

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

**“Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi,
Inklusi Keuangan dan Kontribusinya
Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”**

**AUDITORIUM UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN, 29 NOVEMBER 2016**



**DITERBITKAN OLEH
PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAMULANG**

PROSIDING
*Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi,
Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”*

PROSIDING

*Seminar Nasional dan Call for Papers
“Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi,
Inklusi Keuangan dan Kontribusinya
Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Penanggung Jawab

H. Endang Ruhayat, S.E., M.M

Koordinator Kegiatan

Yusa' Farchan, S.Sos., M.Si

Reviewer

Nofryanti, S.E., M.Akt

Prof.Dr.Gustian Djuanda, S.E., M.M

Shinta Ningtyas Nazar, S.E., M.Acc., Akt

Susi Sih Kusumawardhany, S.E., M.Acc., Ak., CA

Julian Maradina, S.E., M.Si., Akt., CA

R. Mohd Zamzami, S.El., M.Si

Akhmad Sigit Adiwibowo, S.E., M.Ak

Muhammad Sopiyan, S.Pd., M.Pd

Anita Anggraini, S.Pd., M.Pd

Muhammad Ridwan, S.E., M.M

Indra Iman Sumantri, S.E., M.M

Effriyanti, S.E, Akt., M.Si., CA

Dr. Khayatun Nufus, S.E., M.Si

Yunita Kurnia Shanti, SE., M.M

Editor Ahli

Putri Nurmala

Listya Sugiyarti

Ibram Pinondang Dalimunthe

Editor Pelaksana

Donny Indradi

Dila Angraini

Erika Astriani Aprilia

Rifkhan

Rosita Wulandari

Tri Utami

Wiwit Irawati

Dewi Rani Gustiasari

Septian Arief Budiman

Penerbit

Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten 15417

Jumlah: ix + 809 hlm.

Ukuran: 21,0 x 29,7 cm

Desember 2016

ISBN: **978-602-60738-1-5**

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Seminar Nasional dan *Call for Papers* ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Kegiatan ini merupakan forum diseminasi berbagai hasil penelitian baik telaah teoritis maupun penelitian empiris yang dilakukan para akademisi, dosen dan mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia.

Seminar Nasional dan *Call for Papers* ini mengusung tema “*Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*”. Melalui Seminar Nasional dan *Call for Papers* ini, diharapkan terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta untuk turut berkontribusi terhadap agenda pembangunan ekonomi baik nasional maupun lokal. Prosiding ini memuat 45 (*empat puluh lima*) paper hasil penelitian dengan sub-sub tema yaitu *Accounting, Finance and Banking, Good Corporate Governance, Management, Economic Regional*, dan lain sebagainya yang dikirim oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari berbagai kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pemakalah yang hadir dan mempresentasikan hasil penelitiannya di Universitas Pamulang. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call for Papers* ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan maupun keterbatasan selama penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call for Papers*. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan permohonan maaf jika hal tersebut kurang berkenan di hati Bapak/ Ibu sekalian.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tangerang Selatan, 13 Desember 2016

Ketua Program Studi Akuntansi S1
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Ketua Panitia
Seminar Nasional dan *Call for Papers*

H. Endang Ruhayat, S.E., M.M
NIDN: 0409067203

Yusa’ Farchan, S.Sos., M.Si
NIDN: 0412078205

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Inflasi Terhadap <i>Return</i> Saham Syariah pada Perusahaan yang Terdaftar dalam <i>Jakarta Islamic Index</i> Tahun 2010-2014 Lastri Sulastri, Anggun Putri Romadhina	1
Neraca Perdagangan Indonesia-China pada Periode <i>Asean-China Free Trade Area</i> (ACFTA) Tahun 2005-2014 Yenny Yuliana	20
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan (Studi Kasus pada Puskesmas Kota Palembang) Rika Henda Safitri, Siti Halimatussa’diah, Muhammad Rinaldi	43
Analisis Pengaruh Diskresi Akruwal terhadap Pendapatan: Upaya Interpretasi atas Implementasi Basis Akuntansi Akruwal pada Pemerintah Daerah Abdul Rohman	64
Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015 (Studi Kasus: Top 10 Perbankan Terbaik di Indonesia) Susanto Wibowo	84
Analisa Pengaruh Kandungan Informasi Akuntansi terhadap Perilaku Investor dan Harga Saham Perusahaan	103
Amelia, Irma Paramita Sofia	
Pengaruh Ukuran Dana Kelolaan, Umur Reksa Dana, dan Biaya Operasi Reksa Dana terhadap Kinerja Reksa Dana Saham (Periode Tahun 2011) Arie Apriadi Nugraha	118
Analisis Audit Internal atas Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis pada Perusahaan Kelapa Sawit Arief Indrawan, Holiawati	150
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Return Stock</i> Ariza Roni Taufik	174
Kualitas Pelayanan dan Citra Merek Terhadap Loyalitas dengan Mediasi Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Swasta Cucu Sumiyati, Tantri Yanuar Rahmat Syah	196

Pengaruh <i>Internet Financial Reporting</i> , <i>Earnings Management</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014) Dwirini	210
Pengaruh Ukuran KAP, <i>Financial Distress</i> , Kepemilikan Institusional, Pergantian Manajemen dan Opini Audit terhadap <i>Auditor Switching</i> Elisabeth Yohana, Agus Ismaya Hasanudin	230
Teori Institusi dan Senjangan Anggaran Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kota Padang Fefri Indra Arza, Erly Mulyani	245
Analisis Pembangunan Regional melalui Integrasi Sektor Ekonomi Primer, Industri dan Keuangan (Studi Kasus di Jawa Barat melalui <i>Input-Output Analysis</i>) Fryanto Anugrah Rhamdhani, Billi Arifauzan, Wahyu Ramadhan	258
Penerapan Pola Pembayaran INA-CBGS BPJS Kesehatan dalam Tinjauan Regulasi dan Implementasi	275
Irwin Ananta	
Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)</i> , <i>Current Ratio (CR)</i> , <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> , <i>Working Capital Turnover (WCTO)</i> dan Struktur Aktiva terhadap <i>Return on Asset (ROA)</i> (Studi Empiris pada Sektor <i>Consumer Goods Industry</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015) Mohamad Zulman Hakim	291
Kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien di Klinik Swasta Mariany Puspita Subrata, Widaningsih	314
Pengaruh <i>Work Life Balance</i> dan <i>Locus of Control</i> terhadap Kualitas Audit dengan <i>Gender</i> sebagai Variabel Pemoderasi Reni Sartika Dewi, Holiawati	324
Pengaruh Orientasi Etika, Pengalaman dan Komitmen terhadap Sensitivitas Etika Auditor (Studi Empiris pada KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan) Rizka Ristiani, Holiawati	343
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Sri Elita Pinta Uli, Roni Budianto	369

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Analisis Kebangkrutan dengan Model <i>Altman Z-Score</i> pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Periode 2013-2014 Suci Kurniawati	386
Penerapan Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Perspektif Maqasid Syariah dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan Taufik Kurrohman	409
Persepsi Mahasiswa dan Dosen Akuntansi terhadap Penerapan Sistem Informasi Akademik dan Keuangan (SIKAD) Universitas Mathla’ul Anwar Banten Verliani Dasmaran	426
Kemampuan Pelayanan dan Komitmen kepada Pasien terhadap Kepuasan Pasien; Studi pada Rumah Sakit Swasta Yohana Elisabeth Lein, Widaningsih	439
Pengaruh Kepemilikan Publik, Persentase <i>Return on Assets</i> dan <i>Financial Distress</i> terhadap Pergantian Auditor	449
Iin Rosini, Ardianti	
Analisis Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Bank Umum Syariah Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)</i> Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, Oni Sahroni	464
Posdaya Universitas Trilogi sebagai Pengejawantahan <i>Sustainability Reporting</i> Afrizal Aziz	481
Analisa Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerbitan <i>Sustainability Report</i> terhadap Keberlangsungan Usaha Angela Tamara, Ghaliza Amola, Dwi Ayannisa	502
Pengaruh <i>Sustainability Leadership</i> Dosen Kewirausahaan terhadap Minat Mahasiswa untuk Menjadi <i>Ecopreneur</i> (Studi Pendahuluan Mahasiswa Non-Bisnis di Indonesia) Antania Shinta Yuwono, Kurnia Perdana	523
Analisis Peran Sukuk Bagi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Baiti Nur Fadian	536
Pengaruh <i>Self Assesment System</i> Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Ketaatan Pengungkapan Harta Wajib Pajak pada Pelaporan <i>Tax Amnesty</i> Denis Prasetya	549

<i>Good Corporate Governance dan Intellectual Capital</i> pada Kinerja Keuangan Perusahaan Giawan Nur Fitria	563
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Profesional Skeptisisme Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit dengan Independensi sebagai Variabel Moderating Imam Tri Saputra, Holiawati	579
Pengaruh Mediasi Opini Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengaruh Akuntabilitas, <i>Creative Accounting</i> , Konsep Audit, dan Peran Auditor terhadap <i>Audit Expectation GAP</i> (Studi Empiris pada BPK RI, DPRD, BPKAD, dan KAP Provinsi DKI Jakarta) Islami Dian Pertiwi, Roni Budianto	602
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Turnover Intention</i> pada Agen Call Center PT. ABC Menggunakan Metode <i>Structural Equation Modelling</i> Juli Ismanto	617
Penerapan <i>Value Chain</i> Komoditas Beragam dalam Upaya Mendukung Program Keuangan Berkelanjutan M. Faisal	643
Peran Auditor Internal dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Efisiensi Kinerja Keuangan Prila Diah Triani	667
Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Rabi’ah Al Adawiyah, Sugiyanto	689
Pengaruh <i>Overvalued Equities</i> terhadap <i>Audit Fees</i> dengan Manajemen Laba sebagai Variabel <i>Moderating</i> Ryan Ramadhan, Roni Budianto	710
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien dengan Moderasi Keterampilan Komunikasi: Studi Kasus pada Pasien Asuransi Pemerintah di Rumah Sakit Umum Swasta Sonya Kartawidjaja, Tantri Yanuar Rahmat Syah	726
Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan pada Program Pasca Sarjana di Universitas Pamulang Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja.....	737
Pengaruh Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Koperasi BMT Wilayah Ciputat Yeti Kusmawati	754

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Motif Transformasi Wirausahawan menjadi Wirausahawan Sosial (Studi Pilot pada Wirausahawan Mahasiswa di Provinsi Lampung) Yuli Yanti, Ni Putu Febi Istiani, Kurnia Perdana	771
Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan dan Karakteristik Personal terhadap Pertumbuhan UMKM yang Berkelanjutan (Kasus: Wirausaha Pengolahan Kentang di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi) Silvia Sari	781
Analisis <i>Experiential Marketing</i> Terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan dengan Harga sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Tempat Pijat Bersih Sehat di Menteng, Jakarta Pusat) Teddy Mustaqim, Tantri Yanuar Rahmat Syah	796

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL
DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2010-2014**

Lastri Sulastri*), Anggun Putri Romadhina

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*Email: kusnadilastri@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of the current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, return on assets, price to book value, and inflation to return stock syariah either partially or simultaneously. Measured by looking at the data of annual financial statements of companies incorporated in the Jakarta Islamic Index in 2010-2014. The research sample there are 13 companies that successively included in the index JII. Statistical method used is multiple linear regression analysis at 5% significance level. These results indicate that partially CR, TATO, ROA and inflation does not significantly affect the return of Islamic stocks in companies incorporated in the JII. As well as the DER, and PBV partially but not significant effect on stock returns syariah. Simultaneous CR, TATO, DER, ROA, PBV and the inflation effect on stock return of syariah.

Key Words: Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Debt to EquityRatio (DER), Return on Assets (ROA), Price to Book Value (PBV), Inflation and Stock Return Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh current ratio, total assets turnover, debt to equity ratio, return on asset, price to book value, dan inflasi terhadap return saham syariah baik secara parsial maupun simultan. Diukur dengan melihat data laporan keuangan tahunan perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2010-2014. Sampel penelitian ini ada 13 perusahaan yang berturut-turut masuk dalam index JII. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial CR, TATO, ROA dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham syariah pada perusahaan yang tergabung dalam JII. Serta DER dan PBV secara parsial berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap return saham syariah. Secara Simultan CR, TATO, DER, ROA, PBV dan Inflasi berpengaruh terhadap return saham syariah.

Kata Kunci: Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Debt to EquityRatio (DER), Return on Asset (ROA), Price to Book Value (PBV), Inflasi dan Return Saham Syariah

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan tolok ukur dari perkembangan ekonomi suatu negara dalam hal instrumen sistem keuangan. Instrumen pasar modal Islam di Indonesia telah hadir pada 3 Juli 1997, hal ini ditandai dengan peluncuran danareksa Islam oleh PT. Danareksa *Invesment Management*, selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa *Invesment Management* meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada 3 Juli 2000 yang bertujuan membantu investor yang ingin menanamkan dananya sesuai dengan prinsip Islam. Baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Saham adalah salah satu sekuritas yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko ini tercermin dari ketidakpastian *return* yang di dapatkan oleh investor di masa yang akan datang.

Untuk memprediksi kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan, investor membutuhkan informasi keuangan. Informasi ini bersifat fundamental. Analisis Fundamental yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas dengan menggunakan *current ratio*, rasio aktivitas menggunakan *total assets turnover*, rasio solvabilitas menggunakan *debt to equity ratio*, rasio profitabilitas menggunakan *return on assets* dan rasio pasar menggunakan *price to book value*. Selain faktor fundamental, ada faktor lain yang mampu mempengaruhi respon pasar terhadap investasi saham yaitu faktor eksternal, salah satunya adalah makro ekonomi. Dalam penelitian ini makro ekonomi yang digunakan adalah kebijakan moneter yaitu berupa tingkat inflasi yang

terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A. Ifayani Haanurat (2013), bahwasannya inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga barang secara umum. Kondisi ini mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang semakin tinggi. Harga jual yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli, dan hal ini akan mempengaruhi keuntungan perusahaan dan akhirnya akan berpengaruh terhadap *return* saham yang akan mengalami penurunan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Analisis Fundamental

Menurut Jogiyanto dikutip dalam Chuzaimah dan Amalina, analisis fundamental merupakan analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Analisis fundamental berupa laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sebuah tolok ukur untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam memutuskan investasi bagi calon investor.

Salah satu alat yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melihat bagaimana rasio keuangan. Rasio keuangan dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membandingkan rasio pada saat sekarang dengan saat yang akan datang. Adapun bagi investor adalah membandingkan rasio keuangan satu perusahaan/ industri dengan perusahaan/ industri lain yang sejenis dengan maksud nantinya akan bisa memberikan suatu analisis perbandingan yang memperlihatkan perbedaan dalam kinerja keuangan.

Analisis rasio keuangan yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan dikelompokkan berdasarkan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

ruang lingkup dan tujuannya yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage/solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aset lancar perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

b. *Total Asset Turnover*

Total assets turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan di mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash and cash equivalent} + \text{marketable securities}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total utang dan modal sendiri (*equity*). Total utang merupakan penjumlahan dari total kewajiban lancar (*current liabilities*) dan utang jangka panjang (*long term debt*).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}}$$

d. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (laba atas aset), mengukur tingkat laba terhadap aset

yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Asset}}$$

e. *Price To Book Value Ratio*

Rasio ini menunjukkan berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan, semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan kekayaan (*wealth*) yang dinikmati oleh pemilik perusahaan (Husnan, 2006:76).

$$\text{PBV} = \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{Nilai buku per saham}}$$

2.2 Inflasi

Inflasi merupakan suatu kejadian atau kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami penurunan, apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus maka akan mengakibatkan memburuknya ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan stabilitas politik suatu negara (Fahmi, 2011). Inflasi ini sangat membahayakan perekonomian dan mampu menimbulkan efek yang sangat sulit untuk diatasi.

2.2.1 Pembagian Inflasi

Berdasarkan Fahmi (2011) dari segi asal terjadinya inflasi ada dua, yaitu:

a. Inflasi Domestik (*Domestic Inflation*)

Domestic inflation terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, seperti karena kebijakan pemerintah (*government policy*) dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. Misalnya pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan bensin, solar, dan gas elpiji yang mampu memberi efek pada

kenaikan harga barang secara keseluruhan.

b. *Inflasi Impor (Imported Inflation)*

Imported inflation disebabkan karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri, seperti terjadinya guncangan ekonomi di Negara Amerika Serikat yang memberikan pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari Negara Amerika. Jika suatu negara memiliki tingkat ketergantungan yang begitu tinggi untuk ekonomi luar negeri terutama pada kurang ketersediaan kemampuan dalam memproduksi barang dalam jenis tertentu maka saat inflasi terjadi salah satunya berakibat pada naiknya jenis barang tersebut dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

2.2.2 Faktor Penyebab Inflasi

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan inflasi adalah sebagai berikut:

a. *Structural Inflation* (Inflasi Struktural)

Yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang, tetapi karena

pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor produksi dari sektor non industri ke sektor industri.

b. *Cost Push Inflation*

Yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barang dagangannya karena implikasi dari kenaikan biaya internal seperti kenaikan upah buruh, suku bunga atau juga karena mengharapkan memperoleh laba yang tinggi.

c. *Demand Full Inflation*

Yaitu inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya. Inflasi lainnya seperti karena faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga disebabkan oleh ketakutan akan terjadi kenaikan harga yang terus-menerus sehingga masyarakat memborongnya, inflasi seperti ini disebut juga dengan inflasi yang timbul karena dorongan permintaan.

2.2.3 Skala Penilaian Inflasi

Dari segi perspektif skala penilaian inflasi maka ada empat kategori skala yang biasa dipakai, yaitu:

Tabel 2.1 Skala Penilaian Inflasi

No.	Jenis Inflasi	Definisi	Skala Penilaian
1.	Inflasi Ringan (<i>Creeping Inflation</i>)	Kondisi inflasi seperti ini disebut dengan inflasi ringan karena skala inflasinya berada di bawah 10%. Kondisi yang ringan seperti ini dialami oleh Indonesia pada era sekarang yaitu pasca reformasi dan pada masa Orde Baru.	< 10% Pertahun
2.	Inflasi Sedang (<i>Moderate Inflation</i>)	Inflasi moderat dianggap tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu dan bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi.	10 – 30 % Pertahun
3.	Inflasi Berat	Inflasi berat adalah di mana sektor-sektor ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai oleh negara.	30 – 100 % Pertahun

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4.	Inflasi Sangat Berat (<i>Hyper Inflation</i>)	Inflasi ini terjadi pada masa perang dunia kedua (1939-1945) di mana untuk keperluan perang terpaksa harus mencetak uang secara berlebihan.	>100 % Pertahun
----	---	---	------------------------

2.3 Return Saham Syariah

2.3.1 Investasi Saham Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001, Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, saham merupakan instrumen investasi yang sampai saat ini masih menjadi dominan para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Dengan memiliki sebuah perusahaan, investor berarti telah ikut dalam penyertaan modal perusahaan, sebagai gantinya investor mendapatkan saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimiliki oleh seorang investor, maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditentukan berapa dividen yang dibagi dan laba ditahan. Selain dividen, para pemegang saham dimungkinkan mendapatkan *capital gain*, yaitu selisih lebih antara harga beli dengan harga jual saham. Akan tetapi harus dapat menghadapi risiko *capital loss* yang merupakan kebalikan dari *capital gain* yaitu ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka prioritas pemegang saham mendapat terakhir setelah kewajiban dapat dilunasi.

Berdasarkan Soemitra (2009), saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan modal ke dalam suatu

perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman beralkohol. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *musyarakah* pada umumnya dilakukan pada perusahaan privat, sedangkan *mudharabah* umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik.

Di Indonesia prinsip-prinsip pernyataan modal secara syariah tidak diwujudkan dengan bentuk saham syariah akan tetapi berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia ada Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2.3.2 Jenis-Jenis Saham

Berdasarkan Hidayat (2011), jenis-jenis saham dibagi dua, yaitu:

2.2.3.1 Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham di mana pemegang saham mewakili kepemilikan diperusahaan sebesar modal yang ditanamkan kepemilikannya akan berhenti ketika saham tersebut dijual kepada investor lain. Karakteristik saham biasa, antara lain:

- Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, pemegang saham akan mendapatkan dividen. Namun apabila perusahaan tersebut bangkrut, maka

pemegang saham mendapatkan hak terakhir atas aset perusahaan setelah kewajiban perusahaan dilunasi.

- b. *Capital gain* yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli.
- c. Tidak ada tanggal jatuh tempo.
- d. Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab terbatas secara pribadi.
- f. Saat perusahaan mengeluarkan saham baru, pemegang saham memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu.

2.2.3.2 Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan saham biasa. Saham ini adalah produk *hybrid* (campuran) antara saham biasa dengan efek pendapatan tetap karena pemilik saham ini akan mendapatkan pendapatan tetap yang dibagikan secara rutin dalam bentuk dividen. Bagi pihak yang menerbitkan, saham ini memiliki kelebihan karena dua hal:

- a. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan dalam perhitungan *earning per share* (EPS).
- b. Tidak dianggap sebagai *debt equity* sehingga tidak menambah beban hutang perusahaan.

Bagi investor pemilik saham, saham ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah:

- a. Memberikan dividen secara rutin.
- b. Mendapatkan keuntungan dari *Capital gain*.
- c. Jika perusahaan dilikuidasi, saham preferen mempunyai hak likuidasi yang lebih tinggi dibandingkan saham biasa karena pemilik saham ini akan didahulukan untuk menerima pembayaran.
- d. Memiliki hak memberikan suara.

Kelemahan saham preferen, yaitu:

- a. Saham ini sangat rentan terhadap inflasi dan perubahan suku bunga.

- b. Jika tidak ada dividen yang dibagikan, maka hal tersebut tidak termasuk tindakan wanprestasi.

2.3.3 Untung Rugi Investasi Saham

Dengan memiliki saham, investor bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas perusahaan (dividen), maupun yang berasal dari harga saham itu sendiri (*Capital gain*).

- a. Dividen

Dividen adalah keuntungan yang didapat dari aktivitas bisnis perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Jumlah yang diperoleh tergantung pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Faktor-faktor yang biasanya menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan pemberian dividen adalah keuntungan perusahaan, prospek pertumbuhan usaha, likuiditas perusahaan, aspek hukum dan keadaan pasar.

Dividen adalah pendapatan bersih perusahaan setelah pajak (*net income after tax* atau *earning after tax*) dikurangi laba ditahan (*retained earning*) yang ditahan sebagai cadangan perusahaan. Dividen yang diperoleh bisa berbentuk tunai (*Cash Dividen*) atau berbentuk saham (*Stock Dividend*).

- b. Dividen Saham (*Stock Dividend*)

Adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Dividen saham dikeluarkan selain untuk memberikan keuntungan para pemegang saham juga untuk meningkatkan likuiditas saham di bursa efek.

Nilai suatu dividen saham dapat diketahui dengan membagi harga wajar dividen saham dengan rasio dividen saham. Harga wajar adalah harga penutupan saham di bursa efek sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- memutuskan dividen. Contoh: Tunas Baru Lampung (TBLA) pada Agustus 2003 membagikan dividen saham dimana pemegang 20 lembar saham lama berhak mendapatkan 1 lembar saham baru.
- c. *Dividen Tunai (Cash Dividend)*
Adalah dividen yang dibayarkan berupa uang tunai. Dividen tunai diberikan dengan tujuan selain untuk memacu kinerja saham di bursa efek, juga untuk memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada pemegang saham. Berbeda dengan nilai dividen saham, nilai dividen tunai tentu saja sesuai dengan nilai tunai yang dibagikan.
- d. *Capital Gain*
Selain keuntungan dari kinerja perusahaan, investor juga dapat keuntungan dari perubahan harga saham perusahaan berupa *capital gain*. *Capital gain* dapat diperoleh jika investor menjual saham yang dimiliki dengan harga jual lebih tinggi dari harga beli. Berbeda dengan dividen, *capital gain* dapat diperoleh investor setiap saat tanpa harus melalui RUPS.
- e. *Capital Loss*
Adalah kerugian dari penjualan saham dimana harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Contoh: tanggal 6 Juli 2010 pukul 09.36 seorang investor membeli saham PGAS pada harga Rp3.925 sebanyak 2 lot (1.000 lembar). Jika 2 menit kemudian investor tersebut menjual kembali sahamnya pada harga Rp3.900, maka *capital loss* dari transaksi tersebut adalah Rp25.000 (Rp25 x 1.000 lembar).
- f. *Tidak Menerima Dividen*
Pemegang dividen bisa tidak memiliki jaminan bahwa ia pasti akan mendapatkan dividen. Akibat merugi, perusahaan tidak membagikan dividen maupun dalam keadaan untung, pemegang saham belum tentu mendapatkan dividen ketika RUPS

- memutuskan sebagian keuntungan perusahaan tidak untuk dibagikan sebagai dividen.
- g. *Likuidasi Perusahaan*
Bukan tidak mungkin perusahaan yang sahamnya dimiliki investor dinyatakan bangkrut lantas kemudian ditutup. Jika kondisi yang ekstrim ini terjadi, saham akan menjadi surat berharga yang tak bernilai. Hak klaim pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan, sisa tersebut dibagikan secara proposional kepada pemegang saham. Namun, jika tidak ada maka pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa.

2.4 Jakarta Islamic Index (JII)

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud efek syariah adalah efek sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa yang telah ditetapkan.

Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa *Investment Management* pada tanggal 3 Juli 2000 meluncurkan *Jakarta Islamic Index*, yang bertujuan untuk membantu investor yang ingin menanamkan dananya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indeks ini merupakan indeks saham sesuai dengan

syariah. Dengan adanya indeks saham yang berbasis syariah, ini diharapkan dapat menjadi sebuah tolok ukur kinerja saham pada pasar modal syariah dan menjadi sarana berinvestasi saham-saham dengan penerapan prinsip syariah bagi para pemodal.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT. Indosat Tbk. Pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham mengakomodasi investasi syariah dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut Hidayat (2011) proses penyaringan emiten di JII adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Syariah
 - 1) Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) Emiten bukan usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - 3) Emiten tidak menjalankan usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
 - 4) Emiten bukan usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- b. Seleksi Kapitalisasi
 - 1) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).

Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.

- 2) Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- c. Seleksi Nilai Volume Transaksi
Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
- d. Proses Evaluasi Emiten
Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan di monitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, maka penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah analisis pengaruh faktor-faktor fundamental dan inflasi terhadap *return* saham syariah. Variabel independen yang digunakan yaitu *current ratio* (X_1), *total assets turnover* (X_2), *debt to equity ratio* (X_3), *return on assets* (X_4), *price to book value* (X_5), dan *inflasi* (X_6).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Adapun Variabel Dependen nya yaitu *return saham syariah (Y)*.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Menara I Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Tepatnya perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* dan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id).

3.1.3 Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian melalui pengukuran data yang berupa angka untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yang ambil dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada perusahaan yang berbasis syariah di *Jakarta Islamic Index* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014.

3.2 Metode Penentuan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang berbasis syariah yang saham syariahnya tergabung di *Jakarta Islamic Index* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014.

3.2.2 Sampel

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (*judgement sampling*) yaitu pemilihan sampel secara

tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2006:84) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Perusahaan yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Saham emiten yang halal berdasarkan ketentuan syariah, kehalalan suatu saham disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- b. Saham-saham tersebut terdaftar di *Jakarta Islamic Index*.
- c. Perusahaan emiten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode Januari 2010 sampai Desember 2014 dan secara berturut-turut masuk dalam *Jakarta Islamic Index*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2010-2014 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara, seperti www.idx.co.id dan www.bi.go.id.

3.3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

3.3.2.1 Penelitian pustaka (*Library Research*).

Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang bersifat sekunder, biasanya data yang berasal dari luar perusahaan. Data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber pustaka yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh KERANGKA TEORI yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan

ini. Penelitian ini dasar-dasar teoritisnya berasal dari buku-buku dan sebagai literatur lain seperti jurnal-jurnal, makalah, catatan kuliah, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

3.3.2.2 Dokumen

Menurut sugiyono (2012:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan membuat salinan dengan cara menggandakan arsip dan catatan perusahaan yang akan diteliti yaitu data laporan tahunan perusahaan.

3.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data diperoleh dengan menggunakan dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen perusahaan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang dikenal dengan ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*). Metode analisis data yang digunakan berupa:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif (*Descriptive Statistic*) merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik-karakteristik data. Untuk melakukan perhitungan data pada statistik parametrik dan non-parametrik, penelitian ini akan menggunakan *software* peranti lunak *Statistical Package for Social Sciences 22* (SPSS 22).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji digunakan untuk mengetahui sebaran data dalam model penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji normalitas yang digunakan yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai signifikan lebih dari 0,05 ($>0,050$) artinya normalitas model memenuhi syarat berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat melihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Nilai *tolerance* yang tidak mengalami multikolinearitas adalah nilai *tolerance* diatas 0,1. Sedangkan VIF yang tidak mengalami multikolinearitas adalah nilai VIF dibawah 10.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Deteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji DW (*Durbin Watson*). Tidak mengalami autokorelasi apabila nilai DW berada diantara 1,5 sampai 2,5.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Metode yang digunakan yaitu dengan grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Analisis Regresi Berganda

Model dasar regresi linear yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Return saham syariah

a = Konstanta

β_1 . β_6 = Koefesien regresi

X1 = Current Ratio

X2 = Total Assets Turnover

X3 = Debt to Equity Ratio

X4 = Return on assets

X5 = Price to book value

X6 = Inflasi

e = Faktor Pengganggu

3.5.2 Uji t (Parsial)

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan uji t:

Menentukan H_0 dan H_a

$H_0 : \beta = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima ($\alpha = 5\%$).

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak ($\alpha = 5\%$).

3.5.3 Uji F (Simultan)

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan uji F:

Menentukan H_0 dan H_a

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini, digunakan statistik F dengan membandingkan F hitung dengan F_{tabel} dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima ($\alpha = 5\%$).

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak ($\alpha = 5\%$).

3.5.4 Uji Koefisien Korelasi Berganda (R)

Menurut Ghazali (2016: 91) Koefisien korelasi berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel atau lebih. Koefisien korelasi berganda ini merupakan nilai untuk mengukur kuatnya hubungan variabel untuk mengetahui pengaruh *current ratio*, *total asset turnover*, *debt equity ratio*, *return on assets*, *price to book value* dan inflasi terhadap *return* saham syariah. Menurut Sugiyono (2013) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut

0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

3.5.5 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel Y (terikat) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel X (bebas) yaitu koefisien yang mengukur besarnya presentase kontribusi X terhadap Y. Nilai R² berada diantara 0 sampai 1. Nilai R² yang mendekati 1 ini berarti informasi yang diberikan oleh variabel independen ke variabel dependen hampir sempurna.

Untuk menentukan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r² = Koefisien Korelasi

3.6 Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Ukur Data
X1 = CR	$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	Rasio
X2 = TATO	$TATO = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio
X3 = DER	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total modal sendiri}}$	Rasio
X4 = ROA	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
X5 = PBV	$PBV = \frac{\text{Harga pasar saham}}{\text{Nilai buku perlembar saham}}$	Rasio
X6 = Inflasi	$Inf = \left\{ \frac{IHKt - IHKt - 1}{IHKt - 1} \times 100\% \right\}$	Rasio

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

$Y = \text{Return saham}$	$R_i = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}}$	Rasio
---------------------------	--	-------

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang diolah menggunakan program SPSS 22 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebaikan model dan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1.1 Uji Normalitas

Dari hasil pengujian SPSS dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Variabel independen yang terdiri dari *current ratio*, *total assets turnover*, *debt to equity ratio*, *return on asset*, *price to book value* dan inflasi memiliki nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,189. Hal ini menggambarkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

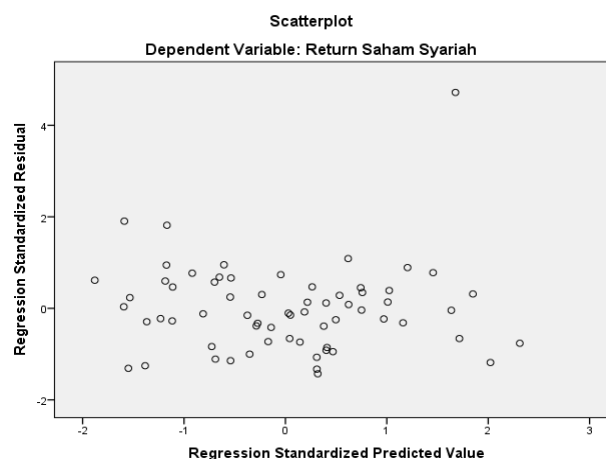
4.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Seluruh variabel yaitu CR, TATO, DER, ROA, PBV dan Inflasi. mempunyai nilai VIF kurang dari batas maksimal 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Sehingga H_0 ditolak, yang artinya variabel independen tersebut tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas (tidak ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel independen lainnya). Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas pada model persamaan regresi.

4.1.1.3 Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji SPSS yang diperoleh Durbin-Watson yaitu sebesar 1,592 adapun d_U nya adalah 1,767 dan d_L 1,437. Karena DW berada diantara d_L dan d_U maka menghasilkan kesimpulan tidak mengalami autokorelasi.

4.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Scatterplot

Berdasarkan output *scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Masing-masing koefesien β tersebut menunjukkan nilai yang menjelaskan bahwa Y (variabel terikat) akan berubah jika X (variabel bebas) diubah.

4.1.2 Uji Hipotesis

Tabel 4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.428	.274		2.560	.524
CR	-.021	.024	-.110	-.971	.487
TATO	-.170	.118	-.293	-2.446	.353
DER	.255	.084	.390	3.054	.003
ROA	-.494	.726	-.140	-.681	.499
PBV	.089	.025	.457	3.597	.001
Inflasi	-.088	.038	-.260	-2.302	.025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,428 - 0,021CR - 0,170TATO + 0,255DER - 0,494ROA + 0,089PBV - 0,088INF + e$$

4.1.2.2 Uji t (Parsial)

1. *Current Ratio* terhadap *Return Saham Syariah*

Berdasarkan Uji SPSS maka didapat t_{hitung} -0,971 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,487 ($> 0,05$). Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001. Maka dari hasil pengujian regresi tersebut, t_{hitung} (-

1,704) $< t_{tabel}$ (2,001) dapat dijelaskan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak maka *Current Ratio* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *return* saham syariah. Hal tersebut berarti tidak menjamin apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka *return* saham yang akan didapatkan oleh pemodal atau investor akan tinggi.

2. *Total Assets Turnover* terhadap *Return Saham Syariah*

Dapat diketahui bahwa TATO memiliki t_{hitung} sebesar -2,446 dan t_{tabel} sebesar 2,001 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,153 ($>$

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

0,05). Dari hasil pengujian regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang artinya bahwa *Total Asset turnover* tidak berpengaruh terhadap *return* saham syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chuzaimah dan Nuramalina (2014) Ia menemukan bahwa rasio aktivitas tidak bermanfaat untuk memprediksi *return* saham syariah yang ada di *Jakarta Islamic Index* untuk periode tersebut.

3. *Debt to Equity Ratio* terhadap *Return Saham Syariah*

DER memiliki t_{hitung} sebesar 3,054 dan t_{tabel} sebesar 2,001 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$). Dari hasil pengujian regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak yang artinya bahwa *Debt to equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *return* saham syariah. Nilai *debt to equity* meningkat akan membuat pasar bereaksi positif dan akan cenderung menginterpretasikan sebagai sinyal tentang prospek cerah perusahaan dimasa yang akan datang.

4. *Return on Asset* terhadap *Return Saham Syariah*

Dapat diketahui bahwa ROA memiliki t_{hitung} sebesar dan t_{tabel} sebesar -0,681 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,499 ($> 0,05$). Dari hasil pengujian regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa H_0 diterima dan H_4 ditolak yang artinya bahwa *return on Asset* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *return* saham syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kinerja perusahaan yang kurang baik karena apabila nilai ROA tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan aktivitya sehingga memperoleh laba.

5. *Price to Book Value* terhadap *Return Saham Syariah*

Price to Book Value memiliki t_{hitung} sebesar 3,597 dan t_{tabel} sebesar 2,001 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$). Dari hasil pengujian regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima yang artinya bahwa *price to book value* berpengaruh terhadap *return* saham syariah. Ini artinya bahwa para investor juga mempertimbangkan rasio PBV. Rasio PBV yang rendah merupakan investasi yang aman.

6. *Inflasi* terhadap *Return Saham Syariah*

B besarnya nilai t_{hitung} -2,302 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 ($< 0,05$). Dari hasil pengujian regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa H_0 diterima dan H_6 ditolak artinya bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap *return* saham syariah. Hal tersebut mengindikasikan apabila tingginya tingkat inflasi akan memicu meningkatnya resiko yang dihadapi Oleh karena itu, investor akan cenderung untuk melepas saham yang mereka miliki karena dikhawatirkan apabila memegang terlalu lama kerugian semakin besar.

4.1.2.3 Uji F (Simultan)

Tabel 4.2. Uji f (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.211	6	.368	4.690	.001 ^b
Residual	4.557	58	.079		
Total	6.768	64			

a. Dependent Variable: Return Saham Syariah

b. Predictors: (Constant), Inflasi, TATO, DER, PBV, CR, ROA

Berdasarkan tabel diatas, F_{hitung} diperoleh nilai sebesar 4,375 dan F_{tabel} sebesar 2,240 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan nilai signifikan 0,001. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka H_0 ditolak yang

berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari CR, TATO, DER ROA, PBV dan inflasi secara simultan mempengaruhi *return* saham syariah secara signifikan.

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

Tabel 4.3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.872 ^a	.827	.757	.28030	1.675

a. Predictors: (Constant), Inflasi, TATO, DER, PBV, CR, ROA

b. Dependent Variable: Return Saham Syariah

Hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai *adjusted R Square* (*adjusted R²*) sebesar 0,757 sebesar 75,7% atau ($0 \leq 0,757 \leq 1$). Nilai ini masuk (0,60 – 0,799) atau kuat ketepatannya. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel *return* saham syariah dapat dijelaskan sebesar 75,7% oleh

variabel CR, TATO, DER, ROA, PBV dan Inflasi. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel *current ratio* tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap *return* saham syariah di *Jakarta Islamic Index*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya bukan berarti perusahaan dapat meningkatkan *return* saham yang akan di dapatkan oleh investor atau pemodal.
- b. Variabel *total asset turnover* tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap *return* saham syariah di *Jakarta Islamic Index*. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio aktivitas (*total asset turnover*) tidak bermanfaat bagi investor pada periode tersebut.
- c. Variabel *debt to equity ratio* menunjukkan adanya pengaruh akan signifikan terhadap *return* saham syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* tidak menyebabkan perubahan *return* saham syariah pada periode tersebut akan tetapi para investor tidak mengabaikan rasio utang perusahaan.
- d. Variabel *Return on Asset* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *return* saham syariah di *Jakarta Islamic Index*. Hal ini mengindikasikan apabila nilai ROA rendah maka *return* saham yang didapatkan oleh para *stockholders* akan rendah pula.
- e. Variabel *price to book value* menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap *return* saham syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa investor juga mempertimbangkan bahwa rasio PBV yang rendah adalah investasi yang aman.

- f. Variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *return* saham syariah di *Jakarta Islamic Index*. Tingginya tingkat inflasi akan memicu tingginya risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, para investor akan cenderung melepaskan sahamnya agar kerugian tidak semakin membesar.
- g. Variabel independen yang terdiri dari *current ratio*, *total asset turnover*, *debt to equity ratio*, *return on asset*, *price to book value* dan inflasi secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi *return* saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*.

5.2 Saran

Penelitian ini masih banyak keterbatasan, oleh karena itu beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain:

- a. Penelitian ini hanya mengambil variabel *current ratio*, *total asset turnover*, *debt to equity ratio*, *return on asset*, *price to book value* dari beberapa variabel mikro ekonomi lainnya yang dianggap memiliki pengaruh terhadap *return* saham syariah dan hanya inflasi yang menjadi variabel makro ekonomi. Kedepan agar ditambahkan faktor-faktor lain dalam menganalisis faktor fundamental perusahaan dan dari segi makro ekonomi seperti suku bunga dan nilai tukar.
- b. Penelitian ini hanya dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang konsisten terdaftar dalam tiap periode penentuan perusahaan yang dianggap memenuhi syarat untuk terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2010 sampai 2014. Untuk penelitian selanjutnya bisa mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang konsisten maupun yang tidak konsisten pada perusahaan yang

- tergabung dalam *Jakarta Islamic Index*.
- c. Bagi manajemen sebaiknya lebih memperhatikan kenaikan maupun penurunan DER dan PBV perusahaan karena sangat mempengaruhi *return* saham syariah.
- d. Bagi Investor sebaiknya lebih selektif lagi dalam memilih portofolio saham dan lebih memperhatikan faktor-faktor intern maupun ekstern perusahaan emiten.
- Ghazali. 2006, "*Imam Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 1*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 2011, "*Imam Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 1*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 2016, "*Imam Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny. 2015, "*Kitab Suci Investor Saham*", Cetakan 1, Jakarta, Kota Mekkah Citra Gran.
- Chuzaimah, Nuramalina. 2014, "*Analisis pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap return saham syariah pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII)*". Jurnal ilmu manajemen dan akuntansi. Universitas Muhammadiyah., Surakarta.
- Elzadora, Rida. 2009, "*Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi pada indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2007)*". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.,Surakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. "*Analisis Kinerja Keuangan*". Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Yuniati, 2001. "*Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ*". Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Haanurat, A. Ifayani. 2013. "*Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro terhadap Return Saham Syariah yang Listing di Jakarta Islamic Index. Jurnal Manajemen dan Bisnis*". Vol. 3 No. 2 April 2013, Universitas Muhammadiyah Makkasar.
- Hanafi, 2004. "*Mahmud M Analisis Laporan Keuangan*". Yogyakarta: BPF E.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. "*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husnan, 2006 "*Dasar-dasar Manajemen Keuangan*", Edisi 3, Yogyakarta: UPP AMP YKPMN.
- Jogiyanto, H.M. 2003, "*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*". Yogyakarta: BPF E-UGM.
- Kasmir, 2008, "*Analisis Laporan Keuangan*", Rajawali Pers, Jakarta.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- Prihadi, 2010, “*Analisis Laporan Keuangan*”. PPM Manajemen. Jakarta.
- Prihatini, Ratna. 2009. “*Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, ROA, DER dan CR Terhadap Return Saham (Studi Kasus Saham Industri Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2006)*”. Tesis Magister Manajemen Undip. Semarang.
- Soemitra, Andri. 2009. “*Bank dan lembaga keuangan syariah*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2006, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*“ Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*“ Alfabeta. Bandung.
- Taufik Hidayat. 2011. “*Buku Pintar Investasi Syariah*”. Jakarta Selatan: Media Kita.

**NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA
PADA PERIODE ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA
(ACFTA) TAHUN 2005 - 2014**

Yenny Yuliana

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Email: yhenyuliana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how the position of Indonesia-China balance of trade in the period of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) in 2005-2014 by using descriptive analysis followed by economic analysis of regression equation and classical assumption test using stepwise linear regression method. This study uses a causality study, by using variable Real Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Customs Tariff ACFTA, Indonesia Gross Domestic Product and China Gross Domestic Product. This study was conducted with the data Q1 2005 to Q4 2014. The results showed that of the five variables studied, there are two influencing variables that affect the Indonesia balance of trade: Real Exchange Rate and Indonesia Gross Domestic Product. While, in theory, Foreign Direct Investment, Customs Tariff ACFTA and China Gross Domestic Product variables should also be influential in Indonesia's balance of trade but the results of this study found no significance among these three variables in improving Indonesia's balance of trade.

Key Words: Balance of Trade, Real Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Gross Domestic Product, Customs Tariff.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisa posisi neraca perdagangan Indonesia-China pada periode Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dengan menggunakan analisis deskriptif dilanjutkan dengan analisis ekonomi dari persamaan regresi dan uji asumsi klasik menggunakan metode regresi linear berganda stepwise. Penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas dengan menggunakan variabel Real Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Tarif Bea Masuk ACFTA, Gross Domestic Product Indonesia dan Gross Domestic Product China. Penelitian dilakukan dengan data triwulan 1 2005 sampai dengan triwulan 4 tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel yang diteliti terdapat dua variabel yang berpengaruh dalam neraca perdagangan Indonesia yaitu variabel Real Exchange Rate dan Gross Domestic Product Indonesia. Walaupun secara teori, variabel Foreign Direct Investment, Tarif Bea Masuk ACFTA dan Gross Domestic Product China juga seharusnya berpengaruh dalam neraca perdagangan Indonesia tetapi dalam hasil penelitian ini tidak ditemukan hasil yang secara signifikan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.

Kata Kunci: Neraca Perdagangan, Real Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Gross Domestic Product, Tarif Bea Masuk.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Perkembangan global yang dialami ASEAN menjadikan kawasan ini perlu melakukan kerjasama ekonomi di dunia Internasional, mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini agar berbagai peluang kerjasama dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ASEAN untuk bersaing secara internasional, di samping itu ASEAN harus dapat menjadi pasar yang menarik bagi investasi asing. Melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area/ FTA*) ASEAN melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mitra seperti Jepang, China, Korea, Australia, Selandia Baru dan India. Dalam kerjasama ini pula setiap negara anggota ASEAN dapat melakukan kerjasama negara-negara yang menjadi mitra ASEAN tersebut.

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam ASEAN-China Summit tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*” (CEC) *Between ASEAN and The People’s Republic of China*, dimana sejak saat inilah ACFTA dideklarasikan. Tujuan dari kerangka perjanjian tersebut adalah untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara negara anggota; (2) meriberalisasikan dan mendorong perdagangan barang dan

jasa dan juga menciptakan rezim investasi yang fasilitatif dan transparan; (3) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani *gap* yang ada di antara negara anggota.

Menindaklanjuti pertemuan tahun 2002 maka pada tahun 2004 kembali pemimpin ASEAN dan China bertemu untuk menandatangani *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China*. Perjanjian ini meliputi: (a) pengurangan atau penghapusan tarif barang yang dibagi dalam *Normal Track* dan *Sensitive Track*, di luar *Early Harvest Programm*, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2005; (b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa dan (c) membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ACFTA.

Dalam ACFTA seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Juli 2006. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2007 dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012. Dengan adanya pengurangan tarif tersebut perdagangan bebas antara China dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara telah dilaksanakan tentu hal ini para pelaku yang bermain di dalamnya harus mampu memanfaatkan peluang yang ada agar dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Perjanjian ACFTA ini dilakukan dalam beberapa tahap. Fase awal dari kesepakatan perdagangan ini dikenal dengan Program Panen Awal (EHP-*Early Harvest Programme*). EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA di mana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2005, merupakan komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk sector pertanian ASEAN yang masuk ke China.

Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan tentunya negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah mengawali dengan meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor. 48 tahun 2004, pasal 1: Mengesahkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the people's Republik of China* (persetujuan kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan presiden ini.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, industri-industri sebagai penopang perekonomian Indonesia malah terkena dampak negatif

dengan adanya ACFTA, akibatnya ekonomi Indonesia seakan jalan di tempat. Pasar domestik Indonesia kalah bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik Indonesia, khususnya barang China. Fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, di mana neraca perdagangan antara Indonesia dengan China kini mengalami defisit. Artinya nilai impor dari China masih lebih besar dibanding ekspor Indonesia ke China.

Sarbapriya (2012) melakukan penelitian untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan India untuk periode 1972-2011 dengan menggunakan variabel-variabel *real effective exchange rate*, *foreign direct investment*, *domestic consumption*, dan *foreign income*. Dalam penelitiannya Sarbapriya menggunakan teknik ekonometrik seperti *Augmented Dickey Fuller Test*, *Johansen Cointegration test*, dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *foreign direct investment* dan *foreign income* mempunyai pengaruh positif terhadap neraca perdagangan, sedangkan *domestic consumption* dan *real effective interest rate* mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca perdagangan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bowo (2012) adalah untuk membahas sejauh mana dampak penerapan ACFTA terhadap nilai perdagangan Indonesia atas China pada beberapa komoditas terpilih. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberlakuan ACFTA berpengaruh terhadap nilai perdagangan antara Indonesia-China (pada komoditas terpilih). Produk Domestik Bruto Riil China dalam model ekspor. Sedangkan Produk Domestik Bruto Riil Indonesia dan nilai tukar riil Rupiah terhadap yaun China berpengaruh terhadap impor komoditas terpilih Indonesia dari China pada model impor. Penelitian oleh Bowo (2012) ini mempunyai persamaan dengan penelitian Sarbapriya (2012) dan Irhan,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Alachan, Korap (2011) dalam hal variabel-variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu *foreign income*, *domestic income* dan *real effective exchange rate*. Perbedaannya adalah, Bowo (2012) juga ingin menganalisis lebih jauh bagaimana dampak penerapan ACFTA terhadap nilai perdagangan Indonesia atas China dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Tambunan (2007) melakukan penelitian tentang efek-efek ekonomi dan sosial dari liberalisasi perdagangan dalam pertanian di bawah China-ASEAN FTA bagi Indonesia. Tambunan menggunakan model yang dikembangkan UNCTAD yang disebut *Agricultural Trade Policy Simulation Model* untuk mengestimasi dampak dari dihilangkannya tarif dan rintangan-rintangan perdagangan lainnya terhadap produksi, ekspor dan impor dari Indonesia dan China untuk sejumlah komoditas yang termasuk di dalam *Early Harvest Program (EHP)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang perdagangan komoditas pertanian, China memperoleh keuntungan lebih banyak dari Indonesia dari kesepakatan EHP. Indonesia mengimpor lebih banyak daripada ekspornya ke China untuk komoditas pertanian.

Hamidi (2013) melakukan penelitian mengenai dampak penerapan ACFTA terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China menggunakan analisis persamaan jangka panjang dan jangka pendek untuk mengetahui dampak penerapan ACFTA baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel *real exchange rate*, *foreign direct investment*, GDP China, GDP Indonesia, dan GDP Amerika Serikat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ACFTA dengan variabel *real exchange rate*, GDP China,

GDP Indonesia dan GDP Amerika Serikat secara signifikan mempengaruhi neraca perdagangan bilateral Indonesia-China. Sedangkan *foreign direct investment* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana neraca perdagangan Indonesia-China selama periode ACFTA diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 dengan variabel-variabel *real exchange rate*, *foreign direct investment*, tarif bea masuk (*tax*), GDP China, dan GDP Indonesia sebagai variabel yang akan diteliti. Periode yang akan diteliti adalah periode tahun 2005 sampai 2014, dimana pada tahun 2010 tarif bea masuk sudah sampai 0% atau nol persen pada hampir seluruh komoditi. Tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif bea masuk yang berlaku pada perjanjian ACFTA.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Perdagangan Internasional (Keuntungan Absolut)

Pelopop perdagangan internasional adalah teori keunggulan absolut oleh Smith (1970) yang menyatakan bahwa suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional dengan spesialisasi produksi dan komoditas ekspor jika negara ini memiliki keuntungan mutlak sebaliknya impor komoditas jika negara memiliki kelemahan mutlak. Fenomena transaksi lintas batas atau perdagangan internasional terjadi karena dua motif: perbedaan sumber daya dan teknologi dari masing-masing negara, dan untuk mencapai skala ekonomi yang mengarah pada pencapaian manfaat perdagangan (Krugman, dan Obsteld, 2000). Fakta bahwa pola perdagangan internasional mencerminkan interaksi kedua motif ini

menjadi inspirasi bagi Ricardo (1871) mengembangkan model perdagangan internasional dikenal sebagai Model Ricardian.

2.2 Perdagangan Bebas

Keputusan untuk membeli barang-barang dalam negeri atau luar negeri adalah harga barang-barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri (Blanchard, 2006). Dan itu berarti bahwa perubahan nilai tukar mata uang adalah faktor penting bagi calon pelanggan untuk memutuskan di mana barang akan dibeli. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari perdagangan bebas. Ketersediaan pasar internasional yang luas di samping untuk perluasan pasar domestik juga dapat mendukung pengusaha dalam negeri untuk selalu berinovasi secara efektif dan efisien agar dapat bersaing di pasar dunia.

Untuk sebuah negara yang mengimplementasi perdagangan bebas, ada tiga kebijakan yang dapat diambil: substitusi impor, promosi ekspor, dan perlindungan (*protection*). Kebijakan substitusi impor merupakan kebijakan produksi dalam negeri dari barang impor. Pemerintah membangun dan / atau memberikan peluang bagi sektor swasta untuk mendirikan industri yang dapat menghasilkan barang-barang impor. Promosi ekspor merupakan bentuk kebijakan perdagangan di mana pemerintah memprioritaskan pengembangan industri yang memproduksi barang untuk ekspor. Sementara kebijakan perlindungan adalah jembatan kebijakan substitusi impor dan promosi ekspor (Rahardja dan Manurung, 2008).

2.3 Teori Integrasi Ekonomi

Teori integrasi ekonomi mengacu pada kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang diskriminatif rendah atau menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara yang saling setuju untuk membangun

integrasi ekonomi yang terbatas. Artinya, dalam negara anggota, berbagai bentuk hambatan perdagangan baik tarif dan non-tarif akan diturunkan atau dihapuskan sama sekali, sementara di negara-negara luar anggota, masing-masing anggota memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan sendiri, apakah akan memberlakukan pembatasan perdagangan atau tidak (Salvatore, 1997).

2.4 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan nilai moneter antara ekspor dan impor. Neraca perdagangan biasanya dikenal sebagai net ekspor. Sebuah keseimbangan positif dalam perdagangan berarti bahwa negara mempunyai nilai moneter dari ekspor melebihi impor, yang disebut sebagai surplus perdagangan. Sementara itu, saldo negatif perdagangan berarti bahwa nilai moneter impor melebihi ekspor, dan disebut sebagai defisit perdagangan. Masing-masing negara akan berharap kondisi surplus. Surplus perdagangan berarti jumlah ekspor yang dilakukan oleh suatu negara lebih dari impor. Kondisi ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kondisi ini juga menyebabkan ketegangan antara negara-negara dengan perdagangan defisit dan yang surplus. Identitas pendapatan nasional menunjukkan bahwa investasi asing bersih selalu sama dengan neraca perdagangan, yaitu:
Investasi Asing Bersih = Neraca Perdagangan

$$S - I = NX$$

Jika $S - I$ dan NX positif, itu menunjukkan surplus perdagangan. Dalam hal ini, negara menjadi donor bersih di pasar keuangan dunia, dan ekspor lebih banyak barang dan jasa daripada mengimpornya. Jika $S - I$ dan NX negatif, itu menunjukkan defisit perdagangan. Dalam hal ini, negara

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

bertindak sebagai net debitur di pasar keuangan dunia dan mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor mereka. Jika $S - I$ dan $NX < 0$, negara dikatakan memiliki neraca perdagangan karena nilai impor sama dengan nilai ekspor.

2.5 Real Exchange Rate (RER)

Real Exchange Rate (RER) adalah harga relatif dari barang antara kedua negara. *Real Exchange Rate menyatakan* tingkat di mana kita dapat membandingkan barang dari satu negara dengan barang dari negara lain. Kurs riil antara kedua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di antara mereka. Jika kurs riil tinggi, barang-barang luar negeri relatif lebih murah dan barang-barang domestik relatif lebih mahal. Sebaliknya, jika nilai tukar riil rendah, maka barang luar negeri relatif lebih mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Kita dapat menyimpulkan pengukuran nilai tukar riil dengan persamaan ini:

$$RER = e \frac{P^f}{P^d}$$

2.6 Investasi Asing Langsung

Menurut Salvatore (1997), investasi asing langsung termasuk investasi riil dalam aset, seperti pembangunan pabrik, menyediakan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk tujuan produksi, berbagai pembelian persediaan peralatan dan sebagainya. Keberadaan aset ini, biasanya diikuti dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan investor (pemilik aset) mempertahankan pemantauan dana yang telah tertanam. Undang-Undang Nomor Indonesia 1 Tahun 1967 menegaskan bahwa definisi investasi asing dalam UU 1 tahun 1967 hanya mencakup investasi asing langsung yang dilakukan oleh atau di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di

Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko investasi.

$$FDI = \Sigma \text{Investment}$$

2.7 ACFTA Customs Tariff

Gambaran umum tentang Tarif Bea Indonesia menurut Departemen Keuangan adalah pengenaan pada barang impor berdasarkan klasifikasi barang yang disusun oleh Konvensional Internasional tentang Uraian Barang *Harmonized* dan *Coding* Sistem oleh *World Custom Organization*. TBMI adalah salah satu instrumen fiskal yang mengatur: (1) Penentuan jumlah pengenaan tarif bea berdasarkan klasifikasi barang; (2) Pelaksanaan Prosedur Impor yang mencakup larangan impor dan / atau penyediaan fasilitas khusus untuk importir tertentu untuk mengimpor barang tunduk pada prosedur dan (3) barang yang penggunaan mungkin memiliki dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan.

ACFTA Tarif Bea adalah tarif yang dikenakan pada barang yang diimpor ke Indonesia dari Cina dan / atau negara-negara ASEAN lainnya yang dilengkapi dengan Form-E (*Certificate of Origin*). Dalam rangka kerjasama perdagangan ASEAN-China, disepakati untuk menurunkan tiga kategori tarif secara bertahap, yaitu *Early Harvest Package*, *Normal Track* dan *Sensitive Track*. *Early Harvest Package (EHP)* adalah program menurunkan tarif antara ASEAN dan China, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2004, dan secara bertahap diturunkan menjadi 0% pada tahun 2006. Program ini telah dilaksanakan oleh Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355 /KMK.01/2004 (EHP ASEAN-China, terdiri dari 527 pos tarif) dan 356 / KMK.01 / 2004 (EHP Bilateral Chine-Indonesia, terdiri dari 46 pos tarif). Tarif untuk produk ini akan menjadi 0% pada

tahun 2006, baik di Indonesia maupun di China.

2.8 Gross Domestic Product (GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) yang diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai pembangunan ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional memiliki pengukuran makro utama pada kondisi suatu negara (Mankiw, 2009). Secara umum, kondisi perbandingan antar negara dapat dilihat sebagai ilustrasi pendapatan nasional. Dalam menentukan apakah suatu negara dianggap sebagai dikembangkan atau negara berkembang, Bank Dunia melakukannya melalui pengelompokan besarnya GDP dan GDP suatu negara adalah sama dengan total belanja barang dan jasa dalam perekonomian (Todaro dan Smith, 2008). Todaro dan Smith (2008) lebih lanjut mengatakan bahwa GDP merupakan indikator yang mengukur jumlah output barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam wilayah itu, baik oleh warga (penduduk) dan non-penduduk (misalnya, perusahaan asing), terlepas dari apakah output produksi akan dialokasikan untuk pasar domestik atau luar negeri. Dengan demikian, pendapatan dari setiap warga negara yang bekerja di negara-negara lain tidak termasuk dalam GDP. Sebagai ilustrasi, PDB Indonesia baik oleh warga negara atau asing Indonesia di Indonesia tidak dapat dimasukkan sebagai produk Indonesia di luar negeri (Sagir, 2009). Mankiw (2009) mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode waktu tertentu.

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$

2.9 Perkembangan ASEAN-China Free Trade Area

Pembentukan ASEAN-China free trade area (ACFTA) yang disepakati oleh peserta ASEAN-China Summit di

Brunei Darussalam pada November 2001, diikuti dengan penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja Komprehensif Economic Co-Operation Antara ASEAN dan Republik Rakyat China pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh, November 2002, di mana naskah menjadi dasar bagi pembentukan ACFTA dalam sepuluh tahun dengan beberapa fleksibilitas yang diberikan kepada beberapa negara yang baru saja bergabung dengan ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Persetujuan Perdagangan Barang Perjanjian Kerangka Ekonomi Komprehensif Kerjasama antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina mencakup pengurangan atau penghapusan tarif atas barang yang terbagi dalam Program Early Harvest, jalur normal dan Sensitif Jalur. Early Harvest Program (EHP) yang ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program penurunan tarif produk dimana tarif Menurunkan dilakukan secara bertahap dan efektif, mulai dari Januari tahun 2006.

2.10 Ekspor Utama dan Impor komoditi Indonesia-China

Ekspor adalah penjualan barang domestik untuk pasar luar negeri. Ini berarti bahwa ada permintaan pasar luar negeri pada produk dalam negeri. Sementara impor adalah pembelian barang dari luar negeri. Ini berarti bahwa ada permintaan domestik untuk barang dari luar negeri. Dalam hubungan perdagangan antara negara-negara, ekspor-impor dipengaruhi oleh produk domestik bruto (PDB) dari negara pengimpor.

$$NX = X - M$$

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dari masing-masing variabel, kemudian dilanjutkan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

dengan analisis ekonomi dari persamaan regresi dan uji asumsi klasik. Di samping itu, akan dilakukan pengujian- pengujian terhadap masalah yang biasanya timbul dalam regresi linear dan analisis kurun waktu (*time series*).

Penelitian ini dibagi menjadi dua penelitian yaitu penelitian untuk menguji hubungan antara *Real Exchange Rate (RER)*, *Foreign Direct Investment (FDI)*, GDP Indonesia dan Tarif Bea masuk Indonesia (*tax*) terhadap *Balance of Trade* dan penelitian kedua adalah hubungan GDP_China terhadap *Balance of Trade*.

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear *stepwise*. Tujuan menggunakan regresi linear *stepwise* adalah untuk memprediksi besarnya nilai

variabel dependen atas dasar salah satu atau lebih variabel independen yang digunakan bersifat *dummy*.

3.2 Penerapan Responden

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari data *time series* dengan frekuensi kuartalan dalam rentang waktu 2005:Q1 sampai dengan 2014:Q4. Penggunaan rentang waktu tersebut adalah untuk mengetahui kondisi neraca perdagangan Indonesia-China selama penerapan ACFTA, dimana ACFTA mulai disahkan sejak 1 Januari 2005, tetapi dampak penerapannya secara efektif di Indonesia mulai 1 Januari 2010.

3.3 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Skala
BOT	Jika $S - I$ dan NX adalah positif, memiliki surplus perdagangan. Jika $S - I$ dan NX adalah negatif, memiliki defisit perdagangan. Jika $S - I$ dan NX adalah nol. $S - I = NX$	Interval
RER	<i>Real Exchange Rate</i> , jika nilainya naik, maka rupiah akan terdepresiasi, maka akan terjadi peningkatan ekspor Indonesia. Begitu juga sebaliknya. $RER = e \frac{P^f}{P^d}$	Interval

Variabel	Definisi Variabel	Skala
FDI	FDI merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. $FDI = \sum Investment$	Interval
GDP_IND	GDP_IND adalah semua nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Diasumsikan jika nilainya meningkat, maka akan terjadi penurunan neraca perdagangan Indonesia-China karena pendapatan tersebut digunakan untuk membeli komoditas dari China (impor) $\frac{GDP_IND}{\text{Harga Konstan, komoditas } i \text{ periode } t}$	Interval
TAX_ACFTA	Dalam penelitian ini, TAX_ACFTA merupakan variabel yang berbentuk data kualitatif. Agar dapat digunakan dalam persamaan regresi, variabel dummy ini akan ditransformasikan menjadi data biner yang bernilai 0 atau 1. Pemberlakuan tarif nol persen, komoditas <i>i</i> periode <i>t</i> , Sebelum nol persen (2005:Q1) = 0 Setelah nol persen (2010:Q1) = 1	Nominal
GDP_CHN	GDP China riil (GDPC) diperoleh dengan membagi GDP China nominal dengan deflatornya. Hal tersebut dilakukan karena data GDP China yang diperoleh berupa GDP nominal. GDP China Riil, komoditas <i>i</i> periode <i>t</i> , $\frac{GDP_CHN \text{ nominal}_{it}}{\text{Deflator } GDP_CHN_{it}}$	Interval

3.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.1 Normalitas

Pengujian ini dapat dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-p plot of regression standardized residual*, yaitu:

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2 Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain :

- Jika nilai *variance inflation factor (VIF)* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Semakin tinggi *VIF* maka semakin rendah *tolerance*.
- Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,8, maka model dapat dinyatakan terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Jika nilai koefisien determinan, baik dilihat dari R maupun R-Square diatas 0,6 namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

ditengarai model terkena multikolinearitas.

3.4.3 Autokorelasi

Menurut Winarno (2007), autokorelasi adalah hubungan antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya. Sedangkan Gijarati (2003) mendefinisikan autokorelasi sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam *time series data*, atau ruang seperti dalam data *cross-sectional*. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (Nachrowi dan Usman, 2006). Sedangkan cara mengatasi autokorelasi, yaitu dengan metode *First Difference* dan *First Order Autoregressive*. Jika statistic *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Hipotesis dari pengujian ini adalah:

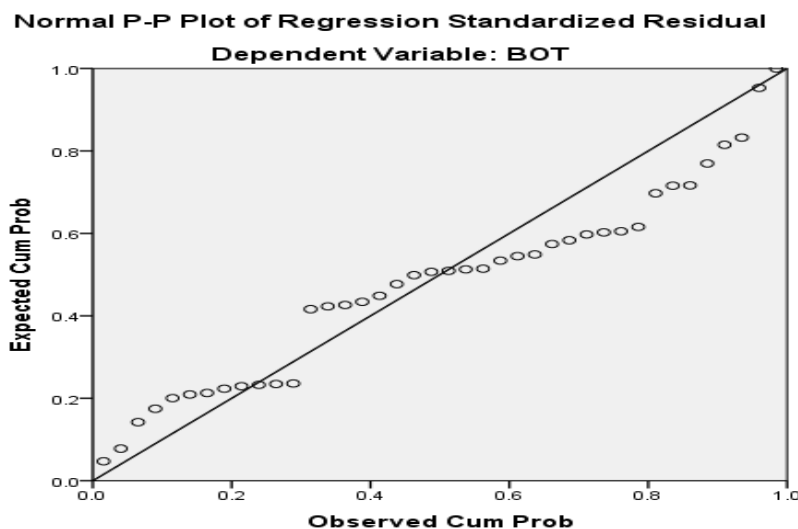
H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_1 : Ada Autokorelasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas



Grafik 4.1 Grafik Normal P-Plot Balance of Trade dengan FDI, RER, GDP_IND & TAX_ACFTA

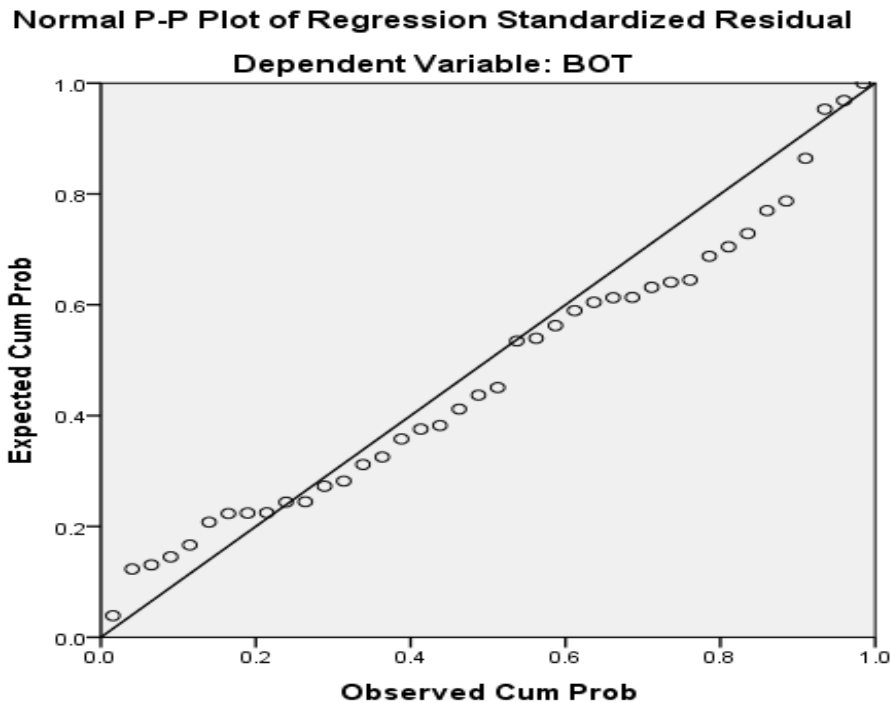
3.4.4 Heteroskedastisitas

Dilakukan dengan *White Heteroscedasticity Test*. Salah satu asumsi dari *error-term* dalam OLS adalah varians dari *error-term* untuk setiap pengamatan sama untuk seluruh nilai variabel bebas (X_i) atau homoskedastis (asumsi varians konstan). Jika asumsi ini tidak terpenuhi dalam suatu regresi tertentu, maka dapat dikatakan *error-term* mengalami masalah heteroskedastisitas. Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *White (cross term)*. Hipotesa dari uji *White Heretoskedasticity* adalah :

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas (Homoskedastisitas)

H_1 : Ada heteroskedastisitas

Dengan tingkat keyakinan (α) = 5%, H_0 akan diterima jika nilai *Probability (P-value)* $> \alpha$, Sebaliknya, H_0 akan ditolak jika nilai (*P-value*) $< \alpha$.



Grafik 4.2 Grafik Normal P-Plot Balance of Trade dengan GDP_CHN

Grafik *normal p-p plot of regression standardized residual* menunjukkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji adalah normal.

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menjelaskan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas, dimana gejala yang dimaksud yaitu adanya korelasi yang signifikan antar variabel independen. Untuk melihat adanya penyimpangan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*.

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas BOT dengan RER, FDI, GDP_IND dan TAX_ACFTA

Variabel Independen	Tolerance	VIF
RER	.477	2.098
FDI	.722	1.385
GDP_IND	.477	2.098
TAX_ACFTA	.600	1.666

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas BOT dengan GDP_CHN

Variabel Independen	Tolerance	VIF
GDP_CHN	1.000	1.000

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.2 diatas menunjukkan hasil uji multikolinearitas untuk BOT dengan RER, FDI, RER, GDP_IND dan TAX_ACFTA dan Tabel 4.3 menunjukkan hasil multikolinearitas untuk BOT dengan GDP_CHN. Berdasarkan Tabel 4.2 dan 4.3 diatas dapat dilihat bahwa semua nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

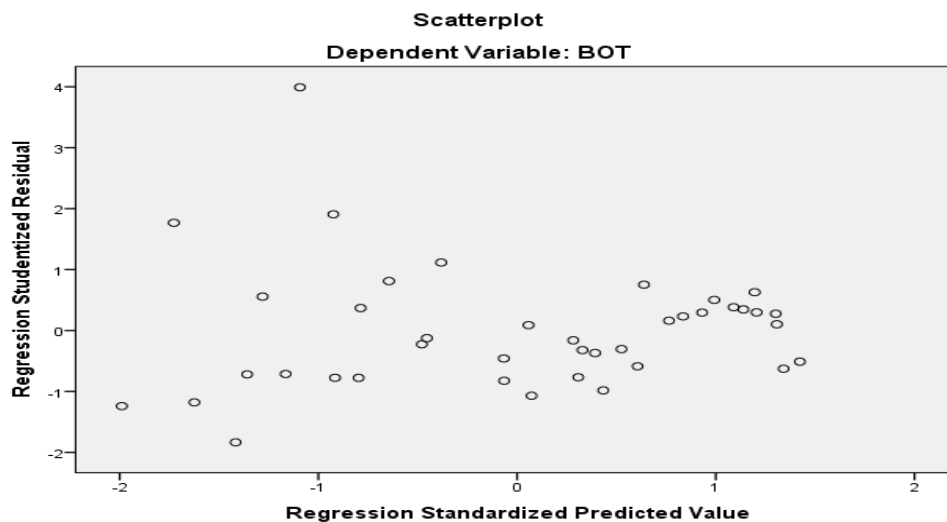
4.1.3 Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dari variabel independen RER, FDI, GDP_IND dan TAX_ACFTA terhadap dependen BOT didapatkan hasil nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,815. Nilai tabel *Durbin-Watson* dengan alpha 5% untuk jumlah data (n) sebanyak 40 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 5 adalah dL 1,2305 dan dU 1,7859. Dengan demikian, maka $d > dU$ atau $1,815 > 1,7859$ maka pada variabel-variabel independen tersebut tidak terdapat autokorelasi positif terhadap variabel dependen. Nilai $(4 - d) > dU$ atau $(4 -$

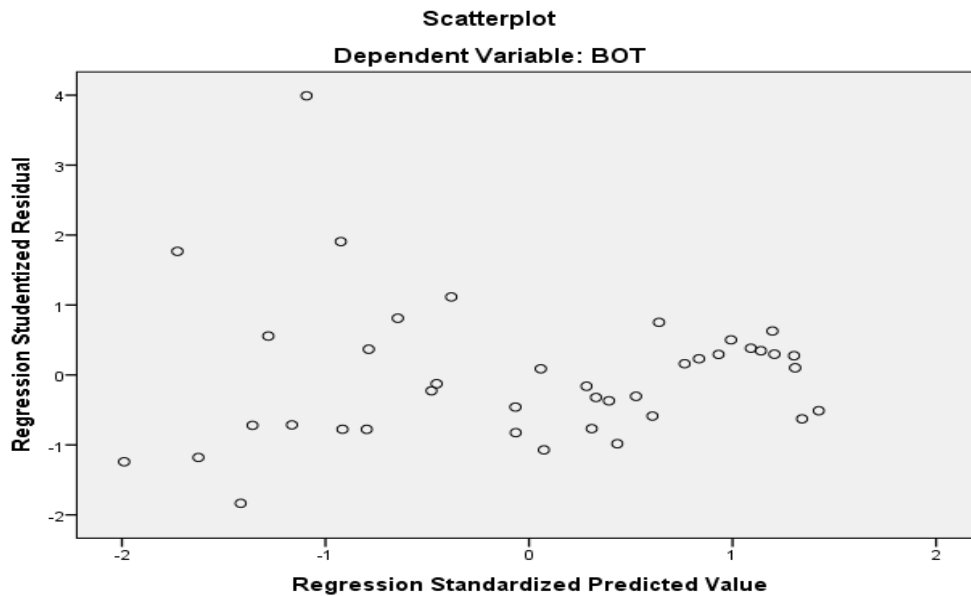
$1,815) > 1,7859$ maka pada variabel-variabel independen tersebut tidak terdapat autokorelasi positif terhadap variabel dependen atau dengan kata lain, nilai *Durbin-Watson* dari model regresi yang terbentuk pada penelitian ini berada pada area bebas autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi dari variabel independen GDP_CHN terhadap dependen BOT didapatkan hasil nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,627. Nilai tabel *Durbin-Watson* dengan alpha 5% untuk jumlah data (n) sebanyak 40 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 5 adalah dL 1,2305 dan dU 1,7859. Dengan demikian, maka $d > dU$ atau $1,627 > 1,7859$ maka pada variabel-variabel independen tersebut tidak terdapat autokorelasi positif terhadap variabel dependen. Nilai $(4 - d) > dU$ atau $(4 - 1,627) > 1,7859$ maka pada variabel-variabel independen tersebut tidak terdapat autokorelasi positif terhadap variabel dependen atau dengan kata lain, nilai *Durbin-Watson* dari model regresi yang terbentuk pada penelitian ini berada pada area bebas autokorelasi.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas



Grafik 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*) BOT dengan RER, FDI, GDP_IND dan TAX_ACFTA



Grafik 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*) BOT dengan GDP_CHN

Pada grafik 4.3 dan 4.4 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar sepanjang sumbu Y positif dan sumbu Y negatif dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi adanya gejala homokedastisitas, artinya bahwa seluruh persamaan regresi yang dilakukan telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.3 Tabel Analisis Regresi Berganda

Hipotesis	B	Beta	T	Sig.	Keterangan
H1 : RER dengan BOT	4559.814	.378	2.129	.035	Diterima
H2 : FDI dengan BOT	-74.743	-.110	-.691	.494	Ditolak
H3 : TAX_ACFTA dengan BOT	.342	.376	1.462	.152	Ditolak
H4 : GDP_IND dengan BOT	-8.564	-.365	-2.118	.041	Diterima
H5 : GDP_CHN dengan BOT	-1.225	-.663	-5.463	.000	Ditolak

4.2.1 Peningkatan *Real Exchange Rate* akan meningkatkan *Balance of Trade* Indonesia

Nilai tukar mata uang suatu negara dibedakan atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal merupakan harga relatif mata

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

uang dua negara (Mankiw, 2009). Misalnya, 1 US\$ untuk 9.000 rupiah di pasar uang. Sedangkan nilai tukar riil merupakan harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nilai tukar riil menyatakan tingkat, di mana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.

Nilai tukar riil di antara kedua negara dihitung dari nilai tukar nominal dikalikan dengan rasio tingkat harga di kedua negara. Hubungan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal, dapat diformulasikan sebagai:

$$RER = ER * PF/PD$$

Di mana:

RER : *Real Exchange Rate* (Nilai tukar riil)

ER : *Exchange rate nominal* yang dapat dinyatakan dalam *direct term* (dalam rupiah/1CNY) ataupun *indirect term* (CNY/1rupiah).

PF : Indeks harga mitra dagang (*foreign*).

PD : Indeks Harga domestik.

Dari formulasi di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya daya saing perdagangan luar negeri ditentukan oleh dua hal, yaitu *Exchange rate* dan rasio harga kedua Negara. Jika *Exchange rate (direct term)* meningkat (terdepresiasi), dengan asumsi rasio harga konstan, maka ada hubungan positif dengan neraca perdagangan. Hal ini disebabkan *Exchange rate* yang lebih tinggi akan memberikan indikasi rendahnya harga produk Indonesia (domestik) relatif terhadap asing, karena dengan dollar yang sama memberikan jumlah rupiah yang lebih banyak.

Sebaliknya dengan asumsi kurs tidak fluktuatif, maka daya saing sangat ditentukan oleh kemampuan negara (domestik) atau otoritas moneter dalam mengendalikan laju harga dengan berbagai instrumen yang menjadi kewenangannya. Nilai tukar riil suatu negara akan berpengaruh pada kondisi

perekonomian makro suatu negara khususnya dengan ekspor netto atau neraca perdagangan. Pengaruh ini dapat dirumuskan menjadi suatu hubungan antara nilai tukar riil dengan ekspor netto atau neraca perdagangan (Mankiw, 2009).

Hasil penelitian ini diterima sesuai dengan teori Batiz (1996) yang menyatakan bahwa *Real Exchange Rate* (RER) berbanding lurus dengan neraca perdagangan. Peningkatan *Real Exchange Rate* (RER) akan menyebabkan Rupiah terdepresiasi sehingga harga barang-barang di dalam negeri menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan barang-barang di luar negeri, yang pada akhirnya akan meningkatkan ekspor dan surplus neraca perdagangan.

4.2.2 Peningkatan *Foreign Direct Investment* tidak akan meningkatkan *Balance of Trade* Indonesia

Secara teori, *Foreign Direct Investment* atau penanaman modal asing (FDI) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan pada khususnya di negara tuan rumah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Salvatore (2007) yang menyatakan bahwa FDI memiliki pengaruh positif pada peningkatan ekspor dan juga berpengaruh positif pada perdagangan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh FDI yang masuk ke Indonesia selain meningkatkan ekspor juga akan meningkatkan impor di Indonesia. Pendapatan yang diterima dari aktivitas ekspor secara otomatis akan membuat aktivitas impor juga meningkat. Maka, semakin banyak FDI yang masuk ke suatu negara secara otomatis akan menyebabkan peningkatan ekspor dan impor negara tersebut.

4.2.3 Peningkatan *Gross Domestic Product* Indonesia akan meningkatkan *Balance of Trade* Indonesia

GDP merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat.

Hubungan GDP dengan neraca perdagangan dapat dijelaskan sebagai berikut, GDP dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, GDP per orang (kapita) memberi tahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata – rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, GDP per orang (kapita) sepertinya merupakan ukuran kesejahteraan rata – rata perorangan yang cukup alamiah. GDP per kapita memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, namun di belakang rata – rata tersebut terdapat perbedaan yang besar antara berbagai pengalaman yang dialami orang – orang. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa GDP merupakan ukuran kesejahteraan yang baik untuk berbagai tujuan, namun tidak untuk semua tujuan (Mankiw, 2007).

Hasil penelitian ini sesuai dengan persamaan pendapatan nasional pada umumnya dimana antara impor dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang terbalik. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka tingkat impor akan semakin tinggi juga (Olivier, 2006). Jika GDP_IND meningkat, maka akan terjadi penurunan pada neraca perdagangan Indonesia-China dikarenakan pendapatan tersebut digunakan untuk membeli komoditas dari China (impor) dan sebaliknya jika GDP_IND menurun, maka akan terjadi peningkatan pada neraca perdagangan Indonesia-China (Olivier, 2006).

4.2.4 Peningkatan *Tax* ACFTA tidak akan meningkatkan *Balance of Trade*

Tarif Bea Masuk dikenakan bilamana suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri.

Pembebanan tarif atas suatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara. Khususnya di dalam pasar barang tersebut. Beberapa efek yang terjadi karena diberlakukannya tarif bea masuk dalam perdagangan yaitu (1) Efek terhadap harga, dapat menyebabkan naik turunnya harga suatu barang di dalam negeri; (2) Efek terhadap konsumsi, dapat menyebabkan naik turunnya jumlah konsumsi atas suatu barang di dalam negeri; (3) Efek terhadap produk, dapat menyebabkan naik turunnya jumlah produksi suatu barang dalam negeri; (4) Efek terhadap distribusi pendapatan, dapat menyebabkan perubahan pola dalam pendapatan masyarakat di dalam negeri.

Tarif bea masuk merupakan salah satu komponen yang menentukan besarnya pungutan bea masuk atas barang yang diimpor. Dalam perkembangannya, tarif bea masuk selalu diupayakan untuk diturunkan serendah mungkin sesuai ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian-perjanjian kepabeanan internasional seperti APEC dan AFTA sementara target penerimaan bea masuk yang disetujui dan ditetapkan dalam APBN menunjukkan *trend* yang selalu meningkat. Secara mikro, setiap transaksi impor akan menghasilkan penerimaan negara sebesar persentase tarif bea masuk dari nilai barang impor (dalam Rupiah). Untuk barang-barang yang berupa bahan baku, barang antara dan barang modal pada umumnya dikenakan tarif yang rendah karena pengimporan barang tersebut dianggap

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

sebagai impor yang produktif dimana barang-barang impor tersebut akan diolah di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah sedangkan atas barang jadi umumnya dikenakan tarif sedang sampai tinggi karena dianggap bersifat konsumtif dan khusus untuk barang mewah dikenakan tarif sangat tinggi.

Dengan demikian apabila masyarakat Indonesia bersikap konsumtif akan mengakibatkan penerimaan bea masuk cenderung tinggi disamping memboroskan devisa dan sebaliknya apabila masyarakat Indonesia mencintai produk dalam negeri dan bersikap produktif maka penerimaan bea masuk cenderung turun dan sebagai kompensasinya maka penerimaan negara di bidang perpajakan akan meningkat, yaitu pajak yang berasal dari pertambahan nilai barang di dalam negeri dan pajak penghasilan akibat pertumbuhan ekonomi disamping membaiknya kondisi neraca perdagangan ke arah yang lebih menguntungkan.

Dengan menurunnya tarif bea masuk akan mengakibatkan *volume* impor meningkat. Hal ini akan membawa pengaruh buruk bagi perkembangan industri di Indonesia karena barang-barang hasil dalam negeri akan kalah saing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Dengan diberlakukannya ACFTA, Produk-produk impor dari akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara China.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Ricardo (1817) yang menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya tarif bea masuk pada suatu negara akan berpengaruh negatif terhadap impor dan neraca perdagangan akan menjadi positif atau surplus. Hal ini disebabkan karena dengan adanya program

penurunan tarif nol persen pada ACFTA. Dengan tarif nol persen telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan Industri Kecil Menengah (IKM). Di mana, perdagangan bebas ini membuat harga cenderung naik dan pendapatan cenderung turun. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk China telah membanjiri pasar local, terutama sejak diterapkannya ACFTA. Sehingga terjadi impor yang meningkat yang berpengaruh negatif pada *Balance of Trade* di Indonesia.

4.2.5 Peningkatan *Gross Domestic Product* China tidak akan meningkatkan *Balance of Trade* Indonesia

Unsur-unsur yang terdapat di dalam GDP, yaitu (1) Konsumsi, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk pembelian barang dan jasa, kecuali pembelian rumah baru. Barang yang dimaksud di sini terbagi menjadi dua, yakni barang tahan lama dan barang tidak tahan lama; (2) Investasi, yaitu pembelian barang yang akan digunakan di masa depan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Investasi biasanya meliputi pembelian peralatan modal, persediaan, struktur, dan rumah baru (Mankiw, 2007); (3) Belanja pemerintah atau *government purchases*, yakni pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan negara bagian; dan (4) Ekspor Neto atau *Net Exports*, adalah perhitungan perdagangan dengan negara lain. Biasanya nilai ekspor neto merupakan hasil dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Hal ini yang kemudian menyebabkan bernilai positif, yakni ketikan nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, dan bernilai negatif ketika nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor (Mankiw, 2007).

Pada tahun 2004, China menarik FDI total sebesar USD 153.5 miliar, tingkat pertumbuhan 33,5 persen secara tahunan, dengan aliran FDI baru senilai

USD 60.6 miliar, meningkat 13,3 persen. Sampai dengan Januari 2005, jumlah perusahaan investasi asing yang terdaftar di China berjumlah 5.125.504 dan modal investasi mencapai USD 1109.445 miliar, dengan realisasi FDI sebesar USD 566.196 miliar.

Pada tahun 2005, total PDB China mencapai 14 triliun RMB (Rp 1,6 triliun) atau lebih dari dua kali lipat PDB gabungan dari Indonesia, Malaysia,

Filipina, Singapura dan Thailand. Perkapita GDP China sekarang yang di sekitar USD 1.300 adalah sama dengan Indonesia tetapi lebih tinggi dari Filipina. Dengan total jumlah nominal PDB, China menduduki peringkat ke-5 perekonomian terbesar di dunia. Dari segi paritas daya beli (PPP), perekonomian China saat ini merupakan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.

Tabel 4.4 GDP China 2005-2014

Tahun	GDP (100 million Yuan)	Consumption	Government	Investment	(X-M)
2005	184,937	145,917	26,398	3,624	8,998
2006	216,314	165,150	30,528	5,000	15,636
2007	265,810	192,665	35,900	6,994	30,251
2008	314,045	223,340	41,752	10,240	38,713
2009	340,902	247,169	45,690	7,783	40,260
2010	401,512	281,517	53,356	9,988	56,651
2011	473,104	337,913	63,154	12,662	59,375
2012	518,942	380,847	71,409	11,016	55,670
2013	568,845	424,375	79,978	11,280	53,212
2014	635,910	476,934	89,023	12,721	57,232

Sumber : *National Bureau of Statistic China* (2014); diolah

Berdasarkan table 4.4 dapat dilihat bahwa China memiliki GDP yang sangat tinggi berbeda jauh dengan Indonesia. Dimana sesuai teori Mankiw (2007) bahwa semakin tinggi GDP suatu negara akan berdampak positif pada pendapatan negara *partner*. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw (2007),

tingginya GDP negara China ternyata tidak membawa dampak yang positif bagi neraca perdagangan Indonesia. Jika dilihat dari tabel 5.6 dapat diketahui bahwa China lebih banyak mengarah pada konsumsi dan pengeluaran pemerintahan.

Kontribusi setiap komponen GDP cukup beragam. Tetapi, konsumsi swasta (rumah tangga) berperan paling

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

signifikan. Bagi China, sektor konsumsi swasta mengisi rata-rata di atas 70 – 80% setiap tahunnya terhadap GDP. Bahkan, saat perekonomian mengalami goncangan, sektor konsumsi swasta semakin menjadi tumpuan. Kekuatan sektor konsumsi di China sejalan dengan besarnya jumlah penduduk. Data *World Economic Forum* (2014) menyebutkan, penduduk China menempati urutan terbesar. GDP China dapat berpengaruh terhadap pendapatan negara *partner* (dalam penelitian ini Indonesia) jika tingkat ekspor dan impor nya tinggi, tetapi dilihat dari tabel 4.4 tingkat ekspor maupun impor China hanya memiliki nilai rata-rata 5 – 9% setiap tahunnya terhadap GDP China. Dimana totalan ekspor dan impor tabel diatas adalah totalan untuk seluruh negara.

4.3 Implikasi Manajerial

Ditinjau dari neraca perdagangan antara Indonesia dan China selama periode 1999-2007 Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan nilai 1.1 milyar pada akhir tahun 2007. Namun tahun 2008-2014 neraca perdagangan Indonesia- China mengalami defisit yang terus meningkat. Defisit yang muncul tersebut apabila ditinjau dari komposisi impor Indonesia dari China jumlah impor barang modal dan bahan baku penolong dari China meningkat pesat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing sebesar 51,4% dan 26,0%. Hal ini merupakan indikasi bahwa terjadi *added value* atau proses produksi terhadap kebutuhan industri domestik, yang tentunya menghasilkan hasil produk yang lebih murah dan efisien.

Selain itu ditinjau dari struktur ekspor non-migas menurut negara tujuan peranan China sebagai negara tujuan ekspor semakin meningkat dibandingkan dominasi pangsa ekspor ke uni eropa, amerika serikat, dan jepang. Hal ini menggambarkan diversifikasi pasar tujuan ekspor ketika krisis ekonomi global melanda amerika serikat dan

wilayah uni eropa, yang mampu menopang kondisi perekonomian Indonesia di teritori per-tumbuhan positif. Dengan terbuka luasnya pasar China, dimana hampir 80% lebih tarif yang menggunakan skema ACFTA telah mencapai *zero percent* hal ini membuka peluang baik dari segi penetrasi pasar produk Indonesia ke China, maupun terbuka lebarnya sumber bahan baku (*material*) yang dibutuhkan sektor industri dalam negeri sehingga dapat bersaing secara kompetitif, mengingat Indonesia bukanlah negara tujuan ekspor ataupun importir utama bagi China. Dari segi investasi ataupun penanaman modal hal ini membawa pengaruh yang cukup baik, mengingat kebijakan pemerintah China yang berencana merestrukturisasi perekonomian mereka dengan melakukan ekspansi dan investasi di luar negeri. Hal ini membawa Indonesia sebagai potensial *market* yang dapat menarik investor China untuk membuka perusahaan sebagai basis produksi dan menanamkan modal mereka di Indonesia.

Tantangan terberat Indonesia sebenarnya lebih kepada faktor di dalam negeri diantaranya, pembenahan sektor pendukung industri dan pertanian seperti kesiapan energi, kualitas tenaga kerja, sistem perbankan baik dari segi suku bunga pinjaman, pembiayaan dan lain-lain, agar dapat mendorong pertumbuhan industri. Berikutnya perlu memperbaiki sistem logistik nasional yang memungkinkan pergerakan barang, modal dan tenaga kerja agar semakin efisien di berbagai sektor. Kemudian peningkatan pengawasan dibatas perdagangan Indonesia sehingga dapat menghalau serbuan produk illegal.

Kebijakan perdagangan dalam periode memasuki era globalisasi ekonomi diarahkan pada penciptaan dan pemantapan kerangka landasan perdagangan, yaitu dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar

negeri dengan tujuan lebih memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat, menenunjang efisiensi produksi, mengembangkan ekspor, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat serta menetapkan stabilitas ekonomi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut diupayakan secara terpadu dan saling mendukung dengan kebijakan dibidang-bidang lainnya agar tercapainya keseimbangan dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan.

Dalam menghadapi ACFTA, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukkan ketidaksiapan kita dalam menghadapi ACFTA, diantaranya dari segi penegakan hukum, sudah diketahui bahwa sektor itu termasuk buruk di Indonesia. Jika tak ada kepastian hukum, maka iklim usaha tidak akan berkembang baik, yang mana hal tersebut akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar internasional.

Kendala utama bagi masyarakat Indonesia adalah mengubah pola pikir, baik di kalangan pejabat, politisi, pengusaha, maupun tenaga kerja. Mengubah pola pikir ini sangat penting bagi keberhasilan kita menghadapi ACFTA. Namun, selain menghadapi berbagai persoalan, ACFTA jelas juga membawa sejumlah keuntungan. Pertama, barang-barang yang semula diproduksi dengan biaya tinggi akan bisa diperoleh konsumen dengan harga lebih murah. Kedua, sebagai kawasan yang terintegrasi secara bersama-sama, kawasan China akan lebih menarik sebagai lahan investasi. Indonesia dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah mempunyai keunggulan komparatif. Namun, pemerintah harus mengadakan program untuk pelatihan SDM sehingga SDM Indonesia memiliki

kemampuan dan pengetahuan dalam berbagai hal sehingga daya SDM Indonesia dapat meningkat.

Saat ini pemerintah harus lebih siap bereaksi atas berbagai dampak yang akan ditimbulkan oleh ACFTA. Pertama, ancaman terhadap pemutusan kerja massal harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Tidak hanya itu, diperlukan sikap afirmatif (*affirmative action*), dengan tenaga kerja dalam negeri memperoleh porsi lebih besar dan lebih dipentingkan dalam setiap pembukaan lahan kerja. Kedua, kualitas produk nasional yang sebelumnya telah tergerus oleh produk-produk China harus memperoleh proteksi. Hal itu secara tidak langsung juga akan melindungi eksistensi industri dalam negeri. Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi setiap produk dalam negeri maupun impor yang beredar di pasaran harus diterapkan dengan pengawasan yang ketat. Penerapan SNI akan mencegah peredaran barang murah, tetapi berkualitas rendah. Bukan rahasia lagi, produk impor yang dipastikan akan lebih membanjiri pasar dalam negeri menjadi malapetaka bagi para pelaku usaha. Penerapan safeguard berupa instrumen pengenaan bea masuk tambahan yang ditetapkan jika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sehingga industri dalam negeri mengalami kerugian, harus direalisasikan lebih cepat. Instrumen ini juga mencegah penyelundupan yang bisa terjadi akibat pengawasan yang lemah. *Safeguard* adalah salah satu instrumen penting dari lima instrumen lainnya (SNI, antidumping, antisubsidi, dan technical barriers to trade). Ketiga, instrumen antisipasi yang tak kalah penting meski seharusnya lebih didahulukan adalah penyusunan aturan hukum yang bisa melindungi produksi nasional Indonesia. Mengingat dampak sistemik yang akan ditimbulkan oleh perjanjian ini,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sepatutnya terlebih dahulu melalui berbagai arena konsultasi di ranah publik.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas di ASEAN, seharusnya Indonesia menjadi pemimpin dalam setiap perjanjian kerja sama. Berperan sebagai subjek yang aktif, menentukan isi dan aturan main serta menyiapkan instrumen yang lebih baik dalam menyikapi berbagai kemungkinan dan ancaman dari pemberlakuan ACFTA. Globalisasi telah menghadirkan ancaman yang tidak semata berwajah fisik. Pemiskinan kedaulatan sangat nyata dalam serbuan produk, barang dan jasa impor yang lambat laun melemahkan kekuatan ekonomi bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan observasi mulai dari triwulan 1 tahun 2005 sampai triwulan 4 tahun 2014 serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, kedua negara yang menjadi obyek kajian ini yaitu Indonesia maupun China sama-sama mendapatkan manfaat dari pemberlakuan ACFTA. Namun dalam konteks hubungan perdagangan barang kedua negara, China lebih dapat mengoptimalkannya sehingga manfaat yang diterima dapat jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima Indonesia.
- b. Variabel independen *Real Exchange Rate* dan *GDP_IND* secara signifikan berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Peningkatan *RER* dan *GDP_IND* akan secara langsung meningkatkan neraca perdagangan.
- c. Variabel independen *Foreign Direct Investment*, *TAX_ACFTA* dan *GDP_CHN* tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

- d. Pemberlakuan ACFTA membuka pasar yang semakin besar yang dapat menyerap produk lebih banyak. Semakin banyak produk terserap akan membuat kapasitas perekonomian bertambah besar. Selain itu juga dapat memacu produsen dalam negeri untuk lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan produknya.
- e. Ditinjau dari neraca perdagangan Indonesia, pada tahun 2005 dimana ACFTA sudah diberlakukan di Indonesia neraca perdagangan masih surplus/ positif. Hal ini dikarenakan belum terlihatnya dampak ACFTA di Indonesia. Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan China sejak tahun 2008 dimana nilai produk impor yang masuk ke Indonesia mencapai US \$15.247.200.000 dan terus berkembang hingga mencapai US \$ 30.624.335.480 pada tahun 2014, dengan defisit perdagangan sebesar US \$ 13.018.391.028. Hal ini menunjukkan dengan diberlakukannya tarif nol persen untuk bea masuk barang dari China, Indonesia tidak mampu menahan derasnya laju barang yang masuk dari China.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan implementasi ACFTA dan dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia, diharapkan produsen di Indonesia dapat menghasilkan produk-produk substitusi, sehingga dapat

- mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk China.
- b. Dengan dihapusnya tarif impor dari China maka pengusaha dapat mengimpor bahan baku dari China dengan harga yang lebih murah untuk dijadikan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi ke daerah ekspor tujuan lainnya.
 - c. Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan baik dari daya saing alam maupun sumberdaya manusia, memiliki potensi untuk bersaing untuk itu perlu dukungan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan dan ketrampilan serta adanya regulasi yang menunjang kegiatan usaha sehingga produk-produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat untuk memasuki pasar luar negeri.
 - d. Dunia usaha harus terus mempersiapkan diri dengan terus melakukan pembenahan dari sisi sumberdaya manusia, bahan baku, pengawasan mutu serta efisiensi proses produksi sehingga dapat membuat produk yang memiliki daya saing.
 - e. Memperluas cakupan penelitian untuk komoditi-komoditi yang lain yang dirasa cukup memberikan pengaruh kepada nilai ekspor-impor Indonesia-China, sehingga mendapatkan model yang lebih baik dan analisis yang lebih komprehensif.
- Ando, Mitsuyo, & Urata, Shujiro. (2006). *The Impact of East Asia FTA: A CGE Model Simulation Study*, JSPS (Kyoto University)-NRCT (Thamassat University) Core University Program Conference "Emerging Developments in East Asia FTA/EPAs". Kanbaikan Hall-Doshisha University.
- Appleyard, D. (2006). *International Economics. 7th edition*. New York : Mc Graw-Hill.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta.
- Azwar, S. (2000). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balassa, Bela. (1961). *The Theory of Economic Integration. Homewood*. Illinois: Richard D. Irwin Inc.
- Bank Indonesia. (Triwulan IV 2009). *Kajian Ekonomi Regional Jakarta: Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) dan Implikasinya Ke Jakarta*. Jakarta: Author.
- Batiz, R. (1996). *International Finance and Open Economy Macroeconomics. 2nd edition*. New York, NY: Macmillan Publishing Co.
- Blanchard, Olivier. (2006). *Macroeconomics (Fourth Edition)*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Bowo. (2012). *Dampak Penerapan ACFTA terhadap Nilai Perdagangan Indonesia atas China: Studi beberapa komoditas*

DAFTAR PUSTAKA

Ambarsari, Indah & Purnomo, Didit. (2005). *Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol 6. Jakarta

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- terpilih. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ezell, Stephen. (2014). *We're Number 2: What Happens When China Surpasses the United States as the World's Largest Economy?*.
- Ghani, Gairzazmi M. (2009). *The Impact of Trade Liberalization on Developing Countries, Trade Balance with Industrial and Developing Countries: An Economic Study* (pp. 10, 53-64.). International Journal of Business and Society.
- Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hamidi, Kamal. (2013). *Dampak Penerapan ACFTA terhadap Neraca Perdagangan Bilateral Indonesia-China*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- H. Bayram Irhan & Nur Dilbaz Alacahan & Levent Korap. (2011). *An Empirical Model for the Turkish Trade Balance: New Evidence from ARDL Bounds Testing Analyses*. *Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, Department of Econometrics, Faculty of Economics* (pp. vol. 14(1), 38-61). Istanbul University.
- Ishabela Ghea. (2012). *Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas ACFTA terhadap Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Krugman, Paul R. (2000). *International Economics: Theory and Policy, Sixth Edition*. Addison Wesley.
- Mankiw, N. G. (2007). “BAB 2: Data Makroekonomi” dalam *Makroekonomi, edisi keenam, diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh Liza, Fitria dan Nurmawan, Imam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2009). *Macroeconomics, 7th Edition*. New York: Worth Publishers.
- Meilani, Erika. (2008). *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Indonesia-Jepang Dengan Pendekatan Global Trade Analysis Project (GTAP)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nachrowi Djalal dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar (Edisi Keempat)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ricardo, David. (1973). *The Principles of Political Economy and Taxation*. England.
- Sagir, H. Suharsono. (2009). *Kapita Selektta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Salvatore, Dominick. (1997). *Ekonomi Internasional (Edisi Kelima)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sarbapriya. (2012). *Evaluating The Impact of Working Capital Management Components on Coorporate Profitability. Evidence from Indian Manufacturing Firms*.

- Sina, Ibnu. (2010). *Analisis Nilai Ekspor dan Impor antara Indonesia-Jepang Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Smith, Adam. (1970). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Vol. 1)*.
- Suryabrata, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sylviana Murni Deborah. (2011). *Dampak ACFTA terhadap industri tekstil nasional ditinjau dari kebijakan persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN (STUDI KASUS PADA PUSKESMAS KOTA PALEMBANG)

Rika Henda Safitri*), Siti Halimatussa’diah, Muhammad Rinaldi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang

**Email: rikahenda@unsri.ac.id*

ABSTRACT

The purpose of this research is to measure the performance of public health centers (puskesmas) in the city of Palembang in uses the balance scorecard .In this study , the researchers focused on perspective learning and growth consisting of 3 (three) indicators satisfaction employment levels employees , their level of understanding employees , and the motivation and empowerment employees. This research uses the quantitative descriptive by taking data in primary and secondary. A population of research is the number of employees puskesmas in the city of Palembang namely 185 people, with the sample the 65. The results of research processed using spss this indicates that the average performance puskesmas in Palembang good enough , indicated by the results of the analysis perspective individuals and of tools research used .Based on the outcome of this research a conclusion can be drawn that perspective balance scorecard is the method of measurement performance very good used because balance scorecard having the same which is not possessed system traditional management strategies .Traditional management strategies measures only organisational performance of financial terms just and preferred measurements on around what lasts tangible.

Key Words: Balanced Scorecard, Performance Assessment, Learning and Growth

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kota Palembang dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tingkat kepuasan kerja pegawai, tingkat pemahaman pegawai, dan tingkat motivasi dan pemberdayaan pegawai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil data secara primer maupun sekunder. Jumlah populasi penelitian adalah jumlah pegawai PUSKESMAS se kota Palembang yakni 185 orang, dengan sampel penelitian 65 orang. Hasil penelitian yang diolah menggunakan SPSS ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja Puskesmas di Palembang cukup baik, yang ditunjukkan oleh hasil analisis perspektif individu maupun dari alat-alat penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif Balance Scorecard merupakan metode pengukuran kinerja yang sangat baik digunakan karena Balance Scorecard memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih mengutamakan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible.

Kata Kunci: Balanced Scorecard, Pengukuran Kinerja, Pembelajaran dan Pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN

Menurut Dwiyanto bahwa model *new public service*, pelayanan publik berdasarkan teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hal di antara warga. Pelayanan publik diberikan oleh organisasi publik (pemerintah). Organisasi publik dituntut dapat memberikan layanan umum maupun fasilitas sosial kepada masyarakat seperti penyediaan pendidikan, kesehatan, administrasi dasar, pengurusan sampah, air minum, listrik dan lainnya.

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa kesehatan yang baik maka manusia akan sulit untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah menjadi salah satu wadah untuk membentuk instansi-instansi kesehatan demi menunjang masyarakat yang sehat. Selain itu, peran masyarakat sebagai tenaga kerja yang bergelut di bidang kesehatan akan membantu masyarakat luas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan dan pelayanan dalam bidang kesehatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pelayanan yang dituntut memiliki profesionalitas SDM yang paham dengan baik tujuan pelayanan dan bagaimana mencapai tujuan pelayanan tersebut. Menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, mampu bekerjasama dengan instansi pemerintahan yang

terkait serta lembaga kemasyarakatan yang menunjang efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

Ini sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Palembang yaitu : tercapainya Palembang sehat. Misi meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan profesionalitas provider, memelihara dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang prima serta menurunkan resiko kesakitan dan kematian. Maka dari itu, diperlukan unit kerja untuk membantu dalam pencapaian dari visi misi tersebut. Seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes, 1991). puskesmas ini menjangkau wilayah-wilayah seperti kecamatan atau sebagian kecamatan.

Pada dasarnya, penilaian masyarakat selaku pengguna layanan Dinas Kesehatan terhadap kinerja Puskesmas sangat rendah atau negative. Terlihat dari bagaimana masyarakat menggunakan layanan tersebut. Adanya perlakuan yang tidak sama antara pelayanan Puskesmas satu dengan Puskesmas lain membuat masyarakat sulit untuk menilai kinerja Puskesmas tersebut. Karena pada setiap Puskesmas terdapat pelayanan yang berbeda, seperti pelayanan 24 jam yang tidak semua Puskesmas ada pelayanan ini.

Kultur para petugas pelayanan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat yang akhirnya mempengaruhi sistematis kinerja yang ada pada unit kerja tersebut. Hal ini yang dapat menggambarkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan selaku instansi yang menaungi pelayanan Puskesmas tersebut cukup rendah dan terbukti dalam hasil

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

survey yang dilakukan oleh peneliti mengenai kualitas pelayanan publik yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan menempati integritas pelayanan publik yang cukup rendah.

Untuk menangani pelayanan kinerja yang rendah, perlu diadakan penelitian terhadap kepuasan masyarakat dalam kinerja dari pelayanan Puskesmas dengan menggunakan pendekatan metode *Balance Scorecard* yang merupakan salah satu alat ukur yang secara komperhensif dapat melakukan pengukuran kinerja pelayanan tersebut guna menanggulangi pelayanan Puskesmas yang rendah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perubahan penggerak organisasi dimana SDM tidak hanya mampu mengikuti perubahan tersebut, tetapi juga berkembang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengevaluasi **”Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan (Studi Kasus pada Puskesmas Kota Palembang)”**

2. KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi (Witthaker; 1995).

Dalam organisasi baik organisasi publik ataupun bisnis pengukuran kinerja sangatlah penting. Pengukuran kinerja biasanya terkait dengan *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Pemahaman tentang *inputs* inilah sebagai sumber yang dipakai dalam menghasilkan suatu pelayanan.

Metode Pengukuran Kinerja yang diungkapkan oleh Witthaker yaitu: a) menetapkan sasaran / tujuan dan hasil yang diinginkan (perencanaan strategik), b) menetapkan indikator kinerja dan selanjutnya mengukur kinerja, c) mengevaluasi kinerja dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki

kinerja. Hal ini merujuk pada hasil keluaran dan hasil yang diperoleh dari proses, produk dan layanan yang memungkinkan evaluasi dan perbandingan relative terhadap goal, struktur, hasil masa lalu dan organisasi lain. Oleh karena itu pengukuran kinerja merupakan salah satu cara pemerintah dalam menentukan untuk menyediakan layanan yang berkualitas dengan biaya yang relative rendah.

Pada organisasi publik pengukuran kinerja biasanya dilihat pada efektivitas dan efisiensi. Keterbatasan organisasi publik dalam memperoleh informasi karena kinerja belum dianggap penting oleh pemerintah. Pada kinerja birokrasi publik pengukurannya tidak sebatas pada efektivitas dan efisiensi tetapi juga pada indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsibilitas. Pengukuran kinerja dalam organisasi tergantunglah pada besar kecilnya suatu organisasi tersebut.

Pada saat ini organisasi cenderung mulai tertarik pada pengukuran kinerja dalam berbagai aspek kombinasi misalnya aspek keuangan, kepuasan pelanggan, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan *stakeholder* dan aspek waktu. Empat aspek tersebut merupakan aspek yang penting dalam suatu organisasi baik publik maupun bisnis, terutama organisasi publik.

Pengukuran pada organisasi publik juga dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Suatu organisasi publik dapat dilakukan dengan mengukur internal karena dapat melihat responsibilitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentu akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Sedangkan aspek eksternal dilihat dari kepuasan masyarakat. Disini organisasi dituntut dalam melihat perkembangan kebutuhan suatu masyarakat pada umumnya.

Pengukuran kinerja yang dibahas di penelitian ini adalah *Balance Scorecard*, menurut Kaplan dan Norton *Balance Scorecard* sebagai tolak ukur kinerja administrasi yang dikaji dari empat perspektif yakni *Financial, customer Focus, Internal Process, Learning and Growth* yang bersumbu pada visi dan strategi organisasi.

2.2. Pengertian Balance Scorecard

Balanced scorecard terdiri dari dua kata yaitu *balanced* dan *scorecard*. *Balanced* artinya berimbang, maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang atau *organisasi* diukur secara berimbang dari dua perspektif yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan eksteren. Sedangkan *scorecard* artinya kartu skor, maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang (Mulyadi, 2005).

2.3. Konsep-konsep Balanced Scorecard

Menguraikan bahwa BSC merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi dan sasaran kepada pemangku kepentingan Darwanto (2003).

2.4. Langkah-langkah Balanced

Scorecard meliputi empat proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut menurut (Kaplan dan Norton, 1996) adalah:

- a. Menterjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan.
Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa

datang. Tujuan juga menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategik, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam sasaran strategik dengan ukuran pencapaiannya.

- b. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis *balanced scorecard*.

Dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja karyawan yang baik.

- c. Merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka.

Balanced scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, akan menggerakkan kearah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh.

- d. Meningkatkan Umpan balik dan pembelajaran strategis .

Proses keempat ini akan memberikan strategis learning kepada perusahaan. Dengan *balanced scorecard* sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek.

2.5. Keunggulan Balanced Scorecard

Dalam perkembangannya BSC telah banyak membantu perusahaan untuk sukses mencapai tujuannya. BSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih menitik beratkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible, namun perkembangan bisnis menuntut untuk mengubah pandangan bahwa hal-hal intangible juga berperan dalam kemajuan organisasi. BSC menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategi kontemporer, yang terdiri dari empat perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan strategis (Mulyadi, 2001, p.18) adalah mampu menghasilkan rencana strategis, yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) komprehensif, (2) koheren, (3) seimbang dan (4) terukur.

2.6. Perspektif Dalam Balanced Scorecard

Perspektif dalam BSC ada empat, yaitu:

1. Perspektif Keuangan

BSC memakai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam perusahaan untuk mengetahui laba. Tolak ukur keuangan saja tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan perubahan kekayaan yang diciptakan perusahaan atau organisasi (Mulyadi dan Johnny Setyawan, 2000). Balanced Scorecard adalah suatu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya ada keseimbangan antara keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan kinerja perusahaan terhadap keberhasilan. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan tersebut (Mulyadi dan Johnny Setyawan, 2000) sebagai berikut:

1. Peningkatan customer 'yang puas sehingga meningkatkan

laba (melalui peningkatan revenue).

2. Peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan sehingga meningkatkan laba (melalui peningkatan cost effectiveness). Peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi.

Di dalam Balanced Scorecard, pengukuran finansial mempunyai dua peranan penting, di mana yang pertama adalah semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan dan yang kedua adalah akan memberi dorongan kepada 3 perspektif yang lainnya tentang target yang harus dicapai dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Kaplan dan Norton, siklus bisnis terbagi 3 tahap, yaitu: bertumbuh (growth), bertahan (sustain), dan menuai (harvest), di mana setiap tahap dalam siklus tersebut mempunyai tujuan finansial yang berbeda. Growth merupakan tahap awal dalam siklus suatu bisnis. Pada tahap ini diharapkan suatu bisnis memiliki produk baru yang dirasa sangat potensial bagi bisnis tersebut. Untuk itu, maka pada tahap growth perlu dipertimbangkan mengenai sumber daya untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanan, membangun serta mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, investasi pada sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung terbentuknya hubungan kerja secara menyeluruh dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Secara keseluruhan tujuan finansial pada tahap ini adalah mengukur persentase tingkat

pertumbuhan pendapatan, dan tingkat pertumbuhan penjualan di pasar sasaran.

Tahap selanjutnya adalah sustain (bertahan), di mana pada tahap ini timbul pertanyaan mengenai akan ditariknya investasi atau melakukan investasi kembali dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang mereka investasikan. Pada tahap ini tujuan finansial yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya suatu usaha akan mengalami suatu tahap yang dinamakan harvest (menuai), di mana suatu organisasi atau badan usaha akan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya. Tujuan finansial dari tahap ini adalah untuk meningkatkan aliran kas dan mengurangi aliran dana.

2. Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target bagi organisasi atau badan usaha. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Selanjutnya apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru/jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka (Kaplan, dan Norton, 1996).

Produk dikatakan bernilai apabila manfaat yang diterima produk lebih tinggi daripada biaya perolehan (bila kinerja produk semakin mendekati atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dan dipersepsikan pelanggan). Perusahaan terbatas untuk memuaskan potential customer sehingga perlu melakukan segmentasi pasar untuk melayani

dengan cara terbaik berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada. Ada 2 kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu:

1. Kelompok pengukuran inti (icore measurement group).

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. Dalam kelompok pengukuran inti, kita mengenal lima tolak ukur, yaitu: pangsa pasar, akuisisi pelanggan (perolehan pelanggan), retensi pelanggan (pelanggan yang dipertahankan), kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan.

2. Kelompok pengukuran nilai pelanggan {customer value proposition}.

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk/jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan harapan para pemegang saham melalui financial returns (Simon, 1999). Tiap-tiap perusahaan mempunyai seperangkat proses penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, Kaplan dan Norton (1996) membaginya dalam 3 prinsip dasar, yaitu:

1. Proses inovasi

Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Tetapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Di dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas dua komponen, yaitu: identifikasi keinginan pelanggan, dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil inovasi dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka produk tidak akan mendapat tanggapan positif dari pelanggan, sehingga tidak memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan bahkan perusahaan harus mengeluarkan biaya investasi pada proses penelitian dan pengembangan.

2. Proses operasi

Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari saat penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke pelanggan. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien, dan tepat waktu. Proses ini, berdasarkan fakta menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja sebagian besar organisasi.

3. Pelayanan purna jual

Adapun pelayanan purna jual yang dimaksud di sini, dapat berupa garansi, penggantian untuk produk yang rusak, dll.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, dan untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk/jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu: sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu badan usaha harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu: meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi, serta menata ulang prosedur yang ada.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu:

1. Kapabilitas pekerja

Kapabilitas pekerja adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen:

a. Kepuasan pekerja

Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggungjawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen. Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja

adalah keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, pengakuan, akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif, serta dukungan dari atasan.

b. Retensi pekerja

Retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan. Di mana kita mengetahui pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi, keluarnya seorang pekerja yang bukan karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intellectual capital dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover di perusahaan.

c. Produktivitas pekerja

Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk menghasilkan output tersebut.

2. Kapabilitas sistem informasi

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

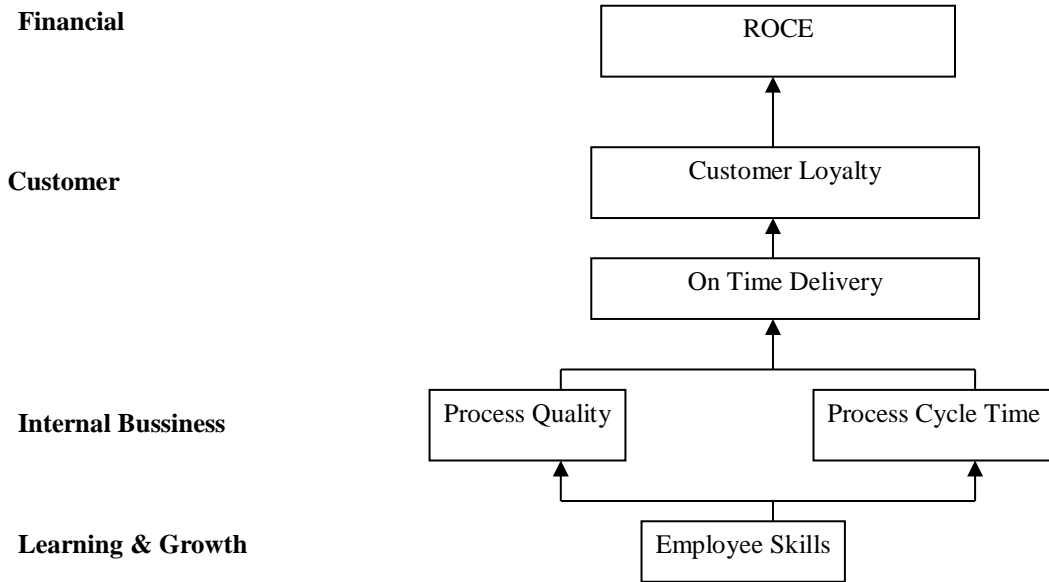
3. Iklim organisasi yang mendorong

timbulnya motivasi, dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2.7. Hubungan Ke – 4 Perspektif



Gambar 1

Hubungan antara empat Perspektif dalam Balanced Scorecard

pertimbangan tertentu Sugiyono (2009).

3. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi seluruh pegawai di puskesmas Kota Palembang. Jumlah populasi penelitian adalah jumlah pegawai PUSKESMAS se kota Palembang yakni 185 orang, dengan sampel penelitian 65 orang.

Penentuan besaran sampel dari populasi tertentu dengan rumus *Slovin* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n= besaran sampel
- N=besaran populasi
- e= nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

3.1. Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini

3.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 sumber yaitu melalui data Primer yang memberikan jawaban pilihan kepada responden atas butir-butir pernyataan yang diajukan dengan menggunakan kuesioner atau angket. Jawaban-jawaban responden ini berskala dan mempunyai gradasi (skala Likert) untuk kepentingan analisis secara kuantitatif dan diberi skor, yang dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang responden tentang fenomena sosial. Menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya pada puskesmas, serta melakukan wawancara langsung kepada beberapa pegawai yang ada di puskesmas yang

memiliki pengetahuan yang baik tentang puskesmas.

3.3. Teknik Analisis Data

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kuesioner yang nantinya dipergunakan untuk mengukur kepuasan karyawan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang benar-benar obyektif, yang dikenal dengan istilah validitas. Selain itu perlu juga diuji konsistensinya yang dikenal dengan istilah reliabilitas. Validitas dan reliabilitas merupakan dua syarat dalam menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara (Ghozali, 2006). Pengujian instrument penelitian dengan menggunakan uji validasi dengan menghitung korelasi menggunakan teknik korelasi *Product moment* sebagai berikut (sugiono, 1999: 183).

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi
 - x = Variabel Independen
 - y = Variabel dependen
 - n = Jumlah sampel
- Tarif signifikan 10%

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Ghozali, 2006); a) *One shot* atau pengukuran sekali saja. Di sini

pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alfa* (α). Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alfa > 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan menggunakan metode *one shot* atau pengukuran sekali saja, yaitu dengan uji statistik Cronbach Alfa. Variabel dikatakan reliabel, jika *Cronbach alpha* $> 0,6$ dan uji selanjutnya dapat dilanjutkan karena angket dinyatakan reliabel. a) Analisis kuantitatif, Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 8). Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (sugiyono, 2012:7), b) Analisis kualitatif, Analisis kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2012:13). Data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda (Riduan, 2003; 5-7).

3.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Coding* yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

menginventarisasi dan memberikan kode angka baik pada data primer maupun data sekunder, kemudian penelitian ini juga menggunakan *Scoring* yang memberikan skor pada data-data sekunder dan primer yang telah diberi kode, dan kemudian memberikan nilai serta bobot pada data tersebut. Pemberian skor tersebut dilakukan pada data yang berkaitan dengan variabel-variabel pengukuran di dalam *Balance Scorecard* yang menganalisis dan menginterpretasikan kinerja puskesmas Kota Palembang secara keseluruhan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah diperoleh skor dan bobot hasil pengukuran dari semua variabel, dan selanjutnya menentukan skor dan bobot dari kinerja secara keseluruhan sehingga dapat diketahui apakah kinerja organisasi baik atau tidak.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode statistik deskriptif dimana metode tersebut menjabarkan aspek-aspek secara tabel yang berkaitan dengan dimensi penelitian yang meliputi aspek-aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Hasil pendapat dari responden tersebut akan di susun dan disajikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya akan di analisis. Analisis dari data yang telah terkumpul akan dilakukan distribusi frekuensi secara kualitatif dan kuantitatif, analisis tersebut meliputi kinerja Pembelajaran dan Pertumbuhan. Pengukuran kinerja Pertumbuhan dan Pembelajaran menggunakan indikator tingkat pemahaman pegawai dan sistem informasi, tingkat kepuasan kerja pegawai, dan tingkat motivasi dan pemberdayaan pegawai. Analisis tersebut dilakukan dengan cara melakukan tabulasi atas pendapat responden dan selanjutnya dianalisis dengan skala likert.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan rentang skala suatu spek kinerja dilakukan rentang kriteria. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pada rentang skala manakah keputusan yang dihasilkan. Tahap proses analisis rentang kriteria adalah dengan cara menentukan rentang skor terendah dan tertinggi dengan cara mengalihkan jumlah sampel dengan bobot paling rendah dan paling tinggi, kemudian menentukan rentang skala dari setiap kriteria, menentukan skala penilaian setiap kriteria, dan menentukan kriteria keputusan. Secara sistematis, perhitungan rentang skala menggunakan rumus dengan persamaan:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{Rt - Rr}{M}$$

Dimana:

RS = Rentang Skala

Rt = Rentang Tertinggi

Rr = Rentang terendah

M = Jumlah Alternatif Jawaban

4. PEMBAHASAN

Evaluasi implementasi kinerja pada Puskesmas Kota Palembang ini dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaiannya berdasarkan uji validitas dan uji realibilitas. Kedua alat tersebut menggunakan kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan prospektif pembelajaran dan pertumbuhan (*Learning and Growth*). Data kuesioner tersebut selanjutnya disusun melalui suatu instrumen penilaian untuk dihitung tingkat kesesuaiannya pada tiap tahap evaluasi dengan melakukan skoring, dari hasil skoring tersebut kemudian dapat dihitung tingkat implementasi kinerja pada masing-masing Puskesmas di Kota Palembang. Hal ini bertujuan untuk menentukan tingkat kinerja di Puskesmas tersebut. Penilaian kinerja yang sudah sesuai akan berdampak pada kualitas Puskesmas terutama dalam rangka

melayani kesejahteraan masyarakat dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk menguji kevalidan dari data yang sudah di peroleh oleh penulis, penulis menggunakan analisis dengan SPSS untuk menguji validitas dan reabilitas instrumen.

Berikut dihasilkan Pengelompokan Responden Berdasarkan Gender dan Usia.

Statistics

		Pengelompokan Responden Berdasarkan Gender	Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia
N	Valid	126	123
	Missing	0	3

Pengelompokan Responden Berdasarkan Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	34	27,0	27,0	27,0
	Perempuan	92	73,0	73,0	100,0
	Total	126	100,0	100,0	

Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 Tahun	40	31,7	32,5	32,5
	25 - 35 Tahun	39	31,0	31,7	64,2
	36 - 45 Tahun	14	11,1	11,4	75,6
	45 Tahun >	30	23,8	24,4	100,0
	Total	123	97,6	100,0	
Missing	System	3	2,4		
Total		126	100,0		

Dari data yang sudah di jelaskan pada tabel diatas, penulis dapat menguji data tersebut dengan uji validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pada variabel Tingkat Persepsi Masyarakat dan Tingkat Harapan Masyarakat besarnya df (*degree of freedom*) yaitu jumlah sampel dan jumlah konstruknya adalah 60 diperoleh dari (df) = n-k dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0,2500.

Jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada setiap butir pertanyaan) yang dilihat pada tabel *correct Item-Total Correlation*, maka pertanyaan tersebut dikatakan **Valid**.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. Tingkat Persepsi Masyarakat

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	58,0323	59,540	,443	,905
p2	57,9677	58,032	,504	,903
p3	58,1129	60,528	,349	,907
p4	58,3710	56,958	,518	,903
p5	58,7258	57,350	,390	,910
p6	58,2903	56,078	,630	,899
p7	58,1452	56,192	,693	,897
p8	58,3226	55,271	,709	,896
p9	58,2258	55,981	,710	,897
p10	58,2258	56,801	,706	,897
p11	58,2258	58,276	,578	,901
p12	58,1613	55,842	,693	,897
p13	58,2581	57,441	,646	,899
p14	58,1613	58,826	,425	,906
p15	58,1774	53,853	,759	,894
p16	58,2903	55,652	,687	,897

2. Tingkat Harapan Masyarakat

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
h1	65,0645	62,422	,515	,936
h2	65,2258	62,604	,503	,936
h3	65,2581	61,178	,608	,934
h4	65,2903	62,013	,499	,937
h5	65,3387	60,129	,591	,935
h6	65,0806	59,682	,763	,930
h7	65,1452	59,405	,745	,931
h8	65,1452	58,618	,821	,929
h9	65,2581	60,031	,719	,931
h10	65,1613	58,006	,781	,929
h11	65,1935	61,864	,568	,935
h12	65,1129	60,430	,667	,932
h13	65,0806	60,174	,664	,933
h14	65,0323	60,524	,703	,932
h15	65,1613	59,515	,766	,930
h16	65,1935	58,224	,792	,929

Sementara itu, pada variabel Tingkat Kepuasan Pegawai besarnya *df* (*degree of freedom*) yaitu jumlah sampel dan jumlah konstraknya adalah 62 diperoleh dari $(df) = n - k$ dengan alpha 0,05 didapat *r* tabel 0,2461. Pada kasus ini terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid, dikarenakan *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel, dimana seharusnya *r* hitung harus lebih besar dari *r* tabel. Sehingga pada kasus ini dilakukan pengujian ulang.

3. Tingkat Kepuasan Pegawai

Item-Total Statistics (data tidak valid)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
k1	73,1250	67,794	,205	,843
k2	73,2344	65,611	,295	,840
k3	72,9219	64,994	,478	,831
k4	72,8125	64,187	,568	,828
k5	73,1406	66,059	,283	,840
k6	74,2656	66,547	,177	,849
k7	73,0313	61,205	,614	,824
k8	72,9688	64,602	,541	,829
k9	72,9844	65,889	,417	,834
k10	72,7188	64,777	,498	,831
k11	72,9219	66,486	,430	,834
k12	73,1875	61,806	,636	,823
k13	73,1250	62,873	,658	,824
k14	73,3438	63,086	,555	,827
k15	73,2188	63,475	,528	,829
k16	73,1250	65,667	,366	,836
k17	72,7656	64,468	,476	,831
k18	73,2813	64,015	,518	,829
k19	72,7031	66,371	,345	,837
k20	72,9375	67,806	,137	,849

Tabel dibawah ini merupakan hasil dari pengujian ulang untuk memvalidasi

variabel Tingkat Kepuasan Pegawai, sehingga data yang diperoleh sekarang adalah **Valid**. Karena r hitung sudah lebih besar dari r

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
k2	62,7500	54,667	,268	,867
k3	62,4375	53,679	,487	,855
k4	62,3281	53,081	,564	,852
k5	62,6563	55,340	,236	,868
k7	62,5469	49,934	,645	,847
k8	62,4844	52,952	,588	,852
k9	62,5000	54,095	,465	,856
k10	62,2344	53,103	,543	,853
k11	62,4375	54,758	,472	,856
k12	62,7031	50,656	,655	,847
k13	62,6406	51,504	,692	,847
k14	62,8594	51,742	,580	,851
k15	62,7344	52,611	,508	,854
k16	62,6406	54,551	,350	,862
k17	62,2813	53,285	,476	,856
k18	62,7969	53,434	,468	,856
k19	62,2188	55,094	,337	,862

b) Uji Reliabilitas

Pada kasus ini diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 60. Maka dengan

demikian variabel Tingkat Persepsi Masyarakat, Tingkat Harapan Masyarakat dan Tingkat Kepuasan Pegawai dapat dikatakan reliabel (konsisten).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Cronbach's Alpha	N of Items
,841	20

1. Tingkat Persepsi Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,906	16

2. Tingkat Harapan Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,936	16

3. Tingkat Kepuasan Pegawai

Reliability Statistics

N	Pertanyaan
0	

b. Kuesioner

Indikator pertama mengenai tingkat pembelajaran dan pertumbuhan pegawai ada 20 pertanyaan yang diajukan kepada 64 responden tentang kemandirian, pendelegasian wewenang, kepercayaan, kemampuan personal, kondisi kerja, sanksi/penghargaan, kondisi kerja yang dapat dilihat dalam tabel berikut: Rangkuman pendapat responden tentang Tingkat Pembelajaran dan Pertumbuhan di Puskesmas Kota Palembang.

TINGKAT KEPUASAN

	SP	P	CP	TP	STP	TOTAL
--	----	---	----	----	-----	-------

Dalam melaksanakan tugas apakah Bapak/Ibu/Saudara?

1	Pegawai selalu sibuk sepanjang waktu.	12	33	14	5	0	100 %
		18,75 %	51,562 %	21,875 %	7,8125 %	0 %	
2	Pegawai diberi kesempatan bekerja sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan.	11	34	10	7	2	100 %
		17,187 %	53,125 %	15,625 %	10,937 %	3,125 %	
3	Pegawai diberikan kesempatan untuk ikut melakukan pekerjaan yang baru atau ikut memecahkan permasalahan.	16	35	11	2	0	100 %
		25 %	54,687 %	17,187 %	3,125 %	0 %	

4	Kesempatan menjadi bagian penting dalam kelompok kerja.	20 31,25 %	33 51,562 5 %	9 14,062 5 %	2 3,125 %	0 0 %	100 %
5	Kemampuan supervisi/atasan langsung dalam membuat keputusan.	14 21,875 %	31 48,437 5 %	14 21,875 %	3 4,6875 %	2 3,125 %	100 %
6	Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bathin Bapak/Ibu/Saudara.	6 9,375 %	9 14,062 5 %	17 26,562 5 %	23 35,937 5 %	9 14,062 5 %	100 %
7	Pekerjaan saat ini dapat memberikan jaminan kehidupan nantinya.	21 32,812 5 %	21 32,812 5 %	18 28,125 %	4 6,25 %	0 0 %	100 %
8	Kesempatan membantu rekan menyelesaikan pekerjaan rekan kerja.	14 21,875 %	36 56,25 %	13 20,312 5 %	1 1,5625 %	0 0 %	100 %
9	Kesempatan untuk membantu rekan kerja apa yang seharusnya dilakukan.	14 21,875 %	34 53,125 %	16 25 %	0 0 %	0 0 %	100 %
10	Kesempatan melakukan pekerjaan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki.	25 39,812 5 %	30 46,875 %	8 12,5 %	1 1,5625 %	0 0 %	100 %

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

11	Penerapan kebijakan kantor dalam kegiatan sehari-hari.	13 20,312 5 %	40 62,5 %	11 17,187 5 %	0 0 %	0 0 %	100 %
12	Imbalan yang diterima jika dikaitkan dengan beban pekerjaan yang dilakukan.	11 17,1875 %	32 50 %	17 26,562 5 %	3 4,6875 %	1 1,5625 %	100 %
13	Kesempatan untuk berkembang terhadap pekerjaan saat ini.	11 17,187 5 %	34 53,125 %	17 26,562 5 %	2 3,125 %	0 0 %	100 %
14	Kebebasan menggunakan penilaian Bapak/Ibu/Saudara sendiri.	8 12,5 %	32 50 %	19 29,687 5 %	4 6,25 %	1 1,5625 %	100 %
15	Kesempatan untuk menggunakan cara/metode sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan.	9 14,062 5 %	36 56,25 %	15 23,437 5 %	2 3,125 %	2 3,125 %	100 %
16	Kondisi kerja (kenyamanan/fasilitas) saat ini.	14 21,875 %	26 40,625 %	22 34,375 %	2 3,125 %	0 0 %	100 %
17	Keharmonisan kerja sesama rekan kerja.	25 39,062 5 %	26 40,625 %	11 17,187 5 %	2 3,125 %	0 0 %	100 %

18	Penghargaan atau sanksi yang diterima jika menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau buruk.	11 17,187 5 %	22 34,375 %	29 45,312 5 %	2 3,125 %	0 0 %	100 %
19	Perasaan puas jika telah menyelesaikan pekerjaan tersebut.	27 42,187 5 %	26 40,625 %	10 15,625 %	1 1,5625 %	0 0 %	100 %
20	Jam kerja yang dirasa sudah sesuai dengan standar yang berlaku.	20 31,25 %	32 50 %	6 9,375 %	2 3,125 %	4 6,25 %	100 %

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Keterangan jawaban dari setiap pertanyaan:

1. Tanggapan Responden terhadap Kesibukan Pegawai sepanjang waktu menyatakan bahwa pegawai yang bekerja di Puskesmas Kota Palembang memiliki intensitas kesibukan yang tinggi dalam melayani pasien atau masyarakat yang berkunjung ke puskesmas tersebut.
2. Tanggapan Responden terhadap pegawai yang diberi kesempatan bekerja sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan menyatakan persetujuan dalam tanggapan ini. Pernyataan ini menjelaskan bahwa pegawai yang menyelesaikan pekerjaannya sendiri bukan karena adanya kesempatan, melainkan karena adanya

ketidak seimbangan antara banyaknya pasien dengan pegawai yang bekerja di puskesmas dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Tanggapan Responden terhadap pegawai yang diberikan kesempatan untuk ikut melakukan pekerjaan yang baru atau ikut memecahkan permasalahan menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini dan menganggap bahwa suatu keharusan bagi pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan yang baru agar kehidupan di Puskesmas dapat berjalan dengan baik.
4. Tanggapan responden terhadap kesempatan menjadi bagian penting dalam kelompok kerja menyatakan persetujuan dengan pernyataan tersebut karena dengan kesibukan yang cukup tinggi, kesempatan bekerja sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- organisasi dapat menjadikan seorang sebagai bagian penting dalam kelompok kerja.
5. Tanggapan responden terhadap Kemampuan Supervisi/atasan menyatakan responden sangat setuju dan setuju apabila kemampuan supervisi/atasan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya. Kemampuan atasan yang baik dan bijak mendorong pegawai untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi bukan karena imbalan , gaji dan fasilitas lainnya, melainkan sosok supervisi/atasan yang bisa menjadi motivator para pegawai untuk bekerja lebih baik.
 6. Tanggapan responden terhadap Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bathin Bapak/Ibu/Saudara menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
 7. Tanggapan responden terhadap Pekerjaan saat ini dapat memberikan jaminan kehidupan nantinya menyatakan sangat puas dan puas bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan jaminan untuk kehidupan nantinya.
 8. Tanggapan terhadap Kesempatan membantu rekan menyelesaikan pekerjaan rekan kerja menyatakan sangat dan puas apabila diberi kesempatan untuk membantu rekan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
 9. Tanggapan responden terhadap kesempatan untuk membantu rekan kerja apa yang seharusnya dilakukan menyatakan sangat puas, puas dan cukup puas apabila diberi kesempatan untuk membantu rekan kerja apa yang harusnya dilakukan. Karena dengan salingmembantu membuat pekerjaan akan semakin mudah dan cepat diselesaikan.
 10. Tanggapan responden terhadap Kesempatan melakukan pekerjaan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki menyatakan bahwa responden sangat dan puas apabila melakukan pekerjaan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, pekerjaan akan lebih terarah dan rapih apabila dikerjakan dengan kemampuan sendiri.
 11. Tanggapan responden terhadap Penerapan kebijakan kantor dalam kegiatan sehari-hari menyatakan bahwa telah dilakukan penerapan kebijakan kantor dalam kegiatan sehari-hari dilakukan Puskesmas Kota Palembang sebanyak 100 % responden sangat dan puas dengan adanya kebijakan yang dilakukan pada Puskesmas Kota Palembang. Kebijakan tersebut telah dilakukan sebaik-baiknya sehingga membuat pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ada.
 12. Tanggapan responden terhadap Imbalan yang diterima jika dikaitkan dengan beban pekerjaan yang dilakukan menyatakan puas dan sangat puas apabila pekerjaan yang dilakukan dihargai dengan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.
 13. Tanggapan responden terhadap Kesempatan untuk berkembang terhadap pekerjaan saat ini menyatakan jika responden sangat puas dan puas mendapatkan kesempatan untuk berkembang terhadap pekerjaannya. Karena dengan adanya kesempatan tersebut, membuat para pegawai dapat

- memberikan ide yang baru untuk memajukan Puskesmas tersebut.
14. Tanggapan responden terhadap Kebebasan menggunakan penilaian Bapak/Ibu/Saudara sendiri menyatakan sangat dan puas bahwa menggunakan penilain sendiri dapat berguna untuk organisasi setelah melalui koordinasi dengan pejabat pembuat kebijakan.
 15. Tanggapan responden terhadap Kesempatan untuk menggunakan cara/metode sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan menyatakan puas dan sangat puas dengan adanya kesempatan untuk menggunakan cara/metode sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya.
 16. Tanggapan responden terhadap Kondisi kerja (kenyamanan/fasilitas) saat ini menyatakan cukup, puas dan sangat puas dengan kondisi kerja dimana telah memenuhi semua harapan yaitu adanya fasilitas dan kenyamanan yang mampu meningkatkan dan menunjukkan kemampuan personal.
 17. Tanggaan responden terhadap Keharmonisan kerja sesama rekan kerja menyatakan cukup, puas dan sangat puas dengan pernyataan tersebut karena kenyataan yang berlangsung selalu ada keharmonisan dengan rekan kerja meskipun selalu ada persaingan diantaranya, namun hal itu tidak menjadi halangan untuk terjadinya keharmonisan dalam lingkungan pekerjaan.
 18. Tanggapan responden terhadap Penghargaan atau sanksi yang diterima jika menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau buruk menyatakan cukup, puas dan sangat puas bahwa terdapat penghargaan atau sanksi yang seimbang.
 19. Tanggapan responden terhadap Perasaan puas jika telah menyelesaikan pekerjaan tersebut menyatakan cukup, puas dan sangat puas dengan tanggapan ini. Karena apabila pegawai telah menyelesaikan pekerjaannya akan timbul rasa puas dari dirinya.
 20. Tanggapan responden terhadap Jam kerja yang dirasa sudah sesuai dengan standar yang berlaku menyatakan setuju dan snagat setuju dengan jumlah jam yang sudah sesuai dengan standar yang ada. Jam kerja pada Puskesmas memiliki standar yang sama dengan pekerjaan yang lainnya, yaitu 8 jam per hari. Dan pada puskesmas di Kota Palembang standar tersebut dijalankan sengan benar, sehingga pegawai merasa sudah sesuai dengan standar yang berlaku.
- Secara garis besar, puskesmas di kota palembang telah berusaha memberikan yang terbaik untuk kepuasan kerja bagi pegawai sehingga dapat memberikan kinerja yang terbaik. Sebagai Puskesmas yang terdiri dari banyak orang yang bekerja sama secara teratur dan terancam dibawah koordinasi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan maka tidak semuanya berjalan denan sempurna seperti yang diharapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diolah menggunakan SPSS ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja Puskesmas di Palembang cukup baik, yang ditunjukkan oleh hasil analisis perspektif individu maupun dari alat-alat penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif Balance Scorecard merupakan metode pengukuran kinerja yang sangat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

baik digunakan karena Balance Scorecard memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih mengutamakan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan kinerja Puskesmas di Palembang dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan metode Balance Scorecard adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti objek lain maupun memperluas sampel penelitian seperti tingkat provinsi dan menggunakan keseluruhan perspektif yang ada dalam metode *Balanced Scorecard*.. Sedangkan untuk pemerintah, diharapkan agar lebih memperhatikan pegawai yang ada di lingkungannya terutama di Dinas Kesehatan yang diwakili oleh PUSKESMAS. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan *reward* yang sepantasnya sesuai dengan hasil kinerja pegawainya tersebut dalam berbagai perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kota Palembang. 2015. *Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Palembang*. Kota Palembang.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ina-Respond. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN.
- Kaplan, R. dan D. Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, edisi satu*. United States Of America : Harvard Business School Press.
- Mulyadi (1999), *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan*, Edisi satu, Yogyakarta : Adiya Media
- Riduwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Simons, Robert. 1982. *Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy*.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Witthaker, James B. 1995. *The Government Performance and result act of 1993; Amndate for strategic planning and performance measurement*. Arlington, Virginia, USA: Educational Service Institute.

**ANALISIS PENGARUH DISKRESI AKRUAL
TERHADAP PENDAPATAN: UPAYA INTERPRETASI ATAS
IMPLEMENTASI BASIS AKUNTANSI AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH**

Abdul Rohman

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang

Email: *abdulrohman2013@gmail.com*

ABSTRACT

The aim of this research would like to see the implementation of accrual accounting basis on Local Government and wanted to investigate whether there is influence of discretionary accruals due to the local government revenue. Our study is a continuation of the research study before we did the research on the level of accrual in the financial statements of Local Government. This study uses a model approach Jones. Reports we examined, among others, the budget realization reports, operations statement (LO), balance sheets and statements of cash flows. With Jones model (1991) we examine the total accruals and then we went on to calculate the total effect of the accrual for factors such as changes in income, asset changes to get the value of discretionary accruals that exist in the financial statements of Local Government. Our results indicate that local governments have attempted to apply the accrual in accordance with existing regulations. The impact of the implementation of accrual showed abnormal discretion are worth negatif. This indicates that there's decreasing income.

Key Words: Accrual, Discretion, Revenues, Total of Accrual, Assets

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ingin melihat penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dan ingin meneliti apakah terdapat pengaruh akibat diskresi akrual terhadap pendapatan Pemerintah Daerah. Penelitian kami merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelum yang kami lakukan terhadap penelitian mengenai tingkatan akrual pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Jones (1991). Laporan yang kami teliti antara lain laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan neraca serta Laporan arus kas. Dengan model Jones maka kami meneliti total akrual kemudian kami melanjutkan dengan menghitung pengaruh total akrual terhadap beberapa faktor seperti perubahan pendapatan, perubahan asset untuk mendapatkan nilai diskresi akrual yang ada pada suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan akrual sesuai dengan peraturan yang ada. Dampak dari implementasi akrual memperlihatkan adanya abnormal discretion yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan adanya decrease income.

Kata Kunci: Akrual, Diskresi, Pendapatan, Total Akrual, Aset

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Paradigma baru “*New Publik Management*” atau (NPM) telah merambah dan digunakan di negeri kita. Salah satu cirinya adalah memasukkan apa yang dianggap sebagai “*the best practice*” di sektor privat ke sektor publik. Kalau dilakukan penelusuran lebih mendalam maka aspek manajemen keuangan yang dilakukan oleh pemerintah telah memiliki ciri-ciri NPM pada berbagai tahapan manajemen keuangan. Tahapan pengelolaan keuangan yang menggunakan NPM mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Maka tidak heran bila di kebangkitan NPM di Indonesia, semangat *re-inventing* sektor publik secara umum, juga merambah di sektor pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satu ciri yang saat ini menonjol dan juga menjadi ciri NPM adalah penggunaan akuntansi pada proses pelaporan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah telah berubah dari model administrasi menjadi manajemen saintifik. Hal ini dicirikan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan sebagai wujud akuntabilitasnya. Akuntansi yang digunakan telah mengalami perubahan dalam penggunaan model basis akuntansi untuk tujuan pelaporan keuangan. Pemerintah telah memulai dari basis kas, kas menuju akrual hingga saat ini basis akrual. Regulasi yang mendasari penggunaan basis kas yaitu UU 18 tahun 1965 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1974, sementara itu regulasi yang mendasari penggunaan basis akrual antara lain: UU nomor 32 tahun 2004, UU nomor 33 tahun 2004, UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, UU nomor 25 tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004. Basis kas mendasarkan pengakuan dan pencatatan transaksi pada penerimaan

dan pengeluaran kas untuk pelaporan keuangan. Sementara kas menuju akrual mendasarkan pengakuan dan pencatatan transaksi pada kas dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pada kelompok akun riel atau akun neraca. Akrual mendasarkan pengakuan dan pencatatan transaksi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas sudah diterima atau sudah dibayarkan atau belum. Perpindahan basis akuntansi ditujukan dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan nilai informasi atas pelaporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Selain itu juga berguna membantu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel secara khusus pada akun-akun akrual seperti misalnya, beban depresiasi/amortisasi, beban hutang, kerugian piutang dan lain sebagainya.

Penggunaan basis akuntansi akrual adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan dipemerintahan dengan berbasis informasi dari pelaporan keuangan yang mendasarkan dirinya pada keterjadian suatu peristiwa ekonomi pemerintah. Hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Negara-negara yang telah mengadopsi akrual umumnya berada di garis depan reformasi manajemen publik. Reformasi ini bertujuan untuk mendukung manajemen Pemerintah bertanggung jawab atas hasil dan / atau output sementara terhadap upaya kontrol pada input. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa manajemen harus bertanggung jawab untuk semua beban yang terkait dengan hasil dan / atau output yang dihasilkan, bukan hanya pengeluaran uang tunai. Hanya akrual yang memungkinkan untuk menangkap beban penuh, sehingga mendukung efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan oleh manajemen Pemerintah. Singkatnya, ketika para manajemen pemerintah diberikan fleksibilitas untuk mengelola sumber daya mereka sendiri (input), mereka harus memiliki informasi

yang diperlukan untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu penerapan akrual merupakan bagian inheren dari reformasi yang lebih luas.

Implementasi akuntansi sebagai model pencatatan dan pelaporan dengan basis akuntansi tertentu menunjukkan adanya perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta. Pemerintah dan pemerintah daerah serta pemerintah pada tingkat desa jika dibandingkan dengan organisasi privat atau swasta memiliki perbedaan dalam penerapan akuntansi pada awalnya. Penerapan akuntansi di swasta sudah memiliki waktu dan pengalaman yang sudah panjang sementara di sektor publik khususnya pemerintah belum memiliki pengalaman yang panjang dengan basis akrual. Pemerintah menerapkan akuntansi menggunakan teknik akuntansi yang berbeda dengan swasta antara lain akuntansi pemerintah menggunakan dasar transaksi yang telah dianggarkan (*Budget Accounting*), adanya jurnal anggaran yang digunakan pada pemerintah juga menunjukkan adanya perbedaan dengan swasta. Selain itu perbedaan yang ada antara lain dari sisi laporan keuangan pemerintah juga memiliki variasi yang lebih banyak dibandingkan dengan swasta. Struktur akun juga menjadi lebih banyak di pihak pemerintah daripada di swasta.

Penerapan basis akrual memiliki manfaat baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Keuntungan dari sebuah penerapan sistem akuntansi berbasis akrual atau *accrual accounting sistem* adalah adanya manfaat dalam segi peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya, kualitas pembuatan kebijakan yang lebih baik, kontrol yang lebih baik terhadap aset, identifikasi *liabilities* yang lebih baik, peluang untuk komparasi sektor *private-public, financial management* akan menjadi *central concern*, kualitas *management of cash*

flow dan current assets/liabilities yang lebih baik.

Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Indonesia didahului dengan adanya kelahiran berbagai regulasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan keluarnya paket UU Keuangan: UU No 17/2003, UU No 1/2004 dan UU No 15/2004. Salah satu amanat UU No 17/2003 adalah implementasi *accrual accounting* di Indonesia, dengan batasan maksimal dilaksanakan tahun 2008. Tenggat waktu yang telah dimanahkan undang-undang tersebut ternyata telah dilewati oleh pemerintah. Hal ini bukan berarti sebuah kegagalan, karena masih ada harapan dan pada saat ini telah berjalan.

Disamping adanya paket peraturan keuangan di atas pemerintah juga telah melahirkan peraturan khusus mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (berbasis akrual). Lahirnya peraturan mengenai implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah dan pemerintah daerah tersebut memiliki berbagai macam implikasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik agar tidak gagal dalam implementasinya. Disamping secara internal pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai dorongan terhadap upaya implementasi akuntansi berbasis akrual, terdapat juga dorongan dari luar negeri mengenai implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini.

Implementasi akuntansi pada pemerintah dan pemerintah daerah di dunia internasional mengarah pada akuntansi berbasis akrual. Hal ini ditunjukkan adanya kecenderungan dunia internasional terhadap pemakaian basis

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

akuntansi akrual pada lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah (Chan J. L., 2010). Saat ini, implementasi *accrual accounting* diyakini secara mendunia sebagai cara membawa pemerintahan lebih akuntabel dan transparan, sebagaimana ramai dikemukakan oleh jurnal-jurnal ilmiah dan sejenisnya tentang “urgency” *accrual accounting*. Akuntabel dan transparan dalam penggunaan *resource* dan kebijakan oleh pemerintah guna menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas negara. Lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF dewasa ini merekomendasikan *accrual accounting* di negara-negara anggotanya (Bontas & Petre, October 2009). Kepentingan komparasi laporan keuangan antar negara juga menjadi salah satu alasan rekomendasi tersebut. Hal ini juga didukung oleh adanya pandangan bahwa informasi akrual merupakan alat manajemen keuangan yang sangat efektif yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pada sektor publik serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengendalian administrasi dalam proses pengelolaan sumberdaya pemerintah (PWC, 2014).

Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang meningkat bagi pengguna dan pemangku kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat semakin memahami peran pemerintah yang semakin besar saat ini. Pemerintah menjadi roda pertumbuhan pembangunan di negara kita. Pemerintah mengelola triliunan rupiah sumberdaya dengan berbagai macam bentuk. Pemerintah harus transparan kepada setiap masyarakat baik pembayar pajak atau masyarakat lainnya. Masyarakat harus menerima informasi yang benar, valid, dan terpercaya serta tepat waktu. Untuk itu pemerintah perlu punya kewenangan dalam pengelolaan

keuangan. Kewenangan (diskresi) terkait dengan pelaporan memberikan pemerintah diskresi dalam penyusunan laporan keuangan antara lain dengan mengatur berbagai kebijakan akuntansi termasuk didalamnya kebijakan mengenai basis akuntansi yaitu akrual atau diskresi akrual.

Berbagai latar belakang diatas membuat kami menjadi tertarik untuk meneliti kewenangan pemerintah dalam pelaporan keuangan dengan adanya kewenangan diskresi akrual pada manajemen pemerintah daerah. Diskresi akrual merupakan kewenangan pemerintah daerah (manajemen pemerintah daerah) untuk menentukan seberapa besar penerapan tingkatan akrual pada pelaporan pemerintah dan pemerintah daerah. Tingkatan akrual dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu *mild accrual*, *moderate accrual*, *strong accrual*, *super accrual*, dan *radical accrual*. Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengelola keuangannya dengan kewenangan yang dimiliki baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam proses penyusunan laporan atau pelaporan keuangannya. Diskresi atau kewenangan yang dimiliki salah satunya adalah diskresi akrual. Diskresi akrual merupakan kewenangan manajemen pemerintah daerah untuk menerapkan akrual dalam proses pelaporan keuangan. Pemerintah daerah menerapkan diskresi akrual didorong selain karena aspek regulasi tapi juga didorong berbagai motif lainnya. Tentunya pemerintah daerah tidak diperkenankan menerapkan diskresi akrual yang merugikan pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri. Manajemen dalam hal ini birokrat ataupun politikus memiliki berbagai motif untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan untuk kepentingan manajemen pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan asumsi tersebut maka kita harus dapat menganalisis apakah manajemen pemerintah daerah telah melakukan diskresi akrual yang menguntungkan

dirinya atau menguntungkan kita semua (publik) dengan menaikkan atau menurunkan pendapatan yang berdampak pada naik atau turunnya surplus atau defisit tahun berjalan.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian yang kami lakukan bermaksud untuk meneliti apakah kewenangan diskresi akrual yang dilakukan atau yang diambil oleh manajemen pemerintah daerah memiliki implikasi terhadap pendapatan pemerintah daerah? Selain itu, kami ingin melihat atau meneliti apakah pengaruh diskresi akrual akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap pendapatan pemerintah daerah?

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kerangka Teori

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian yang akan kami lakukan maka kami menyusun landasan teori yang terkait atau relevan dengan tujuan penelitian kami. Pemerintah telah melaksanakan perubahan yang sangat mendasar pada bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada penelitian ini yang kami bahas adalah aspek pelaporan. Pelaporan merupakan sistem yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencatat transaksi, melakukan posting dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Proses pencatatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan akuntansi. Akuntansi merupakan proses yang sistematis untuk mencatat dan menyusun laporan. Dalam pencatatan atau jurnal akuntansi menggunakan pendekatan *duality*, dan menggunakan basis akuntansi. Teknik pencatatan *duality* adalah pencatatan dengan dua sisi yaitu debit dan kredit. Basis akuntansi merupakan dasar pengakuan transaksi. Pemerintah telah melaksanakan berbagai basis akuntansi mulai dari kas, modifikasi dan akrual.

Selain itu beberapa alasan seperti peristiwa ekonomi dan politik mendorong pemerintah untuk beralih pada akrual antara lain Pemerintah membuat keputusan dan melakukan tindakan dengan konsekuensi melampaui periode berjalan, Pemerintah menerima kredit dan melanjutkan kredit, Pemerintah memiliki sumberdaya *non cash*, tidak ada hubungan antara pajak dan layanan pemerintah dalam jangka pendek pada tingkat individual, Para politisi memiliki insentif untuk menunda atau tidak terhadap suatu biaya (Chan J. L., 2008). Bagaimana reaksi akuntansi apakah akan menerapkan akrual? Jawabannya antara lain tidak meniadakan realitas yang ada, memahami sumberdaya sebagai asset, memahami obligasi sebagai kewajiban, mengusahakan ukuran kinerja atas sumberdaya yang dimiliki atau digunakan, memberi tekanan lebih terhadap pengungkapannya. Untuk memudahkan pengelolaan berbagai sumberdaya yang dikelola manajemen pemerintah daerah maka manajemen menerapkan berbagai kebijakan termasuk didalamnya kebijakan mengenai proses dan metode pencatatan.

Untuk memudahkan pengelolaan keuangan akuntansi menggunakan basis catatan dan metode pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Basis akuntansi merupakan metode yang digunakan disiplin akuntansi untuk mencatat transaksi atau peristiwa ekonomi dengan pendekatan disiplin akuntansi. Pendekatan yang kami maksud adalah cara atau teknik untuk melakukan pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi menggunakan metode *double entry bookkeeping* dengan prinsip *duality* atau pembukuan dua sisi yaitu debit dan kredit. Basis akuntansi terdapat beberapa diantaranya yaitu basis kas, basis akrual dan basis kas modifikasi serta basis akrual modifikasi. Basis kas mendasarkan pengakuan dan pencatatan pada dasar kas. Transaksi dicatat berdasarkan penerimaan kas dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pengeluaran kas. Basis akrual didasarkan pada terjadinya transaksi meski belum menerima kas atau mengeluarkan kas.

Akrual merupakan salah satu metode atau pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah pada saat ini. Pencatatan akuntansi berbasis akrual adalah pencatatan yang didasarkan dirinya *pada* terjadinya peristiwa ekonomi meskipun pemerintah daerah belum menerima kas atau mengeluarkan kas. Dengan metode ini menimbulkan potensi atau hak untuk menerima manfaat pada masa yang akan datang dengan mencatat pendapatan pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Selain itu dengan metode akrual pemerintah memiliki kewajiban pada masa yang akan datang karena pemerintah telah menerima manfaat saat ini. Dengan kata lain akan timbul kewajiban pada masa yang akan datang dengan beban yang timbul saat ini. Dengan menerapkan akrual pada berbagai aspek baik pendapatan, beban, asset, kewajiban dan lainnya maka kita dapat memahami tingkatan akrual yang diterapkan oleh manajemen pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Tingkatan akrual merupakan jenjang penerapan akrual yang dilakukan manajemen pemerintah daerah atas pelaksanaan diskresi akrual. Dengan menerapkan diskresi akrual maka tingkatan akrual akan menjadi berbeda-beda bagi berbagai pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga menyusun kebijakan akuntansi bagi pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. Setiap pemerintah daerah menyusun sendiri-sendiri dengan pedoman peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Dengan penyusunan kebijakan akuntansi yang relative berbeda maka akan ada kemungkinan keragaman dalam tingkatan akrual yang dilaksanakan. Tingkatan

akrual dalam literature yang ada dibedakan menjadi lima tingkatan yaitu *mild accrual, moderate accrual, strong accrual, super accrual, dan radical accrual* (Chan P. J., 2010). Semakin tinggi akrual maka akan semakin meragukan pengakuan aset dan kewajiban semakin bersifat estimasi dan bersifat *judgemental*, kurang dapat diandalkan, dan memiliki kemungkinan yg kurang relevan terhadap ukuran moneter serta kurang bermakna dalam hal pengungkapan (Chan J. L., 2008). Tingkatan akrual menjadi bervariasi antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya karena adanya diskresi akrual yang dimiliki oleh manajemen pemerintah daerah.

Discretionary accrual merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel, atau dengan kata lain, metode *discretionary accrual* memberikan peluang kepada manajemen untuk memperbaiki surplus (defisit) sesuai dengan keinginan manajemen pemerintah daerah. Diskresi akrual merupakan kewenangan manajemen pemerintah daerah untuk menerapkan basis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Makna diskresi akrual secara konseptual, adalah akrual yang nilainya ditentukan oleh kebijakan/diskresi manajemen. Diskresi akrual dianggap memiliki hubungan yang terpola dengan aspek-aspek lain organisasi (pemerintah daerah) seperti total akrual, pendapatan, piutang, *plant property and equipment (PPE)*. Namun demikian terkadang terdapat sejumlah nilai diskresi akrual yang tidak cocok dengan pola hubungannya dengan aspek-aspek tersebut. Nilai ini disebut diskresi akrual abnormal, yang sering digunakan sebagai proksi bahwa diskresi akrual telah “dimanipulasi.” Tujuan akhir manipulasi akrual diskresioner tersebut, tentu saja, adalah manipulasi angka laba atau, dengan kata lain, manipulasi laba.

Pendapatan pemerintah daerah dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/Daerah yang yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan ini berbasis kas. Pendapatan diakui ketika kas diterima. Sementara untuk belanja diakui manakala kas dibayarkan atau keluar. Pendapatan LRA dikelompokkan menjadi beberapa diantaranya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang syah. Secara teknis pendapatan LRA dilaporkan pada laporan LRA dan memiliki akun 4 (empat) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui berdasarkan akrual basis. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan Asli daerah – LO, pendapatan transfer-LO, dan lain-lain pendapatan yang syah – LO. Pendapatan LO secara teknis dilaporkan pada laporan Operasional (LO) dan memiliki akun 8 (delapan) serta menghasilkan surplus atau defisit LO. Manajemen Pemerintah Daerah melakukan "manipulasi" laba (surplus/defisit) laba tahun berjalan karena berbagai motif. Hal ini terjadi karena berbagai motif sebagaimana dijelaskan pada teori agensi.

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pemerintah. Keduanya, pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*) berasumsi bahwa agen mempertimbangkan kepentingannya dan memaksimalkannya pendapatan dan membagikan biaya atau menggunakan biaya agar tercapai laba yang menguntungkan pihak manajemen atau agen (Jensen & H.Meckling, 1976). Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*.

Principal mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Kontribusi teori *principal-agent* dalam pemerintah daerah mengasumsikan bahwa: (a) monopoli perilaku dibatasi oleh upaya masyarakat untuk memantau hasil kebijakan pemerintah daerah; (b) kebijakan pemerintah daerah mempengaruhi nilai aset pemerintah daerah (Bravo, 2002). Selain itu politisi, birokrat pemerintah daerah memiliki berbagai motif dalam melaksanakan diskresi akrual.

Teori pilihan publik mengasumsikan bahwa politisi dan birokrat pemerintah mengejar tujuan mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan preferensi mereka, yaitu, mereka memiliki perilaku (Mueller, 2003). Alasan untuk manajemen laba dapat dinyatakan dalam hal biaya baik kontraktual maupun berupa politik (Zimmerman, 1990). Seperti dalam penelitian lainnya, pada entitas sektor publik, manajemen pemerintah daerah dapat memiliki insentif berupa penggunaan pilihan akuntansi untuk berbagai kepentingan seperti menyamarkan kinerja keuangan yang buruk, manajemen kekurangan atau *insufficiencies* dana dalam pemberian pelayanan publik, dan menghindari kenaikan biaya layanan atau defisit, serta mencapai target kinerja yang diperkirakan keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Kami telah melakukan penelitian pada berbagai artikel di beberap negara yang terkait dengan tema penelitian kami. Hal ini kami lakukan karena penerelitian di dalam negeri relative masinh jarang yang terkait dengan tema yang kami angkat. Penelitian pertama yang menjadi rujukan penelitian kami adalah penelitian yang berjudul "*Cash Versus accrual accounting in publik sektor*" yang dilakukan oleh Andriana Tiron Tudor, Alexandra Mutiu dari University Babes Bolyai, Cluj Napoca , Romania pada

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

tahun 2006 (Tudor & Mutiu, 2006). Tujuan penelitian adalah menganalisis evolusi perpindahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual di sektor publik, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kasus akuntansi sektor publik di Rumania dan tanggapan terhadap pertanyaan:

1. Apakah perpindahan dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual akan membawa perubahan yang lebih baik?
2. Apakah Rumania akan memilih sistem tersebut atau menolak?

Hasilnya penelitian ini menunjukkan Rumania mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual bagi sektor publik sejak 2006, Bagi Rumania disimpulkan bahwa Akuntansi sektor publik di Rumania lebih baik menganut akuntansi akrual.

Penelitian lainnya berjudul *“Theoretical Framework for Analysing Accounting Developments: in Case of Local Government Accounting in Japan”*, oleh Kiyoshi Yamamoto dari University of Tokyo pada tahun 2012. Tujuan penelitian menguji perkembangan akuntansi di Pemerintah daerah Japan pada lima decade yang lalu (Yamamoto, 2012). Menguji pada tingkatan istilah ruang lingkup dan waktu; perspektif mikro dan makro dan proses serta dampak yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan akuntansi pemerintah daerah di Jepang merupakan interaksi berbagai pelaku yang terkait baik vertical maupun horizontal : pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan berbagai kementerian di pemerintah pusat.

Penelitian berikutnya berjudul *“Accrual Accounting and Australian Publik Sektor – A Legitimation Explanation”* yang dilakukan oleh Nicholas Davis yang ditulis pada Australian Accounting Business and Finance Journal Vol 4 issue 2 tahun 2010 (Davis, 2010). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi peristiwa kunci

pada masa transisi dan menganalisis hal tersebut dengan teori habermas (1976) yaitu teori legimitasi. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan jenis negara asutralis yaitu negara kesejahteraan , selama masa krisis ekonomi tidak dapat dielakkan terjadinya manifestasi dalam istilah rasionalitas krisis ke dalam sistem administrasi berupa defisit fiskal dan peningkatan tingkat hutang.

Penelitian lainnya di kroasia berjudul *“Publik sektor Accounting in Slovenia and Croatia”* oleh Tatjana Jovanovic, pada Publik finance and accounting tahun 2015 (Jovanovic, 2015). Tujuan penelitian ini menganalisis dan membandingkan sistem akuntansi Slovenia dan Kroasia agar supaya dapat menilai kondisi di negara tersebut untuk transparansi dan oientasi informasi manajemen keuangan dan perkembangan implementasi prinsip akrual dalam penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan tahap implementasi akrual dalam legislasi nasional, terhadap perencanaan dan pelaksanaan penganggaran (akuntansi anggaran) masih berbasis prinsip kas.

Selanjutnya terdapat penelitian di Nigeria yang berjudul *“New Publik Management and Accrual Accounting Basis for Transparency anda Accountability in The Nigerian Publik Sektor”* oleh Dr. Ofoegbu, Grace N. (Ofoegbu & N, 2014). Tujuan penelitian ini adalah meneliti apakah adopsi dan implementasi IPSAS akuntansi basis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pada laporan keuangan sektor publik Nigeria, Meneliti apakah adopsi dan implementasi IPSAS akuntansi basis akrual akan meningkatkan transparansi pada laporan keuangan sektor publik Nigeria, Meneliti apakah adopsi dan implementasi IPSAS akuntansi basis akrual akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi pada laporan keuangan sektor publik Nigeria, Studi ini membantu menghilangkan kekhawatiran

praktisi, akuntan sektor publik, auditor dan akuntan pendidik dengan menunjukkan bahwa IPSAS basis akrual akan membantu menjamin akuntabilitas, transparansi dan meningkatkan dalam pelaporan keuangan namun beberapa tantangan yang tidak berbeda dari negara lain yg mengimplementasi IPSAS akuntansi akrual juga ditemukan. Diharapkan pelaporan keuangan sektor publik yang lemah dapat dikoreksi melalui sistem yang dibangun dengan sistem akrual.

Penelitian di India berjudul *"The Effectiveness of replacing accrual instead of cash base in the publik sektor accounting and budgeting"* oleh Amir Azadi Marand, Mehdi Shabani, Mahmoud Hnema, pada Indian Journal Of Fundamental and Applied Life Science: 2231-6345 2014 vol 4 april-june pp 1198-1211 (Marand, Shabani, & Hnema, 2014). Penelitian ini meneliti keuntungan dan kelemahan sistem akuntansi berbasis akrual dan kas, kemungkinan model antara akuntansi dan anggaran, kebutuhan dan proses reformasi dalam sistem anggaran dan akuntansi pada sektor publik. Juga menganalisa 3 model akuntansi dan anggaran yang berbeda yang diterapkan di Slovenia dan Kroasia-Serbia). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada keraguan terhadap penilaian model akuntansi dan anggaran dapat digunakan secara penuh bagi pemerintah.

Selain itu masih terdapat penelitian di Eropa yang berjudul *"Accrual accounting in EU Local Governments: One Methode, Several Approaches"* oleh Vicente Pina, Lourdes Torres, and Ana Yetano European Accounting Review Vol. 18, Iss. 4 tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkatan akrual pada sistem akuntansi yang diimplementasikan pada pemerintah daerah di Eropa dan juga mencoba menjawab pertanyaan mengapa akuntansi akrual mendapat resistensi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan

tingkatan implementasi akuntansi akrual dan ketaatan pada peraturan

Penelitian terakhir yang kami jadikan rujukan berjudul *"Earnings Management In English Local Governments: Determining Factors And Instruments"* oleh María José Arcas, Ron Hodges Caridad Marti, yang ditulis pada Research Project Spanish project R & D Palna Project ECON2010-17463, pada tahun 2012 (Arcas & Marti, 2012). Makalah ini menyelidiki manajemen laba di pemerintah daerah bahasa Inggris, termasuk motivasi untuk penggunaannya dan instrumen yang digunakan untuk mencapainya. Kami menemukan bukti manajemen angka akuntansi di pemerintah daerah. Tidak ada kecenderungan jelas yang antara peningkatan dan penurunan pendapatan. Pemerintah daerah menggunakan praktik akuntansi untuk mencapai "(surplus) defisit tahun berjalan" mendekati nol.

2.3. Kerangka Penelitian

Penelitian yang kami lakukan menggunakan kerangka penelitian berupa pengujian pengaruh atas variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen). Variabel independen yang dimaksud adalah variabel diskresi akrual. Sementara variabel dependen berupa pendapatan khususnya berupa surplus (defisit) atas laporan operasional. Berikut gambar atas desain penelitian yang kami susun. Dengan kerangka penelitian seperti tersebut diatas maka kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

H0: Diskresi akrual yang dilakukan manajemen Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi pendapatan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal ini manajemen Pemerintah Daerah menggunakan kewenangan secara normative sesuai dengan regulasi menerapkan diskresi akrual. Diskresi yang diterapkan tidak mempengaruhi pendapatan. Pendapatan tidak bertambah dan juga tidak berkurang seiring

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

penggunaan kewenangan birokrat Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Birokrat Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tanpa adanya motif keuntungan keuangan pribadi. Pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan realisasinya pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melayani atau memberikan layanan kepada masyarakat umum.

H1: Diskresi akrual yang dilakukan manajemen Pemerintah Daerah mempengaruhi pendapatan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal ini manajemen Pemerintah menggunakan kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual berharap mampu meningkatkan Pendapatan Daerah. Kewenangan dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan digunakan oleh birokrat untuk menyajikan laporan keuangan yang menampilkan nilai Pendapatan Daerah yang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan juga akan tampak meningkat. Kinerja pengelolaan keuangan meningkat maka akan meningkat kinerja satuan kerja perangkat daerah. Jika kinerja satuan kerja perangkat daerah meningkat maka kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat. Motif penggunaan kewenangan atau diskresi akrual yang bertujuan untuk menyajikan pendapatan yang lebih meningkat antara lain diduga karena menyamakan kinerja keuangan yang buruk, manajemen kekurangan atau *insufficiencies* dana dalam pemberian pelayanan publik, dan menghindari kenaikan biaya layanan atau defisit, serta mencapai target kinerja yang diperkirakan keuangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang kami gunakan adalah data sekunder. Data yang kami kumpulkan berasal dari data laporan keuangan. Laporan Keuangan yang kami gunakan antara lain neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas. Data diambil dari laporan keuangan dan ditabulasi dengan excel dan dikonversi menggunakan SPSS 20. Data diolah dengan menggunakan metode regresi berganda.

3.2. Populasi dan Sampel

Pemerintah Daerah yang menjadi obyek penelitian kami adalah pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan. Pemerintah daerah yang ada diwilayah Sumatera Selatan berjumlah 18 Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah tersebut terdiri dari 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 4 (empat) Pemerintah Kota dan 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten. Kami menggunakan seluruh pemerintah daerah sebagai obyek penelitian. Data penelitian ini berupa laporan keuangan berupa Pemerintah Daerah. Data yang diuji meliputi laporan keuangan tahun 2014 dan tahun 2015. Laporan keuangan yang diuji antara lain neraca, laporan arus kas dan laporan operasional serta laporan arus kas dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Sumatera Selatan. Setiap Pemerintah Daerah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Pemeirntah Provinsi. Sehingga Seluruh data terdapat pada pemerintah Provinsi pada SKPD Sekretariat Daerah bagian Daerah Bawahan.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang kami gunakan menggunakan regresi berganda. Regresi berganda karena kami menggunakan beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Selain itu kami juga menggunakan tiga model untuk keperluan penelitian ini.

3.4. Operasional Variabel

Operasional variabel yang kami gunakan berasal dari beberapa persamaan penelitian terdahulu yaitu menggunakan model Jones dan modified Jones. Berikut beberapa variabel operasional yang kami gunakan dalam penelitian ini total akrual (ACCR), total akrual merupakan nilai selisih antara arus kas bersih dari aktivitas operasional pemerintah daerah pada periode tahun tertentu dengan surplus atau defisit (Jones, 1991). Net Cash Flow Operation (COFO) merupakan nilai kas bersih dari arus kas dari aktivitas operasional pemerintah daerah tertentu dan pada tahun tertentu (Subramanyam & Wild, 2010). Surplus/Defisit (Dy) merupakan selisih antara pendapatan dan beban pada pemerintah daerah (Perrin & Whiteoak, 1993). Tingkat akrual, merupakan jenjang penerapan akrual pada suatu laporan keuangan pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah daerah yang menjadi obyek penelitian kami berjumlah 18. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Komposisi pemerintah daerah yang ada di wilayah Sumatera Selatan berjumlah (18 Pemerintah Daerah) terdiri dari 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 4 (empat) Pemerintah Kota dan 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten. Terdapat 5 pemerintah daerah yang merupakan daerah pemekaran baru.

Seluruh pemerintah daerah tersebut telah melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini ditunjukkan dari laporan keuangan yang telah disusun berupa Laporan Operasional (LO) dan Neraca yang menjadi ciri khas penerapan akuntansi berbasis akrual. Laporan

operasional belum disusun jika pemerintah daerah belum menerapkan sistem akuntansi akrual sesuai dengan regulasi yang ada pada periode 2014 dan 2015.

4.2. Hasil dan Pembahasan

Pada sisi privat istilah manajemen laba digunakan untuk menjelaskan penggunaan diskresi manajemen terhadap upaya untuk mengelola laba. Istilah manajemen laba pada sektor publik lebih dikenal sebagai manajemen atas angka-angka akuntansi. Manajemen angka akuntansi melalui penggunaan praktik akuntansi akrual merupakan cara atau mekanisme atau hal yang sangat menarik, hal ini karena didalam praktiknya mekanisme seperti ini memperhitungkan pendapatan dan beban dari tahun yang berjalan tidak melibatkan arus kas, meskipun tidak semua akrual berasal dari praktik manajemen angka akuntansi.

Penelitian kami mengukur manajemen angka akuntansi dengan beberapa variabel yang terdapat pada beberapa persamaan yang telah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya. Agar kita dapat mengukur manajemen angka akuntansi, maka perlu membedakan variabel. Pertama, akrual dari aktivitas normal dari suatu entitas (disebut akrual yang diharapkan). Akrual ini dihasilkan dari aktivitas manajemen pemerintah daerah yang tidak terdistorsi oleh praktik manajemen angka akuntansi. Kedua, akrual dari praktik manajemen angka akuntansi (disebut akrual abnormal). Akrual abnormal (ABNACCR) merupakan nilai akrual yang didalamnya terdapat praktik diskresi akrual manajemen pemerintah daerah. Karena akrual abnormal merupakan variabel *unobserve*, kami menghitungnya dengan menggunakan formula akrual abnormal yang merupakan perbedaan antara total akrual (ACCR) dan akrual yang diharapkan (EXPACCR) yang dinotasikan sebagai berikut:

$$ABNACCR_{jt} = ACCR_{jt} - EXPACCR_{jt}$$

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

atau

$$\text{EXPACCR}_{jt} = \text{ACCR}_{jt} - \text{ABNACCR}_{jt}$$

Persamaan (1)

Dimana:

ABNACCR = Abnormal akrual
ACCR = total akrual (ACCR),
(EXPACCR) = akrual yg diharapkan
j = menunjukkan entitas
pengamatan j
t = tahun t

Total akrual dapat diukur dengan menggunakan item-item pada neraca atau item-item pada laporan arus kas. Persamaan diatas dengan menggunakan data neraca. Hal ini memiliki kelemahan seperti yang dsampaikan oleh peneliti sebelumnya yaitu Hribar dan Collins. Hribar dan Collins menemukan bahwa frekuensi dan besarnya kesalahan yang disebabkan penggunaan data neraca berbasis akrual untuk menghitung nilai akrual, sehingga menyarankan penggunaan akrual diambil atau menggunakan data pada laporan keuangan lain yaitu laporan arus kas (Hribar & Collins, 2002).

Karena itu, kita mengukur total akrual dari pernyataan arus kas sebagai berikut:

$$\text{ACCR}_{jt} = -\text{DY}_{jt} + \text{COFO}_{jt}$$

atau

$$\text{ACCR}_{jt} = \text{COFO}_{jt} - \text{Dy}_{jt}$$

Persamaan (2)

Dimana;

DY_{jt} = Surplus (Defisit) untuk pemerintah daerah j pada tahun t
COFO_{jt} = arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi pemerintah daerah j pada tahun t.

Akrual yang diharapkan (EXPACCR) adalah perkiraan akrual yang menggunakan varian *cross-sectional* dari model Jones dan model Jones yang

dimodifikasi (Dechow & Sweeney, 1995). Model ini telah banyak digunakan dan diuji untuk sektor swasta (DeFond, 1994). Dari sektor swasta, mereka juga telah digunakan oleh Leone dan Van Horn untuk mendeteksi manajemen angka akuntansi di rumah sakit nirlaba US (Leone & Van Horn, 2005) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{ACCR}_{jt}}{\text{TA}_{jt-1}} = \alpha \frac{1}{\text{TA}_{jt-1}} + \beta 1 \left(\frac{\delta \text{REV}_{jt}}{\text{TA}_{jt-1}} \right) + \beta 2 \left(\frac{\text{PPE}_{jt}}{\text{TA}_{jt-1}} \right) + \text{Bjt}$$

atau

$$\text{Bjt} = \frac{\text{ACCR}_{jt}}{\text{TA}_{jt-1}} - \left[\alpha \frac{1}{\text{TA}_{jt-1}} + \beta 1 \left(\frac{\delta \text{REV}_{jt}}{\text{TA}_{jt-1}} \right) + \beta 2 \left(\frac{\text{PPE}_{jt}}{\text{TA}_{jt-1}} \right) \right]$$

Persamaan (3)

Dimana:

Bjt = Level Diskresi akrual pada instansi j tahun t
ACCR_{jt} = Total akrual untuk pemerintah daerah j pada tahun t
δREV_{jt} = Perubahan pendapatan dari jasa pemerintah daerah j pada tahun t,
PPE_{jt} = Gross aktiva tetap berwujud untuk pemerintah daerah j pada tahun t, dan
TA_{jt-1} = Total aset untuk pemerintah daerah j pada tahun t

δREV_{jt} digunakan sebagai kontrol untuk tingkat normal modal kerja akrual terkait dengan pendapatan dari layanan, dan PPE adalah variabel kontrol untuk tingkat normal amortisasi dan beban penyusutan akrual. Hal ini sejalan atau konsisten dengan literatur sebelumnya, dan untuk mengurangi masalah estimasi, semua variabel diskalakan oleh *lag aset*.

Kami juga memperkirakan akrual yang diharapkan dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi (Dechow & Sweeney, 1995). Model ini merupakan model kontrol untuk manajemen laba karena peningkatan abnormal pada pendapatan, dengan asumsi bahwa semua perubahan layanan pemerintah daerah

yang bersifat kredit atau terutang (sehingga menimbulkan piutang bagi pemerintah daerah) adalah karena manajemen laba (angka ankuntansi) ini. Persamaan yang digunakan sebagai bentuk modifikasi persamaan jones adalah sebagai berikut:

$$\frac{ACCR_{jt}}{TA_{jt-1}} = \alpha \left(\frac{1}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\delta REV_{jt}}{TA_{jt-1}} - \frac{\delta AR_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + B_{jt}$$

atau

$$B_{jt} = \frac{ACCR_{jt}}{TA_{jt-1}} - \left[\alpha \left(\frac{1}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\delta REV_{jt}}{TA_{jt-1}} - \frac{\delta AR_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{jt}}{TA_{jt-1}} \right) \right] \quad \text{Persamaan (4)}$$

Dimana:

δAR_{jt} = Perubahan piutang (debitur) untuk pemerintah daerah j pada tahun t.

Diharapkan akrual masing-masing entitas lokal diperoleh dari model estimasi (persamaan [3] dan [4]). Akhirnya, akrual abnormal (ABACCR_{jt}) dihitung seperti pada [1].

1. Akrual yang abnormal positif (menyiratkan manajemen pemerintah daerah penggunaan

strategi diksresi akrual) yang menyebabkan pendapatan meningkat, sedangkan

2. Akrual tidak normal negatif (menyiratkan manajemen pemerintah daerah menggunakan strategi diskresi akrual) yang menyebabkan pendapatan menurun.

Untuk menguji manajemen laba, terlepas apakah entitas lokal mengikuti strategi pendapatan meningkat atau pendapatan menurun, kita menggunakan akrual abnormal mutlak (Warfield & Wild, 1995).

Dengan menggunakan rumusan atau persamaan dari Jones dan modified jones yang kami kemukakan diatas, maka dapat kami sampaikan hasil penelitian kami sebagai berikut:

Pengaruh akrual terhadap pendapatan diuji dengan melakukan regresi persamaan 2 (dua). Persamaan 2 (dua) terdiri dari variabel ACCR dan variabel COFO dan DY. Hipotesis nol menyatakan bahwa manajemen pemerintah daerah melakukan diskresi namun tidak berpengaruh pada pendapatan.

Tabel 4.1. Anova

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3101685152044240000000,0	15508425760221200000000,00	70,31	,000 ^b
Residual	3308547963500812000000,00	220569864233387460000,000		
Total	34325399483943210000000,0			

Sumber: Hasil olah data - 2016

Dari tabel diatas terlihat nilai F hit sebesar 70,311 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan membandingkannya dengan nilai F tabel maka akan dapat diketahui apakah model yang digunakan dapat memprediksi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Setelah dilakukan perhitungan dan pembacaan F tabel dengan ketentuan (K;N-k atau 3;18-3) bernilai sebesar 3,29

sedangkan nilai f hitung sebesar 256,013. Sehingga F hitung > F tabel . Kesimpulan model mampu memprediksi hubungan antara independen dengan dependen. Maka variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap dependen. Selain itu nilai probabilitas F hitung dari persamaan Jones juga dapat terlihat dari nilai signifikansinya dari tabel diatas. Nilai Sig sebesar 0,000 lebih

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian berikutnya adalah pengujian terhadap model yang digunakan apakah sudah layak atau

belum. Hasil pengujian kami seperti tampak pada tabel dibawah ini antara lain nilai adjusted R squarenya sebesar 0,891 yang artinya variabel independen mampu menjelaskan 89,1 % variabel dependen. Artinya variabel DY dan COFO mampu menjelaskan sebesar 89,1 dan sisanya 10,9 (100%-89,1%) dijelaskan oleh faktor lainnya.

Tabel 4.2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,951 ^a	,904	,891	14851594669,711

Sumber: Hasil Olah Data-2016

Koefisien yang terdapat pada persamaan regresi hasil perhitungan adalah 0,95 untuk COFO dan 0,136 untuk DY. COFO memiliki koefisien slop yang positif sementara DY memiliki koefisien negatif. Artinya jika positif maka arahnya searah dengan akrual. Sementara

negatif berarti berlawanan arah. Searah berarti jika tingkat akrual naik maka COFO juga akan naik sebesar koefisien COFO dan turun berarti jika Total Akrual ataupun tingkatan akrual naik maka DY akan turun.

Tabel 4.3. Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12557162507,339	5560284989,199		2,258	,039
COFO	,095	,009	,891	10,871	,000
DY	-,136	,020	-,563	-6,873	,000

Sumber: Hasil Olah Data-2016

Dengan hasil yang tampak pada tabel diatas maka Ho dapat dinyatakan tidak terbukti dan H1 terbukti. Diskresi akrual yang diwakili dengan adanya ACCRjt . Arus kas keluar bersih dari kegiatan operasional diwakili dengan COFO, sementara surplus atau defisit pendapatan diwakili oleh DY. Tabel diatas menyatakan dengan adanya akrual (ACCRjt) berhubungan terbalik dengan DY. Artinya jika terdapat diskresi akrual

maka arahnya menurunkan surplus atau defisit tahun berjalan.

Selain itu kami juga menguji tingkat akrual terhadap beberapa variabel lainnya terkait dengan akun-akun akrual lain dengan menggunakan model Jones dan modified Jones:

Pengujian atas model yang kami gunakan dengan menggunakan persamaan regresi baik model Jones dapat kami tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Anova - Model Jones

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Model Jones	Regression	2,652	2	1,326	378,488	,000 ^c
	Residual	,053	15	,004		
	Total	2,705	17			

- a. Dependent Variable: Bjt
 - b. Predictors: (Constant), PPE/Tajt-1
 - c. Predictors: (Constant), PPE/Tajt-1, DREVjt/TAjt-1
- Sumber: Hasil Olah Data-2016

Dari tabel diatas terlihat nilai F hitung sebesar 378,488 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan membandingkan nilai F tabel maka akan dapat diketahui apakah model yang digunakan dapat memprediksi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Setelah dilakukan perhitungan dan pembacaan F tabel dengan ketentuan (K;N-k atau 3;18-3) bernilai sebesar 3,29 sedangkan nilai f hitung sebesar 256,013. Sehingga F hitung > F tabel . Kesimpulan model mampu memprediksi hubungan antara independen dengan dependen. Maka variabel independen secara simultan

memiliki pengaruh terhadap dependen. Selain itu nilai probabilitas F hitung dari persamaan Jones juga dapat terlihat dari nilai signifikansinya dari tabel diatas. Nilai Sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian atas model yang kami gunakan dengan menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan model *Modified Jones* dapat kami tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Anova – Modified Jones

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Model Modified Jones	Regression	2,661	5	,532	183,822	,000 ^b
	Residual	,035	12	,003		
	Total	2,696	17			

Sumber: Hasil Olah Data-2016

Dari tabel diatas terlihat nilai F hitung sebesar 256,013 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan membandingkan nilai F tabel maka akan dapat diketahui apakah model yang digunakan dapat memprediksi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Setelah dilakukan perhitungan dan pembacaan F tabel dengan ketentuan (K;N-k atau 5;18-5) bernilai sebesar 3,03 sedangkan nilai f hitung sebesar 183,822. Sehingga F hitung > F tabel . Kesimpulan model

mampu memprediksi hubungan antara independen dengan dependen. Maka variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap dependen. Selain itu nilai probabilitas F hitung dari persamaan Modified Jones juga dapat terlihat dari nilai signifikansinya dari tabel diatas. Nilai Sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Tahap berikutnya kami melakukan pengujian pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Kami menguji pengaruh tersebut dengan menggunakan Koefisien determinasi. Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R Square atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien

determinasi penulis lebih senang menggunakan R-Square daripada Adjusted R-Square, walaupun variabel bebas lebih dari satu. Pada tabel berikut tampak nilai Adjusted R Squarenya sebesar 0,978 (model Jones) dan 0,978 (model Modified Jones). Ternyata keduanya menghasilkan nilai Adjusted R square yang sama. Angka 0,978 berarti menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel independen sebesar 97,8 %. Artinya asset dan pendapatan serta piutang memiliki proporsi pengaruh terhadap level akrual sebesar 97,8 % sedangkan sisanya (100%-97,8) dipengaruhi oleh variabel lainnya. Karena kedua model menunjukkan nilai yang sama berarti kedua model menunjukkan nilai proporsi pengaruh yang konsisten.

Tabel 4.6. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1. Model Jones	,991 ^a	,982	,978	,0588
2. Model Modified Jones	,990 ^b	,981	,978	,0592

Sumber: Hasil Olah Data-2016

Pada tahap akhir ini kami sampaikan interpretasi model baik model Jones maupun Modified Jones. Pada model Jones (tabel berikut) nilai konstanta 0,21. Nilai PPE sebesar 0,908 bertanda negatif (-) dan Rev sebesar 1,053 bernilai negatif(-). Kedua variabel bernilai negatif berarti tidak searah

dengan level akrual. Hal ini berarti bila level akrual meningkat maka kedua variabel cenderung turun, dan sebaliknya bila level akrual turun maka kedua variabel cenderung naik dengan besaran sesuai nilai masing-masing slope variabel.

Tabel 4.7. Tabel Coefficient-Model Jones

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,021	,120	,177	,862	
	PPE/Tajt-1	-1,141	,098	-,945	-11,601	,000
2	(Constant)	-,082	,054	-1,513	,151	
	PPE/Tajt-1	-,908	,052	-,753	-17,494	,000
	DREVjt/TAjt-1	-1,053	,129	-,352	-8,187	,000

Sumber: Hasil Olah Data-2016

Pada model modified Jones (tabel berikut) nilai konstanta 0,36. Nilai PPE sebesar 0,958 bertanda negatif (-) dan Rev sebesar 0,876 bernilai negatif(-). Kedua variabel bernilai negatif berarti tidak searah dengan level akrual. Hal ini berarti bila level akrual meningkat maka kedua variabel cenderung turun, dan sebaliknya bila level akrual turun maka kedua variabel cenderung naik dengan

besaran sesuai nilai masing-masing slope variabel. Namun demikian variabel AR dan ACCR bernilai 0,152 dan 0,388 bernilai positif (+) hal ini berarti searah dengan level akrual. Searah berarti jika level akrual naik maka AR dan ACCR juga akan naik dan sebaliknya jika level akrual turun maka AR dan ACCR juga akan turun.

Tabel 4.8. Tabel Coefficient-Model Modified Jones

Model Modified Jones	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,036	,054		-,668	,517
ACCRjt/Tajt-1	,388	,321	,046	1,211	,249
DREVjt/TAjt-1	-,125	,414	-,042	-,303	,767
DAR/Tajt-1	,152	,487	,018	,311	,761
DREVjt/Tajt-1 -	-,876	,403	-,309	-2,173	,051
PPE/Tajt-1	-,958	,054	-,795	-17,655	,000

Sumber: Hasil Olah Data-2016

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pengolahan data yang kami lakukan menghasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan telah berupaya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini tampak dari ketersediaan laporan operasional yang merupakan ciri khas dari penerapan basis akrual tersebut.

Pemerintah daerah telah melaksanakan kewenangan pada aspek pelaporan dengan menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual. Hal ini selain terbukti dari persamaan yang kami gunakan dapat mendeteksi adanya diskresi akrual juga tampak dari sampel penelitian peraturan kepala daerah pada berbagai pemerintah daerah yang mengindikasikan adanya diskresi akrual.

Pemerintah daerah dalam hal ini manajemen pemerintah daerah menerapkan diskresi akrual yang legal. Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015. Pemerintah sudah menyusun manual akuntansi dan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang disusun berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri dan standar akuntansi pemerintah. Rentang waktu yang masih sangat singkat kami yakini bahwa pemerintah daerah melaksanakan akrual karena berpedoman kepada regulasi yang ada bukan atau belum pada motif lainnya.

Akibat penerapan akrual berdampak pada surplus atau defisit anggaran. Hal ini tampak dari pengolahan data yang mencerminkan terjadinya diskresi akrual baik dari persamaan Jone maupun Modified Jones.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Hasil dari kedua persamaan atau model menyatakan bahwa adanya diskresi akrual mengakibatkan penurunan pendapatan yang diwakili oleh surplus atau defisit tahun berjalan pada pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian kami memiliki keterbatasan antara lain populasi. Populasi yang kami gunakan masih terbatas pada satu provinsi. Hal ini belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. Kami memiliki keterbatasan perolehan data. Data sulit diperoleh dan membutuhkan dana untuk pengumpulan data seluruh Indonesia.

Selain itu kami belum melakukan pengujian pada aspek *earning* manajemen pada pemerintah daerah. Hal ini sebenarnya dapat kami lakukan, namun karena keterbatasan waktu maka kami belum melakukan pengujian pengaruh diskresi akrual terhadap *earning management* pada pemerintah daerah.

5.3. Saran

Kami melakukan penelitian dengan keterbatasan yang kami miliki. sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menerapkan secara lebih luas agar dapat diambil keputusan yang lebih luas atau dapat digeneralisasi dengan baik atas hasil penelitian yang dilakukan.

Kami juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian terhadap *earning management* pemerintah daerah. Hal ini penting dilakukan karena sangat dimungkinkan terjadinya hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcas, M. J., & Marti, R. H. (2012). *Earning management in English Local Governments: Determining Factors and Instruments. Research Project Spanish R & D ECON2010-17463.*
- Bravo, A. B. (2002). Local Government Behavior and Principal-agent Theory. *Academia Militar CIEF (Technical University of Lisbon)*, 1-13.
- Chan, J. L. (2008). *Accrual Accounting: Concepts, Standards, and Implementation.* Chicago: University Of Illinois.
- Chan, J. L. (2010). IPSAS: COncceptual and Institutional Issues. *Chan GA Seminar* (p. 13). US: -.
- Chan, P. J. (2010). *Government Financial Accounting Principles.* Beijing: Chan Lecture 3.
- Davis, N. (2010). Accrual Accounting and Australian Publik Sektor – A Legitimation Explanation. *Australian Accounting Business and Finance Journal . Vol 4. Issue 2.*
- Dechow, P. S., & Sweeney. (1995). Detecting *earnings* management. *The Accounting Review*, 193-25.
- DeFond, M. a. (1994). Debt covenant violation and manipulation of

- Accrual . *Journal of accounting and economics*, 145–76.
- Hribar, P., & Collins, D. W. (2002). Errors in Estimating Accruals: Implications for Empirical Research . *Journal Of Accounting Research*, (pages 105–134).
- Jensen, M. C., & H.Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 305-360.
- Jones, J. (1991). *Earnings management during import relief investigations.* *Journal Accounting Research*, 193–228.
- Jovanovic, T. (2015). Publik sektor Accounting in Slovenia and Croatia. *Publik Finance and Accounting*.
- Leone, A. a. (2005). How do nonprofit hospitals manage *earnings*?. *Journal of Health Economics*, 24:4 , pp815–37.
- Marand, A. A., Shabani, M., & Hnema, M. (2014). The Effectiveness of replacing accrual instead of cash base in the publik sektor accounting and budgeting. *Indian Journal Of Fundamental and Applied Life Science*, 2231-6345.
- Mueller, D. C. (2003). *Publik Choice III*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ofoegbu, D., & N, G. (2014). New Publik Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in The Nigerian Publik Sektor. *IOSR Journal of Business and Management Vol 16 Issue 7 ver III*, 104-113.
- Perrin, D. H., & Whiteoak, M. E. (1993). *Publik sektor Accounting and Financial Control*. London: Chapman and Hall.
- PWC. (2014). *Collection of Information Related to The Potential Impact, Including Cost, of Implementing accrual Accounting in teh publik sektor and technical analysis of the Suitability of individual IPSAS Standar.* -: PWC.
- Subramanyam, K., & Wild, J. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tudor, A. T., & Mutiu, A. (2006). Cash Versus accrual accounting in publik sektor. *Universitas Babes Bolyai, Cluj Napoca*.
- Warfield, T. W., & Wild, K. (1995). Managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 61-91.
- Yamamoto, K. (2012). Theoretical Framework for Analysing Accounting Developments: in Case of Local Government Accounting in Japan. *University of Tokyo*.
- Zimmerman, R. L. (1990). Positive Accounting Theory: A ten Year

PROSIDING

*Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi,
Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”*

Perspective. *The Accounting
Review*, 131-156.

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011 - 2015 (STUDI KASUS: TOP 10 PERBANKAN TERBAIK DI INDONESIA)

Susanto Wibowo

Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Email: payoosant@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komisaris audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan terbaik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sampel di ambil dari 10 perbankan terbaik yang tercatat di BEI Indonesia dengan sampel data series tahun 2011-2015. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode "purposive sampling". Model uji analisis statistik data dengan regresi linear berganda untuk menguji beberapa variabel tersebut diatas yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen, komite audit dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan kemudian keputusan manajerial dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya hasil uji simultan menunjukkan komisaris independen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan direksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada para pihak manajerial sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang dikelolanya.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komisaris Audit, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, Nilai Perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam stabilitas perekonomian di Indonesia sangat vital karena merupakan penggerak roda perekonomian agar terus tetap berjalan dengan baik. Perbankan merupakan perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan yang kekurangan dana. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) diberikan kewenangan oleh pemerintah sebagai pengawas keuangan nasional.

Pengawasan yang ketat menyebabkan perbankan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian ini menyebabkan kebijakan perbankan menjadi ketat dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan (Michelle F.W dan Ch. Rusiti).

Peran manajemen dalam menjalankan perusahaan sangat besar andilnya dalam menentukan keputusan dan kebijakan yang diambil. Pihak manajerial merupakan pihak pengelola perusahaan atau direksi kemudian pihak

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

institusional merupakan pihak pemegang saham. Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang memberikan kewenangan kepada manajer untuk mengelola perusahaan yang punya kewajiban untuk membuat keputusan terbaik bagi pemegang saham.

Pertumbuhan aset perbankan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun ditengah persaingan yang kompetitif diantara masing-masing perbankan. Dengan dukungan situasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi makro yang belum menunjukkan perkembangan yang baik.

Berikut 10 bank dengan aset terbesar hingga September 2015:

Tabel 1.1 Daftar Bank Terbaik dan Total Asetnya

No.	Nama Bank	Total Aset (Triliun Rp.)
1	Bank Mandiri	905,76
2	Bank BRI	802,30
3	Bank BCA	584,44
4	Bank BNI	456,46
5	Bank CIMB Niaga	244,28
6	Bank Danamon	195,01
7	Bank Permata	194,49
8	Bank Panin	182,23
9	Bank BTN	166,04
10	Bank Maybank Indonesia	153,92

Sumber: Laporan keuangan September 2015, Erlangga Djumena, KONTAN

Dari tabel 1.1 tersebut diatas terlihat, dari daftar sepuluh perbankan terbaik di Indonesia maka Bank Mandiri masih mendominasi dengan mencatat nilai total asetnya sebesar Rp. 905,76 triliun. Dan yang paling terakhir adalah Bank Maybank Indonesia dengan nilai total asetnya Rp. 153,92 triliun. Bank-bank plat merah milik pemerintah masih mendominasi urutan teratas, ini memberikan bukti kepercayaan kepada

nasabah dan para *stakedholder* untuk terus menjalin hubungan dan saling memberikan kontribusi pada perkembangan perbankan nasional agar semakin maju dan dapat berkompetisi di kancah global.

Grafik fluktuasi nilai saham yang beredar di pasaran untuk sub sektor keuangan (*finance*) yang tercatat di bursa efek Indonesia selama 3 (tiga) tahun 2011-2013 sebagai berikut:



Sumber: www.idx.co.id, diolah chartnexus.com, 2013

Gambar 1.1 Kinerja Indeks Sub Sektor Keuangan 2011-2013

Terlihat dari gambar 1.1 diatas, kinerja indeks sub sektor keuangan mengarah kepada peningkatannya dengan kurva garis naik. Ini mencerminkan bahwa investor sangat tertarik dan berminat untuk berinvestasi di bidang sub sektor keuangan di Indonesia. Karena pergerakan harga saham selalu mengarah kepada peningkatan yang cukup signifikan ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana faktor fundamental dan faktor teknikal yang dibangun oleh pemerintah dan pihak perbankan mampu memberikan kepastian akan peluang berinvestasi kepada investor untuk berinvestasi di sub sektor perbankan yang lebih menarik di bandingkan sub

sektor yang lain. Sehingga tingkat kepercayaan investor terhadap sub sektor keuangan mampu mendorong pergerakan roda pertumbuhan ekonomi di negara Indoensia.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Pengertian Bnk

Menurut Bank Indonesia. (2006). Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Bank Indonesia (2006) perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. *Good corporate governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar.

- a. Tranparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan/kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2.2 Teori Agensi

2.2.1 Komisaris Independen

Bank Indonesia (2006) menyatakan Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Totok Dewayanto (2010), komisaris independen merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran komisaris independen, semakin efektif pula proses monitor serta pelaporan keuangan. (Rafriny, 2012). Proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung dengan cara menghitung presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran dewan komisaris perusahaan sampel. (Ujiyanto, 2007).

Rumus menghitung proporsi dewan komisaris independen

$$PDKI = \frac{DK \text{ luar}}{UDK} \times 100\%$$

Keterangan:

PDKI : Proporsi dewan komisaris independen

DK luar : Jumlah anggota dewan komisaris berasal dari luar perusahaan

UDK : Ukuran dewan komisaris

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.2 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan bertanggung jawab untuk membantu auditor independen. (Arens, 2014; 135). Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris, dan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan. (Sekar Mayangsari, 2003).

Menurut Bank Indonesia (2006) Peraturan No. 8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Pasal 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. Pasal 43 (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2 : Ukuran komite audit independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.3 Dewan Komisaris

Menurut Bank Indonesia (2006) dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kedudukan dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Pada umumnya dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur.
- b. Dalam melakukan tugas, dewan komisaris harus sesuai dengan kepentingan PT dan maksud serta tujuan PT.
- c. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006; 13)

Ukuran dewan Komisaris adalah menghitung presentase jumlah total dari

anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan sampel. (Ujiyanto, 2007).

Rumus menghitung ukuran dewan komisaris:

$$UDK = DK \text{ internal} + DK \text{ eksternal}$$

Keterangan:

- UDK : Jumlah total anggota dewan komisaris
 DK internal : Anggota dewan komisaris internal
 DK eksternal : Anggota dewan komisaris eksternal

Hipotesis penelitian ini adalah :

H3 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.4 Kepemilikan Manajerial

Kesempatan memiliki saham perusahaan oleh manajer dapat dijadikan salah satu cara untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan. Manajer yang sekaligus pemegang saham diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan meningkat, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. (Michelle F.W dan Ch. Rusiti)

Stulz (1988) dalam Chen et al. (2003) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer pada level tinggi, manajer cenderung mengamankan (*entrenched*) posisinya yang mengakibatkan nilai perusahaan turun.

Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005).

Rumus menghitung kepemilikan manajerial:

$$KM = \frac{SM}{SB} \times 100\%$$

Keterangan:

KM : Kepemilikan manajerial

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

SM : Total saham yang dimiliki oleh manajemen
SB : Jumlah saham yang perusahaan yang dikelola

Hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.5 Dewan Direksi

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum *good corporate governance* (2006; 17) dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Dalam penelitian Amyulianthy (2012), didapatkan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan ukuran dewan direksi dapat meningkatkan *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Rumus menghitung ukuran dewan direksi adalah:

$$UDD = DD \text{ internal} + DD \text{ eksternal}$$

Keterangan:

UDD : Jumlah total anggota dewan direksi
DD internal : Anggota dewan direksi internal
DD eksternal : Anggota dewan direksi eksternal

Hipotesis penelitian ini adalah:

H5 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.2.6 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor atas kondisi keuangan perusahaan. Nilai perusahaan terlihat dari maksimalisasi kekayaan pemegang saham yang tercermin dalam memaksimalkan harga saham perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti perusahaan juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. (Michelle F.W dan Ch. Rusiti)

Bagi perusahaan yang *go public*, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan (Brealey & Myers, 1991).

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh investor (Wahyudi, 2005). Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).

Penelitian ini mencoba meneliti nilai perusahaan dengan pendekatan nilai perusahaan dengan menggunakan rasio Tobin's Q. Walaupun sebenarnya ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan. Alasan memilih rasio Tobin's Q dalam penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan adalah karena penghitungan rasio Tobin's Q lebih rasional mengingat unsur-unsur kewajiban juga dimasukkan sebagai dasar penghitungan.

Tobin's Q memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman

yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, Sukmawati, 2004.).

Salah satu versi Tobin's Q yang dimodifikasi dan disederhanakan oleh Smithers, A., and Wright, S, 2000 adalah sebagai berikut:

MVE

= *close price saham akhir tahun X saham beredar akhir tahun*

BVE

= **total asset**

– **total liability**

$$\text{VALUEPER (Q)} = \frac{\text{MVE} + \text{D}}{\text{BVE} + \text{D}}$$

Keterangan:

VALUEPER (Tobin's Q) : Nilai perusahaan (*Value of the Firm*)

MVE :

Market Value of Equity (Nilai pasar equitas)

BVE : *Book*

Value of Equity (Nilai buku dari total aktiva)

D (*Debt*) : Nilai

buku dari total hutang

Skor Interpretasi nilai Tobin's Q (Tobin's, James, 1969):

a. Tobin's $q < 1$:

Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *undervalued*. Artinya manajemen telah gagal dalam mengelola aktiva perusahaan. Maka potensi pertumbuhan investasi rendah.

b. Tobin's $q = 1$:

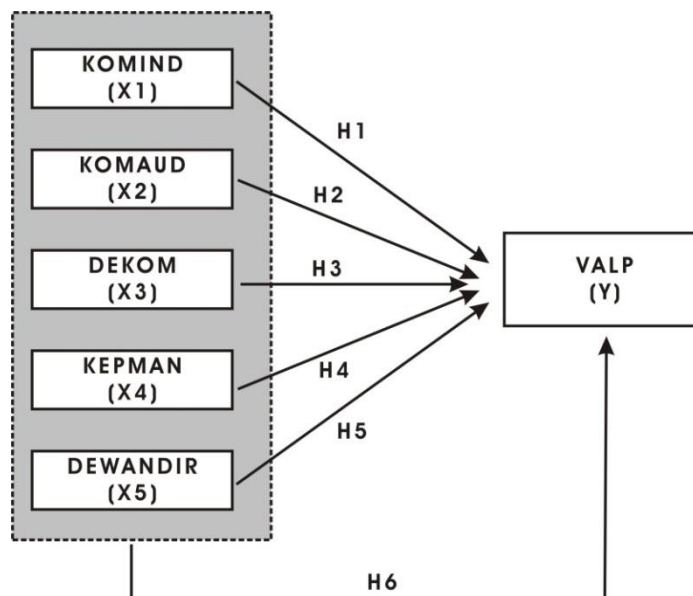
Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *average*. Artinya manajemen *stagnan* dalam mengelola aktiva. Maka potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.

c. Tobin's $q > 1$:

Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *overvalued*. Maka manajemen berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan investasi tinggi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Model kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Alur Penelitian

Keterangan:

Variabel Dependen (Y)

VALP (Tobin's Q) : Value

Perusahaan (Nilai Perusahaan)

Variabel Independen (X)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

KOMIND :Komisaris Independen (X1)
KOMAUD :Komite Audit (X2)
DEKOM :Dewan Komisaris (X3)
KEPMAN :Kepemilikan Manajerial (X4)
DEWANDIR :Dewan Direksi (X5)

3. METODE PENELITIAN

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu yaitu tahun 2011-2015.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sampel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.1 Metode Penarikan Sampel

Metode pengambilan data sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan khususnya berjumlah 10 bank peringkat terbaik di Indonesia yang terdaftar di BEI.
2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan tahunan atau *annual report* selama periode pengamatan di BEI tahun 2011-2015.
3. Memiliki data mengenai komisaris independen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial

dan dewan direksi selama menerbitkan laporan tahunan

Tabel 3.1 dibawah ini adalah daftar perusahaan perbankan yang menjadi sampel:

Tabel 3.1 Input Data Sampel

No.	Nama Bank	Ada Laporan Tahunan (Annual Report)
1	Bank Mandiri	2011 – 2015
2	Bank BRI	2011 – 2015
3	Bank BCA	2011 – 2015
4	Bank BNI	2011 – 2015
5	Bank CIMB Niaga	2011 – 2015
6	Bank Danamon	2011 – 2015
7	Bank Permata	2011 – 2015
8	Bank Panin	2011 – 2015
9	Bank BTN	2011 – 2015
10	Bank Maybank Indonesia	2011 – 2015

Sumber: input data “*annual report banks*”, 2016

3.1. Metode Pengumpulan Data

3.1.1. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2011 – 2015. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan diolah pihak lain).

3.1.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengklasifikasikan dokumen yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti dari kepustakaan maupun melalui internet. Data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari tahun 2011 – 2015, dan juga studi

pustaka dengan membaca buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3.2. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data maka metode analisis yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yang dinamakan dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini pun disebut metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivism, disebut pula sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Dan disebut juga dengan metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan baru serta disebut pula metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2013; 7)

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2011; 19)

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan *software SPSS for Windows*. Penggunaan metode analisis dalam regresi dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji dua arah (*two tailed test*), yaitu dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka data berdistribusi normal. (Ghozali, 2009).

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2009; 95).

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang tinggi sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \geq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ dengan tingkat kolonieritas 0.95 (Ghozali, 2009)

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

maka disebut Homokedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 125).

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan variabel residualnya SRESID.

3.3.2.4 Uji Autokolerasi, Durbin Watson

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2009; 93).

Uji autokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin-Watson*. Jika

nilai *Durbin-Watson* berkisar antara nilai batas atas (du) maka diperkirakan tidak terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- Apabila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada auto korelasi positif.
- Apabila nilai DW lebih besar daripada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- Apabila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan (Ghozali, 2009:79-80).

3.3.3 Uji Korelasi (R)

Tabel 3.2 Ketentuan Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2009)

3.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang digunakan dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011:97).

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.3.5 Pengujian Hipotesis

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan model persamaan (Ujiyanto, 2007).

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nanti variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya (Sugiyono, 2008:149).

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan asset, ukuran perusahaan, dan risiko terhadap struktur modal. Bentuk umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan (VALP) atau nilai Tobin's Q

a = Nilai konstanta

$b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien perubahan nilai

X1 = KOMIND (Komisaris Independen)

X2 = KOMAUD (Komite Audit)

X3 = DEKOM (Dewan Komisaris)

X4 = KEPMAN (Kepemimpinan Manajerial)

X5 = DEWANDIR (Dewan Direksi)

e = variabel residual (tingkat kesalahan)

Menurut Ghozali (2009: 88), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2009; 88). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$).

3.3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dengan data sampel 10 perusahaan Perbankan terbaik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode penelitian dari 2011-2015.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

3.3.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum,

minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2011; 19).

Tabel 3.3 Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAHUN	50	2011	2015	2013.00	1.429
VALP	50	1.10	6.67	3.3604	1.64925
KOMIND	50	.25	.75	.5210	.10473
KOMAUD	50	1	6	3.60	1.069
DEKOM	50	4	10	6.86	1.400
KEPMAN	50	.00	.42	.1184	.13243
DEWANDIR	50	6	18	10.14	2.100
Valid N (listwise)	50				

Sumber: data diolah dengan SPSS

Terlihat dari tabel 3.3 untuk nilai perusahaan (VALP) atau nilai Tobin’s Q minimumnya 1,10 dan maksimumnya 6,67 kemudian rata-rata nilai perusahaan menunjukkan $Q = 3,3604$ ini membuktikan jika Tobin’s Q lebih besar dari 1, maka nilai pasar lebih besar dari nilai asset perusahaan yang tercatat. Tobin’s $q > 1$ menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *overvalued*. Maka manajemen berhasil dalam mengelola

aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan investasi tinggi.

Akan tetapi hasil itu semua belum memberikan penjelasan lebih dalam tentang nilai perusahaan itu sendiri yang mana bisa di pengaruhi oleh faktor variabel-variabel tersebut diatas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik

4.1.1. Uji Normalitas

Tabel 4.1 Hasil stastistik uji normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28404526
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.476
Asymp. Sig. (2-tailed)		.977

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah dengan SPSS

Dari tabel 4.1 terlihat hasilnya melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* data

terdistribusi normal dimana p-value adalah nilai signifikansinya sebesar $0.977 > 0.05$. Dengan demikian dapat

dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji statistik selanjutnya untuk membuktikan nilai signifikansi dan menjawab hipotesa dalam penelitian ini.

4.1.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Hasil statistik uji multikolinearitas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.809	1.114		7.007	.000		
	KOMIND	.960	1.407	.094	.682	.499	.708	1.412
	KOMAUD	.589	.351	.304	1.680	.100	.414	2.418
	DEKOM	.016	.222	.012	.070	.944	.490	2.042
	KEPMAN	-5.466	1.697	-.391	-3.221	.002	.914	1.094
	DEWANDIR	-.433	.106	-.491	-4.071	.000	.927	1.078

a. Dependent Variable: VALP

Sumber: data diolah dengan SPSS

Pada tabel 4.2 terlihat di kolom nilai tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10 tingkat kolonieritas 0.95. Sehingga data tidak terkena gejala multikolinearitas di

dalam model regresi. Dengan demikian dapat dilakukan uji statistik selanjutnya.

4.1.3. Uji Autokorelasi, Durbin Watson

Tabel 4.3 Hasil statistik uji autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.406	.339	1.50370	2.424

a. Predictors: (Constant), DEWANDIR, KOMAUD, KEPMAN, KOMIND, DEKOM

b. Dependent Variable: VALP

Sumber: data diolah dengan SPSS

Pada tabel 4.3 terlihat hasilnya uji Durbin-Watson sebesar 2.424 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah sampel=50, k=5, dL=1.20501 dU=1.53785, maka dimana nilai d=2.424 jadi $(4-d) = 4 - 2.424 = 1.576$.

Deteksi autokorelasi positif: $d > dU$ maka $2,424 > 1,53785$ artinya tidak terjadi autokorelasi positif.

Deteksi autokorelasi negatif: $(4 - d) > dU$ maka $4 - 2,424 > 1,53785$ hasilnya 1,576 $> 1,53785$ artinya tidak terjadi autokorelasi negatif.

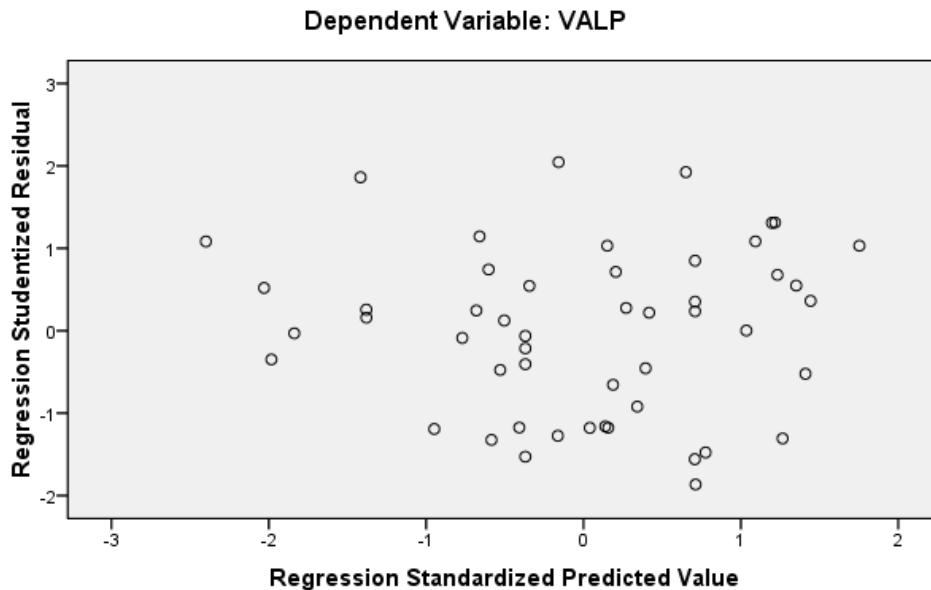
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi, dan

layak untuk dilakukan uji statistik lanjutan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.1.4. Uji Heterokedastisitas



Gambar 4.1 Grafik *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah dengan SPSS

Pada gambar 4.1 grafik *scatterplot* grafik terlihat gambar grafik *scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyerbar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat dilakukan uji statistik selanjutnya.

4.2. Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.406	.339	1.50370	2.424

a. Predictors: (Constant), DEWANDIR, KOMAUD, KEPMAN, KOMIND, DEKOM

b. Dependent Variable: VALP

Sumber: data diolah dengan SPSS

Pada tabel 4.4 nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0.406 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel KOMIND, KOMAUD, DEPKOM, KEPMAN dan DEWANDIR terhadap variabel VALP sebesar 40.6%. Artinya Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi memiliki proporsi pengaruh terhadap Nilai Perusahaan sebesar 40,6% sedangkan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model

regresi linear. Variabel lain dalam hal ini merupakan faktor eksternal perusahaan terkait tingkat pertumbuhan ekonomi makro di luar perusahaan, misalnya; tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lainya.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.809	1.114		7.007	.000		
	KOMIND	.960	1.407	.094	.682	.499	.708	1.412
	KOMAUD	.589	.351	.304	1.680	.100	.414	2.418
	DEKOM	.016	.222	.012	.070	.944	.490	2.042
	KEPMAN	-5.466	1.697	-.391	-3.221	.002	.914	1.094
	DEWANDIR	-.433	.106	-.491	-4.071	.000	.927	1.078

a. Dependent Variable: VALP

Sumber: data diolah dengan SPSS

Dari tabel 4.5 dapat di paparkan uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Maka:

$$VALP = 7.809 + 0.960 KOMIND + 0.589 KOMAUD + 0.016 DEKOM - 5.466 KEPMAN - 0.433 DEWANDIR + e$$

Terlihat dari tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koefisien regresi KOMIND sebesar 0.960, KOMAUD sebesar 0.589, DEKOM sebesar 0.016 bernilai positif artinya pada saat nilai KOMIND, KOMAUD, DEKOM naik maka Nilai Perusahaan (VALP) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat nilai KOMIND, KOMAUD, DEKOM turun maka Nilai Perusahaan (VALP) akan turun.

Kenaikan 1 poin akan meningkatkan KOMIND sebesar 0.960, KOMAUD sebesar 0.589 dan DEKOM sebesar 0.016 demikian juga sebaliknya bilamana mengalami penurunan 1 poin.

Kemudian koefisien regresi KEPMAN sebesar -5.466 dan DEWANDIR sebesar -0.433 bernilai negatif artinya pada saat nilai naik maka Nilai Perusahaan (VALP) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada nilai KEPMAN dan DEWANDIR turun

maka Nilai Perusahaan (VALP) akan turun.

Kenaikan 1 poin akan meningkatkan KEPMAN sebesar -5.466 dan DEWANDIR sebesar -0.433 demikian juga sebaliknya bilamana mengalami penurunan 1 poin.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji t (t Test)

Tabel 4.6 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	7.809	1.114		7.007	.000		
	KOMIND	.960	1.407	.094	.682	.499	.708	1.412
	KOMAUD	.589	.351	.304	1.680	.100	.414	2.418
	DEKOM	.016	.222	.012	.070	.944	.490	2.042
	KEPMAN	-5.466	1.697	-.391	-3.221	.002	.914	1.094
	DEWANDIR	-.433	.106	-.491	-4.071	.000	.927	1.078

a. Dependent Variable: VALP

Sumber: data diolah dengan SPSS

Pada tabel 4.6 pengujian secara parsial pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

H₁: Komisari Independen berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai signifikansi Komisaris Independen (KOMIND) sebesar $0.499 > 0.05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (VALP) pada taraf keyakinan 95%.

Hasilnya adalah **menolak H₁**, hal ini menyatakan bahwa berapapun kuantitas atau kualitas komisaris independen tidak mempengaruhi nilai perusahaan

H₂: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai signifikansi Komite Audit (KOMAUD) sebesar $0.100 > 0.05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (VALP) pada taraf keyakinan 95%.

Hasilnya adalah **menolak H₂**, hal ini menunjukkan berapapun kuantitas atau kualitas komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan

H₃: Dewan Komisari berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai signifikansi Dewan Komisaris (DEKOM) sebesar $0.944 > 0.05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai

Perusahaan (VALP) pada taraf keyakinan 95%.

Hasilnya adalah **menolak H₃**, hal ini menyatakan bahwa berapapun kuantitas atau kualitas dewan komisaris tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

H₄: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai signifikansi Kepemilikan Manajerial (KEPMAN) sebesar $0.002 < 0.05$ berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (VALP) pada taraf keyakinan 95%.

Hasilnya adalah **menerima H₄**, ini dapat dikatakan bahwa besar atau kecilnya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial sangat mempengaruhi nilai perusahaan sehingga investor akan melihat kualitas dan menambah kepercayaannya kepada pihak manajerial dan menganggap pihak manajerial mampu untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik.

H₅: Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai signifikansi Dewan Direksi (DEWANDIR) sebesar $0.000 < 0.05$ berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (VALP) pada taraf keyakinan 95%.

Hasilnya adalah **menerima H₅**, ini dapat dikatakan bahwa kuantitas atau kualitas

dewan direksi mempengaruhi nilai perusahaan. Ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan investor kepada dewan direksi sangat tinggi atau mempengaruhi nilai perusahaan yang dikelolanya.

4.4.2. Uji F (F Test)

Tabel 4.7 Hasil Uji F ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52.492	5	10.498	5.718	.000 ^a
	Residual	80.790	44	1.836		
	Total	133.282	49			

a. Predictors: (Constant), DEWANDIR, KEPMAN, DEKOM, KOMIND, KOMAUD
 b. Dependent Variable: VALP

Sumber: data diolah dengan SPSS

Pada dari tabel 4.7 pada uji hipotesa simultan (uji bersama-sama) semua variabel bebas dijelaskan sebagai berikut:

Pada uji hipotesis:

H₆: Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai signifikansi uji F (uji simultan atau bersama-sama) semua variabel bebas tersebut sebesar $0.000 < 0.05$ berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (VALP) pada taraf keyakinan 95%.

Hasilnya adalah **menerima H₆**, ini dapat dikatakan bahwa komisari independen, komite audit, dewan komisari, kepemilikan manajerial, dewan direksi secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi nilai perusahaan.

Hal ini dapat dikatakan bahwa semua pejabat struktural sebagai pihak manajerial atau pengelola perusahaan mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Artinya investor maupun para *stakeholders* mempunyai kepercayaan bahwa nilai perusahaan akan bagus bilamana dipegang oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari Hasil dan Pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
2. Berdasarkan hasil uji t, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
3. Berdasarkan hasil uji t, Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
4. Berdasarkan hasil uji t, Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
5. Berdasarkan hasil uji t, Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
6. Berdasarkan hasil uji F, komisaris independen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dewan direksi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

5.2. Saran

Agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, Rafriny. (2012). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia. *Jurnal Liquidity* Vol.1 (2), Juli-Desember, 91-98.
- Brealey, Richard D., & Myers, Steward, C. (1991). *Principles of Corporate Finance*. McGraw Hill. New York.
- Bank Indonesia. (2006). Peraturan No. 8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, Jakarta.
- Boediono, Gideon SB. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII*, Solo.
- Brigham, Eugene F., and Joel F. Houston, (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, alih bahasa Ali Akbar Yulianto. Buku satu. Edisi sepuluh. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Chen, C.R., Guo, W., Mande, V., (2003). *Managerial Ownership and Firm Valuation: Evidence From Japanese Firms*. *Pacific-Basin Finance Journal*.
- Dewayanto, Totok. (2010). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Nasional.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Indriantoro, Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFEE.
- Jensen, M., and Meckling, W., (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Finance Economics* 3.
- Michelle F.W dan Ch. Rusiti, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, *Jurnal “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI),*.
- Sujoko dan Ugy Soebiantoro. 2007. ” Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 1, h. 41-48.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Smithers, A., and Wright, S, (2000). *Valuing Wall Street: Protecting Wealth in Turbulent Markets, Wall Street, March 2000*.

- Mayangsari, Sekar. (2003). *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Auditor Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi.
- Sukamulja, Sukmawati. (2004). *Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*, 8(1), 1-25.
- Tobin's, James, (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, *Journal of Money, Credit and Banking*.
- Ujiyantho, Muh. Arif., dan Bambang Agus Pramuka, (2007). *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Wahyudi, Untung dan Prasetyaning, Hartini Pawestri. (2006). *Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan : Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang 23-26 Agustus.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**ANALISA PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP PERILAKU INVESTOR
DAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN**

Amelia*), Irma Paramita Sofia

Program Studi Akuntansi, Fakultas Humaniora dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan

*Email: amelia.2013@student.upj.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this paper is to review recent research into the effect of the accounting information in the financial statements on the decision of investor's behavior to invest their influence on stock prices of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The results of this study show/indicate that the content of the information in the financial statements could affect stock prices. This occurs because the better the information possessed by the company, it will influence investors to buy shares. At the end of its holdings to increase demand and lead to rising stock prices.

Key Words: Accounting, Financial Statement, Information, Stock, Investor

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kandungan informasi akuntansi dalam laporan keuangan terhadap perilaku pengambilan keputusan untuk berinvestasi oleh investor dan pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review atas penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan di pasar modal. Berdasarkan literature review yang telah dilakukan, kandungan informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat mempengaruhi harga saham. Hal ini terjadi karena semakin baik informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi para investor untuk membeli saham. Pada akhirnya permintaan saham perusahaan menjadi meningkat dan berakibat terhadap kenaikan harga saham.

Kata Kunci: Akuntansi, Informasi, Laporan Keuangan, Saham, Investor

1. PENDAHULUAN

Perusahaan-perusahaan yang semakin berkembang setiap tahunnya, pasti akan membutuhkan dana lebih atau modal tambahan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Modal tersebut didapatkan dengan cara menjual saham perusahaan kepada investor di pasar modal. Menurut Bastomi (2014) menyatakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan perdagangan saham

dengan tujuan untuk meningkatkan modal perusahaan, sedangkan para investor melakukan transaksi jual beli saham bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang.

Para investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya. Informasi yang dibutuhkan oleh para investor terdapat

pada laporan keuangan perusahaan. Menurut Timuriana dan Nurdiana (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sumber utama informasi akuntansi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai.

Tujuan laporan keuangan juga disebutkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) yang menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Pelaporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan selama periode tertentu (Agustina dan Kianto, 2012).

Pada laporan keuangan, para investor dapat melihat informasi laporan arus kas dan laba perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur investor untuk mengambil keputusan dalam membeli saham suatu perusahaan. Laporan arus kas dan laba perusahaan mempunyai peran penting dalam menarik para investor.

Informasi laporan arus kas yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar, keduanya memiliki aktivitas masing-masing yang saling berkaitan yang mampu menghasilkan informasi (Timuriana dan Nurdiana, 2014). Laporan arus kas memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam Aset bersih perusahaan, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (Mutia, 2012). Penjelasan lebih lanjut oleh Mutia (2012) menyatakan bahwa aktivitas operasi, pendanaan dan investasi dapat menjadi indikator apakah arus kas yang dihasilkan dari aktivitas tersebut cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Informasi lainnya yang dibutuhkan investor adalah tentang laba perusahaan. Laba merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi yang tinggi (Agustina dan Kianto, 2012). Laba bermanfaat bagi perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan serta untuk mengukur keberhasilan perusahaan (Rachmawati, 2014).

Menurut PSAK No 46 (SAK, Revisi 2015), laba akuntansi didefinisikan sebagai laba atau rugi bersih selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laporan laba perusahaan berhubungan harga saham dari perusahaan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Mutia (2012) yang menyatakan bahwa reaksi pasar terhadap harga saham akan tercermin dalam pergerakan harga saham disekitar tanggal pengumuman informasi laba, jika laba yang dilaporkan lebih besar maka harga saham cenderung naik dan sebaliknya.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2011; 205) Laporan Keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan ini digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Penjelasan lebih lanjut menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan (Oktanto, 2014).

Menurut Mas’ud dan Srengga (2012) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat teknis berdasar pada metode dan prosedur-prosedur yang memerlukan penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dapat dicapai. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk membuat proyeksi tentang berbagai aspek finansial perusahaan di masa mendatang.

2.1.2. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2015) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Menurut SAK (Revisi 2015) Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka. Penjelasan lebih lanjut bahwa dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian), kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Kasmir dalam Pongoh (2013) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala.

2.2. Bentuk Laporan Keuangan

Menurut Kasmir dalam Pongoh (2013) mengatakan bahwa terdapat bentuk dalam laporan keuangan yaitu, sebagai berikut:

- Neraca
 - Neraca terdiri atas tiga bagian:
 - 1) Aset (asset)
 - Aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Komponen Aset secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Aset Lancar (current asset)
 - b. Investasi (investment)
 - c. Aset Tetap (fixed asset)
 - d. Aset Tidak Berwujud (intangible asset)
 - e. Aset Lain-lain (other asset)
 - 2) Hutang/kewajiban (liabilities)
 - Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan Aset atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Komponen dari

kewajiban secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban Lancar (current liabilities).
- b. Kewajiban Jangka Panjang (long term liabilities/debt)
- c. Kewajiban Lain-lain (other liabilities).
- d. Kewajiban yang Disubordinasi (subordinated loan).

3) Modal (equity)

Komponen terakhir dari neraca adalah modal sendiri, yaitu selisih dari Aset dengan kewajiban (hutang). Modal ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Komponen modal adalah:

- a. Modal Saham (capital stock)
- b. Agio Saham (surplus/premium)
- c. Laba yang Ditahan (retained earning)
- d. Laba Tahun Berjalan (profit of current year)
- e. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap.

• Laporan Rugi-Laba

Laporan rugi laba adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode tertentu. Melalui laporan rugi-laba dapat diketahui jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu tersebut. Bentuk laporan rugi-laba yang biasa digunakan sebagai berikut:

- a. Bentuk single step, yaitu merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok (operasional) maupun di luar pokok (nonoperasional) dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga dijadikan satu.

- b. Bentuk multiple step, yaitu merupakan pemisahan antara komponen usaha pokok (operasional) dengan di luar pokok (nonoperasional).

2.3. Laba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) laba merupakan selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi; keuntungan (yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi daripada pembeliannya, membungakan uang, dan sebagainya). Sedangkan, Menurut Gunawan dan Sri (2013) menyatakan bahwa pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut Juliana dan Sulardi dalam Oktanto dan Muhammad (2014) menyatakan bahwa laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan Aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Laba dapat digunakan sebagai pengukuran atas efisiensi manajemen serta sebagai pengukur keberhasilan dan sebagai pedoman pengambil keputusan manajemen di masa yang akan datang. Secara umum laba juga telah diterima sebagai ukuran pengembalian investasi. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin baik suatu bisnis penanaman modal (Meythi dan Hartono, 2012).

Menurut Yadiati dalam Agustina dan Kianto (2012), laba akuntansi dapat diartikan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Segi sintaksis, laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban. Laba dianggap telah timbul bila terjadi kenaikan nilai sari kekayaan bersih sebagai akibat adanya transaksi.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2. Segi semantik diartikan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran (wealth), atau diartikan sebagai perubahan kemakmuran, atau perubahan modal (capital). Seseorang dikatakan makmur apabila seseorang dapat mengonsumsi suatu aliran jasa atau kemakmuran selama periode waktu tertentu dan sama sejahteranya pada akhir periode seperti pada awal periode.
3. Segi pragmatik memiliki makna sebagai berikut:
 - Laba sebagai alat prediksi, angka laba dapat memberikan informasi sebagai alat untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk pembagian dividen, dan sebagai alat untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menaksir earnings power dan nilai perusahaan di masa mendatang.
 - Laba sebagai alat pengendalian manajemen, laba dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajer atau divisi dari suatu perusahaan.

Menurut Mutia (2012) menyatakan bahwa laba akuntansi merupakan salah satu informasi dari banyak informasi yang digunakan oleh para investor untuk memperkirakan nilai suatu saham.

2.4. Arus Kas

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2015) menyatakan bahwa laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian takterpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian

laporan keuangan. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

1. Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan.
2. Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Menurut Bastomi (2014) menjelaskan tentang arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan total arus kas sebagai berikut:

- Arus kas operasi meliputi kas yang dihasilkan dan dikeluarkan yang masuk dalam determinasi penentuan laba bersih. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi meliputi arus kas yang timbul karena adanya pengiriman atau produksi barang untuk dijual dan penyediaan jasa, serta pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya terhadap kas yang mempengaruhi pendapatan.
- Arus kas Investasi merupakan arus kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan dan melibatkan aset jangka panjang.
- Arus kas pendanaan meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas

pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan.

- Total arus kas digunakan sebagai informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Informasi tersebut bisa dilihat dari total arus kas perusahaan. Total arus kas adalah jumlah dari arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang kemudian di total dan ditambah saldo kas pada awal tahun. Sehingga informasi dari total arus kas bisa mencerminkan keseluruhan keadaan kas pada perusahaan dan bisa digunakan oleh para investor sebagai dasar informasi untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.5. Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri (Hery, 2015). Penjelasan lebih lanjut menurut Hery (2015) mengatakan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Menurut Rachmawati (2014) memberikan definisi terhadap analisis laporan finansial (financial statement analysis) khusus mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa yang lalu, sekarang dan memproyeksi hasil yang akan datang.

2.6. Investasi

Menurut Fitzgerald, Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan

dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Menurut Puspitaningtyas dan Kurniawan (2012) menyatakan bahwa investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan sejumlah dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Tujuan investor melakukan kegiatan investasi ialah untuk mencari (memperoleh) pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return) yang akan diterima di masa depan.

Mark Tier (2004) dalam buku Manajemen Investasi menyatakan bahwa sebuah sistem investasi yang sukses harus dibangun pada fondasi filosofi investasi yang sesuai dengan realitas. Filosofi investasi adalah serangkaian keyakinan tentang kondisi realitas investasi: bagaimana cara kerja pasar, mengapa harga bergerak, sebuah teori nilai, termasuk bagaimana nilai dapat diidentifikasi dan apa yang menyebabkan return dan kerugian, dan sifat investasi yang baik.

Paradiba dan Nainggolan (2015) mengatakan bahwa harga saham perusahaan akan mempengaruhi keputusan investor dalam hal pengambilan keputusan untuk melakukan perdagangan saham atau tidak. Harga saham penutupan (closing price) yaitu harga yang diminta oleh penjual atau harga perdagangan terakhir untuk suatu periode.

2.7. Pasar modal

Menurut Kardita, Westra dan Purwanti (2013) menyatakan bahwa pasar modal merupakan sarana moneter penghubung pemilik modal (investor) dengan penjamin dana (perusahaan), Selain itu pasar modal merupakan sarana untuk menunjang pembangunan ekonomi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

nasional. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya (www.idx.co.id).

Menurut Aditya (2014) mengatakan bahwa pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang berkepentingan saling mengisi, yaitu calon pemodal (investor) dari satu pihak emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau dana jangka panjang dilain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat (dalam arti abstrak) bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau dana jangka panjang.

2.8. Harga saham

Menurut Resmi dalam Agustina dan Kianto (2012) mengatakan bahwa variasi harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan, selain dipengaruhi pula oleh hukum permintaan dan penawaran. Kinerja keuangan akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar modal. Menurut Sartono dalam Gunardi (2010) Harga saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value di aliran kas yang diharapkan akan diterima. Harga saham yang terjadi di pasar (harga pasar saham) akan sangat berarti bagi perusahaan, karena harga tersebut akan menentukan besarnya nilai perusahaan.

Menurut Paradiba dan Nainggolan (2015) menyatakan bahwa harga saham merupakan tanda penyertaan atau

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, selembarnya adalah selembarnya kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilikinya (berapapun porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembarnya saham mempunyai nilai atau harga.

Menurut Aditya (2014) menyatakan bahwa harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya.

2.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Menurut Weston dan Brigham dalam Paradiba dan Nainggolan (2015) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah:

a. Laba per lembar saham (earning per share/EPS)

Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS) yang diberikan perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Ini akan mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi sehingga harga saham perusahaan akan meningkat.

b. Tingkat bunga

Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, apabila suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham. Hal sebaliknya juga akan terjadi apabila tingkat bunga mengalami penurunan.

Tingkat bunga juga mampu mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan. Suku bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan mempengaruhi laba perusahaan.

c. Jumlah kas deviden yang diberikan

Kebijakan pembagian deviden dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan dalam bentuk deviden dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian deviden merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham karena jumlah kas deviden yang besar adalah yang diinginkan oleh investor sehingga harga saham naik.

d. Jumlah laba yang didapat perusahaan

Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai profit yang cukup baik karena menunjukkan prospek yang cerah sehingga investor tertarik untuk berinvestasi, yang nantinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan.

e. Tingkat Resiko dan Pengembalian

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian saham yang diterima.

2.10. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh kandungan informasi akuntansi terhadap perilaku investor.

H2 : Terdapat pengaruh kandungan informasi akuntansi terhadap harga saham perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang digunakan yaitu jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data tersebut merupakan jurnal-jurnal yang telah disesuaikan dan juga studi pustaka yang berasal dari buku ataupun website untuk mendukung penelitian ini.

3.2. Metode Analisis Data

Pemilihan sampel menggunakan metode *literature review* berdasarkan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang telah disesuaikan dengan topik Kandungan Informasi Akuntansi terhadap perilaku investor dan harga saham perusahaan. Berikut Tabel 3.1 yang menjabarkan mengenai hasil penelitian sebelumnya:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 3.1 Jurnal Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Udayan Kachchhy, 2015	<i>Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies — Empirical Evidence From All Listed Companies From NSE in Power Generation and Distribution Sektor</i>	Penelitian yang dilakukan berdasarkan 20 perusahaan pembangkit daya dan sektor distribusi yang terdaftar di Bursa Efek Nasional tahun 2013-2014, menyatakan: (1)terdapat hubungan positif antara informasi akuntansi dan harga saham, tetapi tingkat signifikansi bervariasi; (2) <i>Inventory turnover ratio</i> memiliki korelasi yang paling signifikan.
2	Junjie Wang, Gang Fu, dan Chao Luo, 2013	<i>Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies - Empirical Evidence from 60 Listed Companies in Shanghai Stock Exchange</i>	Penelitian yang dilakukan berdasarkan 60 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai tahun 2011, menyatakan: (1) terdapat hubungan positif antara informasi akuntansi dan harga saham tetapi tingkat signifikan bervariasi; (2) laba per saham dan <i>return on equity</i> memiliki korelasi yang paling signifikan.
3	Udayan S Kachchhy, Bhavik U Swadia, dan Dr, Shailja C Tiwari, 2014	<i>Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies – Empirical Evidence from All Listed Companies From NSE in Oil and Gas Sektor</i>	Penelitian yang dilakukan berdasarkan 25 perusahaan Minyak dan Gas yang terdaftar di Bursa Efek Nasional 2013-2014 menghasilkan: (1) hubungan positif antara informasi akuntansi dan harga saham tetapi tingkat signifikan bervariasi; (2) laba per saham memiliki korelasi yang paling signifikan
4	Adaramola Anthony Olugbenga, 2014	<i>The Relationship Between Financial Accounting Information and Market Values of Quoted Firms in Nigeria</i>	Menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara informasi akuntansi dan harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria.
5	Sylvester Eriabie dan Ben-Caleb Egbide, 2016	<i>Accounting Information and Share Prices in the Food and Beverage, and Conglomerate sub-sektors of the Nigerian Stock Exchange</i>	Penelitian ini menggunakan metode Ohlson dan metode regresi berganda, pada <i>Conglomerate sub-sektors</i> harga pasar per saham memiliki hasil positif namun tidak signifikan terhadap nilai buku per saham dan pendapatan per

			saham. Sedangkan pada sub sektor <i>food and beverages</i> , harga pasar per saham memiliki hasil positif dan signifikan terhadap nilai buku per saham dan pendapatan per saham.
6	Evi Mutia, 2012	Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham	Informasi laba, aktivitas investasi arus kas dan kegiatan pembiayaan arus kas berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45, sedangkan operasi aktifitas arus kas dan jumlah arus kas tidak pengaruh signifikan terhadap harga saham LQ 45.
7	Meythi dan Selvy Hartono, 2012	Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham	Variabel laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan variabel arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel laba, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
8	Lidya Agustina dan Ferlysia Kianto, 2012	Pengaruh Informasi Laba Akuntansi Terhadap <i>Abnormal Return</i> pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Indeks LQ45	Secara keseluruhan diperoleh koefisien regresi laba bersih yang menunjukkan tanda negatif. Berdasarkan uji koefisien ANOVA diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara laba bersih terhadap abnormal return saham.
9	Ahmad Yazid Al Bastomi, 2014	Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan <i>Food and Beverages</i> yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia	Arus kas aktivitas investasi berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, sedangkan arus kas aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan total arus kas tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.
10	Tiara Timuriana dan Ardi Nurdiana, 2014	Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Harga Saham pada PT Astra Agro Lestari Tbk Di Bursa Efek Indonesia	Arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan total arus kas masing-masing mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pengambilan keputusan investasi, syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan informasi yang relevan dengan tujuan investor. Dengan adanya informasi yang relevan, maka investor dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Sebab, apabila terlambat atau salah dalam mengambil keputusan maka akan mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Untuk itulah, investor perlu melakukan analisis informasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap berbagai produk investasi dan bagaimana tindakan aktif investor dalam pasar modal.

Berdasarkan *literature review* yang telah dilakukan, kandungan informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat mempengaruhi harga saham. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kachchhy (2015) atas studi kasus pembangkit daya dan sektor distribusi, yang menyatakan adanya hubungan positif antara informasi akuntansi dengan harga saham tetapi tingkat signifikan bervariasi. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Wang et al. (2013) atas studi kasus di Bursa Efek Shanghai, Kachchhy et al. (2014) atas studi kasus perusahaan minyak dan gas di Bursa Efek Nasional India, dan Olugbenga (2014) atas studi kasus di Bursa Efek Nigeria.

Pada ketiga jurnal diatas yaitu Kachchhy (2015), Wang et al. (2013), dan Kachchhy et al. (2014), mereka menggunakan delapan indeks akuntansi sebagai media untuk menganalisa dan para investor biasa menggunakan indeks tersebut. Para investor menggunakan delapan indeks ini karena sudah mewakili profitabilitas, pengembangan kemampuan, kemampuan operasi dan kemampuan perusahaan membayar hutang. Indeks tersebut lebih dikenal sebagai rasio keuangan untuk menganalisa laporan keuangan. Para

investor akan lebih mudah memahami laporan keuangan dengan menggunakan rasio tersebut, karena hasil perhitungan dari rasio tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Disisi lain, Olugbenga (2014) menggunakan laba, nilai buku, dividen dan arus kas sebagai media untuk memprediksi harga saham.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eriabie dan Egbide (2016) pada studi kasus di *Food and Beverage* dan *Conglomerate* sub-sektor yang berada di Bursa Efek Nigeria untuk mengetahui apakah informasi akuntansi merupakan nilai yang relevan atau tidak. Hasil yang didapat yaitu pada *Conglomerate* sub-sektor harga pasar per saham memiliki hasil positif tidak signifikan terhadap nilai buku per saham dan pendapatan per saham, sedangkan *Food and Beverage* memiliki hasil positif signifikan terhadap nilai buku per saham dan pendapatan per saham. Hal ini terjadi karena nilai yang relevan tergantung pada sektor perusahaannya, jika perusahaan tersebut mempunyai produk yang seragam maka manipulasi pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih beragam produknya. Para investor membutuhkan informasi yang relevan agar terhindar dari manipulasi pendapatan yang akan merugikan pihak investor.

4.1. Informasi Laba Perusahaan

Harga saham dapat dipengaruhi oleh laba perusahaan, karena laba perusahaan mempunyai kandungan informasi yang tinggi bagi para investor dalam pengambilan keputusan. Suatu perusahaan mempunyai laporan laba yang baik setiap tahunnya dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2012), berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa laba akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, maka semakin

meningkat laba akuntansi pada periode pengamatan maka harga saham LQ 45 akan cenderung naik dan sebaliknya. Hasil tersebut juga sejalan dengan Meythi dan Hartono (2012) menyatakan bahwa laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap harga saham. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa **H1 diterima.**

4.2. Informasi Arus Kas Perusahaan

Hal lain yang mempengaruhi harga saham yaitu informasi arus kas, karena informasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi arus kas dimasa yang akan datang dalam mendistribusikan kas. Arus kas berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan total arus kas. Pada penelitian yang dilakukan Timurina dan Nurdiana (2014) menyatakan bahwa secara parsial aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan total arus kas berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Mutia (2012) menyatakan bahwa aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham secara parsial sejalan dengan hasil penelitian Timurina dan Nurdiana, tetapi untuk aktivitas operasi dan total arus kas tidak sejalan karena hasilnya secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa **H2 diterima.**

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemahaman dari kesepuluh jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan informasi sangat diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan seperti investor. Pada laporan keuangan, investor dapat melihat laba perusahaan dan arus kas perusahaan. Selain itu, pengguna laporan keuangan dapat menggunakan rasio keuangan

dalam mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa investor (calon investor) cenderung berperilaku rasional. Investor (calon investor) perlu mempertimbangkan informasi secara jelas atas suatu peristiwa ekonomi jika akan melakukan pengambilan keputusan investasi. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk dapat memperkirakan keterkaitan informasi tersebut dengan perubahan harga saham. Pasar menyajikan beragam informasi dan seharusnya investor menganalisis beragam informasi tersebut. Sebelum pada tahapan pemanfaatan informasi untuk mengambil keputusan, investor akan terlebih dahulu melakukan pencarian informasi secara aktif dan terus-menerus.

Investor (calon investor) harus mengetahui keadaan serta prospek perusahaan yang menjual saham. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis informasi akuntansi yang relevan. Semua informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan transaksi di pasar modal yang tercermin pada perubahan harga.

Kandungan informasi perusahaan juga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin baik informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi para investor untuk membeli saham. Pada akhirnya permintaan saham perusahaan menjadi meningkat dan berakibat terhadap kenaikan harga saham.

5.2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik kandungan informasi akuntansi adalah diharapkan dapat menggunakan data primer dari perusahaan dan menambahkan variabel-variabel yang dapat dikaitkan dengan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

topik penelitian ini. Selain itu diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengkuantifikasi variabel-variabel penelitian yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Bagi perusahaan disarankan untuk menjaga informasi agar tetap relevan demi meningkatkan harga saham perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rendra Yuli. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Rokok di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 3 No. 5.
- Agustina, Lidya dan Ferlysia Kianto. (2012). Pengaruh Informasi Laba Akuntansi Terhadap Abnormal Return pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Indeks LQ45. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2.
- Ali, Ustman. (2015). *Pengertian dan Jenis Investasi Menurut Pakar*. Diunduh pada tanggal 8 November 2016 dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut-pakar.html>
- Azis, Musdalifah, Sri Mintarti dan Maryam Nadir. (2015). *Manajemen Investasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bastomi, Ahmad Yazid Al. (2014). Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan Food and Beverages yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol. 3 No. 1.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Eriabie, Sylvester dan Ben-Caleb Egbide. (2016). Accounting Information and Share Prices in the Food and Beverage, and Conglomerate sub-sektors of the Nigerian Stock Exchange. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, Vol. 2 Issue 3.
- Gunardi, Ardi. (2010). Perubahan Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Food and Beverages. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1.
- Gunawan, Ade dan Sri Fitri Wahyuni. (2013). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 13 No.1/2013.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Indonesia Stock Exchange (IDX). (2010). Diunduh pada tanggal 8 November 2016 dari <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>
- Kachchhy, Udayan S, Bhavik U Swadia, dan Dr, Shailja C Tiwari. (2014). Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies – Empirical Evidence from All Listed Companies From NSE in Oil and Gas Sektor. *International Journal of Research & Development in Technology and Management Science-Kailash*, Vol. 21 Issue 5.

- Kachchhy, Udayan. (2015). Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies — Empirical Evidence From All Listed Companies From NSE in Power Generation and Distribution Sektor. *Indian Journal of Research*, Vol. 4 Issue 5.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). Diunduh pada tanggal 8 November 2016 dari <http://kbbi.web.id/laba>.
- Karditha, Inocencio Arya Wahyudi, I Ketut Westra, Ni Putu Purwanti. (2013). Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pembuatan Prospektus Pada Kegiatan Di Pasar Modal. *Kertha Semaya*, Vol. 1 No. 11.
- Mas'ud, Imam, dan Reva Maymi Srengga. (2012). Analisis Rasio Keuangan Untuk memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Meythi dan Selvy Hartono. (2012). Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 3 No. 7.
- Mutia, Evi. (2012). Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1.
- Oktanto, Danny dan Muhammad Nuryatno. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008-2011. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1 No.1/2014.
- Olugbenga, Adaramola Anthony. (2014). The Relationship Between Financial Accounting Information and Market Values of Quoted Firms in Nigeria. *Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics (GJCRA)*, Vol. 1 Issue 1.
- Paradiba, Lailan, dan Karlonta Nainggolan. (2015). Pengaruh Laba Bersih Operasi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1.
- Pongoh, Marsel. (2013). Analisa Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources TBK. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3.
- Puspitaningtyas, Zarah dan Agung W Kurniawan. (2012). Prediksi Tingkat Pengembalian Investasi Berupa Devidend Yield Berdasarkan Analisis Financial Ratio. *Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1.
- Rachmawati, Anggun Arif. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan dan Kebijakan Dividen Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No.3.
- Rachmawati, Anggun Arif. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan dan Kebijakan Dividen Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol 3 No.3/2014.
- Timuriana, Tiara dan Ardi Nurdiana. (2014). Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Harga Saham pada PT

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Astra Agro Lestari Tbk Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Volume Semester II.

Wang, Junjie, Gang Fu, dan Chao Luo. (2013). Accounting Information and Stock Price Reaction of Listed Companies - Empirical Evidence from 60 Listed Companies in Shanghai Stock Exchange. *Journal of Business & Management*, Vol. 2 Issue 2.

**PENGARUH UKURAN DANA KELOLAAN,
UMUR REKSA DANA, DAN BIAYA OPERASI REKSA DANA
TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM
(PERIODE TAHUN 2011)**

Arie Apriadi Nugraha

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung

Email: arie.apriadi@widyatama.ac.id

ABSTRACT

This study aims at examining the effect of the managed fund size, mutual fund age, and fund operating cost, either simultaneously or partially to the period of performance of equity mutual funds in 2011. This study uses descriptive and verification research methods. The data used are secondary data derived from official site cash, the official website of BAPEPAM-LK, the financial reports, as well as mutual fund prospectus which is entirely published during the period in 2011. The number of mutual fund shares is sampled by 22 mutual fund shares of the total number as much as 79 active equity funds during 2011. The data analysis method used is multiple regression analysis in which the effect is simultaneously tested by using the F test and it is partially tested by using the T test. These results indicate that all of the superior performance of equity mutual funds (outperform) the market performance. The results of the study shows that there is positive simultaneously insignificant collectively between the variable of managed fund size, mutual fund age and fund operating cost. Partial test proves that the variable managed fund size has no significant negative effect, operating cost of mutual fund have no significant positive effect meanwhile variable life mutual fund has a significant positive effect. Multiplier coefficient (R²) is 0.262 or 26.2% while the remaining 73.8% is explained by other factors that are not addressed in this study.

Key Words: Managed Fund Size, Mutual Fund Age, Mutual Fund Operations Costs, and Equity Fund Performance Period in 2011.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana, baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja reksa dana saham periode tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari situs resmi kontan, situs resmi BAPEPAM-LK, laporan keuangan, serta prospektus perusahaan reksa dana saham yang seluruhnya dipublikasikan selama periode tahun 2011. Jumlah reksa dana saham yang dijadikan sampel adalah sebanyak 22 reksa dana saham dari total jumlah reksa dana saham sebanyak 79 reksa dana saham yang aktif sepanjang tahun 2011. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dimana pengaruh secara simultan diuji dengan menggunakan uji F dan pengaruh secara parsial diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua kinerja reksa dana saham unggul (outperform) terhadap kinerja pasar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif tidak signifikan secara bersama-sama

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

antara variabel ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana. Pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel ukuran dana kelolaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, variabel umur reksa dana memiliki pengaruh positif signifikan, dan biaya operasi reksa dana memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Koefisien multiplier (R^2) sebesar 0,262 atau 26,2% sedangkan sisanya sebesar 73,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Ukuran Dana Kelolaan, Umur Reksa Dana, Biaya Operasi Reksa Dana, dan Kinerja Reksa Dana Saham Periode Tahun 2011.

1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan bisnis di dunia semakin besar dan massif sehingga semakin menghilangkan batasan bisnis antar satu negara dengan negara lainnya. Hal ini diawali dengan kemunculan era globalisasi diseluruh negara yang ada di dunia. Dalam era globalisasi ini pasar modal merupakan wahana alternatif untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal juga memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Selain sektor perbankan, pasar modal selama ini telah menjadi sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat. Masyarakat dapat melakukan investasi di pasar modal dengan berbagai pilihan jenis investasi yang sekiranya cocok dengan keinginan investor dapat menanamkan dananya pada sekuritas – sekuritas seperti saham biasa, saham *preferen*, obligasi, obligasi konversi, sertifikat *right*, waran, sertifikat reksadana, deposito dan sebagainya.

Di dunia usaha, sebelumnya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Ada yang tingkat keamanannya tinggi, namun tingkat keuntungan hasil investasinya terbatas, seperti tabungan. Ada juga media investasi yang relatif kurang *liquid* karena memerlukan waktu untuk menjualnya, misalnya tanah.

Investasi di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi akan memberikan hasil investasi yang lebih besar daripada investasi di deposito, namun yang harus diingat oleh investor adalah semakin tinggi harapan akan suatu hasil investasi maka akan selalu dibarengi dengan kemungkinan munculnya risiko yang semakin tinggi pula.

Risiko terbesar dalam investasi adalah hilangnya seluruh nilai investasi yang ditanamkan. Hal ini mungkin saja terjadi jika bank di mana kita menempatkan deposito bangkrut atau penerbit obligasi yang kita beli bangkrut sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar bunga dan nilai pokok investasi. Begitu pula investasi saham, terdapat kemungkinan bahwa saham tersebut tidak mempunyai nilai lagi karena perusahaannya mengalami kebangkrutan. Disinilah perlunya kehati-hatian dalam pemilihan bank atau perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pilihan investasi. Oleh karena itu dalam berinvestasi diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik serta risiko dari masing-masing instrumen yang akan dipilih.

Investor pada umumnya melakukan aktivitas investasi dengan maksud untuk mendapatkan *return* yang lebih besar daripada risiko yang dihadapinya. Pengetahuan tentang risiko merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh setiap investor maupun calon investor. Seorang investor yang rasional sebelum mengambil keputusan

investasi, paling tidak harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pendapatan yang diharapkan (*expected return*) dan risiko (*risk*) yang terkandung dari alternatif investasi, tetapi besar kecilnya risiko tersebut tergantung pada jenis investasinya.

Untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko perlu dilakukan diversifikasi media investasi, selain untuk faktor keamanan diversifikasi juga bisa mengoptimalkan tingkat hasil yang ingin dicapai, serta bila terjadi kerugian pada satu aset dapat di *cover* dengan aset lain untuk menghindari kerugian yang maksimal. Konsekuensinya, kita perlu membangun suatu portofolio aset, yakni sekumpulan aset dengan berbagai profil risiko yang berbeda seperti saham, obligasi, deposito, dan lainnya. Repotnya, untuk membangun portofolio ideal diperlukan dana yang relatif besar.

Reksa dana kemudian muncul sebagai solusi agar pemodal tak lagi kesulitan dalam berinvestasi. Kesulitan berupa dana yang mendesak, keterbatasan pengetahuan dan informasi, kurangnya waktu dan tenaga untuk memonitor portofolio, dan risiko-risiko lain dapat diatasi dengan reksadana.

Reksa dana mulai dikenal pertama kali di Indonesia yaitu pada tahun 1995 sejak diterbitkannya reksa dana berbentuk perseroan oleh PT BDNI Reksa Dana, penerbitan reksa dana ini seiring dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): "Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi".

Reksa dana dibentuk oleh manajer investasi dan bank kustodian melalui akta kontrak investasi kolektif

(KIK) yang dibuat notaris. Manajer investasi akan berperan sebagai pengelola dana investasi yang terkumpul dari sekian banyak investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek, seperti T/D, SBI, obligasi, dan saham. Sementara, bank kustodian akan berperan dalam penyimpanan dana atau portofolio milik investor serta melakukan penyelesaian transaksi dan administrasi reksa dana. Reksa dana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar. Melalui reksa dana, investor sudah tidak perlu repot mengelola portofolio investasinya sendiri.

Saat ini perkembangan reksa dana di Indonesia terus berkembang seiring dengan perekonomian Indonesia yang hingga tahun 2011 berada dalam kondisi membaik. Beberapa indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi yang terkendali, suku bunga yang menurun, nilai tukar yang stabil, dan indeks saham yang tumbuh pesat telah membawa pengaruh positif bagi perkembangan industri sekuritas.

Perekonomian Indonesia yang terus membaik hingga tahun 2011 memiliki korelasi yang positif dengan meningkatnya minat masyarakat dalam melakukan investasi di Indonesia khususnya reksadana. Meningkatnya minat masyarakat dalam menitipkan dananya pada manajer investasi dapat dilihat dari bertambahnya aset reksa dana semenjak awal kemunculannya di Indonesia.

Menurut data dari BAPEPAM perkembangan reksa dana selama empat tahun terakhir (2008-2011) mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Berikut data perkembangan reksa dana selama empat tahun terakhir, dapat kita lihat pada tabel 1.1.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 1.1 Perkembangan Reksa Dana Periode 2008 s.d 2011

Periode	Jumlah Reksa Dana	NAB (Rp. juta)	Jumlah Unit Penyertaan
2008	602	74,93	60,98
2009	673	113,17	70,04
2010	714	170,928	81,59
2011	762	201,53	98,155

Sumber: www.bapepam.go.id (diolah kembali)

Selama tahun 2008 jumlah Reksa Dana di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 473 reksa dana pada akhir Desember 2007 menjadi 602 reksa dana per akhir Desember 2008 (meningkat 27,27 %).

Pada tahun 2009 dari sisi dana kelolaan, jumlah reksa dana mengalami peningkatan dari 604 reksa dana pada akhir Desember 2008 menjadi 673 reksa dana pada tanggal 16 Desember 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 11,42 % dibandingkan tahun 2008. Sementara Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan jumlah unit penyertaan reksa dana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. NAB reksa dana meningkat dari 74,93 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi Rp 113,17 triliun pada tanggal 28 Desember 2009 atau meningkat sebesar 51,03%, sedangkan jumlah unit penyertaan reksa dana meningkat dari 60,98 miliar pada akhir Desember 2008 menjadi 70,04 miliar atau meningkat sebesar 14,86 %.

Di tahun 2011 dari sisi pengelolaan produk investasi, jumlah reksa dana sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,72% dari 714 pada akhir tahun 2010 menjadi 762 pada tanggal 28 Desember 2011. Sementara itu NAB dan jumlah unit penyertaan reksa dana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. NAB reksa dana meningkat dari Rp 170,928 triliun pada akhir Desember 2010 menjadi Rp. 201, 53 triliun pada tanggal 28 Desember 2011 atau meningkat sebesar 17,90%, sedangkan jumlah unit penyertaan reksa dana meningkat dari 81,59 miliar unit

pada akhir Desember 2010 menjadi 98,155 miliar unit pada tanggal 28 Desember 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 20,30 %.

Reksa Dana merupakan investasi yang sangat fleksibel, karena dikelola oleh Manajer Investasi, sehingga investor cukup hanya memperhatikan nilai aktiva bersih yang dimilikinya. Investasi Reksa Dana sangat cocok bagi investor yang tidak memiliki waktu yang cukup banyak, memiliki keterbatasan kapasitas dan pengetahuan investasi, dan keterbatasan dana.

Berdasarkan peraturan Bapepam & LK, penggolongan jenis reksa dana di Indonesia berdasarkan kategori instrumen di mana reksa dana melakukan investasi dibagi dalam empat jenis kategori, yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran.

Reksa dana yang mempunyai risiko tinggi adalah reksa dana saham tetapi berpotensi menghasilkan *return* yang lebih tinggi. *High risk high return* merupakan logika yang paling tepat untuk menggambarkan reksa dana saham. Berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, dimana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga, efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham. Selain hasil dari *capital gain*, efek saham juga memberikan hasil lain berupa dividen. Secara teori dan berdasarkan pengalaman yang sudah dibuktikan di seluruh dunia, investasi pada saham adalah jenis investasi jangka panjang yang sangat

menjanjikan. Investasi saham merupakan investasi pada perusahaan-perusahaan yang dalam jangka panjang akan memberikan hasil investasi yang lebih besar dari pada deposito dan obligasi. Namun, dalam jangka pendek, terdapat risiko, karena harga-harga saham yang selalu berfluktuasi.

Perkembangan *market share* (pangsa pasar) reksa dana berdasarkan jenisnya selama empat tahun terakhir (2008-2011) dapat kita lihat pada tabel 1.2 komposisi jumlah dan NAB reksa dana selama empat tahun terakhir (2008-2011) dibawah ini:

Tabel 1.2 Komposisi Jumlah dan NAB Reksa Dana Periode 2008 s.d 2011

Periode	Reksa Dana							
	Pasar Uang		Pendapatan Tetap		Saham		Campuran	
	Jumlah Reksa Dana (unit)	NAB (triliun)	Jumlah Reksa Dana (unit)	NAB (triliun)	Jumlah Reksa Dana (unit)	NAB (triliun)	Jumlah Reksa Dana (unit)	NAB (triliun)
2008	29	2.0	134	7.2	58	20.1	96	6.5
2009	26	5.2	123	15.9	62	37.2	101	11.8
2010	27	9.6	101	26,3	63	44,7	93	17,7
2011	29	9,6	106	28,4	78	60,4	91	21,4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah reksa dana saham selama empat tahun terakhir (2008-2011) mengalami perkembangan pesat seiring dengan performa yang membaik dari pasar saham, reksa dana saham pun mengalami kecenderungan yang baru, yakni menggeser pamor reksa dana pendapatan tetap dengan semakin tertariknya para investor untuk menanamkan dananya pada reksa dana saham.

Pada tahun 2008 sampai dengan 2011 jumlah reksa dana saham terus mengalami peningkatan dari 58 unit hingga 78 unit dengan komposisi NAB yang terus meningkat pula dari 20,1 triliun hingga di akhir tahun 2011 mencapai 60,4 triliun. Hal ini berbeda dengan tiga reksa dana lainnya yang jumlah reksa dana dan kenaikan komposisi NAB nya mengalami fluktuatif dan tidak signifikan.

Pada akhir tahun 2008 jumlah reksa dana saham mencapai 58 unit dengan jumlah dana kelolaan mencapai 20,1 triliun. Tahun 2009, perkembangan

jumlah reksa dana saham mencapai 62 unit dengan jumlah dana kelolaan 37,2 triliun, terjadi peningkatan jumlah unit reksa dana saham sebesar 7% dan jumlah dana kelolaan sebesar 85% dibandingkan dengan tahun 2008. Tahun 2010 pertumbuhan jumlah reksa dana saham masih lebih besar dibandingkan jenis reksa dana lainnya yaitu jumlah reksa dana mencapai 63 unit dan jumlah dana kelolaan mencapai 44,7 triliun, terjadi peningkatan jumlah reksa saham sebesar 20%. Hingga 30 Desember 2011, jumlah dana kelolaan Indonesia masih berada di urutan pertama, yaitu sebesar mencapai 60,4 triliun dengan jumlah reksa dana mencapai 78 unit, terjadi peningkatan jumlah reksa dana saham sebesar 24% dan jumlah dana kelolaan sebesar 35%. Hal ini menunjukkan reksa dana saham menjadi jenis reksa dana yang menjadi pemegang terbesar pangsa pasar.

Membaiknya kondisi reksa dana saham di Indonesia, selain terlihat dari jumlah dana kelolaan yang terus meningkat, hal ini juga ditandai dengan bertambahnya produk reksa dana.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Semakin banyak manajer investasi yang menerbitkan produk reksa dana, maka akan semakin banyak pula produk reksa dana yang ditawarkan kepada investor dan tentunya akan menguntungkan bagi investor karena akan semakin mudah menyesuaikan karakternya dalam berinvestasi.

Kinerja reksadana perlu diperhatikan dalam melakukan investasi di reksa dana yang akan diambilnya. Kinerja reksadana ini kemudian menjadi suatu hal yang amat penting untuk diperhatikan di dalam melakukan sebuah investasi. Menurut Peterson et al (81: 2001) dalam *journal of investing* yang berjudul: “*Explaining the Performance of Domestic Equity Mutual Funds*” karakteristik reksa dana yang dapat digunakan untuk melihat kinerja reksa dana saham diantaranya adalah ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana.

Ukuran dana kelolaan mencerminkan besarnya aset yang dikelola di dalam reksa dana atau pertumbuhan besarnya aset yang dikelola di dalam reksa dana yang dinamakan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Semakin besar jumlah aset yang dikumpulkan dalam sebuah reksa dana, dapat memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi pada reksa dana tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Semakin besar aset maka akan semakin memudahkan terciptanya *economies of scale* yang akan berdampak pada penurunan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah secara tidak langsung seperti biaya manajemen, biaya kustodian, biaya transaksi, dan biaya lainnya.

Besar kecilnya jumlah aset yang dikelola di dalam sebuah reksa dana (NAB) menunjukkan kemampuan manajer investasi dalam mengelola dana yang berhasil dihimpun dari para pemodal yang menginvestasikan dananya. Setiap pemodal yang menginvestasikan dananya dalam reksa dana akan memperoleh

unit penyertaan reksa dana dalam jumlah yang proporsional dengan jumlah dana yang diinvestasikannya. NAB dari masing-masing unit penyertaan reksa dana disebut dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/unit).

NAB/unit merupakan “harga beli” per Unit Penyertaan yang harus kita beli, jika kita ingin berinvestasi dengan membeli Unit penyertaan reksa dana. Ini juga sekaligus menjadi “harga jual” per Unit Penyertaan jika kita ingin mencairkan investasi kita, dengan menjual Unit Penyertaan reksa dana yang kita miliki. Perubahan NAB/unit memberikan indikator kinerja investasi suatu reksa dana, (Eko, 53: 2012).

Umur reksa dana dapat digunakan dalam menilai kinerja reksa dana dengan cara melihat tanggal saat reksa dana ditawarkan. Umur masing-masing reksa dana dapat berbeda antara satu reksa dana dengan reksa dana lainnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan diterbitkannya setiap reksa dana. Umur reksa dana dapat juga menilai dan membandingkan kinerja dari manajer investasi.

Mutia (34: 2004) mengatakan bahwa umur reksa dana mencerminkan pengalaman dari manajer investasinya didalam mengelola reksadana tersebut. Semakin lama umur suatu reksa dana, maka manajer investasinya semakin berpengalaman didalam mengelola portofolio bila dibandingkan dengan reksa dana yang berumur lebih muda.

Sebelum melakukan investasi pada produk reksa dana, seyogianya para investor juga perlu memahami apa saja jenis-jenis biaya apa saja yang dibebankan baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan suatu reksa dana serta berapa besaran biaya dari masing-masing pos biaya tersebut. Biaya yang secara langsung dibebankan kepada kita umumnya berupa biaya pembelian (*selling fee*) yang dibebankan pada saat kita membeli Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption*

fee) yang dibebankan pada saat kita menjual Unit Penyertaan yang kita miliki.

Besarnya biaya pembelian saat ini berkisar antara 1-3% dari nilai transaksi pembelian. Sementara, biaya penjualan umumnya bervariasi tergantung pada jangka waktu lamanya kita berinvestasi. Besarnya *redemption fee* antara 1-2% dari nilai transaksi penjualan kembali. Tergantung pada kebijakan Manajer Investasi pengelolanya, kisaran biaya pembelian dan penjualan, bisa saja berada di luar kisaran yang dicantumkan di atas.

Biaya yang tidak secara langsung dibebankan kepada investor meliputi biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian, biaya transaksi, biaya auditor, biaya pajak, dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan investasi. Biaya ini dikatakan tidak secara langsung dibebankan kepada investor karena dibebankan kepada reksa dana.

Besar kecilnya biaya-biaya diatas akan mempengaruhi hasil investasi yang akan diberikan kepada investor. Perhitungan pengenaan biaya-biaya ini dilakukan pada saat perhitungan harga NAB per unit sehingga hasil investasi yang diketahui oleh investor melalui perubahan harga NAB per unit sudah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya tersebut.

Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu penentuan yang dilakukan secara periodik untuk menentukan efektifitas portofolio berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu risiko dan *return*. Penetapan risiko dan *return* sebagai kriteria penilaian didasarkan pada asumsi bahwa dua hal ini yang penting bagi investor. Permasalahan dalam penilaian kinerja reksa dana adalah bagaimana menentukan kombinasi antara risiko dan *return* yang terbaik. Pengukuran kinerja reksa dana dapat dilakukan dengan perbandingan langsung dan *single measurement*. Pengukuran dengan menggunakan *single*

measurement yang biasa digunakan antara lain *sharpe*, *treydnor*, dan *jensen measure*. Penulis dalam melakukan penelitian ini akan mencoba menggunakan pengukuran kinerja reksa dana dengan menggunakan metode *Sharpe Measure*. Hal ini didasarkan pada *systematic risk* dan *unsystematic risk* yang melekat pada reksa dana.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Investasi

Hakekat dari investasi dapat diawali dengan memahami pengertian investasi tersebut. Pengertian investasi yang berkembang saat ini sangat variatif. Berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi investasi yang diambil dari beberapa sumber.

Modul 2: *Certified Financial Planer* (dalam Mangasa Simatupang, 2010: 8) menjelaskan pengertian investasi sebagai berikut: "Suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis *assets* selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi"

Eduardus Tandelin (2010: 2) memberikan pengertian investasi sebagai berikut: "Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang"

2.1.1 Perusahaan Investasi

Perusahaan investasi adalah perantara keuangan yang menghimpun dana dari para investor perorangan dan menanamkan dana tersebut pada beragam sekuritas atau aset lainnya.

Bodie (2005: 141) menggolongkan perusahaan investasi menjadi dua tipe perusahaan yaitu: "*unit investment trust* dan *managed investment companies*".

1. Unit Investment Trust

Himpunan dana yang diinvestasikan dalam sebuah portofolio tetap (tidak

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

berubah) sepanjang umur reksa dana tersebut.

2. *Managed Investment Companies*

Managed investment companies pada dasarnya adalah perusahaan independen, penasihat investasi, perusahaan yang berkaitan dengan pialang, atau perusahaan asuransi. Terdapat dua jenis *managed investment companies* yaitu: Reksa dana terbuka (*open-end funds*) dan Reksa dana tertutup (*close-end funds*). Reksa dana terbuka merupakan jenis perusahaan investasi dimana pada jenis ini perusahaan investasi selalu siap untuk menebus atau menerbitkan unit penyertaan pada nilai aktiva bersihnya (meskipun pembelian dan penebusan akan melibatkan beban penjualan), sedangkan Reksa dana tertutup merupakan perusahaan investasi yang tidak melakukan penebusan atau penerbitan unit penyertaan. Investor pada reksa dana tertutup yang ingin menguangkan unit penyertaan mereka harus menjualnya kepada investor lain.

2.1.2 Tujuan Investasi

Eduardus Tandelin (2010: 8) mengemukakan ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.1.3 Return Investasi

Menurut Eduardus Tandelin (2010: 102) sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu *yield* dan *capital gain (loss)*. *Yield* merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jika kita berinvestasi pada sebuah obligasi misalnya, maka besarnya *yield* ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayarkan. Demikian pula halnya jika kita membeli saham, *yield* ditunjukkan oleh besarnya dividen yang kita peroleh sedangkan *capital gain (loss)* sebagai komponen kedua dari *return* merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat hutang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. Dalam kata lain, *capital gain (loss)* bisa juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas.

Dari kedua sumber return di atas, maka kita bisa menghitung return total suatu investasi dengan menjumlahkan *yield* dan *capital gain* yang diperoleh dari suatu investasi. Perlu diketahui bahwa *yield* hanya akan berupa angka nol (0) dan positif (+), sedangkan *capital gain (loss)* bisa berupa angka minus (-), nol (0) dan positif (+). Secara matematis *return* total suatu investasi bisa dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Return Total} = \text{yield} + \text{capital gain (loss)}$$

2.1.4 Risiko Investasi

Eduardus Tandelin (2010: 102) menjelaskan bahwa risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar risiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut antara lain: risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko financial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara (*country risk*).

Dalam teori portofolio modern telah diperkenalkan bahwa risiko investasi total dapat dipisahkan menjadi dua jenis risiko atas dasar apakah suatu jenis risiko tertentu dapat dihilangkan melalui diversifikasi atau tidak. Kedua jenis risiko tersebut adalah risiko sistematis dan risiko tidak sistematis.

Risiko sistematis atau dikenal dengan risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan, Eduardus Tandelin (2010: 104). Mangasa Simatupang (2010: 44) menyebutkan juga bahwa perubahan yang terjadi di pasar di dalam menyebabkan terjadi risiko sistematis diantaranya faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga dan kondisi politik. Risiko sistematis ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara keseluruhan.

Risiko tidak sistematis atau dikenal juga dengan risiko spesifik (risiko perusahaan) adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan, Eduardus Tandelin (2010: 104). Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Mangasa Simatupang (2010: 44) menyebutkan bahwa risiko nonsistematis atau sering disebut juga sebagai risiko unik adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap

jenis industri memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi secara spesifik. Contoh risiko nonsistematis yaitu: risiko finansial, risiko industri, risiko negara, dsb. Risiko nonsistematis dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio.

2.2 Reksa Dana

2.2.1 Pengertian Reksa Dana

Berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi reksa dana yang diambil dari beberapa sumber.

Undang-undang pasar modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 menyebutkan bahwa "reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi".

Tjiptono Darmaji dan Henry M Fakhrudin dalam buku Pasar Modal Di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab (2001) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan reksa dana adalah "sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas".

Selanjutnya reksa dana menurut buku *A Guide to Understanding Mutual Funds 1998* disebutkan bahwa "*Mutual fund is a company that invest in a diversified portfolio securities*".

Eduardus Tandelin (2010: 48) menjelaskan bahwa "reksa dana adalah wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor".

Dari pengertian reksa dana di atas, dapat disebutkan bahwa karakteristik instrumen reksa dana sebagai media investasi yang tidak langsung, dikarenakan untuk melakukan investasi pada reksa dana, para pemodal menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut manajer investasi sebagai

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pengelola portofolio investasi bagi para nasabahnya.

2.2.2 Klasifikasi Reksa Dana

Eko Priyo Pratomo (2009: 68) menjelaskan dari sisi peraturan Bapepam & LK, reksa dana Indonesia dibagi dalam 4 (empat) jenis kategori, yakni Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran. Penggolongan jenis reksa dana ini berdasarkan kategori instrumen di mana reksa dana melakukan investasi.

1. Reksa Dana Pasar Uang (RDPU)

Reksa Dana Pasar Uang didefinisikan sebagai reksa dana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri didefinisikan sebagai efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Secara umum, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi: Deposito, SBI, Obligasi serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT)

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, SBI, obligasi, dan instrumen lainnya.

3. Reksa Dana Saham (RDS)

Reksa Dana Saham (RDS) adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham).

4. Reksa Dana Campuran (RDC)

Reksa Dana Campuran adalah reksa dana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk dalam kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Saham.

2.2.3 Manfaat Investasi Reksa Dana

Produk investasi reksa dana sangat menarik karena memiliki banyak kelebihan dan sangat cocok untuk investor kecil dan investor yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan investasi sekalipun dapat melakukan investasi pada produk reksa dana. Mangasa Simatupang (2010: 175) menjelaskan bahwa manfaat melakukan investasi pada reksa dana diantaranya: “pengelolaan yang professional, diversifikasi otomatis, transparansi/keterbukaan, likuiditas tinggi, tersedia fasilitas perpajakan, tersedia banyak alternatif pilihan jenis investasi reksa dana, mendorong meningkatkan *supply* dan *demand* di pasar modal”.

2.2.4 Risiko Investasi Reksa Dana

Setiap investasi yang dilakukan oleh investor disamping tingkat keuntungan yang akan diperoleh juga akan terdapat kemungkinan risiko yang dihadapi. Demikian juga terhadap produk-produk investasi keuangan seperti reksa dana, disamping keuntungan yang akan diraih juga senantiasa dihadapkan kepada berbagai risiko yang dihadapi para pemodal di dalam melakukan investasinya sehingga perlu diwaspadai oleh setiap investor reksa dana.

Mangasa Simatupang (2010: 180) mengemukakan bentuk-bentuk risiko dalam investasi reksa dana dapat diuraikan dibawah ini yaitu antara lain: “risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko perubahan politik dan ekonomi, risiko pasar dan globalisasi, risiko terkait peraturan, dan risiko aktivitas lembaga-lembaga terkait reksa dana”.

2.2.5 Kinerja Reksa Dana

Salah satu survey yang dilakukan oleh *Investment Company Institute* di Amerika Serikat menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan utama

masyarakat Amerika Serikat dalam memilih reksa dana adalah kinerja historis reksa dana. Lebih dari 70% responden memilih reksa dana berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan. Berdasarkan hal di atas, standarisasi pengukuran kinerja menjadi suatu keharusan sehingga kinerja reksa dana dapat dibandingkan antara satu dan yang lainnya.

Dari literatur yang penulis peroleh berdasar James L (1997:511) menyatakan, "*Portfolio performance analysis is to asses how well the invesment plan is meeting its goal as well as the degree to which invesment managers are adding value in carrying out the invesment plan*". Pernyataan ini dapat diartikan analisis kinerja portofolio adalah untuk menilai bagaimana target investasi mencapai tujuannya sesuai dengan nilai tambah yang diberikan oleh Manajer Investasi. Berdasarkan uraian ini kinerja reksadana yang merupakan portofolio adalah target-target investasi yang akan dicapai oleh Manajer Investasi dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap investasi yang dikelolanya. Dalam menganalisis kinerja reksadana analisis paling umum digunakan adalah analisis *Sharpe*, *Treynor* dan *Jensen*.

Berikut cara perhitungan *Sharpe*, *Treynor*, dan *Jensen* berdasarkan (M. Syamsul : 2006) adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Kinerja *Sharpe*

Berikut adalah rumus untuk menghitung kinerja reksadana berdasarkan *Sharpe*:

$$R/V = \frac{\overline{Rp} - \overline{Rf}}{\sigma p}$$

Keterangan :

R/V = reward to variability ratio model *Sharpe*

Rp = return portofolio

Rf = risk free rate, return bebas risiko tingkat bunga bebas risiko

2. Ukuran Kinerja *Treynor*

Indeks kinerja *Treynor* dihitung dengan formula berikut :

$$Tp = (\overline{Rp} - \overline{Rf})/\beta p$$

Keterangan:

Tp = indeks kinerja *Treynor*.

\overline{Rp} = average return portofolio.

\overline{Rf} = risk free rate, tingkat bunga bebas risiko.

βp = beta portofolio sebagai tolak ukur resiko.

3. Ukuran Kinerja *Jensen*

$$E(\overline{Rp}) = \overline{Rf} + \beta p(E(\overline{Rm}) - \overline{Rf})$$

Keterangan :

$E(\overline{Rp})$ = Expected return portofolio

\overline{Rf} = Risk free, interest rate

βp = Beta portofolio

$E(\overline{Rm})$ = Expected market return

Expected return $E(\overline{Rm})$, merupakan return minimum yang diharapkan oleh investor terhadap suatu portofolio, rumus yang digunakan bisa untuk mengukur suatu saham saja atau portofolio. Istilah *minimum rate of return* digunakan dalam perhitungan *Jensen* untuk membedakan *expected return* yang diartikan sama dengan *average return* dalam model *Treynor* dan model *Sharpe*.

Perhitungan *Jensen*, Alpha (α) = average return - expected return

2.3 Ukuran Dana Kelolaan

Besarnya ukuran dana yang dikelola oleh manajer investasi mencerminkan kepercayaan dari investor terhadap suatu reksa dana. Manajer investasi yang mengelola reksa dana dengan dana yang lebih besar akan memiliki kinerja yang lebih baik. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya *economies of scales*, efisiensi, bargaining power serta peluang return yang lebih besar bagi reksa dana tersebut. Nilai Aktiva Bersih yang besar juga memberikan keleluasan bagi manajer investasi di dalam berinvestasi ke dalam portofolio.

Mangasa Simatupang, (2010: 158-159) menjelaskan bahwa ukuran dari

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

nilai portofolio efek suatu reksa dana adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *net asset value* (NAV). Dengan demikian kinerja suatu produk reksa dana dapat dilihat dari NAB masing-masing reksa dana yang menjadi satuan dari nilai aset suatu reksa dana. Nilai aktiva bersih suatu reksa dana dapat berfluktuasi walaupun fluktuasi reksa dana tersebut tidak sesering dan sebesar fluktuasi dari saham.

Secara umum NAB suatu reksa dana sangat bergantung kepada kinerja sekuritas yang menjadi portofolio reksa dana yang bersangkutan yaitu apabila harga pasar dari aset-aset yang menjadi portofolio reksa dana mengalami kenaikan, maka secara otomatis NAB reksa dana yang bersangkutan juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila aset-aset dalam portofolio reksa dana mengalami penurunan di pasar maka otomatis total NAB reksa dana yang bersangkutan juga akan mengalami penurunan.

Mutia Dewi Akbarini, (2004: 31) menyebutkan bahwa besarnya *asset* yang dikelola oleh manajer investasi merupakan salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja reksadana

Lemak dan Stish (1996) menemukan bahwa perusahaan yang mengelola dana yang lebih besar memiliki kinerja reksa dana yang lebih baik dibandingkan dengan yang mengelola dana yang lebih kecil.

2.4 Umur Reksa Dana

Usia dari reksa dana mengindikasikan kapan suatu reksa dana mulai diperdagangkan di pasar modal. Banyak investor yang lebih menyukai reksa dana yang berumur lebih lama. Rao (dalam Mutia Dewi Akbarini, 2004: 34) menjelaskan bahwa reksa dana yang memiliki unsur yang lebih lama maka akan memiliki *track record* yang lebih panjang dan dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih baik kepada para investornya.

Abdi Mulyawan, (2008) menyebutkan bahwa umur reksa dana dapat memainkan suatu peranan dalam memutuskan kinerja, karena reksa dana yang lebih muda akan menunjukkan biaya yang signifikan lebih tinggi di awal periode. Hal ini untuk biaya marketing tetapi juga *cash flow* awal akan menempatkan beban yang lebih besar atas biaya transaksi reksa dana.

Miguel A. Ferreira (2001), menjelaskan bahwa umur reksa dana menunjukkan masa operasi reksadana dan kemampuan manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut. Pengaruh umur reksa dana pada kinerja reksa dana dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

Umur reksa dana mencerminkan pengalaman dari manajer investasinya di dalam mengelola reksa dana tersebut. Semakin lama umur suatu reksa dana, maka manajer investasinya semakin berpengalaman di dalam mengelola portofolio bila dibandingkan dengan reksa dana yang berumur lebih muda.

2.5 Biaya Operasi Reksa Dana

Mangasa Simatupang, (2010: 236) menjelaskan bahwa investor harus memahami apa saja dan berapa besar biaya operasional yang ditimbulkan dari investasi pada suatu reksa dana. Hal ini penting dipahami dan diperhatikan mengingat bahwa segala biaya reksa dana tersebut dipastikan akan berpengaruh langsung dengan kinerja dari reksa dana yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang umum selalu ada dalam setiap reksa dana diantaranya yaitu biaya pengelolaan (*management fee*) yang ditetapkan oleh manager investasi, biaya untuk bank kustodian sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam administrasi dan pengamanan reksa dana, biaya transaksi jual dan beli suatu reksa dana (*selling and redemption fee*), biaya penggantian/pertukaran (*switching fee*),

biaya audit, biaya laporan keuangan dan prospektus.

Eko Priyo Utomo (61: 2009) menjelaskan bahwa besar kecilnya biaya operasi reksa dana akan mempengaruhi hasil investasi yang akan diberikan kepada investor.

Abdi Mulyawan, (2008) menjelaskan bahwa biaya operasi reksa dana menggambarkan biaya yang secara tidak langsung dibebankan kepada investor. Biaya tersebut meliputi biaya manajer investasi, bank kustodian, biaya transaksi saham atau aset lain, biaya auditor, pajak, dan biaya lain berkaitan dengan pengelolaan investasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Pada dasarnya metode berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, atau menurut Sugiyono (2008: 2) bahwa "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Metode penelitian yang tepat akan menghasilkan penelitian yang baik dan untuk mendapatkan metode penelitian yang tepat maka seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada, tujuan diadakannya penelitian, serta ruang lingkup penelitian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengolah data yang diperoleh selama pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan statistik dan juga menerangkan pengaruh, menguji hipotesis dan mendapatkan pengertian dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode verifikatif adalah

metode yang bertujuan untuk menguji secara matematis dugaan mengenai adanya hubungan antar variabel masalah yang dimiliki. (Nazir 2003: 56).

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Hatch dan Farhady (1981) dalam Sugiyono (2008: 38) menjelaskan bahwa secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek, yang mempunyai "variasi" antara satu orang

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan variabel-variabel yang tercakup dalam judul penelitian menjadi dua variabel, yaitu:

1. Variabel *Independen* / Variabel Bebas (Variabel X) adalah "variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen*/terikat", Sugiyono (2008: 39). Dalam hal ini yang merupakan variabel bebas yaitu ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana,
2. Variabel *Dependen* / Variabel Terikat (Variabel Y) adalah "variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas", Sugiyono (2008: 39). Dalam hal ini yang merupakan variabel terikat yaitu kinerja reksa dana saham dengan menggunakan *sharpe measure*. *Sharpe measure* menunjukkan seberapa optimal tingkat keuntungan yang diperoleh suatu reksa dana atas risiko yang ditanggungnya.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Ukuran Dana Kelolaan	Ukuran dana dari nilai portofolio efek suatu reksa dana adalah total nilai aset	Total Nilai Aset	Rasio
Umur Reksa Dana	Umur reksa dana merupakan pengalaman dari manajer investasinya didalam mengelola reksadana tersebut	Tanggal Penawaran Reksa Dana Saham	Rasio
Biaya Operasi Reksa Dana	Seluruh biaya investasi yang ada pada reksa dana saham	Biaya Pengelolaan + Biaya Transaksi Jual Beli + Biaya Penggantian + Biaya Prospektus + Biaya Audit + Biaya Laporan Keuangan	Rasio
Kinerja Reksa Dana Saham	<i>Sharpe Measure</i>	$Kinerja\ Reksa\ Dana = \frac{\bar{R}_p - \bar{R}_f}{\sigma_p}$	Rasio

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang diambil berupa data *cross sectional*. Menurut Iqbal Hasan (2002: 82) data *cross sectional* adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu, artinya bahwa pengumpulan data dilakukan dari berbagai informasi perusahaan.

Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan lagi. Data sekunder yang digunakan penulis adalah data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari terbitan Bapepam, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, prospektus dan laporan keuangan. Penulis mendownload dari situs resmi BAPEPAM-LK (www.bapepam.go.id), situs resmi kontan (www.kontan.co.id), situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta prospektus dan

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan reksa dana yang menerbitkan reksa dana saham.

3.3.2 Cara Penentuan Data

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dimulai dari pemilihan populasi yang dilanjutkan dengan memberikan kriteria-kriteria terhadap populasi tersebut sehingga diperoleh sekumpulan sampel, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini adalah reksa dana yang terdaftar di Bapepam dan diklasifikasikan ke dalam reksa dana saham.
2. Teknik pemilihan sampel adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2006: 78). Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi sampel dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Sampel adalah perusahaan yang masih aktif sampai penelitian ini berlangsung.
 - b. Adanya data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit pada setiap

perusahaan yang menerbitkan reksa dana.

- c. Adanya data prospektus pada setiap perusahaan yang menerbitkan reksa dana.
- d. Reksa dana yang diterbitkan sekurang-kurang satu tahun sampai 31 Desember 2011.

Secara keseluruhan Reksadana saham konvensional yang masih aktif sampai dengan 30 Desember 2011 berjumlah 79 reksadana. Data ini diperoleh peneliti berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh situs resmi BAPEPAM-LK. Namun dari keseluruhan reksadana yang ada tersebut tidak semua data NAB per unit reksadana bisa diperoleh, selain itu tidak semua perusahaan reksa dana mempublikasikan prospektus dan laporan keuangannya. Oleh sebab itu dikarenakan adanya keterbatasan informasi yang bisa penulis dapatkan, dari 79 produk reksadana saham konvensional yang ada penulis hanya memperoleh sebanyak 22 produk reksadana saham konvensional untuk dijadikan sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah:

1. Studi Lapangan
Studi lapangan dengan mencari informasi melalui situs-situs yang memberikan dukungan informatif baik untuk referensi maupun data yang akan diolah untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan. Hasil survei melalui internet antara lain: www.bapepam.go.id, www.bi.go.id, www.idx.co.id, www.kontan.co.id.
2. Studi Kepustakaan
Studi ini dilakukan dengan mempelajari literatur dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh landasan teori.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam rancangan analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur melalui sumber-sumber antara lain buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya yang berhubungan dengan ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, biaya operasi reksa dana, dan kinerja reksa dana saham.
2. Mengumpulkan NAB per unit, *prospectus*, dan laporan harian reksa dana saham yang terdaftar di Bapepam, serta mengumpulkan “BI” *rate* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. Menentukan operasionalisasi variabel penelitian, adapun dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas (*independent*) yaitu ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana. Dalam hal ini yang merupakan variabel terikat (*dependen*) yaitu kinerja reksa dana saham.
4. Menghitung *return* reksa dana berdasarkan perubahan nilai aktiva bersih per unit yang dikeluarkan oleh bank kustodian. Perhitungan *return* reksa dana masing-masing reksa dana saham (R_i) dilakukan dengan persamaan;

$$R_{it} = \frac{NAB_t - NAB_{t-1}}{NAB_{t-1}}$$

5. Menghitung *return* dari aset bebas risiko. Perhitungan *return* bebas risiko (R_f) dilakukan dengan persamaan:

$$R_f / \text{tahun} = \frac{\sum_{i=1}^N R_f}{N}$$

6. Menghitung tingkat risiko reksa dana dengan standar deviasi σ_p dilakukan dengan persamaan:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (R_{IJ} - \bar{R}_i)^2}{n - 1}}$$

7. Menghitung kinerja reksa dana dengan menggunakan *sharpe measure*. Perhitungan *sharpe*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

measure masing-masing reksa dana saham dengan persamaan:

$$\text{Kinerja Reksa Dana} = \frac{\overline{Rp} - \overline{Rf}}{\sigma p}$$

8. Menentukan ukuran dana kelolaan yang ditunjukkan oleh total nilai aktiva reksa dana saham. Agar perbedaan antara nilai maksimum dan minimum masing-masing variabel tidak terlalu besar maka menggunakan logaritma untuk meminimalisasi.
9. Menentukan umur reksa dana yang ditunjukkan pada tanggal saat reksa dana ditawarkan. Seperti halnya ukuran dana kelolaan, maka umur reksa dana juga dilakukan logaritma
10. Menghitung biaya operasi reksa dana. Perhitungan biaya operasi reksa dana masing-masing reksa dana saham menggunakan persamaan;

$$\begin{aligned} & \text{Biaya Operasi Reksa Dana} \\ & = \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Rata - Rata NAB}} \end{aligned}$$

11. Melihat pengaruh ukuran dana kelolaan, umur reksa dana dan biaya operasi reksa dana secara bersama-sama (simultan) dan terpisah (parsial) terhadap kinerja reksa dana saham. Perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 20.0

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis menggunakan pengujian pengaruh ukuran dana kelolaan, umur reksa dana dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Analisis regresi digunakan untuk menaksir nilai variabel *dependen* berdasarkan variabel *independen* serta taksiran perubahan variabel *dependen* untuk setiap satuan perubahan variabel *independen*. Persamaan analisis regresi

linier berganda secara umum untuk empat variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y_{SI} = \alpha + \beta_1 (\text{Size}) + \beta_2 (\text{Age}) + \beta_3 (\text{Expenses}) + \varepsilon$$

Dimana:

Y_{SI}	= Sharpe Index
α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi dari masing – masing variabel
Size	= log variabel ukuran dana kelolaan
Age	= log variabel umur reksa dana
Expenses	= log variabel biaya operasi reksa dana
ε	= error term

Setelah mendapatkan persamaan regresi dari tahap analisis regresi berganda, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik regresi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai dari model regresi sah. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

3.7 Uji Asumsi Klasik Regresi

3.7.1 Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji statistik, maka perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dalam program SPSS ver 20.0. Hal ini untuk membuktikan bahwa data yang dipergunakan berdistribusi normal. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya.

Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas (*asymptotic significance*) yaitu:

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal
- Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal

3.7.2 Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi model regresi adalah tidak terdapatnya autokorelasi.

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk memeriksa adanya autokorelasi, biasanya dilakukan uji statistik *Durbin-Watson* (DW).

Langkah-langkah hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$ tidak terjadi autokorelasi

$H_a : \rho \neq 0$ terjadi autokorelasi

Nilai DW menggunakan rumus:

$$DW = \frac{\sum(\mu_t - \mu_{t-1})^2}{\sum \mu_{t2}}$$

Secara umum, kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika angka DW mendekati nol, maka dapat diartikan terdapat autokorelasi positif
2. Jika angka DW mendekati nilai empat, maka dapat diartikan terdapat autokorelasi negatif
3. Jika angka DW mendekati nilai dua, maka tidak terdapat autokorelasi

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran dari model regresi yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah dari *residual homogeny* digunakan uji *white* (*White Heteroskedasticity Test*). Uji *white* dengan menghitung regresi variabel bebas dengan kuadrat dari residual (*error*).

Statistik uji yang digunakan adalah $n \times R^2$ yang mengikuti distribusi *Chi - Kuadrat*. Jika signifikan berarti menunjukkan adanya heterokedastisitas.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat heterokedastisitas

H_a : terdapat heterokedastisitas

Secara umum kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bila $n \times R^2$ hitung $< \chi_{tabel}$, maka H_0 diterima berarti tidak terdapat heterokedastisitas
2. Bila $n \times R^2$ hitung $> \chi_{tabel}$, maka H_0 ditolak berarti terdapat heterokedastisitas

3.7.4 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independen*. Jika terjadi korelasi antar variabel *independen* maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel *independen*. Kalaupun terdapat korelasi antar variabel *independen* maka tingkat korelasi tersebut haruslah rendah agar tidak terjadi masalah akibat multikolinieritas. Cara mendeteksi adanya multikolinear adalah *variance inflation factor* (VIF)

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2}$$

Dimana:

VIF = *Variance inflation factor*

R^2 = Koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresi salah satu variabel bebas X terhadap variabel lainnya

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat multikolinear

H_a : terdapat multikolinear

Secara umum kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai VIF < 10 , maka H_0 diterima berarti tidak terdapat multikolinear
2. Bila nilai VIF > 10 , maka H_0 ditolak berarti terdapat multikolinear

3.8 Penentuan Uji Hipotesis

Hipotesis akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

terikatnya. Pengujian hipotesis yang akan dilakukan adalah pengujian hipotesis null (H_0) yang menyatakan bahwa koefisien regresi tidak berarti atau signifikan, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa koefisien regresi berarti atau signifikan. Jika koefisien null (H_0) ditolak maka hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

3.8.1 Uji F

Uji F statistik bertujuan untuk mengetahui apakah variabel *independen* secara bersama-sama (simultan) menjelaskan variabel *dependen* dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95%. langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

Bertujuan untuk membuktikan bahwa variabel ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja reksa dana dinyatakan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh secara simultan dari ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham.

$H_a : \beta_1 \neq 0, I = 1,2,3$ Terdapat pengaruh secara simultan dari ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham.

Keterangan;

β_1 = koefisien regresi ukuran dana kelolaan

β_2 = koefisien regresi umur reksa dana

β_3 = koefisien regresi biaya operasi reksa dana

2. Menentukan tingkat kepercayaan ($1-\alpha$) dan derajat kebebasan ($df_1 = k, df_2 = n - k - 1$); k = banyaknya variabel bebas.

3. Menentukan nilai F_{hitung} sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

n = ukuran sampel

k = banyaknya variabel

4. Menentukan F_{tabel} dengan melihat tabel F dimana $\alpha = 5\%$ dengan k sebagai numerator dan $(n-k)$ sebagai denominator

5. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel *independen* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*

6. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel *independen* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

3.8.2 Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana secara parsial berpengaruh terhadap kinerja reksa dana saham dinyatakan sebagai berikut:

1. Ukuran Dana Kelolaan

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran dana kelolaan terhadap kinerja reksa dana saham.

$H_a : \beta_1 > 0$ Terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran dana kelolaan terhadap kinerja reksa dana saham.

2. Umur Reksa Dana

$H_0 : \beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara umur reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham.

$H_a : \beta_2 > 0$ Terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran dana kelolaan terhadap umur reksa dana saham.

3. Biaya Operasi Reksa Dana

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham.

$H_a : \beta_3 > 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham.

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t), yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} yang dirumuskan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{B_n}{SB_n}; df = n - k$$

Dimana:

B_n = koefisien regresi masing-masing variabel *independen*

SB_n = standard error masing-masing variabel *independen*

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Ukuran Dana Kelolaan

Ukuran Dana Kelolaan (UDK)	
N	22
Minimum	24.706.014.865,00
Maximum	11.247.149.132.849,00
Mean	1.659.437.765.464,00
Std. Deviation	2.917.577.394.788,07

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai ukuran dana kelolaan reksa dana saham yang terendah adalah Batavia Dana Saham Agro yaitu sebesar Rp.24.706.014.865, sementara nilai dana

Masing-masing t_{hitung} perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan taraf nyata 0,05 dan *degree of freedom* (n-k). Kriterianya adalah sebagai berikut:

H_0 diterima : $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak : $t_{hitung} > t_{tabel}$

3.8.3 Goodness of Fit (R^2)

Berdasarkan adanya regresi linier berganda, kemudian dihitung besarnya koefisien determinasi yaitu R^2 yang merupakan bagian dari variasi total dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. R^2 merupakan koefisien determinasi multipelnya, apabila R^2 semakin mendekati 1, maka pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya semakin tinggi.

4. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Statistik Data Penelitian

1. Ukuran Dana Kelolaan Reksa Dana Saham Periode Tahun 2011

kelolaan reksa dana saham tertinggi adalah Schroder Dana Prestasi Plus yaitu sebesar Rp.11.247.149.132.849. Standar deviasi untuk ukuran dana kelolaan sebesar Rp.2.917.577.394.788,07.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2. Umur Reksa Dana Saham Periode 2011

Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Umur Reksa Dana

Umur Reksa Dana (URD)	
N	22
Minimum	2
Maximum	15
Mean	5,7273
Std. Deviation	4,17683

Sumber: Ouput SPSS 20.0

Dari hasil output penelitian, dapat dilihat bahwa umur reksa dana saham yang terendah adalah Schroder 90 Plus Equity Fund 2 tahun. Reksa dana saham dengan umur yang tertinggi adalah Bahana Dana Prima 15 tahun. Standar deviasi adalah 4,17683 tahun sedangkan

rata-rata umur reksa dana reksa dana saham adalah 5,7273.

3. Biaya Operasi Reksa Dana Saham Periode 2011

Tabel 4.3 Deskripsi Statistik Biaya Operasi Reksa Dana

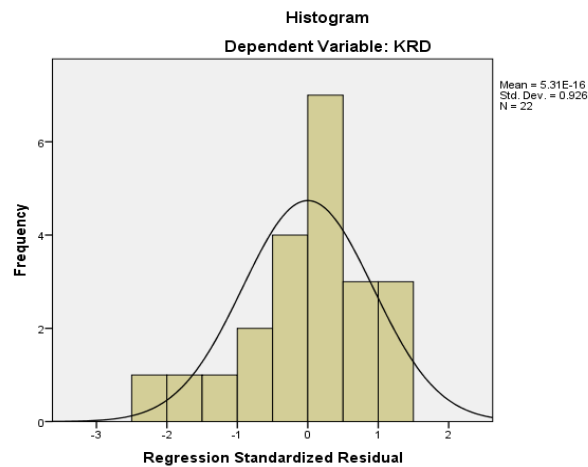
Biaya Operasi Reksa Dana (BODR)	
N	22
Minimum	1.025.885.014
Maximum	303.937.050.834
Mean	46.368.939.607,77
Std. Deviation	76.374.006.226,09

Sumber: Ouput SPSS 20.0

Dari hasil output penelitian diketahui nilai reksa dana terkecil adalah CIMB Principal Equity Aggressive Rp.1.025.885.014. Nilai yang tertinggi BODR adalah Schroder Dana Prestasi Plus Rp.303.937.050.834. Nilai rata-rata untuk biaya operasi reksana dana adalah Rp.46.368.939.607,77 sedangkan nilai deviasi standarnya adalah Rp.76.374.006.226,09.

4.2 Uji Asumsi Klasik

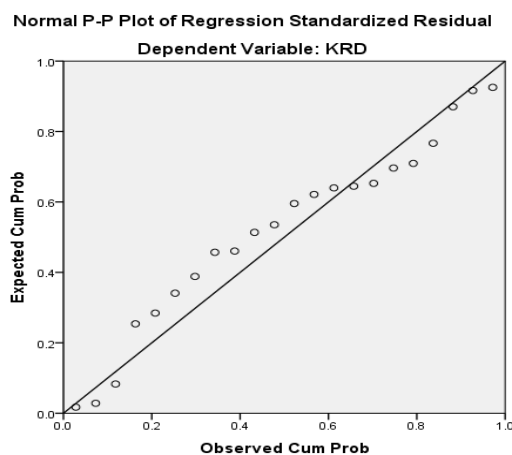
4.2.1 Uji Normalitas



Gambar 4.1: Hasil Grafik Histogram
Sumber: Ouput SPSS 20.0

Dari analisis gambar di atas output histogram menunjukkan bahwa pola distribusi mendekati normal, sedangkan dari hasil *normal probability*

plot dapat secara lebih lebih handal menilai distribusi normal nilai residual pada gambar 4.2.



Gambar 4.2: hasil *normal probability plot*
Sumber: Ouput SPSS 20.0

Analisis grafik normal pola menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini

mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		UDK	URD	BORD	KRD
N		22	22	22	22
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.659.437.765.464,45	5,7273	46.368.939.607,7727	-1,0643
	Std. Deviation	2.917.577.394.788,07	4,1768	72.776.374.006.226,0	1,23986
Most Extreme Differences	Absolute	,292	,247	,276	,194
	Positive	,292	,247	,264	,172
	Negative	-,288	-,141	-,276	-,194
Kolmogorov-Smirnov Z		1,368	1,157	1,296	,908
Asymp. Sig. (2-tailed)		,047	,137	,069	,381

a. Test distribution is Normal.

Pada tabel 4.4 di atas pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolmogorof-Smirnov Test* diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,908 dan signifikansi pada 0,381 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal karena nilai *asymptotic significance (2tailed)* adalah

0,381 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan selanjutnya dapat digunakan untuk analisis regresi.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Berikut di bawah ini hasil uji multikolonieritas:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2,081	,481		-4,330	,000		
UDK	-5,914	,000	-,139	-,136	,893	,390	5,507
URD	,132	,063	-,443	2,099	,050	,920	1,087
BORD	7,800	,000	,480	,474	,641	,400	5,081

a. Dependent Variable: KRD

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 20

Pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa *Variance Inflating Factor* masing-masing variabel adalah untuk ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana adalah 5,507, 1,087, dan 5,081. Analisis berdasarkan nilai VIF diketahui bahwa nilai ≤ 10 , dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya).

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,512 ^a	,262	,139	1,15070	2.405

a. Predictors: (Constant), MJM, BORD, URD, UDK

b. Dependent Variable: KRD

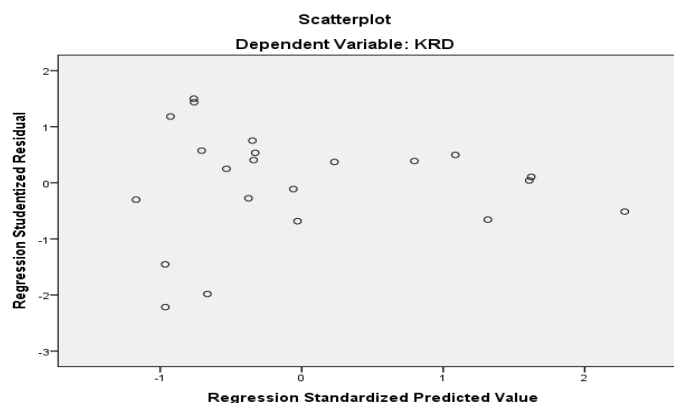
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 2,405 nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 5% jumlah sampel 22 dan jumlah variabel bebas 3 ($k = 3$). Dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai $dl = 0,9578$ dan $du = 1,7974$, setelah dilakukan *mapping*, nilai DW 2,405

tidak terletak antara batas atas (du) dan ($4-du$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi tersebut.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3: hasil uji heteroskedastisitas
Sumber: Ouput SPSS 20.0

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Dari diagram pencar di atas dapat dilihat bahwa plot antara *regression standardized predicted value* dengan *regression studentized residual* menyebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, atau data bervariasi homogeny, dimana dengan melihat sebaran titik titik yang acak baik diatas maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y,

maka dapat disimpulkan tidak terjadi model dalam regresi ini.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-2,081	,481		-4,330	,000		
1 UDK	-5,914	,000	-,139	-,136	,893	,390	5,507
URD	,132	,063	-,443	2,099	,050	,920	1,087
BORD	7,800	,000	,480	,474	,641	,400	5,081

a. Dependent Variable: KRD

Pada tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi linier berganda antara variabel bebas dan variabel terikat, sebagai berikut:

$$Y = -2,081 - 5,914 X_1 + 0,132 X_2 + 7,800 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Reksa Dana Saham (KRD)

X₁ = Ukuran Dana Kelolaan (UDK)

X₂ = Umur Reksa Dana (DURD)

X₃ = Biaya Operasi Reksa Dana (BORD)

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa konstanta intersepsi dari tabel dan persamaan di atas bernilai negatif yakni -2,081. Hal ini berarti bahwa jika variabel bebas dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja

reksa dana saham bernilai sebesar -2,081.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X₁ bernilai negatif, menunjukkan hubungan fungsional antara ukuran dana kelolaan dengan kinerja reksa dana saham berbanding terbalik atau tidak searah (β_1 bernilai negatif). Koefisien regresi variabel X₁ sebesar -5,914 mengandung arti bahwa untuk setiap ukuran dana kelolaan (X₁) sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya kinerja reksa dana saham (Y) sebesar -5,914.

4.3.2.1 Pengaruh Ukuran Dana Kelolaan, Umur Reksa Dana, dan Biaya Operasi Reksa Dana Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham

4.3.2 Pengujian Hipotesis

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,448	3	2,816	2,127	,132 ^b
	Residual	23,834	18	1,324		
	Total	32,282	21			

a. Dependent Variable: KRD

b. Predictors: (Constant), BORD, URD, UDK

Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 2,127 dan Ftabel sebesar 3,20. Dikarenakan Fhitung lebih kecil daripada Ftabel, dan nilai p-value adalah 0,132 (*sig*) lebih besar dari alpha 0.05 (*confidence interval*), artinya untuk terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan secara simultan antara ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan hubungan fungsional antara umur reksa dana dan kinerja reksa dana berbanding lurus atau searah (β_2 bernilai positif), koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,132 mengandung arti untuk setiap umur reksa dana (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya kinerja reksa dan saham (Y) sebesar 0,132.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_3 bernilai positif, menunjukkan hubungan fungsional antara biaya operasi reksa dana dengan kinerja reksa dana berbanding lurus atau searah (β_3 bernilai positif). Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 7,800 mengandung arti untuk

setiap biaya operasi reksa dana (X_3) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya kinerja reksa dana saham (Y) sebesar 7,800.

Dari hasil regresi juga terlihat bahwa arah hubungan ini ialah positif (+). Semakin tinggi ukuran dana kelolaan, umur reksa dana dan biaya operasi reksa dana maka kinerja reksa dana saham juga akan semakin meningkat, dengan kata lain ukuran dana kelolaan, umur reksa dana dan biaya operasi reksa dana secara simultan berbanding lurus dengan kinerja reksa dana saham. Dapat disimpulkan bahwa X_1, X_2, X_3 tidak berpengaruh terhadap Y.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.3.2.2 Pengaruh Ukuran Dana Kelolaan, Umur Reksa Dana, dan Biaya Operasi Reksa Dana Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham

Tabel 4.9 Hasil Uji Persamaan Parsial (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-2,081	,481		-4,330	,000		
1 UDK	-5,914	,000	-,139	-,136	,893	,390	5,507
URD	,132	,063	-,443	2,099	,050	,920	1,087
BORD	7,800	,000	,480	,474	,641	,400	5,081

a. Dependent Variable: KRD

Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,73961 dan nilai t_{hitung} untuk ukuran dana kelolaan sebesar -0,136. Dikarenakan $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dan nilai p-value adalah 0,4465 (0,893/2) (*sig*) lebih besar dari alpha 0,05 (*confidence interval*), artinya terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara variabel umur dana kelolaan terhadap kinerja reksa dana saham.

Hasil statistik t_{hitung} untuk umur reksa dana sebesar 2,099 dan t_{tabel} sebesar 1,73961. Dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ada di daerah penolakan, dan nilai p-value adalah 0,025 (0,050/2) (*sig*) lebih kecil dari alpha 0,05 (*confidence interval*), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel umur reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham adalah pengaruh positif dan signifikan.

Hasil statistik t_{hitung} untuk biaya operasi reksa dana sebesar 0,474 dan t_{tabel} sebesar 1,73961. Dikarenakan $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 ada di daerah penerimaan, dan nilai p-value adalah 0,3205 (0,641/2) (*sig*) lebih besar dari alpha 0,05 (*confidence interval*), artinya pengaruh yang terjadi antara variabel biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana adalah pengaruh positif dan tidak signifikan.

4.4 Koefisien Determinasi (R²)

Dalam suatu penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat sering ingin diketahui seberapa kekuatan variabel-variabel bebas tersebut secara simultan menerangkan perubahan pada variabel terikat. Hasil koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.512 ^a	.262	.139	1,15070	2.405

a. Predictors: (Constant), MJM, BORD, URD, UDK

b. Dependent Variable: KRD

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 20

Dari tabel 4.10 di atas terlihat bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,512 yang menunjukkan hubungan antara ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham. Koefisien determinasi (R^2) menggunakan *adjusted R square* sebesar 0,262 memberi pengertian bahwa besarnya kinerja reksa dana saham yang dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana adalah sebesar 26,2%.

4.5 Pembahasan

Pada penelitian ini setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 2,127 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,20. Dikarenakan F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} , dan nilai p-value adalah 0,132 (*sig*) lebih besar dari alpha 0.05 (*confidence interval*), artinya terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan secara simultan antara ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham

Berdasarkan hasil penelitian nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,512 yang artinya bahwa besarnya kinerja reksa dana saham yang dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana adalah sebesar 26,2% sedangkan sisanya sebesar 73,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja reksa dana yaitu lingkungan reksa dana terutama kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, sedangkan faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja reksa dana adalah pengelolaan investasi reksa dana seperti alokasi asset investasi reksa dana, pemilihan atas instrumen investasi (*stock selection*) serta saat pembelian (*market timing*) instrumen investasi.

Kebijakan alokasi asset merupakan tindakan untuk menempatkan bobot investasi atau proporsi reksa dana ke dalam instrument pasar uang dan pasar modal maupun campuran dari keduanya dengan komposisi tertentu. Meskipun kebijakan alokasi aset yang ditetapkan berbeda-beda, tetapi prinsipnya sama yaitu memberikan tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya dengan risiko tertentu. Sementara itu *stock selection* adalah kemampuan manajer investasi dalam memilih saham yang tepat yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari portofolio reksa dana sehingga memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik dari tingkat pengembalian pasar. *Market timing* adalah kemampuan manajer investasi dalam memilih waktu untuk melakukan pembelian atau penjualan saham dari portofolio reksa dana. Kedua unsur ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan portofolio secara aktif dan keduanya mempunyai peranan penting terhadap kinerja portofolio secara keseluruhan

Keterlibatan perbankan dalam distribusi reksa dana merupakan salah

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

satu faktor yang mempengaruhi kinerja reksa dana juga. Keterlibatan bank-bank dalam penjualan reksa dana diwujudkan dalam bentuk kerjasama (*mutual agreement*) antara bank sebagai *agent of sales* reksa dana dengan manajer investasi sebagai pengelola dana. Dengan berperan sebagai agen penjual reksa dana maka bank-bank tersebut akan menggunakan jaringan kantornya di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak penjualan reksa dana.

Tingkat risiko adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kinerja reksa dana. Risiko investasi merupakan kemungkinan perolehan investasi yang kurang dari yang diharapkan (*expected return*). Salah satu hal yang mempengaruhi risiko investasi adalah kemampuan manajer investasi. Semakin baik seorang manajer investasi melakukan pemilihan saham maka semakin kecil pula risiko investasi yang muncul.

Selain itu faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja reksa dana diantaranya, kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik, iklim politik yang semakin kondusif, serta faktor pembebasan pajak atas pendapatan bunga.

Selain pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F, pada penelitian ini juga dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t. Uji ini digunakan untuk membuktikan ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana, secara parsial berpengaruh terhadap kinerja reksa dana saham.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada variabel ukuran dana kelolaan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ukuran dana kelolaan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana saham. Pengaruh yang negatif dan tidak signifikan bisa diartikan bahwa ukuran dana kelolaan tidak dapat dijadikan rujukan oleh investor saat akan membeli

reksa dana saham, hal ini dikarenakan nilai ukuran dana kelolaan reksa dana saham yang besar pada satu produk reksa dana saham tertentu belum tentu mencerminkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini pada dasarnya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Grinblatt and Titman (1989) didalam penelitian yang berjudul pengaruh ukuran dana kelolaan terhadap kinerja reksa. Didapatkan hasil bahwa kinerja reksa dana berhubungan negatif dengan ukuran dana kelolaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Abdi Mulyawan (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dana kelolaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Adanya ketidaksamaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terjadi mengingat penelitian dilakukan pada periode yang berbeda selain itu kondisi perekonomian serta faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi *return* dari suatu reksa dana dapat pula menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan ini, sedangkan kesamaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ukuran dana kelolaan reksa dana saham yang besar pada satu produk reksa dana saham tertentu belum tentu mencerminkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Pada hasil uji t yang dilakukan terhadap variabel umur reksa dana dapat disimpulkan bahwa hipotesis umur reksa dana memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja reksa dana saham, ini berarti reksa dana yang memiliki umur yang lebih lama maka akan memiliki *track record* yang lebih panjang dan dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih baik kepada para investornya selain itu koefisien positif mengindikasikan reksa dana yang lebih tua cenderung berkinerja lebih baik dari pada reksa dana yang lebih muda.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Abdi Mulyawan (2007) yang di dalam penelitiannya menyatakan bahwa umur reksa dana berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana, selain itu penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wydia (2007) dimana di dalam penelitiannya dinyatakan bahwa umur reksa dana tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja reksa dana, namun penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Miguel A. Ferreira (2001) yang menyatakan bahwa pengaruh umur reksadana pada kinerja reksa dana dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

Adanya ketidaksamaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terjadi mengingat penelitian dilakukan pada periode yang berbeda menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan ini, sedangkan kesamaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan investasi reksa dana saham seorang investor harus juga mempertimbangkan umur reksa dana, hal ini dikarenakan umur reksa dana mencerminkan pengalaman dari manajer investasinya di dalam mengelola reksa dana tersebut. Semakin lama umur suatu reksa dana, maka manajer investasinya semakin berpengalaman di dalam mengelola portofolio bila dibandingkan dengan reksa dana yang berumur lebih muda

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan terhadap variabel biaya operasi reksa dana dapat disimpulkan bahwa hipotesis biaya operasi reksa dana memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana saham. Pengaruh yang tidak signifikan antara biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertimbangan para investor setelah melihat semua keuntungan reksa dana menyebabkan investor dapat membeli

reksa dana tanpa mempertimbangkan biaya operasi reksa dana.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Abdi Mulyawan (2007) yang di dalam penelitiannya menyatakan bahwa biaya operasi reksa dana berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana. Adanya ketidaksamaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terjadi mengingat penelitian dilakukan pada periode yang berbeda menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan masalah mengenai pengaruh ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Reksa dana saham yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan perhitungan dengan metode *sharp measure* dan menempati peringkat tiga besar adalah reksa dana saham lautandhana equity, batavia dana saham, dan grow-2-prosper
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham. Keempat variabel independen tersebut menjelaskan kinerja reksa dana saham sebesar 26,2 %
3. Pengujian secara parsial pada setiap variabel menunjukkan bahwa variabel ukuran dana kelolaan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana saham, variabel umur reksa dana memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja reksa dana saham, variabel biaya operasi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

reksa dana memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana saham.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan

1. Pada saat akan melakukan investasi sebaiknya investor memperhatikan umur reksa dana, hal ini dikarenakan umur reksa dana yang lebih lama akan memiliki *track record* yang lebih panjang dan dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih baik kepada para investornya, selain itu reksa dana yang memiliki umur yang lebih panjang cenderung berkinerja lebih baik dari pada reksa dana yang memiliki umur lebih muda.
2. Dari hasil pengujian secara simultan ternyata tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ukuran dana kelolaan, umur reksa dana, dan biaya operasi reksa dana terhadap kinerja reksa dana saham. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan karakteristik reksa dana yang lainnya untuk menilai kinerja reksa dana saham seperti kebijakan alokasi asset, kemampuan manajer investasi saat pembelian reksa dana, tingkat risiko, dan lain sebagainya.
3. Pada penelitian kali ini peneliti hanya meneliti satu jenis reksa dana, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih dari satu jenis reksa dana, hal ini tentunya dapat memberikan informasi yang lebih berguna bagi para investor.
4. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu selama satu tahun, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu lebih dari satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mulyawan. (2008). Pengaruh Ukuran Dana Kelolaan, Umur Reksa Dana, Biaya Operasi Reksa Dana, Dan Masa Jabatan Manajemen Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Periode 2007. Tesis. Bandung: Program Magister Manajemen Universitas Padjadjaran.
- Anindita Putri Nurmalita Sari dan Agus Purwanto. (2012). Analisis Kebijakan Alokasi Aset, Kinerja Manajer Investasi, Dan Tingkat Risiko Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia. Semarang. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Bank Indonesia. (2011). Tinjauan Kebijakan Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Perbankan. Melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/18577CD0-C607-4438-AD13-70CBCED53053/24755/TKMNovember2011final.pdf>
- Bodie, Kane and Ang Marcus. (2005). Investments. International Edition Mc Graw- Hill. Singapore.
- Cahyono, Jaka E. (2000). Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksa dana. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Desmon Silitonga. (2010). Memilih Investasi Reksa Dana. Melalui http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/edukasi/Millenium_Dana_tama_Indonesia_Desmon_Silitonga.pdf

- Eduardus Tandelilin. (2010). *Portofolio dan Investasi – Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Eko Priyo Pratomo. (2009). *Reksa Dana – Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ginting Prasetya Enka Nurcahya dan Rendi. (2010). *Reksa Dana di Indonesia: Analisis Kebijakan Alokasi Aset, Pemilihan Saham, dan Tingkat Risiko*. Purwokerto. Simposium Nasional Akuntansi (SNA).
- James D Peterson, Paul A. Pietranico, Mark W. Riepe, and Fran Xu. (2001). Explaining the Performance of Domestic Equity Mutual Funds. *Journal of Investing*. Volume 10. Number 3. Page 81-91. Melalui www.ijournals.com.
- Kompisisi NAB Reksa dana. Melalui: <http://bapepam.go.id/reksadana/statistik.asp?page=komposisi-nab>.
- Lemak, David J., Stathis, Peruvemba K. (1996). Mutual Fund Performance And Manager's Team Service: Are there performance differences. *Journal of Investing*. Volume 5, Number 4.
- Mangasa Simatupang. (2010). *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksa Dana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Martin Sewell. (2007). *Fund Performance*. Melalui: <http://finance.martinsewell.com/fund-performance/fund-performance.pdf>
- Martin Sewell. (2011). *Fund Performance*. Melalui: http://www-typo3.cs.ucl.ac.uk/fileadmin/UCL-CS/research/Research_Notes/RN_11_03.pdf
- Miguel A. Ferreira et al. (2011). The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study. *Swiss Finance Institute Research Paper No. 31*. E-Journal on line. Melalui http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=947098
- Mohammad Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mutia Dewi Akbarini. (2004). *Analisis Atas Pengaruh Faktor Nilai Aktiva Bersih, Umur Reksa Dana, Afiliasi Dan Spesialisasi Manajer Investasi Terhadap Kinerja Reksa Dana Penelitian Empiris Periode Tahun 1999-2003*. Tesis. Depok. Program Studi Ilmu Manajemen. Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy./ Fakhruddin. (2001). *Pasar Modal Di*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Indonesia Pendekatan Tanya
Jawab. Jakarta. Salemba Empat

ana/files/regulasi/uu_no_8_tahun_
1995_pasar_modal.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia
No.8 Tahun (1995) Tentang Pasar
Modal. Melalui
<http://www.bapepam.go.id/reksad>

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta

ANALISIS AUDIT INTERNAL ATAS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET BIOLOGIS PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT

Arief Indrawan*), Holiawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*Email: arief.indrawan@outlook.com

ABSTRACT

This research aims to find out how to recognize and to measure a biological asset and how the implementation on internal auditing of the recognition and measurement of biological asset. This research was conducted at PT X that has a biological asset of palm oil plantations which has estates in West Kalimantan and headquartered in West Jakarta. This research data obtained through observation, interview dan documentation. Analysis of the method used is descriptive qualitative method of analysis is to examine, expose, analyze and explains the process on intern auditing a biological assets at PT X. Results of the research are PT X recognizes the biological assets at non current asset, i.e. mature plant and immature plant, then PT X measures the biological assets based on the value of the cost method and presented on the balance sheet as the book value (the value of acquisition minus accumulated depreciation). It is based on the consideration that value of cost method is more measurable than fair value method, so the value obtained could be more reliably. To achieve the reliability of the financial statements, the company shall make the records associated with a biological asset. The implementation of internal audit has complied with the values of the four stages of audit internal cycle P-E-D-E, according to Valery. Procedures and internal audit steps over the recognition and measurement of biological asset obtained through direct interviews to the internal auditor who worked at PT X and supported with documentation of PT X.

Keywords: Internal Audit, Biological Assets, Internal Audit Cycle P-E-D-E

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pengukuran suatu aset biologis serta bagaimana penerapan audit internalnya. Penelitian ini dilakukan pada PT X yang memiliki aset biologis berupa tanaman perkebunan kelapa sawit yang memiliki kebun di Kalimantan Barat dan berkantor pusat di Jakarta Barat. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari PT X untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang proses audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PT X. Hasil penelitian perusahaan mengakui aset biologis pada kelompok aset tidak lancar, yaitu tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, aset biologis diukur berdasarkan metode biaya nilai perolehan dan disajikan pada neraca sebesar nilai bukunya (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga nilai yang diperoleh lebih andal. Dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

untuk mencapai keandalan laporan keuangan, perusahaan harus membuat catatan terkait dengan aset biologis. Pelaksanaan audit internalnya telah memenuhi nilai-nilai empat tahapan siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery. Prosedur dan langkah kerja audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis diperoleh melalui wawancara langsung kepada auditor internal yang bekerja pada PT X serta didukung dengan dokumentasi PT X.

Kata Kunci: Audit Internal, Aset Biologis, Siklus Audit Internal P-E-D-E.

1. PENDAHULUAN

MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam Indonesia tapi pada dasarnya MEA itu sama saja dengan AEC atau *ASEAN Economic Community*.

Awal mula MEA berawal pada KTT yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 1997 dimana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Kemudian dilanjutkan pada KTT Bali yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020, *ASEAN Security Community* dan beberapa komunitas sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas ASEAN. Seluruh pihak diharapkan agar dapat bekerja sama secara kuat didalam

membangun komunitas ASEAN di tahun 2020.

Kemudian, selanjutnya pada pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah diselenggarakan di bulan Agustus 2006 yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia mulai bersepakat untuk bisa memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dengan memiliki target yang jelas dan terjadwal dalam pelaksanaannya.

Di KTT ASEAN yang ke-12 di bulan Januari 2007, para pemimpin mulai ASEAN di tahun 2015 yang telah diusulkan oleh ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan adanya penandatanganan deklarasi CEBU mengenai percepatan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN di tahun 2015 dan untuk melakukan perubahan ASEAN menjadi suatu daerah perdagangan yang bebas barang, investasi, tenaga kerja terampil, jasa dan aliran modal yang lebih bebas lagi.

Adapun bentuk kerjasamanya ialah:

1. Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas
2. Pengakuan terkait kualifikasi profesional
3. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi.
4. Memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan.
5. Meningkatkan infrastruktur.
6. Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN.

7. Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah.
8. Meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sebagaimana telah disebutkan pada point pertama diatas, dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN haruslah mempersiapkan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, cerdas dan kompetitif, terutama Indonesia. Lalu sumber daya manusia yang seperti apa yang diperlu disiapkan di Indonesia? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, berikut ini adalah data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dalam 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata	2015	2014	2013	2012	2011
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	34,65%	32,88%	34,00%	34,78%	35,19%	36,39%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,29%	1,15%	1,25%	1,27%	1,42%	1,34%
3	Industri	13,46%	13,29%	13,31%	13,27%	13,88%	13,54%
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0,23%	0,25%	0,25%	0,22%	0,22%	0,22%
5	Konstruksi	6,21%	7,15%	6,35%	5,63%	6,09%	5,83%
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	21,41%	22,37%	21,66%	21,38%	20,90%	20,76%
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,52%	4,45%	4,46%	4,52%	4,49%	4,66%
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,57%	2,84%	2,64%	2,57%	2,40%	2,40%
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	15,66%	15,62%	16,07%	16,36%	15,40%	14,87%
10	Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sekitar 34% penduduk yang bekerja di Indonesia bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, pemburuan dan perikanan. Angka ini adalah angka lapangan pekerjaan utama tertinggi di antara lapangan pekerjaan

lainnya selama 5 tahun terakhir, maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang mahir di bidang tersebut, baik dari sisi operasional maupun pengelolaan pencatatannya.

Sumber daya manusia Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tenaga melalui kekuatan fisik saja, sumber daya

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

manusia di Indonesia harus siap bersaing secara profesi termasuk di bagian akuntansi, karena bagian akuntansi yang tahu mengenai kondisi ekonomi yang ada pada suatu organisasi melalui laporan keuangan.

Salah satu alat manajemen yang umum diketahui adalah laporan keuangan. Saat ini, permintaan publik terhadap informasi laporan keuangan juga semakin tinggi. Menurut PSAK No. 1 (2009), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pentingnya porsi laporan keuangan dalam pengelolaan sebuah industri membuat keberadaan laporan keuangan sangat dibutuhkan, tentunya ditunjang dengan *output* kualitas informasi yang baik pula.

Dalam menyusun laporan keuangan, metode akuntansi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Berbeda dengan perusahaan manufaktur pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur memiliki aset yang berbentuk makhluk hidup (tumbuhan dan hewan). Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset yang dikenal dengan nama aset biologis ini juga sangat berbeda dengan aset tetap yang umumnya benda mati. Dibutuhkan pemahaman yang lebih detail, karena aset biologis akan mengalami klasifikasi yang berulang di sepanjang umur ekonomisnya akibat transformasi bentuk aset tersebut.

Dalam aplikasinya, aset biologis dapat diukur menggunakan biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis didasarkan pada harga perolehan awal dari aset tersebut. Namun sayangnya, metode biaya historis dianggap kurang mampu menyampaikan informasi yang wajar terkait nilai aset terkini. Sebaliknya, metode nilai wajar memungkinkan bagi

setiap entitas untuk merevaluasi aset biologisnya pada setiap periode. Metode ini muncul karena pemikiran bahwa aset biologis tumbuh dan dapat mengalami perubahan nilai setiap waktu, yang biasa dikenal dengan transformasi biologis. Sayangnya, metode ini juga memiliki kelemahan, selain memakan biaya yang cukup tinggi dalam aplikasinya, terkadang untuk beberapa aset biologis nilainya tidak tersedia di pasar, sehingga sulit untuk menentukan nilainya.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi akuntansi global, International Accounting Standard (IAS) 41 “*agriculture*” muncul untuk menjawab keberagaman yang terjadi dalam pengungkapan aset biologis. Dikeluarkan oleh Internasional Accounting Standard Board (IASB), IAS 41 memperkenalkan metode *fair value* sebagai dasar pengukuran aset biologis. Klasifikasi terhadap aset biologis juga dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan Desember 2000 ini. Selain itu, standar akuntansi untuk sektor pertanian sudah mulai berkembang sedemikian rupa. IPSAS 27, European Farm Accountancy Data Network (FADN), dan *Proposed International Accounting Standard on Agricultural* (PIASA), juga turut mengatur perlakuan akuntansi aset biologis yang dimiliki oleh negara maju.

Berbeda dengan apa yang kita lihat di luar, Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait pencatatan dan pengungkapan dalam sektor agrikultur. Sampai saat ini, acuan pelaporan keuangan dalam sektor agrikultur hanya mengacu pada Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan, PSAK 16 tentang Aset Tetap, PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aktiva, dan SAK ETAP untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Pada kenyataannya, saat ini banyak entitas usaha agrikultur di Indonesia yang hanya mengacu pada PSAK 16 dan 48 dalam menilai aset biologis yang mereka miliki (Menurut Kurniawan dalam Dian Martha (2014)). PSAK 16 dan 48 sendiri tidak secara spesifik mengatur masalah aset biologis, hanya aset secara umum. Kurniawan juga menilai bahwa hal ini dapat menimbulkan distorsi akuntansi yang dampaknya akan membuat laporan keuangan menjadi tidak andal. Bias yang terjadi pada pelaporan akuntansi, akan berdampak besar pada keakuratan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Tang dan Gao dalam Dian Martha (2014), tidak adanya keseragaman dalam standar pelaporan akuntansi biologis akan menimbulkan keberagaman pengungkapan, perusahaan terdaftar yang sejenis tidak dapat diperbandingkan dan menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan paparan di atas bahwa tidak adanya keseragaman dalam standar perlakuan aset biologis yang menimbulkan keberagaman pengungkapan, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana audit internal memeriksa pengakuan dan pengukuran aset biologis yang dilakukan pada PT X.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Ruang Lingkup Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT X yang berlokasi di Jakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan berangsur mulai Desember 2015 sampai dengan Mei 2016.

2.2. Metode Penentuan Sampel

Dalam buku Sugiyono (2012), mengemukakan bahwa:

"Naturalistic sampling is, then, very different from conventional sampling. It is based on informational, not statistical, considerations. Its purpose is to maximize information, not to facilitate generalization"

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Oleh karena itu menurut Sugiyono, dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel *purposive*, yaitu:

1. *Emergent sampling design* / sementara
2. *Serial selection of sample units* / menggelinding seperti bola salju (*snowball*)
3. *Continuous adjustment of 'focusing' of the sample* disesuaikan dengan kebutuhan
4. *Selection to the point of redundancy* / dipilih sampai jenuh

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2.3. Metode Pengumpulan Data

2.3.1. Jenis Data

- a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pihak perusahaan.
- b. Data Sekunder
Data Sekunder, yaitu data data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang berkaitan dengan penulisan berupa laporan keuangan serta catatan-catatan mengenai pengakuan dan pengukuran aset biologis.

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu memperoleh fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui pengamatan.
- b. Wawancara
Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan interview sebagai berikut.
“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.”
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide *melalui* tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang *sudah* berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

2.3.3. Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan tentang proses audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PT X.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Selanjutnya adalah menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. *Conclusion Drawing / Verification*
Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

2.4. Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari dan menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (*qualities*)

dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan bawah variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu audit internal, pengakuan aset biologis dan pengukuran aset biologis.

2.4.1 Audit Internal

Mendeskripsikan bagaimana cara suatu perusahaan untuk memeriksa apakah prosedur yang ditetapkan sudah dijalankan dengan seharusnya.

Menurut Valery (2011), siklus kerja audit internal dibagi menjadi 4 tahapan besar, yaitu:

- a. **PLAN** : Rencana Audit (*Audit “Plan”*)
Merupakan upaya menerjemahkan Strategi Koorporasi/Bisnis serta umpan balik (*feedback*) yang diterima dari berbagai pihak ke dalam perspektif audit internal, yaitu berupa pemetaan risiko dan pengendalian, penetapan strategi audit hingga penyusunan program audit.
- b. **DO** : Pelaksanaan Audit (*Audit Execution*)
Merupakan implementasi dari rencana audit, baik secara teratur (*Regular Audit*) maupun berdasarkan investigasi khusus atau permintaan pihak tertentu (*Special Audit*). Keduanya dijalan secara sinergis antara pengawasan tidak langsung (*Audit on Desk*) maupun pengawasan langsung (*Audit on Site*). Mengingat aktivitas yang bersifat *continuous audit*, maka pengembangan *Audit Database* juga menjadi bagian yang penting dari tahap ini.
- c. **CHECK** : Penyajian Hasil Audit (*Audit “Deliverables”*)

Merupakan penyampaian konfirmasi temuan (*finding confirmation*) kepada pihak klien/teraudit (*auditee*) hingga penyajian Laporan Hasil Audit (*audit report*) ke auditee dan pihak-pihak yang berkepentingan. Baik konfirmasi temuan maupun laporan hasil audit perlu ditanggapi oleh pihak auditee sebagai fungsi *rechecking*.

- d. **ACT** : Peninjauan Kembali Hasil Audit (*Audit “Evaluation”*)

Merupakan aktivitas evaluasi (*review*) yang terdiri dari 2 aspek : pertama, evaluasi terhadap tindak lanjut hasil audit yang harus dijalankan oleh *auditee*. Kedua, evaluasi secara integral mengenai kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal seluruh grup korporasi serta review internal terhadap kinerja audit sepanjang tahun. Hasil *review* sepenuhnya akan dipakai untuk tahap perencanaan audit ke depan.

Prosedur PT X dalam siklus audit internal menurut Valery:

1. **PLAN** : Apabila tim audit internal ingin melakukan pemeriksaan, maka harus ditunjuk karyawan sebagai koordinator untuk memenuhi data yang dibutuhkan oleh auditor internal dengan maksimal pemberitahuan untuk persiapan data adalah 5 hari kerja, termasuk perencanaan waktu kunjungan dan transportasi yang dibutuhkan.
2. **DO** : Proses pelaksanaan pemeriksaan harus matang, karyawan yang ditunjuk hadir, data yang diperlukan lengkap dan siap, serta alat penunjang yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
3. **CHECK** : Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan audit interal yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

ditandatangani oleh tim pelaksana audit, *Departemen Head – Internal Audit*, dan unit kerja yang diaudit.

4. ACT : Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal diterbitkan di *internalweb* sebagai arsip bahan untuk evaluasi untuk pemeriksaan periode berikutnya.

2.4.2 Pengakuan Aset biologis

Mendeskripsikan bagaimana proses penerapan pemeriksaan pengakuan aset biologis. Menurut PSAK No. 16 biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal

2.4.3 Pengukuran Aset biologis

Mendeskripsikan bagaimana proses penerapan pengukuran *biological asset*.

- a. Model Biaya
Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- b. Model Revaluasi
Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang di nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga hasil dan pembahasan utama, yaitu proses pengakuan aset biologis pada PT X, proses pengukuran aset biologis pada PT X, dan terakhir adalah analisis audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis.

3.1. Proses Pengakuan Aset Biologis Pada PT X

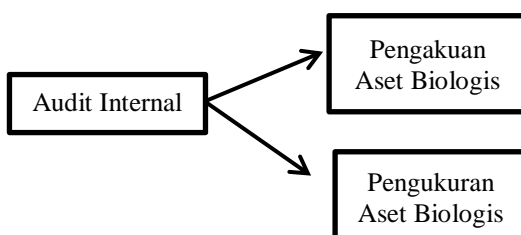
Pengakuan aset biologis pada PT X yaitu menentukan status aset biologis pada laporan keuangan. Terdapat dua akun untuk menampung status aset biologis pada PT X, yaitu tanaman menghasilkan (*Mature Plant*) dan tanaman belum menghasilkan (*Immature Plant*).

a. Pencatatan transaksi pengakuan tanaman belum menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan adalah tanaman yang belum mampu memberikan kontribusi manfaat ekonomi bagi perusahaan. Biaya yang dapat diakui sebagai tanaman belum menghasilkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian yang berkaitan langsung dengan tanaman dan aktivitas tanaman atau sering disebut biaya langsung. Biaya yang dikategorikan sebagai biaya langsung adalah semua biaya yang manfaatnya berhubungan langsung dengan aset biologis, contohnya adalah harga peroleh bibit tanaman, biaya persiapan lahan, biaya pemupukan dan biaya pemeliharaan baik upah maupun material. Biaya yang dikategorikan sebagai biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan aset biologis contohnya adalah alokasi biaya administrasi dan umum.

Misalnya, dalam rangka pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit, terjadi transaksi

Gambar 2.1 Operasional Variabel



biaya survey areal, biaya sehubungan pembuatan, biaya imas tumbang, imas yaitu memotong kayu-kayu kecil dengan diameter < 15 cm, tujuannya adalah memberikan jalan kepada pekerja yang akan melakukan pekerjaan tumbang, sedangkan tumbang itu sendiri adalah pekerjaan menumbangkan

pohon, maksud dari pekerjaan ini adalah penebangan kayu yang berukuran besar dengan diameter > 15 cm. Adapula biaya rumpuk, yaitu kegiatan memotong kayu yang sudah tumbang.

Adapun jurnal yang diperlukan atas transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jurnal Pembebasan Lahan (*Land Clearing*)

Akun	Debit	Kredit
Survey Areal	XXX	
Blocking	XXX	
Imas Tumbang	XXX	
Rumpuk	XXX	
Utang		XXX

Sumber: Data PT X

Selain pembukaan lahan, terdapat biaya yang telah terjadi sehubungan dengan pekerjaan pembuatan infrastruktur di blok tanaman belum menghasilkan, biaya tersebut adalah biaya untuk pembuatan akses *road*, pengerasan akses *road*, pembuatan *collection*

road, pengerasan *collection road*, pembuatan jembatan beton, pembuatan parit dan pembuatan patok blok.

Berdasarkan transaksi-transaksi tersebut, perlu dibuat jurnal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jurnal Pembuatan Infrastruktur

Akun	Debit	Kredit
Pembuatan Akses <i>Road</i>	XXX	
Pengerasan Akses <i>Road</i>	XXX	
Pembuatan <i>Collection Road</i>	XXX	
Pengerasan <i>Collection Road</i>	XXX	
Pembuatan Jembatan Beton	XXX	
Pembuatan Parit	XXX	
Pembuatan Patok Blok	XXX	

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Utang		XXX
-------	--	-----

Sumber: Data PT X

Setelah lahan dibuka dan infrastruktur sudah dibangun, selanjutnya terdapat aktivitas penanaman bibit meliputi pancang tanam, yaitu menentukan jarak dan kerapatan tanaman kelapa sawit, pembuatan tapak dan lubang tanam, penguntulan pupuk untuk

tenaga kerja dan dikeluarkan stok pupuk, upah pemupukan lubang tanam, transport dan ecer bibit, penanaman bibit serta untuk upah tenaga kerja dan stok bibit yang dikeluarkan.

Atas biaya sehubungan aktivitas tersebut, perlu dibuatkan jurnal sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jurnal Penanaman Bibit

Akun	Debit	Kredit
Pancang Tanam	XXX	
Pembuatan Tapak & Lubang Tanam	XXX	
Penguntulan Pupuk Lubang Tanam	XXX	
Pemupukan Lubang Tanam	XXX	
Transport & Ecer Bibit	XXX	
Penanaman Bibit	XXX	
Utang		XXX
Persediaan Pupuk		XXX
Bibit		XXX

Sumber: Data PT X

Aktivitas selanjutnya setelah penanaman bibit adalah pengendalian gulma. Contoh dibutuhkan biaya untuk pengendalian piringan manual, yaitu aktivitas membersihkan dan membasmi gulma dengan tenaga manusia yang menggunakan cangkul sebagai alat bantu. Adapula kegiatan pengendalian pasar rintis manual, yaitu kegiatan memelihara jalan yang digunakan

untuk merawat tanaman maupun mengeluarkan buah saat panen secara manual tanpa bahan kimia, contoh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan ini. Dan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pengendalian pasar rintis *chemist* dengan mengeluarkan stok bahan kimia.

Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas adalah:

Tabel 3.4 Jurnal Pengendalian Gulma

Akun	Debit	Kredit
Pengendalian Piringan Gulma	XXX	
Pengendalian Pasar Rintis Manual	XXX	
Pengendalian Pasar Rintis Chemist	XXX	
Utang		XXX
Persediaan Bahan Kimia		XXX

Sumber: Data PT X

Aktivitas selanjutnya yaitu merawat pokok, meliputi perawatan gembur tanah piringan, penyiraman tanaman, dan penyesipan.

Tabel 3.5 Perawatan Pokok

Akun	Debit	Kredit
Gembur Tanah Piringan	XXX	
Penyiraman Tanaman	XXX	
Penyesipan	XXX	
Utang		XXX

Sumber: Data PT X

Berikutnya yaitu aktivitas pemupukan, contoh dibutuhkan biaya untuk penguntulan pupuk anorganik dengan mengeluarkan stok pupuk anorganik, penaburan pupuk anorganik, penaburan pupuk organik dengan mengeluarkan stok pupuk dan penaburan pupuk cair dengan mengeluarkan stok pupuk cair. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya atas aktivitas tersebut adalah:

Tabel 3.6 Jurnal Pemupukan

Akun	Debit	Kredit
Penguntulan Pupuk Anorganik	XXX	
Penaburan Pupuk Anorganik	XXX	
Penaburan Pupuk Organik	XXX	
Penaburan Pupuk Cair	XXX	

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Utang		XXX
Persediaan Pupuk		XXX

Sumber: Data PT X

Setelah pemupukan, aktivitas berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit, pengeluaran dana untuk sensus hama dan penyakit, pengendalian hama dan penyakit penggerek daun, pengendalian hama dan penyakit

penggerek batang serta pengendalian hama dan penyakit lainnya dengan mengeluarkan stok bahan kimia. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya atas aktivitas tersebut adalah:

Tabel 3.7 Jurnal Pengendalian hama dan penyakit

Akun	Debit	Kredit
Sensus Hama dan Penyakit	120.000	
Pengendalian Hama dan Penyakit Penggerek Daun	315.000	
Pengendalian Hama dan Penyakit Penggerek Batang	320.000	
Pengendalian Hama dan Penyakit Lainnya	250.000	
Utang		515.000
Persediaan Bahan Kimia		490.000

Sumber: Data PT X

Aktivitas berikutnya adalah sensus tanaman, yaitu kegiatan untuk sensus pokok dan pemasangan plat. Jurnal yang

diperlukan untuk mencatat biaya atas aktivitas tersebut adalah:

Tabel 3.8 Jurnal Sensus Tanaman

Akun	Debit	Kredit
Sensus Pokok	XXX	
Pemasangan Plat	XXX	
Utang		XXX

Sumber: Data PT X

Selanjutnya adalah pemeliharaan infrastruktur, aktivitas didalamnya yaitu pemeliharaan *access road*, pemeliharaan *collection road*, pemeliharaan jembatan beton,

pemeliharaan parit, pemeliharaan patok blok. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya atas aktivitas tersebut adalah:

Tabel 3.9 Jurnal Pemeliharaan Infrastruktur

Akun	Debit	Kredit
Pemeliharaan Access Road	XXX	
Pemeliharaan Collection Road	XXX	
Pemeliharaan Jembatan Beton	XXX	
Pemeliharaan Parit	XXX	
Pemeliharaan Patok Blok	XXX	
Utang		XXX

Sumber: Data PT X

Nilai yang dimasukkan dalam jurnal di atas adalah nilai dari biaya yang dibayarkan oleh perusahaan yang dikapitalisasi ke dalam akun tanaman belum menghasilkan.

Penjurnalan ini dilakukan setiap akhir periode untuk biaya yang dikapitalisasi ke dalam tanaman belum menghasilkan sampai dengan tanaman belum menghasilkan tersebut telah memenuhi kriteria untuk berubah menjadi tanaman menghasilkan.

Tabel 3.10 Jurnal Settlement Tanaman Belum Menghasilkan

Akun	Debit	Kredit
Tanaman Belum Menghasilkan	XXX	
Alokasi Biaya TBM ke Aset Dalam Proses TBM		XXX

Sumber: Data PT X

b. Pencatatan transaksi settlement tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan

Setelah tanaman belum menghasilkan telah memenuhi kriteria untuk diakui menjadi tanaman telah menghasilkan berdasarkan tingkat pertumbuhan vegetatif dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen, maka tanaman belum menghasilkan harus segera direklasifikasi ke dalam tanaman telah menghasilkan.

Suatu areal TBM dengan kondisi normal dapat dimasukkan

ke areal TM apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Umur rata-rata tanaman 30 bulan atau maksimal 48 bulan (tergantung kondisi tanaman pada blok tersebut).
- 2) Pokok produktif $\geq 60\%$.
- 3) Berat janjang rata-rata $> 2,5$ kg.
- 4) Luas tertanam minimal 70 % dari luas kerangka blok (*master plan*), jika sampai pada usia 48 bulan tanaman di blok tersebut belum bisa mencapai 70 % tertanam dari master plan maka tanaman

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pada blok tersebut bisa langsung diangkat menjadi blok TM dengan memakai rata-rata umur tanaman.

Contoh, setelah dilakukan oleh pengecekan oleh pekerja lapangan diperoleh informasi bahwa lebih dari 70% tanaman sawit belum menghasilkan pada blok A dapat dikategorikan

sebagai tanaman menghasilkan, maka semua nilai dari tanaman sawit pada blok A harus direklasifikasi menjadi tanaman telah menghasilkan setelah dibuatkan Berita Acara Pengangkatan TM, jurnal *settlement* dari kejadian tersebut adalah:

Tabel 3.10 Jurnal *Settlement* Tanaman Menghasilkan

Akun	Debit	Kredit
Tanaman Menghasilkan	XXX	
Tanaman Belum Menghasilkan		XXX

Sumber: Data PT X

Tanaman telah menghasilkan dinilai berdasarkan nilai tanaman belum menghasilkan yang direklasifikasi ke dalam tanaman telah menghasilkan.

Proses kapitalisasi biaya-biaya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tanaman perkebunan tidak lagi dilakukan seperti pada tanaman belum menghasilkan, maka nilai tanaman belum menghasilkan tidak akan berubah kecuali jika ada kondisi lain yang mengharuskan diadakannya perubahan nilai tersebut, misalnya terjadi penghapusan tanaman telah menghasilkan karena alasan yang dapat diterima.

c. Penyajian aset biologis berupa Tanaman Perkebunan pada Laporan Keuangan PT X

Dalam laporan keuangan PT X aset biologis berupa tanaman perkebunan disajikan pada Neraca dalam kelompok aset tidak lancar (*non-current asset*) berupa tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan.

Tanaman menghasilkan disajikan dengan nilai setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Baik tanaman menghasilkan maupun tanaman belum menghasilkan *kedunya* ditampilkan secara total keseluruhan, tidak disajikan per kebun, per areal maupun per blok, adapun untuk mengetahui jumlah pokok tanaman kelapa sawit per blok, per kebun ataupun per areal, maka dapat dilihat pada *areal statement report*.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tampilan pencatatan aset biologis berupa tanaman perkebunan dalam ilustrasi *laporan keuangan* pada Neraca di lampiran I.

3.1.1. Proses Pengukuran Aset biologis pada PT X

PT X melakukan pengukuran aset biologis saat mengakui tanaman menghasilkan pada laporan keuangannya. Tanaman menghasilkan diakui dengan mengukur reklasifikasi dari tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan berdasarkan blok-blok yang tanamannya

sudah memenuhi kriteria tanaman menghasilkan, kemudian pengukuran selanjutnya adalah melakukan perhitungan penyusutan aset biologis setiap bulan untuk mengetahui nilai buku tanaman menghasilkan tersebut.

a. Metode Pengukuran Aset Biologis

PT X melakukan pengukuran aset biologis dengan menggunakan metode biaya, yaitu dengan mengakui semua biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas tanaman sebagai harga perolehan tanaman menghasilkan. PT X memilih menggunakan metode biaya karena harga-harga yang sudah dibayar dan dicatat dapat diandalkan sesuai dengan PSAK No 16.

b. Penyusutan Aset biologis

Tanaman telah menghasilkan karena telah mampu memberikan kontribusi manfaat ke dalam

perusahaan berupa kemampuan untuk menghasilkan produk agrikultur, maka perlu diadakan pengakuan terhadap pemakaian manfaat tersebut ke dalam setiap periode dimana manfaat tersebut dipakai. PT X melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi 25 tahun dengan tarif 4% pertahun.

Cara untuk mengakui pemakaian manfaat dari tanaman telah menghasilkan adalah dengan mengadakan penyusutan terhadap nilai tanaman telah menghasilkan yang dimanfaatkan ke dalam setiap periodenya. PT X melakukan penyusutan terhadap tanaman telah menghasilkan menggunakan metode garis lurus. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Tabel 4.13 Jurnal Penyusutan Tanaman Menghasilkan

Akun	Debit	Kredit
Biaya Penyusutan TM	XXX	
Akum. Penyusutan TM		XXX

Sumber: Data PT X

Nilai dari pembebanan penyusutan tanaman menghasilkan pada setiap periodenya didasarkan pada estimasi manfaat yang dipakai pada setiap periodenya, dalam hal ini PT X mengakui penyusutan tanaman telah menghasilkan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan membagi manfaat ekonomi dari tanaman telah menghasilkan sama besar setiap periodenya sampai dengan masa manfaat dari tanaman telah menghasilkan dapat digunakan. Masa manfaat dari tanaman telah

menghasilkan diperoleh dari estimasi pihak manajemen dengan mempertimbangkan proses pertumbuhan vegetatif dari tanaman telah menghasilkan.

3.1.2. Analisis Audit Internal atas Pengakuan dan Pengukuran Aset biologis

Penerapan Audit Internal di PT X pada kondisi normal mengacu pada prosedur pengadaan audit internal yaitu menentukan tujuan diadakannya audit, membentuk tim auditor internal yang ditugaskan, menyusun agenda, menunjuk wakil unit kerja yang diaudit untuk mempersiapkan data dan memberikan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

keterangan kepada tim auditor internal hingga pelaksanaan pemeriksaan, pembuatan berita acara pengadaaan pemeriksaan dan mengarsipkannya di internal web sebagai acuan untuk evaluasi kerja.

Berikut ini adalah penerapan audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis.

a. Audit Internal atas Pengakuan Aset biologis

Dalam melaksanakan auditor internal, tim auditor internal harus mengetahui tujuan dilakukannya audit, memahami langkah-langkah audit yang akan dilakukan hingga menyimpulkan temuan, menyampaikan temuan kepada manajemen dan menuntaskan hasil temuan tersebut.

1. Audit internal atas pengakuan aset biologis dilakukan bertujuan:

- a) Memeriksa apakah terdapat *internal control* yang baik atas pengakuan aset biologis.
- b) Memeriksa apakah aset biologis yang diakui di neraca betul-betul ada, masih dipelihara dan milik perusahaan. (*Existency*)
- c) Memeriksa apakah penambahan pengakuan aset biologis dalam tahun berjalan diotorisasi oleh pihak yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. (*Completeness*)
- d) Memeriksa apakah disposal dari aset biologis sudah dicatat dengan benar dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Completeness*)
- e) Memeriksa apakah penyajian aset biologis dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. (*Presentation & Disclosure*)

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur P, yaitu *Plan* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

2. Langkah-langkah dalam melakukan audit internal:

- a) Auditor Internal memeriksa apakah setiap penambahan dan pengurangan aset biologis dibuatkan bukti dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat *internal control* yang baik atas setiap pengakuan aset biologis.

Penerapan pada PT X, setiap penambahan dan pengurangan aset biologis harus dibuatkan berita acara dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang tersebut adalah *Region Controller Operation* dan *Head Research & Agronomy Palm Oil*. Dengan adanya kewajiban untuk membuat berita acara pengangkatan tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan disertai dengan kelengkapan otorisasi pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa PT X memiliki *internal control* untuk setiap pengakuan aset biologis.

Formulir berita acara pengangkatan tanaman menghasilkan yang terdapat di PT X dapat dilihat pada lampiran II.

- b) Auditor internal harus memeriksa apakah terdapat kebijakan tertulis yang jelas

mengenai prosedur pengakuan aset biologis.

PT X memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis tentang prosedur aset biologis. Pada SOP milik PT X nomor SO-RAS-17-2015 tentang Panen, dituliskan bahwa :

“Suatu areal TBM dengan kondisi normal dapat dimasukkan ke areal TM apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Umur rata-rata tanaman 30 bulan atau maksimal 48 bulan (tergantung kondisi tanaman pada blok tersebut).
- 2) Pokok produktif $\geq 60\%$.
- 3) Berat janjang rata-rata $> 2,5$ kg.
- 4) Luas tertanam minimal 70 % dari luas kerangka blok (master plan), jika sampai pada usia 48 bulan tanaman di blok tersebut belum bisa mencapai 70 % tertanam dari master plan maka tanaman pada blok tersebut bisa langsung diangkat menjadi blok TM dengan memakai rata-rata umur tanaman.”

Hal ini menunjukkan bahwa PT memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengakuan aset biologis. Adapun SOP Panen tersebut dapat dilihat pada lampiran III.

- c) Auditor Internal harus memeriksa apakah aset biologis diasuransikan oleh perusahaan dengan jumlah/nilai pertanggungan (*insurance coverage*) yang wajar.

Setelah dilakukan konfirmasi, PT X tidak mengasuransikan aset biologisnya karena tidak ada perusahaan asuransi yang

bersedia untuk menanggung resiko kelangsungan hidup tanaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai asuransi yang dapat menjadi biaya pemeliharaan tanaman jika ada.

- d) Auditor Internal harus memeriksa bukti kepemilikan aset biologis.

Bukti-bukti kepemilikan aset biologis milik PT X disimpan ditempat yang aman. Salah satu bukti kepemilikan aset biologis adalah sertifikat kecambah (sertifikat pembelian bibit sawit) yang diperoleh dari supplier andal dan terpercaya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa aset biologis yang tercantum di neraca benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh PT X.

- e) Auditor Internal harus memeriksa aktivitas yang mempengaruhi perubahan aset biologis.

PT X melakukan inventarisasi/pemeriksaan yang rutin terhadap aset biologis, untuk mengetahui perkembangan dan kondisi dari aset biologis tersebut.

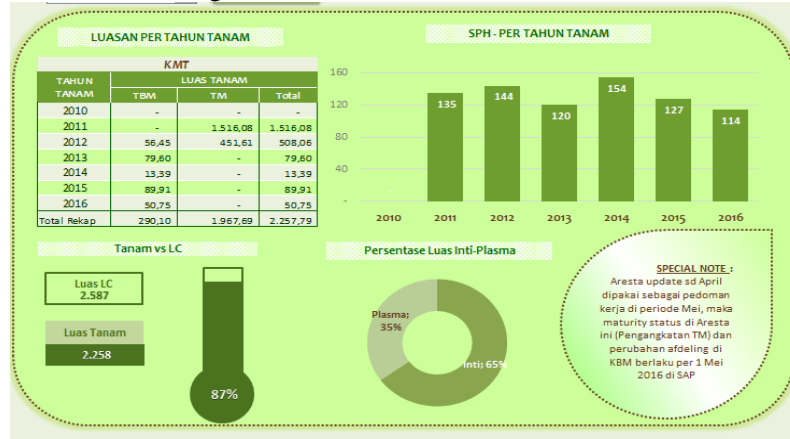
PT X memiliki laporan berupa *areal statement report*, dimana dalam laporan tersebut dapat diketahui setiap perubahan yang terjadi pada aset biologis, baik itu penambahan atas penanaman bibit baru, maupun pengurangan atas tanaman yang mati atau tanaman yang dianggap tidak layak untuk dipelihara lagi karena alasan tertentu harus diganti atau dihilangkan.

Berikut adalah gambar utama *areal statement report* yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

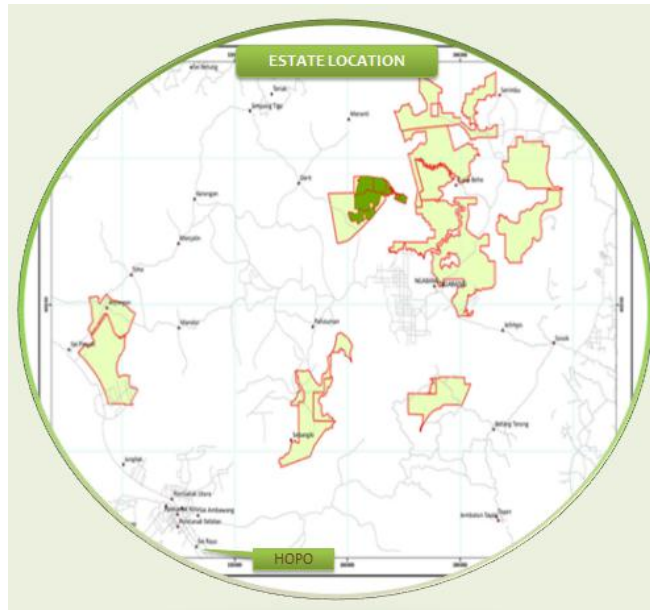
menunjukkan luas tanam
pertahun dan status
kepemilikan aset biologis.



Gambar 3.1 Areal Statement

Dan berikut ini adalah gambar peta lokasi untuk

lebih meyakinkan lagi bahwa aset biologis memang ada.



Gambar 3.2 Peta Lokasi Kebun

f) Auditor internal harus memeriksa apakah penyajian aset biologis di dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyajian aset biologis pada PT X sudah sesuai dengan IAS 41 yaitu dengan mengelompokkan aset biologis ke dalam kelompok tanaman menghasilkan

(Mature Plant) dan tanaman belum menghasilkan (Immature Plant).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur E, yaitu Execution dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

3. Temuan

Auditor internal menemukan bahwa terdapat pengakuan

tanaman belum menghasilkan yang seharusnya diangkat menjadi tanaman menghasilkan, karena dari segi usia sudah memasuki bulan ke 50 meskipun tanaman tersebut belum menghasilkan buah yang optimal.

4. Menyampaikan Temuan

Auditor internal PT X menyampaikan temuan tersebut kepada tim Accounting, Auditor internal tidak langsung menyampaikan rekomendasi dengan tujuan agar tim Accounting yang dapat mencari akar permasalahannya dan menemukan solusinya, dalam hal tim Accounting tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan dibahas melalui rapat, ditunjuk notulen, dan dibuatkan MoM dan *dateline* hingga permasalahan selesai agar temuan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengendalian internal dan pelaksanaan operasional yang lebih baik lagi. Penyampaian temuan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur D, yaitu *Deliverables* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

5. Menuntaskan temuan

Setelah temuan disampaikan, dan diberikan tenggang waktu agar temuan dapat diselesaikan, maka auditor internal PT X harus memastikan bahwa temuan sudah diselesaikan. Dalam kasus ini, Penerapan Audit Internal atas Pengakuan aset biologis adalah berkoordinasi dengan departemen terkait dalam hal ini yaitu tim *Research & Agronomy* agar dapat dibuatkan berita acara

pengangkatan tanaman menghasilkan di blok tersebut. Penuntasan temuan yang diterapkan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur E, yaitu *Evaluation* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

b. Audit Internal atas Pengukuran Aset biologis

Dalam melaksanakan audit internal, tim auditor internal harus mengetahui tujuan dilakukannya audit, memahami langkah-langkah audit yang akan dilakukan hingga menyimpulkan temuan, menyampaikan temuan kepada manajemen dan menuntaskan hasil temuan tersebut.

1. Audit Internal atas pengukuran aset biologis dilakukan bertujuan untuk:

- a) Memeriksa apakah terdapat *internal control* yang baik atas pengukuran aset biologis.
- b) Memeriksa apakah aset biologis yang diukur dan disajikan di neraca betul-betul ada, masih dipelihara dan milik perusahaan. (*Ownership*)
- c) Memeriksa apakah penambahan pengakuan aset biologis dalam tahun berjalan diotorisasi oleh pihak yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar telah diukur dengan tepat. (*Completeness*)
- d) Memeriksa apakah disposal dari aset biologis sudah dicatat dengan benar dengan pengukuran yang akurat dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Accuracy*)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- e) Memeriksa apakah pembebanan penyusutan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan SAK, dan apakah perhitungannya sudah benar. (*Valuation*)

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur P, yaitu *Plan* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

2. Langkah-langkah yang dilakukan auditor internal dalam memeriksa pengukuran aset biologis:

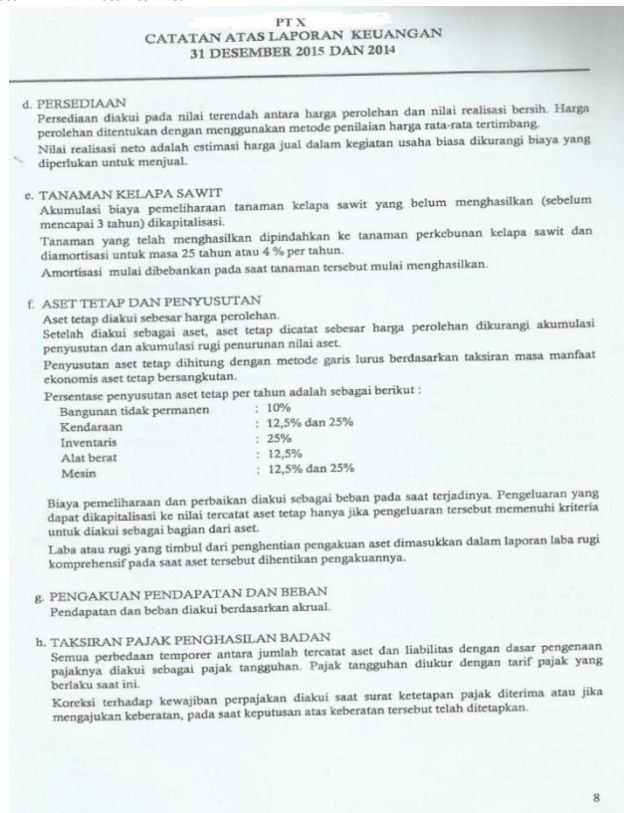
- a) Auditor internal meminta kepada bagian akuntansi mengenai *accounting top schedule* aset biologis, yaitu suatu kertas kerja yang menunjukkan saldo awal dan saldo akhir akun aset biologis dalam suatu periode tertentu dan *supporting schedule* aset biologis, yaitu suatu kertas kerja yang memuat rincian atas mutasi akun dalam periode tertentu yang merupakan pendukung *accounting top schedule*. Hal ini dibutuhkan untuk dapat melihat berapa saldo awal aset biologis, berapa penambahan/pengurangannya dan berapa saldo akhir aset biologis tersebut.
- b) Auditor internal memeriksa apakah setiap penambahan dan pengurangan dari aset biologis dilengkapi dengan *supporting document*, termasuk otorisasinya. Tidak berbeda dengan pelaksanaan audit internal pengakuan aset biologis, setiap penambahan dan pengurangan aset biologis pada PT X didukung dengan

berita acara yang diotorisasi oleh *Region Controller Operation* dan *Head Research & Agronomy Palm Oil*.

- c) Internal auditor memeriksa apakah setiap transaksi reklasifikasi ke TM maupun TBM dilengkapi dengan berita acara, dan memastikan semua akun yang berhubungan dengan aset biologis sudah direklasifikasi ke akun yang tepat. Pada langkah ini, auditor internal lebih memfokusnya pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas tanaman, yaitu dengan cara memeriksa *Cost Object ID* atau kode identitas yang merujuk kepada lokasi dan departemen yang menikmati atau menggunakan suatu biaya yang dikeluarkan perusahaan.
- d) Auditor internal memeriksa apakah *capitalization policy* sudah benar dan *depreciation policy* dijalankan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Untuk memeriksa konsistensi dalam melakukan penyusutan aset biologis, auditor internal memeriksa persentase penyusutan dan memeriksa apakah nilai penyusutan sudah dihitung dengan akurat. Untuk memastikan tarif penyusutan aset biologis tersebut, maka diperlukan bukti yang menunjukkan tarif penyusutan aset biologis. Dalam hal ini akan

ditunjukkan pada catatan atas laporan keuangan milik PT X. Auditor internal juga memeriksa berapa besar tanaman menghasilkan di akhir tahun sebelum periode audit kemudian dikalikan tarif penyusutan, ditambah, nilai tanaman menghasilkan yang diangkat di tahun periode audit dikalikan dengan jumlah bulan dalam tahun periode sejak pengangkatan tanaman

menghasilkan dibagi 12 bulan. Hasilnya harus sama dengan pergerakan akumulasi penyusutan dari tahun sebelum dan saat periode audit. Berikut ini adalah gambar catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan umur ekonomis tanaman dan persentase penyusutan aset biologis.



Gambar 3.3 Catatan atas laporan Keuangan

Langkah-langkah yang diterapkan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur E, yaitu *Execution* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

3. Temuan

a) Terdapat biaya pemeliharaan kendaraan

yang beroperasi di kantor regional Pontianak, akan tetapi masuk ke pembebanan kebun, kesalahan ini terjadi karena keliru melihat daftar kepemilikan kendaraan.

b) Terdapat biaya pemupukan TM yang dibebankan ke TBM, kesalahan ini terjadi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

karena keliru memilih COA.

4. Menyampaikan Temuan

Auditor internal PT X menyampaikan temuan tersebut kepada tim Accounting, Auditor internal tidak menyampaikan rekomendasi dengan tujuan agar tim Accounting yang dapat mencari akar permasalahannya dan menemukan solusinya, dalam hal tim Accounting tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan dibahas melalui rapat, ditunjuk notulen, dan dibuatkan MoM dan *dateline* hingga permasalahan selesai agar temuan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengendalian internal dan pelaksanaan operasional yang lebih baik.

Penyampaian temuan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur D, yaitu *Deliverables* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

5. Menuntaskan temuan

Setelah temuan disampaikan, dan diberikan tenggang waktu agar temuan dapat diselesaikan, maka auditor internal PT X harus

memastikan bahwa temuan sudah diselesaikan. Dalam kasus ini, maka penyelesaian atas temuan auditor internal sebagai berikut :

a) Terdapat biaya pemeliharaan kendaraan yang beroperasi di kantor regional Pontianak, akan tetapi masuk ke pembebanan kebun, kesalahan ini terjadi karena keliru melihat daftar kepemilikan kendaraan. Penyelesaiannya adalah mereklasifikasi ke akun yang tepat dengan mengurangi pembebanan kebun dan menambah beban kantor regional Pontianak.

b) Terdapat biaya pemeliharaan TM yang dibebankan ke TBM, kesalahan ini terjadi karena keliru memilih COA. Penyelesaiannya adalah mereklasifikasi biaya pemupukan TBM ke TM

Penuntasan temuan yang diterapkan oleh auditor internal PT X telah memenuhi unsur E, yaitu *Evaluation* dalam siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT X, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT X dalam melakukan pengakuan aset biologis berupa tanaman perkebunan telah dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16, sedangkan untuk teknisnya, PT X menggunakan nama akun “Tanaman Belum Menghasilkan” atau “*Immature Plant*” untuk

mencatat tanaman yang belum mampu menghasilkan manfaat bagi perusahaan dan akun “Tanaman Menghasilkan” atau “*Mature Plant*” untuk tanaman yang sudah dapat memberikan kontribusi berupa buah kepada perusahaan.

2. Aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PT X diukur berdasarkan harga perolehannya yaitu dengan metode biaya karena didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur

sehingga mampu memberikan informasi yang lebih andal.

3. Analisis audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PT X memenuhi nilai-nilai empat tahapan siklus audit internal menurut Valery (2011), yaitu P-E-D-E, *Plan, Execution, Deliverables* dan *Evaluation*.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi perusahaan
 Prosedur Audit Internal yang sudah ada memang sudah baik karena memenuhi empat tahapan siklus audit internal P-E-D-E menurut Valery dan jelas didukung dengan SOP tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan yang juga memadai membuat pelaksanaan audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis dapat dilakukan tanpa adanya hambatan yang signifikan. Diharapkan ke depannya PT X dapat juga menyusun program-program audit lainnya seperti audit sumber daya manusia, apakah kompensasi dan *punishment* yang sudah ada sudah cukup adil, hal ini untuk meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja sehingga karyawan mampu memberikan kontribusi yang maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 Peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran tentang penerapan audit internal atas pengakuan dan pengukuran aset biologis mengacu pada PSAK 69 yang pada saat peneliti melakukan penelitian masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2011). *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama*. Diakses dari <http://www.bps.go.id>.
- Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2013). *IFRS In Your Pocket*. London: The Creative Studio at Deloitte.
- Floyd A. Beams dan Partenrs. (2007). *"Akuntansi Lanjutan Jilid I"*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, Abdul (2008). *Auditing 1 (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Harahap dan Sofyan Safri. (2011) *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hery. (2012) *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hery. (2015). *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap*, Jakarta: Salemba.
- Kompas Cetak. (2015). *Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Diakses dari <http://www.nationalgeographic.co.id>.
- Laras, Esti. (2012). *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Pelaporan Aset biologis*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- (Studi Kasus Pada Koperasi “M”). Jurnal.
- Riska, Dian. (2014). *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Industri Perkebunan*. Jurnal.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. (2014). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Valery. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Warren, Carl S., Reeve, James M., dan Fess, Philip E. (2006). *Pengantar Akuntansi*. Edisi dua puluh satu. (penerjemah: Aria Farahmita), Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., Kimmel, Paul D. (2007). *Accounting principles* (penerjemah: Ali Akbar Yulianto). Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, Amin. (2012). *The Internal Auditing Handbook*. Jakarta: Harvarindo.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP RETURN STOCK

Ariza Roni Taufik

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email: dosen01128@unpam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) on stock returns. Good Corporate Governance is measured by results ranked by IICG, Corporate Social Responsibility is measured by CSRDI and Stock Return is measured by abnormal return formula. The kind research of this research is kuantitatif with a sampling method of this research is purposive sampling. The population in this study is a listed company in IICG which totaled 50 companies. Total sample of this research is 7 companies for 5 years. Statistical calculations used to test this hypothesis are the classic assumption test, multiple linear regression analysis, and analysis of determination, f test, and t test. This study uses multiple regression analysis. All data was tested with classic assumption test, multiple linear regression analysis, analysis of determination, f test, and t test. The results showed that good corporate governance has no significant influence on stock returns, but corporate social responsibility significant influence on stock returns.

Key Words: GCG, CSR, Stock Returns

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap return saham. Good Corporate Governance diukur dengan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh IICG, Corporate Social Responsibility diukur dengan CSRDI dan Return Saham diukur dengan rumus abnormal return. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengambilan sampel penelitian yaitu purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di IICG yang berjumlah 50 perusahaan. Jumlah sampel yang sesuai dengan adalah 7 perusahaan selama 5 tahun. Perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, namun corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Kata Kunci: GCG, CSR, Return Saham.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Brigham and Houston, 2001). Perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (*maximization wealth of shareholder*). Salah satu cara untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham yaitu dengan meningkatkan *return* saham perusahaan. Peningkatan *return* saham perusahaan mengakibatkan respon positif dari para investor, oleh karena hal itu maka perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan *return* saham perusahaan.

Komponen laporan keuangan yang lazim digunakan untuk memprediksi *return* saham perusahaan adalah laporan laba rugi (Jatiningrum, 2009). Return saham dapat diartikan sebagai *reward* berupa sejumlah dana atas investasi dalam saham pada perusahaan. Laporan keuangan tahunan merupakan salah satu sumber informasi bagi para investor. Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan akan berdampak pada pergerakan harga saham sehingga berdampak pada *return* saham.

Dengan prinsip ini beberapa perusahaan mengabaikan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan, sehingga memunculkan tekanan publik yang berdampak negatif bagi perusahaan. Dampak tersebut dapat mengganggu kinerja keuangan perusahaan dan mengakibatkan turun harga saham, karena kurangnya kepercayaan investor akibat citra buruk yang ditimbulkan perusahaan.

Hal tersebut telah mengubah pola pikir para pelaku bisnis untuk memperhatikan pemangku kepentingan lain di luar para *shareholder*. Dunia usaha menyadari bahwa kelangsungan

usaha jangka panjang tidak hanya bergantung pada kekuatan finansial, akan tetapi dibutuhkan suatu sistem yang dapat menjamin pengelolaan perusahaan dengan baik dan tepat. Salah satu sistem yang dapat diterapkan adalah *Good Corporate Governance* (GCG) atau bila diterjemahkan menjadi tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* merupakan arahan dalam mengimplementasikan kebijakan bisnis suatu perusahaan dengan berdasarkan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF)*.

Berdasarkan website kontan pada tanggal 15 September 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil 100 emiten. Hal ini terkait dengan sosialisasi penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Peringkat Indonesia dalam hal GCG perusahaan publik di tingkat ASEAN dinilai masih rendah. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) di tahun 2013, skor GCG emiten-emiten di Negara Indonesia secara umum masih ada di bawah Negara Filipina. Pada tahun 2014, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) menggelar survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Selama 12 tahun, survei ini memperlihatkan kemajuan kurang begitu baik. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan pada tahun 2014 yang hanya mendapat total 23 perusahaan.

The Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan penilaian atas penerapan GCG pada perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate governance* (IICG). Penilaian ini dilakukan melalui sebuah riset yang dibuat untuk menilai penerapan konsep *Corporate Governance* (CG) yang ada di sebuah perusahaan dengan melalui perbaikan

yang berkesinambungan dan evaluasi melalui *benchmarking*.

Signaling theory disusun berdasarkan asumsi adanya informasi asimetris antara manajer dan pemegang saham. Diasumsikan manajer memiliki informasi lebih baik daripada investor mengenai kesempatan investasi perusahaan dan investor menafsirkan tindakan manajer perusahaan yang didasarkan untuk kepentingan para pemegang saham dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam teori *stakeholder* dijelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggungjawab pada *stockholder* saja tetapi juga pada *stakeholder* (Jalal, 2009 dalam Sugiyanto, 2011). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kegiatan yang sejalan dengan konsep *stakeholder theory*. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempublikasikan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GC). Dengan adanya pengungkapan tersebut maka diharapkan para investor agar dapat berinvestasi dengan harapan mendapatkan *return* saham yang positif.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kepedulian perusahaan yang tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga membangun manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang ditentukan (Suharto, 2008 dalam Sugiyanto, 2011). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

Survei global yang dilakukan *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85 % eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai

pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan terkadang tidak tepat sasaran. Fokus program CSR adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

Tanggungjawab sosial perusahaan juga telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR. Undang-undang ini menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang 40 Tahun 2007 Pasal 74, maka jelas dan tegas bahwa program CSR penting dan wajib bagi perusahaan.

Bagi suatu perusahaan CSR dapat membentuk *image* baik perusahaan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Christiawan (2011), menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap *abnormal return* yang menyatakan bahwa investor mempertimbangkan informasi CSR dalam pengambilan keputusan investasi.

Struktur GCG menetapkan distribusi hak dan kewajiban antara

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi. Orientasi keputusan CSR dan GCG selalu berfokus pada kepentingan *stakeholder*. Perusahaan publik yang dituntut keterbukaan dalam berbagai informasi, CSR dan GCG seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam bisnis. Namun fenomena yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, kegiatan CSR dan GCG umumnya masih dalam kategori implementasi belum maksimal.

Tahun 2005-2006 pengungkapan tema-tema CSR perusahaan publik tidak lebih dari 30% (Monika, 2008). Sedangkan menurut lembaga survei GCG di Indonesia yaitu *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*, jumlah peserta survei GCG dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Peserta tahun 2001-2005 berkisar antara 22-52 perusahaan. Hal tersebut setidaknya merefleksikan keraguan perusahaan publik mengenai insentif langsung yang akan diterima apabila melaksanakan CSR dan GCG.

Penelitian Pranata (2007) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara GCG terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Namun, Wardani (2008) tidak menemukan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pasar. Penerapan GCG dalam perusahaan dapat mendorong pelaksanaan dan pengungkapan CSR (Solihin, 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa GCG mempunyai pengaruh terhadap CSR.

Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap *return* saham maupun kinerja keuangan. Dahli (2008) tidak menemukan pengaruh signifikan CSR terhadap *return* saham tetapi menemukan pengaruh positif signifikan CSR terhadap kinerja keuangan. Sayekti (2007) menemukan pengaruh positif signifikan CSR terhadap *return* saham. Sedangkan Monika (2008) dan Fauzi (2007) tidak menemukan pengaruh signifikan CSR

terhadap kinerja keuangan. Kaitannya dengan pengaruh kinerja keuangan terhadap *return* saham, Taufik (2007) menemukan bahwa secara signifikan semakin tinggi nilai kinerja keuangan, maka semakin tinggi *return* saham yang dinikmati oleh para pemegang saham. Penelitian Hakim (2006) tidak menemukan pengaruh signifikan kinerja keuangan terhadap *return* saham.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu menandakan adanya *research gap*. Tidak konsistennya temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari BEI dan IICG, hal ini karena data laporan dari BEI dan IICG lebih dapat dipercaya. Data dari IICG lebih bisa dijadikan acuan daripada menggunakan pengukuran dengan prinsip-prinsip ataupun mekanisme, hal ini karena data dari IICG mempunyai pengukuran-pengukuran yang lebih obyektif.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Agency Theory

Menurut Darmawati (2003), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal* atau investor) dan pengendalian (*agent* atau manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan kewenangan kepada agen. Dalam hal ini manajer diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.

Dalam rangka memahami *corporate governance* (CG) maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan

kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam ekonomi modern, pengelolaan dan pengendalian perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan. Hal ini sejalan dengan Teori Agensi yang menunjukkan pentingnya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik (investor) kepada manajer. Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan mempekerjakan agen profesional dalam mengelola perusahaan. Hal ini terjadi di mana para CEO perusahaan publik memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai agen untuk investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Teori Agensi mencoba untuk merancang sistem informasi dengan biaya yang paling efektif.

Satu hal penting dalam manajemen keuangan, bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Tetapi didalam kenyataannya tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak sesuai keinginan pemegang saham, tetapi dalam praktik sering terjadi konflik.

2.2 Signaling Theory

Signaling theory disusun berdasarkan asumsi adanya informasi asimetris antara manajer dan pemegang saham, Diasumsikan manajer memiliki informasi lebih baik daripada investor mengenai kesempatan investasi

perusahaan dan investor menafsirkan tindakan manajer perusahaan yang didasarkan untuk kepentingan para pemegang saham dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

2.3 Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* ditahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Good Corporate Governance* merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Dari pengertian diatas pula, ada beberapa aspek penting dari *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni:

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal)
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya

3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya

4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) GCG memiliki asas sebagai berikut:

1. *Transparency*, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability*, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu

perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan pra syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan,

3. *Responsibility*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai good corporate governance.

4. *Independency*, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness*, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Dengan penerapan GCG diyakini dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik, efisien, dan menguntungkan.

Terdapat beberapa manfaat dari *Good Corporate Governance*, antara lain:

a) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang

saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen,

b) Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring turunnya tingkat resiko perusahaan,

c) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan *image* perusahaan tersebut kepada publik dalam jangka panjang,

d) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan,

e) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholders*,

f) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*,

g) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah suatu riset yang oleh Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) untuk menilai kinerja manajemen perusahaan (Laporan IICG, 2014). Adapun ruang lingkup dan fokus penilaian dalam CGPI antara lain :

a. Aspek kepatuhan (*compliance*) dalam implementasi GCG merupakan pemenuhan atas berbagai tuntutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator. Aspek kepatuhan menyatakan kepastian bahwa seluruh operasional bisnis perusahaan sudah dilakukan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan.

b. Aspek kesesuaian (*conformance*) dalam implementasi GCG merupakan keselarasan berbagai kebijakan dan operasional perusahaan dengan norma, etika, dan tata nilai yang dianut perusahaan. Aspek kesesuaian menyatakan kepastian kepatutan penyelenggaraan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan.

c. Aspek kinerja (*performance*) dalam implementasi GCG merupakan hasil-hasil capaian perusahaan dalam memenuhi tuntutan operasional secara etika dan bermartabat. Aspek kinerja menyatakan kepastian pencapaian kinerja perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan.

1. Aspek Penilaian Dalam CGPI

a. Self Assessment

Self-assessment adalah penilaian mandiri oleh seluruh organ, anggota, dan stakeholder perusahaan mengenai kualitas penerapan GCG dan penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan secara etikal dan bermartabat dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Pada tahapan ini perusahaan mengisi kuesioner yang menggali persepsi responden terhadap aspek dan indikator yang dinilai secara jujur dan objektif guna memberikan umpan balik dan evaluasi yang baik kepada perusahaan.

b. Sistem Dokumentasi

Tahapan sistem dokumentasi adalah pemenuhan persyaratan penilaian berupa penyerahan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan terkait dengan pelaksanaan GCG dan penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan secara etikal dan bermartabat dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perusahaan.

c. Penyusunan Makalah

Penyusunan makalah merupakan salah satu pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan penciptaan nilai tambah perusahaan.

d. Observasi

Observasi adalah tahapan akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI 2014 berupa peninjauan langsung ke perusahaan oleh tim penilai CGPI 2014 untuk memastikan

kualitas penerapan GCG dan proses penciptaan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan yang diperoleh dari data dan informasi pada ketiga tahapan sebelumnya (*self assessment*, sistem dokumentasi dan makalah). Berikut adalah komposisi penilaian CGPI:

Tabel 2.1 Bobot Tahapan Penilaian CGPI

Tahapan	Bobot
<i>Self Assessment</i>	27%
Kelengkapan Dokumen	41%
Penyusunan Makalah	14%
Observasi	18%
Total Overall Inconsistency	100%

Sumber: *The Indonesian Institute for Corporate Governance 2016*

2.4 Corporate Social Responsibility

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Muid (2011) menjelaskan bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Menurut Suharto (2008) dalam Muid (2011) CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Pelaksanaan corporate social responsibility merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pembentukan citra positif perusahaan.

2.5 Return Saham

Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return dibedakan menjadi dua yaitu return

realisasi (*realized return*) atau return ekspektasi (*expected return*). Return realisasi merupakan return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. *Return* ini penting karena digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan *return* dan risiko dimasa mendatang. Sedangkan *return* ekspektasi adalah *return* yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang dan masih bersifat tidak pasti (Jogiyanto, 2010).

Sumber-sumber *return* saham terdiri dari dua komponen utama yaitu *yield* dan *capital gain (loss)*. *Yield* merupakan komponen *return* yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Jika kita berinvestasi pada sebuah obligasi maka besarnya *yield*

ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayarkan. Jika kita membeli saham, *yield* ditunjukkan dengan besarnya dividen yang kita peroleh. Sedangkan *capital gain* sebagai komponen kedua *return* merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi (*explanatory research*) karena dirancang untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel yaitu seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* (independen) terhadap *return* saham (variabel dependen) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian replikatif dan pengembangan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). Perusahaan yang terdaftar di IICG sebagai populasi karena perusahaan tersebut mempunyai skor penilaian GCG, sehingga dapat diolah data tersebut. Pemilihan sampel pada

penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria yang ditentukan.

Sampel yang dipilih harus memiliki kriteria adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014,
2. Perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember periode 2010-2014,
3. Masuk dalam peringkat *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) periode 2010-2014,
4. Memiliki laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang masuk pada peringkat CGPI pada tahun 2010-2014 karena semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang mendaftar sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip GCG yang tentunya diharapkan bisa menjadi acuan sebagai perusahaan yg benar dan beresistematika serta mampu menerapkan struktur GCG dalam prosesnya. Terdapat 7 perusahaan yang telah memenuhi kriteria dijadikan untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Daftar perusahaan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Sampel

No.	Nama Perusahaan Sampel	Kode Saham
1	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN
5	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
6	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	PTJSM
7	PT Timah (Persero) Tbk	TINS

Sumber: Data diolah, 2016

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari:

- a. Hasil pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang diperoleh dari www.iicg.org. Hasil ini digunakan untuk melihat perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

GCG dan nilai dari hasil penerapan GCG tiap perusahaan.

b. *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2010-2014, yang digunakan untuk melihat harga saham (*closing price*) perusahaan.

c. Majalah SWA, untuk melihat hasil pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) pada tahun 2010-2014.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari pihak di luar objek penelitian yang telah dikumpulkan dan dikelola sedemikian rupa sehingga layak untuk disajikan dan dipublikasikan kepada para pengguna. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeringkatan CGPI dan laporan harga saham perusahaan yang *listing* pada periode 2010-2014.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang diperlukan dengan cara mempelajari dan mengkalsifikasi dokumen yang tertulis yang relevan, baik dari kepustakaan maupun pencarian melalui internet. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dokumentasi dari sumber data yang ada pada *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2010 - 2014, data pemeringkatan CGPI yang dapat diakses di www.iicg.org, dan data historis dari Bursa Efek Indonesia.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Metode analisis data terdiri atas 2 (dua) analisis, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis statistik deskriptif berguna sebagai alat untuk menganalisa data dengan cara

menggambarkan sampel yang telah ada tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan hubungan/pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen (variabel bebas) secara parsial ataupun secara bersama-sama terhadap variabel dependen (variabel terikat).

Sebelumnya, hipotesis diuji dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas:

1. Uji normalitas (*normality test*),
2. Uji multikolinearitas (*multicollinearity test*),
3. Uji heterokedastisitas (*heteroskedastisity test*), dan
4. Uji autokorelasi (*autocorrelation test*).

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Data yang digunakan adalah data *time series* maka uji autokorelasi dilakukan. Dilanjutkan dengan pengujian yang meliputi:

1. Uji signifikansi parameter secara parsial (*t-test*),
2. Uji signifikansi parameter secara bersama-sama (*f-test*),
3. Uji koefisien determinasi (*goodness of fit – R² test*).

3.4.1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi data perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi,

nilai maksimum dan nilai minimum. Diuji menggunakan *software* SPSS versi 23.

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas terdiri atas 2 (dua) cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas secara grafik adalah dengan melihat/deteksi normal probability plot dan grafik histogram. Uji normalitas dengan normal probability plot, yaitu dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dalam Normal P-P plot standardized residual yang mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (Priyatno, 2009; 59). Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen yang ada benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan variabel dependen. Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan yang sempurna antara variabel independen atau terdapat korelasi linear.

Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat signifikan yang digunakan untuk menolak hipotesis akan semakin besar dan *probability* menerima hipotesis yang salah juga akan semakin besar. Sehingga model regresi yang diperoleh tidak *valid* untuk menaksir variabel independen.

Priyatno (2009; 60) mengungkapkan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Sebagian besar penelitian mengungkapkan bila *tolerance value* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi (Priyatno, 2009; 60). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dari hasil pengolahan data dari paket statistik dalam komputer yaitu dengan melihat pola *scatter plot*. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas,

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.4.2.4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu (Priyatno, 2009:61). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah *time series*, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan dan seterusnya. Dampak yang diakibatkan dengan adanya autokorelasi yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya.

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan Uji Durbin dan Watson (Uji *Durbin-Watson*) dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a)
 H_0 = tidak terjadi autokorelasi
 H_a = terjadi autokorelasi
- b. Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi menggunakan 0,05
- c. Menentukan nilai d (Durbin-Watson)
- d. Menentukan nilai dL dan dU
- e. Dasar pengambilan keputusan:
 - $Du < d < 4 - du$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)

- $D < D_L$ atau $d > 4 - d_L$ maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi)
- $D_L < d < d_U$ atau $4 - d_U < d < 4 - d_L$ maka tidak ada kesimpulan

3.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5 Pengujian Hipotesis

Dalam pengelolaan data penelitian menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Uji Regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen (variabel terikat) dengan beberapa variabel independen (variabel bebas). Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat. Tahapan penyusunan model regresi berganda meliputi:

1. Menentukan variabel independen (*independent variable*) dan variabel dependen (*dependent variable*),
2. Menentukan metode pembuatan model regresi (*Enter, Stepwise, Forward, atau Backward*),
3. Melihat ada tidaknya data yang *outlier* (ekstrim),

4. Menguji asumsi-asumsi pada regresi berganda, seperti uji normalitas (*normality test*), uji multikolinearitas (*multicollinearity test*), uji heterokedastisitas (*heteroskedasticity test*), dan uji autokorelasi (*autocorrelation test*),
5. Menguji kelayakan model regresi (*f-test* dan *R² test*),
6. Menguji hipotesis (*t-test*),
7. Interpretasi model regresi berganda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komputer program *SPSS 23 version for Windows*. Hasil analisis regresi berganda terlihat pada *Regression* (tabel *variables entered/removed^b*, *model summary*, *Anova^b*, dan *coefficients^a*).

Model regresi berganda dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = *Return* saham

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel bebas (X₁)

b₂ = Koefisien regresi variabel bebas (X₂)

X₁ = *Good Corporate Governance / GCG*

X₂ = *Corporate Social Responsibility / CSR*

e = *Disturbance error*

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha 1: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Return* saham.

Ha 2: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Return* saham.

Ha 3: *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Return* saham.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t atau Uji signifikansi parameter secara parsial (*t-test*). Uji t dilaksanakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu

berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 2 arah (*2 tails*) dengan tingkat keyakinan 95% (yang merupakan standar keyakinan untuk penelitian bisnis) dan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan:

a. Berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}:

➤ jika t_{hitung} > t_{tabel}, maka H_a diterima,

➤ jika t_{hitung} < t_{tabel}, maka H_a ditolak.

b. Berdasarkan perbandingan nilai probabilitas :

➤ jika probabilitas > 0,05, maka H_a ditolak,

➤ jika probabilitas < 0,05, maka H_a diterima.

Perhitungan t_{hitung} berdasarkan statistik hitung. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan komputer program *SPSS 23 version for Windows*. Hasil t_{hitung} terlihat pada *coefficients^a* (kolom t). Sedangkan t_{tabel} dihitung pada tabel t, dengan perhitungan:

- tingkat signifikansi (α) adalah 5%,
- *degree of freedom* atau d_f = n - 1, dimana; n = jumlah data,
- uji dilaksanakan 2 sisi (*2 tails*).

Perhitungan probabilitas berdasarkan statistik hitung. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan komputer program *SPSS 23 version for Windows*. Hasil probabilitas terlihat pada kolom *sig (significance)*.

Pengujian kelayakan model dengan uji F. Uji f atau Uji signifikansi parameter secara simultan (*f-test*) dilaksanakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji f dilakukan dengan 2 arah (*2 tails*) dengan tingkat keyakinan 95% (yang merupakan standar keyakinan untuk penelitian bisnis) dan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara bersama terhadap

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan:

a. Berdasarkan perbandingan f_{hitung} dengan f_{tabel} :

- jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_a diterima,
- jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_a ditolak.

b. Berdasarkan nilai probabilitas:

- jika probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak,
- jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima.

Perhitungan f_{hitung} berdasarkan statistik hitung. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan komputer program SPSS 23 version for Windows. Hasil f_{hitung} terlihat pada *anova*^b (kolom F). Sedangkan f_{tabel} dihitung pada tabel f, dengan perhitungan:

- tingkat signifikansi (α) adalah 5%,
- numerator = $n - 1$ atau numerator = jumlah variabel - 1
- denominator = $k - n$
denominator = jumlah kasus - jumlah variabel independen
- uji dilaksanakan 2 sisi (*2 tails*).

Uji koefisien determinasi atau *goodness of fit – R² test* adalah pengujian seberapa besar presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. *R²-test* menghasilkan angka koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinansi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. *R²-test* dihitung berdasarkan statistik hitung. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 23 version for Windows. Besarnya koefisien determinasi (R^2) atau angka R, terlihat pada *model summary*^b (*Adjusted R Square*). Karena dalam penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel, maka penulis menggunakan koefisien determinasi (R^2) yaitu *adjusted R Square*.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) atau angka R, terlihat pada *model summary*^b (*Adjusted R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen: dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinansi, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsial. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi individu yang paling besar merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen.

Perhitungan probabilitas berdasarkan statistik hitung. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan komputer program SPSS 23 version for Windows. Hasil probabilitas terlihat pada kolom *sig (significance)*.

3.6. Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini merupakan variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

a. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

1. Return Saham

Return saham adalah perolehan atau imbalan yang didapat dari hasil investasi. Menurut Jogiyanto (2010: 206), *Return* total merupakan *Return* keseluruhan dari suatu investasi dalam periode tertentu. *Return* total sering disebut dengan *Return* saja. *Return* total merupakan tingkat kembalian investasi

(Return) yang merupakan penjumlahan dari dividend *yield* dan *capital 2 gain*. Dividend *yield* adalah tingkat kembalian yang diterima investor dalam bentuk tunai setiap akhir periode pembukuan. Di sisi lain semakin tinggi harga pasar menunjukkan bahwa saham tersebut juga semakin diminati oleh investor karena semakin tinggi harga saham akan menghasilkan *capital gain* yang semakin besar pula. *Capital gain* merupakan selisih antara harga pasar periode sekarang dengan harga periode sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung return saham dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Keterangan:

R_t = Return saham

P_t = Harga saham tahun t

P_{t-1} = Harga saham tahun t-1

b. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lain.

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah tata kelola yang baik dalam manajemen perusahaan. Terdapat 4 (empat) prinsip

dalam penerapan good corporate social responsibility yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Untuk menghitung GCG dalam penelitian ini digunakan skor yang diperoleh dari lembaga survei CGPI.

2. *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility adalah bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan hubungan baik dengan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Menurut Erman (2013) dalam Putra dan Utama (2015) *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan program yang dapat memperbaiki program yang bertujuan untuk menciptakan relasi yang baik. Untuk menghitung CSR dalam penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\sum x_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

CSRDI = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

$\sum x_{ij}$ = Total Pengungkapan

N_j = Jumlah Item

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Skala
1	Variabel dependen(Y) : <i>Return Saham</i>	Diukur dengan rumus: $R_{it} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$	Rasio
2	Variabel Independen X1: <i>Good Corporate Governance</i>	Diukur dengan menggunakan skor GCG yang dipublikasikan oleh IICG.	Rasio

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

3	Variabel Independen X2 : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Diukur dengan rumus: $CSRI_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$	Rasio
---	---	---	-------

Sumber: Diolah Penulis (2016)

4. PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara statistik atas variabel-variabel

independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan SPSS 23:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG	35	70,73	92,88	85,3734	4,56358
CSR	35	,07	,90	,4546	,27655
RS	35	-,40	,96	,0814	,33878
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Output SPSS 23.

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa banyaknya unit penelitian (N) adalah 35. Jumlah tersebut merupakan total sampel perusahaan selama 5 tahun pengamatan pada penelitian dari tahun 2010 sampai 2014 dimana setiap tahun terdapat 7 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa:

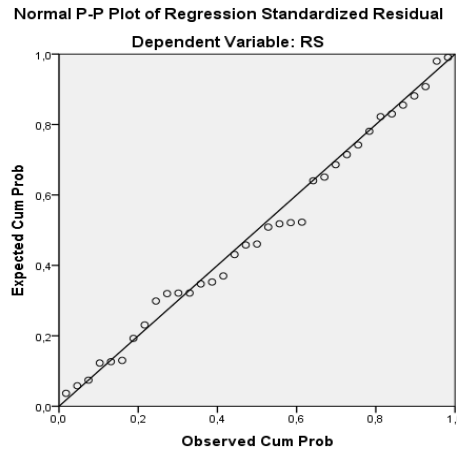
1. GCG memiliki nilai terendah 70,33 nilai tertinggi sebesar 92,88 dan

rata-rata sebesar 85,3734 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 4,56358.

2. CSR memiliki nilai terendah 0,07 nilai tertinggi sebesar 0,90 dan rata-rata sebesar 0,4546 dengan rata-rata penyimpangan sebesar 0,27655.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS 23

Gambar 4.1. Normal Probability Plot

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik nilai data terletak kurang lebih dalam suatu garis lurus, sehingga

dapat dikatakan data berasal dari suatu populasi yang terdistribusi normal.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
CGC	.583	1.176
CSR	.583	1.176

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai *GCG* sebesar 0,583 dan *CSR* sebesar 0,583.
- 2) Hasil perhitungan *VIF* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10 yang berarti tidak ada

korelasi antar variabel independen. Nilai *VIF GCG* sebesar 1,176 dan *CSR* sebesar 1,176.

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.922

Sumber: Output SPSS 23

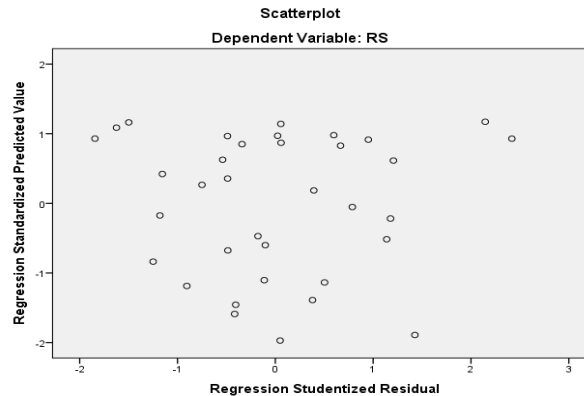
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Pada tabel 4.3 menunjukkan nilai DW = 1,922 dengan nilai tabel DW dengan n = 35, k = 2 dan a = 0,05 diperoleh nilai du sebesar 1,726 (lihat lampiran), sehingga nilai 4-du = 2,274.

Hasil perbandingan menunjukkan nilai DW = 1,922 yang terletak antara du dan 4-du, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.1.4 Uji Heterokedastisitas



Sumber: Output SPSS 23

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot

Pada gambar 4.2 grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di bawah dan di atas angka nol. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3. Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.339 ^a	.115	.059	.32855

Sumber: Output SPSS 23

Dari hasil pengujian regresi didapat nilai *Adjusted R²* adalah 0,059. Artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak sebesar 5,9% sedangkan sisanya 94,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam pengujian.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1,545	1,463	

GCG	-.014	.016	-.193
CSR	-.527	.267	-.430

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + E$$

$$Y = 1,545 - 0,014X_1 - 0,527X_2 + E$$

- Y = variabel terikat Return saham
- a = konstanta
- b₁, b₂ = koefisien regresi
- X₁ = GCG
- X₂ = CSR

Berdasarkan model regresi di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa hal, yaitu:

- a. Konstanta sebesar 1,545 artinya jika GCG (X₁) dan CSR (X₂), *Leverage* (X₃) dianggap konstan, maka Return saham (Y) nilainya akan menurun sebesar 1,545%.

- b. Koefisien regresi variabel GCG (X₁) sebesar - 0,014 bertanda negatif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan GCG (X₁) mengalami kenaikan 1%, maka Return saham (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,559%.
- c. Koefisien regresi variabel CSR (X₂) sebesar -0,527 bertanda Negatif artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan CSR (X₂) mengalami penurunan 1%, maka Return saham (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2,072%.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Uji t (t Test)

Tabel 4.7 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,056	,299
GCG	-,886	,038
CSR	-1,973	,049

Sumber: Output SPSS 23

Pembahasan pengujian secara parsial pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh GCG (X₁) Terhadap CSR (Y)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel GCG memiliki nilai |t-hitung| 0,886 < |t-tabel| 2,030 dengan nilai signifikan 0,382 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak, sehingga dengan kata lain tidak ada pengaruh GCG yang signifikan terhadap Return saham. Artinya apabila implemntasi CGC ditingkatkan maka Return saham tidak terlalu berubah signifikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2011) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Sudarti (2012), menunjukkan hasil yang berbeda dimana ditemukan adanya pengaruh antara *Good Corporate Governance Indeks* terhadap Harga Saham.

Hal ini membuktikan adanya perbedaan hasil pada beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwa variabel *Good Corporate Governance* tidak dapat hanya diukur berdasarkan indeks maupun mekanisme. Sehingga dibutuhkan pendalaman untuk mengetahui

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

penerapan *Good Corporate Governance* yang nyata. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak dapat diukur hanya berdasarkan pada indeks ataupun mekanisme melainkan memerlukan observasi yang lebih mendalam.

2. Pengaruh CSR (X_2) Terhadap Return saham (Y).

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel CSR memiliki nilai $|t\text{-hitung}| 1,973 < |t\text{-tabel}| 2,030$ dengan nilai signifikan $0,049 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, sehingga dengan kata lain terdapat pengaruh CSR yang signifikan terhadap Return saham. Artinya apabila implementasi CSR ditingkatkan maka Return saham akan berubah signifikan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan didalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2011) yang menyatakan Return saham dan kinerja keuangan pada perusahaan besar dapat

ditingkatkan melalui pelaksanaan dan pengungkapan kegiatan CSR pada laporan tahunan

Hal ini terjadi karena pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* merujuk pada pengalokasian dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menambah beban pengeluaran pada perusahaan. sehingga dapat menimbulkan pergerakan pada *return* saham. Menurut Monika (2008) CSR membuat adanya biaya tambahan yang dapat menempatkan perusahaan dalam keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dibandingkan perusahaan lain yang kurang bertanggung jawab secara sosial. Investor beranggapan bahwa kegiatan CSR membebani perusahaan kategori *size* kecil, Hal tersebut akan membawa respon negatif dengan turunnya harga saham.

4.5.2. Uji F (F Test)

Tabel 4.8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,448	2	,224	2,075	,045 ^b
	Residual	3,454	32	,108		
	Total	3,902	34			

Sumber: Output SPSS 23

Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \text{minimal salah satu } \beta_{i,i=1,2,3} \neq 0$, Ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan:

- 1) H_0 ditolak jika, $p\text{-value} > \alpha$, F-hitung < F-tabel
- 2) H_1 diterima jika, $p\text{-value} < \alpha$, F-hitung > F-tabel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F-hitung $2,750 > F\text{-tabel}$ sebesar 2,50 pada tingkat signifikan $\alpha=5\%$ dan nilai *degree of freedom* (35) dan nilai signifikan $0,045 < 0,05$. Maka dapat diambil keputusan bahwa H_3 diterima. Dengan demikian maka H_4 diterima. hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return* Saham.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uji dan pembahasan di atas dapat diambil simpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return* saham.
2. Berdasarkan hasil uji t, *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Return* saham.
3. Berdasarkan hasil uji F, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Return* saham.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari hasil uji dan pembahasan di atas terdapat beberapa keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Data penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diangkat dari laporan tertulis dari perusahaan. Sementara ini dari pelaksanaan mekanisme GCG dan CSR adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan,
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari penelitian dari perusahaan yang memenuhi kriteria uji analisis, tidak semua perusahaan tercakup dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan analisis hasil uji dan pembahasan penelitian, maka selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh GCG dan CSR, antara lain:

1. Menggunakan sampel penelitian yang tidak terbatas hanya di perusahaan kriteria, namun perusahaan lain yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
2. Bagi perusahaan diharapkan dapat menerapkan GCG atau CSR di dalam perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan yang telah menerapkan GCG dan CSR diharapkan penerapan GCG dan

CSR tersebut sesuai dengan tujuan dikeluarkannya yaitu agar terciptanya perusahaan yang sehat dan bersih.

3. Bagi pemilik modal diharapkan partisipasi dalam penerapan GCG dan CSR dengan melakukan monitoring atas pelaporan keuangan guna menjadi sumber informasi bagi perusahaan sehingga mekanisme GCG dan CSR bisa lebih optimal dan terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E.F., dan Houston, J.F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Chandler, David. (2015). *Corporate Social Responsibility: A Strategic Perspective*. First Edition. USA: Busines Expert Press.
- Guler, Aras dan Crowther, David. (2009). *A handbook of Corporate Governance and Social Responsibility*. England: Gower Publishing Limited.
- Dahli, Lely, dan Sylvia Veronica Siregar. (2008). *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2005 dan 2006)*. *Simposium Nasional Akuntansi 11*, Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- Fauzi, Hasan, dkk. (2007). *The Link Between Corporate Social Performance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Companies*. *Issues in Social and Environment Accounting*, vol. 1, no. 1 June, PP. 149-159

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS*, Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, Rahman. (2006). *Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metode EVA, ROA, dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ 45 Di Bursa Efek Jakarta*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Jatiningrum, Citrawati. (2009). *Analisis Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Interim Terhadap Abnormal Return Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. *Jurnal JMK* Vol. 7. No 3. Maret 2009.
- Jogiyanto. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto, H.M. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Muid, Dul. (2011). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Stock Return (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Monika, Elsa R, dan Dwi Hartanti. (2008). *Analisis Hubungan Value Based Management dengan Corporate Social Responsibility dalam Iklim Bisnis Indonesia (Studi Kasus Perusahaan SWA 100 2006)*, *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Pranata, Yudha. (2006). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. (2009). *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sayekti, Yosefa, dkk. (2007). *Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio. (2007). *Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ)*. Disampaikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas. (2011). *Peningkatan Return Saham Dan Kinerja Keuangan Melalui Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance*. Tesis Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Taufik. (2007). *Pengaruh Pendekatan Traditional Accouting dan Economic Value Added Terhadap Stock Return Perusahaan Sektor Perbankan di PT. Bursa Efek Jakarta*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 5, No 10 Desember.
- Wardani, Diah Kusuma. (2008). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

KUALITAS PELAYANAN DAN CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS DENGAN MEDIASI KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT SWASTA

Cucu Sumiyati^{*)}, Tantri Yanuar Rahmat Syah
Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Esa Unggul, Jakarta
**Email: cucusmt09@gmail.com*

ABSTRACT

Patient perception was instrumental to describe the level of patient satisfaction on services. Based on this perception will arise impression of the patient to the hospital, previous research about the influence of brand image in manufacture has been done but not in Indonesia, the lack of a complete research with four variabel that is quality, brand image, satisfaction and loyalty in hospitals. The goal this study was to determine the effect of service quality, brand image and patient satisfaction on patient loyalty in hospital. This research is descriptive quantitative by using SEM as statistical analysis. The data according to the criteria so that in the end there were 195 hospitalized patients were used as a sample. Based on the results obtained SEM analysis of the quality of service does not have a significant influence on patient satisfaction, service quality has a significant influence on loyalty, brand image has a significant influence on patient satisfaction and patient loyalty, satisfaction has no influence on loyalty.

Key Words: Service quality, Brand Image, Patient Satisfaction, Loyalty.

ABSTRAK

Persepsi pasien sangat berperan dalam menggambarkan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Berdasarkan persepsi ini akan timbul kesan pasien terhadap rumah sakit. Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh citra merek namun demikian telah dilakukan di manufaktur dan bukan di Indonesia, minimnya penelitian yang meneliti dengan menggunakan empat variabel secara keseluruhan tentang, kualitas, citra merek, kepuasan dan loyalitas di rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan pasien, pengaruh kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan pasien terhadap loyalitas pasien di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SEM sebagai analisa statistik. Data yang sesuai dengan kriteria sehingga pada akhirnya terdapat 195 pasien rawat inap yang digunakan sebagai sampel. Hasil analisis SEM didapatkan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien, kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas, citra merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien dan loyalitas pasien, kepuasan tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Citra Merek, Kepuasan Pasien, Loyalitas.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan rumah sakit semakin ditunjang oleh banyaknya pilihan rumah sakit, sehingga rumah sakit bersaing dalam meningkatkan kualitas layanan untuk meraih dan mempertahankan pelanggannya. Peningkatan kualitas layanan di rumah sakit harus diiringi dengan usaha pemasaran untuk menginformasikan kepada pelanggannya agar pelanggan dapat mengetahui keberadaan layanan rumah sakit (Sudhir dan Reddy, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien antara lain: ketidaksesuaian harapan dan kenyataan, layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan, perilaku personel kurang memuaskan, suasana dan kondisi fisik lingkungan yang tidak menunjang, jarak terlalu jauh, promosi atau iklan tidak sesuai dengan kenyataan (Nursalam, 2011). Kepuasan pasien menjadi suatu tolak ukur untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh suatu instansi rumah sakit atau tenaga kesehatan yang bekerja. Masalah kepuasan pasien menjadi susah dipenuhi memang sudah menjadi rahasia umum, karena bergerak di bidang jasa sehingga banyak hal mengenai kepuasan pasien dinilai secara subjektif.

Wujud dari pemenuhan harapan tersebut bagi industri jasa harus menyediakan total kualitas layanan berupa menyediakan sarana fisik yang baik, proses pelayanan akurat, cepat dan karyawan handal (Alimuddin, 2004). Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga gerakan revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang. Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia jasa/layanan untuk selalu memanjakan konsumen/pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik. serta

tidak diperbolehkan untuk menambah biaya sedikitpun selama perawatan. Pasien hanya membayar iuran perbulan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan.

Wu (2015) melakukan penelitian ini untuk menunjukkan hubungan antara kualitas pelayanan, citra merek, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan di industri KTV. Osman (2015) untuk mengembangkan pemahaman efek langsung dari kualitas layanan, kepuasan pelanggan dan citra terhadap loyalitas pelanggan di industri perbankan komersial Malaysia. Malik (2012) melihat pada semua aspek dan hubungan mereka dengan kepuasan pelanggan. Alrubaiee (2011) mengatakan bahwa untuk mengetahui hubungan antara persepsi kualitas kesehatan pasien, kepuasan pasien, dan kepercayaan pasien dan efek mediasi kepuasan pasien.

Namun Demikian belum adanya penelitian tentang kualitas pelayanan, citra merek terhadap kepuasan dan loyalitas yang dilakukan di rumah sakit Mayapada, serta untuk membandingkan pengaruh citra merek yang sebelumnya dilakukan di manufaktur, belum adanya penelitian yang meneliti secara keseluruhan dengan menggunakan empat variabel secara keseluruhan tentang, kualitas, citra merek, kepuasan dan loyalitas, di penelitian terdahulu dilakukan di rumah sakit dan manufaktur di luar negeri, belum terdapat penelitian baik secara keseluruhan yang dilakukan di Indonesia. Perbedaan persepsi antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien semakin hari semakin jelas, seperti pemberi pelayanan kesehatan merasa bahwa mereka telah memberi pelayanan maksimal, sementara pasien belum merasa puas sehingga dapat mempengaruhi word of mouth berdasarkan pengalaman yang didapat selama di rawat yang akan mempengaruhi citra merek rumah sakit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas

pelayanan dan citra merek terhadap kepuasan pasien, serta mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan pasien terhadap loyalitas pasien di rumah sakit Mayapada Tangerang.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kualitas Pelayanan

Parasuraman (1998)

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu konsep secara tepat mewakili inti dari kinerja suatu pelayanan yaitu perbandingan terhadap keterhandalan (*excellence*) dilakukan oleh konsumen. Bitner (1996) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan keseluruhan kesan konsumen terhadap *inferioritas/superioritas* argumentasi beserta jasa yang ditawarkan. keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan.

Menurut Wyckof (1996) mendefinisikan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan, dengan demikian, keunggulan suatu produk dan jasa tergantung dari sifat unik dan kualitas diperlihatkan, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan atau konsumen. Salah satu cara perusahaan agar dapat tetap unggul bersaing adalah dengan memberikan jasa pelayanan dengan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan pesaing, oleh karena itu, harapan dari pelanggan (pasien) terbentuk dari pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut kemulut, promosi yang kemudian diperbandingkan dengan tempat lain.

2.2 Citra Merek

Manfaat (*benefit*) bagi rumah sakit dapat diperoleh dari loyalitas pelanggan, apalagi pelanggan mau menceritakan pengalamannya selama di rumah sakit kepada pihak lain (*word of mouth*) secara berulang-ulang sehingga akan membentuk citra rumah sakit. Citra rumah sakit yang positif sangat dibutuhkan agar pelanggan bersedia untuk melakukan *word of mouth* yang positif dan bersedia memilih rumah sakit (Kim, et al., 2008). Citra perusahaan dan reputasi dianggap menjadi faktor penting dalam evaluasi keseluruhan dari setiap organisasi (Sarstedt, et al., 2012) karena kekuatan terletak pada persepsi dan pikiran ketika pelanggan mendengar nama organisasi (Bravo, et al., 2009).

Citra merek adalah jenis asosiasi yang muncul di benak pengguna jasa ketika menggunakan suatu merek tertentu. Citra merek merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi keputusan pasien dalam menggunakan layanannya. Perusahaan yang kompetitif menggunakan citra merek untuk mengikat dan menarik perhatian pelanggan, bahwa citra merek adalah tanggapan pelanggan terhadap nama merek, tanda, atau kesan, dan mewakili kualitas produk, juga citra merek adalah seperangkat aset dan kewajiban, dan itu terkait dengan menandatangani nama merek bahwa aset dan kewajiban bisa bertambah atau mengurangi nilai dengan menyediakan layanan produk atau layanan kepada pelanggan (Magid, Anthony dan Dena, 2006).

2.3 Kepuasan Pasien

Oliver (2001) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kinerja yang tidak sesuai dengan harapan, akan membuat pelanggan kecewa, mengidentifikasi elemen utama, beberapa dapat membedakan kualitas pelayanan dan kepuasan bahwa kualitas adalah penilaian atau evaluasi menyangkut pola kinerja, melibatkan beberapa dimensi layanan khusus untuk layanan yang disampaikan, kualitas diyakini lebih banyak ditentukan oleh isyarat eksternal.

Kepuasan pasien dapat mempelajari dalam konteks pengalaman mereka secara keseluruhan dalam pengaturan kesehatan. Priporas, et al., (2008) menyatakan harapan pasien dan persepsi tidak hanya terkait karena pelayanan medis atau kesehatan secara teknis tidak komprehensif. Pasien karenanya tidak dapat memiliki gagasan yang jelas tentang harapan mereka dalam pengaturan klinis. Kepuasan pasien didefinisikan sebagai evaluasi dimensi kesehatan yang berbeda (Linder, 1982). Ini dapat dianggap sebagai salah satu hasil yang diinginkan perawatan dan informasi kepuasan diperlukan untuk penilaian kualitas untuk merancang dan mengelola kesehatan (Turner, 2009).

2.4 Loyalitas

Caruana (2002) berpendapat bahwa perilaku adalah ekspresi penuh loyalitas terhadap merek dan bukan hanya pikiran, namun perilaku standar (seperti pembelian berulang) telah dikritik, karena kurangnya konseptual dasar dari proses yang dinamis (Caruana, 2002). Frekuensi rendah pembelian berulang khusus layanan dapat disebabkan faktor situasi yang berbeda, seperti non-ketersediaan atau tidak adanya penyedia. Akibatnya, loyalitas dari jenis pelanggan terutama berbeda dari loyalitas para pelanggan yang serius mendukung produk, dan memiliki ikatan

psikologis dengan produk dan perusahaan.

Menurut Bramson (2005) loyalitas konsumen merupakan suatu konsep yang mencakup lima faktor yaitu pengalaman konsumen dengan kepuasan utuh ketika melakukan transaksi dengan anda, kesediaan untuk mengembangkan hubungan dengan anda dan dengan perusahaan anda, kesediaan untuk menjadi pembeli setia, kesediaan untuk merekomendasikan anda kepada orang lain, dan penolakan untuk berpindah pada pesaing. Kualitas layanan jasa mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen menciptakan loyalitas konsumen. Perusahaan dapat memberikan layanan jasa yang berkualitas dan konsumen merasa mendapatkan kepuasan maka akan tercipta loyalitas.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Ada empat variabel yaitu kualitas pelayanan kesehatan, citra merek, kepuasan pasien dan loyalitas pasien. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik analisa yang dipergunakan untuk menganalisa data adalah analisis SEM (*Structural Equation Model*). Sampel yang dipilih adalah pasien rawat inap di Rumah Sakit Mayapada Tangerang, Indonesia Persyaratan penentuan jumlah sampel ditentukan oleh Hair, et al., (1998) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil minimal lima kali dari jumlah parameter yang dipergunakan dalam penelitian. Kuesioner penelitian ini terdapat 42 pernyataan, mempunyai 4 variabel yang teramati. Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah $5 \times 42 = 210$ responden. Pada penelitian ini sebanyak 210 responden ditambah

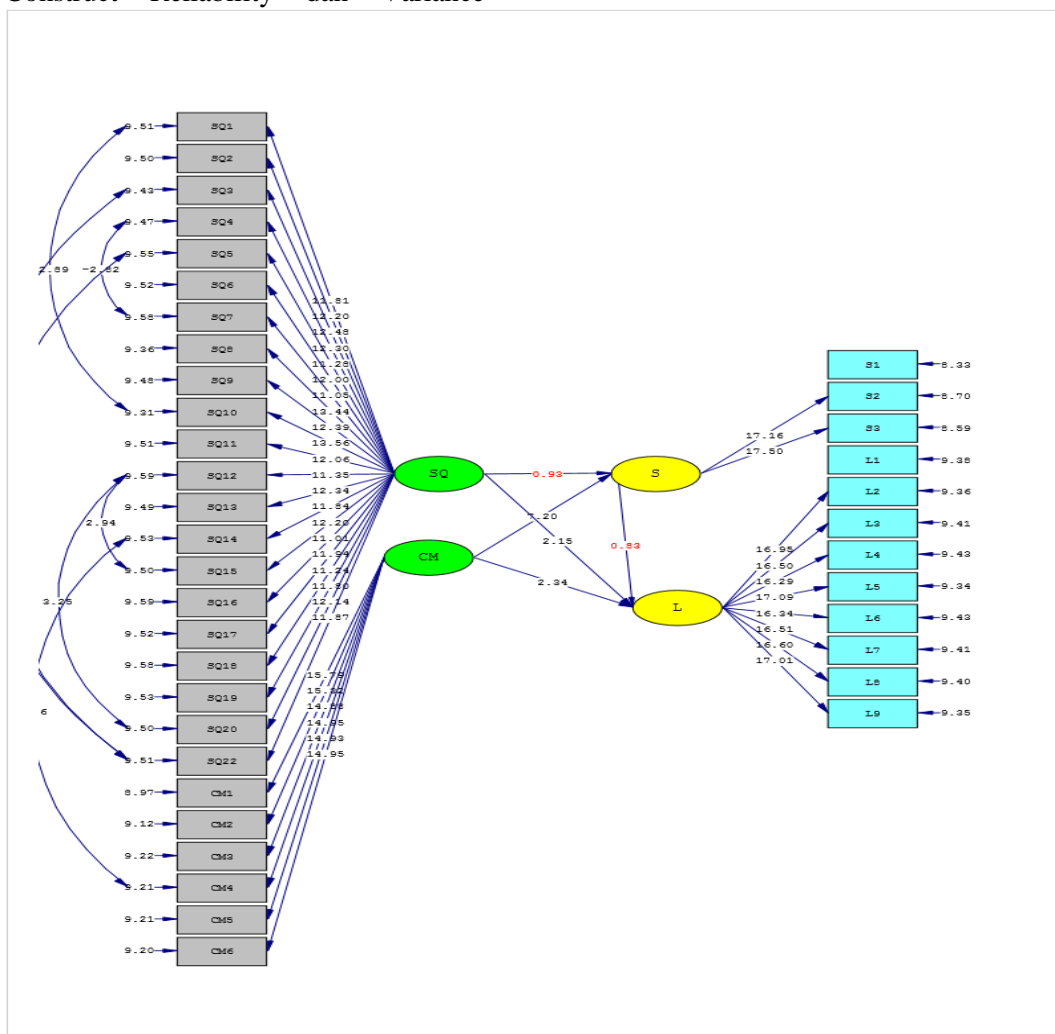
dengan 10% untuk antisipasi margin of error maka jumlah responden 211 untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner, yang sekaligus sebagai ukuran sampel minimal. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan skala pengukuran Likert dengan skala satu sampai lima.

4. PEMBAHASAN

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini sudah diuji dalam validitas dan reliabilitas sehingga didapatkan hasil Construct Reliability dan Variance

Extracted SQ nilai VE 0,55, CM nilai VE, 0,75, S nilai VE 0, 75, L nilai VE 0,87, *goodness of fit*, dimana *Chi Square* = 768,32 *Degree of Freedom* = 688, *ECVI* = 4,68, *AIC* = 907,39, *CAIC* = 1300,51, *Critical N* = 197,25 *RMR* = 0,030 dan *PGFI* = 0,74.

Selanjutnya penelitian ini menghasilkan *diagram value* seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Path Diagram T-Value

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Nilai T-Value	Keterangan
H ₁	Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien	0,93	Data tidak mendukung hipotesis
H ₂	Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan loyalitas pasien	2,15	Data mendukung hipotesis
H ₃	Citra merek yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien	7,20	Data mendukung hipotesis
H ₄	Citra merek yang baik akan meningkatkan loyalitas pasien	2,34	Data mendukung hipotesis
H ₅	Kepuasan pasien yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pasien	0,83	Data tidak mendukung hipotesis

Sumber: Hasil uji pada alat analisis data

Kualitas Pelayanan Tidak Meningkatkan Kepuasan Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis pertama (H₁), ditemukan bahwa hasil analisis tidak mendukung hipotesis H₁ yaitu tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan 0,93 terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Karakteristik dan kualitas adalah sebagai berikut: Gronroos (1984) mengatakan persepsi kualitas pelayanan sebagai hasil dari proses evaluasi, dimana konsumen membandingkan harapan dengan layanan yang di terima, yaitu menempatkan layanan yang dirasakan terhadap layanan yang diharapkan, hasil dari proses ini akan menjadi kualitas yang dirasakan dari layanan. Persepsi kualitas

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choi (2005), Atinga (2011), Garbarino, dan Johnson (1999), Colgate dan Danaher (2009), Atinga (2011), Wu (2011), Alrubaiee (2011), Chenet (2010), Malik (2012), Osman (2015), yang menyatakan bahwa kualitas

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien, yang artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka kepuasan pasien akan meningkat atau sebaliknya Begitu juga dengan semakin berkualitas produk yang diterima maka konsumen akan semakin puas, hal tersebut berbeda dengan hasil dari penelitian ini, kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Adapun hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal.

Kepuasan merupakan perasaan yang dirasakan pasien terhadap layanan yang dirasakan. Segala kegiatan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya ada puas terlebih dahulu dari dalam diri, setelahnya suatu layanan yang diterimanya. Begitu juga dengan tempat pelaksanaan dan responden yang diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga bisa terjadi di Rumah Sakit Mayapada Tangerang kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pasien, hal tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti pasien merasa sangat puas jika pasien sembuh dari penyakitnya yang merupakan tujuan utama setiap

pasien yang datang ke rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan bertujuan memberikan informasi kepada perusahaan mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kualitas produknya sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Menurut Tjiptono (2008) Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi kepuasan terhadap suatu produk atau jasa, diantaranya faktor pendapatan, faktor budaya, faktor status sosial, faktor tingkat pendidikan, faktor tingkat usia, faktor demografis dan masih banyak faktor yang lain. Faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap jasa tersebut (Zeithamal dan Bitner 1996). Tjiptono (2007) Kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelayanan. Berdasarkan definisi ini kualitas jasa yang bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan, yaitu harapan terhadap kesembuhan penyakitnya.

Kualitas Pelayanan Meningkatkan Loyalitas Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis kedua (H2), ditemukan bahwa hasil analisis mendukung hipotesis H2 yaitu terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan sebesar 2.15 terhadap loyalitas pasien. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas pasien dipengaruhi oleh tingkat kualitas pelayanan yang diterimanya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan loyalitas pasien di Rumah Sakit Mayapada Tangerang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cronin dan Taylor (1992), Boulding (1993), (Cronin, *et al.*, 2000), (Potluri dan Zeleke, 2009), Boshoff dan Gray (2004), Chenet (2010), Osman

(2015), Wu (2015), Mosahab (2010), Wu (2011), Chenet (2010), Alrubaiee (2011), yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pasien, yang artinya adalah semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka loyalitas pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya.

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan pengaruh dalam mempertahankan kesetiaan pelanggan (Potluridan Zeleke, 2009). Dalam pelayanan kesehatan, Boshoff dan Gray (2004) mengatakan terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan loyalitas yang diukur dengan keinginan pasien untuk kembali berlangganan.

Citra Merek Meningkatkan Kepuasan Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga (H3), ditemukan bahwa hasil analisis mendukung hipotesis H3 yaitu terdapat pengaruh antara citra merek sebesar 7.20 terhadap kepuasan pasien. Aaker dan Keller (1990) mengatakan perusahaan adalah reputasi sebagai persepsi pelayanan terkait dengan nama perusahaan, citra perusahaan sebagai persepsi dari sebuah organisasi tercermin dalam asosiasi memori konsumen. Citra merek yang diberikan rumah sakit sangat baik maka hal itu akan membuat pasien merasa puas dan akan melekat di memori pasien tentang citra merek yang baik yang sudah terkenal, hal ini salah satu strategi buat rumah sakit untuk melakukan pemasaran melalui citra merek.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wu (2011), Osman (2015), Tan, Liew dan William (2012), Kaihatu (2012), Wu (2015), yang mengatakan bahwa citra merek memberikan dampak yang positif terhadap kepuasan pasien, yang artinya semakin baik citra merek yang didapatkan oleh pasien sehingga membuat pasien merasa puas dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

melekat di memori pasien tentang citra merek tersebut, maka kepuasan pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya.

Penelitian tentang pengaruh citra merek terhadap kepuasan pasien rumah sakit besar di Taiwan juga menunjukkan adanya pengaruh langsung serta terdapat pengaruh tidak langsung antara citra merek terhadap kepuasan melalui kualitas layanan (Wu, 2011). Citra merek rumah sakit mempunyai pengaruh langsung terhadap kepuasan, namun pengaruh tidak langsung citra merek terhadap kepuasan pasien melalui persepsi atas kualitas layanan yang lebih besar daripada pengaruh langsungnya.

Citra Merek Meningkatkan Loyalitas Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis keempat (H4), ditemukan bahwa hasil analisis mendukung hipotesis H4 yaitu terdapat pengaruh antara citra merek sebesar 2.34 terhadap loyalitas pasien. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas pasien dipengaruhi oleh tingkat citra merek yang diterimanya. Semakin baik citra merek yang didapatkan maka semakin meningkatkan loyalitas pasien di Rumah Sakit Mayapada Tangerang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu, Maulana (2010), Setiyowati (2013), Merrilees dan Frey (2002), Davies dan Chun (2002), Andreassen dan Rosenberger (2008), Wu (2011), Tan, Liew dan William (2012), Osman (2015) melakukan penelitian yang mengatakan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pasien, yang artinya adalah semakin baik citra merek yang didapatkan maka loyalitas pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya.

Merrilees dan Frey (2002) menemukan bahwa citra merek memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas. Davies dan Chun (2002) menemukan bahwa citra merek memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Selain itu, citra

merek bisa memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas (Andreassen dan Rosenberger, 2008).

Kepuasan Pasien Tidak Meningkatkan Loyalitas Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis kelima (H5), ditemukan bahwa hasil analisis tidak mendukung hipotesis H5 yaitu tidak terdapat pengaruh antara kepuasan sebesar 0,83 terhadap loyalitas pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pasien merasa puas tetapi belum tentu pasien tersebut menjadi loyal. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lai, *et al.* (2009), Szymanski dan Henard (2001), Fisk (1990), Kim, *et al.* (2008), Hart dan Johnson (1999), Chenet (2010), Osman (2015), Alrubaiee (2011), mengatakan bahwa kepuasan pasien berpengaruh positif terhadap loyalitas pasien, yang artinya adalah semakin tinggi tingkat kepuasan pasien yang didapatkan maka loyalitas pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya.

Menurut Mowen dan Minor (1998) loyalitas konsumen adalah sikap positif terhadap merek, komitmen pada suatu merek mempunyai niat untuk meneruskan pembelian dimasa datang. Loyalitas konsumen tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan/ketidakpuasan dengan merek tersebut yang terakumulasi secara terus menerus disamping adanya persepsi tentang kualitas produk (barang/jasa). Mempertahankan loyalitas nasabah/pelanggan tidak hanya dibutuhkan kepuasan, melainkan lebih dari itu adalah kepercayaan pelanggan yang merupakan kunci dari relationship marketing. Beberapa organisasi telah mengembangkan program pelayanan sebagai bagian dari kegiatan membangun hubungan loyalitas pelanggan. loyalitas pelanggan adalah konsep yang rumit. Tetapi pelanggan yang melakukan pembelian yang berberulang dikatakan di atas bagian dari kesetiaan. Dalam

pelayanan, loyalitas telah didefinisikan secara luas sebagai perilaku yang diamati (Bloemer, et al., 1999).

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa loyalitas tidak dipengaruhi oleh kepuasan, terdapat beberapa faktor selain dari kepuasan, sebagian besar pasien di Rumah Sakit Mayapada mempunyai penghasilan yang cukup selain menggunakan asuransi sehingga bagi mereka biaya perawatan di rumah sakit ini menjadi terjangkau dibandingkan dengan rumah sakit yang baru yang kualitasnya belum diketahui, dokter yang kompeten salah satu alasan pasien menjadi loyal terhadap rumah sakit, karena pasien sudah percaya terhadap dokter tersebut dalam pengobatan yang diberikan selama perawatan dan membuat pasien menjadi sembuh dari sakitnya, hal tersebut membuat pasien menjadi terus loyal sehingga terjadilah word of mouth yang baik.

Loyalitas pasien juga bisa dipengaruhi oleh letak rumah sakit, yang berada di tengah pemukiman warga yaitu kompleks Moderland sehingga membuat pasien menjadi loyal karena jarak yang dekat dengan rumah serta tidak terlalu jauh dari jalan utama, letak rumah sakit yang strategis dan terjangkau menambah nilai tambah buat rumah sakit, dengan letak ditengah kompleks Moderland Rumah Sakit Mayapada menjadi salah satu rumah sakit yang dituju oleh masyarakat yang tinggal khususnya di Moderland Tangerang, selain letak rumah sakit, yaitu fasilitas rumah sakit yang lengkap salah satunya dengan pemeriksaan penunjang seperti alat radiologi yang lengkap, dokter spesialis yang kompeten, loyalitas pasien khususnya yang menggunakan asuransi, karena adanya kerjasama asuransi dengan rumah sakit sehingga walaupun pasien tidak puas karena pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, tetapi karena dirujuk langsung oleh pihak asuransi pasien harus berobat dan di rawat di rumah sakit.

Pasien yang dengan sukarela berlangganan dalam jangka waktu yang panjang dan memberikan word of mouth yang baik kepada keluarga, teman dan lingkungan sekitar, itu salah satu bentuk loyalitas pasien terhadap rumah sakit, sehingga secara tidak langsung pasien telah melakukan pemasaran terhadap rumah sakit, selain dari word of mouth, sesungguhnya pasien yang loyal sangatlah bernilai bagi rumah sakit sehingga rumah sakit lain yang jadi pesaing akan sulit merebut pasien tersebut. Selain itu mereka juga bisa menjadi pengiklan perusahaan, artinya mereka dapat memberikan rekomendasi dan keuntungan yang sangat besar bagi rumah sakit, dengan fasilitas yang memadai, letak rumah sakit yang strategis, dokter dan tim kesehatan yang profesional dan berkualitas dalam memberikan perawatan kepada pasien, serta biaya perawatan yang terjangkau khususnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang, dan keuntungan kerjasama yang dilakukan rumah sakit dengan beberapa asuransi dalam jangka waktu yang panjang sehingga hal tersebut menjadikan salah satu faktor loyalitas pasien di Rumah Sakit Mayapada Tangerang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari Hasil dan Pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pasien, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pasien (hipotesis pertama tidak didukung). Hasil yang didapatkan dari kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pasien, kepuasan pasien tidak hanya di dapatkan dari kualitas pelayanan yang diberikan, terdapat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- beberapa harapan yang diinginkan pasien, dengan harapan akan kesembuhan penyakitnya, seberapa baiknya kualitas pelayanan yang diberikan tetapi pasien cenderung tidak merasa puas. Terdapat faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti yang menyebabkan pasien merasa puas tetapi bukan dari kualitas pelayanan seperti pasien merasa puas apabila setelah dirawat dan diberi pengobatan pasien menjadi sembuh.
- b. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pasien, hal ini didukung dari hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan loyalitas pasien (hipotesis kedua didukung). Rumah Sakit Mayapada Tangerang sudah memberikan kualitas pelayanan yang berkualitas, baik dan tepat sehingga pasien memiliki loyalitas yang tinggi terhadap rumah sakit.
 - c. Hasil penelitian berikutnya citra merek mempengaruhi kepuasan pasien, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa citra merek mempengaruhi kepuasan pasien (hipotesis ketiga didukung). Dengan memberikan citra merek yang baik kepada pasien dan keluarga sehingga akan mendapatkan *world of mouth* yang baik yang akan dilakukan oleh pasien kepada teman, keluarga dan lingkungan sekitarnya, membuat citra merek yang baik, sehingga pasien akan puas terhadap rumah sakit dan membuat pasien percaya terhadap rumah sakit.
 - d. Hasil yang selanjutnya dari penelitian ini yang keempat adalah citra merek mempengaruhi loyalitas pasien. Citra merek yang baik akan meningkatkan loyalitas pasien (hipotesis keempat didukung). Rumah Sakit Mayapada Tangerang memberikan citra merek terhadap pasien yang baik dan tepat sehingga pasien cenderung akan memiliki loyalitas yang tinggi, pasien akan menceritakan pengalamannya melalui *world of mouth* kepada keluarga, lingkungannya.
 - e. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kepuasan pasien tidak mempengaruhi loyalitas pasien (hipotesis lima tidak didukung). Kepuasan pasien yang tinggi belum tentu pasien menjadi loyal, terdapat faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti yang menyebabkan pasien menjadi loyal tetapi bukan dari kepuasan pasien seperti pasien menjadi loyal karena kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit dan citra merek yang baik sehingga pasien menjadi loyal terhadap rumah sakit Mayapada. merasa puas apabila setelah dirawat dan diberi pengobatan pasien menjadi sembuh.

5.2. Saran

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini secara lebih mendalam, dapat meneruskan penelitian ini dari kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian ini hanya melihat kualitas pelayanan kesehatan, citra merek dari kepuasan dan loyalitas pasien, untuk kebutuhan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti kepercayaan pasien, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber data. Untuk memperluas populasi penelitian selanjutnya, yaitu dengan menambah jumlah rumah sakit yang diteliti dan menambah responden. Mengevaluasi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar pernyataan-pernyataan tersebut dapat mewakili secara tepat variabel yang hendak diukur, juga dapat mencari indikator lain yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditetapkan. Data penelitian yang telah diperoleh dikembangkan dengan wawancara lebih mendalam agar

diketahui keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Service *Quality* on Patient Satisfaction at A Public Hospital in state of Pahang, Malaysia. www.leena-luna.co.jp
Vol. 2 No. 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. Muzahid, Parvez, Noorjahan. (2009). Impact of service quality, trust, and customer satisfaction on consumer loyalty. *ABAC Journal*, Vol. 29, No. 1
- Aaker, D. A. (1990). *Measuring brand equity across products and markets*. The Free Press, New York, NY.
- Abd, El dan Shawky. (2013). The impact of corporate image and reputation on service quality, customer satisfaction and customer loyalty: testing the mediating role. *Journal of Business and Retail Management Research*.
- Alrubaiee, L. (2011). The Mediating Effect of Patient Satisfaction in the Patients Perceptions of Healthcare Quality – Patient Trust Relationship. *International Journal of Marketing Studies Vol. 3 No. 1*.
- Amin. M dan Siti. Z.N. (2013). Hospital service quality and its effects on patient satisfaction and behavioural intention. *Clinical Governance an international journal*.
- Atinga R.A., Abekah-Nkrumah dan Kwame A.D. (2011). Managing healthcare quality in Ghana : A necessity of patient satisfaction. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, Vol 24 No 7, 2011.
- Azizan N.A and Bahari Mohamed. (2013). The Effect of Perceived Service *Quality* on Patient Satisfaction at A Public Hospital in state of Pahang, Malaysia. www.leena-luna.co.jp
Vol. 2 No. 3.
- Bitner, M. J. & Zethamal, A. R. (1996). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality: the customer's voice. *Service Quality New Directions in Theory and Practice*, Thousand Oaks, CA: Sage (In Rust, R.T and Oliver, R.L. (Eds.), 72-94. 71.
- Bloemer and MJ, Bitnev, (1999), *Services Marketing*, New York, The McGraw Hill companies MC
- Caruana, A. (2002). Service Loyalty: The Effects of Service Quality and the Mediating role of Customer Satisfaction. *European Journal of Marketing*, 36(7), 811-828
- Caruana, Albert; Arthur H. Money dan Pierre R. Berthon (2000), "Service Quality and Satisfaction – The moderating role of value", *European Journal of Marketing*, Vol 34(11/12), p:1338-1352
- Chang, H. H., Wang, Y. A., and Yang, W. Y. (2009). The impact of e-service quality, customer satisfaction and loyalty on e-marketing. Moderating effect of perceived value. *Total Quality Management and Business Excellence*, 20 (4)
- Choi E, Kim J, Lee W. (1988). *Health care systems in Korea*. Seoul, Korea. Korea Institute for Health and Social Affairs
- Choi S.K dan Hanjoon Lee. (2005). The service quality dimensions and patient satisfaction relationship in south korea: comparisons across

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- gender, age and types of service. *Journal service quality dimensions and patient satisfaction relationships.*
- Choi, et al. (2005). The Service Quality Dimensions And Patient Satisfaction Relationships In South Korea. Comparisons Across Gender, Age And Types Of Service. *Journal of Services Marketing* 19.3 : 140-149.
- Da Silva, R.V dan Alwi, S.F.S., (2008). Online Corporate brand Image Satisfaction and Loyalty. *Journal of Brand management Vol.16.*
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective (7th ed.)*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. *Hennig International Journal of Marketing Studies* 64 Vol. 2, No. 2
- Irfan. S.M. Aamirijaz and M.M Farooq. (2012). Patient satisfaction and service quality of public hospitals in Pakistan An Empirical Assesment. *Journal of scientific research.*
- Kheng, Chenet dan Mosahab. (2010). *Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan: Studi Bank di Penang, Malaysia.*
- Kim, H. B., & Kim, W. G. (2005). *The relationship between brand equity and firms' performance in luxury hotels and chain restaurants.* *Tourism Management*, 26, 549-560.
- Kim, K. H., dan Kang, S. H. (2008). Brand equity in hospital marketing. *Journal of business research*, 61(1), 75-82.
- Kun-Hsi Liao. (2012). The Casual Effects of Service Quality, Brand Image, Customer Satisfaction on Customer Loyalty in the Leisure Resort Enterprise. *China-USA Business Review*, 11(5), pp. 631-642
- Lai, T, G (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity? *Journal of Product & Brand Management*, 16(1), 38-48.
- Lee, H. S. (2013). *Major moderators influencing the relationships of service quality, customer satisfaction and customer loyalty.* *Asian Social Science*, 9(2), 1-11.
- Lo Liang Kheng, Osman Mahamad, T. Ramayah and Rahim Mosahab. (2010) The Impact of Service Quality on Customer Loyalty. A Study of Banks in Penang, Malaysia. *International Journal of Marketing Studies*, 2(2), pp. 57-66.
- Malik., Zinatelli, N., Cragg, P., & Cavaye, A.L.M. (2012). *Personal computing acceptable factors in small firms. a structural equation model MIS Quarterly*, 27(4), 555-573
- Moorman, Christin, Gerald Zaltman and Rohit Desphande (1992) Relationships Beetwen Provider and Users of Market Researt : The Dinamics Of Trust Withim and Between Organizations, *Journal Marketing Research.*
- Muhammad Ishtiaq Ishaq. (2012). Perceived value, service quality, corporate image and customer loyalty: empirical assessment from Pakistan. *Serbian Journal of Management*, 7(1), pp. 25 – 36.

- Oliver, RL and WS De Sarbo (2001) Respon Determination Satisfaction Judgment, *Journal of consumers reseach*
- Osman dan Sentosa (2015). Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Kualitas Layanan dan Loyalitas Pelanggan Hubungan di Malaysia Industri Perbankan Komersial. *International Journal of Economics, Finance and Management Vol. 3, No. 2*, ISSN 2307-2466.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. and Berry, L. (1988). SERVQUAL : .a multi-item scale for measuring consumer perception of service quality. *Journal of Retailing Vol. 64 No. 1*, pp 12-40
- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1994). Alternative scales for measuring service quality.a comparative assesment based on psychometric and diagnostic criteria. *Journal of Retailing, Vol. 70 No. 3*, pp.201-30.
- Ren-Fang Chao, Tai-Chi Wu. (2015).The Influence of Service Quality, Brand Image, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty for Private Karaoke Rooms in Taiwan. *The Journal of Global Business Management Vol. 11, No.1*.
- Salazar, A., Costa, J. E., Rita, P. (2004). Relationship between Service Quality, Customer Satisfaction and Behavioural Intentions: A Study on the Hospitality Sector. *Proceedings of the 33rd EMAC (European Marketing Academy Conference)*. Murcia. Spain.
- Taylor, S.A., & Baker, T.L., (1994). An assessment of the relationship between service quality and customer satisfaction in the formation of customers purchase intentions. *Journal of Retailing*, 70(2), 163-78.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Service Manajement Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wijayanti Ari, 2008. Strategi Meningkatkan Loyalitas Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus : Produk Kartu Selular PraBayar Mentari – Indosat Wilayah Semarang). *Jurnal. Manajemen Universitas Dipanegoro*.
- Wu. C. C., (2011). The Impact of hospital brand image on service quality, patient Satisfaction and loyalty. *Journal Feng Chia University, Taiwan*
- Wyckof, R.L. (1996). A Cognitive Model of The Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. *Journal of Marketing Research, 17*.
- Young-Ei Kim and Jung-Wan Lee. (2012). Relationship between corporate image and customer loyalty in mobile communications service markets. *Africa Journal of Business Management*, 4(18), pp. 4035-4041.
- Zahir Osman et al., (2015). An Empirical Study of Direct Relationship of Service Quality, Customer Satisfaction and Bank Image on Customer Loyalty in Malaysian Commercial Banking Industry. *American Journal of Economics*, 5(2): 168-176.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Zeithaml, V. A., & Bitner, M. (2000). *Service Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm*. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc

Zeithaml, Valarie. A., Berry, Leonard. L., Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. *Journal of Marketing, Vol. 6*

Zeithmal, VA, Barry and Parasuraman. (1990). *Delivering Quality Service : Balancing Customer Perceptions and Expectations*. Collier Macmillan Publishers.

Zhaohua Deng, Jinlong Zhang, Ling Zhao, Yaobin Lu and K.K. Wei. (2009). *Customer Satisfaction And Loyalty of Mobile Services*. Eighth International Conference on Mobile Business, IEEE.

**PENGARUH INTERNET FINANCIAL REPORTING,
EARNINGS MANAGEMENT, LEVERAGE,
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2014)**

Dwirini

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang
Email: dwirini14@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses how the influences internet financial reporting, earnings management, leverage, and firm size to firm value on banks listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) Year 2012-2014. The independent variable in this study consisted of internet financial reporting (IFR), earnings management (Discretionary Accruals), leverage (Debt to Total Assets), and firm size (LogTA). The dependent variable is the firm value using the ratio of Tobin's Q. Based on research results using linear regression models of the 30 banks listed on the Indonesia Stock Exchange, it is known that variable of internet financial reporting and firm size significant effect on the firm value. While the earnings management and leverage no significant effect on the firm value.

Key Words: Firm value, Internet Financial Reporting, Earnings Management, Leverage, and firm size

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh internet financial reporting, earnings management, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2014. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari internet financial reporting (IFR), earnings management (Discretionary Accruals), leverage (LEV), dan ukuran perusahaan (LogTA). Sedangkan variabel terikat adalah nilai perusahaan menggunakan Rasio Tobin's Q. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model regresi linear berganda terhadap 30 perbankan yang terdaftar di BEI, diketahui bahwa variabel internet financial reporting dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan earnings management dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Nilai perusahaan, Internet Financial Reporting, Earnings Management, Leverage, dan Ukuran perusahaan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet banyak mempengaruhi tren bisnis di Indonesia. Saat ini baik perusahaan

perbankan, usaha kecil menengah, dan perusahaan non perbankan berlomba-lomba memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Hal itu tidak aneh, mengingat pengguna internet memang termasuk pasar menjanjikan. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi *netter* dalam negeri mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka ini diperkirakan akan melambung hingga 112 juta pada 2017 nanti. Jika ingin memikat pasar di dunia maya, pelaku usaha wajib mulai membenahi kebutuhan teknologi internalnya untuk menyokong kelancaran bisnis. Bagi perusahaan perbankan, menyediakan perangkat teknologi mungkin bukan hal sulit.

Terlebih ketika munculnya internet, yang notabene merupakan teknologi baru yang dapat menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet merupakan sebuah program yang terdapat di dalam komputer yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh data yang ada di data yang ada berbagai macam situs atau web.

Dengan perangkat digital, kini setiap perusahaan di dunia memiliki kesempatan yang sama dalam menggerakkan dan mengarahkan perubahan. Dunia internet yang selama ini dikatakan “maya” telah berevolusi menjadi dunia yang real. Hadirnya internet yang dijumpai *cyberspace* telah membentuk perilaku tersendiri. Saat ini jumlah web mencapai jutaan, bahkan mungkin trilyunan dan memuat bermacam-macam topik. Situs-situs itu menjadi sumber informasi baik positif maupun negatif.

Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi maka apabila pemilik perusahaan tidak mampu menampilkan sinyal yang baik tentang nilai perusahaan, nilai perusahaan akan berada di atas atau dibawah nilai yang sebenarnya. Sedangkan nilai perusahaan

bagi perusahaan yang sudah *go public*, dapat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dari *listing price*.

Sejalan dengan nilai perusahaan, internet menawarkan suatu bentuk unik pengungkapan yang menjadi media bagi perusahaan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat luas sesegera mungkin (Abdelsalam *et al.*, 2007). Atas dasar itulah muncul suatu media tambahan dalam penyajian laporan keuangan melalui internet atau *website* yang lazim disebut *Internet Financial Reporting* (IFR).

Pengungkapan informasi keuangan dalam *website* perusahaan (*Internet Financial Reporting - IFR*) merupakan suatu bentuk pengungkapan sukarela yang telah dipraktekkan oleh berbagai perusahaan. Survei dari Carol (1999) dalam Khan (2006) terhadap 1000 perusahaan besar di Eropa menunjukkan bahwa 67% perusahaan telah mempunyai *website* dan 80% dari perusahaan yang mempunyai *website* tersebut mengungkapkan laporan keuangan di internet. Hingga tahun 2006, lebih dari 70% perusahaan besar di dunia menerapkan IFR. (Kahn, 2006)

Selain itu *earnings management* dan karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari variabel kontrolnya yaitu berupa Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage*, *Sales Growth* dan *NOL* (*Net Operating Loss*). (Budiman, 2012).

Dorongan pihak manajemen melakukan tindakan *earnings management* adalah untuk memperlihatkan kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik, yang akan berpengaruh terhadap harga saham, dan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar rasio

leverage ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat. Ukuran perusahaan menunjukkan *total assets* yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.

Salah satu elemen penting dalam kaji ulang perusahaan perbankan adalah teknologi informasi khususnya internet. Salah satu penyebab cepat perubahan lingkungan bisnis global adalah pesatnya kemajuan teknologi. Implikasinya, bank-bank yang tidak mampu beradaptasi dan mengadopsi kemajuan teknologi perbankan akan terlibas oleh pesaing-pesaingnya. Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan informasi keuangan dalam *website* perusahaan, dengan sampel adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. KERANGKA TEORI

2.1. Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 1 (revisi 2013), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan menyajikan laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan para pemangku kepentingan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban perusahaan

terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Harahap, 2002).

Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen. Laporan keuangan yang disampaikan harus disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan Bapepam dalam bidang akuntansi serta harus diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.

Selanjutnya laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam. Laporan keuangan utama bagi perusahaan terdiri dari Laporan Laba Rugi (*income statement*), Laporan Perubahan Ekuitas (*statement of changes in equity*), Laporan Posisi Keuangan (*statement of financial position*), dan Laporan Arus Kas (*statement of cash flows*).

Laporan laba rugi menggambarkan ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. Laporan posisi keuangan menggambarkan daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun berikutnya. Laporan arus kas menggambarkan ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.

2.2. Teori Keagenan

Dalam kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan, yaitu: 1) hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik (*Bonus Plan Hypothesis*), 2) hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur (*Debt/Equity Hypothesis*) dan 3) hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah (*Political Cost Hypothesis*). Hal ini berarti ada kecenderungan bagi manajer untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal hubungannya dengan pemilik, kreditur maupun pemerintah. Praktik IFR merupakan media untuk menyampaikan informasi sebagaimana yang dikehendaki dalam kontrak keagenan.

2.3. Teori Sinyal

Teori Sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan-perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding pihak luar (investor, kreditor).

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

(Wolk *et al.*, 2000 dalam Sari dan Zuhrotun, 2006)

2.4. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan mencerminkan nilai pasar saham perusahaan. Manajer keuangan bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham dengan membuat keputusan yang meningkatkan nilai saham perusahaan. Dengan demikian, fungsi manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai sekarang per lembar saham yang telah beredar. Nilai saham yang dimaksud adalah nilai pasar atau harga pasar saham bukan nilai buku saham.

James Tobin, seorang guru besar di Yale University, menghipotesiskan bahwa keseluruhan nilai pasar untuk semua perusahaan pada harga pasar saham akan serupa dengan biaya penempatan aktiva tersebut (Fiakas, 2005). James Tobin memperoleh Nobel di bidang ekonomi dengan mencoba mengembangkan sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan konsepnya dengan nama *Tobin's q*. *Tobin's q* mengukur dengan sangat elegan meskipun terlihat sederhana, sehingga menarik banyak perhatian dalam perputaran investasi, dimana para investor dan analis mencari indikator serupa yang sederhana untuk menjelaskan hubungan bisnis dan ekonomi yang sangat kompleks.

Secara sederhana, *Tobin's q* adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. *Tobin's q* merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (*enterprise value*) terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan (Fiakas, 2005). Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, dan laba kemungkinan akan

didapatkan. Berdasarkan pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal investasi baru adalah tinggi ketika surat berharga (saham) memberikan keuntungan di masa depan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya investasinya. (Fiakas, 2005)

Penelitian Fakhruddin dan Sopian (2001) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. (dalam Herumuningsih dan Wardani, 2009, p.174). Sri Rahayu (2010) dalam Amanti (2012) nilai perusahaan juga dapat menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Samuel (2000) dalam Nurela dan Islahuddin (2008) juga menjelaskan bahwa *enterprise value* (EV) atau yang dikenal juga sebagai *firm value* (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan.

Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Hardiyanti (2012), menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan semakin tinggi nilai perusahaan maka menunjukkan tingginya kemakmuran para pemegang saham. Meningkatnya nilai perusahaan ini dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya (Haruman, 2008). Rasio *Tobin's q* digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Rasio *Tobin's Q* dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam *Tobin's Q* memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja

dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan, tetapi seluruh aset perusahaan. (Permanasari, 2010)

2.5. Internet Financial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting adalah pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet atau *website* (Lai *et al.*, 2009). Venter (2002) dalam Chandra (2008) mengidentifikasi cara penyajian melalui *website* yaitu:

- a. Membuat duplikat (menduplikasi) laporan keuangan yang sudah dicetak ke dalam format *electronic paper*.
- b. Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML.
- c. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui *website* sehingga lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan daripada laporan keuangan dalam format cetak.

Berbagai format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan keuangan melalui internet antara lain:

- a. *Portable Document Format* (PDF). Merupakan sebuah format file yang dikembangkan oleh *Adobe Corporation* untuk membuat dokumen- dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili dokumen yang asli. Semua elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai gambaran elektronik.
- b. *Hyper Text Markup Language*. HTML merupakan standar yang biasa digunakan untuk mempresentasikan informasi melalui internet.
- c. *Graphics Interchange Format* (GIF). GIF adalah sebuah format file berbentuk grafik, dengan meringkas mengenai gambaran informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat dibaca oleh kebanyakan pengguna.
- d. *Joint Photographic Expert Group* (JPEG). Sebuah format grafik yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- digunakan untuk meringkas foto agar mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam *website*.
- e. *Microsoft Excel Spreadsheet*. Sebuah aplikasi komputer yang berupa *spreadsheet* dengan menyimpan, memperlihatkan dan memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan lajur.
 - f. *Microsoft Word. Ms. Word* merupakan aplikasi program komputer yang paling banyak digunakan dalam IFR.
 - g. *Zip Files*. WinZip adalah program *windows* yang mengizinkan para pengguna untuk menyimpan dan meringkas dokumen informasi sehingga mereka dapat menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien.
 - h. *Macromedia Flash Software*. Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat.
 - i. *Real Networks Real Player Software*. Format yang menggunakan efek video.
 - j. *Macromedia Shockwave Software*. *Shockwave* merupakan bagian dari *multimedia player*.

Penelitian Ashbaugh *et al.*, (1999) menyatakan bahwa IFR dipandang sebagai alat komunikasi yang efektif kepada pelanggan, investor dan pemegang saham. IFR merupakan respon dari perusahaan untuk menjalin komunikasi dengan *stakeholder*, khususnya investor, dengan lebih baik dan lebih cepat. Jones (2002) dalam Abdelsalam *et al.*, (2008) berpendapat bahwa “*responsiveness*” merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan mempengaruhi kepercayaan investor pada pasar modal.

Menurut Jogiyanto (2000), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya

adanya perubahan pada volume dan frekuensi perdagangan saham, perubahan pada harga saham, *bid/ ask spread*, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, sehingga memicu reaksi oleh para pelaku di pasar modal. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dorner (2005) yaitu informasi keuangan yang tersedia bagi masyarakat akan berdampak pada pergerakan saham.

Pergerakan harga saham, volume dan frekuensi perdagangan saham yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Investor bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru yang masuk di pasar, sehingga menyebabkan saham segera melakukan penyesuaian. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Beaver (1968) dalam Lai *et al* (2009), Ball dan Brawn (1968) dan Fama *et. al.* (1969) yaitu saham akan bergerak ketika informasi yang berguna memasuki pasar.

Penelitian Debrecency *et al* (2002) mempelajari 660 perusahaan di 22 negara yang berbeda dan menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, teknologi informasi dan perusahaan yang terdaftar pada *NY Stock Exchange* merupakan faktor utama dalam adopsi IFR. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2002); Hanifa dan Rashid (2005) dalam Fitriana (2009); Andrikopoulos (2007); dan Aly (2009) dimana ukuran perusahaan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap praktik penerapan IFR. Kemudian *leverage*, profitabilitas, kepemilikan saham oleh investor institusional, sektor industri muncul sebagai variabel penjelas lain mengenai adopsi IFR.

Penelitian Lodhia *et al.* (2004) melakukan penelitian mengenai pelaporan perusahaan melalui internet pada perusahaan di Australia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun di Australia pelaporan

perusahaan melalui internet sedang berkembang tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak secara maksimal menggunakan internet untuk mengungkapkan informasi keuangan pada pemegang saham.

Penelitian Febrian Haryantoro (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh menyimpulkan *Internet Financial Reporting* (IFR) dan tingkat pengungkapan informasi pada *website* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009. Penelitian ini menghasilkan bahwa IFR dan tingkat pengungkapan informasi pada *website* berpengaruh signifikan terhadap frekuensi perdagangan saham perusahaan.

2.6. *Earnings Management*

Manajemen laba memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu (Agen) walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan laba yang dapat diidentifikasi sebagai sesuatu keuntungan (Darwis, 2012). Pihak manajemen yang memiliki kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi kepentingan prinsipal (Rahmawati dkk, 2007).

Manajemen laba merupakan suatu tindakan mengatur laba sesuai yang dikehendaki pihak tertentu, atau terutama oleh manajemen perusahaan (Fahmi, 2012). Pengaturan laba ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada pemegang saham bahwa kinerja perusahaan yang terus membaik, yang nantinya akan berpengaruh kepada harga saham, dan nilai perusahaan itu sendiri.

Manajemen laba dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan memanfaatkan pos-pos akrual yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu dengan memanfaatkan akrual diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang digunakan untuk mengurangi atau memperbesar laba yang dilaporkan

dengan cara memilih kebijakan akuntansi oleh manajemen yang bersifat subjektif (Armando dan Farahmita, 2012). Penelitian ini menggunakan model Healy (1999) dalam Sutami (2012:45) untuk mengukur akrual diskresioner.

Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan pengukuran berbasis akrual dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total *accrual* adalah pendekatan tersebut berpotensi untuk dapat mengungkapkan cara-cara untuk menurunkan atau menaikkan laba, karena cara-cara tersebut kurang mendapat perhatian untuk diketahui pihak luar. Total *Accrual* dalam perhitungan laba terdiri atas *non discretionary* dan *discretionary accrual*. *Nondiscretionary accrual* merupakan komponen akrual yang terjadi secara alami atau wajar seiring dengan perubahan aktivitas perusahaan. Sedangkan *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang berasal dari rekayasa manajemen (*earnings management*). (Veronica & Bachtiar, 2003).

Penelitian Fauzan Kamil dan Dini Wahyu Hapsari (2014), dan Darwis (2012) menyatakan meskipun manajemen laba akan meningkatkan nilai perusahaan pada periode tertentu, namun sebenarnya manajemen laba akan menurunkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Rachmawati dan Hanung (2007) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan. Hasilnya kepemilikan institusional, ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Komisaris, independen, KAP, *leverage* berpengaruh secara signifikan dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kualitas laba berpengaruh positif namun

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7. Leverage

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur (*margin* perlindungan) jika terjadi penyusutan nilai aset atau kerugian besar.

Penelitian Kusumawati dan Sudento (2005) menggambarkan *leverage* sebagai kemampuan perusahaan membayar hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. *Leverage* dapat dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya *leverage* yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula, karena bila risiko semakin tinggi ditakutkan perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Sehingga bila rasio *leverage* tinggi akan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Didukung oleh hasil penelitian Ginting (2003), yang mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Sugeng Wahyudi dan Yangs Nalisa (2011) menyatakan jika perusahaan gagal untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang salah satu penyebabnya adalah kurang cermatnya perusahaan dalam mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut membuat kinerja perusahaan di pandang buruk oleh *stakeholders*nya. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal

ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Suharli, 2006). Dalam ini ukuran perusahaan dinilai dengan *log of total assets*. *Log Of Total Assets* ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total aset dibentuk menjadi logaritma natural, konversi berbentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data total aset terdistribusi normal.

Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan sudah dilakukan oleh Desemliyanti (2003) dan Vebrianawati (2002). Ia meneliti tiga variabel yang dianggap mempengaruhi nilai perusahaan, yakni ukuran perusahaan (total aset), hutang dan bunga. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan nilai perusahaan, dan bunga memberikan hubungan yang positif dengan nilai perusahaan. Investor dalam penyertakan modalnya juga perlu untuk melihat ukuran perusahaan. Pada penelitian ini jumlah aktivasi log untuk mempersempit perbedaan jumlah dalam skala interval.

2.9. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Internet Financial Reporting* (IFR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- b. *Earnings Management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
- c. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
- d. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pemilihan Sampel dan Data

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana terdapat 30 perusahaan perbankan yang menjadi sampel. Perusahaan yang dipilih yaitu perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014, memiliki laporan keuangan perusahaan *go public* di Indonesia selama tiga tahun (tahun 2012-2014) untuk sektor perbankan, perusahaan yang masih eksis hingga tahun 2014, perusahaan memiliki data yang lengkap mengenai *closing price*, *net income*, *cash from operation*, *debt ratio*, jumlah saham beredar, dan data-data yang lain untuk mendeteksi nilai perusahaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi karena data berupa data sekunder. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan yang dibutuhkan. Data sekunder ini berupa laporan keuangan tahunan perbankan di Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2012-2014. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut diperoleh dari situs-situs atau web dari setiap sektor perbankan, situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan *IDX Fact Book* dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

3.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.3.1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2008:59). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

a. *Internet Financial Reporting*

Indeks *Internet Financial Reporting* menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000) dan Lymer et al. (1999). Indeks yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000) terdiri dari empat komponen, dan empat komponen masing-masing diberi bobot sebagai berikut isi/ *content* sebesar 40%, ketepatanwaktuan/ *timeliness* sebesar 20%, pemanfaatan teknologi (20%) dan dukungan pengguna/ *user support* sebesar (20%). Adapun penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- 1) **Isi/ Content**, dalam kategori ini meliputi komponen informasi keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan keberlanjutan perusahaan. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam bentuk HTML memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format PDF, karena informasi dalam bentuk HTML lebih memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat.
- 2) **Ketepatanwaktuan**, ketika *website* perusahaan dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksnya.
- 3) **Pemanfaatan Teknologi**, komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

media teknologi multimedia, *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi “*Intelligent Agent*” atau XBRL).

- 4) **User Support**, indeks *website* perusahaan semakin tinggi jika perusahaan mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam *website* perusahaan seperti media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to home page*, *site map*, *site search*).

b. Earnings Management

Earnings management diukur menggunakan *discretionary accruals*. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Gumanti (2000), umumnya poin awal dalam pengukuran *discretionary accruals* adalah total *accruals*, dimana total *accruals* tersebut terdiri dari komponen *non discretionary accruals* dan *discretionary accruals*. Selanjutnya model yang dikembangkan Healy (1999) dalam Sutami (2012:45) digunakan untuk mengukur *discretionary accruals*.

Model pengukuran atas *discretionary accruals* pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

$$DA_t = \frac{TAt}{At - 1}$$

Keterangan:

DA_t = *Discretionary accruals* pada periode t .

TAt = Total *accruals* pada periode t .

$At-1$ = Total aset pada satu tahun sebelum tahun t .

Sedangkan TAt diperoleh dari:

$$TAt = NI - CFO$$

Keterangan:

TAt = Total *accruals*.

NI = *Net operating income* yang juga merupakan *income before extraordinary items*.

CFO = *Cash flow from operation activities*.

c. Leverage

Leverage ratio dapat diukur dengan cara:

$$Debt Ratio = \frac{Total Debt}{Total Asset}$$

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari total aset (Klapper dan Love, 2002 dalam Darmawati, 2005).

$$SIZE = \log \text{ of total assets}$$

3.3.2. Variabel Dependen (Nilai Perusahaan)

Tobin's q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan.

Di dalam penggunaannya, *Tobin's q* mengalami modifikasi. Modifikasi *Tobin's q* versi Chung dan Pruitt (1994) telah digunakan secara konsisten karena disederhanakan diberbagai simulasi permainan. Modifikasi versi ini secara statistik kira-kira mendekati *Tobin's q* asli dan menghasilkan perkiraan 99,6% dari formulasi aslinya yang digunakan oleh Lindenberg & Ross (1981). Formulasi rumusnya sebagai berikut:

$$Q = \frac{MVS + D}{TA}$$

Keterangan:

MVS = *Market value of all outstanding shares (outstanding shares x closing price)*.

D = *Debt*

TA = Firm’s asset’s

DA_t = Discretionary accruals pada periode t

LEV = Leverage pada periode t

LogTA = Log Total Asset pada periode t

β₀ = Konstanta

β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien regresi

e_{it} = error term

3.3.3. Teknik Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan pengujian asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{IFR} + \beta_2 \text{DA}_t + \beta_3 \text{LEV} + \beta_4 \text{LogTA} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Tobin’s q

IFR = Indeks *Internet Financial Reporting* pada periode t

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, Tabel 4.1. berikut ini akan menampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOBINQ	90	1.00	89354.00	19164.02	26027.80090
IFR	90	.80	.90	.8833	.03748
DA	90	-5.68	.84	-.0641	.60968
LEV	90	.74	1.00	.8818	.04175
LogTA	90	4.31	12.72	8.4021	1.55084
Valid N (listwise)	90				

Sebelum dilakukan analisis data, dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian normalitas data yang dilakukan sebagai berikut:

4.1.1. Uji Normalitas

Untuk menentukan normalitas data dengan *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data yang normal atau mendekati distribusi

normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan koreksi *Lilliefors*. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut:

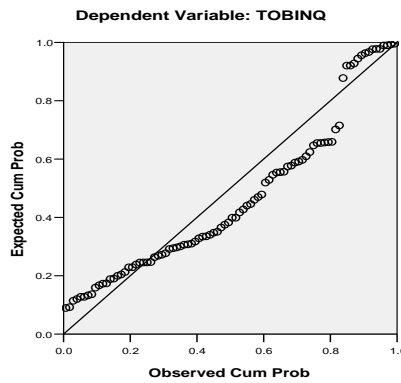
- Jika $p < 0,05$ maka distribusi data tidak normal.
- Jika $p > 0,05$ maka distribusi data normal.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

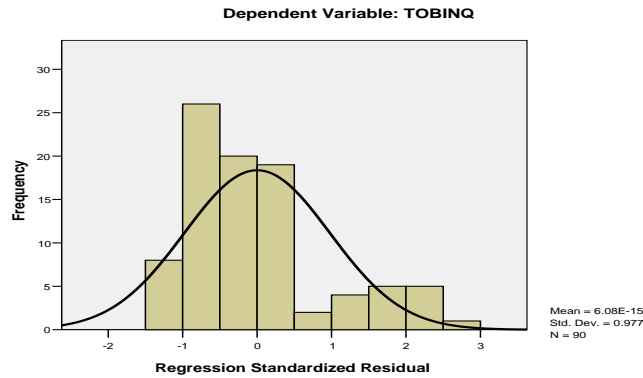
Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* digambarkan dalam gambar 4.1 dan gambar 4.2 berikut ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 Uji Normalitas P-Plot

Histogram



Gambar 4.2 Grafik Histogram

Dari grafik histogram di atas model regresi cenderung membentuk kurva normal yang cembung dengan angka standar deviasi mendekati satu yaitu sebesar 0,977 dan pada *normal probability plot* mengikuti garis diagonal. Dari hasil ini dapat

disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

4.1.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
IFR	.906	1.104
DA	.984	1.016
LEV	.978	1.022
LogTA	.911	1.098

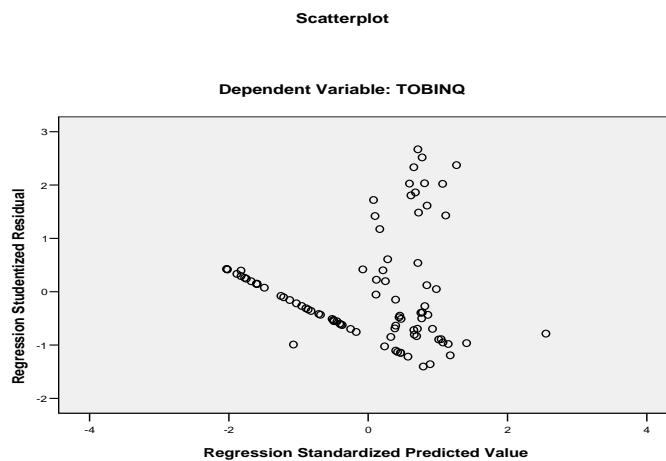
Dari Tabel 4.2 di atas ini dapat dilihat bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga hal ini diindikasikan model tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas.

heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y¹ adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*.

4.1.3. Uji Heteroskedasitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

Hasil deteksi dengan melihat *scatterplot* disajikan dalam gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan juga terlihat titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Pengujian-pengujian di atas telah membuktikan kalau data yang akan digunakan telah memenuhi syarat normalitas, bebas multikolinearitas, dan tidak adanya heteroskedastisitas. Dengan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

tiga pengujian pendahuluan ini, maka pengujian atas persamaan *multiple regression* dapat dilakukan dengan hasil yang akurat.

4.2. Analisis Regresi dan Hasil Pengujian

4.2.1. Analisis Regresi

Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-259822	71868.832		-3.615	.001		
	IFR	302945.0	66860.050	.436	4.531	.000	.906	1.104
	DA	2481.923	3943.165	.058	.629	.531	.984	1.016
	LEV	78614.795	57745.934	.126	1.361	.177	.978	1.022
	LogTA	-6876.451	1611.112	-.410	-4.268	.000	.911	1.098

a. Dependent Variable: TOBINQ

Model regresi ini untuk menguji pengaruh dari *internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, dimana secara sistematis persamaan diatas dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = - 259822 + 302945 \text{ IFR} + 2481,923 \text{ DA} + 78614,795 \text{ LEV} - 6876,451 \text{ LogTA} + e_{it}$$

Artinya:

- $\beta_0 = - 259822$; artinya jika variabel *internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan bernilai 0 maka nilai perusahaan bernilai - 259822.
- $\beta_1 = 302945$; artinya jika *internet financial reporting* meningkat sebesar

1 dan variabel lainnya konstan, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 302945.

- $\beta_2 = 2481,923$; artinya jika *earnings management* meningkat sebesar 1 dan variabel lainnya konstan, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 2481,923.
- $\beta_3 = 78614,795$; artinya jika *leverage* meningkat sebesar 1 dan variabel lainnya konstan, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 78614,795.
- $\beta_4 = - 6876,451$; artinya jika ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 dan variabel lainnya konstan, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 6876,451.

4.2.2. Uji F

Tabel 4.4 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2E+010	4	4319920468	8.537	.000 ^a
	Residual	4E+010	85	506035876.3		
	Total	6E+010	89			

a. Predictors: (Constant), LogTA, LEV, DA, IFR

b. Dependent Variable: TOBINQ

Berdasarkan hasil pada uji F diketahui nilai F hitung sebesar 8,537 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Nilai signifikansi dari F hitung didapati lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *internet financial*

reporting, earnings management, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.2.3. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.535 ^a	.287	.253	22495.24119

a. Predictors: (Constant), LogTA, LEV, DA, IFR

b. Dependent Variable: TOBINQ

Didapati R² sebesar 0,287 (dapat dilihat pada tabel 4.5) hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan menggunakan variabel *internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan adalah sebesar 28,7%. Sedangkan sisanya sebesar 71,3% variabilitas nilai perusahaan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai koefisien

korelasi (R) sebesar 0,535a, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif searah antara *internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

4.2.4. Pengujian Hipotesis

Tabel 4.6 Uji t

Model	T	Sig	Keterangan
1 (Constant)	-3.615	.001	Signifikan
IFR	4.531	.000	Signifikan
DA	.629	.531	Tidak signifikan
LEV	1.361	.177	Tidak signifikan
LogTA	-4.268	.000	Signifikan

Berdasarkan Tabel 4.6 maka dapat dilihat bahwa hasil nilai t-signifikansi *earnings management* sebesar 0.000. Karena nilai t sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *internet financial reporting* (IFR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien untuk variabel IFR menunjukkan nilai 4,531. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah antara bahwa *internet financial reporting* dengan nilai perusahaan. Dengan kata lain, jika terdapat kenaikan *internet financial reporting* sebesar 1 maka akan menyebabkan kenaikan nilai perusahaan sebanyak 4,531.

Untuk *earnings management* hasil uji t-signifikansi sebesar 0.531. Maka dapat disimpulkan bahwa *earnings management* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, karena nilai t sig lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien untuk variabel *earnings management* menunjukkan nilai 0,629. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah antara bahwa *earnings management* dengan nilai perusahaan. Dengan kata lain, jika terdapat kenaikan *earnings management* sebesar 1 maka akan menyebabkan kenaikan nilai perusahaan sebanyak 0,629.

Pada variabel *leverage* pada nilai perusahaan, t-signifikansi sebesar 0,177,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, karena nilai t sig lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien untuk variabel *leverage* menunjukkan nilai 1,361. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah antara bahwa *leverage* dengan nilai perusahaan. Dengan kata lain, jika terdapat kenaikan *leverage* sebesar 1 maka akan menyebabkan kenaikan nilai perusahaan sebanyak 1,361.

Sedangkan hasil nilai t -signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0.000. Karena nilai t sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien untuk variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai -4,268. Tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan antara bahwa ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Dengan kata lain, jika terdapat kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1 maka akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan sebanyak 4,268.

Internet financial reporting (IFR) secara konsisten mampu mempengaruhi nilai perusahaan, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Febrian Hargyantoro (2010) menyatakan bahwa IFR dan tingkat pengungkapan informasi keuangan yang terkini melalui internet atau *website* dapat mempengaruhi frekuensi perdagangan saham perusahaan. Terdapat keunggulan bagi perusahaan perbankan dalam mengungkapkan informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting - IFR*) diharapkan mampu meningkatkan komunikasi perusahaan dengan *stakeholder*, *shareholder* dan pihak-pihak lain yang berkaitan, khususnya investor. Dengan adanya IFR, investor dapat lebih cepat mengakses informasi keuangan perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan. Semakin banyak informasi yang tersedia dan

semakin cepat informasi itu tersedia akan mempermudah investor dalam mengevaluasi portofolio saham yang dimiliki. Informasi tersebut akan menciptakan penawaran dan permintaan oleh para investor yang berujung pada nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini *earnings management* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruhnya adalah positif, tidak seperti hipotesa kedua, yang mengatakan *earnings management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bertolak dengan hasil penelitian Fauzan Kamil dan Dini Wahyu Hapsari (2014), Darwis (2012). Semakin banyak manipulasi laba yang dilakukan oleh pihak manajemen menggambarkan semakin buruknya nilai perusahaan tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka manipulasi laba, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya nilai saham suatu perusahaan.

Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruhnya adalah positif, tidak seperti hipotesa ketiga, yang mengatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bertolak dengan hasil penelitian Kusumawati dan Sudento (2005) dan Ginting (2003). Rasio *leverage* yang semakin tinggi akan menimbulkan semakin tinggi juga resiko perusahaan, karena bila resiko semakin tinggi ditakutkan perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Sehingga bila rasio *leverage* tinggi akan menurunkan nilai perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pengaruhnya adalah positif. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desemliyanti (2003) dan Vebrianawati (2002) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor

yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kondisi tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. Ekspektasi insvestor berupa perolehan dividen dari perusahaan tersebut. Peningkatan permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham di pasar modal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 30 perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Berikut ini merupakan hasil statistik deskripsi dari variabel-variabel penelitian dengan variabel dependen nilai perusahaan:

- 1) *Internet financial reporting* memiliki nilai minimum sebesar 0,80 dan nilai maksimum sebesar 0,90. Rata-rata nilai *internet financial reporting* dari seluruh observasi adalah 0,8833 dengan standar deviasi 0,03748. Standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data *internet financial reporting* pada penelitian ini tidak bervariasi.
- 2) *Earnings management* memiliki nilai minimum sebesar -5,68 dan nilai maksimum sebesar 0,84. Rata-rata nilai *earnings management* dari seluruh observasi adalah -0,0641 dengan standar deviasi 0,60968. Standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data

earnings management pada penelitian ini bervariasi.

- 3) *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,74 dan nilai maksimum sebesar 1. Rata-rata nilai *leverage* dari seluruh observasi adalah 0,8818 dengan standar deviasi 0,04175. Standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data *leverage* pada penelitian ini tidak bervariasi.
 - 4) Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 4,31 dan nilai maksimum sebesar 12,72. Rata-rata nilai ukuran perusahaan dari seluruh observasi adalah 8,4021 dengan standar deviasi 1,55084. Standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data ukuran perusahaan pada penelitian ini tidak bervariasi.
- b. *Internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- c. Pengaruh *internet financial reporting*, *earnings management*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap nilai perusahaan adalah sebagai berikut:
- 1) *Internet financial reporting* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah koefisien regresi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa dapat *internet financial reporting* menaikkan nilai perusahaan.
 - 2) *Earnings Management* dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah koefisien regresi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa *earnings management* dan *leverage* dapat menaikkan nilai perusahaan.
 - 3) Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah koefisien regresi yang negatif. Hal

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menurunkan nilai perusahaan.

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang. Sampel perusahaan selanjutnya diharapkan menggunakan semua perusahaan non perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penilaian *internet financial reporting* (IFR) selain model Cheng et al. (2000) dan Lymer et al. (1999), seperti model Ettredge (2001) dalam Lai et al., (2009). Penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan model pengukuran *earnings management* (*discretionary accruals*) selain Healy (1999), seperti model Jnes (1991), Dechow et al. (1995), Kasznik (1999), dan Kothari et al. (2005).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelsalam, O.H., El-Masry, Ahmed.(2008). *The Impact Of Board Independence And Ownership Structure On The Timeliness Of Corporate Internet Reporting Of Irish-Listed Companies*. *Managerial Finance*, Vol. 34 No. 12, 2008 pp. 907-918.
- Abdelsalam, O.H., S. M., Bryant, dan D. L. Street. (2007). *An Examination of the Comprehensiveness of Corporate Internet Reporting Provided London - Listed Companies*. *Journal of International Accounting Research*, Vol. 6, No.2.
- Adhis Anggiany Putri S. (2015). *5 Teknologi yang Wajib Dimiliki untuk Membangun Start Up*. Diunduh 17 Oktober 2016, dari: <http://teknokompas.com/read/2015/11/21/07020057/5>.Teknologi.ya
- ng.Wajib.Dimiliki.untuk.Membangun.StartUp.
- Almilia, Luciana Spica. (2009). *Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) ISSN: 1907-5022.
- Almilia, Luciana Spica. (2009). *Analisa Kualitas Isi Financial And Sustainability Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) ISSN: 1907-5022.
- Amanti, L. (2012). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas Negeri, Surabaya.
- Armando, Equivalent dan Farahmita, Aria.(2012). *Manajemen Laba Melalui AkruaI dan Aktivitas Riil Di Sekitar Penawaran Saham Tambahan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. 20-22 September 2012.
- Cheng, A. Lawrence, S dan Coy, D. (2000). *Measuring the Quality of Corporate Financial Websites: A New Zealand Study*. Paper presented at the 12th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues – Beijing.
- Chung, K.H and Pruitt, S.W. (1994). *A Simple Approximation of tobin's q*.

- Financial Management*, Vol. 23, No. 3 Autumn.
- Darwis, Herman. (2012). *Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No.1, Januari 2012, Hal 45-55.
- Fahmi, Irham. (2012). *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Faradila, Astri & Dewi Cahyati, Ari. (2013). *Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah*. JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 Hal 57-74.
- Fiakas, D. (2005). *Tobin's q: Valuing Small Capitalization Companies*. *Crystal Equity Research*, April.
- Gwenda, Zefanya & Juniarti.(2013). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Variabel Share Ownership, Debt Ratio, dan Sektor Industri Terhadap Nilai Perusahaan*. *Business Accounting Review*, Vol 1.
- Ginting, S. 2003. *Pengaruh Struktur Modal terhadap Produktivitas Aktivitas Kinerja Keuangan serta Nilai Perusahaan Industri Manufaktur di Indonesia*. *Unpublished Graduate Thesis*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hardiyanti, Nia. (2012). *Analisis Pengaruh Insider Ownership, Leverage, Profitabilitas, Firm Size dan Dividen Payout Ratio Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi S1. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Hargyantoro, Febrian & Dul Muid.(2010). *Pengaruh Internet Financial Reporting Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan*. *Undergraduate thesis*, Universitas Diponegoro.
- Herawaty, V. (2008). *Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Akuntansi.
- Hermuningsih, S., Wardani, D. (2009). *Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dan bursa efek Indonesia*. Jurnal Siasat Bisnis, 13(2), pp.173-183.
- Kamil, Fauzan & Hapsari, Dini Wahyu.(2014). *Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Mekanisme Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*. e-Proceeding of Management : Vol.1, No.3.
- Khan, Tehmina. (2006). *Financial Reporting Disclosure On The Internet: An International Perspective*. Faculty of Business and Law School of Accounting, Victoria University, Australia.
- Kusumastuti, S., Supatmi., Sastra, P. (2007). *Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2).
- Nalisa, Yangs & Wahudi, Sugeng. (2011). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Study Empiris*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Terhadap Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2006-2008). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.*
- Nurlela, R., Islahuddin. (2008). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Permanasari, Wien Ika. (2010). *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institutional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi S1. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Prasetya, Mellisa & Irwandi, Soni Agus. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. The Indonesian Accounting Review Volume 2, No. 2, July 2012, pages 151 – 158.
- Rahmawati, dkk.(2007). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 4, No. 3. Hal 173-183.
- Sari, Ratna Chandra dan Zuhrotun. (2006). *Keinformatifan Laba Di Pasar Obligasi Dan Saham: Uji Liquidation Option Hypothesis*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Sudiyanto, Bambang & Puspitasari, Elen.(2010). Tobin's q dan altman z-score sebagai indikator pengukuran kinerja perusahaan. Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi.
- Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sutami, Wahyu. (2012). *Analisis Manajemen Laba (Earning Management) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik (Study Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2007-2009)*. Universitas Islam 45 Bekasi: Disertasi yang tidak dipublikasikan.

**PENGARUH UKURAN KAP, *FINANCIAL DISTRESS*,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PERGANTIAN
MANAJEMEN DAN OPINI AUDIT
TERHADAP *AUDITOR SWITCHING***

Elisabeth Yohana*), Agus Ismaya Hasanudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

*Email: elisabethyohanas@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to test the effect of Public Accounting Firm, Financial Distress, Institutional Ownership, Management Change and Audit Opinion on The Auditor Switching. The population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 to 2014. The total sample in this research are 99 companies selected by using purposive sampling method based on specific criteria the period of 3 years from 2012 to 2014. This research used logistic regression as statistical analysis method. The results of this study revealed that public accounting firm size has significant effect on auditor switching, meanwhile financial distress, institutional ownership, management change and audit opinion do not have significant effect on auditor switching.

Key Words: Auditor Switching, Public Accounting Firm Size, Financial Distress, Institutional Ownership, Management Change and Audit Opinion

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP, Financial Distress, Kepemilikan Institusional, Pergantian Manajemen dan Opini Audit terhadap Auditor Switching. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Total sampel dalam penelitian ini adalah 99 perusahaan yang telah dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang sesuai dengan kriteria yang digunakan selama periode 3 tahun dari 2012 sampai 2014. Penelitian ini menggunakan regresi logistik sebagai metode analisis statistik. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian auditor sedangkan financial distress, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap auditor switching.

Kata Kunci: Auditor Switching, Ukuran KAP, Financial Distress, Kepemilikan Institusional, Pergantian Manajemen, Opini Audit

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi sangat membantu pihak eksternal dalam mengetahui kondisi suatu entitas dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selaku pemakai laporan keuangan, pihak eksternal sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu diperlukan profesi seperti auditor untuk menjamin kualitas dan kewajaran laporan keuangan. Laporan Keuangan menurut SAK memiliki dimensi bertujuan umum karenaditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna Laporan Keuangan, termasuk Direktorat Jendral Pajak sebagai pengguna. Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan (*balance sheet*) pada atau per akhir periode laporan.
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (*income Statement*) selama periode pelaporan.
3. Laporan Perubahan ekuitas selama periode pelaporan.
4. Laporan Arusa Kas selama periode pelaporan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan komersial yang dibuat oleh seorang akuntan dengan mengacu pada PSAK disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dimana seperti kita ketahui pemakai Laporan Keuangan Komersial tersebut adalah:

- Intern , Pemakai Laporan Keuangan dari sisi Perusahaan
1. Pegawai, Berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan dan biasanya berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, contoh : gaji, bonus , dll
 2. Manajemen Perusahaan, Pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas Perusahaan, bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dan untuk mengetahui

kebijakan keuangan yang akan mendukung keputusan strategis yang dibuat oleh Perusahaan.

- Ekstern, Pihak yang berkepentingan di luar Perusahaan.
1. Pemegang saham atau Pemilik, Pemilik adalah bukan pengelola Perusahaan dalam Perseroan terbuka, fungsi Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui share profit yang didapat oleh Pemilik.
 2. Pemerintah, Pemerintah berkepentingan untuk mendata jumlah Perusahaan dan keterkaitan dengan penerimaan pajak bagi perusahaan.
 3. Investor. Penempatan dana dalam Perusahaan apakah akan ditambah atau dikurangi dengan menganalisa keuangan.
 4. Kreditur, Berkaitan dengan dana yang akan dikucurkan oleh Pihak Kreditur terhadap Perusahaan.
 5. Masyarakat Luas, Berkaitan dengan *social responsibility* yang dimiliki oleh Perusahaan dimana Perusahaan tersebut berada.

Pekerjaan dari auditor ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Jasa Akuntan Publik (No: 17/PMK.01/2008). Salah satu ketentuannya adalah mengenai *Auditor Switching* (Pergantian Auditor). Bagian mengenai peraturan pembatasan pemberian jasa menuliskan jika, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai *auditor switching* ini bertujuan untuk tetap menjaga independensi auditor yang ditakutkan akan menurun seiring semakin lamanya *audit tenure*.

Kasus Enron/Arthur Andersen pada tahun 2001 adalah salah satu contoh kasus besar yang berawal dari audit

tenure yang panjang dan mengakibatkan Arthur Andersen kehilangan sikap independensinya. Permasalahan auditor menjadi sorotan masyarakat ketika banyaknya kasus-kasus yang terkuak, kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu PT Aqua Golden Mississippi pada tahun 2002 pernah mengganti auditornya namun auditor baru yang ditunjuknya merupakan auditor yang masih memiliki hubungan dengan auditor terdahulunya. Kasus lain juga terjadi pada PT Inovasi Infracom Tbk pada tahun 2014 yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT BEL.PT Inovasi Infracom Tbk pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun buku 2014. Pergantian KAP ini dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan perusahaan tersebut dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (sumber: finance.detik.com)

Independensi auditor merupakan penyebab utama adanya *auditor switching* secara wajib di Indonesia. *Auditor switching* dapat terjadi berdasarkan aturan pemerintah (*mandatory*) ataupun keinginan perusahaan sendiri (*voluntary*). Ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi kontrak kerja, maka perhatian utama tertuju kepada auditor pengganti. Pada pergantian secara wajib yang terjadi adalah pemisahan paksa (*mandatory*) oleh peraturan. Sebaliknya, jika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, kemungkinan yang muncul adalah apakah auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah apakah ukuran KAP, *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan

opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa ukuran KAP, *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *auditor switching*.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Peraturan Pemerintah Tentang Pergantian Auditor

Pergantian auditor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pergantian auditor secara wajib dan pergantian auditor secara sukarela (Susan dan Trisnawati, 2011). Untuk pergantian auditor secara wajib diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang jasa akuntan publik (perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 423/KMK.06/2002) yang berisi bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dengan kewajiban mengganti KAP setelah melaksanakan audit selama 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut. Selanjutnya, KAP dan akuntan publik boleh menerima kembali penugasan audit dari klien yang sama setelah jeda satu tahun buku.

2.2. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menunjukkan hubungan antara dua pihak, yaitu pihak manajemen (agen) dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pihak eksternal perusahaan (prinsipal) yang juga pemakai laporan keuangan (Robbitasari dan Wiratmaja, 2013).

Pihak prinsipal menunjuk pihak agen agar agen tersebut bertindak untuk kepentingan mereka. Dalam teori keagenan, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena pihak agen tidak berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak prinsipal (Aprilia, 2013). Dengan adanya konflik kepentingan ini nantinya dapat menimbulkan biaya agensi pada perusahaan dan peran auditor adalah untuk menekan biaya agensi tersebut.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik dengan pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan sedangkan agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari keterlibatannya dalam hubungan agensi seperti memutuskan untuk melakukan pergantian auditor karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka agen akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan agen.

2.3. Auditor Switching

Auditor switching dilakukan perusahaan untuk mempertahankan independensi auditor karena auditor yang hubungannya sangat lama dengan perusahaan dapat mempengaruhi emosional auditor atau kesetiaan yang kuat dimana mereka mempunyai hubungan yang nyaman dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi opini mereka ketika melakukan pekerjaan (Astrini dan Muid, 2013).

Auditor switching dibagi menjadi dua macam, yaitu *auditor switching* secara wajib dan *auditor switching* secara sukarela. Ketika klien mengganti auditornya secara sukarela (*voluntary*) atau pada saat tidak ada

aturan yang mengharuskan untuk diganti, maka yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dihentikan oleh klien. Jika perusahaan mengganti auditor secara sukarela maka perlu dipertanyakan hal-hal apa saja yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* (Susan dan Trisnawati, 2011).

2.4. Ukuran KAP

Menurut SK.Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 januari 1997 sebagaimana telah diubah dengan SK.Menkeu No470/KMK.017/1999 pertanggal 04 oktober 1999 , kantor akuntan publik (KAP) Adalah lembaga yang memiliki ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.

Kantor akuntan publik yang masuk kategori KAP *the big four* di indonesia adalah:

- Kantor Akuntan Publik *Price Water House Cooper*, yang bekerja sama dengan Kantor Kuntan Publik Drs.Hadi Susabto dan rekan.
- Kantor Akuntan Publik KPMG (*Klynfeld Peat Marwick Goedelar*), yang bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Wijaya.
- Kantor Akuntan Publik Ernst dan Young, yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Drs.Sarwoko dan Sanjoyo.
- Kantor Akuntan Publik *Delloite Tauche Thomatshu*, yang bekerjasama degan Kantor Akuntan Publik Drs.Hans Tuanokata.

Dalam penelitian ini, ukuran KAP dibagi menjadi dua kelompok, kantor akuntan publik besar yang berafiliasi dengan *Big Four* dan kantor akuntan publik kecil yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*.

Sebagian besar perusahaan memilih kantor akuntan publik dengan

kualitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata para pengguna laporan keuangan (Halim 1997: 79-80 di Divianto 2011). KAP yang berafiliasi *big four* adalah *Price Waterhouse Coopers (PWC)*, *Klynveld Gmbut Marwick Goerdeler (KPMG)*, *Ernest&Young (E&Y)* dan *Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte)* (Elder et al. 2014 : 34 dalam Dewi Sri Kistini dan Nahumury (2014).

2.5. Financial Distress

Financial distress atau kesulitan keuangan perusahaan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Wijaya, 2012). Menurut situs www.investopedia.com, *financial distress* dapat didefinisikan sebagai: "*A condition where a company cannot meet or has difficulty paying off its financial obligation o its creditors. The chance of financial distress increases when a firm has high fixed costs, illiquid asstes, or revenues that are sensitive to economic downturns.*"

McKeown (1991) dan Sinarwati (2010) menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* untuk mengukur kesulitan keuangan perusahaan, yang menemukan pengaruh positif kesulitan keuangan perusahaan dengan melakukan perpindahan KAP. Ada berbagai cara dan teknik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sedang mengalami *financial distress* atau tidak. Salah satu teknik yang dapat dipergunakan adalah dengan melakukan analisa keuangan. Beberapa resiko keuangan yang dapat menunjukkan kondisi tersebut diantaranya: (1) Rasio likuiditas (*liquidity ratio*), (2) Rasio manajemen hutang (*debt management ratio*), dan (3) Rasio pemanfaatan asset (*asset utilization ratio*).

2.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional (investor) didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan perbankan investasi.

Kepemilikan institusional diharapkan lebih menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Peran dari pemegang saham institusional sebagai pengawas perusahaan dipengaruhi oleh nilai investasi mereka. Apabila pemegang saham institusional tidak merasa puas atas kinerja pihak manajemen maka mereka akan menjual sahamnya di pasar. Oleh karena itu, pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan

2.7. Pergantian Manajemen

Perubahan manajemen adalah sebagai akibat dari penggantian direksi perusahaan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri (Endina Sulistiarini dan Sudarno 2012). Dewan Komisaris berkewenangan untuk menunjuk suatu KAP melalui rekomendasi dari komite audit yang nantinya akan diusulkan dalam RUPS (Rahmawati, 2011). Jika manajemen baru berharap bahwa auditor yang baru lebih bias diajak bekerjasama dan lebih bias memberikan opini seperti yang diharapkan manajemen, maka dapat terjadi pergantian auditor di dalam perusahaan (Sinarwati, 2010).

Menurut Nagy (2005) dalam Sulam Damayanti dan Made Sudarma (2008), perubahan manajemen perusahaan diikuti oleh perubahan kebijakan di bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan kantor akuntan publik. Perusahaan akan mencari kantor akuntan publik yang sejalan dengan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dan membutuhkan auditor berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika ini tidak bisa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

dipenuhi, perusahaan mungkin akan mengganti auditornya

2.8. Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan pendapat dari auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor tersebut. Proses audit akan menghasilkan sebuah laporan audit. Menurut IFRS (International Financial Reporting Standards), laporan audit didefinisikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan audit dan temuan audit secara komprehensif, yang diberikan oleh *team* audit kepada organisasi audit.

Opini audit selain wajar tanpa pengecualian cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian auditor, karena hal ini mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif (Divianto, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengambilan sampel adalah selama tiga tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria-kriteria.

3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel Penelitian ini menjabarkan tentang variabel Terikat (Y) dan Variabel Bebas (X).

1. Variabel Terikat

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan perusahaan. Jika perusahaan melakukan *auditor switching* diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan tidak

melakukan *auditor switching* maka diberi nilai 0.

2. Variabel Bebas

a. Ukuran KAP

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP *Big Four* dan non *Big Four*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* maka diberi nilai 1. Sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP non *Big Four* maka diberi nilai 0.

b. Financial distress

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam masa kesulitan keuangan. Dalam penelitian ini *financial distress* dihitung dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Jika perusahaan memiliki rasio DER lebih dari 100% maka diberi nilai 1 dan jika perusahaan memiliki rasio $DER \leq 100\%$ maka diberi nilai 0.

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Variabel kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi investor dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar.

d. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah penggantian direksi perusahaan atau *Chief Executive Officer* (CEO) yang disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan mereka sendiri. Jika terjadi perubahan CEO maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika tidak terjadi perubahan CEO maka diberi nilai 0.

e. Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan yang diauditnya. Apabila perusahaan menerima opini *unqualified* dan *unqualified with explanatory*

paragraph diberi nilai 1, sedangkan nilai 0 diberikan apabila perusahaan menerima opini selain *unqualified*.

3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi

logistik. Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik ini adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2011).

Tabel 3.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Sampel
Jumlah perusahaan manufaktur	140
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan keuangan auditan selama periode 2012-2014	(9)
Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporannya dalam Rupiah	(29)
Perusahaan manufaktur yang tidak memenuhi kriteria penelitian	(3)
Jumlah perusahaan sampel	99
Tahun pengamatan (tahun)	3
Jumlah sampel selama periode penelitian	297

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016)

Tabel 3.2 Value of -2LogLikelihood

-2LogLikelihood	Value
Block 0	242.068
Block 1	223.944

Tabel 3.3 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fot Test

Chi-square	Sig.
3,772	0,877

Tabel 3.4 Cox and Snell R Square and Nagelkerke R Square

Cox and Snell R Sqaure	Nagelkerke R Square
0,059	0,106

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sun rage*, *kurtosis*

dan masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2011).

Screening Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel memiliki distribusi normal atau

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

tidak. Suatu model regresi yang baik adalah dimana semua datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah *screening* terhadap data yang akan diolah. Dalam penelitian ini terdapat variabel dummy dan rasio. Variabel dummy yaitu Ukuran KAP, *Financial Distress*, Pergantian Manajemen, Opini Audit dan *Auditor Switching*. Variabel rasio adalah Kepemilikan Institusional. Variabel rasio sebelum diolah datanya perlu di *screening* terlebih dahulu untuk mengetahui normalitas data tersebut. Variabel kepemilikan institusional memiliki skala rasio yang artinya variabel ini perlu untuk di *screening* data yang bertujuan untuk memastikan apakah variabel tersebut terdistribusi secara normal agar data tersebut dapat mewakili populasi yang diamati.

Model Regresi Logistik

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik yaitu dengan melihat pengaruh ukuran KAP, *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit terhadap *auditor switching* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{SWITCH} = \beta_0 + \beta_1 \text{UKAP} + \beta_2 \text{FD} + \beta_3 \text{KI} + \beta_4 \text{PM} + \beta_5 \text{OPINI} + e$$

Keterangan:

SWITCH : Auditor *Switching*

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien

UKAP : Ukuran KAP

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness and Fit Tests* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit model* tidak baik karena

FD : Kesulitan Keuangan Perusahaan
KI : Kepemilikan Institusional
PM : Pergantian Manajemen
OPINI : Opini Audit
e : Error

Menguji Keseluruhan Model (-2Log Likelihood (-2LL))

Langkah pertama adalah menilai *overall fit* model terhadap data. Beberapa *test* statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai *model fit* adalah: H0: Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

HA: Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data.

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar model *fit* dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood L* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, *L* ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$. Penurunan *likelihood* ($-2LL$) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data (Ghozali, 2011).

Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness and Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness and Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan *fit*).

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness and Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat

diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox dan Snell's R²* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke's R²* dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh ukuran KAP, *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit terhadap *auditor switching* dilakukan dengan menggunakan *wald test* ditujukan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika hasil *wald test* dari variabel independen menghasilkan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014 adalah 140 perusahaan. Ini berarti bahwa dari 140 perusahaan ada 420 pengamatan. Perusahaan manufaktur yang dapat dijadikan sampel penelitian adalah 99 perusahaan, seperti yang telah ditentukan hanya untuk perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan auditan selama periode 2012-2014, perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam Rupiah, dan perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria seperti menampilkan informasi yang lengkap mengenai ukuran KAP, *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit. Jumlah pengamatan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian adalah 297 pengamatan.

Analisis selanjutnya adalah pengujian model menggunakan 2LL, *Hosmer and Lemeshow's Goodness of*

Fit Test dan *Nagelkerke R Square*. Hasil dari uji -2LL ditampilkan pada tabel 3.2.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2LogLikelihood awal (*block number = 0*) dengan nilai -2LogLikelihood (-2LL) akhir (*block number = 1*). Jika nilai 2LogLikelihood awal (*block number = 0*) lebih besar dari nilai -2LogLikelihood akhir (*block number = 1*) maka H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga hipotesis model fit dengan data.

Tabel 3.2 menggambarkan nilai dari -2LogLikelihood awal atau sebelum variabel independen ditambahkan ke dalam model adalah 242.068. dan setelah variabel independen ditambahkan dalam model -2LogLikelihood, nilainya adalah 223.944. ini menunjukkan bahwa nilai -2LogLikelihood akhir menurun dibandingkan dengan nilai -2LogLikelihood awal. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 diterima dan H_A ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit dengan data.

Tabel 3.3 menggambarkan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Fit Test menghasilkan nilai sebesar 3,722 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,877 > 0,05. Jadi H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara model dan data. Ini menunjukkan model regresi logistik mampu memprediksi nilai pengamatan, sehingga model dapat diterima dan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa nilai *Cox and Snell R Square* adalah 0,059 dengan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,106 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 10,6%. Sisanya yaitu 89,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 4.1 Hasil Signifikansi Data

	B	Sig.
St X1	-.587	.002
ep X2	.211	.545
X3	-.001	.738
X4	.308	.574
X5	.443	.205
Constant	-1.261	.000

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran KAP yang memiliki nilai signifikan <0,05, jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Pengujian ini menunjukkan hasil yang signifikan dan arah hubungan negatif. Hal ini berarti hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan manufaktur yang menggunakan jasa auditor berafiliasi dengan *Big Four* cenderung tidak melakukan *switching*. Dalam penelitian ini besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan *KAP non Big Four*. Ukuran KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Perusahaan yang telah menggunakan jasa *KAP Big Four* cenderung akan tetap menggunakan jasa *KAP Big Four* karena dianggap memiliki kualitas audit yang

tinggi. Perusahaan berharap reputasi tinggi yang dimiliki oleh *KAP Big Four* akan menghasilkan reaksi positif dari investor. Hasil uji pada variabel *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit memiliki nilai signifikan >0.05. Ini mengindikasikan bahwa variabel *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam regresi logistik melalui *wald test*, dapat disimpulkan bahwa dari lima variabel independen, ukuran KAP, *financial distress*, kepemilikan institusional, pergantian manajemen dan opini audit, hanya variabel ukuran KAP yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*.

4.2.1 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Auditor Switching

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan regresi logistik ukuran KAP memiliki koefisien regresi negatif sebesar 1,587. Ukuran KAP memiliki nilai Sig sebesar 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka variabel independen ukuran KAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Ukuran KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Perusahaan yang telah menggunakan jasa *KAP Big Four* cenderung akan tetap menggunakan jasa *KAP Big Four* karena dianggap memiliki kualitas audit yang tinggi. Perusahaan berharap reputasi tinggi yang dimiliki oleh *KAP Big Four* akan menghasilkan reaksi positif dari investor. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susan dan Trisnawati (2011) dan Ekka Aprillia (2013) yang menunjukkan koefisien regresi bernilai negatif dan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

4.2.2 Pengaruh Financial Distress terhadap Auditor Switching

Berdasarkan hasil output pengujian regresi logistik dapat dilihat bahwa *financial distress* memiliki koefisien regresi 0,211. *Financial distress* memiliki nilai Sig sebesar 0,545 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka variabel independen *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini dapat terjadi karena sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan jasa audit *KAP Non Big Four* yang cenderung kurang independen dan dapat diajak untuk bekerjasama dengan memberikan opini sesuai keinginan manajemen sehingga perusahaan menganggap bahwa dengan melakukan *auditor switching* akan menghabiskan biaya besar terlebih lagi jika melakukan *auditor switching* ke *KAP Big Four* yang dapat membuat kondisi keuangan perusahaan semakin

menurun. Dengan dilakukannya *auditor switching* maka KAP yang baru akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami bisnis klien tersebut. Selain itu, perusahaan yang sering mengganti auditornya akan menimbulkan anggapan negatif dari pemegang saham. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Yanwar Titi Pratitis (2012) pada variabel *financial distress* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,246 yang lebih besar dari 0,0 menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Auditor Switching

Berdasarkan hasil output pengujian regresi logistik, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,001. Kepemilikan institusional memiliki nilai Sig 0,738 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini dapat terjadi disebabkan proporsi kepemilikan institusional perusahaan sampel memiliki rata-rata (*mean*) 5,927. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa sampel perusahaan manufaktur sahamnya sebagian dimiliki oleh institusi. Hasil dari penelitian ini menyatakan kepemilikan institusional bukan merupakan faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kistini dan Nahumury (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.2.4. Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching

Berdasarkan hasil output pengujian regresi logistik, dapat dilihat bahwa pergantian manajemen memiliki koefisien regresi positif 0,308. Pergantian manajemen memiliki nilai Sig sebesar 0,574 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka variabel independen pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini berarti hasil penelitian belum dapat membuktikan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian manajemen akan melakukan *auditor switching*. Selain itu pada kenyataannya, pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa suatu auditor. Dengan adanya pergantian manajemen baru, manajemen tersebut tidak semata-mata harus mengganti kebijakan perusahaan. Namun manajemen baru dapat melakukan penyesuaian kebijakan perusahaan sehingga auditor yang bekerja sama dengan perusahaan tidak harus diganti. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) bahwa pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*.

4.2.5 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Berdasarkan hasil output pengujian regresi logistik, dapat dilihat bahwa opini audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,443. Opini audit memiliki nilai Sig sebesar 0,205 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka variabel independen opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil pengujian yang tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* disebabkan karena pada umumnya perusahaan manufaktur dalam penelitian ini telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Di samping itu juga apabila terjadi *auditor switching*, opini yang diberikan auditor baru tidak jauh berbeda dari opini auditor sebelumnya, karena auditor baru akan mencari informasi atas opini yang diberikan oleh auditor lama. Dan perusahaan juga tidak mudah untuk melakukan *auditor switching* sekalipun perusahaan tersebut mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian karena perusahaan yang sering mengganti auditornya akan menimbulkan anggapan negatif dari pemegang saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013).

5. KESIMPULANDAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Auditor Switching. Pengaruh negatif ukuran KAP terhadap *auditor switching* menunjukkan perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP *Big Four* memiliki kemungkinan yang lebih

kecil untuk melakukan *auditor switching*.

2. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap Auditor Switching. Hasil penelitian ini menunjukkan *financial distress* tidak menjadi faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Kepemilikan institusional bukan merupakan faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

4. Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa suatu auditor.
5. Opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Opini yang diberikan auditor baru tidak jauh berbeda dari opini auditor sebelumnya, karena auditor baru akan mencari informasi atas opini yang diberikan oleh auditor lama.
1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu penelitian selama 4 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2014.
2. Objek penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang masuk ke dalam kelompok industri manufaktur saja.
3. Nilai *Nagelkerke R Square* yang kecil memperlihatkan bahwa variasi variabel independen hanya dapat sedikit menjelaskan variasi variabel dependen. Hal ini berarti banyak variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi *auditor switching*, namun tidak digunakan dalam penelitian ini.

Berikut beberapa keterbatasan hasil penelitian ini:

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya seperti berikut:

1. Menambah periode tahun penelitian sehingga diharapkan agar hasil penelitian dapat lebih memberikan keyakinan mengenai praktik *auditor switching*.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah jumlah sampel perusahaan yang cakupannya lebih luas.
3. Menambah variabel independen lain seperti reputasi auditor (Sinarwati 2010) dan *Company Growth* (Khasanah dan Nahumury 2013) yang diharapkan dapat lebih memprediksi terjadinya *auditor switching*.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia, Ekka. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching*.

Accounting Analysis Journal Vol. 1, No. 4, tahun 2013, Hlm 199-207.

Astrini, Nova Retno dan Dul Muid. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan *Auditor Switching* Secara *Voluntary*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 02, No. 03. Tahun 2013, Halaman 1-11.

Chow, C.W., & Rice, S.j. (1982). Qualified Audit Opinions and Share Prices: An Investigation. *Auditing: A Journal Practice and Theory* Vol 2, 50.

Divianto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan dalam Melakukan *Auditor Switch* (Studi Kasus: perusahaan Manufaktur di BEI). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Informasi*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Akuntansi*. Vol. 1, No. 2, Mei 2011. Hlm. 153-173
- George, N. (2005). *Auditor Rotation and the Quality of Audits*. The CPA Journal, Vol. 74, No.12.
- Ghazali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Prgoram IBM SPSS 19*. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julianti, Ni Wayan Ari, dan Ni Ketut Rasmini. 2013. *Auditor Switching dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. *E-Jurnal Akuntansi Univeristas Udayana* 3.3 (2013): 231-246
- Kristini, Dewi Sri dan Joicenda Nahumury. 2014. *The Effect of public Accounting Firm Size, Financial Distress, Institutional Ownership, and Management Change on The Audito Switching in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*. *The Indonesian Accounting Review* Vol. 4, No. 2, tahun 2014, pages 185-194.
- Kementrian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Kementrian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Kementrian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
- Lennox, C.S., & Pittman, J.A. (2011). *Voluntary Audits versus Mandatory Audits*. *American Acoounting Association: The Acoounting Review* Vol. 86, No. 5, 1655-1678.
- Pratitis, Yanwar Titi. 2012. *Auditor switching: Analisis Berdasarkan Ukuran KAP, Ukuran Klien dan Financial Distress*. *Accounting Analisis Journal* 1 (1) (2012).
- Robbitasari, Ainnurriszky Putrid an I Dewa Nyoman Wiratmaja. 2013. *Pengaruh Opini Audit Going Concern, Kepemilikan Institusional, dan Audit Delay pada Voluntary Auditor Switching*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Udayana 5.3 (2013): 652-665.
- Schwartz, K.B., & Menon, K (1985). *Auditor Switches by Failing Firms*. *The Accoutning Review* Vol. 60. *American Acoounting Association*, 248-261
- Siao Fen. (2009). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern dan Konsekuensinya Terhadap Auditor Switching*. Skripsi S1. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Sinarwati, Ni Kadek 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan*

- Publik.Akuntabilitas Vol. 9,
No. 2. Maret 2009
- Suparlan dan Wuryan Andyani.2010.
Analisis Empiris Pergantian
Kantor Akuntan Publik
Setelah Ada Kewajiban
Rotasi Audit.*Simposium
Nasional Akuntansi
13.Purwokerto.*
- Susan dan Estralita Trisnawati. 2011.
Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Perusahaan
Melakukan Auditor Switch.
*Jurnal Bisnis dan
Akuntansi.*Vol. 13, No. 2,
131-144.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**TEORI INSTITUSI DAN SENJANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN DAERAH KOTA PADANG**

Fefri Indra Arza*), Erly Mulyani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

**Email: fefriarza@gmail.com*

ABSTRACT

The objective of this study is to provide a better understanding of how institutional theory such as task environment and institutional environment, and ethical position influence managers' budgetary slack creation. A total of 56 questionnaires were distributed to government managers in Kota Padang. Hypotheses testing using multiple regressions analysis to determine influence task environment and institutional environment and ethical position toward budgetary slack. The results discussed in this paper support institutional theoretical model for developing budgetary slack behavior in public sector organizations. Task environment and institutional environment toward budgetary slack influenced significantly. Further, this research provides evidence regarding the impact of ethical position in the relations among task environment, institutional environment and budgetary slack.

Key Words: Institutional Theory, Budgetary Slack, Task Environment, Institutional Environment, Ethical Position

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori institusi, seperti lingkungan tugas, lingkungan institusi dan posisi etis mempengaruhi pimpinan melakukan senjangan anggaran. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 56 kepada pejabat setingkat eselon di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh lingkungan tugas, lingkungan institusi dan posisi etis terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian mendukung bahwa model teori institusi bisa menjelaskan terjadinya perilaku senjangan anggaran pada organisasi sektor publik. Lingkungan tugas dan lingkungan institusi berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan posisi etis berdampak terhadap hubungan lingkungan tugas, lingkungan institusi dan senjangan anggaran.

Kata Kunci: Teori Institusi, Senjangan Anggaran, Lingkungan Tugas, Lingkungan Institusi, Posisi Etis

1. PENDAHULUAN

Sprinkle (2003) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai masalah etika yang hadir ketika seorang bawahan sengaja memilih untuk melaporkan secara keliru informasi aktual mereka kepada atasan. KPMG pada 2008-2009, melaporkan bahwa prevalensi perilaku yang tidak etis dalam organisasi adalah cukup tinggi. Karyawan yang disurvei, 74 persen melakukan perbuatan yang tidak etis dalam organisasi mereka. Selain itu, 46 persen karyawan melakukan kesalahan yang sifat kesalahannya parah dan berpotensi merugikan kepercayaan publik pada organisasi mereka. Dua bentuk yang paling umum dari kesalahan yang dilakukan adalah salah mengelola sumber daya organisasi dan kesalahan penanganan informasi pribadi. Kedua bentuk kesalahan tersebut berkaitan dalam penciptaan senjangan anggaran.

Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis menimbulkan ancaman signifikan bagi organisasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai motif potensial yang mempengaruhi perbuatan tidak etis terus dikaji. Konsisten dengan teori keagenan, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa preferensi kepentingan pribadi adalah alasan utama bahwa individu terlibat dalam perilaku tidak etis (Baiman, 1982; Eisenhardt, 1989). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa motif non-finansial juga mempengaruhi perilaku individu dalam cara yang signifikan secara ekonomi (Douglas and Wier, 2000; Hannan, 2005; Hartmann and Maas, 2010; Merchant, 1985; Stevens, 2002; Young, 1985). Luft (1997) dan Sprinkle (2003) menggambarkan pentingnya memahami dampak dari preferensi organisasi pada penilaian individu dan pengambilan keputusan

Luo (2005) menjelaskan bahwa pendekatan organisasional terkait perilaku senjangan anggaran merupakan hal yang penting dengan beberapa alasan yaitu

pertama, sebuah organisasi merupakan unit dasar terjadinya praktik senjangan anggaran. Kedua, organisasi bertanggung jawab untuk mengetahui penyebab sulitnya memberantas senjangan anggaran pada organisasi tersebut. Ketiga, organisasi merupakan jendela untuk melihat tingkat senjangan anggaran pada sebuah negara. Keempat, mengetahui dampak terjadinya senjangan anggaran pada level organisasi merupakan hal yang penting.

Model institusional menjelaskan bahwa terjadinya senjangan anggaran pada level organisasi sektor publik disebabkan oleh *task environment* yang tidak mendukung seperti pemahaman dan implementasi peraturan yang lemah, tidak adanya komitmen yang kuat dari pemimpin untuk memberantas praktik senjangan anggaran; serta *institutional environment* yang tidak transparan dan mempunyai sistem administrasi yang kompleks (Luo, 2005; Pillay and Kluvers, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa faktor organisasional yang mempengaruhi penilaian pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengaturan anggaran (senjangan anggaran). Secara khusus, penelitian ini menyelidiki dampak dari lingkungan tugas dan lingkungan institusi serta posisi etis pada keputusan manajer/pimpinan untuk melakukan senjangan anggaran.

Reformasi penganggaran pada sektor publik (pemerintahan) merupakan perubahan dari sistem anggaran tradisional (*traditional budget system*) ke sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budget system*). Perubahan sistem penganggaran tersebut merupakan konsep *New Public Management* (NPM). Mahmudi (2003) menyatakan bahwa penerapan konsep *New Public Management* menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Suartana (2010) menyatakan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja merupakan proses pembangunan yang efisien dan partisipatif dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Anggaran daerah disusun eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal. Namun, penilaian kinerja berdasarkan target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan senjangan anggaran demi jenjang karir yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, senjangan anggaran juga sering terjadi pada tahap perencanaan dan persiapan anggaran daerah, karena penyusunan anggaran seringkali didominasi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif, serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat (Kartiwa, 2004).

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonomi terus berupaya mencapai kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Namun dalam kenyataan ketergantungan pada pendaptan dari pusat masih cukup tinggi. Jika dibandingkan anggaran dan realisasi pendaptan daerah, terdapat beberapa item realisasi pendapatan lebih tinggi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini memproyeksikan kearah senjangan anggaran (*budgetary slack*) dimana realisasi pendapatan selalu lebih tinggi dari anggaran pendapatan daerah.

Penelitian ini membahas pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: (1) Apakah lingkungan tugas mempengaruhi keputusan senjangan anggaran? (2) Apakah lingkungan institusi mempengaruhi keputusan senjangan anggaran? (3) Apakah posisi etis mempengaruhi keputusan individu untuk menciptakan senjangan anggaran?

2. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Institusional dan Senjangan Anggaran

Model institusional Luo menjelaskan bahwa *task environment*

dan *institutional environment* akan memengaruhi individu dalam sebuah organisasi untuk melakukan tindakan curang (*malfeasant behaviour*). Tindakan curang (*malfeasant behavior*) memicu berkembangnya *deterrent outcomes* seperti kurangnya fokus dalam pencapaian strategi, organisasi menjadi lemah dan tidak mampu merespon lingkungannya dengan baik.

Organizational system dijelaskan oleh Luo sebagai alat untuk mencegah terjadinya praktik perilaku curang yang terdiri dari unsur *organizational culture*, *organizational structure* dan *compliance system*. *Organizational culture* adalah sebuah organisasi yang mempunyai landasan moral dalam setiap pengambilan keputusannya. *Organizational structure* bertujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi setiap perbuatan curang yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan *compliance system* disusun untuk mencegah praktik curang melalui penyusunan kode etik organisasi dan program antiperilaku curang.

Anggaran memiliki peranan penting sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendali. Anggaran digunakan untuk penetapan target, keputusan alokasi sumber daya, dan sebagai metode untuk mengevaluasi kinerja bawahan. Dalam pengaturan anggaran partisipatif, bawahan (yaitu, agen) diberikan tanggung jawab untuk menetapkan anggaran (Lindquist, 1995; Waller, 1988; Young, 1985). Menurut teori keagenan, dalam pengaturan tersebut sering ada asimetri informasi antara principal (superior) dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Adanya asimetri informasi menyebabkan bawahan memiliki informasi yang lebih banyak daripada atasan. Oleh karena itu, bawahan memiliki kesempatan untuk menggunakan informasi pribadi mereka, seperti anggaran digunakan dalam berbagai cara, yaitu bawahan mungkin memiliki insentif untuk mengatur

anggaran oportunistik melalui penciptaan senjangan anggaran.

Senjangan anggaran adalah perbedaan antara informasi aktual bawahan dan apa yang bawahan pilih untuk diungkapkan kepada atasan (Sprinkle, 2003). Senjangan anggaran juga bisa terjadi jika bawahan sengaja memberikan target anggaran bias dalam rangka meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan anggaran. Misalnya, bawahan mungkin memiliki kemampuan bahwa tingkat output tertentu dapat dicapai, namun, bawahan menetapkan target yang dianggarkan pada tingkat output yang lebih rendah untuk memastikan bahwa target terpenuhi.

2.2 Motivasi Senjangan Anggaran

Seringkali, manajer membuat senjangan anggaran dengan cara yang konsisten dengan kepentingan diri mereka. Misalnya, senjangan dibuat untuk meningkatkan evaluasi kinerja mereka sehingga mereka dapat mempertahankan atau meningkatkan kompensasi mereka. Teori keagenan sering digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan mengapa individu terlibat dalam perilaku oportunistik (Baiman, 1982; 1990; Eisenhardt, 1989). Teori keagenan tradisional mengasumsikan bahwa individu hanya memanfaatkan preferensi kekayaan dalam fungsi pengambilan keputusan. Ketika bawahan memiliki akses ke informasi pribadi dan kesempatan untuk mengaburkan dari organisasi, teori keagenan memprediksi bahwa kepentingan diri sendiri akan memotivasi bawahan untuk terlibat dalam senjangan anggaran untuk memaksimalkan kepentingannya.

Sementara teori keagenan menunjukkan bahwa kepentingan diri adalah motivasi utama untuk penciptaan senjangan anggaran oleh bawahan, penelitian sebelumnya juga menemukan faktor-faktor yang berkontribusi pada penciptaan senjangan anggaran. Faktor-faktor tersebut meliputi keberadaan

asimetri informasi dan risiko preferensi (Young, 1985), tingkat keterlibatan individu dalam proses penganggaran (Hartman and Maas, 2010; Merchant, 1985; Young, 1985), tingkat di mana keputusan penganggaran yang dibuat (Kohlmeyer and Hunton, 2004), jenis skema gaji (Waller, 1998), kepedulian terhadap reputasi (Webb, 2002), dan jenis umpan balik kinerja (Young, Fisher, and Lindquist, 1993). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepentingan diri sendiri, preferensi sosial, faktor organisasional dan nilai-nilai etis berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan yang terkait dengan praktek-praktek anggaran.

2.3 Ethical Ideology

Individu sering berbeda dalam persepsi apakah praktek tertentu etis atau tidak etis. Forsyth (1980, p. 183) mengusulkan tipologi ideologi etis untuk menjelaskan variasi antara penilaian moral individu berdasarkan pernyataan bahwa "pada umumnya orang mengambil sikap tertentu mengenai etika dan bahwa posisi yang diambil akan mempengaruhi penilaian yang diambil." Dalam Forsyth tipologi, posisi etika individu didasarkan pada dua faktor, relativisme dan idealisme.

Menurut Forsyth (1980), relativisme berkaitan dengan tingkat ketergantungan pada prinsip-prinsip moral universal atau aturan untuk mengarahkan respon yang benar untuk masalah etika. Individu dengan relativisme yang tinggi menolak ide mengandalkan aturan universal. Sebaliknya, individu dengan relativisme yang tinggi percaya bahwa ada perspektif alternatif yang dapat didukung untuk mencapai penilaian moral. Dengan kata lain, individu yang tinggi dalam relativisme merasa bahwa respon moral yang benar adalah konteks tertentu. Oleh karena itu, daripada menggunakan aturan universal untuk setiap masalah etika, seorang relativis tinggi akan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

menganalisis setiap masalah untuk menentukan aturan untuk berasumsi untuk memecahkan setiap situasi. Sebaliknya, relativis rendah percaya pada validitas aturan universal dan percaya bahwa aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten tanpa variasi berdasarkan faktor-faktor situasional tertentu. Untuk menggambarkan, contoh aturan moral universal, pencurian adalah sesuatu yang salah secara moral. Sebuah relativis tinggi akan berpendapat bahwa beberapa konteks membenarkan pencurian sebagai tindakan yang dapat diterima secara moral, sementara relativis rendah akan berpendapat bahwa pencurian adalah salah dalam konteks apapun.

Faktor kedua tipologi Forsyth adalah idealisme. Idealisme berkaitan dengan keyakinan seseorang dalam hubungan antara tindakan moral dan hasil. Seorang idealis percaya bahwa tindakan yang benar secara moral selalu menghasilkan hasil yang positif dan tindakan yang salah secara moral selalu menghasilkan hasil negatif. Sebaliknya, orang yang kurang idealis percaya bahwa tindakan moral dan tidak bermoral dapat menghasilkan kombinasi hasil yang positif dan negatif. Idealisme juga dapat diartikan relatif terhadap tingkat kepedulian individu untuk kesejahteraan orang lain (Forsyth, 1992). Misalnya, biaya penelitian dan pengembangan dapat dipotong untuk mengelola laba untuk periode tersebut. Idealis akan melihat manajemen laba menghasilkan hasil yang negatif karena akan merugikan kesejahteraan orang lain (misalnya, kekayaan jangka panjang pemegang saham). Oleh karena itu, individu idealis akan selalu menghindari terlibat dalam manajemen laba tersebut. Sebaliknya, non idealis menganggap bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan hasil positif dan negatif. Dengan demikian, seorang non idealis mungkin melihat bahwa meskipun kekayaan jangka panjang pemegang saham mungkin

turun, tujuan keuntungan jangka pendek akan tercapai, yang mungkin memiliki dampak positif pada kesejahteraan orang lain seperti kenaikan harga saham jangka pendek bagi para pemegang saham, kinerja karyawan dievaluasi berdasarkan pada target laba sehingga menerima bonus, atau bahkan mungkin mempertahankan pekerjaan mereka. Individu non-idealis mungkin terlibat dalam bentuk manajemen laba jika mereka melihatnya sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang positif bagi kepentingan pribadi.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Institusional Teori dan Senjangan Anggaran

Luo (2002) menjelaskan bahwa *task environment* terdiri dari informasi, sumberdaya eksternal atau kondisi-kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian strategi (anggaran). Adanya konsentrasi kekuatan pada pemerintah (organisasi) dan pengawasan regulasi yang lemah, memungkinkan agen pemerintah untuk mengintervensi kebijakan dan akses terhadap sumber daya. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya celah bagi para pelaku senjangan anggaran untuk bekerjasama dalam upaya mencapai keuntungan individu.

Institutional environment terdiri dari tiga elemen yaitu transparansi, keadilan dan kompleksitas. Transparansi merupakan tingkat keterbukaan dan kemudahan dalam memahami aturan-aturan yang berlaku. Luo berpendapat bahwa aturan yang ambigu akan memberikan kesempatan kepada agen pemerintah untuk melakukan senjangan anggaran dengan memanfaatkan kelemahan tersebut. Keadilan menjelaskan sebuah aturan dapat ditegakkan dan diberlakukan secara adil dan tidak ada diskriminasi dalam implementasinya. Sedangkan kompleksitas adalah sistem aturan dan lingkungan sosial kultural yang sulit dimengerti, sehingga memicu seseorang

untuk berbuat curang (Luo, 2002; Pillay and Kluvers, 2014). Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Lingkungan Tugas (*Task environment*) berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran.
- H2: Lingkungan Institusi (*Institutional environment*) berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran.

2.4.2 Ideologi Etis dan Senjangan

Anggaran

Studi sebelumnya menjelaskan bahwa ideologi etis individu mempengaruhi penilaian mereka dari praktek-praktek bisnis yang etis dan tidak etis dan menentukan apakah mereka bersedia untuk terlibat dalam praktek tersebut (Barnett et al, 1994; Forsyth, 1992). Misalnya, Arrington dan Reckers (1985) menemukan hubungan yang signifikan antara posisi etika dalam keputusan penggelapan pajak. Shaub, Finn and Munter (1993) meneliti efek dari ideologi etis auditor pada sensitivitas etis dan menemukan bahwa auditor yang relativisme cenderung untuk mengenali masalah etika dalam tugas audit mereka. Selain itu, Greenfield, Norman and Wier (2008) menemukan bahwa individu idealis cenderung terlibat dalam praktik manajemen laba daripada individu relativistik. Elias (2002) menemukan bahwa absolutis dan Situasionis melihat manajemen laba sebagai isu etis lebih parah dari exceptionists dan subjektivis.

Senjangan anggaran terjadi ketika bawahan sengaja memilih untuk menahan informasi yang akurat dari atasan mereka (Sprinkle, 2003; Merchant, 1995; Merchant dan Manzoni, 1989). Senjangan anggaran sering menimbulkan konsekuensi negatif bagi organisasi (Sprinkle, 2003; Merchant, 1995). Merchant (1995, p. 2) menyatakan bahwa penciptaan senjangan anggaran melanggar "norma yang berhubungan

dengan peran dan kebajikan yang diinginkan manajer profesional dan akuntan." Oleh karena itu, penciptaan senjangan anggaran adalah dilema etika, yang menggabungkan penilaian moral individu (Douglas dan Wier, 2000). Berdasarkan hubungan antara ideologi etis dan dilema etika diamati dalam berbagai aspek praktik bisnis, posisi etika individu diharapkan untuk mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam penciptaan senjangan anggaran. Oleh karena itu, ideologi etis diharapkan untuk memoderasi dampak lingkungan tugas dan lingkungan institusi pada perilaku penciptaan senjangan anggaran.

Secara umum, idealisme tinggi dan relativisme rendah diharapkan akan berkorelasi negatif dengan penciptaan senjangan anggaran. Oleh karena itu, absolutis (idealisme tinggi dan relativisme rendah) diharapkan dapat menekan untuk terjadinya senjangan anggaran dibandingkan pada situasionis (idealisme tinggi dan relativisme yang tinggi), subjektivis (idealisme rendah dan relativisme tinggi), dan exceptionists (idealisme rendah dan relativisme rendah). Absolutis memanfaatkan prinsip-prinsip moral universal, yang kemungkinan akan menyatkan bahwa oportuniste dan ketidaktepatan adalah perilaku salah. Selain itu, absolutis akan menghindari tindakan yang menghasilkan hasil negatif, seperti hasil negatif yang terkait dengan senjangan anggaran bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

- H3: Posisi etis idealisme yang tinggi bisa menekan terjadinya perilaku senjangan anggaran
- H4: Posisi etis relativisme yang tinggi bisa meningkatkan terjadinya perilaku senjangan anggaran

Faktor yang menarik dalam penelitian ini adalah posisi etis. Teori ideologi etika Forsyth (1980)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

menunjukkan bahwa individu mengambil sikap tertentu mengenai etika didasarkan pada dua faktor, relativisme dan idealisme. Teori ini menunjukkan bahwa posisi etika individu akan mempengaruhi penilaian moral dan perilaku. Douglas dan Wier (2000) menemukan hubungan positif antara slack anggaran dan relativisme sedangkan mereka menemukan hubungan negatif antara idealisme dan penciptaan senjangan anggaran. Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan memeriksa apakah posisi etika memoderasi pengaruh lingkungan tugas dan lingkungan organisasi pada perilaku manajer/pimpinan melakukan senjangan anggaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Metode pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas atau pemilihan nonrandom berupa *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah SKPD yang terlibat dalam menentukan anggaran pendapatan daerah. Hal ini dengan pertimbangan bahwa SKPD tersebut merupakan *revenue centre*, dimana mereka merupakan SKPD yang mempunyai tanggung jawab menghasilkan pendapatan asli daerah.

3.2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui *self-administered survey* dengan menggunakan jasa kurir. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan pada setiap SKPD yang dijadikan sampel yang menduduki jabatan eselon. Penentuan responden didasari bahwa

pejabat level eselon tersebut terlibat dalam penentuan anggaran pendapatan daerah. Jumlah responden yang dikirim kuesioner adalah 85 orang. Pengumpulan data memerlukan waktu 20 hari, sampai batas waktu pengumpulan kuesioner terkumpul sebanyak 56 eksemplar kuesioner. Hal ini menggambarkan cukup tingginya *respon rate* responden yaitu 65,88%. Tabel berikut ini menggambarkan profil responden yang memberikan respon atas kuesioner penelitian ini.

Tabel 3.1 Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Persen
Total responden	56	100,0
Jenis kelamin:		
Laki-laki	42	75
Perempuan	14	25
Jabatan saat ini:		
Eselon II	3	5,3
Eselon III	16	28,6
Eselon IV	37	66,1
Lama masa kerja:		
Kurang dari 10 tahun	6	10,7
10 s.d 15 tahun	20	35,7
Lebih dari 15 tahun	30	53,6
Pendidikan:		
Ekonomi	15	26,8
Non Ekonomi	41	73,2

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas memberikan gambaran karakteristik responden pada penelitian ini. Jumlah responden yang memberikan respon atas kuesioner yang dikirimkan berjumlah 56 orang. Jenis kelamin responden lebih dominan laki-laki yaitu, 42 orang atau 75%. Sebagian besar responden menduduki jabatan sebagai pejabat eselon 4, yaitu sebesar 66,1%. Komposisi responden dilihat dari lamanya masa kerja sebagian besar, yaitu 53,6% bekerja lebih dari 15 tahun. Latar belakang pendidikan responden 73,2% non ekonomi.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Senjangan Anggaran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah senjangan anggaran. Senjangan Anggaran adalah selisih antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dan jumlah estimasi terbaiknya yang bisa dicapai, supaya bawahan lebih mudah mencapai target anggaran. Indikator pengukuran variabel senjangan anggaran antara lain standar anggaran, tuntutan anggaran, dan sasaran anggaran. Instrumen penelitian diadopsi dari penelitian terdahulu (Dunk, 1993), dengan 6 item pernyataan, semua item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala *likert*, skor 1 diberikan untuk menilai jawaban sangat tidak setuju, dan skor 5 untuk jawaban sangat setuju.

3.3.2 Lingkungan Tugas dan Lingkungan Institusi

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *task environment* dan *institutional environment* sebagai variabel independen untuk mengukur penyebab terjadinya senjangan anggaran pada organisasi sektor publik. Model penelitian tersebut dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Luo (2005) dan Pillay dan Kluvers (2014). Lingkungan tugas (*task environment*) dijelaskan dengan 7 item pertanyaan, dan lingkungan institusi (*institutional environment*) dengan 8 item pertanyaan. Semua item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala *likert*, skor 1 diberikan untuk menilai jawaban sangat tidak setuju, dan skor 5 untuk jawaban sangat setuju.

3.3.3 Posisi Etis

Pengukuran variabel independen ini akan menggunakan Posisi Etis Questionnaire (EPQ) yang dikembangkan oleh Forsyth (1980). Kuesioner ini telah digunakan secara luas dalam penelitian

sebelumnya untuk mengukur posisi etika responden (misalnya, Arrington dan Reckers, 1985; Douglas dan Wier, 2000; Elias, 2002; Greenfield, Norman dan Wier, 2008; Shaub, Finn dan Munter, 1993). The EPQ terdiri dari dua set 10 pernyataan untuk mengukur idealisme dan relativisme. Peserta memberikan tanggapan mereka atas pernyataan EPQ pada skala Likert 5 poin, dimana 1 mewakili "sepenuhnya setuju" dan 5 mewakili "benar-benar tidak setuju".

3.4 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk menjamin kualitas data yang diperoleh melalui kuesioner. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan handal jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.60.

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Senjangan Anggaran	0,822	Reliabel
Lingkungan Tugas	0,807	Reliabel
Lingkungan Institusi	0,769	Reliabel
Posisi Etis Idealisme	0,881	Reliabel
Posisi Etis Relativisme	0,781	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan indikator nilai *Cronbach's Alpha*, memperlihatkan bahwa seluruh variabel reliabel. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil pengujian validitas variabel lingkungan tugas, lingkungan institusi, posisi etis dan senjangan anggaran mempunyai nilai r

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

hitung lebih besar dari r tabel (0,218) sehingga keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid.

Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda, setelah melalui uji asumsi klasik, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel lingkungan tugas, lingkungan institusi dan posisi etis terhadap senjangan anggaran. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini prosesnya menggunakan

bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 15.0 for windows*.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Untuk menggambarkan suatu data variabel yang diteliti akan dilakukan deskripsi data. Berikut ini akan diuraikan deskripsi dari data setiap variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation
Senjangan Anggaran	4,20	.519
Lingkungan Tugas	4,16	.532
Lingkungan Institusi	4,05	.698
Posisi Etis Idealisme	4,40	.494
Posisi Etis Relativisme	4,21	.828

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Variabel senjangan anggaran memiliki skor rata-rata 4,20 dengan deviasi standar 0,519. Deviasi standar variabel ini cukup rendah karena hanya sekitar 12% dari nilai rata-ratanya. Kelompok variabel yang mempengaruhi senjangan anggaran terdiri dari lingkungan tugas, lingkungan institusi, posisi etis idealisme dan posisi etis relativisme dimana deviasi standar

variabel-variabel tersebut juga rendah, dengan nilai masih di bawah 20% dari nilai rata-ratanya,

4.2 Pengujian Hipotesis

Tabel berikut memberikan ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 15.0 for Windows*.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi

	Koefisien (B)	Signifikansi (p-value)	Keterangan
Lingkungan Tugas	.316	.016	diterima
Lingkungan Institusi	.226	.008	diterima
Posisi Etis Idealisme	-.449	.004	diterima
Posisi Etis Relativisme	.196	.001	diterima

$Adjusted R^2 = 0,684$ $F = 30,724$ $p\text{-value} = .000$

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil komputasi yang diringkaskan dalam tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi untuk model regresi berganda ini cukup tinggi, bisa dilihat dari nilai $Adjusted R^2$ sebesar 0,684. Angka koefisien ini menggambarkan bahwa 68,4% variasi

senjangan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel bebas; lingkungan tugas, lingkungan institusi, posisi etis idealisme dan posisi etis relativisme yang dimasukkan dalam model. Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat dapat dilihat dari hasil uji

ANOVA. Tabel di atas menyajikan nilai F hitung sebesar 30,724 dengan probabilitas (*p-value*) 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari *alpha* 0,05 maka disimpulkan variabel bebas secara bersama-sama yang terdiri dari lingkungan tugas, lingkungan institusi, posisi etis idealisme dan posisi etis relativisme mempengaruhi variabel terikat senjangan anggaran.

Untuk menjawab hipotesis penelitian bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, dapat dilihat dari hasil uji statistik t. Tabel 4 di atas memperlihatkan hasil uji signifikansi variabel bebas secara individual, yang mana seluruh variabel bebas signifikan mempengaruhi senjangan anggaran

4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya senjangan anggaran pada organisasi sektor publik dengan menggunakan Teori Institusi yang menjelaskan faktor lingkungan (*task environment dan institutional environment*) mendasari terjadinya senjangan anggaran. Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan tugas berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran berhasil terdukung secara statistik. Nilai koefisien untuk variabel lingkungan tugas sebesar 0,316 dan nilai signifikansinya adalah $0,016 < \alpha = 0,05$ (tabel 4).

Sedangkan hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa lingkungan institusi berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran berhasil terdukung secara statistik. Pada tabel 4 terlihat nilai koefisien dan signifikansi untuk variabel ini adalah 0,226 dan $0,008 < \alpha = 0,05$. Hasil ini memberikan bukti empiris terhadap model institusional yang dikemukakan oleh Luo (2002) dan dikembangkan oleh Pillay dan Kluvers (2014) dengan mengambil latar belakang studi pada perilaku senjangan anggaran

pada pemerintahan daerah Kota Padang. *Task Environment* seperti kontrol terhadap regulasi, ketidakpastian struktur, pemusatan kekuatan pada kelompok tertentu dan *Institutional Environment* seperti transparansi, keadilan, kompleksitas institusi dapat memengaruhi terjadinya senjangan anggaran dalam konteks organisasi sektor publik.

Hipotesis ketiga (H3) dan keempat (H4) melihat pengaruh posisi etis terhadap perilaku senjangan anggaran. Hipotesis ketiga menyatakan posisi etis idealisme yang tinggi bisa menekan terjadinya perilaku senjangan anggaran berhasil terdukung secara statistik. Nilai koefisien untuk variabel posisi etis idealisme sebesar $-0,449 < \alpha = 0,05$ (tabel 4). Sedangkan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa posisi etis relativisme yang tinggi bisa meningkatkan terjadinya perilaku senjangan anggaran berhasil terdukung secara statistik. Pada tabel 4 terlihat nilai koefisien 0,196 dan nilai signifikansi untuk variabel ini adalah $0,001 < \alpha = 0,05$.

Temuan hipotesis 4 membuktikan individu dengan posisi etis idealisme adalah individu yang menghindari perilaku yang salah (senjangan anggaran). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Douglas dan Wier (2000), yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara posisi etis idealisme dan niat untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan kemampuan terbaik yang bisa diperoleh. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi organisasi sektor publik (pemerintahan) bahwa karakteristik idealis akan mempertimbangkan perilaku senjangan anggaran sebagai tindakan tidak etis karena tindakan keputusan senjangan anggaran akan menyebabkan konsekuensi negative bagi bagi organisasi. Sedangkan untuk posisi etis relativisme, menunjukkan bahwa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

relativisme adalah faktor signifikan bagi perilaku senjangan anggaran. Hasilnya selaras dengan penelitian Douglas dan Wier (2000). Secara khusus, semakin tinggi posisi etis relativisme individu semakin tinggi pula perilaku senjangan anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Teori institutional dapat menjelaskan terjadinya senjangan anggaran pada level organisasi, yaitu dengan memberikan bukti secara empiris bahwa faktor lingkungan tugas (*task environment*) dan lingkungan institusional (*institutional environment*) mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran dalam organisasi sektor publik.
2. Posisi etis berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran, dimana posisi etis idealisme yang tinggi bisa menekan terjadinya senjangan anggaran dan posisi etis relativisme yang tinggi mendorong terjadinya senjangan anggaran.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah responden yang terbatas pada satu kota. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah sampel penelitian dengan melibatkan responden dari tiap kabupaten kota atau provinsi dan lintas departemen/dinas sehingga akan menambah tingkat generalisasi hasil penelitian. Penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan pendekatan eksperimen dalam pendekatan penelitian tentang senjangan anggaran.

5.3 Saran dan Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian ini menarik bagi praktisi dan pemangku kepentingan organisasi sektor publik

(pemerintahan) karena hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai dampak faktor lingkungan organisasi memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku senjangan anggaran. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa perilaku senjangan anggaran dapat diminimalkan dengan menanamkan nilai-nilai etis idealisme bagi anggota organisasi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrington, C. E., and Reckers, P. (1985). A social-psychological investigation into perceptions of tax evasion. *Accounting and Business Research*, 15(59), 163-176.
- Baiman, S. (1982). Agency research in managerial accounting: A survey. *Journal of Accounting Literature*, 1, 154-213.
- _____(1990). Agency research in managerial accounting: A second look. *Accounting, Organizations and Society*, 15, 341-371.
- Barnett, T., Bass, K., and Brown, G. (1994). Ethical ideology and ethical judgment regarding ethical issues in business. *Journal of Business Ethics*, 13(6), 469-480.
- Douglas, P. C., and Wier, B. (2000). Integrating ethical dimensions into a model of budgetary slack creation. *Journal of Business Ethics*, 28, 267-277.
- Dunk, A. S. 1993. The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation

- Between Budgetary Participation and slack. *The Accounting Review*, 68,400-410.
- Elias, R. Z. (2002). Determinants of earnings management ethics among accountants. *Journal of Business Ethics*, 40(1), 33.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Forsyth, D. R. (1980). A taxonomy of ethical ideologies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(1), 175-184.
- _____.(1992). Judging the morality of business practices: The influence of personal moral philosophies. *Journal of Business Ethics*, 11(5-6), 461-470.
- Greenfield, A. C., Norman, C.S., and Wier, B. (2008). The effect of ethical orientation and professional commitment on earnings management behavior. *Journal of Business Ethics*, 83(3), 419-434.
- Hannan, R. L. 2005. The combined effect of wages and firm profit on employee effort. *The Accounting Review*. 80(1), 167-189.
- Hartmann, F. G. H., and Maas, V. S. (2010). Why business unit controllers create budget slack: Involvement in management, social pressure, and machiavellianism. *Behavioral Research in Accounting*, 22(2), 27-49.
- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4), 305-360.
- Kartiwa, H. A. 2004. *Proses Penyusunan Anggaran (APBD) dan Arah Kebijakan Umum*, Makalah. Sukabumi, 8 Desember 2004.
- Kohlmeyer, J. M., and Hunton, J. E. (2004). Budgetary slack creation and task performance: Comparing individuals to collective units. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 7, 97-122.
- Lindquist, T. M. (1995). Fairness as an antecedent to participative budgeting: Examining the effects of distributive justice, procedural justice and referent cognitions on satisfaction and performance. *Journal of Management Accounting Research*, 7, 122-147.
- Luo, Y. 2002. Corruption and Organization in Asian Management Systems. *Asia Pacific Journal of Management*, 19, 405-422.
- Luft, J. L. (1997). Fairness, ethics and the effect of management accounting on transaction costs. *Journal of Management Accounting Research*, 199-216.
- Mahmudi, 2003. New Public Management (NPM); Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi. Kajian Bisnis dan Manajemen*, 6 (1) , 69-79.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Merchant, K. A. (1985). Budgeting and the propensity to create budgetary slack. *Accounting, Organizations and Society*, 10(2), 201-210.
- _____. (1995). Ethical issues related to "results-oriented" management control systems, in *Ethical Issues in Accounting: Proceedings of the Professionalism and Ethics Seminar*. Professionalism and Ethics Committee of the American Accounting Association. St. Charles, IL, June 2-4, 1995.
- Merchant, K. A., and Manzoni, J. F. (1989). The achievability of budget targets in profit centers: a field study. *The Accounting Review*, 64, 539-558.
- Pillay, S., dan Kluvers, R. 2014. An Institutional Theory Perspective on Corruption : The Case of a Developing Democracy. *Financial Accountability and Management* 30(1) :95-119.
- Shaub, M. K., Finn, D. W., and Munter, P. (1993). The effects of auditors' ethical orientation on commitment and ethical sensitivity. *Behavioral Research in Accounting*, 5, 145-169.
- Sprinkle, G. B. (2003). Perspectives on experimental research in managerial accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 287-318.
- Stevens, D. E. (2002). The effects of reputation and ethics on budgetary slack. *Journal of Management Accounting Research*, 14, 153-171.
- Suartana, I. W. 2010. *Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Waller, W. S. (1988). Slack in participative budgeting: The joint effect of a truth-inducing pay scheme and risk preferences, *Accounting, Organizations and Society*, 13(1), 87-98.
- Webb, R. A. (2002). The impact of reputation and variance investigations on the creation of budget slack. *Accounting, Organizations and Society*, 27, 361-378.
- Young, S. M. (1985). Participative budgeting: the effects of risk-aversion and symmetric information on budgetary slack. *Journal of Accounting Research*, 23, 829-842.
- Young, S. M., Fisher, J. G., and Lindquist, T. M. (1993). The effects of intergroup competition and intragroup cooperation on slack and output in a manufacturing setting. *The Accounting Review*, 68, 466-481.

**ANALISIS PEMBANGUNAN REGIONAL
MELALUI INTEGRASI SEKTOR EKONOMI PRIMER,
INDUSTRI DAN KEUANGAN (STUDI KASUS DI JAWA
BARAT MELALUI INPUT-OUTPUT ANALYSIS)**

Fryanto Anugrah Rhamdhani*), Billi Arifauzan, Wahyu Ramadhan

Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

*Email: fryyanto007@gmail.com

ABSTRACT

Every region has a potential of economic sectoral for a economic acseleration. In West Java the industrial of sectoral has contributed successively for GDP period 2011-2013 in West Java. It was recorded at 2013 369.830.981/million than agriculture sector. At the same time agriculture sector has a low output GDP than industrial, it proven inequality growing economic sector. The other side incresing financial sector able to support financial for these sector, eventually increasing both industrial and agriculture sector. The aim this study analysis interconection between manufacture, agriculture and financial sectoral. We used descriptive analysis through input-output matrix tabel in West Java period 2010 and likewise we have RAS method for renew matrix tabel in 2013. Afthur Lewis has revealed that agriculture sector was not applied technology for processing output, as result agriculture sector lower than industrial. According matrix tabel result showing industrial has a high pull factor 97.24 unit than other sector. The Industrial sector can increasing upstream sector outputthrough changging raw material become value added and likewise the most highest power deployment in financial sector 30.5 unit. As result I-O was proven agriculture sector can not increasing downstream sector. Based on the lingke financial sector show backward lingke 1.02, while manufacture show a high forward lingke 3.24. In line with the oppinion of Lewis Industrial sector applied hightech able resulting a faster outputand impact for other sector. Financial sector is expected able growing agriculture sector output, it cause financial sector has a high backward lingke after communication and transport.

Key Words: Industrial, Financial, Agriculture, Pull Factor, Power Deployment.

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki suatu potensi sektor ekonomi untuk kemajuan suatu perekonomian. Di Jawa Barat industri berkontribusi sangat besar untuk 3 tahun berturut-turut (2011-2013). Tahun 2013 sektor industri telah mencapai 369.830.981/juta. Di waktu yang sama sektor primer memiliki sumbangan gross domestik produk yang lebih rendah dengan sektor industri. Mengindikasikan adanya ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi sektor primer dan sektor industri. Di lain sisi meningkatnya sektor keuangan membantu keuangan bagi kedua sektor tersebut, pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dari sektor keuangan dan sektor industri. Tujuan penelitian ini menganalisis keterkaitan antara sektor

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Industrial, Primer dan keuangan. Kami melakukan analisis deskripsi melalui tabel matriks input-output di Jawa Barat pada periode 2013 dan menggunakan metode RAS untuk mengestimasi periode 2013. Aftur Lewis mengungkapkan sektor primer tidak menerapkan teknologi dalam suatu proses sehingga output lebih rendah disandingkan sektor industri. Berdasarkan tabel matriks, industri memiliki daya tarik yang tinggi sebesar 97.24 unit. Sektor Industri dapat meningkatkan output sektor hulu merubah bahan baku mentah menjadi barang yang bernilai dan demikian juga sektor finansial memiliki daya sebar yang paling tinggi sebesar 30.5 unit. Sebagai hasil dari tabel matriks input-output telah dibuktikan bahwa sektor primer tidak mampu meningkatkan sektor hilir. Berdasarkan keterkaitan sektor finansial memiliki backward lingke yakni 1.47, sementara industri memiliki forward lingke yang tinggi sebesar 3.24. Sejalan dengan opini Lewis sektor industrial telah menerapkan teknologi yang tinggi sehingga menghasilkan output yang cepat dan berdampak pada sektor lainnya. Sektor keuangan diharapkan mampu membantu meningkatkan output sektor primer, dikarenakan sektor keuangan memiliki backward lingke yang tinggi setelah sektor komunikasi dan pengangkutan.

Kata Kunci: Industri, Keuangan, Primer, Daya Tarik, Daya Sebar.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi memberikan ruang kepada masing-masing daerah guna melakukan pembangunan ekonomi guna mensejahterakan rakyat melalui potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah diharapkan mampu membangun sektor-sektor strategis.

Setiap daerah memiliki corak paradigma pembangunan yang berbeda-beda. Nampaknya saat ini daerah lebih menekankan pada paradigma pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui Industrialiasasi. Salah satunya yang terjadi daerah Jawa Barat dimana dapat dilihat dari total sumbangan Gross Domestik Produk berdasarkan lapangan sektor ekonomi.

Tabel 1.1 Sumbangan GDP Berdasarkan Lapangan Usaha tahun 2013

No	Lapangan Usaha	Sumbangan GDP 2013	Sumbangan GDP 2010	Pertumbuhan GDP(%) 2013-2010
1	Pertanian	127.884.693	104.557.476	0.22%
2	Pertambangan dan Penggalian	18.608.261	17.362.819	0.07%
3	Industri Pengolahan	369.830.981	319.983.632	0.16%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	29.190.228	21.943.285	0.33%
5	Bangunan/Kontruksi	47.133.450	35.034.275	0.35%
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	261.537.327	194.615.660	0.34%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	87.721.801	66.336.419	0.32%
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	32.212.810	24.479.916	0.32%
9	Jasa-jasa	95.057.585	77.921.093	0.21%

Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Industri Pengolahan memberikan sumbangan cukup besar terhadap GDP Jawa Barat. Meski pertumbuhan Sektor Industri dari tahun 2010-2013 naik sebesar 0.16% dan pada sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0.22% akan tetapi tetap sektor Industri memegang sumbangan yang besar terhadap perekonomian Jawa Barat. Berbeda dengan sektor lainnya mengalami pertumbuhan meski sumbangan terhadap GDP Jawa Barat tidak sebesar sektor Industri. Pertumbuhan sektor Keuangan dan jasa perusahaan memiliki pertumbuhan yang besar 0.32% dibandingkan dengan sektor Industri dan Sektor Pertanian. Peretumbuhan Keuangan dapat diharapkan mampu meningkatkan sektor lainya secara *backward*.

Sektor Industri kini menjadi sektor utama baik dalam skala nasional maupun regional, hal ini disebabkan daerah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu menciptakan nilai tambah produk. Berdasarkan hasil sumbangan GDP per-lapangan usaha Sektor Industri menyumbang sebesar 369.830.981 tahun 2013 naik dari tahun 2010 sebsar 319.983.632. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3.935.610/orang ketiga terbesar setelah sektor perdagangan dan pertanian (BPS : 2015). Besarnya kontribusi Sektor Industri sebagai cara alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapat lain mengungkapkan bahwa orientasi Industri dapat mencangkup menjadi 2 yakni sebagai komoditas ekspor atau konsumsi dalam negeri (Nawawi, Ismail, 2008; 118). Alhasil dengan berkembangnya sektor Industri maka mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan Pertanian.

Secara demografi Jawa Barat memiliki wilayah yang luas sebesar

2.735.753 ha. Dengan wilayah yang luas maka memberikan peluang bagi sektor pertanian untuk menghasilkan output yang besar baik untuk komoditi ekspor, konsumsi rumah tangga maupun sebagai input bagi sektor sekunder. Sektor ini mampu menyerap lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri sebesar 3.804.324/orang. Output yang dihasilkan sektor ini pada tahun 2013 sebesar 127.884.693 meningkat dari tahun 2010 104.557.476. Hal ini disebabkan *value added* output lebih rendah dibandingkan dengan Sektor Industri. Sektor Pertanian memiliki peran yang sangar vital karena dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dari Sektor Industri. Pernyataan tersebut didukung G. Bellu pengembangan sektor pertanian sangat penting melingkupi sebagai penyedia bahan baku industri (G. Bellu, Lorenzo, 2001; 14).

Di Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting terhadap suatu perekonomian. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 550.777/orang per-februari 2013. Sektor ini menghasilkan output sebesar 32.212.810 meningkat dari tahun 2010 sebesar 24.479.916. Peningkatan pertumbuhan GDP sektor ini lebih besar dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini diyakini dengan adanya penigkatan GDP dari sektor lain. Berkembangnya sektor lain dengan sektor keuangan berjalan secara simbios mutualisme, artinya kenaikan sektor lain maka membutuhkan sektor keuangan dan jasa perusahaan. Begitupun dengan bertumbuhnya Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan maka mampu mendorong sektor lain untuk berkembang.

Terlepas dari Sektor Industri ataupun Sektor Pertanian, keduanya telah memberikan manfaat bagi perekonomian di daerah Jawa Barat. Sektor Industri tidak akan bisa lepas dari sektor Industri, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat guna meningkatkan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

kesejahteraan bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat Chapra mengungkapkan pembangunan antara sektor Industri dan Pertanian bukanlah pilihan alternatif, Sektor tersebut bagian dari sifat komplementer guna mencapai kesejahteraan (Chapra, Umer, 2000; 40). Pandangan Chapra berbeda dengan Aftur Lewis yang menekankan pada pembangunan secara struktural bahwa guna meningkatkan satandar hidup maka kesejahteraan maka perlu dilakukan perpindahan dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor Industri (Lewis, Aftur, 1994; 108). Asumsi Aftur Lewis didasari pada adanya kelebihan surplus tenaga kerja yang berada di wilayah pedesaan dan hanya sektor industri yang mampu dapat menampung dari kelebihan tenaga kerja di Sektor Pertanian. Fenomena kelebihan tenaga kerja menandakan elastisitas sempurna, artinya upah yang diberikan sama. Tentunya upah yang diberikan di Sektor Industri lebih tinggi dan adanya laba dipergunakan kembali sebagai investasi untuk memperluas kesempatan kerja serta menyerap kembali kelebihan tenaga di Sektor Pertanian (dalam Todaro , 2011; 140-143).

Terlepas perdebatan antara Sektor Industri dan Sektor Pertanian, Berkembangnya Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendukung bagi pertumbuhan sektor lain. Pertumbuhan dari tahun 2010-2013 cukup besar perlu dilihat kembali berkenaan dengan kedudukan Sektor ini mampu mendorong sektor lain. Atas Penelitian ini didasarkan adanya perbedaan output diantara Sektor Industri Pengolahan ,Pertanian dan bertumbuh cepat Jasa Keuangan serta Jasa Perusahaan. Kontribusi Nilai Industri Pengolahan yang besar, belum dapat dipastikan bahwa sektor tersebut memiliki keterkaitan yang kuat antars sektor. Oleh karenanya peneliti akan melihat bagaimana keterkaitan antar Sektor Pertanian, Industri Pengolahan

dan Keuangan, Jasa Perusahaan guna membentuk Pembangunan Regional secara berkesinambungan. Keterkaitan antar Sektor dapat dilihat dari segi *Direct/Indirect Backward Lingked, Direct/Indirect Forward Lingked*, Daya Penyebar, daya pendorong dan Multiplayer Tenaga Kerja dari masing-masing sektor. yang tinggi sehingga dapat menggambarkan keadaan sektor ekonomi di Jawa Barat.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Dikarenakan penelitian ini menggambarkan keadaan dari Sektor Ekonomi. Sejalan dengan Arikunto berpendapat Penelitian Deskriptif adalah penelitian dimaksud menyelidiki keadaan dan kondisi (Arikunto, Suharsimi, 2010; 3). Kuantitatif dimana dalam pengukuran menggunakan suatu perhitungan. bahwa penelitian pendekatan kuantitatif yakni pengukuran dilakukan dengan cara perhitungan tertentu. Ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah Jawa Barat dikarenakan memiliki wilayah yang luas. Dilihat *trend* dengan wilayah yang luas memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan output Pertanian namun sebaliknya bertumbuhnya Sektor Industri serta melihat pengaruh berkembangnya Sektor Jasa Keuangan dan Persusahaan terhadap 2 sektor tersebut.

2.2 Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder (non Survey). Menurut Hanke, dkk (1998) (dalam Kuncoro, M, 2011; 30) data terbagi menjadi 2 yakni data internal dan data primer serta sekunder. Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa data sekunder telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Berkenaan dengan hal tersebut kami menggunakan

data sekunder berupa data tabel input-output yang telah disediakan oleh Bappeda dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan analisis Input-Output. Dalam unit analisis ini akan dianalisis berkenaan dengan keterkaitan antar sektor. Peneliti menggunakan data input-output Jawa Barat tahun 2013 dengan kualifikasi 9 sektor. Penelitian ini menggunakan data I-O yang dikeluarkan pada tahun 2010 dengan melakukan metode RAS untuk mengestimasi koefisien input pada tahun 2013. Luas wilayah dalam penelitian ini mencakup 26 wilayah Kabupaten dan Kota.

2.3 Alat Analisis (I-O)

Analisis Input-Output merupakan alat analisis yang sering digunakan dalam mengukur potensi sektor ekonomi yang berada di suatu daerah. Menurut Tarigan (2005) dalam bukunya mengatakan bahwa analisis input-output merupakan unit analisis melihat keterkaitan antar sektor secara menyeluruh. Di dalam tabel ini dapat dilihat pula keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan antar sektor. Kerangka gambar dari tabel input-output dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kerangka Tabel Input Output

	Alokasi Output		Total Penyedia	
	Permintaan Antara	Permintaan Akhir	Impor	Jumlah Output
Input antara	Sektor Produksi Kuadran I	Kuadran II		
Sektor 1	$X_{11} \dots X_{1j} \dots X_{1m}$	F_1	M_1	X_1
Sektor 2	$X_{21} \dots X_{2j} \dots X_{2m}$	F_2	M_2	X_2
...
Sektor i	$X_{i1} \dots X_{ij} \dots X_{im}$	F_i	M_i	X_i
...
Sektor n	$X_{n1} \dots X_{nj} \dots X_{nm}$	F_n	M_n	X_n
	Kuadran III		Kuadran IV	
Input Primer	$V_1 \dots V_j \dots V_m$			
Jumlah Input	$X_1 \dots X_j \dots X_m$			

Sumber: Tarigan

Dari tabel diatas, dapat dihitung matriks koefisien input (matriks A). Matriks Identitas diperoleh dari (I-A) $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$. Matriks Pengganda yakni kebalikan dari $(1-A) = (1 - A)^{-1}$ (dalam Tarigan, R, 2005; 108). Adapun melakukan perhitungan dalam mencari keterkaitan menurut firmansyah (2006) (dalam A'fif, dkk,2013;3) berkenaan dengan keterkaitan ke depan dan kebelakang, sebagai berikut :

2.3.1 Analisis pengaruh keterkaitan langsung ke depan (Direct Forward Linked Effect)

Keterkaitan langsung kedepan (direct forward linked effect) merupakan analisis efek suatu sektor terhadap tingkat produksi sektor penyedia input bagi sektor tersebut secara langsung dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F^{di} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}$$

F^{di} = Indeks Keterkaitan ke depan

α_{ij} = Matriks teknis.

Apabila mencari keterkaitan langsung dan tidak langsung maka menurut Jensen (dalam Stanny, 2009; 50) :

α_{ij} = matriks leontif terbuka

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Menunjukkan nilai keterkaitan ke depan dinotasikan dengan F^d_i merupakan penjumlahan secara kolom dari matriks teknologi yang dinotasikan dengan a_{ij} . Nilai $F^d_i > 1$ menunjukkan bahwa sektor i memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan sektor lain dalam wilayah tersebut.

2.3.2 Analisis pengaruh keterkaitan langsung ke belakang (*Direct Backward Linked Effect*)

Keterkaitan langsung ke belakang merupakan bentuk penggunaan hasil output suatu sektor, untuk digunakan sebagai input pada sektor lain. Ukuran keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linked effect*) pada suatu sektor beralih dari model Leontif dengan melihat sisi permintaan (*demand-driven*). Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$B^d_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}$$

B^d_j = Indek keterkaitan ke belakang

α_{ij} = matriks teknis

Apabila mencari keterkaitan langsung dan tidak langsung (dalam Stanny, 2009; 50) :

α_{ij} = matriks leontif terbuka

Menunjukkan nilai keterkaitan ke depan dinotasikan dengan F^d_i merupakan penjumlahan secara kolom dari matriks teknologi yang dinotasikan dengan a_{ij} . Nilai $F^d_i > 1$ menunjukkan bahwa sektor i memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan sektor lain dalam wilayah tersebut.

2.3.3 Daya Penyebaran

Daya Penyebaran merupakan efek rata-rata yang ditimbulkan oleh suatu sektor x terhadap sektor secara keseluruhan serta mampu menarik sektor hulu. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya output di sektor hilir.

Dapat digambarkan rumus sebagai berikut (dalam Tarigan, R, 2005; 112):

$$\alpha_j = \frac{\sum_i i_j}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_i i \sum_j b_{ij}}$$

Apabila $\alpha_j > 1$ maka daya penyebaran lebih tinggi dan sebaliknya.

2.3.4 Derajat Kepekaan

Derajat Kepekaan merupakan efek rata-rata yang ditimbulkan oleh suatu sektor x terhadap sektor secara keseluruhan serta mampu menarik sektor hilir. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya output di sektor hulu. Dapat digambarkan rumus sebagai berikut (dalam Tarigan, R, 2005; 113):

$$\beta_j = \frac{\sum_i i_j}{\left(\frac{1}{n}\right) \sum_i i \sum_j b_{ij}}$$

Apabila $\alpha_j > 1$ maka derajat Kepekaan lebih tinggi dan sebaliknya.

2.3.5 Analisis Dampak Pengganda (Multiplayer Impact)

Efek lapangan pekerjaan merupakan adanya perubahan yang diakibatkan karena adanya perubahan output di suatu sektor tersebut. Untuk menghitung maka perlu dilakukan perhitungan rata-rata output setiap pekerja di sektor j dinotasikan dengan W_j : $W_j = \frac{x_j}{L_j}$, dimana L_j yakni jumlah pekerja di sektor J , Selanjutnya efek perubahan tambahan tenaga kerja $E_j = \sum W_n + 1, i^{\alpha_{ij}}$

2.4 Koefisien Input tahun 2013 (RAS)

RAS atau dikenal dengan metode Bioporal. Penelitian ini mencoba untuk mengestimasi koefisien matriks tabel di

tahun 2013. Oleh karenanya perlu dilakukan *updating* data menggunakan RAS. Istilah RAS sering artikan sebagai parsial survei, dengan menggunakan koefisien matriks tahun lalu guna mengestimasi tahun x. Menurut Nazara dalam melakukan perhitungan RAS membutuhkan jumlah $X(1)$, $V(1)$ dan $U(1)$ (Nazara, Suhail, 1997;103). Sejalan dengan apa yang diungkapkan Nazara, Miller dan Blair (2009) mengungkapkan langkah-langkah dalam melakukan prosedur RAS (E. Miller, R, dkk, 2009;313) :

$$\begin{aligned}
 & \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix} \\
 (a) \quad A(1) &= \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix} \\
 & \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix} \\
 (b) \quad A(0) &= \begin{matrix} X_1 & & U_1 \\ X_2 & U(1) & V(1) \\ X_3 & & U_3 \end{matrix} \\
 (c) \quad X(1) &= \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{matrix} \quad U(1) = \begin{matrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{matrix} \quad V(1) = \begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{matrix}
 \end{aligned}$$

Asumsi apabila suatu perekonomian dianggap stabil tidak ada perubahan yang signifikan maka dapat dibentuk persamaan sebagai $A(0) = A(1)$. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan tabel matriks teknologi di periode 1 / Z(1) yakni

$$(d) \quad A(0)[X(1)]$$

Hasil *updating* data dianggap selesai apabila tidak ada perubahan antara matriks teknologi tahun awal dengan tahun yang diestimasi. Hasil dai penjumlahan kolom $U(1)$ sama dengan $X(1)$. Apabila pada tahun ke-1 terjadi perbedaan $A(0) \neq A(1)$, dapat diartikan bahwa $u^1 =$ jumlah $X(1)$ tidak sama dengan $V(1)$. Meskipun tidak terjadi nilai yang sama masih dapat dihitung $A(0)[X(1)]$. Apabila $u^1 > U(1)$ memiliki arti bahwa nilai matriks lebih besar dari seharusnya dan sebaliknya. Dengan demikian perlu dilakukan suatu penyesuaian $R^1 = [U(1)](u^1)^{-1}$. Apabila setelah didapat R^1 , selanjutnya apabila kita kalikan dengan kondisi U^1 secara matematis : $U(1) = [R^1 A(0) X(1)]_j$. Untuk memperoleh hasil estimasi sementara

matriks teknologi dapat dirumuskan matematik $A^1 = R^1 A(0)$. Estimasi total penjualan input antar sektor tahun ke-1/ $V(1)$ maka $v^i = i[A(1).X(1)]$. Apabila kondisi $v^1 \neq V(1)$ maka perlu dilakukan penyesuaian kembali, batas nilai perbedaan peneliti asumsikan 0,005(Nazara, Suhail, 1997; 111). Ketika terjadi perbedaan maka di perlukan penyesuaian kembali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara umum dari data yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dari 9 sektor ekonomi di Jawa barat, Sektor industri memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Jawa Barat. Pertumbuhan dari sektor Industri mengalami perlambatan dibandingkan dengan sektor lainnya namun tetap sumbangan terbesar berasal dari sektor Industri. Dari data diatas tampak sumbangan sektor PDRB di Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 11%. Dengan perolehan nilai tertinggi di sektor Industri (34.56%) dan sektor terendah di sektor penggalian dan pertambangan (1.74%).

Dilihat persentase sumbangan PDRB lebih besar, dapat ditaksirkan bahwa sektor perekonomian Jawa Barat bertumpu di sektor Industri. Peranan sektor Keangan Persewaan dan Jasa Perusahaan belum mampu memberikan sumbangan yang besar. Dimuat dalam BPS kontribusi tertinggi dalam menyumbang terhadap sektor Pertanian yakni Kabupaten Subang sebesar 42.86% dan Kabupaten Cianjur sebesar 41.96%. sedangkan untuk daerah penyumbang sektor Industri tertinggi yakni Kabupaten Bekasi sebesar 40.82% dan Kabupaten Bandung sebesar 34.45%. Konsentrasi Industri tidak terjadi di daerah Kota melainkan Kabupaten. Besar sumbangan PDRB sektor Industri membuat penyerapan tenaga kerja lebih besar

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

dibandingkan sektor Pertanian. Dari lapangan kerja utama, sektor Industri menyerap 3.935.610/jiwa dan sektor Pertanian menyerap 3.804.324/jiwa. Dengan besarnya sumbangan PDRB belum dapat dipastikan berkenaan dengan keterkaitan antara sektor satu dengan sektor lainya. Analisis Penulis

terkait dengan sumbangan sektor Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dikarenakan sektor ini bukan merupakan sektor utama. Sehingga kedudukanya sebagai penunjang bagi sektor lainya. Lebih jelasnya tergambar di tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sumbangan PDRB Per-Sektor Lapangan Usaha (%)

No	Lapangan Usaha	Sumbangan PDRB 2013 (%)	Rank
1	Pertanian	11.9	3
2	Pertambangan dan Penggalian	1.74	9
3	Industri Pengolahan	34.56	1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.73	8
5	Bangunan/Konstruksi	4.40	6
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	24.44	2
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8.20	5
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.01	7
9	Jasa-jasa	8.98	4

Sumber : BAPPEDA, data diolah

3.2 Gambaran Umum Kontribusi Nilai Tambah Bruto Berdasarkan Lapangan Usaha

Nilai Tambah Bruto (NTB) dapat diartikan sebagai timbal balik jasa dari memproduksi suatu barang atau nilai surplus dari memproduksi suatu barang dan jasa. Sektor yang memiliki peranan besar dalam PDRB, belum dapat dipastikan NTB yang disumbangkan besar. Hal ini diakibatkan karena besarnya biaya dalam memproduksi barang atau Jasa di sektor tersebut.

Lebih lanjut digambarkan nilai NTB dimana Sektor Industri Pengolahan memiliki nilai kontribusi 37.7%. Diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Komunikasi 22.4% serta Sektor

Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan 2.7%.

Besarnya nilai NTB di sektor Industri menandakan sektor ini telah berjalan secara efisien dan efektif dalam melakukan produksi. Rendahnya nilai NTB di suatu sektor menandakan dalam melakukan produksi memerlukan biaya yang tinggi sehingga net produksi yang menghasilkan margin yang rendah. Dalam hal ini Sektor Pertanian(12.6%) dan Keuangan, jasa perusahaan (2.7%) memiliki nilai tambah yang rendah dibandingkan dengan sektor Industri (37.7%). Sektor Industri didorong oleh teknologi yang tinggi sehingga mampu meminimalisir biaya produksi. Perubahan tidak hanya terjadi di daerah Jawa Barat melainkan hampir di daerah-daerah. Lebih jelasnya tergambar di tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Kontribusi Nilai Tambah Bruto

No	Lapangan Usaha	Sumbangan NTB 2013 (Juta)	Sumbangan NTB 2013 (%)	Rank
1	Pertanian	97.194.393	12.6	3
2	Pertambangan dan Penggalian	15.546.259	2	9
3	Industri Pengolahan	290.754.724	37.7	1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	21.294.460	2.8	8
5	Bangunan/Konstruksi	29.047.786	3.8	6
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	172.713.197	22.4	2
7	Pengangkutan dan Komunikasi	54.635.685	7.1	5
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	21.155.315	2.7	7
9	Jasa-jasa	68.318.686	8.9	4
Jumlah		770.660.505	100	

Sumber : Data diolah tabel I-O Jawa Barat

3.2 Analisis *Direct and Indirect Forward* dan *Backward Linked*

Tabel sebelumnya menunjukkan sektor Industri memiliki sumbangan yang besar terhadap PDRB Jawa Barat. Kontribusi yang besar dari Industri, belum dapat dikatakan bahwa sektor tersebut sektor strategis untuk dikembangkan. Hal ini perlu dilihat lebih lanjut keterkaitan antara sektor Industri dengan sektor lainnya. Astarai (2013) pembangunan masa depan yakni mampu mengintegrasikan beberapa sektor. Sependapat dengan hal tersebut guna menuju pembangunan berkesinambungan, perlu dilihat dari keterkaitan antar sektor. Berdasarkan tabel 4 tampak nilai tertinggi *Direct and Indirect Forward* yakni berada di sektor Industri Pengolahan dengan perolehan nilai sebesar 3.32 dan nilai terendah sektor Jasa-jasa dengan nilai 0.2. Nilai tertinggi *Indirect/Direct Backward* yakni berada di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.46.

Direct and Indirect Forward dimaknai ketika terjadi kenaikan Penggunaan Output 1 pada Sektor Industri maka dampak keterkaitan

langsung dan tidak langsung kedepan pengembangan pada sektor hilir sebesar 3.32 satuan. Sektor Jasa hanya memiliki keterkaitan sebesar 0.2 satuan. Apabila dibandingkan antara sektor Industri (3.3), Pertanian (0,77) dan Keuangan, Jasa Perusahaan (0.98). Sektor Pertanian memiliki *Direct and Indirect Forward* yang rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut terindikasi sektor lain menggunakan Output dari sektor Pertanian berasal dari luar wilayah Jawa Barat. Nilai *Direct and Indirect Forward* pada sektor Keuangan Persewaan, Jasa Perusahaan lebih besar dibandingkan dengan Pertanian, guna memperkuat pentingnya sektor ini dalam mendorong sektor lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel 4.

Berbeda dengan *Direct and Indirect Backward linked* sektor komunikasi sebesar 1.46 dapat dimaknai jika terjadi kenaikan permintaan akhir di sektor ini sebesar 1 maka akan berdampak keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang terhadap pertumbuhan secara keseluruhan sektor hulu sebesar 1.46 unit. Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai *Direct/Indirect Backward Linked*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang sama artinya ketika kenaikan permintaan akhir sebesar 1 maka akan berdampak keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang pertumbuhan sektor hulu sebesar 0.94. Dilihat dari keterkaitan ke belakang secara langsung dan tidak langsung meskipun sektor

Industri menduduki kontribusi PDRB yang besar namun tidak mampu menarik sektor hulu, artinya ada kemungkinan bahwa sektor Industri di daerah Jawa Barat menggunakan bahan baku berasal dari Luar Jawa Barat.

Tabel 3.3 Analisis *Direct/Indirect Forward* dan *Backward Linked*

No	Sektor Lapangan Usaha	<i>Forward Linked</i>	<i>Backward Linked</i>
1	Pertanian	0.774256244	0.940439225
2	Pertambangan dan Penggalian	1.396119223	0.940438871
3	Industri Pengolahan	3.327133833	0.940438871
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.364909728	0.940438871
5	Bangunan/Kontruksi	0.310909475	0.940438871
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.929805493	0.940438871
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.659236966	1.464036412
8	Kuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.979875655	0.940438871
9	Jasa-Jasa	0.245301119	0.940438871

Sumber : Hasil Analisis

3.3 Analisis *Direct Forward* dan *Backward Linked*

Dilihat dari keterkaitan langsung kedepan sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki nilai yang tinggi sebesar 1.476 dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memiliki nilai terendah sebesar 0.899. Dapat dimaknai keterkaitan langsung kedepan, jika terjadi kenaikan permintaan akhir di sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 1 maka akan berdampak keterkaitan langsung terhadap pertumbuhan secara keseluruhan sektor hulu sebesar 1.46 unit. Sama halnya dengan sektor Listrik, Gas dan Air hanya berdampak terhadap sektor hulu sebesar 0.899. Keterkaitan langsung kebelakang nilai tertinggi berada pada sektor Industri dengan nilai 3.21 dan terendah pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0.91. Dapat dimaknai jika terjadi kenaikan permintaan akhir di sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 1 maka akan berdampak keterkaitan langsung kedepan

terhadap pertumbuhan secara keseluruhan sektor hilir sebesar 1.46 unit. Sama halnya dengan sektor Listrik, Gas dan Air hanya berdampak terhadap sektor hilir sebesar 0.89 unit. Berbeda dengan keterkaitan langsung kebelakang, jika terdapat kenaikan permintaan akhir pada sektor Industri sebesar 1 maka berdampak secara keseluruhan terhadap pertumbuhan sektor hulu sebesar 0.91 unit.

Dapat dilihat dari tabel 5 antara sektor Pertanian, Industri serta Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, secara *Direct Forward linked* nilai yang terendah yakni pada sektor Pertanian sebesar 0.899, sedangkan sektor Industri lebih unggul dibandingkan dengan sektor Pertanian sebesar 0.904. Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai yang tinggi sebesar 1.016, artinya sektor ini memberikan dampak yang lebih kuat terhadap sektor hilir. Nilai *Backward Linked* tertinggi pada sektor Industri sebesar 3.24, diikuti oleh sektor pertanian

(1.579) dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (0.919). Kenaikan permintaan akhir di sektor ini dapat menarik cukup besar terhadap sektor hulu. Dengan tingginya keterkaitan *Forward* dan *Backward* pada sektor Industri yang lebih besar dari sektor Pertanian dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor Industri memberikan peranan yang kuat dalam mendorong.

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerinatah yakni bagaimana mendorong hasil pertanian guna sebagai bahan input di sektor Industri. Diharapkan dengan berkembangnya

sektor Industri mampu meningkatkan di sektor Pertanian. Solusi dari adanya penelitian ini yakni bagaimana melakukan pembangunan ekonomi daerah khususnya di Jawa Barat dengan mengaitkan antara sektor Pertanian, Industri dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai *forward* yang tinggi maka diharapkan kedepanya mampu meningkatkan sektor hilir, berkenaan dengan pembiayaan keuangan sektor lain. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat lebih lanjut pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Analisis *Direct Forward* dan *Backward Linked*

No	Sektor Lapangan Usaha	<i>Forward Linked</i>	<i>Backward Linked</i>
1	Pertanian	0.899542472	1.579540645
2	Pertambangan dan Penggalian	0.922552136	1.246998348
3	Industri Pengolahan	0.904327038	3.24130911
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.899258715	0.190529412
5	Bangunan/Kontruksi	0.935901469	0.215859568
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.006687516	0.915468184
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.476904926	0.538831987
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.01670952	0.919697752
9	Jasa-Jasa	0.941507452	0.155156237

Sumber : Hasil Analisis

Apabila kita analisis antara keterkaitan ke depan sektor pertanian dan keterkaitan ke belakang. Seharusnya nilai sektor Industri memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang yang besar dan Pertanian memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan yang besar maka hal tersebut menggambarkan pertumbuhan yang sepadan tidak terjadi dualisme pertumbuhan. Pada kenyataanya bahwa nilai *direct* dan *Indirect* sektor pertanian < 1. Berbeda hasil penelitian lainnya nilai keterkaitan ke depan langsung dan langsung tidak langsung >1, salah satunya dilakukan oleh cahyo, dkk (2014), sektor

primer(Pertanian) memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi. Penelitian ini didukung oleh penelitian lainnya Subanti (2009), Suryani (2010), A'fif (2013), Anas (2015) Sektor Pertanian memiliki nilai keterkaitan ke depan yang tinggi. Perbedaan antara hasil dari penelitian disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tahun yang dianalisis. Daerah penelian mencakup Kalimantan, Sulawesi, Jawa tengah dan Pematang, diartikan bahwa sektor Pertanian mampu mendorong sektor lain dan sebagai besar menggunakan input dari dalam wilayah tersebut. Struktur dari perekonomian Jawa Barat sama halnya seperti perekonomian di daerah Jawa Timur ,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

penelitian wahyuni (2013) menunjujkan sektor Pertanian memiliki nilai keterkaitan depan yang rendah (<1), terindikasi bahwa perekonomian Jawa Barat dengan Jawa Timur menggunakan input yang berasal dari luar wilayah tersebut.

Keterkaitan ke belakang Sektor Pertanian lebih unggul dibandingkan dengan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan namun nilainya masih rendah dibandingkan dengan sektor Industri. Hal ini sama dengan Provinsi Jawa Timur wahyuni (2013), Nilai keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung yang rendah. Tidak semua nilai keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung memiliki nilai yang tinggi maka nilai keterkaitan ke belakang akan tinggi pula, hal ini dibuktikan oleh Suryani (2013), A'fifi, dkk (2013), Anas (2013) nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung kebelakang di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan nilai keterkaitan ke depan. Adapun nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yakni di daerah Sulwaesi Tenggara bahwa nilai Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke kedepn baik ke belakang memiliki nilai yang besar. Artinya sektor di Sulawesi Tenggara ditopang oleh Sektor Agraris.

Peneliti berasumsi bahwa rendahnya nilai sektor pertanian dikarenakan masing-masing daerah memfokuskan pada pengembangan sektor lain, salah satunya ada sektor Industri. Sektor Industri memiliki peran penting dalam dimensi pembangunan di beberapa daerah. Hal ini di perkuat oleh beberapa penelitian yang penelitian baik di daerah Jawa Barat dan luar Jawa Barat. Kontribusi PDRB dari sektor Industri dengan nilai keterkaitan yang besar menunjukkan bahwa sektor ini memnjadi sektor penggerak ekonomi secara umum di wilayah Jawa Barat. Hasil Penelitian

ini sama dengan peneltian yang sebelumnya dilakukan di wilayah Jawa Barat dengan berlandaskan tabel I-0 Jawa Barat Hermawan (2006) sektor Industri memiliki nilai keterkaitan yang tinggi baik secara langsung dan tidak langsung. Merujuk pada penelitian Hernawan bahwa struktur ekonomi Jawa Barat tidak berubah dari tahun 2006 yakni pada sektor Industri. Selain di Jawa Barat, di daerah lain telah berkembang sektor Industri dimuat dalam penelitian yang dilakukan Didit, dkk (2008), Astrini (2013), A'fifi, dkk (2013), Anas (2013) menempatkan Industri menjadi sektor yang berpotensi. Hal tersebut didasarkan pada nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi di sektor Industri.

Nampaknya bahwa pertumbuhan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan belum memberikan kontibusi yang signifikan pada perekonomian di Jawa Barat. Sektor ini memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi bila dibandingkan dengan sektor Pertanian, artinya sektor ini mampu mendorong sekto hilir. Kondisi Jawa Barat sama halnya dengan kondisi di daerah Jawa Timur dalam penelitian Wahyuni (2013), Astrini (2013) sektor ini memiliki keterkaitan ke depan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keterkaitan ke belakang, di mana sektor ini mampu memberikan keterkaitan ke depan yang besar.

Total secara keseluruhan jumlah *Backward Linked* dan *Forward Linked* sektor Industri Pengolahan dengan jumlah nilai (8.41), Pertambangan dan Penggalian (4.5), Pertanian sebesar (4.13), Pengangkutan dan Komunikasi (4.13), Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (3.8). Secara keseluruhan bahwa nilai keterkaitan Industri Pengolahan di Jawa Barat memiliki keterkaitan yang kuat bagi pertumbuhan sektor hulu dan sektor hilir.

Tabel 3.5 Total *Direct* dan *Indirect Backward Linked* dan *Forward Linked*

No	Sektor Lapangan Usaha	Total <i>Backward Linked</i> and <i>Forward Linked</i>	Rangking
1	Pertanian	4.193778586	3
2	Pertambangan dan Penggalian	4.506108578	2
3	Industri Pengolahan	8.413208852	1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.395136726	9
5	Bangunan/Konstruksi	2.403109383	8
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.792400064	6
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.139010291	4
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.856721798	5
9	Jasa-Jasa	2.282403679	7

Sumber : Hasil Analisis

3.4 Analisis Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran

Dengan mengukur keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan dan ke belakang tampak bahwa sektor Industri Pengolahan memiliki nilai yang besar. Apabila hanya melihat dari nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung baik ke depan ataupun ke belakang, hal tersebut belum cukup memadai dikarenakan tiap sektor memiliki nilai permintaan akhir yang berbeda-beda. Sejalan dengan Stanny (2009) berpendapat guna memastikan bahwa sektor memiliki keterkaitan yang kuat maka perlu dinormalkan dengan membandingkan dengan nilai rata-rata dampak sektor x terhadap dampak rata-rata seluruh sektor. Efek relatif suatu sektor digamabarkan menjadi 2 yakni, Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran.

Nilai Derajat Kepekaan berada pada sektor Komunikasi dan Pengangkutan (0.0182), Sektor Keuangan Persewaan dan Perusahaan (0.1255). Sektor Pertanian dan sektor Industri memiliki Derajat Kepekaan yang sama. Daya Penyebaran sektor Industri sebesar (0.4), Pertanian (0.195), Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (0.11). Secara umum bahwa rata-rata nilai Derajat Kepekaan dan

Daya Penyebaran kurang dari satu menandakan masing-masing sektor memiliki efek relatif yang ditimbulkan rendah. Dapat diartikan nilai Daya Penyebaran sektor Industri yakni Ketika terjadi kenaikan 1 unit output di sektor tersebut maka efek relatif sektor tersebut akan menyebabkan naiknya output sektor secara lain keseluruhan sebesar 0.4 unit. Sama halnya pada sektor Keuangan persewaan dan Perusahaan dan sektor Pertanian yakni Ketika terjadi kenaikan 1 unit output di sektor tersebut maka efek relatif sektor tersebut akan menyebabkan naiknya output sektor lain secara keseluruhan sebesar 0.011 unit (Keuangan Persewaan dan Perusahaan) dan 0.195 unit (Pertanian). Sebaliknya nilai tertinggi pada Derajat Kepekaan yakni berada di sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 0.0182, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan (0.012), Industri (0.0111) dan Pertanian (0.0111). Dapat diartikan dari nilai Derajat Kepekaan yakni pada sektor diatas ketika terjadi kenaikan satu unit secara keseluruhan maka efek relatif dari kenaikan tersebut berdampak pada peningkatan output pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi 0.01821 unit, Keuangan Persewaan dan Jasa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Perusahaan (0.012), Industri (0.0111) dan Pertanian (0.0111).

Hasil analisa terkait dengan sektor Pertanian, Industri serta Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor Pertanian dan Industri memiliki nilai Derajat Kepekaan yang sama maka sektor ini tidak kuat dalam meningkatkan output lain secara rata-rata. Sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan mampu mendorong bagi sektor lainnya/hilir. Terindikasi bahwa sebagian output sektor dari sektor Pertanian dan Industri Pengolahan

berasal dari luar wilayah Jawa Barat. Sebaliknya dengan Daya Penyebaran dimana Sektor Industri memiliki nilai yang besar, disusul oleh Pertanian dan Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor Industri memiliki nilai tertinggi, dapat dikatakan adanya perubahan output secara keseluruhan maka output Industri Pengolahan sebesar mendapatkan efek perubahan yang paling besar. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat lebih lanjut pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran

No	Sektor Lapangan Usaha	Derajat Kepekaan	Daya Penyebaran
1	Pertanian	0.011105463	0.019500502
2	Pertambangan dan Penggalian	0.011389533	0.015395041
3	Industri Pengolahan	0.011164531	0.040016162
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.011101959	0.002352215
5	Bangunan/Kontruksi	0.011554339	0.002664933
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.012428241	0.011302076
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.018233394	0.006652247
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.012551969	0.011354293
9	Jasa-Jasa	0.011623549	0.001915509

Sumber : Hasil Analisis

3.5 Analisis Efek Pengganda Tenaga Kerja dan Pengelompokan Sektor

Secara umum bahwa analisis Pengganda melihat adanya perubahan yang disebabkan oleh variabel eksogen, salah satunya yakni pada jumlah tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis Pengganda Tenaga Kerja, tampak dari tabel 8 bahwa dari Dilihat dari angka pengganda Tenaga Kerja Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan pengganda Tenaga Kerja yang paling tinggi sebesar 7.972, Pertanian 5.397, Industri Pengolahan 5.3988 dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0.85. Dapat diartikan kenaikan sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran akan menciptakan lapangan kerja bagi 7.972 tenaga kerja di semua sektor ekonomi ketika output sektor tersebut meningkat 1 juta rupiah. Sama halnya dengan Pertanian, Industri Pengolahan, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan akan menciptakan lapangan kerja bagi pertanian 5.397 tenaga kerja, Industri Pengolahan 5.398 tenaga kerja dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0.85 tenaga kerja bagi sektor lain secara keseluruhan. Apabila dari masing-masing sektor meningkat 1 juta rupiah di sektor. Meski sektor Pertanian memiliki pertumbuhan berbeda dengan sektor Industri namun dalam hal tenaga kerja memiliki pengganda yang sama, dikarenakan bahwa bagaimanapun sektor Pertanian sebagai penopang bagi

ketahanan pangan di Indonesia di jumlah penduduk yang tinggi. Hasil dari pengganda Tenaga Kerja berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stanny (2009) dimana sektor Industri yang unggul dalam pengganda tenaga

kerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.7, sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Pengganda Tenaga Kerja

No	Sektor Lapangan Usaha	Pengganda Tenaga Kerja
1	Pertanian	5.397254834
2	Pertambangan dan Penggalian	0.083029692
3	Industri Pengolahan	5.39883241
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.072819844
5	Bangunan/Kontruksi	2.184691397
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.972965124
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.968578902
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.854035997
9	Jasa-Jasa	4.358055

Sumber : Hasil Analisis

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, dimana peneltian ini berfokus pada melihat sumbangan PDRB sektor Industri yang besar apakah memiliki

1. Sektor Industri memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari besaran kontribusi terhadap PDRB dan NTB. NTB yang diterima oleh sektor ini lebih besar dari sektor lain. mengindikasikan bahwa sektor ini berjalan secara efisien sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Aftur Lewis.
2. Dilihat dari *Direct Forward* dan *Direct Backward*, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai *Direct Forward* yang tinggi dibandingkan dengan Sektor

keterkaitan yang kuat diantara sektor. Dalam hal ini mengukur keterkaitan antara sektor Industri, Pertanian dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Adapun temuan penting didalam penelitian ini :

- Pertanian dan Industri. *Direct Backward*, Sektor Industri memiliki nilai yang tinggi dan diikuti oleh Pertanian serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
3. Dilihat dari *Indirect/Direct Forward and Indirect/Direct Backward*, nilai *Indirect/Direct Forward* Industri memiliki nilai yang tinggi diikuti oleh sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor Pertanian berada dibawah sektor Keuangan. *Indirect/Direct Backward* Sektor Pengangkutan dinilai paling besar.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4. Sektor Industri dan Pertanian memiliki nilai Derajat kepekaan yang sama dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan Daya Penyebaran sektor Industri paling besar diikuti sektor

pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

5. Efek Pengganda tenaga kerja Sektor pertanian dan sektor Industri memiliki nilai yang sama.

4.2 Saran

Untuk penelitian lebih lanjut gunakan analisis IRIO, karena dalam penelitian ini hanya dalam satu wilayah. Sedangkan guna untuk memenuhi kebutuhan tidak semua berasal dari

wilayah Jawa Barat. Hal ini terindikasi dimana ketika sektor Pertanian tidak memiliki nilai keterkaitan ke depan yang tinggi, hal tersebut mengindikasikan adanya output yang berasal dari Luar Jawa Barat. Oleh karena perlu diperhitungkan wilayah selain Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'fif, Muhammad, dkk. (2013). Dampak Investasi Swasta Yang Tercatat di Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah (Analisis Input-Output). *Diponegoro Journal Of Economic*, 2 (3) 1-9.
- Anas, Muhammad Azwar (2015). Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Analisis Input-Output. *Economic Development Analysis Journal*. 4 (3) 320-329.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Astrini, Utari Retno. (2013). Analisis Revitalisasi Sektor Pertanian dalam Pembangunan Terhadap Perekonomian di Jawa Timur Melalui Pendekatan Input-Output". *Economic Development Analysis Journal*, 2(3) 159-173.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Jawa Barat dalam angka 2014*. Bandung : BPS
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Keadaan tenaga kerja di provinsi Jawa barat 2015*. Jakarta: BPS.
- Cahyo, Dwi B, dkk. (2014). Analisis Input-Output Sektor Perekonomian Propinsi Kalimantan Barat tahun 2010 Menggunakan Model Leontief. *Buletin Ilmiah Math. Stat dan Terapan*. 3 (1) 83-90.
- Chapra, Umer. (2000). *Islam dan pembangunan ekonomi*. Jakarta : Gema Insani Press
- E. Miller, R, dkk.(2009). *Input-output analysis : foundation and extension*. Inggris: Cambridge Press.
- Hermawan, W. (2006). Analisis Input-Output Provinsi Jawa Barat 2006. *Bina Ekonomi*. 10 (2) 1-9
- Kuncoro, Mudrajad. (2011). *Metode kuantitatif*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Lewis, W, Arthur. (1994) *Perencanaan Pembangunan : dasar-dasar kebijakan ekonomi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nawawi, Ismail. (2009). *Pembangunan dalam perspektif islam*. Surabaya : Putra Media Nusantara
- Nazara, Suahasil. (1997). *Analisis input-output*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Policy and Programme Development Support Division. (2001). *Development and development paradigms a (resaoned) review of prevailing vision*. Italia : FAO
- Purnomo, dkk. (2008). Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tenga Tahun 2000 dan Tahun 2004 (Analisis Input-Output). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (2) 137-155.
- Stanny, Dewinta. (2009). *Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Pengolahan Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat*. Skripsi S1, Institut Pertanian Bogor.
- Subanti, S, dkk (2009). “ Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara: Pendekatan Basis dan Analisi Input-Output”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 10 (1) 13-33.
- Suryani, T. (2013) ”Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pematang (Analisis tabel Input-Output Kabupaten Pematang 2010)”. *Economic Development Analysis Journal*. 2 (1) 1-9.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi regional*. Jakarta : Bumi Aksara
- Todaro, Michael P, dkk. (2011). *Pembangunan ekonom jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Wahyuni, Rika. (2013) *Analisa Identifikasi Sektor Unggulan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 (Pendekatan I-O)*. Skripsi S1, Universitas Brawijaya Malang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PENERAPAN POLA PEMBAYARAN INA-CBGS BPJS KESEHATAN DALAM TINJAUAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Irwin Ananta

Sastra Inggris, STIBA Nusa Mandiri, Tangerang Selatan

Email: irwin.ananta@gmail.com

ABSTRACT

Entering the era of nhi the government through institutions its executioner bpjs health has implemented policy the payment system for prospective. The payment system for prospective is expected to more capable of control the cost of health care and encourage health services to always having the quality of according to standard. Among the payment of prospective models used in the program is bpjs health system package ina-cbgs (indonesia case base groups ,) namely a fare system for payment with tally based on data and data costing koding hospital. Data costing obtained from the hospital elected (hospitals sample) as representation and data koding the results of grouping system of codifying of diagnosis the end and the act of / procedures be output service. The system is used both in inpatient or outpatient to level faskes advanced by the use of the information technology system in the form of application ina-cbg. Optimization the success of the application of ina cbgs, in addition to technology also must be supported by sufficiency budget , good management and services faskes and the policy and regulations other support. Synergy these factors are is expected to optimize the national social security system.

Key Words: Ina-CBGs, BPJS Health, National Health Insurance

ABSTRAK

Memasuki era JKN ini pemerintah melalui institusi pelaksananya BPJS Kesehatan telah menerapkan kebijakan sistem pembiayaan prospektif. Sistem pembiayaan prospektif diharapkan dapat lebih mampu dalam mengendalikan biaya kesehatan serta mendorong pelayanan kesehatan agar senantiasa memiliki mutu sesuai standar. Diantara model pembayaran prospektif yang digunakan dalam program BPJS Kesehatan ialah sistem paket INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) yakni suatu sistem tarif untuk pembayaran dengan penghitungan berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit. Data costing didapatkan dari rumah sakit terpilih (rumah sakit sampel) sebagai representasi dan koding hasil pengelompokan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan. Sistem tersebut digunakan baik pada rawat inap maupun pada rawat jalan untuk tingkat faskes lanjutan dengan menggunakan sistem teknologi informasi berupa Aplikasi INA-CBG. Optimalisasi kelancaran penerapan Ina CBGs ini selain teknologi juga harus didukung oleh kecukupan anggaran, baiknya manajemen dan layanan faskes serta kebijakan dan regulasi lain yang menopang. Sinergi semua faktor tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan sistem jaminan kesehatan nasional.

Kata Kunci: INA-CBGS, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan penduduk saat ini lebih dari 250 juta jiwa. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia cukup beragam diantaranya dalam permasalahan kesehatan bagi penduduknya. Sejak tahun 2014 Indonesia resmi mencanangkan memasuki era baru dalam dunia kesehatan dengan berupaya menyediakan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduknya. Butuh keberanian dan tekad yang kuat bagi suatu negara berkembang semacam Indonesia untuk bisa memberikan pelayanan jaminan kesehatan secara nasional. Jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu ciri layanan yang biasa diberikan oleh negara-negara maju dan kaya bagi segenap warganegaranya. Indonesia meski negara kaya akan sumber daya alam namun dengan carut marut dalam manajemen dan tatakelola kekayaan negara baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masih belum optimal menyebabkan Indonesia masih jauh untuk bisa layak disebut sebagai negara kaya/negara maju. Permasalahan lilitan utang negara, kasus korupsi uang negara yang merajalela serta ketergantungan Indonesia yang besar pada produk dan sumber daya asing tidak jarang menyebabkan Indonesia adakalanya mengalami defisit anggaran. Dalam kondisi anggaran keuangan negara yang masih rentan menghadapi masalah defisit, jaminan kesehatan nasional merupakan tantangan dan sekaligus tuntutan bagi pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjalankan amanah undang-undang diantaranya UUD 45 pada Pasal 28H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.", UUD 45 Pasal 34 ayat 2 "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.", Pasal 34 ayat 3 "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". (Luknanto, 2009).

Upaya Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dilanjutkan dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap warga negara guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Di dalam UU No 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya, pelayanan yang aman, bermutu, terjangkau di bidang kesehatan (NIHRD, 2015, Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti dikutip melalui <http://www.ina-respond.net> Hingga untuk itu sebagai langkah nyata dalam menerapkan program JKN maka pemerintah mengeluarkan undang-undang no 24 tahun 2011 mengenai terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai institusi pelaksana dari program jaminan kesehatan nasional tersebut. Salah satu ciri dari layanan jaminan kesehatan adalah adanya kepastian anggaran dan pembiayaan yang akan menutup biaya-biaya yang timbul dari proses penyehatan, pengobatan dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit pasien yang menjadi peserta dari program jaminan kesehatan tersebut. Oleh sebab itu sistem pembayaran yang tepat dan segenap faktor lain yang mendukungnya menjadi salah satu unsur

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

penting bagi kelangsungan program JKN BPJS Kesehatan ini kedepannya (Tim Penyusun, 2014) Buku Pegangan sosialisasi Jkn. Permasalahan pokok yang menjadi fokus pembahasan adalah penulis berupaya untuk menguraikan ulasan mengenai permasalahan seputar implementasi sistem pola pembayaran atas jaminan kesehatan yang mengacu pada INA-CBGS oleh BPJS Kesehatan. Pada umumnya pemberlakuan sistem INA-CBGS diperuntukan untuk faskes tingkat lanjutan. Hal-hal yang sering di polemikan seputar kecukupan anggaran/tarif pembiayaan maupun faktor-faktor lain yang mendukungnya ditinjau dari sudut pandang regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Penulis mencoba mengurai temuan kendala-kendala yang ada serta berupaya melakukan pengumpulan argumentasi dan fakta-fakta hasil informasi atas penerapan pola pembayaran INA CBGS yang terjadi dengan mengacu pada referensi dari sejumlah literatur yang mendasari regulasi pola INA CBGS tersebut kemudian penulis berupaya untuk menata letak kembali keselarasan untuk kemudian memberikan kontribusi masukan-masukan yang membangun. Tujuan penulisan di dalam ulasan tulisan ini, penulis berupaya merunut konsep sistem yang digunakan dalam pola pembayaran INA CBGS oleh BPJS kesehatan baik pada regulasi, aturan main maupun modus transaksionalnya kemudian secara tepat dapat menemukan unsur-unsur yang dipermasalahkan dan upaya memberikan kontribusi berupa solusi dalam mengatasinya.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Era Sebelum Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sebelum memasuki era JKN pembiayaan rumah sakit umumnya menggunakan mekanisme pembayaran ongkos untuk pelayanan atau *Fee For Service* (FFS) atau ada uang ada jasa pengobatan. Dalam proses pembiayaan

pengobatan medis yang terjadi umumnya pasien mendatangi dokter kemudian dokter memberikan obat atau tindakan medis, lalu pasien mengeluarkan biaya yang kisaran besarnya tergantung penyakit, jenis perawatan dan tarif yang ditetapkan dokter atau rumah sakit tersebut. Biaya yang dikeluarkan pasien sangat relatif, mungkin bisa dari nol (digratiskan) atau sedikit sampai dengan dikenakan sejumlah nominal biaya yang besar sekali, bahkan adakalanya biaya berobat bisa menyebabkan pasien kehilangan rumahnya untuk dijual. Posisi pasien yang dalam kondisi sakit dan membutuhkan kesembuhan umumnya mempunyai kedudukan daya tawar yang lemah, kebutuhannya untuk sembuh dari sakit dan minimnya pengetahuan tentang prosedur medis yang ia jalani biasanya pasien menurut saja kehendak dokter/rumah sakit soal perawatan dan biayanya atau kemungkinan lain pasien malah berhenti berobat sama sekali jika sudah diambang batas kemampuan finansialnya. Sebelum ada pihak ketiga semacam asuransi atau pun negara, pihak yang menanggung risiko finansial tidak lain adalah pasien. Dengan kehadiran pihak ketiga ini telah mengubah hubungan dokter-pasien secara mendasar, terutama dalam hal pembagian risiko finansial.

2.2. Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Ketika Indonesia mulai memasuki era jaminan kesehatan nasional seperti saat ini maka pembagian risiko finansial yang lebih proporsional dengan tidak hanya sekedar membebaskan pembiayaan kepada pasien dan tentu juga tidak merugikan pihak medis dari kalangan dokter, rumah sakit dan lainnya merupakan salah satu hal penting yang menjadi bagian perhatian pemerintah. Kesuksesan penerapan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) salah satu diantaranya ditandai dengan kelancaran, kecukupan, keterjaminan dan

ketepatan alokasi pembiayaan kesehatan. Dinyatakan dalam Permenkes RI no 27 tahun 2014 “Tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi pasien, mendorong efisiensi tidak memberikan *reward* terhadap provider yang melakukan *over treatment*, *under treatment* maupun melakukan *adverse event* dan mendorong pelayanan tim. Dengan sistem pembiayaan yang tepat diharapkan tujuan diatas bisa tercapai” (Kemenkes, 2014), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case base Groups,. Metode pembayaran di rumah sakit yang digunakan selama ini terdapat dua metode diantaranya adalah metode pembayaran retrospektif atau metode pembayaran yang dilakukan berdasarkan atas servis/layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan aktifitas layanan yang diberikan. Pada metode ini besar biaya yang harus dibayarkan pasien sebanding dengan banyak layanan kesehatan yang diterimanya. *Fee For Services* (FFS) atau pembebanan ongkos atas pelayanan yang diberikan merupakan cara konvensional atas pembayaran dokter/rumah sakit selama ini terutama sebelum era jkn. *Fee for services* ini merupakan contoh dari pola pembayaran retrospektif. Metode berikutnya adalah metode pembayaran prospektif atau metode pembayaran yang dilakukan berdasarkan atas layanan kesehatan dengan kisaran besaran biaya telah diketahui sebelum layanan kesehatan tersebut diberikan. Beberapa contoh pembayaran prospektif antara lain *global budget*, Perdiem, Kapitasi dan *case based payment*. Dalam realitanya Tiada sistem pembiayaan yang benar-benar sempurna, setiap sistem pembiayaan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Memasuki era JKN ini pemerintah memilih pilihan sistem pembiayaan yang sesuai pada kebutuhan dan tujuan dari

implementasi pembayaran kesehatan tersebut sebagaimana dikemukakan menurut (Pratiwi,2015) bahwa pada hal ini sistem pembiayaan prospektif menjadi pilihan untuk diterapkan karena:

1. Dapat mengendalikan biaya kesehatan
2. Mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar
3. Membatas pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan berlebihan atau *under use*
4. Mempermudah administrasi klaim
5. Mendorong provider untuk melakukan *cost containment*

Dalam era jaminan kesehatan nasional sebagaimana dijelaskan dalam buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI tentang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan informasi yang tertuang mengacu pada UU No 40 2004 tentang SIJN dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dalam halaman webnya (Tim Penyusun, 2014) Buku Pegangan sosialisasi Jkn, yang menerangkan bahwa “BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kapitasi. Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s”. Faskes tingkat pertama yang dimaksud tersebut seperti puskesmas maupun klinik dokter sesuai ketentuan dalam JKN menggunakan sistem kapitasi. Pengertian kapitasi dijelaskan bahwa “Istilah kapitasi berasal dari kata kapital yang berarti kepala. Sistem kapitasi berarti cara perhitungan berdasarkan jumlah kepala yang terikat dalam kelompok tertentu. Dalam hal JKN ini, kepala berarti orang atau peserta atau anggota program BPJS Kesehatan” (Ita Hartati, Ak., MBA., 2014) Dana Kapitasi BPJS Kesehatan: Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya, Kapitasi dilakukan melalui pendistribusian pembayaran dana BPJS untuk jasa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pelayanan kesehatan dengan tarif biaya perbulan berdasarkan pada data jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungan dari faskes tingkat pertama tersebut tanpa menghitung jenis maupun jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kapitasi secara mudahnya mirip seperti sistem borongan. Pada Faskes rujukan tingkat lanjut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian pada kelanjutannya perpres tersebut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bukan dengan sistem kapitasi namun dengan sistem INA-CBGs (*Indonesia Case Base Groups*). Sistem tersebut merupakan model pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan untuk mengganti klaim yang ditagihkan oleh rumah sakit. INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Mengacu pada kamus istilah BPJS dalam laman webnya menyatakan bahwa rumah sakit akan mendapat besaran bayaran berdasar nominal yang sesuai pada tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis (Tim redaksi, 2014). “Permisalan dalam hal ini sistem menghitung misalkan seorang pasien penderita demam berdarah maka layanan apa saja yang akan diberikan bagi pasien tersebut berikut pengobatannya sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh atau selama satu periode rawat di rumah sakit itu”. Kilas balik penerapan INA-CBG’s sebagaimana penjelasan dalam lampiran permenkes no 27 tahun 2014 pada laman web JKN Kemenkes (Kemenkes, 2014), Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case base Groups (INA-CBGs), , dimulai pada tahun 2006 pertama kali di Indonesia

mengembangkan sistem casemix dengan nama INA-DRG (*Indonesia- Diagnosis Related Group*). Sistem tersebut lebih dikembangkan lagi pada tahun 2008 dengan implementasi pembayaran dalam program Jamkesmas untuk 15 rumah sakit vertical. Pada tahun 2009 diperluas kerjasama dengan lebih banyak lagi rumah sakit yang dilibatkan. Pada tahun 2010 dilakukan perubahan nomenklatur dari INA-DRG (*Indonesia Diagnosis Related Group*) berubah menjadi INA-CBG (*Indonesia Case Based Group*). Sejak diimplementasikannya sistem *casemix* di Indonesia telah dihasilkan 3 kali perubahan besaran tarif, yaitu tarif INA-DRG Tahun 2008, tariff INA-CBG Tahun 2013 dan tarif INA-CBG Tahun 2014. Pengelompokan dalam sistem menggunakan sistem teknologi informasi berupa Aplikasi INA-CBG sehingga dapat dihasilkan 1.077 kelompok tarif yang terdiri dari 789 kode grup/kelompok rawat inap dan 288 kode grup/kelompok rawat jalan. Dasar pengelompokan dalam INA-CBGs menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan.

2.3. Tarif INA-CBGs dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan no 27 tahun 2014 dalam laman web JKN Kemenkes (Kemenkes, 2014, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case base Groups* (INA-CBGs), bahwa per 1 Januari 2014 diberlakukan Tarif INA-CBGs dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Pengelompokan Tarif 7 kluster rumah sakit, yaitu :
 - a. Tarif Rumah Sakit Kelas A
 - b. Tarif Rumah Sakit Kelas B
 - c. Tarif Rumah Sakit Kelas B Pendidikan

- d. Tarif Rumah Sakit Kelas C
 - e. Tarif Rumah Sakit Kelas D
 - f. Tarif Rumah Sakit Khusus Rujukan Nasional
 - g. Tarif Rumah Sakit Umum Rujukan Nasional
- Penyesuaian nilai dilakukan setelah melihat besaran *Hospital Base Rate* (HBR) sakit yang didapatkan dari perhitungan total biaya pengeluaran rumah sakit yang digunakan sebagai acuan pengelompokan tarif sedangkan digunakan *Mean Base Rate* bila dalam satu kelompok terdapat lebih dari satu rumah sakit.
2. Regionalisasi, tarif terbagi atas 5 Regional yang didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dan telah disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
 3. Terdapat pembayaran tambahan (*Top Up*) dalam sistem INA-CBGs versi 4.0 yang meliputi : a. *Special Prosedure*, b. *Special Drugs*, c. *Special Investigation*, d. *Special Prosthesis*, dan e. *Special Groups Subacute* dan Kronis. Top up pada special CMG tidak diberikan untuk seluruh kasus atau kondisi, tetapi hanya diberikan pada kasus dan kondisi tertentu. Khususnya pada beberapa kasus atau kondisi dimana rasio antara tarif INA-CBGs yang sudah dibuat berbeda cukup besar dengan tarif RS. Penjelasan lebih rinci tentang Top Up dapat dilihat pada poin D.
 4. Tidak ada perbedaan tarif antara rumah sakit umum dan khusus, disesuaikan dengan penetapan kelas yang dimiliki untuk semua pelayanan di rumah sakit berdasarkan surat keputusan penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
 5. Tarif INA-CBGs merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non-medis.

Tarif INA-CBGs yang digunakan setara dengan Tarif Rumah Sakit Kelas D sesuai regionalisasi masing-masing bagi Rumah Sakit yang belum memiliki penetapan kelas. Penghitungan tarif INA CBGs berbasis pada data *costing* dan data koding rumah sakit. Data *costing* didapatkan dari rumah sakit terpilih (rumah sakit sampel) representasi dari kelas rumah sakit, jenis rumah sakit maupun kepemilikan rumah sakit (rumah sakit swasta dan pemerintah), meliputi seluruh data biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, tidak termasuk obat yang sumber pembiayaannya dari program pemerintah (HIV, TB, dan lainnya). Data koding diperoleh dari data koding rumah sakit PPK Jamkesmas. Untuk penyusunan tarif JKN digunakan data *costing* 137 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 6 juta data koding (kasus)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini secara kualitatif dengan bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan memakai pendekatan induktif. Proses maupun makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif.

3.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Metode literatur

Studi literatur dilakukan dengan telaah literatur terhadap ketentuan, regulasi dan modus transaksional yang dilakukan INA CBGs BPJS Kesehatan. Selain itu melakukan penelusuran dan pengkajian sejumlah referensi materi dari sumber terpercaya yang berhubungan dengan wacana, kritikan dan informasi masukan dari praktisi BPJS Kesehatan dan masyarakat mengenai BPJS Kesehatan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2. Metode observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berkompeten yang mengetahui penerapan praktek INA CBGs BPJS Kesehatan.

3. Metode Komparatif

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan fakta temuan penerapan praktek INA CBGs BPJS Kesehatan, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang melandasinya serta modus transaksional pada BPJS Kesehatan kemudian mencocokkan dengan wacana, kritikan dan informasi masukan dari praktisi BPJS Kesehatan dan masyarakat

3.2. Sumber Data

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penulisan sesuai dengan fakta di lapangan sedang literatur yang digunakan merujuk kepada ketentuan, regulasi dan modus transaksional yang dilakukan BPJS Kesehatan serta wawancara dan observasi langsung di lapangan mengenai pelaksanaan BPJS dan pembayaran serta praktek yang terjadi dari fase tingkat pertama hingga fase rujukan, tingkat lanjutan.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Program BPJS berbasis *Fee For Services*

Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya jaminan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam biaya pengobatan dan biaya rumah sakit yang relatif mahal. Bentuk serupa semacam JKN ini merupakan kelaziman layanan pada negara-negara yang taraf kemakmuran hidupnya relatif tinggi dengan tata kelola kekayaan negaranya optimal sehingga rakyat mendapatkan

hak layanan gratis kesehatan dan berobat dengan dibiayai oleh negara. Namun lain halnya di Indonesia dengan kondisi negara saat ini masih yang banyak ditemui terdapat carut-marutnya pelaksanaan birokrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam tata kelola negara serta masih tingginya kasus kerah putih seperti korupsi, kolusi, penyeludupan, penggelapan uang negara dan semacamnya yang secara otomatis menyebabkan banyak menimbulkan kebocoran anggaran serta banyak dana yang hilang sehingga dana anggaran tidak dapat digunakan untuk kebutuhan yang semestinya seperti diantaranya dalam memberikan jaminan kesehatan rakyat sebagaimana amanah undang-undang diantaranya UUD 45 Pasal 28H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”, UUD 45 Pasal 34 ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. “, Pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Upaya implementasi negara adalah berupa jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk segenap rakyat Indonesia. Secara mendasar JKN telah mengubah model dan mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan. Pasien tidak lagi membayar tunai biaya berobat langsung ke Dokter, klinik, dan rumah sakit namun pembayaran dibayar secara prospektif oleh BPJS Kesehatan. Diantara permasalahan dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah besarnya kisaran anggaran yang harus di alokasikan guna terpenuhinya kebutuhan tersebut. Sebagai upaya dalam mengendalikan besaran biaya yang mungkin timbul dari proses transaksi biaya medis yang terjadi.

4.2. Program BPJS berbasis Indonesian Case base Groups (INA-CBG's)

"Kementerian Kesehatan RI membangun sistem INA-CBGs dan kapitasi sebagai pola pembayaran ke pihak faskes dengan peruntukan masing-masing pemerintah menetapkan tarif INA-CBGs untuk seluruh rumah sakit dan tarif kapitasi untuk puskesmas dan klinik, serta melakukan penetapan terhadap jenis obat dalam formularium obat nasional dan demikian pula penetapan alat-alat kesehatan dalam kompendium alat kesehatan. Merupakan keharusan bagi BPJS Kesehatan untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan menteri kesehatan tersebut pada segenap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengannya" (Putri: 2016). Untuk mencukupi operasional dan pembayaran klaim, BPJS masih mengacu pada sumber dana keuangan BPJS Kesehatan. Sumber dana terbesar dari Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber APBN, selain itu pengumpulan iuran peserta mandiri dan non PBI serta sumber-sumber dana BPJS lainnya. Dana yang terkumpul oleh BPJS kesehatan kemudian dialokasikan untuk pembayaran layanan kesehatan yang diberikan kepada penyedia jasa kesehatan. Dalam laman web Jamsos Indonesia (Tim redaksi, 2016) dikemukakan bahwa "tarif Ina CBG's mengacu pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 mengenai standar tarif pelayanan kesehatan pada faskes tingkat pertama dan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional adalah sebesar besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan berbagai diagnosis penyakit." Dalam

pelaksanaan program JKN penentuan besaran tarif INA-CBG's ditentukan mengacu pada basis data costing dari 137 RS Pemerintah dan RS Swasta serta melibatkan data coding dari 6 juta kasus penyakit. Besaran biaya yang ditetapkan dipengaruhi oleh sejumlah aspek pada sistem INA-CBG's, antara lain terdapatnya diagnosa utama, adanya diagnosa sekunder berupa penyerta (comorbidity) atau penyulit (complication), tingkat keparahan, bentuk intervensi, serta variasinya umur pasien. Maka dapat dipahami secara ringkasnya bahwa tarif INA-CBG's yang ditentukan tersebut merupakan biaya yang harus dibayarkan selaras dengan ongkos atau *cost* per episode dari suatu pelayanan kesehatan dalam suatu rangkaian perawatan pasien sampai selesai. Dengan pola paket INA-CBG's, menurut informasi seputar BPJS Kesehatan sebagaimana termuat dalam laman web seputar info BPJS Kesehatan (Tim Info BPJS Kesehatan, 2014), "bahwa pembayaran tersebut sudah termasuk ongkos baik pada konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium, radiologi (rontgen) dan lab lainnya, obat Formularium Nasional (Fornas) maupun obat bukan Fornas, bahan dan alat medis habis pakai, akomodasi atau kamar perawatan, biaya lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien." Komponen biaya yang sudah termasuk ke dalam paket INA-CBG's telah ditentukan besaran sebelumnya dan menjadi acuan buat BPJS Kesehatan untuk membayar biaya tersebut sehingga tidak lagi dibebankan prihal biaya tersebut kepada pasien. Berikut merupakan contoh tarif untuk rawat inap yang digunakan sebagai acuan oleh rumah sakit dalam membebankan biaya tagihan kepada BPJS Kesehatan (Tim redaksi, 2016)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

No	Kode INA-CBG	Deskripsi Kode INA-CBG	Tarif Kelas 3	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1
1	A-4-10-I	SEPTIKEMIA RINGAN	3.255.749	3.906.899	4.558.049
2	A-4-10-II	SEPTIKEMIA SEDANG	5.562.095	6.674.514	7.786.933
3	A-4-10-III	SEPTIKEMIA BERAT	7.855.880	9.427.056	10.998.232
4	A-4-11-I	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA RINGAN	7.088.577	8.506.292	9.924.007
5	A-4-11-II	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA SEDANG	12.485.416	14.982.500	17.479.583
6	A-4-11-III	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA BERAT	20.422.950	24.507.540	28.592.130
7	A-4-12-I	DEMAM RINGAN	3.568.515	4.282.218	4.995.921
8	A-4-12-II	DEMAM SEDANG	4.443.939	5.332.727	6.221.514
9	A-4-12-III	DEMAM BERAT	4.742.946	5.691.536	6.640.125
10	A-4-13-I	INFEKSI NON BAKTERI RINGAN	4.546.533	5.455.839	6.365.146
11	A-4-13-II	INFEKSI NON BAKTERI SEDANG	5.369.563	6.443.476	7.517.389
12	A-4-13-III	INFEKSI NON BAKTERI BERAT	6.750.986	8.101.183	9.451.380
13	A-4-14-I	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN	3.783.365	4.540.038	5.296.710
14	A-4-14-II	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG	4.866.364	5.839.637	6.812.910
15	A-4-14-III	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT	5.575.708	6.690.850	7.805.992
16	A-4-15-I	INFEKSI HIV RINGAN	5.682.628	6.819.154	7.955.679
17	A-4-15-II	INFEKSI HIV SEDANG	8.506.218	10.207.462	11.908.705
18	A-4-15-III	INFEKSI HIV BERAT	10.674.537	12.809.444	14.944.352
19	B-1-01-I	PROSEDUR PENCANGKOKAN HATI RINGAN	58.061.438	69.673.726	81.286.013
20	B-1-01-II	PROSEDUR PENCANGKOKAN HATI SEDANG	64.057.111	76.868.533	89.679.955

Gambar 4.1 tarif Ina CBG's 2013 Regional 1 Rumah Sakit Kelas A

Pola Pembayaran BPJS Kesehatan kepada faskes tingkat lanjut seperti pada rumah sakit berbeda dengan faskes pertama yang menggunakan sistem kapitasi. Pada faskes lanjutan pola pembayaran diberlakukan sistem *fee for service* namun dengan besaran tarif yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pada paket tarif dalam INA-CBGs. Cara pembayaran *fee for service* yang diterapkan secara konvensional terdahulu ditentukan secara sepihak oleh provider kesehatan (rumah sakit / klinik dan sebagainya) meski berorientasi pada pelayanan namun tidak menutup kemungkinan terjadinya unsur komersialisasi pada layanan kesehatan tersebut. Pada sistem Ina CBGs, BPJS kesehatan tarif layanan telah ditentukan, kebijakan penentuan besaran tarif oleh BPJS Kesehatan kerap kali menghadapi kasus komplainan dari pihak provider rumah sakit yang merasa bahwa biaya kesehatan yang mengacu patokan tarif Ina CBGs terlampaui kecil dari layanan riil yang telah diberikan pihak rumah sakit kepada pasien peserta JKN BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi lebih runyam apabila faskes tingkat pertama ternyata tidak optimal dalam memberikan layanan kesehatan. Adakalanya anggaran kapitasi di faskes pertama sudah mulai menipis tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan terjadinya Moral Hazard. Fenomena kasus yang mungkin terjadi

misalkan demi upaya menghemat biaya kapitasi untuk layanan primer faskes tingkat pertama kemudian main memudahkan saja proses rujukan guna mengirimkan pasiennya ke faskes tingkat lanjutan. Padahal didapati fakta sesungguhnya pasien belum patut dipindah rujukan karena masih dalam jangkauan kemampuan sumber daya yang ada di faskes tingkat pertama tersebut. Proses rujukan pengiriman ke rumah sakit dibuat bukan melihat kondisi riil keadaan pasien secara prosedural medis namun lebih kepada upaya mengeruk keuntungan atau menekan penggunaan dana kapitasi dan melempar masalah ke pihak lain.

Proses yang tidak prosedural medis dalam mengirim pasien rujukan menyebabkan rumah sakit kewalahan menangani banyaknya pasien peserta BPJS kesehatan. Menurut Karmawan laman webnya (Karmawan, Budi, 2014 “RSCM melayani hampir 2200 pasien per hari, RS Fatmawati hampir 1500 pasien per hari, RS Kanker Dharmais lebih dari 1000 pasien per hari, begitu juga dengan RS lain di Jakarta. Inilah yang terjadi bila sistem rujukan tidak berjalan sebagaimana meskinnya.” Membeludaknya jumlah pasien akan memperbesar tagihan atau klaim biaya atas pengobatan rumah sakit tersebut. Dana pembayaran klaim tagihan tersebut sebagian besarnya di ambil dari anggaran APBN. Di negara maju yang telah juga

memberlakukan sistem pembiayaan yang serupa dengan JKN di Indonesia diketahui bahwa 65% keluhan pasien sudah bisa ditangani di faskes layanan primer. Sekiranya ini bisa diterapkan di Indonesia maka penyerapan dana kapitasi untuk faskes pertama sudah optimal sehingga BPJS bisa menghemat tagihan klaim (tarif Ina CBGs) pada faskes lanjutan. Dalam prakteknya BPJS kerap kali mengalami defisit anggaran dalam memenuhi klaim pembayaran terhadap layanan faskes. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam ulasan yang diberitakan oleh Simorangkir dalam rubrik webnya (Simorangkir Eduardo, 2016), mengatakan “PMN (Penyertaan Modal Negara) yang diperlukan sebesar Rp 6,827 triliun. PMN ini akan digunakan untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan karena adanya defisit. Defisit tersebut terjadi akibat adanya *missmatch* antara klaim peserta yang lebih tinggi daripada iuran masuk.” Pernyataan menteri keuangan tersebut sejalan dengan ulasan data-data yang dihimpun oleh Eduardo Simorangkir dalam laman tersebut diatas mengenai perlunya penambahan PMN untuk BPJS Kesehatan dikarenakan semakin banyaknya jumlah peserta JKN mencapai 156,79 juta jiwa (*audited*) per 31 desember 2015. Pada saat mendaftar diketahui sebanyak 14,96 juta jiwa (9,54%) sudah dalam kondisi sakit berat yang membutuhkan biaya tinggi dan langsung memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti misalkan pasien dengan kondisi gagal ginjal yang langsung membutuhkan penanganan cuci darah. Akibat hal tersebut “Dana Jaminan Sosial” atau DJS pada tahun 2015 menunjukkan sentimen negatif sebesar Rp 5,76 triliun (kumulatif negatif Rp 9,07 triliun). Pada tahun 2016 pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku melakukan upaya peninjauan ulang atas besaran iuran dan mengalokasikan penambahan iuran tersebut dalam APBN tahun anggaran 2016. Pada kenyataannya

perhitungan iuran ini pun belum sesuai dengan hasil aktuaria dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, maka penambahan iuran masih belum mampu mengatasi permasalahan keuangan DJS. Diproyeksikan pada tahun 2016 masih menunjukkan sentimen negatif sebesar Rp 6,827 triliun (kekurangan likuiditas). Masih berdasar data dari (Simorangkir,2016) dalam laman tersebut diatas “asumsi iuran yang diterima kurang-lebih sebesar Rp 70,03 triliun sementara beban jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan sebesar Rp 73,09 triliun, terdapat minus pengeluaran sekitar 3,06 triliun sedangkan kebutuhan beban operasional BPJS sekitar Rp 3,77 triliun, total minus menjadi kurang lebih sekitar 6,83 triliun (hasil pembulatan)”. Biaya pengeluaran besar yang harus ditanggung BPJS Kesehatan tentu menambah beban anggaran negara dan juga menjadi tambahan beban iuran bagi peserta yang menjadi sumber utama pendanaan bagi JKN BPJS kesehatan. Belakangan ini diketahui kebijakan tarif atas peserta mandiri JKN BPJS Kesehatan sejak 1 april 2016 silam mengalami kenaikan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu sendiri diundat-undangkan pada 1 Maret lalu. Dengan terbitnya Perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu, Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu (Sekretariat kabinet RI, 2016), Hal itu semua menjadi ironi ketika masyarakat mencita-citakan adanya jaminan kesehatan yang paripurna dan mendapat layanan secara cuma-cuma tanpa terdapat pembebanan iuran kesehatan sebagaimana tertuang dalam UUD 45 Pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pelayanan umum yang layak”. Indonesia negeri yang begitu kaya dengan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya maka diharapkan kedepannya pemerintah harus mampu memperkuat anggaran guna mencukupi kebutuhan negara termasuk dalam sektor kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memiliki suatu regulasi yang mendukung optimalisasi penambahan sumber dana kesehatan. Ditengah masih carut marutnya tata kelola negara yang menyebabkan menguapnya sejumlah besar kekayaan negara dengan maraknya korupsi, kolusi maupun pencucian uang hasil kejahatan adalah dengan diharapkan hadirnya undang-undang atau peraturan yang berupaya untuk mengembalikan kembalinya semua aset berupa hasil sitaan dari kejahatan tersebut masuk ke kas negara guna memperkuat anggaran negara dan tentu saja termasuk guna mengoptimalkan anggaran bagi pendanaan jaminan kesehatan nasional. Cara lain bisa pula dibuatkan kebijakan pengalihan subsidi bbm (bahan bakar minyak) sebagai solusi penambahan dana JKN.

Di era JKN BPJS Kesehatan ini kekhawatiran masyarakat atas biaya pengobatan menjadi lebih diminimalisir, dengan rutin membayar premi BPJS kesehatan maka klaim biaya pengobatan bagi masyarakat tersebut sudah di *cover* oleh BPJS. Kondisi ini menimbulkan animo masyarakat untuk berobat dengan memanfaatkan layanan proteksi kesehatan BPJS semakin meningkat banyak. Pada ulasan ini dihimpun data dari sejumlah pandangan menghadapi realita dilapangan baik itu dari sudut pandang pengunjung rumah sakit pada umumnya maupun sisi lain dari pada sudut pandang pihak tenaga medisnya. Dalam hal ini mengacu pada ulasan data yang di informasikan oleh dr Budi Karmawan dalam laman webnya (Karmawan Budi, 2014),maka bisa dicermati bersama bahwa “animo masyarakat yang meningkat ini

menimbulkan *demand* yang besar dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan”. Suatu keniscayaan yang terjadi saat ini rumah sakit kebanjiran pasien melebihi ambang batas kapasitas yang wajar. Antrian panjang pendaftaran menjadi tidak terelakan, lamanya proses waktu tunggu pasien pun tak bisa dihindarkan lagi. Kondisi *crowded* ini berdampak pada jasa pelayanan menjadi tidak nyaman. Jumlah kunjungan pasien yang banyak membeludak menyebabkan beban kerja para tenaga medis pun semakin berat. Beban kerja yang berat tentu akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan sedangkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan itu sangat bergantung pada perilaku, sikap, kualitas, kompetensi dan motivasi para tenaga kesehatan. Guna memaksimalkan pelayanan yang bermutu merupakan suatu kepatutan agar manajemen pada tiap-tiap provider kesehatan memperbaiki sistem manajemennya guna menunjang kinerja tenaga medis dan pelayanan di faskesnya dengan imbalan dan insentif yang proporsional sesuai beban kerja dan keaktifannya. Di sisi lain agar efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana INA CBGs dilakukan secara optimal baik bagi rumah sakit dan BPJS kesehatan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah harus berlaku komprehensif baik bagi faskes pertama, faskes lanjutan dan tentu juga bagi pemerintah itu sendiri dalam mensikapi kebijakan atas JKN BPJS kesehatan tersebut. Dimulai dengan upaya menekan sebesar mungkin angka rujukan kunjungan ke rumah sakit. Hal tersebut bisa optimal jika keluhan pasien sudah bisa terselesaikan dengan baik di faskes layanan primer. Layanan primer atau faskes pertama berbasis sistem pembayarannya dengan sistem kapitasi (beban pasien perkepala perbulan telah di anggarkan dan di bayarkan sebelumnya), artinya pemerintah sudah menganggarkan sebelumnya untuk estimasi pengeluaran per kepala dari pasien yang sakit

diwilayah tersebut. Optimalisasi faskes pertama bisa optimal dalam layanan caranya dengan membangun sarana, prasarana lengkap dan segenap sumber daya yang handal agar kinerja menjadi lebih terpercaya bagi masyarakat. Bila pasien banyak yang sembuh pada faskes pertama maka dengan ini akan mampu menekan jumlah pasien rujukan ke rumah sakit faskes lanjutan yang berbasis pola bayar tarif INA CBGs sehingga tagihan klaim pembayaran Ina CBGs dari tiap-tiap rumah sakit pada faskes lanjutan menjadi lebih terminimalisir. Diantara cara membangun sumber daya handal diantaranya ialah upaya pembenahan manajemen dan profesionalitas faskes tingkat satu perlu ditingkatkan, misal dengan upaya antara lain diberikannya insentif yang layak, adil dan transparan bagi tenaga medis/tenaga pelayanan yang bekerja agar lebih aktif dan maksimal. Harus ada upaya peningkatan kemampuan keahlian para dokter di layanan primer. Oleh sebab itu perlunya mekanisme yang mengatur skala sistem *reward* dan *punishment* untuk kelayakan rujukan ke rumah sakit sehingga layanan faskes primer menjadi lebih obyektif sesuai kebutuhan dalam membuat surat rujukan. Optimalnya faskes satu memperkecil angka rujukan ke faskes lanjutan dan tentu menghemat anggaran karena menekan angka klaim atas taris Ina CBGs di faskes lanjutan.

4.3. Evaluasi Program BPJS berbasis Indonesian Case base Groups (INA-CBG's)

Pemerintah pun wajib membenahi dan menindaklanjuti permasalahan serius seputar kecukupan dana yang mampu untuk dapat menutup beban klaim sesuai tarif BPJS dalam menutupi biaya operasional rumah sakit selaku provider kesehatan dan mitra bagi BPJS. Harus ada suatu kebijakan yang adil dan terpisah mengenai rumah sakit kelolaan pemerintah yang masih mendapat bantuan dana operasional dari negara

seperti pada gaji karyawannya (PNS) dengan rumah sakit kelolaan swasta yang operasionalnya dilakukan penuh secara mandiri. Pemerintah harus membentuk tim evaluasi yang mengakomodir semua pihak guna melakukan evaluasi optimal secara berkala untuk menindaklanjuti masalah seputar kecukupan dana dan beban atas tarif ini serta melakukan kerjasama penuh dengan semua pihak termasuk organisasi profesi untuk menyusun tarif INA CBGs yang lebih valid dan sinergis dengan keuangan rumah sakit. Pemerintah diharap mampu membuat kebijakan yang optimal mengenai obat-obatan serta lebih mendorong hidup dan tumbuhnya industri bahan baku obat dalam negeri guna menghapus ketergantungan penuh pada bahan-bahan obat impor. Saat membuka rapat pleno penyusunan formularium nasional (Fornas) pada tahun 2015 Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengemukakan "Karena kita banyak bergantung pada bahan impor, saat nilai tukar dolar naik, maka harga obat tidak bisa dipungkiri akan terpengaruh,". Lanjut beliau masih dalam kegiatan yang sama juga menyatakan "saat ini 90 persen bahan baku obat masih bergantung pada impor. Meski 73 persen produk yang beredar di Indonesia merupakan produk industri farmasi lokal" (Inung dan sir, 2015), "90 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor," Kondisi menjadi tidak kondusif bila nilai dolar mengalami kenaikan maka harga obat pun harus disesuaikan. Harga obat yang terjangkau menjadi komponen penting dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Biaya penggunaan obat tentu akan mempengaruhi pengeluaran anggaran JKN secara keseluruhan. Pada rumah sakit faskes tingkat lanjutan juga dituntut untuk melakukan pembenahan dalam menghadapi arus perubahan di era JKN ini. Mengacu referensi dan pengalaman serta wawasan dari sudut pandang seorang praktisi medis dr Budi Karmawan pada *release* yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

dilakukannya seputar ulasan peningkatan mutu layanan BPJS (Karmawan, Budi, 2014), beliau mengemukakan bahwa "pembenahan yang harus dilakukan antara lain rumah sakit faskes lanjutan harus menata ulang perencanaan dan anggaran belanjanya dengan ketepatan alokasi untuk operasional, karyawan dan investasi." Manajemen faskes lanjutan harus mampu mewujudkan kesadaran untuk membangun pelayanan yang efisien, bermutu dan kompetitif. Selain itu harus mampu membangun program keselamatan pasien rumah sakit yang mampu mengendalikan dan mengeliminasi kejadian yang tidak diharapkan, harus mampu memperbaiki tatanan sistem pelayanan rekam medik dan administrasi klaim, manajemen faskes lanjutan juga harus mendorong terwujudnya sistem insentif berdasarkan beban kerja dan performa secara transparan dan adil. Faskes lanjutan diharapkan melakukan upaya kaji ulang, identifikasi maupun tindakan eliminasi atas layanan (medik dan non medik) yang terbukti tidak efisien dan bermutu. Menjadi bagian yang tak kalah penting manajemen faskes lanjutan harus meninjau ulang SOP pelayanan, pemeriksaan penunjang, penggunaan obat dan bahan habis pakai serta melakukan standarisasi obat dan AMHP dengan formularium serta penggunaan obat generik. Manajemen faskes lanjutan juga tidak boleh serampangan dalam menggunakan sumber daya yang ada dan harus cerdas dalam meminimalisir variasi pelayanan dengan Clinical pathway agar anggaran tidak membengkak. Profesionalisme kerja juga harus ditunjukkan oleh pekerja medis maupun operator lapangan lainnya berkaitan dengan implementasi layanan dengan sistem INA-CBGs ini. Kecerobohan mereka dapat merugikan pihak-pihak lain termasuk diantaranya institusi rumah sakit itu sendiri. Sebagaimana telah diutarakan oleh Indriwanto Sakidjan dalam jurnal ARSI mengemukakan

bahwa " ..ketidaktepatan pengisian catatan rekam medis dan ketidaktepatan melakukan koding dalam INA-CBG yang menyebabkan pelayanan menanggung risiko financial..", lanjut beliau lagi dalam mensikapi sistem INA-CBGs, " Pada sistem ini, pemberi pelayanan ikut menanggung risiko finansial apabila tidak efisien, tidak tepat dalam pengisian catatan rekam medis, dan tidak tepat dalam melakukan koding. Risiko finansial yang terjadi di antaranya yakni selisih kurang pada klaim" (Sakidjan, Indriwanto, 2014, Analisis Kelengkapan Catatan Rekam Medis Kasus Tetralogy of Fallot pada Implementasi INA-CBGs di RSPJN Harapan Kita. Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan ARSI vol 1 no 1 oktober 2014 halaman 26-31). Kompleksitas polemik proteksi kesehatan JKN serta kecukupan dana yang mengacu pada besaran tarif INA CBGs maupun dampak kondisi layanannya tidak dapat diselesaikan secara parsial namun harus komprehensif baik pada regulasi, implementasi dan setiap obyek pelaku yang terlibat didalamnya.

5. Kesimpulan

Dengan merunut pada pemaparan dari penulis tersaji tersebut diatas mengenai ulasan penerapan pola pembayaran INA-BPJS Kesehatan ini dapat penulis simpulkan antara lain Program JKN BPJS kesehatan yang telah berjalan saat ini masih belum optimal dalam implementasi menjalankan amanah undang-undang 1945 guna memberikan kemaslahatan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih diperlukan anggaran dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional termasuk dalam hal pembayaran klaim yang sesuai dengan tarif Ina CBGs yang mejadi instrumen pembayaran bagi faskes lanjutan. Perlunya pengkajian dan evaluasi secara kontinyu dan berkala mengenai

kebijakan penentuan tarif Ina CBGs yang layak secara adil dan independen. Secara teknologi informasi aplikasi program INA CBGS pun harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tuntutan kebutuhan medis yang ada. Meski pembayaran tarif Ina CBGs telah di patok sejumlah tarif tertentu oleh pemerintah dengan limit tertentu namun provider layanan kesehatan dituntut untuk cermat memperhatikan aspek penunjang kinerja tenaga medis dan pelayanan di faskesnya semisal dengan imbalan dan insentif yang proporsional sesuai beban kerja dan keaktifannya. Hal tersebut bertujuan guna mendorong timbulnya motivasi dan etos kerja yang optimal sehingga mampu memberi pelayanan terbaik. Pemerintah wajib menerapkan suatu formula yang mampu menekan besarnya tagihan klaim pengobatan dengan tarif ina cbgs di faskes lanjutan ini dengan upaya yang harus dilakukan diantaranya menekan angka jumlah pasien rujukan serta mengoptimalkan faskes primer sebagai media pencegahan dan penyembuhan penyakit bagi pasien. Pemerintah diharap mampu membuat kebijakan yang optimal mengenai obat-obatan serta lebih mendorong hidup dan tumbuhnya industri bahan baku obat dalam negeri guna menghapus ketergantungan penuh pada bahan-bahan obat impor. Upaya ini diharap mampu menekan tingginya harga obat dan jumlah pengeluaran anggaran JKN secara keseluruhan termasuk besarnya beban klaim obat atas tarif ina cbgs. Untuk menyesuaikan iklim kultur JKN BPJS terkait dengan kecukupan dana dengan mengacu besaran tarif yang telah di patok bagi faskes lanjutan maka seyogyanya institusi provider kesehatan di faskes lanjut tersebut harus menata ulang mengenai perencanaan dan anggaran belanjanya serta membenahi manajemen di segala aspek baik itu dalam tatanan sumber daya manusia, keuangan maupun pelayanannya. Kompleksitas polemik penerapan tarif

INA CBGs JKN BPJS Kesehatan akan mampu diselesaikan permasalahannya asalkan sinergi semua aspeknya baik pada tataran regulasi, implementasi dan obyek pelaku yang terlibat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ita Hartati, Ak., MBA., (2014) *Dana Kapitasi BPJS Kesehatan: Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya*, BDK Makasar. 2014, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288-dana-kapitasi-bpjs-kesehatan-pelaksanaan-dan-pertanggungjawabannya>. Diambil dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288-dana-kapitasi-bpjs-kesehatan-pelaksanaan-dan-pertanggungjawabannya>
- Info BPJS Kesehatan. 2014. *Begini Cara Pembayaran INA-CBG's BPJS Kesehatan*. Diakses dari http://m.kompasiana.com/infobpjs-kesehatan/begini-cara-pembayaran-ina-cbg-s-bpjs-kesehatan_54f6a68ba33311bf518b45a4
- Inung dan sir. 2015. *90 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor*. Diakses dari <http://poskotanews.com/2015/09/03/90-persen-bahan-baku-obat-masih-impor/>
- Karmawan, Budi. 2014. *Insentif Berkeadilan, Solusi Peningkatan Mutu Layanan BPJS*. Diakses dari http://www.kompasiana.com/budi_karmawan/insentif-berkeadilan-solusi-peningkatan-mutu-layanan-bpjs_54f6dcd5a33311b5408b46af

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Kemenkes. 2014. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case base Groups (INA-CBGs). Diakses dari <http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduh/PMK%20No.%2027%20ttg%20Juknis%20Sistem%20INA%20CBGs.pdf>.
- Luknanto, Djoko. 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>
- NIHRD. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diakses dari <http://www.ina-respond.net/wp-content/uploads/2015/05/3-UU-No-36-tahun-2009-tentang-Kesehatan.pdf>
- Pratiwi, Galuh Astri. 2015. Mengenal Lebih Dekat Sistem Pembiayaan JKN ke Rumah Sakit yang Katanya Bikin Rugi. Diakses dari http://www.kompasiana.com/astri_gprtw/mengenal-lebih-dekat-sistem-pembiayaan-jkn-ke-rumah-sakit-yang-katanya-bikin-rugi_54f37edd745513a42b6c77b2
- Putri, Eka Asih. 2016. Geger Pembayaran Prospektif. Diakses dari http://archives.jamsosindonesia.com/identitas/geger_pembayaran_prospektif
- Sakidjan, Indriwanto. 2014. Analisis Kelengkapan Catatan Rekam Medis Kasus Tetralogy of Fallot pada Implementasi INA-CBGS di RSPJN Harapan Kita. Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Universitas & PERMAPKIN. ARSI vol 1 no 1 oktober 2014 halaman 26-31. Diakses dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/arsi/article/viewFile/5209/3494>
- Sekretariat kabinet RI. 2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Th 2016. Diakses dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/unduh/index/537>
- Simorangkir, Eduardo. 2016. Antisipasi Defisit, BPJS Kesehatan Ajukan 'Suntikan' Rp 6,82T. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2016/06/20/160534/3237605/4/antisipasi-defisit-bpjs-kesehatan-ajukan-suntikan-rp-682-t>
- Tim penyusun bahan sosialisasi dan advokasi JKN. 2014. Buku Pegangan Sosialisasi Jkn. Diakses dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>
- Tim redaksi. 2016. Tarif Ina CBG's Berlaku 1 Januari 2014. Diakses dari <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/496>
- Tim redaksi klik BPJS. 2014. Apa Itu INA CBGS BPJS Kesehatan Inilah Penjelasannya. Diakses dari <http://klikbpjs.com/apa-itu-ina-cbgs-bpjs-kesehatan-inilah-penjelasannya>
- TNP2K. 2014. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diakses dari <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>

Tri Sulistiyono, Seno. 2016. Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan agar Duduk Bersama. Diakses dari <http://m.tribunnews.com/nasional/2016/03/19/iuran-bpjs-kesehatan-pemerintah-dan-pemangku-kepentingan-agar-duduk-bersama>

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR), CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), WORKING CAPITAL TURNOVER (WCTO) DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)
(STUDI EMPIRIS PADA SEKTOR CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2015)**

Mohamad Zulman Hakim

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: mohamadzulmanhakim@gmail.com

ABSTRACT

This study uses population consumer goods industry sector the period 2014 - 2015 with a purposive sampling method, the sample of twenty companies. Independent variables used in this study Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), the Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Working Capital Turnover (WCTO), Asset Structure (STA) and the dependent variable used in this study return on Asset (ROA). This study aims to prove empirically the influence of Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), the Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Working Capital Turnover (WCTO), Asset Structure (STA) to Return on Asset (ROA) and the method of analysis used in this study Multiple Linear Regression. The results F test showed that Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Working Capital Turnover (WCTO), Asset Structure (STA) significantly (Significant levels of ≤ 0.01 , or 1%) to Return on Asset (ROA). Partially (t test) Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) significantly (Level of Significant ≤ 0.01 , or 1%) to Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR) significantly (Level of Significant ≤ 0.05 or 5%) to Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) not significant effect to Return on Asset (ROA), Working Capital Turnover (WCTO) significantly (Level of significant ≤ 0.01 , or 1%) to Return on Asset (ROA), Asset Structure (STA) significantly (Level of significant ≤ 0.05 or 5%) to Return on Asset (ROA).

Key Words: CSR (G.4), CR, WCTO, DER, STA, ROA

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan populasi sektor consumer goods industry periode 2014 – 2015 dengan metode purposive sampling, maka sampel sebanyak dua puluh perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Working Capital Turnover (WCTO), Struktur Aktiva (STA) dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini Return on Asset (ROA). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara

empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, *Struktur Aktiva (STA)* terhadap *Return on Asset (ROA)* dan Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini *Regresi Linier Berganda*. Hasil penelitian Uji F menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, *Struktur Aktiva (STA)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* $\leq 0,01$ atau 1%) terhadap *Return on Asset (ROA)*. Secara parsial (Uji t) *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* $\leq 0,01$ atau 1%) terhadap *Return on Asset (ROA)*, *Current Ratio (CR)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* $\leq 0,05$ atau 5%) terhadap *Return on Asset (ROA)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)*, *Working Capital Turnover (WCTO)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* $\leq 0,01$ atau 1%) terhadap *Return on Asset (ROA)*, *Struktur Aktiva (STA)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* $\leq 0,05$ atau 5%) terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Kata Kunci: CSR (G.4), CR, WCTO, DER, STA, ROA

1. PENDAHULUAN

Manajemen suatu perusahaan dituntut untuk meningkatkan imbal hasil bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya (Hery, 2016). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Riyanto, 2011) karena profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham dan Daves, 2010) dan profitabilitas tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan yang dapat dikaitkan dengan tingkat penjualan yang dapat diciptakan (Husnan, 2012). Salah satunya dapat diukur dengan *Return on Asset (ROA)* yang merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan. (Hanafi dan Halim, 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi pada industri *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 -

2015, karena industri *Consumer Goods* diantaranya adalah perusahaan – perusahaan makanan dan minuman, perusahaan – perusahaan farmasi, perusahaan – perusahaan kosmetik dan kebutuhan rumah tangga, perusahaan peralatan rumah tangga serta perusahaan – perusahaan rokok lebih mudah terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap setiap kejadian internal maupun eksternal perusahaan serta terkait dengan lingkungan dan masyarakat.

Fenomena yang terjadi adanya penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,01 (1%) pada PT. Akasha Wira Internasional, Tbk dari 0,06 (6%) tahun 2014 menjadi 0,05 (5%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,05 (5%) pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dari 0,09 (9%) tahun 2014 menjadi 0,04 (4%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,02 (2%) pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk dari 0,06 (6%) tahun 2014 menjadi 0,04 (4%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,12 (12%) pada PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk dari 0,36 (36%) tahun 2014 menjadi 0,24 (24%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,09 (9%) pada PT. Sekar

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Bumi,Tbk dari 0,14 (14%) tahun 2014 menjadi 0,05 (5%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,08 (8%) pada PT. HM Sampoerna,Tbk dari 0,35 (35%) tahun 2014 menjadi 0,27 (27%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,02 (2%) pada PT. Kalbe Farma,Tbk dari 0,17 (17%) tahun 2014 menjadi 0,15 (15%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,03 (3%) pada PT. Merck,Tbk dari 0,25 (25%) tahun 2014 menjadi 0,22 (22%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,02 (2%) pada PT. Tempo Scan Pasific,Tbk dari 0,10 (10%) tahun 2014 menjadi 0,08 (8%) tahun 2015. Penurunan *Return on Asset (ROA)* sebesar 0,03 (3%) pada PT. Unilever Indonesia,Tbk dari 0,40 (40%) tahun 2014 menjadi 0,37 (37%) tahun 2015.

Salah satu topik yang masih menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam dunia bisnis saat ini dan memiliki kaitannya dengan *Return on Asset (ROA)* adalah *Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Lako, 2011). Selain itu Manajemen modal kerja yang merupakan administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar (Horne dan Wachowicz, 2012).

Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR) merupakan proses komunikasi akan dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan ekonomi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan keterbukaan ini perusahaan menciptakan suasana kepercayaan dengan masyarakat dan secara tidak langsung perusahaan

memperoleh jaminan investasi berupa kepercayaan publik atas operasi aktivitas perusahaan serta masyarakat akan merasa terjamin aktivitas dan lingkungannya. Bahwa semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maka semakin tinggi tingkat ketersediaan masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan respon yang baik bagi perusahaan atas *Corporate Sosial Responsibility Disclosure*, karena akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan (Lako, 2011). *GAP* juga terjadi pada penelitian terdahulu dimana candrayanthi dan Saputra (2013), Sriviana (2013) menyatakan bahwa *CSR* berpengaruh signifikan positif terhadap *ROA*. Berbanding terbalik dengan penelitian Yparto, Frisko, Eriandani (2013) yang menyatakan bahwa *CSR* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

Current Ratio (CR) merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Aktiva lancar yang dimiliki terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan hutang lancar terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang gaji, dan hutang jangka pendek lainnya (Harjito dan Martono, 2011). Salah satu unsur kebijakan modal kerja berasal dari aktiva lancar berupa kas, piutang dan persediaan. Mengelola modal kerja berarti mengelola aktiva lancar yang biasanya dikaitkan dengan hutang lancar, oleh sebab itu dalam memahami modal kerja berkaitan pula dengan hutang lancar karena dengan kondisi tersebut aktiva lancar yang dikelola dengan baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga akan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) bagi perusahaan (Riyanto, 2011). *GAP* juga terjadi pada penelitian terdahulu dimana Jatismara (2011),

Setyawan (2015) menyatakan bahwa *CR* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Widiyanti dan Bakar (2014) yang menyatakan bahwa *CR* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya total aktiva yang dibiayai oleh kreditur perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham (Harjito dan Martono, 2011). *GAP* juga terjadi pada penelitian terdahulu dimana Sudaryo dan Sari (2013) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Sebaliknya dengan penelitian Yanto (2013) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

Working Capital Turnover (WCTO) merupakan perbandingan antara penjualan dengan jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Semakin besar rasio perputaran modal kerja maka semakin baik suatu perusahaan dimana persentase modal kerja yang ada mampu menghasilkan jumlah penjualan tertentu. Selain itu semakin besar rasio ini menunjukkan efektifnya pemanfaatan modal kerja yang tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan (Riyanto, 2011). *GAP* juga terjadi pada penelitian terdahulu dimana Ismiati, Puspitaningtyas, Sisbintari (2013) menyatakan bahwa *WCTO* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Berbanding terbalik dengan penelitian Widiyanti dan Bakar (2014) menyatakan bahwa *WCTO* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

Struktur aktiva merupakan penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva

tetap. Struktur aktiva merupakan perbandingan jumlah aktiva lancar dengan total aktiva. Semakin besar rasio, maka semakin baik karena menunjukkan tersedianya kas, piutang dan persediaan yang merupakan aktiva lancar yang paling likuid dibanding dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Adanya aktiva yang likuid dapat digunakan sewaktu – waktu membiayai kebutuhan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba (Riyanto, 2011). *GAP* juga terjadi pada penelitian terdahulu dimana Hakim (2013) menyatakan bahwa Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)*. Berbanding terbalik dengan penelitian Hanum (2008) menyatakan bahwa Struktur Aktiva berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Investment*.

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR)* berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?
2. Apakah *Current Ratio (CR)* berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?
4. Apakah *Working Capital Turnover (WCTO)* berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?
5. Apakah Struktur Aktiva (*STA*) berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?
6. Apakah *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)* dan Struktur Aktiva (*STA*) berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*?

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Dasar (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Legitimasi (*legitimacy theory*)

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat member *costs* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, *CSR* merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela (Lako, 2011).

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Hadi, 2011).

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency problem potensial untuk terjadi dalam perusahaan dimana manajer memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan. Dalam perusahaan perorangan, pemilik sekaligus sebagai manajer akan selalu bertindak memaksimalkan kemakmuran mereka dan meminimumkan pengeluaran yang

tidak diperlukan. Konflik lain yang potensial terjadi dalam perusahaan besar adalah antara *stockholders* dan *debtholders*. Kreditur memiliki hak atas sebagian laba yang diperoleh perusahaan terutama dalam kasus kebangkrutan. Sementara itu pemegang saham memegang pengendalian perusahaan yang akan sangat menentukan profitabilitas dan risiko perusahaan. Peningkatan jumlah utang ini akan mengakibatkan nilai profitabilitas perusahaan menurun, karena semakin banyak kreditur yang mempunyai hak atas aliran kas dan aset perusahaan (Sunyoto dan Susanti, 2015).

2.2 Konsep Teori

2.2.1 *Return on Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas total aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2016). *Return on Investment (ROI)* sering disebut juga dengan *Return on Total Assets (ROA)* dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan penggunaan seluruh aktiva perusahaan yang dimiliki (Syamsuddin, 2002).

2.2.2 *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR D)*

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari

komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan demikian *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela (Lako, 2011).

Adapun hal – hal yang termasuk dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* di *Global Reporting Initiative (GRI)* G.4 adalah kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial (*Triple Bottom Line*). Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing – masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah *item* yang sesungguhnya diungkapkan perusahaan (ΣX) dengan jumlah *item* yang diharapkan diungkapkan perusahaan ($n = 91$ *Item* Indikator).

2.2.2.1 Kategori Ekonomi

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi ditingkat lokal, nasional, dan global. Kategori Ekonomi menggambarkan arus modal di antarapemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomitama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat.

2.2.2.2 Kategori Lingkungan

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup termasuk tanah, udara,

air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energy dan air) dan *output* (seperti emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

2.2.2.3 Kategori Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi. Kategori Sosial berisi Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Tanggung Jawab atas Produk.

2.2.3 Current Ratio (CR)

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Riyanto, 2011). Dalam penelitian ini Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dengan jaminan aktiva lancar yang dimilikinya atau *Current Ratio (CR)* merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar (Riyanto, 2011).

2.2.4 Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya total aktiva yang dibiayai oleh kreditur perusahaan. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan perbandingan antara total *debt* dengan total *equity* (Riyanto, 2011).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

2.2.5 Working Capital Turnover (WCTO)

Perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*) merupakan kemampuan modal kerja berputar dalam suatu periode siklus kas dari perusahaan. Perputaran modal kerja diukur berdasarkan perbandingan penjualan yang dihasilkan dengan aktiva lancar. Perputaran modal kerja mengukur efektifitas penggunaan aktiva lancar untuk menghasilkan penjualan (Riyanto, 2011).

2.2.6 Struktur Aktiva (STA)

Struktur aktiva merupakan penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Rasio struktur aktiva diukur dengan *Current Assets to Total Assets Ratio* yang merupakan perbandingan jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva yang terdapat di perusahaan (Riyanto, 2011).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka Hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) terhadap Return on Asset (ROA)

Implikasi positif dari *concern* perusahaan melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan juga sangat luar biasa karena adanya korelasi positif antara rating tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas. Semakin tinggi (rendah) peringkat tanggung jawab sosial suatu perusahaan, semakin tinggi (rendah) pula tingkat profitabilitas perusahaan tersebut (Lako, 2011). Pada penelitian terdahulu candrayanthi dan Saputra (2013), Sriviana (2013) menyatakan bahwa *CSR* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

H_1 : *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

2.3.2 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return on Assets (ROA)

Current Ratio (CR) merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Aktiva lancar yang dimiliki terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan hutang lancar terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang gaji, dan hutang jangka pendek lainnya (Harjito dan Martono, 2011). Salah satu unsur kebijakan modal kerja berasal dari aktiva lancar berupa kas, piutang dan persediaan. Mengelola modal kerja berarti mengelola aktiva lancar yang biasanya dikaitkan dengan hutang lancar, oleh sebab itu dalam memahami modal kerja berkaitan pula dengan hutang lancar karena dengan kondisi tersebut aktiva lancar yang dikelola dengan baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga akan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) bagi perusahaan (Riyanto, 2011). Pada penelitian terdahulu Jatismara (2011), Setyawan (2015) menyatakan bahwa *CR* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

H_2 : *Current Ratio (CR)* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

2.3.3 Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya total aktiva yang dibiayai oleh kreditur perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang

saham (Harjito dan Martono, 2011). Pada penelitian terdahulu Sudaryo dan Sari (2013) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

H_3 : *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

2.3.4 Pengaruh *Working Capital Turnover (WCTO)* terhadap *Return On Asset (ROA)*

Working Capital Turnover (WCTO) merupakan perbandingan antara penjualan dengan jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Semakin besar rasio perputaran modal kerja maka semakin baik suatu perusahaan dimana persentase modal kerja yang ada mampu menghasilkan jumlah penjualan tertentu. Selain itu semakin besar rasio ini menunjukkan efektifnya pemanfaatan modal kerja yang tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan (Riyanto, 2011). Pada penelitian terdahulu Ismiati, Puspitaningtyas, Sisbintari (2013), menyatakan bahwa *WCTO* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

H_4 : *Working Capital Turnover (WCTO)* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

2.3.5 Pengaruh Struktur Aktiva (STA) terhadap *Return On Asset (ROA)*

Struktur aktiva merupakan penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Struktur aktiva merupakan perbandingan jumlah aktiva lancar dengan total aktiva. Semakin besar rasio, maka semakin baik karena menunjukkan tersedianya kas, piutang dan persediaan yang merupakan aktiva lancar yang paling likuid dibanding dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Adanya aktiva yang likuid dapat digunakan sewaktu – waktu

membayai kebutuhan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba (Riyanto, 2011). Pada penelitian terdahulu dimana Hakim (2013) menyatakan bahwa Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

H_5 : Struktur Aktiva (STA) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

2.3.6 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR D)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, Struktur Aktiva (STA) terhadap *Return on Asset (ROA)*

Adanya Implikasi positif dari *concern* perusahaan melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Lako, 2011). Manajemen modal kerja merupakan administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar (Horne dan Wachowicz, 2012). Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham dan Daves, 2010). Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan yang dapat dikaitkan dengan tingkat penjualan yang dapat diciptakan (Husnan, 2012). *Return on Asset (ROA)* dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan penggunaan aktiva perusahaan yang dimiliki (Tandelilin, 2010). Pada penelitian terdahulu candrayanthi dan Saputra (2013), Sriviana (2013) menyatakan bahwa *CSR D* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Jatismara (2011), Setyawan (2015) menyatakan bahwa *CR* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Sudaryo dan Sari (2013) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Ismiati,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Puspitaningtyas, Sisbintari (2013), menyatakan bahwa *WCTO* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Hakim (2013) menyatakan bahwa Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

H_6 : *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, Struktur Aktiva (STA) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)*.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian juga merupakan cara ilmiah, berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuwan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2012).

Pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian secara kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2012).

3.2. Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi (Priyatno, 2010). Variabel tergantung (Dependen) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dan sifatnya tidak dapat berdiri sendiri (Priyatno, 2010). Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dan sifatnya berdiri sendiri (Priyatno, 2010).

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Skala	Formula
1.	<i>Return on Asset (ROA)</i> (Y)	Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dari seluruh aktiva yang dimilikinya	Ratio	$\frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Assets} \times 100\%$
2.	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)</i> (X ₁)	Pembagian antara jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan perusahaan (ΣX) dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan (n= 91 Item Indikator)	Ratio	$\frac{\sum X}{n}$
3.	<i>Current Ratio (CR)</i> (X ₂)	Perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar dan Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar	Ratio	$\frac{Current\ Assets}{Current\ Liabilitie\ s} \times 100\%$
4.	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> (X ₃)	Perbandingan total <i>debt</i> terhadap total <i>equity</i>	Ratio	$\frac{Total\ Debt}{Total\ Equity} \times 100\%$

5.	<i>Working Capital Turnover (WCTO) (X₄)</i>	perbandingan penjualan dengan jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu	<i>Ratio</i>	$\frac{Sales}{Working\ Capital} \times 100\%$
6.	Struktur Aktiva (STA) (X ₅)	Perbandingan jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva	<i>Ratio</i>	$\frac{Current\ Assets}{Total\ Assets} \times 100\%$

Sumber: dari berbagai literatur

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan populasi pada sektor *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2015. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel, sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2015.
2. Perusahaan sektor *Consumer Goods Industry* yang konsisten *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2015.
3. Perusahaan sektor *Consumer Goods Industry* yang memiliki laporan keuangan auditan dan disajikan secara lengkap periode 2014 - 2015.
4. Perusahaan sektor *Consumer Goods Industry* yang memiliki laporan keberlanjutan (*Corporate Social Responsibility*) periode 2014 - 2015.
5. Perusahaan sektor *Consumer Goods Industry* yang memiliki keuntungan (laba) periode 2014 - 2015.
6. Perusahaan sektor *Consumer Goods Industry* yang menggunakan mata uang rupiah periode 2014 - 2015

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan auditandan laporan keberlanjutan (*Corporate Social Responsibility*) sektor *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2015. Sumber data tersebut dapat diperoleh di Bursa Efek Indonesia dan dapat juga diakses melalui (<http://www.idx.co.id>).

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, sebagai berikut:

3.4.2.1 Studi Lapangan (*Field Research*) dan Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan auditan dan laporan keberlanjutan (*Corporate Social Responsibility*) periode 2014 – 2015.

Studi kepustakaan yang akan dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal – jurnal dan buku – buku untuk memperoleh kajian pustaka yang mendukung dan akan digunakan dalam

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pembahasan masalah dalam penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sampel terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh sampel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012).

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dengan menggunakan *SPSS*. Statistik deskriptif ini untuk mengubah data-data yang digunakan oleh peneliti agar dapat lebih jelas dan mudah dipahami (Ghozali, 2013).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan *SPSS* dan sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S). Data yang berdistribusi normal ditandai dengan asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 (Ghozali, 2013).

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendeteksi sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas. Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) kurang dari 10 dan mempunyai angka *Tolerance* lebih dari 0,1 (Priyatno, 2012).

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelum). Jika terjadi korelasi maka ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui adanya korelasi dalam suatu regresi dapat dilakukan uji *Durbin-Watson* (*DW*) dengan ketentuan, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Autokorelasi Durbin – Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada korelasi negative	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$

Tdk ada autokorelasi,Positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$
---	---------------	-------------------

Sumber : Ghozali, 2013

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2010). Pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih

dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2012).

3.5.3. Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien Korelasi (R) digunakan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai R semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah (Sugiyono, 2012).

Tabel 3.3 Ketentuan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2012

3.5.4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk melihat berapa presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Peneliti menggunakan *Adjusted R Square (SPSS)*, yang merupakan nilai *R Square* yang telah disesuaikan. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan *Adjusted R Square* sebagai koefisien determinasi (Priyatno, 2012).

Linear Regression Analysis) yang merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X₁, X₂, X₃, X₄, X₅) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk membuktikan dengan studi empiris berpengaruh signifikan atau tidak variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan serta data yang digunakan berskala rasio (Priyatno, 2010).

3.5.5. Analisis Regresi Linear Berganda Pengujian Hipotesis

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple*

Model persamaan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*) yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Y = Return on Asset (ROA)

X_1 = Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)

X_2 = Current Ratio (CR)

X_3 = Debt to Equity Ratio (DER)

X_4 = Working Capital Turnover (WCTO)

X_5 = Struktur Aktiva (STA)

ε = Error Term

3.5.6. Pengujian Hipotesis

3.5.6.1. Uji Koefisien Regresi secara

Parsial (Uji – t)

Uji Koefisien regresi secara parsial (Uji – t) digunakan untuk membuktikan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (Priyatno, 2012). Merumuskan hipotesis untuk melakukan Uji – t, sebagai berikut:

H_0 : Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_1 : Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_0 : Current Ratio (CR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_2 : Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_0 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_3 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_0 : Working Capital Turnover (WCTO) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_4 : Working Capital Turnover (WCTO) berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_0 : Struktur Aktiva berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

H_5 : Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

Kriteria pengujian, sebagai berikut:

Jika Signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak.

Jika Signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima.

Jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak.

Jika $-t$ tabel $\leq t$ hitung $\leq t$ tabel maka H_0 diterima.

3.5.6.2 Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji – F)

Uji – F digunakan untuk membuktikan variabel independen secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil Uji – F dapat dilihat pada output ANOVA Multiple Linear Regression Analysis (Priyatno, 2012). Merumuskan hipotesis untuk melakukan Uji – F, sebagai berikut:

H_0 : Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Working Capital Turnover (WCTO), Struktur Aktiva (STA) secara bersama –

samaberpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

H_6 : *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, Struktur Aktiva (STA) secara bersama – samaberpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Kriteria Pengujian, sebagai berikut:

Jika Signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak.

Jika Signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan auditan dan laporan

keberlanjutan (*Corporate Social Responsibility*) pada sektor *Consumer Goods Industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2015. perusahaan yang telah memenuhi kriteria berdasarkan metode *purposive sampling* sebanyak 20 sampel perusahaan dengan jumlah data (N) sebanyak 40.

4.1.1 Analisis statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara statistik atas variabel-variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif menunjukkan N yang merupakan jumlah data dalam penelitian ini, nilai minimum atau nilai terendah, nilai maksimum atau nilai tertinggi, *mean* atau nilai rata – rata, standar deviasi atau ukuran penyebaran data menyimpang dari rata-ratanya.

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	40	,14	,48	,3235	,08848
CR	40	,51	10,25	2,7128	2,11809
DER	40	,07	2,11	,6903	,48875
WCTO	40	1,18	5,51	2,5018	1,09553
STA	40	,34	1,54	,6508	,26025
ROA	40	,04	,40	,1395	,09956
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*

Berdasarkan Tabel 4.1 *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* nilai minimum 0,14 atau 14%, nilai maksimum 0,48 atau 48% dengan *mean* atau nilai rata – rata 0,3235 atau 32,35%, artinya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan cukup baik. Standar deviasi atau ukuran penyebaran data 0,08848,

artinya data menyimpang dari rata – ratanya sebesar 8,848%.

Current Ratio (CR) nilai minimum 0,51 atau 51% dan nilai maksimum 10,25 dengan *mean* atau nilai rata – rata 2,7128 atau 271,28%. Hasil tersebut menunjukkan *Current Ratio (CR)* diatas standar umum (200%), bahwa aktiva lancar harus dua kali lebih besar dari kewajiban lancar. Hal tersebut menunjukkan dalam kondisi *likuid*, yaitu

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

mampumelunasi kewajiban *financial* jangka pendeknya. Standar deviasi atau ukuran penyebaran data2,11809.

Debt to Equity Ratio(DER) nilai minimum0,07atau 7% dan nilai maksimum2,11 atau 211% dengan *mean* atau nilai rata – rata 0,6903atau 69,03%. Standar deviasi atau ukuran penyebaran data0,48875 atau 48,875%.

*Working Capital Turnover (WCTO)*nilai minimum 1,18atau 118%, nilai maksimum5,51atau 551% dengan *mean* atau nilai rata – rata 2,5018atau 250,18%, Hasil tersebut menunjukkan *Working Capital Turnover(WCTO)* berjalan dengan baik, karena penjualan lebih dari dua kali atas modal kerjanya. Standar deviasi atau ukuran penyebaran data1,09553.

Struktur Aktiva (STA) nilai minimum0,34atau 34% dan nilai maksimum1,54 atau 154% dengan *mean* atau nilai rata – rata 0,6508atau 65,08%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktiva lancar mendekati 100% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan, artinya ketersediaan modal kerja yang dimiliki perusahaan berjalan dengan baik dalam kegiatan operasionalnya. Standar deviasi atau ukuran penyebaran data0,26025atau 26,025%.

*Return on Asset (ROA)*nilai minimum0,04atau 4% dan nilai maksimum0,40 atau 40% dengan *mean* atau nilai rata – rata,1395atau 13,95%. Standar deviasi atau ukuran penyebaran data0,09956 atau 9,956%.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,06141212
Most Extreme Differences	Absolute	,129
	Positive	,129
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,814
Asymp. Sig. (2-tailed)		,522

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: Olah data (*Output SPSS*)

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji normalitas pada *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* nilai

Asymp.Sig.(2-tailed) 0,522(0,522>0,05). Hal tersebut menunjukkan data berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	CSR	,951	1,051
	CR	,524	1,910
	DER	,653	1,531
	WCTO	,701	1,426
	STA	,917	1,090

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah data (Output SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai

Variance Inflation Factor(VIF) kurang dari 10. Kesimpulannya Model Regresi bebas dari multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,06577	2,034

Sumber: Olah data (Output SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin – Watson (DW)* sebesar 2,034 dengan n=40 dan k= 5, maka nilai $du = 1,7859$. Kriteria $du < dw$

$< 4-dumaka 1,7859 < 2,034 < 4-1,7859 (1,7859 < 2,034 < 2,2141)$, artinya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi penelitian.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,066	,038		1,728	,093
	CSR	-,062	,072	-,138	-,873	,389
	CR	-,004	,004	-,194	-,911	,369
	DER	-,022	,016	-,263	-1,381	,176

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

WCTO	,011	,007	,298	1,622	,114
STA	-,004	,025	-,024	-,150	,882

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Olah data (Output SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi *CSR*, *CR*, *DER*, *WCTO*,

STA dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3 Uji Koefisien Korelasi (R)

Tabel 4.6 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.620	.564	.06577

a. Predictors: (Constant), *STA*, *WCTO*, *CSR*, *DER*, *CR*

b. Dependent Variable: *ROA*

Sumber: Olah data (Output SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, Struktur Aktiva (*STA*) terhadap *Return on Asset (ROA)*.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai *Adjusted R²* adalah 0,564. Artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen, yaitu *Return on Asset (ROA)* sebesar 56,4% sedangkan sisanya 43,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam pengujian.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,241	,065		-3,693	,001
1 CSR	,362	,122	,322	2,966	,005
CR	,015	,007	,315	2,156	,038
DER	-,035	,027	-,174	-1,329	,193
WCTO	,072	,011	,796	6,298	,000
STA	,103	,042	,268	2,428	,021

a. Dependent Variable: *ROA*

Sumber: Olah data (Output SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.7 Model persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = -0,241 + 0,362X_1 + 0,015X_2 - 0,035X_3 + 0,072X_4 + 0,103X_5 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar $-0,241$ dapat diartikan jika *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR D)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, Struktur Aktiva (STA) nilainya adalah nol, maka *Return on Asset (ROA)* nilainya negatif sebesar $0,241$.

Nilai *Coefficients* regresi variabel *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR D)* bernilai positif sebesar $0,362$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 (satu) satuan *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR D)*, maka *Return on Asset (ROA)* akan meningkat sebesar $0,362$ atau $36,2\%$ dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Nilai *Coefficients* regresi variabel *Current Ratio (CR)* bernilai positif sebesar $0,015$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 (satu) satuan *Current Ratio (CR)*, maka *Return on Asset (ROA)* akan meningkat sebesar $0,015$ atau $1,5\%$ dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Nilai *Coefficients* regresi variabel *Debt to Equity Ratio (DER)* bernilai negatif sebesar $0,035$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 (satu) satuan *Debt to Equity Ratio (DER)*, maka *Return on Asset (ROA)* akan menurun sebesar $0,035$ atau $3,5\%$ dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Nilai *Coefficients* regresi variabel *Working Capital Turnover (WCTO)* bernilai positif sebesar $0,072$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 (satu) satuan *Working Capital Turnover (WCTO)*, maka *Return*

on Asset (ROA) akan meningkat sebesar $0,072$ atau $7,2\%$ dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Nilai *Coefficients* regresi variabel Struktur Aktiva (STA) bernilai positif sebesar $0,103$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 (satu) satuan Struktur Aktiva (STA), maka *Return on Asset (ROA)* akan meningkat sebesar $0,103$ atau $10,3\%$ dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t (t Test)

Berdasarkan Tabel 4.7 Pembahasan pengujian hipotesis secara parsial, sebagai berikut:

4.6.1.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR D)* terhadap *Return on Asset (ROA)*

Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,005$ atau ($0,005 < 0,01$) dan nilai t hitung sebesar $2,966$ atau ($2,966 > 2,032$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Corporate Sosial Responsibility Disclosure (CSR D)* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Adanya Implikasi positif dari *concern* perusahaan melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena adanya korelasi positif antara rating tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas. Semakin tinggi peringkat tanggung jawab sosial suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yaparto, Frisko, Eriandani (2013) *CSR D* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4.6.1.2 Pengaruh *Current Ratio (CR)* terhadap *Return on Asset (ROA)*

Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,038 atau ($0,038 < 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 2,156 atau ($2,156 > 2,032$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio (CR)* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Dengan kondisi aktiva lancar yang dikelola dengan baik dan mampu memenuhi kewajiban *financial* jangka pendeknya, maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hastuti (2010), Widiyanti dan Bakar (2014) yang menyatakan bahwa *CR* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

4.6.1.3 Pengaruh *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap *Return on Asset (ROA)*

Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,193 atau ($0,193 > 0,05$) dan nilai t hitung sebesar -1,329 atau ($-2,032 \leq -1,329 \leq 2,032$) maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Jika hutang mempunyai dampak terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang akan mengurangi keuntungan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudaryo dan Sari (2013) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

4.6.1.4 Pengaruh *Working Capital Turnover (WCTO)* terhadap *Return on Asset (ROA)*

Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau ($0,000 < 0,01$) dan nilai t hitung sebesar 6,298 atau ($6,298 > 2,032$) maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Working Capital Turnover (WCTO)* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Semakin besar rasio perputaran modal kerja, maka semakin baik suatu perusahaan dimana persentase modal kerja yang ada akan meningkatkan penjualan atau semakin besar rasio ini menunjukkan efektifnya pemanfaatan modal kerja yang tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widiyanti dan Bakar (2014) menyatakan bahwa *WCTO* berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROA*.

4.6.1.5 Pengaruh Struktur Aktiva (STA) terhadap *Return on Asset (ROA)*

Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,021 atau ($0,021 < 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 2,428 atau ($2,428 > 2,032$) maka H_0 ditolak dan H_5 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Struktur Aktiva (STA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Semakin besar rasio maka semakin baik karena menunjukkan tersedianya kas, piutang dan persediaan yang merupakan aktiva lancar yang paling likuid dibanding dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Adanya aktiva yang likuid dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanum (2008) menyatakan

bahwa Struktur Aktiva berpengaruh tidak signifikan terhadap *ROI*.

4.6.2 Uji F (F Test)

Tabel 4.8 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,240	5	,048	11,073	,000 ^b
Residual	,147	34	,004		
Total	,387	39			

a. Dependent Variable: *ROA*

b. Predictors: (Constant), *STA*, *WCTO*, *CSR*, *DER*, *CR*

Sumber: Olah data (Output SPSS)

Berdasarkan tabel 4.8 nilai F-hitung 11,073 > F-tabel 2,494 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,01 maka H_0 ditolak dan H_6 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Working Capital Turnover (WCTO)*, Struktur Aktiva (*STA*) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)*.

Adanya Implikasi positif dari *concern* perusahaan melakukan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan manajemen modal kerja merupakan administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar sehingga meningkatkan *Return on Asset (ROA)*.

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Dengan demikian ada kontak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dengan masyarakat, dimana masyarakat akan memberikan *cost dan benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Dalam teori *agency* Konflik yang potensial terjadi antara *stockholders* dan *debtholders*. Kreditur memiliki hak atas sebagian laba yang diperoleh perusahaan, sementara itu pemegang saham memegang

pengendalian perusahaan yang akan sangat menentukan profitabilitas dan risiko perusahaan. Peningkatan jumlah utang ini akan mengakibatkan nilai profitabilitas perusahaan menurun, karena semakin banyak kreditur yang mempunyai hak atas aliran kas dan aset perusahaan.

5 KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* ≤ 0,01 atau 1%) terhadap *Return on Asset (ROA)*.
2. *Current Ratio (CR)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* ≤ 0,05 atau 5%) terhadap *Return on Asset (ROA)*.
3. *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)*.
4. *Working Capital Turnover (WCTO)* berpengaruh signifikan (*Level of Significant* ≤ 0,01 atau 1%) terhadap *Return on Asset (ROA)*
5. Struktur Aktiva (*STA*) berpengaruh signifikan (*Level of Significant* ≤ 0,05 atau 5%) terhadap *Return on Asset (ROA)*.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

6. *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Working Capital Turnover (WCTO), Struktur Aktiva (STA) berpengaruh signifikan ($Level\ of\ Significant \leq 0,01$ atau 1%) terhadap Return on Asset (ROA).*

5.2 Implikasi

Bahwa semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, maka masyarakat akan lebih berminat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan respon yang baik bagi perusahaan atas *Corporate Social Responsibility*, karena akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. *Working Capital Management* berkaitan erat dengan masalah pembelanjaan perusahaan, dimana hal ini ada kaitannya dengan jumlah dana pada aktiva lancar perusahaan. Ketersediaan modal kerja perusahaan memiliki peranan penting dalam kegiatan penjualan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan terkait dengan penelitian ini adalah sebaiknya pihak perusahaan lebih memperhatikan akan pentingnya *Corporate Social Responsibility* dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta sebaiknya semua perusahaan *public* membuat *Sustainability Report* untuk kepentingan bersama. Selain itu pihak perusahaan sebaiknya lebih berperan aktif dalam menentukan besarnya modal kerja perusahaan, mengalokasikannya dan mengendalikannya agar aktiva lancar perusahaan tetap terjaga dengan baik sehingga penjualan lebih besar dari modal kerja yang dimilikinya agar tidak terjadi *Idle Money* dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (*Return on Asset*). Bagi investor dalam melakukan keputusan investasi perlu mempertimbangkan faktor – faktor seperti *Corporate Social Responsibility dan Working Capital Management*, lebih tanggap untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan terutama dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dalam hal pengelolaan modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E dan Daves, P. 2010. *Intermediate Financial Management*. Tenth Edition. Cengage Learning. South – Western.
- Candrayanthi, Alit. AA dan Saputra, Dharma. I D, G. 2013. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan : Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1*. ISSN : 2302-8556.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hakim, Mohamad. Zulman. 2013. *Analisis Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Return on Assets Pada Industri Barang Konsumsi*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Jakarta.
- Hanafi, M. Mahmud dan Halim, Abdul. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Hanum, Encik. Latifah. 2008. *Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Return on Investment Pada Industri Rokok Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Harjito, Agus dan Martono. 2011. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Hery, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta. Grasindo.
- Horne, Van dan Wachowicz, Jr. 2012. *Financial Management*. Terjemahan Mubarakah, Quratul’ain. Jakarta: Salemba Empat.
- Husnan, Suad. 2012. *Management Keuangan: Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*. Yogyakarta: BPF E.
- Ismiati, Nike. Puspitaningtyas, Zarah. Susbintari, Ika. 2013. *Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan : Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012*.
- Jatismara, Raditya. 2011. *Analisis Pengaruh TATO, DER, Dividen, Sales dan Current Ratio Terhadap Return On Asset*. Skripsi. Diponegoro : Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Priyatno, Duwi, 2010. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*. Yogyakarta. Mediakom.
- 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI.
- Riyanto, B, 2011. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta. BPF E.
- Setyawan, Fran. Ulung. 2015. *Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Size Terhadap Return On Asset pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- Efek Indonesia*. Skripsi. Kediri : Program Saarljana Universitas Nusanlara PGRI Kediri.
- Sriviana, Eva. 2013. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* . (Volume VIII; No. 4).
- Sudaryo, Yoyo. Sari, Novita. Mila. 2013. *Pengaruh Debt To Eguity Ratio(DER) Terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2012. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang, dan Susanti, Eka. Fathonah. 2015. *Manajemen Keuangan Untuk Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : CAPS.
- Syamsuddin, Lukman. 2002. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Baru, Cetakan Ketujuh. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Tandelilin, E. 2010. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widiyanti, Marlina. W. dan Bakar, Samadi. 2014. *Pengaruh Working Capital Turnover, Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio Terhadap Profitabilitas (ROA) Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI*. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Jurusan Manajemen.
- Yanto, Andri. 2013. *Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Tterdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012*
- Yaparto, Marissa. Frisko, Dianne. Eriandani, Rizky. 2013. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan pada Sektot Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2010-2011*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. (Volume 2; No. 1).

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN PASIEN DI KLINIK SWASTA

Mariany Puspita Subrata^{*}), Widaningsih

Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Esa Unggul, Jakarta

**Email : marianypuspita@gmail.com*

ABSTRACT

Healthcare service quality in accordance with patient expectations made decrease the number of patient. Past research on service quality, customer satisfaction and confidence to do in the corporate environment, the hospitality industry, government and private hospitals. The purpose of this study was to determine the effect of the quality of health care could improve patient confidence and satisfaction, as well as knowing the analysis of factors that have the most significant effect on the confidence and satisfaction of patients. We used the method of analysis of SEM (Structural Equation Modeling) on samples of old and new patients in private clinics. The data collection system with the questionnaire of the data according to the criteria so that in the end there were 295 respondents were used as samples. The results of SEM analysis to get the quality of service had a significant influence on patient satisfaction, quality of service had a significant influence on patient confidence and satisfaction had no effect on patient trust.

Key Words: Healthcare Service Quality, Patient Satisfaction, Patient Trust

ABSTRAK

Kualitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan harapan pasien menurunkan jumlah kunjungan pasien. Penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan, kepuasan dan kepercayaan pelanggan dilakukan di lingkungan perusahaan, industri perhotelan, rumah sakit pemerintah dan swasta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien, serta mengetahui analisis faktor yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan pasien. Kami menggunakan metode analisa SEM (Structural Equation Modeling) terhadap sampel pasien lama dan baru di klinik swasta. Pengumpulan data dengan sistem kuesioner dari data sesuai kriteria sehingga pada akhirnya terdapat 295 responden yang digunakan sebagai sampel penelitian. Hasil analisis SEM mendapatkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien, kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan pasien, dan kepuasan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pasien.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pasien, Kepercayaan Pasien

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan setiap

pemakai jasa pelayanan kesehatan sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal dan jaminan kepercayaan agar masyarakat mendapat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

hasil yang memuaskan sehingga membutuhkan layanan kesehatan yang optimal dan jaminan kepercayaan agar masyarakat mendapat hasil yang memuaskan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mutlak memerlukan pengukuran kepuasan pasien sehingga dapat mengetahui sejauh mana dimensi kualitas pelayanan yang telah diselenggarakan dapat memenuhi harapan pasien.

Penelitian Alrubaiee (2011) meneliti kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien, kepercayaan pasien dan karakteristik demografi sosial. Kami mengumpulkan data survei dari 330 responden yang dipilih secara acak untuk menguji adanya hubungan kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien, kepercayaan pasien dan karakteristik demografi sosial. Penelitian ini menggunakan metode analisis SEM. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan kesehatan mempunyai dampak positif terhadap kepercayaan pasien, kualitas pelayanan kesehatan mempunyai dampak yang positif terhadap kepuasan pasien, kepuasan pasien juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan pasien, dan beberapa variabel dari karakteristik demografi sosial mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan dan kepercayaan pasien.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan dilakukan di lingkungan perusahaan, industri perhotelan, rumah sakit pemerintah dan swasta sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan, kepuasan pasien dan kepercayaan pasien di klinik swasta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien, serta mengetahui analisis faktor yang mempunyai

pengaruh paling signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan pasien.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan pasien dan keinginan pasien serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelayanan. Menurut Wyckof (2000) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pasien. Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkannya, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitasnya dipersepsikan buruk. Dengan demikian kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan pemilik jasa dalam memenuhi harapan pasien secara konsisten.

Lima dimensi (Parasuraman, 1994) yang merupakan inti dari determinasi service quality yang dikenal SERVQUAL, yaitu sebagai berikut:

1. Tangibles yaitu kemampuan suatu penyedia layanan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik penyedia layanan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, kamar kecil, ruang tunggu, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya;
2. Reliability yaitu kemampuan pemberi layanan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pasien yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua

pasien tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi;

3. Responsiveness yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pasien, dengan penyampaian informasi yang jelas;
4. Assurance yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para petugas pemberi layanan untuk menumbuhkan rasa percaya pasien kepada pemberi layanan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun;
5. Emphaty yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien. Dimana suatu pemberi layanan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pasien, memahami kebutuhan pasien secara spesifik, serta memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi pasien.

2.2. Kepuasan Pasien

Kepuasan merupakan evaluasi pasien terhadap layanan yang didapatkannya, mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh pasien. Evaluasi tersebut merupakan intensitas respon afektif pada periode tertentu berupa perasaan dan sikap terhadap produk atau layanan yang pernah didapatkannya. Selain itu kepuasan dijembatani pengalaman yang dirasakan pasien terhadap konsep kepuasan telah dapat didekati dengan banyak cara yang berbeda. Pasien mengalami berbagai tingkat kepuasan dan ketidakpuasan setelah mengalami atau merasakan masing-masing pelayanan sesuai dengan sejauhmana harapan mereka terpenuhi

atau terlampaui (Lovelock dan Wright, 2007).

Menurut Marshall (1976), tujuh dimensi kepuasan, yaitu:

1. Kepuasan umum, misalnya kesempurnaan perawatan medis yang diterima oleh pasien;
2. Kualitas teknik, misalnya kamar praktik dokter memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan yang menyeluruh, diagnosa yang dibuat oleh dokter benar, ketika melakukan pemeriksaan, tenaga medis memeriksa dengan penuh ketelitian dan secara menyeluruh, kemampuan dokter yang merawat;
3. Perilaku antar pribadi, misalnya dokter bersikap terlalu praktis terhadap pasien dan dokter memperlakukan pasien dengan ramah dan sopan;
4. Komunikasi, misalnya dokter memberikan penjelasan yang akurat tentang hasil pemeriksaan dan dokter mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasien;
5. Aspek keuangan, misalnya harga yang terjangkau untuk pelayanan yang diberikan dan prosedur administrasi yang mudah;
6. Waktu bersama dokter, misalnya tenaga medis terlihat sabar dan teliti dalam mengambil tindakan dan dokter meluangkan banyak waktu untuk pasien;
7. Akses dan kenyamanan, misalnya mempunyai akses yang mudah untuk bertemu dengan dokter sesuai kebutuhan medis dan mendapatkan pelayanan medis kapanpun dibutuhkan dengan mudah.

2.3 Kepercayaan Pasien

Morgan dan Hunt (2006) yang menyatakan bahwa kepercayaan timbul sebagai hasil dari kehandalan dan integritas mitra yang ditunjukkan melalui berbagai sikap seperti konsistensi, kompeten, adil, tanggung jawab, suka

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

menolong, dan memiliki kepedulian. Dalam konteks hubungan penyedia layanan dengan pasien, kepercayaan pasien akan muncul ketika pihak penyedia layanan membuktikan keahlian dan keahliannya. Kepercayaan tanpa adanya kemauan untuk mengandalkan pihak yang dipercaya menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut masih bersifat terbatas.

Dimensi kepercayaan Hall, Dugan, Zheng, dan Mishra (2001) menyatakan bahwa dasar teori empiris mengenai kepercayaan dalam setting medis pada umumnya dikonseptualkan dalam lima dimensi, yaitu:

1. Kesetiaan yaitu menekankan kepentingan pasien dan tidak memanfaatkan keadaan pasien yang rentan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui ekspresi dokter seperti kepedulian, respon, membela, dan menghindari konflik kepentingan;
2. Kemampuan, berarti upaya untuk menghindari kesalahan dan menghasilkan perolehan hasil terbaik. Hal ini berarti bahwa dokter berupaya untuk tidak melakukan kesalahan ketika melakukan pekerjaannya (memeriksa pasien dan menegakkan diagnosa penyakit) dalam artian dokter bekerja dengan baik dan bagus untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Contohnya adalah kemampuan dokter dalam praktek kerja, keterampilan interpersonal dokter yang bagus, dokter mampu membuat keputusan yang benar, dan menghindari kesalahan ketika memeriksa pasien;
3. Kejujuran yaitu berkata benar dan menghindari kebohongan atau ketidakjujuran. Hal ini berarti bahwa dokter jujur, terbuka, dan jelas memberitahukan kondisi dan informasi medis kepada pasien;
4. Konfidensial yaitu melindungi dan menggunakan informasi yang sensitif ataupun informasi yang

bersifat privasi sebagaimana mestinya. Ini berarti bahwa bagaimana dokter menjaga informasi penting tentang pasien.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini penelitian kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada tiga variabel yaitu kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien dan kepercayaan pasien. Kami mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik analisa menggunakan analisis SEM (Structural Equation Model). Sampel dalam penelitian ini adalah semua pasien baik yang baru maupun lama yang menggunakan jasa pelayanan Klinik Sarana Medika Baru, Tangerang, Indonesia. Penentuan sampel dari populasi menggunakan acuan tabel yang dikembangkan para ahli salah satunya adalah menurut Hair, et al. (1998) yaitu jumlah sampel = $n \times 5$. Kuesioner yang disebar sebanyak: $56 \times 5 = 280$ responden. Dari jumlah sampel yang didapat, kami menambahkan sepuluh persen untuk mengantisipasi sampel yang tidak sesuai kriteria: $280 + 28 = 306$ responden. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan skala pengukuran Likert dengan skala satu sampai lima.

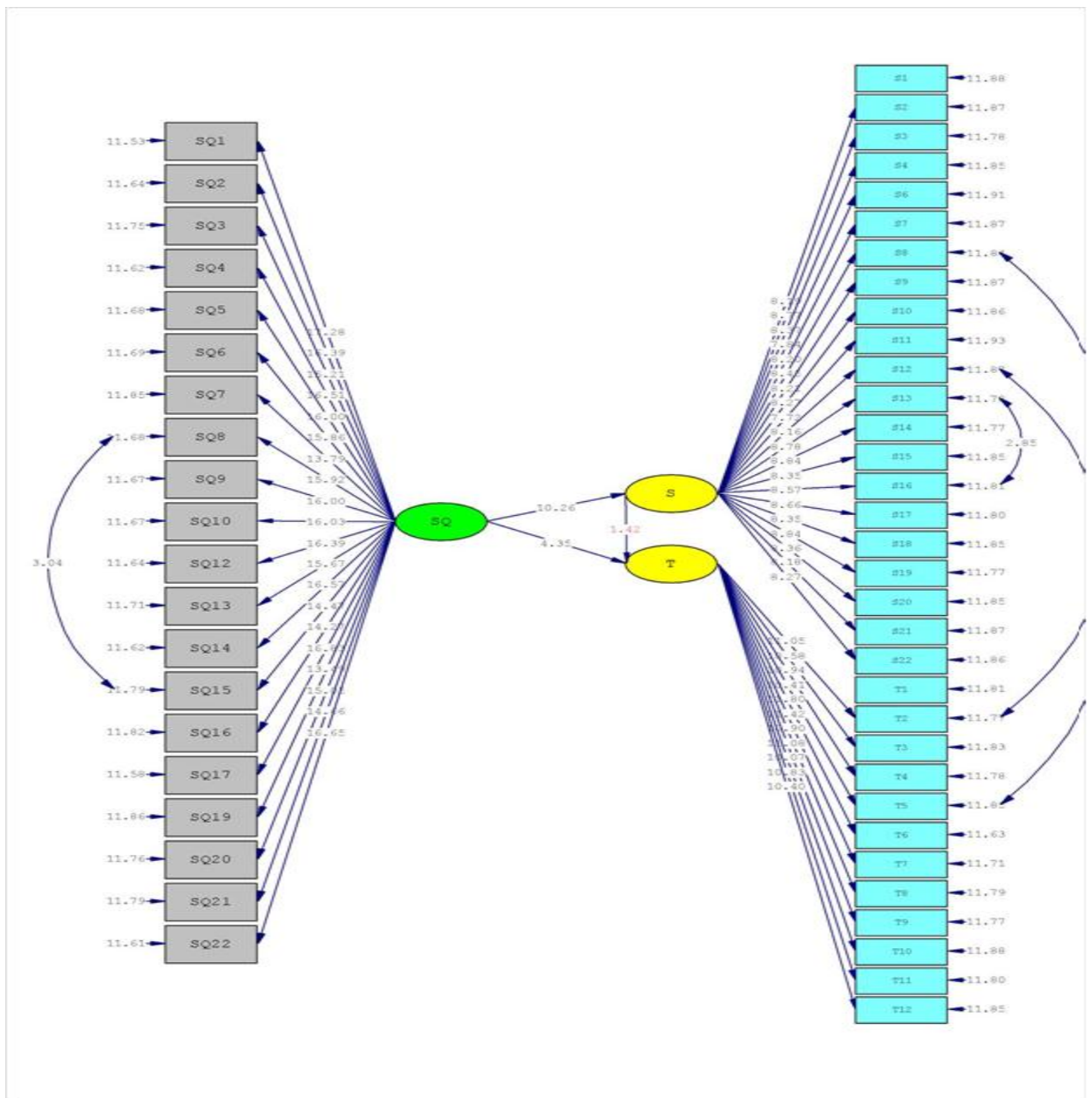
Kami melakukan pretes dengan dua cara yaitu: uji validitas dan uji reliabilitas. Pada dimensi kualitas pelayanan kesehatan (Parasuraman, 1994) terdapat 22 pertanyaan, setelah melakukan pretes didapatkan Anti Images Matrices SQ11(0,281) dan SQ18(0,445) sehingga hanya menggunakan 20 pertanyaan. Selanjutnya pada dimensi kepuasan pasien (Marshall, 1976) terdapat 22 pertanyaan, setelah melakukan pretes didapatkan Anti Images Matrices S5(0,464) sehingga hanya menggunakan 21 pertanyaan. Pada dimensi

kepercayaan pasien (Hall, 2001) terdapat 12 pertanyaan, setelah melakukan pretes, semua pertanyaan dapat digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan instrumen yang sudah diuji dalam validitas dan reliabilitas sehingga didapatkan hasil goodness of fit, dimana Chi Square = 1402,56, Degree of Freedom = 1,07, ECVI = 5,27, AIC =

1543,30, CAIC = 2091,68, Critical N = 302,05, RMR = 0,036, dan PGFI = 0,79. Nilai construct reliability semua indikator telah memenuhi syarat reliabilitas dengan baik meskipun nilai variance extracted kepuasan pasien sebesar 0,35 dan kepercayaan pasien 0,46. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan diagram value seperti pada gambar berikut:



PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Nilai T-Value	Keterangan
H ₁	Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien	10,26	Data mendukung hipotesis
H ₂	Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasien	4,35	Data mendukung hipotesis
H ₃	Kepuasan pasien yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasien	1,42	Data tidak mendukung hipotesis

Sumber: Hasil uji pada alat analisis data

4.1. Kualitas Pelayanan Meningkatkan Kepuasan Pasien

Kualitas suatu pelayanan klinik memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pasien. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pasien untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan klinik. Pasien akan membuat klinik tersebut sebagai klinik pilihan, berikut untuk seluruh keluarga besarnya. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan klinik untuk memahami dengan seksama harapan pasien serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, klinik dapat meningkatkan kepuasan pasien dimana klinik memaksimalkan pengalaman pasien yang menyenangkan. Kepuasan pasien merupakan suatu tingkat perasaan yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang dirasakannya.

Banyak literatur yang menunjukkan hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan, di dalam pemasaran menunjukkan kualitas pelayanan dan kepuasan mempunyai hubungan yang kuat. Pollack (2008) telah melakukan penelitian yang mengindikasikan tingginya kualitas pelayanan menyebabkan kepuasan meningkat. Selain itu, kualitas layanan yang tinggi berkorelasi dengan kepuasan pasien yang tinggi. Kepuasan pasien berfungsi sebagai medium antara kualitas

layanan dan niat perilaku. Kualitas layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana layanan dari tenaga medis memberikan layanan kepada pasien namun juga bagaimana pasien merasa nyaman dengan kondisi dan situasi yang klinik ciptakan (Wu, 2011).

Pada hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menemukan pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan mempengaruhi kepuasan pasien. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kepuasan pasien di Klinik Sarana Medika Baru Tangerang.

Hasil penelitian ini semakin menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choi (2005), Badri (2009), Atinga (2011), Wu (2011), Alrubaiee (2011), Shpetim (2012), Azizan (2013), dan Amin (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien, yang artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka kepuasan pasien akan meningkat atau sebaliknya.

4.2. Kualitas Pelayanan Meningkatkan Kepercayaan Pasien

Pelayanan kesehatan merupakan jenis produk yang tidak berwujud dan layanan yang dilakukan dengan melakukan pertemuan langsung antar

personil, personil tersebut adalah tenaga medis dan tenaga pelayanan umum yang harus dapat mengembangkan hubungan kepercayaan pasien. Kepercayaan menjadi salah satu faktor penting pada keputusan pasien dalam memilih pelayanan medis yang akan digunakan.

Droge (2006) telah melakukan studi yang mengatakan kualitas pelayanan memberikan hubungan yang positif terhadap kepercayaan. Di samping itu, ada peneliti lainnya telah menegaskan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung dan baik akan mempengaruhi kepercayaan pasien (Bell, 2007). Hubungan yang positif juga didapatkan antara kualitas layanan dan kepercayaan di dalam pelayanan (Pierre, 2008). Kemudian ada peneliti lain, bahwa kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan mempunyai efek positif terhadap kepercayaan pasien melalui institusi kesehatan (Hu, 2009). Pendapat peneliti Wu (2010), bahwa kepercayaan merupakan kunci sukses dari sebuah kualitas pelayanan. Lebih lanjut, penelitian tentang efek dari kualitas pelayanan yang memberikan dampak yang positif terhadap kepercayaan pasien di rumah sakit (Wong, 2014).

Pada hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menemukan pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepercayaan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan yang diterima mempengaruhi kepercayaan pasien. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan pasien di Klinik Sarana Medika Baru Tangerang.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eisingerich (2007), Chenet (2010), Alrubaiie (2011), Shpetim (2012), Chang (2013), dan Lien (2014) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pasien, yang artinya adalah semakin baik kualitas pelayanan yang

diberikan maka kepercayaan pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya.

4.3. Kepuasan Tidak Mempengaruhi Kepercayaan Pasien

Kepercayaan merupakan sikap di masa depan yang tercermin dari pengalaman di masa lalu. Beberapa penelitian telah dilakukan dan menunjukkan bahwa kepuasan pasien mendukung terjadinya kepercayaan pasien. Chiou (2006) berpendapat bahwa kepuasan memberikan dampak yang positif terhadap kepercayaan. Kemudian menurut Li (2009), pasien di Taiwan, ditemukan kepuasan mempunyai dampak yang positif terhadap kepercayaan. Pelayanan di Malaysia dan Qatar menunjukkan hubungan yang positif antara kepuasan dan kepercayaan pasien (Huntz, 2010). Di samping itu, ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap pasien yang menggunakan layanan kesehatan, didapatkan kepuasan pasien mempunyai efek yang kuat dan positif terhadap kepercayaan. Dalam penelitian Christo (2011) di pelayanan kesehatan terjadi hubungan antara kepuasan pasien mempunyai dampak yang positif terhadap kepercayaan. Ditemukan juga pada pengguna pelayanan kesehatan di Spanyol bahwa kepuasan pasien berdampak positif terhadap kepercayaan pasien (Jose, 2011). Selain itu, Edwin (2011) meneliti di pelayanan kesehatan di industri pelayanan menemukan bahwa kepuasan pasien memberi dampak yang kuat di kepercayaan pasien yang mana mempunyai hubungan erat. Danesh (2012) melakukan penelitian terhadap hubungan antara kepuasan dengan kepercayaan pasien di pelayanan kesehatan Malaysia didapatkan hubungan yang erat. Osman (2013) juga berpendapat bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepuasan dan kepercayaan pasien. Lebih lanjut, Abdalla (2014) melakukan penelitian

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

terhadap pasien, didapatkan hubungan yang erat antara kepuasan dan kepercayaan pasien.

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menemukan tidak ada pengaruh antara kepuasan pasien terhadap kepercayaan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien tidak mempengaruhi kepercayaan pasien. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alrubaiee (2011) dan Shpetim (2012) mengatakan bahwa kepuasan pasien memberikan dampak positif terhadap kepercayaan pasien, artinya semakin tinggi kepuasan yang didapatkan oleh pasien maka kepercayaan pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya. Namun pada penelitian ini terjadi sebaliknya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kepuasan merupakan perasaan yang dirasakan pasien terhadap layanan yang ia rasakan, sehingga akan bervariasi bagi setiap pasien. Kepuasan merupakan respon subyektif dari masing-masing individu sehingga kepuasan belum tentu dapat meningkatkan kepercayaan. Tempat pelaksanaan dan responden yang diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga bisa terjadi di Klinik Sarana Medika Baru Tangerang kepuasan pasien tidak mempengaruhi kepercayaan pasien.

Persepsi pelayanan sebagai hasil dari proses evaluasi, dimana pasien membandingkan harapan dengan layanan yang ia terima, yaitu ia menempatkan layanan yang dirasakan terhadap pelayanan yang diharapkan, hasil dari proses ini akan dirasakan dari layanan. Harapan akan kesembuhan yang diperoleh dari penyakitnya, pasien akan cenderung lebih puas apabila pasien tersebut dikatakan sembuh yang merupakan tujuan utama setiap pasien yang datang ke sarana pelayanan kesehatan, berbeda dengan pasien tidak sembuh setelah diberikan pelayanan maka tidak dapat menimbulkan

kepercayaan. Segala kegiatan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya ada puas terlebih dahulu dari dalam diri, setelahnya suatu layanan yang diterimanya. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi kepuasan terhadap suatu produk atau jasa, diantaranya faktor pendapatan, faktor budaya, faktor status sosial, faktor tingkat pendidikan, faktor tingkat usia, faktor demografis dan masih banyak faktor yang lain. Faktor utama yang menentukan kepuasan pasien adalah persepsi pasien terhadap jasa tersebut.

Profesi di bidang medis dipercaya oleh pasien karena pasien percaya bahwa paramedis merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga percaya bahwa paramedis akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Kepercayaan adalah keoptimisan pasien dalam kondisi yang rentan dimana pasien mempercayai dokter akan perhatian kepada kepentingan pasien. Kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Kepercayaan adalah elemen utama pada hubungan interpersonal dokter-pasien yang mencakup sekumpulan keyakinan ataupun harapan pasien bahwa dokter akan bertindak dengan cara tertentu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari Hasil dan Pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pasien, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien (hipotesis pertama didukung), yang artinya Klinik Sarana Medika Baru Tangerang sudah memberikan kualitas pelayanan

- yang baik dan cenderung memiliki kepuasan pasien yang tinggi.
2. Hasil penelitian berikutnya adalah kualitas pelayanan mempengaruhi kepercayaan pasien, sehingga meningkatkan kepercayaan pasien (hipotesis kedua didukung). Hasil tersebut menunjukkan Klinik Sarana Medika Baru Tangerang telah memberikan kualitas layanan yang baik sesuai dengan yang diinginkan pasien, maka pasien cenderung semakin percaya.
 3. Hasil penelitian hipotesis ketiga ditemukan bahwa kepuasan pasien tidak mempengaruhi kepercayaan (hipotesis tidak didukung). Walaupun Klinik Sarana Medika Baru Tangerang telah berhasil membuat pasien merasa puas, tetapi cenderung pasien tidak percaya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti, selain dari aspek kualitas pelayanan.

5.2. Saran

Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dari kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian ini hanya melihat kualitas pelayanan kesehatan dari kepuasan dan kepercayaan pasien, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel seperti loyalitas dan citra merek. Dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan bahan rujukan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup, diukur dengan menggunakan skala Likert. Disarankan agar peneliti selanjutnya menambahkan dengan teknik wawancara tatap muka agar memperoleh jawaban lebih mendalam dan masukan-masukan dari responden. Peneliti disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrubaiee, L. (2011). The Mediating Effect of Patient Satisfaction in the Patients Perceptions of Healthcare Quality – Patient Trust Relationship. *International Journal of Marketing Studies* 3(1).
- Amin, M., & Siti, Z. N. (2013). Hospital service quality and its effects on patient satisfaction and behavioural intention. *Clinical Governance an international journal*.
- Atinga, R. A., Abekah, N., & Kwame A. D. (2011). Managing healthcare quality in Ghana: A necessity of patient satisfaction. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 24(7).
- Azizan, N.A., & Bahari, M. (2013). The Effect of Perceived Service Quality on Patient Satisfaction at A Public Hospital in state of Pahang, Malaysia. *Journal of marketing* 2(3).
- Badri, M. A. (2009). Healthcare quality and moderators of patient satisfaction: testing of causality. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 22(4).
- Bendapuli, N., & Leonard B. (2007). Customer's Motivation for Maintaining Relationship with Service Providers. *Journal of Retailing*, 73(15-37).
- Chang C. S., Su Y. C., & Yi T. L. (2013). Service Quality, Trust, and patient satisfaction in interpersonal-based

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- medical service encounters. *BMC Service Research*.
- Chenet, P. (2010). Service quality, trust, commitment and service differentiation in business relationship. *Journal of Service Marketing*.
- Choi, S. K., & Hanjoon, L. (2005). The service quality dimensions and patient satisfaction relationship in south korea: comparisons across gender, age and types of service. *Journal service quality dimensions and patient satisfaction relationships*.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). *Multivariate Data Analysis* (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Lien, C. H., Jyh-Jeng, W., Ying-Hueih, C. & Chang-Jhan W. (2014). Trust transfer and effect of service quality on trust in the healthcare industry. *Managing Service Quality*, 24(4).
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1994). Alternative Scales for Measuring Service Quality: a Comparative Assessment Based on Psychometric and Diagnostic Criteria. *Journal of Retailing*, 70(3), 201-230.
- Pollack, B. L. (2008). The Nature Service Quality and Satisfaction Relationship. *Managing service quality*, 18(6), 537-558.
- Sbpetim, C. (2005). Exploring the Relationship among Service Quality, Satisfaction, Trust and Store Loyalty among Retail Customers. *Journal of Competitiveness*, 4(4), 16-35 2012.
- Tjiptono, Fandy. (2005). *Pemasaran Jasa*. Bayu Media Publishing. Yogyakarta.
- Wright, D. B. (2007). The Impact of Eyewitness Identifications from Simultaneous and Sequential Lineups. *Memory*, 15, 746-754.
- Wu, C. C., (2011). The Impact of Hospital Brand Image on Service Quality, Patient Satisfaction and Loyalty. *Journal Feng Chia University, Taiwan*.

PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Reni Sartika Dewi*), Holiawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*Email: liemeifung@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the effect of work life balance and locus of control on quality audits with gender as a moderating variable. The method used in this research is quantitative method is to test a theory or used in sistatistika research on the relationship between variables. The population in this study is the auditor who works in Public Accounting Firm (KAP) in South Jakarta. This research was conducted during the months of July to August 2016 using convenience sampling method, the method of data collection by conducted questionnaires to 80 respondents, were processed using SPSS statistical software tools 22, a scale of measurement that uses a Likert scale. Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis. Results showed that: Work Life Balance has no significant effect on audit quality. Locus Of Control has significant influence on audit quality. From the test results obtained by moderating variables F with F-count is greater than F-table, this means that the Work Life Balance and Locus Of Control with gender as a moderating variable significant effect on audit quality.

Key Words: Work Life Balance, Locus of Control, Audit Quality, Gender.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh work life balance dan locus of control terhadap kualitas audit dengan gender sebagai variabel pemoderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu untuk menguji suatu teori atau digunakan dalam penelitian sistatistika mengenai hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2016 dengan menggunakan metode convenience sampling, metode pengumpulan data dengan cara dilakukan penyebaran kuesioner ke 80 responden, yang diolah dengan menggunakan alat bantu software statistic SPSS 22, skala pengukurannya yaitu menggunakan skala likert. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Work Life Balance tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Locus Of Control mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari hasil uji F dengan variabel pemoderasi diperoleh F-hitung lebih besar dari F-tabel, hal ini berarti bahwa Work Life Balance dan Locus Of Control dengan Gender sebagai variabel pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Kata Kunci : Work Life Balance, Locus of Control, Kualitas Audit, Gender

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dari masa ke masa yang semakin pesat menuntut Indonesia sebagai Negara yang berkembang untuk ikut berperan dalam melakukan pembangunan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan yang bergerak pada sektor swasta, dapat meningkatkan strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari perusahaan, yaitu dengan memaksimalkan laba dan menekan biaya pengeluaran seefisien mungkin agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri tidak menutup kemungkinan bahwa jasa audit akan sangat diperlukan untuk memberikan pernyataan keandalan dan kesesuaian atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pelayanan jasa audit tidak hanya dilakukan pada sektor swasta saja yakni perusahaan, tetapi juga dilakukan pada sector public yakni sasarannya adalah organisasi pemerintahan. Jasa audit eksternal disektor swasta dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang saat ini didominasi oleh “*The Big Four*” yang terdiri dari Deloitte, Price Water House Coopers, Ernst & Young dan KPMG. Selain *the four*, saat ini di Indonesia telah banyak kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit bagi sektor swasta.

KAP sebagai eksternal auditor sektor swasta sangat berperan penting bagi perusahaan yang dilakukan audit, karena dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan serta proses kegiatan perusahaan sampai dengan laporan keuangan berjalan dengan semestinya atau tidak. Dalam hal ini KAP merupakan kepercayaan masyarakat khususnya kalangan swasta, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh KAP harus dapat dipertanggung jawabkan bagi semua pihak dan dalam melakukan audit harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Oleh karena itu bagi seorang

auditor harus dapat menunjang tinggi kode etik profesi yang ada.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan konsultan, tentu kualitas hasil kerja auditor secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang diambil, untuk itu auditor dituntut untuk mampu secara tepat memberikan hasil audit yang berkualitas. Hal ini menyebabkan tingginya tuntutan kerja yang harus dilakukan auditor. Selain itu auditor juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas yang dimiliki agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat dan mampu bersaing didalam peningkatan karir. Dikarenakan peningkatan karir merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan auditor dalam bekerja.

Peningkatan karir auditor tidak lagi hanya ditentukan oleh wewenang atasan dan kebijakan organisasi itu sendiri, akan tetapi auditor juga dapat berperan aktif dalam menentukan dan memilih karir yang diinginkan. Auditor yang mampu mengatur dirinya sendiri atau yang sering disebut dengan *high-self management* merupakan auditor yang sesuai berada dilingkungan organisasi yang semakin dituntut untuk lebih fleksibel dan lincah didalam era globalisasi seperti sekarang. Hal ini berkaitan erat dengan lokus pengendali internal. Auditor dengan lokus pengendali internal memiliki kepercayaan dan integritas yang tinggi sehingga cenderung mampu memilih jalan karirnya sendiri.

Dalam upaya peningkatan karir serta mengatasi banyaknya tuntutan profesi yang dialami, auditor seringkali mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Hal ini rentan terjadi pada auditor perempuan atau *gender feminine*. Adanya peran ganda bagi auditor perempuan, dimana harus pandai dalam menyeimbangkan diri dengan berbagai tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keseimbangan

antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau yang lebih dikenal dengan *work life balance* berpengaruh terhadap kinerja auditor itu sendiri. Auditor yang memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung memiliki kinerja yang baik sehingga akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Auditor seperti ini biasanya didominasi oleh *gender maskulin*.

Setiawati (2007) menyatakan bahwa *sex* dan *gender* kerap diidentifikasi sebagai hal yang sama. Secara biologis, manusia dibedakan menjadi dua *sex*, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara *gender* itu sendiri adalah aspek non fisiologis dari *sex* yang memiliki harapan budaya terhadap feminitas dan maskulinitas. Salah satu bidang yang terimbas oleh keracunan *sex* dan *gender* adalah bidang kerja.

Richmond (2003) menemukan bukti bahwa kepribadian individu mempengaruhi perilaku etis. Seorang auditor harus taat pada aturan etika yang mengharuskannya bersikap independen. Menurut Mulyadi (2001) faktor penting dari kualitas audit adalah independensi merupakan sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain (tidak dikendalikan dan tidak bergantung kepada pihak lain), secara intelektual bersikap jujur dan objektif (tidak memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan opininya. Hal ini berkaitan dengan *locus of control*.

2. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan yang berjumlah 100 auditor, baik itu auditor senior maupun auditor junior yang diambil dari 10 Kantor Akuntan Publik. Peneliti menentukan jumlah populasi karena di setiap Kantor Akuntan Publik jumlah auditornya berbeda-beda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang dipilih.

2.1. Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*. Sugiyono (2009:82) teknik *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu.

Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan yang telah terdaftar pada Directory Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAI.
- 2) Responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor pada kantor akuntan publik baik itu partner, manajer, supervisor, senior maupun junior.
- 3) Responden tidak dibatasi oleh *gender* sehingga semua auditor yang bekerja di kantor akuntan publik dapat diikutsertakan sebagai responden.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono, (2011:137). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya Sugiyono, (2011:142).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Hasil kuesioner yang merupakan data kuantitatif variabel independen dan dependen tersebut, yang dijadikan oleh penulis sebagai acuan untuk diolah dengan menggunakan alat bantu *software statistic* SPSS 22.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen Sugiyono, (2011:137). Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui buku, jurnal, internet, artikel dan literatur.

2.3. Metode Analisis Data

Analisis data kuantitatif menurut Sugiyono (2010:7) yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Skala pengukuran yang digunakan pengujian adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2005:86) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

- Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert yang menggambarkan peringkat jawaban.
- Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
- Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
- Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1 Skala Likert Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner

No	Kategori Jawaban	Skor/Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu / Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2010:132)

2.3.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur suatu

konstruk dan apakah dimensi-dimensi yang diukur secara sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran (Ghazali:2005) dalam Edo Asmara (2013:61).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Corrected Item-Total Correlations* dengan tingkat kepercayaan 0,05 , uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{table} dengan *degree of freedom* (df) = n-2 dalam hal ini n adalah sampel. Data dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{table}$.

2.3.2. Uji Reliabilitas

Reabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Penelitian diuji dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbachs Alpha*. Jika nilai koefisien $\alpha > 0,6$ maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliable.

2.3.3. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Ganda adalah suatu teknik yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

2.3.4. Uji Korelasi Berganda

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar

variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi yang ditentukan meliputi korelasi berganda dan korelasi parsial, nilai korelasi $-1 \leq r \leq 1$.

- a. Jika $r = -1$ atau mendekati -1, maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah sangat kuat tetapi negatif, dapat diartikan jika variabel independen naik maka variabel dependen akan turun dan sebaliknya.
- b. Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah lemah sekali yang berarti tidak ada atau dapat dikatakan lemah. Maka dengan demikian dapat dikatakan pula antara variabel independen dengan variabel dependen tidak ada hubungan.
- c. Jika $r = 1$ atau mendekati 1, maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen adalah sangat kuat tetapi positif (jika variabel independen naik maka variabel dependen akan naik dan sebaliknya). Koefisien korelasi ditentukan dengan SPSS. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.2 Ketentuan Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2011:191)

2.3.5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (r^2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi tidak pernah negative dan besarnya antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.

2.3.6. Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji T diajukan untuk menemukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Dan juga untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

2.3.7. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan

tingkatan signifikansi 0.05. Jika nilai probability F lebih besar dari 0.05 maka regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependent atau dengan kata lain variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

2.4. Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Agar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan jelas, serta untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan pengertian disini, maka perlu pembatasan dari variabel dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.3 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
X1 = <i>Work Life Balance</i> (Sturges dan Guest (2004) dalam journal <i>louis P Parkes dan Peter H Langford (2008)</i>)	1. <i>Work Interference With Personal Life</i>	1 <i>Fleksibilitas</i>	Likert
		2 <i>Problem solving</i>	
	2. <i>Personal Life Interference With Work</i>	3 Suasana hati	
		4 Keterampilan	
	3. <i>Personal Life Enhancement Of Work</i>		
	4. <i>Work Enhancement Of Personal Life</i>		

<p>X2 = <i>Locus of control</i> (lokus kendali) dalam Intiyas Utami,dkk (2007)</p>	<p>1. Locus Kendali Internal (<i>Internal Locus of Control</i>)</p> <p>2. Locus Kendali Eksternal (<i>Eksternal Locus of Control</i>)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>Keputusan Pimpinan</p> <p>Jabatan/Kedudukan</p> <p>Kesempatan</p> <p>Kemampuan dalam pekerjaan</p> <p>Keberuntungan</p> <p>Nasib</p>	<p>Likert</p>
<p>Y = Kualitas Audit (De Angelo (1981))</p>	<p>1. Kualitas teknis</p> <p>2. Kualitas Jasa</p> <p>3. Hubungan Auditor-Klien</p> <p>4. Independensi</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip auditing dalam melakukan pekerjaan lapangan</p> <p>Berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam melakukan audit</p> <p>Tidak mudah percaya terhadap pernyataan klien</p> <p>Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien</p> <p>Melaporkan semua kesalahan klien</p>	<p>Ordinal</p>
<p>Z = <i>Gender</i> (Timothy J Fogarty, 1996)</p>	<p>1. Pria</p> <p>2. Wanita</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Peran</p> <p>Perilaku</p> <p>Mentalitas</p>	

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

		4	Karakteristik emosional	
--	--	---	-------------------------	--

Sumber : Diolah Penulis (2016)

3.1. Karakteristik Responden

- a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

3. PEMBAHASAN

Tabel 3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	24	37,5%
Perempuan	40	62,5%
Total	64	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden atau 37,5% adalah laki – laki. Sedangkan sebanyak 40 atau 62,5 % responden adalah

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini mayoritas adalah perempuan

- b. Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 tahun	9	14%
25 – 35 tahun	47	73%
35 – 40 tahun	6	10%
40 – 45 tahun	2	3%
Jumlah	64	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari data diatas dapat diketahui responden yang berumur <25 tahun berjumlah 9 orang dengan persentase 14%, responden yang berumur 25 – 35 tahun berjumlah 47 orang dengan persentase 73%, responden berumur 35 –

40 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 10% dan berumur 40 – 45 tahun ada 2 orang dengan persentase 3%.

- c. Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
< 1 Tahun	12	19%
1 - 3 Tahun	34	53%
>3 Tahun	18	28%
Jumlah	64	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diketahui bahwa auditor yang bekerja < 1 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 19%, responden yang bekerja selama 1- 3 tahun berjumlah 34 orang dengan

persentase 53%, responden yang bekerja > 3 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 28%.

- d. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
------------	--------	------------

D3	0	0%
S1	53	83%
S2	11	17%
Jumlah	64	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diketahui auditor yang berpendidikan S1 berjumlah 53 orang dengan persentase 83% dan berpendidikan S2 berjumlah 11 orang dengan persentase 17%.
 e. Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 3.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Junior Auditor	21	33%
Senior Auditor	39	61%
Supervisor	4	6%
Jumlah	64	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diketahui auditor yang memiliki jabatan Junior Auditor berjumlah 21 orang dengan persentase 33%, yang memiliki jabatan Senior Auditor berjumlah 39 orang dengan persentase 61% dan yang memiliki jabatan Supervisor berjumlah 4 orang dengan persentase 6%.

3.2. Uji Kualitas Data

3.2.1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Variabel *Work Life Balance* (X1)

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas *Work Life Balance*

Pertanyaan	r hitung	r table	Kesimpulan
Pertanyaan1	0,380	0,246	Valid
Pertanyaan2	0,256	0,246	Valid
Pertanyaan3	0,261	0,246	Valid
Pertanyaan4	0,259	0,246	Valid
Pertanyaan5	0,427	0,246	Valid
Pertanyaan6	0,330	0,246	Valid
Pertanyaan7	0,663	0,246	Valid
Pertanyaan8	0,692	0,246	Valid
Pertanyaan9	0,791	0,246	Valid
Pertanyaan10	0,805	0,246	Valid
Pertanyaan11	0,578	0,246	Valid
Pertanyaan12	0,756	0,246	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Pada tabel 3.6 menunjukkan variabel work life balance mempunyai kriteria valid untuk 12 butir pertanyaan karena memiliki nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r-table sebesar 0,246.

b. Uji Validitas Variabel *Locus of Control* (X2)

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas *Locus of Control*

Pertanyaan	r hitung	r table	Kesimpulan
Pertanyaan1	0,773	0,246	Valid
Pertanyaan2	0,649	0,246	Valid
Pertanyaan3	0,261	0,246	Valid
Pertanyaan4	0,669	0,246	Valid

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Pertanyaan5	0,862	0,246	Valid
Pertanyaan6	0,394	0,246	Valid
Pertanyaan7	0,729	0,246	Valid
Pertanyaan8	0,687	0,246	Valid
Pertanyaan9	0,808	0,246	Valid
Pertanyaan10	0,808	0,246	Valid
Pertanyaan11	0,325	0,246	Valid
Pertanyaan12	0,721	0,246	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Pada tabel 3.7 menunjukkan variabel *locus of control* mempunyai kriteria valid untuk 12 butir pertanyaan karena memiliki nilai dari *Corrected*

Item-Total Correlation lebih besar dari r-tabel sebesar 0,246.

c. Uji Validitas Variabel Kualitas Audit (Y)

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Kualitas Audit

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Pertanyaan1	0,724	0,246	Valid
Pertanyaan2	0,702	0,246	Valid
Pertanyaan3	0,632	0,246	Valid
Pertanyaan4	0,395	0,246	Valid
Pertanyaan5	0,730	0,246	Valid
Pertanyaan6	0,707	0,246	Valid
Pertanyaan7	0,720	0,246	Valid
Pertanyaan8	0,682	0,246	Valid
Pertanyaan9	0,678	0,246	Valid
Pertanyaan10	0,786	0,246	Valid
Pertanyaan11	0,727	0,246	Valid
Pertanyaan12	0,766	0,246	Valid
Pertanyaan13	0,656	0,246	Valid
Pertanyaan14	0,605	0,246	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Pada tabel 3.8 menunjukkan variabel komitmen organisasi mempunyai kriteria valid untuk 14 butir pertanyaan karena memiliki nilai dari

Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r-tabel sebesar 0,246.

3.2.2. Uji Reliabilitas

a. Uji Reabilitas Variabel *Work Life Balance* (X1)

Tabel 3.9 Hasil Uji Reabilitas Variabel *Work Life Balance*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	12

Sumber : Data Primer yang diolah (2016)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* atas variable *work life balance* sebesar 0,856. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner tersebut

reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

b. Uji Reabilitas Variabel *Locus of Control* (X2)

Tabel 3.10 Hasil Uji Reabilitas Variabel Locus of Control
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	12

Sumber: Data primer diolah (2016)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* atas variable *locus of control* sebesar 0,913. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner tersebut

reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

c. Uji Reabilitas Variabel Kualitas Audit (Y)

Tabel 3.11 Hasil Uji Reabilitas Variabel Kualitas Audit
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.931	14

Sumber: Data primer diolah (2016)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* atas variable kualitas audit sebesar 0,931. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner tersebut reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

3.3. Uji Regresi Linear Berganda
3.3.1. Uji Regresi Linear Berganda Tanpa Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS Ver.22 diperoleh data hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Tanpa Variabel Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	36.603	6.572		5.569	.000
WLB	-.108	.283	-.088	-.381	.705
LOC	.522	.216	.555	2.411	.019

a. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 36,603 - 0,108X_1 + 0,522X_2 + 6,572$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel *work life balance* dan *locus of control* terhadap kualitas audit, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta = 36,603 , artinya bahwa pada saat *work life balance* dan *locus of control* tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka kualitas audit auditor di KAP sebesar 36,603 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
2. Koefisien regresi variabel *work life balance* (X1) sebesar 0,108 artinya jika *work life balance* mengalami kenaikan 1, maka kualitas audit mengalami kenaikan 0,108 atau

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

10,8%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *work life balance* terhadap kualitas audit.

3. Koefisien regresi variabel *locus of control* (X2) sebesar 0,522 artinya jika *locus of control* mengalami kenaikan 1, maka kualitas audit akan mengalami kenaikan 0,522 atau 52,2%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif

antara *locus of control* terhadap kualitas audit

4. Uji Regresi Linear Berganda Dengan Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS Ver.22 diperoleh data hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Dengan Variabel Moderasi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.440	6.537		5.727	.000
WorkLifeBalance	-.188	.286	-.153	-.657	.514
LocusOfControl	.563	.216	.599	2.603	.012
Moderasi1	.029	.020	.166	1.461	.149

a. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :
 $Y = a + b1X1 + b2X2 + b4Moderat + e$
 $Y = 37,440 - 188X_1 + 0,563X_2 + 0,029((X_1Z)+(X_2Z)) + 6,537$

Keterangan:

X₁ = Work Life Balance

X₂ = Locus Of Control

Z = Gender

((X₁Z)+(X₂Z)) = Variabel penjumlahan dari hasil perkalian antara *work life balance* dengan gender dan perkalian antara *locus of control* dengan gender yang menggambarkan pengaruh variabel moderating gender atas hubungan *work life balance* dan *locus of control* terhadap kualitas audit.

Y = Kualitas audit

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel *work life balance* dan *locus of control* terhadap kualitas audit dengan gender sebagai variabel

pemoderasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta = 23,756 , artinya bahwa pada saat *work life balance* dan *locus of control* dengan variabel moderasi tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka kualitas audit auditor di KAP sebesar 37,440 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
- 2) Koefisien regresi variabel *work life balance* (X1) sebesar 0,188 artinya jika *work life balance* mengalami kenaikan 1, maka kualitas audit mengalami kenaikan 0,188 atau 18,8%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *work life balance* terhadap kualitas audit.
- 3) Koefisien regresi variabel *locus of control* (X2) sebesar 0,563 artinya jika *locus of control* mengalami kenaikan 1, maka kualitas audit akan mengalami kenaikan 0,563 atau 56,3%. Koefisien bernilai positif

artinya terjadi hubungan positif antara *locus of control* terhadap kualitas audit.

- 4) Koefisien regresi variabel moderasi sebesar 0,029 artinya jika variabel moderat mengalami kenaikan 1, maka kualitas audit akan mengalami kenaikan 0,029 atau 2,9%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel pemoderasi terhadap kualitas audit

3.4 Uji Korelasi Berganda

3.4.1. Uji Koefisien Korelasi Berganda Tanpa Variabel Moderasi

Uji koefisien korelasi berganda ini dilakukan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel X1, X2 dan variabel Y. Dalam penelitian ini variabel X (variabel bebas) adalah *Work Life Balance* (X1) dan *Locus Of Control* (X2) dan variabel Y (variabel tidak bebas) adalah Kualitas Audit.

Tabel 3.14 Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda (R) Tanpa Variabel Moderasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.231	.206	6.951

a. Predictors: (Constant), LocusOfControl, WorkLifeBalance

b. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, nilai R sebesar 0,481 atau 48,1%. Karena nilai R berada pada interval koefisien 0,40 – 0,599 ini menunjukkan bahwa variabel independen dengan kualitas audit berada pada tingkat hubungan yang sedang.

3.4.2. Uji Koefisien Korelasi Berganda Dengan Variabel Moderasi

Tabel 3.15 Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda (R) Dengan Variabel Moderasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.220	6.888

a. Predictors: (Constant), Moderat1, WorkLifeBalance, LocusOfControl, Gender

b. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, nilai R sebesar 0,508 atau 50,8%. Karena nilai R berada pada interval koefisien 0,40 – 0,599 ini menunjukkan bahwa variabel independen dengan variabel moderasi berada pada tingkat hubungan yang sedang terhadap kualitas audit.

3.5 Uji Koefisien Determinasi

3.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R²) Tanpa Variabel Moderasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variasi variabel independen yaitu *work life balance* dan *locus of control* dapat menjelaskan variasi dalam kualitas audit (variabel dependen). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square* yang ditampilkan pada tabel berikut:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 3.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Tanpa Variabel Moderasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.231	.206	6.951

a. Predictors: (Constant), LocusOfControl, WorkLifeBalance

b. Dependent Variable: KualitasAuditl

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,206 atau 20,6% , hal ini menunjukkan bahwa variabel *work life balance* dan *locus of control* dapat menjelaskan 20,6% terhadap kualitas audit, sedangkan sisanya 79,4% (100% - 20,6%) dijelaskan karena variabel-variabel lain tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R²) Dengan Variabel Moderasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variasi variabel independen yaitu *work life balance* dan *locus of control* dapat menjelaskan variasi dalam kualitas audit (variabel dependen) dengan *gender* sebagai variabel pemoderasi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square* yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Dengan Variabel Moderasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.220	6.888

a. Predictors: (Constant), Moderat1, WorkLifeBalance, LocusOfControl, Gender

b. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien *adjusted R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen dan moderasi sebesar 0,220. Hal ini menunjukan bahwa variabel *work life balance*, *locus of control*, *gender* mampu menjelaskan 22% terhadap variabel kualitas audit dan sisanya 78% (100% - 22%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

3.6.1. Uji Statistik T (Uji Parsial) Tanpa Variabel Moderasi

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Nilai t tabel ditentukan dengan nilai signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n - k$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.

Dalam pengujian ini, jumlah sample (n) = 64; jumlah variabel (k) = 3; taraf signifikan $\alpha = 0,05\% : 2 = 2,5\%$, maka $df = n - k = 64 - 3 = 61$ sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,00.

3.6 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial) Tanpa Variabel Moderasi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	36.603	6.572		5.569	.000
WLB	-.108	.283	-.088	-.381	.705
LOC	.522	.216	.555	2.411	.019

a. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

1. Pengaruh *Work Life Balance* terhadap Kualitas Audit

Hasil uji H_1 dari tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan yang didapat t-hitung -0,381 dan tingkat signifikansi 0,705. Dari hasil perhitungan tersebut dengan t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka variabel *work life balance* secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak dapat diterima.

2. Pengaruh *Locus Of Control* terhadap Kualitas Audit

Hasil uji H_2 dari tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan yang didapat t-hitung 2,411 dan tingkat

signifikansi 0,019. Dari hasil perhitungan tersebut dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka variabel *locus of control* secara partial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

3.6.2. Uji Statistik T (Uji Parsial) Dengan Variabel Moderasi

Untuk menunjukkan apakah variabel independen dan moderasi yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui nilai t-hitung setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial) Dengan Variabel Moderasi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	37.440	6.537		5.727	.000
WorkLifeBalance	-.188	.286	-.153	-.657	.514
LocusOfControl	.563	.216	.599	2.603	.012
Moderasi	.029	.020	.166	1.461	.149

a. Dependent Variable: KualitasAudit

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Tabel 3.19 menunjukkan bahwa variabel *work life balance* memberikan koefisien parameter sebesar (0,657) dengan signifikansi 0,514 , variabel *locus of control* memberikan nilai koefisien sebesar 2,603 dengan signifikansi 0,012 , sementara variabel moderasi yang merupakan interaksi antara *work life balance*, *locus of control* dan variabel moderasi *gender* memberikan koefisien

parameter sebesar 1,461 dengan signifikansi 0,149.

3.7 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai f-hitung dengan f-tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - k$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Dalam pengujian ini (n) = 64, sehingga diperoleh f -tabel sebesar 3,148 dari ($df = 64 - 3$).

3.7.1. Uji Statistik F (Uji Simultan) Tanpa Variabel Moderasi

Tabel 3.20 Hasil Uji F (Simultan) Tanpa Variabel Moderat ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	886.169	2	443.084	9.170	.000 ^b
Residual	2947.581	61	48.321		
Total	3833.750	63			

a. Dependent Variable: KualitasAudit

b. Predictors: (Constant), LocusOfControl, WorkLifeBalance

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari hasil uji f diatas diperoleh f -hitung sebesar 9,170 dengan nilai signifikansinya 0,000. Dari perhitungan tersebut didapat tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan f -hitung > dari f -tabel, hal ini berarti *work life balance* dan *locus of control* berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit melalui *work life balance* dan *locus of control*.

3.7.2. Uji Statistik F (Uji Simultan) Dengan Variabel Moderasi

Tabel 3.21 Hasil Uji F (Simultan) Dengan Variabel Moderasi ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	987.451	3	329.150	6.938	.000 ^b
Residual	2846.299	60	47.438		
Total	3833.750	63			

a. Dependent Variable: KualitasAudit

b. Predictors: (Constant), Moderat1, WorkLifeBalance, LocusOfControl, Gender

Sumber : Data primer yang diolah (2016)

Dari hasil uji f diatas diperoleh f -hitung sebesar 6,938 dengan nilai signifikansinya 0,000. Dari perhitungan tersebut didapat tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan f -hitung > dari f -tabel, hal ini berarti *work life balance* dan *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan *gender* sebagai variabel pemoderasi. Dengan demikian dapat disimpulkan H_3 yang menyatakan bahwa *work life balance* dan *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan *gender* sebagai variabel pemoderasi dapat diterima.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari Hasil dan Pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

2. *Work life balance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit auditor di kantor akuntan publik.
3. *Locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit auditor di kantor akuntan publik.
4. *Gender* berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi variabel *work life balance* dan *locus of control* terhadap kualitas audit.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis mencoba melakukan saran sebagai berikut:

1. Bagi penulis selanjutnya diharapkan menggunakan model yang lebih baik untuk melihat dan menguji kualitas audit.
2. Pengembangan teori untuk menentukan penyebab perilaku dan sikap individu dalam lingkup kerja kantor akuntan publik sangat penting dalam penelitian keprilakuan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel gender sebagai anteseden sikap auditor antara lain : persepsi diskriminasi, personality, sikap kerja dan kepribadian untuk dapat menjelaskan penyebab perbedaan kualitas audit.
3. Dalam profesi akuntansi, kualitas sumber daya merupakan aset yang sangat penting. Faktor penentu dari sikap tersebut sangat diperlukan sebagai dasar pengembangan pengelolaan sumber daya manusia di KAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit seorang auditor adalah integritas, independensi, motivasi dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan locus of control seorang auditor. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah kemungkinan pihak manajemen lebih berfokus menciptakan kebijakan, kondisi dan situasi seimbang serta meningkatkan kualitas diri auditor-auditornya. Manajemen KAP harus mampu mengendalikan dan memberikan situasi yang mendukung bagi auditor dalam menyeimbangkan diri agar dapat sejalan dengan kebijakan KAP serta mendukung tercapainya kualitas audit yang baik.

4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dalam mengadopsi kuesioner peneliti diharapkan mengembangkan daftar-daftar pertanyaan pada penelitian ini. Serta memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. Auditing. 2014. Lembaga Penerbit FUEI. Jakarta.
- Akerlof, George A. "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and The Market Mechanism". *Quarterly Journal of Economics* 84 (3), 1970.
- Antara Komitmen dengan Kepuasan Kerja (Studi Empiris pada Akuntan Pendidik di Surabaya)". *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi*. Volume 4. Januari 2004. Semarang Program Sain Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Ardani, Lilis. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit. *Dalam Majalah Ekonomi Tahun XX*.
- Ardiansah, Muhammad Noor. (2003). Pengaruh Gender dan Locus Of Control Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional Dan Keinginan Berpindah Kerja Auditor (Studi pada Auditor KAP di Pulau Jawa). Semarang.
- Ariesanti, Alia. "Tesis: Pendapat Aditor tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keahlian dan Independensi sebagai Kualitas

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Audit". Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 2001.
- Arisinta, Octaviana. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure, dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIII, No. 3 Desember 2013: 266 – 278.*
- Beauregard, Alexandra and Lesley C. Henry. (2008), "Making the link between work-life balance practices and organizational performance", *Human Resources Management Review*, Volume 19, Issue 1, article available on www.sciencedirect.com
- Cristiawan, Y.J. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting & Economics*.
- Gregson, T, 1990. Communication Satisfaction : A Path Analytic Study of Accountants Affiliated with CPA Firms. *Behavioral Research in Accounting*, Volume 2 .32-49
- Gregson, T, 1992. An Investigation of the causal ordering of job satisfaction and organizational commitment in turnover models in accounting. *Behavior Research In Accounting*. 4 : 80 – 95
- Harif, A.R, 2001. "Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional terhadap Intensi Keluar: Pengujian Empiris Model Turnover." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 3, No.1. 335-352.
- Kompas.com. (2013). "Work Life Balance" Indikator Baru Kesuksesan, <http://kompas.com/work-life.balance.indikator.baru.kesuksesan/>. Diakses 9 Juli 2016 pukul 20.35 WIB. Jakarta
- Kuntjoro, Z.S., (2002). Komitmen Organisasional. (Online), tersedia: <http://www.e-psikologi.com/masalah/250702.htm>.
- Mulyadi. 2009. Auditing. Edisi Enam. Salemba Empat. Jakarta.
- Penelitian Empiris. *Journal Directory: Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra*. Vol. 4 / No. 2.
- Priyatmo, Duwi. (2014). SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis-Ed.1. Yogyakarta: ANDI
- Reksohadiprodjo, S dan T.Hani H (1990) *Teori dan Perilaku Organisasi Perusahaan*
- Robbin, Steven. 2008. Perilaku Organisasi Empat : Jakarta
- Robbins, Stephen P. (2001). *Organizational Behavior*, New Jersey: Pearson Education International.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi ke Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Taufiq Muh. Efendi. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). *Tesis.*

Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (dipublikasikan).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PENGARUH ORIENTASI ETIKA, PENGALAMAN DAN KOMITMEN TERHADAP SENSITIVITAS ETIKA AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN)

Rizka Ristiani*), Holiawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*Email: rizkaristiani19@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Ethical Orientation, Experience and Commitment of Ethical Sensitivity Auditor. The population in this study was 67 auditor at KAP Tangerang and South Tangerang with a sample of 55 respondents. Methods of data collection using questionnaires. Sampling with purposive sampling method. This study uses multiple regression analysis was tested by Test Validity, Test Reliability, Classical Assumption Test, Coefficient of Determination, Correlation, T and F Test. Test results indicate idealism, professional and organizational commitment has significant and positive effect on the ethical sensitivity of auditor. Relativism has negative and significant effect on the ethical sensitivity of auditor. While experience has no effect significantly on the ethical sensitivity of auditor.

Key Words: Ethical Sensitivity, Ethical Orientation, Experience, Commitments

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Orientasi Etika, Pengalaman dan Komitmen Terhadap Sensitivitas Etika Auditor. Populasi dalam penelitian ini adalah 67 auditor di KAP Tangerang dan Tangerang Selatan dengan jumlah sampel 55 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda diuji dengan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi, Korelasi, Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealisme, komitmen profesional dan komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap sensitivitas etika auditor. Relativisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sensitivitas etika auditor. Sedangkan pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor.

Kata Kunci: Sensitivitas Etika, Orientasi Etika, Pengalaman, Komitmen

1. PENDAHULUAN

Akuntan publik merupakan pihak independen yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik dengan memberikan jasa audit dan attestasi

lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011. Auditor menghadapi dilema etika profesional ketika harus bertanggungjawab melayani klien dan juga melayani publik secara bersamaan. Dilema etika profesi auditor dikarenakan

auditor bekerja untuk klien, tetapi auditor harus mewakili berbagai kepentingan konstituen, termasuk pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum. Shaub *et al.*, (1993) menyatakan masalah etika muncul ketika akuntan publik menyeimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait.

Krisis kepercayaan terhadap profesi auditor KAP di Indonesia terjadi setelah adanya sanksi pembekuan izin praktik kepada 13 KAP yang melanggar standar audit pada tahun 2008-2009 (Agoes, 2012). Salah satunya adalah sanksi pembekuan izin praktik selama 9 bulan dihitung sejak tanggal 29 April 2008 atas pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Drs. Oman Pieters Arifin karena telah melanggar Standar Auditing (SA), dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu dilakukan dalam audit Laporan Keuangan PT Electronic Solution Indonesia 2007. Hal ini membuktikan bahwa auditor harus bersikap profesional serta dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menjalankan tugas.

Shaub *et al.*, (1993) menyatakan sensitivitas etika (*ethical sensitivity*) merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan. Agar dapat melatih sensitivitasnya dalam hal pertimbangan etika, auditor harus dapat mengakui ada masalah etika dalam pekerjaannya, dan sensitivitas tersebut merupakan tahap awal dalam proses pengambilan keputusan etika. Dengan menggunakan *path analysis* untuk menguji hubungan struktural sensitivitas auditor pada situasi etika (Shaub *et al.*, 1993) memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh sensitivitas etika auditor (didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika pada situasi profesional auditor) dari: (1) orientasi etika personal dibentuk oleh lingkungan budaya dan pengalaman personal, (2) komitmen organisasi, dan (3) komitmen profesional.

Orientasi etika merupakan alternatif pola perilaku seseorang untuk menyelesaikan dilema etika, yang dibentuk oleh idealisme dan relativisme (Forsyth, 1980). Idealisme berkaitan dengan tindakan yang berpedoman pada nilai-nilai etika dan moral, sedangkan relativisme berkaitan dengan penolakan terhadap nilai-nilai etika dan moral (Forsyth, 1980).

Pengalaman adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (Asana, 2013). Auditor yang memiliki pengalaman dianggap lebih konservatif saat menghadapi dilema etika. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sangat penting, karena semakin teliti auditor maka semakin meningkat sensitivitas etika yang dimiliki auditor. Gusnardi (2003) secara lebih spesifik menyatakan bahwa pengukuran terhadap pengalaman audit dapat dilakukan dengan mengetahui jabatan auditor, lama bekerja, peningkatan keahlian, serta pelatihan audit yang pernah diikuti.

Salah satu cara yang dapat dilakukan seorang auditor untuk bertahan sebagai anggota dari organisasi dan/ atau profesinya adalah memahami sifat dasar etika dari suatu keputusan yang dibuat, pemahaman yang cukup dapat meningkatkan sensitivitas etikanya (Anderson dan Ellyson, 1986; Shaub *et al.*, 1993 dalam Irawati dan Supriyadi, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komitmen profesional dan komitmen organisasional dengan sensitivitas etika.

Beberapa penelitian mengenai sensitivitas etika telah dilakukan. Mahendra (2014) menyatakan orientasi etika dan komitmen profesional berpengaruh terhadap sensitivitas etika. Kurniawan (2013) menyatakan bahwa idealisme, relativisme dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap sensitivitas etika dengan komitmen sebagai variabel intervening. Irawati dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Supriyadi (2012) menyatakan terdapat pengaruh komitmen organisasional terhadap sensitivitas etika.

Hasil tersebut berbeda dengan Aziza dan Salim (2007) yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara komitmen organisasional dengan sensitivitas etika. Januarti (2011) menyatakan bahwa orientasi etika berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis, sedangkan pengalaman, komitmen profesional, dan nilai etika organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis. Falah (2006) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap idealisme dan tidak berpengaruh pada relativisme, sedangkan relativisme berpengaruh signifikan pada sensitivitas etika dan idealisme tidak berpengaruh. *Shaub et al.*, (1993) menyatakan bahwa orientasi etika mempengaruhi sensitivitas etika, komitmen profesi dan organisasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel pengalaman terhadap sensitivitas etika auditor, serta penggunaan dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dan tempat penelitian dilakukan pada KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan. Alasan dipilihnya auditor pada KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya sensitivitas etika auditor pada KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menguji sensitivitas etika pada auditor pemerintah, seperti, auditor BPK dan pemeriksa internal Bawasda.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dipilihnya auditor KAP adalah budaya organisasi yang cenderung heterogen pada masing-masing KAP jika dibandingkan dengan BPK yang memiliki budaya organisasi yang cenderung homogen, karena berada pada satu organisasi yang memiliki

kesamaan budaya. Kesamaan budaya pada BPK diperkuat dengan sistem *e-audit* yang diterapkan oleh BPK untuk seluruh anggotanya, sehingga mengarah pada penyeragaman program audit. Perbedaan budaya KAP dengan BPK diduga akan berpengaruh pada keputusan individu auditor, penelitian ini mencoba untuk melihat fenomena tersebut dari objek penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan skala Likert 1 sampai 7 dan 1 sampai 5, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 4 untuk menghindari *multi interpretable*, *central tendency effect* dan menghindari banyak informasi yang hilang (Hadi, 1991; Kriyantono, 2008; Asana, 2013).

2. KERANGKA TEORI

2.1 Orientasi Etika

Forsyth (1980) berpendapat bahwa orientasi etika adalah tujuan utama perilaku profesional yang berkaitan erat dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku dan digerakkan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Seorang auditor yang absolutis (relativisme rendah, idealisme tinggi) akan taat pada standar moral dan akan menunjukkan tingkat sensitivitas etika yang tinggi. Relativisme rendah lebih sensitif terhadap situasi yang melanggar norma atau peraturan. Bagaimanapun, auditor yang idealis akan cenderung untuk fokus pada kesalahan auditor yang lain. Finn *et al.*, (1988) mengembangkan penelitian Hunt dan Vitell (1986) dengan menggunakan skala idealisme dan relativisme dari Forsyth (1980), dimana lingkungan budaya dan pengalaman pribadi diasumsikan membentuk orientasi etika. Forsyth (1981) mengidentifikasi idealisme dan relativisme sebagai prediktor penting penilaian moral. Sikap idealis diartikan sebagai sikap tidak memihak dan terhindar dari berbagai kepentingan. Sedangkan, relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap

nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis (Forsyth, 1980).

Lawrence dan Shaub (1997) menunjukkan bukti empiris bahwa orientasi etika dan pertimbangan etis auditor berpengaruh terhadap keputusan profesional dan keputusan etis. Selain itu, orientasi etika berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis (Januarti, 2011). Falah (2006) secara spesifik menemukan idealisme berpengaruh positif terhadap sensitivitas etika dan relativisme berpengaruh negatif terhadap sensitivitas etika. Persepsi etika auditor pada ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa aturan-aturan etika berpengaruh pada sikap auditor dalam menentukan keputusannya. Ketika auditor memilih untuk mempertahankan idealisme atau relativisme, maka sensitivitas etika yang dihasilkan akan berbeda, sehingga diduga:

- H₁ : Idealisme berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.
- H₂ : Relativisme berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

2.2 Pengalaman

Pengalaman adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (Knoers dan Haditono, 1999) dalam Asana (2013). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa pelaksanaan audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Merchant (1989) dalam Agoes (2012) menemukan bahwa auditor yang semakin berpengalaman akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan

dalam melakukan telah analitik dan semakin tinggi tingkat independensinya. Auditor yang memiliki pengalaman lebih konservatif saat menghadapi dilema etika. Masih dalam Agoes (2012) Libby dan Frederick (1990) menyatakan semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin banyak pula sikap skeptisme. Januarti (2011) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis. Perkembangan moral kognitif seseorang dipengaruhi oleh pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor berkaitan dengan tingkat ketelitian auditor dan dapat mempengaruhi sensitivitas etika seorang auditor saat melaksanakan tugasnya, sehingga diduga:

- H₃ : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

2.3 Komitmen

Komitmen diartikan sebagai sebuah kepercayaan pada nilai-nilai organisasi dan/ atau profesi untuk mengerahkan usaha atas nama organisasi dan/ atau profesi sehingga memunculkan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi dan/ atau profesi (Aranya *et al.*, 1981). Komitmen dibedakan menjadi komitmen profesional dan komitmen organisasional secara empiris dan diprediksi oleh variabel yang berbeda (Irawati dan Supriyadi, 2012). Kedua komitmen tersebut akan menumbuhkan sensitivitas bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya, tidak terkecuali dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai etika.

Mahendra (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen profesional terhadap sensitivitas etika. Irawati dan Supriyadi (2012) juga menemukan bahwa komitmen organisasional berpengaruh

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

secara signifikan terhadap sensitivitas etika. Kurniawan (2013) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap sensitivitas etika. Nurfarida (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap sensitivitas etika auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen profesional dan komitmen organisasional mempengaruhi sensitivitas etika, sehingga diduga:

H₄ :Komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan

H₅ :Komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan

2.4 Sensitivitas Etika

Shaub *et al.* (1993) berpendapat bahwa sensitivitas etika adalah kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai etika dalam suatu keputusan. Hunt dan Vitell (2006) menjelaskan bahwa kemampuan seseorang untuk memahami masalah etis dipengaruhi oleh lingkungan budaya, lingkungan industri, lingkungan organisasi, dan pengalaman pribadi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 bagi KAP menyatakan bahwa setiap individu dalam KAP harus patuh pada ketentuan yang berlaku. Standar ini memperjelas definisi audit Shaub *et al.* (1993) dan Hunt & Vitell (2006) bagi auditor untuk semakin meningkatkan kemampuannya memahami nilai etika. Clarkeburn (2002) menyatakan bahwa sensitivitas etika adalah langkah awal dalam pengambilan keputusan. Tanpa mengenali situasi yang ada, mustahil dapat mengenali masalah etika. Kerana tanpa pengakuan awal bahwa terdapat suatu masalah etika dan moral sulit untuk membuat keputusan. Keputusan harus dibuat berdasarkan kesadaran akan adanya masalah etika

yang berdampak terhadap keputusan tersebut. Menurut Jagger (2011) sensitivitas etika adalah kemampuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek dari dilema etika. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sensitivitas etika adalah kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah dilema yang muncul untuk membuat suatu keputusan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang auditor yang memiliki orientasi etika yaitu idealisme dan relativisme yang tinggi, pengalaman yang baik dan memiliki komitmen, yaitu komitmen profesional dan komitmen organisasional dalam melakukan pekerjaannya akan berdampak terhadap pembentukan sensitivitas etika auditor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orientasi etika, pengalaman dan komitmen mempengaruhi sensitivitas etika, sehingga diduga:

H₆ :Idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *survey* dalam pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner. Data penelitian diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden secara langsung kepada auditor KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan. Berdasarkan *directory* IAPI per 30 Mei 2016 jumlah KAP di Tangerang yaitu 7 KAP dan jumlah KAP di Tangerang Selatan adalah 9 KAP.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan dengan jumlah responden sebanyak 67 auditor. Teknik sampling

yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel untuk auditor diambil sebanyak 55 auditor dengan kriteria bahwa auditor yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

- a. Auditor yang bekerja di KAP wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
- b. Jabatan yang dimiliki seorang auditor dalam KAP minimal sebagai auditor junior.
- c. Auditor memiliki pengalaman minimal 1 tahun pada KAP. Pemilihan sampel juga didasarkan pada kondisi bahwa auditor dengan pengalaman minimal 1 tahun telah memperoleh penugasan audit sebagai auditor junior.
- d. Pendidikan terakhir auditor minimal D3 dan telah mengikuti pelatihan.

3.2 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul (Sugiyono, 2013). Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh orientasi etika, pengalaman dan komitmen terhadap sensitivitas etika auditor KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) 23*.

3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016). Jadi suatu

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan maupun pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Uji validitas menggunakan nilai *Pearson Correlation* antar skor item dengan total item kemudian dibandingkan dengan r kritis. Jika korelasi item terhadap nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari r kritis (0,30) maka instrumen penelitian tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011). Begitu pula sebaliknya, apabila korelasi item terhadap nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari r kritis (0,30) maka instrumen penelitian tersebut dikatakan tidak valid.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk dari suatu kuesioner (Ghozali, 2016). Jadi suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Jika nilainya lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian tersebut dikatakan reliabel atau handal dan berlaku sebaliknya (Ghozali, 2011). Begitu pula sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil dari 0,60 maka instrumen penelitian tersebut dikatakan tidak reliabel atau tidak handal.

3.2.3 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi data perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Diuji menggunakan *software SPSS* versi 23.0.

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan *software SPSS for Windows*. Penggunaan metode

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

analisis dalam regresi dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.2.4.1 Uji Normalitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residu dari persamaan regresi berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah dengan statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal bila *Asymp. Sig (2-tailed) > alpha (0,05)*. Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dapat digambarkan dalam dua bentuk yaitu kurva histogram dan grafik normalitas *P-P Plot*.

3.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar sesama variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance > 0,10* atau nilai *VIF < 10*.

3.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Teknik untuk mendeteksi telah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melihat grafik *scatter plot* dimana antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID).

Pengujian menggunakan model *Glejser* juga dapat digunakan untuk memastikan telah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Model ini dilakukan dengan meregresikan nilai *absolute* residual terhadap variabel bebasnya. Jika variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *absolute* residual berarti model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

3.2.5 Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel/ lebih. Koefisien korelasi berganda ini merupakan nilai untuk mengukur kuatnya hubungan variabel untuk mengetahui pengaruh orientasi etika, pengalaman dan komitmen terhadap sensitivitas etika auditor di beberapa KAP Tangerang dan Tangerang Selatan. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat (signifikan), sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah (tidak signifikan). Menurut Sugiyono (2014) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = Sangat Rendah
0,20 - 0,399 = Rendah
0,40 - 0,599 = Sedang
0,60 - 0,799 = Kuat
0,80 - 1,000 = Sangat Kuat

3.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sebaliknya, nilai R² yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.2.7 Pengujian Hipotesis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh orientasi etika, pengalaman dan komitmen terhadap sensitivitas etika auditor KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) v. 23*. Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Sensitivitas Etika

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

X₁ = Idealisme

X₂ = Relativisme

X₃ = Pengalaman

X₄ = Komitmen Profesional

X₅ = Komitmen Organisasional

e = *Error Term*

Setelah melakukan pengujian validitas, reliabilitas, normalitas dan pengujian atas asumsi-asumsi klasik, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian atas hipotesis. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R²), dan nilai statistik t.

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji T ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh variabel masing-masing independen terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya, dapat dilihat dari probabilitasnya. Jika prob (t-statistik)

lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat signifikansi. Sedangkan jika prob (t-statistik) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat signifikansi.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujiannya adalah dengan merumuskan hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menentukan tingkat signifikansi pada uji dua sisi $\alpha/2 = 0,025$, kemudian menentukan besarnya signifikansi t masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil pengujian dengan program SPSS. Jika tingkat probabilitas (sig.) $t < \alpha/2 = 0,025$ maka hipotesis diterima.

b. Uji Signifikansi Model (Uji Statistik F)

Uji F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkatan signifikansi 0,05. Jika nilai probability F lebih besar dari 0,05 maka regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3 Operasional Variabel

3.3.1 Sensitivitas Etika

Shaub *et al.* (1993) dalam Aziza dan Salim (2007) menyatakan bahwa sensitivitas etika adalah kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai etika dalam suatu keputusan. Penelitian Irawati dan Supriyadi (2012) mengukur sensitivitas etika dengan memodifikasi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

skenario sensitivitas etika Shaub (1989) yang terdiri dari kegagalan akuntan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta, penggunaan jam kantor untuk kepentingan pribadi dan *judgement* akuntan dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Variabel sensitivitas etika (Y) diukur dengan menggunakan 4 indikator berupa kasus-kasus yang berkaitan dengan sensitivitas etika auditor. Indikator sensitivitas etika dijabarkan dalam kasus 1 s/d 4 pada lampiran kuesioner penelitian. Responden diarahkan untuk menilai tingkat indikasi pentingnya 4 kasus yang disajikan. Penilaian dimulai dari indikasi kasus sangat tidak penting/ STP (1), tidak penting/ TP (2), penting/ P (3), dan sangat penting/ SP (4).

3.3.2 Orientasi Etika

Orientasi etika merupakan alternatif pola perilaku untuk menyelesaikan dilema etika dan konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi yang berbeda. Orientasi etika diasumsikan dibentuk melalui pengalaman pribadi dan lingkungan budaya dengan menggunakan skala idealisme dan relativisme. Forsyth (1980) mengidentifikasi idealisme dan relativisme sebagai prediktor penting penilaian moral. Idealisme adalah sikap tidak memihak dan terhindar dari berbagai kepentingan. Relativisme adalah sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis.

Irawati dan Supriyadi (2012) membuat pengukuran idealisme dengan mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral. Idealisme diukur dengan menggunakan sepuluh item yang dikembangkan Forsyth (1981) yaitu memastikan hasil audit tidak merugikan pihak lain, toleransi terhadap

suatu kerugian, evaluasi terhadap suatu tindakan, tindakan yang berkaitan dengan fisik dan psikologis, sikap profesional, introspeksi diri, penilaian moral, kesejahteraan, pengorbanan, dan penilaian suatu tindakan ideal. Variabel idealisme (X_1) diukur dengan 10 pernyataan yang berkaitan dengan sikap tidak memihak dan terhindar dari berbagai kepentingan. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/ STS (1), tidak setuju/ TS (2), setuju/ S (3), dan sangat setuju/ SS (4).

Relativisme diukur dengan menggunakan sepuluh item yang dikembangkan Forsyth (1981) yaitu pertimbangan kode etik, aturan etika audit pada berbagai situasi, subjektivitas, karakteristik prinsip-prinsip moral, penilaian etis terhadap suatu tindakan individu, prinsip-prinsip moral individu, pertimbangan moral, penetapan aturan etika, formulasi kebohongan, dan situasi yang mempengaruhi kebohongan. Variabel relativisme (X_2) diukur dengan 10 pernyataan yang berkaitan dengan sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/ STS (1), tidak setuju/ TS (2), setuju/ S (3), dan sangat setuju/ SS (4).

3.3.3 Pengalaman

Pengalaman adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (Asana, 2013). Gusnardi (2003) mengukur pengalaman audit berdasarkan jabatan auditor, lama bekerja, peningkatan keahlian, serta pelatihan audit yang pernah diikuti oleh auditor.

Variabel pengalaman (X_3) diukur dengan menggunakan 4 indikator yang dikembangkan Gusnardi (2003).

Indikator pengalaman dijabarkan dalam poin kuesioner pengalaman yang terdiri dari jabatan auditor, lama bekerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan audit yang pernah diikuti.

- a. Penilaian jabatan dimulai dari auditor junior yang diberi skor 1, auditor senior yang diberi skor 2, manajer yang diberi skor 3, dan pemilik/partner yang diberi skor 4.
- b. Penilaian lama bekerja dimulai dari 1-2 tahun diberi skor 1, 3-4 tahun diberi skor 2, 5-6 tahun diberi skor 3, dan yang bekerja ≥ 7 tahun diberi skor 4.
- c. Penilaian tingkat pendidikan dimulai dari D3 diberi skor 1, S1 diberi skor 2, S2 diberi skor 3, dan S3 diberi skor 4.
- d. Penilaian pelatihan dimulai dari 1-2 kali diberi skor 1, 3-4 kali diberi skor 2, 5-6 kali diberi skor 3, dan ≥ 7 kali diberi skor 4.

3.3.4 Komitmen

Aranya *et al.* (1981) mendefinisikan komitmen sebagai kepercayaan serta penerimaan tujuan nilai organisasi dan/ atau profesi dengan kesediaan untuk mengerahkan usaha atas nama organisasi dan/ atau profesi dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi dan/ atau profesi. Komitmen profesional dan komitmen organisasional diindikasikan sebagai dua hal yang berbeda. Komitmen organisasional dan komitmen profesional dibedakan secara empiris dan diprediksi oleh variabel yang berbeda.

Komitmen profesional dalam penelitian ini menggunakan modifikasi pengukuran Irawati dan Supriyadi (2012). Penilaian menggunakan lima pernyataan yang berkaitan dengan komitmen profesional yaitu keinginan, tanggungjawab, motivasi, kepedulian, dan kebanggaan pada profesi auditor. Variabel komitmen profesional (X_4) diukur dengan 5 indikator yang dijabarkan menggunakan 5 pernyataan yang berkaitan dengan komitmen auditor terhadap profesinya sebagai auditor.

Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/ STS (1), tidak setuju/ TS (2), setuju/ S (3), dan sangat setuju/ SS (4).

Mowday *et al.*, (1978) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun bila setiap individu mengembangkan tiga sikap dalam organisasi, yaitu *identification*, *involvement*, dan *loyalty*. Komitmen organisasional diukur dengan menggunakan empat indikator modifikasi Irawati dan Supriyadi (2012) terhadap pengukuran Mowday *et al.*, (1978) yaitu keinginan kuat tetap sebagai anggota, keinginan berusaha keras, penerimaan nilai organisasional dan penerimaan tujuan organisasional. Variabel komitmen organisasional diukur dengan 4 indikator yang dijabarkan menggunakan 4 pernyataan yang berkaitan dengan komitmen auditor terhadap organisasi tempat ia bekerja, dalam hal ini Kantor Akuntan Publik. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/ STS (1), tidak setuju/ TS (2), setuju/ S (3), dan sangat setuju/ SS (4).

3.4 ANALISIS DATA

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh orientasi etika, pengalaman dan komitmen terhadap sensitivitas etika auditor KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) v. 23.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner dengan sampel 6 KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan tahun 2016.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4. PEMBAHASAN

4.1 Data Kuesioner Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Tangerang dan Tangerang Selatan. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, jabatan, lama bekerja, tingkat pendidikan, dan jumlah

pelatihan yang diikuti. Pengukuran tersebut dapat dilakukan melalui data yang diperoleh dari kuesioner yang kembali. Berikut ini adalah deskripsi yang menunjukkan karakteristik responden tersebut diatas.

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20 – 25 tahun	45	81,82 %
26 – 30 tahun	9	16,36 %
31 – 35 tahun	1	1,82 %
Total	55	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Sebagai informasi tambahan yang terkait dengan keberlangsungan profesi auditor di Tangerang dan Tangerang Selatan, penelitian ini memberikan data mengenai usia auditor KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hasil menunjukkan bahwa profesi ini masih didominasi oleh auditor yang memiliki usia produktif. Hal ini terlihat dari jumlah auditor dengan usia 20 sampai 25 tahun berjumlah 45 orang (81,82%), dan

jumlah auditor dengan usia 26 sampai 30 tahun berjumlah 9 orang (16,36%). Sedangkan auditor dengan usia 31 sampai 35 tahun yaitu 1 orang (1,82%). Data tersebut dapat menjadi pertimbangan sebagai peluang riset lanjutan dengan usia sebagai variabel yang mempengaruhi sensitivitas etika.

4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – Laki	26	47,27 %
Perempuan	29	52,73 %
Total	55	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah auditor laki-laki sebanyak 26 orang (47,27%) dan auditor perempuan sebanyak 29 orang (52,73%). Hal ini menunjukkan bahwa auditor pada Kantor

Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan masih didominasi oleh auditor perempuan dengan selisih yang tidak terlalu signifikan.

4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Presentase
Auditor Junior	9	16,36 %
Auditor Senior	40	72,73 %

Manajer	6	10,91 %
Pemilik/Partner	0	0 %
Total	55	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Tabel 4.3 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan tingkatan jabatan auditor di KAP Tangerang dan Tangerang Selatan di dominasi oleh auditor senior dengan presentase sebesar 72,73% (40 orang). Auditor junior dengan urutan kedua

sebesar 16,36% (9 orang) dan jabatan setingkat manajer sebesar 10,91% (6 orang) dan untuk jabatan pemilik/ partner adalah 0%.

4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1 – 2 tahun	7	12,73 %
3 – 4 tahun	28	50,91 %
5 – 6 tahun	16	29,09 %
≥ 7 tahun	4	7,27 %
Total	55	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas karakteristik responden yang bekerja pada KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan menunjukkan bahwa auditor yang bekerja selama 1 sampai 2 tahun sebesar 12,73% (7 orang), auditor yang bekerja selama 3 sampai 4 tahun sebesar 50,91% (28 orang), jumlah auditor yang

bekerja selama 5 sampai 6 tahun sebesar 29,09% (16 orang), dan auditor yang bekerja selama 7 tahun atau lebih sebesar 7,27% (4 orang).

4.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
D3	0	0 %
S1	51	92,73 %
S2	4	7,27 %
S3	0	0 %
Total	55	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan didominasi oleh auditor dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 51 orang (92,73%) dilihat dari karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan auditor. Jumlah auditor

dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 0%. S2 sebanyak 4 orang (7,27%), dan S3 sebanyak 0 orang (0%).

4.1.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Pelatihan Yang Diikuti

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Pelatihan Yang Diikuti

Pelatihan Yang Diikuti	Jumlah	Presentase
1 – 2 kali	3	5,45 %
3 – 4 kali	13	23,64 %
5 – 6 kali	21	38,18 %
≥ 7 kali	18	32,73 %
Total	55	100,00 %

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil bahwa karakteristik responden berdasarkan jumlah pelatihan yang telah diikuti auditor pada KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan sejumlah 3 auditor (5,45%) telah mengikuti pelatihan sebanyak 1 sampai 2 kali. Sejumlah 13 auditor (23,64%) telah mengikuti pelatihan sebanyak 3 sampai 4 kali dan 21 auditor (38,18%) mengikuti pelatihan sebanyak 5 sampai 6 kali serta 18 auditor (32,73%) telah mengikuti pelatihan sebanyak 7 kali atau lebih.

Data yang valid adalah data yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan data yang reliabel adalah data yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur suatu objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Data dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian pada Tabel 4.7 menunjukkan seluruh nilai koefisien korelasi dari instrumen ini lebih besar dari 0,3. Sehingga instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid atau instrumen ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

4.2 Uji Validitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

No	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	X _{1.1}	0,687	Valid
2	X _{1.2}	0,537	Valid
3	X _{1.3}	0,586	Valid
4	X _{1.4}	0,712	Valid
5	X _{1.5}	0,738	Valid
6	X _{1.6}	0,669	Valid
7	X _{1.7}	0,620	Valid
8	X _{1.8}	0,688	Valid
9	X _{1.9}	0,564	Valid
10	X _{1.10}	0,711	Valid
11	X _{2.1}	0,859	Valid
12	X _{2.2}	0,788	Valid
13	X _{2.3}	0,695	Valid
14	X _{2.4}	0,712	Valid
15	X _{2.5}	0,733	Valid
16	X _{2.6}	0,501	Valid
17	X _{2.7}	0,679	Valid
18	X _{2.8}	0,814	Valid

19	X _{2.9}	0,716	Valid
20	X _{2.10}	0,794	Valid
21	X _{3.1}	0,737	Valid
22	X _{3.2}	0,817	Valid
23	X _{3.3}	0,508	Valid
24	X _{3.4}	0,839	Valid
25	X _{4.1}	0,802	Valid
26	X _{4.2}	0,760	Valid
27	X _{4.3}	0,800	Valid
28	X _{4.4}	0,775	Valid
29	X _{4.5}	0,887	Valid
30	X _{5.1}	0,850	Valid
31	X _{5.2}	0,845	Valid
32	X _{5.3}	0,814	Valid
33	X _{5.4}	0,861	Valid
34	Y.1	0,799	Valid
35	Y.2	0,751	Valid
36	Y.3	0,785	Valid
37	Y.4	0,860	Valid

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

4.3 Uji Reliabilitas

Data penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Hasil penelitian pada Tabel 4.8 menunjukkan seluruh nilai koefisien *Cronbach Alpha* dari instrumen ini lebih

besar dari 0,6. Sehingga instrumen dari penelitian ini dapat dikatakan *reliable* atau bila instrumen ini digunakan beberapa kali untuk mengukur suatu objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula.

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Idealisme (X ₁)	0,850	Reliabel
2	Relativisme (X ₂)	0,904	Reliabel
3	Pengalaman (X ₃)	0,691	Reliabel
4	Komitmen Profesional (X ₄)	0,864	Reliabel
5	Komitmen Organisasional (X ₅)	0,864	Reliabel
6	Sensitivitas Etika (Y)	0,809	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

4.4 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Informasi tentang karakteristik variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.9 dibawah ini.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Kisaran Teoritis		Kisaran Aktual		Std. Deviasi
		Min	Maks	Min	Maks	
Sensitivitas Etika	12,18	4	16	7	16	2,40
Idealisme	31,72	10	40	22	40	5,03
Relativisme	30,72	10	40	22	40	5,30
Pengalaman	9,30	4	16	5	14	1,91
Komitmen Profesional	14,83	5	20	8	20	2,92
Komitmen Organisasional	12,36	4	16	7	16	2,45

Sumber: Data diolah SPSS v. 23 (2016)

Rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data dan standar deviasi digunakan untuk mengukur perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa *mean* variabel sensitivitas etika adalah 12,18 dengan standar deviasi sebesar 2,40. *Mean* variabel idealisme adalah 31,72 dengan standar deviasi sebesar 5,03. *Mean* variabel relativisme adalah 30,72 dengan standar deviasi sebesar 5,30. *Mean* variabel pengalaman adalah 9,30 dengan standar deviasi sebesar 1,91. *Mean* variabel komitmen profesional adalah 14,83 dengan standar deviasi sebesar 2,92. *Mean* variabel komitmen organisasional adalah 12,36 dengan standar deviasi sebesar 2,45.

Nilai kisaran aktual minimum dan maksimum variabel sensitivitas etika pada penelitian ini adalah sebesar 7 dan 16, idealisme sebesar 22 dan 40, relativisme sebesar 22 dan 40, pengalaman sebesar 5 dan 14, komitmen profesional sebesar 8 dan 20 serta komitmen organisasional sebesar 7 dan 16. Hasil ini juga menunjukkan bahwa nilai sentral dari distribusi data dengan

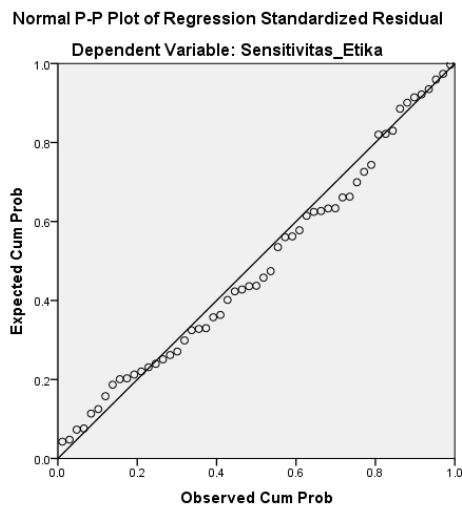
nilai tertinggi adalah idealisme dan yang terendah adalah pengalaman. Selain itu, variabel yang memiliki standar deviasi tertinggi adalah relativisme dan yang terendah adalah pengalaman.

4.5 Uji Asumsi Klasik

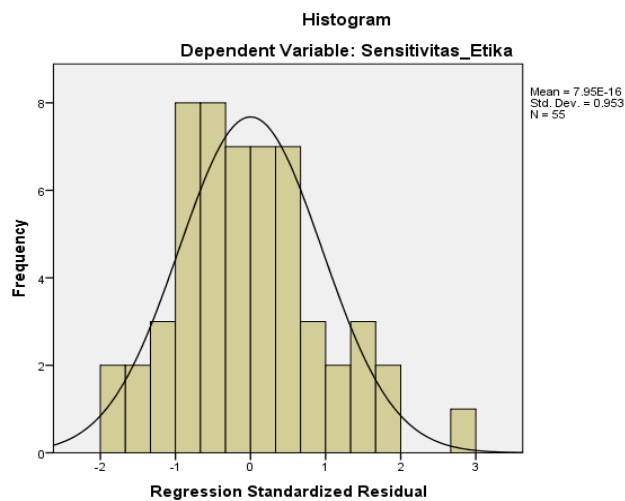
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan terbebas dari gejala-gejala asumsi klasik. Menurut Ghazali (2016) uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normal tidaknya data dalam penelitian ini dapat dideteksi lewat plot dan grafik histogram melalui gambar 4.1 dan 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.1 P-P Plot Hasil Uji Normalitas



Gambar 4.2 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 diatas menunjukkan penyebaran data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan *P-P Plot* di atas menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Gambar 4.2 di atas juga menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Untuk mendeteksi normalitas data juga dapat dilakukan dengan non-

parametrik statistik dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Residual berdistribusi secara normal apabila tingkat signifikansi atau *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Hasil uji pada tabel 4.10 di bawah ini menunjukkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* dari uji normalitas adalah sebesar 0,200 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti model dalam penelitian ini berdistribusi normal.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.02101868
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.048
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah bebas dari gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10.

Hasil uji pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa koefisien *tolerance* variabel idealisme adalah sebesar 0,896 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,116 lebih kecil dari 10. Koefisien

tolerance variabel relativisme adalah sebesar 0,747 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,339 lebih kecil dari 10. Koefisien *tolerance* variabel pengalaman adalah sebesar 0,944 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,060 lebih kecil dari 10. Koefisien *tolerance* variabel komitmen profesional adalah sebesar 0,653 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,532 lebih kecil dari 10. Koefisien *tolerance* variabel komitmen organisasional adalah sebesar 0,593 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 1,687 lebih kecil dari 10. Hasil tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional, dan komitmen organisasional dalam penelitian ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Idealisme (X ₁)	0,896	1,116	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Relativisme (X ₂)	0,747	1,339	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Pengalaman (X ₃)	0,944	1,060	Tidak terjadi multikolinearitas
4	Komitmen Profesional (X ₄)	0,653	1,532	Tidak terjadi multikolinearitas
5	Komitmen Organisasional (X ₅)	0,593	1,687	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

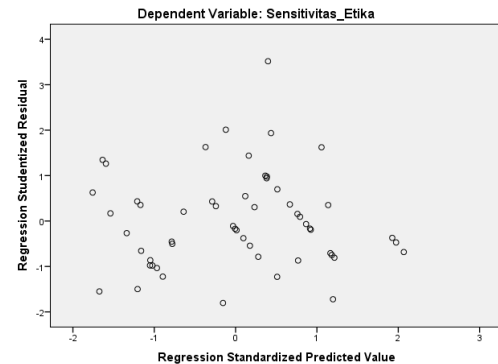
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Teknik untuk mendeteksi telah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dimana antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID).

Dari gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi sensitivitas etika auditor berdasarkan masukan variabel

independen idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional.



Gambar 4.3
Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji statistik untuk menjamin keakuratan hasil untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *glejser* untuk

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen, seperti pada tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.214	1.120		.191	.849
Idealisme	-.004	.017	-.037	-.269	.789
Relativisme	.031	.017	.266	1.765	.084
Pengalaman	-.067	.043	-.211	-1.576	.121
Komitmen_Profesional	.061	.034	.291	1.806	.077
Komitmen_Organisasional	-.038	.042	-.154	-.912	.366

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Besar probabilitas signifikansi variabel idealisme sebesar 0,789, variabel relativisme sebesar 0,084, variabel pengalaman sebesar 0,121, variabel komitmen profesional sebesar 0,077, dan variabel komitmen organisasional sebesar 0,366. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya kelima variabel berada di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.6 Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi berganda bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel/ lebih. Koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional dengan sensitivitas etika terhadap garis dugaannya. Apabila titik

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

kombinasi semakin mendekati garis dugaannya maka nilai koefisien semakin baik. Semakin besar nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang

semakin erat dan sebaliknya. Berikut hasil analisis koefisien korelasi dalam penelitian ini, ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Korelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.820	.801	1.07185	1.762

a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasional, Pengalaman, Idealisme, Relativisme, Komitmen_Profesional

b. Dependent Variable: Sensitivitas_Etika

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil menunjukkan R sebesar 0,905 atau sebesar 90,5%, yang artinya variabel idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap variabel sensitivitas etika.

4.7 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS 23, koefisien determinasi terletak pada tabel *Model Summary^b* dan tertulis *Adjusted R Square*.

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.820	.801	1.07185	1.762

a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasional, Pengalaman, Idealisme, Relativisme, Komitmen_Profesional

b. Dependent Variable: Sensitivitas_Etika

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, hasil menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0,801. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel sensitivitas etika dapat dijelaskan oleh variabel idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional sebesar 80,1%, sedangkan

sisanya sebesar 19,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

4.8 Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.492	2.061		2.179	.034
IDEALISME	.158	.031	.331	5.164	.000

RELATIVISME	-.128	.032	-.283	-4.030	.000
PENGALAMAN	-.103	.078	-.082	-1.314	.195
KOM_PROFESIONAL	.151	.062	.184	2.451	.018
KOM_ORGANISASIONAL	.432	.077	.441	5.604	.000

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

Pengujian tersebut dilakukan terhadap variabel idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional pada sensitivitas etika. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.15, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,492 + 0,158 X_1 - 0,128 X_2 - 0,103 X_3 + 0,151 X_4 + 0,432 X_5 + 2,061 e$$

Keterangan:

- Y = Sensitivitas Etika
- α = Konstanta
- β₁ - β₅ = Koefisien Regresi
- X₁ = Idealisme
- X₂ = Relativisme
- X₃ = Pengalaman
- X₄ = Komitmen Profesional
- X₅ = Komitmen Organisasional
- e = Error Term

Koefisien persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 4,492. Koefisien regresi variabel idealisme auditor (X₁) sebesar 0,158 menunjukkan besarnya pengaruh idealisme terhadap sensitivitas etika searah (positif). Koefisien regresi variabel relativisme auditor (X₂) sebesar

-0,128 menunjukkan besarnya pengaruh relativisme terhadap sensitivitas etika berbalik arah (negatif). Koefisien regresi variabel pengalaman auditor (X₃) sebesar -0,103 menunjukkan besarnya pengaruh pengalaman terhadap sensitivitas etika berbalik arah (negatif). Koefisien regresi variabel komitmen profesional (X₄) sebesar 0,151 menunjukkan besarnya pengaruh komitmen profesional terhadap sensitivitas etika searah (positif) dan koefisien regresi komitmen organisasional (X₅) sebesar 0,432 menunjukkan besarnya pengaruh komitmen organisasional terhadap sensitivitas etika searah (positif).

4.9 Uji T (T Test)

Uji t bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikansi dari masing-masing variabel bebas, dimana variabel bebasnya adalah idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional terhadap variabel terikat yaitu sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Tabel 4.16 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.492	2.061		2.179	.034
IDEALISME	.158	.031	.331	5.164	.000
RELATIVISME	-.128	.032	-.283	-4.030	.000
PENGALAMAN	-.103	.078	-.082	-1.314	.195
KOM_PROFESIONAL	.151	.062	.184	2.451	.018
KOM_ORGANISASIONAL	.432	.077	.441	5.604	.000

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Berdasarkan hasil uji t SPSS dalam tabel 4.16 atas pengujian masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Idealisme Terhadap Sensitivitas Etika Auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa idealisme berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk menguji pengaruh idealisme terhadap sensitivitas etika dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel idealisme = $0,000 < \alpha/2 = 0,025$, hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima. Kesimpulannya adalah idealisme berpengaruh secara signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Beberapa penelitian sebelumnya memperkuat hasil penelitian ini. Mahendra (2014) dan Kurniawan (2013) menemukan bahwa orientasi etika berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor. Januarti (2011) menunjukkan orientasi etika berpengaruh pada persepsi dan pertimbangan etis. Fallah (2006) secara spesifik menunjukkan idealisme berpengaruh positif terhadap sensitivitas etika. Shaub *et al.* (1993) juga menyatakan bahwa orientasi etis mempengaruhi sensitivitas etika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor yang idealis memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, sehingga sikap idealis harus dipertahankan untuk dapat digunakan membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi dilema etika.

b. Pengaruh Relativisme Terhadap Sensitivitas Etika Auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa relativisme berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk menguji pengaruh relativisme terhadap sensitivitas etika dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel relativisme = $0,000 < \alpha/2 = 0,025$, hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima. Kesimpulannya adalah relativisme berpengaruh secara signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Beberapa penelitian sebelumnya memperkuat hasil penelitian ini. Mahendra (2014), Kurniawan (2013) dan Nurfarida (2011) menunjukkan relativisme berpengaruh pada sensitivitas etika. Januarti (2011) dan Shaub *et al.* (1993) menunjukkan orientasi etika berpengaruh pada persepsi dan pertimbangan etis. Fallah (2006) secara spesifik menemukan bahwa relativisme berpengaruh negatif terhadap sensitivitas etika. Relativisme diartikan sebagai sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang bersifat absolut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah relativisme harus dihilangkan oleh auditor.

c. Pengaruh Pengalaman Terhadap Sensitivitas Etika Auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk menguji pengaruh pengalaman terhadap sensitivitas etika dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel pengalaman = $0,195 > \alpha/2 = 0,025$, hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak. Kesimpulannya adalah pengalaman tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Penelitian sebelumnya memperkuat hasil penelitian ini. Januarti (2011) menemukan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap persepsi dan pertimbangan etis auditor BPK. Januarti (2011) menyatakan bahwa auditor memperoleh pengalaman dari diskusi, pelatihan dan penggunaan standar. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman juga mempunyai peran dalam menghadapi dilema etika. Semakin teliti auditor, maka semakin meningkat sensitivitas etika yang dimiliki auditor untuk mengambil suatu keputusan dalam semua aktivitasnya.

d. Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Sensitivitas Etika Auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk menguji pengaruh komitmen profesional terhadap sensitivitas etika dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel komitmen profesional = $0,018 < \alpha/2 = 0,025$, Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima. Kesimpulannya adalah komitmen profesional berpengaruh secara signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Beberapa penelitian sebelumnya memperkuat hasil penelitian ini. Mahendra (2014) menyatakan komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika. Profesionalisme membantu auditor menciptakan pelayanan audit yang lebih baik bagi klien atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen profesional sangat penting,

karena peningkatan komitmen profesional auditor berakibat pada peningkatan sensitivitas etika auditor dalam mengambil suatu keputusan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Januarti (2011) yang menemukan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis auditor BPK.

e. Pengaruh Komitmen Organisasional Terhadap Sensitivitas Etika Auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hipotesis kelima (H_5) menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasional pada sensitivitas etika dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel komitmen organisasional = $0,000 < \alpha/2 = 0,025$, hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima. Kesimpulannya adalah komitmen organisasional berpengaruh secara signifikan terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Beberapa penelitian sebelumnya memperkuat hasil penelitian ini. Kurniawan (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap sensitivitas etika. Irawati dan Supriyadi (2012) secara spesifik menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh secara signifikan terhadap sensitivitas etika pemeriksa BPK. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa organisasi profesi auditor memiliki peran dalam pembentukan sensitivitas etika.

4.10 Uji F (*F Test*)

Uji F bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Tabel 4.17 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	255.888	5	51.178	44.547	.000 ^b
	Residual	56.294	49	1.149		
	Total	312.182	54			

a. Dependent Variable: Sensitivitas_Etika

b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasional, Pengalaman, Idealisme, Relativisme, Komitmen_Profesional

Sumber: Data diolah SPSS v. 23

Dari uji ANOVA pada tabel di atas menunjukkan pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila uji F menunjukkan hasil yang signifikan, maka seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan model yang digunakan layak uji, sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. Tingkat probabilitas (sig.) F yang diperoleh dari hasil pengujian dengan program SPSS adalah 0,000. Hasil pengujian tingkat probabilitas (sig.) $F = 0,000 \leq \alpha = 0,05$; H_0 diterima. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan mampu memprediksi dan menjelaskan sensitivitas etika auditor KAP di Tangerang dan Tangerang Selatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Idealisme berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel idealisme bernilai positif dan signifikan. Hal ini bermakna bahwa auditor yang memiliki idealisme akan

memiliki tingkat sensitivitas etika yang kuat.

- b. Relativisme berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relativisme bernilai negatif dan signifikan. Hal ini bermakna bahwa auditor yang memiliki relativisme akan memiliki tingkat sensitivitas etika yang lemah.
- c. Pengalaman berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman bernilai negatif dan tidak signifikan. Hal ini bermakna bahwa pengalaman auditor tidak mempengaruhi sensitivitas etika yang dimiliki.
- d. Komitmen profesional berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen profesional bernilai positif dan signifikan. Hal ini bermakna bahwa auditor yang memiliki komitmen profesional akan memiliki tingkat sensitivitas etika yang kuat.
- e. Komitmen organisasional berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

variabel komitmen organisasional bernilai positif dan signifikan. Hal ini bermakna bahwa auditor yang memiliki komitmen organisasional akan memiliki tingkat sensitivitas etika yang kuat.

- f. Idealisme, relativisme, pengalaman, komitmen profesional dan komitmen organisasional secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan sehingga mampu memprediksi dan menjelaskan sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan di atas dapat diambil saran sebagai berikut:
 - a. Objek dalam penelitian ini adalah auditor Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi mengenai sensitivitas etika auditor Kantor Akuntan Publik di wilayah lainnya.
 - b. Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang berbeda seperti auditor pemeriksa BPK, auditor internal perusahaan, dan tidak menutup kemungkinan untuk pihak-pihak lainnya.
 - c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel baru yang berpengaruh terhadap sensitivitas etika, seperti kode etik, prinsip etika, gender, *fee audit* dan usia

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jilid 1. Edisi Keempat, Salemba Empat. Jakarta.
- Anderson, G. dan R. C. Ellyson. 1986. *Restructuring Profesional Standards: The Anderson Report*. *Journal of Accountancy*, September, pp. 92-104.
- Aranya, N., A. Barack and Amernic, J. 1981. *A test of Holland's theory in a population of accountants*. *Journal of Vocational Behavior*, Vol. 19 No. 1, pp. 15-24.
- Asana, Gde Herry Sugiarto. 2013. *Pengaruh Pengalaman, Komitmen Dan Orientasi Etika Pada Sensitivitas Etika Auditor Kantor Akuntan Publik Di Bali*. Universitas Udayana: Tesis.
- Aziza, N. dan Salim A. 2007. *Pengaruh Orientasi Etika Pada Komitmen dan Sensitivitas Etika Auditor (Studi Empiris pada Auditor di Bengkulu dan Sumatera Selatan)*. Simposium Nasional Akuntansi 11. Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- Clarkeburn, H., 2002. *A test for ethical sensitivity in science*. *Journal of Moral education*, 31(4), pp.439-453.
- Falah, Syaikhul. 2006. *Pengaruh budaya etis organisasi dan orientasi etika terhadap sensitivitas etika (studi empiris tentang pemeriksa internal di Bawasda Pemda Papua)*. Universitas Diponegoro: Tesis.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Finn, Don W., Lawrence B., Chonko, dan Shelby D. Hunt. 1988. *Ethical Problems in Public Accounting: The View From the Top*. Journal of Business Ethics, Vol. 7, pp. 605-615.
- Forsyth, D. R. 1981. *Moral Judgment: The Influence of Ethical Ideology*. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 7, pp. 218-223.
- _____. D. R. 1980. *A Taxonomy of Ethical Ideology*. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 39, pp. 175-184.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ke 5. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ke 8. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. 2003. *Analisis Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Judgment Penetapan Risiko Audit oleh Auditor yang Berpengalaman dan Auditor yang Belum Berpengalaman*. Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hunt, S.D. dan Vitell, S.J., 1986. *A General Theory of Marketing Ethics*. Journal of Macromarketing, Spring, pp. 5-16.
- _____. S.D. and Vitell, S.J., 2006. *The general theory of marketing ethics: A revision and three questions*. Journal of Macromarketing, 26(2), pp.143-153.
- Irawati, Anik dan Supriyadi. 2012. *Pengaruh Orientasi Etika Pada Komitmen Profesional, Komitmen Organisasional dan Sensitivitas Etika Auditor dengan Gender sebagai Variabel Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Jagger, S., 2011. *Ethical Sensitivity*. Journal of Business Ethics Education, 8(1), pp.13-30.
- Januarti, Indira. 2011. *Analisis pengaruh pengalaman auditor, komitmen profesional, orientasi etis, dan nilai etika terhadap persepsi dan pertimbangan etis (auditor badan pemeriksa keuangan Indonesia)*. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
- Knoers dan Haditono. 1999. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagian*. Cetakan ke-12, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kurniawan, dani Adi. 2013. *Pengaruh Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika Auditor Dengan Komitmen Profesional Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Auditor KAP di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro: Skripsi.
- Lawrence, J.E., PhD, C.P.A., Shaub, M.K. and PhD, C.P.A., 1997. *The ethical construction of auditors: an examination of the effects of gender and career level*. Managerial Finance. 23(12), pp.52-68.

- Mahendra, Purwatanza. 2014. *Pengaruh Orientasi Etika Dan Komitmen Profesional Terhadap Sensitivitas Etika Auditor (Studi Empiris Pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Naskah Publikasi.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., and Porter, L. W. 1978. *The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavioral*, Vol. 14, pp.224-247.
- _____ R. T., Steers, R. M., and Porter, L. W. 1982. *Employee Organization Linkages, The Psychology of Commitment Abstentism and Turnover*. New York: Academic Press 28-49.
- Nurfarida, Lia. 2011. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Komitmen Organisasi dan Sensitivitas Etika Auditor (Studi pada Aparatur Inspektorat Kabupaten Bogor)*. UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi.
- Shaub, M. K. 1989. *An Empirical Examination of The Determinants of Auditor's Ethical Sensitivity*. Dissertation in Texas Tech University.
- _____ M. K., Don W. Finn dan Paul Munter. 1993. *The Effects of Auditor's Ethical Orientation on Commitment and Ethical Sensitivity. Behavioral Research in Accounting*, Vol. 5, pp. 145-169.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan ke 3. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 21. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Tentang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG**

Sri Elita Pinta Uli^{*}), Roni Budianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

**Email: pintapasaribu@gmail.com*

ABSTRACT

This research is purposed to analyze the factors that makes influence on PPN revenue in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. The data which used for this research is the data that have been organized in KPP Pratama Serang from period 2012 to 2014. The results of this research showed that: SPT Masa PPN partially has a significant effect on the dependent variable PPN(Y); But variables Surat Himbauan (X2), SKPKB (X3) and STP (X4) partially have no influence on the dependent variable PPN (Y).

Key Words: SPT Masa PPN, Surat Himbauan, SKPKB, STP, PPN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Data didapatkan dari data yang telah diolah di KPP Pratama Serang pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Teknis analisis data menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Science). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel independen jumlah SPT Masa PPN (X1) secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen PPN (Y). Sedangkan, variabel independen jumlah Surat Himbauan (X2), jumlah SKPKB (X3) dan jumlah STP (X4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PPN (Y).

Kata Kunci: SPT Masa PPN, Surat Himbauan, SKPKB, STP, PPN

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan sebagai kontribusi terbesar penyumbang dana bagi pembiayaan negara. Sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara berasal dari

penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pendapatan kedua terbesar setelah Pajak Penghasilan memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Untuk mencapai target yang terus meningkat serta mengamankan penerimaan pajak, diperlukan upaya-upaya yang salah satunya dapat ditempuh

dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi penyumbang pendapatan kedua terbesar dalam penerimaan negara. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Pada kenyataannya, belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Pemerintah terus berupaya mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu melalui kegiatan pelayanan, konsultasi, dan pengawasan. Serangkaian pengawasan dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya antara lain penerbitan Surat Himbauan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Tagihan Pajak. Langkah awal pengawasan yang dilakukan terhadap SPT Masa PPN yang dilaporkan PKP adalah penerbitan Surat Himbauan. Hal ini dilakukan dengan dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketika PKP tidak merespon surat himbauan yang diberikan maka *Account Representative* (AR) dapat mengusulkan PKP untuk dilakukan pemeriksaan dalam keperluan pembuktian. Hasil dari kegiatan pemeriksaan ini adalah Surat Ketetapan Pajak yang salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sedangkan Surat Tagihan Pajak (STP) diberikan saat PKP tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh

Undang-Undang. Upaya pengawasan ini dilakukan dengan harapan masyarakat lebih sadar, peduli serta mendukung target penerimaan pajak demi kelangsungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor jumlah SPT masa PPN, jumlah Surat Himbauan, jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak

Menurut Suandy (2011;11)

Ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah;
- b. pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
- c. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah; pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- e. pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; dan
 - f. pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan pasal 23A UUD 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* (mengatur), namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambahkan dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (Ilyas dan Burton, 2010:12).

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011:27), asas-asas pemungutan pajak yaitu :

- a. *Equality*. Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.
- b. *Certainly*. Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi.
- c. *Convenience of Payment*. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak *Economic of Collection*.

Stelsel Pajak

Pada umumnya terdapat tiga sistem stelsel pajak (Pudyatmoko, 2009:77), yaitu:

- a. *Real Stelsel*. Dalam stelsel riil/nyata ini pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek pajak sesungguhnya.
- b. *Fictive Stelsel*. Berbeda dengan stelsel riil/nyata, pengenaan pajak dalam stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan hukum (*fictie*) tertentu.
- c. *Mixing Stelsel*. Dalam stelsel campuran ini utang pajak dikenakan dengan mendasarkan stelsel fictie pada awal masa/tahun pajak yang merupakan ketetapan bersifat sementara, dan kemudian setelah masa/tahun pajak berakhir akan dikoreksi berdasarkan keadaan penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh Negara. Menurut Pudyatmoko (2009:80) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000; 22) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Karakteristik PPN

Menurut Resmi (2012; 2) PPN di Indonesia memiliki karakteristik, antara lain:

- a. *Pajak Tidak Langsung*. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b. *Pajak Objektif*. Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
- c. *Multistage Tax*. PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke pritel).
- d. *Nonkumulatif*. PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.
- e. *Tarif Tunggal*. PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tarif*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.
- f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method*. Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut

atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).

- g. *Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri*. Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
- h. *Consumtion Type Value Added Tax (VAT)*. Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak.

Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009 (Resmi, 2012:1).

Mekanisme PPN

Menurut Valentina dan Suryo (2006), Mekanisme PPN dan PPnBM di Indonesia ada tiga macam yaitu:

- a. *Direct Substraction Method*. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai Subyek Pajaknya;
- b. *Indirect Substraction Method*. Pemungut PPN dan PPnBM yang membayar atas penyerahan Barang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai Subyek Pajaknya; dan
- c. *Self Imposition Method*. Metode memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN dan PPhBM terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Objek PPN

Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Bukan Objek PPN

Pada dasarnya semua barang dikenai PPN, kecuali barang-barang tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat 2 1984 didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Subyek Pajak

Menurut Mardiasmo (2008), disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah:

- a. Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak;

- b. Mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak;
- c. Menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Resmi, 2012:25).

- a. *Harga Jual*. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dari potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. *Penggantian*. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- c. *Nilai Impor*. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.
- d. *Nilai Ekspor*. Nilai ekspor adalah nilai berupa, uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

- e. *Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.* Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Tarif PPN

Tarif PPN menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Berdasarkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan. Tarif PPN paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap menggunakan tarif tunggal. Tarif 0% (nol persen) dikenakan atas :

- a. ekspor BKP berwujud
- b. ekspor BKP tidak berwujud
- c. ekspor jasa kena pajak.

Saat Terutang PPN

Menurut Valentina dan Suryo (2006) terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak,
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.

2.3 SPT Masa PPN

Pengertian SPT Masa PPN menurut PER – 160/PJ/2006 adalah :

- a. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak standar kurang dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan baik dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) maupun dalam bentuk elektronik
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak standar

lebih dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik.

- c. Bagi Pemungut PPN, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang terdiri dari Induk SPT dan Lampiran SPT baik dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) maupun dalam bentuk elektronik.

Fungsi SPT Masa PPN

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam buku Aristanti (2013), SPT Masa PPN mempunyai fungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0).

Jatuh Tempo Pelaporan SPT Masa PPN

Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan kecuali di bawah kondisi tertentu. Maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

2.4 Surat Himbauan Pajak

Berdasarkan PER-170/PJ/2007 pasal 1 ayat 1, Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(16), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen)
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

- e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

2.6 Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang- undang Perpajakan Perambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Hubungan SPT Masa PPN dan Penerimaan PPN

SPT Masa PPN adalah wujud nyata penerapan *self assessment system* yaitu sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Semakin meningkatnya jumlah pelaporan SPT Masa PPN atas perhitungan jumlah PPN terutang oleh Pengusaha Kena Pajak diharapkan akan meningkatkan potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, Ika (2013) yang menyatakan jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Surabaya Gubeng, dan Handayani (2011) juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Namun, Masithoh (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian Ahmad Prayudi (2010) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Jumlah SPT Masa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.7.2 Hubungan Surat Hibauan dan Penerimaan PPN

Himbauan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh fiskus dalam melaksanakan pemberitahuan kepada Wajib Pajak terkait ketentuan pelaksanaan peraturan perpajakan yang belum dipenuhi dalam pelaporan SPT yang PKP berikan. Hibauan merupakan langkah awal upaya pengawasan fiskus kepada Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system*. Maka atas dasar hal tersebut, hibauan yang dilakukan merupakan langkah awal dalam mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dengan melakukan pengawasan pencegahan terhadap kewajiban PKP yang masih harus dipenuhi diharapkan dapat mengamankan potensi penerimaan PPN sehingga target penerimaan pajak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marselinda (2013) bahwa penambahan jumlah PKP, hibauan, dan pemeriksaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Purwokerto meskipun tidak sejalan dengan penelitian Dwi (2014) bahwa hibauan tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi penerimaan pajak sektor *usaha real estat* dalam era *self assessment system* dengan studi kasus pada KPP Perusahaan masuk Bursa. Oleh sebab itu, dibuatlah sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2 : Jumlah Surat Hibauan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.7.3 Hubungan SKPKB dan Penerimaan PPN

Pemeriksaan merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh fiskus sebagai bentuk pengawasan (*tax enforcement*) terhadap Wajib Pajak dalam era *self assessment system*. Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan merupakan bentuk *law enforcement* yaitu

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

memiliki kekuatan hukum, untuk memaksa Wajib Pajak. Di dalam Himbuan yang diberikan kepada Wajib Pajak, ketika PKP tidak memberikan respon atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedy (2014) menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayara (SKPKB) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Ada hal menarik untuk melakukan penelitian kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Fungsi SKPKB itu sendiri adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi, sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak. Peran pemeriksaan pajak dalam mengeluarkan SKPKB sekecil apapun, akan tetap menentukan besarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena ada keharusan bagi Wajib Pajak yang diperiksa untuk memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, dibuatlah sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.7.4 Hubungan STP dan Penerimaan PPN

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR). Pengawasan yang dilakukan oleh AR salah satunya adalah dengan melakukan penelitian terhadap WP, ketika WP yang diteliti tidak menaati peraturan perpajakan maka AR mempunyai kewajiban untuk menerbitkan STP.

Semakin banyak jumlah STP yang diterbitkan oleh AR untuk PKP maka semakin sering penelitian pajak yang dilakukan oleh AR. Semakin sering dilakukannya penelitian pajak oleh AR, semakin meningkat kesadaran & kepatuhan Wajib Pajak serta semakin minim kemungkinan kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Ika (2013) menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Dedy (2014) menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Jumlah Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari arsip KPP Pratama Serang. Adapun arsip data yang dijadikan sampel penelitian adalah data dari Januari 2012 - Desember 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah

sebagai berikut : (1) Pengusaha Kena Pajak terdaftar di KPP Pratama Serang selama periode 2012-2014, (2) dokumen-dokumen resmi berupa jumlah penerimaan Pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT Masa PPN yang dilaporkan, Surat Himbuan yang diterbitkan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan selama periode 2012-2014. Data yang didapat tersebut dapat langsung digunakan oleh penulis untuk melanjutkan hasil penelitian dan menjawab poin-poin yang menjadi pokok permasalahan.

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasi data deret waktu (Awat, 1995:547) menghitung kenaikan jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP setiap bulannya. Perhitungan dimulai dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2014.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Jumlah SPT Masa PPN (X_1)

Indikator Pengukuran Variabel :

Persentase perubahan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan.

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN bulan}_{(t)} - \text{Jumlah SPT Masa PPN bulan}_{(t-1)}}{\text{Jumlah SPT Masa PPN bulan}_{(t-1)}} \times 100 \%$$

2. Jumlah Surat Himbuan (X_2)

Indikator Pengukuran Variabel :
Persentase perubahan jumlah Surat Himbuan yang diterbitkan setiap bulan.

Surat Himbuan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasi data deret waktu (Awat, 1995:547) menghitung kenaikan jumlah SPT Pembetulan yang dikeluarkan oleh fiskus setiap bulannya. Perhitungan dimulai dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2014.

$$\frac{\text{Jumlah Surat Himbuan bulan}_{(t)} - \text{Jumlah Surat Himbuan bulan}_{(t-1)}}{\text{Jumlah Surat Himbuan bulan}_{(t-1)}} \times 100 \%$$

3. Jumlah SKPKB (X_3)

Indikator Pengukuran Variabel :
Persentase perubahan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setiap bulan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeblasian data deret waktu (Awat, 1995:547) menghitung kenaikan jumlah SKPKB yang

dikeluarkan oleh fiskus setiap bulannya. Perhitungan dimulai dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2014.

$$\frac{\text{Jumlah SKPKB bulan } (t) - \text{Jumlah SKPKB bulan } (t-1)}{\text{Jumlah SKPKB bulan } (t-1)} \times 100 \%$$

4. Surat Tagihan Pajak (X₄)

Indikator Pengukuran Variabel :

Persentase perubahan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) setiap bulan.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeblasian data deret waktu (Awat, 1995:547) menghitung kenaikan jumlah STP PPN yang dikeluarkan oleh fiskus setiap bulannya. Perhitungan dimulai dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2014.

$$\frac{\text{Jumlah STP bulan } (t) - \text{Jumlah STP bulan } (t-1)}{\text{Jumlah STP bulan } (t-1)} \times 100 \%$$

5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Indikator Pengukuran Variabel :
Persentase perubahan jumlah penerimaan PPN setiap bulan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks

pendeblasian data deret waktu (Awat, 1995:547) menghitung kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya. Perhitungan dimulai dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2014.

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan } (t) - \text{Jumlah PPN bulan } (t-1)}{\text{Jumlah PPN bulan } (t-1)} \times 100 \%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas.

Hasil grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, nilai signifikansi 1-k *sample kolmogorov-sminor test* adalah 0,987 lebih besar dari 0,05. Artinya, dapat dikatakan bahwa residual model berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance diatas 0,1 (10%). Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tidak ada satupun variabel independent yang signifikan secara statistik. Semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima atau semua variabel independent dapat dinyatakan bebas heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin Watson* sebesar 2,284 yang dimana terletak diantara 4-du dan d-dL yaitu dengan keputusan tidak ada kesimpulan yang pasti. Namun, Hasil *runs test* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,06 > 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

4.2 Uji Hipotesis

Tabel 4.1 Regresi Linier Berganda

$$PPN = \alpha + \beta_1 \text{ SPT Masa PPN} + \beta_2 \text{ Surat Hibauan} + \beta_3 \text{ SKPKB} + \beta_4 \text{ STP} + e$$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	15,935	14,181		1,124	,275					
1 SPT	5,628	1,327	,675	4,240	,000	,656	,697	,673	,993	1,007
SH	,000	,006	-,012	-,073	,942	,057	-,017	-,012	,981	1,019
SKPKB	,006	,035	,032	,179	,859	-,105	,041	,028	,796	1,257
STP	-,023	,013	-,316	-1,762	,094	-,261	-,375	-,280	,781	1,280

a. Dependent Variable: PPN

Tabel 4.2 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75333,369	4	18833,342	5,182	,005 ^b
	Residual	69057,688	19	3634,615		
	Total	144391,056	23			

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), STP, SPT, SH, SKPKB

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,421, hal tersebut berarti bahwa kemampuan variabel independen Jumlah

SPT Masa PPN, Jumlah Surat Hibauan, Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Jumlah Surat Tagihan Pajak dapat menjelaskan variabel dependen

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 42,1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 57,9% dijelaskan oleh variabel dependen lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Uji F menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 5,182 dengan signifikansi sebesar 0,005. Dari Nilai F_{tabel} yang menggunakan derajat kepercayaan 95% atau $\alpha=0,05$ sebesar 2,54, didapatkan bahwa Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dimana hal ini menjelaskan bahwa model regresi sesuai atau dapat dipakai dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS uji-t pada variabel SPT Masa PPN, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,240 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dari nilai t_{tabel} sebesar 1,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,05, didapatkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Jumlah SPT Masa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Serang. Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Semakin meningkatnya jumlah pelaporan SPT Masa PPN atas perhitungan jumlah PPN terutang oleh Pengusaha Kena Pajak mencerminkan peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Masithoh (2011) menyatakan jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan penelitian Ahmad Prayudi (2010) menunjukkan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS uji-t pada variabel Surat Hibauan, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,703 dan nilai signifikansi sebesar sebesar 0,942. Dari nilai t_{tabel} sebesar 1,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,05, didapatkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima atau dapat disimpulkan bahwa Jumlah Surat Hibauan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Serang. Salah satu hal yang menyebabkan ini terjadi adalah jumlah AR yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan kurang begitu efektif dijalankan. Pengawasan dalam hal ini adalah kegiatan tindak-lanjut fiskus atas respon WP terhadap penerbitan Surat Hibauan. Banyak WP teridentifikasi belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tidak memberi respon, tetapi terbatasnya fiskus menyebabkan adanya penyeleksian dan fokus dalam melakukan tindak lanjut. Fokus tindak-lanjut yang dilakukan adalah mendahulukan WP yang berpotensi memberikan penerimaan yang cukup besar (Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, KPP Pratama Serang). Langkah awal pengawasan dengan penerbitan Surat Hibauan diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memberi merespon atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakannya, seperti melakukan pembetulan SPT dan juga saat hanya memberikan respon atas ketidaksetujuan wajib pajak. Ketika langkah awal pengawasan ini efektif dikerjakan kepada semua WP yang terindikasi kurang patuh maka diharapkan potensi penerimaan PPN dapat optimal. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi (2014) menunjukkan bahwa himbauan tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi penerimaan pajak sektor *usaha real estat* dalam era *self assessment system* dengan studi kasus pada KPP Perusahaan masuk Bursa.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS uji-t pada variabel SKPKB, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,179 dan nilai signifikansi sebesar 0,859. Dari nilai t_{tabel} sebesar 1,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,05, didapatkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima atau dapat disimpulkan bahwa Jumlah SKPKB tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Serang. SKPKB merupakan salah satu hasil produk pemeriksaan dan kadang atas usul kegiatan tindak-lanjut dari penerbitan Surat Himbauan. Oleh karena itu, faktor penyebab SKPKB tidak berpengaruh pada KPP Pratama Serang dapat disebabkan antara lain : (1) terbatasnya jumlah Pemeriksa di KPP Pratama Serang yang hanya terdapat 13 orang Pemeriksa. (2) Keterkaitan dengan minimnya AR di KPP Pratama Serang dalam melakukan pengawasan (melakukan penyeleksian dan fokus terhadap potensi WP besar) berdampak pada sedikitnya pengajuan usul untuk dilakukan pemeriksaan kepada WP kurang patuh. Keterkaitan dari kedua hal di atas menyebabkan hasil dari produk pemeriksaan yaitu SKPKB menjadi sedikit. Hal inilah yang menyebabkan SKPKB kurang memiliki pengaruh pada penerimaan PPN di KPP Pratama Serang (Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, KPP Pratama Serang). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy (2014) menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS uji-t pada variabel STP, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1,762 dan nilai signifikansi sebesar 0,094. Dari nilai t_{tabel} sebesar 1,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,05, didapatkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Maka H_0 diterima atau dapat disimpulkan bahwa Jumlah STP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Serang. Penerbitan Surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak (Vegirawati, 2011) dan diterbitkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR).

Account Representative (AR) adalah petugas yang diangkat pada KPP yang telah mengimplementasikan organisasi modern yang memberikan pengawasan dan pelayanan serta membantu permasalahan perpajakan yang diajukan wajib pajak dengan sesegera mungkin secara efektif dan efisien (Hapsari, 2012). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015, Salah satu fungsi *Account Representative* (AR) adalah melakukan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak adalah dengan melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh AR salah satunya adalah dengan melakukan penelitian terhadap WP, ketika WP yang diteliti tidak menaati peraturan perpajakan maka AR mempunyai kewajiban untuk menerbitkan STP. Semakin banyak jumlah STP yang diterbitkan oleh AR untuk PKP maka semakin sering penelitian pajak yang dilakukan oleh AR. Semakin sering dilakukannya penelitian pajak oleh AR, semakin meningkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta semakin minim kemungkinan kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini, AR yang terdaftar pada KPP Pratama Serang hanya terdapat 24 orang. Dengan terbatasnya AR yang ada mempengaruhi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

pengawasan kecurangan yang dapat dilakukan oleh PKP di KPP Pratama Serang, dimana ruang lingkup pekerjaan seorang AR sangatlah luas. Hal ini juga mempengaruhi keoptimalan pengawasan yang dilakukan fiskus sehingga banyak potensi yang belum dapat diawasi dan digali secara maksimal (Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, KPP Pratama Serang). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah Surat Tagihan Pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, Ika (2013) menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Dedy (2014) menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan bab sebelumnya tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Serang, simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Jumlah SPT Masa PPN memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan (2) Jumlah Surat Hibauan, SKPKB, dan STP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran bagi peneliti selanjutnya maupun KPP Pratama Serang sebagai berikut:

1. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengujian terhadap model penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel-variabel lain yang mungkin

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya penambahan PKP. Diharapkan model penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik dari penelitian ini

2. Memperbanyak sampel dan tahun penelitian.
3. Disarankan kepada KPP Pratama Serang untuk menambahkan jumlah Petugas Pajak sehingga kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak lebih optimal guna meningkatkan Penerimaan Pajak.
4. Disarankan kepada KPP Pratama Serang untuk terus meningkatkan kegiatan pengawasan beserta penerapan sanksi yang tegas, sehingga dari diterbitkannya Surat Hibauan, SKPKB dan STP diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Prayudi. (2010). Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Mandiri*.
- Arif Nurrokhman. (2013). *Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Studi Empiris Di Kpp Pratama Semarang Gayamsari*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro.
- Dedy Setya Utama Pandiangan. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak*

- Pertambahan Nilai (PPN)*. Skripsi.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwi, Endang, dan Nila. (2013). Pengaruh Himbauan, Konseling Dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat Dalam Era Self Assessment System (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani. (2011). *Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu*. Skripsi.
- Herryanto dan Agus Arianto Toly. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*. Universitas Kristen Petra.
- Ida Ayu dan I Ketut. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI.
- Masithoh. (2011). *Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang Dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candi*. Skripsi.
- Nursanti, Ika. (2013). Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.03/2007 tentang tata carapelaporan SPT Masa bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan masa pajak dalam suatu Surat Pemberitahuan Masa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang cara Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/2007 tentang tata cara pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 181 /PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Prayogo, Kukuh Widya. (2009). *Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Pudyatmoko, Y.Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan – Teori dan Kasus*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjidi, Erly. (2013). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran. 2011. *Metodelogi Penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri, Ventje, Harijanto. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 7. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardji, Untung, (2005). *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa
- Vegirawati. (2011). *Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang*. Skripsi.
- Waluyo. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung : Alfabeta.

ANALISIS KEBANGKRUTAN DENGAN MODEL ALTMAN Z-SCORE PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA DI BEI PERIODE 2013-2014

Suci Kurniawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Rawamangun, Jakarta Timur
Email: suci_kurniawati@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the company's financial distress on basis industry and chemical sectors as many as 57 companies using the ALTMAN Z-Score model in 2013-2014. The data which used was secondary data, such as Financial Statements of manufacturing company publication issued by Indonesian Stock Exchange (BEI) and obtained by downloading the website: www.idx.com. This study uses descriptive quantitative method. The finding of Z-Score index in basis industry and chemical sector in 2013 is occupied by PT. Intan Wijaya Internasional Tbk on chemical subsector and 2014 is occupied by PT. Alakasa Industrindo Tbk on metal subsector and others, with the first highest rank and healthy condition, whereas the last and lowest rank on wood and processing sector in 2013-2014 is PT. SLJ Global Tbk, with having financial distress condition. The findings of this study are not consistent or even in accordance with the reality which shows that the Altman method can not be used as a tool to indicate a tendency towards company's financial distress.

Key Words: Financial Distress, Z-Score, Basis Industry and Chemical Sector

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebangkrutan perusahaan sektor industri dasar dan kimia sebanyak 57 perusahaan dengan menggunakan Model Altman Z-Score pada tahun 2013 dan 2014. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yakni berupa data Laporan Keuangan Publikasi Perusahaan yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia dan diperoleh dari media internet dengan mendownload melalui website: www.idx.com. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil index Z-Score pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2013 adalah diduduki oleh PT. Intan Wijaya Internasional Tbk pada subsector kimia dan pada tahun 2014 adalah diduduki oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk pada subsector logam dan sejenisnya dengan peringkat pertama tertinggi dengan kondisi sehat, sedangkan yang menduduki peringkat paling terakhir dan terendah di perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah PT. SLJ Global Tbk pada subsector kayu & pengolahannya dengan kondisi bangkrut. Serta hasil penelitian ini tidak konsisten/ sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang menunjukkan bahwa metode Altman tidak dapat dijadikan alat untuk mengindikasikan kecenderungan terhadap kebangkrutan.

Kata Kunci: Kebangkrutan, Z-Score, Sektor Industri Dasar dan Kimia

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Kebangkrutan perusahaan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam dunia usaha baik dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Misalnya terjadi kenaikan biaya bahan baku, biaya upah, biaya listrik atau biaya lainnya tanpa diimbangi dengan kemampuan perusahaan, adanya produk pesaing yang lebih unggul sehingga mempengaruhi penjualan dan ketidakmampuan manajer dalam melakukan manajemen perusahaan. Kejadian tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja perusahaan dan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebangkrutan maka perusahaan harus mempunyai persiapan dini untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Perusahaan diharapkan dapat menilai kondisi perusahaan yang sedang berjalan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perusahaan sekarang ini, sehingga dapat mengetahui tindakan apa yang tepat untuk mempertahankan dan memperbaiki kekurangan perusahaan agar dapat bertahan dan bersaing.

Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk menilai kondisi perusahaan adalah laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode. Agar perusahaan dapat mengetahui lebih jelas kondisi perusahaan sekarang ini, maka perusahaan dapat membandingkan laporan keuangan yang sekarang dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Rasio keuangan merupakan alat untuk menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk menginterpretasikan baik atau buruknya kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diperoleh dari *balance sheet* dan *income statement*. Rasio-rasio yang digunakan umumnya

meliputi *Liquidity Ratio*, *Profitability Ratio*, *Efficiency Ratio*, *Coverage Ratio*.

Seiring dengan dinamika bisnis, rasio-rasio keuangan bukan hanya untuk menginterpretasikan baik atau buruknya kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tetapi dapat digunakan dalam menganalisis dan mengindikasikan kecenderungan kebangkrutan perusahaan.

Salah satu model kebangkrutan yang terbukti memberikan banyak manfaat adalah model Z-Score. Model ini dikembangkan oleh Edward I Altman seorang ekonom keuangan. Model ini merupakan pengembangan dari teknik statistik *multiple discriminant* yang menggabungkan efek beberapa variabel. Model Altman ini merupakan suatu model analisis keuangan yang telah banyak digunakan di Amerika Serikat.

Pada tahun 2014 ekonomi global dan kebijakan moneter Indonesia mengalami laju yang lambat karena perkembangan industri manufaktur Indonesia mengalami dilema dalam suku bunga yang tinggi 7,5% dan kenaikan tarif dasar listrik industri per 1 mei 2014. Suku bunga dan tarif listrik yang naik menjadi beban industri manufaktur karena suku bunga akan menekan konsumsi masyarakat sehingga pembelian kendaraan bermotor yang menjadi dasar industri logam akan menurun, sedangkan kenaikan listrik dapat menambah biaya produksi. Pertumbuhan industri manufaktur tahun 2014 berada dikisaran 5% dan pada tahun 2013 tumbuh 5,64% yang ditopang oleh industri logam setelah industri kendaraan bermotor dan industri makanan. (www.kemenperin.go.id)

Pemerintah terus melakukan upaya strategis dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri dalam negeri. Salah satu sektor yang dijadikan acuan pertumbuhan industri adalah kimia dan logam. Rantai nilai industri kimia terkait erat dengan sektor

ekonomi produktif yaitu pangan, sandang, dan papan, serta penyediaan bahan baku berbagai industri hilir antara lain industri cat dan *coating*, elektronik, serta otomotif. Pada sektor industri logam pemerintah terus memperkuat program hilirisasi industri berbasis mineral tambang yang mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah, perkuatan struktur industri, penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri. Industri logam dan bahan dari logam berperan pada pengembangan industri hilir terutama industri otomotif, dirgantara, permesinan dan elektronika serta infrastruktur.

Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam rangka mengembangkan industri nasional. Saat ini, nilai impor produk industri kimia dan logam masih tinggi sehingga produk domestik relatif kurang berdaya saing dalam lingkup regional ASEAN maupun Asia. Selain itu, banyak pabrik yang berusia relatif tua dengan teknologi proses yang kurang *up-to-date*, sehingga membutuhkan dukungan revitalisasi. Disadari juga bahwa investasi pembangunan pabrik kimia dan logam membutuhkan dana sangat besar dan membutuhkan dukungan kebijakan serta insentif dan iklim usaha yang kondusif. (www.kemenperin.go.id)

Sektor industri dasar dan kimia adalah salah satu sektor yang termasuk dalam cabang industri manufaktur (industri non-migas) yang menghasilkan bahan-bahan dasar yang selanjutnya akan diproses menjadi barang jadi. Perusahaan non-migas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sektor industri dasar dan kimia terdapat delapan sub sektor yaitu sub sektor semen, sub sektor keramik dan porselen, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik dan kemasan, sub sektor

pakan ternak, kayu dan pengolahannya, serta sub sektor pulp dan kertas.

Analisis kebangkrutan ini sangatlah penting karena dapat menilai indikasi kebangkrutan perusahaan, apakah suatu perusahaan terancam bangkrut atau tidak, dimana bila terjadi kebangkrutan perusahaan dapat merugikan banyak pihak seperti manajer, investor, kreditor, bahkan karyawan tersebut.

Berdasarkan hal yang telah disampaikan di atas kemudian peneliti merasa sangat penting untuk dapat melakukan penelitian tentang bagaimanakah indikasi kebangkrutan dengan Model Altman Z-Score pada sektor industri dasar dan kimia periode 2013-2014 dan apakah Model Altman Z-Score dapat digunakan sebagai alat dalam memprediksi kecenderungan kebangkrutan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kebangkrutan yang menggunakan Model Altman Z-Score pada industri sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2014.

Adapun tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui indikasi kebangkrutan pada sektor industri industri dasar dan kimia periode 2013-2014 dengan Model Altman Z-Score; (2) Untuk mengetahui apakah Model Altman Z-Score dapat digunakan sebagai alat dalam memprediksi kecenderungan kebangkrutan perusahaan.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang metode Altman Z-Score dilakukan oleh Nuralya Usman dari skripsi Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2015 dengan judul Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

tahun 2013 sebanyak 54.5 % perusahaan diprediksi sehat, 9.1 % diprediksi di *gray area* dan 36.4 % diprediksi bangkrut. PT Malindo Feedmill Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, dan PT Delta Djakarta Tbk adalah lima perusahaan yang selama periode pengamatan diprediksi sehat.

Penelitian selanjutnya dari jurnal akuntansi FE Untar yang dilakukan oleh Pasaman Silaban dari Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 2014 dengan judul Analisis Kebangkrutan dengan Menggunakan Model Altman Z-Score: Studi Kasus di Perusahaan Telekomunikasi. Analisis menunjukkan bahwa pada 2010-2012 kondisi kesehatan perusahaan tidak baik. Pada tahun 2010 perusahaan berada di zona abu-abu, maka tahun depan kondisi perusahaan menurun, dan pada tahun 2012 itu pada kondisi tidak sehat/bangkrut. Telkom dalam keadaan sehat dan meningkat setiap tahun, Indosat berada di zona yang tidak sehat dengan Z-Score cenderung meningkat setiap tahun.

Penelitian selanjutnya dari jurnal akuntansi FE Untar yang dilakukan oleh Ketut Asmara Jaya dari STIE Sailendra Jakarta pada tahun 2014 dengan judul Laporan Keuangan Merupakan Alat Dalam Memprediksi Kecendrungan Terjadinya Kebangkrutan Perusahaan Dengan Menggunakan Model Altman: Study Analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa Model Altman dapat digunakan sebagai alat dalam memprediksi kecendrungan kebangkrutan perusahaan.

2.2. Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). (Harahap, 2006; 297).

Rasio keuangan adalah perhitungan yang dilakukan untuk

menstandarisasikan, menganalisis dan membandingkan data keuangan yang dinyatakan hubungan. (Fraser & Armiston, 2008; 346).

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa rasio keuangan adalah angka-angka yang dihasilkan dari perbandingan pos-pos tertentu dengan pos lain yang ada dalam laporan keuangan dan juga merupakan hubungan matematis antara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya.

2.3. Analisis Altman

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mendapatkan model analisis yang merupakan gabungan beberapa rasio keuangan. Diantarnya penelitian yang dilakukan oleh Edward I Altman tahun 1966 untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Dalam studinya, Altman mengambil sampel 66 perusahaan dimana setengah dari sampel merupakan perusahaan yang telah bangkrut. Berdasarkan model *Multiple Discriminant Analysis*, koefisien dari kelima rasio keuangan kemudian ditentukan. Penjumlahan dan perkalian antara koefisien dengan rasio keuangan menghasilkan nilai *multivariate*. Oleh Altman, nilai *multivariate* ini dinamakan Z-Score.

Model Z-Score Altman dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 \text{ (Altman, 1968)}$$

Dimana:

X1= *Working Capital / Total Assets*

X2= *Retained Earnings / Total Assets*

X3= *EBIT / Total Assets*

X4= *Market Value Equity / Book Value of Total Liabilities*

X5= *Sales / Total Assets*

Dengan :

Z-Score	Indikasi
< 1,81	Bangkrut

1,81 – 2,99 *Grey Area / zone of ignorace*
 > 2,99 Tidak Bangkrut

Model Z-Score tersebut tidak didesain untuk digunakan dalam setiap situasi. Terdapat 2 jenis model Z-Score lain, yang diperuntukkan bagi prediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur tertutup atau *non public* dan perusahaan non manufaktur.

Rasio yang digunakan pada model Z-Score memiliki beberapa keterbatasan yakni:

- Rasio untuk *Market Value* dibagi dengan *Total Liabilities* (Variabel X4). Jika perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang telah *go public*, maka tidak ada *Market Value of Equity*.
- Rasio untuk *Asset Turnover* (X3), yang diperoleh dengan membagi *sales* dengan *total assets* pada akhir tahun. Rasio ini secara signifikan dapat sangat berbeda berdasarkan jenis industrinya.

Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, Altman melakukan modifikasi terhadap model Z-Score. Modifikasi pertama dikembangkan Altman untuk memperluas penggunaan bagi perusahaan *non-public* atau perusahaan *privat*. Dalam model baru ini, variabel dihitung dengan menggunakan nilai buku ekuitas dibagi dengan nilai buku hutang. Oleh Altman modifikasi pertama ini dinamakan *Z-Score the private firm version* atau *The Z' (Z Prime) version*. Model baru ini dapat diuraikan dalam rumus berikut:

$$Z' = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 \text{ (Altman, 1984)}$$

Dimana:

X1= *Working Capital / Total Assets*
 X2= *Retained Earnings / Total Assets*
 X3= *EBIT / Total Assets*

X4= *Net Worth / Total Liabilities*
 X5= *Sales / Total Assets*

Dengan :

Z-Score	Indikasi
< 1,23	Bangkrut
1,23 – 2,90	<i>Grey Area / zone of ignorace</i>
> 2,90	Tidak Bangkrut

Modifikasi kedua dilakukan untuk memperluas penggunaan model bagi perusahaan non manufaktur. Dalam model ini, variabel (Rasio perputaran asset) dihilangkan karena salah satu unsurnya, yaitu tingkat penjualan, diyakini sangat dipengaruhi oleh jenis industri perusahaan. Modifikasi terhadap Model Altman yang terakhir ini dinamakan *The Four Variable Model* atau *Z'' (Z double prime)*. Model baru ini dapat diuraikan dalam rumusnya sebagai berikut:

$$Z'' = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4$$

Dimana:

X1= *Working Capital / Total Assets*
 X2= *Retained Earnings / Total Assets*
 X3= *EBIT / Total Assets*
 X4= *Net Worth / Total Liabilities*

Dengan :

Z-Score	Indikasi
< 1,10	Bangkrut
1,10 – 2,60	<i>Grey Area / zone of ignorace</i>
> 2,60	Tidak Bangkrut

Hal yang menarik mengenai Z-Score adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhitungkan ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan dalam kondisi sangat makmur, bila Z-Score mulai menurun secara tajam, lonceng peringatan harus berdering. Atau, jika perusahaan baru saja *survive*, Z-Score dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terletak di Jln. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

3.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu Variabel Terikat (*Dependent Variable*) dan Variabel Bebas (*Independent Variable*), yaitu dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah status kebangkrutan perusahaan dan variabel Bebas (*Independent Variable*) variabel-variabel rasionya adalah sebagai berikut:

Variabel	Konsep variabel	Skala
X1	Likuiditas	Rasio
X2	Profitabilitas dalam periode tertentu	Rasio
X3	Profitabilitas	Rasio
X4	Struktur keuangan	Rasio
X5	Perputaran modal	Rasio

3.3. Model Penelitian

Perhitungan Z-Score dimulai dengan menghitung variabel-variabel yang dipergunakan dan kemudian memasukan nilai variabel tersebut kedalam Z-Score sehingga mendapatkan nilai Z. Variabel tersebut terdiri dari:

1. X1 = Liquidity Ratio,
2. X2 = Age of Firm and Cumulative profitabilitas Rasio,
3. X3 = Profitability Ratio,
4. X4 = Financial Structure Ratio,
5. X5 = Capital Turnover Ratio.

Z-Score dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5$$

Dimana:

$$X1 = (\text{Current Asset} - \text{Current Liabilities}) / \text{Total Asset}$$

$$X2 = \text{Retained Earning} / \text{Total Asset}$$

$$X3 = \text{EBIT} / \text{Total Asset}$$

$$X4 = \text{Market Value Equity} / \text{book value of Total Debt}$$

$$X5 = \text{Sales} / \text{Total Asset}$$

Dengan:

Z-Score	Indikasi
< 1,81	Bangkrut
1,81 – 2,99	Grey Area / zone of ignorance
> 2,99	Tidak Bangkrut

3.4. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Sumber datanya berupa data sekunder, dimana data sekunder ini berupa data Laporan Keuangan Publikasi Perusahaan industri dasar dan kimia yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia dan diperoleh dari media internet dengan mendownload melalui website: www.idx.com.

Untuk melengkapi kajian pustaka yang relevan dalam penelitian ini dikumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber bacaan yakni diperoleh dari skripsi, jurnal-jurnal, artikel, Koran, buku, dan lain-lain. Peneliti mengumpulkan, mempelajari dan mencatat data-data yang diperlukan dan diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dari perpustakaan STEI maupun perpustakaan lain.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Serta observasi dalam mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan kenyataan yang sesungguhnya dari objek yang diperoleh. Dengan melalui pengamatan dengan penelitian lapangan (*field research*) ini peneliti ingin mengetahui uji konsistensi, sehingga peneliti dapat data yang akurat dan relevan.

3.5. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2014.

3.6. Sampel dan Pengambilan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih secara cermat sehingga relevan

dengan rancangan penelitian dan diharapkan dapat mewakili masing-masing karakteristik populasi, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan termasuk dalam industri dasar dan kimia yang ada di Indonesia.
- 2) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap tersedia selama periode 2013-2014.
- 3) Perusahaan tersebut tidak dalam keadaan merger maupun likuidasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini *adalah* 57 perusahaan industri dasar dan kimia. Berikut sampel yang digunakan yaitu:

Tabel 3.1 Nama Sampel yang Digunakan

No	Kode	Sektor	Nama
1	INTP	Subsektor Semen	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
2	SMBR		PT. Seman Baturaja Tbk
3	SMCB		PT. Holcim Indonesia Tbk
4	SMGR		PT. Semen Indonesia Tbk
5	AMFG	Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	PT. Asahimas Flat Glass Tbk
6	ARNA		PT. Arwana Citramulia Tbk
7	IKAI		PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk
8	KIAS		PT. Keramik Indonesia Assosiasi Tbk
9	MLIA		PT. Mulia Industrindo Tbk
10	TOTO		PT. Surya Toto Indonesia Tbk
11	ALKA	Subsektor Logam dan Sejenisnya	PT. Alakasa Industrindo Tbk
12	ALMI		PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk
13	BAJA		PT. Sarana Central Bajatama Tbk
14	BTON		PT. Beton Jaya Manunggal Tbk
15	CTBN		PT. Citra Tubindo Tbk
16	GDST		PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

17	INAI		PT. Indal Aluminium Industry Tbk	
18	JKSW		PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	
19	JPRS		PT. Jaya Pari Steel Tbk	
20	KRAS		PT. Krakatau Steel Tbk	
21	LION		PT. Lion Metal Works Tbk	
22	LMSH		PT. Lionmesh Prima Tbk	
23	NIKL		PT. Pelat Timah Nusantara Tbk	
24	PICO		PT. Pelangi Indah Canindo Tbk	
25	TBMS		PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk	
26	BRPT	Subsektor Kimia	PT. Barito Pacific Tbk	
27	BUDI		PT. Budi Starch & Sweetener Tbk	
28	DPNS		PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk	
29	EKAD		PT. Ekadharma International Tbk	
30	INCI		PT. Intan Wijaya Internasional Tbk	
31	SRSN		PT. Indo Acidatama Tbk	
32	TPIA		PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk	
33	UNIC		PT. Unggul Indah Cahaya Tbk	
34	AKKU		Subsektor Plastik dan Kemasan	PT. Alam Karya Unggul Tbk
35	APLI			PT. Asiaplast Industries Tbk
36	BRNA	PT. Berlina Tbk		
37	FPNI	PT. Lotte Chemical Titan Tbk		
38	IGAR	PT. Champion Pacific Indonesia Tbk		
39	IMPC	PT. Impack Pratama Industri Tbk		
40	IPOL	PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk		
41	SIAP	PT. Sekawan Intipratama Tbk		
42	SIMA	PT. Siwani Makmur Tbk		
43	TRST	PT. Trias Sentosa Tbk		

44	YPAS		PT. Yanaprima Hastapersada Tbk
45	CPIN		PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
46	JPFA	Subsektor Pakan Ternak	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
47	MAIN		PT. Malindo Feedmill Tbk
48	SULI		Subsektor Kayu dan Pengolahannya
49	TIRT	PT. Tirta Mahakam Resources Tbk	
50	ALDO	Subsektor Pulp dan Kertas	PT. Alkindo Naratama Tbk
51	DAJK		PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk
52	FASW		PT. Fajar Surya Wisesa Tbk
53	INKP		PT. Indah Pulp & Paper Tbk
54	INRU		PT. Toba Pulp Lestari Tbk
55	KBRI		PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
56	SPMA		PT. Suparma Tbk
57	TKIM		PT. Pabrik Kertas Twiji Kimia Tbk

Sumber: www.sahamok.com (2015)

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan Metode Altman Z-Score dan uji tingkat kesesuaian dengan kenyataan sebenarnya.

3.8. Metode Altman Z-Score

Tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk menentukan kondisi keuangan dengan metode Altman Z-Score yaitu:

1. Menghitung rasio keuangan

Variabel tersebut terdiri dari:

1. X1 = Liquidity Ratio,
2. X2 = Age of Firm and Cumulative profitabilitas Rasio,
3. X3 = Profitability Ratio,
4. X4 = Financial Structure Ratio,
5. X5 = Capital Turnover Ratio.

Dimana:

$$X1 = (Current Asset - Current Liabilities) / Total Asset$$

$$X2 = Retained Earning / Total Asset$$

$$X3 = EBIT / Total Asset$$

$$X4 = Market Value Equity / book value of Total Debt$$

$$X5 = Sales / Total Asset$$

2. Melakukan perhitungan dengan analisis diskriminan yang ditemukan Altman melalui rumus. Z-Score dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Z-Score = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5$$

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Melakukan interpretasi dari hasil perhitungan Z-Score yang telah diolah. Hal ini tentunya dengan batas ketentuan yang telah ditentukan, yaitu:

Z-Score	Indikasi
< 1,81	Bangkrut
1,81 – 2,99	Grey Area / zone of ignorance
> 2,99	Tidak Bangkrut

- Membuat indeks peringkat/ ranking sesuai nilai Z-Score.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis historis untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kenyataan sebenarnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Model Altman Z-Score

3.9. Model Analisis Historis

Tabel 4.1 Hasil Index Peringkat Indikasi Sehat Tahun 2013

SEKTOR	Kode	Z-Score	Peringkat
Subsektor Kimia	INCI	5,2488	1
Subsektor Logam & Sejenisnya	ALKA	4,7677	2
Subsektor Logam & Sejenisnya	JPRS	4,0087	3
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	KIAS	3,8184	4
Subsektor Kimia	DPNS	3,5497	5
Subsektor Logam & Sejenisnya	TBMS	3,4831	6
Subsektor Plastik & Kemasan	IGAR	3,4237	7
Subsektor Logam & Sejenisnya	LMSH	3,3953	8
Subsektor Pakan Ternak	CPIN	3,1718	9

Sumber: olah data

Pada tabel 4.1 tersebut dengan kode INCI yakni PT. Intan Wijaya Internasional Tbk pada subsektor kimia memiliki nilai Z-Score 5,2488 dengan indikasi diatas 2,99 yang terletak di posisi yang sehat dan menduduki peringkat/ ranking pertama tertinggi pada perusahaan manufaktur tahun 2013, sedangkan dengan kode CPIN yakni PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada

subsektor pakan ternak memiliki nilai Z-Score 3,1718 dengan indikasi diatas 2,99 yang terletak di posisi yang sehat dan menduduki peringkat/ ranking ke 9 pada tahun 2013.

Tabel 4.2 Hasil Index Peringkat Indikasi Sehat Tahun 2014

SEKTOR	Kode	Z-Score	Peringkat
Subsektor Kimia	ALKA	5,3204	1
Subsektor Logam & Sejenisnya	INCI	5,1253	2
Subsektor Logam & Sejenisnya	SIAP	5,0890	3
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	KIAS	4,2866	4
Subsektor Kimia	IGAR	3,7644	5
Subsektor Logam & Sejenisnya	JPRS	3,7240	6
Subsektor Plastik & Kemasan	SMBR	3,5237	7
Subsektor Logam & Sejenisnya	TBMS	3,3968	8
Subsektor Pakan Ternak	LMSH	3,2977	9

Sumber: olah data

Pada tabel 4.2 tersebut dengan kode ALKA yakni PT. Alakasa Industrindo Tbk pada subsektor logam dan sejenisnya memiliki nilai Z-Score 5,3204 dengan indikasi diatas 2,99 yang terletak di posisi yang sehat dan menduduki peringkat/ ranking pertama

tertinggi pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2014, sedangkan dengan kode LMSH yakni PT. Lionmesh Prima Tbk pada subsektor logam dan sejenisnya memiliki nilai Z-Score 3,2977 dengan indikasi diatas 2,99 yang terletak di posisi yang sehat dan menduduki peringkat/ ranking ke 9 pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2014.

Tabel 4.3 Hasil Index Peringkat Indikasi Grey Area Tahun 2013

SEKTOR	Kode	Z-Score	Peringkat
Subsektor Logam & Sejenisnya	GDST	2,9706	1
Subsektor Pulp & Kertas	KBRI	2,9001	2
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	ARNA	2,7721	3
Subsektor Pakan Ternak	MAIN	2,6945	4
Subsektor Kimia	SRSN	2,6764	5
Subsektor Semen	INTP	2,6431	6

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Subsektor Logam & Sejenisnya	LION	2,6035	7
Subsektor Kimia	UNIC	2,5723	8
Subsektor Kimia	EKAD	2,4611	9
Subsektor Logam & Sejenisnya	BTON	2,3757	10
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	TOTO	2,2959	11
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	AMFG	2,2934	12
Subsektor Logam & Sejenisnya	CTBN	2,1495	13
Subsektor Semen	SMGR	2,1367	14
Subsektor Pakan Ternak	JPFA	2,0351	15
Subsektor Pulp & Kertas	ALDO	1,9958	16
Subsektor Plastik & Kemasan	FPNI	1,9585	17
Subsektor Plastik & Kemasan	APLI	1,9283	18

Sumber: olah data

Pada tabel 4.3 tersebut dengan kode GDST yakni PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk pada subsektor logam & sejenisnya memiliki nilai Z-Score 2,9706 dengan indikasi 1,81 - 2,99 yang terletak di posisi grey area dan menduduki peringkat/ rangking pertama tertinggi pada perusahaan manufaktur

tahun 2013, sedangkan PT. Asiaplast Industries Tbk dengan kode APLI pada subsektor plastik & kemasan memiliki nilai Z-Score 1,9283 dengan indikasi 1,81 - 2,99 yang terletak di posisi yang dan menduduki peringkat/ rangking ke 18 pada tahun 2013.

Tabel 4.4 Hasil Index Peringkat Indikasi Grey Area Tahun 2014

SEKTOR	Kode	Z-Score	Peringkat
Subsektor Plastik & Kemasan	APLI	2,8984	1
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	ARNA	2,8981	2
Subsektor Kimia	UNIC	2,6239	3
Subsektor Kimia	DPNS	2,5935	4
Subsektor Kimia	EKAD	2,5865	5
Subsektor Plastik & Kemasan	FPNI	2,5765	6

Subsektor Semen	INTP	2,5326	7
Subsektor Kimia	SRSN	2,4899	8
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	AMFG	2,4800	9
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	TOTO	2,3149	10
Subsektor Pakan Ternak	CPIN	2,2734	11
Subsektor Semen	SMBR	2,1203	12
Subsektor Logam & Sejenisnya	LION	2,0637	13
Subsektor Logam & Sejenisnya	BTON	2,0263	14
Subsektor Pakan Ternak	JPFA	2,0118	15
Subsektor Plastik & Kemasan	IMPC	2,0068	16
Subsektor Pulp & Kertas	ALDO	1,9571	17
Subsektor Logam & Sejenisnya	CTBN	1,8696	18

Sumber: olah data

Pada tabel 4.4 tersebut dengan kode APLI yakni PT. Asiaplast Industries Tbk pada subsektor plastik & kemasan memiliki nilai Z-Score 2,8984 dengan indikasi 1,81 - 2,99 yang terletak di posisi grey area dan menduduki peringkat/ rangking pertama tertinggi

pada perusahaan industry dasar dan kimia tahun 2014, sedangkan PT. Citra Tubindo Tbk dengan kode CTBN pada subsektor logam & sejenisnya memiliki nilai Z-Score 1, 8696 dengan indikasi 1,81 - 2,99 yang terletak di posisi yang dan menduduki peringkat/ rangking ke 18 pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2014.

Tabel 4.5 Hasil Index Peringkat Indikasi Bangkrut Tahun 2013

SEKTOR	Kode	Z-Score	Peringkat
Subsektor Plastik & Kemasan	IMPC	1,7567	1
Subsektor Kimia	TPIA	1,7238	2
Subsektor Semen	SMBR	1,7212	3
Subsektor Logam & Sejenisnya	NIKL	1,6478	4
Subsektor Logam & Sejenisnya	PICO	1,5742	5

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Subsektor Kimia	BUDI	1,3716	6
Subsektor Kimia	BRPT	1,3637	7
Subsektor Plastik & Kemasan	IPOL	1,3297	8
Subsektor Semen	SMCB	1,2687	9
Subsektor Logam & Sejenisnya	ALMI	1,2640	10
Subsektor Pulp & Kertas	DAJK	1,2414	11
Subsektor Logam & Sejenisnya	KRAS	1,1535	12
Subsektor Pulp & Kertas	SPMA	1,0937	13
Subsektor Plastik & Kemasan	TRST	1,0856	14
Subsektor Logam & Sejenisnya	INAI	1,0510	15
Subsektor Plastik & Kemasan	SIAP	1,0263	16
Subsektor Plastik & Kemasan	YPAS	0,9937	17
Subsektor Pulp & Kertas	FASW	0,9312	18
Subsektor Plastik & Kemasan	BRNA	0,9301	19
Subsektor Pulp & Kertas	TKIM	0,8661	20
Subsektor Logam & Sejenisnya	BAJA	0,8201	21
Subsektor Pulp & Kertas	INKP	0,7616	22
Subsektor Logam & Sejenisnya	JKSW	0,5916	23
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	IKAI	0,5324	24
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	MLIA	0,1453	25
Subsektor Kayu & Pengolahannya	TIRT	0,0761	26
Subsektor Plastik & Kemasan	SIMA	(0,1671)	27
Subsektor Plastik & Kemasan	AKKU	(0,1932)	28
Subsektor Pulp & Kertas	INRU	(0,4951)	29
Subsektor Kayu & Pengolahannya	SULI	(2,6519)	30

Sumber: olah data

Pada tabel 4.5 tersebut dengan kode IMPC yakni PT. Impack Pratama Industri Tbk pada subsector plastic & kemasan memiliki nilai Z-Score 1,7567 dengan indikasi < 1,81 yang terletak di posisi bangkrut dan menduduki

peringkat/ ranking pertama tertinggi pada tahun 2013, sedangkan dengan kode SULI yakni PT. SJL Global Tbk pada subsector kayu & pengolahannya memiliki nilai Z-Score (2,6519) dengan indikasi < 1,81 yang terletak di posisi yang dan menduduki peringkat/ ranking ke 30 pada tahun 2013.

Tabel 4.6 Hasil Index Peringkat Indikasi Bangkrut Tahun 2014

SEKTOR	Kode	Z-Score	Peringkat
Subsektor Kimia	TPIA	1,7036	1
Subsektor Logam & Sejenisnya	PICO	1,6863	2
Subsektor Logam & Sejenisnya	GDST	1,661	3
Subsektor Plastik & Kemasan	YPAS	1,5703	4
Subsektor Pakan Ternak	MAIN	1,4044	5
Subsektor Kimia	BRPT	1,3979	6
Subsektor Plastik & Kemasan	TRST	1,3597	7
Subsektor Logam & Sejenisnya	NIKL	1,3282	8
Subsektor Pulp & Kertas	DAJK	1,3046	9
Subsektor Plastik & Kemasan	BRNA	1,3016	10
Subsektor Pulp & Kertas	SPMA	1,2840	11
Subsektor Logam & Sejenisnya	BAJA	1,2765	12
Subsektor Logam & Sejenisnya	INAI	1,2710	13
Subsektor Plastik & Kemasan	IPOL	1,2465	14
Subsektor Pulp & Kertas	FASW	1,2333	15
Subsektor Kayu & Pengolahannya	TIRT	1,2115	16
Subsektor Kimia	BUDI	1,2099	17
Subsektor Logam & Sejenisnya	ALMI	1,1612	18

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Subsektor Logam & Sejenisnya	KRAS	1,0439	19
Subsektor Semen	SMCB	1,0374	20
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	MLIA	0,8954	21
Subsektor Pulp & Kertas	TKIM	0,8175	22
Subsektor Pulp & Kertas	INKP	0,7650	23
Subsektor Plastik & Kemasan	SIMA	0,5914	24
Subsektor Logam & Sejenisnya	JKSW	0,4602	25
Subsektor Keramik, Porselen, Kaca	IKAI	0,1182	26
Subsektor Plastik & Kemasan	AKKU	(0,1055)	27
Subsektor Pulp & Kertas	INRU	(0,3987)	28
Subsektor Pulp & Kertas	KBRI	(0,7327)	29
Subsektor Kayu & Pengolahannya	SULI	(0,9179)	30

Sumber: olah data

Pada tabel 4.3 dengan kode TPIA yakni PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk pada subsector kimia memiliki nilai Z-Score 1,7036 dengan indikasi < 1,81 yang terletak di posisi bangkrut dan menduduki peringkat/ ranking pertama pada perusahaan industry dasar dan kimia tahun 2014, sedangkan kode SULI

yakni PT. SLJ Global Tbk pada subsektor kayu & pengolahannya memiliki nilai Z-Score (0,9179) dengan indikasi < 1,81 yang terletak di posisi bangkrut yang dan menduduki peringkat/ ranking ke 30 paling rendah pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2014.

Tabel 4.7 Persentase

Indikasi	Tahun 2013	Tahun 2014
Sehat	$(9/57*100\%) = 15,8\%$	$(9/57*100\%) = 15,8\%$
Grey area	$(18/57*100\%) = 31,6\%$	$(18/57*100\%) = 31,6\%$
Bangkrut	$(30/57*100\%) = 52,6\%$	$(30/57*100\%) = 52,6\%$

Sumber: olah data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikasi kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score pada tabel 4.7. menunjukkan bahwa pada tahun 2013

dan tahun 2014 di BEI ada 57 perusahaan industri dasar dan kimia dengan berbagai sektor dengan persentase 52,6% di posisi bangkrut dan 31,6% di posisi grey area serta 15,8% di posisi sehat. Posisi sehat lebih kecil dari pada yang lainnya, hal ini

menunjukkan cenderung kurang baik pada perusahaan industri dasar dan kimia di BEI.

4.2. Analisis Kesesuaian dengan Kenyataan Sebenarnya

Tabel 4.8 Tingkat Kesesuaian dengan Kenyataan Sebenarnya tahun 2013

No	Kode	Z-Score 2013	Tahun 2014 bangkrut / tidak bangkrut
1	INCI	Sehat	Tidak Bangkrut
2	ALKA	Sehat	Tidak Bangkrut
3	JPRS	Sehat	Tidak Bangkrut
4	KIAS	Sehat	Tidak Bangkrut
5	DPNS	Sehat	Tidak Bangkrut
6	TBMS	Sehat	Tidak Bangkrut
7	IGAR	Sehat	Tidak Bangkrut
8	LMSH	Sehat	Tidak Bangkrut
9	CPIN	Sehat	Tidak Bangkrut
10	GDST	Grey Area	Tidak Bangkrut
11	KBRI	Grey Area	Tidak Bangkrut
12	ARNA	Grey Area	Tidak Bangkrut
13	MAIN	Grey Area	Tidak Bangkrut
14	SRSN	Grey Area	Tidak Bangkrut
15	INTP	Grey Area	Tidak Bangkrut
16	LION	Grey Area	Tidak Bangkrut
17	UNIC	Grey Area	Tidak Bangkrut
18	EKAD	Grey Area	Tidak Bangkrut
19	BTON	Grey Area	Tidak Bangkrut
20	TOTO	Grey Area	Tidak Bangkrut

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

21	AMFG	Grey Area	Tidak Bangkrut
22	CTBN	Grey Area	Tidak Bangkrut
23	SMGR	Grey Area	Tidak Bangkrut
24	JPFA	Grey Area	Tidak Bangkrut
25	ALDO	Grey Area	Tidak Bangkrut
26	FPNI	Grey Area	Tidak Bangkrut
27	APLI	Grey Area	Tidak Bangkrut
28	IMPC	Bangkrut	Tidak Bangkrut
29	TPIA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
30	SMBR	Bangkrut	Tidak Bangkrut
31	NIKL	Bangkrut	Tidak Bangkrut
32	PICO	Bangkrut	Tidak Bangkrut
33	BUDI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
34	BRPT	Bangkrut	Tidak Bangkrut
35	IPOL	Bangkrut	Tidak Bangkrut
36	SMCB	Bangkrut	Tidak Bangkrut
37	ALMI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
38	DAJK	Bangkrut	Tidak Bangkrut
39	KRAS	Bangkrut	Tidak Bangkrut
40	SPMA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
41	TRST	Bangkrut	Tidak Bangkrut
42	INAI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
43	SIAP	Bangkrut	Tidak Bangkrut
44	YPAS	Bangkrut	Tidak Bangkrut
45	FASW	Bangkrut	Tidak Bangkrut
46	BRNA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
47	TKIM	Bangkrut	Tidak Bangkrut

48	BAJA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
49	INKP	Bangkrut	Tidak Bangkrut
50	JKSW	Bangkrut	Tidak Bangkrut
51	IKAI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
52	MLIA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
53	TIRT	Bangkrut	Tidak Bangkrut
54	SIMA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
55	AKKU	Bangkrut	Tidak Bangkrut
56	INRU	Bangkrut	Tidak Bangkrut
57	SULI	Bangkrut	Tidak Bangkrut

Tabel 4.9 Tingkat Kesesuaian dengan Kenyataan Sebenarnya tahun 2014

No	Kode	Z-Score 2014	Tahun 2015 bangkrut / tidak bangkrut
1	ALKA	Sehat	Tidak Bangkrut
2	INCI	Sehat	Tidak Bangkrut
3	SIAP	Sehat	Tidak Bangkrut
4	KIAS	Sehat	Tidak Bangkrut
5	IGAR	Sehat	Tidak Bangkrut
6	JPRS	Sehat	Tidak Bangkrut
7	SMBR	Sehat	Tidak Bangkrut
8	TBMS	Sehat	Tidak Bangkrut
9	LMSH	Sehat	Tidak Bangkrut
10	APLI	Grey Area	Tidak Bangkrut

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

11	ARNA	Grey Area	Tidak Bangkrut
12	UNIC	Grey Area	Tidak Bangkrut
13	DPNS	Grey Area	Tidak Bangkrut
14	EKAD	Grey Area	Tidak Bangkrut
15	FPNI	Grey Area	Tidak Bangkrut
16	INTP	Grey Area	Tidak Bangkrut
17	SRSN	Grey Area	Tidak Bangkrut
18	AMFG	Grey Area	Tidak Bangkrut
19	TOTO	Grey Area	Tidak Bangkrut
20	CPIN	Grey Area	Tidak Bangkrut
21	SMBR	Grey Area	Tidak Bangkrut
22	LION	Grey Area	Tidak Bangkrut
23	BTON	Grey Area	Tidak Bangkrut
24	JPFA	Grey Area	Tidak Bangkrut
25	IMPC	Grey Area	Tidak Bangkrut
26	ALDO	Grey Area	Tidak Bangkrut
27	CTBN	Grey Area	Tidak Bangkrut
28	TPIA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
29	PICO	Bangkrut	Tidak Bangkrut
30	GDST	Bangkrut	Tidak Bangkrut
31	YPAS	Bangkrut	Tidak Bangkrut
32	MAIN	Bangkrut	Tidak Bangkrut
33	BRPT	Bangkrut	Tidak Bangkrut
34	TRST	Bangkrut	Tidak Bangkrut
35	NIKL	Bangkrut	Tidak Bangkrut
36	DAJK	Bangkrut	Tidak Bangkrut
37	BRNA	Bangkrut	Tidak Bangkrut

38	SPMA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
39	BAJA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
40	INAI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
41	IPOL	Bangkrut	Tidak Bangkrut
42	FASW	Bangkrut	Tidak Bangkrut
43	TIRT	Bangkrut	Tidak Bangkrut
44	BUDI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
45	ALMI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
46	KRAS	Bangkrut	Tidak Bangkrut
47	SMCB	Bangkrut	Tidak Bangkrut
48	MLIA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
49	TKIM	Bangkrut	Tidak Bangkrut
50	INKP	Bangkrut	Tidak Bangkrut
51	SIMA	Bangkrut	Tidak Bangkrut
52	JKSW	Bangkrut	Tidak Bangkrut
53	IKAI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
54	AKKU	Bangkrut	Tidak Bangkrut
55	INRU	Bangkrut	Tidak Bangkrut
56	KBRI	Bangkrut	Tidak Bangkrut
57	SULI	Bangkrut	Tidak Bangkrut

Berdasarkan pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 tersebut, kenyataannya sampai sekarang ini operasi perusahaan masih berjalan normal dan perusahaan dikatakan dalam kondisi berjalan dengan baik setelah peneliti mengamati. Hal ini tidak terdapat kesesuaian hasil index dengan kondisi kenyataan sebenarnya.

Maka hasil index Model Altman Z-Score tidak dapat digunakan sebagai alat indikasi kecenderungan kebangkrutan perusahaan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut keterbatasan penelitian yaitu:

- a. Hasil analisa Altman Z-Score sangat terkait dengan terbatasnya jumlah sampel dan data serta periode yang digunakan. Sehingga penelitian ini tidak mampu untuk menganalisa secara keseluruhan dimana hasil analisa Altman Z-Score terbatas pada perusahaan industri dasar dan kimia saja sehingga hanya menggambarkan kondisi pada perusahaan industri dasar dan kimia saja.
- b. Periode pengamatan hanya dua tahun, mungkin akan berbeda jika digunakan periode pengamatan yang berbeda ataupun lebih panjang.
- c. Dan model yg digunakan hanya Altman Z-Score saja dimana terdapat beberapa model-model untuk analisa kebangkrutan, mungkin akan berbeda jika menggunakan model lain atau menggunakan beberapa model dalam menganalisa.

5.2. Kesimpulan

1. Hasil index Z-Score pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2013 diduduki oleh PT. Intan Wijaya Internasional Tbk pada subsector kimia dengan peringkat pertama tertinggi dengan kondisi sehat, sedangkan yang menduduki peringkat paling terakhir dan terendah di perusahaan industri dasar dan kimia di BEI adalah PT. SLJ Global Tbk pada subsector kayu &

pengolahannya dengan kondisi bangkrut.

Hasil index Z-Score pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2014 diduduki oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk pada subsector logam dan sejenisnya dengan peringkat pertama tertinggi dengan kondisi sehat, sedangkan yang menduduki peringkat paling terakhir dan terendah di perusahaan industri dasar dan kimia di BEI adalah PT. SLJ Global Tbk pada subsector kayu & pengolahannya dengan kondisi bangkrut.

2. Hasil penelitian ini tidak konsisten/ sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang menunjukkan bahwa metode Altman tidak dapat dijadikan alat untuk mengindikasikan kecenderungan terhadap kebangkrutan.

5.3. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Saran untuk perusahaan industri dasar dan kimia

Sebaiknya perusahaan selalu memelihara dan meningkatkan kinerja perusahaan secara lebih baik lagi, karena berdasarkan hasil pada tahun 2013 dan 2014 sebagian besar perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel berpotensi untuk mengalami indikasi kebangkrutan dengan nilai Z-Score dibawah nilai 1,81.

Bagi perusahaan industri dasar dan kimia pada Model Altman Z-Score ini tidak dapat digunakan untuk mengindikasikan kebangkrutan karena adanya ketidaksesuaian dengan kenyataannya, namun model ini dapat membantu untuk menilai dan memberi masukan untuk perbaikan dan mempertahankan perusahaan.

2. Saran Penelitian Lanjutannya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti memberikan saran untuk penelitian lanjutannya yakni sebaiknya jumlah sampel dan periode penelitian yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih baik. Diharapkan mampu menganalisa variabel lainnya yang tidak terkontrol pada penelitian ini atau gunakan berbagai model untuk analisis kebangkrutan seperti model springate, fulmer, blasztk, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Brigham, Eugene F. & J. Fred Weston. (2005). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.

Jaya, Asmara Ketut. (2014). Laporan Keuangan merupakan Alat dalam Memprediksi Kecendrungan Terjadinya Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Model Altman (studi analisis). *Jurnal Akuntansi FE Untar*, Volume XVIII/02/Mei/2014 Nomor 02, hal 166-187.

Fraser, Lyn M. dan Aileen Armiston. (2008). *Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Indeks.

Margaretha, Farah. (2005). *Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana.

Silaban, Pasaman. (2014). Analisis Kebangkrutan dengan Menggunakan Model Altman (Z-SCORE) Studi Kasus di Perusahaan Telekomunikasi. *Jurnal Akuntansi FE Untar*, Volume XVIII/03/September/2014 Nomor 03, hal 322-334.

Syafri, Sofyan Harahap. (2006). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Usman, Nuralya. (2015). *Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. Skripsi Strata-1 Manajemen. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PENERAPAN KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
BERKELANJUTAN**

Taufik Kurrohman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email: taufik.qman@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the application of contracts, the contract carried out by Islamic banks perspective maqasid sharia economic development efforts sustainable society, this research uses qualitative research approach based on secondary data, contracts that have been carried out by Islamic banks based on the standard contract islamic bank financing. The method used is descriptive deductive analysis based on data of a general nature to the data that is specifically sourced data that is to be primary or secondary. This research seeks to describe how the concept of maqasid sharia in the application of sharia bank financing agreement and with community economic development. and this research would also give facts financing contracts that are not in accordance with the principles of sharia maqasid.

Key Words: Contracts, Islamic Bank, Maqasid Sharia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kontrak-kontrak akad yang dilakukan oleh bank syariah perspektif maqasid syariah dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berbasis data sekunder kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh bank-bank syariah berdasarkan standar kontrak pembiayaan bank syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bersifat deduktif berdasarkan data yang bersifat umum kepada data yang bersifat khusus baik bersumber data yang bersifat sekunder maupun yang bersifat primer. Penelitian ini hendak menggambarkan bagaimana konsep maqasid syariah dalam penerapan akad pembiayaan bank syariah dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat. dan penelitian ini juga hendak memberikan fakta-fakta kontrak-kontrak pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.

Kata Kunci: Kontrak, Bank Syariah, Maqasid Syariah

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara terbesar berpenduduk muslim di dunia, hal tersebut merupakan salah satu potensi perkembangan ekonomi syariah. Di dalam praktik perbankan, pembiayaan

yang berbasis bunga seringkali kita dapatkan bahwa debitur seringkali mendapatkan kesulitan di dalam melunasi hutang-hutangnya oleh karena secara praktik para pengusaha seperti melakukan gali lobang tutup lobang,

maksudnya adalah membentuk perusahaan dengan meminjam uang kepada bank seperti sedang berternak ayam *boiler* yang selalu butuh suntikan untuk membesarkannya dan relatif rentan terhadap sakit. Namun berbeda ketika membangun usaha dengan kekuatan uang sendiri, seperti sedang berternak ayam kampung yang ia hidup dengan makanan yang ia cari namun relatif kuat dan stabil. Ia tidak akan goyah ketika usaha mengalami penurunan pendapatan namun ia tetap kokoh karena tidak harus membayar bunga. Adanya konsep kontrak pembiayaan pada bank syariah yang tidak berbasis bunga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Di Indonesia praktik *fiqih muamalah*, atau ekonomi syariah mulai muncul tahun 1990. Yaitu ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disahkan. Diantara kandungan Undang-Undang itu ialah membenarkan bank konvensional beroperasi melalui sistem bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian zaman reformasi, timbul perubahan Undang-Undang itu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang ini menjadi perintis ke era baru perbankan syariah di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui bank-bank syariah baru atau divisi/ unit usaha syariah pada bank konvensional. Dengan demikian, praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah. (M. Cholil Nafis, 2011; 24).

Doktrin bunga juga diharamkan oleh gereja pada abad pertengahan. Ciri utamanya adalah larangan penerapan bunga. Semua bangsa yang telah berbudaya zaman dahulu, serta pada abad zaman Kristen pertengahan, benar-benar tidak mendukung dengan adanya bunga.

Ada perintah yang eksplisit di dalam Injil yang menyangkut bunga seperti "beri pinjaman, dan jangan berharap sesuatu yang lain". (lukas) Gereja Kristen mengulurkan tangannya, dan setapak gereja dapat mengenalkan larangan bunga menjadi bentuk Undang-Undang. Larangan gereja tentang riba terus berlaku hingga akhir abad pertengahan, yang berakhir pada abad ke-13 (Afzalul Rahman, 1995; 15).

Aktifitas ekonomi diatur dalam Al-Qur'an pada surat 2/ Al-Baqarah: 188, 280, 270, 4/ Annisa': 32, 10, 29, 7/ Al-A'raf: 128, 9/ Attaubah: 60, 10/ yunus: 67, 13/ Ar-Ra'ad: 11, 51/ Adh-Dzariyat: 19, 70/ Al-Ma'arij: 24-25, dan lainnya. Misalnya mengenai jual beli (perdagangan) yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara yang batil termasuk intimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. (Idri, 2015; 6-7). Asas persamaan hukum (*Al-musawah*) yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain (Al-Qur'an, Al-Hujarat ayat 13). Asas ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. (Abd. Shomad, 2012; 82).

Oleh karena itu perbankan syariah tentu berbeda dengan bank konvensional dalam konsep penerapannya, sehingga sumber daya manusia dalam ekonomi Islam merupakan sudut pandang yang harus diutamakan. Pada aspek religiusitas sumber daya manusia di dalam perbankan syariah merupakan hal yang diutamakan, hal ini sejalan dengan pembelajaran agama Islam bagi setiap muslim. Senada dengan penelitian LPPOM MUI "*That's is why the Indonesia ulama Assemble (Majelis Ulama Indonesia) fatwa commission concluded that all prosessed product is basically doubtful and needs to be studied or explored futhermore before setting the status or its halal illegeitimate, to provide*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

certainty and reassuring Moslems consumers to practice their religious teachings. (M. Amin, 2013; 28). Pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang harus ada pada setiap kontrak-kontrak yang dilakukan bank syariah harus mencerminkan maksud-maksud syariah itu sendiri diantaranya di dalam menjaga harta (*hifzul maal*). Oleh karenanya sangat penting untuk memahami kontrak-kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah apakah sudah memenuhi aspek *maqasid* syariah itu sendiri, karena fakta-fakta menunjukkan kontrak-kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang berbasis standar kontrak belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di dalam hukum Islam dikenal dua jenis akad, yaitu:

- a. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan *rhido* dan pahala dari Allah Ta’ala, sama sekali tidak mencari unsur “*return*” ataupun motif mencari keuntungan, misalnya *Al-Qardh*.
- b. Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *mudharabah* serta *musyarokah* (Abd. Shomad, 2012; 171).

Akad-akad tersebut merupakan akad yang ada di dalam operasional perbankan syariah baik dalam bentuk pembiayaan ataupun bentuk-bentuk produk lainnya. Bank syariah dalam pelayanannya tidak mudah untuk melakukan akad-akad yang bersifat *qardh*, namun kelazimannya bank syariah menyediakan produk-produk yang berbasis pada akad *tijari* atau berbasis keuntungan. Meskipun demikian pada hakikatnya bank dapat mengkonversi produk-produk

pembiayaan tersebut untuk membantu masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan konsep-konsep akad yang berkeadilan serta berimbang. Bank syariah di dalam upaya memenuhi prinsip-prinsip syariah seyogyanya dapat mengaktualisasikan diri sebagai bank Islam yang representatif di dalam membentuk kontrak-kontrak standarnya memberikan kelonggaran terhadap nasabah dan konsumennya.

Oleh karena itu Sutan Remy Sjahdeini menyarankan kepada Bank Indonesia dengan bantuan Dewan Syariah Nasional dapat melakukan penyeragaman terhadap perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia, sehingga dengan penyeragaman perjanjian-perjanjian baku perbankan syariah tersebut diharapkan akan mencapai beberapa hal sebagai tujuan yang diinginkan oleh para pihak. (Sutan Remy Sjahdeini, 2010; 143). Aktualisasi penyeragaman kontrak standar dalam perjanjian-perjanjian baku hendaknya sudah memenuhi aspek *maqasid* syariah, salah satu tujuan yang terpenting diterapkannya prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian dari pemaparan tersebut ada dua hal yang paling mendasar dari tulisan paper ini yang akan menjadi rumusan pertama, bagaimana penerapan kontrak pada bank syariah perspektif *maqasid* syariah; kedua, bagaimana bank syariah berkontribusi dalam bentuk kontrak pembiayaan terhadap ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karenanya paper ini berjudul “Penerapan Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Perspektif *Maqasid* Syariah Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan”.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Terminologi Akad Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Peradaban manusia dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis menuntut adanya perubahan, salah satu aspek yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah kebutuhan konsep di dalam melakukan transaksi, oleh karena itu terciptalah suatu konsep kontrak yang berdasar baik dari sumber budaya maupun sumber Al-qur'an.

Bagian dari dasar kontrak sebagai tujuan dari *maqashid assyariah* adalah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa semua kontrak atau akad haruslah dinyatakan secara hitam putih, yang menyatakan:

".....dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.....(QS. al-Baqarah {2} 282).

Kata kontrak yang dimaksud ialah terjemahan dari kata 'uqud bentuk jamak dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak. kata "akad" secara terminologi *fiqih* adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *kabul*. Implikasi dari adanya kontrak tersebut adalah ikatan antara para pihak yang terdapat dalam premis mayor dan premis minor pada suatu kontrak perjanjian. Oleh karenanya suatu hal yang mendasar jika kita melakukan suatu kontrak hendaklah dibaca secara seksama terlebih dahulu untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak. Oleh karenanya para pihak seyogyanya memahami isi kontrak secara seksama dan tidak diperkenankan salah satu pihak bermaksud menyembunyikan substansi akad dengan maksud tertentu, misalnya format kontrak dibuat kecil sehingga salah satu pihak enggan untuk membacanya.

Memahami isi kontrak merupakan suatu keniscayaan, dan adanya keseimbangan dalam berkontrak menurut hemat penulis juga merupakan suatu hal yang penting dalam perjanjian pada perbankan syariah, karena dalam konsepsi hukum Islam suatu akad berbicara nilai (*value*). Nilai yang dimaksud adalah *muamalah* yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan kejujuran.

Ala' Eddin Kharofa menguraikan kata "Aqd", dalam uraiannya mengenai definisi *contract* dalam hukum Islam:

- a. *The word 'aqd (contract) in the arabic language originally means tying tightly, as in tying rope. Arabs also used the word to speak about firm belief or determination.*
- b. *The word contract in Islamic jurisprudential usage means an engagement and agreement between two persons in a legally accepted, impactful and binding manner. (A.S. Noorden, 2000; 1-5).*

Kata-kata *aqada* dalam Al-Quran ditemukan 7 kali dalam lima surah dengan berbagai bentuknya, yaitu 'aqadat pada surah *An-Nisa* (4): 33, 'uquud pada surah *AL-Maidah* (5): 1, 'aqdatun pada surah *AL-Ma'idah* (5): 89, 'uqdatun pada Surah *AL-Baqarah* (2): 235 dan 237, Surat *Taha* (20): 27, dan 'Uqad pada surah *AL-Falaq* (113): 4 dari 7 kata tersebut yang berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surah *AL-Maidah* (5): 1. Dalam ayat tersebut Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia. (Fathurrahman Djamil, 2012; 5; Adiwarmar A. Karim, 2014; 65.

lex mercatoria blacks law diartikan kebiasaan dalam praktik bisnis (tidak tertulis) yang semula berlaku dikalangan pedagang. Namun dalam perkembangan menjadi tertulis melalui putusan hakim Niaga, arbiter, klausul kontrak standar bahkan dilembagakan melalui organisasi-organisasi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

internasional. Seperti ICC (*International Chamber of Commerce*) FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Councils*), UNCITRAL (*United Nations Conference International Trade Law*) dan UNIDROIT (*International Institute for the Unifications of Private Law*). Para ahli pada umumnya mendefinisikan *lex mercatoria* sebagai hukum kebiasaan komersial Internasional. (Taryana Soenandar, 2004; 1-2; 15-16) kebiasaan dalam praktik bisnis pada masa kini sudah terlembagakan dengan baik di antaranya dalam berbagai transaksi kontrak internasional beberapa organisasi lahir yang tujuannya adalah untuk memudahkan dan menstandarisasikan klausula-klausula kontrak-kontrak antar negara yang pada intinya memberikan pemahaman secara seksama antara para pihak yang bersifat saling menguntungkan.

Perjanjian *Cost-plus-sale*, adalah salah satu perjanjian yang paling populer untuk membeli komoditas dan produk-produk lain secara kredit. Konsepnya adalah pemodal memberi sebuah produk. Yaitu sebuah komoditas, bahan baku dan lain-lain untuk seorang pengusaha yang tidak memiliki modal sendiri. Pemodal dan pengusaha sepakat mengenai tingkat keuntungan, sering disebut mark up, yang ditambahkan pada biaya produk. Pembayaran ditunda untuk jangka waktu tertentu di mana pada jangka waktu itu pengusaha menghasilkan produk akhir dan menjualnya di pasar. Agar menjadi perjanjian yang sah, syariat mensyaratkan perjanjian *murabahah* sebagai hasil dari penjualan awal dan bukan sebagai pendanaan yang ada. Selain itu, pemodal harus mengambil kepemilikan barang-barang yang dijual. (Hennie Van Groeuning, Zamir Iqbal, 2011; 22).

Bentuk-bentuk akad pembiayaan pada bank syariah salah satunya berbasis perjanjian *cost-plus-sale* seperti halnya pada produk pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah yang substansinya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena di dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin diperoleh). (Adiwarman A. Karim, 2014; 113). Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Produk-produk finansial syariah misalnya tentang *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i istishna* dan lain-lain adalah produk keuangan yang merupakan hasil pengembangan karena mengenai hal-hal tersebut belum diatur dalam Al-qur'an dan as-sunnah/ al-hadits sehingga karena itu harus dikembangkan. Diperbolehkannya melakukan pengembangan atas hal-hal yang bersifat *mutagoyyirat* atau bukan yang bersifat *tsawabit* adalah berdasarkan asas *muamalah* yang telah dikemukakan yang menentukan “suatu transaksi dianggap tidak bertentangan/ sesuai dengan prinsip syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan syariah. (Sutan Remy Syahdeini, 2010; 128).

2.2. Teori Maqasid Syariah

Asas *Tasyri'iyah* atau asas legislasi, prinsip ini menekankan bahwa dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial harus berperilaku

sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. (Abd. Shomad, 2012; 60) Asas *Maslahah* prinsip ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat (*Maqashid Assyariah*). (Abd. Shomad, 2012; 60). Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* (pembebanan kewajiban), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqih*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah terpeliharanya agama (*Hifz ad din*), terpelihara jiwa (*Hifz an nafs*), terpelihara keturunan (*Hifz al-nasl*), terpelihara akal (*Hifz al-'aql*) dan terpelihara harta kekayaan (*Hifz al-mal*). Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan merasakan adanya *mafsadat*, makalah ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik. (Fathurrahman Djamil, 2015; 65).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyat, menegaskan bahwa:

"Syariah berlandaskan kepada kebijakan dan kesejahteraan manusia di dunia hingga hari akhir nanti. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi rasa keadilan, kasih sayang, kebaikan serta kebijaksanaan. Apapun yang bergeser dari keadilan ke penindasan, dari kasih sayang ke kebencian, dari kesejahteraan ke kesengsaraan dan dari kebijaksanaan ke kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariah. (Ibnu al-Qayyim, 1955; 14).

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat

ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, lalu kemudian *hajiyyat* dan terakhir *tahsiniyyat*. (Ibnu al-Qayyim, 1955; 66), yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Contohnya larangan hukum untuk mencuri, membunuh serta meminum *khamar*, memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan atau terlindungi harta yang dimiliki seseorang, dan agar terpelihara jiwa, serta kesehatan akal pikiran seseorang (Ibnu al-Qayyim, 1955;67).

Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Dalam bidang muamalah, seperti disyariatkannya banyaknya macam akad dan beberapa *rukhsah* dalam *muamalah*, bertujuan agar dalam aktivitas ekonomi manusia memiliki pilihan-pilihan dalam melakukan transaksi sehingga terjadi kemudahan. Sementara dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan (Ibnu al-Qayyim, 1955; 67).

Pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat* maupun

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

tahsiniyyat dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok, seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain, dimana untuk peringkat pertama primer, yang kedua sekunder dan yang ketiga komplementer. Sebagai contoh, untuk memelihara diri, keturunan dan harta, bentuk *dharuriyyat*nya adalah memiliki tempat berteduh. Tempat berteduh merupakan aspek *dharuriyyat*, menjelmannya menjadi rumah merupakan aspek *hajiyyat*, dan keharusan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan aspek *tahsiniyyat*. Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan kebutuhan dasar *five basic need* secara sempurna maka ketiga tingkat *maqashid assyariah* di atas tidak dapat dipisahkan. Tingkat *hajiyyat* adalah penyempurnaan tingkat *dharuriyyat*, dan tingkat *tahsiniyyat* adalah penyempurnaan tingkat *hajiyyat* (Ibnu al-Qayyim, 1955; 68).

Dengan demikian, *Maqasid* syariah berusaha menjaga harmonisasi secara holistik, integral dan berkesinambungan antara lima hal tersebut. Apa saja yang dapat memantapkan perlindungan kelima hal tersebut, merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Misalnya dalam memilih untuk tunduk pada ekonomi Islam sebagai suatu ketetapan hukum, memiliki tujuan dan hikmah sebagaimana tujuan dari suatu hukum ditetapkan, yaitu dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia pada aspek nilai-nilai Islam. Persoalannya adalah bagaimana tujuan dari suatu ketetapan hukum tersebut dapat tercermin dalam legal formalnya (*fiqih*) membawa pada tujuan utama syariat tersebut. Pada tatanan ini, peran *mujtahid* atau yuris untuk mengungkapkan suatu hikmah atau ketetapan hukum akan sangat berperan.

Kaidah-kaidah *fiqih* yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan masalah

ekonomi syariah, khususnya ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

“Hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah kedua dalil tersebut dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah seperti giro, tabungan, deposito, *murabahah*, jual beli salam, jual beli *istishna*, pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain. Contoh penerapan pada kedua kaidah tersebut dalam masalah produk penghimpunan dana. masyarakat terkadang memerlukan sarana untuk investasi dan menjaga keamanan dari dana yang dimilikinya. Untuk kebutuhan tersebut pada masa kini antara lain disediakan oleh perbankan yang salah satu produknya adalah simpanan berupa giro, tabungan dan deposito, berdasarkan kaidah tersebut di atas, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka simpanan berupa giro diperbolehkan dengan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Demikian pula hukum tabungan, deposito, pembiayaan dan lain-lain dapat menggunakan kaidah tersebut, selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang sifatnya untung-untungan seperti judi, atau tidak mengandung riba.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu hukum yang muncul tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2014; 60). Menurut Morris L. Cohen, *Legal research is the process of finding the laws that governs*

activities in human society (Morris. L. Cohen & Kent C. Olson, 1992; 1).

Menurut Black's Law Dictionary "legal research" diartikan sebagai:

- a. *The finding and assambling of authorities that bear on a questions of law.*
- b. *The field of study concerned with the effective marshalling of authorities that bear on a questions of law.*

Pendekatan koseptual (*conseptual approach*) berdasarkan dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum kontrak/ akad, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) terutama difokuskan pada ketentuan kontrak BW dan Undang-Undang serta peraturan Bank Indonesia mengenai perbankan syariah, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dalam menganalisis kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada perbankan syariah dan diputus oleh pengadilan, sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative appraoch*) sebagai bagian pendekatan pelengkap komparasi hukum nasional dan hukum Islam dalam transaksi kontrak/ akad perbankan syariah. Pendekatan tersebut dapat juga dengan membandingkan ketentuan-kententuan kodifikasi hukum yang ada seperti catatan-catatan naskah akademik, standarisasi kontrak perbankan syariah yang telah disepakati oleh asosiasi dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang telah diakui misalnya AAOFI, *Accounting and Auditing and Governance standars for Islamic Finansial Institution (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*. Dapat juga KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Basis pendekatan yang utama adalah penerapan kontrak pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh bank-bank syariah, yang akan menjadi fokus telah kritis terhadap setiap akad baik pada aspek klausula kontrak ataupun pada aspek tatanan praktis kontrak tersebut dijalankan. Dengan melihat secara

mendalam berdasarkan perspektif *maqasid* syariah.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus berbasis data sekunder yaitu kontrak-kontrak pembiayaan bank syariah yang telah ada. Analisis penelitian berfokus pada kontrak pembiayaan bank syariah yang dihubungkan dengan *maqasid* syariah dengan memberikan deskripsi yang menyeluruh serta signifikansinya bank syariah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau "source of law" Black's Law Dictionary memberikan definisi "source of law" adalah *something (such as constitutions, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analisis*" yang dibagi tiga kategori, yaitu (i) *the oriigin of legal concepts and ideas* (ii) *governmental institutions that formulate legal rules; and* (iii) *the published manifestations of the law (books, cumputer data bases, microforms, optical disks, and other media that contain legal information are all sources of law* (Black Henry Campbell, 1990; 1400).

Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah sumber hukum kepustakaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Watt:

"The material located in a library can be reasonable placed into on of two groups. The first group we shall call primary legal materials and in this group can be insolated all over legal resources. All of other materials in the library are used basically to assist the researcher in understanding the law, and this group we

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

secondary materials" (Robert Watt, 2001; 1).

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014; 181). Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014; 181).

Bahan hukum yang bersifat primer maupun sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*). Hasil data yang didapatkan lalu akan diinventarisir dan diidentifikasi serta diklasifikasikan kepada beberapa kategori pencatatan sumber data dengan tujuan untuk mempermudah penulis menganalisis permasalahan yang terkait. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah model catatan lapangan (CL) yang terdiri dari catatan observasi (CO), catatan teori (CT) dan catatan metodologi (CM). Model catatan lapangan yang terdiri dari CO, CT, dan CM merupakan upaya penulis mencatat secara tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialami dan difikirkan dalam proses pengumpulan data dan merupakan refleksi dari data penelitian. Hal ini penting untuk dilakukan oleh peneliti karena merupakan jantung dari penelitian kualitatif. (Mukhtar, 2010; 100-101). Metode tersebut seringkali dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif dalam upaya memperoleh data.

3.4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain (Sugiyono, 2007; 244). Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian (Ronny Hanitijo Soemitro, 1999: 97). Metode analisis data bersifat normatif kualitatif menggambarkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus yaitu pembahasan secara sistematis dengan menjabarkan dan menginterpretasikan asas-asas hukum, norma atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Rangkaian dalam penulisan dimulai dengan inventarisir dan identifikasi terhadap sumber-sumber bahan hukum yang relevan. Proses selanjutnya adalah melakukan sistemisasi terhadap asas-asas hukum, konsep dan doktrin guna mempermudah dalam memformulasi dan pengkajian penelitian yang tujuannya adalah dapat menemukan reinterpretasi baru terkait dengan akad pembiayaan perbankan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard K. Neumann, Jr sebagai berikut:

Empat tahapan dalam proses penelitian hukum yaitu: (i) *analysing*, (ii) *organizing* (iii) *producing and* (iv) *rewriting*. Lihat. *Richard K. Neumann Jr. Legal Reasoning and Legal Writing (structure, and style)*. (Richard K. Neumann, 2001; 57).

Tahapan-tahapan di dalam analisis data tersebut bersifat rigid untuk memperoleh analisis yang bersifat komprehensif, oleh karenanya di dalam melakukan penelitian ini terstruktur di dalam menganalisis dengan upaya pertama kali melakukan analisis, mengorganisasi, menciptakan dan mencatat.

4. PEMBAHASAN

4.1. Bentuk-bentuk Transaksi Pembiayaan Bank Syariah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 butir 25 memberikan definisi sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahia bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

4.2. Keabsahan Akad dan Berakhirnya Kontrak

Kalangan ahli hukum pada umumnya berpandangan bahwa sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, mulai dari sudut ekonomi, sejarah, dan sosiologi sampai pada sudut filsafat dan lain sebagainya. Adapun sumber formal yang dikenal dalam ilmu hukum adalah terdiri dari UU (*statute*, perundang-undangan) kebiasaan (hukum adat, *costum*, *common law*), keputusan-keputusan hakim (*judge law*, *jurisprudentie*), traktat (perjanjian, *Treaty*) dan pendapat sarjana hukum (doktrin) (C.S.T. Kansil, 1989; 46). Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif sebagai sumber hukum materiil dapat diwujudkan dalam operasional perbankan syariah,

sebagaimana pada umumnya setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, secara legal formal dituangkan dalam surat perjanjian kredit (*letter of offer*) (Adiwarman A. Karim, 2014; 462).

Dengan demikian, para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu antara bank syariah dengan nasabah, dapat memasukkan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi tidak mengurangi aspek syariahnya. Asas kebebasan berkontrak ini harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, baik menurut syariah maupun KUH Perdata pasal 1320, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu pokok perjanjian tertentu dan mengenai suatu sebab yang tidak dilarang. Dengan demikian jika suatu perjanjian atau kandungan isi akad dianggap batal demi hukum maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Menurut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dianut dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (isi perjanjian) berupa apapun yang diinginkan dan disepakati oleh para pihak tersebut. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut bukan tanpa batas. Salah satu yang membatasi asas tersebut adalah Undang-Undang.

Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 KUH Perdata, tetapi isi materi atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dipandang dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariah

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

(Hartono Mardjono, 2000; 77-78). Dalam transaksi akad lazim dikenal dengan istilah *fasakh* atau pemutusan kontrak yang dimaksud dengan *fasakh* di sini adalah “melepaskan ikatan akad” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi” dengan *fasakh*, para pihak yang berakad kembali kepada status semula sebelum akad terjadi baik *fasakh* itu terjadi karena atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) maupun *fasakh* itu terjadi atas dasar putusan hakim (*al-qadhai*) (Fathurrahman Djamil, 2015; 57). *Fasakh* bisa terjadi dalam satu kondisi tertentu misalnya dikatakan *fasakh* itu wajib jika menghormati ketentuan syariah, melindungi kepentingan umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya atau kerugian) dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* jika dilakukan berdasarkan atas kerelaan para pihak untuk mengakhiri akad.

Berakhirnya akad menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tashiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad.

4.3. Analisis Akad Pembiayaan Bank Syariah Perspektif *Maqasid* Syariah

Dalam *ushul fiqih* ada kaidah yang mengatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa waajib*”, yakni segala sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Karena pada zaman saat ini perekonomian selalu berkaitan dengan perbankan, maka adanya perbankan merupakan suatu hal yang wajib, maka

dengan demikian jelas hubungan antara Islam dengan perbankan. Demikian juga halnya masalah ekonomi adalah kategori *muamalah* yang secara teoritis tidak diatur secara spesifik oleh hukum Islam, namun secara substansial diatur oleh hukum Islam. Berikut beberapa analisis pembiayaan bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan klausula-klausula akad.

Klausula akad *murabahah* bank Muamalat pada bagian pasal 5 syarat realisasi butir 4 dicantumkan bahwa:

Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah pembiayaan *murabahah* ke dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh bank dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, bilamana nilai mata uang rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang USD (Dolar Amerika).

Sudut pandang yang digunakan di dalam mengkonversikan jumlah pembiayaan *murabahah* ke mata uang lainnya adalah pandangan baik menurut bank dan untuk kepentingan bank, suatu hal yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* mengenai ketentuan umum *murabahah* pada butir 7 yaitu nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sehingga kemungkinan jumlah yang akan dibayarkan oleh nasabah akan bertambah jika konversi mata uang dilakukan dari rupiah ke dollar, namun klausula tersebut adalah sebagai kesepakatan syarat realisasi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*.

Pada klausula akad *murabahah* bank Muamalat pasal 7 butir 6 tata cara pembayaran kewajiban yang mencantumkan:

Nasabah tidak diperbolehkan membayar kewajibannya kepada bank dengan jalan menjumpakan atau

memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/ klaim nasabah kepada bank bila ada, dan nasabah juga tidak diperbolehkan menuntut suatu pembayaran lain (*counter claim*) kepada bank. Untuk hal tersebut, nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Klausula tersebut merupakan bentuk menghilangkan hak nasabah untuk membayar kewajibannya dengan menjumpakan atau memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1425-1429 KUH Perdata. Hal tersebut adalah standar kontrak yang diberikan oleh bank terhadap nasabah sehingga nasabah tidak diberikan alternatif pembayaran yang diperbolehkan secara hukum, seharusnya tata cara pembayaran dengan kompensasi tersebut diperbolehkan oleh bank dalam upaya membentuk kontrak pembiayaan yang bersifat proporsional dan akomodatif.

Pada klausula akad *murabahah* bank Muamalat pasal 8 tentang biaya, potongan dan pajak-pajak butir butir 2 mencantumkan:

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain dalam hal nasabah cidera janji sehingga bank perlu menggunakan advokat untuk menagihnya, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa advokat, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Pasal 18 tentang asuransi mencantumkan:

Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi kewajiban nasabah, sisa kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah kepada bank dan wajib dibayar dengan seketika dan

sekaligus oleh nasabah pada saat ditagih oleh bank.

Pada klausula tersebut bank memberikan ketentuan jika nasabah cidera janji maka pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penagihan atau jasa-jasa lainnya dan pembayaran advokat ditanggung oleh nasabah. Klausula tersebut bertentangan dengan asas proporsionalitas berkontrak yang memberikan pembebanan yang sama kepada para pihak, hal tersebut juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar pada butir 5 menyatakan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Pada klausula pasal 10 tentang pemberian jaminan dan agunan pada butir 1 mencantumkan: untuk menjamin seluruh kewajiban nasabah hingga lunas, tertib dan secara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh nasabah kepada bank, dengan ini menyerahkan kepada bank jaminan berupa dua bidang tanah sebagai jaminan asesoris dan kapal itu sendiri yang menjadi objek jual beli serta ada jaminan tambahan yang bentuknya adalah penjaminan perusahaan.

Pada bentuk pengikatan jaminan bank mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok dalam pembiayaan tersebut adalah kapal yang dijadikan objek jual beli, sedangkan untuk jaminan tambahannya adalah jaminan dua bidang tanah dan bangunan serta jaminan *Corporate Guarantee*. Ketentuan tersebut tentu memberatkan nasabah dan tidak bersifat proporsional karena pembebanan biaya yang timbul dari pengikatan jaminan tersebut tentunya dibebankan kepada nasabah sebagaimana yang tercantum pada pasal 8 mengenai biaya, potongan dan pajak-

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pajak pada perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut.

Pada klausula pasal 12 tentang cidera janji, kelalaian dan pelanggaran butir 9 mencantumkan: Harta benda nasabah/ penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan kepada bank, diletakan sita jaminan (*conservatoir/ revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*eksekutorial beslag*) oleh pihak ketiga.

Pada klausula tersebut semua harta benda yang terkait dengan nasabah/ penjamin baik yang diagunkan dan tidak diagunkan diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi, klausula tersebut bertentangan dengan asas proporsionalitas dan prinsip-prinsip syariah karena yang menjadi objek barang sitaan seyogyanya hanya yang terkait dengan jaminan yang diagunkan tidak termasuk yang tidak diagunkan. Namun klausula tersebut menyebutkan secara eksplisit jaminan yang tidak diagunkan pun menjadi bagian yang harus diletakkan pada sita jaminan atau sita eksekusi.

Pada klausula pasal tentang pernyataan dan jaminan nasabah pada butir 11 mencantumkan:

Bahwa semua kuasa yang diberikan nasabah kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna membayar denda, biaya-biaya, pelunasan harga jual maupun kewajiban nasabah lain yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya, denda dan ganti rugi, kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh nasabah tanpa ada persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu dan tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Apabila

dibutuhkan kuasa-kuasa baru untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan perjanjian ini maupun akad pembiayaan *murabahah*, maka nasabah dengan ini menyetujui untuk memberikan kuasa-kuasa baru tersebut kepada bank.

Klausula tersebut memberikan kuasa yang bersifat substitusi kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna membayar denda, biaya-biaya, pelunasan harga jual maupun kewajiban nasabah lain yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh nasabah dan jika dibutuhkan kuasa baru karena perjanjian tersebut maka nasabah menyetujui memberikan kuasa tersebut. Bentuk tata cara pembayaran tersebut bersifat baku dari bank dan nasabah pada posisi harus menerima ketentuan tersebut.

Oleh karenanya menurut penulis akad-akad pembiayaan bank syariah perspektif *maqasid* syariah seharusnya memberikan kelonggaran secara substansial meskipun akad tersebut adalah akad *tijari* yang orientasinya adalah keuntungan materi.

4.4. Konsep Pembiayaan Bank Syariah dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan

Pada tataran konsep ekonomi syariah pada prinsipnya sama, ia mengeluarkan suatu produk yang akan disampaikan kepada masyarakat muslim untuk dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang bernilai kehalalan. Karena disaat yang sama nasabah bank kritis terhadap apapun yang mereka alami pada aspek pelayanan atau aspek produk. Rahman berpendapat “*Islamic banking has been providing superior products that conform to the sharia, however, there are still many customers who are in doubt of tis professionalism and service*

quality. Superiority in products remains in sufficient for customer satisfaction and loyalty. Banking customers are increasingly critical that the products and services provided affect banks survival. (Rahman, 2004; 12).

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Rachmad Hidayat dkk yang memberikan kesimpulan "Result showed that service quality and customer trust of Islamic banks were predictors of customers satisfaction and customer loyalty of Islamic bank customer satisfaction of Islamic bank was the intervening variable linking service quality and customers trust of Islamic bank to customers loyalty of Islamic bank. (Rachmad Hidayat dkk, 2015; 163).

Dengan demikian menurut pendapat penulis hal yang harus diperhatikan dalam operasional perbankan syariah servis yang mumpuni dan pemahaman perbankan syariah kepada sumber daya manusia yang ada pada perbankan syariah harus senantiasa didorong ke arah yang lebih baik. Implikasi *maqashid assyariah* terhadap perilaku konsumen (Abulhasan M. Sadek, 1992; 193). Secara konvensional dikenal dengan tiga dimensi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan bagi siapa produksi itu dilakukan. Permasalahan tersebut tidak akan timbul apabila sumber daya alam tidak terbatas selaras dengan keinginan (*wants*) manusia atau keinginan (*wants*) manusia terbatas selaras dengan sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian konsep *wants* dan *needs* adalah konsep yang tidak bebas nilai. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang didefinisikan syariah.

Dalam hal upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah

adalah memberikan peluang kepada masyarakat dalam hal pembiayaan berdasarkan produk-produk yang ada pada bank syariah dengan mengedepankan aspek akad *tabarru* ataupun akad *tijari*, keduanya dapat digunakan di dalam membangun ekonomi masyarakat. Komparasi antara bank syariah dan konvensional harus memberikan nilai lebih kepada setiap akad yang dilakukan oleh bank syariah. Beberapa pertanyaan masyarakat seperti apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional sering kali terdengar dan hal tersebut seyogyanya dijawab dengan aktualisasi pelayanan yang mumpuni pada aspek kontrak maupun pada aspek tatanan praktis akad penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam akad pembiayaan bank syariah harus dikedepankan dengan tidak mengesampingkan keuntungan yang hendak diraih oleh bank syariah. Perjanjian-perjanjian pembiayaan pada bank syariah menunjukkan belum mengedepankan aspek kemaslahatan para pihak, namun secara substansial lebih mengedepankan pencegahan kerugian kepada pihak bank dan lebih mengedepankan aspek keuntungan. Artinya akad pembiayaan pada bank syariah dalam upaya membangun ekonomi masyarakat seyogyanya merubah paradigma akad dari akad *tijari* yang mengedepankan kemaslahatan para pihak dengan memberikan peluang sebesar-besarnya *bargaining position* yang sama antara debitur dan kreditur.

Para pakar ekonomi syariah dan praktisi perbankan syariah tidak cukup hanya mengetahui *fiqh muamalah* dan aplikasinya saja, namun yang lebih substansial adalah memahami tinjauan *maqasid* syariah. Beberapa ulama *salaf* mengatakan bahwa mempelajari ilmu *fiqh* merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil *syara'* sekaligus bagaimana menerapkan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

dalil-dalil syariah. Tema terpenting dalam ilmu *ushul fiqih* adalah *maqasid* syariah karena ia mempunyai posisi di dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pemahaman mengenai *maqasid* syariah tidak hanya cukup pada tujuan-tujuan syariat akan tetapi juga pemahaman mengenai teori-teori syariah untuk mewujudkan *maqasid* syariah landasan filosofis alasan yang bersifat rasional, *illat*, rahasia *tasyri*, dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya. Dan cara melakukan *ijtihad* dengan metode-metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-zariah*, *u'rf*, *istihsab* dan metode-metode *ijtihad* lainnya yang sangat penting untuk dipahami.

Para pihak harus melaksanakan akad-akadnya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Oleh karenanya kiranya bank syariah dapat memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya di dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat diaktualisasikan dalam bentuk-bentuk akad pembiayaan yang berimbang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga semakin jelas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pertama, Penerapan kontrak pembiayaan berdasarkan perspektif *maqasid* syariah pada bank syariah belum teraktualisasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat secara substansial bank syariah dengan akad *tijarinya* lebih mengedepankan keuntungan. Bentuk-bentuk kontrak tersebut tertuang dalam bentuk standar akad yang pada penerapannya antara para pihak tidak mempunyai *bargaining position* yang sama. Makna dan fungsi pada asas-asas perjanjian hukum Islam harus dikedepankan di dalam membuat konsep akad pembiayaan bank syariah.

Kedua, Aktualisasi bank syariah di dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan dapat terimplementasikan dengan mengedepankan kontrak-kontrak yang berkeadilan dan berimbang. Dan upaya akad yang bersifat *tabarru* pada tatanan praktisnya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga signifikansi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat tidak begitu terlihat oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia. artinya masyarakat lebih percaya di dalam penyaluran zakat misalnya kepada lembaga pemberdayaan zakat dibandingkan kepada bank. Karena salah satu fungsi bank syariah yang bersifat *tabarru* adalah dengan menerima zakat dan memberdayakannya.

5.2. Saran

Pertama, kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Majelis Ulama Indonesia dan lembaga terkait lainnya seyogyanya membuat regulasi dengan pendekatan *maqasid* syariah. Agar hal tersebut teraktualisasi pada akad-akad pembiayaan bank syariah dengan mengedepankan aspek kemaslahatan para pihak. Sehingga standar kontrak dapat berbasis pilihan-pilihan para pihak

dan mempunyai *bargaining position* yang sama.

Kedua, kepada bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank pada umumnya, juga kepada praktisi notaris seyogyanya mengedepankan aspek akad yang bersifat *tabarru* untuk mengoptimalisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh karena bank syariah diberikan kewenangan untuk melakukan akad yang bersifat *tabarru* seperti menampung zakat dari wajib zakat dan menyalurkannya untuk *mustahik* zakat serta memberdayakan dana zakat tersebut dalam bentuk yang lebih bermanfaat seperti yang dilakukan lembaga-lembaga zakat. Dengan demikian bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penampung zakat namun dapat melakukan upaya-upaya pemberdayaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Afzalur Rahman. (1995). *Economic doktrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 3, terjemahan soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Ala'Eddin Khasofa. (2000). *Transactions in Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noorden.

Adiwarman A. Karim. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet ke-10, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Abulhasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali. (1992). *Reading In Islamic*

Economic Thought, Longman Malaysia; Selangor Darul Ehsan.

C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Fathurrahman Djamil. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2015). *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono Mardjono. (2000). *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Jakarta: Studio Press.

Hennie Van Groeuning, Zamir Iqbal. (2011). *Risk Analysis for Islamic Banking, Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Terjemahan Yulianti Abbas, Jakarta: Salemba empat.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ibnu al-Qayyim. (1955). *I'lam al-Muwaqi'in an Rabbi Al-Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr.

M. Cholil Nafis. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: UI Press.

Mukhtar. (2010). *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- Penelitian Kualitatif lapangan dan Perpustakaan*, Cet ke-3, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Morris. L. Cohen & Kent C. Olson. (1992). *Legal Research*. st. Paul, Minn: West Publishing Company.
- M. Amin. (2013). *Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk*, Jurnal halal LPPOM MUI, No. 104 November-Desember.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Cet ke-9, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rachmad Hidayat dkk. (2015). *Effect of Service Quality, Customers Trust and Customers Religious Commitment on Customer Satisfaction and Loyalty of Islamic bank in East Java*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol VII (2), Faculty Syariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University.
- Rahman. (2004). *Developing Customer Oriented Service a Case Study*, *Managing Service Quality*, Vol. 14 No. 5.
- Richard K. Neumann, Jr. (2001). *Legal Reasoning and Legal Writing (structure, and style)*, New York: Aspen Law & Business.
- Robert Watt. (2001). *Concise Legal Research*, 4th ed., NSW: The Federation Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1999) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sutan Remy Syahdeini. (2010). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet ke-III, Bandung: Alfabeta.
- Taryana Soenandar. (2004). *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan penyelesaian Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

**PERSEPSI MAHASISWA DAN DOSEN AKUNTANSI
TERHADAP PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK
DAN KEUANGAN (SIKAD) UNIVERSITAS MATHLA'UL
ANWAR BANTEN**

Verliani Dasmaran

Fakultas Ekonomi, Universitas Mathla'ul Anwar, Banten

Email: eeytea@gmail.com

ABSTRACT

Academic Information Systems and Finance SIAKAD UNMA been in force since mid-2013 is intended to facilitate students and faculty, in the implementation of teaching and learning activities that were previously done manually. The purpose of this study to find out how students' perceptions and how Accounting lecturer perceptions of Economics faculty, Mathlaul Anwar University to SIAKAD Application. The sample was 26 students study consisted of four forces and the entire faculty of accounting courses totaling 28 to 54 research samples. Results prove the perception of students and lecturers of the SIAKAD good perception or level 2 is still under very great meaning is nice but not the maximum was about 72.5% must still be raised 27.5% more to maximum results. To improve students' perceptions and lecturers perceptions of Accounting Department of Economics faculty on the application of SIAKAD be added insights related to how the implementation SIAKAD thoroughly and intensively so that all students and faculty no longer who do not understand or do not understand the application of the system either with workshops, IHT(In House Training) or the installation pamphlet , Benner or other props to facilitate the understanding SIAKAD.

Key Words: Students Perceptions, Lecturers Perceptions, Application of SIAKAD

ABSTRAK

Sistem Informasi Akademik dan Keuangan SIAKAD UNMA diberlakukan sejak pertengahan 2013 ini ditujukan untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam implementasi kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa dan bagaimana persepsi dosen Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas mathlaul Anwar terhadap Penerapan SIKAD. Yang menjadi sampel penelitian adalah 26 mahasiswa terdiri dari 4 angkatan dan seluruh dosen program studi akuntansi yang berjumlah 28 sampel penelitian menjadi 54. Hasil Penelitian membuktikan persepsi mahasiswa dan persepsi Dosen terhadap SIAKAD bagus atau level 2 masih dibawah sangat bagus artinya sudah bagus tetapi belum maksimum masih sekitar 72,5 % masih harus ditingkatkan 27,5% lagi untu hasil yang maksimum. Untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan persepsi dosen program studi akuntansi tentang penerapan SIAKAD harus ditambah wawasan terkait bagaimana implementasi SIAKAD secara menyeluruh dan intensif agar semua mahasiswa dan dosen tidak ada lagi yang tidak mengerti atau tidak paham tentang penerapan sistem baik dengan workshop, IHT atau dengan pemasangan pamplet, benner atau alat peraga lain untuk mempermudah pemahaman SIAKAD.

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Persepsi dosen, Penerapan SIAKAD

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Universitas Mathlaul Anwar Banten (UNMA) terintegrasi menjadi universitas mulai tahun 2001 yang semula dari beberapa sekolah tinggi. Sekarang UNMA terdiri dari 10 fakultas dan 21 program studi dan memiliki mahasiswa sekitar 8000. Pada awal berdiri UNMA melayani mahasiswa dengan sistem manual. Komputer hanya sebagai alat bantu, belum menggunakan sistem yang terintegrasi dari mulai akademik, keuangan dan kemahasiswaan. Tentu hal ini menjadi masalah tersendiri bagi karyawan atau staf, bagi dosen bagi mahasiswa dan semua pihak yang terlibat dalam lingkup kinerja universitas Mathlaul Anwar dan efeknya menjadi fatal ketika pelaporan ke DIKTI menjadi terlambat, hal itu yang melandasi penerapan sistem yang mengintegrasikan semua hal baik akademik, keuangan dan mahasiswa menjadi informasi yang cepat dan akurat.

Maka dibentuklah PUSKOM (Pusat Komputer) yang mengelola Sistem Informasi Akademik dan Keuangan. Penerapan Sistem Informasi Akademik dan keuangan (SIKAD) di Universitas Mathlau'ul Anwar Banten (UNMA) mulai diaktifkan tahun 2014 dan mulai difungsikan secara sentral baru tahun 2015 sehingga baru berjalan secara menyeluruh 2 tahun terakhir. SIKAD bertujuan untuk mempermudah akses akademik dan akses keuangan sehingga mempercepat pelaporan PDPT-Dikti yang harus selesai di setiap akhir semester, begitu pula dengan keuangan SIKAD mempermudah informasi keuangan bagi mahasiswa dan mempercepat proses pelaporan pertanggung jawaban keuangan UNMA yang harus segera dilaporkan setiap akhir tahun akademik.

Program studi akuntansi sebagai bagian dari Fakultas Ekonomi memiliki mahasiswa 256 orang dari seluruh semester dan memiliki dosen tetap

program studi 7 orang, dosen tetap diluar Program Studi 10 orang serta dosen tidak tetap 11 orang. Baik dosen dan mahasiswa berhubungan dengan SIKAD dalam proses akademik mulai dari pengisian KRS, perwalian dalam mengontrak matakuliah, penentuan absen mahasiswa, absen dosen, beserta nilai di setiap semester selain itu juga sistem ini dapat membantu dosen dalam menerbitkan bahan ajar atau modul serta mempublikasikan jurnal dan penelitian.

Penelitian ini merupakan deskriptif *exploratory* untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen dan persepsi mahasiswa tentang penerapan SIKAD di lingkungan program studi akuntansi sehingga semua kemungkinan dari sistem bisa diketahui baik dari keuntungan dari penerapan *system* ataupun kekurangan-kekurangan dari sistem tersebut dan diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi semua pihak di lingkungan UNMA.

Berdasarkan pengamatan peneliti, *software* yang digunakan adalah *software Php dan MYSQL* yang banyak diterapkan di tempat lain dan sudah terbukti dapat membantu proses pembelajaran, dengan jaringan internet yang memadai *hardware* dan *software* yang tersedia seharusnya dapat memudahkan dan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran dan administrasi lainnya untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan penelitian secara kualitatif *eksploratory* untuk melihat hal-hal apa saja yang menjadi hambatan terhadap penerapan SIKAD pada mahasiswa dan dosen di lingkungan Program Studi Akuntansi UNMA.

Masalah penelitian yang diusung penulis yaitu bagaimana persepsi mahasiswa dan dosen terhadap penerapan Sistem Akademik dan Keuangan (SIKAD) UNMA sehingga kegiatan akademik dan keuangan di Universitas Mathlaul Anwar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh persepsi mahasiswa dan persepsi dosen tentang SIAKAD UNMA sehingga masalah dan hambatan yang terjadi di mahasiswa mengenai SIAKAD akan tertangani dengan cepat

2. KERANGKA TEORI

Dalam buku Akuntansi Keprilakuan I, Wayan Suartana (2010) menyebutkan bahwa akuntansi keprilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keprilakuan dari organisasi dimana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Persepsi manusia merupakan bagian dari perilaku manusia yang dihubungkan dengan sistem yang berlaku.

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu genetika, sikap, norma *social* dan *control* perilaku pribadi. Sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu, sedangkan norma *social* yaitu

pengaruh tekanan social, sedangkan *control* perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan perilaku.

Banyak pengertian persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, masing-masing ahli memaknai sesuai disiplin keilmuannya. Konsep mengenai persepsi itu sendiri seyogianya telah lama dikembangkan dalam berbagai teori psikologi. dan suatu teori khusus mengenai persepsi yang cukup berpengaruh adalah teori atribusi.

Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi formalnya, atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri.

Sementara menurut Weiner (Weiner, 1980, 1992), "*attribution theory is probably the most influential contemporary theory with implications for academic motivation.*" Artinya Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia menekankan gagasan bahwa peserta didik sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa baik tentang diri mereka sendiri.

Menurut teori atribusi, keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat dianalisis dalam tiga karakteristik, yakni :

- a. Penyebab keberhasilan atau kegagalan mungkin internal atau eksternal. Artinya, kita mungkin berhasil atau gagal karena faktor-faktor yang kami percaya memiliki asal usul mereka di dalam diri kita atau karena faktor yang berasal di lingkungan kita.
- b. Penyebab keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat berupa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

stabil atau tidak stabil. Maksudnya, jika kita percaya penyebab stabil maka hasilnya mungkin akan sama jika melakukan perilaku yang sama pada kesempatan lain.

- c. Penyebab keberhasilan atau kegagalan dapat berupa dikontrol atau tidak terkendali. Faktor terkendali adalah salah satu yang kami yakin kami dapat mengubah diri kita sendiri jika kita ingin melakukannya. Adapun faktor tak terkendali adalah salah satu yang kita tidak percaya kita dengan mudah dapat mengubahnya.

Merupakan faktor internal yang dapat dikontrol, yakni kita dapat mengendalikan usaha dengan mencoba lebih keras. Demikian juga faktor eksternal dapat dikontrol, misalnya seseorang gagal dalam suatu lembaga pelatihan, namun dapat berhasil jika dapat mengambil pelatihan yang lebih mudah. Atau dapat disebut sebagai faktor tidak terkendali apabila kalkulus dianggap sulit karena bersifat abstrak, akan tetap abstrak, tidak akan terpengaruh terhadap apa yang kita lakukan.

Secara umum, ini berarti bahwa ketika peserta didik berhasil di tugas akademik, mereka cenderung ingin atribut keberhasilan ini untuk usaha mereka sendiri, tetapi ketika mereka gagal, mereka ingin atribut kegagalan mereka untuk faktor-faktor dimana mereka tidak memiliki kendali, seperti mengajarkan hal buruk atau bernasib buruk.

Menurut Weiner, faktor paling penting yang mempengaruhi atribusi ada empat faktor yakni antara lain :

- a. *Ability* yakni kemampuan, adalah faktor internal dan relative stabil dimana peserta didik tidak banyak latihan control langsung.
- b. *Task difficulty* yakni kesulitan tugas dan stabil merupakan faktor

eksternal yang sebagian besar di luar pembelajaran control.

- c. *Effort* yakni upaya, adalah faktor internal dan tidak stabil dimana peserta didik dapat latihan banyak *control*.
- d. *Luck* yakni faktor eksternal dan tidak stabil dimana peserta didik latihan *control* sangat kecil.

Sedangkan pengertian persepsi Menurut Robbins (2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Menurut Philip Kotler (2009): Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakarakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. faktor eksternal berupa lingkungan. kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi.

Dalam buku Mulyana (2000) John R.Wenburg dan William W. Wilmot : persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Rudolph. F. Verderber mendefinisikan persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Sedangkan J. Cohen mengemukakan persepsi adalah sebagai interpretasi bermakna atas

sensasi sebagai representatif objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang diluar sana.

Rakhmat dalam psikologi komunikasi mengemukakan, persepsi merupakan bagian dari komunikasi intra personal. Menurutnya pengolahan informasi komunikasi intra personal meliputi, sensasi, persepsi memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli. Persepsi ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru, dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi.

Proses pembentukan persepsi diawali dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia (*sensory receptor*) sebagai bentuk *sensation*. Sejumlah besar *sensation* yang diperoleh dari proses pertama diatas kemudian diseleksi dan diterima. Fungsi penyaringan ini dijalankan oleh faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap.

Sensation yang diperoleh dari hasil penyaringan pada tahap kedua itu merupakan input bagi tahap ketiga, tahap pengorganisasian *sensation*. Dari tahap ini akan diperoleh *sensation* yang merupakan satu kesatuan yang lebih teratur dibandingkan dengan *sensation* yang sebelumnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Vincent (Manajemen Bisnis Total, 1997, hal 35):

- a. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
- b. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.

- c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Pada prosesnya persepsi menurut Walgito (2010) mulai dari masuknya stimulus oleh alat indera, stimulus yang diungkap panca indera diteruskan ke otak menjadi individu sadar sehingga terjadi persepsi dan individu bereaksi mengubah prilakunya.

Persepsi adalah proses dimana individu dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. Ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang . Persepsi Seseorang, Membuat penilaian tentang individu lain. Penerapan konsep persepsi yang paling relevan dengan perilaku organisasi adalah persepsi seorang individu yang dibuat tentang individu lainnya

Terjadinya persepsi dilandasi adanya stimulus yang masuk melahirkan cara pandang yang dapat diterapkan dalam aktivitas. Dalam penelitian ini lebih focus pada persepsi mahasiswa dan dosen tentang SIAKAD UNMA menjadikan stimulus bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan prosedur

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

akademik yang lebih efektif dan efisien sehingga dari persepsi ini melahirkan suatu kebijakan yang tepat mengenai bagaimana keberlanjutan SIAKAD UNMA dengan satu aplikasi tepat bisa memenuhi apa yang dibutuhkan semua pihak yang terlibat dalam organisasi universitas.

SIAKAD menurut buku panduan teknis SIAKAD (*Manual book SIAKAD*) menerangkan suatu sistem terpadu antara akademik, keuangan dan kemahasiswaan yang menggambarkan seluruh aktivitas dalam periode pembelajaran. SIAKAD termasuk kedalam sistem informasi yang membutuhkan input olahan yang bersumber dari mahasiswa, dosen dan tenaga non kependidikan yang diproses sehingga menghasilkan informasi yang akurat mengenai data akademik, keuangan kemahasiswaan serta seluruh informasi dosen dan tenaga non kependidikan secara, efektif dan efisien.

Penentuan Sistem Informasi Akuntansi Dalam buku Akuntansi keprilakuan Iwayan Suartana, menjelaskan kritikan terhadap penelitian kontinjensi lebih banyak diarahkan dalam desain rerangka kontinjensi, terutama pada aspek metode pengujian. Drazin dan Van de Ven (1985) mengusulkan tiga pendekatan penting dalam penelitian kontinjensi, meliputi : seleksi, interaksi dan sistem. Kenyataannya bahwa dalam pendekatan seleksi dan interaksi memunculkan sejumlah kelemahan baik dalam konsep maupun konsekuensi hasil, arah metode pendekatan kemudian difokuskan terhadap pendekatan sistem.

Menurut Gordon. B. Davis (1991: 91) sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi pengelola data tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.

Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik

data dan teknologi. Dalam sistem informasi tidak hanya pada pengguna teknologi dan informasi tetapi juga bagaimana cara orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnis, sistem informasi dapat dikategorikan kedalam empat bagian yaitu

1. Sistem informasi Manajemen
2. Sistem Mendukung Keputusan
3. Sistem informasi Eksekutif
4. Sistem informasi pemrosesan transaksi

Dalam artikelsiana.com menyebutkan Fungsi Sistem Informasi :

- Untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna, tanpa dengan prantara sistem informasi.
- Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem
- Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi
- Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi
- Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi
- Mengembangkan proses perencanaan yang efektif

Komponen Sistem Informasi (SI)

Komponen-komponen dari sistem informasi adalah sebagai berikut:

- a. *Komponen input* adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi
- b. *Komponen model* adalah kombinasi prosedur, logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah di tentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
- c. *Komponen output* adalah hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk

- semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
- d. Komponen teknologi adalah alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output dan memantau pengendalian sistem.
 - e. Komponen basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan *software database*.
 - f. Komponen kontrol adalah komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi.

Ciri-Ciri Sistem Informasi:

- a. Baru, adalah informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima
- b. Tambahan, adalah informasi dapat diperbaharui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada.
- c. Kolektif, adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya.
- d. Penegas, adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada

SIKAD merupakan bagian dari SIA (Sistem Informasi Akuntansi) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang memiliki satu tujuan dalam UNMA yaitu untuk memberikan informasi yang akurat dalam menunjang seluruh kegiatan lembaga dan menjadi dasar dalam pembuatan keputusan. Tanpa ada sistem yang saling terhubung, akan sulit bagi suatu organisasi atau lembaga untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar efektif. Disinilah kemudian SIA berperan sebagai sistem manajemen yang efektif.

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari lima komponen yang saling terhubung yaitu:

- a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dalam melaksanakan berbagai fungsi
- b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatis yang melibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi
- c. Data tentang proses bisnis organisasi.
- d. Software yang digunakan untuk memproses data organisasi
- e. Infrastruktur teknologi informasi

Dengan kelima komponen ini, akan memungkinkan SIA dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk memenuhi fungsi pentingnya, di antaranya:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut, agar para manajemen, para pegawai, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.
- b. Mengubah data menjadi informasi. Ini merupakan fungsi vital dari SIA. Ketika data menjadi informasi, maka informasi tersebut akan sangat bermanfaat baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.
- c. Fungsi yang ketiga dari SIA adalah tersedianya pengendalian. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam ranah organisasi yang lingkungannya besar seperti perusahaan, terjadinya *fraud* atau kecurangan bukanlah hal yang langka. Dengan adanya SIA, perusahaan akan mampu untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

Ketika fungsi SIA telah berjalan dengan maksimal sesuatu dengan fungsi diatas, maka manajemen suatu perusahaan atau lembaga organisasi juga akan ikut maksimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *exploratory* yang menitik beratkan pada kemampuan mengeksplor logika berpikir responden, memilih antara rumusan masalah, tujuan teknik, dan paradigma atau konsep berpikir untuk mengetahui makna dari suatu fenomena.

Populasi penelitian adalah seluruh dosen dan mahasiswa yang sudah disebutkan diatas yaitu seluruh mahasiswa 256 mahasiswa dan 28 dosen sehingga seluruh populasi 284, untuk sampel penelitian penulis membagi menjadi 55 orang terdiri dari 28 orang dosen dikarenakan terbatasnya jumlah dosen maka seluruh dosen dijadikan sampel dan untuk mahasiswa penulis mengambil 10% dari 256 yaitu 25,6 dibulatkan menjadi 26.

Tujuan pendekatan kualitatif antara lain mencari bentuk pengetahuan baru, menjelaskan secara rinci dan mendalam objek studi, menemukan metode untuk menyelesaikan masalah, dan mencari bentuk-bentuk aplikasi praktis. Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Moleong (2002:3),

pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang diperoleh berupa gambaran umum bagaimana pemahaman mahasiswa Akuntansi terhadap sistem yang baru berlaku di UNMA dan bagaimana Pemahaman dosen tentang SIAKAD yang berlaku di UNMA karna mahasiswa dan Dosen merupakan *user* bagi sistem tersebut dan diharapkan sistem tersebut membantu dan mempermudah *user* atau dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Kegiatan belajar mengajar di program studi Akuntansi Data tersebut diorganisir dan didokumentasikan oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data primer merupakan data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner langsung terhadap 28 dosen pengguna SIAKAD dan 26 mahasiswa Akuntansi yang dipilih secara random sebagai populasi. Yang menjadi operasionalisasi variable tergambar pada gambar dibawah ini

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi variable	Indikator	item	skala
Persepsi mahasiswa dan Dosen Program Studi Akuntansi	persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi,	1. Kemudahan Akses	1,2	Ordina
		2. Kemudahan Menu	3,4	Ordinal
		3. Tampilan Program Aplikasi (User interface)	5,6 7,8	Ordinal Ordinal

sehingga individu tersebut memperoleh makna. Robbins (2003: 97)	4. Keamanan dalam mengakses sistem	9,10	Ordinal
	5. Kecepatan dalam menyampaikan informasi	11,12	Ordinal
	6. Ketepatan hasil informasi	13,14	Ordinal
	7. Kemudahan tombol Aplikasi	15,16	Ordinal
	8. Kelengkapan Dalam Hasil Informasi		

4. PEMBAHASAN

Sebelum menyebarkan kuesioner penulis mengamati mahasiswa dan dosen yang menggunakan SIAKA, jika dosen menggunakan SIAKAD dalam menginput nilai mahasiswa dan penerbitan *e- journal* serta *e-book* yang digunakan dalam lingkungan program studi, sedangkan mahasiswa mulai sibuk dengan SIAKAD pada waktu pengisian KRS, Pengumuman Nilai dan waktu lain. Setiap awal semester penulis masih banyak melihat mahasiswa yang masih mengantri di kantor Puskom

untuk pengisian KRS hal ini membuat ketidak efektifan dan ketidak nyamanan bagi mahasiswa dan puskom sebagai pengelola SIAKAD. Begitu pula dengan dosen seberapa besar pemahaman dosen terhadap SIAKAD sehingga semua aktivitas dosen lebih terfasilitasi dengan SIAKAD.

Teknik pengolaha data hasil kuesioner diawali dengan penentuan skor ideal bagi setiap item dalam indikator-indikator penelitian dimana skor ideal memiliki bobot 5 (skala Likert). Sebaran hasil olahan data tergambar dalam table berikut

Table 4.1 Skor Ideal dan Aktual Persepsi Mahasiswa

Item Pernyataan	Skor ideal	Skor Aktual	%
Kemudahan akses	260	224	86,1
Pemahaman Menu	260	170	65,8
Tampilan Program	260	210	80,7
Keamanan Dalam mengakses system	260	230	88,4
Kecepatan dalam menyampaikan Informasi	260	140	53,8
Ketepatan hasil informasi	260	215	82,6
Kemudahan tombol aplikasi	260	180	69,2
Kelengkapan dalam hasil informasi	260	220	84,6

Table 4.2 Skor Ideal dan Aktual Persepsi Dosen

Item Pernyataan	Skor ideal	Skor Aktual	%
Kemudahan akses	280	220	78,5
Pemahaman Menu	280	180	64,2
Tampilan Program	280	215	76,7

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Keamanan Dalam mengakses system	280	240	85,7
Kecepatan dalam menyampaikan Informasi	280	221	78,9
Ketepatan hasil informasi	280	265	94,6
Kemudahan tombol aplikasi	280	220	78,5
Kelengkapan dalam hasil informasi	280	250	89,2

Table 4.3 Skor Ideal dan Aktual Persepsi Dosen dan Mahasiswa

Variabel Penelitian	Skor ideal	Skor Aktual	%
Persepsi Mahasiswa	2080	1589	76,3
Persepsi Dosen	2240	1811	80,8

Table 4.4 Interpretasi Persepsi Mahasiswa dan Dosen

Persentasi	Kriteria
0 – 20 %	Tidak baik
21 – 40%	Kurang Baik
41 – 60%	Cukup
61- 80%	Baik
81 – 100 %	Sangat Baik

Berdasarkan olahan data di atas maka hasil penelitian dengan sebaran kuesioner dan wawancara penulis akan membahas kedalam beberapa indikator dan hasilnya mengenai persepsi Mahasiswa dan dosen.

- Kemudahan Akses**, skor ideal kemudahan akses adalah 260 untuk persepsi mahasiswa dan 280 untuk persepsi dosen. Sedangkan skor *actual* dalam persepsi mahasiswa 224 (86,1%) hal ini berarti mahasiswa

merasa sangat baik atau sangat mudah untuk mengakses SIAKAD sesuai table 4.4. Dan untuk persepsi dosen rata-rata skor aktual 220 (78,5%) ini pun memiliki arti bahwa dosen merasa mudah untuk akses kedalam SIAKAD, hal ini ditunjang dengan fasilitas internet yang disediakan lembaga untuk mengakses SIAKAD begitu pula diluar kampus semakin mudah dengan fasilitas *gadget* yang dimiliki

mahasiswa dan dosen secara personal.

- Pemahaman menu**, skor ideal pemahaman menu 260 untuk persepsi

mahasiswa (65%) ini memiliki skor terendah. Hal ini membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa yang menggunakan aplikasi Sistem SIAKAD dengan pihak lain atau meminta bantuan orang lain baik itu teman atau pihak puskom karena kesulitan dalam memahami menu. Dengan demikian ini harus lebih diperhatikan oleh pihak lembaga agar memberikan informasi detail baik dalam forum resmi ataupun tidak resmi kepada mahasiswa agar semester berikutnya pemahaman mahasiswa lebih maksimum. Dan skor ideal untuk persepsi dosen tentang pemahaman menu 180 (64,2%). Sama halnya dengan pemahaman menu bagi dosen menjadi skor terendah dampak dari dosen yang sibuk dan tidak ikut

- dalam sosialisasi pada saat peluncuran SIAKAD. Selain itu bagi dosen tidak tetap kurang begitu peduli karena untuk masuk aplikasi sering meminta bantuan staf atau tenaga non kependidikan yang ada di fakultas. Ini pun menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi lembaga bahwasanya dosen tidak tetap sangat perlu diberikan *manual book* tentang bagaimana penggunaan SIAKAD atau di acara rapat dosen diselingi tentang bagaimana menggunakan SIAKAD.
- c. **Tampilan program Aplikasi (*user interface*)** skor aktualnya 210 (80,7%) untuk persepsi mahasiswa. Artinya mahasiswa sangat memahami tampilan program aplikasi yang ada di SIAKAD. Untuk skor aktual persepsi dosen 215 (76,7 %) artinya dosen paham tentang tampilan program aplikasi SIAKAD.
 - d. **Keamanan Dalam Mengakses sistem**, skor *actual* 230 (88,4%) untuk persepsi mahasiswa artinya mahasiswa merasa sangat aman dalam mengakses SIAKAD sedangkan persepsi dosen skor aktualnya 240 (85,7 %) artinya dosen merasa aman dalam mengakses SIAKAD. Hal ini menandakan selama satu tahun akademik dipakai belum pernah ada kejadian yang *negative* mengenai keamanan data yang diinput.
 - e. **Kecepatan dalam menyampaikan informasi**, untuk persepsi mahasiswa 225 (53,8%) artinya mahasiswa kurang merasakan adanya kecepatan informasi yang disampaikan SIAKAD. Dalam realisasi, kecepatan informasi banyak dipengaruhi oleh faktor lain tidak hanya dengan kesiapan sistem, jadi sebagai salah satu solusinya ketegasan lembaga dalam menentukan batas maksimum penginputan informasi sehingga secepatnya informasi tersebut dapat disampaikan. Sedangkan persepsi dosen tentang kecepatan menyampaikan informasi memiliki skor *actual* 221 (78,9%) artinya dosen menilai kecepatan SIAKAD dalam menyampaikan informasi sangat baik.
 - f. **Ketepatan hasil informasi**, untuk persepsi mahasiswa skor aktual 215 (82,6%), artinya mahasiswa memiliki persepsi bahwa SIAKAD memberikan informasi yang sangat tepat. Sedangkan persepsi dosen skor aktual 265 (94,6%) artinya dosen memiliki persepsi bahwa informasi dari SIAKAD sangat tepat.
 - g. **Kemudahan tombol Aplikasi**, skor aktual persepsi mahasiswa 180 (69,2%) artinya mahasiswa berpersepsi bahwa tombol aplikasi SIAKAD mudah. Sedangkan persepsi dosen memiliki skor *actual* 220 (78,5%) artinya dosen beranggapan cukup mengetahui kemudahan dari tombol Aplikasi SIAKAD. Item ini merupakan nilai terendah ke dua setelah pemahan menu, itu sangat rasional bila tingkat pemahaman mahasiswa dan dosen kurang maka tombol aplikasi pun pasti kurang dipahami sehingga jika ditingkatkan sosialisasi SIAKAD lebih intens maka 2 item dari persepsi ini akan meningkat dengan signifikan.
 - h. **Kelengkapan hasil Informasi**, persepsi mahasiswa skor aktualnya 220 (84,6 %) artinya mahasiswa mengetahui sangat baik kelengkapan hasil informasi dan untuk persepsi dosen memiliki skor aktual 250 (89,2 %) artinya dosen memahami kelengkapan informasi sangat baik semua hal yang ada di SIAKAD.
 - i. Bila dilihat dari variable **persepsi mahasiswa** Akuntansi terhadap Penerapan SIAKAD UNMA maka

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

skor idealnya 2080, sedangkan skor aktualnya 1589 sekitar 76,3 % artinya secara keseluruhan persepsi mahasiswa terhadap penerapan SIAKAD baik. Sedangkan untuk **persepsi dosen** nilai idealnya 2240 dan skor aktualnya 1811 (80,8%) artinya persepsi dosen terhadap penerapan SIAKAD sudah sangat baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa dan dosen memiliki persepsi yang bagus terhadap SIAKAD UNMA yang diberlakukan oleh Universitas Mathloul Anwar, tetapi hampir semua jawaban belum ada yang memiliki nilai maksimum artinya semua indikator masih berkisar di kategori baik atau di level kedua. Terlihat pada item pemahaman menu yang memiliki skor terendah dan kemudahan tombol aplikasi ini disebabkan mahasiswa masih belum mengenal secara keseluruhan sistem SIAKAD. Mereka hanya mengenal sistem seperlunya seperti pengisian KRS, dan melihat nilai. Sedangkan menu-menu yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan proses pengisian KRS tidak *dieksplor* lebih jauh misalnya, *journal (e-journal)*, *E-book*, dan lainnya kadang mereka tidak begitu peduli atau karna ketidaktahuan mahasiswa.

Sedangkan dilihat dari persepsi dosen ada indikator pemahaman menu dan kemudahan tombol aplikasi menjadi *point* terendah dibandingkan dengan indikator indikator yang lain hal ini diakibatkan dari pengetahuan dosen terhadap SIAKAD yang masih harus ditingkatkan karna masih banyak dosen kesulitan pada saat mau mencetak ataupun menginput data akibat kurangnya sosialisasi terhadap bagaimana penggunaan tombol-tombol dalam SIAKAD. Meskipun demikian

tidak mengurangi semangat dosen dan mahasiswa untuk mengenal lebih jauh SIAKAD UNMA agar tercipta sistem pembelajaran yang kondusif.

Saran

Bila dilihat dari beberapa indikator yang diajukan dalam variable persepsi mahasiswa dan persepsi dosen terhadap penggunaan SIAKAD UNMA belum mencapai nilai yang maksimum berarti masih harus ada peningkatan terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa dan dosen program studi Akuntansi maka dengan begitu penulis menyarankan:

1. Di buat acara *workshop* atau *in house training (IHT)* tentang penggunaan aplikasi SIAKAD dikalangan dosen mulai dari pengenalan *user name*, tampilan menu, fungsi tombol dan aplikasi lain yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dalam kegiatan belajar mengajar sehingga semua fungsi sistem dapat di rasakan oleh dosen dan dosen dapat mendapatkan informasi yang komplit.
2. Pengenalan SIAKAD lebih mendalam kepada mahasiswa setiap angkatan terutama pada mahasiwa baru dibekali dengan praktek langsung penggunaan SIAKAD UNMA pada saat acara pengenalan kampus, dan dengan pemasangan pamflet atau *banner* bagaimana cara penggunaan SIAKAD beserta batas waktu input data SIAKAD seperti jadwal KRS, Nilai dan yang lainnya sehingga semua mahasiwa merasa mudah dan lebih paham dalam implementasi SIAKAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Predana MediaGroup.

- Debby ratna Daniel, erlina sudaryati,
Persepsi Mahasiswa
- Gaspersz, Vincent. (1997). *Manajemen Bisnis Total Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PT Gramedia.
- Gordon B. Davis. (1991). *Management Information System*. Mc graw-Hill Ryerson. limited.
- Husein Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I wayan suartana. (2010). *Akuntansi keperilakuan*. Jogjakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riduan. (2012). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- _____.(2012). *Pengantar Statistik untuk Penelitian*.Bandung: Alfabeta
- _____.2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta
- Stephen P.Robbins. (2003). *Organization Behavior*. Practice Hall
- Sugiono.(2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Philip Kothler. (2013). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Walgito. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jogjakarta: CV Andi Offset

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

KEMAMPUAN PELAYANAN DAN KOMITMEN KEPADA PASIEN TERHADAP KEPUASAN PASIEN; STUDI PADA RUMAH SAKIT SWASTA

Yohana Elisabeth Lein*), Widaningsih

Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Esa Unggul, Jakarta

**Email: yohana.lein@gmail.com*

ABSTRACT

Recently, the society's demand for healthcare quality in radiology division increases, requiring any radiographer to work professionally. Therefore, service ability and commitment of every radiographer should get special attention. One benefit obtained by the hospital prioritizing patient satisfaction is the increased number of people coming to it to have treatment because they want to receive satisfactory service like what they hear. This research aimed to analyze the effect of service ability and commitment to patient on patient satisfaction. The research design in this research was causal research. The method of analysis used was SEM (Structural Equation Modeling) with radiological patients in private hospital as the sample. The data was collected using questionnaire system; from the data meeting the criteria 180 radiological patient respondents were obtained as the sample of research. Considering the result of analysis, it can be found that service ability affects significantly the commitment to patient, commitment to patient affects patient satisfaction and service ability does not affect patient satisfaction.

Key Words: Service Ability, Commitment to Patient, Patient Satisfaction.

ABSTRAK

Tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap mutu pelayanan kesehatan bidang radiologi yang semakin meningkat, mengharuskan setiap radiografer untuk bekerja secara profesional, maka dari itu kemampuan dan komitmen pelayanan dari setiap petugas radiografer perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh suatu rumah sakit yang mengutamakan kepuasan pasien yaitu bertambahnya jumlah orang yang berobat karena ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan seperti yang mereka dengar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan pelayanan dan komitmen kepada pasien terhadap kepuasan pasien. Desain penelitian ini adalah penelitian kausal. Metode analisa yang digunakan adalah metode SEM (Structural Equation Modeling) terhadap sampel pasien radiologi rumah sakit swasta. Pengumpulan data dengan sistem kuesioner dari data sesuai kriteria sehingga pada akhirnya terdapat 180 responden pasien radiologi yang digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa kemampuan pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen kepada pasien, komitmen kepada pasien memiliki pengaruh terhadap kepuasan pasien dan kemampuan pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pasien.

Kata Kunci : Kemampuan Pelayanan, Komitmen kepada Pasien, Kepuasan Pasien.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI No.44 tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan. Dalam upaya memberikan pelayanan yang bermutu maka setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien (UU RI No. 44/2009).

Tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap mutu pelayanan kesehatan bidang radiologi yang semakin meningkat, mengharuskan setiap radiografer untuk bekerja secara profesional, maka dari itu kemampuan dan komitmen pelayanan dari setiap petugas radiografer perlu mendapat perhatian khusus. Setiap rumah sakit yang mengemukakan kualitas layanan sebagai bagian dari jasa yang diberikan kepada pasiennya, akan cenderung menggunakan kepuasan konsumen menjadi salah satu indikator kesuksesan pelayanan yang diberikan. Manfaat yang tercipta oleh karena kepuasan konsumen diantaranya dapat membuat harmonis

hubungan antara penyedia jasa yaitu pihak rumah sakit dengan konsumen, menjadi dasar yang baik untuk penggunaan ulang jasa, dan akan terciptanya loyalitas konsumen, yang mana akan mengarah kepada pemberian rekomendasi *word of mouth* yang pada akhirnya dapat menguntungkan pihak penyedia jasa, yang mana dalam konteks penelitian ini adalah pihak rumah sakit Tjiptono (2006).

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, umumnya yang menjadi tolak ukur adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut Smith, *et al.* (1992) kemampuan karyawan dalam bekerja akan mempengaruhi kepuasan. Menurutnya setiap orang mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda, membawa keuntungan dan kerugian bagi mereka dalam mengoptimalkan performa yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan mereka. Menurut Chung dan Schneider (2002) sebagai *boundary spanners*, layanan karyawan kecil kemungkinannya untuk mengalami dual komitmen yaitu kepada organisasi maupun pelanggan. Menurut Siders, George dan Dharwadkar (2001) karena pelanggan merupakan bagian eksternal dari organisasi, sifat dan kekuatan dari komitmen karyawan terhadap pelanggan harus sangat relevan untuk memprediksi cakupan tujuan dan harapan pelanggan yang akan mereka coba untuk penuhi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alyssa, Gwenith, Janet dan James (2015) ditemukan bahwa sumber daya pribadi khususnya bersama-sama dengan tuntutan kerja dan sumber daya kerja berpengaruh terhadap kemampuan kerja, yang mana dapat mempengaruhi prestasi atau hasil kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara langsung maupun tidak langsung antara kemampuan kerja, etika rumah sakit, kepemimpinan terhadap komitmen

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

karyawan rumah sakit dan kepuasan pasien rumah sakit. Terdapat pengaruh tidak langsung antara kemampuan kerja, etika rumah sakit, dan kepemimpinan terhadap kepuasan pasien rumah sakit. Yuanqiong, Wenli dan Kin (2011) menemukan bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Vandenberghe, *et al.* (2007) yaitu *Affective commitment* kepada pelanggan berhubungan positif terhadap kualitas pelayanan. Ditemukan juga bahwa tidak ada pengaruh *normative commitment* terhadap kualitas pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Chen (2013) membuktikan bahwa karakteristik pegawai seperti usia, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan mempengaruhi *job attitude* dan *employee commitment* dalam bekerja. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi adalah kunci sukses karyawan, semakin termotivasi maka karyawan akan semakin berkomitmen terhadap organisasinya.

Penelitian terkait lainnya yaitu yang dilakukan oleh Tsoukatos dan Rand (2007) diperoleh hasil hubungan antara dimensi budaya dan kualitas pelayanan diduga bahwa harapan dari pelayanan dipengaruhi oleh profil budaya dan budaya menentukan pentingnya dimensi kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Peringkat dari hubungan antara kepuasan pelanggan dan dimensi kualitas pelayanan dan pentingnya dimensi kualitas pelayanan, diduga bahwa budaya juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terkait komitmen karyawan terhadap kepuasan pelanggan ditemukan juga hasil penelitian yang bertolak belakang dengan penelitian tersebut diatas yakni penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) yang menyatakan bahwa komitmen karyawan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Smith, *et al.* (1992) menyatakan bahwa

kemampuan karyawan dalam bekerja akan mempengaruhi kepuasan. Menurutnya setiap orang mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda, membawa keuntungan dan kerugian bagi mereka dalam mengoptimalkan performa yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan mereka. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Delcourt, *et al.* (2013) bahwa kemampuan emosional karyawan berpengaruh penting terhadap hasil pelayanan, seperti kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dengan mengukur persepsi pelanggan akan kemampuan emosional karyawan, dibanding persepsi karyawan atau pengamat, dengan menghubungkan sosial dan psikologi organisasi (yang merupakan konsep asli kemampuan emosional) dengan sumber pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan pelayanan dan komitmen kepada pasien terhadap kepuasa pasien di radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Kemampuan Pelayanan

Menurut Robbins (2006) kemampuan merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Sedangkan Davis (2002) mendefinisikan kemampuan sebagai karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimum fisik dan mental seseorang. Lebih lanjut Robbins (2006), mengatakan bahwa kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Sedangkan kemampuan fisik adalah

kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Menurut Gibson (1995) kemampuan adalah sifat hidup dipelajari, memungkinkan seseorang melakukan sesuatu baik bersifat mental maupun fisik, sedang keterampilan adalah kompetensi dengan pekerjaan. Dengan demikian kemampuan pegawai adalah salah satu sifat yang dapat dipelajari oleh setiap orang dalam organisasi yang menyangkut kapasitas yang sifatnya individual.

2.2 Komitmen kepada Pasien

Menurut Chung dan Schneider (2002) sebagai *boundary spanners*, layanan karyawan kecil kemungkinannya untuk mengalami dual komitmen yaitu kepada organisasi dan kepada pelanggan. Menurut Siders, George dan Dharwadkar (2001) karena pelanggan merupakan bagian eksternal dari organisasi, sifat dan kekuatan dari komitmen karyawan terhadap pelanggan harus sangat relevan untuk memprediksi cakupan tujuan dan harapan pelanggan yang akan mereka coba untuk penuhi. Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan komitmen sebagai “*an exchange partner believing that on going relationship with another is so important as to warrant maximum efforts at maintaining it; that is, the committed party believes the relationship is worth working on to ensure that it endures indefinitely*”.

2.3 Kepuasan Pasien

Menurut Kotler (2009), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja berada di atas persepsi konsumen, maka konsumen akan sangat puas dan demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang ada berada di bawah persepsi

konsumen, maka konsumen akan kecewa.

Menurut Marshall (1976), tujuh dimensi kepuasan, yaitu: (1) kepuasan umum, misalnya kesempurnaan perawatan medis yang diterima oleh pasien; (2) kualitas teknik, misalnya kamar praktik dokter memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan yang menyeluruh, diagnosa yang dibuat oleh dokter benar, ketika melakukan pemeriksaan, tenaga medis memeriksa dengan penuh ketelitian dan secara menyeluruh, kemampuan dokter yang merawat; (3) perilaku antar pribadi, misalnya dokter bersikap terlalu praktis terhadap pasien dan dokter memperlakukan pasien dengan ramah dan sopan; (4) komunikasi, misalnya dokter memberikan penjelasan yang akurat tentang hasil pemeriksaan dan dokter mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasien; (5) aspek keuangan, misalnya harga yang terjangkau untuk pelayanan yang diberikan dan prosedur administrasi yang mudah; (6) waktu bersama dokter, misalnya tenaga medis terlihat sabar dan teliti dalam mengambil tindakan dan dokter meluangkan banyak waktu untuk pasien; (7) akses dan kenyamanan, misalnya mempunyai akses yang mudah untuk bertemu dengan dokter sesuai kebutuhan medis dan mendapatkan pelayanan medis kapanpun dibutuhkan dengan mudah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kausalitas atau hubungan pengaruh. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah SEM atau *Structural Equation Modeling* yang dioperasikan Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan alat analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik analisa yang dipergunakan untuk menganalisis data

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

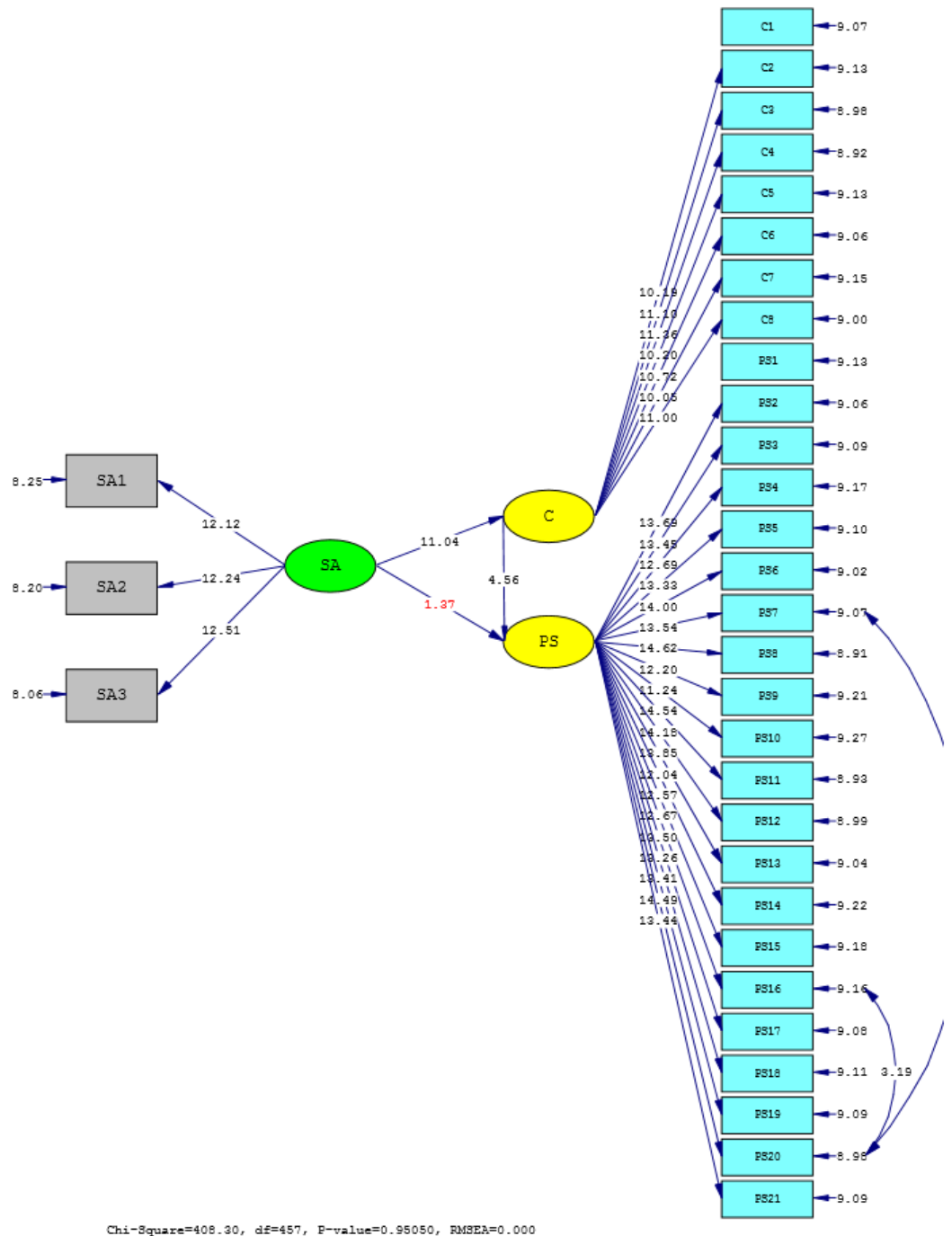
adalah analisis SEM (*Structural Equation Model*). Sampel penelitian adalah pasien rawat jalan yang melakukan pemeriksaan di unit Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang, Bekasi, Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan Wijanto (2008), maka jumlah sampel yang diambil adalah: minimal 5 responden untuk setiap variabel teramati. Jumlah sampel minimum yaitu $32 \times 5 = 160$ ditambah 10%antisipasi *margin of error* sehingga jumlah sampel pada penelitian ini menjadi 180 responden. Data kuesioner yang telah terkumpul kemudian dilakukan skala pengukuran Likert dengan skala 1-5. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei hingga Juni 2016 dengan menggunakan data primer.

Penelitian dimulai dengan uji *Pre-tes* yang dilakukan dengan dua cara yaitu: uji validitas dan uji reliabilitas. Kami mengukur variabel kemampuan pelayanan dari Gibson (1995) yang terdiri dari 1 dimensi dengan 3 pertanyaan, setelah dilakukan pre-tes diperoleh nilai KMO dan Anti Images Matrices diatas 0,5 sehingga 3 pertanyaan tersebut dapat digunakan. Selanjutnya pada dimensi komitmen

kepada pasien dari DM Powell, JD Mayer (2004) yang terdiri dari 2 dimensi dengan 8 pertanyaan, setelah dilakukan pre-tes dengan nilai KMO dan Anti Images Matrices diatas 0,5 maka 8 pertanyaan tersebut dapat digunakan. Pada dimensi kepuasan pasien dari Marshall mengacu kepada Ware, Snyder dan Wright (1976) yang terdiri dari 7 dimensi dengan 21 pertanyaan, setelah dilakukan pre-tes dengan nilai KMO dan Anti Images Matrices diatas 0,5 semua pertanyaan tersebut dapat digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini sudah diuji dalam validitas dan reliabilitas sehingga didapatkan hasil yang mempunyai *goodness of fit* yang baik dimana nilai *Chi Square* = 436,93, *Degree of Freedom* = 457, *ECVI* = 5,90, *AIC* = 1056,00, *CAIC* = 3296,88, *Critical N* = 218,23, *RMR* = 0,024, dan *PGFI* = 0,88. Hasil penelitian menunjukkan nilai *construct reliability* dari semua indikator diatas 0,70 dan nilai *variance extracted* dari semua indikator diatas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa semua dimensi telah memenuhi syarat reliabilitas yang baik. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan *diagram value* seperti pada gambar berikut:



Chi-Square=408,30 df=457, P-value=0.95050, RMSEA=0.000

Gambar
Path Diagram T-Value

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Nilai T-Value	Keterangan
H1	Kemampuan pelayanan yang baik akan meningkatkan komitmen kepada pasien	11,04	Data mendukung hipotesis
H2	Komitmen kepada pasien yang tinggi akan meningkatkan kepuasan pasien	4,56	Data mendukung hipotesis
H3	Kemampuan pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien	1,37	Data tidak mendukung hipotesis

Sumber: Hasil uji pada alat analisis data

4.1. Kemampuan Pelayanan Meningkatkan Komitmen kepada Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis pertama (H_1), ditemukan pengaruh antara kemampuan pelayanan sebesar 11,04 terhadap komitmen kepada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kepada pasien dipengaruhi oleh kemampuan pelayanan yang diberikan. Semakin baik dan tinggi kemampuan pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan komitmen kepada pasien di Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang.

Hasil penelitian ini semakin menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alyssa, Gwenith, Janet dan James (2015) dan Yusuf (2013) yang menyatakan bahwa kemampuan pelayanan berpengaruh positif terhadap komitmen kepada pasien, yang artinya semakin baik dan tinggi kemampuan pelayanan yang diberikan maka komitmen kepada pasien akan meningkat atau sebaliknya.

4.2. Komitmen kepada Pasien Meningkatkan Kepuasan Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis kedua (H_2), ditemukan pengaruh antara komitmen kepada pasien sebesar 4,56 terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien dipengaruhi oleh tingkat komitmen kepada pasien melalui pelayanan yang diterimanya. Semakin tinggi komitmen kepada pasien maka akan semakin meningkatkan kepuasan pasien di Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuanqiong, Wenli dan Kin (2011), Vandenberghe, *et al.* (2007), Lee dan Chen (2013), dan Tsukatos dan Rand (2007) yang mengatakan bahwa komitmen kepada pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien, yang artinya adalah semakin tinggi komitmen kepada pasien maka kepuasan pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yusuf (2013) yang menyatakan bahwa komitmen karyawan

tidak mempengaruhi kepuasan pasien atau bernilai negatif. Walaupun penelitian dilakukan di tempat yang sama yaitu rumah sakit namun dapat diperoleh hasil yang berbeda karena perbedaan tempat penelitian, jenis rumah sakit, tahun penelitian dan perbedaan karakteristik responden akan sangat mempengaruhi hasil penelitian.

4.3. Kemampuan Pelayanan Tidak Mempengaruhi Kepuasan Pasien

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3), ditemukan tidak ada pengaruh antara kemampuan pelayanan sebesar 1,37 terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien tidak dipengaruhi oleh kemampuan pelayanan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Smith, *et al.* (1992), Delcourt, *et al.* (2013), Hur, Moon dan Jung (2015) dan Solnet (2006) yang mengatakan bahwa kemampuan pelayanan memberikan dampak yang positif terhadap kepuasan pasien, yang artinya semakin tinggi kemampuan pelayanan yang didapatkan oleh pasien maka kepuasan pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya. Namun pada penelitian ini ditemukan hasil yang sebaliknya.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kemampuan pelayanan merupakan kapasitas individu untuk melayani pasien, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan sehingga akan bervariasi pelayanan yang dirasakan oleh pasien sehingga kemampuan pelayanan belum tentu dapat meningkatkan kepuasan pasien. Faktor seperti tempat pelaksanaan yang berbeda karena pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan di perusahaan, perhotelan dan bank, responden yang berbeda, situasi dan suasana yang

berbeda dengan penelitian terdahulu, bisa menjadi faktor penyebab di Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang ditemukan hasil yang berbeda yaitu kemampuan pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pasien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari Hasil dan Pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pelayanan mempengaruhi komitmen kepada pasien, sehingga dapat meningkatkan komitmen kepada pasien (hipotesis pertama didukung), yang artinya para petugas Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang sudah memberikan kemampuan pelayanan yang baik dan cenderung memiliki komitmen kepada pasien yang tinggi.
2. Hasil penelitian berikutnya adalah komitmen kepada pasien mempengaruhi kepuasan pasien, sehingga meningkatkan kepuasan pasien (hipotesis kedua didukung). Hasil tersebut menunjukkan bahwa petugas Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang mempunyai komitmen yang tinggi kepada pasien melalui pelayanan yang baik sesuai dengan yang keinginan pasien, maka pasien cenderung semakin puas.
3. Hasil penelitian hipotesis ketiga ditemukan bahwa kemampuan pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pasien (hipotesis tidak

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

didukung). Walaupun petugas Radiologi Siloam Hospitals Lippo Cikarang telah berhasil membuat pasien merasa puas dengan mempunyai komitmen yang tinggi kepada pasien melalui pelayananyang baik sesuai dengan yang keinginan pasien, tetapi cenderung pasien tidak puas dengan kemampuan pelayanan yang diterima. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya melihat kemampuan pelayanan, komitmen kepada pasien dan kepuasan pasien, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel

seperti kinerja karyawan, iklim dan budaya pelayanan, pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja karyawan, upah atau gaji karyawan, kepercayaan pasien, hingga loyalitas pasien. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup, diukur dengan menggunakan skala Likert dengan jumlah responden standar. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan studi kohort. Disarankan agar peneliti selanjutnya menambahkan jumlah responden, menggunakan juga teknik wawancara tatap muka agar memperoleh jawaban lebih mendalam dan masukan-masukan dari responden. Peneliti disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperluas kancah ilmu pengetahuan dengan hasil penemuan baru yang lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chung, B. G., & Schneider, B. (2002). Serving multiple masters: Role conflict *experienced* by service employees. *The Journal of Services Marketing*, 16, 70-88.
- Chung, Chieh Lie, Chih, Jen Chen (2013). The relationship between employee commitment and job attitude and its effect on service quality in the tourism industry. *American Journal of Industrial and Business Management*, 3, 196-208.
- Delcourt, Cecile, *et al.*, (2013). Effects of perceived employee emotional competence on customer satisfaction and loyalty: The mediating role of rapport. *Journal of Services Management*, vol. 24, No. 1, 5-24.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2003). *Multivariate Data Analysis* (5th Ed), Pearson Education, India.
- McGonagle, Alyssa K., *et al.*, (2015). Individual and work factors related to perceived work ability and labor force outcomes. *Journal of Applied Psychology*, vol. 100, No. 2, 376-398.
- Siders, M. A., George, G., & Dharwadkar, R. (2001). The relationship of internal and external commitment to objective job performance measures. *Academy of Management Journal*, 44, 570-579.
- Solnet, David (2006). Introducing employee social identification to customer satisfaction research: A hotel industry study. *Managing*

- Service Quality* vol. 16, No. 6, 575-594.
- Tsoukatos, Evangelos, Rand, Graham K. (2007). Cultural influence on service quality and customer satisfaction: evidence from Greek insurance. *Managing Service Quality*, vol. 17, No. 4, 467-485.
- Vandenberghe, Christian, *et al.*, (2007). An Examination of the Role of Perceived Support and employee commitment in Employee-Customer Encounters. *Journal of Applied Psychology*, vol. 92, No. 4, 1177-1187.
- Won, Moo Hur, Tae, Won Moon, Yeon, Sung Jung (2015). Customer response to employee emotional labor: the structural relationship between emotional labor, job satisfaction and customer satisfaction. *Journal of Services Marketing*, vol. 29, No. 1, 71-80.
- Yuanqiong He, Wenli Li, Kin Keung Lai (2011). Service Climate, Employee commitment and customer satisfaction: Evidence from the hospitality industry in China. *International Journal of Contemporary Hopspitality Management*, vol. 23, No. 5, 592-607.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PENGARUH KEPEMILIKAN PUBLIK,
PERSENTASE RETURN ON ASSETS DAN FINANCIAL
DISTRESS TERHADAP PERGANTIAN AUDITOR**

Iin Rosini *), Ardianti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

**Email:hafizh_iin@yahoo.com*

ABSTRACT

This study aimed to test effect of ownership public, the percentage of ROA and financial distress to the auditor switching. The analysis used was the logistic regression analysis. This type of research is classified in quantitative research. Data collection techniques with documentation techniques. The population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011 to 2015 as many as 143 companies. The Sample selection using purposive sampling method. The data sample get as many as 21 companies. The results showed that financial distress significant effect on auditor switching and in simultan Public Ownership, Percentage Return on Assets and Financial Distress significant effect on auditor switching. While out Public Ownership and Percentage Return on Assets non significant on auditor switching.

Key Words: Public Ownership, Percentage Return on Assets, Financial Distress, Auditor Switching

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan publik, persentase return on assets dan financial distress terhadap pergantian auditor. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik (logistic regression). Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 143 perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 21 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor dan secara simultan kepemilikan publik, persentase return on assets dan financial distress berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Sedangkan, untuk kepemilikan publik dan persentase return on assets tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Kata Kunci: Kepemilikan Publik, Persentase Return on Assets (ROA), Financial Distress, Pergantian Auditor, Auditor Switching.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perusahaan terbuka atau yang sering disebut dengan istilah perusahaan *go public* semakin banyak. Perusahaan *go public* wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Maharani dan Purnomosidhi (2012) dalam Ni Made Dewi Anggun Jayanti Ni Luh Sari Widhiyani (2012) mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi bagi pemegang saham, sehingga dengan dilakukannya audit, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi relevan dan *reliable* bagi pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Asimetri informasi dan *agency conflict* merupakan suatu hambatan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pembuatan keputusan akuntansi. Asimetri informasi berarti bahwa terjadi ketidakseimbangan jumlah informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dimana, manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki informasi internal mengenai prospek perusahaan di masa mendatang yang lebih banyak daripada para pemilik modal atau investor.

Agency conflict merupakan konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan diantara manajer (*agent*) dan para pemegang saham/ pemilik perusahaan/ investor (*principal*). Oleh karena adanya asimetri informasi dan *agency conflict*, diperlukan pihak ketiga diantara pihak-pihak yang berkepentingan, guna melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Pihak ketiga ini yang auditor, auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat obyektif dan independen dalam melakukan audit atas

laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dari laporan keuangan.

Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) juga semakin bertambah, dikarenakan perusahaan terbuka wajib menyusun laporan keuangan audit yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan perusahaan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Dengan semakin banyaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi, maka memberikan pilihan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (*auditor switching*). Oleh karena itu terjadi persaingan antar kantor akuntan publik untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan cara berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang auditor, maka perusahaan akan mengganti auditor yang dipandang lebih memiliki independensi dan kredibilitas yang tinggi.

Nasser *et al.* (2006) menganjurkan untuk dapat mempertahankan sikap obyektif auditor diperlukan rotasi wajib auditor, karena rotasi auditor dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien. Rotasi auditor adalah pergantian atau perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi (Nabila, 2011) dalam I Wayan Deva Widia Putra (2014).

Seiring dengan munculnya kasus kecurangan akuntansi pada perusahaan publik seperti *Enron* dan *Worldcom* di Amerika mengakibatkan banyak investor

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang dirugikan. Begitu pula kasus yang terjadi di Indonesia, PT. Kimia Farma, Tbk sempat tidak mendapatkan kepercayaan dari pemegang sahamnya sendiri yang disebabkan penyajian penjualan yang *overstated* dan tidak mampu dideteksi oleh KAP. Merespon kasus yang terjadi pada Enron dan Worldcom di Amerika, dengan menerbitkan Undang-Undang *Sarbanes-Oxley Act (SOX)* pada Juli 2002 untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. *SOX* mengatur antara lain mengenai pembatasan penggunaan jasa akuntan publik, yaitu maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pergantian KAP secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Perubahan yang dilakukan adalah pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik

dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2015, tentang praktik akuntan publik dalam pasal 11 ayat (1) bahwa “pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut”. Dan pasal 11 ayat (4) “Akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Keputusan Menteri Keuangan tersebut, diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi.

Menurut Febrianto 2009, (dalam Wijayani, 2011) pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary* (sukarela), maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan (*financial distress*), manajemen yang gagal, perubahan manajemen (*CEO*), Persentase ROA, kepemilikan publik dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, ukuran KAP, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya surat keputusan kementarian tersebut.

Salah satu faktor pemicu terjadinya pergantian auditor adalah kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami perusahaan. Hal ini terjadi

ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban *financial* nya dan terancam bangkrut. Pergantian auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas *financial*-nya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan *subyektif* dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP. Ni Made Dewi Anggun Jayanti dan Ni Luh Sari Widhiyani (2014) juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara *financial distress* dan keputusan perusahaan untuk berpindah KAP. Disisi lain Apriyeni Salim (2012) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak menjadi penyebab untuk mengganti KAP.

Salah satu tolok ukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang dapat menggambarkan reputasi klien secara menyeluruh adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat diwakili oleh *Return on Asset* (ROA) perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang telah digunakan (Dwi Sakti Prastyaningrum, 2013). Semakin besar ROA maka semakin baik pula efektifitas manajemen dalam memanfaatkan aktivitya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan penelitian guna mengetahui pengaruh perubahan ROA terhadap *auditor switching*.

Variabel kepemilikan publik menggambarkan seberapa besar jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan persentase struktur kepemilikan saham di suatu perusahaan kepemilikan saham juga merupakan faktor yang menyebabkan *auditor switching* yang dilihat dari sisi *corporate governance* (Ekka Apprillia, 2013). Dari ketiga variabel yang dipilih dalam penelitian ini dirasa mampu mewakili dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary*.

Dengan adanya peraturan mengenai pergantian auditor, diharapkan dapat meningkatkan independensi seorang auditor, dengan membatasi kemungkinan auditor memberikan jasa non-audit pada klien auditnya dan juga termasuk pembatasan atas penggunaan jasa KAP yang lama oleh klien.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Agency Theory

Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 (Jarita Inez Basuki, 2016). Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam suatu proses kontrak. Hubungan kontrak tersebut berupa pendelegasian wewenang dari *principal* sebagai pemilik perusahaan kepada *agent* sebagai pengelola sekaligus pelaksana perusahaan. *Principal* selalu ingin memperoleh keuntungan dari hasil operasi perusahaannya sehingga mempekerjakan *agent*, yang dinilai profesional untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. *Agent* akan mendapatkan insentif dari hasil kerjanya mengelola perusahaan hingga menghasilkan *return* bagi *principal*.

2.2. Stakeholder Theory

Stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Pemegang saham sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan. Pandangan ini di dasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan Chariri, 2007:409).

Menurut Ghazali dan Chariri (2007: 409), Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

2.3. Kepemilikan Publik

Menurut Maria Rio Rita dan Sartika (2011) “kepemilikan saham publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan.

$$\text{Rasio Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki masyarakat (publik)}}{\text{Total saham yang dimiliki perusahaan}} \times 100\%$$

2.4. Persentase Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) menurut Jarita Inez Basuki (2016) didefinisikan sebagai rentabilitas ekonomi yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa lalu, kemudian diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Menurut Damayanti dan Sudarma (2007) dalam Jarita Inez Basuki (2016) persentase perubahan ROA merupakan salah satu indikator keuangan perusahaan untuk melihat prospek bisnis perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai persentase perubahan ROA yang

Publik sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Putri dan Puspitasari dalam Maria Rio Rita dan Sartika, 2011). Sementara perusahaan perseroan (PT) yang memiliki saham perusahaan bersangkutan tidak dimasukkan dalam kategori publik.

Carey et al. (2000) dalam Ekka Aprillia (2013) menyatakan proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka timbul permintaan monitoring dan audit berkualitas. Guedhami et al. (2009) dalam Ekka Aprillia (2013) menemukan kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Kepemilikan saham oleh masyarakat publik akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang berkualitas.

Menurut Ekka Aprillia (2013), untuk mengukur seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dengan cara:

dihasilkan berarti semakin efektif pengelolaan asset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Alvin A. Arens. et .al (2014: 252), ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas, yang mengartikan bahwa kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas untuk membayar kewajiban-kewajiban, ekspansi usaha dan dividen sangat bergantung pada profitabilitasnya. Rasio profitabilitas yang paling banyak digunakan adalah rasio laba per saham. Tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas biasa merupakan pengukuran atas profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio-

rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas setiap rupiah aset dan ekuitas yang dimiliki perusahaan.

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas dianggap dapat diwakili oleh *return on asset* (ROA) perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Return on asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan

keuntungan dengan sejumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan atau merupakan pengukuran atas profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dalam tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas biasa (Alvin A. Arens et.al 2008: 233). Dengan mengetahui besar rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan secara efisien menggunakan aktiva-aktivanya dalam kegiatan usahanya. Semakin besar ROA maka semakin baik pula efektifitas manajemen dalam memanfaatkan aktiva. Persentase perubahan ROA dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perhitungan, yaitu: (Alvin A. Arens. et .al, 2014: 252).

$$\text{Earning Power of Total Investment (ROA)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

2.5. Financial Distress

Menurut Haryetti (2010), kebangkrutan juga diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas.

Financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* juga bisa didenifisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban *financial* yang telah jatuh tempo. Kesulitan keuangan jangka pendek bisa berkembang menjadi kesulitan tidak *solvable*, dan perusahaan bisa dilikuidasi atau direorganisasi. Hal ini dapat ditarik kesimpulan, salah satu indikator yang dipakai untuk mengetahui tingkat kebangkrutan perusahaan adalah indikator keuangan.

Menurut Ni Made Dewi Anggun Jayanti (2012) “klien yang mengalami

kesulitan keuangan lebih cenderung untuk mengganti KAP mereka dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih sehat dengan alasan bahwa mereka perlu menyewa kualitas auditor yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya untuk menarik kepercayaan investor dan menambah kepercayaan diri perusahaan”. Ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut.

Menurut Dwi Sakti Prastyaningrum (2013), mengungkapkan bahwa *financial distress* dapat diukur dengan perhitungan *DER* atau *Debt to Equity Ratio* dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Dengan tingkat rasio *DER* aman adalah 100%. Rasio *DER* diatas 100% merupakan indikator memburuknya kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan (Dwi Sakti Prastyaningrum, 2013). Variabel *financial distress* menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan klien memiliki rasio *DER* di atas 100%, maka diberikan nilai 1 (satu).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Sedangkan jika perusahaan klien memiliki rasio *DER* dibawah 100%, maka diberikan nilai 0 (nol) (Wijayanti dan Januarti, 2011).

2.6. Auditor Switching

Menurut Evy Dwi Wijayanti (2010), *auditor switching* merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan. Hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Nabila (2011) “rotasi auditor adalah pergantian atau perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi”.

Menurut Febrianto (2009) dalam Wijayanti (2011) “pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib)”. Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary* (sukarela), maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan manajemen, persentase ROA, kepemilikan publik, dsb) dan dari sisi auditor (misalnya: *fee* audit, kualitas audit, ukuran KAP, dsb). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory* (wajib), seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar masa perikatan audit (*audit tenure*) lebih pendek dan perusahaan akan melakukan pergantian auditor, sehingga independensi auditor dapat dijaga.

Peraturan-peraturan pada kewajiban rotasi auditor merupakan peraturan yang mengatur tentang pembatasan audit yaitu *audit tenure* dan *auditor switching* sekarang ini di Indonesia. Pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama

untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama.

Namun pada bulan April 2015 terdapat beberapa pembaharuan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP, yang semula paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut mengalami perubahan pada pemberian jasa akuntan publik. Pasal 11 ayat (1) tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Pasal 11 ayat (4), tentang Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Keputusan Menteri tersebut diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi.

Auditor switching dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan mengganti auditornya secara *voluntary* pada tahun berikutnya selama periode pengamatan, maka diberikan nilai 1 (satu). Sedangkan jika perusahaan tidak mengganti auditornya, maka diberi nilai 0 (nol) (Dwi sakti prastyaningrum, 2013).

2.7. Auditing

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Menurut Alvin A. Arens. et al (2014: 24), auditing adalah “Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013: 14) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 yang berjumlah 143 perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah dengan *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang aktif selama periode 2011-2015.
- Perusahaan sampel yang tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.
- Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan data

secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2011-2015.

- Perusahaan sampel yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary* selama tahun pengamatan.
- Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor yang independen.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berjumlah 21 perusahaan. Jumlah ini diambil karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kriteria yang telah ditentukan. Metode yang digunakan peneliti adalah Regresi Logistik. Persamaan regresi ini digunakan karena variabel dependennya diukur secara nominal (bersifat dikotomis) dan variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal).

Adapun model *logistics regression* yang akan digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$SWITCH_t = \beta_0 + \beta_1 PP + \beta_2 ROA + \beta_3 DTRS + \epsilon$$

Dimana:

$SWITCH_t$ = Pergantian Auditor

PP = Kepemilikan Publik

ROA = Persentase ROA

DTRS = *Financial Distress*

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

ϵ = *Error Term*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Regresi logistik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui tiga variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara ketiga variabel independen (X1, X2 dan X3) terhadap variabel dependen (Y) dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.1. Hasil Uji Regresi Logistik

	B	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Kepemilikan_Publik	-,014	,326	,986
ROA	-,003	,416	,997
Financial_Distress	1,730	,000	5,641
Constant	-1,145	,013	,318

Berdasarkan Tabel 4.1. dapat diperoleh persamaan:

$$\text{SWITCH}_t = -1,145 - 0,014PP - 0,003ROA + 1,730DTRS$$

Hasil uji regresi logistik memperlihatkan bahwa arah koefisien kepemilikan publik *negative* 0,014. Nilai *Exp(B)* dapat diinterpretasikan jika variabel kepemilikan publik meningkat sebesar 1% maka akan terdapat perubahan *odds ratio (Exp(B))* sebesar 0,986. Hal ini berarti apabila jumlah saham publik yang berada di perusahaan rendah maka hal tersebut akan memperkecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, dan apabila jumlah saham publik yang berada di perusahaan tinggi maka akan memperbesar kemungkinan dilakukannya pergantian auditor. Jika dinilai dari signifikansinya maka dihasilkan tingkat signifikansi 0,326 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Pada variabel persentase ROA dapat diperoleh bahwa arah koefisien ROA *negative* 0,003. Nilai *Exp(B)* dapat diinterpretasikan jika variabel persentase ROA meningkat sebesar 1% maka akan terdapat perubahan *odds ratio (Exp(B))* sebesar 0,997. Hal ini berarti menandakan bahwa semakin tinggi persentase ROA yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, dan

semakin kecil persentase ROA yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Jika dinilai dari signifikansinya maka dihasilkan tingkat signifikansi 0,416 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan persentase ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Hasil uji regresi logistik memperlihatkan bahwa arah koefisien *financial distress* positif 1,730. Nilai *Exp(B)* dapat diinterpretasikan jika variabel *financial distress* meningkat sebesar 1 satuan maka akan terdapat perubahan *odds ratio (Exp(B))* sebesar 5,641. Hal ini berarti apabila kinerja keuangan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan maka hal tersebut akan memperkecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, dan apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka akan memperbesar kemungkinan dilakukannya pergantian auditor. Jika dinilai dari signifikansinya maka dihasilkan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variasi dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *Nagelkerke R Square* pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	120,433 ^a	,140	,193

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Negelkerke R Square* sebesar 0,193. Hal tersebut berarti 19,3% perubahan pergantian auditor (*auditor switching*) dijelaskan oleh kepemilikan publik, persentase ROA dan *financial distress*, sisanya 80,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

Tabel 4.3. Hasil Uji Omnibus Test (Uji F)

	Chi-square	df	Sig.
Step	15,838	3	,001
Step 1 Block	15,838	3	,001
Model	15,838	3	,001

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa hasil *omnibus test* diperoleh *Chi-Square* sebesar 15,838 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*) dengan tingkat signifikansi (α). jika nilai probabilitas (*sig*) < dari 0,05 (tingkat signifikansi) maka H_0 diterima. Dari hasil Uji F di atas dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh

antara variabel kepemilikan publik, persentase *return on assets* dan *financial distress* terhadap pergantian auditor yang berarti hipotesis H_2 diterima.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu antara kepemilikan publik, persentase *return on assets* dan *financial distress* terhadap pergantian auditor.

Tabel 4.4. Hasil Uji T

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Kepemilikan_Publik	-,014	,014	,965	1	,326	,986
ROA	-,003	,004	,662	1	,416	,997
Financial_Distress	1,730	,468	13,641	1	,000	5,641
Constant	-1,145	,462	6,158	1	,013	,318

Berdasarkan Tabel 4.4. diatas dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan publik diukur dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki masyarakat (publik) terhadap total saham yang dimiliki perusahaan dikalikan 100%. Nilai signifikansi kepemilikan publik adalah sebesar 0,326 yang artinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menandakan bahwa H_1 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan publik mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

Variabel ROA diukur dengan membandingkan antara EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) terhadap jumlah aktiva dikalikan 100%. Nilai signifikansi ROA adalah sebesar 0,416 yang artinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menandakan bahwa H_1 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial persentase ROA mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

Variabel *financial distress* diukur dengan menggunakan *dummy*, yang artinya apabila DER (*Debt to Equity Ratio*) perusahaan dibawah 100%,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

dikategorikan memiliki kinerja keuangan yang baik atau 0 (nol). Namun apabila DER (*Debt to Equity Ratio*) perusahaan di atas 100%, maka kinerja keuangan perusahaan dikategorikan lemah atau 1 (satu). Nilai signifikansi *financial distress* adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari taraf nyata signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menandakan bahwa H_1 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial persentase *financial distress* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

5. KESIMPULAN

Kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Hal ini terbukti dari tingkat signifikansi sebesar (0,326 > 0,05), karena perusahaan cenderung untuk tidak melakukan pergantian auditor meskipun saham publik selalu dalam persentase yang kecil. Persentase *return on assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Hal ini terbukti dari tingkat signifikansi sebesar (0,416 > 0,05). Tingkat signifikansi ini disebabkan oleh pertimbangan pihak manajemen untuk mempertahankan reputasi perusahaannya yang berkaitan dengan ukuran KAP masih menjadi faktor utama bagi perusahaan. *Financial distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Hal ini terbukti dari tingkat signifikansi sebesar (0,000 < 0,05), karena perusahaan cenderung untuk melakukan pergantian KAP ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Pertimbangan tersebut dilakukan karena perusahaan menilai ingin menekan *audit fee*. Dengan mengganti KAP yang lebih kecil dapat mengurangi biaya audit yang tinggi. Pengaruh kepemilikan publik, persentase *return on assets* dan *financial distress* terhadap pergantian auditor diperoleh hasil uji kelayakan model regresi dengan

nilai *Goodness of Fit Test* adalah 0,502 atau lebih besar dari 0,05 maka model dapat diprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Uji keseluruhan model (*overall model fit*), Nilai $-2 \text{ Log } L$ pada awal (*Block Number = 0*) sebesar 136,271 mengalami penurunan menjadi 120,436 pada akhir (*Block Number = 1*) dinyatakan model statistik tersebut semakin fit dengan data dikarenakan mengalami penurunan dari $-2 \text{ Log } L$ pada awal (*Block Number = 0*) ke $-2 \text{ Log } L$ pada akhir (*Block Number = 1*). Uji Multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Hasil uji regresi logistik didapat $SWITCH_t = -1,145 - 0,014PP - 0,003ROA + 1,730DTRS$. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 19,3%. Sedangkan untuk hasil uji F diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ (tingkat signifikansi) maka H_0 diterima. Dan yang terakhir adalah uji t menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor (0,326 > 0,05), persentase *return on assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor (0,416 > 0,05), dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor (0,000 < 0,05).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alim, MN, Hapsari T. dan Purwanti, L. 2005. *Pengaruh Kompetensi dan*

- Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.* Simposium.
- Anggraeni, Citra dan Adi Kuswanto. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor Yang Terjadi Pada Bank Yang Terdaftar di BEI.* Universitas Gunadarma.
- Aprillia, Ekka. 2013. *Pengaruh Pergantian Manajemen, Kepemilikan Publik, Financial Distress, dan Ukuran KAP terhadap Auditor Switching.* Universitas Negeri Semarang.
- Arens, et. al. 2014. *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach.* England: Pearson Education Limited.
- _____. 2011. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi Jilid 1.* Jakarta: Erlangga.
- Basuki, Jarita Inez. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baker, Richar E. 2010. *Akuntansi Keuangan Lanjutan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, Shulamite dan Made Sudarma. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik,* Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak.
- Divianto. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Melakukan Auditor Switch.* Jurnal Ekonomi dan Akuntansi . Vol 1 No. 2, Hal. 153-173.
- Dwijayanti, S, Patricia Febrina. 2010. *Penyebab, Dampak, Dan Prediksi Dari Financial Distress Serta Solusi Untuk Mengatasi Financial Distress.* Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala.
- Dwiyantri, R. Meike Erika dan Arifin Sabeni. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Secara Voluntary.* Universitas Diponegoro : Semarang
- Fakhrurozie. 2007. *Analisis Pengaruh Kebangkrutan Bank Dengan Metode Altman Z-Score Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Di BEI.* Jakarta.
- Freeman, R.E., and Reed. 1983. *Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance.*
- Friedman, Milton. 1962. *Capitalism and Freedom.* Chicago: University of Chicago Press.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Edisi IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Good, Carter V. dan Scates, Douglas E. 1972. *Methods Of Research.* New York: Appleton Century Crofts, Inc.
- Gray, dkk. 1997. *Manajemen Proyek.* LPFE Universitas Indonesia.
- Hariani, Delvia. 2009. *Analisis Potensi Kebangkrutan dengan Menggunakan Model Altman pada*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Perusahaan Food dan Beverage Go Public di BEI.* Lampung: Universitas Lampung.
- Haryetti, 2010. *Analisis Financial Distress untuk Memprediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan.* Pekanbaru: Kampus Bina Widya.
- Hudaib, Mohammad dan TE Cooke. 2005. *Qualified Audit Opinion And Auditor Switching.* Departemen of Accounting and Finance Scholl of Business and Economic University of Exeter Streatham Coert. UK.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Jayanti, Ni Made Dewi Anggun dan Ni Luh Sari Widhiyani. 2012. *Financial Distress dalam Memoderasi Pengaruh Auditor Switching pada Audit Quality.* ISSN: 2302-8556. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 9.3 (2014): 668-683.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik, Jakarta.
-
- Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Jakarta.
- Kerlinger, F. N. 1973. *Founding of Behaviour Research,* Holt. Rinchart and Winston Inc. New York.
- Kieso, Donald E. et. al. 2008. *Akuntansi Intermediate Edisi Keduabelas.* Jakarta: Erlangga.
- Mahantara, AA Gede Widya. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI.* Universitas Udayana : Bali.
- Mardiyah, AA. 2002. *Pengaruh Faktor Klien dan Faktor Auditor terhadap Auditor Changes: Sebuah Pendekatan dengan Model Kontijensi RPA (Recursive Model Algorithm) Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi.* Vol. 3. No. 2. Pp. 133-154.
- Mas'ud, Imam dan Reva Maymi Srengga. 2010. *Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Universitas Jember.
- Meira Masitta. 2015. *Pengaruh Opini Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Pergantian Auditor.* Universitas Pamulang: Tangerang Selatan.
- Messier, William F, et. al. 2006. *Auditing & Assurance Services a Systematics Approach.* Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty.
- Nasser, et. al. 2006. *Auditor-Client Relationship: The Case of Audit tenure and Auditor Switching in Malaysia.* Managerial Auditing Journal, Vol. 21, No. 7, pp. 724-737.
- Nur'aeni, Dini. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan.* Universitas Diponegoro.
- Nur Hidayati. 2009. *Analisis Laba Bersih dan Arus Kas Dalam Memprediksi*

- Arus Kas Masa Depan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.* Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, Jakarta.
- Prastiwi, Andri, dan Frena Widayuarti. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor Studi Empiris Perusahaan Publik di Indonesia.* Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 1. No. 1 pp. 62-75.
- Prastyaningrum, Dwi Sakti. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan Melakukan Auditor Switching (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012).* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pratini., I G A Asti, dan I B Putra Astika. 2013. *Fenomena Pergantian Auditor di Bursa Efek Indonesia.* ISSN: 2302-8556. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 5.2: 470-482.
- Pratiwi, Meilia Dian dkk. 2012. *Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Analisis Rasio Keuangan dan Metode Economic Value Added (EVA).* Malang: Universitas Brawijaya.
- PT. Bursa Efek Indonesia. 2005-2015. *Indonesian Capital Market Directory 2005-2015.* Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia.
- Putra, I Wayan Deva Widia. 2014. *Pengaruh Financial Distress, Rentabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Pada Pergantian Auditor.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014): 308-323. ISSN: 2302-8556.
- Rita, Mario Rio dan Sartika. 2011. *Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).* Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Salim, Apriyeni dan Sri Rahayu. 2012. *Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, Dan Financial Distress terhadap Auditor Switching (Studi Kajian pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012).* Universitas Telkom.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis).* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. 1992. *Metode Statistika.* Edisi Kelima. Bandung: Tarsito.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Andayani. 2010. *Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah ada Kewajiban Rotasi Audit.* Universitas Brawijaya.
- Susan, dan Estralita Trisnawati. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Auditor Switch.* Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 13. No. 2, Hal. 131-144.
- Utomo, Oki Abi. 2015. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Auditor Switching. Universitas
Bakrie

Warren, Carl S. *et. al.* 2014. *Principles of Accounting Bilingual Adaptation.* Jakarta: Salemba Empat.

Wenny, Cherrya Dhia. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Changes.* STIE-MDP.

Wijayani, Evy Dwi. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Di Indonesia Melakukan Auditor Switching.* Universitas Diponegoro.

Wijayani, Evi Dwi, dan Indira Januarti, 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Di Indonesia Melakukan Auditor Switching.* Simposium Nasional Akuntansi XIV ACEH.

**ANALISIS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) BANK UMUM SYARIAH
BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX
(INDEKS ISR)**

Apip Zanariyatim*), Ai Nur Bayinah, Oni Sahroni
Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok
**Email: apipzanariyatim@gmail.com*

ABSTRACT

ISR index (Islamic Social Reporting) was first conceived by Haniffa (2002), which contains a compilation of CSR disclosure items specified by AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) which are then developed further by several subsequent researchers, including in Indonesia. However, the results obtained from these studies that various Islamic banks in Indonesia are still not optimal in applying ISR index as a measure of CSR disclosure. Therefore, the purpose of this study was to measure the extent to which the rate of ISR index scores when using the item more comprehensive. The population in this study was 12 BUS (Islamic Banks) and sample selection using purposive sampling BUS which has published the Annual Report 2012 to 2014 on the official website of each. The results obtained from this study is the ISR index score each year experienced a significant improvement in which the acquisition of ISR Index score is the highest in the year 2012-2014 BSM with a score of 89.6% and the lowest score achieved by BVS of 45.8%. The predicate obtained BUS until 2014 there were two BUS predicate Very Informative namely: BMI and BSM. Informative predicate achieved by BRIS, BSB, and BNIS. Then four BUS predicate Less Informative are: BMS, BCAS, BJBS, and BPS. While the two BUS more predicate Not Informative is BMS and BVS.

Key Words: Corporate Social Responsibility Disclosure, Islamic Banking, Islamic Social Reporting Index.

ABSTRAK

Indeks ISR (Islamic Social Reporting) pertama kali digagas oleh Haniffa (2002) yang berisi kompilasi item pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa peneliti berikutnya termasuk di Indonesia. Namun hasil yang diperoleh dari berbagai penelitian tersebut bahwa bank syariah di Indonesia masih belum maksimal dalam menerapkan Indeks ISR sebagai alat ukur pengungkapan CSR. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat perolehan skor Indeks ISR jika menggunakan item yang lebih komprehensif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 12 BUS (Bank Umum Syariah) dan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yaitu BUS yang telah mempublikasikan Annual Report 2012-2014 pada website resmi masing-masing. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah skor Indeks ISR setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan yang mana perolehan skor Indeks ISR tertinggi pada tahun 2012-2014 adalah BSM dengan skor 89,6% dan skor terendah diraih oleh BVS sebesar 45,8%. Adapun predikat yang diperoleh BUS hingga tahun 2014 terdapat dua BUS yang memperoleh predikat Sangat Informatif

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yaitu: BMI, dan BSM. Predikat Informatif diraih oleh BRIS, BSB, dan BNIS. Kemudian empat BUS yang memperoleh predikat Kurang Informatif adalah: BMS, BCAS, BJBS, dan BPS. Sedangkan dua BUS lagi yang memperoleh predikat Tidak Informatif adalah BMS dan BVS.

Kata Kunci: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Bank Syariah, Islamic Social Reporting Index.

1. PENDAHULUAN

Pelaporan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi suatu perhatian khusus bagi entitas bisnis dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Mengingat perkembangan CSR di Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya (Fitria dan Hartanti, 2010). Pada awalnya pelaporan mengenai CSR bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) (Fauziah dan Yudho, 2013) setelah adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, yang mewajibkan perseroan bergerak dalam bidang sumber daya alam atau bidang lainnya yang terkait untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan (Putra, 2014). Menurut Wibisono (2007) dalam Sofyani *et al* (2012) secara umum CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan baik agar bisa *sustainable*. Adapun dalam pernyataan Fitria dan Hartanti (2010), bahwa praktik dalam pengungkapan CSR telah banyak dilakukan oleh perusahaan *go public* di Indonesia yang pada umumnya bergerak dalam bidang pertambangan atau manufaktur, dikarenakan perusahaan tersebut memiliki risiko pencemaran lingkungan yang lebih tinggi ketimbang perusahaan-perusahaan yang lainnya. Namun hingga pada akhirnya praktik CSR diikuti oleh sektor perbankan. Menurut Sofyani dan Setiawan, (2012)

konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam yang mana ketika menjalankan suatu bisnisnya harus berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Salah satu lembaga yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah bank syariah. Sebagaimana tujuan utama dari pendirian bank syariah itu sendiri yaitu sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya (Antonio, 2001).

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut Ismail (2010), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup menggembirakan dengan melihat banyaknya kantor bank syariah, maupun pengumpulan dan pembiayaan dibandingkan dengan sejak berdirinya

bank syariah pertama di Indonesia. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) sampai bulan Desember 2014, Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 12, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 22. Sedangkan total aset BUS dan UUS per Desember 2014 telah mencapai Rp.272,34 triliun dengan jumlah DPK sebesar Rp.217,86 triliun dan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.199,33 triliun.

Pelaporan sosial berdasarkan nilai-nilai Islami atau sering disebut dengan *Islamic Social Reporting* (Selanjutnya disebut ISR) merupakan salah satu upaya bank syariah dalam memberikan informasi mengenai kinerja sosial bank syariah kepada *stakeholder*. Namun pengukuran CSR *disclosure* bank syariah yang berkembang saat ini masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (indeks GRI) (Fitria dan Hartanti, 2010). Sedangkan menurut Haniffa (2002), hal ini justru tidak logis bagi bank syariah yang memiliki nilai-nilai syariah dalam melaporkan kinerja sosialnya memakai alat ukur yang sama dengan bank konvensional. Karena pada dasarnya jenis informasi yang perlu disajikan berbeda antara perspektif Islam dengan perspektif konvensional.

Indeks ISR merupakan suatu standar pelaporan atas pengungkapan CSR perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini berisi kompilasi item-item pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya sehingga item-item tersebut dianggap relevan untuk digunakan oleh entitas syariah. Adapun, beberapa peneliti yang telah mengembangkan indeks ISR diantaranya: Haniffa (2002) yang menggagas indeks ISR yang kemudian dilanjutkan oleh Othman et al (2009).

Adapun Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.

Beberapa penelitian terkait indeks ISR perbankan telah banyak dilakukan oleh para peneliti diantaranya Haniffa (2002), yang menegaskan bahwa "hadirnya ISR pada lembaga keuangan syariah dapat membawa dampak yang positif serta memberikan efek manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi sosial guna memenuhi pertanggung jawaban atas segala perilaku dan tindakan yang dilakukan". Kemudian Fitria dan Hartanti (2010), yang membandingkan pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative Index* dengan *Islamic Social Reporting Index*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas atau hanya dapat memenuhi 50% jika diukur dengan *Islamic Social Reporting Index*, pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative Index* lebih tinggi skornya daripada *Islamic Social Reporting Index*. Dikarenakan indikator *Islamic Social Reporting Index* kurang komprehensif.

Penelitian Fauziah dan Yudho (2013), dengan melakukan analisis terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini mengambil objek perbankan syariah sebanyak 7 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan *annual report* tahun 2011. Hasil yang didapatkan yakni skor indeks ISR tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia yaitu sebesar 73% dan skor terendah adalah Bank Panin Syariah dengan skor 41%.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Gustani dan Bayinah (2013), dalam jurnalnya yang berjudul model pelaporan kinerja sosial perbankan syariah: implementasi *Islamic Social Reporting* (indeks ISR) di Indonesia. Dalam penelitian ini mengambil sampel 5 bank umum syariah yakni: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan pengambilan *annual report* 2009-2011. Hasil yang diperoleh bahwa tingkat pengungkapan kinerja sosial tertinggi periode 2009-2011 adalah BSM. Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS di Indonesia dalam periode 2009-2011 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian lain dilakukan oleh Putra (2014) yang juga meneliti mengenai pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian ini fokus pada bank syariah yang menjadi pemenang penghargaan *Corporate Image Award 2012* yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Hasil yang diperoleh bahwa rata-rata pengungkapan semua bank syariah yang menjadi sampel adalah 57%. Dari keempat sampel yang diteliti hanya 3 sampel yang mampu mencapai angka lebih dari 50%. Dimana yang memperoleh angka tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank syariah di Indonesia berdasarkan *Indeks Islamic Social Reporting* (ISR) masih belum maksimal. Sebagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Hartanti (2010) mendapatkan hasil yang

kurang maksimal, dikarenakan penerapan ISR di bank syariah Indonesia masih terlalu asing untuk diterapkan.

Sedangkan pada tahun 2013 telah mengalami perkembangan yang sangat bagus dimana dalam penelitian Fauziah dan Yudho (2013) menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dalam hal pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan *Indeks Islamic Social Reporting* (ISR) sudah cukup optimal.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustani dan Bayinah (2013) yang memperoleh hasil bahwa setiap tahunnya tingkat kinerja sosial bank syariah selalu meningkat. Namun secara keseluruhan rata-rata tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS di Indonesia masih kurang informatif. Dilanjutkan dengan hasil temuan Putra (2014) terhadap bank syariah di Indonesia yang memperoleh penghargaan *Corporate Image Award 2012*.

Pada bank syariah tersebut pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan *Indeks Islamic Social Reporting* (ISR) sudah baik dengan menunjukkan hasil diatas 50 % pada ketiga sampel bank syariah yang diteliti.

Secara umum hasil dari penelitian Fauziah dan Yudho (2013) berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Gustani dan Bayinah (2013), dan penelitian Putra (2014). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustani dan Bayinah (2013) sama dengan hasil penelitian Putra (2014). Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari penelitian Fauziah dan Yudho (2013), menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia yang menduduki tingkat tertinggi dalam pengungkapan CSR berdasarkan ISR adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sedangkan hasil penelitian Gustani dan Bayinah (2013) sama dan penelitian Putra (2014), menunjukkan bahwa bank syariah di

Indonesia yang memiliki tingkat tertinggi dalam pengungkapan CSR berdasarkan ISR diduduki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM).

Dapat diasumsikan bahwa perbedaan hasil dari penelitian Fauziah dan Yudho (2013), penelitian Gustani dan Bayinah (2013), dan penelitian Putra (2014) dikarenakan menggunakan sampel, periode dan indikator ISR yang berbeda. Hal ini yang kemudian menjadi suatu pertanyaan apakah suatu bank syariah setiap tahunnya mengalami kemuduran dalam pelaporan CSR berdasarkan ISR, sehingga dapat diungguli oleh bank syariah lainnya. Atau bisa jadi performa suatu bank syariah dalam pelaporan CSR berdasarkan ISR stabil, namun bank syariah lainnya menunjukkan kinerja yang lebih baik tiap tahunnya sehingga bisa mendapatkan peringkat pertama dalam pelaporan CSR berdasarkan ISR.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia berdasarkan ISR dengan menggunakan periode yang berbeda dan sampel yang mendekati pada populasi agar mendapatkan hasil yang lebih optimal serta menggunakan indikator ISR dari hasil penggabungan penelitian sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia berdasarkan indeks ISR melalui laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah (BUS). Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan menggunakan laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah (BUS) periode 2012-2014 yang telah

dipublikasi di *website* resmi masing-masing.

Variabel penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pengungkapan CSR berdasarkan ISR, yang mana komponen tersebut mengacu pada Hannifa (2002), Haniffa dan Hudaib (2007), Othman et al (2009), Fauziah dan Yudho (2013), Gustani dan Bayinah (2014) serta penelitian-penelitian sebelumnya, indeks ISR dalam penelitian ini berisi 6 (enam) tema pengungkapan, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup, dan Tema Tata Kelola Perusahaan. Dari setiap tema terdapat item pengungkapan yang secara keseluruhan berjumlah 80 (delapan puluh) item.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yaitu: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), Bank Syariah Bukopin (BSB), Panin Bank Syariah (PBS), Bank Victoria Syariah (BVS), Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank Negara Indonesia (BNIS), Bank Central Asia Syariah (BCAS), dan Maybank Syariah (MS). Adapun metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*) dengan metode skoring yakni:

- a. Nilai 0 jika terdapat item yang tidak diungkapkan;
- b. Nilai 1 jika terdapat item yang diungkapkan.

Metode skoring ini dilakukan berdasarkan indeks ISR yang terdiri dari 6 indikator yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi yang dikembangkan menjadi 80 item

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pernyataan, dapat disajikan pada Tabel

3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rincian Indeks ISR

TEMA	ITEM INDEKS ISR	SUMBER
PENDANAAN DAN INVESTASI	1. Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	2. Kegiatan yang mengandung <i>gharar</i> (<i>hedging, future on delivery trading or margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	3. Sumber zakat	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	4. Jumlah zakat	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	5. Penerima zakat	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	6. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	Othman et al (2009)
	7. Kegiatan investasi (secara umum)	Haniffa dan Hudaib (2007)
	8. Proyek pembiayaan (secara umum)	Haniffa dan Hudaib (2007)
PRODUK DAN JASA	9. Status halal dalam produk	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	10. Pengembangan produk	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	11. Jenis dan definisi setiap produk	Haniffa dan Hudaib (2007)
	12. Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru	Haniffa dan Hudaib (2007)
	13. Peningkatan pelayanan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	14. Penanganan keluhan	Haniffa dan Hudaib (2007)
	15. Total keluhan	Haniffa dan Hudaib (2007)
TENAGA KERJA	16. Denda baik uang maupun non uang terkait pelanggaran peraturan	Fauziah dan Yudho (2013)
	17. Jumlah karyawan	Haniffa dan Hudaib (2007)
	18. Jam kerja	Haniffa dan Hudaib (2007)

	19. Tunjangan karyawan	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	20. Kebijakan remunerasi	Othman et al (2009)
	21. Rasio gaji	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	22. Komposisi karyawan berdasarkan kriteria tertentu	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	23. Pendidikan dan pelatihan karyawan	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	24. Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	Othman et al (2009)
	25. Membangun program dan jenjang karir karyawan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	26. Strategi retensi karyawan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	27. Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	Haniffa dan Hudaib (2007)
	28. Kesehatan dan keselamatan karyawan	Othman et al (2009)
	29. Keterlibatan karyawan di perusahaan	Othman et al (2009)
	30. Tempat ibadah yang memadai	Othman et al (2009)
	31. Waktu ibadah/ kegiatan religius	Othman et al (2009)
	32. Kesejahteraan karyawan	Haniffa dan Hudaib (2007)
SOSIAL	33. Perekrutan khusus	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	34. Lingkungan kerja	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	35. Sedekah/ donasi (jumlah dan penyalurannya)	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	36. <i>Waqaf</i> (jenis dan penyalurannya)	Hannifa (2002)
	37. <i>Qard hasan</i> / pinjaman kebajikan (jumlah dan penyaluran)	Hannifa (2002)
	38. Zakat atau sumbangan dari kalangan karyawan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	39. Pemberian beasiswa sekolah	Othman et al (2009)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

	40. Pendirian/ renovasi sekolah	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	41. Bantuan pada sekolah dalam bentuk <i>financial</i> atau <i>non financial</i>	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	42. Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/ kuliah magang atau praktik kerja lapangan	Othman et al (2009)
	43. Pemberdayaan ekonomi	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	44. Pembangunan atau renovasi masjid	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	45. Pengembangan generasi muda	Othman et al (2009)
	46. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	Othman et al (2009)
	47. Bantuan kesehatan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	48. Kepedulian terhadap anak yatim (piatu)	Othman et al (2009)
	49. Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dan lain-lain)	Hannifa dan Hudaib (2007) Othman et al (2009)
50. Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)	Othman et al (2009)	
LINGKUNGAN	51. Kampanye <i>go green</i>	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	52. Konservasi lingkungan hidup	Hannifa (2002) Othman et al (2009)
	53. Perbaikan atau pembuatan sarana umum	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	54. Kegiatan mengurangi pemanasan global (meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dan lain-lain)	Othman et al (2009)
	55. Pendidikan terhadap lingkungan hidup	Othman et al (2009)
	56. Penghargaan dibidang lingkungan hidup	Hannifa dan Hudaib (2007) Othman et al (2009)
	57. Sistem manajemen lingkungan hidup	Othman et al (2009)
TATA KELOLA PERUSAHAAN	58. Profil dan strategi organisasi	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	59. Struktur organisasi	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)

	60. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	61. Remunerasi dewan komisaris	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	62. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	63. Remunerasi direksi	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	64. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	65. Remunerasi komite	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	66. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	67. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	68. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	69. Penanganan benturan kepentingan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	70. Penerapan fungsi kepatuhan bank	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	71. Penerapan fungsi audit intern	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	72. Penerapan fungsi audit ekstern	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	73. Batas maksimum penyaluran dana	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
	74. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

	75. Pendapatan dan penggunaan dana non halal	SE BI No. 12/13DPbS (2010) Gustani dan Bayinah (2014)
	76. Struktur kepemilikan saham	Othman et al (2009)
	77. Kebijakan anti korupsi dan praktik menyimpang lainnya	Othman et al (2009)
	78. Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan terorisme	UU No. 8 Tahun 2010 Gustani dan Bayinah (2014)
	79. Perkara hukum	Othman et al (2009)
	80. Etika perusahaan	Othman et al (2009) Fauziah dan Yudho (2013)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Presentase tingkat pengungkapan indeks ISR pada bank syariah di Indonesia secara kumulatif dapat dilihat

pada tabel 4.1. dan berikut perbandingan indeks ISR pada Bank Umum Syariah pada tahun 2012-2014.

Tabel 4.1. Tingkat Pengungkapan Indeks ISR Bank Umum Syariah Pada tahun 2012-2014

No	Nama BUS	2012		2013		2014	
		Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
1	BMI	69	86,3%	69	86,3%	67	83,8%
2	BSM	73	91,3%	76	95,0%	66	82,5%
3	BMS	44	55,0%	48	60,0%	46	57,5%
4	BRIS	56	70,0%	61	76,3%	61	76,3%
5	BSB	59	73,8%	52	65,0%	54	67,5%
6	BNIS	51	63,8%	61	76,3%	61	76,3%
7	BVS	30	37,5%	39	48,8%	41	51,3%
8	BCAS	43	53,8%	46	57,5%	43	53,8%
9	BJBS	45	56,3%	42	52,5%	46	57,5%
10	BPS	38	47,5%	50	62,5%	57	71,3%
11	MBS	37	46,3%	40	50,0%	36	45,0%

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa indeks ISR pada tahun 2012, Bank Muamalat mendapatkan skor 86,3% dengan pengungkapan sebanyak 69 item sehingga predikat yang didapatkan adalah Sangat Informatif. Kemudian di tahun 2013 perolehan skor masih stabil yaitu sebesar 86% dengan pengungkapan sebanyak 69 item dan predikat yang didapatkan adalah Sangat Informatif. Sedangkan pada tahun 2014 skor ISR menurun menjadi 83,8% dikarenakan adanya pengurangan

pengungkapan pada tema sosial sebanyak 2 item dari tahun sebelumnya yaitu tidak melakukan kegiatan CSR berupa bantuan pendirian/ renovasi sekolah dan kegiatan sosial lainnya seperti pemberian buku, pembagian Al-Qur'an dan lain-lain.

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 mendapatkan skor 91,3% dengan pengungkapan sebanyak 73 item, sehingga predikat yang didapatkan adalah Sangat Informatif. Pada tahun 2013 skor meningkat menjadi 95%

dengan adanya penambahan pengungkapan menjadi 76 item, pada tahun tersebut Bank Syariah Mandiri telah berhasil melakukan kegiatan pengembangan generasi muda dengan cara mengembangkan usaha-usaha kecil sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup miskin, dan memiliki sistem manajemen lingkungan hidup yang baik. sehingga predikat yang diperoleh adalah Sangat Informatif. Sedangkan, pada tahun 2014 skor ISR menurun drastis menjadi 82,5% dengan pengungkapan hanya 66 item. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan CSR yang tidak dilakukan seperti: sedekah, wakaf, zakat yang berasal dari karyawan, bantuan dalam bentuk kesehatan, kegiatan penghijauan/ *go green*, kenservasi lingkungan hidup, dan pendidikan lingkungan hidup.

Bank Mega Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor ISR 55% dengan pengungkapan hanya 44 item dan predikat yang didapatkan adalah Tidak Informatif. Kemudian tahun 2013 skor ISR naik menjadi 60% dengan adanya penambahan pengungkapan menjadi 48 item dikarenakan adanya kegiatan yang bermanfaat buat generasi muda seperti melakukan pengembangan usaha dll, namun predikat yang didapatkan Kurang Informatif. Sedangkan, pada tahun 2014 terjadi penurunan skor ISR menjadi 57,5% disebabkan adanya pengurangan 1 (satu) item di tema pendanaan dan investasi dan 1 (satu) item di tema tenaga kerja sehingga predikat yang didapatkan masih Kurang Informatif.

Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2012 memperoleh skor 70% dengan adanya pengungkapan sebanyak 56 item, dan predikat yang didapatkan adalah Informatif. Tahun 2013 skor meningkat menjadi 76,3% dengan adanya penambahan pengungkapan menjadi 61 item yang mana pada tahun tersebut telah melakukan penanganan keluhan nasabah dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan karyawannya sehingga

predikat yang didapatkan Informatif. Sedangkan, pada tahun 2014 skor berada pada titik stabil yaitu 76,3% dengan perolehan nilai pengungkapan 46 item dan predikat yang didapatkan adalah Informatif.

Bank Syariah Bukopin pada tahun 2012 memperoleh skor 73,8% dengan perolehan nilai pengungkapan sebanyak 59 item sehingga predikat yang diterima adalah Informatif. Pada tahun 2013 item yang diungkapkan hanya 52 dengan skor 65%. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut Bank Syariah Bukopin tidak menyalurkan dana sedekahnya untuk kegiatan sosial, dan bantuan pendirian sekolah sehingga predikatnya. Kemudian pada tema pendanaan dan investasi terjadi pengurangan 1 (satu) item, tema tenaga kerja 4 (empat) item, tema sosial 2 (dua) item. Sehingga mendapatkan predikat Kurang Informatif. Pada tahun 2014 skor meningkat menjadi 67,5% dengan adanya pengungkapan menjadi 54 item namun predikat yang didapatkan masih sama yaitu Kurang Informatif.

Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor 63,8% dengan pengungkapan sebanyak 51 item dan predikat yang diperoleh masih Kurang informatif. Namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan skor menjadi 76,3% dengan adanya penambahan pengungkapan menjadi 61 item yang pada tahun tersebut terjadi beberapa kegiatan seperti: melakukan penanganan keluhan nasabah, melakukan kegiatan ibadah pengajian rutin, kampanye *go green*, pengelolaan air bersih dan lain-lain. Sehingga predikat yang didapatkan menjadi Informatif. Pada tahun 2014 skor yang diperoleh stabil yaitu mencapai 76,3% dengan predikat Informatif.

Bank Victoria Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor 37,5% dengan pengungkapan sebanyak 30 item, sehingga predikat yang didapatkan pada tahun tersebut adalah Tidak Informatif. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 48,8% dengan penambahan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pengungkapan menjadi 39 item namun predikat yang didapatkan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Tidak Informatif. Pada tahun 2014 skor kembali meningkat menjadi 51,3% dengan adanya penambahan pengungkapan menjadi 41 item yang mana pada tahun tersebut terdapat penyelesaian atas perkara hukum dan adanya pengungkapan etika perusahaan/bisnis. Namun walaupun adanya peningkatan skor, predikat yang didapatkan masih berada pada posisi Kurang Informatif.

Bank Centra Asia Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor 53,8% dengan pengungkapan sebanyak 43 item dan predikat yang didapatkan adalah Kurang Informatif. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan skor menjadi 57,5% disebabkan adanya penambahan pengungkapan menjadi 46 item, yang mana pada tahun tersebut Bank Central Asia Syariah telah melakukan beberapa kegiatan sosial diantaranya: pemberian bantuan beasiswa sekolah, pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, bantuan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Namun, predikat yang didapatkan masih Kurang Informatif. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan skor menjadi 53,8%, skor tersebut sama dengan tahun 2012 yaitu dengan adanya pengungkapan sebanyak 43 item. Sehingga predikat yang didapatkan adalah Kurang Informatif.

Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor 56,3% dengan pengungkapan sebanyak 45 item, sehingga predikat yang didapatkan pada tahun tersebut adalah Kurang Informatif. Pada tahun 2013 terjadi penurunan skor menjadi 52,5% disebabkan adanya pengurangan pengungkapan menjadi 42 item dan predikat yang didapatkan Kurang Informatif. Namun skor pada tahun 2014 terjadi peningkatan kembali menjadi 57,5% dengan pengungkapan sebanyak 46 item, yang mana

penambahan item tersebut hanya beda 1 (satu) item dengan tahun 2012 yaitu terdapat kegiatan mengurangi pemanasan global seperti pengelolaan air bersih. Namun, predikat yang didapatkan masih sama yaitu Kurang Informatif.

Bank Panin Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor 47,5% dengan pengungkapan sebanyak 38 item, dan predikat yang didapatkan adalah Tidak Informatif. Kemudian pada tahun 2013 terjadi peningkatan skor menjadi 62,5% disebabkan adanya penambahan pengungkapan menjadi 50 item yang mana pada tahun tersebut Bank Panin Syariah telah melakukan pengungkapan atas sumber, jumlah dan penerima zakat dari perusahaan atau diari karyawan, kegiatan dalam penanganan keluhan nasabah dan membangun program jenjang karir karyawan, namun predikat yang didapatkan masih Kurang Informatif. Adapaun peningkatan skor yang signifikan terjadi pada tahun 2014 dengan perolehan skor 71,3 dengan adanya penambahan pengungkapan menjadi 57 item, sehingga predikat yang didapatkan menjadi Infomatif.

Maybank Syariah pada tahun 2012 memperoleh skor 46,3% dengan pengungkapan sebanyak 37 item dan predikat yang didapatkan adalah Tidak Informatif. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan skor menjadi 50% disebabkan adanya penambahan pengungkapan menjadi 40 item, hal ini karena pada tahun tersebut Maybank Syariah telah melakukan kegiatan sosial dalam bentuk bantuan pendirian atau renovasi sekolah, dalam bentuk *financial* dan *non financial*, pembangunan atau renovasi masjid, bantuan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Namun peningkatan skor tersebut tidak mengubah predikat yang didapatkan yaitu Tidak Informatif. Sedangkan, pada tahun 2014 skor ISR kembali turun menjadi 45% dengan pengungkapan sebanyak 36 item. Perolehan skor tersebut lebih kecil jika dibandingkan

dengan tahun 2012 dan 2013. Sehingga predikat yang didapatkan adalah Tidak Informatif.

Adapun predikat indeks ISR secara kumulatif yang diperoleh Bank Umum Syariah pada tahun 2012 sampai 2014

dapat dilihat pada Tabel 4.2. serta Grafik 4.1. mengenai rata-rata perbandingan tingkat pengungkapan indeks ISR antar Bank Umum Syariah pada tahun 2012 sampai 2014.

Tabel 4.2. Tingkat Predikat Pengungkapan Bank Umum Syariah Pada Tahun 2012-2014

No	Nama BUS	Tahun		
		2012	2013	2014
1	BMI	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif
2	BSM	Sangat Informatif	Sangat Informatif	Sangat Informatif
3	BMS	Kurang Informatif	Kurang Informatif	Kurang Informatif
4	BRIS	Informatif	Informatif	Informatif
5	BSB	Informatif	Kurang Informatif	Informatif
6	BNIS	Kurang Informatif	Informatif	Informatif
7	BVS	Tidak Informatif	Tidak Informatif	Kurang Informatif
8	BCAS	Kurang Informatif	Kurang Informatif	Kurang Informatif
9	BJBS	Kurang Informatif	Kurang Informatif	Kurang Informatif
10	BPS	Tidak Informatif	Kurang Informatif	Informatif
11	MBS	Tidak Informatif	Tidak Informatif	Tidak Informatif

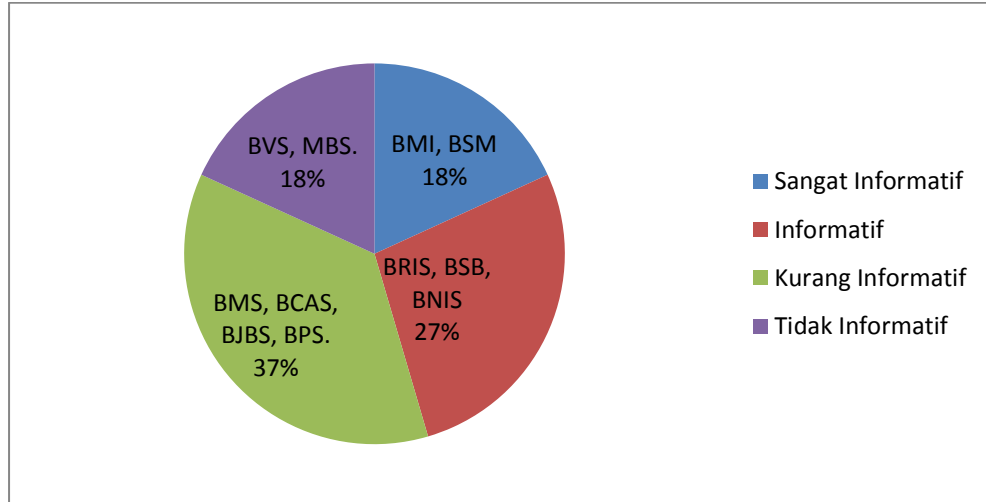
Secara keseluruhan, pada tahun 2012 Bank Umum Syariah yang mendapatkan predikat Sangat Informatif diraih oleh Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri. Hal ini dirasa wajar karena bank syariah tersebut telah berdiri lebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah yang lainnya. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia pada lima tahun terakhir ini mendapatkan 100 penghargaan yang bergengsi, salah satunya pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai “*Best Islamic Bank in Indonesia*” dan “*The Most Innovative Islamic Bank*” dari *Islamic Finance News*. Hal ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih agresif dengan disertai oleh peningkatan kualitas layanan dan terus melakukan inovasi agar dapat menjadi *leader* di industri perbankan syariah. Sedangkan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan sebagai “*Corporate Image*

Award” dari majalah tempo media group bekerja sama dengan *frontier consulting group*. Predikat Informatif secara konsisten diraih oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah, sedangkan Bank Negara Indonesia Syariah memperoleh predikat Informatif ditahun 2013 dan 2014 yang mana sebelumnya hanya mendapatkan predikat Kurang Informatif padahal pada tahun 2012 bank syariah tersebut memperoleh penghargaan dibidang *Good Corporate Governance* dan laba yang diperoleh juga meningkat 53,6%. Kemudian Bank Panin Syariah pada tahun 2014 memperoleh predikat Informatif padahal tahun sebelumnya hanya mendapatkan predikat Tidak Informatif dan Kurang Informatif hal ini diasumsikan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank syariah tersebut pada tahun 2014 sangat bagus yang mana terdapat pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa, pengadaan Al-Qur’an terjemahan bagi karyawan dan lain-lain. Untuk melihat seberapa banyak bank syariah dan prosentasenya dalam

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

memperoleh predikat secara kumulatif pada tahun 2012 sampai 2014 dapat disajikan berdasarkan Grafik 4.1.:

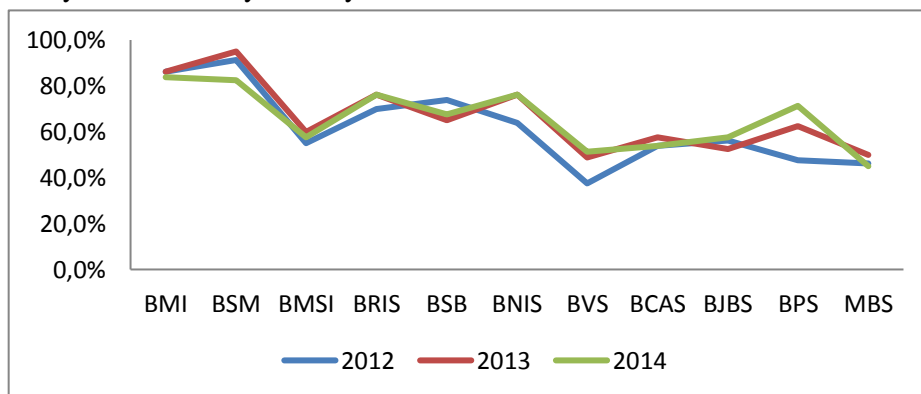


Grafik 4.1. Tingkat Prosentase Predikat Pengungkapan Indeks ISR Kumulatif Bank Umum Syariah Pada Tahun 2012-2014

Dari Grafik 4.1. diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2012 sampai 2014, Bank Umum Syariah lebih banyak mendapatkan predikat Kurang Informatif yang mana skor yang diperoleh sebesar 37%. Sedangkan bank syariah yang memperoleh predikat Sangat Informatif secara konsisten diraih oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, skor tersebut sama dengan hasil yang diperoleh Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah

yang secara konsisten berada pada predikat Tidak Informatif. Sedangkan predikat Informatif selama tiga tahun terakhir diraih oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Negara Indonesia Syariah.

Pada Grafik 4.2. berikut ini dijelaskan mengenai peningkatan indeks ISR Bank Umum Syariah secara keseluruhan di tahun 2012-2014.



Grafik 4.2. Tingkat Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR Pada Tahun 2012-2014

Dari Grafik 4.2. diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank

Umum Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, Bank Umum Syariah yang

dianggap telah baik dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR sebanyak 4 (empat) bank syariah. Sedangkan, pada tahun 2013 mendapatkan hasil yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat 4 (empat) bank syariah yang dianggap sudah baik pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR. Kemudian pada tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 6 (enam) bank syariah yang dianggap sudah baik dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR.

Hasil penelitian ini sekaligus memberikan konfirmasi terhadap penelitian Fitria dan Hartati (2010) bahwa dengan menggunakan indikator ISR yang lebih komprehensif ternyata hasil yang diperoleh menjadi lebih baik, kemudian mengkonfirmasi pula hasil temuan Gustani dan Bayinah (2014) bahwa pada tahun 2014 telah terdapat 6 bank syariah yang mendapatkan predikat Informatif dan Sangat Informatif.

4.1. Urgensi ISR Bagi Bank Umum Syariah.

Adapun dampak yang diperoleh Bank Umum Syariah ketika menggunakan indeks ISR sebagai alat ukur dalam pelaporan CSR nya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menunjukkan kepada masyarakat mengenai peran perusahaan dalam perspektif spiritualnya (Haniffa, 2002). Sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui tentang peran perusahaan terhadap perekonomian saja, melainkan lebih luas dari pada itu dengan mengetahui kegiatan sosial, lingkungan, karyawan dan lain sebagainya dengan berlandaskan nilai-nilai Islami didalamnya.
- b. Dapat memberikan *feedback* yang baik bagi Bank Umum Syariah seperti dalam hal peningkatan penjualan produk, karena pada dasarnya indeks ISR sangat memperhatikan kehalalan atas produk yang dihasilkan.

- c. Akan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder* nya. Hal ini dikarenakan *stakeholder* merasa yakin dan percaya atas dana yang diinvestasikannya akan aman. Indeks ISR pun telah memperhatikan aktivitas yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari aktivitas yang terlarang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah tahun 2012 sampai 2014 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Skor ISR tertinggi secara kumulatif diraih oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan skor 89,6% dan perolehan skor terendah diraih oleh Bank Victoria Syariah dengan perolehan skor sebesar 45,8%. Dari enam tema yang diteliti terdapat beberapa tema yang banyak diungkapkan oleh bank syariah diantaranya: tema tata kelola perusahaan, dan tema produk dan jasa. Sedangkan tema yang paling sedikit diungkapkan oleh Bank Umum Syariah adalah tema sosial dan lingkungan.

Adapun berdasarkan hasil skor yang diperoleh tersebut dapat ditentukan tingkat konsistensi perolehan predikat Bank Umum Syariah pada tahun 2012 sampai 2014 yang mana Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri konsisten meraih predikat Sangat Informatif pada tahun 2012 sampai 2014. Bank Rakyat Indonesia Syariah pun setiap tahunnya selalu konsisten memperoleh predikat Informatif. Bank Syariah Bukopin mendapatkan predikat Kurang Informatif hanya pada tahun 2013 namun pada tahun 2012 dan 2014 predikat yang didapatkan adalah Informatif. Berbeda halnya dengan Bank Negara Indonesia Syariah yang mendapatkan predikat Tidak Informatif pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 dan 2014 meningkat secara signifikan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

menjadi Informatif. Bank Panin Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara bertahap dimana pada tahun 2012 hanya mendapatkan predikat Tidak Informatif, tahun 2013 menjadi Kurang Informatif, dan tahun 2014 menjadi Informatif. Bank Mega Syariah, Bank Central Asia Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012 sampai 2014 selalu mendapatkan predikat Kurang Informatif. Sedangkan Bank Victoria Syariah pada tahun 2012 dan 2013 mendapatkan predikat Tidak Informatif namun pada tahun 2014 mendapatkan predikat Kurang Informatif. Adapun bank syariah yang selalu mendapatkan predikat Tidak Informatif dari tahun 2012 sampai 2014 adalah Maybank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema insani press.

Bank Indonesia. (2010). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Dipetik 01 12, 2013, dari http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/AEA3A15E-F508-477E-AD3A-B00935096EFA/19921/se_121312.pdf.

Bank Central Asia Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari Situs Resmi Bank Central Asia Syariah: www.bcasyariah.co.id

Bank Jabar Banten Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2015, dari Situs Resmi Bank Jabar

Banten Syariah: www.bjbsyariah.co.id.

Bank Mega Syariah Indonesia. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014* Dipetik Nopember 19, 2015, dari Situs Resmi Bank Mega Syariah Indonesia: www.megasyariah.co.id.

Bank Muamalat Indonesia. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari www.bankmuamalat.co.id.

Bank Negara Indonesia Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2015, dari Situs Resmi Bank Negara Indonesia Syariah: www.bnisyariah.co.id.

Bank Panin Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2015, dari Situs Resmi Bank Panin Syariah: www.paninbanksyariah.co.id.

Bank Rakyat Indonesia Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari Situs Resmi Bank Rakyat Indonesia Syariah: www.brisyariah.co.id.

Bank Syariah Bukopin. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari Situs Resmi Bank Syariah Bukopin: www.syariahbukopin.co.id.

Bank Syariah Mandiri. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari Situs Resmi Bank Syariah Mandiri: www.syariahmandiri.co.id.

- Bank Victoria Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari Situs Resmi Bank Victoria Syariah:
www.bankvictoriasyariah.co.id.
- Fauziah, K., & Yudho, P. (2013). Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5 No. 1.
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). "Islam dan Tanggung Jawab Social: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks." *Simposium Nasional Akuntansi(SNA) XIII*.
- Gustani, & Bayinah, A. n. (2014). "Model pelaporan kinerja sosial perbankan syariah : implementasi islamic social reporting index (Index ISR) di indonesia." *Jurnal Akuntansi dan keuangan Islam*, 2 No. 1.
- Haniffa, R. (2002). "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. Indonesia Management & Accounting Research." *Indonesian Management & Accounting Research Vol.1 No.2*.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics*.
- Ismail. (2010). *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Maybank Syariah. (t.thn.). *Laporan Tahunan Periode 2012-2014*. Dipetik Nopember 19, 2014, dari www.maybanksyariah.co.id.
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). "Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia." *International Business & Economics Research Journal*, 3, 135-144. 9 Number 4.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia." *Research Journal Of International Studies -Issue 12*.
- Putra, H. F. (2014). "Corporate Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan indeks Islamic social reporting (ISR)". *Prosiding*.
- Sofyani, H., & Setiawan, A. (2012). "Perbankan Syariah Dan Tanggungjawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Islamic Social Reporting Index Dan Globalreporting Initiative Index." *Prosiding*.
- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., Wahyuni, S. (2012). "Islamic Social Reporting Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Melayu)." *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, hal. 36-46.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

POSDAYA UNIVERSITAS TRILOGI SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN SUSTAINABILITY REPORTING

Afrizal Aziz

Universitas Trilogi, Jakarta

Email: afrizal.aziz@universitas-trilogi.ac.id

ABSTRACT

Trilogi University, implement its in Tri Dharma Perguruan Tinggi , especially the third Dharma is devotion society, have a moral responsibility to serve the community by involving elements of lecturers or students. Posdaya is a forum gathering, advocacy, communication, and education, as well as a coordination of activities to strengthen family functions in an integrated manner. Posdaya is a vehicle for the empowerment of family functions by revitalizing the social capital of the communities, such as the spirit of mutual cooperation. Attempts were made through Posdaya developed gradually, and is primarily intended to increase the Human Development Index (HDI/ HDI). To that end, the activities prioritized in four areas, namely: education, health, entrepreneurship, and the environment. Szekely (2005) states that sustainability is how to build a society in which economic, social and ecological objectives must be balanced. One approach is most often used to measure corporate sustainability is a triple bottom line approach. The approach involves three dimensions: Environmental (environmental); Social (social); and Economic (economic).

Key Words: Sustainable Reporting, Sustainability Development, Posdaya, IPM

ABSTRAK

Universitas Trilogi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma yang ketiga yaitu Pengabdian masyarakat, memiliki tanggungjawab moral untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan unsur Dosen ataupun mahasiswa. Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, dan edukasi, sekaligus sebagai wadah koordinasi kegiatan-kegiatan untuk penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Posdaya adalah wahana untuk pemberdayaan fungsi-fungsi keluarga dengan merevitalisasi modal sosial yang dimiliki masyarakat, seperti semangat kegotongroyongan. Upaya-upaya yang dilakukan melalui Posdaya dikembangkan secara bertahap, dan terutama ditujukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/ HDI). Untuk itu, kegiatan-kegiatan diprioritaskan pada empat bidang yaitu: bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Szekely (2005) menyatakan bahwa sustainability adalah bagaimana membangun masyarakat dimana ekonomi, social dan tujuan ekologi harus seimbang. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur corporate sustainability adalah pendekatan triple bottom line. Pendekatan tersebut melibatkan tiga dimensi yakni: Environmental (lingkungan); Social (sosial); dan Economic (ekonomi).

Kata Kunci: Sustainable Reporting, Sustainability Development, Posdaya, IPM

1. PENDAHULUAN

Universitas Trilogi, yang mengusung 3 (tiga) Pilar yaitu *Teknopreneur*, Kolaborasi, Kemandirian. Pilar ini akan menjadi roh dalam tiap pelaksanaan aktivitasnya. Diawal perkuliahan semangat ini sudah didengungkan kepada seluruh mahasiswa dengan cara membentuk kelompok belajar (perwujudan dari kolaborasi) yang terdiri atas mahasiswa yang berasal dari Program Studi berbeda dengan dibantu seorang Kakak Asuh serta adanya dosen pembimbing kelompok. Komunikasi antar anggota kelompok, Kakak Asuh serta dosen pembimbing diluar jadwal yang telah disepakati dapat berlangsung dengan memanfaatkan Teknologi (perwujudan dari *teknopreneur*). Dalam tiap kelompok, mahasiswa dapat saling berbagi pengalaman belajar serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kuliah ataupun hal penunjang proses perkuliahan lainnya. Dari adanya pertemuan-pertemuan kelompok ini akan terwujud kepercayaan diri yang pada akhirnya akan menimbulkan kemandirian, (perwujudan dari pilar kemandirian).

Proses perkuliahan di Universitas Trilogi didominasi dengan model *Cooperative Learning* dimana kuliah berlangsung dengan diskusi setelah sebelumnya mahasiswa dikelompok-kelompokan untuk membahas materi berdasarkan RPKPS.

Pada semester 6 (enam), mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN, dibekali dengan pengetahuan serta pengalaman belajar tentang tata cara pembentukan posdaya. Pembekalan ini dilaksanakan pada program studi masing-masing, untuk dosen pengampu mata kuliah KKN, telah menjelaskan dan menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa pelaksanaan KKN akan dikelompokkan dari program studi yang

berbeda dengan bimbingan seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Tiap kelompok yang telah dibentuk serta memiliki DPL, wajib melakukan pertemuan dengan sesama anggota disertai Dosen Pembimbing Lapangan, hal ini untuk mendukung pilar kolaborasi. Maksud dari pertemuan ini antara lain untuk saling berkenalan satu sama lainnya serta DPL akan menjelaskan tujuan, maksud, strategi, program yang akan dijalankan, dan waktu yang diperlukan serta lokasi yang telah ditentukan.

Universitas Trilogi merupakan pengembangan dari STEKPI (Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan & Perbankan Indonesia), pengembangan ini dilakukan pada tahun 2013. Saat ini Universitas Trilogi memiliki 13 Program Studi dan 1 Program Pascasarjana.

Pasca pengembangan dari STEKPI ke Universitas Trilogi, sampai sekarang Universitas Trilogi telah membina posdaya binaan, posdaya lingkaran kampus serta posdaya hasil sosialisasi. Berikut disajikan pada Tabel 1.1.:

Tabel 1.1. Perkembangan Posdaya Universitas Trilogi Tahun 2013 – 2016

Tahun	Jenis Posdaya			Jumlah
	Binaan	Lingkaran Kampus	Sosialisasi	
2013	5	7	-	12
2014	-	25	-	25
2015	-	29	-	29
2016	-	41	10	51
Total	5	102	10	117

Mencermati data diatas, Universitas Trilogi memiliki 5 posdaya binaan yang artinya posdaya dimaksud akan dibina langsung oleh Universitas Trilogi dengan penunjukkan Dosen Pembimbing Lapangan dan dibawah pengawasan dari LPPM Universitas.

Posdaya lingkaran kampus, adalah posdaya yang berada di seputaran lokasi Universitas Trilogi, pembentukannya berasal dari hasil KKN mahasiswa. Sementara posdaya sosialisasi, adalah posdaya yang berhasil dibentuk atas sosialisasi yang dilakukan oleh

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

mahasiswa KKN disertai dosen pendamping, dan kecenderungan posdaya ini berasal dilingkar luar kampus.

Universitas Trilogi dalam pelaksanaan KKN mengusung tema KKN tematik posdaya, pemilihan tema ini tidak lepas dari bentuk tanggung jawab Universitas terhadap lingkungan lingkaran kampus. Universitas Trilogi berada kelurahan Duren Tiga Kalibata, bertetangga dengan kecamatan Pancoran, dan Pasar Minggu.

Tahun pertama dan kedua pelaksanaan KKN tematik berfokus di kecamatan Pancoran, selanjutnya bergerak ke kecamatan Pasar Minggu. Penentuan lokasi merupakan hasil kajian dari LPPM Universitas Trilogi.

LPPM Universitas telah melakukan kajian secara mendalam tentang obyek KKN, faktor utama yang menjadi pertimbangan LPPM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), faktor sosial dan ekonomi.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Posdaya

2.1.1. Pengertian Posdaya

Posdaya adalah kependekan dari pos pemberdayaan keluarga merupakan suatu forum silaturahmi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 (delapan) fungsi keluarga secara terpadu, utamanya fungsi agama, budaya, perlindungan, reproduksi/ kesehatan, pendidikan, ekonomi/ wirausaha dan lingkungan.

Posdaya bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kegotong-royongan di masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan saling membantu dalam mengatasi masalah yang dialami warganya terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan agama.

2.1.2. Cara Membentuk Posdaya

Pertama lakukan pengumpulan data kelembagaan dan pendekatan non formal kepada tokoh masyarakat dan kelurahan/ desa, apabila ada potensi dan mendapat respon positif maka tahap selanjutnya dapat mulai dilaksanakan. Namun, jika mendapat respon negatif, maka pembentukan posdaya untuk sementara ditunda.

Setelah mendapat respon positif dari masyarakat, diadakan diskusi/ musyawarah antara tokoh masyarakat dan unsur lembaga yang ada disekitar untuk memperoleh informasi kesiapan masyarakat untuk ber-posdaya. Selanjutnya dilakukan pendataan sasaran, kebutuhan, permasalahan dan potensi pemberdayaan yang ada di masyarakat. Setelah itu pelaksanaan program-program kerja, pendampingan, pengisian berbagai program yang relevan sesuai kebutuhan. Ketika posdaya makin berkembang, maka berpeluang untuk membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang memungkinkan.

2.1.3. Kegiatan Posdaya

Program utama posdaya terbagi dalam empat bidang yang akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Bidang tersebut adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

Bidang pendidikan yang dimaksud adalah untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar semua anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan. Solusinya dapat dicarikan orang tua asuh, donator, mengikuti program paket, mendirikan PAUD, pustaka desa, komputera (komputer untuk pemberdayaan), dan lain-lain. Bidang kesehatan lebih ditonjolkan pada upaya hidup sehat, penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi.

Bidang ekonomi atau kewirausahaan untuk menumbuhkan semangat kerja produktif dan

meningkatkan pendapatan untuk keluarga.

Bidang lingkungan diarahkan untuk menata lingkungan agar lebih sehat, asri dan juga menghasilkan misalnya dengan menanam kebun bergizi pada setiap rumah, baik di pekarangan maupun dalam pot.

2.2. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

2.2.1. Pengertian Kuliah Kerja Nyata

Adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa.

2.2.2. KKN Tematik

KKN tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (kabupaten/kota). Masing-masing Universitas memiliki istilah tersendiri dalam KKN. Sebagian Universitas menerapkan KKN tematik dan sebagian lagi menerapkan KKN posdaya.

KKN tematik adalah program KKN berbasis *problem solving* untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target tertentu.

Ciri-ciri:

- a. Program kegiatan dirancang tematik, melembaga, berkesinambungan dan berbasis kompetensi;
- b. Mencerminkan kompleksitas permasalahan dan arah kebijakan pembangunan pemerintah;
- c. Dilaksanakan oleh mahasiswa, DPL dan masyarakat;

- d. Dilaksanakan waktu terbatas, efisien, efektif dengan mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan masyarakat.

2.2.3. Sifat KKN Tematik

Sifat KKN tematik adalah melembaga, koordinatif, interdisipliner, berkesinambungan dan berbasis kemasyarakatan.

2.2.4. Prinsip Pelaksanaan KKN Tematik

- a. Keterpaduan;
- b. Kebutuhan;
- c. Kemampuan sendiri;
- d. Interdisipliner;
- e. Partisipasi aktif;
- f. Keberlanjutan.

2.2.5. Tujuan KKN Tematik

- a. Peningkatan kualitas pendidikan;
- b. Peningkatan kualitas kesehatan;
- c. Peningkatan daya beli masyarakat;
- d. Kemandirian pangan;
- e. Peningkatan daya kerja aparatur;
- f. Peningkatan infrastruktur wilayah;
- g. Kemandirian energi dan kecukupan air baku;
- h. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup;
- i. Pembangunan perdesaan;
- j. Pengembangan budaya lokal.

2.2.6. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posdaya

Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.

2.2.7. Maksud KKN Posdaya

- a. Terselenggaranya upaya pemberdayaan dalam masyarakat.
- b. Membantu keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.
- c. Mewujudkan keluarga mandiri.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2.2.8. Tujuan Umum KKN Posdaya

- a. Menguatkan fungsi-fungsi keluarga.
- b. Mendorong keluarga untuk mampu membangun dirinya, sehingga meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.
- c. Mendorong meningkatkan mutu keluarga.
- d. Mendorong terpeliharanya infrastruktur sosial berdasarkan kearifan budaya lokal, sehingga memperkuat keutuhan sebagai bangsa Indonesia.

2.2.9. Tujuan Khusus KKN Posdaya

- a. Mensosialisasikan posdaya.
- b. Mengidentifikasi Potensi kelembagaan dan SDM yang mendukung pembentukan posdaya.
- c. Pembentukan posdaya (berbasis: masjid, PKK, karang taruna).
- d. Pembuatan SK kepengurusan posdaya (minimal di sahkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan).
- e. Pembuatan profil posdaya dan pendampingan/ pengisian kegiatan: pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, lingkungan hidup dan agama.
- f. Pendampingan aktifitas posdaya (memperkuat program dan mengembangkan program).

2.2.10. Sasaran KKN Posdaya

- a. Sasaran obyek KKN posdaya:
 - 1) Kalangan Keluarga muda tidak mampu secara ekonomi.
 - 2) Kalangan keluarga marjinal (perkantoran: faktor lemahnya akses).
 - 3) Kalangan keluarga marjinal (pedesaan karena faktor geografi 3T: Terpencil, Terpencar, Tertinggal).
- b. Sasaran subyek KKN posdaya:
 - 1) Kepala desa/ lurah, camat, bupati/ wali kota, agar meningkatkan perhatiannya terhadap keluarga muda yang tidak mampu.

- 2) Lembaga sosial masyarakat yang ada (tim Penggerak PKK, lembaga keagamaan, lembaga adat, DKM, karang taruna dan lain-lain) agar meningkatkan peran dan fungsinya.
- c. Sasaran program KKN posdaya:
 - 1) Pendidikan:
 - i. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.
 - ii. Membentuk dan menguatkan PAUD.
 - iii. Membantu memecahkan masalah anak yang tidak sekolah/ melanjutkan pendidikan (Wajar Dikdas).
 - iv. Program keaksaraan fungsional.
 - v. Pendidikan luar sekolah (PLS) (paket A/ B/ C).
 - vi. Pemberantasan buta huruf/ baca tulis Alquran dengan metoda *Bil-Hikmah*.
 - 2) Kesehatan
 - i. Kesehatan ibu dan anak.
 - ii. Gizi keluarga.
 - iii. Posyandu
 - 3) Wirausaha/ Ekonomi
 - i. Mendorong peningkatan ekonomi keluarga.
 - ii. Ekonomi berbasis keunggulan lokal.
 - iii. Ekonomi kreatif.
 - 4) Lingkungan hidup
 - i. Pemanfaatan halaman untuk dijadikan taman gizi dan taman buah.
 - ii. Penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih.
 - iii. Kehidupan bertetangga.
 - 5) Keagamaan dan budaya
 - i. Mendorong IMTAK dan budi pekerti.
 - ii. Menciptakan keluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya sendiri.
 - iii. Mengembangkan kearifan budaya lokal sebagai *social capital*.

2.2.11. Target KKN Posdaya

- a. Terbentuk posdaya.
- b. Terdapatnya kegiatan pendampingan dan penguatan posdaya (program pendidikan, kesehatan, wirausaha/ekonomi, lingkungan hidup dan keagamaan dan budaya).

2.3. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

2.3.1. Pengertian IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
- c. Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk

domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("a process of enlarging people's choices"). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana yang dikeluarkan oleh UNDP yakni merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/ paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia

secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

2.3.2. Cara Menghitung IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Untuk menghitung IPM (Indeks Pembangunan Manusia), adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).
- c. Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan

manusia pada skala 0,0–100,0 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peringkat Kinerja Pembangunan Manusia

Keterangan	Range Nilai IPM
Tinggi	IPM lebih dari 80,0
Menengah Atas	IPM antara 66,0-79,9
Menengah Bawah	IPM antara 50,0-65,9
Rendah	IPM kurang dari 50,0

Sumber data: Sumber data penghitungan komponen IPM berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS setiap tahun yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

2.3.3. Konsep Penghitungan IPM

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

a. Usia Hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan *eo*. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, *eo* sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia *eo* dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata

anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

b. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years school*).

c. Standar hidup layak

Selain usia hidup, dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

INDIKATOR	NILAI		CATATAN
	MAKSIMUM	MINIMUM	
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita Yang disesuaikan	732,72	300000 (1996) 360.000 (1999)	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Manual Teknis Operasional Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Manusia (BPS, Bappenas, UNDP)

Tahapan perhitungan IPM terlihat sebagai berikut:

- a) Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = X_1 , Pengetahuan = X_2 dan Standar Hidup Layak = X_3)

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Dimana:

X_i : Indikator komponen pembangunan manusia ke- i ,

I : 1,2,3

X_{\min} : Nilai minimum X_i

X_{\max} : Nilai Maksimum X_i

- b) Tahapan kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan rumus:

$$\text{IPM} = \{X_1 + X_2 + X_3\} / 3$$

Dimana:

X_1 = Indeks angka harapan hidup

X_2 = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 = Indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

- c) Tahap ketiga adalah menghitung reduksi *short fall*, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$r = \{(\text{IPM}_{t+n} - \text{IPM}_t) / (\text{IPM ideal} - \text{IPM}_t) \times 100\}^{1/n}$$

Dimana:

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t+n} : IPM pada tahun $t+n$

IPM ideal : 100

2.4. Sustainability

2.4.1. Pengertian Sustainability

Sustainability report menurut *World Business Council for Sustainable Development* adalah laporan publik perusahaan yang memberikan gambaran mengenai posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternal (WBCSD dalam Soelistyoningrum, 2011). Sementara menurut Szekely (2005) menyatakan bahwa *sustainability* adalah bagaimana membangun masyarakat dimana ekonomi, sosial dan tujuan ekologi harus seimbang. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur *corporate sustainability* adalah pendekatan *triple bottom line*. Pendekatan tersebut melibatkan tiga dimensi yakni:

- Environmental* (lingkungan); mengukur dampak pada sumber daya seperti udara, air, emisi limbah.
- Social* (sosial); berhubungan dengan *corporate governance*, motivasi, insentif, keamanan dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hak asasi manusia dan perilaku etis.
- Economic* (ekonomi); mengacu pada pengukuran pemeliharaan atau peningkatan keberhasilan perusahaan sebagai contoh, teknologi dan inovasi, kolaborasi, manajemen pengetahuan, pembelian, proses dan pelaporan *sustainability*.

Dalam berbagai definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konsep *sustainability* ini yang paling terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada dengan efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu kita juga harus menghindari hal atau pengeluaran, resiko yang tidak perlu serta menghindari limbah sehingga tidak menghabiskan cadangan sumber daya lingkungan, meningkatkan material dan efisiensi energi untuk generasi masa depan.

2.4.2. Sustainable Reporting dan Peranannya

Di dalam konsep *sustainability*, maka tiap perusahaan wajib menyusun laporan. Pelaporan tersebut bisa disebut dengan laporan berkelanjutan (*sustainable reporting*) yang merupakan pengungkapan dari tiga aspek kerja perusahaan, yakni lingkungan, sosial dan ekonomi. Pelaporan tersebut diharapkan menjadi alat komunikasi atau bukti untuk pemangku kepentingan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan kinerja lingkungan maupun sosialnya.

Adapun pedoman penyusunan pelaporan *sustainability* untuk perusahaan yang dibuat oleh *Global Reporting Initiative*. Di dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa *Global Reporting Initiative* (GRI) bertujuan untuk mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ekonomi global yang berkelanjutan.

Misi GRI adalah untuk membuat pelaporan keberlanjutan menjadi praktik standar. Agar semua perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola mereka, GRI membuat pedoman pelaporan keberlanjutan tidak berbayar. Menurut GRI sendiri

menyebutkan bahwa "*A sustainability report is a type of corporate or organizational report. A sustainability report conveys sustainability-related information in a way that is comparable with financial reporting*".

Ruang lingkup *reporting* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Strategy and analysis*, yang digambarkan dari *statement* CEO dan preskom atau ketua organisasi independen terhadap organisasi pembuat laporan yang memaparkan risiko dan peluang penting secara ringkas.
- b. *Organization profile*, meliputi nama organisasi, produk-produknya, struktur operasional, negara-negara di mana perusahaan beroperasi, kondisi kepemilikan dan badan hukumnya, pasar, skala organisasi, serta keputusan-keputusan penting selama periode pelaporan.
- c. *Reporting parameters*: lingkup atau profilnya, keterangan mengenai prosesnya, dan batasan pelaporan, daftar isi dan *assurance* yang menerangkan lingkup dan dasar penilaian dari pihak independen yang digunakan ketika melakukan penilaian dan melaporkannya.
- d. *Governance* (struktur organisasi dan tata kepemimpinan dalam organisasi tersebut), *commitments to external initiatives* (keterangan mengenai apakah dan bagaimana pendekatan tertentu diambil oleh perusahaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip/ perjanjian/ kesepakatan dalam hal sosial dan lingkungan yang dikembangkan secara eksternal dan diterapkan secara sukarela) dan *engagement* (sebagai gambaran luasnya pemangku kepentingan yang didefinisikan oleh organisasi dan relasi dengan para pemangku kepentingan tersebut).

GRI juga menyebutkan beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk membantu organisasi-organisasi pelapor

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

mengetahui lingkup dan aspek yang dibahas dalam laporannya antara lain:

- a. Kinerja perekonomian, meliputi: penciptaan dan pendistribusian nilai ekonomi, kehadiran di pasar serta dampak ekonomi secara tak langsung.
- b. Kinerja lingkungan, meliputi: bahan yang digunakan, energi dan konsumsinya, air dan konsumsinya, pembuangan-emisi-pelepasan limbah (cair, padat dan gas), produk dan jasa, kepatuhan, transport, dan penilaian aspek-aspek itu secara keseluruhan.
- c. Kinerja sosial dalam praktek perburuhan dan pemenuhan aturan-aturan hubungan industrial, meliputi: kondisi pekerja (jumlah, komposisi *gender*, pekerja purna waktu dan paruh waktu), relasi buruh dengan manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan-pendidikan-pengembangan karyawan, serta keberagaman dan peluang.
- d. Kinerja sosial dalam aspek HAM, meliputi: praktek manajemen, penerapan prinsip non diskriminasi, kebebasan untuk mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak, pemaksaan untuk bekerja, praktek pendisiplinan, praktek pengamanan, dan hak-hak masyarakat adat.
- e. Kinerja sosial terhadap masyarakat, meliputi berbagai kepedulian dan langkah perusahaan mengantisipasi atau mengelola isu-isu: komunitas, korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti kompetitif seperti anti *trust* dan monopoli.
- f. Kinerja sosial dalam aspek *product responsibility*, yaitu mencakup beberapa aspek: kesehatan dan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan pada umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta *customer privacy*.

Perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep *sustainability* menggunakan *Global Reporting Initiative* sebagai acuan dan pedoman

pembuatan pelaporan. Pelaporan ini digunakan pemangku kepentingan untuk menilai aspek-aspek yang diperlukan. *Sustainability reporting* pada prinsipnya merupakan inisiatif bersama dari berbagai pihak dalam membangun kepedulian untuk peningkatan kinerja bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat.

2.5. Teori-teori yang Mendasari Triple Bottom Line

2.5.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang diungkapkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut berada. Ketika terjadi suatu perbedaan, baik yang nyata atau berpotensi muncul di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi entitas. Sesuai dengan yang dinyatakan O'Donovan (2002) bahwa legitimasi merupakan gagasan agar sebuah organisasi dapat terus beroperasi dengan sukses, maka organisasi tersebut harus bertindak sesuai aturanyang diterima secara luas oleh masyarakat.

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah sebagai, “Teori yang menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas”.

Ghozali & Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antar perusahaan dan masyarakat di tempat perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Jadi, setiap perusahaan memiliki kontrak

implisit dengan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung di dalam masyarakat. Apabila perusahaan bertindak memenuhi kontrak implisit maka masyarakat akan mendukung keinginan perusahaan tersebut. Ahmad, dkk., (2004) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan masyarakat, dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian, perusahaan disarankan untuk mengungkapkan kinerja lingkungan sehingga mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan memperoleh legitimasi atas usahanya.

Perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Saidi (2004), teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status, yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan kongruen dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Ketika suatu perbedaan yang nyata atau potensial ada antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. O'Donovan (2002) mendefinisikan legitimasi sebagai, "*Legitimacy theory as the idea that in order for an organization to continue operating successfully, it must act in a manner that society deems socially acceptable*".

Barkemeyer (2007) menyatakan legitimasi sebagai, "*Legitimacy is sought by organisations as it affects by understanding and actions of people towards the organization. People*

perceive a legitimate organisation as "... more trustworthy". Lebih lanjut Barkemeyer (2007) memberikan definisi mengenai *organizational legitimacy* sebagai, "*Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions*".

Jadi, legitimasi adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berlaku, peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memerhatikan lingkungan.

Legitimasi organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Kedudukan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat ditunjukkan dengan operasi perusahaan yang seringkali memengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota komunitas tersebut.

Gray, dkk., (1995) juga menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan akan berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang seiring dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini akan mendorong perusahaan melalui top manajemennya

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

akan mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik yang relevan dengan *stakeholder*.

Perusahaan menggunakan laporan keuangan tahunan untuk menggambarkan akuntabilitas atau tanggung jawab manajemen terhadap perusahaan dan kesan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan yang bersangkutan diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan nilai perusahaan dapat meningkat sehingga berdampak pula pada peningkatan laba perusahaan. Hal ini juga dapat mendorong dan membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Lindblom (1994) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan kongruen dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Hal ini menyebabkan munculnya ancaman terhadap legitimasi perusahaan ketika terjadi perbedaan yang nyata atau potensial antara kedua sistem nilai tersebut. Sehingga, dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan akan merasa bahwa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

2.5.2. Teori Stakeholder (*stakeholder theory*)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha

untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Freeman dkk., 2004).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah “Teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* memunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan”.

Budimanta, Prasetijo, & Rudito (2008) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan *stakeholder* yaitu *old-corporate relation* dan *new corporate relation*. *Old-corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan di antara fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan juga bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatn bersama. Pendekatan *old-corporate relation* ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para *stakeholder* baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan.

Sedangkan, pendekatan *new-corporate relation* menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder* sehinggaperusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Hubungan perusahaan dengan *stakeholder* di dalam perusahaan dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatannya yang membangun kerjasama dalam menciptakan kesinambungan usaha perusahaan, sedangkan hubungan dengan *stakeholder* di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan selain menghimpun kekayaan juga berusaha bersama-sama membangun kualitas kehidupan dengan *stakeholder* di luar perusahaan.

2.5.3. Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) menjelaskan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara agen dengan *principal*. *Principal* adalah pemegang saham atau investor sedangkan agen adalah orang yang diberi kuasa oleh *principal* yaitu manajemen untuk mengelola perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan antara *principal* dan agen. Teori agensi ini muncul untuk mengatasi konflik agensi yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Di dalam teori keagenan dikatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (*principal*) memberi kuasa kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Dalam kontrak ini agen berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat dan meningkatkan

kesejahteraan *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Laporan tersebut akan digunakan oleh *principal* sebagai landasan dalam menilai kinerja manajemen. Tetapi, yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya pun dianggap baik. Manajemen seringkali melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri yaitu dengan memaksimalkan laba manajemen yang dilakukan dengan manajemen laba (*earnings management*).

Tindakan manajemen laba ini dapat menyesatkan dan dapat menyebabkan pihak luar membuat keputusan ekonomi yang salah. Gray, dkk., (1995) berpendapat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ *corporate social and environmental disclosure* (CSED) merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari *monitoring* atas rekayasa laba atau isu lain, sehingga berdampak pada harga saham. Aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan memberikan informasi yang berguna dalam penilaian risiko yang lebih akurat bagi investor. Hal ini akan memberikan akses kepada pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa manajemen yang melakukan manajemen laba dapat diprediksikan akan melakukan lebih banyak pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

2.6. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan

2.6.1. Definisi *Triple Bottom Line*

Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Melalui bukunya yang berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”, Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality, dan social justice*. Perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memerhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memerhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Aspek-aspek yang terdapat dalam *triple bottom line* adalah sebagai berikut (Wibisono, 2007).

a. Profit

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan dari setiap kegiatan usaha. Fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Profit sendiri adalah tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

b. *People*

Masyarakat di sekitar perusahaan adalah salah satu *stakeholder* penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dukungan dari masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan

sehingga perusahaan akan selalu berupaya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sehingga perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Secara ringkas, jika perusahaan ingin tetap mempertahankan usahanya, perusahaan juga harus menyertakan tanggung jawab sosial.

c. Planet

Selain aspek *people*, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis, kerap kali sebagian besar perusahaan tidak terlalu memperhatikan hal yang berhubungan dengan lingkungan, karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Dengan melestarikan lingkungan, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kenyamanan dan ketersediaan sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi teks studi pustaka.

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini lebih dekat dengan jenis studi pustaka yang pertama dimana studi ini berusaha menelaah konsep KKN, IPM, *sustainable development* dan *sustainability report*.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penghimpunan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dari LPPM Universitas Trilogi, khususnya untuk data posdaya Universitas Trilogi.

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Penghimpunan data dilakukan dari LPPM Universitas Trilogi, khususnya untuk data posdaya, panduan pendirian posdaya, prosedur KKN, dasar penentuan obyek posdaya, serta Jenis posdaya.

3.3. Analisis Data

Dokumen yang telah diperoleh dari LPPM Universitas Trilogi, diolah kembali karena data yang terhimpun masih dalam proses pengolahan pihak LPPM Universitas. Panduan serta tuntunan yang diterbitkan oleh LPPM disinkronkan dengan teori yang digunakan dalam pembahasan ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi KKN Tematik Posdaya Universitas Trilogi

Keberlangsungan hidup suatu badan usaha (perusahaan atau lembaga pendidikan) haruslah ikut memperhatikan daerah tempatan badan usaha dimaksud. Beragam upaya yang dapat dilakukan, antara lain: dengan memberikan kesempatan kerja, pengadaan fasilitas umum, penyediaan poliklinik atau pemberian bantuan pendidikan.

Bentuk kepedulian Universitas Trilogi, terhadap lingkungannya adalah dengan mengadakan KKN tematik dilingkar kampus, upaya ini sebagai pengejawantahan 3 (tiga) pilar Universitas Trilogi yakni *teknopreneur*, kolaborasi, kemandirian adalah dengan melibatkan semua komponen civitas akademika dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam pelaksanaan KKN tematik posdaya, pihak LPPM Universitas sudah mengelompokkan peserta KKN dari beragam program studi dan menetapkan satu orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Kelompok yang sudah terbentuk, akan berkoordinasi dengan DPL, serta akan memulai KKN berdasarkan prosedur yang telah ada. Masing-masing

kelompok akan mendatangi Rukun Warga disertai surat pengantar dari Universitas tentang maksud dan tujuan dari KKN Tematik.

4.2. Analisis Situasi

Beranjak dari tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup, jumlah penduduk yang kurang sejahtera dan menikmati hidup layak di Indonesia jumlah terbesar berada diaerah pedesaan. Dari segi terpenuhinya sarana dan prasarana, masyarakat yang hidup di daerah pedesaan jauh tertinggal dari masyarakat yang hidup di kota. Masyarakat yang hidup di kota lebih mudah mengakses segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu dilihat dari sosialisasi dan pendidikan yang tidak merata merupakan salah satu faktor pembuat masyarakat yang tinggal di desa kurang memahami betapa pentingnya pendidikan.

Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa memiliki kondisi ekonomi yang rendah, karena kurangnya *skill* dan pengetahuan yang menunjang terciptanya kreatifitas. Penduduk desa bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan perkebunan yang hasilnya tidak bisa dipastikan. Jadi masyarakat di desa lebih memilih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya daripada belajar dibangku sekolah.

Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk mendapatkan pemecahan masalah yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia serta pemberdayaan segala potensi yang ada di desa tersebut melalui penyuluhan dan pembekalan *skill*.

Penanganan hal tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi oleh semua pihak yang merasa peduli dan mampu. Berkenan dengan hal tersebut, mahasiswa sebagai kaum intelektual dan merasa bertanggung jawab untuk ikut membantu pemberdayaan sumber daya

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan mendirikan POSDAYA di wilayah pedesaan serta merumuskan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik sebagai bentuk aplikasi konkrit dari ilmu yang dimiliki mahasiswa.

4.3. Identifikasi Situasi

Program utama posdaya terbagi dalam empat bidang yang akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM. Bidang tersebut adalah:

a. Bidang Pendidikan

Urgensi : Memberikan dorongan kepada masyarakat agar semua anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan.

Solusi : Mencarikan orang tua asuh, donator, mengikuti program paket, mendirikan PAUD, pustaka desa, komputera (komputer untuk pemberdayaan).

b. Bidang Ekonomi

Urgensi : Upaya menciptakan pekerjaan dengan menggunakan potensi yang ada di wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. Bukan dengan memberikan uang sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Solusi : Memberikan pelatihan menganyam (anyaman bambu, rotan, tikar pandan dan lain-lain sebagai upaya pemanfaatan sumber daya lokal wilayah hutan), membuat makanan ringan dan kerajinan-kerajinan lain (*home industry*).

d. Bidang Kesehatan

Urgensi : Mendorong hidup sehat, menekan kematian bayi dan ibu melahirkan, program KB, pencegahan dan pengenalan penyakit secara dini dan pemanfaatan obat herbal sebagai alternatif pengobatan.

Solusi : Mendirikan posyandu dan penguatan kader, integrasi dukun bayi dan bidan desa, penyuluhan KB, penyuluhan kesehatan dan gizi, pengenalan obat herbal berbasis sumber daya lokal dan cara penggunaannya.

e. Bidang Lingkungan

Urgensi : Penataan lingkungan sehat (menjaga kualitas udara, air dan tanah), bumi hijau dan langit biru. *green villice and green city*.

Solusi : Menanam kebun gizi, pertanian organik, peternakan dan perikanan berbasis pekarangan dan pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan kebun sayur organik.

4.4. Permasalahan dalam Pengelolaan Posdaya

Dalam pelaksanaan KKN tematik posdaya, secara umum masalah yang dihadapi dapat dikelompokkan atas 2 (dua) hal, yaitu (1) kendala fisik, rata-rata sulit menemukan sekretariat posdaya, ruang belajar, modal usaha serta terbatasnya lahan untuk penataan lingkungan, (2) kendala non fisik, adanya anggapan dari masyarakat bahwa posdaya dianggap sebagai program pemerintah yang akan membagi-bagikan materi tertentu atau membawa proyek tertentu dan masyarakat menjadi sasaran proyek tersebut sebagai tenaga kerja pelaksanaan proyek.

Kendala manajemen posdaya ditunjukkan dengan belum adanya jadwal pertemuan koordinasi antara pengurus posdaya untuk membahas perkembangan posdaya, dan sebagian pengurus berdalih dengan aktifitas rutin harian yang menyebabkan sulitnya mencurahkan sedikit waktu bagi posdaya. Ketersediaan jumlah kader menjadi kendala pada posdaya tertentu. Pemberdayaan dengan filosofi keswadayaan memang memerlukan SDM sukarela dan berjiwa sosial yang

tinggi. Kendala kualitas SDM juga dirasakan oleh sebagian posdaya dengan kurangnya ide-ide pengembangan kegiatan yang muncul dari pengurus, dan kurangnya inisiatif untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak luar posdaya untuk menjaring ide-ide dan dukungan pengembangan posdaya.

4.5. Implikasi

Rencana program aksi pengembangan posdaya berdasarkan analisis situasi dan identifikasi situasi pengelolaan posdaya, maka dapat disusun berbagai rencana aksi pengembangannya, antara lain: (1) pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus/ kader posdaya, (2) resosialisasi posdaya secara vertikal dan horizontal ke seluruh pihak, (3) membangun jejaring usaha produktif untuk lebih memacu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat yang baru, (4) pembelajaran dan pemotivasian pengurus/ kader posdaya melalui kegiatan studi banding dan *bechmarking* ke posdaya-posdaya lain, (5) merintis dan membangun koperasi posdaya sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan antara lain:

- a. KKN tematik posdaya Universitas Trilogi, sebagai bentuk perwujudan keberlanjutan pengembangan dan keberlanjutan pelaporan.
- b. Membumikan 3 (tiga) pilar Universitas Trilogi kepada seluruh civitas akademika.
- c. Kegiatan KKN tematik posdaya sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memangkas jarak keagenan serta dapat meningkatkan legitimasi lembaga.
- d. Mempererat tali silaturahmi antara civitas Universitas Trilogi, kepala

desa, perangkat desa, pengurus RW/ RT dan tokoh masyarakat, serta para pemuda pemudi mempunyai hubungan yang baik, loyalitas, dedikasi yang tinggi demi membangun desa.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan KKN tematik posdaya sehingga masyarakat dapat mengembangkan lebih lanjut hasil dari program-program kerja tim KKN POSDAYA.
- b. Perlu pembinaan remaja dan karang taruna untuk menunjang pembangunan desa melalui forum dan lembaga yang telah terbentuk.
- c. Perlunya pembinaan dan peningkatan pengetahuan dalam kewirausahaan yang merupakan upaya untuk meningkatkan potensi secara optimal bagi warga desa.
- d. Perlunya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan atau keterampilan tentang kesehatan sehingga masyarakat dapat mandiri dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N & Sulaiman, M. 2004. Environmental Disclosure in Malaysian Annual Reports: A Legitimacy Theory Perspective. *International Journal of Commerce & Management*. Vol.14, No.1.
- Barkemeyer, R. 2007. Legitimacy as a Key Driver and Determinant of CSR in Developing Countries. *Paper for the 2007 Marie Curie Summer School on Earth System Governance*, 28 May – 06 June 2007, Amsterdam.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- Budimanta, A., Prasetyo, A. & Rudito, B. 2008. *Corporate Social Responsibility, Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainability Development
- Chariri, A. & Ghozali, I. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chriasmawati, D. T. 2007. Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan terhadap Praktik *Environmental Disclosure* di Indonesia. *Skripsi*. Perpustakaan Ekonomi Referensi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Commission of the European Communities. 2001. *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*. Brussels: European Community.
- Darwin, A. 2008. CSR: Standards dan Reporting. *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional CSR sebagai Kewajiban Asasi Perusahaan; Telaah Pemerintah, Pengusaha, dan Dewan Standar Akuntansi*, 27 November 2010.
- Deegan. 2002. Introduction: The Legitimizing Effect Of Social And Environmental Disclosure – A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol.15, no. 3, pp. 282-311.
- Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975, “Organizational legitimacy: social values and organization behaviour,” *Pacific Sociological Review*, Vol. 18 No. 1, pp. 122-136.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Endiarto, O.T. & Stephanus, D. S. 2014. Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Index Sri Kehati. *Proposal Skripsi*. Universitas Ma Chung. Malang.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. Edisi Kedua. Jakarta: FCGI.
- Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman. Boston.
- Ghozali & Chairiri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. 2006. *GRI Sustainability Reporting GuideLines G3 Version*. Dipetik Desember 6, 2013, dari <https://www.globalreporting.org/>.
- Haniffa, R. M & Cooke, T. E. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* 24.
- Hasibuan, R. 2001. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heal, G. 2004. Corporate Social Responsibility—An Economic and Financial Framework. *Working Paper*. Columbia Business School.

- Jensen, M. C & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Lawrence, A. & Webber, J. 2008. *Business & Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*. McGraw Hill Companies Incorporated.
- Lindblom, C. K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate*.
- Nugroho, O.C. & Stephanus, D.S. 2014. *Studi Empiris Pengaruh Manajemen Laba (Earnings Management), Corporate Governance, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang.
- Nuraini, E. (2010). *Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Nurlela, R & Islahuddin. 2008. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak* 2008.
- O'Donovan. 2002. Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol.15, No.3.
- Oktiviana, D. & Stephanus, D.S. 2014. Analisis Pengaruh Penerapan *Environment Management Accounting Dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan*. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang.
- Prior, D, Jordi, S, Josep, A. 2008. Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance: An International Journal*, Vol.16, no.3, 160-177.
- Puspita, M. E. & Stephanus, D.S. 2014. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Global Reporting Initiatives Dan Iso 26000 Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan*. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang.
- Reverte, C. 2008. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms. *Journal of Business Ethics* (2009) 88:351– 366 DOI 10.1007/s10551-008-9968-9.
- Robert, D. & Stephanus, D.S. 2014. Penerapan Dan Analisis Pengaruh *Environmental Management Accounting (Ema)*. Proposal Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Saidi. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur *Go Public* di BEJ 1997-2002. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 11 no.1, hal. 44-58.
- Saputra, N. A. & Stephanus, D.S. 2014. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Global Reporting Initiatives Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Indeks Sri-Kehati 2010—2012*. Skripsi. Universitas Ma Chung. Malang
- Sayekti & Wondabio. (2007). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Earnings Response Coefficient*. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Shleifer, A. dan Vishny, R.W. 1997. *A Survey of Corporate Governance*. *Journal of Finance*, Vol 52. No 2.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Szekly, Fransisco & Knirsch, Marianna. (2005). " Responsible Leadership and Corporate Social Responsibility: Metrics for Sustainable Performance" *,European Management Journal Vol. 23, No. 6, pp. 628-647*.
- Tunggal, A, W. 2008. "Corporate Social Responsibility (CSR)". Harvarindo.
- Untung, H. B. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing
- Wineberg, D. 2004. *Corporate Social Responsibility – What Every In House Counsel Should Know*. *Acc Docket*.
- World Bank Ext Communications For Development Division Devcomm/Sdo. 2003. *Corporate Social Responsibility And Multi Stakeholder Dialogue: Towards Environmental Behavioral Change*. *Discussion Paper*.

ANALISA PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERBITAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA

Angela Tamara*), Ghaliza Amola, Dwi Ayannisa

Program Studi Akuntansi, Fakultas Humaniora dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan

*Email: angela.tamara@student.upj.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, environmental damage has been perceived by the global society. Environmental damage is an important thing retrieving the effect caused by bad environmental management. Environmental concern comes up from external motivation, such as government, consumers, and stakeholders. The increasing amount of organization which have concern about environment has been a proof that environmental damage is a serious problem, from both environment and economic side. External motivation has pushed company to publish a sustainability report which contains accounting triple bottom line. Accounting triple bottom line has been number one issue and promoted through three piles; people, planet, and profit. External side has a significant role because they give funds to the company and the funds will be used for the company's operation. The more external side value the company, means that the company has a big chance to get the fund. The purpose of this research is to analyze company continuity before and after the sustainability report publication. The result of this research shows that sustainability report does not give effect to company continuity.

Key Words: Sustainability reporting, going concern, triple bottom line accounting, corporate social responsibility, environmental accounting.

ABSTRAK

Dewasa ini, kerusakan lingkungan telah dirasakan oleh masyarakat dunia. Kerusakan lingkungan telah menjadi hal yang penting mengingat dampak yang ditimbulkan dari buruknya pengelolaan lingkungan. Kepedulian lingkungan muncul akibat adanya dorongan dari pihak eksternal, seperti pemerintah, konsumen, dan para pemegang kepentingan. Meningkatnya jumlah organisasi peduli lingkungan telah menjadi bukti bahwa kerusakan lingkungan adalah masalah yang cukup serius, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Dorongan dari pihak eksternal telah memotivasi perusahaan untuk segera menerbitkan laporan keberlanjutan yang berisi triple bottom line dalam akuntansi. Triple bottom line tersebut telah menjadi isu utama yang diwujudkan dalam tiga pilar, yaitu people (orang), planet (lingkungan), dan profit (laba). Pihak eksternal memiliki peran yang cukup penting bagi perusahaan karena mereka merupakan sumber dana bagi perusahaan. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan demi keberlangsungan usaha perusahaan. Semakin baik penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan, maka kesempatan perusahaan dalam mendapatkan dana akan semakin besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keberlangsungan usaha sebelum dan sesudah penerbitan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

penerbitan laporan keberlanjutan tidak memberikan dampak terhadap keberlangsungan perusahaan.

Kata Kunci: Laporan keberlanjutan, keberlangsungan usaha, triple bottom line, accounting, corporate social responsibility, akuntansi lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan diantaranya adalah pencemaran sungai yang diakibatkan oleh penuhnya limbah pabrik, pencemaran di pantai yang diakibatkan oleh tumpahan minyak mentah, pencemaran udara yang timbul akibat proses produksi pada suatu pabrik yang berlebihan serta penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan. Hal-hal tersebut terjadi karena masih sangat banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mengelola lingkungan dengan baik dan hanya mementingkan profit semata tanpa memperdulikan dampak jangka panjang bagi bumi ini dan sumber daya alamnya.

Tidak ada satu pun perusahaan atau badan usaha yang terhindar dari risiko kebangkrutan. Tidak ada bisnis yang bisa mampu bertahan atau berjaya selamanya. Kombinasi dari melemahnya prospek badan usaha ke depan digabungkan dengan kesalahan dalam manajemen dapat berakibat fatal bagi suatu badan usaha (Parahita, 2011). Fenomena kebangkrutan merupakan sebuah fakta yang harus dihadapi meskipun dalam dunia usaha akan tetap berlaku sebuah prinsip *going concern*. *Going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah (Petronela, 2004 dalam Arga dan Linda, 2007).

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan,

dari sisi non-keuangannya, suatu badan usaha dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat peduli lingkungan serta menerapkan tindakan-tindakan untuk melestarikan lingkungan, seperti mengolah limbah sebaik mungkin agar limbah pabrik tidak mencemari lingkungan masyarakat, membuat gerakan peduli lingkungan, meminimalisir penggunaan alat-alat yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk sisi keuangannya, perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, maka dapat diketahui kondisi dan perkembangan finansial perusahaan. Selain itu, juga dapat diketahui kelemahan serta hasil yang dianggap cukup baik dan potensi kebangkrutan perusahaan tersebut (Lukviarni, 2009).

Perusahaan harus sadar untuk menjaga lingkungan dalam proses produksinya demi terciptanya *going concern* (keberlangsungan usaha perusahaan). Hal ini membuat banyak perusahaan mulai sedikit demi sedikit menerapkan sistem manajemen lingkungan serta membuat dan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang baik untuk perusahaannya agar selain sumber daya alam dapat tetap terjaga dan masyarakat sekitar sejahtera, konsumen pun akan dengan tenang membeli, menggunakan

dan mengkonsumsi produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan investor pun tidak akan segan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) kian menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan (Chariri, 2009).

Pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan akan dikaji oleh pemerintah, kreditor, investor, konsumen, karyawan, dan publik, sehingga akan membentuk opini dalam diri pengguna laporan keuangan tersebut, baik opini positif maupun opini negatif. Informasi tersebut dapat mempengaruhi reputasi suatu perusahaan, sehingga perusahaan harus sebaik mungkin menerapkan akuntansi lingkungan yang baik agar memperoleh hasil yang maksimal.

Kenyataan yang terjadi sebagaimana diungkap dalam Girindra Wardana (2015) menemukan bahwa berdasarkan penelitian Collin dan Porras pada tahun 2004, perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham biasanya tidak akan bertahan atau berlangsung dalam waktu yang lama. Menurut penelitian tersebut, perusahaan yang dapat bertahan sukses dalam waktu yang lama adalah perusahaan yang berusaha untuk mencapai beberapa tujuan, dimana memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham hanya merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai, dan biasanya bukan merupakan tujuan yang utama. Oleh karena itu, pelaporan yang hanya memfokuskan pada kinerja keuangan dianggap tidak cukup, sehingga perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan kerangka *triple-bottom-line*.

Indonesia memiliki satu organisasi non-profit yang bernama *National Center for Sustainability Reporting* atau yang lebih dikenal dengan NCSR. Organisasi ini didirikan oleh lima organisasi terkemuka yaitu Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) serta *Indonesian-Netherlands Association* (INA) yang memiliki tujuan untuk mendorong dan mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Melalui laporan ini, perusahaan menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, berdasarkan kerangka pelaporan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

2. KERANGKA TEORI

2.1. Sustainability Report

2.1.1. Definisi Sustainability Report

Global Reporting Initiative mendefinisikan *sustainability report* sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan, sebagai tanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainability report* akan menjadi salah satu media untuk mendeskripsikan pelaporan ekonomi, lingkungan dan dampak sosial seperti halnya konsep *triple bottom line*, pelaporan CSR, dsb (Imam dan Sekar, 2014).

Isi *sustainability report* menurut pedoman GRI terdiri atas lima bagian, yaitu:

- a. Visi dan Strategi
- b. Profile Perusahaan
- c. Sistem Manajemen dan Struktur Pengelolaan
- d. *GRI Content Index*
- e. Indikator Kinerja

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Pengungkapan standar dalam *Sustainability Report* menurut GRI-G3 *Guidelines* terdiri dari:

- a. Ekonomi
Mengungkapkan bagaimana dampak yang dihasilkan perusahaan pada kondisi ekonomi dari *stakeholder* dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.
- b. Lingkungan
Mengungkapkan bagaimana dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar
- c. Hak Asasi Manusia
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
- d. Masyarakat
Perusahaan harus memusatkan perhatian pada dampak organisasi terhadap masyarakat dan mengungkapkan bagaimana risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan lembaga sosial lainnya.
- e. Tanggung jawab produk
Berisi pelaporan produk yang dihasilkan perusahaan dan layanan yang secara langsung mempengaruhi pelanggan
- f. Sosial
Berisi kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan, apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.

2.1.2. Prinsip Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan *sustainability report* yang sesuai dengan GRI harus memenuhi beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam GRI-G3.1 *Guidelines*, yaitu:

- a. Keseimbangan
Sustainability report sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja suatu perusahaan

- b. Dapat Dibandingkan
Sustainability report berisi isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikompilasi, dan dilaporkan secara konsisten sehingga memungkinkan *stakeholders* untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu.
- c. Akurat
Informasi yang dilaporkan dalam *sustainability report* harus cukup akurat dan rinci
- d. Urut Waktu
Pelaporan *sustainability report* tersebut harus terjadwal dan informasi yang ada harus selalu tersedia bagi *stakeholders*.
- e. Kesesuaian
Informasi yang diberikan dalam *sustainability report* harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh *stakeholders*.
- f. Dapat Dipertanggungjawabkan
Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi.

2.1.3. General Reporting Initiative (GRI)

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan mendorong keberlanjutan dan pelaporan Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (ESG). GRI mengeluarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipergunakan di dunia dalam rangka mendorong transparansi yang lebih besar. Kerangka tersebut, bersama ”Petunjuk G3”, menetapkan prinsip dan indikator yang dapat dipergunakan organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosialnya. GRI berkomitmen terus memperbaiki dan

meningkatkan penggunaan petunjuk ini, yang tersedia secara bebas untuk publik.

GRI mengeluarkan *The Sustainability Reporting Guidelines* sebagai pembuka bagi tanggapan dan pengujian publik dan sebanyak dua puluh satu perusahaan dari seluruh dunia menjadi proyek percontohan bagi panduan tersebut. Tahun 2000, GRI meluncurkan *the sustainability reporting guidelines* yang diadopsi oleh kurang lebih seratus perusahaan di seluruh dunia.

2.1.4. Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik dengan CSP (*Corporate Social Policy*), yakni strategi perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial (Edi Suharto, 2008).

Di Indonesia, perbincangan terus berlanjut seputar konsep dan perjalanan CSR. Ada persetujuan namun ada pula pertentangan. Pihak pemerintah secara khusus membuat UU tentang tanggung jawab sosial, yakni dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 74. Terlepas dari itu, isu tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menjadi perbincangan hangat. Persoalannya bukan lagi hanya dari aspek sosial, tetapi sudah jauh merasuk ke aspek bisnis dan penyehatan korporasi. Lama-kelamaan, CSR tidak lagi dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. Dari yang semula dianggap

sebagai *cost*, kini mulai diposisikan sebagai investasi (Hasan Asy'ari, 2009).

2.2. Keberlangsungan Perusahaan

Going concern (keberlangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah (Petronela, 2004 dalam Arga dan Linda, 2007). Asumsi *going concern* berarti suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu jangka pendek (Arga dan Linda, 2007).

Tujuan keberlangsungan usaha dapat diartikan sebagai maksimasi dari kesejahteraan badan usaha yang merupakan nilai sekarang badan usaha itu terhadap prospek masa depannya. Prinsip keberlanjutan usaha menganggap bahwa badan usaha akan terus melakukan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian dan kegiatan yang sedang berlangsung. Prediksi keberlanjutan usaha suatu badan usaha sangat penting bagi manajemen dan pemilik badan usaha untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan, karena kebangkrutan menyangkut terjadinya biaya-biaya baik biaya langsung maupun tidak langsung (Wibowo, 2012).

Keberlangsungan usaha adalah sebuah kondisi di saat perusahaan memiliki kecukupan dana dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Keberlanjutan usaha sering kali berkaitan dengan kebangkrutan. Perusahaan selalu lebih memperhatikan suatu kondisi yang berpotensi merugikan perusahaan seperti kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan suatu keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menunjukkan adanya masalah likuidasi yang parah dan tidak dapat dipecahkan apabila tidak

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

melakukan penjadwalan kembali secara besar-besaran terhadap operasi dan struktur perusahaan (Wibowo. 2012).

2.2.1. Penyebab Kebangkrutan

Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab kebangkrutan, faktor tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Faktor Umum
 - 1) Sektor Ekonomi
 - 2) Sektor Sosial
 - 3) Sektor Teknologi
 - 4) Sektor Pemerintah
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Sektor pelanggan atau nasabah
 - 2) Sektor Kreditor
 - 3) Sektor pesaing atau bank lain
- c. Faktor Internal Perusahaan
 - 1) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah
 - 2) Manajemen yang tidak efisien
 - 3) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan

2.2.2. Manfaat Prediksi

Keberlangsungan Usaha

Menurut Hanafi dan Halim (2003: 261) dalam Wibowo (2012), informasi mengenai prediksi keberlanjutan usaha penting artinya bagi pihak-pihak lain yang terkait seperti berikut ini:

- a. Pemberi Pinjaman
Informasi keberlanjutan usaha dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa saja yang akan diberi pinjaman dan memonitor pinjaman yang ada.
- b. Investor
Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut.
- c. Pihak Pemerintah
Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu, dapat dilakukan lebih awal.

d. Akuntan

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi keberlanjutan suatu usaha karena akan menilai kemampuan *going concern* suatu perusahaan.

e. Manajemen

Apabila manajemen dapat mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan merger atau restrukturasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan dapat dihindari.

2.2.3. Analisis Keberlangsungan Usaha Dengan Altman Z-Score

Untuk mengetahui keberlangsungan sebuah perusahaan maka penulis, dalam penelitian ini akan melakukan penghitungan dengan menggunakan formula untuk mendapatkan Altman Z-Score. Pada tahun 1968, Edward I. Altman memberikan formula yang berfungsi untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Altman mempergunakan angka-angka di dalam laporan keuangan dan merepresentasikannya dalam suatu angka, yaitu Z-Score yang dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi untuk bangkrut atau tidak. (Parahita Irawan, 2011).

Formula untuk mendapatkan Altman Z-Score adalah sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6XT4 + 0.999T5$$

Keterangan:

T1 = *Working Capital / Total Assets*

T2 = *Retained Earnings/ Total Assets*

T3 = *Earnings Before Interest and Taxes/ Total Assets*

T4 = *Market Value of Equity/Total Liabilities*

T5 = *Sales/ Total Assets*

2.2.3.1. Working Capital to Total Assets Ratio (X1)

Working Capital to Total Assets merupakan ukuran bersih pada aktiva lancar perusahaan terhadap modal kerja perusahaan (Oktapiana 2012). *Working Capital to Total Assets* merupakan salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, perhitungan rasio ini akan negatif apabila kewajiban lancar lebih besar dari aktiva lancar (Wibowo, 2012).

Berikut adalah rumus untuk menghitung *Working Capital to Total Assets*:

$$WCTA = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.3.2. Retained Earnings to Total Assets Ratio (X2)

Retained Earnings to Total Assets merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Pengertian laba ditahan menurut Munawir (2002: 27) dalam Wibowo (2012) adalah akumulasi laba sesudah pajak yang dikumpulkan sejak perusahaan didirikan dan tidak dibagikan kepada pemiliknya.

Suatu kerugian laba kumulatif yang negatif akan memberikan sinyal dari suatu periode yang buruk, dan terdapat kemungkinan bahwa perusahaan akan berhenti beroperasi (Gretha, 2012).

Untuk menghitung *Retained Earnings to Total Assets* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RETA = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.3.3. Earning Before Interest and Tax to Total Assets Ratio (X3)

Rasio *Earning Before Interest and Tax to Total Assets* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan

penjualan dan mendapatkan laba. Untuk menghitung *Earning Before Interest and Tax to Total Assets* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EBITDA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.3.4. Market Value Equity to Book Value Total Debt Ratio (X4)

Market Value Equity to Book Value Total Debt Ratio digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang menjadi *insolvent* (keadaan dimana perusahaan tidak mempunyai cukup uang untuk membayar hutang). Modal diukur melalui gabungan nilai pasar dan keseluruhan lembar saham preferen dan biasa (*market value of equity*). Sementara total hutang (*liabilities*) meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Untuk menghitung *Market Value Equity to Book Value Total Debt Ratio* dapat menggunakan rumus berikut:

$$MVEBVD = \frac{\text{Nilai Pasar Modal Sendiri}}{\text{Total Nilai Buku Hutang}}$$

2.2.3.5. Sales to Total Assets Ratio (X5)

Sales to Total Assets Ratio merupakan rasio yang mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan laba. Untuk menghitung *Sales to Total Assets Ratio* dapat menggunakan rumus berikut:

$$STA = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.3.6. Kriteria atau Nilai Cut-Off Z-Score

Terdapat angka-angka *cut-off* nilai *Z-Score* yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak pada masa mendatang angka-angka tersebut dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

Tabel 2.1. Nilai Cut-Off Z-Score

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Kondisi Perusahaan	Z-Score
	Z
"Distress" Zone	$Z < 1,80$
"Grey" Zone	$1,80 < Z < 2,99$
"Safe" Zone	$Z > 2,99$

Apabila hasil perhitungan *Z-Score* dari perusahaan yang diuji masuk dalam kondisi "*Distress*" Zone, maka perusahaan tersebut berpeluang besar untuk mengalami kondisi kebangkrutan karena perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Apabila masuk pada kondisi "*Grey*" Zone, maka perusahaan yang diteliti berada dalam kondisi yang meragukan atau dengan kata lain perusahaan tersebut memiliki resiko untuk bangkrut namun tidak besar sehingga perusahaan masih dapat melakukan perbaikan dalam manajemen maupun struktur keuangannya. Sedangkan pada kondisi "*Safe*" Zone, perusahaan yang diuji tidak mengalami permasalahan dalam keuangan dan diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan (*non-bankrupt company*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian data yang terkumpul akan dianalisa untuk mencari hubungan antara variabel (Ahmad, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional* untuk melihat adanya hubungan atau pengaruh antara penerbitan *sustainability report* dengan keberlangsungan usaha pada perusahaan pemenang SRA 2015 kategori infrastruktur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana

data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahun perusahaan infrastruktur pemenang SRA 2015 dan laporan keberlanjutan perusahaan infrastruktur pemenang SRA 2015. Adapun data yang diperlukan yaitu laporan keuangan dan *sustainability reporting*. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id> dan situs resmi perusahaan yang diuji.

3.1. Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah:

4. Perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan serta diaudit untuk 5 (lima) tahun terakhir, yaitu 2011-2015.
5. Perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan yang disajikan secara lengkap pada tahun 2011-2015.
6. Perusahaan infrastruktur yang mempublikasikan laporan keberlanjutan untuk 5 (lima) tahun terakhir, yaitu 2011-2015.
7. Pemenang SRA 2015 kategori infrastruktur.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pemenang SRA tahun 2015. Sumber data laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit diperoleh dari www.idx.co.id. Selain itu, data sekunder yang digunakan adalah laporan keberlanjutan perusahaan pemenang SRA 2015 yang didapat dari situs resmi perusahaan.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa dua periode *sustainability report* dan laporan keuangan periode dua tahun sebelum perusahaan yang diuji menerbitkan *sustainability report* dan dua tahun setelah perusahaan yang diuji menerbitkan *sustainability report*. Laporan-laporan tersebut diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indoensia. Selain itu, data pendukung lainnya diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, artikel, jurnal, dan media riset akuntansi, serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan.

3.3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Melakukan Perbandingan *Sustainability Report* Perusahaan Dengan Indeks GRI *Sustainability Report* yang dibandingkan adalah *sustainability report* yang diterbitkan pada dua tahun pertama perusahaan tersebut mulai menerbitkan *sustainability report*. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang sudah diterapkan oleh perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan.
- b. Melakukan Penghitungan Skor *Sustainability Report* Perusahaan Tahap ini bertujuan untuk mengetahui berapa skor *sustainability report* perusahaan yang diuji, dengan memperhitungkan jumlah informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.
- c. Melakukan Penghitungan Keberlangsungan Perusahaan (*Z-Score*) Penghitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus Altman *Z-Score* dengan angka-angka yang diperoleh

dari laporan keuangan perusahaan yang diuji.

- d. Menganalisa *Z-Score* Sebelum dan Sesudah Menerbitkan *Sustainability Report* *Z-Score* dua tahun sebelum penerbitan *sustainability report* dan dua tahun sesudah penerbitan *sustainability report* setiap perusahaan dianalisa sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh *sustainability report* terhadap keberlangsungan usaha. Nilai yang dihasilkan dari penghitungan *Z-Score* sangat menentukan apakah perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau tidak setelah menerbitkan *sustainability report*.
- e. Melakukan Pengambilan Kesimpulan Setelah melakukan analisa pengaruh *sustainability report* pada setiap perusahaan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan secara keseluruhan mengenai pengaruh penerbitan *sustainability report* terhadap keberlangsungan usaha pada perusahaan pemenang SRA 2015 kategori infrastuktur berdasarkan analisa yang sudah dilakukan.

3.4. Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya (Ismi Ardianti, 2015).

- a. Variabel bebas (*independent variable*) Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sustainability report*. *Sustainability report* memiliki skor tersendiri untuk menentukan kelengkapan dalam menerapkan prinsip *triple bottom line*. Cara memberikan skor adalah dengan mencantumkan angka ‘1’ pada item

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sustainability report guidelines index untuk informasi yang diungkapkan atau memberikan skor ‘0’ untuk informasi yang tidak diungkapkan. Cara pemberian skor ini dikenal dengan *dichotomous*, yaitu angka 1 untuk menandai ‘ya’ dan 0 untuk menandai ‘tidak’. Dengan menjumlahkan semua angka 1, maka didapatkan jumlah angka yang merupakan total informasi kegiatan yang dilaporkan pada laporan keberlanjutan. Berikut adalah rumus untuk menghitung skor SR perusahaan:

$$\text{Skor SRDI} = \frac{K}{N}$$

Keterangan:

SRDI : *Sustainability Report Disclosure Index*

K : Indeks yang terpenuhi

N : Total indeks yang harus dipenuhi

- b. Variabel terikat (*dependent variable*)
Merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat

dalam penelitian ini adalah keberlangsungan perusahaan yang penghitungannya menggunakan Altman *Z-Score* dengan formula sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + 0.999T5$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perbandingan *Sustainability Report (SR)* PT United Tractors, Tbk. dengan Indeks GRI Tahun 2013

Indeks SRI pada PT U Tbk pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{K}{N} = \frac{65}{150} = 0.43$$

Maka, skor dari pelaporan *Sustainability Report* PT United Tractors Tbk, pada tahun 2013 adalah 0.43.

4.2. Perbandingan *Sustainability Report (SR)* PT United Tractors, Tbk. dengan Indeks GRI Tahun 2014

Tabel 4.1. Perbandingan SR PT United Tractors Dengan Indeks GRI Tahun 2014

<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	Skor <i>Sustainability Report</i> PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
Strategi dan Analisis		
G4-1	1	Sambutan Direktur Utama
G4-2	0	Dampak utama, risiko, dan peluang
Profil Perusahaan		
G4-3	1	Nama organisasi
G4-4	1	Merek, produk dan jasa
G4-5	1	Lokasi kantor pusat
G4-6	1	Jumlah negara tempat organisasi beroperasi
G4-7	1	Kepemilikan dan badan hukum
G4-8	1	Pasar yang dilayani
G4-9	1	Skala organisasi
G4-10	1	Total Jumlah Karyawan dan Distribusi

G4-11	1	Persentase total karyawan dalam perjanjian kerja bersama.
G4-12	1	Rantai pasokan organisasi
G4-13	1	Perubahan signifikan selama periode pelaporan
G4-14	1	Pendekatan atau prinsip kehati-hatian
G4-15	1	Daftar piagam, prinsip-prinsip, atau inisiatif lainnya di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial
G4-16	1	Keanggotaan asosiasi
<i>Material dan Batasan Teridentifikasi</i>		
G4-17	1	Daftar semua entitas
G4-18	1	Definisi Konten Laporan dan aspek batasan
Global Reporting Initiative (GRI)	Skor <i>Sustainability Report</i> PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
G4-19	1	Aspek Material yang teridentifikasi
G4-20	1	Aspek batasan internal untuk setiap aspek material
G4-21	1	Aspek Batasan di luar organisasi untuk setiap aspek material
G4-22	1	Pengaruh dari pernyataan ulang atas informasi yang diberikan sebelumnya
G4-23	1	Perubahan signifikan dari periode pelaporan sebelumnya
<i>Hubungan dengan Pemangku Kepentingan</i>		
G4-24	1	Daftar kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi
G4-25	1	Dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.
G4-26	1	Pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan
G4-27	1	Permasalahan utama yang pernah diajukan melalui hubungan dengan pemangku kepentingan
<i>Profil Laporan</i>		
G4-28	1	Periode pelaporan
G4-29	1	Tanggal laporan sebelumnya.
G4-30	1	Siklus pelaporan.
G4-31	1	Kontak yang dapat dihubungi
G4-32	1	Indeks GRI
G4-33	1	<i>Assurance Status</i>
<i>Pemerintahan</i>		
G4-34	1	Struktur tata kelola organisasi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	<i>Skor Sustainability Report PT. United Tractors tahun 2013</i>	Indikator GRI versi 4.0
G4-35	0	Proses pelimpahan otoritas untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial
G4-36	0	Jabatan-jabatan di tingkat eksekutif dengan tanggung jawab untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
G4-37	0	Proses konsultasi antara pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi
G4-38	0	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite-komitennya
G4-39	0	Pimpinan badan tata kelola tertinggi yang juga merupakan pejabat eksekutif
G4-40	0	Proses pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
G4-41	0	proses pada badan tata kelola tertinggi untuk memastikan konflik kepentingan dihindari
G4-42	0	Peran badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior
G4-43	0	Tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
G4-44	0	Proses untuk evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
G4-45	0	<ul style="list-style-type: none">- Peran badan tata kelola tertinggi dalam identifikasi dan pengelolaan dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial.- Konsultasi pemangku kepentingan digunakan untuk mendukung identifikasi dan manajemen
G4-46	0	Peran badan tata kelola tertinggi dalam meninjau keefektifan proses manajemen risiko organisasi
<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	<i>Skor Sustainability Report PT. United Tractors tahun 2013</i>	Indikator GRI versi 4.0
G4-47	0	Frekuensi review badan tata kelola tertinggi mengenai dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial.
G4-48	0	Komite atau posisi tertinggi yang secara resmi meninjau dan menyetujui laporan keberlanjutan organisasi
G4-49	0	Proses penyampaian permasalahan penting kepada badan tata kelola tertinggi.
G4-50	0	Sifat dan jumlah total permasalahan penting yang dikomunikasikan kepada badan tata kelola tertinggi
G4-51	0	Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior
G4-52	0	Proses untuk menentukan remunerasi
G4-53	0	Pandangan pemangku kepentingan terkait dengan remunerasi
G4-54	0	Rasio total kompensasi tahunan untuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi dalam organisasi

G4-55	0	Rasio peningkatan persentase dalam total kompensasi tahunan untuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi
<i>Etika dan Integritas</i>		
G4-56	1	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi
G4-57	0	Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan tentang perilaku etis
G4-58	0	Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan masalah terkait perilaku tidak etis dan melanggar hukum
<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	Skor <i>Sustainability Report</i> PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
Pengungkapan Standar Khusus		
<i>Pengungkapan Pendekatan Manajemen Generik</i>		
G-DMA	0	respon organisasi dalam aspek material
Kategori Ekonomi		
<i>Kinerja Ekonomi</i>		
G4-EC1	1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
G4-EC2	0	Risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim
G4-EC3	1	Kewajiban rencana obligasi
G4-EC4	0	Nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah
<i>Keberadaan Pasar</i>		
G4-EC5	1	rasio upah pegawai pemula (<i>entry level</i>) terhadap upah minimum berdasarkan gender
G4-EC6	0	Persentase manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal
<i>Dampak Ekonomi tidak Langsung</i>		
G4-EC7	1	Pembangunan investasi infrastruktur dan jasa
G4-EC8	1	Dampak ekonomi tidak langsung positif dan negatif signifikan yang teridentifikasi
G4-EC9	1	Persentase anggaran pengadaan yang digunakan di lokasi operasi yang signifikan
Lingkungan		
<i>Bahan</i>		
G4-EN1	0	Berat atau volume total bahan
G4-EN2	0	Persentase bahan input berupa bahan daur ulang
<i>Energi</i>		
<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	Skor <i>Sustainability Report</i> PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

G4-EN3	0	Konsumsi total bahan bakar dari sumber yang tak terbarukan
G4-EN4	0	Energi yang dikonsumsi di luar organisasi
G4-EN5	1	Rasio intensitas energi
G4-EN6	1	Jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai
G4-EN7	1	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa yang dijual
<i>Air</i>		
G4-EN8	0	Total volume pengambilan air
G4-EN9	0	Total sumber air yang secara signifikan terkena dampak pengambilan air
G4-EN10	1	Total volume air yang didaur ulang
G4-EN11	0	Informasi untuk setiap lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau berdekatan dengan, kawasan lindung
G4-EN12	0	Sifat dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan
G4-EN13	1	Ukuran dan lokasi semua kawasan habitat yang dilindungi atau kawasan yang dipulihkan
G4-EN14	1	Jumlah spesies IUCN (<i>International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources</i>) Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di wilayah yang dipengaruhi oleh operasional
<i>Emisi</i>		
G4-EN15	0	Emisi bruto GRK (Gas Rumah Kaca) langsung
G4-EN16	1	Emisi GRK tidak langsung dari energi bruto
G4-EN17	0	Emisi bruto GRK tidak langsung lainnya
Global Reporting Initiative (GRI)	Skor <i>Sustainability Report</i> PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
G4-EN18	1	Rasio intensitas emisi GRK
G4-EN19	1	jumlah pengurangan emisi GRK yang dicapai
G4-EN20	1	Produksi, impor, dan ekspor bahan perusak ozon (BPO)
G4-EN21	0	Jumlah emisi udara yang signifikan
<i>Efluen dan Limbah</i>		
G4-EN22	1	Volume total air terencana dan tidak terencana yang dibuang
G4-EN23	1	Bobot total limbah berbahaya dan tidak berbahaya
G4-EN24	0	Jumlah dan volume total tumpahan
G4-EN25	0	Bobot total untuk tiap-tiap limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, dan diolah kembali.
G4-EN26	0	Badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak air buangan

<i>Aspek Produk dan Jasa</i>		
G4-EN27	1	Dampak lingkungan dari produk dan jasa yang telah dimitigasi
G4-EN28	0	Persentase produk dan bahan kemasannya yang direklamasikan
<i>Kepatuhan</i>		
G4-EN29	0	Denda dan sanksi non-moneter yang signifikan
<i>Transportasi</i>		
G4-EN30	0	Dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang.
<i>Lain-lain</i>		
G4-EN31	1	Total pengeluaran perlindungan lingkungan
<i>Asesmen Pemasok atas Lingkungan</i>		
G4-EN32	0	Persentase penapisan pemasok baru
<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	<i>Skor Sustainability Report PT. United Tractors tahun 2013</i>	Indikator GRI versi 4.0
G4-EN33	0	Jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak lingkungan.
<i>Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan</i>		
G4-EN34	0	Jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan
<i>Sosial</i>		
<i>Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja</i>		
<i>Kepegawaian</i>		
G4-LA1	0	Jumlah total dan tingkat rekrut karyawan baru
G4-LA2	0	Tunjangan yang merupakan standar untuk karyawan purnawaktu dari organisasi.
G4-LA3	0	Jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan
<i>Hubungan Industrial</i>		
G4-LA4	0	Waktu minimum yang biasanya diberikan untuk pemberitahuan perubahan
<i>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i>		
G4-LA5	0	Komite bersama formal manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan
G4-LA6	1	Jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja
G4-LA7	1	Pekerja yang dalam kegiatan kerja sering terkena, atau berisiko tinggi terkena, penyakit tertentu.
G4-LA8	1	Perjanjian formal (baik lokal atau global) dengan serikat pekerja mencakup kesehatan dan keselamatan
<i>Pelatihan dan Pendidikan</i>		

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	Skor Sustainability Report PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
G4-LA9	1	Jam pelatihan rata-rata yang telah diambil oleh karyawan organisasi
G4-LA10	1	Jenis dan cakupan program yang dilaksanakan dan bantuan yang diberikan
G4-LA11	1	Persentase karyawan total
<i>Keberagaman dan Kesetaraan Peluang</i>		
G4-LA12	1	Persentase individu-individu dalam badan tata kelola organisasi
<i>Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki</i>		
G4-LA13	0	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki untuk setiap kategori karyawan
<i>Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan</i>		
G4-LA14	0	Persentase pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.
G4-LA15	0	Jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen
<i>Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan</i>		
G4-LA16	0	Jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan
<i>Hak Asasi Manusia</i>		
<i>Investasi</i>		
G4-HR1	0	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi
G4-HR2	0	Total waktu dalam periode pelaporan yang digunakan untuk pelatihan
<i>Non-Diskriminasi</i>		
G4-HR3	0	Jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan.
<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	Skor Sustainability Report PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
G4-HR4	0	Operasi dan pemasok di mana hak karyawan untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perjanjian
<i>Pekerja Anak</i>		
G4-HR5	0	Operasi dan pemasok yang dianggap berisiko besar atas terjadinya eksploitasi pekerja anak
G4-HR6	0	Operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja paksa
<i>Praktik Pengamanan</i>		
G4-HR7	0	Persentase petugas pengamanan yang telah menerima pelatihan formal
<i>Hak Adat</i>		

G4-HR8	0	Jumlah total insiden pelanggaran yang diidentifikasi
<i>Asesmen</i>		
G4-HR9	0	Total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan <i>review</i>
G4-HR10	0	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
G4-HR11	0	Jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen terkait dampak hak asasi manusia
<i>Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia</i>		
G4-HR12	0	Jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia
<i>Masyarakat</i>		
<i>Masyarakat Lokal</i>		
G4-SO1	1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
<i>Global Reporting Initiative (GRI)</i>	Skor <i>Sustainability Report</i> PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
G4-SO2	0	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
G4-SO3	1	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai untuk risiko terkait dengan korupsi
G4-SO4	1	Jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola
G4-SO5	0	Jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti.
<i>Kebijakan Publik</i>		
G4-SO6	0	Total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial
G4-SO7	0	Jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan
<i>Kepatuhan</i>		
G4-SO8	0	Denda dan sanksi non-moneter yang signifikan
G4-SO9	0	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
G4-SO10	0	Jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen untuk dampak terhadap masyarakat
<i>Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat</i>		
G4-SO11	0	Total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi
<i>Tanggung Jawab atas Produk</i>		
G4-PR1	1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya telah dinilai
G4-PR2	0	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Global Reporting Initiative (GRI)	Skor Sustainability Report PT. United Tractors tahun 2013	Indikator GRI versi 4.0
G4-PR3	0	informasi produk dan jasa berdasarkan prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa.
G4-PR4	0	jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
G4-PR5	1	Hasil atau kesimpulan utama dari survei kepuasan pelanggan
<i>Komunikasi Pemasaran</i>		
G4-PR6	0	Pelaporan apakah organisasi menjual produk yang dilarang di pasar tertentu atau menjadi subjek dari pertanyaan pemangku kepentingan atau debat publik.
G4-PR7	0	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang komunikasi pemasaran.
<i>Privasi Pelanggan</i>		
G4-PR8	0	Jumlah total keluhan yang terbukti yang diterima tentang pelanggaran privasi pelanggan
<i>Kepatuhan</i>		
G4-PR9	1	Total nilai moneter dari denda yang signifikan untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Indeks SRI pada PT Wijaya Karya Tbk pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{K}{N} = \frac{69}{150} = 0.46$$

Maka, skor dari pelaporan *Sustainability* PT United Tractors Tbk, pada tahun 2014 adalah 0.46.

4.3. Penghitungan Keberlangsungan Usaha (Z-Score) PT United Tractors Tbk.

Tabel 4.2. Tabel Penghitungan Keberlangsungan Usaha PT United Tractors

Tahun	Nilai Z-Score
2011	$Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + 0.99T5$ $= 1.2(0.23) + 1.4(0.20) + 3.3(0.17) + 0.6(1,45) + 0.99(1.18)$ $= 3.17$
2012	$Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + 0.99T5$ $= 1.2(0.21) + 1.4(0.19) + 3.3(0.15) + 0.6(1,79) + 0.99(1.11)$ $= 3.20$
2013	$Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + 0.99T5$ $= 1.2(0.23) + 1.4(0.17) + 3.3(0.06) + 0.6(1,64) + 0.99(0.89)$ $= 2.60$
2014	$Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + 0.99T5$ $= 1.2(0.28) + 1.4(0.16) + 3.3(0.11) + 0.6(1,78) + 0.99(0.89)$ $= 2.88$

a. Dengan nilai Z PT United Tractors tahun 2011 sebesar 3,17 maka PT

United Tractors tahun 2011 sudah bisa dikatakan sebagai perusahaan

- dengan keberlangsungan yang sehat dan berkemungkinan kecil mengalami kebangkrutan.
- b. Dengan nilai Z PT United Tractors tahun 2012 sebesar 3,20 maka PT United Tractors tahun 2011 sudah bisa dikatakan sebagai perusahaan dengan keberlangsungan yang sehat dan berkemungkinan kecil mengalami kebangkrutan.
 - c. Dengan nilai Z PT United Tractors tahun 2013 sebesar 2,60 maka PT United Tractors tahun 2011 berada dalam zona kelabu (*grey zone*) yang artinya perusahaan memiliki kemungkinan mengalami kebangkrutan.
 - d. Dengan nilai Z PT United Tractors tahun 2014 sebesar 2,88 maka PT United Tractors tahun 2011 berada dalam zona kelabu (*grey zone*) yang artinya perusahaan memiliki kemungkinan mengalami kebangkrutan.

4.4. Analisa Pengaruh Sustainability Report dengan Z-Score Perusahaan

Tabel 4.3. Daftar Skor SRDI dan Z-Score PT United Tractors

Tahun	Skor SRDI	Z-Score
2011	-	3,17
2012	-	3,20
2013	0,43	2,60
2014	0,46	2,88

Tahun 2011 dan 2012 merupakan dua tahun sebelum PT United Tractors menerbitkan *sustainability report*. Pada tahun 2011, Z-Score PT United Tractors adalah 3,17 yang berarti perusahaan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai perusahaan dengan keberlangsungan yang sehat. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang aman dan memiliki risiko kebangkrutan kecil. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2012 dengan Z-Score 3,20, perusahaan juga masih berada dalam *safe zone* dan memiliki kemungkinan akan berlangsung dalam jangka waktu lama.

PT United Tractors pertama kali menerbitkan *sustainability report* pada tahun 2013 dengan skor SRDI sebesar 0,43 dan masih sangat jauh dari skor sempurna. Untuk Z-Score PT United Tractors pada tahun 2013 adalah 2,60 yang turun dari Z-Score tahun sebelum dan berada dalam zona kelabu. Berbeda dengan tahun 2014 yaitu sebesar 2,88, PT United Tractors kembali masuk dalam zona aman dan berada dalam kondisi

yang cukup sehat. Setelah menerbitkan *sustainability report*, PT United Tractors tidak mengalami peningkatan pada Z-Score dan mengalami penurunan skor keberlangsungan usaha atau dapat diartikan tidak ada peningkatan pada skor keberlangsungan usahanya setelah menerbitkan *sustainability report*.

Setelah melakukan penghitungan skor SDRI dan juga Z-Score pada PT United Tractors dua tahun sebelum penerbitan *sustainability report* dan dua tahun setelah penerbitan *sustainability report*, maka *sustainability report* dapat dikatakan tidak memberikan peningkatan terhadap keberlangsungan usaha PT United Tractors. Sesuai dengan tabel di atas, Z-Score PT United Tractors mengalami penurunan pada tahun pertama penerbitan *sustainability report* namun mengalami peningkatan pada tahun kedua penerbitan.

4.5. Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Sustainability Report Terhadap Keberlangsungan Perusahaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PT United Tractors juga merupakan perusahaan yang mengalami penurunan setelah menerbitkan *sustainability report*, namun hal ini disebabkan oleh turunnya laba sebelum pajak dan bunga milik PT United Tractors. Laba sebelum pajak dan bunga merupakan keuntungan dari operasi perusahaan yang tidak memperhitungkan beban pajak dan bunga sehingga menyebabkan rasio *Earning Before Interest and Tax to Total Assets* (EBITTA) PT United Tractors mengalami penurunan. Penurunan yang cukup jauh pada laba sebelum pajak dan bunga PT United Tractors menyebabkan nilai keberlangsungan usaha PT United Tractors juga mengalami penurunan. PT United Tractors diharapkan dapat meningkatkan laba sebelum pajak dan bunga agar perusahaan dapat mempersiapkan pengembangan usaha (ekspansi) dengan laba tersebut.

Setelah melakukan penelitian dan analisa pengaruh *sustainability report* terhadap keberlangsungan perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Bagi perusahaan untuk dapat terus mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya ternyata bukan hanya dengan melakukan penerbitan *sustainability report*, namun juga melakukan perbaikan dalam manajemen perusahaan untuk dapat membantu meningkatkan keberlangsungan perusahaan. Perbaikan dalam manajemen dapat berupa pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai keberlangsungan usaha, melakukan *survey* untuk mengetahui bagaimana permintaan pelanggan atau nasabah agar perusahaan dapat memproduksi barang atau menawarkan jasa sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan, *sustainability report* tidak memberikan dampak terhadap

keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian penulis menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

PT United Tractors mengalami penurunan angka *Z-Score* setelah menerbitkan *sustainability report*. Hal ini disebabkan oleh turunnya laba sebelum pajak dan bunga milik PT United Tractors yang merupakan keuntungan dari operasi perusahaan yang tidak memperhitungkan beban pajak dan bunga sehingga menyebabkan rasio *Earning Before Interest and Tax to Total Assets* (EBITTA) mengalami penurunan dan angka *Z-Score* PT United Tractors pun juga menurun.

5.2. Saran

- a. Perusahaan harus tetap melakukan penerbitan *sustainability report* karena di dalam *sustainability report* tersebut terdapat penerapan *triple bottom line accounting*. Penerapan *triple bottom line accounting* pada perusahaan akan memberikan pandangan yang baik mengenai kepedulian perusahaan terhadap *planet* (lingkungan) dan *people* (masyarakat) untuk memperoleh *profit* (laba).
- b. Perusahaan disarankan untuk dapat terus memperbaiki dan mempertahankan manajemen perusahaan agar perusahaan dapat membuat kebijakan yang lebih baik dan sesuai untuk mempertahankan perusahaannya dan menemukan strategi untuk menarik investor selain dari aspek keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, H. (2009). Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Sebagai Modal Sosial pada PT Newmont.
- Chariri, A., & J, F. A. (2009). Retorika Dalam Pelaporan *Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting* Pt Aneka Tambang Tbk. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Indonesia Stock Exchange. (2010). *PT Bursa Efek Indonesia*. Retrieved February 2016, from Indonesia Stock Exchange - Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id.
- Irawan, P. (2011). *Investing Ideas: Kumpulan Ide Sederhana Tentang Analisis Fundamental Saham*.
- Irawan, P. (2011). *Menghindari Potensi Kebangkrutan Perusahaan dengan Altman Z-Score*.
- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wardana, G. (2015, September 25). *Akuntansi Manajemen Lingkungan: Strategi Untuk Menunjang Keberlangsungan Hidup Perusahaan*. Retrieved April 2016, from Drs. J. Tanzil & Associates: <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/213/slug/akuntansi-manajemen-lingkungan-strategi-untuk-menunjang-keberlangsungan-hidup-perusahaan>.
- Wibowo, A. (2012). Analisis Keberlanjutan Usaha dengan Metode Altman Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Se-Kabupaten Kendal.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PENGARUH SUSTAINABILITY LEADERSHIP DOSEN
KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT MAHASISWA
UNTUK MENJADI ECOPRENEUR
(STUDI PENDAHULUAN MAHASISWA NON-BISNIS
DI INDONESIA)**

Antania Shinta Yuwono*), Kurnia Perdana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

**Email: antania.shinta@gmail.com*

ABSTRAK

Keberlanjutan telah menjadi isu viral dan masif bagi seluruh kalangan. pemerintahan, sektor swasta, aktivis lingkungan hidup, media cetak dan elektronik bahkan dunia pendidikan. Dunia pendidikan turut menjadi pemangku kepentingan, karena posisinya yang begitu strategis. Universitas menjadi penyedia sumber tenaga ahli dan andal serta ketersediaan riset penelitian yang tidak terbatas. Mahasiswa dan dosen idealnya menjadi subyek yang dapat mengambil alih peran agen perubahan untuk melanjutkan tongkat estafet keberlanjutan. Sehingga mahasiswa memegang peran sentral untuk bertindak sebagai subyek. Kewirausahaan hingga saat ini masih menjadi profesi yang amat diharapkan untuk terus digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana tidak, kewirausahaan menjadi solusi bagi lingkaran setan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh antara sifat sustainability leadership dan gaya sustainability leadership sebagai karakteristik yang dimiliki oleh dosen kewirausahaan terhadap minat mahasiswa non bisnis untuk menjadi ecopreneur. Sampel pada penelitian ini sebanyak 93 orang yang merupakan mahasiswa sarjana (S1) non bisnis di perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah kewirausahaan bagi mahasiswa non bisnis. Variabel penelitian terdiri dari tiga yang dioperasikan menjadi beberapa pertanyaan dalam kuisisioner yang bertujuan untuk mengukur menggunakan skala likert 8 poin. Metode kuantitatif regresi menggambarkan bahwa sifat dan gaya sustainability leadership yang dimiliki para dosen kewirausahaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk menjadi ecopreneur. Selanjutnya bahwa latar belakang pendidikan mahasiswa eksakta berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi ecopreneur.

Kata Kunci: Sustainability Leadership, Ecopreneur

1. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi masalah keterbatasan kesempatan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi. Laporan *International Labor Organization* (ILO) mencatat jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 di Indonesia berjumlah 9,6 juta jiwa (7,6%), dan 10% diantaranya adalah sarjana (Nasrun, 2010). Tingginya populasi pendudukan berimplikasi pada tumbuhnya potensi sumberdaya manusia Indonesia. Namun, di lain pihak dapat berakibat pada meningkatnya beban negara karena timbulnya berbagai masalah sosial. Selain masalah sosial, dunia juga menghadapi permasalahan ekonomi dan isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, pemanasan global, kebutuhan energi, dan berkurangnya sumber daya alam karena peningkatan konsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa jumlah wirausahawandi Indonesia hanya 0,2% dari 230 juta penduduk. Indonesia masih membutuhkan banyak stimulus untuk menambah jumlah pengusaha, setidaknya 4,8 juta pengusaha dibutuhkan agar perekonomianIndonesia lebih stabil (BPS, 2010).

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan disuatu negara terletak pada peran universitas untuk penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan (Indarti, 2008; Zimmerer, 2004). Amat penting bagi kampus untuk mengintegrasikan *soft skill* kewirausahaan bagi mahasiswa agar tidakhanya bercita-cita menjadi pekerja tetapi juga berparadigma menciptakan lapangan kerja sekaligus menumbuhkembangkan hasrat, jiwa dan perilaku wirausaha (Kourilsky dan Walstad, 1998).

Selain itu, dalam kewirausahaan diperlukan kepemimpinan, maka gaya kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan untuk memotivasipara pengikutnya. Kepemimpinan bukanlah

"satu ukuran cocok untuk semua" organisasi atau kelompok. Gaya kepemimpinan harus dipilih dan disesuaikan dengan organisasi, situasi, kelompok, dan individu. Dengan demikian berguna untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang gaya yang berbeda sebagai pengetahuan seperti meningkatkan alat yang tersedia untuk memimpin secara efektif.

Pendidikan merupakan salah satu proses penting untuk menuju keberlanjutan (Hargreves dan Fink, 2003). Soemanto (2002) menyatakan bahwa cara untuk mewujudkan manusia yang mempunyai moral, sikap, dan keterampilan wirausaha adalah dengan pendidikan. Pola pendidikan di perguruan tinggi lebih menekankan pada unsur pengembangan pola pikir dan pengalaman (Indarti dan Rostiani, 2008). Sehingga vital bagi seorang dosen untuk memiliki kemampuan memengaruhi dan menginspirasi mahasiswa sebagai salah satu faktor strategis keberhasilan proses pendidikan (Uwes, 1999; Morrison, 2000; Kouzes dan Posner, 2007).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Rostiani (2008), Shriberg dan MacDonald (2013), Douglas dan Shepherd (2002). Tujuan dilakukannya studi ini adalah guna menginvestigasi pengaruh antara sifat *sustainability leadership* dan gaya *sustainability leadership* sebagai karakteristik yang dimiliki oleh dosen kewirausahaan terhadap minat mahasiswa non bisnis (Visser dan Courtice, 2011). Penelitian ini juga akan kembali menguji penelitian Sinha (1996) bahwa latar belakang pendidikan adalah faktor penentu minat berwirausaha dan kesuksesan yang dijalankan.

2. KERANGKA TEORI

Memahami kepemimpinan keberlanjutan mengharuskan kita memahami sifat-sifat mereka, gaya,

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

keterampilan dan pengetahuan sehingga kombinasi ini membuat pemimpin individu yang unik (Visser dan Courtice, 2011). Teori kepemimpinan transaksional (tahun 1950) muncul dengan pengakuan bahwa pekerja melakukan lebih baik ketika perhatian dibayar untuk motivasi. Para pemimpin membimbing atau memotivasi para pengikut menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan (Robbins dan Judge, 2015).

Di akhir 1970-an dan masih model yang dominan kepemimpinan diajarkan dalam pendidikan tinggi (Hunt, 1999) dan sastra populer, mengambil evolusi ini satu langkah lebih jauh. Karismatik pemimpin transformasional mengubah seluruh organisasi menuju etika yang lebih tinggi melalui keterampilan mereka dalam visi, komunikasi dan membangun kepercayaan dan loyalitas (Bass dan Steidlmeier, 1999). Pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap pengikutnya (Robbins dan Judge, 2015).

Menurut Tom Peters dan Nany Austin dalam bukunya *A. Passion For Excellence* (1985), *leadership* berarti “*Vision, cheerleading, enthusiasm, love, trust, verve, passion, obsession, consistency, the use of symbols paying attentions illustrated by the content of on of one’s calendars, out and out drama (The management thereof) creating heroes at all levels, coaching effectively wandering around and namerous other things*” Sedangkan Stoner et al (1995) mengartikan *leadership* sebagai “*The process of directing and cofluencing the task-related activities of grup member*”.

Bygrave (1989) dalam Ulhøi dan Neergaard (2007: 28) menyatakan pendapatnya bahwa *entrepreneurship* adalah salah satu paradigma yang masih

“muda” dalam ilmu manajemen. Karena umurnya yang masih cukup “muda”, maka paradigma *entrepreneurship* berkembang menjadi sebuah paradigma yang menggunakan metode dan teori dari ilmu-ilmu yang lebih “tua”, sebagaimana dinyatakan: “*Entrepreneurship is one of the youngest paradigms in the management sciences. As with all young paradigms, it has emerged by using the methods and theories of other sciences*”.

Ecopreneurship berupaya memproduksi dan menawarkan produk ramah lingkungan atau proses dengan maksud mengoptimalkan keuntungan dan termotivasi untuk beroperasi berdasar pada nilai-nilai etika dan sosial (Walley & Taylor, 2002). *Ecopreneurs* adalah pengusaha yang tidak hanya memerhatikan keuntungan, tetapi lebih dari itu mereka fokus pada nilai-nilai hijau yang mendasari (Kirkwood dan Walton, 2010).

2.1. Sifat Sustainability Leadership Terhadap Minat Menjadi Ecopreneur

Ada sejumlah daftar penelitian mengenai sifat kepemimpinan. Model Visser dan Courtice (2011) sebagai penguat korelasi mengenai sifat *sustainability leadership* yakni, peduli, sistematis, berpikiran terbuka, berempati, visioner. Konsep keberlanjutan mewujudkan berbeda, pendekatan kepemimpinan yang lebih terpadu, visual direpresentasikan sebagai jembatan antara teori kepemimpinan lingkungan dan tradisional (Shriberg dan MacDonald, 2013).

Kepemimpinan untuk keberlanjutan adalah tata ide yang relatif baru merupakan pemahaman radikal diperluas kepemimpinan yang mencakup basis diperbesar dari pemimpin sehari-hari di semua lapisan masyarakat yang mengambil kekuasaan dan terlibat dalam tindakan dengan orang lain untuk membuat perbedaan yang berkelanjutan

dalam organisasi dan masyarakat (Ferdig, 2007).

2.2. Gaya Sustainability Leadership Terhadap Minat Menjadi Ecopreneur

Penting untuk keberlanjutan menantang sebagian besar karena sifat "jahat" dari isu-isu sosial dan lingkungan yang saling berkaitan. Model gaya kepemimpinan model Visser dan Courtice (2011) yakni membaur, visioner, kreatif, altruistik, dan radikal. Kepemimpinan bagi keberlanjutan berbeda dari pemahaman kepemimpinan tradisional, yang sering bergantung pada sifat-sifat, perilaku dan situasi untuk menjelaskan kepemimpinan.

Seorang pemimpin yang memiliki gaya humanis dan partisipatif akan lebih disukai. Kesan akrab dan ramah seorang pemimpin akan menimbulkan rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai perasaan (Robbins dan Judge, 2015). Josep Schumpeter dalam Husaini (2004) menjelaskan juga bahwa kewirausahaan adalah kekuatan kreatif utama di masyarakat sosial ekonomi. Guna mencari solusi dari permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kian kompleks, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengolaborasi sumber daya yang dimiliki untuk secara aktif mentransformasi realita situasi yang dihadapi (Shulman, 2007; Colby dan Sullivan, 2009).

2.3. Latar Belakang Pendidikan Terhadap Minat Menjadi Ecopreneur

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia,serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pengaruh pendidikan kewirausahaan selama ini telah dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan hasrat, jiwa dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi muda (Kourlsky dan Walstad, 1998). Beberapa peneliti terdahulu membuktikan bahwa keinginan berwirausaha para mahasiswa merupakan sumber bagi lahirnya wirausaha-wirausaha masa depan (Gorman *et al.*, 1997; Kourilsky dan Walstad, 1998). Selain itu faktor kepribadian seperti kebutuhan akan prestasi (McClelland, 1961; Sengupta dan Debnath, 1994) serta demografi seperti umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seseorang diperhitungkan sebagai penentu bagi intensi kewirausahaan.

Pentingnya pendidikan dikemukakan oleh Holt (Rahmawati, 2000) yang mengatakan bahwa paket pendidikan kewirausahaan akan membentuk siswa untuk mengejar karir kewirausahaan. Pendidikan formal memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses kewirausahaan, tantangan yang dihadapi para pendiri usaha baru dan masalah-masalah yang harus diatasi agar berhasil. Sementara itu menurut Hisrich dan Peters (1998) pendidikan penting bagi wirausaha, tidak hanya gelar yang didapatkannya saja, namun pendidikan juga mempunyai peranan yang besar dalam membantu mengatasi masalah-masalah dalam bisnis seperti keputusan investasi dan sebagainya.

Latar belakang pendidikan seseorang terutama yang terkait dengan bidang usaha, seperti bisnis dan manajemen atau ekonomi dipercaya akan mempengaruhi keinginan dan minatnya untuk memulai usaha baru di masa mendatang. Sebuah studi dari India membuktikan bahwa latar belakang pendidikan menjadi salah satu penentu

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

penting intensi kewirausahaan dan kesuksesan usaha yang dijalankan (Sinha, 1996). HisrichPeters (1995:13) menyatakan pendidikan formal dan pengalaman kecil-kecilan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi potensi utama untuk menjadi wirausaha yang berhasil.

Demikian pula dengan latar belakang pendidikan terutama terkait dengan bidang usaha, seperti bisnis dan manajemen ekonomi dipercaya akan memengaruhi keinginan dan minat untuk memulai usaha baru di masa mendatang. Sebuah studi dari India membuktikan bahwa latar belakang pendidikan menjadi salah satu penentu penting intensi kewirausahaan dan kesuksesan usaha yang dijalankan (Sinha, 1996).

3. METODE PENELITIAN

Sampel pada penelitian ini sebanyak 93 orang yang merupakan

mahasiswa sarjana (S1) non bisnis di universitas yang mengajarkan mata kuliah kewirausahaan bagi mahasiswa non bisnis. Kampus dimaksud adalah Universitas Lampung, Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya dan Universitas Budi Luhur, Universitas Bandar Lampung dan Universitas Trisakti. Pengambilan sampel didasarkan pada *purposive sampling* dengan memerhatikan kriteria tertentu (Remenyi, 2000).

Variabel penelitian terdiri dari tiga yang dioperasikan menjadi beberapa pertanyaan dalam kuisisioner. Kuisisioner disampaikan langsung kepada mahasiswa untuk menjamin tingkat pengembalian yang tinggi. Dilakukan dengan cara seperti ini juga untuk mendapatkan latar belakang heterogenitas demografi yang luas. Kuisisioner dibuat dalam bahasa Indonesia dan diukur dengan menggunakan skala *likert* 8 poin.

Tabel 3.1. Tabulasi Demografi Responden

Karakteristik	Jumlah	
	N	%
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	64	68,8
- Perempuan	29	31,2
Usia		
- Kurang dari 22 tahun	73	78,5
- Lebih dari 22 tahun	20	21,5
Latar Belakang Pendidikan		
- Eksakta	50	53,7
- Non Eksakta	43	46,3

Sumber: Data diolah, 2016.

Responden yang berhasil direkrut sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebesar 68,8%, sedangkan sisanya sebanyak 31,2% berjenis kelamin perempuan. 78,5% usia responden kurang dari 22 tahun sedangkan 21,5% berusia lebih dari 22 tahun. Mahasiswa eksakta yang menjadi responden pada penelitian ini adalah sebanyak 53,7%, sisanya yaitu sebesar 46,3% adalah mahasiswa non eksakta.

Indeks setiap variabel bebas dan terikat ditentukan dari rerata jawaban untuk setiap konstruk variabel. Tabulasi jawaban responden dari kuisisioner terangkum sebagai berikut:

Penelitian ini berlangsung di provinsi Lampung, Banten, dan DKI Jakarta pada bulan Mei-Oktober 2016. Untuk menginvestigasi pengaruh *sustainability leadership* dosen kewirausahaan terhadap minat mahasiswa menjadi

ecopreneur, dibangunlah kuisisioner yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang sifat *sustainability leadership* yang dimiliki dosen, bagian kedua adalah

gaya *sustainability leadership* dan bagian ketiga adalah tentang minat mahasiswa menjadi *ecopreneur*.

Tabel 3.2. Tabulasi Jawaban Responden

Variabel	rerata	SD
<i>Sifat sustainability leadership</i>		
- Dosen kewirausahaan menginspirasi Anda dengan sifatnya yang peduli tentang isu keberlanjutan dan etika	6,32	1,05
- Dosen kewirausahaan menginspirasi Anda dengan sifatnya yang berpikir holistik atau sistemik, sehingga mampu memodifikasi sub-sistem yang berdampak menyeluruh	6,41	0,97
- Dosen kewirausahaan menginspirasi Anda dengan sifatnya yang selalu mencari pengetahuan baru, menghormati perbedaan dan memerhatikan nilai dan norma.	5,93	1,34
- Dosen kewirausahaan menginspirasi Anda dengan sifatnya yang berempati dan mampu memahami keadaan mahasiswa.	7,45	1,21
- Dosen kewirausahaan menginspirasi Anda dengan sifatnya yang visioner, optimis, kreatif, dan berani untuk mencoba hal baru.	7,12	1,02
<i>Gaya sustainability leadership</i>		
- Dosen kewirausahaan memengaruhi Anda dengan gayanya yang mengutamakan partisipasi berdasarkan dialog, komitmen, konsensus dan pendekatan humanis.	7,42	1,01
- Dosen kewirausahaan memengaruhi Anda dengan gayanya yang memberikan stimulasi, memberikan tantangan, mentransformasi persepsi.	7,27	0,85
- Dosen kewirausahaan memengaruhi Anda dengan gayanya yang berperan sebagai pendesain, pemikir dan inovator.	6,89	1,82
- Dosen kewirausahaan memengaruhi Anda dengan gayanya yang mau melayani dengan sepenuh hati	6,91	0,79
- Dosen kewirausahaan memengaruhi Anda dengan gayanya yang bersedia mengambil risiko dan penuh dengan muatan misi positif.	7,31	1,02
<i>Minat ecopreneurs</i>		
- Saya akan memilih karir sebagai seorang <i>ecopreneur</i>	7,42	1,01
- Saya akan memilih karir sebagai pekerja atau karyawan	7,27	0,85
- Saya lebih suka menjadi <i>ecopreneur</i> daripada menjadi karyawan	6,89	1,82

Sumber: data diolah, 2016.

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Variasi konstruk nilai koefisien *cronbach alpha* ada di antara 0,78 hingga 0,91 sehingga dapat diterima karena lebih dari 0,5.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan atas dasar penghitungan regresi terhadap variable-variabel bebas yaitu, sifat *sustainability leadership* dan gaya *sustainability leadership*. Sedangkan

untuk latar belakang pendidikan eksakta dan non-eksakta dianggap sebagai variabel *dummy* dengan kode 0 untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan non-eksakta dan 1 untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan eksakta.

Hasil penghitungan regresi terangkum pada tabel 4.1. berikut ini:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.1. Tabulasi Perhitungan Regresi

Variabel	Hasil
Sifat <i>sustainability leadership</i>	0,164
Gaya <i>sustainability leadership</i>	0,189
Latar belakang pendidikan	0,124
R ²	0,152
Adjusted R ²	0,147
F(3, n-4)	6,213*

Catatan: $p < 0,05$, * $p < 0,01$

4.1. Pengujian Variabel Sifat *Sustainability Leadership*

Hipotesis 1 menyatakan bahwa sifat *sustainability leadership* berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi *ecopreneurs*. Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel 3 diketahui bahwa sifat *sustainability leadership* yang dimiliki oleh dosen kewirausahaan secara signifikan mampu untuk memengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi *ecopreneur*. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Visser dan Coutice (2011) dan Shriberg dan MacDonald (2013). Seorang dosen memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar mahasiswa melalui *transfer of knowledge and attitude* yang dilakukan di kelas maupun *scientific attitude* yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai seorang individu, dosen memiliki ciri-ciri pendorong moral, pemikiran utuh, berpikiran terbuka, empati, berani dan mereka harus menarik pada apa yang tepat atau pas dengan kepribadian dan keadaan mereka sendiri, sehingga menjadi yang paling efektif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan (Kouzes dan Posner, 2007).

Menurut Robbins dan Judge (2015) sifat dapat memprediksi potensi kepemimpinan. Pemimpin yang baik dalam individu yang memiliki sifat jujur, memiliki visi ke depan (visioner), berkompentensi unggul dan cerdas (Kouzes dan Posner 2007).

Kompetensi adalah satu-satunya sifat yang harus terus diupdate dan berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Menurut *survey* yang dilakukan oleh Accenture dan United Nation Global Compact (2010) menyatakan bahwa saat ini adalah era keberlanjutan. Sehingga amat dibutuhkan tindakan dan pengambilan keputusan bisnis yang memerhatikan isu keberlanjutan.

Sifat peduli, pemikir holistik, berpikiran terbuka (*open minded*), selalu berempati dan visioner secara aktif akan meningkatkan daya tarik emosional berupa ekspresi dan emosi sehingga akan membantu efektifitas penyampaian pesan seorang dosen kepada mahasiswa (Robbins dan Judge, 2015). Melalui berbagi ekspresi dan emosi seorang dosen menginspirasi emosi positif mahasiswa hingga tersampainya pesan secara efektif dan bermuara pada timbulnya minat (Douglas dan Shepherd, 2002; Robbins dan Judge, 2015). Pembangkitan emosi dan pengaitan dengan visi yang menarik akan meningkatkan peluang mahasiswa untuk menerima perubahan. Para pemimpin yang fokus pada sasaran inspirasional akan menghasilkan optimisme yang lebih tinggi dan antusiasme di dalam diri mahasiswa.

Walaupun isu keberlanjutan sebenarnya telah masif diadopsi oleh banyak perusahaan besar (Delai dan Takahashi, 2011) namun tidak diimbangi oleh tingkat konsumsi yang belum banyak berubah, karena tingkat harga dan efisiensi saluran distribusi belum dapat

ditekan. Untuk itu dibutuhkan dorongan yang lebih kuat dari lebih banyak produsen dan pelaku bisnis untuk mempromosikan "green issue" kepada konsumen.

4.2. Pengujian Variabel Gaya Sustainability Leadership

Hipotesis 2 menyatakan bahwa gaya *sustainability leadership* berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi *ecopreneurs*. Terlihat pada hasil pengujian di tabel 4.1. bahwa gaya *sustainability leadership* yang dimiliki oleh dosen kewirausahaan secara signifikan memengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi *ecopreneur*. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Visser dan Coutice (2011) dan Burns *et al* (2013).

Guna mencari solusi dari permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kian kompleks, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengolaborasi sumber daya yang dimiliki untuk secara aktif mentransformasi realita situasi yang dihadapi (Shulman, 2007; Colby dan Sullivan, 2009). Pemimpin yang partisipatif, daripada mengambil keputusan otokratis, berusaha untuk melibatkan orang lain dalam proses, mungkin termasuk bawahan, rekan, atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Seringkali, bagaimanapun, karena dalam kehendak manajer untuk memberikan atau menolak kontrol untuk bawahannya, kegiatan yang paling partisipatif adalah tim langsung. (http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/leadership_styles).

Antusiasme dosen adalah salah satu dari banyak karakteristik dosen di penelitian efektivitas. Murray (1983) mendefinisikan dosen yang antusias terdiri dari perilaku mengajar ekspresif berikut: (1) berbicara dengan cara *piexpressive dramatic*, (2) variasi *pitch* dan volume, (3) infleksi vokal, (4)

tersenyum atau tertawa saat mengajar, (5) bergerak sementara perkuliahan, (6) memberi isyarat dengan tangan atau ms, (7) menunjukkan mimik wajah atau ekspresi, (8) kontak mata, dan (9) humor. Dosen yang memiliki gaya humanis dan partisipatif akan lebih disukai oleh mahasiswa. Kesan akrab dan ramah seorang dosen akan menimbulkan rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai perasaan (Robbins dan Judge, 2015). Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Akst (2007) bahwa 66% responden menyatakan bahwa hal yang paling memotivasi di organisasi adalah penghargaan dari pemimpin.

Penelitian yang luas secara konsisten menunjukkan hubungan antara antusias mengajar dan pembelajaran mahasiswa (Murray, 1983, 1985; Perry & Magnusson, 1987, 1989). Dosen yang melayani dengan hati adalah refleksi dari perilaku etis yang tinggi. Gaya ini akan membawa pemimpin melampaui kepentingan mereka sendiri dan menitikberatkan pada kesempatan untuk membantu para mahasiswanya agar berkembang. Pencapaian tujuan pun dilakukan dengan cara persuasif dan tanpa menggunakan kekuasaan. Hal ini yang membuat mahasiswa lebih nyaman dengan dosen, sehingga pesan yang tersampaikan lebih mudah dicerna dan lebih efektif diterima. Dampak yang dirasakan adalah komitmen mahasiswa untuk mencapai tujuan yaitu menjadi *ecopreneurship* akan lebih tinggi, konsep diri *ecopreneur* dan potensi diri juga akan meningkat, dan hal ini berkaitan erat dengan *organisational commitment behaviour* (OCB).

Salah satu syarat bagi suatu tindakan oleh individu adalah adanya ilustrasi pengondisian perilaku di manapun setiap kali penguatan menjadi syarat bagi suatu tindakan (Robbins dan Judge, 2015). Keterlibatan individu untuk melakukan tindakan itu dapat memberikan stimulan untuk perilaku dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kepentingan tertentu. Memotivasi orang adalah untuk menunjukkan kepada mereka arah tertentu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan (Trisnaningsih *et al*, 2012).

Pendekatan strategi motivasi menyangkut asumsi mungkin bahwa merangsang pengalaman kelas memiliki efek jangka panjang terhadap motivasi murid. Daftar strategi yang digunakan oleh para peneliti berasal baik dalam teori maupun dalam survei guru sebelumnya, misalnya Dörnyei dan Csizér (1998). Bahkan jika strategi melakukan merupakan pedagogi motivasi untuk pelajar, karena beberapa studi penelitian di atas mengkonfirmasi, kita tidak bisa memastikan bahwa mereka menyebabkan peserta didik investasi usaha dalam belajar bahasa di luar kelas, dalam jangka panjang - jenis motivasi yang salah harapkan berkorelasi erat dengan pencapaian kompetensi komunikatif L2, terutama dalam sistem negara-sekolah di mana waktu terbatas dan isi pelajaran dibatasi oleh penilaian praktik. Dörnyei dan Ushioda (2011) menunjukkan ada perbedaan penting antara siswa memotivasi dan mengembangkan motivasi mereka, mendefinisikan yang terakhir sebagai bersosialisasi dan menghasilkan bentuk yang sehat motivasi didorong internal.

Dosen yang inspiratif memiliki banyak kualitas dari seorang guru yang baik. Ada juga tumpang tindih yang jelas dengan beberapa strategi motivasi kunci diprioritaskan oleh dosen. Namun, jika ada satu tema dominan dalam wasiat yang ditawarkan oleh peserta didik, itu adalah hubungan manusia yang dibuat oleh dosen – sesuatu di dalamnya, atau sesuatu yang dilakukan dengan konsisten, menghantam sebuah akord dalam pembelajar yang masih bergaung. Para dosen telah meraih apa yang banyak anggap sebagai hadiah terbesar profesi - transformasi pribadi dalam peserta didik

mereka - dan mereka memiliki dicapai ini dengan meninggalkan kesan abadi dalam pikiran mereka, apakah metodologi khas, sebuah profesionalisme teladan, atau kualitas mereka (Lamb & Wedell, 2013).

Hal ini juga terkait dengan *controlled processing* (Frauenheim, 2010). *Controlled processing* berupaya untuk mengidentifikasi sesuatu mengetahui, mengumpulkan informasi mengenai nilai dari berbagai sumber (Frauenheim, 2010; Robbins dan Judge, 2015). Tahapan-tahapan tersebut memang membutuhkan proses yang panjang dan upaya yang lebih banyak, melakukan pertimbangan atas pilihan, menganalisis bukti dan gambar sehingga memengaruhi logika.

4.3. Pengujian Variabel Latar Belakang Pendidikan

Analisis regresi menunjukkan bahwa mahasiswa eksakta memiliki minat untuk menjadi wirausahawan yang lebih tinggi dari mahasiswa non-eksakta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Rostiani (2008) yang menyatakan bahwa dengan latar belakang pendidikan terutama terkait dengan bidang usaha, seperti bisnis dan manajemen ekonomi dipercaya akan memengaruhi keinginan dan minat untuk memulai usaha baru di masa mendatang. Selain itu juga mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan dan membuat keputusan dan tekad dalam mengelola bisnis, mengelola sejumlah modal dan menghadapi ketidakpastian dari keuntungan (Rohima *et al*, 2013).

Efektivitas dari suatu organisasi sangatlah ditentukan oleh peran seorang *leader guiding* yang akan membawa anggota organisasi dan kelompok ke arah pencapaian tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi (Thompson, 2000). Dalam mendukung kinerja suatu perguruan tinggi tidak dapat diabaikan begitu saja peran dari seorang pemimpin.

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang pendidikan tinggi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jalur akademik dan profesional. Berdasarkan pengertian di atas, mahasiswa sebagai peserta didik menduduki posisi bergengsi di masyarakat dan diharapkan memiliki kualitas tinggi (Trisnaningsih *et al*, 2012). Menurut Tanjung (1995), pendidikan tinggi dirancang untuk mempersiapkan sumber daya terdidik manusia yang memiliki tingkat tertentu kualitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan pengetahuan dan pemahaman teknis akan memudahkan mahasiswa memiliki rasa peduli terhadap lingkungan hidup.

Ecopreneur sadar akan biaya, inovasi dan keuntungan pemasaran dan mencari perubahan sosial dan moral dalam sektor kewirausahaan (Arabatzis, *et al*, 2015). Bennet (1991), Berle (1991) dan Blue (1990) dalam penelitiannya juga menjelaskan secara intrinsik, kegiatan bisnis para *ecopreneur* memiliki efek positif secara keseluruhan pada lingkungan alam dan pada keberlanjutan ekonomi, dan secara sadar bertujuan mengasuransikan masa depan yang lebih berkelanjutan. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, karena untuk komitmen yang tidak stabil dari sektor publik, yang dukungannya sedang mudah terbalik dengan perubahan sehari-hari dalam politik dan lobi. Krisis pangan global yang dikombinasikan dengan praktek pertanian berkelanjutan adalah untuk sebagian besar akibat dari kelalaian ini pertanian selama dua dekade terakhir (Aerni 2008).

Pengaruh positif latar belakang pendidikan terhadap minat mahasiswa eksakta non bisnis sejalan dengan proses retensi pada teori pembelajaran sosial (Akers dan Jennings, 2016).

5. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini sejalan dengan proses retensi pada teori pembelajaran sosial yang menjelaskan seberapa baiknya individu mengingat tindakan model setelah model tidak lagi tersedia. Akibatnya mahasiswa eksakta dengan data kuantitatif lebih mendekati dengan pemahaman tentang lingkungan (Indarti dan Rostiani, 2008). Individu dapat memelajari dengan diberitahukan atau atau dengan mengobservasi apa yang terjadi dari orang lain seiring dengan pengalaman terhadap model, orang tua, pengajar, rekan sekerja, pemeran film, atasan, dan sebagainya.
- b. Sifat *sustainability leadership* berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi *ecopreneurs*. Diketahui bahwa sifat *sustainability leadership* yang dimiliki oleh dosen kewirausahaan secara signifikan mampu untuk memengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi *ecopreneur*. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Visser dan Coutice (2011) dan Shriberg dan MacDonald (2013).
- c. Gaya *sustainability leadership* berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi *ecopreneurs*. Terlihat bahwa gaya *sustainability leadership* yang dimiliki oleh dosen kewirausahaan secara signifikan memengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi *ecopreneur*. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Visser dan Coutice (2011) dan Burns *et al* (2013).
- d. Hasil penghitungan sifat dan gaya *sustainability leadership* dosen kewirausahaan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh pada minat mahasiswa untuk menjadi *ecopreneur*. Implikasi manajerial yang dapat diambil adalah dengan bersandar pada teori perilaku, dosen sebagai sosok yang dihormati, digugu

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

dan ditiru sebaiknya melengkapi dirinya dengan misi dan visi untuk menginspirasi mahasiswa serta memperkaya dirinya dengan gaya dan sifat yang dapat mengilhami para mahasiswa.

- e. Analisis regresi menunjukkan bahwa mahasiswa eksakta memiliki minat untuk menjadi wirausahawan yang lebih tinggi dari mahasiswa non-eksakta. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan pengetahuan dan pemahaman teknis akan memudahkan mahasiswa memiliki rasa peduli terhadap lingkungan hidup. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Rostiani (2008) yang menyatakan bahwa dengan latar belakang pendidikan terutama terkait dengan bidang usaha, seperti ekonomi bisnis dan manajemen dipercaya akan memengaruhi keinginan dan minat untuk memulai usaha baru di masa mendatang.
- f. Bennet (1991), Berle (1991) dan Blue (1990) dalam penelitiannya juga menjelaskan secara intrinsik, kegiatan bisnis para *ecopreneur* memiliki efek positif secara keseluruhan pada lingkungan alam dan pada keberlanjutan ekonomi, dan secara sadar bertujuan mengasuransikan masa depan yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accenture & UN Global Compact., 2012. A New Eraa In Sustainability (CEO Survey).
- Aerni, P., 2008. A New Approach To Deal With The Global Food Crisis. *ATDF Journal*. Vol. 5, No.1., Iss 2., pp. 16-32
- Akers, R.,L., Jennings, W.G. 2016. Social Learning Theory. *John Wiley & Sons, Inc.*
- Bass, B.M., & Steidlmeier, P., 1999. Ethics, Character, And Authentic Transformational Leadership Behaviour. *Leadership Quarterly*. Vol. 10, No 2, pp.181-217.
- Bennet, S.J., 1991. *Ecopreneuring: The Complete Guide to Small Business Opportunities From The Environmental Revolution*. Wiley: New York.
- Berle, G., 1991. The Green Entrepreneur: Business Opportunities That Can Save The Earth And Make You Money. *Liberty Hall Press, Blue Ridge Summit: Pennsylvania*.
- Blue, J., 1990. *Ecopreneuring: Managing For Result*. Scott Foresman, London.
- Burns, H., Vaught, P.S., 2015. Leadership For Sustainability: Theoretical Foundations And Pedagogical Practices That Foster Challenge. *International Journal of Leadership Studies*. Vol. 9, Iss. 1,2015.
- Burns, J.M., 1978. Leadership. *New York: Harper & Row*.
- Colby, A., & Sullivan, W.M., 2009. Strengthening The Foundations of Students' excellence, Integrity, And Social Contribution. *Liberal Education*. Vol 95. Iss. 1, pp.22-29.
- Dough, C., Castells, N. & Funtowicz, S., 1998. Integrated Assesment: An emerging methodology for complex issues. *Environmental Modeling and Assesment*. Vol. 3,pp.19-29.
- Dörnye, Z., 2007. Creating A Motivating Classroom Environment In

- Cummins. *International Handbook of English Language Teaching*. Sringer US.
- Dörnyei, Z., & Csizer, K., 1998. Ten Commandments For Motivating Language Learners: Result of An Empirical Study. *Language Teaching Research* 2/3: 203-229.
- Ferdig, M.A., 2007. Sustainability Leadership: Co-Creating A Sustainable Future. *Journal of Change Management*. Vol. 7, Iss. 1, pp.25-35.
- Frauenheim, E. 2010. Communicating for Engagement During Tough Times. www.workforce.com diakses 10 November 2016.
- Gorman, G., Hanlon, D., & King, Ww., 1997. Entrepreneurship Education: The Australian Perspective For The Nineties. *Journal of Small Business Education*9: 1-14.
- Hargreaves, A., & Fink, D., 2003. The Seven Principles of Sustainable Leadership, available at: http://marylandpublicshcool.org/NR/rdonlyres/F7D49A8D-E9DO-4C49-9DE6-3A878BC9F1F4/18748.seven_principles.pdf.
- Hunt, J.G., 1999. Transformational/Charismatic Leadership's Transformation of The Field: An Historical Essay. *Leadership Quarterly*. Vol. 10, no. 2, pp.129-144.
- Indarti, N., & Rostiani, R., 2008. Intensi Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesia*. Vol. 23, no.4.
- Kourlsky, M.L., & Walstad, W.B., 1998. Entrepreneurship and Female youth: Knowledge, Attitude, Gender Differences, and Educational Practices. *Journal of Business Venturing*. Vol.13, no.1,pp.77-88.
- Kouzes, J.M., & Posner, B.Z., 2007. *The Leadership Challenge*, 4th Edition. Jossey-Boss.
- Kouzes, J., & Posner, B., 2012. *The leadership challenge* (5th edition). *Bkasmxala.nn San Francisco: Jossey-Bass*.
- Lamb, M., & Wedell, M., 2013). *Inspiring English Teachers: A Comparative Study of Learner Perceptions of Inspirational Teaching. ELT Reasearch Papers: 13-03*. British Council: London. ISBN. 978-0-86355-709-5.
- Morrison, A.J., 2000. Developing A Global Leadership Model. *Human Resource Management*. Vol. 39, no.2&3, pp.177-131.
- Murray, H.G., 1983. Low-Inference Classroom Teaching Behaviors And Student Ratings of Collage Teaching Effectiveness. *Journal of Educatona Psycology*. Z5, 138-149.
- Murray, H.G., 1985. Classroom Teaching Behaviors Related To College Teaching Effectiveness. In Donald, J.G., & Sullivan, A.M., (eds), *Using Research To Improve Teaching*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nasrun, M.A., 2010. Mengapa Banyak Sarjana Yang Menganggur?., *Suara Merdeka*.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Perry, R.P., & Magnusson, J.L., 1987. Effectiveness Instruction And Students's Perceptions of Control In The College Classroom: Multiple-Lecture Effects. *Journal of Educational Psychology*, 79, pp. 453-460
- Perry, R.P., & Magnusson, J.L., 1989. Casual Attributions And Percieved Performance: Consequences For College Students' Achievement And Percieved Control In Different Instructional Conditions. *Journal of Educational Psychology*, 81, pp. 164-172.
- Remenyi,D., Williams, B., Money, A., & Swartz, E., 2000. Doing Research in Business and Management: An Introduction toProcess and Method. *London: Sage Publications.*
- Robbins, S.P., & Judge, T.A., 2015. Organizational Behaviour 16th Edition. *Pearson.*
- Rohima, V., & Suman, A., 2013. Vicious Circle Analysis of Poverty and Entrepreneurship. *Journal of Business and Management*. Vol. 7, Iss.1,pp.33-46.
- Sengupta, S.K., & Debnath, S.K., 1994. Need For Acchievement And Entrepreneurial Success: A Studyof Entrepreneurs In Two Rural Industries In West Bengal. *The Journal of Entrepreneurship*. Vol 3, Iss.2, pp.191-204.
- Shriberg, M., & MacDonald, L., 2013. Sustainability Leadership Programs: Emerging goals, methods & best practices. *Journal of Sustainability Education*, 5, 1-21.
- Shulman, L.S., 2007. Forward in Colby, A., Beaumont, E., Ehrlich, T., & Corngold, J. (eds.). Educating For Democracy. *San Francisco, CA: Jossey-Bass.* pp.x-xiii.
- Sinha, T.N., 1996. Human Factors in Entrepreneurship Effectiveness. *Journal of Entrepreneurship*. Vol 5, no,1,pp.191-204.
- Thompson., 2000. Gender, Leadership Orientation, And Efectiveness: Testing The Theoretical Models of Bolman & Deal., Vol. 42., No. 11-12.
- Trisnarningsih, S., Suparwati., Hendra, F.H., 2012. The Factors That Influence To Lecturers Perrformance With Motivation As An Intervening Variable. *The Fourth UB International Consortium Accounting.*
- Visser, W., & Courtice, P., 2011. Sustainability Leadership: Linking Theory and Practice. *SSRN Working Paper Series.*
- Zimmerer, T.W., 2004. Essential of Entrepreneurship and Small Business Management (4th Edition). *Prentice Hall.*

ANALISIS PERAN SUKUK BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Baiti Nur Fadian

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

**Email: baiti.sudarmansyah@gmail.com*

ABSTRACT

Indonesia is a developing country, where the development of existing infrastructure are under construction. This is because the movement rate and economic growth in one country can not be separated from the availability of infrastructure such as transport, communications, and energy availability. Infrastructure in Indonesia budgeted in the Expenditure Budget (APBN), taking into account the amount of funds that will be used for infrastructure development. Budgeting of the funds obtained from the loan made by the State in which the state typically offers of securities owned by the State. Loans made by the State aimed at funding infrastructure development in Indonesia. In the budgeting of funds for financing infrastructure development, the government is only able to bear a third of the total financing needs of infrastructure to be built. This study aims to provide an alternative concept of infrastructure financing by the Islamic financial system. Using government funds for infrastructure development by funding Islamic bonds / sukuk. Islamic bonds have a refund rate that is lower than the conventional interest-based bonds. This research was conducted using qualitative method, done by a process of discussion and study of literature in order to obtain information and test hypotheses. In the analysis of the discussion can be concluded that the level of benefits from the use of Islamic bonds / sukuk is very beneficial for the government. By using government bonds do not pay interest on the bonds, but only pay for the results of sukuk so that the State may be disadvantaged because of the low level of refunds. It can facilitate the government in obtaining funds for infrastructure development in Indonesia, so as to increase the interest for investors to invest their shares in Indonesia.

Key Words: Islamic Bonds / Sukuk, State Budgeting, Infrastructure Development

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah Negara yang sedang berkembang, dimana perkembangan infrastruktur yang ada sedang dalam tahap pembangunan. Hal ini dikarenakan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi disuatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan juga ketersediaan energi. Infrastruktur di Indonesia di anggarkan dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), dengan memperhitungkan besaran dana yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Penganggaran dana tersebut didapat dari pinjaman yang dilakukan oleh Negara dimana biasanya Negara menjaminkan surat-surat berharga milik Negara. Pinjaman yang dilakukan oleh Negara bertujuan untuk pendanaan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dalam penganggaran dana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah hanya mampu menanggung sepertiga dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur yang akan dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu konsep alternative pembiayaan infrastruktur dengan system keuangan syariah. Menggunakan pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah dengan dana obligasi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

syariah/sukuk. Obligasi syariah memiliki tingkat pengembalian dana yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dilakukan dengan proses diskusi dan studi literatur dalam rangka memperoleh informasi dan uji hipotesis. Dalam analisa pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan dari penggunaan obligasi syariah/sukuk sangat menguntungkan bagi pemerintah. Dengan menggunakan sukuk pemerintah tidak perlu membayar bunga obligasi, melainkan hanya membayar bagi hasil dari sukuk sehingga Negara dapat lebih diuntungkan karena rendahnya tingkat pengembalian dana. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam memperoleh dana untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan bagi para investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia.

Kata Kunci: Obligasi Syariah/Sukuk, Penganggaran Negara, Perkembangan Infrastruktur

1. PENDAHULUAN

Keberadaan infrastruktur merupakan hal yang paling vital bagi perekonomian nasional. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang paling tinggi dalam sebuah negara, harus dapat menyediakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti energi, komunikasi dan transportasi. Salah satu infrastruktur yang paling utama, yaitu transportasi jalan karena berperan penting dalam pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mendukung mobilitas masyarakat maupun pendistribusian komoditi perdagangan maupun industri di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Meskipun Indonesia negara kepulauan, namun transportasi yang dominan dipergunakan adalah transportasi jalan. Menurut Dirjen Bina Marga (2015: 1), moda transportasi jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api baru 7,3%, udara 1,5%, dan laut 1,8%. Oleh karena itu gangguan kerja jalan akan menimbulkan gangguan secara langsung terhadap roda perekonomian nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dimana perkembangan infrastruktur yang ada sedang dalam tahap pembangunan.

Lemahnya pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketertinggalan

Indonesia dalam memacu perkembangan ekonomi. Lemahnya kondisi infrastruktur di Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang APBN 2009 menyebutkan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan suatu struktur pembiayaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur yang mempunyai keterbatasan akses dalam investasi dengan jumlah dana yang besar (*huge invest*), berjangka panjang (*long term*) dan jenis pembangunan infrastruktur yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat guna menunjang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan (*Infrastructure Friendly*) (Kadin Indonesia, *National summit* 2009).

Berdasarkan data dari *World Economic Forum* tentang *global competitiveness index*, 2004 dalam Helmi (2015: 3), secara umum infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82 dari 148 negara yang dinilai. Posisi ini jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura (Peringkat 5), Malaysia (Peringkat 25), Thailand (Peringkat 61). Posisi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Philipina (Peringkat 98) dan Vietnam (Peringkat 110).

Infrastruktur di Indonesia di anggarkan dalam Anggaran Pembelanjaan Negara, dengan memperhitungkan besaran dana yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi

pada saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami berbagai permasalahan diantaranya ketidakjelasan sumber pembiayaan (*funding gap*) guna menutupi kekurangan dana yang ada, maka dari itu pemerintah Indonesia harus mencari sumber pendanaan alternatif, yaitu dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman luar Negeri dalam bentuk utang maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional (World Bank, IMF, ADB, IDB dan Lainnya). Dengan menerbitkan Surat Utang Negara tidak akan pernah lepas dari adanya beban besaran bunga yang ditawarkan kepada investor dan menjadi beban negara dalam APBD untuk membayar beban bunganya.

Menurut *Standard & Poor*, 2008 (dalam Adiatna dan Pradono, 2010: 2), di sisi lain model sistem pembiayaan syariah saat ini mengalami perkembangan yang cukup tinggi dan mempunyai daya tarik sendiri bagi investor. Model yang berbasiskan sistem *fee/ margin/* bagi hasil ini telah terbukti keandalannya dalam menghadapi krisis yang terjadi sekitar awal tahun 2009. Sistem syariah dapat terhindar dari krisis yang terjadi diantaranya adalah karena ada prinsip-prinsip yang dipegang secara konsisten yaitu dengan menghindari *gharar* (spekulasi), *maisyir* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga).

Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Pada masa itu sukuk ini digunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Ayub, 2005 dalam Abdul, 2011: 282).

Sebagai salah satu investasi, banyak negara menerbitkan sukuk, tidak hanya negara berpenduduk muslim, negara-negara Barat dan Asia yang berpenduduk muslim minoritas juga ikut memanfaatkan peluang ini. Ada tujuh negara yang telah menerbitkan sukuk dan telah menjadi

regular issuer, yaitu Malaysia, Bahrain, Brunai Darussalam, Uni Emirat Arab, Pakistan, Qatar dan Indonesia. Dan ada negara lain yang juga telah menerbitkan sukuk, yaitu Jerman, Inggris, Kanada, Dubai, Kuwait, Singapura, Jepang, Korea, Cina, dan India.

Berdasarkan kajian pasar sekunder yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012), bahwa sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, perkembangan penerbitan sukuk korporasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya, meskipun porsinya masih relatif sangat kecil dibandingkan pasar konvensional.

Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara. Disahkannya UU SBSN merupakan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah lebih serius lagi terutama sukuk. Akan tetapi, dengan disahkannya UU SBSN bukan berarti usaha kita untuk mengembangkan sukuk berhenti sampai di sini saja. Kita harus senantiasa berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memonitor dinamika sukuk, peluang dan tantangannya terutama di negeri tercinta Indonesia (Abdul, 2011: 282).

Dengan melihat prospek perkembangan sukuk di pasar global maupun dalam negeri yang pesat serta di sisi lain pemerintah mempunyai permasalahan kekurangan dana untuk pembiayaan infrastruktur termasuk untuk pembiayaan infrastruktur transportasi, maka ini merupakan suatu hal yang menarik untuk mengkaji kemungkinan penerapan sukuk negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur transportasi.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Berdasarkan pada latar belakang diatas, hal itulah yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun paper ini, sehingga memberi judul “Analisis Peranan Sukuk Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia”.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Sukuk

2.1.1. Pengertian Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah dimana berasal dari bahasa arab “SAK” atau sertifikat. Menurut *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) memberikan definisi untuk sukuk yaitu sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan tertentu.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang

obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin/ fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sedangkan menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX.A.13, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas proyek tertentu atau aktivitas tertentu.

Sukuk sebagai produk keuangan Islam sering disejajarkan dengan obligasi (*bond*) walaupun memiliki karakteristik yang agak berbeda. Menurut Adam (2006, hal. 63), sukuk memiliki sifat-sifat umum yang membuatnya memiliki kualitas yang sama dengan produk keuangan konvensional lainnya, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Tabel keuntungan sukuk

Dapat diperdagangkan (<i>Tradable</i>)	Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat asset, atau kegiatan bisnis, dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar (<i>market price</i>).
Dapat diperingkat (<i>Rateable</i>)	Sukuk dapat diperingkat oleh agen pemberi peringkat, baik regional maupun internasional.
Dapat ditambah (<i>Enhanceable</i>)	Sebagai tambahan terhadap aset yang mawadainya (<i>underlying asset</i>) atau aktivitas bisnis, sukuk dapat dijamin dengan jaminan (<i>collateral</i>) lain berdasarkan prinsip syariah.
Fleksibilitas Hukum (<i>Legal flexibility</i>)	Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan perlakuan pajak yang berbeda.
Dapat ditebus (<i>Reedemable</i>)	Struktur pada sukuk memungkinkan untuk dapat ditebus.

2.1.2. Pengertian Sukuk Ritel

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 69/DSN Sukuk ritel adalah surat berharga syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh negara, yaitu Departemen Keuangan (depkeu). Dimana pemerintah akan memilih agen penjual dan konsultasi hukum sukuk ritel. Agen

penjual haruslah memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah. Sukuk ritel juga diatur dalam Undang-Undang No. 19/2008 pada bulan Mei 2008.

2.1.3. Karakteristik Sukuk

Karakteristik sukuk adalah (Depkeu: 2010).

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat;
- b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan;
- c. Terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *masyir*;
- d. Penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV);
- e. Memerlukan *underlying asset*;
- f. Penggunaan *proceeds* (hasil jual) harus sesuai prinsip syariah.

2.1.4. Jenis-jenis Sukuk

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang obligasi syariah, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: *mudharabah* (*muqaradah/ qiradah*), *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* (DSN, 2006).

- a. Akad *Ijarah* (*operating lease*)
Ijarah merupakan akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas sesuatu obyek *ijarah* yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan aset itu sendiri. Dalam akad *ijarah*, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- b. Akad *mudharabah* atau *muqaradah* (*trust financing, trust investment*)
Akad ini merupakan akad keaja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal (*rab-al-maal/ shahibul maal*) dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah* Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

- c. Akad *Musyarakah* (*partnership, project financing participation*)
Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah*, dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan. Dalam akad *musyarakah* Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.
- d. Akad *istishna'* (*purchase by order or manufacture*)
Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'*, dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan proyek atau barang. Dalam akad *istishna'* Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *istishnai*.
- e. Akad *Salam* (*in-front payment sale*)
Salam adalah penjualan suatu komoditi, yang telah ditentukan kualitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan dimasa depan pada harga sekarang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *salam* disebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *salam*.

2.1.5. Dasar Hukum dan Fatwa-fatwa Sukuk Ritel

Dasar hukum SBSN yaitu peraturan Bapepam dan LK yang khusus terkait dengan penerbitan sukuk nomor IX.A.13 yang didalamnya mengatur penawaran umum, kewajiban penyampaian dokumen kepada Bapepam dan LK, penyampaian dari wali amanat, pengungkapan informasi dalam prospektus perjanjian perwaliamatan, perubahan jenis/ akad/ kegiatan, aset yang mendasari penerbitan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sukuk, kewajiban emiten dalam penggunaan dana hasil penawaran umum, dan syarat-syarat perdagangan sukuk dipasar sekunder.

Selain itu, fatwa-fatwa yang terkait dengan Surat Berharga Negara diantaranya:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga Negara;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *sale and back*;
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*;
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2008 SBSN *Ijarah Asset To Be Leased* (Sukuk *Milkiyah al-maujudat al-mu’ajjarah*).

2.1.6. Tujuan Penerbitan Sukuk Ritel

Penerbitan obligasi dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana, baik untuk ekspansi bisnisnya atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan atau negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam Undang-Undang tentang SBSN pada pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan penerbitan sukuk untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

2.1.7. Keuntungan Sukuk Ritel (SR)

Dalam membeli sukuk terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari sukuk, antara lain:

- a. Pembayaran imbalan/ kupon dan nilai nominal SR dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga SR tidak mempunyai resiko gagal bayar;

- b. Pada saat diterbitkan (pasar perdana), imbalan/ kupon SR ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
- c. Imbalan/ kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada tanggal jatuh tempo;
- d. Imbalan/ kupon SR dibayarkan setiap bulan;
- e. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme bursa efek atau dieksekusi kepada nasabahnya yang memberi di pasar perdana;
- f. Tersedia kuota harga beli (*bid price*) dari agen penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di pasar perdana;
- g. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila dijual pada harga yang lebih tinggi dari pada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder;
- h. Dapat di pinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- i. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional;
- j. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

2.2.1. Pengertian APBN

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Daftar anggaran yang mengandung penerimaan sistematis dan rinci dan rencana pengeluaran untuk tahun fiskal negara 1 Januari - 31 Desember. anggaran, anggaran perubahan, dan akuntabilitas, perusahaan dalam APBN dan akuntabilitas

anggaran negara setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

2.2.2. Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah:

- a. Pendapatan negara dan hibah;
- b. Belanja negara;
- c. Keseimbangan primer;
- d. surplus/ defisit anggaran;
- e. Pembiayaan;
- f. struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang sering disebut *i-account*. Dalam beberapa hal, isi dari *i-account* sering disebut postur APBN.

2.2.3. Fungsi APBN

Fungsi APBN menurut Undang-Undang No.17 tahun 203, yaitu:

- a. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan adalah anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.3. Infrastruktur

2.3.1. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik

pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Istilah umum bagi insfrastruktur yang merujuk pada infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur biasanya berupa pembangunan kereta api, jalan raya, air bersih, kanal, waduk, jalan tol telekomunikasi, pelistrikan dan pelabuhan. Secara fungsional infrastruktur selain fasilitas dapat pula mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan proses pendistribusian suatu barang sehingga dapat sampai ke masyarakat.

World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminologi yang mempayungi banyak aktivitas terkait "*social overhead capital*". Selain itu "*social overhead capital*" bisa dikatakan sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

2.3.2. Jenis Infrastruktur

Infrastruktur sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Infrastruktur keras meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran imigrasi.
- b. Infrastruktur keras non fisik meliputi yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyalur, pemasok listrik, jaringan telekomunikasi, dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, gas berikut pipa distribusinya dan bio disel.
- c. Infrastruktur lunak bisa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan. Serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait khususnya pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektivitas serta arti pengalaman bagi individu (brockopp, Marie T, Hastingstolsma, 2000).

Metode ini meneliti tentang penyebab, dampak dan apa yang akan terjadi nantinya atau hasilnya.

3.2. Observasi

Bungin (2007: 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipan, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

a. observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

b. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatan dalam mengamati suatu obyek.

c. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

3.3. Analisis Data

Untuk analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, maka data tersebut diolah dengan langkah-langkah:

- a. Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian.
- b. Data diolah sesuai masalah penelitian.
- c. Analisis data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai jawaban terhadap analisis.

Metode analisis, dalam penelitian kualitatif, penulisan deskriptif sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2000) mengikuti prosedur sebagai berikut: (1) Analisis deskriptif dengan menggambarkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan, (2) penafsiran atas hasil deskriptif dengan pedoman pada teori yang sesuai.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif dengan maksud menjawab masalah penelitian. Data tersebut ditafsirkan menjadi kategori-kategori yang berarti menjadi bagian dari teori atau mendukung teori yang diformulasikan secara deskriptif (Maleong,2000).

3.4. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman kelompok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Sukuk

Sukuk negara ritel merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara. Di Indonesia sendiri sukuk dijual melalui agen penjual yang dimana agen tersebut dipilih sendiri oleh pemerintah. Pemilihan agen penjual baik dari bank umum syariah ataupun konvensional, serta perusahaan efek harus memiliki empat kriteria, yaitu: (1) memiliki anggota tim yang berpengalaman dalam penjualan

produk keuangan syariah; (2) memiliki komitmen dalam mengembangkan pasar SBSN; (3) memiliki rencana kerja, strategi dan metodologi penjualan; dan (4) memiliki dukungan sistem teknologi informasi yang memadai dalam penjualan sukuk ritel.

Penerbitan sukuk pertama kali dilakukan pada tahun 2009, dimana sukuk yang dikeluarkan adalah sukuk SR-001 dengan nilai imbal hasil 12% menggunakan akad perjanjian *ijarah sale and lease back* dan bertenor selama tiga tahun. Pertama kali sukuk diterbitkan tingkat partisipasi investor terhadap sukuk sangat tinggi, dimana nilai imbal balik yang sangat besar menjadi daya tarik bagi para investor. Penerbitan sukuk SR-001 berhasil memperoleh dana sebesar Rp.5,56 triliun.

Pada tahun berikutnya pemerintah juga mengeluarkan sukuk dengan seri SR-002 dimana nilai imbal balik 8,7% lebih rendah dibandingkan dengan nilai imbal balik pada SR-001. Nilai imbal balik yang lebih rendah dari sebelumnya tidak menghalangi niat investor untuk menanamkan modal terbukti dengan naiknya perolehan dana menjadi Rp.8 triliun, dengan tenor selama tiga tahun.

Tahun 2001, pemerintah mengeluarkan sukuk seri SR-003 dengan nilai imbal balik sebesar 8,15% dengan tenor selama tiga tahun dan memperoleh dana sebesar Rp.7,34 triliun, menurun jika dibandingkan dengan perolehan pada SR-002. Kemudian ditahun 2012, pemerintah mengeluarkan sukuk seri SR-004 dengan nilai imbal balik sebesar 6,25%, menurun drastis jika dibandingkan dengan SR-003. Penurunan nilai imbal balik tidak mempengaruhi niat investor untuk menanamkan sahamnya sehingga pemerintah mendapatkan dana sebesar

Rp.13,61 triliun. Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan sukuk SR-005 dengan nilai imbal balik 6% dan menjadi nilai imbal balik yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Dengan memperoleh dana sebanyak Rp.14,97 triliun

Pada tahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan sukuk seri SR-006 dengan nilai imbal balik adalah 8,75% dimana nilai imbal balik pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai imbal balik pada tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah memperoleh dana sebesar Rp.19,23 triliun.

Tahun 2015 pemerintah mampu memperoleh dana sebesar Rp.21,96 triliun dimana dana tersebut diperoleh dengan mengeluarkan sukuk seri SR-007 dengan nilai imbal balik sebesar pada SR-001 sampai dengan SR-003 pemerintah menggunakan akad *ijarah sale and lease back* dimana akad tersebut hanya menjaminkan aset yang dimiliki negara, sedangkan dalam sukuk seri SR-004 sampai dengan SR-008 pemerintah menggunakan akad *ijarah asset to be leased* yaitu akad dimana yang dijaminakan bukan hanya aset melainkan proyek yang sedang berlangsung yang dibiayai oleh APBN infrastruktur. Dalam perkembangannya ketertarikan investor terhadap sukuk mengalami peningkatan yang stabil dimana peningkatan tersebut berkisar antara 20% - 35%. Tetapi pada saat penerbitan sukuk seri SR-003 minat para investor mengalami penurunan, tetapi diimbangi dengan kenaikan yang signifikan pada saat penerbitan sukuk seri SR-004.

Berikut ini tabel yang menggambarkan tentang perkembangan sukuk:

Tabel 4.1. Perkembangan Sukuk Ritel

Sukuk	Tanggal terbit dan jatuh tempo	Akad	Nominal (dalam triliunan)
SR-001	Tanggal terbit 25 Februari 2009	<i>Ijarah sale and lease back</i>	Rp.5.556.290

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

	Jatuh tempo 25 Februari 2012		
SR-002	Tanggal terbit 10 Februari 2010 Jatuh tempo 10 Februari 2013	<i>Ijarah sale and lease back</i>	Rp.8.033.860
SR-003	Tanggal terbit 23 Februari 2011 Jatuh tempo 23 Februari 2014	<i>Ijarah sale and lease back</i>	Rp.7.340.000
SR-004	Tanggal terbit 21 September 2012 Jatuh tempo 21 September 2015	<i>Ijarah asset to be leased</i>	Rp.13.600.000
SR-005	Tanggal terbit 27 Februari 2013 Jatuh tempo 27 Februari 2016	<i>Ijarah asset to be leased</i>	Rp.14.968.000
SR-006	Tanggal terbit 5 Maret 2014 Jatuh tempo 5 Maret 2017	<i>Ijarah asset to be leased</i>	Rp.19.232.345
SR-007	Tanggal terbit 11 Maret 2015 Jatuh tempo 11 Maret 2018	<i>Ijarah asset to be leased</i>	Rp.21.965.035
SR-008	Tanggal terbit 10 Maret 2016 Jatuh tempo 11 Maret 2019	<i>Ijarah asset to be leased</i>	

4.2. APBN Infrastruktur

Dalam setiap tahunnya, pemerintah merancang anggaran untuk pembelanjaan negara dalam tahun yang akan berjalan. Anggaran yang dibuat memerlukan dana yang tidak hanya diperoleh dari pendapatan negara tetapi juga melalui tambahan dana dari utang obligasi dan sukuk negara ritel.

Dimana obligasi dan sukuk berperan sebagai penutup defisit APBN untuk membiayai anggaran yang berasal dari hutang. Dalam perkembangannya kebutuhan dana pemerintah untuk pembiayaan APBN teruslah meningkat dan menyebabkan defisit anggaran terus meningkat. Pengalokasian anggaran dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dimana didalam indikator tersebut terdapat anggaran yang dibuat khusus untuk infrastruktur baik bagi pusat ataupun transfer ke daerah.

Berdasarkan kementerian dan lembaga, anggaran infrastruktur pada setiap tahunnya mengalami kenaikan yang disebabkan oleh naiknya jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp.86 triliun yang dibagi menjadi dua, yaitu: (1)

kementerian/ lembaga sebesar Rp.59,9 dan non kementerian/ lembaga sebesar Rp.26,1.

Tahun 2011, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.114,2 triliun dimana anggaran untuk kementerian/ lembaga sebesar Rp.91,2 triliun dan untuk non kementerian/ lembaga Rp.23 triliun.

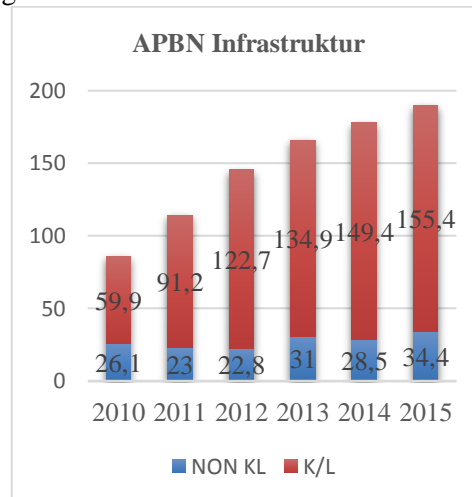
Tahun 2012 anggaran riil yang dikeluarkan sebesar Rp.145,5 triliun, dimana untuk kementerian/ lembaga sebesar Rp.122,6 triliun dan untuk non kementerian/ lembaga Rp.22,8 triliun.

Pada tahun berikutnya anggaran riil yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp.155,9 triliun dimana anggaran untuk kementerian/ lembaga sebesar Rp.134,9 triliun dan untuk non kementerian/ lembaga Rp.21 triliun.

Tahun 2014 APBNP sebesar Rp.177,9 triliun dimana anggaran untuk kementerian/ lembaga sebesar Rp.149,4 triliun dan untuk non kementerian/ lembaga Rp.28,5 triliun.

Dan pada tahun 2015 anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.189,7 triliun dimana anggaran untuk kementerian/ lembaga sebesar Rp.155,4 triliun dan untuk non kementerian/ lembaga Rp.34,3 triliun. Dalam lima tahun terakhir, anggaran infrastruktur terus mengalami

peningkatan, yang dimana itu berarti kenaikan anggaran harus disertai dengan kenaikan pendapatan negara.



Grafik 4.2 Penyaluran Dana APBN Untuk Kementerian dan Non Kementerian

4.3. Defisit atau Surplus Negara

Defisit negara secara harfiah berarti adalah kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi apabila suatu organisasi (biasanya pemerintahan) mengalami kelebihan dalam hal pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan. Sedangkan surplus dapat terjadi jika pemasukan lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran. Terjadinya defisit anggaran dapat terjadi oleh beberapa faktor penting, adakalanya terjadi karena anggaran yang memang kurang dan adakalanya terjadi karena cara atau metode pembiayaan yang mengakibatkan defisit.

Jika defisit negara didanai melalui prosedur pinjaman publik dalam negeri, tekanan moneter dari total permintaan pemerintah terhadap harga tidak akan terjadi, karena sarana pembayaran individu yang kelebihan berhasil diserap dan demikian inflasi mata uang tidak terjadi karena kebijakan tersebut. Apabila defisit negara dibiayai oleh Bank Sentral maka tekanan inflasi harga mata uang mulai muncul sebagai akibat adanya alat pembayaran yang berlebih dari pada penawaran yang ada. Disini, metode penanganan defisit juga berdampak besar terhadap konsekuensi

yang muncul. Yaitu apabila penanganan defisit anggaran ditutupi dengan penerbitan uang baru (ekspansi moneter) akan menyebabkan inflasi dan merosotnya nilai kurs mata uang lokal terhadap mata asing.

4.4. Pembahasan

Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah pada setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup stabil pada setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai tertarik dengan sukuk dimana nilai imbal balik yang relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan ORI.

Hasil dari penerbitan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan untuk menambah dana anggaran pemerintah dimana di dalam anggaran tersebut terdapat anggaran infrastruktur, dimana dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengalami defisit anggaran yang menyebabkan pemerintah harus mencari dana untuk menutupi defisit anggaran.

Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah harus mengeluarkan surat hutang, baik surat hutang dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Dalam pinjaman dalam negeri pemerintah mengeluarkan surat hutang baik itu dalam bentuk Obligasi Ritel Indonesia maupun Surat Negara Ritel. Dan untuk luar negeri pemerintah menggunakan pinjaman luar negeri. Pada dasarnya, menurut penelitian terdahulu surat hutang yaitu ORI maupun SR merupakan sumber utama pendanaan hutang yang dilakukan oleh negara, dimana pinjaman luar negeri hanyalah sebagai pelengkap.

Anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan bagi seluruh infrastruktur di Indonesia, baik dalam hal teknologi, jalan raya, pelabuhan, kesehatan dan pendidikan.

Apabila anggaran infrastruktur mengalami defisit maka, pembangunan infrastruktur yang telah dirancang akan mengalami masalah dalam pengembangannya. Infrastruktur yang dibangun dapat berjalan dengan lancar apabila pemerintah dapat menyediakan dana sebesar yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur bisa berdampak baik dalam hal perkembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah apabila suatu perusahaan mengirim bahan baku untuk proses produksi tetapi untuk jalan yang ada disekitar perusahaan tidak baik, maka proses pengiriman bahan baku akan terhambat dan dapat berdampak pada proses produksi yang juga terhambat. Selain itu, pada saat barang jadi telah selesai pada saat akan dikirim untuk di ekspor maka barang tersebut mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan pendapatan pajak ekspor pemerintah mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan pendapatan anggaran. Dalam hal defisit anggaran, sukuk berperan serta memberikan dana untuk menutup defisit anggaran yang terjadi karena kekurangan pendapatan.

Penerbitan surat hutang negara kepada publik merupakan salah satu

potensi pembiayaan untuk mengurangi risiko keuangan bagi negara dimasa mendatang. APBN di Indonesia pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang menyebabkan perkembangan infrastruktur juga ikut semakin meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Anggaran infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah ditujukan untuk peningkatan pembangunan. Dimana di dalam anggaran infrastruktur pendanaan yang ditujukan untuk infrastruktur seringkali mengalami kekurangan. Dalam hal kekurangan anggaran atau sering disebut sebagai defisit anggaran, pemerintah melakukan peminjaman dana, baik dari pihak luar maupun dalam negeri.

Terdapat beberapa pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Surat Hutang Negara (SHN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kekurangan anggaran yang terjadi ditutup oleh dana dari penerbitan surat berharga negara. Dan dalam hal ini sukuk ikut berperan didalamnya. Jadi, menurut penulis peran sukuk ialah sebagai penutup anggaran defisit, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidak sesuaian antara arus penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio negara. Apabila kekurangan defisit ditutup dan anggaran infrastruktur tercukupi, secara tidak langsung dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Untuk peran sukuk bagi perkembangan pembangunan infrastruktur itu sebagai pemberi dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Didalam anggaran infrastruktur terdapat defisit anggaran dimana hal tersebut dapat ditutup dengan adanya penerbitan sukuk yang dilakukan sebagai tambahan dana untuk anggaran. Pengalokasian anggaran

infrastruktur digunakan untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia, baik dalam segi pembangunan jalan tol, pendidikan, kesehatan, pelabuhan dan teknologi.

Perkembangan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, berbeda pada tahun sebelumnya pada saat sukuk belum digunakan untuk pendanaan anggaran. Secara tidak langsung, dengan adanya penerbitan surat hutang negara baik itu ORI maupun sukuk dapat memberikan dampak positif bagi minat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pemerintah bisa mendapatkan pendapatan negara yang lebih besar yang akan diolah untuk pembangunan perekonomian di Indonesia.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan peran sukuk bagi perkembangan infrastruktur di Indonesia adalah peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti anggaran infrastruktur yang mengalami defisit anggaran sehingga dapat ditutup oleh penerbitan surat hutang negara. Dan untuk pemerintah diharapkan untuk APBN Infrastruktur agar dapat lebih transparansi lagi dalam hal pengalokasian dana, karena defisit anggaran infrastruktur ditutup dengan penerbitan surat hutang negara.

DAFTAR PUSTAKA

Munawar, Dingtji. (2014). *Peran surat hutang negara sebagai penutup deficit anggaran*. diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20145-peran-surat-utang-negara-sebagai-penutup-defisit-apbn>

www.djpu.kemenkeu.do.id

<http://www.syariahbank.com/mengenal-obligasi--syariah-sukuk>

<http://www.syariahmandiri.co.id/sukurit>

<http://www.kemenkeu.go.id/sukukritel>

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia#Belanja_Negara

http://www.kompasiana.com/amirsyahoke/mengenal-jenis-jenis-belanja-pemerintah-pusat-dalam-apbn_552b00daf17e616860d623ca

<http://danirachmat.com/obligasi-ritel-negara-ori-dan-sukuk-ritel-negara/>

http://www.kompasiana.com/tutihand/ca-paian-pembangunan-indonesia-dalam-grafik_54f82374a33311c27b8b5469

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM PENGISIAN SPT
TAHUNAN ORANG PRIBADI TERHADAP KETAATAN
PENGUNGKAPAN HARTA WAJIB PAJAK
PADA PELAPORAN TAX AMNESTY**

Denis Prasetya

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email: 5321denis5321@gmail.com

ABSTRACT

LAW number 6 YEAR 1983 On General provisions and Taxation Procedures article 2 States tax payers as the intention in paragraph (1) should take notice in a place specified by in dantje It is the primary base in the form of the regulation on the system of taxation in Indonesia with a system of Self understanding with just my Assesment tax payers must calculate, reckon, deposit and report taxes themselves. The purpose of this research is to know the influence of the influence of the self assessment system of charging annual private person against such obedience disclosure of property taxpayers in tax amnesty program. The method used in this research is Associative. Population against this research is taxpayer personal Tax Service Office in Cilandak. The results of this research is the height has no effect against the obedience of the disclosure of property taxpayers reporting on a tax amnesty.

Key Words: Self Assessment System, Asstes Tax Payers, Tax Amnesty

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2, menyebutkan wajib pajak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus mengambil surat pemberitahuan di tempat yang di tentukan oleh di DJP. Ini merupakan dasar utama di bentuknya peraturan mengenai system perpajakan di Indonesia dengan sistem Self Assesment dengan pengertian wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengaruh self assessment system pengisian SPT tahunan orang pribadi terhadap ketaatan pengungkapan harta wajib pajak pada program Tax Amnesty. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah Asosiatif. Populasi terhadap penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Cilandak. Hasil dari penelitian ini adalah tinggi tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan harta wajib pajak pada pelaporan Tax Amnesty.

Kata Kunci: Self Assessment System, Harta Wajib Pajak, Tax Amnesty

1. PENDAHULUAN

Sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessments system*, sejak reformasi perpajakan tahun 1983 yang sebelumnya menganut *official assessments system* peninggalan zaman kolonial Belanda. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh wajib pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.

Definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu hubungannya penghasilan dengan harta wajib pajak yang akan dilaporkan adalah penghasilan berkaitan erat dengan harta, bahwa penambahan harta berarti terdapat penghasilan pada wajib pajak tersebut. Namun pengurangan jumlah harta juga bukan berarti berkurangnya penghasilan, dalam beberapa hal pengurangan harta juga berarti penghasilan bagi wajib pajak.

Di samping itu dengan dilaporkannya harta pihak DJP lebih mudah dalam penghasilan berkaitan erat dengan harta, bahwa penambahan harta berarti terdapat penghasilan pada wajib pajak tersebut. Namun pengurangan jumlah harta juga bukan berarti berkurangnya penghasilan, dalam beberapa hal pengurangan harta juga berarti penghasilan bagi wajib pajak. Faktanya tidak semua wajib pajak melaporkan hartanya pada SPT Tahunan pribadi mereka dengan berbagai alasan yang mereka utarakan, antara lain, masyarakat masih berfikir jika mereka mengungkap harta di SPT mereka akan dikenai pajak besar, wajib pajak bingung

akan harta yang mereka miliki, mereka tidak mengerti jika harta harus diisi, alasan lainnya. Ini yang menjadi alasan pemerintah dalam membuat program *tax amnesty* (pengampunan pajak) sekarang ini.

Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Jika wajib pajak belum melaporkan harta yang mereka miliki pada SPT tahun terakhir (2015) maka wajib pajak mempunyai 2 pilihan yaitu, mengikuti program *tax amnesty* yang sekarang sudah sampai tahap kedua dengan uang tebusan 2% dari harta yang mau diungkapnya (Harta tambahan = Harta tambahan – Kewajiban tambahan) dan mendapat sederet manfaat dengan mengikuti program *tax amnesty*, atau tidak mengikuti *tax amnesty* dan berdoa sampai 30 Juni 2019 agar harta bagi wajib pajak yang tidak mengungkapkannya tidak diselidik oleh DJP, dan apabila di temukan harta yang belum di ungkap makan pihak DJP akan memberikan sanksi 200% dari tarif normal yang harus di bayar berdasarkan harta yang belum di ungkapnya.

2. KERANGKA TEORI

2.1. *Self Assessment System*

2.1.1. Pengertian

Self assessment system berasal dari tiga kata yaitu *self* yang artinya sendiri, *assessment* yang artinya penaksiran, dan *system* artinya metode atau sistem itu sendiri, sehingga jika digabung *self assessment system* merupakan sistem penaksiran sendiri, sehingga wajib pajak lah yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sejak perubahan ketentuan peraturan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan sejarah, sistem pemungutan perpajakan yang pernah dilaksanakan di Indonesia, ialah:

- a. Sistem *Official Assessment*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967.
- b. Sistem semi *Self Assessment* dan *Witholding*, dilaksanakan sampai pada periode 1968 – 1983.
- c. Sistem *Self Assessment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 sampai sekarang, atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2003), yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus diabayar.

- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak

2.1.3 Kekurangan Sistem *Self-Assessment*

Sistem *self-assessment* ini masih terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan WP hanya ia sendiri.
- b. Masih banyaknya wajib pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Lain halnya ketika WP harus melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal. Seperti yang dilakukan di Belanda, dimana laporan keuangan fiskal merupakan *by product* dari akuntansi komersial.
- c. Kendala juga tidak terjadi di pihak WP, di pihak fiskus juga terjadi masalah yaitu terbatasnya akses data wajib pajak yang dimiliki oleh pihak ketiga sehingga mempersulit DJP untuk mendeteksi kebenaran isi SPT yang dilaporkan WP. Sehingga

pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

2.1.4 Kelebihan Sistem Self-Assessment

Kelebihan dari sistem *self assesment* yaitu wajib pajak dipercaya fiskus untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya, dan wajib pajak akan terdorong untuk memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi yang berat (denda bunga, kenaikan jumlah pajak terutang dan sandera pajak/ *gijzeling* serta yang lebih berat yaitu pidana pajak), dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut wajib pajak akan memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya.

2.2. Harta Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 yang dimaksud dengan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses pengampunan pajak, harta terkait harus dimasukkan dalam daftar rincian harta dan disampaikan wajib pajak dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan formulir kertas (*hardcopy*). Selain berisi harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, daftar rincian harta juga mencerminkan

nilai harta tambahan untuk diperhitungkan dalam nilai harta bersih yang menjadi dasar dalam penghitungan uang tebusan.

2.2.2. Jenis-jenis Harta

Harta apa saja yang wajib dilaporkan dalam SPT, sering ditanyakan oleh sebagian besar wajib pajak orang pribadi, apalagi yang NPWP-nya terbilang *fresh from the oven* atau dengan kata lain baru pertama kali bersentuhan dengan kewajiban perpajakan. Lebih lanjut juga banyak ditanyakan apakah seluruh harta yang dimiliki wajib pajak wajib dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-81/PJ./2007, tidak disebutkan dengan tegas batasan atau kategori apa yang digunakan untuk menentukan jenis harta yang wajib dilaporkan dalam SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Aturan yang merupakan petunjuk pengisian SPT PPh wajib pajak ini hanya memberikan contoh-contoh harta yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu:

- a. Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- b. Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- c. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
- d. Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya;
- e. Uang tunai rupiah, valuta asing sepadan US Dollar, simpanan termasuk tabungan dan deposito di bank dalam dan luar negeri; piutang dan sebagainya dicantumkan secara global;
- f. Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) dicantumkan secara global;
- g. Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya);

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- h. Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak terbagi atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global;
- i. Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.

2.2.3. Pernyataan Harta Pada SPT

Sepututnya harta yang kita miliki dilaporkan pada SPT kita, ini bertujuan agar pihak DJP menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan, terutama dengan melakukan analisis penambahan/pengurangan harta, hutang dan penghasilan.

Di luar itu, ada pula yang berpandangan bahwa harta tersebut tidak perlu dilaporkan karena tidak signifikan dalam menghitung tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak. Selain itu, jika dikaitkan dengan UU penagihan pajak dengan surat paksa, harta-harta berupa perabotan rumah tangga tidak menjadi salah satu objek yang dapat disita. Namun, berbeda dari kedua pendapat tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa harta-harta tersebut tetap wajib dilaporkan dalam SPT PPh wajib pajak.

Terpecahnya pendapat tentang jenis harta yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak rasanya perlu diperhatikan oleh para *rule maker*. Sebab walau bagaimana pun wajib pajak berhak untuk mendapatkan kejelasan tentang kewajiban pajak yang diwajibkan kepada mereka. Apalagi wajib pajak yang masih sangat awam dengan pajak. Kejelasan ini tentu juga dibutuhkan oleh petugas pajak, karena mereka dituntut untuk dapat memberikan penjelasan yang tegas, seragam dan tidak mengambang.

Dari sudut pandang penggunaan harta, apakah untuk usaha atau tidak, tidak ada perbedaan dalam kewajiban melaporkan daftar harta di dalam SPT. Artinya, baik harta tersebut digunakan wajib pajak untuk usaha atau tidak (untuk

kepentingan pribadi), harta-harta tersebut tetap harus dilaporkan oleh wajib pajak.

2.3. Tax amnesty (Pengampunan Pajak)

2.3.1. Pengertian

UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menjelaskan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak.

Objek *tax amnesty* adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir.

Subjek *tax amnesty*. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2016 yang menjadi subjek pengampunan pajak yaitu pertama setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak meliputi badan, Orang Pribadi (OP), pengusaha omset tertentu, dan badan/ OP yang belum ber NPWP, kedua wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Latar belakang *tax amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyebab pertama Indonesia memberlakukan *tax amnesty* adalah karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. *Tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak;
- c. Kasus Panama *Pappers*.
- d. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. Data pengampunan pajak dijamin kerahasiaannya, tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun. (pembocor dikenakan sanksi 5 tahun).
- f. Pembebasan PPh untuk balik nama harta tambahan (hanya membayar BPHTB 5%, hemat 2,5% dari penjual sebagai *nominee*) → harus dengan SKB.

Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

- a. Surat Berharga Negara Republik Indonesia;
- b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
- d. Investasi keuangan pada bank persepsi;
- e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; dan/ atau
- h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan keluar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan surat keterangan.

2.3.2. Keuntungan dan Konsekuensi Mengikuti Program *Tax Amnesty*

UU No.11/2016 menjelaskan tentang keuntungan mengikuti program *tax amnesty*:

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
- b. Tidak dikenai sanksi administrasi (bunga atau denda) dan sanksi pidana perpajakan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.3.3. Yang Dapat Atau Tidak Mengikuti *Tax Amnesty* dan Persyaratannya

UU No.11/2016 menjelaskan siapa saja yang dapat mengikuti dan tidak mengikuti program *tax amnesty*:

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Wajib Pajak Badan;
- c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Penandatanganan di Surat Pernyataan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau
- c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Yang tidak dapat mengikuti *tax amnesty* adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau orang yang sudah melaporkan seluruh harta yang telah dia miliki.

2.3.4. Tarif Tax Amnesty

Pasal 4 ayat (2) UU No.11/2016 menjelaskan besarnya tarif perhitungan uang tebusan:

- a. Harta di dalam negeri atau di luar negeri yang dialihkan ke Indonesia (repatriasi):
 - 1) 2% untuk periode 3 bulan pertama (sejak UU berlaku s.d akhir bulan ke-3 yaitu 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016).
 - 2) 3% untuk periode 3 bulan kedua (bulan ke-4 sejak UU berlaku s.d 31 Desember 2016 yaitu 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016).
 - 3) 5% untuk periode 3 bulan ketiga (1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017).
- b. Harta di luar negeri yang tidak dialihkan:
 - 1) 4% untuk periode 3 bulan pertama (sejak UU berlaku s.d akhir bulan ke-3 yaitu 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016).
 - 2) 6% untuk periode 3 bulan kedua (bulan ke-4 sejak UU berlaku s.d 31 Desember 2016 yaitu 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016).

- 3) 10% untuk periode 3 bulan ketiga (1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017).

- c. Bagi wajib pajak dengan peredaran usaha s.d Rp.4,8 Milyar (UMKM) pada tahun pajak terakhir:
 - 1) 0,5% bagi yang mengungkapkan nilai harta s.d Rp.10 Milyar.
 - 2) 2% bagi yang mengungkapkan lebih dari Rp.10 Milyar (wajib pajak wajib melampirkan surat pernyataan omzet).

2.3.5. Sanksi Tax Amnesty

Perlu diketahui setelah 31 Maret 2017 (berakhirnya *tax amnesty*), yang ketahuan melaporkan sebagian hartanya saat *tax amnesty* akan dikenakan sangat sangat tinggi yaitu dikenai PPh + tambah sanksi 200% + pidana penjara. Berjalannya *tax amnesty* akan ada kelanjutan revisi Undang-Undang ketentuan PPN dan PPh, di mana kemungkinan akan lebih dipermudah. Quartal pertama tahun 2018 atau 2 tahun lagi, semua lembaga akan mewajibkan menyerahkan seluruh data ke badan pajak. Seperti perbankan, asuransi, kartu kredit, dan lembaga lainnya. Bahkan kerjasama dengan negara-negara dunia telah menandatangani untuk saling keterbukaan. Dengan kata lain orang-orang yang tidak ikut *tax amnesty* akan sangat mudah ketahuan bahkan bagi yang mempunyai keuangan di Swiss, Singapore atau negara lainnya akan mudah terdeteksi. Dengan kata lain, denda 200% dan pidana akan diberlakukan. Bagi WP yang telah mengajukan *tax amnesty*, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%. Bagi WP yang tidak memanfaatkan *tax amnesty*, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi sesuai UU Perpajakan.

2.3.6. Tata Cara Mengikuti Tax Amnesty

Tata cara pengajuan amnesti pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan, yaitu:
 - 1) bukti pembayaran uang tebusan;
 - 2) bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak;
 - 3) daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
 - 4) daftar utang serta dokumen pendukung;
 - 5) bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - 6) fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - 7) surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.
 - 8) surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - 9) melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi;
 - 10) surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM.
- b. Wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesti pajak melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- c. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan.
- e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat keterangan pengampunan pajak kepada wajib pajak.
- f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan surat keterangan, surat pernyataan dianggap diterima.
- g. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

3. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Cilandak. Populasi yang akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *tax amnesty* di KPP tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi secara langsung.

3.1. Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Merupakan teknik pengumpulan sampel pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu Wiratna Sujarweni (2015).

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber Wiratna Sujarweni (2015). Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuisisioner yang diberikan secara sampel kepada wajib pajak di KPP yang telah disebutkan di atas.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisisioner. Kuisisioner adalah tehknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para responden.

3.3. Metode Analisis Data

Wiratna Sujarweni (2015) analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diperoleh dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian tehknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Pengujian data yang telah diperoleh menggunakan *software* SPSS v.23 untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian dan menarik kesimpulan akan permasalahan yang ada.

3.3.1. Uji Statistik Deskriptif

Wiratna Sujarweni (2015), statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif seperti *mean*, *median*, *modus*, *presentil*, *desil*, *quartile*, dalam bentuk analisis angka maupun gambar/diagram.

3.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas bentuk pengukuran yang dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur sebuah konsep bersatu menjadi sebuah kumpulan. Menurut Yogyanto (2010) suatu pengukuran dikatakan reliabel jika pengukuran tersebut dapat dipercaya, supaya dapat dipercaya maka hasil dari pengukuran harus konsisten. Dan dikatakan konsisten manakalah beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda.

3.3.3. Uji Validitas

Validitas merupakan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur (Yogyanto: 2010). Atau definisi lainnya mengartikan validitas sebagai

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ada tiga kategori validitas yang sering dijumpai, yaitu validitas berdasarkan kriteria, validitas konvergen, validitas diskriminan.

3.3.4. Uji Regresi Sederhana

Regresi sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan *predictor* sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan *response*. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR (*Simple Linear Regression*) juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas.

Penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain:

- a. Hubungan *self assessment system* pengisian SPT tahunan orang pribadi terhadap ketaatan pengungkapan harta wajib pajak pada pelaporan *tax amnesty*.

Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = Variabel *Response* atau Variabel Akibat (*Dependent*).

X = Variabel *Predictor* atau Variabel Faktor Penyebab (*Independent*).

a = konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran *response* yang ditimbulkan oleh *predictor*.

x = *self assessment system* pengisian SPT tahunan orang pribadi.

Y = ketaatan pengungkapan harta wajib pajak pada pelaporan *tax amnesty*.

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

3.3.5. Uji Koefisien Determinasi R

Menurut Imam Ghozali (2009) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel independen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila R = 0 berarti diantara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*) tidak ada hubungannya, sedangkan bila R = 1 berarti antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*) mempunyai hubungan kuat.

3.3.6. Uji Hipotesis T

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t_{hitung} , proses uji t identik dengan uji F (lihat perhitungan SPSS pada *coeficient regression full model/ enter*). Atau bisa diganti dengan uji metode *Stepwise*.

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik t (uji satu sisi).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Kriteria pengujian:

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq + t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak;
- Jika $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > + t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan $(n-k-1)$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel memberikan gambaran umum rata-rata mean, standar deviasi, maksimum, minimum, dan sum dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	30	8	18	13,60	2,647
Pelaporan Tax Amnesty	30	9	19	14,30	2,731
Valid N (listwise)	30				

4.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Hasil r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} dengan

signifikan 0,05. Dalam penelitian ini terdapat jumlah responden 30 wajib pajak, maka diperoleh r_{tabel} yaitu 0,3494. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid sebagai alat ukur.

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Self Assessment System

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Kriteria
SAS1	0,104	0,3494	Tidak Valid
SAS2	0,288	0,3494	Tidak Valid
SAS3	0,061	0,3494	Tidak Valid
SAS4	0,154	0,3494	Tidak Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS v23

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Pelaporan Tax Amnesty

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Kriteria
PTA1	0,472	0,3494	Valid
PTA2	-0,050	0,3494	Tidak Valid
PTA3	0,416	0,3494	Valid
PTA4	0,307	0,3494	Tidak Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS v23

Berdasarkan Tabel 4.2. dan 4.34 diatas pada kolom r_{hitung} untuk masing-masing item atau butir pernyataan nilai lebih besar dari r_{tabel} 0,3494, sehingga dapat disimpulkan pernyataan-pernyataan tersebut adalah valid.

4.3 Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2015:199) uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai $\alpha > 0,60$ maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel.

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Self Assessment System	0,288	4	Tidak Reliabel
Pelaporan Tax Amnesty	0,476	4	Tidak Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS v23

Tabel 4.4. di atas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel *self assessment system* sebesar 0,288 dan variabel pelaporan *tax amnesty* 0,476, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisioner semua

variabel ini tidak reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih kecil dari 0,60.

4.4 Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,134	2,677		6,028	,000
Self Assessment System	-,135	,193	-,131	-,698	,491

a. Dependent Variable: Pelaporan Tax Amnesty

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS v23

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,134 - 0,135X$$

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta yaitu sebesar 16,134. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel *self assessment system* dianggap konstan (nol), maka besarnya pelaporan *tax amnesty* (Y) sebesar 16,134.

Koefisien regresi pada variabel *self assessment system* sebesar -0,135 hal

ini berarti jika variabel *self assessment system* bertambah satu satuan maka variabel pelaporan *tax amnesty* akan menurun sebesar 0,135.

4.5 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sebesar mana hubungan antara *self assessment system* (X) terhadap pelaporan *tax amnesty* (Y). Hasil analisis menggunakan SPSS versi 23 pada tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,131 ^a	,017	-,018	2,756

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System

b. Dependent Variable: Pelaporan Tax Amnesty

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS v23

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) adalah 0,131 sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,017 dengan standar error sebesar 2,756. Hal ini berarti 0,17% variasi dari pelaporan *tax amnesty* bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen *self assessment system*. Sedangkan sisanya (100% - 0,17% = 99,83%) dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.6 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu *self assessment system* (X) terhadap pelaporan *tax amnesty* (Y). Dimana $df = n - k - 1 = 30 - 1 - 1 = 28$, maka t_{tabel} adalah 2,04841.

Tabel 4.7. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,134	2,677		6,028	,000
Self Assessment System	-,135	,193	-,131	-,698	,491

a. Dependent Variable: Pelaporan Tax Amnesty

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS v23

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas dapat diketahui variabel *self assessment system* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,698 dan nilai signifikan 0,491. Dengan demikian berarti bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap pelaporan *tax amnesty* karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,698 < 2,04841$) dan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,491 > 0,05$). Sehingga kesimpulannya bawa hipotesis ditolak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara *self assessment system* pengisian SPT Tahunan orang pribadi terhadap ketaatan pengungkapan harta wajib pajak pada pelaporan *tax amnesty* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,698 < 2,04841$) dan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,491 > 0,05$) sehingga hipotesis ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa jika *self assessment system* akan pengisian SPT tahunan orang pribadi tinggi tidak berpengaruh terhadap ketaatan

pengungkapan harta wajib pajak pada pelaporan *tax amnesty*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan sikap wajib pajak tentang ketaatan pengisian harta SPT Tahunan orang pribadi dalam program pelaporan *tax amnesty* adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel dependen lain yang dapat mempengaruhi ketaatan pengisian harta pada SPT Tahunan orang pribadi serta memperluas sampel penelitian pada kantor pajak yang lain. Untuk wajib pajak diharapkan untuk lebih taat terkait urusan pajak dan agar lebih terbuka kepada kantor pajak terhadap harta yang dilaporkannya. Sedangkan untuk kantor pajak, diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya, lebih lagi untuk wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo, 2007, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm 108.
- Erwin Silitonga dalam Hotsaritua Situmorang, 2006, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Refrendum*, <http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga-pegawai-direktorat>, diakses tanggal 6 oktober 2015.
- Furchan. Arief. 2007. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Katherine Baer dan Eric LeBorgne, 2008, *“Tax Amnesties: Theory, Trend, and Some Alternatives”*, International Monetary Fund, Washington, 121.
- S. Gustiawan, Uwon, 2007, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Santoso, Urip & Justina, Setiawan, 2009. *Tax amnesty dan Pelaksananya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009.
- Sekaran. 2006. *Research Method for Business; Metodologi Penelitian untuk Bisnis Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Yogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- <https://pengampunanpajak.com/>
- <http://www.pajak.go.id/content/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak>
- <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>
- <http://www.samcopajak.com/tax-amnesty-pengertian-dan-ruang-lingkup-pengampunan-pajak.html>
- <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>.
- Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, berjudul Amnesti Pajak Perlu Prasarat.
- Tax Reform, (<http://groups.yahoo.com/group/orumpajak/message/10744>).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Uji validitas dan Uji Reliabilitas. Diakses dari http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/diklat_kursus_spss/d.Bab_II_Uji_Validitas_dan_Uji_Reliabilitas.pdf.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Giawan Nur Fitria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Email: giawan.nur@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect about Intellectual Capital (IC) and Good Corporate Governance (GCG) of corporate financial performance comprehensively in banking sector companies listed in Indonesia Stock Exchange. This study model use IC with VAIC model. IC with VAIC model measures by Human Capital Efficiency (HCE) and Capital Economic Efficiency (CEE). GCG is measured by institutional ownership, independent audit committee and independent commissioner. For corporate financial performance is measured by Return on Asset (ROA). This study use 25 banking companies listed in 2012-2015 with 100 annual reports data. Multiple regression analysis is used in this study. The result showed that HCE, CEE and independent audit committee has impact to corporate financial performance. While others variables like institutional ownership and independent commissioner has no impact to corporate financial performance.

Key Words: IC, GCG, Corporate Financial Performance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh antara Intellectual Capital (IC) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan pada emiten perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia secara komprehensif. Model penelitian ini menggunakan IC yang diukur menggunakan VAIC model. IC diprosikan dengan Human Capital Efficiency (HCE) dan Capital Employed Efficiency (CEE). GCG diukur dengan Kepemilikan institusional, komite audit independen dan dewan komisaris independen. Untuk kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return On Asset (ROA). Penelitian ini menggunakan 26 perusahaan sektor perbankan dari tahun 2012 – 2014 dengan 78 data laporan tahunan perusahaan. Untuk melakukan analisa data digunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa HCE, CEE dan komite audit independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan untuk variabel lainnya seperti kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata Kunci: IC, GCG, Kinerja Keuangan Perusahaan

1. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), situasi transfer sumber daya dari satu negara ke negara yang lainnya terjadi dengan bebas. Para pemilik modal bebas menanamkan uang mereka. Disisi

lainnya, arus modal yang bebas, situasi global dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi yang cepat, perubahan permintaan pelanggan dan persaingan perusahaan dalam memberikan jasa yang baik bagi para pelanggan. Hal tersebut

memicu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Perusahaan membutuhkan inovasi untuk mengembangkan daya saing mereka agar dapat bertahan dalam era globalisasi ekonomi, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan mereka. Situasi ini yang menyebabkan perusahaan harus dapat mengelola *intellectual capital* agar perusahaan berjalan dengan baik. Perusahaan dapat melakukan inovasi dalam aset tidak berwujud (*intangible assets*) sesuai PSAK No. 19 (revisi 2015) yang mengatur tentang aset tidak berwujud. Contoh dari inovasi aset tidak berwujud seperti teknologi, desain dan implementasi sistem, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar modal dan merek dagang. *Intellectual capital* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengontrol laba yang akan datang, tetapi beberapa perusahaan masih mengabaikan pengungkapan *intellectual capital* pada pelaporan keuangan. Perusahaan mengungkapkan *intellectual capital* memiliki tujuan untuk mengembangkan strategi dan inisiatif taktis untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif (Bontis 2002 dikutip oleh Ulum, 2016).

Penelitian terdahulu meneliti mengenai hubungan *intellectual capital* dan kinerja keuangan tidak hanya di Indonesia tapi di negara lainnya. Hashim dkk (2015) meneliti mengenai *intellectual capital* pada kinerja keuangan di Malaysia. Penelitian ini memiliki hasil bahwa *intellectual capital* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian di Rumania. Gogan dkk (2015) telah meneliti mengenai *intellectual capital* pada kinerja perusahaan air minum di Rumania tahun 2010 – 2014. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa *intellectual capital* memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang sama juga yang diperoleh dari Ozkan dkk (2015).

Di Indonesia beberapa penelitian *intellectual capital* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Ulum, 2016). Nova dkk (2012) juga meneliti tentang hubungan komponen *intellectual capital* terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan pada emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah *intellectual capital* memiliki dampak terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Ciptaningsih (2013) yang dalam penelitiannya bahwa *intellectual capital* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Investor selalu menginginkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Investor melihat hal ini melalui interpretasi laba pada laporan keuangan. Permasalahan yang sering terjadi antara manajemen dan investor adalah adanya asimetri informasi. Permasalahan ini dapat dikurangi dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa implementasi GCG di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini terlihat dari gelaran penghargaan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* terhadap 50 emiten se-ASEAN di Manila. Pada penghargaan tersebut, hanya 2 emiten dari Indonesia yang berhasil memenangkannya yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Tbk. Hal itu berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga Indonesia di ASEAN seperti Thailand ada 8 emiten, Filipina ada 11 emiten, Singapura ada 8 emiten, dan Malaysia ada 6 emiten (Idris, 2015).

Menurut IICG (2015), *good corporate governance* merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan. GCG dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholdernya*, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya. *Good corporate governance* dapat menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga muncul terjadinya *agency problem* yang dapat menyebabkan *agency conflict*, yaitu konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan *investor (principal)* (Pratiwi, 2014). Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (KNKG, 2006).

Penelitian sebelumnya mengenai GCG, *The previous research of GCG, the determinant and effect of corporate governance level: evidence from Istanbul Stock Exchange* (Aren, 2014) menyatakan bahwa GCG memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Pengaruh implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan di Malaysia juga diteliti oleh Ramli dkk (2016) dengan judul penelitian *Corporate Governance and Corporate Performance of Malaysia Companies Exchange from Islamic perspective*.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu aspek yang dinilai terkait tingkat kesehatan sektor perbankan. Selain itu, sektor perbankan memiliki modal intelektual yang paling intensif dan dari sisi sumber daya manusia, karyawan perbankan lebih homogen (Kubo dan Saka, 2002). Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Botosan (1997) dan Mangena *et al.*

(2010) tentang *corporate governance* yang efektif dan pengungkapan *intellectual capital*, terhadap kinerja keuangan perusahaan dan masih kurangnya tingkat kesadaran penerapan GCG di Indonesia di mana CGC yang diterapkan hanya sebatas regulasi dan menghindari sanksi (KNKG, 2006). Tujuan penelitian ini untuk menguji apakah ada pengaruh tentang *intellectual capital* dan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Literature Review

a. Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak disebut agen dan pihak lain disebut prinsipal. Dalam teori agensi dikenal adanya kontrak kerja yang mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaatnya secara menyeluruh.

b. Knowledge Based View Theory

Dalam konteks untuk menjelaskan tentang konsep *intellectual capital*, teori *stakeholder* harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etika (moral) maupun bidang manjerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder* (Deegan, 2004 dikutip oleh Ulum 2016: 36). Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek teori ini. Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh perusahaan, baik karyawan (*human*

capital), asset fisik (*physical capital*), maupun *structural capital*. Pengelolaan yang baik atas potensi ini akan menciptakan *value added* bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan *stakeholder*.

c. *Knowledge Based View Theory*

Knowledge Based View merupakan turunan dari *Resource Based View* (RBV) dan mendemonstrasikan bahwa pengetahuan dalam beberapa bentuk yang penting dari sumber daya (Grant, 1996; Machlup, 1984 dikutip oleh Wahdikorin 2010). *Knowledge Based View* beranggapan bahwa pengetahuan merupakan sumber daya strategis yang sangat signifikan bagi perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

d. *Intellectual Capital*

Intellectual capital (IC) merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan (modal perusahaan) yang digunakan untuk memenangkan persaingan (Bontis, 1996). Seangkan Mouritsen (2004) dikutip oleh Ulum (2016) mendefinisikan bahwa *intellectual capital* merupakan “sesuatu” seperti karyawan, konsumen, teknologi, pekerjaan manajemen dan pengetahuan. *Intellectual capital* tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan fungsi aset yang dapat mendukung proses produktivitas sebuah perusahaan.

Intellectual capital dapat didefinisikan dengan model *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). Model ini dikembangkan oleh Pulic (1998), yang kemudian dikembangkan oleh Kamath (2007) yang dikutip oleh Ulum (2016). Pengembangan model ini merupakan cara perhitungan *value added intellectual coefficient* melalui mekanisme *human capital efficiency* (HCE) dan *capital employed efficiency* (CEE). Pengembangan

model ini sering digunakan sebagai indikator kinerja atau yang sering disebut dengan *Intellectual Capital Performance* (ICP) atau *business performance indicators* (BPI).

e. *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2003), GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut teori keagenan, GCG merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidaksiharasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) didalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia mengembangkan beberapa asas-asas GCG, yaitu (KNKG, 2006):

1) *Transparansi (transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

- 3) *Responsibilitas (responsibility)*
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- 4) *Independensi (independency)*
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- 5) *Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)*
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Denis dan McConnel (2003), ada dua mekanisme dalam *corporate governance*, yaitu:

a. *Internal Governance Mechanism*

1) *Boards of Directors*

Perusahaan-perusahaan pada negara yang menganut *two tier system*, seperti Indonesia mempunyai dua badan yang terpisah, yaitu Dewan Komisaris (dewan pengawas) dan Dewan Direksi (dewan manajemen). Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan direksi sedangkan dewan direksi bertugas

untuk mengelola perusahaan. Mekanisme internal yang sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan *boards of directors* adalah *size of board*, *composition of independence board*, *board/ executive compensation*, kualitas auditor, atau keberadaan komite audit.

2) *Ownership Structure*

Struktur kepemilikan disini berarti siapa sajakah yang memiliki saham atau ekuitas perusahaan dan berapakah persentase kepemilikannya. Mekanisme internal yang sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan *ownership structure* adalah *managerial ownership*, *institutional ownership*, *insider ownership*, *blockholder ownership* ataupun *government ownership*.

b. *External Governance Mechanism*

1) *The Takeover Market*

Ketika mekanisme pengendalian internal gagal untuk mengendalikan dan mengontrol perusahaan atau ketika nilai perusahaan aktual berbeda dengan nilai perusahaan yang dilaporkan maka pihak luar atau publik terdorong untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan. Mekanisme pengendalian ini dapat dilakukan oleh para pelaku pasar, peneliti-peneliti keuangan dan pasar modal, atau analisis keuangan.

2) *The Legal/ Regulatory System*

La Porta *et.al* (1998) menyatakan bahwa secara fundamental, sistem hukum atau peraturan adalah mekanisme *corporate governance* yang penting. Dalam penelitiannya, mereka berpendapat sejauh mana hukum sebuah negara melindungi hak-hak investor dan sejauh mana hukum tersebut

dijalankan. Hal tersebut merupakan cara untuk melihat perkembangan *corporate governance* pada suatu negara.

f. **Kinerja Keuangan Perusahaan**

Rasio-rasio profitabilitas sering kali digunakan sebagai salah satu ukuran dari kinerja perusahaan (Ulum, 2016: 202). Sejauh ini, definisi tentang kinerja perusahaan masih variatif. Firer and Williams (2003: 348):

"Financial performance is a precise definition of corporate performance proves highly elusive despite frequent use by various special interest stakeholder groups, scholars and policy makers alike. The lack of consensus may arise because this concept is associated with a variety of facets of a firm's overall wellbeing, ranging from financial profitability to output levels to market return".

Kinerja keuangan perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi investor untuk mengetahui keadaan perusahaan.

2.2. Hipotesis

2.2.1. Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham. Cornett *et al.* (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Putri (2013) telah meneliti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jika kepemilikan institusional lebih tinggi, maka kinerja keuangan juga akan lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.2.2. Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Hadi dan Sabeni (2002) menyatakan bahwa komite audit sebagai mekanisme pengawasan yang secara sukarela dibentuk dalam situasi *agency cost* yang tinggi untuk memperbaiki kualitas informasi antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, manajer yang bertindak sebagai agen akan mengungkapkan informasi perusahaan lebih terbuka sebagai bentuk keefektifan kinerja komite audit, terlebih lagi dengan keanggotaan komite audit yang memiliki pendidikan akuntansi.

Komite audit dapat membantu manajemen untuk mempersiapkan laporan keuangan lebih relevan, tepat waktu dan wajar sesuai dengan standard akuntansi keuangan. Maka investor dapat menggunakan informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Putri (2013) telah meneliti tentang pengaruh jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelian tersebut menyatakan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.2.3. Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen, 1993). Dalam perusahaan, dewan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

komisaris independen dianggap mampu dalam melakukan monitoring sebagai perwakilan dari mekanisme pengendalian internal utama dan *controlling* terhadap perilaku manajer perusahaan yang oportunis sehingga dapat menjadi salah satu yang melatarbelakangi adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke tiga yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H3 : Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.2.4. Human Capital Efficiency (HCE) dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningsih (2013) dengan judul uji komponen modal intelektual terhadap kinerja keuangan BUMN menyatakan bahwa *human capital efficiency* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan *knowledge based view theory*, perspektif *intellectual capital* dilihat dari sisi *human capital* merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi perusahaan (Barney, 1991 dikutip oleh Ulum, 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ke empat yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Human Capital Efficiency* (HCE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.2.5. Capital Employed Efficiency (CEE) dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nova dkk (2012) dengan judul pengaruh *intellectual capital* terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan menjelaskan bahwa *capital economic efficiency* (CEE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan.

Jika dilihat dari perspektif *stakeholder theory* menjelaskan bahwa manajer korporasi akan berusaha menaikkan nilai perusahaan untuk kepentingan semua pemegang saham. Oleh karena itu, pemangku kepentingan atau pemegang saham akan bertindak mengontrol penggunaan modal oleh manajemen agar kinerja perusahaan lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke lima yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5 : *Capital Employed Efficiency* (CEE) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah emiten perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2015 (www.idx.co.id, diakses tanggal 20 Oktober 2016). Dari 81 emiten perbankan yang masih listing maka ditentukan 25 emiten perbankan yang menurut peneliti merupakan sampel yang *representative*. Metode pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria (Ghozali, 2014) antara lain:

- Antara rentang waktu tahun 2012-2015, emiten tidak mengalami *delisting*.
- Emiten melaporkan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah.
- Selama rentang waktu tahun 2012-2015, emiten tidak mengalami kerugian.
- Ketersediaan adanya data laporan tahunan emiten selama tahun penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan tahun 2012 sampai 2015. Sumber data diperoleh dari idx.co.id, finance.yahoo.com, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Untuk

memperoleh data-data perusahaan seperti kepemilikan institusional, proporsi komite audit independen, proporsi dewan komisaris independen, *human capital efficiency*, *capital employed efficiency* dan kinerja keuangan perusahaan berasal dari laporan keuangan tahunan emiten perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015.

3.2. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengangkat tentang *good corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk komponen *good corporate governance* yang menjadi variabel bebas, seperti kepemilikan institusional (X1), komite audit (X2) dan komisaris independen (X3). Sedangkan untuk *intellectual capital*, komponen yang digunakan untuk variabel bebas adalah *human capital efficiency* (X4) dan *capital employed efficiency* (X5). Sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan (Y).

Agar tidak terjadi bias penafsiran dalam pengukuran variabel, maka berikut ini merupakan definisi operasional variabel yang digunakan:

- a. Kepemilikan Institusional (X1)
Kepemilikan institusional di ukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar (Ale, 2014). Proksi kepemilikan institusional yaitu jumlah kepemilikan saham institusional dibagi jumlah saham beredar.
- b. Komite Audit (X2)
Proporsi komite audit di ukur dengan cara menghitung jumlah komite audit independen dibagi dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan (Shah dan Butt, 2009).
- c. Komisaris Independen (X3)
Variabel ini diukur dengan jumlah total komisaris independen dibagi

dengan jumlah komisaris pada perusahaan. (Agnes, 2013).

- d. *Human Capital Efficiency* (X4)
Human Capital Efficiency (HCE) adalah hasil dari *value added* dibagi dengan *human capital* (Ulum 2016). *Value Added* (VA) diperoleh dari total pendapatan (VA) dikurang total semua beban dan biaya selain beban dan biaya yang terkait dengan pengeluaran untuk karyawan seperti biaya gaji dan upah, biaya training dan lainnya. Sedangkan *Human Capital* (HC) diperoleh dari semua beban dan kompensasi serta pengembangan karyawan.
- e. *Capital Employed Efficiency* (X5)
Capital Employed Efficiency (CEE) merupakan hasil dari *Value Added* (VA) dibagi dengan *Capital Employed* (CE). Sedangkan *Capital Employed* (CE) itu sendiri diperoleh dari total modal ditambah laba bersih (Mavridis, 2004 dikutip oleh Ulum, 2016).
- f. Kinerja Keuangan Perusahaan (Y)
Variabel kinerja keuangan perusahaan didefinisikan menjadi *Return on Asset*. (Ciptaningsih, 2013). *Return on asset* diperoleh dari total laba bersih dibagi dengan total aset.

3.3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan emiten dari tahun fiskal 2012 ampai tahun 2015. Sebagai alat uji dalam penelitian ini digunakan SPSS V.23. Pemilihan alat uji ini cocok digunakan dalam penelitian ini dikarenakan variabel yang digunakan merupakan variabel *observe* (variabel yang dapat diobservasi) karena menggunakan data kuantitatif dalam perhitungannya. Model statistik yang digunakan adalah regresi linear untuk melihat hubungan antara *good corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Model penelitian yang diajukan adalah:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Model penelitian yang diajukan adalah:

$$CFP = \beta_0 + \beta_1 (INST) + \beta_2 (AUD) + \beta_3 (COMIN) + \beta_4 (HCE) + \beta_5 (CEE) + \varepsilon$$

Keterangan:

CFP = Kinerja keuangan perusahaan

INST = Kepemilikan institusional

AUD = Jumlah komite audit

HCE = *Human Capital Efficiency*

CEE = *Capital Employed Efficiency*

ε = error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INST	100	25,66	9794,00	61,1697	978,22060
AUD	100	2,00	8,00	4,0909	1,27047
COMIN	100	50,00	80,00	58,1313	8,48486
HCE	100	1,06	11,58	2,2801	1,49242
CEE	100	,04	1,09	,2544	,15967
CFP	100	,30	4,30	1,5362	,83789
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 23. 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional pada emiten perbankan dalam penelitian rata-rata sebesar 61,16%. Porsi jumlah komite audit rata-rata berjumlah 4 anggota. Komisaris independen pada emiten yang dijadikan sampel rata-rata berjumlah 4 orang. Porsi komisaris independen sebesar 58,13%. Sedangkan untuk human capital efficiency pada emiten sampel rata – rata sebesar 2,2 dan untuk capital employed efficiency rata – rata sebesar 0,25.

Kinerja keuangan emiten sampel dilihat dari perspektif return in asset dalam penelitian ini menunjukkan rata – rata sebesar 1,5.

4.2. Uji Statistik dan Hipotesis

4.2.1. Normality Test

Uji normalitas berujuan untuk menguji apaka model regresi atau residual variabel memiliki distribusi normal. Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dapat dilihat dari grafik yang membandingkan antara observasi distribusi data dekat dengan distribusi normal (Ghozali, 2016).

Uji kolmogorof -Smirnov (KS) digunakan untuk menguji statistic apakah data berdistribusi normal sesuai asumsi kolmogorof Smirnov. Uji Kolmogorof Smirnov jika sigifikansi ≥ 0.05 , maka

data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.2 dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

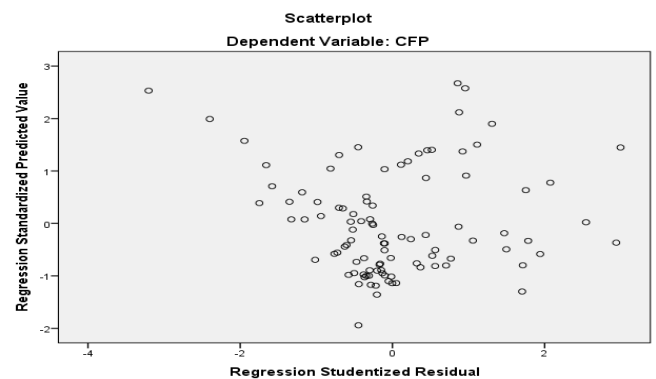
Tabel 4.2. Kolmogorov Smirnov- Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,68590819
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,080
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061 ^c

Sumber: SPSS 23. 2016

4.2.2. Heterokedasticity Test

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak mengandung heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016). Berdasarkan pengamatan peneliti melalui gambar dibawah ini maka peneliti menyimpulkan gambar dibawah ini memenuhi asumsi uji heterokedastisitas, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas data.



Gambar 1 Scatterplot

4.2.3. Multicollinearity Test

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakan model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF (*variance inflation factor*) ≥ 10 . (Ghozali, 2016). Berdasarkan tabel 3 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model penelitian ini karena nilai hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

variable independen yang memiliki nilai kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variable independen. Hasil perhitungan VIF juga lebih dari 10. Jadi disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variable pada model regresi ini.

Tabel 4.3
Collinearity Statistics

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
INST	,960	1,041
AUD	,921	1,085
COMIN	,934	1,071
HCE	,973	1,028
CEE	,969	1,032

Sumber: Output SPSS 23. 2016

4.2.4. Autocolleration Test

Uji autokolerasi untuk menguji apakah dalam model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t terhadap periode t1 (sebelumnya). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi maka dapat digunakan dengan uji durbin Watson (DW Test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lag diantara variable independen. (Ghozali, 2016). H0 : tidak ada autokolerasi dan HA: ada auto kolerasi, dengan syarat $dl \leq d \leq du$.

Tabel 4.4
Durbin –Watson Test

Model	Durbin-Watson
1	2,450

Sumber: Output SPSS 23. 2016

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, kita dapat melihat hasil tes durbin Watson sebesar 2,450 yang mana dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dan total sampel 100 (n) an total variabel bebas adalah 5 (k=5) sehingga hasil durbin Watson tabel adalah 1,647. Karena hasil DW-Test 2,450 lebih besar dari 1,647 dan kurang dari 5 – 1,647 (5-du), jadi dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima atau disimpulkan tidak terdapat autokolerasi pada model regresi ini.

4.2.5 Coefficient Determinant - Test

Pada intinya koefisien determinant mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R square* untuk mengevaluasi model, hal ini karena nilai *adjusted R Square* dapat naik dan turun jika satu variable independen ditambahkan kedalam model (Ghozali , 2016).

Berdasarkan tabel 5 dibawah ini bahwa adjusted R square adalah 0,294 atau 29,40%. Hal ini berarti kepemilikan institusional, komite audit, komisioner independen, human capital efficiency dan capital employed efficiency dapan menjelaskan kinerja keuangan perusahaan sebesar 29, 40% dan 70,60% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi pada penelitian ini.

Table 4.5
Coeffision Determinant

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,574 ^a	,330	,294

Sumber : Output SPSS 23. 2016

4.2.6. F- Test (Simultaneous test)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama – sama atau simultan terhadap variable dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah jika signifikansi $\leq 0,05$ maka disimpulkan semua variable

independen secara simultan mempengaruhi variable dependen. (Ghozali, 2016)

Tabel 4.6
Anova F-Test

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,696	5	4,539	9,156	,000 ^b
	Residual	46,106	93	,496		
	Total	68,802	98			

Sumber: Output SPSS 23. 2016

Berdasarkan hasil uji anova atau F test diatas, maka nilai F hitung sebesar 9,156 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan atau dapat dikatakan bahwa INST, AUD, COMIN, HCE dan CEE secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4.2.7. T-Test (Parametric Individual Test)

Uji signifikansi *parametric individual* (uji statistic t), untuk menginterpretasikan koefisien variable bebas (independen) dapat menggunakan *unstandardized coefficients*. (Ghozali, 2016). Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$CFP = 0,641 - 7,612INST + 0,274 AUD + 0,005 COMIN + 0,190 HCE + 1,400 CEE + e$$

Tabel 4.7
Coeffisient T-test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,641	,634		-1,012	,314		
INST	-7,612	,000	-,089	-1,026	,308	,960	1,041
AUD	,274	,058	,416	4,702	,000	,921	1,085
COMIN	,005	,009	,049	,553	,581	,934	1,071
HCE	,190	,048	,338	3,931	,000	,973	1,028
CEE	1,400	,453	,267	3,093	,003	,969	1,032

Sumber: Output SPSS 23. 2016

4.2.8. Hipotesis

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, pada model regresi ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (H1) dan independen komisioner (H3) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

keuangan perusahaan. Sedangkan untuk variabel komite audit (H2), *human capital efficiency* (H4) dan *capital employed efficiency* (H5) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Good corporate governance pada penelitian ini di proksikan kedalam 3 variabel yaitu kepemilikan institusional, jumlah komite audit dan komisaris independen. Peneliti menggunakan variabel ini karena ketiga variabel ini dapat difungsikan dalam *good corporate governance* untuk meminimalisir informasi asimetri dan dapat mengurangi konflik agensi.

Hipotesis pertama menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil hipotesis ini sama dengan hasil penelitian Putri (2013) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil hipotesis pertama pada penelitian ini memiliki arti bahwa seberapa banyak porsi kepemilikan saham institusional pada emiten perbankan tidak mempengaruhi hasil dari kinerja perusahaan. Porsi jumlah kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan karena porsi kepemilikan institusional tidak dapat merefleksikan manajemen untuk bekerja lebih maksimal dalam menghasilkan laba lebih besar untuk kepentingan *stakeholdernya* meskipun porsi *stakeholder* saham lebih besar dimiliki oleh institusi dari pada masyarakat.

Hipotesis kedua menguji jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Hasil dari pengujian dalam penelitian ini menerima hipotesis ini. Jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Keberadaan komite audit pada perusahaan emiten menjadikan manajemen perusahaan emiten bekerja lebih hati – hati dan sesuai dengan standard akuntansi keuangan. Hal ini direfleksikan karena manajemen akan merasa ada komite audit yang melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen seperti pengendalian kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Hal ini menyebabkan manajemen akan bekerja lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan demi kepentingan para stakeholder perusahaan emiten.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah komisioner independen memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari uji hipotesis ini adalah bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Putri (2013) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Porsi banyaknya komisaris independen tidak dapat meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Hal ini diartikan bahwa keberadaan jumlah komisaris independen dalam suatu emiten tidak dapat sepenuhnya menjadi penyeimbang dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam pengimplementasian seluruh strategi dan kebijakan perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan perusahaan yang terbaik.

4.3.2. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Intellectual capital merupakan indikator penting bagi kinerja perusahaan. Hipotesis ke empat dan ke lima untuk menguji pengaruh *human capital efficiency* dan *capital employed efficiency* terhadap kinerja keuangan perusahaan memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hashim dkk (2015) bahwa *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pada komponen *intellectual capital* terdiri dari kemampuan pelaksana seperti sumber daya manusia dan porsi sumber daya lainnya berupa modal perusahaan seperti asset perusahaan. Kedua komponen ini jelas dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Banyaknya asset yang disiapkan untuk menjalankan operasional perusahaan akan lebih optimal penggunaannya jika didukung oleh pelaksana atau dalam hal ini sumber daya manusi pada emiten tersebut. Jika kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan tercipta kinerja keuangan yang baik.

5. Kesimpulan

5.1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini dilator belakangi oleh teori agensi, teori *stakeholder* dan teori *knowledge based view*. Ketiga teori ini dipilih karena dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu untuk mencari apakah ada perngaruh antara *good corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang telah didapat bahwa tidak semua variabel yang ada pada *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan untuk *intellectual capital*, semua komponen didalamnya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Good corporate governance diharapkan dapat menjadi faktor peyeimbang antara adanya *conflict of interest* pada emiten antara pemilik saham dan manajemen. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengimplementasian *good corporate governance* ini harus dijalankan dengan baik tidak hanya untuk mematuhi peraturan Pemerintah yang mengharuskan para emiten yang *go public* menerapkab GCG, sehingga GCG dapat dioptimalkan sebagai salah satu solusi adanya *conflict of interest* yang sering terjadi pada perusahaan.

Perusahaan yang memiliki *intellectual capital* yang baik, akan cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Jika dilihat dari *knowledge based view*, *intellectual capital* unggul yang dimiliki perusahaan merupakan sumber daya perusahaan sebagai modal pengelola perusahaan lebih baik. Semakin baik pengelolaan *intellectual capital*, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan yang diraih.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terlihat dari hasil uji koefiesien determinan R square yang menunjukkan bahwa variabel bebas pada model ini hanya mampu menjelaskan 29,40% pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga penelitian ini seharusnya menambah variabel bebas lainnya yang diduga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti pesaing, lingkungan bisnis emiten, kompensasi dan benefit untuk karyawan dan lainnya.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes. (2013). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. ejournal.unp.ac.id
- Ale, L. (2014). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Ejournal Universitas Atmajaya
- Asian Development Bank. (2013). *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Report and Assesment 2012-2013*. Mandaluyong City, Philipines
- Ciptaningsih (2013). *Uji Pengaruh Modal Intellectual Pada Perusahaan BUMN.10* Desember 2013. Print ISSN: 1412-1700; Online ISSN: 2089-7928. DOI: <http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2013.12.3.7> Copyright@2013. Published by Unit Research and Knowledge, School of Business and Management – Institute
- Ghozali Imam (2016). *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hashim, Osman, Alhabsi.(2015). *Effect of Intellectual Capital on Organization Performance*. *Procedia Social Behavioral Science*. www.scinedirect.com
- Indonesia Stock Exchange.(2016). *Emiten sector perbankan*. www.idx.co.id
- Idris, M. (2015) *Hanya 2 Emiten RI Masuk 50 Terbaik GCG di ASEAN*. Diakses pada 28 April 2016 melalui <http://finance.detik.com>
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior. Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360
- Juniarti., Agnes, A.S., (2010). *Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt)*. *Jurnal akuntansi.petra.ac.id*
- Kamath, G.B. 2007. *The Intellectual Capital Performance of Indian Banking Sector*. *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 8 No. 1 Page. 96-123
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance*. Jakarta
- KNKG. (2013). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance*. Jakarta
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2013, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta
- Kubo, I., Saka. A. (2002). *An Inquiry Into The Motivations of Knowledge Workers In The Japanese Financial Industry*. *Journal of Knowledge Management*, 6(3). 262-271
- Nova, Didik.(2012). *Pengaruh Elemen Pembentuk Intellectual Capital Terhadap Nilai Pasar dan Kinerja*

- Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Page 1-11
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pratiwi, R. (2014). *Implementasi GCG Harus Libatkan Semua Stakeholders*. Diakses pada 30 Mei 2015 dari World Wide Web: <http://swa.co.id/>
- Puteri (2013). *Karakteristik Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan Manufaktur*. Universitas Udayana. www.portalgaruda.co.id
- Shah, S.Z.A., Butt, S.A. (2009). *The Impact of Corporate Governance on the Cost of Equity: Empirical Evidence from Pakistani Listed Companies*. The Lahore Journal of Economics, 14(1), 139-171
- Ozan, Cakan, Kayacan. (2016). *Intellectual Capital and Financial Performance: A Study of Turkish Banking Sector*. www.elsevier.com/journals/borsa-istanbul-review/22/14-8450
- Ulum (2016), *Intellectual Capital*. UMM Press
- Wahdikorin, Ayu. 2010. *Pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009*. Semarang : Universitas Diponegoro.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN PROFESIONAL SKEPTISISME AUDITOR TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT DENGAN INDEPENDENSI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

Imam Tri Saputra*), Holiawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*Email: itputra27@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of Work Experience and Professional Skepticism against Accuracy Provision Auditor Audit Opinion with Independence as Moderating Variable in South Jakarta and Tangerang This study uses quantitative data analysis performed on public accounting firm in South Jakarta and Tangerang. This research was conducted during the months of July to August 2016 using convenience sampling method, the method of data collection by conducted questionnaires to 48 respondents, were processed using SPSS statistical software tools 22, that uses a Likert scale. Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis. Research results show that the partial work experience a significant effect on the accuracy of the audit opinion administration, professional skepticism significant effect on the accuracy of the audit opinion and the provision of simultaneous work experience and professional skepticism, the auditor's independence as moderating variable does not affect the accuracy of the administration of the audit opinion.

Key Words: Work Experience, Proesional Skepticism, Accuracy Provision of Audit Opinion, Independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Pengalaman Kerja dan Profesional Skeptisisme Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit dengan Independensi sebagai Variabel Moderating di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2016 dengan menggunakan metode convenience sampling, metode pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner ke 48 responden, yang diolah dengan menggunakan software statistik SPSS 22, dengan skala likert. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, profesional skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit dan secara simultan pengalaman kerja dan profesional skeptisisme auditor dengan independensi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Kata Kunci: Pengalaman Kerja, Proesional Skeptisisme, Ketepatan Pemberian Opini Audit, Independensi.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Profesi akuntan publik tumbuh dan berkembang di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan di negara-negara tersebut. Profesi akuntan publik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk menyatakan apakah ikhtisar keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tugas akuntan publik adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Profesi Akuntan Publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi risiko yang sangat tinggi. Hampir seluruh akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mentaati kode etik akuntan publik dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak, akuntan publik bisa salah dalam memberikan opini, karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian padahal laporan keuangan mengandung salah saji material, itu dapat disebut *failure audit*. Pada tahun 2008, saat BPK RI mengaudit tentang penyalahgunaan dana APBD, ditemukan kasus bahwa auditor bekerja tidak menggunakan profesionalismenya namun menggunakan asumsi-asumsi. Hal ini disebabkan kurangnya bukti-bukti audit atau berkas yang diperlukan oleh auditor tidak terpenuhi untuk melakukan proses audit terhadap penggunaan APBD tersebut. Ini menunjukkan bahwa auditor tidak memiliki sikap skeptis dalam bekerja. Dari kejadian tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menurun drastis.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, di Amerika Serikat dikeluarkan *Sarbanes Oxley Act*. Indonesia pun tidak mau ketinggalan, saat ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 3 Mei 2011 yang salah satu pasalnya menyebutkan akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana (Sukrisno, 2014).

Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme seorang auditor. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Semakin banyak seorang auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisisme yang dimiliki. Untuk itu, seorang auditor harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan audit senior yang lebih berpengalaman.

Menurut Arens (2008) Auditor harus menjalani pendidikan formal di bidang akuntansi, pengalaman praktis yang cukup banyak dalam bidang kerja yang dilakukannya, serta pendidikan profesi yang berkelanjutan.

Sedangkan, menurut Asih (2006: 12) memberikan kesimpulan bahwa seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan inilah yang sangat bermanfaat bagi pengembangan keahlian.

Masyarakat atau pemangku kepentingan memerlukan kepercayaan dari profesi akuntan yang menyediakan jasanya. Dalam memberikan opini kewajaran sebuah laporan keuangan auditor harus memiliki sikap skeptisisme.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu (KUBI, 1976 dalam Gusti dan Ali 2008). Menurut Arens (2008: 47), auditor harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh hati-hati. Sebagai ilustrasi, sikap skeptis ini harus ditunjukkan auditor dalam perhatian mendalam termasuk pertimbangan akan kelengkapan kertas kerja, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit.

Sedangkan, Menurut Noviyanti (2008: 107) dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya auditor tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap profesional skeptisismenya. Profesional skeptisisme perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti audit, sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Munculnya pandangan skeptis terhadap profesi akuntan publik memang beralasan, di karenakan cukup banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan setelah mendapat opini wajar tanpa pengecualian tapi tidak diiringi dengan ketepatan pemberian opini yang baik. Misalnya kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen yang berakibat menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas penyajian laporan keuangan.

Penelitian Beasley (2001) dalam Herustya (2007) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Realeases*), selama 11 periode (Januari 1987 - Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan adalah rendahnya tingkat profesional skeptisisme audit dan kurangnya pengalaman yang dimiliki. Theodorus M. Tuanakotta (2011), menyatakan bahwa profesional

skeptisisme yang rendah akan menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting Error*) dan kecurangan (*fraud*).

Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan ditetapkan dalam pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisme seorang auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Independensi, dalam *The CPA Handbook* menurut E.B. Wilcox adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan Sharaf, 1993: 246). Kode Etik Akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dimiliki oleh seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan yakni ketika

akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin terlihat supaya kinerjanya terlihat baik dimana pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang dibiayainya. Dari uraian tersebut terlihat ada dua kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Jelas, ini menjadi tanggung jawab auditor untuk dapat memberikan opini audit yang sebaik-baiknya dengan sikap independensi yang dimilikinya.

Opini audit merupakan final report atas audit yang dilakukan pada suatu entitas atau perusahaan yang di audit dan merupakan kemampuan profesional serta keberanian diri auditor untuk menyatakan pendapatnya secara benar. Pemberiaan opini secara benar oleh auditor sesuai dengan kode etik yang berlaku, tentu akan membawa citra positif bagi masyarakat dan dunia usaha. Perusahaan yang mendapat opini unqualified secara konsisten atas laporan keuangan perusahaannya akan memberi keyakinan kepada masyarakat untuk mempercayai pengelola dananya secara pasti. Para pengguna jasa Kantor Akuntansi Publik (KAP) sangat mengharapkan agar para auditor dapat memberikan opini yang tepat, namun dalam praktiknya masih kerap kali terjadi pemberian opini akuntan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Sehingga patut diduga ketidaksesuaian ini antara lain belum optimalnya tingkat profesional auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang pada gilirannya berdampak pada ketidaktepatan pemberian opini.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Audit

Menurut (Arens. 2008) "Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan".

Menurut Yusar dan Fitri (2013: 16) "Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen".

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) "Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Sedangkan menurut Mulyadi (2009: 9) "Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian Ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk menentukan tentang kewajaran atas suatu laporan keuangan berdasarkan tingkat kesesuaian bukti dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1. Auditing Ditinjau Dari Sudut Profesi Akuntan Publik dan Pengguna Laporan Keuangan

Ditinjau dari sudut akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2012: 10) bahwa “audit atas laporan keuangan diperlukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya adalah para pemegang saham”. Dalam hal ini, biasanya para pemegang saham setahun sekali akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana dalam rapat tersebut para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen tersebut perlu di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan pihak ketiga yang independen. Hal ini karena:

- a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja, karena itu laporan yang tidak di audit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
- b. Jika laporan keuangan telah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

- c. Mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya Rp.25.000.000.000 ke atas, maka harus memasukan *audited financial statements* nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukan *audited financial statements*nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
- e. SPT yang didukung oleh *audited financial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum di audit.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar audit dibutuhkan karena untuk membuat para pemegang saham atau orang yang berkepentingan dengan laporan keuangan yakin atas kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia (SAK/ ETAP/ IFRS).

2.1.2. Jenis Audit

Audit dapat dilakukan dalam berbagai jenis, hal ini dimaksudkan agar tercapainya suatu saasaran dari audit:

- a. Audit Operasional
Yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Di dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

b. **Audit Ketaatan**

Audit jenis ini dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang di audit mengikuti prosedur, turan atas ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan perturan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, sebagian pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

c. **Audit Laporan Keuangan**

Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk perusahaan atau organisasi itu.

2.2. Pengalaman Kerja

Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya (Anoraga, 2000: 47) dalam Widiyanto dan Yuhertian, 2005: 24). Auditor selalu melakukan pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugas audit dapat menjadikan pertimbangan auditor berkualitas (Libby dan Trotman, 1993 dalam Nurchasanah dan Rahmanti, 2004: 4).

Jadi, pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan baik dari

segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Pengalaman terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengalaman berdasarkan lamanya bekerja dan pengalaman bekerja dalam jumlah penugasan.

Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang dihitung berdasarkan satuan waktu/tahun. Sehingga auditor yang telah lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan sebagai auditor berpengalaman. Karena semakin lamanya bekerja menjadi auditor, maka akan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan auditor di bidang akuntansi dan auditing (Arens, 2008).

Sedangkan, banyaknya pengalaman bekerja dari jumlah penugasan yang telah dilakukan oleh auditor dapat meningkatkan pengetahuan karena adanya kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang di audit. Pengalaman berdasarkan lamanya bekerja dan banyaknya jumlah penugasan saling berkaitan erat, karena semakin lamanya seseorang menjadi auditor, tentunya jumlah penugasan yang pernah dilakukan pun akan semakin banyak.

Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar (Libby, 1985 dalam Mayangsari, 2003: 4).

Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan diantaranya dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan (Tubbs, 1992 dalam Nurchasanah dan Rahmanti, 2004: 30).

2.3. Profesional Skeptisisme Auditor

Auditor harus bertanggungjawab secara profesional dalam pelaksanaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh hati-hati. Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari terjadinya kecerobohan serta sikap asal percaya, tetapi auditor tidak diharapkan untuk membuat suatu pertimbangan yang sempurna dalam suatu kesempatan (Arens 2008: 47).

Di dalam SPAP, (Standar Profesi Akuntan Publik 2011) menyatakan profesional skeptisisme auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap profesional skeptisisme.

Skeptisisme bukanlah sikap sinis, melainkan merupakan sikap yang mengharapkan untuk mempertanyakan, meragukan atau tidak setuju dengan penyajian klien. Tetapi hal ini bukan berarti auditor harus menanamkan asumsi bahwa manajemen tidak jujur dan juga menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, auditor tidak harus puas dengan bukti yang disediakan manajemen. Sebab, profesional skeptisisme adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan evaluasi secara kritis terhadap keabsahan suatu bukti audit.

Profesional skeptisisme auditor dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak tipe serta bukti audit seperti apa yang harus dikumpulkan (Arens, 2008: 48). Sementara frase-frase dalam proses, yaitu:

- a. Terdapat informasi dan kriteria yang ditetapkan.
- b. Pengumpulan serta pengevaluasian bukti.
- c. Ditangani oleh auditor yang kompeten dan independen.
- d. Mempersiapkan laporan audit

Dari penelitian di atas, dapat dilihat bahwa auditor yang memiliki sikap skeptis akan terus mencari dan menggali bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi auditor tersebut untuk melaksanakan pekerjaannya mengaudit. Dengan tidak mudah percaya, cermat dan seksama terhadap apa yang telah dilihat dan disajikan, sehingga dapat menemukan kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang bersifat material, dan pada akhirnya dapat memberikan hasil opini audit yang tepat dan sesuai dengan gambaran keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya.

2.4. Opini Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001: SA Seksi 110, Paragraf 01) Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001: SA Seksi 508, Paragraf 03) yaitu opini audit harus didasarkan atas standar auditing dan teman-temannya. Opini audit disampaikan dalam paragraf pendapat yang termasuk dalam bagian laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan kepada pengguna informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya.

Terdapat tujuh unsur bentuk baku yang membangun suatu laporan audit, yaitu: (1) judul laporan, (2) alamat laporan audit, (3) paragraf pendahuluan, (4) paragraf *scope*, (5) paragraf pendapat, (6) nama KAP, (7) tanggal laporan audit. Opini audit ada pada unsur ke lima yaitu paragraf pendapat, paragraf pendapat merupakan bagian terpenting dalam laporan audit sehingga sering kali seluruh

laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat atau opini auditor.

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan yang telah di audit. Pada akhir pemeriksaannya, suatu pemeriksaan umum (general audit), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas:

- a. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan dan merupakan tanggung jawab manajemen.
- b. Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan (neraca).
 - 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif (Laporan Laba Rugi).
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 4) Laporan Arus Kas.
 - 5) Catatan atas laporan keuangan, yang antara lain berisi: bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelesan atas pos-pos laporan posisi keuangan (neraca) dan laba rugi komprehensif (laba rugi).
 - 6) Informasi tambahan berupa lampiran mengenai rincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, *liabilities*, beban umum dan administrasi serta penjualan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis opini audit, yaitu:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang

cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ ETAP/ IFRS maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ ETAP/ IFRS.

- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*). Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjas (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

Keadaan tersebut meliputi:

- 1) Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- 2) Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal tersebut itu telah memadai.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- 4) Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
 - 5) Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
 - 6) Data keuangan kwartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) namun tidak disajikan atau di review.
 - 7) Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah dihilangkan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut.
 - 8) Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ ETAP/ IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan jika:
- 1) Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
 - 2) Auditor yakin atas dasar buktinya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ ETAP/ IFRS, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
 - 3) Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk. Frasa yang dimaksud di atas memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.
- d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai SAK/ ETAP/ IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ ETAP/ IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung

tidak wajar (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa adutiro tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat menyatakan suatu pendapat jika ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ ETAP/ IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan audit harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan jika auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan yang material dari SAK/ ETAP/ IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (yaitu

paragraf lingkup audit dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK/ ETAP/ IFRS.

2.5. Independensi

Pemahaman *good governance* bagi akuntan publik merupakan landasan moral/ etika profesi yang harus diinternalisasikan dalam dirinya. Seorang akuntan publik yang memahami *good governance* secara benar dan didukung independensi yang tinggi, maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak.

Bukan hanya penting bagi seorang akuntan publik untuk memelihara sikap mental independen dalam memenuhi tanggung jawabnya, tetapi penting juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut. Arens (2008: 91) mengkategorikan aspek independensi yang dimiliki auditor, yaitu independensi dalam fakta (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Independensi dalam fakta (*independence in fact*)

Independensi akan ada apabila dalam kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak di dalam

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

b. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi dalam penampilan berarti adanya kesan dari masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen, sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi dalam penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik, untuk memperjelas pengertian ini akan diberikan contoh seorang akuntan kompeten dan independen akan melakukan audit pada sebuah perusahaan yang dewan direksinya dan para manajernya adalah saudara atau kerabatnya. Walaupun auditor tersebut benar-benar bersikap independen dalam sikap mentalnya, namun menurut persepsi masyarakat tidak akan bersikap independen dikarenakan adanya hubungan darah atau kekerabatan yang dapat mengakibatkan rusaknya independensi.

Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz (1961) dalam Trisnarningsih (2007:7), mengungkapkan dua aspek independensi lainnya, yaitu independensi praktisi (*practitioner independence*) dan independensi profesi (*profession independence*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Independensi praktisi (*practitioner independence*)

Independensi praktisi berarti independensi yang berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam merencanakan program, pelaksanaan pekerjaan, verifikasi, dan penyusunan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga

dimensi, yaitu independensi penyusunan program, independensi investigasi, dan independensi pelaporan.

b. Independensi profesi (*profession independence*)

Independensi profesi berarti kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Sedikit berbeda dengan independensi dalam penampilan, independensi profesi lebih bersifat menyeluruh terhadap seluruh profesi akuntan publik. Jika profesi akuntan publik sedang memburuk di mata masyarakat seperti adanya kasus Enron, maka nama baik seluruh akuntan publik akan ikut tercemar.

Sebagian literatur yang membahas tentang independensi auditor menegaskan bahwa kredibilitas laporan keuangan tergantung pada persepsi para pengguna laporan keuangan tentang independensi auditor eksternal. Jika auditor tidak terlihat independen oleh pengguna laporan keuangan, maka para pengguna tidak akan mempunyai kepercayaan terhadap laporan keuangan dan opini auditor pada suatu laporan keuangan perusahaan tidak akan bernilai. Dengan demikian, kredibilitas auditor tidak hanya tergantung dari sikap independensi yang dimilikinya, tetapi juga tergantung pada persepsi independensi dari para pengguna laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan.

3.1. Metode Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *convenience sampling*, dimana unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah

diukur dan kooperatif (Hamid, 2007:30) dalam Sadewo (2011:48). Metode *convenience sampling* termasuk dalam *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel (Januari Devona Ruth, 2012:38).

3.2. Metode dan Jenis Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode kuisisioner. Metode kuisisioner dipilih karena responden yang digunakan cukup banyak dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Kuisisioner atau angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199).

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan langsung kuisisioner oleh peneliti kepada responden dan diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian peneliti mendatangi KAP untuk mengambil kuisisioner yang telah diisi.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistik, yaitu dengan SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 22. Sarwono (2012: 15) SPSS adalah suatu *software* yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik dengan basis *windows*.

3.3.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data sampel yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010: 206).

3.3.2. Teknik Analisis Data

3.3.2.1. Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item pada kuisisioner atau skala, apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukurinya.

3.3.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

3.3.2.3. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu peubah yang dihubungkan dengan satu peubah tidak bebas.

3.3.2.4. Uji Korelasi Berganda

Korelasi Berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel (dua atau lebih variabel dependen dan satu variabel independen). Korelasi berganda berkaitan dengan interkolasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen.

3.3.2.5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dinyatakan dengan untuk pengujian regresi linier berganda yang mencakup lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui proporsi keragaman total dalam variabel tak bebas yang dapat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

dijelaskan atau diterangkan oleh variabel-variabel bebas yang ada di dalam model persamaan regresi linier berganda secara bersama-sama.

3.3.2.6. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen yang diuji, digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. dengan kriteria pengujian yaitu jika $T_{hitung} > T_{Tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya jika $T_{hitung} < T_{Tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.3.2.7. Uji Statistik f

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. kriteria pengujian yaitu H_0 diterima bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ dan H_0 ditolak bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ (Priyatno, 2010: 67).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Peneliti mengambil sampel sebanyak 8 KAP dari keseluruhan KAP yang berada di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Kuisisioner yang disebar sebanyak 60 buah dan jumlah kuisisioner yang kembali adalah 54 buah atau 90%. Kuisisioner yang tidak kembali adalah sebanyak 6 buah atau 10%, hal ini terjadi dikarenakan waktu penyebaran kuisisioner yang kurang tepat. Kuisisioner yang dapat diolah adalah sebanyak 48 buah atau 80%, sedangkan kuisisioner yang tidak dapat diolah adalah sebanyak 6 buah atau 10%. Gambaran mengenai sampel disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Kuisisioner yang disebar	60	100%
2	Jumlah Kuisisioner yang tidak kembali	6	10%
3	Jumlah Kuisisioner yang tidak dapat diolah	6s	10%
4	Jumlah Kuisisioner yang dapat diolah	48	80%

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.2. Distribusi Kuisisioner

No	Nama Akuntan Publik	Kuisisioner dikirim	Kuisisioner dikembalikan
1	S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan	15	15
2	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan	10	10
3	Khairunnas dan Abdul Hamid	5	3
4	Hananta, Budianto dan Rekan	5	4
5	Tri Bowo Yulianti	10	10
6	Made Sudarma, Thomas dan Dewi	5	5
7	Hadori, Sugiarto, Adi dan Rekan	5	5

8	Drs. Lukman, Hadianto dan Rekan	5	4
---	---------------------------------	---	---

Tabel 4.3. Hasi Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	10	20.8	20.8	20.8
	S1	34	70.8	70.8	91.7
	S2	4	8.3	8.3	100
	Total	48	100	100	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.4. Hasi Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2tahun	16	33.3	33.3	33.3
	3-4tahun	13	27.1	27.1	60.4
	>5tahun	19	39.6	39.6	100
	Total	48	100	100	

Tabel 4.5. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan Auditor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Auditor Junior	15	31.3	31.3	31.3
	Auditor Senior	31	64.6	64.6	95.8
	Manajer	2	4.2	4.2	100
	Total	48	100	100	

Sumber :Data primer yang diolah

4.2. Pembahasan

4.2.1. Hasil Uji Kualitas Data

Uji Kualitas Data dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan variabel moderat

X1 variabel bebas Pengalaman Kerja (PK), lihat tabel 4.6.

X2 Profesionalisme Skeptisme (PS) lihat tabel 4.7.

X3 Ketepatan Pemberian Opini Auditor (KPOA) lihat tabel 4.8.

X4 Independensi Auditor (IDP) lihat tabel 4.9.

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Data X1

Nomor Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
PK1	0,631	0,278	Valid
PK2	0,401	0,278	Valid
PK3	0,494	0,278	Valid
PK4	0,377	0,278	Valid
PK5	0,384	0,278	Valid
PK6	0,452	0,278	Valid
PK7	0,338	0,278	Valid

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Data X2

Nomor Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
PS1	0,739	0,278	Valid
PS2	0,861	0,278	Valid
PS3	0,306	0,278	Valid
PS4	0,459	0,278	Valid
PS5	0,882	0,278	Valid
PS6	0,430	0,278	Valid

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Data X3

Nomor Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
KPOA1	0,749	0,278	Valid
KPOA2	0,483	0,278	Valid
KPOA3	0,405	0,278	Valid
KPOA4	0,619	0,278	Valid

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Data Variabel Moderasi

Nomor Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
IDP1	0,852	0,278	Valid
IDP2	0,894	0,278	Valid
IDP3	0,883	0,278	Valid
IDP4	0,820	0,278	Valid
IDP5	0,546	0,278	Valid
IDP6	0,653	0,278	Valid
IDP7	0,613	0,278	Valid

Secara keseluruhan, semua item pertanyaan yang diuji dalam uji validitas ini mempunyai kriteria valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang valid yang berarti

data ini layak untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitian yang dilakukan penulis.

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 4.10. Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	No of Item
Pengalaman Kerja	0,722	7
Profesional Skeptisisme	0,824	6
Ketepatan Pemberian Opini Audit	0,760	4
Independensi	0,919	7

Tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel pengalaman kerja sebesar 0,722, profesional skeptisisme sebesar 0,824, ketepatan pemberian opini audit sebesar

0,760, dan independensi sebesar 0,919. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisioner penelitian ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari

0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang

relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.2.3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Sebelum Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.337	3.416	
1 X1	0.229	0.081	0.349
X2	0.288	0.081	0.44

Dari hasil olah data diatas dapat ditampilkan menjadi persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 $Y = 2,337 + 0,229X_1 + 0,288X_2 + 3,41$
 Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta 2,337, jika

dalam variabel pengalaman kerja dan profesional skeptisisme nilainya 0, maka ketepatan pemberian opini audit (Y) adalah 2,337.

Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Setelah Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	11.783	14.542	
X1	-0.111	0.45	-0.169
X2	0.342	0.408	0.524
Z	-0.456	0.689	-1.48
Moderate1	0.017	0.022	1.9
Moderate2	-0.003	0.02	-0.271

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil olah data diatas dapat ditampilkan menjadi persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 $Y = 11,783 + (-0,111)X_1 + 0,342X_2 + (-0,456)Z + 0,017(X_1.Z) + (-0,003)(X_2.Z) + 3,416$

Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta 11,783 jika dalam variabel pengalaman kerja dan profesional skeptisisme nilainya 0, maka ketepatan pemberian opini audit (Y) adalah 11,783.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.2.4. Hasil Uji Korelasi Linear Berganda

Tabel 4.13. Hasil Uji Korelasi sebelum Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.558a	0.312	0.281	1.258	1.854

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.13., nilai R sebesar 0,558. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dan profesional skeptisisme terhadap

ketepatan pemberian opini audit adalah cukup karena berada posisi antara koefisien korelasi (R) 0,400 – 0,599.

Tabel 4.14. Hasil Uji Korelasi Setelah Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.568 ^a	0.323	0.243	1.291	1.844

a. Predictors: (Constant), Moderate2, X1, X2, Z, Moderate1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 4.14., nilai R sebesar 0,568. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dan profesional skeptisisme terhadap ketepatan pemberian opini audit dengan independensi sebagai variabel

moderating adalah cukup karena berada posisi antara koefisien korelasi (R) 0,400 – 0,599.

4.2.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	0.312	0.281	1.258

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Ys

Tabel 4.15. menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,281 atau 28,1%, ini menunjukkan bahwa variabel ketepatan pemberian opini yang dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman

kerja, profesional skeptisisme adalah sebesar 28,1%, sedangkan sisanya sebesar 0,719 atau 71,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Tabel 4.16. Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	0.323	0.243	1.291

a. Predictors: (Constant), Moderate2, X1, X2, Z, Moderate1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 4.16. menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,243 atau 24,3%, ini menunjukkan bahwa variabel ketepatan pemberian opini yang dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman kerja, profesional skeptisisme dengan independensi sebagai variabel moderating adalah sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar 0,757 atau 75,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji t digunakan untuk koefisien regresi secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Untuk menentukan t tabel ditentukan dengan nilai signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Dalam pengujian ini $(n) = 48$ sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,014 dari $(df = 48 - 3 = 45)$. Untuk mengetahui t-hitung setiap variabel dapat dilihat pada tabel 4.22.:

4.2.6. Hasil Uji Statistik t

Tabel 4.17. Hasil Uji Statistik t sebelum Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.337	3.416		0.684	0.497
1 X1	0.229	0.081	0.349	2.825	0.007
X2	0.288	0.081	0.44	3.558	0.001

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Hipotesis 1 (H₁):

Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.17., variabel pengalaman kerja mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,007. Hal ini berarti menerima H₁, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengalaman kerja lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan pengaruh yang positif. Jadi, semakin tinggi tingkat pengalaman kerja auditor maka semakin besar ketepatan pemberian opini audit yang diberikan. Hal ini sejalan dengan teorinya yaitu semakin banyak pengalaman kerja auditor maka semakin tepat dalam memberikan penjelasan dari berbagai macam temuan audit.

Hasil Uji Hipotesis 2 (H₂):

Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit dengan Independensi sebagai Variabel Moderating.

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.18., variabel pengalaman kerja mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,449. Hal ini berarti menolak H₂, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja dengan independensi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengalaman kerja lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 3 (H₃):

Pengaruh Profesional Skeptisisme terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.17., variabel profesional skeptisisme mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti menerima H₃, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profesional skeptisisme

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengalaman kerja lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.18. Hasil Uji t Setelah di Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.783	14.542		0.81	0.422
X1	-0.111	0.45	-0.169	-0.247	0.806
X2	0.342	0.408	0.524	0.839	0.406
Z	-0.456	0.689	-1.48	-0.662	0.512
Moderate1	0.017	0.022	1.9	0.765	0.449
Moderate2	-0.003	0.02	-0.271	-0.147	0.884

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Hipotesis 4 (H₄) : Pengaruh Profesional Skeptisisme terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit dengan Independensi sebagai Variabel Moderating.

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.18, variabel profesional skeptisisme mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,884. Hal ini berarti menolak H₄, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profesional skeptisisme dengan independensi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengalaman kerja lebih besar dari 0,05.

Dari hasil uji hipotesis di atas maka keseluruhan dapat disimpulkan, secara

parsial independensi sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh pengalaman kerja dan profesional skeptisisme auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.

4.2.7. Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka variabel independennya secara model regresi mempengaruhi variabel dependennya.

Tabel 4.19. Hasil Uji F Sebelum Moderasi
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	32.247	2	16.123	10.186	.000 ^b
Residual	71.233	45	1.583		
Total	103.479	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 10,186 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,810 yang artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi 0,05

dan dapat disimpulkan bahwa secara model regresi layak (andal) untuk digunakan menguji hipotesis atau dapat dikatakan pengalaman kerja dan profesional skeptisisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Tabel 4.20. Hasil Uji F Setelah Moderasi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	33.434	5	6.687	4.010	.005 ^b
Residual	70.045	42	1.668		
Total	103.479	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Moderate2, X1, X2, Z, Moderate1

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Hasil Uji Hipotesis 5 (H_5): Pengaruh Pengalaman Kerja dan Profesional Skeptisisme terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit dengan Independensi sebagai variabel moderating.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 4,010 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,810 yang artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai probabilitas sebesar 0,005 lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Artinya bahwa secara model regresi layak (andal) untuk digunakan menguji hipotesis. Namun secara simultan, independensi sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh pengalaman kerja dan profesional skeptisisme auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit. Terlihat dari nilai F_{hitung} sebelum di moderasi sebesar 10,186 mengecil menjadi 4,010 setelah di moderasi. Hal tersebut artinya bahwa H_5 yang peneliti gambarkan di awal ditolak.

Independensi sejatinya adalah suatu sikap yang memang harus dimiliki oleh seorang auditor. Sikap yang mana mampu mempertahankan perilaku independen guna memenuhi tanggung jawab profesinya. Tidak ada alasan bagi seorang auditor untuk tidak memiliki sikap ini. Oleh karena itu, indikator itulah yang menyebabkan variabel independen bukan berfungsi sebagai memperkuat atau memperlemah dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Hasil uji t menunjukkan pengalaman kerja auditor (X_1) yang diukur melalui ketepatan pemberian opini audit (Y) secara parsial diperoleh hasil t-hitung 2,825 lebih besar dari t-tabel 1,679 dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, H_1 diterima yang berarti pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- b. Hasil uji t menunjukkan pengalaman kerja auditor (X_1) yang diukur melalui ketepatan pemberian opini audit (Y) dengan independensi sebagai variabel moderating (Z) secara parsial diperoleh hasil t-hitung 0,765 lebih kecil dari t-tabel 1,679 dengan nilai signifikansi 0,449 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, H_2 ditolak yang berarti pengalaman kerja auditor dengan independensi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- c. Hasil uji t menunjukkan profesional skeptisisme auditor (X_2) yang diukur melalui ketepatan pemberian opini audit (Y) secara parsial diperoleh hasil t-hitung 3,558 lebih besar dari t-tabel 1,679 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, H_3 diterima yang berarti profesional skeptisisme auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- d. Hasil uji t menunjukkan profesional skeptisisme auditor (X_2) yang diukur melalui ketepatan pemberian opini audit (Y) dengan independensi sebagai variabel moderating (Z) secara parsial diperoleh hasil t-hitung -0,147 lebih kecil dari t-tabel 1,679 dengan nilai signifikansi 0,884 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan, H_4 ditolak yang berarti profesional skeptisisme auditor dengan independensi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- e. Hasil uji F menunjukkan pengalaman kerja (X_1) dan profesional skeptisisme auditor (X_2) terhadap ketepatan pemberian opini audit (Y) dengan independensi sebagai variabel moderating (Z) secara simultan diperoleh nilai sebesar 4,010 lebih

besar dari F-tabel 2,810 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Namun dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan H_3 ditolak karena terjadi penurunan F hitung sebelum moderasi dengan setelah di moderasi. Artinya, independensi sebagai variabel moderating memperlemah pengaruh pengalaman kerja dan profesional skeptisisme auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.

5.2. Saran

- a. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperbanyak responden dan area survei tidak hanya pada Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan saja sehingga penelitian tersebut dapat digeneralisasikan.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode lain seperti wawancara secara langsung agar dapat dilakukan pengawasan terhadap jawaban responden terkait dengan instrumen yang diteliti.

S2 Program Pasca Sarjana UI. Jakarta.

Ibnu, Widiyanto & Yuhertian, 2008. *Pointers : Metodologi Penelitian*. Semarang: BP Undip.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Salemba Empat

Mautz, R.K. dan H.A. Sharaf. 1993. *The Philosophy of Auditing*. American Accounting Association. Sarasota. Hal. 246.

Mulyadi. (2009). *Auditing*. Edisi Enam. Salemba Empat. Jakarta.

Novianty, Suzy. (2008). Skeptisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 5 No. 1, Juni 2008.

Sekar, Mayangsari. (2003). "Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap pendapat Audit". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Volume 6, Hal 1-22.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sunyoto, Danang. 2014. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. Cetakan Pertama Jakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Tubbs, L Stewart dan Moss Sylvia. 2001. *Human Communication (konteks-kontekskomunikasi)*. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Trisnaningsih, S. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan oleh KAP)*. (2014). Lembaga Penerbit FUEI. Jakarta.

Antonius, Herusetya. (2007). *Pendapat Auditor atas Laporan Keuangan*. *Jurnal The Winners*, 08 (1). 47 - 57. ISSN 1412 - 1212

Arens, Alvin A. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi ke Dua Belas. Erlangga. Jakarta.

Asih. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja di Bidang Auditing pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Jawa Barat*. Tesis

PROSIDING

*Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi,
Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”*

Auditor. *Simposium Nasional
Akuntansi X, Makasar.*

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011
Tanggal 3 Mei 2011 tentang
Akuntan Publik

**PENGARUH MEDIASI OPINI LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN TENTANG PENGARUH AKUNTABILITAS,
CREATIVE ACCOUNTING, KONSEP AUDIT, DAN PERAN
AUDITOR TERHADAP AUDIT EXPECTATION GAP
(STUDI EMPIRIS PADA BPK RI, DPRD, BPKAD, DAN KAP
PROVINSI DKI JAKARTA)**

Islami Dian Pertiwi*), Roni Budianto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
**Email: islamidianp@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Accountability, Creative Accounting, Auditing Concepts and Role of Auditors to Audit Expectation GAP between auditors and users of audit reports, mediated by Opinion Inspection Report. In this study, the analysis by using SEM analysis, and PLS as a software, approach Sobel test to measure the effect of mediation between variables. Samples in this study is user financial government is represented by DPRD commission C, BPKAD, KAP and BPK as an auditor government. Samples obtained in purposive sampling. The data obtained by questionnaire. The results of this research is, the higher level of Accountability, Creative Accounting, Auditing Concepts and Role of Auditors on a financial reports, then lead to the higher also Audit Expectation GAP will happen. Except if supported by the better opinion.

Key Words: Accountability, Creative Accounting, Auditing Concepts, Role of Auditors, Audit Expectation GAP, Opinions on Inspection Reports.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Creative Accounting, Konsep Audit, dan Peran Auditor terhadap Audit Expectation GAP antara auditor dengan pemakai laporan audit, dengan dimediasi oleh Opini Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan menggunakan software Partial Least Squares (PLS) dengan pendekatan Uji Sobel untuk mengukur pengaruh mediasi antar variabel. Sampel dalam penelitian ini adalah pemakai laporan keuangan pemerintah yang diwakili oleh DPRD komisi C bagian keuangan, BPKAD, KAP dan auditor pemerintah yaitu BPK. Sampel diperoleh secara purposive sampling. Data yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, creative accounting, konsep audit, dan peran auditor pada suatu laporan keuangan maka mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat audit expectation gap yang terjadi. Kecuali jika didukung dengan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan yang lebih baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Creative Accounting, Konsep Audit, Peran Auditor, Opini Laporan Hasil Pemeriksaan, Audit Expectation GAP.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Audit Expectation Gap adalah perbedaan antar keinginan atau harapan masyarakat terhadap hasil kerja auditor dengan hasil kerja yang ditunjukkan auditor (Chandler & Edward, 1996). Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap peran dan tanggung jawabnya dibanding pemakai laporan keuangan pemerintah. Hal ini membuktikan adanya *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah (Yulianti et.al, 2007).

Expectation gap tidak hanya terjadi dalam lingkungan audit sektor swasta. Namun dapat pula terjadi di lingkungan audit sektor publik mengingat sektor publik pun turut menggunakan laporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu badan yang bebas dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 1 akan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Salah satu indikator dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas adalah dengan mendorong Kementerian/Lembaga untuk memperoleh opini audit tanpa pengecualian (WTP) setiap tahunnya (Djalil, 2014). Pada tahun 2010 K/L yang memperoleh opini WTP sebesar 63%, tahun 2011 sebesar 77%, tahun 2012 sebesar 74% dan tahun 2013 sebesar 74% (IHPS, 2013).

Kriteria pemberian opini menurut UU No.15 tahun 2004 penjelasan pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan; (iii) kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan; dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern.

Untuk itu laporan keuangan yang dipublikasi harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya. Laporan keuangan yang buruk menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang salah dan menyesatkan (Mahmudi, 2007).

Selain itu, peran auditor sangat penting dalam menghasilkan kualitas audit yang baik. Pendapat yang dinyatakan auditor akan sangat berguna bagi para pemakai laporan audit untuk menentukan keputusan ekonomi. Selain itu, peran auditor dibutuhkan untuk memverifikasi hasil audit apakah telah handal dan akuntabel (Setyorini, 2010).

Penelitian mengenai keberadaan *expectation gap* di sektor swasta telah banyak dilakukan, namun penelitian mengenai keberadaan *expectation gap* di sektor publik khususnya di Indonesia masih jarang dilakukan, kecuali Nugroho (2004). Nugroho (2004) menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan audit pemerintah (anggota DPRD), (2) ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan sektor swasta dengan pemakai laporan keuangan pemerintah, dan (3) tidak ada perbedaan persepsi antara laporan keuangan pemerintah di sektor pemerintahan daerah satu dengan pemakai laporan keuangan pemerintah daerah lain.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sentral mengenai apakah akuntabilitas, *creative*

accounting, konsep audit, dan peran auditor mempengaruhi *audit expectation gap* melalui opini laporan hasil pemeriksaan.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pada organisasi pemerintahan, model prinsipal-agen sangat mudah diamati, di mana keseluruhan hierarki dalam pemerintahan merupakan hubungan keagenan, mulai dari rakyat kepada legislatif, dan legislatif kepada eksekutif yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat Damayanti (2010).

Maraknya skandal keuangan yang terjadi di lingkup pemerintahan telah memberikan dampak besar kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa semua kasus tersebut melibatkan profesi auditor, seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen dapat memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya *expectation gap* antara masyarakat dengan auditor.

2.2. Teori Ekspektasi

Teori ekspektasi/ teori harapan mengasumsikan bahwa individu berniat memilih tindakan, tingkat usaha, dan pekerjaan yang memaksimalkan kesenangan yang mereka harapkan dan meminimalkan harapan yang dapat menyakitkan mereka (Donovan, 2001; Kanfer, 1990); Pinder, 1998) dalam Binberg *et al.*, 2007:120). Model teori harapan individu merupakan kekuatan

motivasi sebagai fungsi dari harapan mereka (probabilitas subjektif bahwa usaha mereka akan memberikan hasil tingkat pertama seperti kinerja), perantaranya (subjektif probabilitas bahwa kinerja akan menghasilkan tingkatan kedua hasil seperti uang), dan valensi (yang afektif orientasi terhadap hasil tingkat kedua). Individu diasumsikan menggabungkan harapan, sarana, dan konsisten dengan yang diharapkan valensi perhitungan nilai untuk menentukan motivasi mereka terhadap setiap alternatif dan kemudian memilih alternatif dengan kekuatan motivasi tertinggi (Binberg *et al.*, 2007:120).

2.3 Gap Analysis

Mengacu pada pendapat dari Bens, I. (2011, p160), *Gap Analysis* memiliki arti yaitu mengidentifikasi langkah-langkah yang hilang, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. *Gap analysis* adalah alat perencanaan yang menciptakan pandangan bersama tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara keadaan sekarang dan masa depan yang diinginkan.

2.4 Audit Sektor Publik

Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara teknis, audit pada sektor publik sama dengan audit pada sektor swasta. Menurut Jones & Bates (1990) yang membedakan pelaksanaan audit dua sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, audit sektor publik memiliki cakupan tugas dan memiliki tanggung jawab yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

lebih luas dari pada audit pada sektor swasta.

2.5. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan

Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 1). Ada empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu, wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP).

2.6. Audit Expectation Gap

Audit ekspektasi *gap* atau yang biasa dikenal dengan istilah *audit expectation gap* yang pertama kali diusulkan oleh Liggio (1974), yang menyatakan bahwa kesenjangan harapan audit yang muncul karena perbedaan persepsi antara akuntan independen dengan pengguna laporan keuangan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan dari profesi akuntansi. *Expectation gap* di dalam auditing adalah suatu fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang apa yang dipercaya oleh auditor yang menjadi tanggung jawabnya dengan apa yang dipercaya pemakai laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor yang sesungguhnya (Guy & Sullivan 1988, Gramling & Wallace 1996).

2.7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak

pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances sistem*).

2.8. Creative Accounting

Menurut Indrijawati, et.al (2015), akuntansi kreatif oleh beberapa kalangan dianggap hal yang tidak etis karena memanipulasi data. Akan tetapi, akuntansi kreatif dalam pandangan teori akuntansi positif, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, tidak ada masalah yang harus dipersoalkan. Tujuan seorang akuntan melakukan *creative accounting* bermacam-macam, diantaranya adalah untuk pelarian pajak, menipu bank demi mendapatkan pinjaman baru, atau memertahankan pinjaman yang sudah diberikan oleh bank dengan syarat-syarat tertentu, mencapai target yang ditentukan oleh analis pasar, atau mengecoh pemegang saham untuk menciptakan kesan bahwa manajemen berhasil mencapai hasil yang cemerlang.

2.9. Konsep Audit

Dalam teori auditing ada lima konsep dasar yang dikemukakan oleh Mautz dan Sharaf, yaitu:

- a. Independensi
Yaitu suatu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.
- b. Kompetensi
Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi.
- c. Materialitas
Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya.

- d. *Bukti/ evidence*
Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan.
- e. *Pengungkapan yang wajar*
Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.
- f. *Audit Kinerja*
Pengertian audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan.

2.10. Peran Auditor

Auditor berperan untuk meningkatkan kredibilitas informasi pertanggungjawaban dari pihak manajemen kepada pihak principal dan *stakeholders* lainnya (*United Nations Development Programme, 2009*). Peran eksternal auditor adalah mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Rondo, 2006). Tanggung jawab auditor adalah untuk memverifikasi apakah laporan keuangan memaparkan pandangan yang benar dan adil (Salehi *et al.*, 2008).

2.11. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

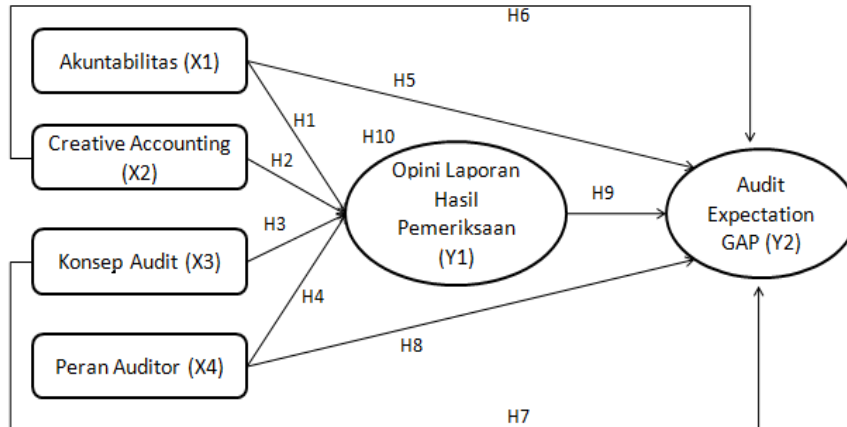
Peneliti	Hasil
Indrijawati, Pagulung, Mediaty, dan Damayanti (2015)	Ada pengaruh langsung antara akuntabilitas, <i>Creative Accounting</i> , dan konsep audit terhadap <i>Audit Expectation GAP</i> menurut Opini Laporan Hasil Pemeriksaan.
Setyorini (2010)	Terdapat <i>Audit Expectation GAP</i> anatar auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah (anggota DPRD, pegawai DPPKAD dan masyarakat pembayar pajak daerah dilihat dari sisi peran auditor, independensi auditor, pengetahuan audit. Serta kurangnya pengetahuan audit dari pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan eksistensi <i>Audit Expectation Gap</i>
Rusliyawati dan Halim (2008)	Terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah (DPRD, Pemda dan masyarakat) dari segi akuntabilitas, independensi, kompetensi, dan audit kinerja.
Yulianti, Winarna, dan Setyawan (2007)	Terdapat <i>expectation gap</i> antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap peran dan tanggung jawabnya dibanding pemakai laporan keuangan pemerintah.
Ramdhani (2012)	Terdapat perbedaan persepsi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya terhadap <i>Expectation Gap</i> dalam isu auditor dan proses audit, peran auditor, kompetensi dan independensi auditor, larangan pada KAP, komunikasi hasil audit antara pemakai laporan keuangan, auditor, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi.
Utary dan Iqbal (2014)	Terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi pelaporan, akuntabilitas, independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar, dan audit kinerja.
Yandi (2013)	Terdapat <i>Audit Expectation Gap</i> dari sisi independensi, dan bukti audit.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

	Tidak terdapat <i>Audit Expectation Gap</i> dari sisi pelaporan, akuntabilitas, kompetensi auditor, matrealitas, pendapat wajar, dan audit kinerja.
--	---

2.12. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

- Menguji pengaruh langsung variabel akuntabilitas, *creative accounting*, konsep audit, dan peran auditor terhadap opini laporan hasil pemeriksaan.
- Menguji pengaruh langsung variabel akuntabilitas, *creative accounting*, konsep audit, dan peran auditor terhadap *audit expectation gap*.
- Menguji pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh akuntabilitas, *creative accounting*, konsep audit, dan peran auditor terhadap *audit expectation gap* melalui opini laporan hasil pemeriksaan.

2.13. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap opini laporan hasil pemeriksaan.
- H2 : *Creative accounting* berpengaruh terhadap opini laporan hasil pemeriksaan.
- H3 : Konsep Audit berpengaruh terhadap opini laporan hasil pemeriksaan.

- H4 : Peran Auditor berpengaruh terhadap opini laporan hasil pemeriksaan.
- H5 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap *audit ekspektation gap*.
- H6 : *Creative Accounting* berpengaruh terhadap *audit ekspektation gap*.
- H7 : Konsep Audit berpengaruh terhadap *audit ekspektation gap*.
- H8 : Peran Auditor berpengaruh terhadap *audit ekspektation gap*.
- H9 : Opini laporan hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap *audit expectation gap*.
- H10 : Akuntabilitas, *creative accounting*, konsep audit, dan peran auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap *audit expectation gap* melalui opini laporan hasil pemeriksaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei dan bersifat non eksperimental. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah *explanatory research*, yang menjelaskan

hubungan kausal dan korelasional antar variabel melalui pengujian hipotesis. Pada metode survei, data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuisioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh melalui kuisioner yang langsung disebarkan kepada auditor BPK, anggota DPRD, pegawai pemerintah daerah dan masyarakat.

3.2. Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling method*, yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122). kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Auditor yang bertugas pada kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang telah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- b. Anggota DPRD DKI Jakarta yang diwakili oleh komisi C Bagian Keuangan yang telah menjabat/ bekerja minimal 1 (satu) tahun.
- c. Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta khususnya bagian keuangan yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun.
- d. Masyarakat yang diwakili oleh akademisi maupun auditor dari KAP yang bertugas di Provinsi DKI Jakarta, yang telah berkerja atau berkecimpung dibidang keuangan maupun audit minimal 1 (satu) tahun.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penyusunan skripsi ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Kuisioner
Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model

Likert. Model *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan program bantu Smart PLS 3 dengan pendekatan Uji Sobel pada mediasi uji antara variabel. PLS adalah model persamaan structural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut Ghozali (2008: 18) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. Untuk tujuan prediksi pendekatan PLS lebih cocok karena diasumsikan bahwa semua ukuran varian adalah varian yang berguna untuk dijelaskan. Teknik analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah: uji statistik deskriptif, uji validitas dan realibilitas dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Deskriptif

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuisioner sebanyak 80 kuisioner. Dari jumlah tersebut kuisioner yang kembali berjumlah 52 kuisioner atau hanya 65% responden yang mengembalikan, sedangkan kuisioner yang tidak kembali berjumlah 28 kuisioner atau 35%. 51 kuisioner atau 63,75% yang dapat diolah, sedangkan 1 kuisioner atau 1,25% tidak dapat diolah.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.1 Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuisisioner yang disebar	80	100%
2	Kuisisioner yang kembali	52	65%
3	Kuisisioner yang tidak kembali	28	35%
4	Kuisisioner yang tidak lengkap	1	1,25%
5	Kuisisioner yang dapat diolah	51	63,75%

Sumber: Data diolah

4.2. Analisis Data

4.2.1. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini adalah *outer model* yaitu *convergent validity* yang dilihat dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) masing-masing konstruk dimana nilainya harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2008: 42). Cara lain yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot of Average Variance Extracted* (\sqrt{AVE})

setiap konstruk (variabel laten) dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Apabila nilai akar kuadrat konstruk lebih besar dari AVE setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model masing-masing indikator pernyataan adalah valid atau dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Tabel 4.2. Average Variance Extracted (AVE) dan (\sqrt{AVE})

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	\sqrt{AVE}	Keterangan
AKT	0,707	0,841	Valid
CA	0,628	0,792	Valid
KA	0,710	0,843	Valid
PA	0,674	0,821	Valid
OLHP	0,704	0,839	Valid
GAP	0,664	0,815	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan *Composite Reliability*. Suatu data

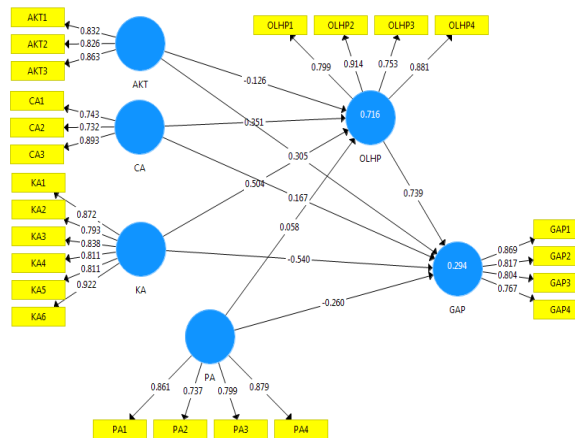
dikatakan reliabel jika, *Composite Reliability* lebih dari 0,7 (Ghozali, 2008:43).

Tabel 4.3. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
AKT	0,879	Reliabel
CA	0,834	Reliabel
KA	0,936	Reliabel
PA	0,892	Reliabel
OLHP	0,905	Reliabel
GAP	0,888	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan Smart PLS (2015)

4.3. Pengujian Hipotesis melalui Outer Model



Gambar 4.1. Full Model Structural Partial Least Square

Hasil pengolahan dengan menggunakan *Smart PLS* dapat dilihat pada gambar 4.1. dimana nilai *outer loadings* dari indikator variabel akuntabilitas, *creative accounting*, konsep audit, dan peran auditor tidak

terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan menunjukkan nilai *outer model* atau korelasi dengan variabel secara keseluruhan sudah memenuhi *convergent validity*.

Tabel 4.4. Outer Loading

	T Statistics (O/STDEV)
AKT1	3,686
AKT2	3,264
AKT3	3,696
CA1	8,238
CA2	9,896
CA3	42,749
GAP1	20,356
GAP2	12,679
GAP3	13,265
GAP4	8,873
KA1	15,650
KA2	10,703
KA3	12,397
KA4	10,731
KA5	9,247
KA6	37,566
OLHP1	12,496
OLHP2	47,533
OLHP3	9,805
OLHP4	20,883
PA1	11,608
PA2	8,681
PA3	16,559
PA4	13,118

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.4. dimana nilai t-statistik seluruh variabel lebih besar atau sudah berada diatas nilai 1,96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas telah memenuhi syarat dari

Tabel 4.5. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 1

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
AKT → OLHP	-0,126	-0,107	0,108	1,160	H1: Ditolak

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis satu (H_1) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.5. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditujukan

Tabel 4.6. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
CA → OLHP	0,351	0,353	0,110	3,194	H2: Diterima

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis dua (H_2) menyatakan bahwa *creative accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.6. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditujukan

Tabel 4.7. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
KA → OLHP	0,504	0,489	0,141	3,576	H3: Diterima

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis tiga (H_3) menyatakan bahwa konsep audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.7. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditujukan dengan

Tabel 4.8. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 4

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
PA → OLHP	0,058	0,059	0,124	0,465	H4: Ditolak

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

kecukupan model atau *discriminant validity*.

4.4. Pengujian Hipotesis Melalui Inner Model

4.4.1. Hasil Uji Hipotesis Pertama

dengan nilai *original sample estimate* sebesar -0,126 dan nilai t-statistik sebesar 1,160 yang mana lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96).

4.4.2. Hasil Uji Hipotesis Kedua

dengan nilai *original sample estimate* sebesar 0,351 dan nilai t-statistik sebesar 3,194 yang mana lebih besar dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis dua (H_2) diterima.

4.4.3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga

nilai *original sample estimate* sebesar 0,504 dan nilai t-statistik sebesar 3,576 yang mana lebih besar dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis tiga (H_3) diterima.

4.4.4. Hasil Uji Hipotesis Keempat

Hipotesis empat (H₄) menyatakan bahwa peran auditor berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap opini laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.8. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditunjukkan

dengan nilai *original sample estimate* sebesar 0,058 dan nilai t-statistik sebesar 0,465 yang mana lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis empat (H₄) ditolak.

4.4.5. Hasil Uji Hipotesis Kelima

Tabel 4.9. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 5

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
AKT → GAP	0,305	0,310	0,173	1,765	H5: Ditolak

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis lima (H₅) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit expectation gap*. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.9. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditunjukkan dengan nilai

original sample estimate sebesar 0,305 dan nilai t-statistik sebesar 1,765 yang mana lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis lima (H₅) ditolak.

4.4.6. Hasil Uji Hipotesis Keenam

Tabel 4.10. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 6

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
CA → GAP	0,167	0,149	0,199	0,841	H6: Ditolak

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis enam (H₆) menyatakan bahwa *creative accounting* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit expectation GAP*. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.10. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditunjukkan dengan

nilai *original sample estimate* sebesar 0,167 dan nilai t-statistik sebesar 0,841 yang mana lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis enam (H₆) ditolak.

4.4.7. Hasil Uji Hipotesis Ketujuh

Tabel 4.11. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 7

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
KA → GAP	-0,540	-0,535	0,261	2,067	H7: Diterima

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis tujuh (H₇) menyatakan bahwa konsep audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit expectation gap*. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.11. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditunjukkan dengan nilai

original sample estimate sebesar -0,540 dan nilai t-statistik sebesar 2,067 yang mana lebih besar dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis tujuh (H₇) diterima.

4.4.8. Hasil Uji Hipotesis Kedelapan

Tabel 4.12. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 8

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
PA → GAP	-0,260	-0,253	0,246	1,057	H8: Ditolak

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Hipotesis delapan (H_8) menyatakan bahwa peran auditor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit expectation gap*. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.12. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditunjukkan dengan nilai

Tabel 4.13. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 9

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of sub Samples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Keputusan
OLHP → GAP	0,739	0,744	0,243	3,034	H9: Diterima

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)

Hipotesis sembilan (H_9) menyatakan bahwa opini laporan hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit expectation gap*. Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan dalam Tabel 4.13. hasil perhitungan terhadap koefisien parameter ditunjukkan dengan nilai *original sample estimate* sebesar 0,739 dan nilai t-statistik sebesar 3,034 yang mana lebih besar dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis sembilan (H_9) diterima.

4.4.10. Hasil Uji Hipotesis Kesepuluh

$$t = \frac{a.b}{\sqrt{(a^2 Sb^2 + b^2 Sa^2 + Sa^2 Sb^2)}} = \frac{(-0.126).(0.739)}{\sqrt{(-0.126)^2(0.243)^2 + (0.739)^2(0.108)^2 + (0.108)^2(0.243)^2}} = -1,046$$

Nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dan jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1,64, 1,94 atau 2,85) atau lebih kecil dari (-1,64, -1,96 atau -2,85) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi. Pada penelitian ini, nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar -1,046 tersebut lebih besar dari -1,96 atau dalam harga mutlak $1,96 > |-1,046|$ yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut tidak signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel akuntabilitas terhadap *audit expectation gap* melalui opini laporan hasil pemeriksaan berpengaruh secara negatif

original sample estimate sebesar -0,260 dan nilai t-statistik sebesar 1,057 yang mana lebih kecil dari nilai t-tabel (1,96). Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis delapan (H_8) ditolak.

4.4.9. Hasil Uji Hipotesis Kesembilan

dan tidak signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 10.a ditolak.**

$$t = \frac{a.b}{\sqrt{(a^2 Sb^2 + b^2 Sa^2 + Sa^2 Sb^2)}} = \frac{(0.351).(0.739)}{\sqrt{(0.351)^2(0.243)^2 + (0.739)^2(0.110)^2 + (0.110)^2(0.243)^2}} = 2,158$$

Nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dan jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1,64, 1,94 atau 2,85) atau lebih kecil dari (-1,64, -1,96 atau -2,85) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi. Pada penelitian ini, nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,158 tersebut lebih besar dari 1,96 yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel *creative accounting* terhadap *audit expectation gap* melalui opini laporan hasil pemeriksaan berpengaruh secara positif dan signifikan sebesar 5%. Dengan demikian **Hipotesis 10.b diterima.**

$$t = \frac{a.b}{\sqrt{(a^2 Sb^2 + b^2 Sa^2 + Sa^2 Sb^2)}} = \frac{(0.504).(0.739)}{\sqrt{(0.504)^2(0.243)^2 + (0.739)^2(0.141)^2 + (0.141)^2(0.243)^2}} = 2,282$$

Nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dan jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1,64, 1,94 atau 2,85) atau lebih kecil dari (-1,64, -1,96 atau -2,85) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi. Pada penelitian ini, nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,282 tersebut lebih besar dari 1,96 yang berarti bahwa

parameter mediasi tersebut signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel konsep audit terhadap *audit expectation gap* melalui opini laporan hasil pemeriksaan berpengaruh secara positif dan signifikan sebesar 5%. Dengan demikian **Hipotesis 10.c diterima.**

$$t = \frac{a.b}{\sqrt{(a^2 Sb^2 + b^2 Sa^2 + Sa^2 Sb^2)}} = \frac{(0,058) \cdot (0,739)}{\sqrt{(0,058)^2(0,243)^2 + (0,739)^2(0,124)^2 + (0,124)^2(0,243)^2}} = 0,437$$

Nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dan jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1,64, 1,94 atau 2,85) atau lebih kecil dari (-1,64, -1,96 atau -2,85) maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi. Pada penelitian ini, nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,437 tersebut lebih kecil dari 1,64 ataupun 1,96 yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut tidak signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel peran auditor terhadap *audit expectation GAP* melalui opini laporan hasil pemeriksaan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan. Dengan demikian **Hipotesis 10.d ditolak.**

5. KESIMPULAN

Akuntabilitas, *creative accounting*, konsep audit, dan peran auditor sangat berpengaruh terhadap kesenjangan harapan audit. Bentuk laporan keuangan yang akuntabel belum tentu bisa menghasilkan opini yang baik pula sehingga dapat meningkatkan eksistensi *expectation gap* yang mungkin terjadi. Praktik *creative accounting* dianggap sebagian kalangan adalah kegiatan yang tidak etis karena dianggap memanipulasi data dari laporan keuangan, namun jika masih berpegang pada akuntansi positif maka hal tersebut sah-sah saja jika tetap memperhatikan prinsip akuntansi yang berterima umum. Konsep audit juga dibutuhkan dalam memeriksa laporan keuangan, jika auditor telah memeriksa laporan

keuangan dengan berpedoman terhadap konsep audit yang ada maka opini yang dihasilkan pun lebih objektif. Selain itu, peran auditor juga diperlukan untuk memberikan opini yang objektif pada laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus memberikan penjelasan jika terdapat harapan yang lebih atas peran auditor sebagai pemberi opini oleh pemakai laporan auditan. Opini yang baik dapat meminimalisir eksistensi *expectation gap* yang mungkin terjadi, oleh karena itu, diperlukan penyusunan laporan keuangan yang baik oleh pihak penyaji dan proses pengauditan yang objektif untuk menghasilkan opini yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Carol A., & Richard Evans, 2004, *Accountability, Completeness, Credibility and The Audit Expectations Gap*, The Journal Of Corporate Citizenship, Academic Research Library, p. 97.
- Adhikara, M.F.A. 2011. *Creative Accounting: Apakah Suatu Tindakan Ilegal?*. *Jurnal Akuntansi*, Akruak, Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Al-Haq, F.F. 2013. "Persepsi Auditor BKM dengan Pemakai Laporan Keuangan BKM tentang *Audit Expectation GAP* dalam Hal Independensi, Kompetensi Auditor, Peran dan Tanggung Jawab Auditor" Malang. <http://www.simpopdf.com>.
- Arif, M.L.S, dkk. 2014. Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang *Creative Accounting*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 5.1 hal. 1-160. Malang.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2015. (in Indonesia).
- Bailey, K.E., Bylinski, J.H. dan Shields, M.D. 1983. *Effect of audit report wording changes on the perceived message*, *Journal of Accounting Research, Autumn*, pp. 355-70.
- Dewi, R.R. 2011. "Expectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah: Studi Kasus di Pemerintah Propinsi Jawa Tengah". Skripsi pada Universitas Diponegoro, Semarang.
- Epstein, M., & M, Geiger., January 1994, *Investor Views of Audit assurance: Recent Evidence of The Expectation Gap*, *The Journal of Accountancy*, p. 60-66.
- Guy, D.M. & Sullivan, J.D. 1988. "The Expectation Gap Auditing Standards" *The Journal of Accountancy*. April.
- Humphrey, C., dan Turley S. 1993. *The Audit Expectation GAP in Britain : An Empirical Investigation*. *Accounting Bussiness Research*. Vol 23, p 395-411.
- Indrarto, M. 2008. "Persepsi Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Expectation Gap (Dalam Isu Auditor dan Proses Audit, Peran Auditor, Serta Kompetensi dan Independensi)". Skripsi pada Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Indrijawati, Aini, dkk. 2015. "Effect of Mediation of Opinion Inspection Reports on the Influence of the Accountability, Creative Accounting, and Auditing Concept towards Audit Expectation GAP". *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 6(1), 137-147. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1541825514?accountid=25704>.
- Kelly, A. dan Mohrweis, L. 1989. "Banker's and Investors Perceptions of the Auditor's role in Financial Statement Reporting: The Impact of SAS No.58". *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 9, Fall, pp.87-97.
- Koh, H.C., dan Woo, E.S. 1998. *The Expectation GAP in Auditing*. *Managerial Auditing Journal*, p. 147-154.
- Liggio, C.D. 1974. *The Expectation GAP: The Accountant's Waterloo*. *Jornal of Contemporary Business*. Vol.2. pp. 27-44.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Andi. (in Indonesia).
- Masyitoh, R.D, dkk. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintahan Daerah Tingkat II Tahun 2008-2009. *SNA 18 Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Miller, J., Reed, S. dan Strawser, R. 1990. "The New Auditor's report: Will it close the expectations gap

- in communications?*". The CPA Journal. Vol. 60, May, pp.68-72.
- Nair, R.D., dan Rittenberg L.E. 1987. *Messege Perceived from Audit, Review and Compilation Reports: Extension to More Diverse Group*, Auditing: A Journal of Practice & Theory. Vol.7, No.1, pp.15-38.
- Nugroho, K.A. 2004. *Analisa atas Expectation GAP pada Profesi Pengeuditan Pemerintah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada.
- Ramadhony, R. & Hadiprajitno, P.B. 2014. "Pengaruh Pengetahuan dan Ekspektasi Masyarakat Terhadap Kesenjangan Persepsi Audit Pemerintahan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No.4, 2014.
- Ramdhani, Dudy S. 2012. "Persepsi Pemakai Laporan Keuangan dan Auditor Mengenai Expectation Gap: Studi Kasus Di Kota Semarang". Skripsi pada Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rusliyawati dan Abdul H. 2007. *Penginvestigasian Audit Expectation GAP pada Sektor Publik*. Proseding Simposium Nasional Akuntansi 11. Banjarmasin.
- Saelendro, A. 2000. *Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Melalui Pengawasan Keuangan Negara yang Efektif, Konvensi Nasional Akuntan IV dan Kongres Luar Biasa, Jakarta (in Indonesia)*
- Setyorini, D.A. 2010. "Analisis Audit Expectation GAP pada Pemerintahan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sragen)". Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Utari, A.R dan Ikkal M. 2014. *Analisis Audit Expectation GAP pada Sistem Audit Sektor Publik di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur*. Tesis pada Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Yandi, D.F. 2013. *Analisis Variabel-Variabel Audit Expectation GAP atas Hasil Audit BPK (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Jambi tahun 2013)*.
- Yeni, Nini Syofri, 2000, *Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung jawab Auditor: Studi Empiris Mengenai Expectation Gap*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Yuliati, dkk. 2007. "Expectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah". Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli 2007.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TURNOVER INTENTION PADA AGEN CALL CENTER
PT. ABC MENGGUNAKAN METODE
STRUCTURAL EQUATION MODELLING**

Juli Ismanto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: july.ismanto@gmail.com

ABSTRACT

PT. ABC is one Group company PT X. As a form of synergy, PT ABC continue to improve services to its customers by utilizing the services of Call Center. Call Center To obtain an effective process, required a reliable and loyal agent. However, this time discovered a number of agents who do resign every month. Therefore, please note any factors that influence it, such as work stress, the pattern of transformational leadership, job characteristics, job satisfaction, and organizational commitment. To test this association, used the method of Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the factor of transformational leadership and job characteristics and significant positive effect on job satisfaction. Factors transformational leadership and job satisfaction positive and significant effect on organizational commitment. Work stress factors a significant negative effect on organizational commitment. Work stress factors and significant positive effect on turnover intention. Factors organizational commitment and significant negative effect on turnover intention. Besides acquired a direct relationship, also obtained an indirect relationship between factors. That relationship is the influence of job characteristics on organizational commitment and transformational leadership, job characteristics, and job satisfaction on turnover intention. However, to work stress factors known to not have any relationship to job satisfaction.

Key Words: Structural Equation Modeling, Turnover Intention, Job Satisfaction, Organization Commitment

ABSTRAK

PT. ABC merupakan salah satu perusahaan Group PT X. Sebagai bentuk sinergi, PT. ABC terus meningkatkan pelayanan pada pelanggannya dengan memanfaatkan layanan Call Center. Untuk mendapatkan proses Call Center yang efektif, diperlukan agent yang handal dan loyal. Namun, saat ini ditemukan sejumlah agent yang melakukan resign di setiap bulannya. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, seperti stres kerja, pola kepemimpinan transformasional, karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Untuk menguji keterkaitan tersebut, digunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan transformasional dan karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Faktor kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Faktor stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Faktor stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Faktor komitmen

organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Selain diperoleh hubungan langsung, diperoleh pula hubungan tidak langsung antar faktor. Hubungan tersebut yaitu pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasi serta kepemimpinan transformasional, karakteristik pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. Namun, untuk faktor stres kerja diketahui tidak memiliki hubungan apapun terhadap kepuasan kerja.

Kata Kunci: Structural Equation Modeling, Turn Over Intention, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi

1. PENDAHULUAN

Perusahaan sekarang dan masa yang akan datang mulai menghadapi lingkungan yang dinamis, yang mengalami perubahan yang pesat. Adanya hal tersebut diperlukan pertimbangan terbaik didalam membawa perusahaan atau organisasi menuju masa depan yang lebih baik. Keberhasilan perusahaan, bukan hanya semata-mata dilihat dari perencanaan bisnis yang dibuat. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia yang akan menjadi point utama.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya bergantung kepada sarana dan prasarana yang ada tetapi juga bergantung pada kinerja karyawannya. Setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawannya dengan memenuhi kebutuhan karyawan, memberikan perhatian terhadap bawahan dan menempatkan karyawan sebagai bagian dari asset perusahaan, tidak semata-mata menganggap karyawan sebagai pekerja saja. Kondisi yang demikian itu dapat terwujud melalui pendekatan kepuasan kerja.

Kinerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Fenomena yang seringkali terjadi adalah kinerja suatu perusahaan yang telah demikian bagus dapat dirusak, baik secara langsung maupun tidak, oleh berbagai perilaku karyawan yang sulit dicegah terjadinya. Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah

keinginan berpindah (*turnover intentions*) yang berujung pada keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya.

Menurut Shaw (2010), beberapa strategi yang dapat dicoba oleh departemen SDM untuk meminimalisir *turnover intention*:

- a. Motivasi, Bonus, cuti, kendaraan dinas atau fasilitas lainnya adalah berbagai alat perusahaan sebagai bentuk *reward* bagi karyawan apabila mereka telah bekerja dengan baik.
- b. Menjaga kepuasan karyawan Berkaitan dengan hal ini, seorang pemimpin mempunyai tugas yang cukup sulit yakni mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai karyawannya. Penting bagi seorang pemimpin untuk sering melakukan komunikasi dengan karyawan untuk mendengar apa yang mereka butuhkan. Berbagai macam survei untuk mengetahui opini karyawan juga sudah mulai banyak berkembang akhir-akhir ini. Memahami keinginan karyawan akan membantu pemimpin perusahaan menetapkan benefit yang tepat sasaran, demi terciptanya *turnover intention* yang rendah.
- c. Rekrutmen

Program penurunan tingkat *turnover intention* dapat dilakukan dari mulai tahap rekrutmen karyawan. Caranya adalah dengan menarik perhatian kandidat-kandidat yang berkualitas. Melakukan proses seleksi yang ketat dan terstruktur. Beberapa cara dapat dilakukan, dari paling murah hingga

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang memakan *budget* tinggi. Misalnya, menawarkan peta jenjang karir yang jelas, menawarkan tunjangan yang menarik, kesempatan pergi ke luar negeri, dan cara-cara kreatif lainnya.

Saat ini tingginya tingkat *turnover intentions* telah menjadi masalah serius bagi banyak perusahaan. Menurut Mobley et al (1978) menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab keinginan pindah kerja (*turnover intention*) adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Individu

Organisasi adalah wadah yang memiliki tujuan yang ditentukan secara bersama oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya interaksi yang berkesinambungan dari unsur-unsur organisasi. Karakter individu yang mempengaruhi keinginan pindah kerja antara lain seperti umur, pendidikan, status perkawinan.

b. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja dapat meliputi lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan fisik meliputi keadaan suhu, cuaca, konstruksi, bangunan, dan lokasi pekerjaan. Sedangkan lingkungan sosial meliputi sosial budaya di lingkungan kerjanya, dan kualitas kehidupan kerjanya.

c. Kepuasan Kerja

Pada tingkat individual, kepuasan merupakan variabel psikologi yang paling sering diteliti dalam suatu model *intention to leave*. Aspek kepuasan yang ditemukan berhubungan dengan keinginan individu untuk meninggalkan organisasi meliputi kepuasan akan gaji dan promosi, kepuasan atas supervisor yang diterima, kepuasan dengan rekan kerja dan kepuasan akan pekerjaan dan isi kerja.

d. Komitmen organisasi

Perkembangan selanjutnya dalam studi *intention to leave* memasukkan

konstruk komitmen organisasional sebagai konsep yang turut menjelaskan proses tersebut sebagai bentuk perilaku, komitmen organisasional dapat dibedakan dari kepuasan kerja. Komitmen mengacu pada respon emosional (*affective*) individu kepada keseluruhan organisasi, sedangkan kepuasan mengarah pada respon emosional atas aspek khusus dari pekerjaan.

Salah satu elemen penting dalam suatu organisasi adalah adanya sumber daya manusia yang mampu menggerakkan seluruh aktivitas guna pencapaian tujuan pada organisasi tersebut. Hal ini menandakan bahwa diperlukan adanya proses pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di dalam suatu organisasi. Namun, masalah yang sering kali dihadapi adalah adanya faktor sikap dan perilaku karyawan yang tidak dapat dikendalikan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dapat dikarenakan organisasi yang menaunginya kurang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku individu tersebut. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu organisasi yaitu karakteristik individu, motivasi individu, imbalan, dan stres kerja.

Selain itu, karakteristik pekerjaan itu sendiri juga mampu memicu pembentukan perilaku dari seorang individu. Hal ini menandakan bahwa komitmen organisasi perlu dibangun guna meningkatkan faktor keterikatan antara individu dan organisasi. Faktor lain yang cukup kuat mempengaruhi perilaku individu adalah peran dari seorang pemimpin dan pola kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang baik akan memfokuskan dirinya pada beberapa aspek, seperti “bagaimanakah dia”, “apa yang diketahuinya”, serta “apa yang dilakukannya”.

Tidak berhasilnya suatu organisasi dalam melakukan proses pengelolaan perilaku individu akan berujung pada adanya intensi *turnover* dari karyawannya. *Turnover intention* merupakan keinginan dari seorang karyawan untuk berpindah dari organisasi satu ke organisasi lainnya. Jika dikaitkan antara faktor pemicu timbulnya perilaku individu dengan bentuk dari perilaku individu yang ditunjukkan pada organisasi, maka intensi *turnover* seorang individu berada pada ujung keterkaitan ini. *Turnover intention* dari seorang individu merupakan dampak terburuk dari ketidakmampuan suatu organisasi dalam mengelola perilaku individu. PT “ABC” merupakan salah satu Group PT “X” Indonesia, Tbk yang bergerak pada bidang penyedia jasa layanan informasi dan komunikasi. Layanan *call center* yang merupakan salah satu pilar bisnis awal dari PT “ABC”. Sebagai salah satu bentuk sinergi antara PT “X” dengan seluruh anggota dari X Group, maka PT “ABC” untuk terus meningkatkan pelayanan pada pelanggan dengan memanfaatkan layanan *call center (inbound dan outbound call)* yang merupakan proses bisnis. PT “ABC” juga bertanggungjawab dalam penyediaan tenaga kerja *inbound* dan *outbound call* yang sering disebut *agent*. Seorang *agent*, berkomitmen sepenuhnya pada PT “ABC” dan bersedia untuk memenuhi target kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang *agent* tersebut, departemen *human resource* PT “ABC” menemukan adanya beberapa *agent* yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya (*resign*) pada periode tahun 2016. Berdasarkan informasi tersebut, didapatkan bahwa setiap bulan selalu terdapat *agent* yang keluar (*resign*) dari pekerjaannya. Hal ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pihak manajemen,

dikarenakan mampu membuat proses *inbound* dan *outbound call* terhambat.

Kepuasan kerja menurut Roelen (2008) diukur dengan menggunakan lima indikator, antara lain:

- a. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan seseorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik.
- b. Kepuasan dengan gaji, yaitu upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam posisi kerja yang sama.
- c. Kepuasan dengan sikap atasan, yaitu kemampuan atasan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para bawahan.
- d. Kepuasan dengan rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara teknis cakap dan secara sosial mendukung tugas rekan kerja lainnya.
- e. Kepuasan dengan promosi atau perspektif karir, yaitu kesempatan seseorang untuk meraih atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi.

Tingginya tingkat keinginan berpindah karyawan dapat disebabkan beberapa variabel antara lain kepuasan kerja (Zhang dan Feng, 2011) Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing dimensi komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:

- a. Komitmen afektif (*affective commitment*) adalah perasaan cinta pada suatu organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.
- b. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*) adalah perasaan berat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.

- c. Komitmen normatif (*normative commitment*) adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan.

Terdapat banyak alasan yang dikemukakan *agent* dimana sebagian besar alasan tersebut merupakan faktor diluar organisasi. Namun lebih dari itu, fenomena *turnover intention* yang dilakukan oleh para *agent* ini dapat pula disebabkan oleh kurang efektifnya pengelolaan perilaku individu di dalam organisasinya. Pemicu timbulnya perilaku individu seperti karakteristik pekerjaan, stres kerja, dan pola kepemimpinan transformasional dari seorang pemimpin yang akan memicu timbulnya kepuasan kerja serta komitmen organisasi sehingga mampu

berujung pada fenomena *turnover intention*, harus diidentifikasi sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut mampu meminimalisasi dampak-dampak buruk akibat *turnover intention* dari sejumlah *agent*. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *turnover intention* pada *agent call center* PT ABC menggunakan metode *Structural Equation Modelling*. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu stres kerja, karakteristik pekerjaan, kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Pengambilan data dilakukan pada *agent inbound dan outbound call di layanan dedicated line* PT “ABC”.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian diawali dengan mengembangkan model teoritis berdasarkan hasil studi literatur. Berikut ini merupakan model teoritis dari penelitian.

Sedangkan hipotesis awal berdasarkan model teoritis yang dibangun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Keterangan
Hipotesis 1	Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan pada kepuasan kerja
Hipotesis 2	Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan pada komitmen organisasi
Hipotesis 3	Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan pada <i>turnover intention</i>
Hipotesis 4	Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan kerja
Hipotesis 5	Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan pada komitmen organisasi
Hipotesis 6	Karakteristik pekerjaan berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>turnover intention</i>
Hipotesis 7	Kepemimpinan transformational berpengaruh positif dan signifikan kepada kepuasan kerja
Hipotesis 8	Kepemimpinan transformational berpengaruh positif dan signifikan pada komitmen organisasi
Hipotesis 9	Kepemimpinan transformational berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>turnover intention</i>
Hipotesis 10	Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan pada komitmen organisasi
Hipotesis 11	Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>turnover intention</i>
Hipotesis 12	Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan pada <i>turnover intention</i>

3.1. Metode Pengumpulan Data**3.1.1. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi dan kuisisioner sedang data sekunder melalui literatur. Jenis data dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT ABC sebagai populasi. Pengumpulan data diawali dengan menentukan jumlah sampel penelitian. Heir et al, dalam Waluyo (2011) menyatakan bahwa penentuan jumlah sampel adalah sebesar 5 kali dari banyaknya variabel indikator. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu jumlah sampel = 5 x jumlah variabel indikator

$$= 5 \times 22$$

$$= 110 \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa sampel yang harus diambil adalah sebanyak 110 sampel.

3.1.2. Perancangan Kuisisioner

Pertanyaan dalam kuisisioner dirancang berdasarkan variabel indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang digunakan dalam kuisisioner ini adalah sebagai berikut:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 3.2. Item Pertanyaan Kuisisioner

No	Item Stres Kerja	Indikator
1	Ukuran Workstation (tempat kerja) membuat saya kurang leluasa dalam bekerja	Stressor Lingkungan Fisik
2	Suhu yang terlalu panas dan kebisingan yang berlebihan pada ruang kerja membuat saya tidak	
3	Pengaturan Workstation (tempat kerja) yang tidak tertata dengan baik cukup mengganggu saya dalam bekerja	
4	Privasi saya cukup terganggu akibat terlalu dekatnya workstation (tempat kerja) saya dengan rekan kerja	
5	Jika melihat keberhasilan orang lain, saya menemukan banyak kekurangan pada diri saya	Stressor Individu
6	Saya sering melakukan kesalahan yang membuat pekerjaan saya tidak selesai pada waktunya	
7	Terkadang saya merasa tidak senang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dikantor dikarenakan adanya masalah keluarga atau pribadi saya	
8	Tugas yang harus saya kerjakan setiap harinya sangat banyak sehingga seringkali membuat saya kelelahan	Stressor Kelompok
9	Saya merasa resah karena terdapat persaingan yang tidak sehat diantara rekan kerja	
10	Saya merasa tersinggung bila terdapat rekan kerja yang menegur kesalahan saya	
11	Terdapat hubungan yang tidak baik antara saya dan atasan saya	
12	Di perusahaan ini pekerjaan karyawan tidak di koordinasikan dengan baik sehingga menghambat pencapaian target	Stressor Organisasi
13	Target perusahaan dan tuntutan tugas terlalu tinggi sehingga memberatkan saya	
14	Dalam menjalankan tugas saya ditekan dengan banyak aturan	
15	Kerja keras saya tidak sebanding dengan hasil atau keuntungan yang saya terima	
16	Jabatan saya menjadi seorang agent sering kali membuat kecil hati	
No	Item Kepemimpinan Transformational	
1	Atasan membuat saya bangga menjadi rekan kerjanya	Pengaruh Ideal
2	Atasan membuat saya nyaman bekerja sama dengannya	
3	Saya sangat percaya pada apapun yang disarankan atasan saya	
4	Atasan selalu mengembangkan cara-cara khusus untuk menginspirasi saya dalam bekerja	Motivasi Inspiratif
5	Atasan selalu mendorong saya untuk sukses	
6	Atasan selalu memotivasi saya dan mengingatkan akan apa yang seharusnya saya lakukan dalam bekerja	
7	Atasan selalu memicu saya untuk berfikir mengenai hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan	Stimulus Intelektual
8	Atasan menghendaki saya menggunakan penalaran dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah	
9	Atasan memotivasi saya untuk selalu berfikir kreatif	
10	Atasan memberikan perhatian khusus kepada saya jika sedang mengalami kesulitan	Pertimbangan Individual
11	Atasan memberikan penghargaan jika saya mampu bekerja dengan sangat baik	
12	Atasan selalu membantu saya dalam mengembangkan kemampuan yang saya miliki	

No	Item Karakteristik Pekerjaan	
1	Saya menggunakan keahlian yang tinggi pada pekerjaan ini	Keragaman Skill
2	Pekerjaan ini sangat mudah dan dilakukan berulang-ulang	
3	Saya mampu menyelesaikan beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan ini dengan mudah	
4	Pekerjaan saya telah diatur sedemikian rupa	Identitas Tugas
5	Tugas dalam pekerjaan saya sangat jelas	
6	Apa yang saya lakukan berdampak besar pada perusahaan	Signifikansi Tugas
7	Pekerjaan saya berpengaruh cukup penting untuk keberlangsungan perusahaan kedepannya	
8	Pekerjaan saya berpengaruh pada pihak lain	
No	Item Kepuasan Kerja	
1	Pekerjaan saya memberikan semangat untuk berprestasi	Prestasi Kerja
2	Pekerjaan saya sangat menarik	
3	Pekerjaan saya sangat menyenangkan	
4	Saya benar-benar melakukan sesuatu yang berharga dalam pekerjaan saya	
5	Manajemen perusahaan saya telah terstruktur secara baik	Kebijakan Perusahaan
6	Top Level Management benar-benar mengerti pekerjaan mereka	
7	Karyawan mendapatkan dukungan yang baik dari perusahaan	
8	Perusahaan memiliki kebijakan promosi yang adil	Promosi
9	Peluang untuk di promosikan sangat tinggi	
10	Terdapat banyak peluang bagus pada perusahaan ini untuk karyawan yang ingin maju	
11	Saya berpeluang besar untuk di promosikan	
12	Atasan saya melibatkan ide-ide karyawan dalam pemecahan masalah tertentu	Supervisor
13	Atasan saya selalu adil pada saya	
14	Atasan saya memberikan penghargaan (hadiah) ketika saya bekerja dengan sangat baik	
15	Atasan saya selalu menepati janjinya	Gaji
16	Jika dibandingkan dengan pekerjaan yang sama di perusahaan lain, gaji saya cenderung tinggi	
17	Saya digaji dengan sesuai di perusahaan ini	
18	Penghasilan saya cukup untuk keperluan saya	

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

No	Item Komitmen Organisasi	
1	Saya sering membanggakan pada orang lain bahwa perusahaan ini merupakan tempat kerja yang bagus	Affective Commitment
2	Saya memiliki kesetiaan yang tinggi pada organisasi ini	
3	Saya bangga menceritakan kepada orang lain bahwa saya adalah bagian dari perusahaan	
4	Memilih untuk bekerja di perusahaan ini bukan merupakan suatu kesalahan	
5	Saya bersedia untuk bekerja lebih keras guna mensukseskan perusahaan ini	Normative Commitment
6	Saya menerima hampir seluruh pekerjaan agar dapat tetap bekerja di perusahaan ini	
7	Saya dapat bekerja di perusahaan lain selama jenis pekerjaannya sama	
8	Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan ini walaupun terjadi perubahan dalam perusahaan	
9	Saya sangat senang memilih perusahaan ini sebagai tempat bekerja	
10	Saya sangat peduli dengan nasib perusahaan ini	Continuance Commitment
11	Menurut saya, terdapat kesamaan antara prinsip diri saya dengan perusahaan	
12	Organisasi ini sangat menginspirasi saya untuk terus berprestasi	
13	Cukup banyak yang dapat saya peroleh dengan bergabung pada perusahaan ini	
14	Saya selalu merasa setuju dengan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan karyawan	
15	Menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik untuk bekerja	
No	Item Turn Over Intention	
1	Saya sering berfikir untuk meninggalkan pekerjaan ini	Saya Berfikir meninggalkan Organisasi
2	Saya akan mencari pekerjaan baru	Saya sedang mencari organisasi lain sebagai alternatif
3	Saya akan cepat meninggalkan perusahaan ini	Saya akan segera meninggalkan organisasi ini

3.2. Metode Analisis Data

Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan penyebaran kuisioner pada sampel penelitian. Hasil pengumpulan data tersebut diolah menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui pemetaan jawaban serta profil responden. Selain itu dilakukan pula pembuatan indentifikasi model dengan menggunakan model persamaan struktural. Setelah data telah memenuhi seluruh pengujian model yang telah disyaratkan, maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) dan kemudian dilakukan pengujian SEM serta pengujian hipotesis, Sarjono (2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Penelitian pada perusahaan ABC menggunakan 110 sampel dengan 5 variabel dengan 22 indikator terhadap *turnover intention*.

4.1.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sun rage*, *kurtosis* dan masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2011).

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif - Stres Kerja

Deskriptif Stress Kerja		
Indikator	Pertanyaan	Mean
Stressor Lingkungan Fisik (SK1)	1	2,53
	2	
	3	
	4	
Stressor Individu (SK2)	5	3,11
	6	
	7	
	8	
Stressor Kelompok (SK3)	9	3,54
	10	
	11	
Stressor Organisasi (SK4)	12	2,89
	13	
	14	
	15	
	16	
Rata-rata		3,02

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif - Kepemimpinan Transformatif

Deskriptif Kepemimpinan Transformatif		
Indikator	Pertanyaan	Mean
Pengaruh Ideal (KT1)	1	2,43
	2	
	3	
Motivasi Inspiratif (KT2)	4	2,29
	5	
	6	
Stimulus Intelektual (KT3)	7	2,25
	8	
	9	
Pertimbangan Individual (KT4)	10	2,64
	11	
	12	
Rata-rata		2,40

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif - Karakteristik Pekerjaan

Deskriptif Karakteristik Pekerjaan		
Indikator	Pertanyaan	Mean
Keragaman Skill (KP1)	1	2,61
	2	
	3	
Identitas Tugas (KP2)	4	2,28
	5	
Signifikansi Tugas (KP3)	6	1,91
	7	
	8	
Rata-rata		2,27

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif - Kepuasan Kerja

Deskriptif Kepuasan Kerja		
Indikator	Pertanyaan	Mean
Pekerjaan (KK1)	1	2,42
	2	
	3	
	4	
Kebijakan Perusahaan (KK2)	5	2,81
	6	
	7	
Promosi (KK3)	8	2,76
	9	
	10	
	11	
Supervisor (KK4)	12	2,78
	13	
	14	
	15	
Gaji (KK5)	16	3,44
	17	
	18	
Rata-rata		2,84

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif - Komitmen Organisasi

Deskriptif Komitmen Organisasi		
Indikator	Pertanyaan	Mean
Affective Commitment (KO1)	1	2,32
	2	
	3	
	4	
Normative Commitment (KO2)	5	2,48
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
Continuance Commitment (KO3)	11	2,59
	12	
	13	
	14	
	15	
Rata-rata		2,46

Tabel 4.6. Statistik Deskriptif - Turn Over Intention

Deskriptif Turn Over Intention		
Indikator	Pertanyaan	Mean
Saya Berfikir meninggalkan Organisasi (TI1)	1	3,04
Saya sedang mencari organisasi lain sebagai alternatif (TI2)	2	3,00
Saya akan segera meninggalkan organisasi ini (TI3)	3	3,29
Rata-rata		3,11

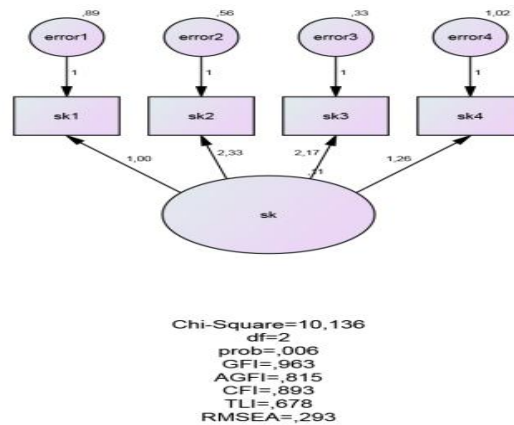
4.1.2. Identifikasi Model dan Model CFA

Identifikasi model merupakan kunci dalam menggunakan model persamaan struktural. Didalam CB-SEM penting bagi seorang peneliti untuk mengetahui apakah model yang

dibangun dengan data empiris yang dikumpulkan itu memiliki nilai yang unik atukah tidak sehingga model tersebut dapat diestimasi.

4.1.2.1. Faktor Stress Kerja

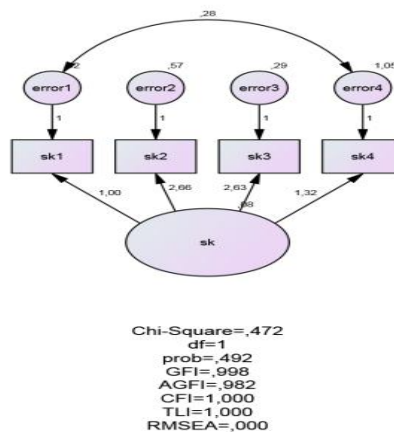
Berikut ini merupakan gambar dari model *confirmatory factor analysis* untuk faktor stres kerja.



Gambar 4.1. Model CFA Stres Kerja

Dari hasil model output diatas dapat dilihat bahwa model belum cukup fit dengan nilai *chi-squares* 10,136 dan probability $0,006 < 0,05$ serta *degrees of freedom* > 1 yaitu 2. Diketahui bahwa

terdapat ukuran *goodness of fit* yang bernilai marginal hal ini menandakan bahwa perlunya modifikasi dengan mengkorelasikan residualnya.



Gambar 4.2. Model CFA Stres Kerja (Modifikasi)

Setelah dilakukan model modifikasi, diketahui bahwa model fit terpenuhi dilihat dari *Chi-Square* 0,472 dan probability $0,492 > 0,05$. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesesuaian antara input observasi atau sesungguhnya dengan prediksi dari model yang diajukan. Selain itu, hasil CFA ini

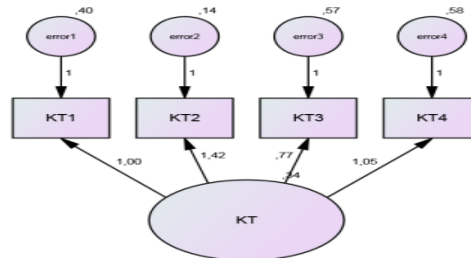
memperlihatkan bahwa seluruh variabel indikator dapat menerangkan faktor stres kerja dengan baik dan signifikan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.1.2.2. Faktor Kepemimpinan Transformasional

Berikut ini merupakan gambar dari model *confirmatory factor analysis* untuk kepemimpinan transformasional.

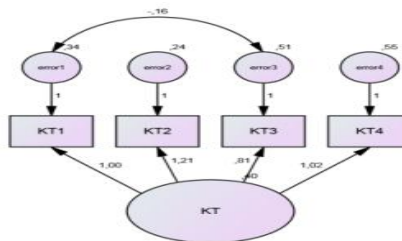


Chi-Square=10,348
Df=2
Prob=.006
GFI=.965
AGFI=.824
CFI=.945
TLI=.834
RMSEA=.180

Gambar 4.3. Model CFA Kepemimpinan Transformasional

Dari hasil model output diatas dapat dilihat bahwa model belum cukup fit dengan nilai *chi-squares* 10,348 dan *probability* $0,006 < 0,05$ serta *degrees of freedom* > 1 yaitu 2. Diketahui bahwa

terdapat ukuran *goodness of fit* yang bernilai marginal hal ini menandakan bahwa perlunya modifikasi dengan mengkorelasikan residualnya.



Chi-Square=.899
df=1
Prob=.343
GFI=.997
AGFI=.965
CFI=1,000
TLI=1,004
RMSEA=.000

Gambar 4.4. CFA Model Kepemimpinan Transformasional (Modifikasi)

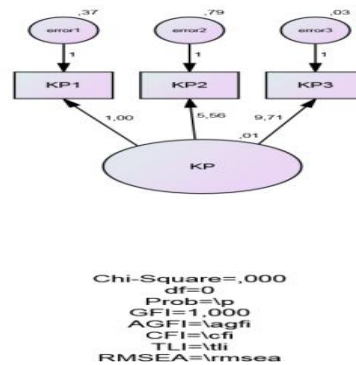
Setelah dilakukan model modifikasi, diketahui bahwa model fit terpenuhi dilihat dari *Chi-Square* 0,899 dan *probability* $0,343 > 0,05$. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesesuaian antara input observasi atau sesungguhnya dengan prediksi dari model yang

diajukan. Selain itu, hasil CFA ini memperlihatkan bahwa seluruh variabel indikator dapat menerangkan faktor Kepemimpinan transformasional dengan baik dan signifikan.

4.1.2.3. Faktor Pekerjaan

Karakteristik

Berikut ini merupakan gambar dari model *confirmatory factor analysis* untuk karakteristik pekerjaan.



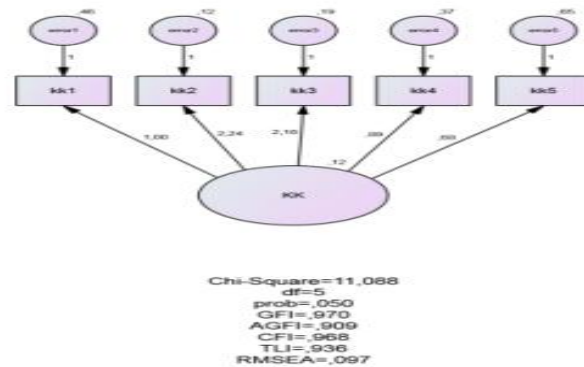
Gambar 4.5. Model CFA Karakteristik Pekerjaan

Berdasarkan Model CFA pada faktor karakteristik pekerjaan yang telah dilakukan di ketahui bahwa nilai *degree of freedom* (df) bernilai 0 sehingga dapat dipastikan model CFA pada faktor komitmen organisasi telah sesuai dimana variabel indikator pembentuk

karakteristik pekerjaan mampu menerangkan faktor dengan baik

4.1.2.4. Faktor Kepuasan Kerja

Berikut ini merupakan gambar dari model *confirmatory factor analysis* untuk kepuasan kerja.



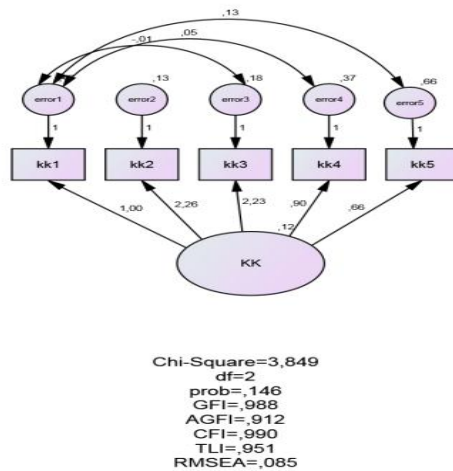
Gambar 4.6. Model CFA Kepuasan Kerja

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa model belum fit dengan nilai *chi-squares* 11,088 dan *probability* 0,05 = 0,05 serta *degrees of freedom* > 1 yaitu 5. Diketahui bahwa terdapat ukuran

goodness of fit yang bernilai marginal hal ini menandakan bahwa perlunya modifikasi dengan mengkorelasikan residualnya.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”



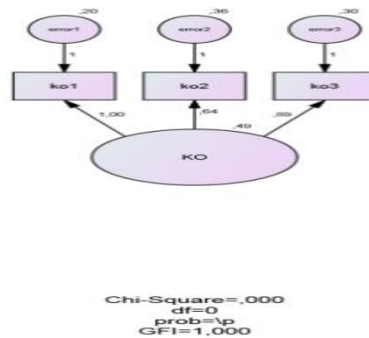
Gambar 4.7. Model CFA Kepuasan Kerja (Modifikasi)

Setelah dilakukan modifikasi hasil output diatas dapat dilihat bahwa model cukup fit dengan nilai *chi-squares* 3,849 dan *probability* 0,146 > 0,05 serta *degrees of freedom* > 1 yaitu 2. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesesuaian antara input observasi atau sesungguhnya dengan prediksi dari model yang diajukan. Selain itu, hasil CFA ini

memperlihatkan bahwa seluruh variabel indikator dapat menerangkan faktor kepuasan kerja dengan baik dan signifikan.

4.1.2.5. Faktor Komitmen Organisasi

Berikut ini merupakan gambar dari model *confirmatory factor analysis* untuk komitmen organisasi.



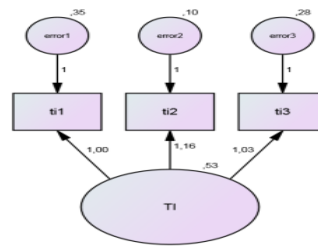
Gambar 4.8. Model CFA Komitmen Organisasi

Berdasarkan model CFA pada faktor komitmen organisasi yang telah dilakukan di ketahui bahwa nilai *degree of freedom* (df) bernilai 0 sehingga dapat dipastikan model CFA pada faktor komitmen organisasi telah sesuai dimana variabel indikator pembentuk komitmen

organisasi mampu menerangkan faktor dengan baik.

4.1.2.6. Faktor Turnover Intention

Berikut ini merupakan gambar dari model *confirmatory factor analysis* untuk *turnover intention*.



Chi-Square=.000
df=0
prob=>p
GFI=1.000

Gambar 4.9. Model CFA Turnover Intention

Berdasarkan model CFA pada faktor *turnover intention* yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai *degree of freedom* (df) bernilai 0 sehingga dapat dipastikan model CFA pada faktor *turnover intention* telah sesuai dimana variabel indikator pembentuk *turnover intention* mampu menerangkan faktor dengan baik.

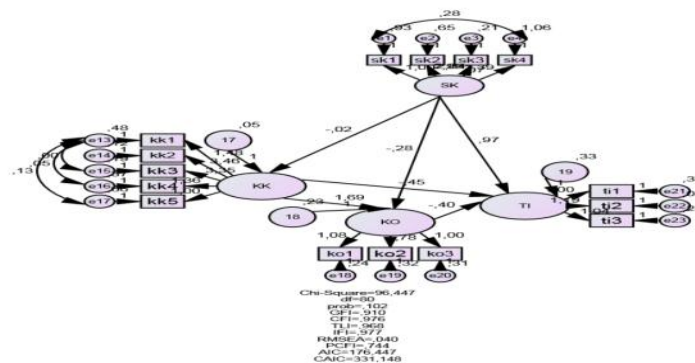
4.1.3. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Dalam SEM analisis faktor konfirmatori atau sering disebut CFA di gunakan untuk mengevaluasi model pengukuran yaitu untuk menguji

validitas dan reliabilitas konstruk laten. Dalam CFA, peneliti harus menentukan jumlah faktor dan hubungan antar faktor dengan konstruk laten berdasarkan basis teori (Brown 2006, p.1; Schumacher dan Lomax 2010, p.164).

4.1.3.1. Konstruk Type 1

Memberikan gambaran mengenai analisis faktor konfirmatori *second – order* konstruk *type 1* dengan menggunakan program AMOS yang terdiri dari empat konstruk dimensi yaitu stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention*.



Gambar 4.10. Konstruk Type 1

PROSIDING

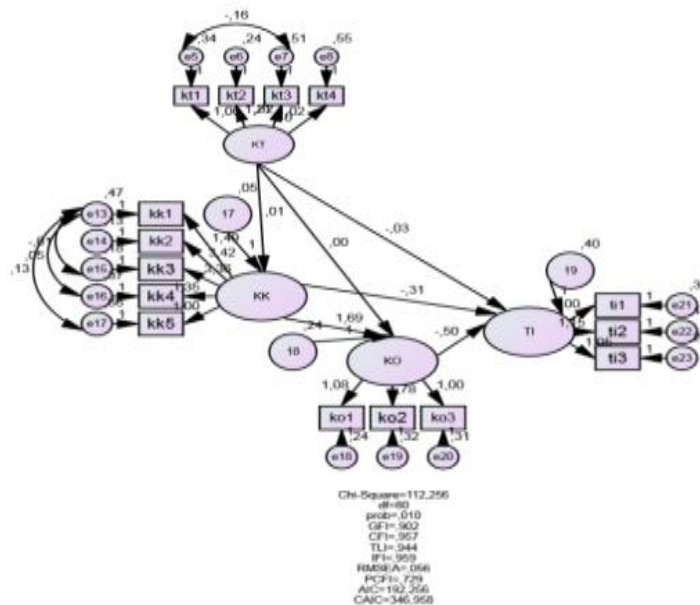
Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Berdasarkan CFA pada faktor konstruk dimensi stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention* diketahui bahwa nilai *degree of freedom* (df) bernilai 80, *Chi-Square* 96,447 dan *probability* 0,102 > 0,05 sehingga dapat dipastikan model CFA konstruk *type 1* valid dan reliabilitas dimana jumlah faktor dan hubungan antar faktor dengan konstruk laten berdasarkan basis teori mampu

menerangkan faktor dengan baik hasil analisis pada tabel > 0,7.

4.1.3.2. Konstruk Type 2

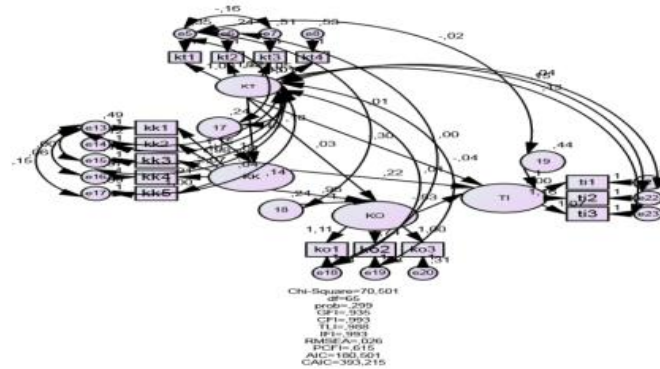
Memberikan gambaran mengenai analisis faktor *konfirmasi second - order* konstruk *type 2* dengan menggunakan program AMOS yang terdiri dari empat konstruk dimensi yaitu kepemimpinan *transformational*, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention*.



Gambar 4.11. Konstruk Type 2

Dari hasil output konstruk *type 2* kepemimpinan *transformational* diatas dapat dilihat bahwa model belum fit dengan nilai *chi-squares* 112,256 dan *probability* 0,010 < 0,05 serta *degrees of*

freedom > 1 yaitu 80. Diketahui bahwa terdapat ukuran *goodness of fit* yang bernilai *marginal* hal ini menandakan bahwa perlunya modifikasi dengan mengkorelasikan residualnya.



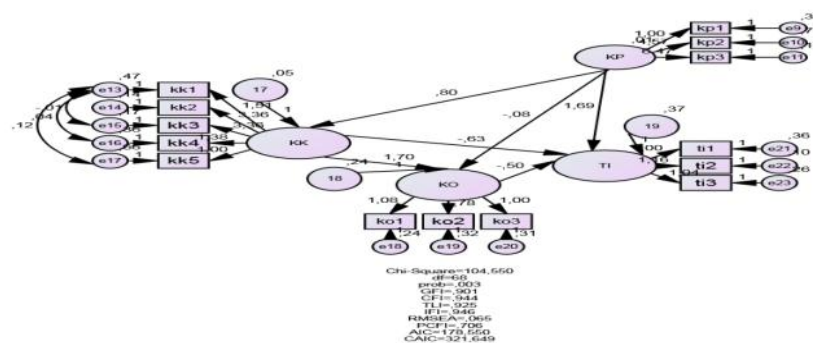
Gambar 4.12. Konstruk Type 2 (Modifikasi)

Berdasarkan modifikasi konstruk CFA *type 2* pada faktor dimensi kepemimpinan *transformational*, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention* diketahui bahwa nilai *degree of freedom* (df) bernilai 65, *Chi-Square* 70,501 dan *probability* 0,299 > 0,05 sehingga dapat dipastikan model CFA konstruk *type 2* valid dan reliabilitas dimana jumlah faktor dan hubungan antar faktor dengan konstruk laten berdasarkan basis teori mampu

menerangkan faktor dengan baik hasil analisis pada tabel > 0,7

4.1.3.3. Konstruk Type 3

Memberikan gambaran mengenai analisis faktor konfirmatori *second - order* konstruk *type 3* dengan menggunakan program AMOS yang terdiri dari empat konstruk dimensi yaitu karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention*.



Gambar 4.13. Konstruk Type 3

Dari hasil output konstruk CFA karakteristik pekerjaan diatas dapat dilihat bahwa model belum fit dengan

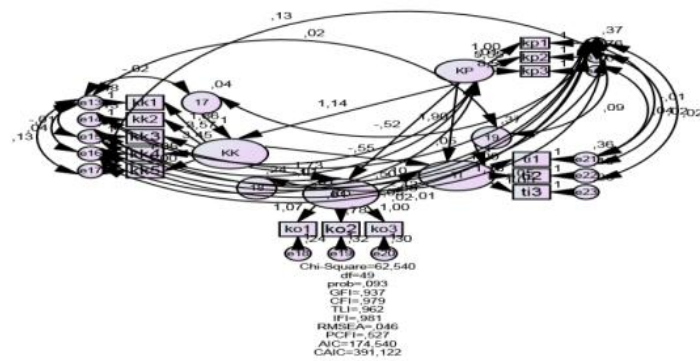
nilai *chi-squares* 104,550 dan *probability* 0,003 < 0,05 serta *degrees of freedom* > 1 yaitu 68. Diketahui bahwa terdapat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

ukuran *goodness of fit* yang bernilai marginal hal ini menandakan bahwa

perlu ada modifikasi dengan mengkorelasikan residualnya.



Gambar 4.14. Konstruk Type 3 (Modifikasi)

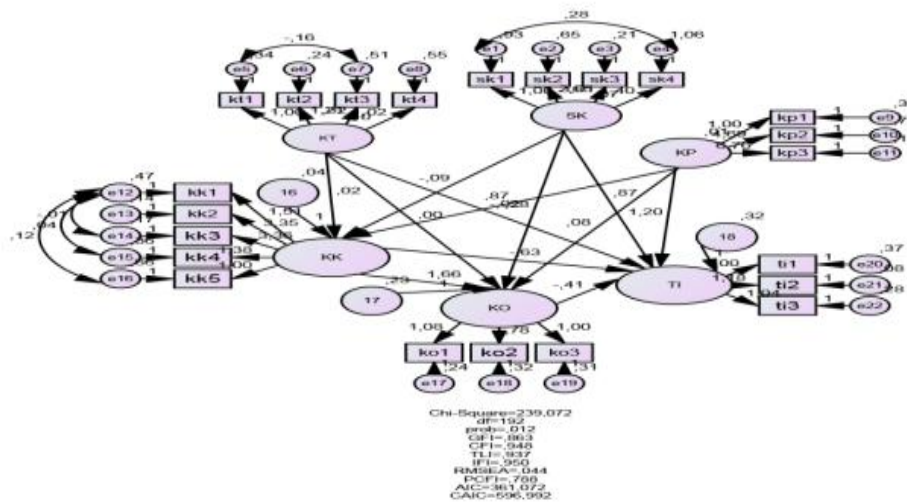
Berdasarkan modifikasi konstruk *type 3* pada faktor dimensi karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention* di ketahui bahwa nilai *degree of freedom* (df) bernilai 49, *Chi-Square* 62,540 dan *probability* 0,093 > 0,05 sehingga dapat dipastikan model CFA konstruk *type 3* valid dan reliabilitas dimana jumlah faktor dan hubungan antar faktor dengan konstruk laten berdasarkan basis teori mampu menerangkan faktor dengan baik hasil analisis pada tabel > 0,7.

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak pada program Amos untuk semua konstruk yang diamati dapat dilakukan dengan melihat output *assessment of normality*.

Nilai *cut - off* yang umumnya dipakai untuk menilai *assessment of normality* adalah nilai skew dan kurtosis berkisar 1,0 -1,5 (Schumacker dan Lomax 2010, p. 69) atau nilai critical ratio harus < 2,58. jika dilihat pada *assessment of normality* secara *univariate* dan *multivariate* nilai *c.r* < 2,58 sehingga konstruk pengamatan ini dapat di simpulkan bahwa data yang diestimasi terdistribusi normal.

4.1.4. Structural Equation Modelling (SEM)

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian *full model structural*, Mulyanto (2010) seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.15. Hasil Pengujian Full Model Structural

Tabel 4.7. Regression Weight Measurement Model pada Full Model Struktural

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Keterangan
Kepuasan Kerja	<---	Stres Kerja	-0,086	0,099	-0,867	0,386	Tidak Signifikan
Kepuasan Kerja	<---	Karakteristik Pekerjaan	0,865	0,613	1,412	0,158	Tidak Signifikan
Kepuasan Kerja	<---	Kepemimpinan Transformational	0,016	0,037	0,429	0,668	Tidak Signifikan
Komitmen Organisasi	<---	Stres Kerja	-0,283	0,255	-1,11	0,267	Tidak Signifikan
Komitmen Organisasi	<---	Karakteristik Pekerjaan	0,075	0,633	0,119	0,905	Tidak Signifikan
Komitmen Organisasi	<---	Kepemimpinan Transformational	-0,003	0,093	-0,027	0,978	Tidak Signifikan
Komitmen Organisasi	<---	Kepuasan Kerja	1,66	0,62	2,677	0,007	Signifikan
Turnover Intention	<---	Stres Kerja	0,875	0,41	2,132	0,033	Signifikan
Turnover Intention	<---	Karakteristik Pekerjaan	1,201	0,923	1,302	0,193	Tidak Signifikan
Turnover Intention	<---	Kepemimpinan Transformational	-0,017	0,098	-0,174	0,862	Tidak Signifikan
Turnover Intention	<---	Kepuasan Kerja	-0,625	0,445	-1,405	0,16	Tidak Signifikan
Turnover Intention	<---	Komitmen Organisasi	-0,412	0,153	-2,69	0,007	Signifikan

Berdasarkan tabel 4.7. dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal yang tidak terbukti berhubungan langsung secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya p-value yang bernilai diatas 10 %. Hubungan tersebut antara lain yaitu pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja, karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan transformational terhadap kepuasan kerja, stres kerja

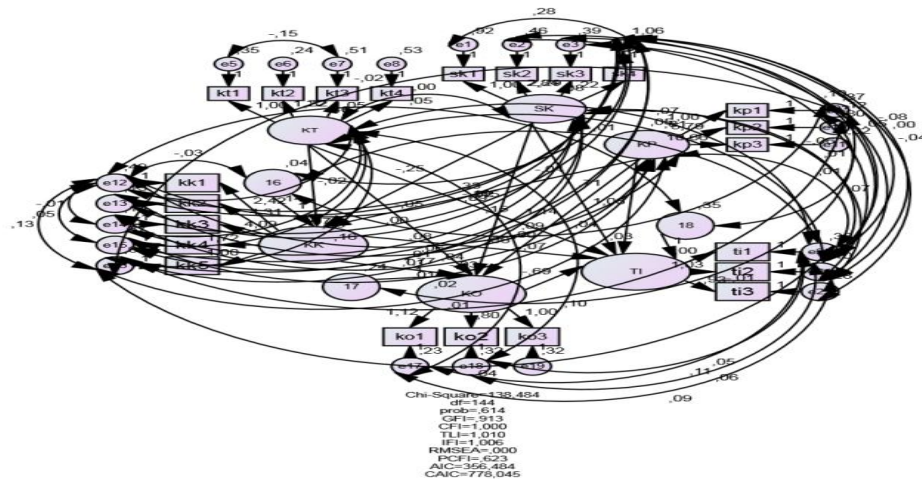
terhadap komitmen organisasi, karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasi, kepemimpinan transformational terhadap komitmen organisasi, karakteristik pekerjaan terhadap turnover intention, kepemimpinan transformational terhadap turnover intention, kepuasan kerja terhadap turnover intention.

Dikarenakan model teoritis awal kurang fit, maka langkah selanjutnya adalah

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

melakukan modifikasi model hingga menghasilkan model yang fit. Berikut ini merupakan pengujiannya.



Gambar 4.16. Hasil Modifikasi Full Model Structural

Berdasarkan pengujian tersebut didapatkan hasil kesesuaian dengan kriteria *goodfitnes of fit index* yang

4.2. Pembahasan

4.2.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 3.2. didapatkan bahwa stressor kelompok memiliki nilai rata-rata paling besar yaitu 3,54. selain itu jika didetailkan pada jenis pertanyaan yang menggambarkan stressor kelompok didapatkan bahwa stress individu (SK2) yang memiliki nilai rata-rata terbesar. Pertanyaan *stressor* individu (SK2) tersebut menjelaskan keresahan dikarenakan persaingan yang tidak sehat diantara rekan kerja dan terdapat hubungan yang tidak baik dengan atasan kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *stressor* kelompok dirasa memicu timbulnya stres kerja terutama pada persaingan yang tidak sehat diantara rekan kerja dan terdapat hubungan yang tidak baik dengan atasan kerja. Secara keseluruhan rata-rata untuk faktor stres kerja adalah 3,02. nilai ini menandakan

menunjukkan bahwa model dapat dikatakan telah sesuai.

bahwa tingkat stres kerja yang terjadi tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan tabel 3.3. didapatkan bahwa pertimbangan individual memiliki nilai rata-rata paling besar yaitu 2,64. selain itu jika didetailkan pada jenis pertanyaan yang menggambarkan pertimbangan individual didapatkan bahwa pengaruh ideal (KT1) yang memiliki nilai rata-rata terbesar. Pertanyaan pengaruh ideal tersebut (KT1) menjelaskan kebanggaan, kepercayaan dan kenyamanan bekerja terhadap atasan kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan individual dirasa memicu timbulnya pengaruh ideal terutama pada perhatian khusus yang diberikan atasan dan penghargaan diberikan bila bekerja dengan baik. Secara keseluruhan rata-rata untuk faktor kepemimpinan transformasional adalah 2,40. nilai ini menandakan bahwa tingkat

kepemimpinan transformasional yang terjadi tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan tabel 3.4. didapatkan bahwa gaji memiliki nilai rata-rata paling besar yaitu 3,44. selain itu jika didetailkan pada jenis pertanyaan yang menggambarkan pertimbangan gaji didapatkan bahwa kebijakan perusahaan (KK2) yang memiliki nilai rata-rata terbesar. Pertanyaan gaji tersebut menjelaskan bahwasannya manajemen terstruktur dengan baik dan top level manajemen benar-benar mengerti pekerjaan mereka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa gaji dirasa memicu timbulnya kebijakan perusahaan. Secara keseluruhan rata-rata untuk faktor kepuasan kerja adalah 2,84. Nilai ini menandakan bahwa tingkat kepuasan kerja yang terjadi tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan tabel 3.5. didapatkan bahwa *continuance commitment* memiliki nilai rata-rata paling besar yaitu 2,59. Selain itu jika didetailkan pada jenis pertanyaan yang menggambarkan pertimbangan *continuance commitment* didapatkan bahwa *normatif commitment* (KO2) yang memiliki nilai rata-rata terbesar. Pertanyaan *continuance commitment* menjelaskan inspirasi organisasi untuk berprestasi dan perusahaan terbaik untuk bekerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *normatif commitment* dirasa memicu timbulnya *continuance commitment* terutama pada inspirasi organisasi untuk berprestasi dan perusahaan terbaik untuk bekerja. Secara keseluruhan rata-rata untuk faktor komitmen organisasi adalah 2,46. Nilai ini menandakan bahwa tingkat komitmen organisasi yang terjadi tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan tabel 3.6. didapatkan bahwa meninggalkan organisasi memiliki nilai rata-rata paling besar yaitu 3,29. Selain itu jika didetailkan pada jenis pertanyaan yang menggambarkan pertimbangan meninggalkan organisasi didapatkan bahwa pola pikir (TII) yang

memiliki nilai rata-rata terbesar. Pertanyaan meninggalkan organisasi (TII) menjelaskan pola pikir karyawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *pola pikir karyawan* dirasa memicu timbulnya karyawan meninggalkan organisasi. Secara keseluruhan rata-rata untuk faktor *turnover intention* adalah 3,11. Nilai ini menandakan bahwa tingkat *turnover intention* yang terjadi tergolong cukup tinggi.

4.2.2. Analisis CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)

Berdasarkan pengujian CFA konstruk *type 1* yang telah dilakukan dan tampak pada gambar 3.10. didapatkan model berada dalam keadaan *identified*. Hal ini di karenakan nilai *degree of freedom* yang dihasilkan adalah lebih dari 1 yaitu sebesar 80 dan, hasil *goodness of fit* memenuhi *cut off value* nya. Hal ini menandakan bahwa terdapat kesesuaian antara input observasi dengan prediksi dari model yang diajukan. Selain melihat kecocokan model, diuji pula tingkat signifikansi masing-masing variabel indikator dalam menjelaskan faktornya dan hasilnya yaitu didapatkan bahwa *stressor* individu dan *stressor* kelompok merupakan pembentuk konstruk stres kerja terbukti *loading* faktor yang dihasilkan diatas 0,7 yang berarti memenuhi syarat validitas konvergen. Selain itu, dengan melihat nilai *construct reliability* untuk faktor stres kerja nya yaitu sebesar $0,861 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa *stressor* individu, dan *stressor* kelompok *reliable* terhadap faktor stres kerja dikarenakan nilai *construct reliability* yang dihasilkan sesuai dengan *cut off value* yang diisyaratkan. Berdasarkan nilai *loading factor* diketahui *stressor* kelompok memiliki kontribusi terbesar dengan nilai 0,864 dalam mengukur faktor stres kerja. Hal ini dikarenakan interaksi antara *agent* dengan rekan kerja maupun atasan dalam lingkungan kerja suatu *contact center* memicu timbulnya stres

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kerja yang cukup tinggi. Selain itu dengan berada dalam ruangan yang sama membuat frekuensi terjadi konflik antar rekan kerja semakin tinggi baik itu konflik yang timbul akibat interaksi ataupun pemantauan kerja yang dilakukan atasan (*supervisor*) terhadap *agent*.

Berdasarkan pengujian CFA konstruk *type 2* yang telah dilakukan dan tampak pada gambar 3.11. didapatkan model berada dalam keadaan *over identified*. Hal ini di karenakan nilai *degree of freedom* yang dihasilkan adalah lebih dari 1 yaitu sebesar 80, maka pengujian perlu dilanjutkan pada hasil *goodness of fit* yang belum memenuhi *cut off value* nya. Hal ini menandakan bahwa belum terdapat kesesuaian antara input obeservasi dengan prediksi dari model yang diajukan. Selain melihat kecocokan model, diuji pula tingkat signifikansi masing-masing variabel indikator dalam menjelaskan faktornya dan hasilnya yaitu didapatkan bahwa bahwa motivasi inspiratif dan pengaruh ideal merupakan pembentuk konstruk dimensi kepemimpinan *transformational* terbukti *loading faktor* yang dihasilkan diatas 0,7 yang berarti memenuhi syarat validitas konvergen. Selain itu, dengan melihat nilai *construct reliability* untuk faktor kepemimpinan *transformational* yaitu sebesar 0,508 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa motivasi inspiratif dan pengaruh ideal terhadap faktor kepemimpinan *transformational* dikarenakan nilai *construct reliability* yang dihasilkan sesuai sesuai dengan *cut off value* yang di isyaratkan. Berdasarkan nilai *loading factor* diketahui motivasi inspiratif dan pengaruh ideal memiliki kontribusi dalam mengukur faktor kepemimpinan *transformational*. Hal ini dikarenakan atasan memberikan motivasi dan inovasi cara kerja dalam pengembangan inspirasi lingkungan kerja agar tidak memicu timbulnya ketidaknyamanan dalam bekerja.

Berdasarkan pengujian CFA konstruk *type 3* yang telah dilakukan dan tampak pada gambar 3.13. didapatkan model berada dalam keadaan *over identified*. Hal ini di karenakan nilai *degree of freedom* yang dihasilkan adalah lebih dari 1 yaitu sebesar 68, maka pengujian perlu dilanjutkan pada hasil *goodness of fit* yang belum memenuhi *cut off value* nya. Hal ini menandakan bahwa belum terdapat kesesuaian antara input observasi dengan prediksi dari model yang diajukan. Selain melihat kecocokan model, diuji pula tingkat signifikansi masing-masing variabel indikator dalam menjelaskan faktornya dan hasilnya yaitu didapatkan bahwa bahwa signifikansi tugas merupakan pembentuk konstruk dimensi karakteristik pekerjaan yang terbukti *loading faktor* yang dihasilkan diatas 0,7 yang berarti memenuhi syarat validitas konvergen. Selain itu, dengan melihat nilai *construct reliability* untuk faktor karakteristik pekerjaan yaitu sebesar 0,282 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa signifikansi tugas terhadap faktor karakteristik pekerjaan dikarenakan nilai *construct reliability* yang dihasilkan sesuai sesuai dengan *cut off value* yang diisyaratkan. Berdasarkan nilai *loading factor* diketahui signifikansi tugas memiliki kontribusi dalam mengukur karakteristik pekerjaan. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan seorang *agent call center* berpengaruh pada pihak lain, dan berpengaruh cukup penting dampaknya untuk perusahaan.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan aplikasi AMOS (Hengky Latan (2010) Santoso (2014) dalam metode *structural equation modelling* yang telah dilakukan, maka didapatkan 1 buah hipotesis yang diterima yaitu H12. Sedangkan 11 hipotesis sisanya yaitu H1, H2, H3, H4, H5, H6,H7, H8, H9, H10 dan H11 tidak terbukti kebenarannya

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

a. Pengaruh variabel-variabel indikator pada masing-masing faktornya akan diuraikan sebagai berikut.

1) Faktor stres kerja

Variabel indikator *stressor* individu dan *stressor* kelompok, terbukti signifikan dalam mengukur faktor stres kerja. Sedangkan variabel indikator *stressor* lingkungan fisik dan *stressor* organisasi tidak terbukti signifikan dalam mengukur faktor stres kerja.

2) Faktor kepemimpinan transformasional

Variabel indikator motivasi inspiratif, dan pengaruh ideal dan pertimbangan individual terbukti signifikan dalam mengukur faktor kepemimpinan transformasional. Sedangkan stimulus intelektual tidak terbukti signifikan dalam mengukur kepemimpinan transformasional.

3) Faktor karakteristik pekerjaan

Variabel indikator signifikansi tugas, dan keragaman skill terbukti signifikan dalam mengukur faktor karakteristik pekerjaan. Sedangkan variabel indikator identitas tugas tidak terbukti signifikan dalam mengukur faktor karakteristik pekerjaan.

4) Faktor kepuasan kerja

Variabel indikator prestasi kerja, kebijakan perusahaan, dan promosi terbukti signifikan dalam mengukur faktor kepuasan kerja. Sedangkan variabel indikator *supervisor* dan gaji tidak terbukti signifikan dalam mengukur faktor kepuasan kerja.

5) Faktor komitmen organisasi

Variabel indikator *affective commitment*, *continuance commitment* dan *normative commitment* terbukti signifikan

dalam mengukur faktor komitmen organisasi.

6) Faktor *Turnover Intention*

Variabel indikator berfikir meninggalkan organisasi, dan mencari pekerjaan baru terbukti signifikan dalam mengukur faktor *turnover intention*.

b. Pengaruh antar faktor dalam *structural equation modelling* akan diuraikan sebagai berikut.

1) Faktor Komitmen Organisasi berpengaruh negatif dan signifikan pada *turnover intention*.

2) Faktor kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan *turnover intention* berpengaruh tidak langsung terhadap stres kerja, kepemimpinan transformasional dan karakteristik pekerjaan.

5.2. Saran

Rekomendasi yang dapat diusulkan pada PT “ABC” untuk komitmen organisasi pada para *agent* adalah meningkatkan *normative commitment* pada *agent* dengan menanamkan persepsi bahwa berkomitmen merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki sejak awal bergabung dengan perusahaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun kepercayaan antara *agent* dan pihak manajemen, melibatkan ide *agent* dalam penanganan masalah tertentu, pemberian penghargaan bagi *agent* yang bekerja sesuai target, menciptakan lingkungan kerja dengan kompetisi yang sehat guna meningkatkan kinerja *agent*, menghargai perbedaan kesuksesan antar *agent*, memberikan saran dan bantuan kepada *agent* dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta memandang *agent* sebagai *partner* kerja yang strategis. Tindakan-tindakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan komitmen *agent* pada perusahaan sehingga *agent* akan berpikir berulang kali untuk meninggalkan perusahaan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

DAFTAR PUSTAKA

- Andina Gustria Caesary. (2012). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Turnover Intention* Pada *Agent Outbound Call* PT Infomedia Nusantara Menggunakan Metode *Structural Equation Modeling*”, Diakses dari http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-18384-Abstract_id.pdf.
- Ana Sri Wahyuni. (2014). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *TurnOver Intention* (Keinginan Berpindah) Karyawan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi, *Jurnal Rekayasa Sipil* Vol. 8 No 2 - 2014 ISSN 1978 – 5658. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang.
- Cut Zurnali. (2010). “*Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation: Knowledge Worker - Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia di Masa Depan*”. Penerbit Unpad Press, Bandung.
- Ghazali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang.
- Hengky Latan. (2013). *Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi Amos 21.0*. Edisi Pertama, Bandung; ALFABETA cv. Edi Riadi. (2013). *Aplikasi Lisrel untuk Penelitian Analisa Jalur*. Edisi Pertama. Yogyakarta; Andi Yogyakarta.
- Haryadi Sarjono dan Winda Julianita. (2015). *Structural Equation Modeling (SEM) Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Jakarta; Salemba Empat.
- Heru Mulyanto dan Anna Wulandari. (2010). *Penelitian Metode & Analisis*. Edisi Pertama. Semarang; Agung cv.
- Mobley, Horner, & Hollingsworth. (1978). *The relationship between human resource practices and Employee retention in public organisations: an exploratory Study conducted in the united arab emirates*. *Arab:International Journal of Business and Social Science*.
- Roelen, C.A.M., (2008). Which work factors determine job Satisfaction. *International Journal of Industrial Ergonomics*.
- Robbins, S.P, dan Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat
- Singgih Santosa. (2014). *Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22*, Edisi Pertama, Jakarta; PT Elex Media Komputindo.
- Singgih Santoso. (2012). *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Edisi Pertama. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.
- Shaw, C. (2010). *How to Improve Employee Retention*. Parature, 10-12.

- Zhang Y and Feng X. 2011. *The relationship between job satisfaction, burnout, and turnover intention among physicians from urban state-owned medical institutions in Hubei, China: a cross-sectional study. BMC Health Services Research* 11: 235.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PENERAPAN VALUE CHAIN KOMODITAS BERAGAM
DALAM UPAYA Mendukung PROGRAM KEUANGAN
BERKELANJUTAN**

M. Faisal

Universitas Trilogi, Jakarta

Email: m.faisal@universitas-trilogi.ac.id

ABSTRACT

Diverse commodities value chain is a breakthrough in efforts to accelerate the adoption of technologies for the development of a pilot model in accelerating the transfer of technology to the rural people. Value Chain Commodities Diverse is to integrate the various business cluster commodities constructed involves several sub-systems (components) or institutions, which Farmers Group, BDS (Business Development Services) and the Institute of Business Financing (Cooperative Bank or LJK) which aims to support each other to create synergy and provide the energy source for life in the system of mutual support, environmentally friendly and sustainable manner to preserve the area. This paper is a literature study which refers to empirical evidence, books and information and actual fact the result of an action research. Action Research is an attempt to study the problems that come up that aims to direct, correct, and evaluate the decisions and actions of the organization. This paper aims to provide inputs and technical considerations to the central or local government in taking measures and strategic policy to address the dynamics of the current situation, which is to steer the agricultural sector and its financing to be able to move efficiently and without waste, encouraging a climate conducive to poverty alleviation economic growth, support the development of environmentally friendly, improving durability and competitiveness Financing Institutions, as well as keeping the earth Indonesia from chemical damage so that communities benefit from this earth for the eternal welfare, the principle remains the national interest.

Key Words: Sustainable, Local Wisdom, Economic Growth, Poverty, Welfare

ABSTRAK

Value chain komoditas beragam adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat pedesaan. Value Chain Komoditas Beragam adalah mengintegrasikan berbagai klaster bisnis komoditi dibangun melibatkan beberapa sub sistem (komponen) atau institusi, yaitu Kelompok Tani, BDS (Business Development Services) dan Lembaga Pembiayaan Usaha (Koperasi, Bank atau LJK) yang bertujuan untuk saling mendukung menciptakan sinergi dan memberi sumber energi untuk kehidupan di dalam sistem yang saling mendukung, ramah lingkungan dan dapat melestarikan wilayah secara berkelanjutan. Karya ilmiah ini merupakan suatu literature study yang mengacu pada bukti-bukti empiris, buku serta informasi dan fakta aktual hasil dari suatu action research. Action Research merupakan suatu upaya untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoreksi, dan mengevaluasi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan organisasi tersebut. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberi masukan dan pertimbangan teknis kepada pemerintah pusat atau

daerah dalam pengambilan langkah dan kebijakan strategis untuk menyikapi dinamika situasi terkini, yaitu untuk mengarahkan sektor pertanian dan pembiayaannya agar mampu bergerak efisien dan tanpa limbah, mendorong iklim yang kondusif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, mendukung pembangunan ramah lingkungan, meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Pembiayaan Usaha, serta menjaga bumi Indonesia dari kerusakan kimia sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari bumi ini untuk kesejahteraan yang abadi, dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional.

Kata Kunci: Berkelanjutan, Kearifan lokal, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Survei Ekonomi OECD Indonesia bulan Maret 2015, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan tetapi kondisi geografis dan infrastruktur transportasinya yang masih tertinggal telah menghambat negara tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan yang masih kurang tepat tersebut telah mengakibatkan penurunan dalam sektor energi. Sektor pertanian mengalami perlambatan produktivitas, insentif yang kurang tepat sasaran terhadap tanaman pangan pokok (seperti beras, jagung dan kacang kedelai) dan kurangnya diversifikasi. Permasalahan lingkungan hidup, termasuk emisi gas rumah kaca dan penebangan hutan, semakin diperparah oleh bahan bakar fosil dan ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pesan utama dari Survei Ekonomi ini adalah bahwasanya sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara lebih baik dengan meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian. Adapun rekomendasi dari Survei Ekonomi ini dalam mengelola sumber daya alam dan menanggulangi

degradasi lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatkan produktivitas pertanian dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan, termasuk melalui perjanjian antara petani kecil dan perkebunan besar. Tingkatkan akses petani terhadap kredit dengan mempercepat pemberian hak atas tanah (*land titling*). Turunkan harga pangan dengan cara menurunkan pembatasan perdagangan.
- b. Gunakan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum dalam mencegah perambahan hutan, penebangan dan pertambangan ilegal.
- c. Kurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan energi bersih (*clean power*) secara lebih lanjut, khususnya energi panas bumi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, mencantumkan delapan misi pembangunan nasional dengan misi keenam adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Misi keenam ini mencakup antara lain:

- a. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- b. Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; dan
- c. Pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 mencantumkan aspek lingkungan sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan dan merekomendasikan lebih lanjut untuk mengembangkan aspek lingkungan sebagai salah satu pilar utama setara dengan aspek ekonomi dan sosial. Dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan ekonomi, disebutkan juga pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan ketahanan energi sebagai prioritas pembangunan ekonomi. (*Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019*, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014).

Roadmap Sustainable Finance (roadmap) berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk Industri Jasa Keuangan (IJK) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap* ini akan menjadi acuan bagi OJK dan pelaku IJK serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. *Roadmap* menjabarkan tiga rencana kerja strategis *sustainable finance* yakni peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup; peningkatan *demand* (permintaan) bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup; dan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bentangan lahan pertanian dan lahan-lahan perkebunan dengan pekerjaan mayoritas masyarakatnya sebagai petani, jika potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka akan banyak membantu masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Selain hasil pertanian dan perkebunan, daerah yang kaya ini memiliki potensi dan dapat dimanfaatkan serta dibuat produktif untuk peternakan, perikanan, dan lain-lainnya. Diantaranya adalah potensi sumberdaya untuk kebutuhan pangan, pakan ternak dan ikan, pupuk organik/kompos dan pestisida organik serta biogas. Berlimpahnya hamparan pakan limbah (hasil ikutan) tanaman pertanian dan perkebunan yang terdapat di ladang-ladang penduduk merupakan nilai lebih bagi usaha ternak, pembuatan pupuk dan pakan ikan karena limbah merupakan kebutuhan utama sebagai kompos, pakan ternak dan ikan yang mudah dicari dan tidak memerlukan biaya besar dalam mendapatkannya.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2010), model integrasi tanaman ternak yang dikembangkan di lokasi beberapa daerah dan negara berorientasi pada konsep “*zero waste production system*” yaitu seluruh limbah dari ternak dan tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali ke dalam siklus produksi. Komponen usahatani dalam model ini meliputi usaha ternak sapi potong, tanaman pangan (padi atau jagung), hortikultura (sayuran), perkebunan, (tebu) dan perikanan (lele, gurami, nila). Limbah ternak (kotoran sapi) diproses menjadi kompos & pupuk organik granuler serta biogas, limbah pertanian (jerami padi, batang & daun jagung, pucuk tebu, jerami kedelai dan kacang tanah) diproses menjadi pakan. Gas-bio dimanfaatkan untuk keperluan memasak, sedangkan limbah biogas (*sludge*) yang berupa padatan dimanfaatkan menjadi kompos dan bahan campuran pakan sapi & ikan, dan yang berupa cairan dimanfaatkan menjadi pupuk cair untuk tanaman sayuran dan ikan.

1.2. Permasalahan

Selama ini pihak pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk

mengangkat harkat masyarakat petani dari berbagai komoditas dengan alokasi dana yang cukup besar, bahkan semakin banyak teknologi serta SDM yang dianggap pakar untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan berbagai komoditas dengan tujuan agar diperoleh nilai tambah yang maksimal. Namun fakta aktual menunjukkan hasil yang diperoleh masih cukup jauh dari yang diharapkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan belum berorientasi sepenuhnya pada pemberdayaan masyarakat, terkesan masyarakat tani masih menjadi obyek dalam pembangunan. Bila dicermati hasil-hasil yang dicapai selama ini, belum ada perubahan bagi kalangan petani kecil terhadap perkembangan usaha rumah tangga masing-masing untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga tani secara layak.

Materi dan substansi penulisan makalah dikembangkan dengan dukungan informasi dari beberapa literatur yang terkait dengan topik bahasan. Tujuan penulisan untuk memberikan informasi bahwa kebijakan program pembangunan pertanian daerah sebaiknya dilaksanakan melalui program *value chain* komoditas beragam, merupakan sebuah upaya lokal jangka panjang ke arah kelompok kemandirian pangan, pakan, pupuk organik, energi (biogas) dan kesejahteraan petani, berbasis integrasi tanaman pangan (padi, palawija dan hortikultura), peternakan, perkebunan, budi daya perikanan, dan kehutanan. Program ini mampu mempertemukan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan/ kelestarian alam, menyediakan proses transformasi ekonomi, dan memperluas akses masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Sejauh mana kemungkinan dan prospek penerapan *value chain* komoditas beragam ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih perlu pengkajian, terutama mengenai

keseimbangan sumberdaya yang ada, keterampilan/ pengetahuan dan motivasi/ keseriusan peternak. Tulisan ini akan mengurai prospek penerapan *value chain* komoditas beragam model integrasi tanaman ternak, terutama untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain, *road map* ini juga dimaksudkan untuk mengatasi tantangan kedepan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pembangunan Berkelanjutan

2.1.1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2.1.2. Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) merupakan dukungan menyeluruh dari Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk pertumbuhan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keuangan berkelanjutan terdiri dari dimensi (*roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014):

- a. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- permasalahan lingkungan dan sosial lainnya;
- b. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
 - c. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha/ ekonomi; dan
 - d. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Program keuangan berkelanjutan ini tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi, seperti sektor energi, infrastruktur, industri pengolahan, pertanian, dan UMKM. Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan Indonesia. Sesuai fungsi intermediasi yang dijalankan oleh industri jasa keuangan, sektor keuangan berperan penting sebagai agen yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pendanaan kepada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang besar dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/23/114400526/8.Bank.Jadi.Pionir.Program.Keuangan.Berkelanjutan>
(Diakses pada 01-11-2016 pukul 14.00)

2.1.3. Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan

(*Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019, Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014)

2.1.3.1. Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk:

- a. Meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa keuangan (LJK)

- sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk/ layanan lingkungan yang ramah lingkungan.
- b. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJP dan RPJM yang bercirikan *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*.
 - c. Berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/ mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

2.1.3.2. Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup:

- a. Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK.
- b. Prinsip Pengembangan Sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.

- c. Prinsip tata Kelola Lingkungan dan Sosial dan Pelaporan dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah LJK, serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.
- d. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

2.1.4. Rantai Nilai (*Value Chain*)

Rantai nilai mengacu pada keseluruhan aktivitas yang diperlukan untuk memindahkan barang (atau jasa) mulai dari fase perencanaan, masuk ke tahap produksi, sampai ke tangan konsumen akhir (Kaplinsky dan Moris, 2001 dalam Laporan *Pilot Project* Skema Pembiayaan Pertanian melalui Penerapan Konsep Pembiayaan Rantai Nilai (*Value Chain Financing*) Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016). Sebuah rantai nilai muncul ketika seluruh pelaku dalam rantai bekerja dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai produk akhir. Sementara Alberta *Value Chain Initiative* mendefinisikan rantai nilai sebagai penggabungan secara vertikal dari perusahaan-perusahaan untuk memperoleh posisi yang lebih menguntungkan di pasar.

Penggabungan vertikal berarti perusahaan-perusahaan tersebut saling terkait dalam satu kesatuan proses produksi, melalui berbagai proses atau pengolahan sampai pada tahap di mana konsumen dan penjual melakukan pembelian produk jadi. Rantai nilai berbeda dengan bentuk gabungan perusahaan lainnya. Sebagai contoh, gabungan dari para produsen pertanian yang bekerja sama bukanlah rantai nilai, melainkan penggabungan secara horizontal. Pada umumnya, rantai nilai terbentuk jika terdapat tiga atau lebih perusahaan yang bergabung secara vertikal, yang disebut sebagai hubungan dalam rantai nilai. Kerjasama dalam rantai nilai tidak hanya sekedar perjanjian jangka panjang, melainkan juga kerjasama antar perusahaan berbeda yang saling terlibat dalam rantai nilai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bersama-sama.

Tujuan utama perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam rantai nilai adalah memperoleh hasil yang lebih menguntungkan, misalnya harga yang lebih tinggi. Namun demikian, dibutuhkan waktu untuk mewujudkan manfaat dari rantai nilai antara lain keamanan pasar yang lebih terjaga dan biaya yang lebih murah. Dengan menjadi bagian dari rantai nilai, perusahaan dapat lebih mudah menembus pasar, menjamin ketersediaan barang dan komunikasi yang baik, sehingga akan meningkatkan siklus pengembangan produk. Dengan kata lain, penggabungan perusahaan secara vertikal dapat membangun kerjasama bisnis yang lebih baik.

Rantai nilai dimulai dan diakhiri dengan pasar. Rantai nilai harus terus berkembang untuk dapat menanggapi permintaan pasar. Ketika suatu perusahaan bergabung dalam rantai nilai, perusahaan tersebut harus aktif terlibat di dalamnya. Interaksi dengan pasar akan memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan di setiap bagian rantai nilai. Rantai nilai yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

berfungsi dengan baik akan memberikan hasil yang efektif bagi aktivitas produksi yang berkaitan dengan pemenuhan permintaan pasar.

Rantai nilai dalam agribisnis dirancang untuk meningkatkan keuntungan persaingan (*competitive advantage*). Hal ini dilakukan dengan menghubungkan produsen, pelaku produksi, pelaku pasar, perusahaan penyedia jasa pangan, perusahaan ritel, peneliti pertanian, dan pemasok (*supplier*). Keunggulan rantai nilai agribisnis dibandingkan dengan bentuk kerja sama lainnya adalah:

- a. Rantai nilai merupakan perusahaan yang diperluas. Apabila rantai produk dan prosesnya sulit ditiru oleh pelaku lain, berarti rantai nilai tersebut memiliki daya saing yang baik;
- b. Rantai nilai dapat membantu mengendalikan risiko. Pembeli memperoleh jaminan ketersediaan produk dan dapat menelusuri produk sampai ke asalnya, dan *supplier* pun memperoleh jaminan pasar;
- c. Rantai nilai dapat mengembangkan akses pasar dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merespon perubahan permintaan konsumen.

Terdapat beberapa alasan bagi pelaku usaha sektor pertanian untuk bergabung dalam rantai nilai agribisnis, antara lain:

- a. Menambah keamanan produk pangan.
- b. Menjamin ketersediaan dan kualitas produk.
- c. Menciptakan pasar baru.
- d. Mengembangkan posisi pasar atau meningkatkan citra usaha.
- e. Kemudahan fasilitas dan perlengkapan untuk meningkatkan efisiensi penanaman.
- f. Kemudahan akses riset dan teknologi.
- g. Meningkatkan proses inovasi produk atau pengembangan pasar.
- h. Memperoleh bantuan keuangan dari pelaku lainnya, mengurangi investasi, dan meningkatkan peluang untuk memperoleh pembiayaan.

- i. Mengembangkan hubungan antara konsumen dan *supplier*/ pemasok.
- j. Memperoleh keuntungan persaingan yang sulit untuk ditiru.

Laporan *Pilot Project* skema pembiayaan pertanian melalui penerapan konsep pembiayaan rantai nilai (*value chain financing*) Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016).

Menurut Otto (2008), Rantai nilai merupakan sebuah sistem dari langkah-langkah saling terkait penting untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi untuk konsumen akhir, dimana setiap langkah tersebut menambah nilai produk. Ini sangat mirip dengan suatu rantai pasokan, namun lebih terfokus pada bagaimana nilai ditambahkan bukan bagaimana bahan mentah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam beberapa cara, nilai tambah terlihat jelas, namun dalam cara lainnya terlihat lebih samar. Dalam contoh dari kopi rantai nilai dimulai dengan menyiapkan lahan (membersihkannya, membiayainya) lalu berlanjut ke penanaman, perawatan, panen, pengeringan, pengemasan, pemeriksaan, pengiriman, pemasaran dan penjualan domestik.

Sepanjang rantai tersebut setiap titik, ada nilai tambah untuk konsumen, baik dalam bentuk metode pengeringan beberapa metode menghasilkan rasa lebih baik dibandingkan metode yang lain hingga pengiriman beberapa perusahaan lebih efisien daripada yang lain atau pengemasan, dengan bentuk-bentuk kemasan yang lebih menarik bagi konsumen. Produsen dengan produk-produk yang berbeda dengan kandungan teknologi, keahlian, dan inovasi lebih tinggi adalah produsen yang dapat menetapkan aturan (Otto, Juli 2008).

2.1.5. Pembiayaan Rantai Nilai

Menurut Robinson dalam Hoffman (2011), pembiayaan rantai nilai adalah bagaimana mengelola modal

vendor) dan pembeli atau dalam bentuk keuangan. Melalui pembiayaan rantai nilai, risiko pembiayaan maupun pengembaliannya kepada penyedia

Tabel 2.1. Perbedaan Sistem Pembiayaan Rantai Nilai dengan Konvensional

No	Indikator	Sistem Pembiayaan Rantai Nilai (<i>Value Chain Financing</i>)	Sistem Pembiayaan Konvensional
1	Prinsip pembiayaan	Kontrak kerja sama/kemitraan	Kebutuhan peminjam
2	Nominal pembiayaan	Merujuk pada kebutuhan pelaku	Merujuk kepada plafon kredit yang ditetapkan
3	Periode pembiayaan	Berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerja sama	Sesuai jangka waktu skema kredit yang ditetapkan
4	Hubungan yang terjalin	Hubungan kemitraan dan pembagian risiko	Hubungan bisnis, risiko masing-masing pelaku
5	Cakupan pembiayaan	Dapat melibatkan satu lini atau lebih dalam suatu rantai nilai	Hanya pada satu lini atau pelaku
6	Biaya transaksi	Ditanggung bersama oleh pelaku yang terlibat dalam skema pembiayaan rantai nilai	Ditanggung oleh pihak peminjam
7	Sekuritisasi pembiayaan	Kontrak kerja sama dapat digunakan sebagai jaminan	Aset pribadi milik peminjam digunakan sebagai jaminan
8	Pihak yang bertanggung jawab	Seluruh pelaku yang terlibat dalam skema pembiayaan rantai nilai	Sepenuhnya diserahkan kepada peminjam
9	Aliran informasi	Informasi diperlukan sebelum pembiayaan, saat pembiayaan berlangsung, hingga pelunasan	Informasi mengenai peminjam diperlukan sebelum diberikan pinjaman
10	Sistem penghitungan kemampuan usaha	Spesifik sesuai dengan karakteristik usaha	Disamakan antara sektor pertanian dan non-pertanian
11	Jasa keuangan	Kredit keuangan, nota gudang, pembiayaan pembelian ulang, <i>leasing</i> , anjak piutang	Kredit keuangan

kerja, arus kas antara perusahaan sepanjang rantai nilai baik dalam bentuk pembayaran antara pemasok (*supplier*/

keuangan ditanggung bersama oleh pelaku dalam rantai pasok.

Berdasarkan konsep pembiayaan rantai nilai yang telah diuraikan di atas, terlihat adanya perbedaan antara pembiayaan yang menggunakan pendekatan rantai nilai (*value chain financing*) dengan pola pembiayaan konvensional. Tabel 2.1. menunjukkan komparasi antara sistem pembiayaan rantai nilai dengan sistem pembiayaan konvensional yang umum digunakan.

Model pembiayaan rantai nilai pertanian sangat penting diterapkan dalam upaya meningkatkan pembiayaan sektor pertanian, khususnya komoditas

pangan dan hortikultura. Alasannya antara lain keterbatasan modal kerja dan besarnya investasi yang diperlukan, serta tingkat risiko yang tinggi mulai dari proses produksi, penanganan pascapanen hingga distribusi produk. Pembiayaan rantai nilai ditentukan pula oleh sifat komoditas pangan dan hortikultura serta rekayasa proses produksi baik di tingkat *on farm* maupun *off farm*. Terdapat beberapa skema pembiayaan rantai nilai yang dapat diterapkan dalam agribisnis pangan dan hortikultura yang perlu diuji

Sumber: Laporan Pilot Project Skema Pembiayaan Pertanian melalui Penerapan Konsep Pembiayaan Rantai Nilai (*Value Chain Financing*) Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

lebih lanjut mengingat sifat komoditas pertanian yang spesifik.

Beberapa instrumen pembiayaan rantai nilai pertanian yang dapat diterapkan adalah:

- a. Pembiayaan produk (*product financing*).
 - 1) Pembiayaan agro input atau input

- b. *Receivables financing*
Pembiayaan anjak piutang (*factoring*).
- c. Penjaminan aset fisik (*physical asset collateralization*)
 - 1) Pembiayaan jaminan kepemilikan komoditas-sistem resi gudang (*warehouse receipt*);

Tabel 2.2. Deskripsi Pembiayaan Rantai Nilai Pertanian

No	Skema Pembiayaan	Uraian Singkat
Pembiayaan Produk (Product Financing)		
1.	Pembiayaan Agroinput	Merupakan pengembangan dari pembiayaan/kredit usahatani konvensional yang diberikan kepada petani atau pelaku di dalam rantai nilai lainnya, di mana pembayaran kredit dilakukan setelah masa panen. Perbedaannya dengan kredit usaha tani konvensional adalah pemberian kredit diberikan kepada kelompok tani/koperasi/jasa logistik perdesaan yang sudah mempunyai kontrak dengan <i>supplier</i> atau pasar terstruktur (yang mensyaratkan kepastian volume, kualitas, kontinuitas dan harga produk). Kredit yang diberikan berupa input produksi (benih, pupuk, pestisida, dsb) melalui agen/toko sarana produksi.
2.	Pembiayaan Jasa Perdagangan	Merupakan tambahan modal kerja berupa pembiayaan yang diberikan kepada kelompok tani untuk membayar hasil produksi kepada anggota kelompok tani/koperasi/jasa logistik perdesaan pada saat penyerahan hasil produksi yang sesuai dengan permintaan pasar terstruktur. Petani memerlukan uang tunai yang digunakan untuk biaya usaha tani dan kebutuhan hidupnya. Pembiayaan ini dilakukan jika pembayaran yang diterima oleh kelompok tani/koperasi/jasa logistik perdesaan dari <i>supplier</i> atau pasar terstruktur memerlukan waktu yang lama (<i>delayed term of payments</i>).
Receivables Financing		
3.	Pembiayaan Anjak Piutang	Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada ritel modern/industri pengolahan/eksportir yang telah terikat kontrak dengan <i>supplier</i> /koperasi agar dapat memberikan pembayaran tunai setelah pengiriman produk. Pembayaran tunai tersebut diberikan melalui bank/lembaga keuangan dengan ketentuan diskon tertentu, selanjutnya pihak perbankan akan menagihkan jumlah pembayaran yang diberikan kepada <i>supplier</i> /koperasi kepada ritel modern/industri pengolahan/eksportir. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperlancar arus kas <i>supplier</i> /koperasi yang mengalami keterlambatan pembayaran dari ritel modern/industri pengolahan/eksportir.
Pembiayaan Penjaminan Aset Fisik (Physical Asset Collateralization)		
4.	Pembiayaan Sistem Resi Gudang	Kelompok tani dan pelaku lain dalam rantai pasok memberikan jaminan ke bank atau lembaga keuangan dalam bentuk hasil produksi yang disimpan dalam gudang yang sudah tersertifikasi dan menerapkan sistem tunda jual. Pihak gudang mengeluarkan bukti kepemilikan barang (resi gudang) yang dapat digunakan sebagai jaminan dan digunakan oleh petani/kelompok tani untuk pengajuan kredit. Kredit tersebut dapat digunakan oleh petani untuk biaya usahatani, selanjutnya pembayaran kredit ke bank dilakukan pada saat produk dijual dengan harga yang lebih baik.
5.	Pembiayaan Investasi Teknologi (<i>lease purchase</i>)	Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pembelian investasi teknologi yang menunjang sistem produksi (<i>on farm</i> dan <i>off farm</i>) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, jaminan ketersediaan produk dan sebagainya. Pembiayaan investasi teknologi diberikan tunai oleh perbankan untuk pembelian alat mesin pertanian, alat mesin penanganan pasca panen, kendaraan pengangkut hasil produk dan lain-lain yang digunakan sebagai jaminan oleh kelompok tani/koperasi/jasa logistik.

produksi;

- 2) Pembiayaan jasa perdagangan.

- 2) Pembiayaan investasi teknologi.

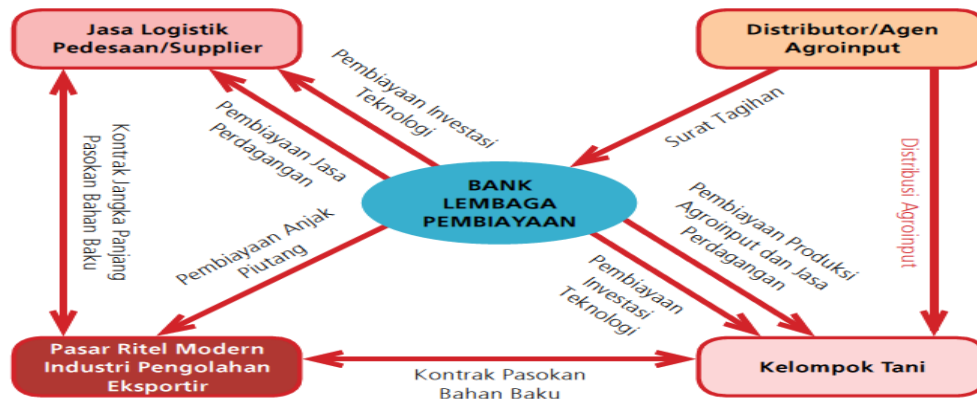
Pembiayaan rantai nilai pertanian dapat dilakukan secara terintegrasi oleh satu atau lebih lembaga keuangan atau bank yang mengikuti aliran barang/produk dari setiap pelaku rantai nilai

produk pertanian. Integrasi pembiayaan rantai nilai dapat mengurangi risiko yang terjadi pada setiap tahapan proses rantai nilai produk pertanian tersebut. Persyaratan utama untuk melakukan

Sumber: Laporan Pilot Project Skema Pembiayaan Pertanian melalui Penerapan Konsep Pembiayaan Rantai Nilai (*Value Chain Financing*) Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016.

pembiayaan rantai nilai terintegrasi adalah pemahaman yang kuat terkait sifat/ karakteristik produk pertanian serta struktur rantai nilai produk pertanian yang memiliki sifat khas dapat dipengaruhi oleh proses bisnis dari masing-masing pelaku. Secara umum integrasi pembiayaan rantai nilai produk

pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini (Laporan Pilot Project Skema Pembiayaan Pertanian melalui Penerapan Konsep Pembiayaan Rantai Nilai (*value chain financing*) Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2016).



Gambar 2.1. Integrasi Pembiayaan Rantai Nilai Produk Pertanian

2.2. Model Value Chain Komoditas Beragam

Value chain komoditas beragam adalah upaya terobosan proyek unggulan dalam rangka mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat pedesaan. *Value chain* komoditas beragam adalah mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada.

Inovasi teknologi yang diintroduksikan berorientasi untuk

menghasilkan produk pertanian organik dengan pendekatan “pertanian tekno ekologis”, yang bertujuan untuk saling mendukung (untuk menciptakan sinergi) dan memberi sumber energi (makanan) di antara tanaman atau hewan yang dibudidayakan, karena ada rantai makanan (energi) untuk kehidupan di dalam sistem pertanian yang saling mendukung.

Kegiatan integrasi yang dilaksanakan berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (*zero waste*) yang menghasilkan 4 F yakni *Food, Feed, Fertilizer* dan *Fuel*, seperti pada Gambar 2.2 (Widia et al, 2011).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

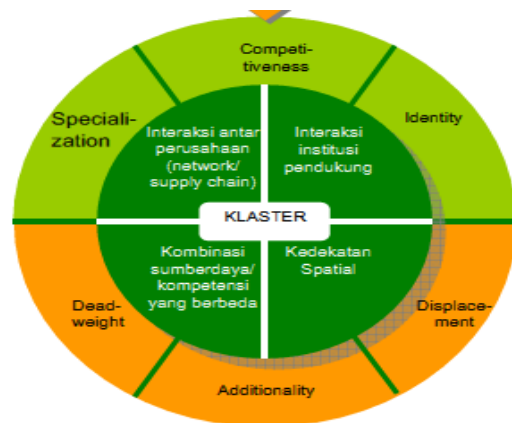


Gambar 2.2. Konsep zero waste dalam model value chain komoditas

Kegiatan utamanya dalam sistem agribisnis ini adalah mengintegrasikan budidaya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah menjadi pakan ternak, dan limbah ternak diolah menjadi Biogas, Biourine, Pupuk organik baik padat maupun Cair, serta Bio Pestisida (Widia et al, 2011).

2.3. Model Kluster Bisnis Berbasis Komoditas

Michael Porter dalam Widia et al, (2011) mendefinisikan kluster sebagai konsentrasi perusahaan dan institusi (pemasok, pelanggan, kompetitor dan institusi pendukung lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, institusi keuangan dan dinas pelayanan umum) yang terkait satu sama lainnya pada bidang industri tertentu. Manfaat kluster selain mengurangi biaya transportasi dan transaksi, juga meningkatkan efisiensi, menciptakan aset kolektif, dan memungkinkan terciptanya inovasi. Lihat Gambar 2.3. di bawah ini.



Gambar 2.3. Konsep pembentukan kluster bisnis dalam konteks peningkatan daya saing bisnis

Pembentukan kluster menjadi isu yang penting karena secara individual UKM seringkali tidak sanggup menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah volume produksi yang besar, standar yang homogen dan penyerahan yang teratur. UKM seringkali mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam pembelian input (seperti peralatan dan bahan baku) dan akses jasa-jasa keuangan dan konsultasi.

Ukuran kecil juga menjadi suatu hambatan yang signifikan untuk internalisasi beberapa fungsi pendukung

penting seperti pelatihan, penelitian pasar, logistik dan inovasi teknologi; demikian pula dapat menghambat pembagian kerja antar perusahaan yang khusus dan efektif secara keseluruhan fungsi-fungsi tersebut merupakan inti dinamika perusahaan.

Beberapa contoh keuntungan yang dapat ditarik dari sebuah kerjasama dalam kluster bisnis adalah:

- a. Melalui kerjasama horisontal, misalnya bersama UKM lain menempati posisi yang sama dalam mata rantai nilai (*value chain*) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil secara individual.
- b. Melalui integrasi vertikal (dengan UKM lainnya maupun dengan perusahaan besar dalam mata rantai pasokan), perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan diri ke bisnis intinya dan memberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal.
- c. Kerjasama antar perusahaan juga memberikan kesempatan tumbuhnya ruang belajar secara kolektif untuk meningkatkan kualitas produk dan pindah ke segmen pasar yang lebih menguntungkan. Jaringan bisnis tersebut dan perumus kebijakan lokal, dapat mendukung pembentukan suatu visi pengembangan lokal bersama dan memperkuat tindakan kolektif untuk meningkatkan daya saing UKM.

Dengan demikian kluster bisnis yang efektif adalah yang dapat menjadi alat yang baik untuk mengatasi hambatan akibat ukuran UKM dan berhasil mengatasi persaingan dalam suatu lingkungan pasar yang semakin kompetitif. Konsep kluster bisnis merupakan salah satu strategi yang dinilai sangat tepat meningkatkan daya saing industri berbasis pertanian yang berkelanjutan. Upaya ini mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik dengan industri pendukung (*supporting industries*)

maupun industri terkait (*related industries*).

Model kluster ini cocok dikembangkan pada komoditas unggulan yang dicirikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pohon industri yang lengkap, spektrum penggunaannya sangat luas, daya serap tenaga kerja yang tinggi, teknologi budidaya yang mudah, masa tanam yang pendek atau biaya produksi per unitnya rendah. Contohnya, adalah pengembangan kluster industri rumput laut di 60 daerah di Indonesia.

Sistem agribisnis berbasis komoditi adalah kesatuan sub-sistem bisnis yang dibentuk berdasarkan konsep pohon industri.

Artinya, komoditi spesifik yang menjadi basis pengembangan dalam sistem agribisnis memiliki potensi dikembangkan menjadi berbagai sub-sistem bisnis yang menghasilkan produk turunan baik produk pangan maupun non-pangan (Widia et al, 2011).

2.4. Karakteristik Kluster

Kluster terdiri dari kelompok perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi yang berbeda namun berhubungan berlokasi dalam sebuah wilayah tertentu, dimana melalui sebuah bentuk interaksi tertentu diantara mereka dan melalui sebuah institusi dibentuk bersama, yang mungkin juga dibentuk bersama organisasi lain, meningkatkan daya saing, spesialisasi dan identitas mereka dalam perekonomian global. Karakteristik kluster dapat dilihat dari sisi proses internal yang terjadi atau dari sisi eksternal, sebagai hasil proses internal tersebut. Dari sisi internal, setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat diperhatikan yaitu:

- a. Adanya konsentrasi perusahaan dalam suatu wilayah/ *spatial*.
- b. Adanya interaksi antar perusahaan.
- c. Kombinasi sumber daya dan kompetensi antar perusahaan yang berinteraksi.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

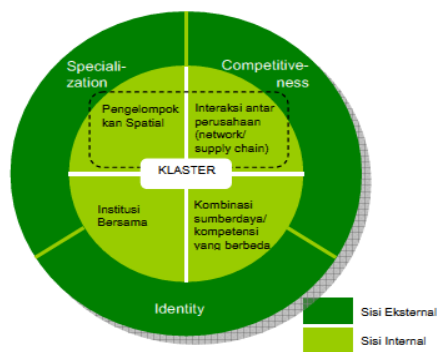
d. Pembentukan dan interaksi antar usaha dalam institusi pendukung yang berfungsi membantu kluster secara keseluruhan.

Adapun dimensi umum karakteristik kluster dapat dilihat pada gambar 2.4.

- Economic specialization*, dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan. (kluster *automotive*, kluster budaya, kluster bunga potong, dan lain-lain).
- Competitiveness*, atau daya saing yang lebih baik dalam konteks dinamis dan global (tercermin dalam konteks dinamis dan global), misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik.
- Identity*, yang relevan dengan agen dan organisasi di dalam kluster ataupun yang di luar kluster. Misalnya Asosiasi Peternak Susu Lembang.

Proses internal yang dilakukan biasanya akan membawa pengusaha yang terlibat untuk melakukan spesialisasi pada mata rantai produksi yang paling dikuasai kompetensinya. Spesialisasi-spesialisasi dari pengusaha-pengusaha yang berhubungan ini dapat mengarahkan produk sentra pada peningkatan daya saing, jika spesialisasi yang dilakukan membuat biaya produksi produk sentra menjadi lebih rendah atau kualitas produk lebih tinggi dibanding daerah lain. Jika daya saing dapat dipertahankan maka identitas produk sentra akan muncul. Jika digambarkan, ke 7 karakteristik ini dapat dilihat dalam gambar 4 (Lestari Hs, 2010).

Gambar 2.4. Dimensi Umum Karakteristik Kluster



Disisi internal, karakteristik kluster dimulai dengan ciri adanya konsentrasi unit usaha yang sejenis dan/ atau saling mendukung dalam satu wilayah yang relatif berdekatan baik secara geografis maupun secara transportasi ekonomis.

Kedekatan spatial ini kemudian diikuti oleh interaksi antar perusahaan untuk mendukung produk sentra. Interaksi dan komitmen ini kemudian diikuti dengan kemauan mengkombinasikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki. Untuk itu, kadang pengusaha perlu membentuk satu atau lebih institusi bersama.

Sedangkan dari sisi eksternal, setidaknya ada 3 elemen yang dapat diperhatikan yaitu:

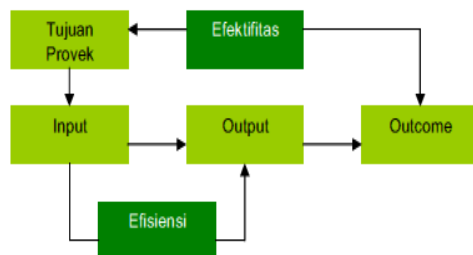
2.5. Pengukuran Efektifitas Program Pemerintah

Efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan, suatu aktifitas disebut efektif jika ia berhasil mengantarkan pelakunya kepada tujuan awal yang melandasi lahirnya aktivitas tersebut. Tujuan pembentukan kluster, seperti yang tercantum dalam RPJM bidang Koperasi dan UKM adalah memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan-tujuan ini diukur melalui instrumen evaluasi sentra yang ada. Terdapat 3 hal

untuk digunakan sebagai tujuan umum pengembangan kluster bisnis yaitu: (1) meningkatnya daya saing produk kluster, (2) adanya/ terbentuknya spesialisasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat didalamnya, dan (3) munculnya identitas kluster yang cukup kuat di tataran regional/ nasional. Dalam sebuah program atau proyek, secara umum efektifitas program/ proyek didefinisikan sebagai seberapa besar tujuan program/ proyek tersebut tercapai. Efektifitas menghubungkan *outcome* dari proyek dengan tujuan proyek, seperti tampak dalam gambar 2.6 (Lestari Hs, 2010).

Input adalah sumberdaya yang disediakan oleh program/ proyek. Misalnya sejumlah dana, pengurangan pajak, sumber daya manusia. Untuk keperluan evaluasi, input umumnya dinyatakan dalam *cash equivalent* dari sumberdaya yang disediakan.

Output adalah pengaruh/ efek langsung yang dihasilkan oleh input. Misalnya peningkatan kapasitas produksi, perbaikan tingkat pengetahuan pekerja, perbaikan tingkat pendidikan pekerja, *turnover* perusahaan yang lebih tinggi, dan lainnya.



Gambar 2.6. Posisi Efektifitas

Efisiensi adalah input dihubungkan dengan output. Sebuah proses disebut efisien jika untuk jumlah output yang sama, dibutuhkan jumlah input yang lebih sedikit.

Outcome dari proses adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi atau hasil yang mengikuti *output*. Contoh *outcome* adalah peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

Efektifitas adalah ukuran pencapaian tujuan, jadi ia menghubungkan *outcome* dengan tujuan awalnya.

Dalam penilaian efektifitas, disamping menilai pencapaian tujuan yang tercantum dalam dokumen program/ proyek, penilaian juga dapat dikembangkan sehingga mencakup efek yang lebih luas yaitu: (1) *deadweight*, (2) *additionality*, dan (3) *displacement*.

a. *Deadweight* berhubungan dengan pertanyaan “apa yang terjadi dalam perusahaan UKM jika dukungan tidak diberikan”. Pengukuran *deadweight* dapat dilakukan dengan membandingkan antara perusahaan yang memperoleh perkuatan dengan perusahaan yang tidak memperoleh perkuatan. Perbandingan ini memberikan 3 kemungkinan hasil: (1) *Pure deadweight*. Jika tanpa program ternyata perusahaan tetap menjalankan/ mencapai tujuan program maka program disebut sebagai *pure deadweight*; (2) *Partially deadweight*. Jika tanpa program, perusahaan tetap memulai menjalankan tujuan program secara terbatas atau dalam bentuk yang lain; dan (3) *Zero deadweight*. Jika tanpa program perusahaan sama sekali tidak dapat berjalan. Pelaksanaan program yang *pure deadweight* adalah pemborosan.

b. *Additionality* didefinisikan sebagai “apakah sebuah dukungan merangsang *private investment* yang tadinya tidak ada/ tidak mungkin”. *Additionality* dapat berada pada input, output, atau *behavioral*. *Input additionality* menjawab pertanyaan apakah perusahaan menjadi berbelanja lebih banyak akibat adanya program/ proyek ini?; *Output additionality* menjawab pertanyaan apakah aktivitas *output* meningkat akibat adanya program/ proyek ini? (misal jumlah inovasi, paten, pekerjaan, pengusaha baru, dan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

sebagainya); sedangkan *behavioral additionality* menjawab pertanyaan adakah perubahan permanen pada perilaku perusahaan akibat bantuan/ program/ proyek ini? (termasuk menjadi lebih efisien dalam mentransformasikan input menjadi output). Sebuah program yang efektif akan memberikan efek *additionality* kepada obyek programnya.

- c. *Displacement* timbul ketika dukungan yang diberikan menggantikan *private investment*. *Displacement* adalah efek negatif dari bantuan negara yang menganulir (sebagian) efektifitas bantuan/ program/ proyek.

Ketiga ukuran ini dimasukkan untuk menilai efektifitas dari sisi dinamika masyarakat akibat pelaksanaan program. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sebuah model pengembangan klaster bisnis UKM dapat disebut efektif jika:

- a. meningkatkan daya saing produk klaster.
- b. menciptakan spesialisasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat didalamnya.
- c. memunculkan identitas klaster yang cukup kuat di tataran regional/ nasional.
- d. memiliki *zero deadweight*.
- e. memberikan efek *additionality* pada UKM.
- f. tidak menghasilkan *displacement*.

3. METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini merupakan suatu *literature study* yang mengacu pada bukti-bukti empiris, buku serta informasi dan fakta aktual hasil dari suatu *action research*. *Action Research* merupakan suatu upaya untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoreksi, dan mengevaluasi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan organisasi tersebut. Beberapa fitur suatu *action research* ini adalah: 1). Merupakan usulan (usulan solusi terhadap masalah-masalah

organisasi) yang *valid* dan *actionable*, serta *applicable*; 2). Konsep dapat diaplikasikan dalam situasi aktual (*real time, everyday-life conditions*), tidak atau bukan dalam *research* atau *laboratory setting*; 3). Implementasi yang efektif akan mengarah pada hasil yang konsisten dengan apa yang diinginkan; 4). Efektivitas diatas adalah *testable* dengan metode-metode standard.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan lima tahapan proses *action research* terhadap masalah yang timbul dan dihadapi :

- a. Mengidentifikasi dan menjelaskan masalah

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi masalah dengan melihat efek langsung dan kumulatif dari proses perubahan.

- b. Mengumpulkan atau mengkoleksi data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan

- 1) Observasi; kontak langsung dalam *setting* tertentu untuk periode waktu tertentu, untuk memperoleh data lain dalam bentuk cerita-cerita, perasaan-perasaan dan pengalaman serta untuk melihat peluang konflik-konflik dan miskomunikasi yang tidak ditemui dalam metode pengumpulan informasi lainnya.

- 2) Pendokumentasian situasi; *interview* atau diskusi, melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap proses pembangunan. Dalam proses pengumpulan data dan informasi tersebut penulis menggunakan suatu portfolio (proses *fling* segala sesuatu yang terlihat relevan terhadap masalah yang nantinya dapat di analisis kemudian). Bukti tertulis berkaitan dengan risalah rapat, surat tugas, artikel-artikel, dan lain-lainnya, digunakan untuk membentuk *baseline* tentang apa yang terjadi di masa lalu dan dapat digunakan

untuk membandingkan pendekatan baru terhadap pendekatan sebelumnya. Sedangkan bukti tidak tertulis berupa manifestasi perilaku dari orang-orang yang menjalankan proses pembangunan.

c. Mengorganisasi data

Dalam mengorganisasi data di atas penulis menyajikan contoh-contoh dan kejadian-kejadian yang diperoleh dari pengumpulan dan pengkoleksian data di atas. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk sederhana dan mudah dimengerti serta menyusun data sesuai prioritas dan urgensinya.

1) Analisis dan interpretasi data

i. Mengolah data menjadi informasi maksimum merupakan langkah berikutnya dari bab sebelumnya, setelah itu dilakukan analisis data untuk menentukan bidang prioritas untuk bertindak.

ii. Langkah berikutnya adalah mempelajari literatur profesional maupun jurnal-jurnal dan mengidentifikasi topik-topik dalam literatur maupun jurnal-jurnal tersebut. Kemudian dilakukan proses pengumpulan laporan riset dan artikel-artikel tersebut serta menganalisis dan menginterpretasikan informasi dalam materi-materi tersebut sebagai alat untuk memahami dan untuk bertindak.

iii. Langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan yang paling sesuai.

2) Membuat strategi-strategi tindakan dan membuat usulan penerapannya dalam organisasi. Pada tahap ini dilakukan pengkombinasian informasi dari analisis data dengan literatur profesional di atas. Kemudian memilih strategi-strategi terbaik

untuk bertindak dan membuat *action plans* jangka pendek dan jangka panjang (jika manajemen setuju dan mau menerapkannya). Selanjutnya

mengimplementasikan beberapa tindakan secepatnya (jika manajemen setuju dan mau menerapkannya) dan menilai implementasi tersebut diatas.

Tahap berikutnya adalah mengulang kembali proses 1 sampai dengan 5 di atas serta melakukan *action research* kembali untuk menilai dampak penerapan usulan di atas (jika manajemen menyetujui dilakukan *action research* lanjutan, baik oleh penulis sendiri maupun penulis lain dalam bidang lainnya).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan rekomendasi dari Survei Ekonomi dan pelaksanaan RPJP dan RPJM dikembangkan berdasarkan keunggulan lokal produk-produk pertanian dan perkebunan yang ditunjang oleh komoditas perikanan dan peternakan. Konsep pengembangan komoditas dilaksanakan dalam bentuk klaster-klaster dengan pola yang tersusun secara hirarkis dalam bentuk klaster induk dan klaster-klaster pendukung. Lokasi pusat-pusat pengembangan ditentukan berdasarkan analisis spasial, dimana setiap lokasi klaster induk ditentukan berdasarkan analisis spasial yang juga didukung oleh aspirasi dari masyarakat melalui *focused group discussion* (FGD). Masing-masing klaster dirancang dengan model terintegrasi dan sinergis, baik antar klaster (misalnya sawit-ternak dengan berbagai produk turunannya) dengan prinsip “*zero waste*”, sehingga diperoleh nilai tambah dan keuntungan yang maksimal. Jaringan koneksitas, keterintegrasian dan sinergi diperlihatkan dalam bentuk gambar 4.1. dan 4.2. di bawah ini yang mudah dipahami.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

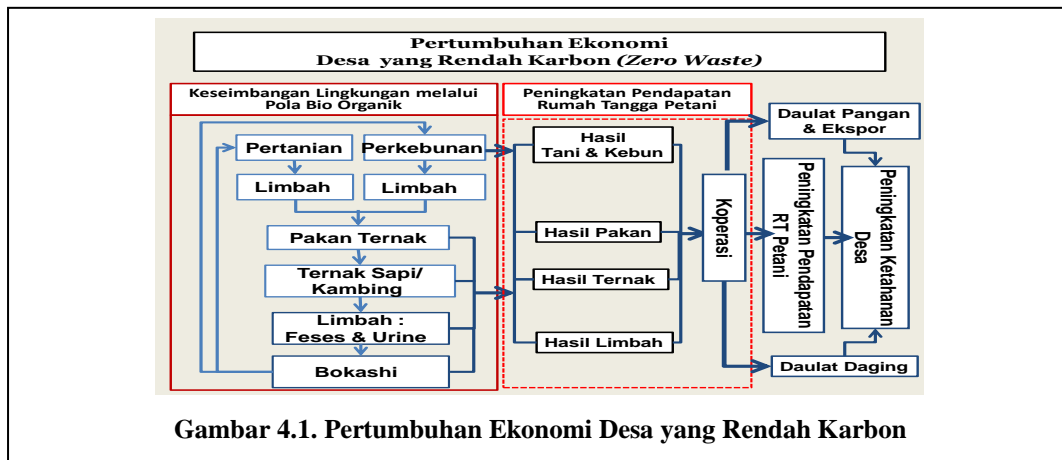
4.1. Model Value Chain Komoditas Beragam

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas perlu inovasi teknologi yang sesuai untuk diintegrasikan dalam usaha pokok, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, dan secara teknis, ekonomi dan sosial budaya layak dan dapat diterima oleh masyarakat pelaku usaha secara berkelanjutan. Integrasi ternak ruminansia pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi telah dilaksanakan secara turun menurun, salah satunya seperti ternak sapi/kambing di Desa Dataran Kempas yang dilakukan dengan cara tradisional yaitu menggembalakan ternak di bawah pohon sawit.

Value chain komoditas beragam adalah upaya terobosan proyek unggulan dalam rangka mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat pedesaan. *Value chain* Komoditas Beragam memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur, untuk mempromosikan praktek pertanian, pemasaran dan sertifikasi yang mampu meningkatkan pendapatan di lahan garapan (*on-farm*), di samping beternak juga melakukan usaha non peternakan (*off-farm*), gizi masyarakat, produksi yang berkelanjutan (di lahan yang tengah digarap) serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain hemat energi dan ramah lingkungan, keunggulan lain dari *Value chain* komoditas beragam adalah petani/ peternak akan memiliki beragam keterampilan dan keahlian terkait lainnya serta sumber penghasilan.

Value chain komoditas beragam yang didalamnya menerapkan sistem pertanian organik dapat meningkatkan bahan organik dalam tanah, penyerapan karbon lebih rendah dibanding pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia dan sebagainya. Inovasi teknologi yang diintroduksikan berorientasi untuk menghasilkan produk pertanian organik dengan pendekatan “pertanian tekno ekologis”, yang bertujuan untuk saling mendukung (untuk menciptakan sinergi) dan memberi sumber energi (makanan) di antara tanaman atau hewan yang dibudidayakan, karena ada rantai makanan (energi) untuk kehidupan di dalam sistem pertanian yang saling mendukung.

Pada gambar 4.1 dibawah ini tentang *value chain* komoditas beragam adalah mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada. Diversifikasi usahatani secara horizontal pada dasarnya mengusahakan beberapa komoditas secara terpadu, yaitu tumpang sari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan bahkan kehutanan (*agroforestry*). Sementara, diversifikasi usahatani secara vertikal adalah mengembangkan unit pelayanan sarana produksi dan lembaga keuangan mikro, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi usahatani, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dan pengolahan/ pemanfaatan hasil ikutan (biourine, biogas, kompos, pakan, bioarang, asap cair, jamur, lebah madu, susu, sabun dari susu, dan lain-lain).



Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Desa yang Rendah Karbon

Menurut Devendra (1993) dalam Priyanti (2007) keuntungan menerapkan usaha tani terpadu (integrasi antara ternak-tanaman) yaitu produk limbah dari satu komponen berfungsi sebagai sumber daya untuk komponen lainnya. Misalnya, pupuk digunakan untuk meningkatkan tanaman produksi, sisa tanaman dan hasil sebagai sumber pakan hewan, melengkapi pasokan pakan yang tidak memadai, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan gizi hewan dan produktivitas. Hewan memainkan peran kunci dan beberapa di fungsi pertanian, dan tidak hanya karena mereka menyediakan produk ternak (daging, susu, telur, wol, kulit) atau dapat dikonversikan menjadi uang tunai cepat pada saat dibutuhkan. Hewan mengubah energi tanaman menjadi berguna: tenaga hewan digunakan untuk membajak, transportasi dan dalam kegiatan seperti penggilingan, *logging*, pembangunan jalan, pemasaran, dan mengangkat air untuk irigasi. <http://sistemintegrasipadi-ternaksapipotong.blogspot.com/>. (Diakses Tanggal 7 November 2016 pukul 14.00).

Soehadji (1992) menyatakan, bahwa limbah peternakan umumnya meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan, baik berupa limbah padat

dan cairan, gas, ataupun sisa pakan. Limbah peternakan adalah semua buangan dari usaha peternakan yang bersifat padat, cair dan gas. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau dalam fase padat (kotoran ternak, ternak yang mati atau isi perut dari pemotongan ternak). Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau berada dalam fase cair (air seni atau urine, air pencucian alat-alat). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fase gas.

Limbah ternak memiliki dua peran penting dalam keberlanjutan keseluruhan sistem:

- Meningkatkan siklus nutrisi: limbah mengandung beberapa nutrisi (termasuk nitrogen, fosfor dan kalium) dan bahan organik, yang penting untuk menjaga struktur tanah dan kesuburan. Melalui penggunaannya, produksi meningkat sementara risiko tanah terdegradasi berkurang.
- Menyediakan energi: limbah merupakan bahan baku dalam produksi biogas dan energi untuk penggunaan rumah tangga (misalnya memasak, penerangan) atau bagi industri perdesaan (misalnya powering pabrik dan pompa air). BBM dalam bentuk

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

biogas atau briket dapat menggantikan arang dan kayu.

Manfaat keseluruhan dari tanaman-ternak integrasi dapat diringkas sebagai berikut:

- Agronomi, melalui pengambilan dan pemeliharaan tanah produktif.
- Ekonomi, melalui diversifikasi produk dan hasil yang lebih tinggi dan berkualitas dengan biaya lebih sedikit.
- Ekologis, melalui pengurangan tanaman hama (mengurangi penggunaan pestisida dan *bettersoil* pengendalian erosi), dan
- Sosial, melalui pengurangan migrasi rural urban dan penciptaan lapangan pekerjaan baru di pedesaan.

dampak pada proses integrasi dengan program pengembangan usaha lainnya yang lebih luas. Berbagai pola pengembangan integrasi tanaman-ternak baik yang berbasis komoditas maupun agro ekosistem telah menjadi bagian dalam upaya mendukung usaha pembibitan sapi potong dalam negeri (Winarso dan Basuno, 2013), sekaligus menjadi salah satu potensi untuk pencapaian Program Swasembada Daging Sapi Nasional (PSDS) tahun 2014 yang telah direncanakan dalam lima kegiatan pokok serta 13 kegiatan operasional Dirjen Peternakan (Ashari et al., 2013).

4.2. Model Klaster Bisnis Berbasis Komoditas

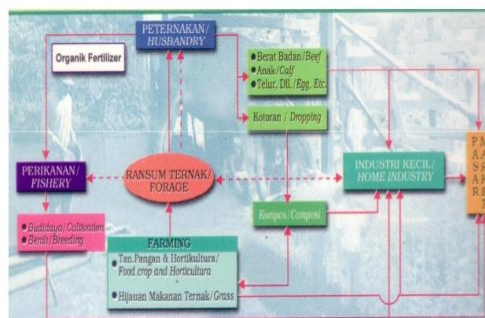
Pengelolaan yang berorientasi pasar haruslah diusahakan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir yang dikoodinir dan dipersatukan menjadi satu kesatuan organisasi bisnis yang kuat dari seluruh lapisan terkait (petani, pengusaha, peneliti pakar, lembaga pembiayaan, lembaga penelitian dan pemerintah) agar nilai tambah pertanian dapat dinikmati secara proporsional oleh masing-masing pelaku bisnis.

Peran dari masing-masing komponen dalam klaster bisnis adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Tani

Pelaksana langsung kegiatan pengembangan integrasi tanaman tahunan/ kelapa sawit dengan ternak kambing adalah petani/ kelompok tani terpilih yang telah ditetapkan melalui proses seleksi, dengan mengacu pedoman teknis yang telah ditetapkan. Satu kelompok tani yang terlibat dalam kluster beranggotakan 20 orang petani calon penerima bantuan awal yang melakukan penggemukan ternak kambing dan 20 (dua puluh) orang lainnya sebagai calon penerima bantuan perguliran berjenjang berikutnya (1 petani menangani 1

Gambar 4.2. Value Chain Komoditas



Sumber: RianPulp, 2005

Pengembangan kegiatan *value chain* komoditas beragam melalui kegiatan integrasi tanaman-ternak juga telah menjadi pola usahatani yang banyak dikembangkan di berbagai daerah dan agro ekosistem di Indonesia. Selain menjadi sumber pendapatan keluarga, pola ini dipandang dapat memberikan berbagai

ekor kambing). Dengan pertimbangan agar pelaksanaan kegiatan pengembangan masing-masing program/ model keberhasilannya dapat menjadi acuan replikasi kelanjutan pengembangannya, penerapan pelaksanaan kegiatan ditempuh dengan kriteria pemilihan kelompok sasaran adalah:

- 1) Para Petani Peternak yang masuk Kelompok Binaan adalah yang sudah pernah memelihara ternak kambing namun tidak lagi memiliki ternak kambing dikarenakan faktor modal.
- 2) Memiliki lahan untuk areal penggemukan ternak kambing dan areal penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT).
- 3) Penerima bantuan bersedia memelihara ternaknya dengan baik (kesehatannya, makanannya dan lain-lain).
- 4) Penerima bantuan bersedia mengelola Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), pakan ternak dan pakan ikan secara swadaya.
- 5) Penerima bantuan bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak.
- 6) Penerima bantuan bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak/ HMT).
- 7) Penerima bantuan bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO, pakan ternak dan pakan ikan dengan baik.
- 8) Penerima bantuan yang telah berhasil bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan.

Pendekatan Perguliran Berjenjang dipandang lebih menarik dan menjamin keberlanjutannya dalam mengkondisikan kemandirian petani penerima bantuan untuk mampu memelihara ternak secara berkelanjutan serta tumbuhnya peran

serta calon petani/ kelompok penerima guliran dalam mengawasi kelancaran dan keberhasilan kegiatan, karena apabila gagal, calon petani/ kelompok penerima berikutnya tidak menerima guliran. Pendekatan berjenjang prinsipnya, adalah:

- 1) Sejak awal kegiatan program dipilih dan ditetapkan petani/ kelompok tani calon penerima bantuan awal dan petani/ kelompok tani calon penerima guliran berikutnya;
- 2) Petani/ kelompok tani penerima bantuan awal melaksanakan kegiatan sampai dengan keuntungan yang diperoleh cukup untuk membeli ternak sejumlah bantuan awal;
- 3) Ternak yang dibeli dari keuntungan menjadi paket bantuan untuk petani/ kelompok tani penerima guliran berikutnya, sedangkan modal pokok juga dibelikan ternak untuk menjadi milik peternak penerima bantuan awal. Demikian seterusnya dengan pendekatan serupa.

Untuk keberlanjutannya diupayakan untuk dapat didanai dari:

- 1) *Sharing* kegiatan/ pembiayaan SKPD terkait di Provinsi.
- 2) *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan peran Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 3) MoU pelaksanaan *value chain* komoditas beragam antara Gubernur dengan Bupati/ Walikota.
- 4) Dikeluarkannya Peraturan Gubernur tentang Keberlanjutan Pertanian Terintegrasi.
- 5) Pembiayaan rantai nilai pertanian. Proses kerja yang dilaksanakan kelompok tani adalah penyiapan lahan, pembuatan kandang dan peralatan, pengadaan kambing, penerapan teknologi (penggemukan & pendampingan), penanganan kesehatan hewan, dan pemasaran

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

hasil. Selanjutnya kelompok tani mengelola Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), pakan ternak dan pakan ikan, pestisida organik dan biogas secara swadaya.

b. *Business Development Services* (BDS)

BDS merupakan badan independen yang berfungsi sebagai pendamping dan pemonitor kinerja dan kelompok tani. BDS ini dapat berasal dari kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian atau perusahaan yang berpengalaman dalam industri. Peran BDS melakukan pendampingan dalam rangka menjaga dan menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi agar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu BDS juga melakukan monitoring terhadap pengembalian pinjaman yang diterima oleh kelompok tani. Pemilihan BDS yang akan dilibatkan dalam klaster didasarkan atas rekomendasi dari Bupati/ Walikota atau lembaga pemerintah lainnya yang ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan oleh petani/ kelompok tani dibawah bimbingan, pendampingan dan koordinasi:

- 1) Dinas Kabupaten/ Propinsi setempat yang mebidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan;
 - 2) Petugas dinas Kabupaten/ Propinsi yang membidangi perkebunan yang ditunjuk untuk menangani administrasi kegiatan;
 - 3) Petugas unit fungsional terkait (surveyor) untuk konsultasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Petugas teknis yang ditunjuk & tim akademisi dari perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan ketrampilan, bimbingan dan pendampingan teknis pelaksanaan.
- Dengan pertimbangan (jika) dana paket bantuan berasal dari berbagai sumber, kerjasama dan peran aktif dari masing-masing pelaksana

kegiatan sangat mendukung keberhasilan.

c. Lembaga Pembiayaan Usaha (Koperasi, Bank atau LJK)

1) Koperasi

Disadari bahwa kelembagaan petani merupakan aspek yang lemah saat ini. Untuk itu diperlukan terobosan dalam pembinaan kelembagaan kelompok tani ditingkatkan menjadi kelembagaan usaha mejadi koperasi.

Menurut Lestari Hs, (2010) bentuk ideal untuk mengembangkan sentra menjadi klaster yang aktif adalah dalam bentuk kelompok. Bentuk kelompok yang ideal yang ada sampai saat ini adalah koperasi. Koperasi di wilayah pertanian dapat menjadi fasilitator pengembangan klaster. Contoh yang bisa dilihat adalah budidaya rumput laut di Sulawesi. Diantara pelaku-pelaku terdapat ikatan yang cukup kuat. Mereka melakukan budidaya secara bersama yang disatukan dalam wadah koperasi sehingga kegiatan produksi dari hulu-hilir dapat dilakukan. Pada tingkat hulu, koperasi menyediakan kebutuhan bahan baku/modal untuk budidaya rumput laut. Pada tingkat hilir, koperasi melakukan kegiatan pengolahan pasca panen bersama (pengeringan rumput laut) dan pemasaran bersama.

Demikian juga pada sektor peternakan. Pada umumnya di Pulau Jawa peternakan sapi dilakukan secara individual. Tetapi pada peternakan sapi di Kalimantan Selatan dilakukan secara kelompok (koloni). Mereka membuat kandang bersama. Satu kandang dimiliki oleh 3 orang petani. Kandang ini dikelola bersama baik pakannya,

pemeliharaan dan sebagainya. Kegiatan produksi ini sangat menguntungkan, karena dapat menghemat tenaga pemeliharaan dan tempat untuk kandang.

Untuk menyatukan pelaku-pelaku dalam kegiatan bersama perlu adanya *leader* (pemimpin) baik berasal individu atau instansi/pemerintah yang memiliki jiwa *entrepreneur*. Komitmen dan kemauan dari pemimpin tersebut merupakan langkah yang strategis untuk memacu pengembangan klaster. (Lestari Hs, 2010).

2) Bank atau LJK

Pengembangan usaha harus didukung dengan pembiayaan yang kuat, sementara kemampuan akses ke lembaga keuangan dan pembiayaan saat ini masih sangat lemah. Untuk itu diperlukan pembinaan peningkatan kemampuan akses ke lembaga keuangan dan pembiayaan oleh petani. Bentuk kegiatan antara lain dengan pelatihan dan pendampingan, termasuk pendampingan penyediaan agunan kredit.

Bank berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi keberlangsungan klaster. Fungsi ini akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman berupa investasi dan modal kerja bagi kelompok tani. Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Pemkab/ Pemkot/ Pemda atau lembaga pemerintah lain yang ditunjuk adalah mediator bagi kerjasama antar komponen klaster dalam kaitannya dengan perbankan.

Pada model klaster bisnis dimaksud terdapat lembaga *surveyor* yang tidak termasuk dalam komponen klaster. Lembaga *surveyor* bertindak sebagai pemantau persediaan di

level koperasi dan hanya sebagai pemeriksa persediaan di level kelompok tani. Layanan sebagai pemantau persediaan mewajibkan lembaga *surveyor* membuat laporan rutin (seminggu atau dua minggu sekali) kepada lembaga pembiayaan perihal kuantitas dan kondisi fisik persediaan, yang menjadi jaminan, mulai dari bahan baku hingga barang jadi selama jam kerja. Lembaga *surveyor* juga akan menerapkan sistem kunci ganda pada gudang dalam rangka mengawasi keamanan dan mutasi barang yang bersangkutan. Layanan sebagai pemeriksa persediaan hanya mewajibkan lembaga *surveyor* membuat laporan atas kuantitas dan kondisi persediaan, yang dijamin, pada satu waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Manfaat lembaga *surveyor* akan dirasakan oleh lembaga keuangan pemberi kredit/ pembiayaan dan klaster bisnis itu sendiri. Manfaat bagi lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:

- i. Pengawasan terhadap jaminan berjalan secara kontinyu.
- ii. Berfungsi sebagai peringatan dini terhadap kondisi usaha.
- iii. Manfaat bagi klaster bisnis (*value chain* komoditas beragam) adalah
 1. Berfungsi sebagai peringatan dini dalam mengembangkan usaha.
 2. Memberikan keyakinan terhadap lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan terhadap usaha.

d. Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran sangat dibutuhkan untuk peningkatan akses pemasaran keluar daerah. Produksi *value chain* komoditas beragam harus diarahkan untuk menghasilkan produk-produk untuk pasar luar

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

daerah, sehingga lembaga pemasaran harus disiapkan. Pedagang pengumpul dan pedagang besar diharapkan dapat menyiapkan mekanisme pemasaran dalam sebuah lembaga yang kuat untuk mendukung kegiatan terminal agribisnis.

Dengan terbentuk klaster bisnis tidak serta merta dapat berjalan secara efektif. Karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya untuk menumbuhkan efektifitas dari klaster tersebut dengan menerapkan prinsip pengungkit dalam penumbuhan klaster bisnis. Tujuan utama dari pengungkit adalah menciptakan sebuah mekanisme transmisi yang efektif, sehingga daya dorong yang terbatas dapat diubah menjadi daya gerak pada massa yang lebih besar bobotnya. Pendekatan *leverage* ini juga dilakukan dalam manajemen keuangan seperti dalam konsep *financial leverage* dan *operational leverage*. Masyarakat setempat diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan yang telah dirintis dan dibina bersama relawan/ tim pelaksana.

Dalam jangka panjang sebagai kelanjutan dari *value chain* komoditas beragam tersebut harus ditingkatkan lebih jauh lagi menjadi agro/ ekowisata sebagai tempat tujuan wisata, sebagai tempat percontohan pertanian yang layak dikunjungi untuk perjamuan, penyegaran (*refreshing*), serta dapat dimanfaatkan bagi penelitian dosen dan mahasiswa (S1 dan S2) serta Kuliah Kerja Nyata (KKN), pelatihan, seminar dan pertunjukan seni/ budaya serta penginapan. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian, program ini dapat digunakan sebagai sekolah *vocational* pertanian terpadu bagi petani dan petugas penyuluh pertanian.

Cara/ langkah yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikannya dengan jenis produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan

untuk kesehatan, kecantikan, umur panjang dan kelestarian lingkungan serta manusia yang berinteraksi, sebagai pengelola, sebagai pemutar dan ikut terlibat dalam perputaran roda ekonomi pertanian terintegrasi tersebut.

5. KESIMPULAN

Penerapan *value chain* komoditas beragam merupakan salah satu upaya dan solusi untuk mewujudkan komitmen pembangunan nasional dengan cara memprioritaskan pembangunan sektor pertanian dan pelestarian lingkungan yang berlandaskan kearifan lokal. Program ini juga untuk menyikapi dinamika situasi terkini, yaitu untuk mengarahkan sektor pertanian dan pembiayaannya agar mampu bergerak efisien dan tanpa limbah, mendorong iklim yang kondusif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, mendukung pembangunan ramah lingkungan, meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga pembiayaan usaha serta menjaga bumi Indonesia dari kerusakan kimia dan pembakaran lahan sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari bumi ini untuk kesejahteraan yang abadi, dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari, N. Ilham dan S. Nuryanti, (2012). *Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi, Konsepsi dan Implementasi. Analisis Kebijakan Pertanian*, 10 (2): 181-198.

Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, (2016). *Laporan Pilot Project Skema Pembiayaan Pertanian melalui Penerapan Konsep Pembiayaan Rantai Nilai (Value Chain Financing)*.

- Direktorat Jenderal Peternakan. (2010). Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman. Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian, Jakarta.
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/23/114400526/8.Bank.Jadi.Pionir.Program.Kuangan.Berkelanjutan>.
- <http://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>.
- Lestari Hs, Sri. (2010). *Kajian Efektifitas Model Penumbuhan Kluster Bisnis UKM Berbasis Agribisnis*. Bidang Pengkajian Sumber daya UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, Desember (2014). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019*.
- Otto, Ben (2008, Juli 2008). Meninggalkan Ketergantungan pada Komoditas: Menggeser Kekuasaan ke Bawah Dalam Rantai Nilai. Fokus pada produk unggulan dan layanan paket lengkap dapat membantu Indonesia mempertahankan nilai dalam rantai nilai. *Competitiveness at the Frontier*.
- Priyanti, A. (2007). *Dampak Program Sistem Integrasi Tanaman-Ternak terhadap Alokasi Waktu Kerja, Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor Bogor. dari <http://sistemintegrasipadi-ternaksapipotong.blogspot.com/>.
- Soehadji, (1992). *Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pengembangan Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan*. Makalah Seminar. Direktorat Jenderal Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun (2009). Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widia W, Putra Kencana N., & Antara Semadi N. (2011). Modul 1: *Pelatihan bagi calon agrotechnoprenur yang berjudul "Model Bisnis Dalam Sistem Agribisnis Modern"*. TPC Project, Universitas UDayana.
- Winarso, B. dan E. Basuno. (2013). Pengembangan Pola Integrasi Tanaman-Ternak Merupakan Bagian Upaya Mendukung Usaha Pembibitan Sapi Potong dalam Negeri. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(2): 151-169.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN**

Prila Diah Triani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email: priladiahtriani@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this writing is to discuss the role of internal auditors in creating or implementing Good Corporate Governance and the efficiency of financial performance. The research method used is descriptive analytic. The data used is the primary data that is in the form of a questionnaire distributed to respondents. Adequate internal auditors plays a role in implementing an effective Good Corporate Governance and efficient financial performance. The better the performance of the internal auditors in the company then Good Corporate Governance and financial performance will be better, otherwise if the role of internal auditors in the company is bad then Good Corporate Governance and performance financial of company will also be bad. With the internal auditors in the company it will be benefit that is one of its ability to monitor and discipline management to provide periodic financial reports. By viewing or comparing the financial statements with the previous period can be known to efficiency and effectiveness of their financial performace, which can also be used as an evaluation of the internal control over the company itself.

Key Words: Good Corporate Governance, Financial Performance

ABSTRAK

Tujuan melakukan penulisan ini adalah untuk membahas peran auditor internal dalam menciptakan atau menerapkan Good Corporate Governance serta efisiensi kinerja keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu berupa kuisisioner yang didistribukan kepada responden. Audit Intern yang memadai berperan dalam menerapkan Good Corporate Governance yang efektif serta kinerja keuangan yang efisien. Semakin baik kinerja auditor internal pada perusahaan maka Good Corporate Governance dan kinerja keuangan akan semakin baik, sebaliknya jika tingkat peran auditor dalam sebuah perusahaan buruk maka Good Corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan juga akan menjadi buruk. Dengan adanya auditor internal perusahaan akan mendapatkan keuntungan yaitu salah satunya kemampuannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen untuk memberikan laporan keuangan secara berkala. Dengan melihat atau membandingkan laporan keuangan dengan periode sebelumnya dapat diketahui efisiensi dan efektifitas kinerja keuangannya, yang juga dapat dijadikan bahan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan itu sendiri.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan

1. PENDAHULUAN

Perusahaan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena menjalankan fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dipengaruhi oleh suatu rangkaian tata kelola. Agar perusahaan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka pemilik saham dan orang-orang yang ada didalam perusahaan perlu memikirkan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, pengelolaan perusahaan yang baik menjadi sangat penting seperti yang telah diterapkan pada pemerintah suatu negara. Dari pernyataan diatas telah menegaskan kedudukan penting perusahaan dalam menjalankan peran dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan sungguh-sungguh sehingga belum bisa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala saat melakukan penerapan *Good Corporate Governance*. Kendala tersebut berasal dari kendala internal, kendala eksternal dan kendala dari struktur kepemilikan perusahaan tersebut.

Perkembangan dunia ekonomi saat ini yaitu banyak perusahaan yang selalu mengejar keinginan untuk menjadi perusahaan yang terbaik, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu bersaing dan bertahan melawan perusahaan lain. Salah satu hal yang dilakukan agar perusahaan tersebut mampu bersaing dan bertahan melawan perusahaan lain adalah dengan cara mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitasnya. Karena jika sebuah

perusahaan memiliki kualitas yang baik dalam segala hal maka kegiatan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik.

Segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan pasti mempunyai tujuan yang dicapai yaitu salah satunya adalah dengan beban pengeluaran yang seminimal mungkin akan mendapatkan laba semaksimal mungkin untuk melangsungkan hidup dan perkembangan perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu melakukan pengawasan yang memadai dimana bisa membantu meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara melakukan pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga perlu menerapkan sistem *Good Corporate Governance* untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan diri bahwa akan memperoleh kembali investasi yang mereka tanam dengan wajar dan bernilai tinggi. Dengan adanya suatu sistem tata kelola perusahaan yang efektif maka dapat mengatur kewenangan direksi, dengan tujuan agar direksi tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya dan juga untuk memastikan bahwa direksi benar-benar bekerja untuk kepentingan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang tidak efektif akan menjadi penyebab krisis ekonomi dan juga kegagalan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Kinerja perusahaan yang dimaksud adalah apa yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan standar atau rencana yang ada pada perusahaan. dimensi kinerja perusahaan terdiri atas kinerja keuangan dan non keuangan. (Morse dan Davis,1996 dalam Pratolo, 2007; Kementerian).

Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditur), terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat (Daniri dan Simatupang, 2008).

Berdasarkan uraian pengertian diatas, bahwa pelaksanaan audit intern dalam suatu perusahaan berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tersebut terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan juga pelaksanaan audit intern yang baik mampu menciptakan kinerja keuangan suatu perusahaan seefisien mungkin sehingga salah satu tujuan perusahaan seperti yang telah dijabarkan diatas yaitu dengan beban pengeluaran yang seminimal mungkin dapat mencapai laba semaksimal mungkin dapat tercapai.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Audit Internal

2.1.1. Pengertian Audit Internal dan Auditor Internal

pengertian audit internal menurut IIA yang dikutip oleh Sawyer (2005: 9) menyatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut: "*Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi*".

Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008) adalah sebagai berikut:

"Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku".

Pengertian audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) adalah sebagai berikut:

"Audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*".

Jadi dapat disimpulkan pengertian audit internal adalah proses pemeriksaan laporan keuangan terhadap data pendukung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh auditor perusahaan.

Audit internal berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control serta efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam usaha hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha Sawyer's.(2005)

2.1.2. Tujuan Internal Audit

Menurut Agoes (2008) untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
- d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
- e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2.1.3. Fungsi dan Ruang Lingkup Auditor Internal

Internal audit berfungsi untuk alat bantu manajemen guna menilai tingkat efektif dan keefisienan pengendalian internal perusahaan, memberi saran ataupun rekomendasi serta memberikan nilai tambah untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan berikutnya.

Ruang lingkup audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan yaitu:

- a. Keandalan dan menyokong informasi;
- b. Sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontak;
- c. Pengamanan aktiva;

- d. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien;
- e. Tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi.

2.1.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Wewenang dan tanggung jawab auditor intern dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci mengenai tanggungjawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001) auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggungjawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-496/BL/2008 tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang auditor internal pada nomor 8 dan 9 adalah: tugas dan tanggung jawab audit internal meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 - h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Sedangkan wewenang Auditor Internal antara lain:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau Komite Audit serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan/ atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

2.1.5. Kedudukan dan Peran Auditor Internal

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan *job description* yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manajer. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan auditor internal ini.

Menurut Sukrisno Agoes (2004), ada empat alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi yaitu:

- a. Bagian internal audit berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan bagian akuntansi keuangan),
- b. Bagian internal audit merupakan staf direktur utama,
- c. Bagian internal audit merupakan staf dari dewan komisaris,
- d. Bagian internal audit dipimpin oleh seorang internal audit director.

Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, *lawyer*, investigator, *security* dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada *top management* yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

2.2. Good Corporate Governance

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan

prinsip GCG di semua lini masyarakat.

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Konsep *good corporate governance* yang kini muncul adalah sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun *good corporate governance* bukan merupakan konsep baru, tetapi masih saja salah dalam menafsirkan *good corporate governance* sesuai dengan kepentingannya.

Corporate Governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder value*) serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti kreditor, supplier atau pemasok, asosiasi usaha, konsumen pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal, 2002).

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa istilah *good governance* berbeda dengan *good management*. Apabila *good management* diartikan sebagai pengelolaan yang baik, maka *good corporate governance* diartikan sebagai pengelolaan yang melibatkan hubungan dengan berbagai pihak untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan.

Definisi lain mengenai *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

1. Asas *Good Corporate Governance*

Prinsip *good corporate governance* diharapkan menjadi titik terang dalam pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *corporate governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/M/MBU/2002, prinsip-prinsip *good corporate governance* mencakup:

- a. **Transparansi**
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. **Kemandirian**
yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. **Akuntabilitas**
yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. **Pertanggung Jawaban**
yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat penerapan *good corporate governance* yaitu:

- a. Perbaikan dalam komunikasi;
- b. Minimalisasi potensial benturan;
- c. Fokus pada strategi-strategi utama;
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi;
- e. Kesinambungan manfaat (*sustainability of benefits*);
- f. Promosi citra korporat (*corporate image*);
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan;
- h. Perolehan kepercayaan investor.

Dengan *good corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, (misalnya, direksi), akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, *good corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

3. Unsur-unsur Yang Terlibat Dalam *Good Corporate Governance*

Menurut pedoman *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat didalam pelaksanaan *good corporate governance*, yaitu:

a. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu institusi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya. Pemegang saham ini mempunyai hak-hak dan kewajiban, yaitu:

- 1) Hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan ketentuan saham yang dimilikinya.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur.
- 3) Hak menerima sebagian keuntungan perseroan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.
- 4) Setiap Pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perseroan dan hak pemegang saham.
- 5) Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara berdasarkan asas.
- 6) Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian didalam

- perseroan harus menyadari tanggung jawab pada saat ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perusahaan.
- b. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh karena itu maka peranan Dewan Komisaris adalah menilai system penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci, memonitor mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu, dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi perusahaan.
- c. Direksi
Direksi bertugas untuk mengelola perseroan agar mencapai tujuan perusahaan, dan Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- d. Komite Audit
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan audit internal di perseroan.
- e. Sekretaris Perusahaan
Fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.
- f. Manajer dan karyawan
Manajer menepati posisi yang strategis karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan dari hari ke hari. Manajer profesional biasanya mengambil peran penting dalam organisasi besar, sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial dan tanggung jawab organisasional yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Karyawan khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat memengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.
- g. Auditor Internal
Auditor Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki akses langsung ke Komite Audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada Auditor Internal untuk melaksanakan tugasnya. Auditor internal membantu manajemen senior dalam mengambil risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.
- h. Auditor Eksternal
Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/ pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dan opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan keuangan perusahaan.
- i. Stakeholder Lainnya
Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai kewajiban perusahaan dalam hal perpajakan. Kreditor yang memberikan pinjaman memungkinkan juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

4. Karakteristik Good Corporate Governance

UNDP (2007: 8) mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari *good corporate* yang bisa dijadikan ukuran, apakah telah tercapai *good governance* tersebut. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

- a. *Equality*, semua orang, laki-laki, perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
- b. Supremasi hukum, dalam negara yang mengatur adalah hukum yang adil, *fair* dan tidak memihak. Semua orang termasuk pemerintah harus tunduk kepada aturan-aturan hukum.
- c. Transparansi, proses pengambilan keputusan harus terbuka, dan ada akses yang sama terhadap segala informasi terhadap masyarakat.
- d. Akuntabilitas, proses pengambilan keputusan harus bisa dimonitor dan dikritisi, yaitu para pengambil keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan.
- e. *Responsiveness*, semua instansi dan lembaga mendengar, mempertimbangkan dan merespon tuntutan-tuntutan masyarakat dan opini publik yang berkembang.
- f. Partisipasi sebanyak mungkin dari masyarakat, langsung atau tidak langsung, terjadi dalam proses pengambilan keputusan publik.
- g. *Effectiveness*, keseluruhan proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cara-cara yang cepat, murah dan sederhana.

Good governance dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Government Governance* (GGG). *good corporate governance* adalah penerapan *good governance* disektor swasta, sedangkan *good government governance* adalah penerapan *good governance* di birokrasi negara. Kedua kelompok *good governance* tersebut merupakan dua sisi

mata uang yang tidak dapat dipisahkan. GCG hanya dapat diterapkan lingkungan dimana pemerintahan atau birokrasi negara telah menerapkan GGG, demikian sebaliknya, GGG tidak mungkin terealisasi tanpa dukungan GCG.

5. Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimal. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Pengertian efisiensi menurut Susili adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Menurut Lubis, pengertian efisiensi ialah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input. Rahardjo Adisasmita mengungkapkan efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.

2. Kinerja Keuangan

Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari cara perusahaan tersebut mengatasi keuangannya. Jika keuangan perusahaan tersebut stabil atau mengalami peningkatan yang signifikan maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut telah berjalan dengan baik.

Pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok

orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

2.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

IAI (2009) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan.

2.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas operasionalnya, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan tingkat stabilitas suatu perusahaan (Munawir, 1999).

Rasio keuangan merupakan bentuk informasi akuntansi yang penting bagi perusahaan selama suatu periode

tertentu. Berdasarkan rasio tersebut, dapat dilihat keuangan yang dapat mengungkapkan posisi, kondisi keuangan maupun kinerja ekonomis dimasa depan dengan kata lain informasi akuntansi.

Menurut Hanif dan Halim (2009) beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan:

- a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
- b. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian atau kegiatan lainnya untuk menunjukkan efisien dan efektifitas kinerja keuangannya.
- c. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan sebagainya.
- d. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi.
- e. Rasio pasar
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham.

2.3.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Mabruroh (2004) melakukan penelitian tentang manfaat dan pengaruh rasio keuangan dalam analisis kinerja keuangan perbankan pada perusahaan *go public* yang tercatat di BEJ pada tahun

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

2000. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas, hasilnya menyimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial dan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan perbankan.

Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Salah satu tujuan terpenting dalam pengukuran kinerja keuangan selain empat tujuan yang disebutkan di atas adalah untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan perusahaan telah tercapai, sehingga kepentingan investor, kreditor dan pemegang saham dapat terpenuhi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian dalam penyusunan paper ini adalah merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor telekomunikasi yang terletak di JL. Moch Kahfi I Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

2.6. Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari suatu populasi yang akan diteliti. Sampel tersebut sebagai perwakilan, harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara pengambilan objek dari sampel yang dinamakan responden. Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Metode pengambilan sampel dibagi kedalam dua kategori, yaitu metode pengambilan dengan acak (*probability sampling*) dan metode pengambilan dengan tidak acak (*nonprobability sampling*). Yang dimaksud dengan

metode pengambilan sampel dengan acak (*probability sampling*) menurut Sugiyono (2011), adalah teknik pengambilan yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sedangkan metode pengambilan sampel dengan tidak acak (*nonprobability sampling*) menurut Sugiyono (2011) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dikarenakan jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 100 sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah sampel jenuh, yang artinya semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian yakni sebesar 15 orang pegawai pada salah satu perusahaan swasta yang saya teliti.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data terkait dengan objek penelitian. Untuk dapat memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Penelitian ini menggunakan data primer berupa memberikan lembar kuisioner (angket) kepada responden dan juga melakukan wawancara kepada beberapa karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisioner dan wawancara. Metode kuisioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden

(Sugiyono, 2011). Sedangkan metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

3.3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa peran auditor internal dalam penerapan *good corporate governance* dan efisiensi kinerja keuangan penulis terlebih dahulu melakukan:

3.3.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini dilakukan kepada data karakteristik responden. Tujuannya untuk mengetahui distribusi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir diperusahaan yang diteliti ini.

3.3.2. Pengujian Instrumen dan Data

3.3.2.1. Uji Validitas Data

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2011).

Dari pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa uji validitas merupakan cara untuk mengukur tingkat kesamaan atau kesesuaian atas suatu penelitian dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi product moment seperti dibawah ini:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n.\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara x dan y

r_{xy}

n = Jumlah sampel

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah skor total

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor total

Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan pada kriteria sebagai berikut:

- Jika R hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
- Jika R hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Dari acuan rumus di atas, penulis akan menggunakan media *Microsoft Excel* dalam mengolah data yang telah di dapat dari hasil perhitungan kuisioner yang telah disebarkan kepada responden.

3.3.2.2. Uji Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas menurut Ghazali (2011) suatu variabel penelitian dikatakan reliabel apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Hasil *conbrach alpha* > 0,6 dinyatakan reliabel.

Hasil *conbrach alpha* < 0,6 dinyatakan tidak reliabel.

- Mencari varian butir.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

$$S_i^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n}$$

b. Mencari varian total

$$St^2 = \frac{\sum Xt^2 - \frac{(\sum Xt)^2}{n}}{n}$$

c. Mencari reliabilitas

$$r_{ca} = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum St^2}{St^2} \right\}$$

Keterangan:

r_{ca} = nilai reliabilitas

S_i = varians skor tiap item pertanyaan

St = varians total

k = jumlah item pertanyaan

X_i = jumlah skor item pertanyaan

n = jumlah responden atau sampel

Xt = jumlah skor seluruh item pertanyaan.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila *Conbrach Alpha* > 0,6 dinyatakan reliabel.
- b. Apabila *Conbrach Alpha* < 0,6 dinyatakan tidak reliabel.

3.3.2.3. Korelasi

Korelasi bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara dua variabel yaitu Internal Auditor (X) terhadap *Good Corporate Governance* dan Efisiensi Kinerja Keuangan (Y) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Jumlah sampel

n = Jumlah responden

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

Dimana hasil korelasi ditemukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0.00 – 0.19	Korelasi sangat lemah
0.02 – 0.39	Korelasi lemah
0.40 – 0.59	Korelasi sedang
0.60 – 0.79	Korelasi kuat
0.80 – 1.00	Korelasi sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2009)

3.3.2.4. Regresi Linear Sederhana

Metode ini didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen Sugiyono (2011: 270). Persamaan umum regresi linear sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\hat{Y} = Variabel terikat (nilai yang diprediksikan)

a = Harga Y bila $X=0$ (Harga konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen

X = Variabel bebas

Untuk menyelesaikan persamaan regresi ini, maka harus hitung terlebih dahulu nilai a dan b . Cara menghitung nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

3.3.2.5. Koefisien Determinasi

Setelah mengetahui korelasi person untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel, maka selanjutnya digunakan rumus koefisien determinasi untuk menguji signifikansi hubungan yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi, Sugiyono (2011).

Analisis determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya variasi persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai r^2 , maka semakin besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Rumus koefisien determinasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dimana:

KD = Koefisien Determinasi

rs^2 = Koefisien Korelasi *product moment*

3.3.2.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dirumuskan akan diterima atau ditolak. Maka rumus yang digunakan menurut Sugiyono(2011:243) adalah:

$$t = \frac{rs\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-rs^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t_{hitung}

rs = Koefisien Korelasi *product moment*

n = Banyaknya sampel

Prosedur pengujian sebagai berikut:

- a. Tarif signifikan (α) = 0,05
- b. Tarif nyata = 95%
- c. Derajat kebebasan = n-2

Adapun hipotesis yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, Tidak terdapat pengaruh Internal Auditor terhadap Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan.

$H_a : \beta \neq 0$, Terdapat pengaruh Internal Auditor terhadap Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan.

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.3.2.7. Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang peneliti jadikan penelitian yaitu: "Peranan internal auditor dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan efisiensi kinerja keuangan pada salah satu perusahaan swasta di Jakarta". Maka terdapat dua variabel penelitian, yaitu:

- a. Variabel bebas (*independent*), yang menjadi variabel ini adalah Peran Internal Auditor (variabel X).
- b. Variabel terikat (*dependent*), yang menjadi variabel ini adalah Penerapan *Good Corporate Governance* dan Efisiensi Kinerja Keuangan (variabel Y)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan sampel 10 orang dan masing-masing responden diberikan 10 pernyataan kuisioner yang terdiri dari 10 pernyataan tentang variabel X (Internal Auditor) dan 10 pernyataan tentang variabel Y (Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan) yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	3	30%
2.	Perempuan	7	70%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2016

Berdasarkan data diatas bahwa presentase jenis kelamin pekerja yang populasinya paling banyak adalah pekerja yang memiliki jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 70%, sedangkan persentase golongan pekerja yang populasinya paling kecil adalah pekerja yang memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 30%.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

b. Pendidikan

Tabel 4.2. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase
1.	SMA	6	60%
2.	D3	3	30%
3.	S1	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Kuisisioner, 2016

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pendidikan pegawai adalah SMA yaitu sebanyak 6 orang atau 60%, D3 sebanyak 3 orang atau 10%, S1 sebanyak 1 orang atau 10%.

4.2. Pembahasan

Tabel 4.3. Data Penelitian Variabel Internal Auditor (X)

NO.	PERNYATAAN VARIABEL AUDIT INTERNAL (X)										SKOR	SKOR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	4	3	4	5	5	4	3	5	4	5	42	1764	
2	5	4	4	5	3	4	4	4	3	4	40	1600	
3	4	4	3	5	5	5	4	5	5	5	45	2025	
4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	5	36	1296	
5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	46	2116	
6	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48	2304	
7	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	47	2209	
8	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	39	1521	
9	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	37	1369	
10	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	48	2304	
											428	18508	
Rhitung	0.6164387	0.5514953	0.5953722	0.625817	0.6939496	0.6938042	0.5646829	0.6312503	0.7795079	0.6214309		8	
Rtabel	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494		5%	
Keterangan	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid		18508	
Thitung	2.2143072	1.8699416	2.0959199	2.2694179	2.7260021	2.7249009	1.9352345	2.30208	3.5198088	2.2434484			
Ttabel	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955		183184	
Keterangan	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid		18318.4	
Xi	42	39	42	44	43	44	42	43	42	47	428	189.6	
Xi ²	184	155	182	200	191	196	182	189	182	223	1884	st	18.96
Si	0.76	0.29	0.56	0.64	0.61	0.24	0.56	0.41	0.56	0.21	4.84		
	1764	1521	1764	1936	1849	1936	1764	1849	1764	2209			
	176.4	152.1	176.4	193.6	184.9	193.6	176.4	184.9	176.4	220.9		0.255274262	
	7.6	2.9	5.6	6.4	6.1	2.4	5.6	4.1	5.6	2.1		0.744725738	
													1.1111111
Hasil Korelasi	0.761773											rca (realibilitas)	0.827473

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Tabel 4.4. Data Penelitian Variabel GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan (Y)

NO.	PERNYATAAN VARIABEL GCG dan EKK (Y)										SKOR	SKOR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	4	4	4	4	5	2	4	4	3	4	38	1444	
2	4	4	5	3	3	3	3	3	3	4	35	1225	
3	4	4	5	5	4	4	3	3	5	5	42	1764	
4	4	4	5	5	3	3	4	3	5	5	41	1681	
5	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	46	2116	
6	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48	2304	
7	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48	2304	
8	4	3	4	5	3	3	4	3	4	3	36	1296	
9	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38	1444	
10	4	4	5	5	4	3	5	4	4	5	43	1849	
											415	17427	
Rhitung	0.718681896	0.7703413	0.6031894	0.6667408	0.6255999	0.5528322	0.5844226	0.7502989	0.778612	0.8076314		8	
Rtabel	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494	0.5494		5%	
Keterangan	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid		17427	
Thitung	2.923378888	3.4171045	2.1390191	2.5303282	2.2681242	1.8764666	2.0370916	3.2100585	3.509526	3.8737901			
Ttabel	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955	1.85955		172225	
Keterangan	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid		17222.5	
Xi	42	41	47	46	39	34	41	37	43	45	415	204.5	
Xi ²	178	171	223	216	159	122	173	143	191	207	1783	st	20.45
Si	0.16	0.29	0.21	0.44	0.69	0.64	0.49	0.61	0.61	0.45	4.59		
	1764	1681	2209	2116	1521	1156	1681	1369	1849	2025		0.224449878	
	176.4	168.1	220.9	211.6	152.1	115.6	168.1	136.9	184.9	202.5		0.775550122	
	1.6	2.9	2.1	4.4	6.9	6.4	4.9	6.1	6.1	4.5		1.1111111	
Hasil Korelasi	0.76177256											rca (realibilitas)	0.8617224

Sumber : Data Pengolahan, 2016

4.2.1. Uji Validitas Variabel (X) Internal Auditor dan Variabel (Y) Penerapan Good Corporate Governance dan Efisiensi Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap butir pernyataan variabel Internal Auditor (X) dan variabel Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan (Y) maka dapat dihitung dengan uji validitas yang berarti pengujian terhadap instrumen, sehingga diketahui instrumen tersebut layak atau

tidak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Berikut adalah rumus untuk menentukan validitas instrumen dari setiap pernyataan menggunakan *product moment*:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Berdasarkan data perhitungan tabel 4.3. diatas dapat diketahui bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa butir pernyataan no. 1 variabel X adalah valid. Dan berikut pernyataan sampai dengan no. 10:

Tabel 4.5. Hasil Analisis Item Instrumen Variabel Kepemimpinan (X)

No Pernyataan	(r hitung)	(r tabel)	Keterangan
1	0,6164387	0.5494	Valid
2	0,55149526	0.5494	Valid
3	0,5953722	0.5494	Valid
4	0,62581698	0.5494	Valid
5	0,69394958	0.5494	Valid
6	0,69380421	0.5494	Valid
7	0,56468291	0.5494	Valid
8	0,63125026	0.5494	Valid
9	0,77950793	0.5494	Valid
10	0,62143094	0.5494	Valid

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4. diatas dapat diketahui bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa

butir pernyataan no. 1 variabel Y adalah valid. Dan berikut pernyataan sampai dengan no. 10:

Tabel 4.6. Hasil Analisis Item Instrumen Variabel Kinerja Pegawai (Y)

No Pernyataan	(r hitung)	(r tabel)	Keterangan
1	0,7186819	0.5494	Valid
2	0,77034133	0.5494	Valid
3	0,60318941	0.5494	Valid
4	0,66674075	0.5494	Valid
5	0,62559989	0.5494	Valid
6	0,55283233	0.5494	Valid
7	0,58442264	0.5494	Valid

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

8	0,75029888	0.5494	Valid
9	0,778612	0.5494	Valid
10	0,80763135	0.5494	Valid

4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan peneliti memiliki nilai tetap. Dari hasil data dalam tabel 4.3. diatas diketahui bahwa nilai reliabilitas pada variabel X (Internal Auditor) adalah 0,83. Pengujian reliabilitas dikatakan reliabel apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Hasil *Conbrach Alpha* > 0,6 dinyatakan reliabel.

Hasil *Conbrach Alpha* < 0,6 dinyatakan tidak reliabel.

Jika nilai *alpha* > 0,6 reliabilitas mencukupi atau $0,83 > 0,6$ maka instrumen variabel X dapat dikatakan reliabel.

Dari hasil data dalam tabel 4.4. diatas diketahui bahwa nilai reliabilitas pada variabel Y (Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan) adalah 0,86. Pengujian reliabilitas dikatakan reliabel apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Hasil *Conbrach Alpha* > 0,6 dinyatakan reliabel.

Hasil *Conbrach Alpha* < 0,6 dinyatakan tidak reliabel.

Jika nilai *alpha* > 0,6 reliabilitas mencukupi atau $0,86 > 0,60$ maka instrumen variabel Y dapat dikatakan reliabel.

4.2.3. Uji Koefisiensi Korelasi

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan koefisien kolerasi *product moment*.

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4.3. dengan menggunakan rumus kolerasi *product moment* didapat hubungan antara Internal Auditor terhadap Penerapan GCG dan Efisiensi

Kinerja Keuangan sebesar 0,761772716. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar kedua variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Koefesien Kolerasi	Tingkat Hubungan
0	Tidak Ada Hubungan
0,00 – 0, 99	Sangat Rendah
0,20 – 0, 399	Rendah
0,40 – 0, 599	Sedang
0,60 – 0, 799	Kuat
0, 80 – 1,000	Sangat Kuat
1	Sempurna

Berdasarkan tabel hubungan koefesien kolerasi *product moment* di atas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel Internal Auditor (X) terhadap variabel Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan (Y) adalah kuat.

4.2.4. Uji Regresi

Penelitian analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 19 Depok. Salah satu model yang paling mudah untuk menjelaskan pengaruh itu adalah regresi sederhana yaitu:

$$y = a + bx$$

Dimana rumusnya:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum x^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum y - b \sum X}{n}$$

n = Jumlah sampel

X = Variabel Kepemimpinan (X)

Y = Variabel Kinerja Pegawai (Y)

n = 10

$\sum X$ = 428

$\sum Y$ = 415

$$\begin{aligned}\sum X^2 &= 18508 \\ \sum Y^2 &= 17427 \\ \sum X.Y &= 17912\end{aligned}$$

a. Menghitung rumus b

$$\begin{aligned}b &= \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{10(17912) - (428)(415)}{10(18508) - (428)^2} \\ &= \frac{179120 - 177620}{185080 - 183184} \\ &= \frac{1500}{1896} = 0,7911\end{aligned}$$

b. Menghitung rumus a

$$\begin{aligned}a &= \frac{\sum y - b \sum X}{n} \\ &= \frac{415 - 0,7911(428)}{10} \\ &= \frac{415 - 338,6}{10} \\ &= \frac{76,4}{10} = 7,64\end{aligned}$$

c. Persamaan Regresi

$$\begin{aligned}\hat{y} &= a + b x \\ \hat{y} &= 7,64 + 0,7911X\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh persamaan yang berbentuk $Y = 7,64 + 0,7911X$. Hasil uji dengan statistik menunjukkan persamaan regresi linear tersebut berarti persamaan tersebut dapat digunakan untuk menaksir nilai Y jika X diketahui.

Dari persamaan terlihat bahwa koefisien b bernilai positif, ini menunjukkan bahwa perubahan Y akan meningkat jika X meningkat, sebaliknya nilai Y akan menurun jika nilai X menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Internal Auditor berperan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan Efisiensi Kinerja Karyawan pada perusahaan yang penulis teliti.

4.2.5. Uji Koefisien Determinasi

Setelah mengetahui besarnya peran Internal Auditor terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan Efisiensi Kinerja Keuangan dengan menggunakan koefisien korelasi, maka selanjutnya dicari koefisiensi determinasi

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X terhadap Y, yaitu dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned}KD &= r^2 \times 100\% \\ KD &= (0,762)^2 \times 100\% \\ KD &= (0,581) \times 100\% \\ KD &= 58,1\%\end{aligned}$$

Nilai koefisiensi determinasi di atas menunjukkan bahwa Auditor Internal memberikan kontribusi sebesar 58,1% sedangkan selebihnya yaitu 41,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

4.2.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk selanjutnya dilakukan uji signifikan korelasi dengan menggunakan uji t untuk mengetahui apakah kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, maka uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : $\beta = 0$, Tidak terdapat pengaruh Internal Auditor terhadap Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan.

Ha : $\beta \neq 0$, Terdapat pengaruh Internal Auditor terhadap Penerapan GCG dan Efisiensi Kinerja Keuangan.

$$\begin{aligned}t &= \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ &= \frac{0,762 \sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0,762^2}} \\ &= \frac{0,762 \cdot 2,83}{\sqrt{1-0,581}} \\ &= \frac{2,16}{\sqrt{0,419}} \\ &= \frac{2,16}{0,647} \\ t &= 3,34\end{aligned}$$

Hasil t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil t_{tabel} untuk kesalahan 5% dan dk: $n-2 = 10-2 = 8$ maka diperoleh t_{tabel} (1,85955). Jadi dari hasil perhitungan uji hipotesis diatas maka dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,34 > 1,85955$ maka menunjukkan hasil yang signifikan atau dengan kata

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

lain $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat peran yang signifikan antara Internal Auditor terhadap penerapan *Good Corporate Governace* dan Efisiensi Kinerja Keuangan.

4.3. Pembahasan

Internal Auditor adalah penilai independen yang merupakan bagian dari pengendalian intern perusahaan yang berfungsi mengawasi, menguji serta mengevaluasi keandalan dan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan secara keseluruhan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Standar Audit adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh unit dan auditor intern dalam melaksanakan tugasnya agar kualitas kinerja auditor dan hasil auditnya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi audit intern yang terdapat pada salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai berikut:

Independensi Audit Intern

Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor intern di perusahaan yang penulis teliti tidak terpisah dari kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan penyebaran kuisioner, pada variabel keenam sebanyak 60% responden menyatakan setuju bila auditor intern melakukan pekerjaan secara independen. Auditor independen dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan namun secara bebas dan objektif. Terpisahnya kedudukan audit intern dengan organisasi ini perusahaan akan menyulitkan auditor dalam melihat catatan-catatan, mewawancarai, meninjau dan memeriksa fasilitas yang digunakan oleh objek yang diperiksa.

Kecakapan Profesional

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner sebanyak 80% responden setuju jika auditor intern yang berkecimpung di dalam kegiatan audit seharusnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, serta pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Staf Audit Intern yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi dapat memperdalam pengetahuannya dengan mengikuti pendidikan khusus secara formal, baik yang ada dalam perusahaan maupun luar perusahaan.

Berdasarkan penyebaran kuisioner menunjukkan 50% responden menyatakan bahwa auditor intern bekerja secara profesional. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama antara tim audit intern dengan semua bagian yang terlibat dalam perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Program Audit

Audit intern di perusahaan membuat perencanaan dan program pemeriksaan sebelum melaksanakan tugas, agar dapat melaksanakan pemeriksaan secara terarah dan teratur sehingga dapat selesai tepat waktu. Perencanaan tersebut harus disetujui oleh pimpinan baru dapat dilaksanakan. Program audit tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaksanaan Audit

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner pada perusahaan ini menunjukkan 20% responden menyatakan pelaksanaan audit intern dalam menjalankan tugasnya kurang baik dalam menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan selama pelaksanaan proses audit.

Perwujudan A Good Corporate Governance dan Efisiensi Kinerja Keuangan

Perusahaan ini setiap setahun sekali akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi agar terus meningkatkan kinerjanya demi kemajuan perusahaan. Namun perusahaan juga telah menyiapkan sanksi bagi para karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan.

Perusahaan ini pun ikut andil dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan mengadakan acara kunjungan ke yayasan yatim piatu setiap enam bulan sekali. Para karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut juga bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga tidak ada karyawan yang menanggung beban lebih pekerjaan yang bukan merupakan tanggung jawabnya.

Semua karyawan ditanamkan pemikiran agar bekerja sesuai dengan visi, misi dan strategi perusahaan. Dan semua karyawan diwajibkan menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut. Setiap karyawan telah diberikan pemberitahuan kode etik sesuai dengan bagiannya dengan cara pendistribusian lembar kode etik agar dapat dipelajari dan dipahami.

Perusahaan ini memberikan informasi yang wajar kepada publik, dan pemegang saham. Hubungan dengan karyawan terus dijaga yaitu dengan menghindari praktek diskriminasi, antara lain menghormati hak asasi karyawan, memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, bangsa, agama dan gender, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga.

Perusahaan ini selalu berusaha untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik agar sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Tingkat perputaran piutang diperusahaan ini bisa dibilang cukup baik berdasarkan hasil kuisioner lebih dari 50% setuju bahwa piutang dapat tertagih sesuai dengan standar yang ditentukan

dan dalam jangka waktu kurang dari 60 hari. Persediaan yang berada diperusahaan ini pun tidak terlalu lama mengendap. Perusahaan ini menyusun cara membeli persediaan untuk pembangunan tower telekomunikasi apabila telah diketahui bahwa tender tersebut pasti akan dijalankan oleh perusahaan ini. Sehingga material yang digunakan dalam pembangunan tidak akan terbuang sia-sia, karena spesifikasi material pembangunan terkadang bisa berubah-ubah sesuai dengan arahan rencana pembangunan dari vendor.

Perusahaan ini pun dapat memanfaatkan asetnya secara baik, dengan asset yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan pendapatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian pada salah satu perusahaan serta pembahasan yang berlandaskan teori, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Audit intern atas penerapan *Good Corporate Governance* dan Efisiensi Kinerja Keuangan pada perusahaan ini telah dilaksanakan dengan memadai. Hipotesis penelitian dapat diterima karena tingkat signifikansi menunjukkan hasil $3,34 > 1,85955$ untuk bagian yang terkait, sehingga dapat disimpulkan "Audit intern yang memadai berperan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan Efisiensi Kinerja Keuangan". Koefisien korelasi antara peranan audit intern dalam penerapan GCG dan efisiensi menunjukkan hasil 0.761, berarti antara audit intern dalam penerapan GCG dan Efisiensi Keuangan menunjukkan hubungan positif yang kuat.
- b. Peranan audit intern pada perusahaan ini dalam penerapan *good corporate goverment* dan efisiensi kinerja keuangan berperan secara memadai

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

5.2. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian pada salah satu perusahaan serta pembahasan yang berlandaskan teori, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Peranan Auditor Internal tetap ditingkatkan untuk membentuk iklim *Good Corporate Governance* dan Efektifitas Efisiensi Keuangan.
- b. Pada penelitian berikutnya, diharapkan dapat menganalisis Perusahaan lain dengan periode amatan yang lebih diperpanjang dan *sampling* diperbanyak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara umum.
- c. Analisis penilaian kinerja perusahaan dilakukan tidak hanya berdasar data-data historis, tetapi dilakukan dengan analisa yang lebih mendalam mengenai aspek manajemen dan aspek-aspek yang lain dari segi kualitasnya.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/M/MBU/2002.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004. *Standar Profesi Audit Internal*, Jakarta :Yayasan Pendidikan Internal Audit.

Komite Kebijakan Governance (KNKG) (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Diakses dari http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.

Mabruroh. 2004. Manfaat dan Pengaruh Rasio Keuangan dalam Analisis Kinerja Keuangan Perbankan. *Benefit*. Vol. 8, No. 1: 37-51.

Pratolo, Suryo. 2007, *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada Jenis Perusahaan*, SNA X Unhas Makasar, Juli 26-28, Makasar.

Sawyer, L, B., Dottenhofer, M. A dan Scheiner J. H, 2005. *Sawyer's Internal Auditing*, Buku 1, Edisi 5, Jakarta :Penerjemah Desi Anhariyani, Salemba Empat.

Surat Keputusan Menti BUMN Nomor: KEP- 496/BL/2008 tentang Tugas, tanggung jawab dan wewenang auditor internal pada nomor 8 dan 9.

Slamet Munawir. 1999. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.

Sukrisno Agoes, 2008. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi

DAFTAR PUSTAKA

Daniri,M.A dan Simatupang A.I,2008, *Transformasi Audit Internal Menuju Terwujudnya GoodCorporateGovernance*.http://www.aajassociates.com/download/GCG_Bisnis_Indonesia_20_Jan_2008.pdf (9 Juni 2011).

Ghozaly, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponogoro; Semarang

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.

Ketiga Jakarta. Lembaga Penerbit
FEU1.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian
Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT

Rabi’ah Al Adawiyah*), Sugiyanto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

**Email: rabiahadawiyah17@gmail.com*

ABSTRACT

The aim of this research is to know the influence of firm characteristics to sustainability report disclosure. Characteristics in use in this research is Firm Size, Profitability, Liquidity, and Leverage. The Population in this research is syari’ah companies in Indonesia Stock Exchange (BEI) and Indonesia Stock Syari’ah Indeks (ISSI) in 2013-2015. This research used Purposive Sampling method and Stratified Random Sampling for take the sample. From that method, the amount of samples are 27 companies. The method of statistical analysis used Logistic Regression. All process of data used IBM SPSS Statistic Program Version 20. The result from this research, Firm Size and Profitability has positive influence to Sustainability Report Disclosure. On the other hand, Liquidity and Leverage has not influence to Sustainability Report Disclosure.

Key Words: Firm Size, Profitability, Liquidity, Leverage, and Sustainability Report

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan Sustainability Report. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage. Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan syari’ah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) selama 2013-2015. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling dan Stratified Random Sampling. Berdasarkan kedua metode tersebut, jumlah sampel yang digunakan adalah 27 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Uji Regresi Logistik. Seluruh perhitungan menggunakan IBM SPSS Versi 20. Berdasarkan hasil penelitian ini, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability Report. Sedangkan, Likuiditas dan Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Sustainability Report

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi semacam evolusi dalam praktik pelaporan keuangan, yaitu semakin banyaknya informasi yang diungkap dalam laporan keuangan melalui pengungkapan sukarela. Dalam pengungkapan sukarela, aspek yang

diungkap adalah aspek lingkungan dan sosial. Pengungkapan aspek ini berguna untuk mengetahui bagaimanakah dampak terhadap lingkungan dan sosial atas bisnis yang dijalankan perusahaan (Chariri dan Ghozali, 2014: 429).

Dorongan untuk mengungkapkan laporan sukarela tidak hanya semata-

mata akibat evolusi dalam praktik pelaporan keuangan, tetapi juga karena akibat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Sehingga mereka menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas, terutama informasi tentang lingkungan dan juga sosial, serta bertanggung jawab atas dampak yang telah ditimbulkan dari segala bentuk kegiatan operasional perusahaan, baik dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan maupun bagi masyarakat (sosial).

Green accounting merupakan sebuah teori yang dirasa tepat untuk dijadikan sebagai teori dasar dari praktik pengungkapan sukarela tersebut. *Green (environmental) accounting* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya lingkungan (*environmental costs*) dan manfaat atau efek ekonomi (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) (Almilia dan Wijayanto, 2007 dalam Kusumaningtias, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *green accounting* dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungan. Dalam penerapan *green accounting*, *sustainability report* merupakan sebuah media yang tepat sebagai bentuk pelaporan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Sustainability (keberlanjutan) sendiri merupakan sebuah keseimbangan yang terjadi antara *People-Planet-Profit* yang dikenal dengan *triple bottom line*. *triple bottom line* merupakan sebuah konsep pelaporan akuntansi ke publik yang tidak hanya mencakup kinerja ekonomi saja, tetapi juga mencakup kinerja sosial dan lingkungannya

(Belkoui dan Ronald, 1991; Idris, 2012 dalam Kusumaningtias, 2013). Konsep ini merupakan konsep yang mendasari pembuatan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Ia menyatakan bahwa kinerja sebuah perusahaan tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya saja (*single bottom line*), tetapi juga melihat *social responsibility* dan *environmental responsibility* yang dilakukan perusahaan. Manajemen suatu perusahaan harus dapat menangkap paradigma pertumbuhan ekonomi menjadi motivasi dalam pengembangan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainability development*), karena perusahaan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian (Fauzi, 2010 dalam Yanti dan Rasmini, 2015). Maka dari itu, *sustainability report* dapat dijadikan sebagai penyampai informasi tentang aspek-aspek tersebut yang nantinya dapat mendukung pembangunan perusahaan yang berkelanjutan.

Selain sebagai bentuk penyampaian informasi, pengungkapan *sustainability report* dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial perusahaan. Para pemimpin perusahaan semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif, tidak hanya laporan keuangan saja, akan mendukung strategi perusahaan. *sustainability report* dapat didefinisikan sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada *stakeholder* internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang berwawasan multi dimensional dalam mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi (Natalia dan Tarigan, 2014). Syukron (2015) berpendapat bahwa selain mencapai kualitas hidup yang tinggi, dengan adanya pengungkapan *sustainability report* yang tidak hanya direfleksikan dalam kondisi ekonomi

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

saja, dapat menjamin nilai perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

Baik *green accounting*, *triple bottom line*, maupun *sustainability report* yang diterapkan dan diungkapkan perusahaan, jika ditelisik lebih dalam ternyata sesuai dengan prinsip syari’ah. Konsep yang berisikan tidak hanya keuntungannya saja yang diungkapkan atau disampaikan kepada masyarakat tetapi juga dampak yang ditimbulkan serta pemanfaatan atas sumber daya yang berasal dari alam (lingkungan) membuktikan bahwa bisnis bukanlah hanya sebuah kegiatan yang hanya mencari keuntungan semata serta pengeksploitasian terhadap alam, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi lingkungan sekitarnya. Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa lingkungan telah disiapkan oleh Allah SWT sebagai sumber-sumber kehidupan bagi manusia. Pernyataan ini terdapat dalam Q.S. Al-Hijr: 19-20 yang berbunyi:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta Kami tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya”.

Dalam pengungkapan *sustainability report* itu sendiri, terdapat beberapa karakteristik perusahaan yang menjadi faktor dalam pengungkapan laporan tersebut, diantaranya profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang menghitung tentang laba atau kesuksesan operasi sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan suatu informasi, terutama informasi tambahan seperti informasi lingkungan dan sosial karena apabila sebuah

perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap memiliki tingkat laba yang tinggi pula, sehingga perusahaan tersebut memiliki biaya yang cukup atau bahkan lebih untuk melakukan pengungkapan informasi tambahan seperti *sustainability report*.

Likuiditas dapat menjadi salah satu faktor penentu yang penting bagi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja perusahaan yang baik. Suatu kinerja perusahaan yang baik, dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin terlihat baik dimata para *stakeholder* nya dengan mengungkapkan informasi tambahan seperti dengan membuat *sustainability report*. Apabila perusahaan sudah dipandang baik oleh *stakeholder* nya, diharapkan para *stakeholder* semakin percaya dengan perusahaan dan akan menanamkan modalnya lebih banyak.

Leverage merupakan sebuah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan mendanai perusahaannya dengan hutang. *leverage* ini dapat mempengaruhi pengungkapan informasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena pada saat tingkat *leverage* perusahaan itu tinggi, maka perusahaan akan cenderung melakukan pengurangan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, tingkat *leverage* sebuah perusahaan dapat mempengaruhi penentuan keputusan untuk melakukan pengungkapan sebuah informasi tambahan seperti pembuatan *sustainability report*.

Sedangkan ukuran perusahaan merupakan sebuah pengukuran tentang seberapa besar sebuah perusahaan. Perusahaan yang besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar. Sari (2011) dalam Nasir *et.al* (2014)

menyatakan bahwa perusahaan besar mampu melakukan pengungkapan lebih luas karena perusahaan besar mempunyai sumber daya yang lebih besar dan mampu membiayai penyediaan informasi kepada pihak eksternal. Selain itu, aktivitas perusahaan yang masuk kedalam kategori perusahaan besar tentu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Maka perusahaan tentu merasa perlu untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dan menginformasikan informasi-informasi tambahan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan, seperti informasi tentang lingkungan dan sosial.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Green Accounting

Konsep *green (environmental) accounting* atau akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Konsep ini berkembang akibat adanya tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga bukan pemerintah serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan lingkungan mendesak perusahaan-perusahaan agar tidak berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga melakukan pengelolaan lingkungan (Almilia dan Wijayanto, 2007 dalam Kusumaningtias, 2013). *Green accounting* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya lingkungan (*environmental cost*) dan manfaat atau efek ekonomi (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan ekonomi (*environmental protection*).

Bell dan Lehman (1999) dalam Kusumaningtias (2013) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai berikut: "*Green Accounting is one of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the*

company or organization by recognizing, quantifying, measuring, and disclosing the contribution of the environment to the business process".

2.1.2. Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk moneter saja, tetapi juga sebagai suatu metode yang menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Tris, 2012). Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accounting*. Sedangkan dalam bahasa Arab, akuntansi disebut sebagai "*muhasabah*" yang berarti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab dengan seksama atau teliti setiap transaksi yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Selain itu, akuntansi Islam merupakan akuntansi yang menyangkut seluruh praktik kehidupan, yang tidak hanya menyangkut praktik ekonomi dan bisnis seperti sistem kapitalis. Praktik akuntansi Islam atau syari'ah sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu dari perhitungan angka, informasi keuangan, pertanggungjawaban, hingga penegakan hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum, baik hukum sipil maupun hukum yang menyangkut ibadah. Apabila jika konteks tersebut kita anggap sebagai unsur utama akuntansi, sistem akuntansi *Ilahiyah* dan akuntansi Amal yang terdapat dalam Al-Qur'an lebih "*compatible*" jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional (Wasilah dan Nurhayati, 2011: 56).

2.1.3. Triple Bottom Line

Triple bottom line (TBL) merupakan sebuah konsep yang tidak hanya mengedepankan pengungkapan dari aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. Konsep ini mengacu pada bagaimanakah dampak

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang telah ditimbulkan dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Konsep TBL diciptakan oleh John Elkington pada pertengahan tahun 1999-an dalam bukunya “*Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21th Century Bussiness*” (Aulia dan Kartawijaya, 2011). Terdapat tiga pilar yang menjadi dasar konsep TBL, yaitu *People-Planet-Profit*.

Wiedmann dan Manfred (2006) dalam Susilo (2008) mendefinisikan *Triple Bottom Line* sebagai berikut: “*Triple Bottom Line Accounting is a wide-spread concept for firms wishing to realize broader societal and environmental objectives in addition to increasing shareholder value. Triple Bottom Line accounts routinely cover social, economic, and environmental indicators and trade-offs between different facets of sustainability*”.

2.1.4. Stakeholder Theory

Stakeholder theory merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 2001 dalam Adhima, 2013). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan mengakomodasikan keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang memiliki kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

Gray, Kouhy, dan Adams (1994) dalam Chariri dan Ghazali (2014:439) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder*, dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerfull stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

2.1.5. Legitimacy Theory

Deegan (2004) dalam Purnomo dan Tarigan (2014) mengemukakan bahwa teori legitimasi menjelaskan perusahaan harus terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”.

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghazali dan Chariri (2014 : 441-442) menyatakan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

2.1.6. Sustainability Report

Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan. Laporan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan komitmen serta kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan. Melalui laporan ini para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran

yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan keberlanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Laporan keberlanjutan memberikan bukti telah adanya komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Nasir *et.al*, 2014). Selain itu, laporan keberlanjutan menjadi salah satu instrument yang dapat digunakan untuk suatu organisasi, baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga negara ataupun *stakeholder*-nya sebagai salah satu penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan *sustainability report* saat ini menempati posisi yang sama pentingnya dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio yang dapat mengukur kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Aniktia dan Khafid (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi memiliki kinerja keuangan yang

kuat sehingga berkemampuan lebih untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan beserta pengungkapannya. Selain itu, dalam pembuatan sebuah laporan memerlukan biaya yang besar. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa apabila sebuah perusahaan memiliki laba yang besar, ia mampu melakukan pengungkapan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba yang lebih kecil. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*

2.2.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk kewajiban jangka pendeknya (Nitisemito, 1989:107 dalam Suryono dan Prastiwi, 2011). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang besar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya berarti menandakan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas, seperti informasi lingkungan dan sosial, dan menciptakan *image* positif yang dapat memungkinkan pihak *stakeholder* untuk selalu berada pada pihak perusahaan atau mendukung perusahaan tersebut (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Pengungkapan informasi tambahan tersebut dapat direpresentasikan dengan cara mengungkapkan atau mempublikasikan laporan tambahan, seperti *sustainability report*, yang terpisah dari laporan keuangan (Nasir *et.al*, 2014). Perusahaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang memiliki likuiditas yang tinggi, dianggap mampu untuk melakukan pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*

2.2.3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan membiayai perusahaannya dengan hutang. Belkoui dan Karpik (1989) dalam Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat menurunkan pendapatan. Artinya, *leverage* memberikan sinyal yang buruk bagi para *stakeholder*.

Aniktia dan Khalid (2015) juga berpendapat bahwa untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari kreditor, manajemen perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi. Perusahaan akan mengurangi biaya-biaya yang dapat mempengaruhi laba perusahaan, salah satunya biaya untuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*

2.2.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan dengan Terhadap *Sustainability Report*

Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*. Dalam kondisi demikian, perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi *stakeholder*

dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat.

Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar. Perusahaan besar mampu melakukan pengungkapan yang lebih luas, karena perusahaan tersebut mempunyai sumber daya yang lebih besar dan mampu membiayai penyediaan informasi kepada pihak eksternal. Selain itu, perusahaan dengan total aktiva yang meningkat menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan meningkat, sehingga dapat lebih banyak berkontribusi pada kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang dapat diungkapkan dalam *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2013 sampai 2015. Sumber data penelitian ini berasal dari www.idx.com untuk laporan keuangan dan *website* dari masing-masing perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengungkapkan *sustainability report* atau tidak secara berturut-turut. Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi dari www.syariahsaham.com dan www.sahamok.com untuk mengetahui daftar perusahaan-perusahaan yang

masuk kedalam Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar tetap dalam Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) selama periode 2013-2015. Peneliti memilih perusahaan tetap karena daftar Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester) sehingga terdapat perbedaan setiap periodenya.

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan yang mengungkapkan dan tidak mengungkapkan *sustainability report*. Untuk mengetahui jumlah perusahaan yang mengungkapkan dan tidak mengungkapkan *sustainability report*, pertama-tama pemilihan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil memiliki kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2011: 85). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) periode 2013 sampai 2015 secara berturut-turut.

- b. Perusahaan mengungkapkan *sustainability report* selama 2013 sampai 2015 secara berturut-turut.
- c. Perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* selama tahun 2013 sampai 2015.
- d. Perusahaan yang mengungkapkan dan tidak mengungkapkan *sustainability report* tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2015.
- e. Kedua kategori perusahaan mengungkapkan informasi pada laporan keuangan secara lengkap.

Berdasarkan metode tersebut, didapat 11 perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dan 199 perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report*. Karena adanya jarak yang terlalu jauh antara perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* dan yang tidak, maka akan dipilih sebanyak 16 perusahaan dari 199 perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* dengan menggunakan *stratified random sampling*. Metode ini akan memilih sampel yang tidak menerbitkan *sustainability report* dari masing-masing sektor yang terdapat dalam ISSI. Peneliti menentukan akan mengambil sebanyak dua perusahaan dari tiap sektor yang ada agar keseluruhan sektor memberikan kontribusinya untuk sampel. Berikut adalah proporsi perusahaan yang dipilih berdasarkan *stratified random sampling*:

Tabel 3.1. Hasil Pemilihan Perusahaan Sampel yang Tidak Mengungkapkan Sustainability Report Berdasarkan Stratified Random Sampling

No	Klasifikasi Industri	Perusahaan Tidak Mengungkapkan Sustainability Report 2013-2015	Jumlah Perusahaan yang Dijadikan Sampel
1	Pertanian	7	2
2	Pertambangan	16	2
3	Industri Dasar dan Kimia	30	2
4	Aneka Industri	21	2
5	Industri Barang Konsumsi	25	2
6	Properti & Real Estate	38	2

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

7	Infrstruktur, Utilitas, & Transportasi	12	2
8	Keuangan	0	0
9	Perdagangan, Jasa, & Investasi	50	2
10	Total	199	16

(Sumber: Data yang telah diolah)

Berdasarkan kedua metode dari penarikan sampel tersebut, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dan *stratified random sampling*, didapat sebanyak 27 perusahaan yang akan

dijadikan sampel untuk penelitian ini. Jumlah sampel tersebut menghasilkan 81 observasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Jumlah Seluruh Sampel yang Digunakan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang mengungkapkan <i>Sustainability Report</i>	11
2	Perusahaan sampel yang tidak mengungkapkan <i>Sustainability Report</i> dengan metode <i>Stratified Random Sampling</i>	16
Jumlah Seluruh Perusahaan Sampel		27
Jumlah Data Observasi Selama 2013-2015		81

(Sumber: Data yang Telah Diolah)

3.3. Metode Penelitian

Dalam pengolahan data, peneliti akan menggunakan metode regresi logistik yang akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 20. Metode regresi logistik dipilih karena didasari oleh pemilihan sampel yang terdiri dari data metrik dan non-metrik serta data yang digunakan tidak berdistribusi secara normal. Penelitian

yang telah dilakukan oleh Aniktia dan Khafid, Nasir et.al (2014), Suryono dan Prastiwi (2011), serta Adhipradana dan Daljono (2014) juga menggunakan metode regresi tersebut sehingga peneliti lebih yakin untuk menggunakan metode ini. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam metode Regresi Logistik:

$$\text{Ln} \frac{\text{SR}}{1-\text{SR}} = \beta_0 + \beta_1(\text{SIZE}) + \beta_2(\text{ROA}) + \beta_3(\text{CR}) + \beta_4(\text{DER}) + e$$

Keterangan:

$\text{Ln} \frac{\text{SR}}{1-\text{SR}}$: *Sustainability Report* dengan variable *Dummy*

SIZE : Ukuran Perusahaan

ROA : *Return on Asset*

CR : *Current Ratio*

DER : *Debt to Equity Ratio*
 β0 : Konstanta
 e : Error

Ghozali (2007) dalam Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedasitas, dan uji asumsi klasik pada variabel *independent*-nya. Namun pada penelitian ini akan dilakukan uji multikolonieritas untuk memastikan bahwa tidak ada variabel independen yang saling berkorelasi. Selanjutnya, uji data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: uji kelayakan model regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*), uji *overall model fit*, serta uji regresi logistik

yang terdiri dari model *summary*, pengujian secara simultan (*omnibus test of model coefficient*), dan pengujian hipotesis (secara parsial) dengan *variables in the equation* (Nasir *et.al*, 2014).

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk mengetahui cara perhitungan dari masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini, berikut adalah tabel operasionalisasi variabel yang dapat menjelaskan variabel-variabel tersebut:

Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel
<i>Sustainability Report</i>	<i>Sustainability report</i> merupakan laporan yang berisi tentang keberlanjutan perusahaan dimasa depan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek keuangan, sosial, dan lingkungan (Tarigan dan Samuel, 2014)	<i>Dummy</i>
Profitabilitas	Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham (Mamduh dan Abdul Halim; Almilia, 2007 dalam Suryono dan Prastiwi, 2011)	<i>Return On Asset:</i> $\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$
Likuiditas	Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur (Prastowo dan Juliaty, 2005 dalam Nasir <i>et.al</i> , 2014)	<i>Current Ratio:</i> $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
<i>Leverage</i>	Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi (Hadiningsih, 2007 dalam Suryono dan Prastiwi, 2011)	<i>Debt to Equity Ratio</i> = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total penjualan, rata-	SIZE = LnTotal Asset

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

	rata tingkat penjualan, dan total aset (Widjaja, 2009 dalam Rahma, 2012)	
--	---	--

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata

(*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). Berikut adalah tabel statistik deskriptif:

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

	UKURAN PERUSAHAAN	PROFITABILITAS	LIKUIDITAS	LEVERAGE	Valid N (listwise)
N	Statistic	81	81	81	81
Minimum	Statistic	20,9697	,0015	,4500	,0793
Maximum	Statistic	33,1341	,2728	13,8713	5,2778
Mean	Statistic	29,586181	,096988	2,549313	,898218
Std. Deviation	Statistic	1,9574943	,0697088	2,4706472	,9488786
Variance	Statistic	3,832	,005	6,104	,900
Skewness	Statistic	-1,258	,449	2,738	2,879
	Std. Error	,267	,267	,267	,267
Kurtosis	Statistic	3,689	-,731	8,577	9,421
	Std. Error	,529	,529	,529	,529

(Sumber: Data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel statistik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah data yang diteliti adalah 81 data. Dari 81 data tersebut, ukuran perusahaan yang terkecil adalah 20,9697 dan yang terbesar adalah 33,1341. Untuk rata-rata perusahaan dari seluruh data yang digunakan adalah 29,586181 dengan standar deviasi sebesar 1,957. Pada variabel profitabilitas, nilai profitabilitas yang terendah adalah 0,0015 dan yang tertinggi adalah 0,2728. Rata-rata untuk variabel ini adalah 0,096988. Sedangkan standar deviasinya adalah 0,005. Untuk variabel likuiditas dapat dilihat nilai tertingginya adalah 13,8713 dan nilai terendahnya adalah 0,4500. Rata-rata dari variabel ini adalah 2,549313 dengan standar deviasi 2,476472. Dan yang terakhir adalah variabel *leverage*. Pada variabel ini, nilai tertingginya adalah 5,2278 dan nilai terendahnya adalah 0,0793. Rata-rata *leverage* pada data

yang dimiliki adalah 0,898218 dengan standar deviasi 0,9488786.

Pengukuran *skewness* dan *kurtosis* berguna untuk mengukur kemencengan dari data dan mengukur puncak dari distribusi data. Jika variabel terdistribusi dengan normal, maka nilai *skewness* dan *kurtosis*nya akan sama dengan nol (0) atau $< 0,01$ (Ghozali, 2011: 21 dan 30). Pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel, nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing adalah 0,267 dan 0,529. Angka tersebut berada jauh dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti tidak berdistribusi normal sehingga uji yang akan dilakukan adalah uji dengan metode non parametik.

4.2. Uji Multikolinieritas

Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah pada variabel independen atau bebas terdapat korelasi atau tidak (Ghozali, 2011: 105). Model regresi yang

baik adalah model regresi yang tidak memiliki korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Apabila terjadi korelasi antara variabel independen, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal, atau variabel independen memiliki nilai korelasi antar sesama

variabel independen adalah nol (0). Terdapat beberapa cara untuk mengetahui nilai korelasi antar variabel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variabel Inflation Factor* (VIF) sebagai pengukur multikolinieritas pada variabel independen yang diteliti.

Tabel 4.2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
UKURAN PERUSAHAAN	,837	1,195
PROFITABILITAS	,873	1,146
LIKUIDITAS	,732	1,366
LEVERAGE	,732	1,366

a. Dependent Variable: SUSTAINABILITY
(Sumber: Data yang telah diolah)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat nilai *tolerance* pada keseluruhan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang terjadi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan hal sama, yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini tidak

memiliki korelasi antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain.

4.3. Uji Regresi Logistik

4.3.1. Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model ini cocok dengan sampel yang diambil. Berikut adalah tabel hasil *Hosmer and Lemeshow's test*:

Tabel 4.3. Hosmer and Lemeshow's Test
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	6,816	8	,557

(Sumber: Data yang telah diolah)

Dapat dilihat bahwa pada tabel diatas, nilai probabilitas signifikansi dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* adalah 0,557 yang berada jauh diatas 0,05. Hal ini menandakan bahwa model mampu memprediksi nilai

observasinya atau model ini diterima karena model cocok dengan data observasinya.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.3.2. Overall Model Fit

Overall model fit digunakan untuk menguji keseluruhan data apakah fit dengan data yang diambil. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan

antara -2log likelihood (-2LL) pada awal pengujian (*Block Number* = 0) dengan -2Log Likelihood (-2LL) pada akhir pengujian (*Block Number* = 1). Berikut adalah hasil dari uji *overall model fit*.

Tabel 4.4. Overall Model Fit (Block Number = 0)

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0	1	109,496
	2	109,496
	3	109,496

(Sumber: Data yang telah diolah)

Tabel 4.5. Overall Model Fit (Block Number = 1)

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients					
		Constant	SIZE	ROA	CR	DER	
Step 1	1	67,040	-21,580	,672	5,563	,075	,665
	2	52,594	-41,214	1,300	8,392	,098	1,101
	3	46,187	-61,241	1,947	12,601	-,016	1,452
	4	44,050	-79,165	2,534	15,501	-,157	1,593
	5	43,611	-91,235	2,932	16,275	-,231	1,597
	6	43,574	-95,931	3,087	16,309	-,251	1,596
	7	43,574	-96,449	3,104	16,310	-,253	1,596
	8	43,574	-96,454	3,104	16,310	-,253	1,596
	9	43,574	-96,454	3,104	16,310	-,253	1,596

(Sumber: Data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil diatas, pada tabel 4.4. dapat dilihat bahwa nilai -2Log Likelihood menunjukkan angka sebesar 109,496. Kemudian pada tabel kedua, yaitu tabel 8, nilai -2 Log Likelihood mengalami penurunan menjadi 43,574. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya penurunan, dari tabel awal ke tabel akhir, menandakan bahwa model regresi menjadi lebih baik (Nasir *et.al*, 2014). Selain itu, penurunan nilai -2Log Likelihood yang cukup besar dari *Block Number* = 0 ke *Block Number* = 1 menandakan bahwa penambahan variabel bebas kedalam model regresi dapat memperbaiki model fit (Nurrahman dan Sudarno, 2013).

4.3.3. Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square

Cox and Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru R² pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit untuk diinterpretasikan (Ghozali, 2011:341). Sedangkan *Nagelkerke’s R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell’s R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Berikut adalah tabel *Cox and Snell’s R Square* dan *Nagelkerke R Square* yang berasal dari output SPSS:

Tabel 4.6. Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke R Square Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	43,574 ^a	,557	,751

(Sumber: Data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada kolom *Cox & Snell R Square*, pada kolom tersebut menunjukkan angka 0,557 dan *Nagelkerke R Square* menunjukkan angka 0,751 atau sebesar 75,1 %. Hal ini berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependennya sebesar 75,1%. Sedangkan 24,9% yang lain variabel dependen dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3.4. Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi atau tabel klasifikasi 2 x 2 merupakan tabel yang

berfungsi menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*) (Ghozali, 2011:342). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen yaitu perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report* (1) dan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan *sustainability report* (0). Sedangkan untuk baris, sama dengan kolom yang merupakan prediksi dari perusahaan yang melakukan pengungkapan dan tidak, merupakan nilai observasi yang sebenarnya. Berikut adalah tabel hasil klasifikasi 2 x 2:

Tabel 4.7. Classification Tabel 2 x 2 Classification Table^a

Observed		Predicted		Percentage Correct
		SUSTAINABILITY		
		0	1	
Step 1	SUSTAINABILITY 0	41	7	85,4
	SUSTAINABILITY 1	5	28	84,8
Overall Percentage				85,2

(Sumber: Data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah data perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* pada kolom prediksi adalah sebanyak 33 data sampel, namun ternyata pada baris observasi yang sebenarnya hanya terdapat 28 data sampel yang melakukan pengungkapan *sustainability report* dan 5 data yang tidak mengungkapkan *sustainability report*. Sehingga persentase prediksi kebenarannya adalah 84,8%.

Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan *sustainability report*, jumlah data yang

terdapat dalam kolom prediksi adalah 48 data perusahaan. Namun, pada baris observasi yang sebenarnya, terdapat 7 data perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* dan 41 data perusahaan yang tidak melakukan *sustainability report* dari 48 data yang diprediksikan. Maka, jumlah persentase kebenaran prediksi ini adalah 85,4% dan total persentase kebenaran prediksi pada penelitian ini adalah 85,2%.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.3.5. Omnibus Test (Uji F)

Omnibus test atau uji F merupakan pengujian hipotesis apakah variabel independen berpengaruh secara

signifikan secara bersama-sama atau simultan. Berikut adalah tabel omnibus test:

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Secara Serentak
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	65,922	4	,000
	Block	65,922	4	,000
	Model	65,922	4	,000

(Sumber: Data yang telah diolah)

Pada tabel 4.8. dapat dilihat bahwa nilai *Chi-Square* sebesar 65,922 dengan nilai signifikansi 0,000 pada nilai df 4. Nilai df merupakan derajat kebebasan yang menunjukkan jumlah variabel yang diteliti. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi berada dibawah 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu *sustainability report*.

4.3.6. Uji Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik biner untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel terikatnya, yaitu pengungkapan *sustainability report*. Berikut adalah tabel hasil dari peregresian logistik karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* menggunakan SPSS Ver.20:

Tabel 4.9. Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 ^a	SIZE	3,104	,959	10,477	1	,001	22,289
	ROA	16,310	7,611	4,592	1	,032	12113502,239
	CR	-,253	,345	,540	1	,462	,776
	DER	1,596	,827	3,725	1	,054	4,934
	Constant	-96,454	29,291	10,844	1	,001	,000

(Sumber: Data yang telah diolah)

$$\text{Ln} \frac{\text{SR}}{1-\text{SR}} = -96,454 + 3,104\text{SIZE} + 16,310\text{ROA} - 0,253\text{CR} + 1,596\text{DER} + e$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada variabel size atau ukuran perusahaan, tingkat signifikansinya menunjukkan angka 0,001 yang kurang dari 0,05. Hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kemudian arah dari pengaruh variabel tersebut dapat dilihat pada nilai konstantanya, apakah nilai

konstanta negatif atau positif. Konstanta untuk size menunjukkan arah yang positif karena nilai konstantanya adalah 3,104. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pada variabel ROA pun menunjukkan nilai signifikansi yang sama dengan size. Tingkat signifikansi

profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report* adalah 0,032 dengan nilai konstanta 16,310. Karena $0,032 < 0,05$ dan nilai konstanta yang menunjukkan arah positif, maka disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Untuk variabel CR, nilai signifikansi menunjukkan angka 0,462. Nilai ini berada jauh diatas 0,05, yang berarti variabel ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Begitupun dengan variabel DER. Variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,054. Angka ini berada tipis diatas 0,05. Maka disimpulkan bahwa *leverage* yang diprosikan oleh DER tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Dari hasil output SPSS yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pada penelitian ini diketahui bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas menunjukkan angka 0,032. Angka tersebut berada dibawah 0,05 yang berarti H_1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasir *et.al* (2014), Suryono dan Prastiwi (2011), serta Prastiwi dan Puspitaningrum (2013).

Alasan mengapa profitabilitas dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, karena apabila tingkat profitabilitas yang diprosikan *Return On Assets* (ROA) tinggi, maka perusahaan dapat melakukan pengungkapan yang lebih luas. Aniktia dan Khafid (2015) berpendapat bahwa dalam pembuatan sebuah laporan keberlanjutan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga apabila sebuah

perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi maka ia akan melakukan pengungkapan yang lebih luas terhadap setiap laporannya. Alasan lain yang menyatakan tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* yaitu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi karena tidak adanya hambatan dalam hal biaya pengungkapan (Asmoro, 2011 dalam Prastiwi dan Puspitaningrum, 2013). Selain itu, ketika perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat menginfakkan hartanya lebih banyak lagi. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji" (Q.S Al-Baqarah: 267).

4.4.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *sustainability report* pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh. Hal ini dibuktikan dari hasil regresi logistik yang telah dilakukan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,465 yang dimana angka tersebut berada diatas 0,05 sehingga H_2 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011), dan Nasir *et.al* (2014).

Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa rasio likuiditas bukanlah faktor yang dipertimbangkan didalam pengungkapan *sustainability*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

report. Likuiditas digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Dalam *sustainability report* hal ini tidak diungkapkan. Kreditur dan investor cenderung melihat kepada laporan keuangan untuk melihat likuiditas sebuah perusahaan. Selain itu, pengungkapan *sustainability report* merupakan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, walaupun suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik namun tidak ada keinginan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*, maka pengungkapan tersebut tidak akan terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4.4.3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai variabel *leverage* yang dihasilkan dari output SPSS adalah 0,054 yang berada diatas 0,05. Hal ini menyebabkan H_3 ditolak dan H_0 diterima. Berdasarkan keputusan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil adalah *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil ini berkesinambungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prastiwi dan Puspitaningrum (2013), serta Suryono dan Prastiwi (2011). Jensen dan Meckling (1976) dalam Prastiwi dan Puspitaningrum (2013) menyatakan bahwa kenaikan utang dalam struktur modal akan meningkatkan konflik kepentingan dan biaya keagenan. Suryono dan Prastiwi (2011) berpendapat bahwa pengungkapan sukarela merupakan suatu bentuk pelaporan tambahan yang dilakukan oleh perusahaan untuk pembentukan *image*. Sama seperti rasio likuiditas, bahwa pengungkapan *sustainability report* yang

dilakukan perusahaan tidaklah hanya dilihat dari tingkat *leverage*-nya. Ketika tingkat *leverage* sebuah perusahaan tinggi, bukanlah sebuah ukuran yang dijadikan acuan perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan serta melakukan pelaporan atas kegiatan tersebut dengan mengungkapkan *sustainability report*.

4.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ukuran dari sebuah perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_4 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir *et.al* (2014), Suryono dan Prastiwi (2011), Adhipradana dan Daljono (2014), serta Prastiwi dan Puspitaningrum (2013).

Daljono dan Adhipradana (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang dilihat dari nilai total aset yang lebih besar akan dapat berkontribusi pada kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Dengan semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang dapat diungkapkan dalam *sustainability report*. Selain itu, sebuah perusahaan besar biasanya menjadi sorotan publik. Maka dari itu, perusahaan besar cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas untuk menghindari serangan politik, permintaan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial, peraturan yang lebih besar, ancaman nasionalisme, atau pemisahan dari entitas atau industri (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Aulia dan Kartawijaya, 2011).

Dalam Islam sendiri, sebuah perusahaan yang besar, maka ia memiliki nilai aset yang besar pula. Maka dari itu, perusahaan dirasa perlu memberikan atau

menginfakkan dan menzakatkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta konservasi lingkungan yang kemudian diungkapkan dalam *sustainability report*. Allah SWT berfirman:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan". Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui" (Q.S Al-Baqarah : 215).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan yang berisi tentang kontribusi perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya dari hasil operasional yang ia dapatkan. Dalam *sustainability report* terdapat tiga aspek yang diungkapkan, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini sendiri jika ditelisik lebih dalam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Islam. Perintah Allah SWT tentang menjaga lingkungan dan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki telah diterapkan dalam *sustainability report* ini.

Terdapat karakteristik-karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan syari'ah yang terdaftar dalam Indeks Saham Syari'ah (ISSI) selama tahun 2013 sampai 2015. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga H₁ diterima. Hal ini terjadi karena ketika tingkat profitabilitas tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas.
- b. Likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga H₂ ditolak. Hal tersebut dikarenakan rasio likuiditas bukanlah suatu faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam melakukan pengungkapan *sustainability report*.
- c. *Leverage* yang diproksikan *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga H₃ ditolak. Hal tersebut dikarenakan *leverage* merupakan salah satu rasio yang dipertimbangkan oleh kreditor dalam memberikan pinjaman. Kreditor lebih cenderung melihat kepada laporan keuangan sebagai acuan pemberian kredit dibandingkan dengan *sustainability report*.
- d. Ukuran sebuah perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga H₄ diterima. Perusahaan yang besar tentu memiliki aset yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perusahaan yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih luas.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- a. Bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan melakukan pengungkapan terhadap kontribusi yang telah diberikan kepada lingkungan dan sosial sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Pengungkapan tersebut lebih baik dilakukan secara terpisah dari laporan keuangan dengan cara membuat *sustainability report* agar informasi tentang sosial dan lingkungan dapat lebih mudah untuk dipahami.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambah jangka waktu sampel yang diambil dan juga dapat menambah variabel seperti *corporate governance* agar hasil penelitian lebih maksimal lagi. Serta kaji lebih dalam tentang praktik *sustainability report* dari pandangan Islam. Peneliti selanjutnya juga dapat mencari tahu apa sajakah manfaat *sustainability report* bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhima, Mochammad Fauzan. (2013). Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. (www.ub.ac.id, diakses pada 11 Februari 2016).
- Adhipradana, Fadhila dan Daljono. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No.1.
- Agustia, Dian. (2013). Pengaruh Faktor *Good Governance*, *Free Cash Flow*, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No.1, 27-42.
- Aniktia, Ria dan Muhammad Khafid. (2015). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 4, No. 3.
- Aulia, Sandra Z dan TB Idis Kartawijaya. (2011). Analisis Pengungkapan *Triple Bottom Line* Dan Faktor Yang Mempengaruhi; Lintas Negara Indonesia Dan Jepang. *Symposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Dilling, Petra F.A.. (2010). *Sustainability Reporting In A Global Context: What Are The Characteristics Of Corporation That Provide High Quality Sustainability Reports – An Empirical Analysis*. *International Business & Economics Research Journal*. Volume 9 Number 1.
- Fraser, Lyn.M dan Aileen Orminston. (2008). *Memahami Laporan Keuangan* atau *Understanding Financial Accounting*. Edisi Ketujuh. Penerjemah: Priyo Darmawan. Indonesia: PT. Indeks.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2014). *Teori Akuntansi: International Financial Reporting System*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Hasan, Fakhurroji. (2015, 1 Agustus). *Apa itu Laporan Keberlanjutan*. Diakses dari [Http://fakhurrojihan.wordpress.com/2015/01/08/apa-itu-laporan-keberlanjutan](http://fakhurrojihan.wordpress.com/2015/01/08/apa-itu-laporan-keberlanjutan)
- Idris. (2012). Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era *Green Market*.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Paul Kimmel. (2011). *Financial Accounting, IFRS Edition*. Amerika : John Wiley & Sons, Inc.
- Kusumaningtyas, Rohmawati. (2013). *Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana?*. *Proceeding Seminar Nasional dan Call of Papers Sancall*. Surakarta.
- Maulida, Ken Auva. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Sustainability Performance*. (www.jimfeb.ub.ac.id diakses pada 11 Februari 2016)
- Milamarta, Misahardi. (2012). Penerapan Prinsip Tanggung Gugat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Implementasi *Triple Bottom Line* di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No.1.
- Mirakhor, Abbas dan Zamir Iqbal. (2008). *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*. Penerjemah A.K. Anwar. *John Wiley & Sons(Asia) pte. Ltd*. Prenada. Jakarta: Media Group.
- Nasir, Azwir, Elfi Ilham, dan Vadela Irna Utara. (2014). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar". *Jurnal Ekonomi*. Volume 22, Nomor 1.
- Natalia, Ria dan Joshua Tarigan. (2014). Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Dari Sisi *Profitability Ratio*. *Business Accounting Review*, Vol. 2, No. 1.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Jakarta : Salemba Empat. 2011.
- Nurrahman, Adimulya dan Sudarno. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 1.
- Prastiwi, Arum dan Ayu Puspitaningrum. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR)* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Rahma, Ayumi. 2012. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, ROA, dan Kepemilikan Manajerial*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Terhadap Praktik Perataan Laba.
Skripsi. Universitas Budi Luhur.

- Rahman, Usamah. (2014, 31 Agustus). *Akuntansi Syari'ah, Pengertian, Arti Penting, Konsep Dasar, dan Prinsip-Prinsip*. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 dari <http://usamahrahman.wordpress.com/2014/08/31/akuntansi-syariah-pengertian-arti-penting-konsep-dasar-dan-prinsip-prinsip/>.
- Santoso, Singgih. (2016). *Menguasai SPSS 22: From Basic to Expert Skills*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Saputro, Dwi Anggoro, Fachrurrozie, dan Linda Agustina. (2013). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Perusahaan di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis atau Research Methods for Business*. Buku 2 Edisi 4. Penerjemah: Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Shabir, Muchlis. (1981). *Terjemahan Riyadus Shalihin*. Buku I. Semarang : CV. Toha Semarang.
- Suartana, I Wayan. (2010). *Akuntansi Lingkungan dan Triple Bottom Line Accounting : Paradima baru Akuntansi Bernilai Tambah*. *Jurnal Bumi Lestari*. Vol. 10, No. 1.
- Sulistyanto, Sri. (2008), *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Susilo, Joko. (2008). *Green Accounting di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus Antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul*. *JAAI*. Vol. 12, No.2. 2008.
- Syukron, Ali. (2015). *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syari'ah*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, No.1.
- Tris, Dodi. (2012). *Pengertian Akuntansi Syariah*. Diakses pada 20 Agustus 2016 dari <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-akuntansi-syari'ah.html?m=1>.
- Uyanto, Stanis Laus S. (2009). *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Edisi 3. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiyanto, Hari Suryono. (2011). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yanti, Fitri dan Ni Ketut Rasmini. (2015). *Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor Yang Mempengaruhi: Studi di Perusahaan Indonesia dan Singapura*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13, No. 2.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syari'ah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

PENGARUH OVERVALUED EQUITIES TERHADAP AUDIT FEES DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Ryan Ramadhan*), Roni Budianto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

*Email: ramaadryan@outlook.com

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of overvalued equities on the revulsion of audit fee, and the effect of earnings management to the association between overvalued equities and audit fee. The reesearch used 45 data sample from financial report and financial statement of 14 mining firms which listed in Indonesian's Stock Exchange during the year of 2013 to 2014 that was taken with purposive sampling method. The method used for analyzing the data is Moderated Regression Analysis (MRA) with IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) software version 20.0. The results indicate that overvalued equities has a positive effect on audit fees, and earnings management has a positive effect over the association between overvalued equities and audit fee.

Key Words: Overvalued Equities, Earnings Management, Audit Fees

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh overvalued equities terhadap perubahan audit fees pada auditor dan pengaruh manajemen laba terhadap hubungan antara overvalued equities dan audit fees. Data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan keuangan dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 pelaporan keuangan yang terdiri dari 14 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan moderated regression analysis (MRA). Data pada penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen overvalued equities berpengaruh terhadap perubahan audit fee, dan variabel moderator manajemen laba berpengaruh positif terhadap hubungan antara overvalued equities dengan audit fee.

Kata Kunci: Overvalued Equities, Manajemen Laba, Audit Fees

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan mengalami kemajuan pesat dalam hal ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong peningkatan jumlah perusahaan dalam mengelola sumber daya dan

memanfaatkan potensi Indonesia yang besar, baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Pendanaan perusahaan berkaitan dengan pendanaan dari dalam (modal/ ekuitas) dan juga dari luar

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

(hutang jangka panjang) (Brealey. *et.al*, 2008).

Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibanding eksternal, utang yang aman dibanding utang yang berisiko, serta yang terakhir adalah saham biasa, yang dinamakan *pecking order theory* (Myers dan Majluf, 1984 dalam Sugiarto 2009). Teori ini dibangun berdasarkan beberapa asumsi yang menekankan pentingnya *financial slack* yang cukup di perusahaan guna mendanai proyek-proyek dengan dana internal. Bila dana internal kurang, maka dipergunakanlah dana dari sumber eksternal sebagai tambahannya.

Pemilihan sumber dana eksternal ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Asimetri informasi terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak daripada para pemegang saham. Dengan demikian pihak manajemen dapat memanipulasi nilai intrinsik saham dengan meninggikan nilai saham di pasar. Itu pun terjadi karena adanya ekspektasi yang tinggi dari pasar, menjadikan pihak manajemen memanfaatkan ekspektasi tersebut untuk meninggikan harga saham pasar.

Seperti dalam artikel Jensen (2005), *overvaluation equity* merupakan suatu keadaan dimana harga saham suatu perusahaan melebihi nilai fundamentalnya. Kelebihan seperti itu disebabkan antusiasme berlebihan dari pasar namun tidak berkelanjutan secara jangka panjang (Shiller dan Robert J, 2000). Hal ini tentu menyebabkan harga saham menjadi *overvalued*. Tekanan perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pendapatan semakin besar, memaksa manajemen memanipulasi laba untuk memenuhi dan mengalahkan ekspektasi pasar (Jensen, 2005). Proposisi Jensen diperkuat oleh bukti empiris tersebut, menjadikan proposisinya dapat dibenarkan, yang bahwasannya

overvalued equities terjadi apabila perusahaan menerbitkan saham mereka namun nilainya berada di atas nilai intrinsik saham perusahaan.

Manajemen laba diindikasikan berpengaruh terhadap kecenderungan *overvaluation* atas saham perusahaan. Chi dan Gupta (2009) menemukan hubungan positif antara *overvaluation equities* dan manajemen laba. Badertscher (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengovervaluasi sahamnya menggunakan manajemen laba akrual dan hal itu dilakukan untuk memenuhi ekspektasi laba.

Namun tidak serta merta investor melakukan investasi hanya dengan melihat harga sahamnya saja, mereka juga memeriksa terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan. Pihak investor pun mempunyai hak untuk menilai dan mengetahui kinerja perusahaan. Menurut Boediono (2005), indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja manajemen dalam laporan keuangan adalah jumlah laba yang terkandung dalam laporan rugi/ laba. Laporan tersebut penting karena didalamnya terkandung informasi laba yang berguna untuk menilai kemampuan dan kinerja perusahaan.

Statement of Financial Accounting Concept (SCAF) dalam *Financial Accounting Standard Board* (FASB) mengatakan jumlah laba merupakan indikator untuk pengukuran kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai target perusahaan yang telah ditentukan serta membantu pemegang saham memperkirakan masa depan perusahaan. Jumlah laba ini yang kemudian dimanfaatkan untuk pihak manajemen menaikkan atau menurunkan laba sesuai yang dibutuhkan, selama tidak menyimpang dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku, yang dikenal dengan istilah manajemen laba.

Schipper (1989) mengatakan bahwa manajemen laba adalah suatu

kondisi dimana pihak manajemen melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal untuk meratakan, menaikkan, atau menurunkan laba. Sedangkan Healy dan Wahlen (2009) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika pihak manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan menyusun transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menyerasakan *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan.

Dalam mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan akibat tersebut, maka pihak *stakeholders* menggunakan jasa audit eksternal dalam memberikan opini tentang laporan keuangan perusahaan. Besaran *audit fee* yang mereka terima tergantung dari kesepakatan antara auditor dengan klien. Menurut IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2008) dalam menentukan *audit fee* akuntan publik harus memenuhi tahapan-tahapan audit dan mempertimbangkan kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum independensi, banyaknya waktu yang dibutuhkan, basis penetapan tarif yang ditetapkan dan tingkat keahlian auditor (level auditor). Menurut Jensen (2005), ditemukan bahwa tingkat *overvalued* perusahaan akan menambah langsung biaya auditor, karena auditor harus melakukan tinjauan ulang yang tidak mudah dan memakan waktu yang tidak sedikit.

Menurut Ahsan Habib (2013), karena beberapa perusahaan menginginkan jasa audit eksternal dalam mendeteksi laporan keuangan, maka dalam mendeteksi laporan audit yang *overvalued* tentunya auditor akan meminta biaya atau tarif lebih dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki *overvaluasi*, mengingat resiko yang ditimbulkan akan berbeda dibanding perusahaan yang tidak memanipulasi laporan keuangan

perusahaannya. Dalam penelitian sebelumnya oleh Fajar (2012), menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan yang mengovervaluasi sahamnya, memanfaatkan ekspektasi pasar yang tinggi sehingga perusahaan menaikkan nilai intrinsiknya.

Bisnis model perusahaan dan faktor lainnya yaitu risiko yang melekat dan kegagalan pengendalian internal untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki material salah saji, atau disebut dengan pengendalian risiko (PCAOB, 2010a, b). Karena auditor tidak selalu dapat mengontrol risiko pengendalian internal yang melekat, satu-satunya komponen risiko audit di bawah kendali auditor adalah risiko deteksi, didefinisikan sebagai risiko bahwa prosedur audit tidak akan mendeteksi dan memperbaiki salah saji material. Karena adanya pengurangan resiko deteksi maka akan meningkatkan kemungkinan bahwa auditor akan dapat mengidentifikasi salah saji material, untuk itu auditor perlu melakukan tambahan pengujian substantif (Messier *et al*, 2010), sehingga meningkatkan *audit fee* (Simunic, 1980).

Untuk mengetahui lebih jauh pengaruh dari *overvalued equities* terhadap *audit fees*, peneliti meregresi *audit fee* yang sudah dilog *naturalkan* terhadap variabel *overvalued equities* dan variabel moderating manajemen laba serta beberapa variabel kontrol. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ahsan Habib *et al* yang juga menemukan hubungan positif antara *overvalued equities* dengan *audit fees* dan adanya pengaruh positif dari manajemen laba dalam mempengaruhi hubungan antara *overvalued equities* dan *audit fees*.

Jurnal ini berkontribusi pada literatur sebelumnya dengan mempertimbangkan respon audit terhadap *overvaluation* perusahaan. Auditor memegang peranan penting dalam memaksa dan melindungi hak investor dengan mendeteksi adanya

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kesalahan dari dalam dan menguntungkan manajemen perusahaan dengan memberikan kepercayaan atas informasi keuangan yang diberikan oleh pihak perusahaan (Newman *et al.*, 2005).

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Yoones Badavar *et al.* yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh *overvalued equities* dengan *audit fees* dan tidak ada pengaruh *overvalued equities* dan *audit fee* dalam perusahaan yang melakukan manajemen laba. Yoones memperkirakan bahwa asimetri informasi merupakan salah satu hal penyebab adanya fenomena *overvalued equities* dan menjadi salah satu bagian penyebab adanya manajemen laba dalam perusahaan.

Penelitian sebelumnya telah membentuk hubungan positif antara peningkatan resiko klien, upaya auditor dan *audit fee*. Bedard dan Johnstone (2004) menemukan klien dengan resiko penilaian yang tinggi berhubungan dengan tingkat tarif yang lebih tinggi, dan akan direncanakan bukti audit kemudian direkomendasikan untuk tingkat penagihan. Penelitian lain oleh Pratt dan Stice (1994), O’Keefe *et al.* (1994) dan Beaulieu (2001) juga mendokumentasikan hubungan positif antara resiko klien dan *audit fee*. Kim dan Fukukawa (2012) menganalisis data audit yang dilakukan oleh *Big 3* di perusahaan Jepang dan mencari bahwa dua perusahaan meningkatkan upaya audit dan biaya premi risiko audit dengan risiko bisnis yang lebih tinggi, tetapi ketiga perusahaan itu meningkatkan upaya pemeriksaan saja.

Charles *et al.* (2010) menunjukkan hubungan positif dan terus meningkat antara risiko pelaporan keuangan dan biaya audit, dari 2000 sampai 2003. Penelitian ini mempertimbangkan *overvalued equities* sebagai potensi kontributor manipulasi pendapatan yang meningkatkan risiko dari salah saji material. Peningkatan risiko dari salah saji material pada akhirnya memerlukan

upaya audit tambahan dan akibatnya membuat biaya audit menjadi lebih tinggi.

Penelitian ini secara eksplisit menganalisa pengaruh *overvalued equities* terhadap *audit fees* dengan manajemen laba sebagai variabel moderating dan terdapat beberapa variabel kontrol yang dimasukkan dengan data yang didapat dari perusahaan pertambangan.

2. KERANGKA TEORI

Teori keagenan yang menginginkan *principal* (pemilik) perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis. Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (2005) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal* termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal* dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien. Teori keagenan mengungkapkan jika antara pihak *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda muncul konflik yang dinamakan masalah keagenan (*agency problem*).

Dari adanya konsep asimetri informasi yang terdapat dalam teori keagenan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan segala cara untuk bisa menarik investor dan meninggikan nilai perusahaan.

Healy dan Wahlen (2009), menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan menyusun transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan. Healy dan Wahlen dalam Ujijantho *et al.* (2007) menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgement*, misalnya *judgement* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai aset.

Berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer dan pemegang saham, manajer dengan kreditor atau pemegang saham, kreditor dan manajer disebabkan adanya hubungan keagenan atau *agency relationship*. Pihak *principal* dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan memberikan kepentingannya dengan memberikan insentif yang layak kepada *agent* dan harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah penyimpangan dari agen. Hal tersebut dinamakan dengan biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam teori biaya keagenan disebutkan bahwa manajer akan terlibat dalam manipulasi pendapatan. Hal tersebut diupayakan untuk mempertahankan ekuitas yang dinilai terlalu tinggi. Sejak pasar saham berkebijakan untuk menghukum perusahaan karena gagal memenuhi ekspektasi pasar bahkan dengan hanya kurang sedikit saja, upaya manajemen perusahaan memenuhi target dengan cara

apa pun menjadi hal yang wajar (Jensen;2005).

Adanya keterkaitan manajemen laba dengan *overvalued equities* adalah manajemen perusahaan sama-sama memanfaatkan asimetri informasi dalam menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya. Untuk itu manajemen perusahaan menaikkan harga saham seolah-olah keadaan perusahaan sedang baik dan menarik minat investor, walaupun pada akhirnya kenyataan yang ditutup-tutupi tidak dapat disembunyikan lagi dan tiba-tiba perusahaan gulung tikar seperti kasus Enron.

Beberapa peneliti mendefinisikan manajemen laba dalam arti yang berbeda. Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi; Fischer dan Rosennveig (1995) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tertentu dalam jangka panjang.

Healy dan Wahlen (2009), menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan menyusun transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan. Healy dan Wahlen dalam Ujijantho *et al.* (2007) menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgement*, misalnya *judgement* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditanggihkan, kerugian piutang dan penurunan nilai aset.

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1978), diantaranya: (1) Hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*), merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income* yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih; (2) Hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*), muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (*debt covenant*). (3) Hipotesis politik (*The Political cost hypothesis*), merupakan motivasi yang muncul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi dalam menyasiasi berbagai regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi *anti trust* dan *anti monopoly*, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menggunakan model akrual untuk menurunkan laba yang dilaporkan.

Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk mengukur manajemen laba. Model akrual agregat merupakan satu-satunya model yang berterima umum karena model tersebut sejalan dengan akuntansi berbasis akrual (*Accounting Based Accruals*). Akuntansi berbasis akrual dipandang lebih rasional dan adil serta informatif dibanding dengan model dasar kas. Namun

akuntansi berbasis akrual dapat membuat munculnya komponen akrual yang mudah untuk dipermainkan besar kecilnya. Seperti pendapat Koyuimirs (2011) yang menyatakan manajemen cenderung memilih kebijakan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi akrual, yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan pada manajemen untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh pada pendapatan yang dilaporkan. Peluang ini sering digunakan oleh manajer ketika mereka menghendaki keuntungan tertentu bagi dirinya. Menurut Scott *et al.* (2005) *discretionary accruals* adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual. Oleh karena itu bentuk akrual dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accruals* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pemilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

Overvalued equities adalah suatu kondisi dimana nilai pasar saham suatu perusahaan berada di atas nilai intrinsiknya. Hal itu dapat disebabkan oleh manajemen perusahaan yang mengatur nilai yang diterbitkan sedemikian rupa agar sepadan dengan laporan keuangan yang telah didandani sehingga dapat memenuhi ekspektasi pasar. Jensen (2005) menyatakan, *overvaluation equity* merupakan suatu keadaan dimana harga saham suatu perusahaan melebihi nilai fundamentalnya.

Overvaluasi seperti itu sering disebabkan oleh antusiasme yang berlebihan yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang (Shiller, 2000). Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih *overvalued*, tekanan untuk memenuhi target pendapatan yang semakin realistis menjadi lebih besar sehingga memaksa manajer untuk

terlibat dalam manipulasi laba untuk memenuhi atau mengalahkan ekspektasi pasar (Jensen, 2005). Bukti empiris ini mendukung proposisi Jensen. Chi dan Gupta (2009) dalam menemukan hubungan positif antara *equity overvaluation* dan manajemen laba dalam meningkatkan *audit fee*.

Badertscher (2011) mengungkapkan bahwa manajer perusahaan yang sahamnya *overvalued* menggunakan *accrual fee* manajemen untuk memenuhi ekspektasi laba. Houmes dan Skantz (2010) juga menyediakan bukti pendapatan menaikkan tingkat manajemen laba oleh perusahaan yang sangat *overvalued*. Dalam sub-bagian ini, peneliti akan menggunakan metode perhitungan dari James Tobin dan William Brainard (1968) yaitu yang dikenal dengan teori Tobin's Q. Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktivitas perusahaan.

Nilai Tobin's Q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, et al 1989) atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin dan Brainard, 1968; Tobin, 1969). Nilai Tobin's Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham (*market value of all outstanding stock*) dan nilai pasar hutang (*market value of all debt*) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi (*replacement value of all production capacity*), maka Tobin's Q dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan. Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, dan laba kemungkinan akan didapatkan. Berdasarkan pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal investasi baru adalah tinggi ketika surat berharga (saham) memberikan

keuntungan di masa depan dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya investasinya (Fiakas, 2005).

Audit fee adalah suatu imbalan untuk auditor atas suatu pekerjaan audit yang imbalannya bervariasi dan diberikan dari klien yang berhubungan dengan auditor baik itu independen (eksternal) maupun dependen (internal). Sedangkan di Indonesia sendiri, kriteria untuk harga atau biaya sudah diatur dalam IAPI nomor: KEP .024/IAPI/VII/2008. Mulai dari menetapkan imbal jasa (*fee*) audit hingga tahapan-tahapan audit itu sendiri.

Simunic (1980) menyatakan bahwa *audit fee* ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan yang di audit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Sedangkan menurut Sankaraguruswamy et al. (2003), *audit fee* merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*). Seperti dalam pernyataan IAPI dalam KEP .024/IAPI/VII/2008, dalam menetapkan imbal jasa auditor akuntan publik harus memperhatikan tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan audit, dan tahap pelaporan. Selain memperhatikan hal-hal tersebut, akuntan publik juga harus memperhatikan kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan, banyaknya waktu yang digunakan, dan basis penetapan tarif yang disepakati.

Variabel *audit fee* diukur menggunakan pernyataan yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

dikembangkan oleh Supriyono (1988) dengan empat pernyataan mengenai *audit fee*, yaitu:

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP) cenderung menerima klien dengan *fee* besar.
- b. *Audit fee* yang besar akan meningkatkan tanggung jawab.
- c. KAP akan mengaudit badan usaha dengan resiko tinggi apabila mendapatkan *fee* yang besar.
- d. Besar kecilnya *fee* akan mempengaruhi tanggung jawab.

Dari pernyataan diatas, terdapat pula faktor-faktor yang mengakibatkan tinggi rendahnya suatu tarif audit, Selain faktor-faktor di atas, dalam menetapkan *audit fee* akuntan publik juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*), independensi, tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan, banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan basis penetapan tarif yang disepakati (IAPI, 2007).

Dalam sub-bagian ini, peneliti akan menggunakan metode perhitungan dari James Tobin dan William Brainard (1968) yaitu yang dikenal dengan teori *Tobin's Q*. *Tobin's Q* adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktivitas perusahaan.

Jensen (2005) berpendapat bahwa manajer akan terlibat dalam kegiatan manipulasi laba demi mempertahankan *overvalued equity*. Sejak pasar saham berkebijakan untuk menghukum perusahaan karena gagal memenuhi ekspektasi pasar bahkan dengan hanya kurang 1000 rupiah saja, upaya manajerial memenuhi target dengan cara

apa pun menjadi hal yang wajar. Jensen (2005) membuat pernyataan tersebut.

Jensen (2005), karena kompensasi yang berkaitan dengan anggaran dan target, orang dibayar bukan untuk apa yang telah mereka lakukan tetapi relatif untuk apa yang mereka lakukan terhadap beberapa tujuan atau target. Dan ini menyebabkan orang untuk memainkan peran dalam sistem dengan memanipulasi, baik penetapan target dan bagaimana mereka memenuhi target mereka. Target kontra produktif ini berbasis anggaran dan sistem kompensasi yang memberikan landasan subur dan bersifat merusak atas permainan manajemen laba dengan pasar modal, dan menghasilkan integritas. Semua itu adalah dasar untuk membebaskan nilai yang menghancurkan overvaluasi. Oleh karena itu, maka penelitian sebelumnya melakukan tes apakah manajer perusahaan yang *overvalued* sebenarnya menggunakan teknik untuk meningkatkan pendapatan melalui manajemen laba atau tidak.

Houmes dan Skantz (2010) meneliti manajemen laba untuk sekelompok saham terlalu tinggi nilainya, alasannya manajer mungkin tidak selalu menyadari bahwa perusahaan mereka dikatakan *overpricing*.

Mereka mendokumentasikan bahwa perusahaan menjadi tinggi nilainya karena cenderung menggunakan *discretionary accrual* untuk mengelola laba pada tahun setelah *overpricing* tersebut. Madhogarhia *et al* (2009) menemukan bahwa laba pertumbuhan baik ke atas atau ke bawah lebih agresif dari nilai perusahaan, karena masalah informasi asimetris yang lebih parah (Skinner dan Sloan, 2002).

Sawicki dan Shrestha (2008), menemukan ada pola akrual yang jelas tidak normal, manajemen di seluruh kuintil (nilai yang menandai batas interval kelas) yang berbeda antara perusahaan dengan peringkat rasio *book-to-market*. Studi-studi ini penting bagi

mereka dalam menyelidiki tanggapan manajerial terhadap *overvaluation equities*. Manajer bisa memanfaatkan kedua akrual dan pendapatan riil strategi manajemen sebelum melakukan penipuan laporan keuangan dalam rangka untuk melaporkan kinerja yang diminta oleh pasar (Badertscher, 2011).

Manajer juga bisa berinvestasi dan menerbitkan saham yang berlebihan, dan mengakuisisi perusahaan lain untuk mempertahankan *overvalued equities*. Karena kegiatan ini meningkatkan risiko perusahaan, dapat diasumsikan bahwa sebuah perusahaan audit eksternal yang meneliti laporan keuangan akan membebani biaya yang lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan risiko. Menurut standar audit profesional, auditor bertugas merencanakan dan melakukan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pernyataan laporan keuangan bebas dari salah saji material (PCAOB, 2010a, b). Untuk mencapai hal ini tugas auditor adalah merencanakan sifat, waktu dan luas prosedur audit, setelah mempertimbangkan antara faktor-faktor lain, tingkat risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Hal ini nantinya akan ditentukan bersama oleh *overvalued equities* dan *audit fee*.

Bisnis model perusahaan dan faktor lainnya yaitu risiko yang melekat dan kegagalan pengendalian internal untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki material salah saji, atau disebut dengan pengendalian risiko (PCAOB, 2010a, b). Karena auditor tidak selalu dapat mengontrol risiko pengendalian internal yang melekat, satu-satunya komponen risiko audit di bawah kendali auditor adalah risiko deteksi, didefinisikan sebagai risiko bahwa prosedur audit tidak akan mendeteksi dan memperbaiki salah saji material. Karena adanya pengurangan risiko deteksi maka akan meningkatkan kemungkinan bahwa auditor akan dapat mengidentifikasi salah saji material,

untuk itu auditor perlu melakukan tambahan pengujian substantif (Messier *et al.*, 2010), sehingga meningkatkan *audit fee* (Simunic, 1980).

Charles *et al.* (2010) menunjukkan hubungan positif dan terus meningkat antara risiko pelaporan keuangan dan biaya audit, dari 2000 sampai 2003. Penelitian ini mempertimbangkan *overvalued equities* sebagai potensi kontributor manipulasi pendapatan yang meningkatkan risiko dari salah saji material. Peningkatan risiko dari salah saji material, pada akhirnya memerlukan upaya audit tambahan dan akibatnya membuat biaya audit menjadi lebih tinggi. Penelitian mengenai dampak *overvalued equities* telah banyak dilakukan, meskipun penelitian ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Namun penelitian yang difokuskan meneliti dampak *overvalued equities* terhadap *audit fee* didalam laporan keuangan masih terbatas di Indonesia. Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan sudah disimpulkan dalam penelitian ini.

Jurnal ini menganalisa *overvalued equity* sebagai penyebab utama terjadinya manipulasi laba yang meningkatkan risiko kesalahan deteksi. Peningkatan risiko tersebut menjadikan auditor eksternal memerlukan tambahan biaya. Hal ini menjadi referensi peneliti dalam penarikan hipotesis berikut:

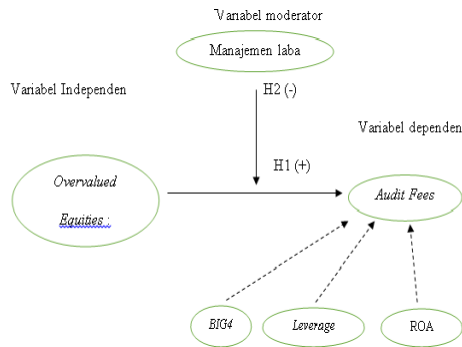
H1: *Overvalued equities* berpengaruh terhadap *audit fees*

H2: Manajemen laba memberikan pengaruh positif terhadap hubungan antara *overvalued equities* dengan *audit fees*.

Untuk lebih jelasnya peneliti memberi gambaran hubungan dalam penelitian ini:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”



3. METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Metode pengambilan sampel yang diambil dari populasi perusahaan pertambangan menggunakan *purposive sampling*. Metode ini merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga sampel penelitian ini menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Melaporkan laporan tahunan dan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2013-2015 di IDX.
- b. Mengungkapkan *audit fee* dalam laporan tahunan.
- c. Mencantumkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Termasuk dalam kriteria perusahaan yang *overvalued* dari perhitungan nilai *Tobin's Q*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji regresi dengan variabel moderating yaitu dengan menggunakan uji Interaksi. Uji Interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2011). Alasan menggunakan MRA pada penelitian ini karena terdapat variabel perkalian antara dua variabel

yang merupakan variabel moderating yang menggambarkan pengaruh moderating terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 20.0.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OV	45	1,00439	2,39879	1,3451729	,32496507
DAC	45	,01170	22,73070	1,2434289	3,74506448
LEV	45	,00742	,90525	,4213884	,23465567
ROA	45	-,26958	,89167	,0407460	,18828092
BIG4	45	1	2	1,33	,477
LNAUDIT	43	19,11383	22,47073	20,5653400	,98865684
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016)

Hasil tabel statistik deskriptif menunjukkan deskripsi variabel penelitian yang digunakan untuk seluruh sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Minimum adalah nilai terkecil suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, *mean* (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data (Ghozali, 2011).

Jumlah data statistik yang digunakan dalam penelitian ini sebesar (N) 45 dari statistik yang diambil dari laporan tahunan dan keuangan perusahaan. Variabel dependen penelitian ini adalah *Audit Fee* (LNAUDIT). Variabel ini menggunakan pengukuran *log natural* biaya audit yang dikeluarkan perusahaan yang dilihat pada laporan tahunan perusahaan. LNAUDIT memiliki nilai minimum 19,11383 dan nilai maksimum 22,47073 dengan nilai rata-rata sebesar 20,5653400. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini minimum biaya audit pada perusahaan sebesar 19,11383 atau senilai Rp200.000.000 dengan nilai maksimum

biaya audit sebesar 22,47073 atau senilai Rp5.740.000.000. pada penelitian ini rata-rata biaya audit sebesar 20,5653400 atau senilai Rp950.000.000. Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini rata-rata perusahaan memiliki *audit fee* yang rendah dari *audit fee* maksimum perusahaan pada sampel penelitian ini.

Variabel independen *Overvalued Equities* (OV) dalam penelitian ini menggunakan metode perhitungan *Tobin's Q* yang telah dimodifikasi. Dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa nilai rata-rata OV perusahaan adalah 1,3451729, nilai minimum adalah 1,00439 dan nilai maksimumnya sebesar 2,39879. Dari kriteria penilaian *Tobin's Q* bahwa perusahaan yang *overvalue* memiliki nilai Q di atas 1, jadi kesimpulannya rata-rata perusahaan memiliki nilai saham yang *overvalued*.

Variabel moderating penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba diukur menggunakan *proxy Discretionary Accrual* (DAC). Dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa nilai rata-rata DAC untuk perusahaan pertambangan adalah 1,2434269, nilai minimumnya adalah 0,01170 dan nilai maksimumnya adalah 22,73070. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada penelitian ini perusahaan memiliki nilai *Discretionary Accrual* yang cukup rendah yaitu sebesar 1,2434269.

Variabel kontrol penelitian ini menggunakan *leverage* (LEV), *return on asset* (ROA) dan KAP Big 4 (BIG4). Variabel LEV memiliki nilai minimum 0,00742 dengan nilai maksimum sebesar 0,90525. Variabel LEV memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4213884 yang menunjukkan bahwa pada penelitian ini memiliki rata-rata tingkat *leverage* yang sedikit rendah. Variabel BIG 4 disini menggunakan variabel *dummy* dengan kode 2 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 dan 1 untuk yang diaudit selain oleh KAP Big 4. Variabel BIG 4 memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 2. Dari tabel di atas dapat

dilihat perusahaan rata-rata diaudit oleh KAP Big 4 sebesar 33%. Variabel ROA memiliki nilai minimum -0,26958 dan nilai maksimum 0,89167. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa rata-rata ROA suatu perusahaan adalah 0,0407460 yang menunjukkan bahwa tingkat ROA perusahaan rata-rata rendah.

Selanjutnya akan dilakukan *screening* data sebelum masuk uji asumsi klasik. Berikut adalah tabel hasil *screening* data dengan *kolmogorov-smirnov test*:

		OV	LEV	BIG4	LNAUDIT	LNROA	LNDAC
N		45	45	45	43	33	45
Normal Parameters ^a	Mean	1,3451729	,4213884	1,33	20,5653400	-3,8109	-1,1033
	Std. Deviation	,32496507	,23465587	,477	,98885684	1,74832	1,40924
Most Extreme Differences	Absolute	,149	,096	,424	,115	,104	,143
	Positive	,149	,077	,424	,115	,094	,143
Negative	Negative	-,147	-,096	-,252	-,094	-,104	-,086
	Kolmogorov-Smirnov Z	1,003	,647	2,847	,754	,599	,960
Asymp. Sig. (2-tailed)		,267	,797	,000	,620	,865	,315

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov test* untuk variabel *audit fee* (LNAUDIT) sebesar 0,620 lebih besar dari 0,05. Untuk variabel *leverage* (LEV) nilainya 0,797, lebih besar dari 0,05. Untuk variabel *overvalued equity* nilai signifikansinya adalah 0,267 lebih besar dari 0,05. Untuk variabel DAC dan ROA nilai sebelumnya adalah 0,000 dan tidak signifikan sehingga data ditransformasi menggunakan *Log Natural* (Ln), lalu hasilnya adalah variabel LNDAC dan LNROA yang mempunyai nilai masing-masing 0,315 serta 0,865, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Sedangkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov test* untuk variabel dan KAP Big 4 (BIG4) adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini dikarenakan variabel *overvalued equities* dan KAP Big 4 merupakan variabel *dummy*.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,089	1,292		13,226	,000
OV	2,892	1,302	,706	2,221	,039
LEV	1,391	1,189	,246	1,170	,257
1 BIG4	,887	,324	,470	2,733	,014
LNROA	,371	,147	,528	2,526	,021
LNDAC	-2,696	1,135	-2,432	-2,376	,029
LNDAC_OV	2,510	,983	2,499	2,555	,020

a. Dependent Variable: LNAUDIT

Hasil uji interaksi dengan MRA di atas menunjukkan bahwa variabel independen OV (*overvalued equity*), variabel kontrol ROA (*Return On Asset*) dan KAP Big 4 (BIG4), serta variabel perkalian antara OV dengan LNDAC (*discretionary accrual*) yaitu LNDAC_OV berpengaruh positif terhadap *audit fees*. Sedangkan variabel manajemen laba (LNDAC) dan variabel *leverage* (LEV) tidak berpengaruh terhadap *audit fees*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

- Hasil hipotesis satu menunjukkan bahwa variabel *overvalued equities* berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.
- Hasil hipotesis dua menunjukkan bahwa variabel moderator manajemen laba berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengaruh positif antara variabel *overvalued equities* dengan *audit fee*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dimiliki, namun masih bisa dikembangkan untuk penelitian berikutnya dengan melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini sebagai acuan. Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain:

- Adanya perbedaan perhitungan variabel independen dari penelitian sebelumnya. Perbedaan perhitungan dapat menyebabkan hasil yang berbeda pula sehingga kesimpulan yang diambil belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya.

- Jumlah sampel dalam penelitian ini terlalu sedikit, dan tahun penelitian yang kurang lama. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan pertambangan yang masuk ke dalam sampel baru mencantumkan nominal *audit fee* dalam laporan tahunannya di tahun 2013 sehingga memaksa peneliti untuk menentukan sampel tahun penelitian dari tahun 2013.
- Pengambilan data tabulasi sangat bergantung dari perusahaan yang mencantumkan laporan tahunannya, dikarenakan data nominal *audit fee* hanya tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Bila perusahaan tidak mencantumkan laporan tahunannya di situs www.idx.co.id maka perusahaan tersebut tidak masuk ke dalam sampel penelitian.
- Fenomena *overvalued equities* yang hanya terbatas pada perusahaan pertambangan saja dan belum terlalu banyak terjadi di sektor lain.

Lalu dalam penelitian ini pun terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti alami, antara lain yaitu:

- Adanya perbedaan perhitungan variabel independen dari penelitian sebelumnya. Perbedaan perhitungan dapat menyebabkan hasil yang berbeda pula sehingga kesimpulan yang diambil belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya.
- Jumlah sampel dalam penelitian ini terlalu sedikit, dan tahun penelitian yang kurang lama. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan pertambangan yang masuk ke dalam sampel baru mencantumkan nominal *audit fee* dalam laporan tahunannya di tahun 2013 sehingga memaksa peneliti untuk menentukan sampel tahun penelitian dari tahun 2013.
- Pengambilan data tabulasi sangat bergantung dari perusahaan yang mencantumkan laporan tahunannya, dikarenakan data nominal *audit fee* hanya tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Bila perusahaan

tidak mencantumkan laporan tahunannya di situs www.idx.co.id maka perusahaan tersebut tidak masuk ke dalam sampel penelitian.

- d. Fenomena *overvalued equities* yang hanya terbatas pada perusahaan pertambangan saja dan belum terlalu banyak terjadi di sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfahrisy, Salim (2005). *Pengertian atau Definisi Abnormal Return*. <<http://pengertianataudefinisi.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisiabnormal-return.html>>.
- Anthony dan Govindarajan (2005). *Management Control System*, Edisi 11. Jakarta. Penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2.
- Arifin, A. (2002). *Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi.
- Badavar, Yoones; Baradaran, Rasool; dan Mohseni, Soheila (2015). *A study of the relationship between overvalued equities and audit fees emphasizing on the role of earning management*. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, vol. 5 pp. 2535-2543.
- Badertscher, B. (2011). *Overvaluation and its effect on management's choice of alternative earnings management mechanisms*. The Accounting Review, Vol. 86 No. 5, pp. 1491-1518.
- Bambang S. dan Elen P. (2010). *Tobins' Q dan Altman Z-Score sebagai Indikator Pengukuran Kinerja Perusahaan*. Kajian Kuntansi, Februari 2010. Hal. 9-21.
- Beaulieu, P. R. (2001). *The effects of judgements of new clients' integrity upon risk judgments, audit evidence, and fees*. Auditing: a Journal of Practice & Theory, 20, 85-99. Bedard, J. C. dan Johnstone, K. M. (2004). *Earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors' planning and pricing decisions*. The Accounting Review, Vol. 79 No. 2, pp. 277-304.
- Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V.3, No. 4, pp. 305-360.
- Boediono, Gideon S. B. (2005). *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.
- Brealey, R. A Myers, S. C. dan Allen, F. (2008). *Principles Of Corporate Finance*. Journal of Accounting Research.
- Caneghem, Tom Van (2010). *Audit Pricing and The Big 4 Fee Premium: Evidence from Belgium*. Managerial Auditing Journal, Vol. 25 Iss 2 pp. 122-139
- Charles, S., Glover, S. M. dan Sharp, N. Y. (2010). *The association between financial reporting risk and audit fees before and after the historic eventssurrounding SOX*. Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 29 No. 1, pp. 15-39.
- Che Ahmad, Ayoib (2006). *The Provision of Non-Audit Services, Audit Fees and Auditor Independence*. Asian Academy of

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Management Journal of Accounting and Finance*, Vol. 2 No. 1 pp. 21-40.
- Chi, J. dan Gupta, M. (2009). *Overvaluation and earnings management*. *Journal of Banking & Finance*, Vol. 33, pp. 1652-1663.
- Christensen, B. E., Omer, T. C., Sharp, N. Y. dan Shelley, M. K. (2012). *Porkbellies and public company audits: have audits once again become just another commodity?*. Working paper, Texas A&M University, College Station, TX.
- Doogar, R., Sivadasan, P. dan Solomon, I. (2010). *The regulation of public company auditing: evidence from the transition to AS5*. *Journal of Accounting Research*, Vol. 48 No. 4, pp. 795-814.
- Fajar, Denny (2012). *Valuasi Saham PT. Bayan Resources Tbk.* (Tesis). Fakultas Ekonomi, Manajemen, Universitas Indonesia. Depok.
- Financial Accounting Standard Board (1978). *Statement of Financial Accounting Concepts No 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Stamford, Connecticut.
- Fischer, M. dan K. Rosenveig (1995). *Attitudes of Shidents and Accounting Practitioners concerning the Ethical Acceptability of Earnings Management*. *Journal of Business Ethics*, Vol. 14, No. 6, hlm. 43344.
- Ghozali, Imam (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. Fourth edition McGraw-Hill, New York.
- Habib, Ahsan; Gong, Rong; Hossain, Mahmud (2013). *Overvalued Equities and audit fees : a research note*. *Managerial Auditing Journal* 28.8: 755-766.
- Healy, P. M. dan Wahlen J. M (2009). *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*. *American Accounting Association Accounting Horizons* Vol. 13 No. 4 December 1999 pp. 365-383.
- Houmes, R. E. dan Skantz, T. R. (2010). *Highly valued equity and discretionary accruals*. *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 37 Nos 1/2, pp. 60-92.
- Houmes, R. E., Foley, M. dan Cebula, R. (2013). *Audit quality and overvalued equity*. *Accounting Research Journal*, Vol. 26 No. 1, pp. 56-74.
- Husnan, Suad (2003). *Dasar-dasar Teori Portofolio*, Edisi kedua. AMP YKPN. Yogyakarta
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2007-2008). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta.
- Jensen, M. C. (2005). *Agency costs of overvalued equity*. *Financial Management*, Vol. 34, pp. 5- 19.
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial*
- Johnstone, K. dan Bedard, J. (2001). *Engagement planning, bid pricing, and client response to initial attest engagements*". *The Accounting*

- Review, Vol. 76 No. 2, pp. 199-220.
- Jogiyanto (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.
- Koyuimirsu. (2011). *Dampak manajemen laba akrual dan manajemen aktivitas nyata terhadap kinerja pasar* (Thesis). Universitas Diponegoro.
- Kim, H. dan Fukukawa, H. (2012). *Japan's Big 3 firms' response to clients' business risk: greater audit effort or higher audit fees?*. International Journal of Auditing.
- Lanis, R. dan Richardson, G. (2013). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a Test of Legitimacy Theory*. Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 26 No 1, pp. 75-100.
- Madhogarhia, P., Sutton, N. K. dan Kohers, T. (2009). *Earnings management practices among growth and value firms*. Applied Financial Economics, Vol. 19 No. 22, pp. 1767-1778.
- Messier, W. Jr, Glover, S. dan Prawitt, D. (2010). *Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach*. 7th ed., McGraw-Hill Irwin, New York, NY.
- Meutia, Inten (2004). *Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 7, No. 3, September 2004.
- Myers, Stewart C. dan Nicholas S. Majluf (1984). *Corporate financing and investment decisions when firms have information the investors do not have*. National bureau of economic research
- Mussalo, Veera (2015). *The effect of earnings management on audit fees*. Thesis. Department of Accounting Aalto University School of Business.
- Newman, D. P., Patterson, E. R. dan Smith, J. R. (2005). *The role of auditing in investor protection*. The Accounting Review, Vol. 80 No. 1, pp. 289-313.
- O'Keefe, T.B., Simunic, D. and Stein, M. (1994). *The production of audit services: evidence from a major public accounting firm*. Journal of Accounting Research, Vol. 32 No. 2, pp. 241-261.
- PCAOB (2010a). *Auditing Standard No. 8, Audit Risk*, PCAOB Release No. 2010-004. Public Company Accounting Oversight Board, Washington, DC.
- PCAOB (2010b), *Report on Observations of PCAOB Inspectors Related to Audit Risk Areas Affected by the Economic Crisis*, PCAOB Release No. 2010-006. Public Company Accounting Oversight Board, Washington, DC.
- Pratt, J. dan Stice, J. D. (1994). *The effects of client characteristics on auditor litigation risk judgments, required audit evidence, and recommended audit fees*. The Accounting Review, Vol. 69 No. 4, pp. 639-656.
- Sankaraguruswamy, S. Whisenant, S., dan Raghunandan, K. (2003). *Evidence on the joint determination of audit and non-*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- audit fees*. Journal of Accounting Research, Vol. 41 No. 4, pp. 721-744.
- Sawicki, J., Shrestha K. M., (2008). *Insider Trading and Earnings Management*. Journal of Business Finance and Accounting 35, pp. 331-346.
- Sawicki, J., Shrestha K. M., (2012). *Overvalued equity and the accruals anomaly: Evidence from insider trades*. 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012).
- Schipper, K. (1989). *Earnings Management*. Accounting Horizons 3, 91-106.
- Scott, A., Sloan, R., Soliman, M dan Tuna, I. (2005). *Accrual reliability, earnings persistence and stock returns*. Journal of Accounting Research, 39, 437-485.
- Simunic, D. (1980). *The pricing of audit services: theory and evidence*. Journal of Accounting Research, Vol. 18 No. 1, pp. 161-190.
- Skinner, D. dan Sloan, R. (2002). *Earnings surprises, growth expectations, and stock returns or don't let an earnings torpedo sink your portfolio*. Review of Accounting Studies, Vol. 7, pp. 289-312.
- Shiller dan J., Robert. (2000). *Irrational Exuberance*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Sugiarto (2009). *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Syamsuddin, Lukman (2007). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tobin, James, (1969). "A General Equilibrium Approach to Monetary Theory", *Journal of Money, Credit and Banking*. Februari, hal. 12-29
- Ujiyantho, Muh. Arief, dan B.A.Pramuka (2007). *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur*. Kumpulan makalah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar, 26-27 Juli, hal. 1-26.
- Watts, R dan Zimmerman. (1978). *Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards*. The Accounting Review 53, 112- 134.
- Yahia, Hassan Kikhia (2015). *Determinants of Audit Fees: Evidence from Jordan*. Accounting and Finance Research, Vol. 4 No.1 2015.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DENGAN MODERASI KETERAMPILAN KOMUNIKASI: STUDI KASUS PADA PASIEN ASURANSI PEMERINTAH DI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA

Sonya Kartawidjaja*), Tantri Yanuar Rahmat Syah
Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Esa Unggul, Jakarta
*Email: sonyakartawidjaja@gmail.com

ABSTRACT

The start of the health insurance system of government in health care in the hospital, reflecting the differences in quality of service and communication skills in the healthcare system in hospitals, in terms of both patients and physicians as a health worker. Data before a system of government guarantees in operation, said the quality of service is closely related to patient satisfaction. However, there has been no research on the quality of service with the moderation of communication skills to satisfaction of patients in the era of JKN (National Health Insurance) conducted in private general hospitals, as well as to compare the effect of communication skills that were previously performed in the era before the existence of a government guarantee. The goal is to determine the effect of service quality on patient satisfaction with communication skills moderation when government security system has been running. The analytical methods used method of GLM (General Linear Model) of the 165 samples of outpatients private hospital. Showed that service quality has a significant effect on patient satisfaction; communication skills significantly affect the quality of care and patient's satisfaction; in patients with a low perception of service quality, high physician communication skills do not improve patient satisfaction and physician communication skills are low does not lower patient satisfaction. In conclusion the higher the quality of services provided, patient satisfaction will be greater, and the communication skills of doctors do not always affect the quality of care and patient's satisfaction depends on the perception of the quality of service that is owned by the patient.

Key Words: Quality of Service, Communication Skills, Patient Satisfaction, General Linear Model

ABSTRAK

Dimulainya sistem jaminan kesehatan pemerintah dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, terlihat adanya perbedaan kualitas pelayanan serta keterampilan komunikasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Data-data sebelum sistem jaminan pemerintah beroperasi, mengatakan kualitas pelayanan berhubungan erat dengan kepuasan pasien. Namun demikian, belum ada penelitian tentang kualitas pelayanan dengan moderasi keterampilan komunikasi terhadap kepuasan pasien pada era Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan di rumah sakit umum swasta. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dengan moderasi keterampilan komunikasi saat sistem jaminan pemerintah sudah berjalan. Metode analisa yang digunakan metode General Linear Model terhadap 165 sampel pasien rawat jalan rumah sakit swasta. Didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kepuasan pasien; keterampilan komunikasi secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien; pasien dengan persepsi kualitas pelayanan yang rendah, keterampilan komunikasi dokter yang tinggi tidak meningkatkan kepuasan pasien dan keterampilan komunikasi dokter yang rendah tidak menurunkan kepuasan pasien.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Keterampilan Komunikasi, Kepuasan Pasien, General Linear Model

1. PENDAHULUAN

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Umpan balik dan informasi merupakan elemen yang penting dalam membangun sistem pemberian pelayanan yang efektif termasuk tingkat kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan konsumen merasa puas terhadap suatu penggunaan jangka panjang, sebab rasa puas konsumen akan mempengaruhi tindakan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dimana selanjutnya mereka tidak akan mudah berpindah jasa karena stimulasi pemasaran. Menurut Donabedian (2005) kepuasan pasien telah menjadi hasil yang penting dari kepuasan terhadap pelayanan kesehatan dan bukan hanya komponen yang penting, tapi juga sebagai kontributor penting dalam definisi kualitas dari perspektif ekspektasi pasien. Kepuasan pasien menjadi suatu tolak ukur untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh suatu instansi rumah sakit atau tenaga kesehatan yang bekerja. Masalah kepuasan pasien menjadi susah dipenuhi memang sudah menjadi rahasia umum, karena bergerak di bidang jasa sehingga banyak hal mengenai kepuasan pasien dinilai secara subjektif.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, telah diselenggarakan program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggunakan *Tarif Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBGs dimana besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atas paket pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur kemudian seluruh pembiayaan pasien yang dirawat sudah ditanggung serta tidak diperbolehkan untuk menambah biaya sedikitpun selama perawatan. Pasien hanya membayar iuran perbulan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya banyak hal yang mempengaruhi tingginya kualitas pelayanan kesehatan, seperti pelayanan dari staf yang terkait, tenaga kesehatan, obat-obat, alat kesehatan yang dipakai, dan kenyamanan prosedur dalam pelayanan kesehatan karena bersifat rujukan berjenjang. Pelayanan kesehatan saat beberapa tahun sebelumnya, pasien dapat datang ke dokter, rumah sakit mana saja sesuai pilihan kemudian mendapatkan obat dan alat kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Pasien tidak perlu mengantri lama untuk bertemu dokter, selain itu juga dalam hal pemeriksaan kesehatan melalui penunjang, seperti radiologi, laboratorium, dan sebagainya. Lain halnya dengan era JKN, dimana semua bagian harus mengantri lebih lama, dikarenakan banyaknya pasien JKN tidak diimbangi dengan jumlah rumah sakit yang melayani jaminan pemerintah.

Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dipercaya membawa efek positif kepada kepuasan pasien dan diindikasikan sebagai kunci dari hasil pelayanan (Andaleeb, 2001). Penelitian dengan tiga variabel ini belum pernah dilakukan di RSUD Siloam karawaci, dengan variabel keterampilan komunikasi sebagai variabel moderasi, kemudian juga dapat melihat perbedaan persepsi kualitas pelayanan antara sebelum dan sesudah terlaksananya jaminan pemerintah.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pasien. Komunikasi yang baik dan benar cara penyampaiannya akan memberikan atau menimbulkan rasa diterima, dihargai, dimengerti dan dilayani dengan baik, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepuasan pasien. Efektifitas komunikasi yang baik antara kedua belah pihak akan berdampak pada kesehatan yang lebih baik, kenyamanan, kepuasan pada pasien, penurunan resiko malpraktik, dan sengketa yang terjadi antara dokter dan pasien. Sasaran dari suatu pelayanan yang baik yaitu dimana keluhan yang didapat sangat sedikit, dan kecenderungan pasien untuk merekomendasikannya kepada orang lain. Sebaliknya dengan adanya keluhan, dapat juga ditanggapi sebagai hal positif dimana suatu instansi dapat memperbaiki atau meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Komunikasi yang efektif dipercaya merupakan hal yang penting dalam kualitas pelayanan yang tinggi dan perawatan untuk mencegah timbulnya keluhan atau masalah (Mercer, 2009).

Kondisi pelayanan kesehatan saat ini, rumah sakit terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Peraturan JKN nomor satu tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja bukan Penerima upah dan Peserta bukan Pekerja. Pada pasal satu dikatakan jaminan kesehatan

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kemudian pasal tiga dikatakan iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dengan moderasi keterampilan komunikasi saat sistem jaminan pemerintah sudah berjalan.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kualitas Pelayanan

Pelayanan merupakan faktor yang amat penting khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa sehingga penting untuk mengetahui secara teoritis tentang batasan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut. Hubungan antara kepuasan dan kualitas pelayanan sudah sangat banyak dibicarakan dalam berbagai bidang pelayanan jasa seperti restoran, rumah sakit, elektronik dan sebagainya. Kepuasan terhadap pelayanan kesehatan berhubungan dengan konsep kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Donabedian (2005) kepuasan pasien telah menjadi hasil yang penting dari kepuasan terhadap pelayanan kesehatan dan bukan hanya komponen yang penting, tapi juga sebagai kontributor penting dalam definisi kualitas dari perspektif ekspektasi pasien. Persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dipercaya membawa efek positif kepada kepuasan pasien dan diindikasikan sebagai kunci dari hasil pelayanan (Andaleeb, 2001).

Menurut Parasuraman (2001) konsep kualitas layanan yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

layanan. Kualitas layanan tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. *Reliability* (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. *Assurance* (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. *Empathy* (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

2.2. Kepuasan Pasien

Kepuasan pelanggan adalah indikator utama dari standar suatu fasilitas kesehatan dan merupakan suatu ukuran mutu pelayanan. Kepuasan pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang akan mempengaruhi profitabilitas fasilitas kesehatan tersebut, sedangkan sikap karyawan terhadap pelanggan juga akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula tuntutan akan mutu pelayanan yang diberikan (Atmojo, 2006). Kepuasan pasien adalah suatu penilaian subjektif dari kualitas pelayanan, tetapi merupakan suatu kendali yang kuat disaat pasien sudah mempunyai pilihan atas penyedia kesehatan atau kesempatan untuk merekomendasikan penyedia kesehatan tersebut kepada orang lain menurut Ware, Snyder, dan Wright (1976). Sesuai dengan Crosby, et al. (1990), dan Kim dan Cha (2002), kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai pengalaman yang didasarkan pada penilaian yang dilakukan pelanggan mengenai sejauh mana harapannya terhadap produk dan jasa dapat diwujudkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas, yaitu terdapat kesamaan pandangan bahwa kepuasan pelanggan merupakan ungkapan perasaan puas apabila menerima kenyataan atau pengalaman pelayanan yang sesuai harapan.

2.3. Komunikasi

Komunikasi yang efektif dipercaya merupakan hal yang penting dalam kualitas pelayanan yang tinggi dan perawatan untuk mencegah timbulnya keluhan atau masalah (Mercer, 2009). Barnlund (1964) mengatakan komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Komunikasi kesehatan antara dokter dan pasien dahulu

menganut pola paternalistik dengan dokter pada posisi yang lebih dominan sudah saatnya diubah menjadi setara antara dokter dan pasien. Efektifitas komunikasi yang baik antara kedua belah pihak akan berdampak pada kesehatan yang lebih baik, kenyamanan, kepuasan pada pasien, penurunan resiko malpraktik, dan sengketa yang terjadi antara dokter dan pasien. Sasaran dari suatu pelayanan yang baik yaitu dimana keluhan yang didapat sangat sedikit, dan kecenderungan pasien untuk merekomendasikannya kepada orang lain. Sebaliknya dengan adanya keluhan, dapat juga ditanggapi sebagai hal positif dimana suatu instansi dapat memperbaiki atau meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Komunikasi yang efektif dipercaya merupakan hal yang penting dalam kualitas pelayanan yang tinggi dan perawatan untuk mencegah timbulnya keluhan atau masalah (Mercer, 2009).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pasien rawat jalan di rumah sakit umum swasta Karawaci, aspek yang diteliti adalah kualitas pelayanan, keterampilan komunikasi, dan kepuasan pasien. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan melakukan metode survei. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan pengaruh. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner. Data diolah secara statistik dengan menggunakan SPSS dengan metode GLM (*General Linear Model*). Hasil analisa kemudian diinterpretasikan dan langkah terakhir disimpulkan serta diberikan saran. Untuk penelitian ini, sampel yang digunakan adalah keseluruhan pasien rawat jalan rumah sakit umum swasta. Berdasarkan Agung (2006), maka jumlah sampel yang diambil adalah: jumlah rerata sel dikali 30. Jumlah sel ada empat, sehingga $4 \times 30 = 120$ responden (minimal) dan

penelitian ini mempunyai 165 responden. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan skala pengukuran *Likert* dengan skala satu sampai lima.

Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu kemampuan organisasi untuk menemukan atau melebihi harapan dari pelanggan (Parasuraman et al., 1988). Kualitas pelayanan memiliki lima dimensi yaitu bukti fisik, kehandalan, empati, jaminan kepastian, dan daya tanggap dengan total 22 pertanyaan. Keterampilan komunikasi yang efektif dipercaya merupakan hal yang penting dalam kualitas pelayanan yang tinggi dan perawatan untuk mencegah timbulnya keluhan atau masalah (Mercer, 2009). Keterampilan komunikasi memiliki total delapan pertanyaan, dan kepuasan Menurut Crosby et al. (1990), Kim dan Cha (2002) mengatakan bahwa kepuasan pasien adalah suatu pengalaman yang didasarkan pada penilaian yang dilakukan pelanggan mengenai sejauh mana harapannya terhadap produk dan jasa dapat diwujudkan dengan total tiga pertanyaan.

Pada saat uji validitas pada indikator keterampilan komunikasi dengan CS 9 dokter di rumah sakit anda memberikan dorongan untuk melakukan pola hidup sehat dengan anti *image matric* 0,753, CS 10 dokter di rumah sakit anda melakukan diskusi terkait alternatif pengobatan untuk menyembuhkan penyakit saya anti *image matric* 0.626 tidak diterima karena komponen matriknya menjadi dua sehingga tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini. Validitas dari indikator yang dipakai untuk mengukur konstruk dari model pengukuran dapat dilihat dari angka pengolahan data menggunakan SPSS. Indikator yang dipakai haruslah memiliki nilai sig. yang lebih kecil dari 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hasil Uji F

Source	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	3	20.072	30.166	.000
Intercept	1	1.136	1.707	.193
SQ_CODE	1	5.142	7.728	.006
SQ_CODE*CS_CODE	2	12.127	18.226	.000
Error	171	.665		
Total	175			
Corrected Total	174			

Pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.1 dimana pengujian hipotesis dengan menggunakan statistika uji F pada baris “kualitas pelayanan” dimana $F_0 = 7,728$ (Sig. 0,006), dengan derajat bebas sebesar 1/171. Hal ini mengindikasikan adanya penolakan H_0 ,

sehingga dapat disimpulkan bahwa data mendukung hipotesa yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dari dokter. Semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan semakin tinggi kepuasan pasien di RSUD Siloam Karawaci.

Tabel 4.2. Hasil Uji t

Parameter		B	Std. Error	T	Sig.
Intercept	β_0	-.528	.096	-	.000
SQ_CODE = 1	β_1	.034	.210	.5.490	.870
SQ_CODE = 2	β_2	1.215	.212	.163	.000
1*CS_CODE = 1	β_3	.424	.225	5.738	.062
SQ_CODE = 2*CS_CODE = 1				1.879	

Pada tabel 4.2, diperlihatkan pengujian hipotesis 2, nilai yang akan diuji adalah pada kelompok “keterampilan komunikasi”, dengan memperbandingkan derajat kualitas pelayanan tinggi dan derajat kualitas pelayanan rendah dengan koefisien β . Pengujian ini dilakukan untuk melihat adanya perbedaan kesenjangan rerata simpangan kepuasan pasien (Y) yang dibentuk oleh kualitas pelayanan (SQ) tinggi (SQ = 1), dan rendah (SQ = 2) baik pada (CS) keterampilan komunikasi tinggi (CS = 1) maupun keterampilan komunikasi rendah (CS = 2) setelah memperhitungkan pengaruh linear kualitas pelayanan (X) terhadap

kepuasan pasien (Y) yang sama dalam semua sel. Hasil analisis mendukung hipotesis H2a yaitu khusus untuk kelompok pasien yang dengan persepsi kualitas pelayanan tinggi, kelompok pasien yang memiliki persepsi keterampilan komunikasi yang tinggi lebih puas dibandingkan kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi yang rendah, dengan nilai sig. 0,000 ($>0,05$).

Pada hasil pengujian hipotesis 2b, ditemukan bahwa hasil analisis tidak mendukung hipotesis H2b yaitu khusus untuk kelompok pasien yang dengan persepsi kualitas pelayanan rendah, kelompok pasien yang memiliki persepsi keterampilan komunikasi yang tinggi lebih puas dibandingkan kelompok

pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi yang rendah, dengan nilai sig. 0,062 ($>0,05$). Pada hasil pengujian hipotesis 2c, ditemukan bahwa hasil analisis tidak mendukung hipotesis H2c yaitu khusus untuk kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi dokter rendah, memiliki kepuasan lebih besar pada kelompok pada persepsi kualitas pelayanan tinggi dibanding kelompok pasien dengan kualitas pelayanan rendah, dengan nilai sig. 0,870 ($>0,05$).

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang sejalan antara dampak dari kualitas pelayanan kepada kepuasan pasien dalam penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Vietnam (Cong dan Mai, 2014). Dengan semakin baiknya kualitas pelayanan, meningkatnya kepuasan pasien diharapkan dapat membawa dampak yang baik untuk kesehatan pasien dan kondisi dari pelayanan kesehatan tersebut.

Pada hasil pengujian hipotesis 1, ditemukan bahwa hasil analisis mendukung hipotesis H1 yaitu kualitas pelayanan yang tinggi meningkatkan kepuasan pasien. Hasil penelitian ini semakin menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cong dan Mai (2014), yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang sejalan antara dampak dari kualitas pelayanan kepada kepuasan pasien, yang artinya adalah semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepuasan pasien akan semakin tinggi atau sebaliknya. Senada dengan Yuristi (2013) yang juga mengungkapkan bahwa adanya hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien.

Pada hasil pengujian hipotesis 2a, ditemukan bahwa hasil analisis mendukung hipotesis H2a yaitu khusus untuk kelompok pasien yang dengan persepsi kualitas pelayanan tinggi, kelompok pasien yang memiliki persepsi keterampilan komunikasi yang tinggi

lebih puas dibandingkan kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi yang rendah. Hasil penelitian ini semakin menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Korsch dan Gozzi (1968) dimana ditemukan bahwa pasien yang menyukai cara komunikasi dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan akan merasa lebih puas dalam pelayanan dibanding pasien yang kurang menyukai cara tenaga kesehatan dalam berkomunikasi tersebut.

Pada hasil pengujian hipotesis 2b, ditemukan bahwa hasil analisis tidak mendukung hipotesis H2b yaitu khusus untuk kelompok pasien yang dengan persepsi kualitas pelayanan rendah, kelompok pasien yang memiliki persepsi keterampilan komunikasi yang tinggi lebih puas dibandingkan kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi yang rendah. Karakteristik dan kualitas adalah sebagai berikut: Gronroos (1984) mengatakan persepsi kualitas pelayanan sebagai hasil dari proses evaluasi, dimana konsumen membandingkan harapan dengan layanan yang ia terima, yaitu ia menempatkan layanan yang dirasakan terhadap pelayanan yang diharapkan, hasil dari proses ini akan menjadi kualitas yang dirasakan dari layanan. Persepsi kualitas sehingga berbeda dari kualitas obyektif, yang melibatkan penilaian obyektif dari suatu hal atau peristiwa atas dasar standar yang telah ditentukan yang terukur dan dapat diverifikasi (Zeithaml, 1988). Kepuasan pasien, digambarkan sebagai evaluasi individu yang positif terhadap dimensi pelayanan kesehatan. Suatu kualitas pelayanan yang baik akan mampu meningkatkan nilai jual suatu jasa pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan suatu jasa atas tempat, akan semakin terdepan. Banyak penyedia jasa lain sebagai kompetitor akan merasa tersaingi dan terlihat jelas bahwa kualitas pelayanan sebagai satu sumber potensi yang paling penting dalam menunjang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

kestabilan keunggulan dalam kompetisi (Lim dan Tang, 2000; Kuei, 1998). Lebih dari dua dekade, para peneliti telah meneliti kualitas pelayanan dan hubungan dengan hasil dari suatu usaha, yang kemudian didapatkan bahwa kualitas pelayanan yang tinggi akan memimpin kepada kepuasan pelanggan (Gotlieb et al., 1994; Kang dan James, 2004; Oliver, 1997; Pollack, 2008). Persepsi kualitas pelayanan itu sangat penting dalam mempengaruhi cara pandang konsumen atau pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh, seorang pasien yang memiliki persepsi kualitas pelayanan yang rendah, maka keterampilan komunikasi yang diberikan dokter tidak akan banyak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, pasien tidak akan merasa adanya sesuatu yang berbeda, sehingga tidak akan menimbulkan rasa puas tersendiri terhadap pelayanan yang diberikan. RSUD Siloam Karawaci, melayani masyarakat menengah kebawah dengan dipusatkan kepada jaminan pemerintah, kelas rawat kelas tiga, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat kelas menengah keatas yang juga menggunakan BPJS dengan hak rawat kelas satu dan dua penuh, turun ke kelas tiga. Dengan persepsi yang pada umumnya lebih tinggi, dirawat di kelas tiga setara pelayanan kelas tiga, dapat timbul rasa kecewa, sehingga mempengaruhi persepsi kualitas pelayanan menjadi rendah. Dengan demikian, keterampilan komunikasi yang tinggi, tidak membawa pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Hasil penelitian ini tidak senada dengan penelitian Franke (1988) yang menegaskan bahwa peningkatan komunikasi memainkan peran yang sangat kuat dalam meningkatkan pandangan konsumen tentang kualitas pelayanan. Pemberian informasi yang baik dan menjawab pertanyaan sesuai dengan bahasa yang dapat dimengerti

cukup berperan penting secara fungsional dan teknis. Berdasarkan penelitian Korsch et al., (1968), komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien sangat penting untuk menentukan kepuasan pasien dalam pelayanan.

Pada hasil pengujian hipotesis 2c, ditemukan bahwa hasil analisis tidak mendukung hipotesis H2c yaitu khusus untuk kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi dokter rendah, memiliki kepuasan lebih besar pada kelompok pada persepsi kualitas pelayanan tinggi dibanding kelompok pasien dengan kualitas pelayanan rendah. Karakteristik dari keterampilan komunikasi adalah sebagai berikut: Komunikasi adalah suatu proses melalui seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak) pendapat tersebut dikatakan oleh Hovland, Janis dan Kelley (1953). Gode (1959) mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan (Ruesch, 1957). Barnlund (1964) mengatakan komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Keterampilan komunikasi yang rendah, didapatkan pasien dengan persepsi kualitas pelayanan tinggi lebih besar dari kualitas pelayanan yang rendah. Pasien yang datang berobat, menggunakan jaminan pemerintah dengan kategori seluruhnya dibiayai oleh pemerintah, umumnya pasien yang datang ke RSUD Siloam Karawaci, adalah golongan menengah kebawah mendapatkan persepsi kualitas pelayanan yang tinggi,

baik atas rekomendasi dari kerabat atau lainnya, dan pasien membandingkan dengan rumah sakit sekitar yang melayani JKN juga. Pasien dengan persepsi kualitas pelayanan yang memang sudah tinggi, dengan kata lain percaya bahwa pelayanan di Siloam bagus, sehingga faktor komunikasi menjadi kurang berdampak. Yang lebih penting, tempat periksa cukup bersih, ruang tunggu yang nyaman, dan hal-hal lainnya dibanding pasien tidak diajak berkomunikasi dengan baik atau secara jelas. Tidak sedikit pasien dalam perawatan yang tidak mengerti menanyakan penyakit apa yang dideritanya. Pasien hanya mengetahui sedang sakit dan sedang dalam perawatan, kemudian sembuh bisa pulang. Hal tersebut sudah membuat pasien puas, tanpa mengetahui penyakit yang dideritanya secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini tidak senada dengan penelitian terdahulu yang mengatakan komunikasi yang efektif dipercaya merupakan hal yang penting dalam kualitas pelayanan yang tinggi dan perawatan untuk mencegah timbulnya keluhan atau masalah (Mercer, 2009). Denise, John, dan David (2014) menyatakan bahwa peningkatan persepsi yang sempurna oleh penyedia pelayanan komunikasi dan pelayanan lain yang saling berhubungan dapat meningkatkan kepuasan pasien. Demikian juga dengan para peneliti lainnya yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik memimpin kepada ketahanan para konsumen untuk terus datang dan berpindah ke lain hati, mengurangi beban harga, mengembangkan citra perusahaan, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan terlebih meningkatkan keuntungan (Berry et al., 1989; Kang dan James, 2004).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif

terhadap kepuasan pasien. Kesimpulan yang bisa diambil dari hipotesis pertama adalah terbukti bahwa kualitas pelayanan pasien JKN di RSUD Siloam Karawaci baik, dan meningkatkan kepuasan pasien (hipotesis didukung).

Hasil penelitian selanjutnya didapatkan keterampilan komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Kesimpulan yang bisa diambil dari hipotesis kedua adalah terbukti secara statistik bahwa pasien JKN yang dengan persepsi kualitas pelayanan tinggi di RSUD Siloam Karawaci, memiliki kepuasan lebih pada dokter dengan keterampilan komunikasi dokter yang tinggi, daripada dengan keterampilan komunikasi dokter yang rendah (hipotesis didukung). Dokter yang dapat menjelaskan dengan baik, pasien akan semakin mengerti dan merasa dihargai, dan dokter dinilai berempati dengan penyakit yang diderita oleh pasien.

Khusus untuk pasien yang dengan persepsi kualitas pelayanan rendah, kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi dokter yang tinggi lebih puas dibandingkan kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi dokter yang rendah (hipotesis tidak didukung). Kesimpulan yang bisa diambil dari hipotesis ketiga adalah pasien JKN di RSUD Siloam Karawaci dengan persepsi kualitas pelayanan yang rendah, keterampilan komunikasi dokter yang tinggi tidak meningkatkan kepuasan pasien. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan kelas dari pengguna jaminan kesehatan pemerintah.

Khusus untuk kelompok pasien dengan persepsi keterampilan komunikasi dokter yang rendah, kelompok pasien dengan persepsi kualitas pelayanan yang tinggi lebih puas daripada pasien dengan persepsi kualitas pelayanan yang rendah. Kesimpulan yang bisa diambil dari hipotesis keempat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

adalah pada pasien JKN di RSUD Siloam Karawaci dengan persepsi kualitas pelayanan rendah, keterampilan komunikasi dokter yang rendah tidak menurunkan kepuasan pasien (hipotesis tidak didukung). Dengan adanya perbedaan kelas peserta jaminan kesehatan pemerintah, disertai dengan adanya perbedaan dasar persepsi pasien terhadap pelayanan rumah sakit dari awal datang untuk berobat, sehingga dapat membuat faktor keterampilan komunikasi menjadi tidak terlalu berpengaruh.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan telah diperoleh kesimpulan, maka penulis ingin memberikan masukan untuk pengembangan penelitian disarankan penelitian mendatang dapat menambahkan variabel-variabel lain, yang mempengaruhi kepuasan pasien. Penelitian dapat dilakukan pada objek penelitian di perusahaan jasa lainnya atau perusahaan industri manufaktur agar mendapat hasil yang lebih objektif dan representatif dengan cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaleeb, S. (2001). 'Service Quality Perceptions and Patient Satisfaction: A Study of Hospitals in a Developing Country'. *Social Science & Medicine*, 52(9), 1359-1370.
- Barnlund, D. (1964). Toward a Meaning Centered Philosophy of Communication. *Journal of Communication*, 12, 197-211.
- Berry, & Leonard, L. (1989). *Relationship Marketing in Emerging Perspectives on Services Marketing*, Leonard L. Berry, G. Lynn Shostack, and GregoryD Upah, eds. Chicago: American Marketing Association.
- Cong & Mai. (2014). Service Quality and its Impact on Patient Satisfaction: An Investigation in Vietnamese Public Hospitals. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol.2 No.1.
- Crosby, Lawrence, A., Kenneth, R., Evans, and Deborah, C. (1990), Relationship Quality In Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective," *Journal of Marketing*, 54, 68-81.
- Denise, M., John, P., & David, J. (2014). Improving The Patient *Experience Through Provider Communication Skills Building*. *Patient Experience Journal*, 1(1), 10.
- Donabedian, A. (2005). Evaluating the Quality of Medical Care. *The Milbank Quarterly*, 83(4), 691-729.
- Franke, N., Keinz, P., & Steger, C. J. (2009). Testing the Value of Customization: When Do Customers Really Prefer Products Tailored to Their Preferences?. *Journal of Marketing*, 73(9), 103-121.
- Gode, A. (1959). "What Is Communication?" *Journal of Communication*, 9(5).
- Grönroos, C. (1984). Marketing Services: The Case of A Missing Product. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 13(4/5), 322-338.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., and Kelley, H. H. (1953). *Communication and Persuasion: Psychological Studies*

- Of Opinion Change. Amerika Serikat: Greenwood Press.
- Kang & James. (2004). Service Quality Dimensions: An Examination of Gronroos's Service Quality Model. *Managing Service Quality*, 12 (4), 266-77.
- Kim, W., & Cha, Y. (2002). Antecedents and Consequences of Relationship Quality in Hotel Industry. *Int Journal Hospitality Manage* 21(4), 301-471.
- Lim & Tang. (2000). A Study Of Patients' Expectations and Satisfaction in Singapore Hospitals. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 13(7), 290-299.
- Mercer, N., Dawes, L., & Kleine, S. (2009). Dialogic Teaching In The Primary Science Classroom. *Language and Education*, 23(4), 353-369.
- Oliver, R. L. (1997). *Satisfaction. A Behavioural Perspective on the Consumer*. Irwin/McGraw-Hill, Boston: MA.
- Parasuraman, A., Valerie, Z., and Berry, L. (1988), "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale For Measuring Customer Perceptions Of Service Quality", *Journal of Retailing*, 64(2), 12-40.
- Parasuraman, A. (2001). *Delivering Quality Service*. New York: The Free Press.
- Pollack, B. (2008). The Nature Of The Service Quality and Satisfaction Relationship. *Managing Service Quality*, 18(6), 537-558.
- Ruesch, J. (1957). Principles of Human Communication. *Dialectica*, 11(1-2), 154-166.
- Smith, R. & Houston, M. (1982), "Script-Based Evaluations Of Satisfaction With Services", in Berry, L., Shostack, G. and Upah, G. (Eds), *Emerging Perspective on Services Marketing*, AMA, Chicago, IL, 59-62.
- Ware, J. E., Snyder, M. K., Wright, W. R., Davies, A. R. (1983). 'Defining and Measuring Patient Satisfaction With Medical Care'. *Evaluation and Program Planning*, 6(3-4), 247-263.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN,
HARGA, DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN
PELANGGAN PADA PROGRAM PASCA SARJANA
DI UNIVERSITAS PAMULANG**

Sri Nitta Crissiana Wiryana Atmaja

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: nittacwa.17.10.10@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to comprehend and give empiric evidence of the effect on service quality, price, and location to the customer satisfaction in Magister Management Program in Pamulang University. The methodology that is applied on this research is quantitative method by using analytic data method by conducting quality data test and hypothesis test by using SPSS version 2.3. The result of this research is there is influence between service quality and customer satisfaction, influence between the price and customer satisfaction, influence between the location and customer satisfaction. Based on simultaneous test service quality, price, and location have influences on customer satisfaction.

Key Words: Service Quality, Price, and Location, and Customer Satisfaction

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan memberikan bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Manajemen di Universitas Pamulang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data yaitu dengan melakukan pengujian kualitas data, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 2.3. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan, dan ada pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan hasil yang didapat adalah secara bersama-sama kualitas pelayanan, harga, dan lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Harga, Lokasi dan Kepuasan Pelanggan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu, atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama (Chaplin (1999: 357)). Kaitannya dengan hal tersebut, kompetisi dapat muncul dalam setiap aspek kehidupan; dalam persahabatan (memperebutkan pujaan hati yang sama), dalam keluarga (dua orang bersaudara berebut program televisi), dalam bisnis baik bisnis barang (menjual produk dengan kualitas baik dan harga yang murah) maupun jasa (menyajikan pelayanan prima bagi pelanggannya, dan masih banyak contoh yang lain. Pada saat itulah secara otomatis muncul hasrat untuk saling mengalahkan di antaranya. Kompetisi merupakan perwujudan tindakan-tindakan serta perilaku. Bagaimana seseorang bersikap dan bertingkah laku.

Kaitannya dengan hal di atas, kompetisi dalam penelitian ini adalah kompetisi bisnis jasa non profit yaitu perguruan tinggi. Ada begitu banyak perguruan tinggi di daerah Tangerang Selatan, namun yang menjadi sorotan adalah tiga perguruan tinggi yaitu UNPAM (Universitas Pamulang), UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta).

Universitas Pamulang (UNPAM) alih manajemen pada 2004 memiliki 6 fakultas dengan 13 program studi (S1), 2 program diploma (D3), dan 2 program pasca sarjana (S2). Berlokasi di Jalan Surya Kencana No 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412. Lokasi yang cukup strategis namun karena jumlah puluhan ribu mahasiswa maka selalu terjadi kemacetan pada pagi, sore, dan malam hari. Area parkir pun kurang memadai, terkadang kendaraan bermotor khususnya mobil harus diparkir dibahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang lain. Belum lagi angkutan umum yang berhenti untuk

menaikkan penumpang di depan kampus menambahkan kemacetan yang sudah ada.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdiri pada tanggal 1 Juni 1957 memiliki sebelas fakultas dengan 56 program studi (S1), 1 program pasca sarjana dan 1 program doktoral (S3). Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan 15412, Indonesia. Lokasi yang terletak ditepi jalan raya dengan jumlah puluhan ribu mahasiswa namun hanya menyebabkan arus lalu lintas yang ramai lancar, jika terjadi kemacetan itu dikarenakan ada kendaraan yang berputar arah, baik disebelah kanan maupun disebelah kiri dari kampus ini.

Universitas Muhammadiyah Jakarta atau yang disingkat UMJ merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berlokasi di Jakarta. Di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), UMJ adalah perguruan tinggi tertua. Berdiri sejak 18 November 1955, serta memiliki motto "Terkemuka, Modern dan Islami". Terletak di area yang padat lalu lintas sehingga kerap kali terjadi kemacetan di depan pintu masuk. Hal ini pun dikarenakan ada area untuk putar balik kendaraan.

"Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya dengan ekspektasi. Jika kinerja produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan tersebut tidak puas dan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan tersebut puas. Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, pelanggan tersebut senang (Kotler (2009: 14)). Pentingnya kepuasan pelanggan ada beberapa, yaitu: (1) kunci untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, (2) penyebab munculnya loyalitas pelanggan, (3) menumbuhkan citra positif perusahaan dan (4) bentuk keunggulan daya saing yang paling efektif.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Pelayanan adalah sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan adalah suatu produk yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan secara luas mencakup baik yang kelihatan (*tangibles*) maupun yang tidak kelihatan (*intangibles*) Tjiptono (2006: 87). Pelayanan pelanggan yang bermutu merupakan kunci sukses dan dasar untuk membangun keberhasilan dan keuntungan bagi perusahaan dalam bidang apapun.

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari seluruh nilai yang ditukar oleh konsumen atau manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut Kotler dan Amstrong (2001: 439). Harga juga memainkan peranan yang penting dalam mengkomunikasikan kualitas dari jasa tersebut. Konsumen mengasosiasikan harga yang tinggi dengan tingkat kinerja suatu produk jasa yang tinggi pula.

Lokasi adalah aspek penting dalam strategi saluran distribusi. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang cepat dan dapat menarik sejumlah besar konsumen. Penentuan lokasi yang baik akan memberikan output kemampuan perusahaan Tjiptono (2002: 186). Perusahaan yang terletak di lokasi yang strategis, dengan akses transportasi yang cepat, akan berdampak pada mobilisasi distribusi yang cepat. Mobilisasi distribusi barang dan jasa akan lancar akan berdampak pada arus kas yang lancar pula. Untuk perusahaan jasa, lokasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menggunakan jasa perusahaan, dibandingkan perusahaan yang berada di lokasi yang sulit diakses.

Sebuah persaingan membutuhkan adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat

berkerja dengan baik (adanya informasi yang asimetris dan monopoli). Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor.

Perlindungan hak-hak konsumen tertuang dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: (1) Hak memilih barang atau yang akan dikonsumsi, (2) Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi, (3) Hak dilayani, diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi, (4) Hak mendapat advokasi dan perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa, (5) Hak didengar pendapat dan keluhannya, (6) Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi (7) Hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur atas apa yang akan dikonsumsi, (8) Hak mendapat barang/ jasa sesuai nilai tukar dengan kondisi dan jaminan yg dijanjikan.

Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi: (1) Pembukaan UUD 1945, (2) UUD 1945 sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia, (3) Pancasila sebagai Landasan Idiil Sistem Pendidikan Indonesia, (4) Ketetapan MPR sebagai Landasan Yuridis

Pendidikan Nasional, (5) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional, (6) Keputusan Presiden sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional, (7) Keputusan Menteri sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional, dan (8) Instruksi Menteri sebagai Landasan yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional pasal 1: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Persaingan dalam dunia pendidikan semakin ketat hari lepas hari. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut para pelaku usaha non profit ini untuk dapat memaksimalkan kinerja lembaganya agar dapat bersaing dengan lembaga lainnya. Terdapat sejumlah perguruan tinggi yang berlokasi di Tangerang Banten baik perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadikan Tangerang dikenal sebagai Kota Pendidikan. Perguruan-perguruan tinggi tersebut menawarkan pendidikan yang berkualitas dan gedung yang permanen serta fasilitas yang memadai, jumlah mahasiswa yang kian hari kian bertambah adalah satu bukti di mana perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut diminati dan digemari oleh banyak siswanya.

Universitas Pamulang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Pamulang Tangerang Banten. Universitas ini alih manajemen pada tahun 2001. Sejak saat itu hingga kini, Universitas Pamulang mempunyai puluhan ribu mahasiswa aktif yang

datang dari berbagai kota-kota besar di pulau Jawa ini dan bahkan dari pulau-pulau lain seperti, pulau Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok, Nias, Ambon dan masih banyak lagi.

Keheranan dan rasa penasaran akan adanya sebuah universitas yang memiliki gedung yang permanen, berfasilitas baik, berkualitas, berlokasi di tempat yang strategis namun berbiaya kuliah yang terjangkau dan bahkan tidak memungut biaya gedung membuat sejumlah pihak-pihak mulai berdatangan untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dan ketika mereka tiba di Universitas Pamulang, mereka menemukan hal itu benar adanya.

Tidak memungut biaya gedung memang menjadi salah satu daya tarik dari Universitas Pamulang, idealnya sebuah perguruan tinggi yang sudah semakin besar hendaknya Universitas Pamulang sudah menggunakan promosi berbayar seperti media elektronik (iklan di TV maupun iklan di radio dan menggunakan layar besar seperti yang dilakukan perguruan tinggi lainnya) sebagai media untuk mempromosikan kampusnya sehingga akan semakin banyak orang akan tahu akan keberadaan sebuah universitas di kota Tangerang Selatan.

Belum adanya *student center* yang merupakan salah satu sarana untuk menciptakan suasana yang menyatukan civitas akademika untuk berbudaya lebih dinamis, serta belum terpenuhinya *food court* untuk mahasiswa membuat mahasiswa Universitas Pamulang memiliki kendala dalam mencari makan siang. Kurangnya jumlah Profesor dijenjang Pasca Sarjana dan belum tersedianya wadah untuk alumni pasca sarjana Universitas Pamulang menyalurkan kompetensi mereka.

Kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

mengimbangi harapan pelanggan. “Seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat” Kotler (2009: 49). Mutu sama dengan kualitas dimana mutu adalah keseluruhan ciri dari atribut produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat Kotler (2007: 49).

Pengertian harga sebagai berikut: “Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya”. Dharmesta dan Irawan (2005: 241) mengemukakan definisi lainnya yaitu “Harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa Saladin (2003: 95).” Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.

Lokasi adalah aspek penting dalam strategi saluran distribusi. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang cepat dan dapat menarik sejumlah besar konsumen. Penentuan lokasi yang baik akan memberikan output kemampuan perusahaan Tjiptono (2002: 186). Teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain.

Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: (1) bahan baku lokal (*local input*), (2) permintaan lokal (*local demand*), (3) bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*), (4) permintaan luar (*outside demand*) Hoover dan Giarratan (2007).

(<http://www.slideshare.net/nugrohosbm/teori-lokasi-dan-terbentuknya-kota>)

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *gêo* ("Bumi") dan *graphein* ("tulisan", atau "menjelaskan").

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada, maka dalam kegiatan ini dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen studi kasus di Universitas Pamulang”.

1.2. Perumusan Masalah

- Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
- Seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
- Seberapa besar pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
- Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara simultan.

1.3. Hipotesis Penelitian

- Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
- Terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
- Terdapat pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara parsial.
- Terdapat pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara simultan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah deskriptif. Tujuan

dari penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi dari variabel kualitas pelayanan, harga, lokasi, dan kepuasan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey method*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan maupun menguji adanya hubungan dan sebab akibat antara dua variabel atau lebih Edi Sukarjono (2012: 101).

Metode survei dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang utama, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory* (penjelasan). *Explanatory* (penjelasan) adalah satu jenis riset konklusif yang tujuan utamanya adalah mendapatkan bukti mengenai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal Malhotra (2009: 100).

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain Sugiyono (2012: 115). Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka dapat digunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya, akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili).

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pasca sarjana (Magister Manajemen - Universitas Pamulang). Jumlah mahasiswa 2012-2015 adalah sebanyak 262 orang

mahasiswa aktif yang dapat digolongkan berdasarkan semester, yaitu semester 1 = 84, semester 2 = 64, semester 3 = 48, dan semester 4 = 66.

Dengan menggunakan tabel 5.1, bila jumlah populasi = 262, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya = 149. Berdasarkan perhitungan dengan cara berikut ini jumlah sampel untuk kelompok Semester 1 = 84, Semester 2 = 64, Semester 3 = 48, dan Semester 4 = 66 dalam tahun ajaran 2013-2014.

Semester 1	= $84/262 \times 149 = 47,77$
Semester 2	= $64/262 \times 149 = 36,40$
Semester 3	= $48/262 \times 149 = 27,30$
Semester 4	= $66/262 \times 149 = 37,53$
Jumlah	= 149

Jadi jumlah sampelnya = $47,77 + 36,40 + 27,30 + 37,53 = 149$. Jumlah yang pecahan bisa dibulatkan ke atas, sehingga jumlah sampel menjadi $48 + 37 + 28 + 38 = 151$

3.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini operasional variabel diidentifikasi sebagai berikut:

a. Variabel X (variabel bebas).

Variabel *independent* (bebas) adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat) Sugiyono (2012: 59). Dalam penelitian ini variabel *independent* (bebas) adalah Kualitas Pelayanan (X_1), Harga (X_2), dan Lokasi (X_3).

b. Variabel Y (variabel terikat)

Variabel *dependent* (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Sugiyono (2012: 59). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan pelanggan (Y)

3.3. Kualitas Pelayanan/ Jasa

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya, pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan laba perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan.

Salah satu pendekatan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model *SERVQUAL* (*Service Quality*) yang dirumuskan oleh Parasuraman dalam Tjiptono dan Chandra (2012: 77). *Servqual* dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utamanya itu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan. Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya. Singkat kata, kualitas layanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima.

Kualitas layanan merupakan dasar bagi pemasaran layanan, karena inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas), dan kinerja yang dibeli oleh pelanggan, oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan merupakan dasar bagi perusahaan jasa. Konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk bersaing dalam merebut konsumen. Sedangkan kinerja yang baik (berkualitas) dari sebuah konsep pelayanan menimbulkan situasi yang kompetitif di mana hal tersebut dapat diimplementasikan melalui strategi untuk meyakinkan pelanggan, memperkuat kesan tentang merk, iklan, penjualan, dan penentuan harga.

Salah satu cara utama bagi perusahaan layanan untuk menyatakan keunggulan dirinya adalah dengan selalu memberikan kualitas pelayanan yang lebih tinggi dari para pesaingnya. Masalah-masalah dalam pemberian pelayanan selalu muncul akan tetapi,

dapat dihindari dengan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik dan belajar dari kesalahan masa lalu yang telah diatasi sebagai cerminan dan pegangan untuk perbaikan kualitas layanan di masa yang akan datang.

a. Dimensi Kualitas Pelayanan

Sebuah perusahaan jasa sebisa mungkin dapat memberikan jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten dan kontinyu dibandingkan dengan pesaing, dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Usaha jasa terbilang cukup rumit dan sangat kompleks dari pada barang yang mempunyai wujud konkrit, sehingga menyulitkan seseorang untuk mengidentifikasinya dalam waktu yang singkat.

Akan tetapi beberapa pakar di bidang pemasaran mencoba melakukan studi atau mencari pendekatan tentang dimensi atau faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Menurut Parasuraman, Zeithamal & Bery dalam Rangkuti (2002: 29), bahwa untuk dapat menentukan standar kualitas jasa dapat dilihat dari dimensi atau kriteria berikut:

- 1) *Reliability* (keandalan)
- 2) *Responsiveness* (ketanggapan)
- 3) *Competence* (kemampuan)
- 4) *Acces* (mudah diperoleh)
- 5) *Courtesy* (keramahan)
- 6) *Communication* (komunikasi)
- 7) *Credibility* (dapat dipercaya)
- 8) *Security* (keamanan)
- 9) *Understanding (knowing the customer)* (memahami pelanggan)
- 10) *Tangibles* (bukti nyata yang kasat mata)

Kesepuluh dimensi tersebut di atas dapat dikonversi ke dalam lima dimensi, Parasuraman, Zeithamal & Bery dalam Rangkuti (2002: 29) mengkonversi dari kesepuluh dimensi kualitas jasa sebagai berikut:

- 1) Keandalan (*reliability*) yaitu, kemampuan untuk melaksanakan

jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya;

- 2) Keyakinan atau jaminan (*assurance*) yaitu, pengetahuan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan;
- 3) Berwujud (*tangibles*) yaitu, penampilan fasilitas fisik, peralatan dan personel;
- 4) Empati (*emphaty*) yaitu, merupakan syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi pada pelanggan;
- 5) Ketanggapan (*responsiveness*) yaitu, kemampuan untuk membantu pelanggan dalam memberikan jasa dengan cepat dan tanggap.

Ada 5 (lima) dimensi penentu kualitas pelayanan atau mutu jasa Kotler dan Keller (2009: 56) yaitu:

- 1) Keandalan (*reliability*) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya;
- 2) Jaminan (*assurance*) yaitu pengetahuan, kesopanan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pada pelanggan;
- 3) Bukti fisik (*tangible*) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal;
- 4) Empati (*empathy*) yaitu memberikan perhatian yang tulus, khusus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen;
- 5) Ketanggapan (*responsiveness*) yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan tepat.

b. Pengukuran Kualitas Jasa

Kualitas jasa dipengaruhi dua variabel, menurut Rangkuti (2002:

21) kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan (*perceived service*) dan jasa yang diharapkan (*expected service*). Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan mengukur kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasi. Menurut Tjiptono (2000: 97) langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur kualitas jasa adalah:

- 1) Spesifikasi determinan kualitas jasa. Langkah ini menyangkut variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa.
- 2) Perangkat standar kualitas jasa yang bisa diukur. Kualitas yang dimaksud adalah menyangkut tentang standar atau instrumen kualitas jasa yang bisa digunakan untuk mengukur variabel.

3.4. Harga

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa (Tjiptono, 1999). Perusahaan harus menetapkan harga secara tepat agar dapat sukses dalam memasarkan barang atau jasa. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lain (produk, distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya. Disamping itu, harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat (Tjiptono, 1999). Secara umum, ada dua faktor yang utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal (Kotler dan Armstrong, 1994 dalam Tjiptono, 1999).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

3.5. Lokasi

Lokasi fasilitas jasa merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial penyedia jasa (Tjiptono dan Chandra, 2005). Secara garis besar, ada dua kemungkinan pertimbangan dalam hal lokasi fasilitas jasa. Pertama, pelanggan mendatangi lokasi fasilitas jasa dan yang kedua adalah penyedia jasa yang mendatangi pelanggan. Selain itu, penyedia jasa dimungkinkan mengkombinasikan keduanya. Lokasi berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategik, seperti fleksibilitas, *competitive positioning*, manajemen permintaan, dan *focus strategic* (Fitzsimmons, 1994). Fleksibilitas sebuah lokasi merupakan ukuran sejauh mana sebuah jasa mampu bereaksi terhadap situasi perekonomian yang berubah. Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, karena itu penyedia jasa harus mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, budaya, persaingan dan peraturan di masa mendatang. *Competitive Positioning* adalah metode-metode yang digunakan agar perusahaan dapat mengembangkan posisi relatifnya dibandingkan dengan para pesaing. Jika perusahaan berhasil memperoleh dan mempertahankan lokasi yang strategis, maka itu dapat menjadi rintangan yang efektif bagi para pesaing untuk mendapatkan akses ke pasar (Tjiptono dan Chandra, 2005).

3.6. Kepuasan Pelanggan

Kotler (2000) menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Hal ini

dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan yaitu dapat menurunkan jumlah pelanggan dan menyebabkan pelanggan tidak tertarik lagi menggunakan jasa perusahaan sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Menurut Schanaar (1991), pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain, hubungan yang harmonis antara perusahaan dan konsumennya, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (*word-of-mouth*) yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 1994).

Banyak pakar mendefinisikan mengenai kepuasan pelanggan. Wikie (1990) dalam Tjiptono (1999) mendefinisikan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman pelanggan suatu produk atau jasa. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan (Engel, 1990). Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Penilaian kepuasan pelanggan mempunyai tiga bentuk yang berbeda, yaitu: - *Positive disconfirmation*, dimana kinerja lebih baik dari harapan - *Simple confirmation*, dimana kinerja sama dengan harapan - *Negative disconfirmation*, dimana kinerja lebih buruk dari harapan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Instrumen Penelitian

4.1.1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sah tidaknya indikator atau kuisisioner dari masing-masing variabel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} . Nilai r_{hitung} merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisis dengan program SPSS dan outputnya bernama *corrected item correlation*. Sedangkan r_{tabel} tidak kurang dari 0,30 Sugiyono (2009: 178). Tingkat validitas indikator atau kuisisioner dapat ditentukan, apabila $r_{hitung} > r_{tabel} = \text{valid}$ dan $r_{hitung} < r_{tabel} = \text{tidak valid}$.

Berdasarkan hasil perhitungan semua nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} sehingga instrumen pertanyaan dalam keadaan valid.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Pengujian realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuisisioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Realibilitas suatu indikator atau kuisisioner dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* (α), yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih besar ($>$) 0,60 maka indikator atau kuisisioner adalah realibel, sedangkan apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih kecil ($<$) 0,60 maka indikator atau kuisisioner tidak realibel. Secara keseluruhan hasil uji realibilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan semua nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} sehingga instrumen pertanyaan dalam keadaan reliabel.

Nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuisisioner yang digunakan kualitas

pelayanan, harga dan lokasi semua dinyatakan handal atau dapat dipercaya.

4.1.3. Pengujian Asumsi Klasik

Pada teknik analisa regresi berganda maka digunakan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa pada model regresi tidak terjadi berbagai penyimpangan baik normalitas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

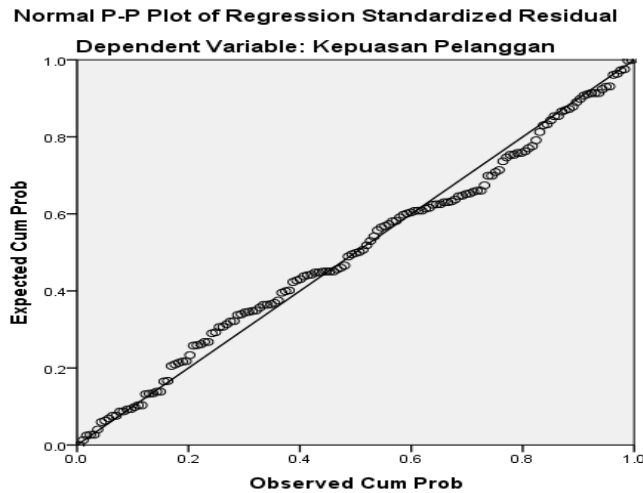
Uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik Normal P-Plot, dimana terjadinya gejala tersebut dideteksi dengan melihat titik-titik yang mengikuti arah garis linear dari kiri bawah kekanan atas, bila titik-titik mengikuti arah garis linear berarti terjadi adanya gejala normalitas, Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan membandingkan garis diagonalnya, Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sebenarnya akan mengikuti garis normalnya (Ghozali, 2005: 105):

Dasar pengambilan uji Normalitas adalah:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis-garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- 3) Hasil uji normalitas dapat dilihat pada grafik normal P-Plot dibawah ini:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”



Gambar 4.1. Grafik Normal P-Plot

Dari gambar 4.1. hasil pengujian normalitas diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005: 91) uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).

Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau *varianc inflation factor (VIF)* batas bebas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* $\leq 0,1$ atau $VIF \geq 10$ Terjadi Multikolinearitas dan apabila *tolerance value* $\geq 0,1$ atau $VIF \leq 10$ Tidak Terjadi Multikolinearitas. Hasil pengujian terhadap multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.813 ^a	.661	.654	4.095	2.186

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Harga, Kualitas Pelayanan

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber: Hasil pengolahan data primer, Maret 2015

Berdasarkan data dari tabel 4.1. diatas didapatkan nilai VIF dari masing-masing variabel tidak ada yang lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki *tolerance value* lebih kecil dari 0,1. Kesimpulan dalam penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas dan semua variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini lolos uji gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model penelitian yang baik adalah homoskedastisitas, yaitu varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain hasilnya tetap.

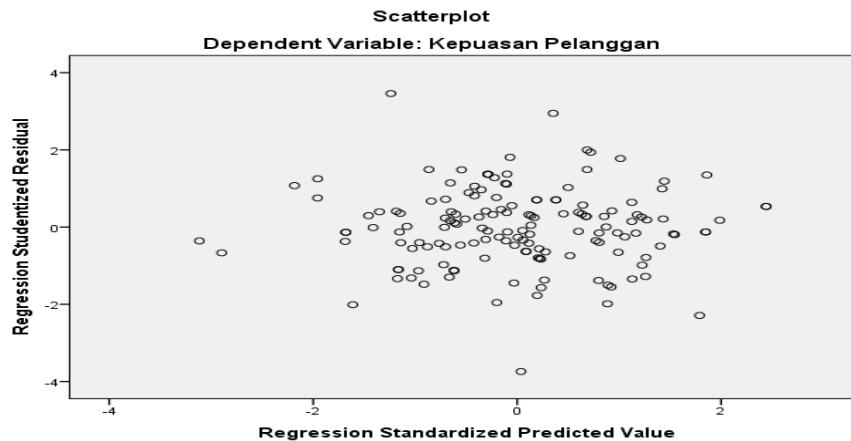
Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa model penelitian kurang layak. Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan diagram.

Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk menentukan apakah variabel terjadi problem Heteroskedastisitas, dasar

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas antara kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan:



Gambar 4.2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik 4.2 di atas menunjukkan bahwa pengaruh antara kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan tidak terjadi problem heteroskedastisitas, hal ini dibuktikan dengan titik-titik menyebar secara acak atau tidak teratur serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka disimpulkan bahwa pada uji ini tidak terjadi.

Berdasarkan diagram *scatter plot*, terlihat titik-titik menyebar secara

acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

d. Analisa Pengaruh Secara Parsial

Berdasarkan regresi berganda tersebut menggunakan program *software IBM SPSS (Statistical Program For Social Science)* versi 22.00 for windows, diperoleh hasil sebagai berikut:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.876	2.329		.376	.707
X1	.335	.072	.317	4.665	.000
X2	.175	.081	.146	2.159	.033
X3	.519	.077	.458	6.753	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan data diatas dapat disajikan kedalam bentuk persamaan regresi *standardized* sebagai berikut:

$$Y = 0,876 + 0,335x_1 + 0,175x_2 + 0,519x_3$$

Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya tiga parameter koefisien regresi yang bertanda positif, yaitu kualitas pelayanan (X_1), harga (X_2), dan lokasi (X_3). Secara matematis, tanda positif mempunyai arti bahwa setiap perubahan salah satu variabel akan mengakibatkan perubahan variabel tidak bebasnya dengan arah yang sama bila variabel bebas lainnya dianggap konstan. Sebaliknya tanda negatif berarti setiap perubahan salah satu variabel bebas akan mengakibatkan perubahan variabel tidak bebasnya dengan arah yang berlawanan bila variabel lainnya dianggap konstan.

Adapun persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (α) sebesar 0,876 menyatakan bahwa variabel X_1 , X_2 , dan X_3 bila dihitung secara bersama-sama maka, besarnya nilai Kepuasan Pelanggan tetap terbentuk sebesar 0,876.
- 2) Variabel kualitas pelayanan (X_1) berpengaruh positif terhadap

kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai koefisiensi sebesar 0,335. Yang artinya jika variabel kualitas pelayanan (X_1) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel variabel harga (X_2) dan variable lokasi tetap (X_3), maka kepuasan pelanggan (Y) akan meningkat sebesar 0,335.

- 3) Variabel harga (X_2) berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai koefisiensi sebesar 0,175. Yang artinya jika variabel harga (X_2) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kualitas pelayanan (X_1), dan variable lokasi (X_3) tetap, maka kepuasan pelanggan (Y) akan meningkat sebesar 0,175.
- 4) Variabel lokasi (X_3) berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai koefisiensi sebesar 0,519. Yang artinya jika variabel lokasi (X_3) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kualitas pelayanan (X_1) dan variabel harga (X_2) tetap, maka kepuasan pelanggan (Y) akan meningkat sebesar 0,519. Oleh karena nilai konstanta tidak signifikan, maka dilakukan pengolahan data lanjutan sebagai berikut dengan metode *Stepwise*:

Tabel 4.3. Analisis Regresi Dengan Metode Stepwise Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.019	2.174		3.688	.000
X3	.855	.061	.753	13.984	.000
(Constant)	2.994	2.138		1.400	.164
X3	.583	.072	.514	8.116	.000
X1	.396	.067	.374	5.910	.000
(Constant)	.876	2.329		.376	.707
X3	.519	.077	.458	6.753	.000
X1	.335	.072	.317	4.665	.000
X2	.175	.081	.146	2.159	.033

a. Dependent Variable: Y

Excluded Variables^a

Model	Beta In	T	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
					Tolerance
X1	.374 ^b	5.910	.000	.437	.590
X2	.269 ^b	4.049	.000	.316	.595
X2	.146 ^c	2.159	.033	.175	.504

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors in the Model: (Constant), X3

Berdasar pada hasil pengolahan diatas, maka persamaan akhir yang bisa dipergunakan adalah:

$$Y = 8,019 + 0,855 X_3 + e$$

Dari ketiga variabel yang digunakan ke dalam model regresi, hanya variabel lokasi (X_3) yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya sebesar 0,003 jauh dibawah 0,05 ($p\text{-value} < 0,05$). Kedua variabel yang lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena dieliminasi oleh *stepwise selection*. Besarnya probabilitas signifikansi variabel tersebut lebih dari 0,05 (p -

value > 0,05). Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Lokasi (X_3) secara individual mempengaruhi Kepuasan Pelanggan (Y) sebesar 0,855.

e. Analisis Pengaruh Secara Simultan Pengaruh secara simultan adalah pengaruh yang dilakukan secara serempak dari variabel yang yang ditetapkan dalam model penelitian. Adapun analisis kuantitatif terhadap besarnya pengaruh secara simultan dapat dilakukan berdasarkan pada tabel berikut:

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

Tabel 4.4. Analisa Pengaruh Secara Simultan
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813 ^a	.661	.654	4.3036693

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Tabel 4.5 Hasil Uji Anova
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5306.029	3	1768.676	95.493	.000 ^b
Residual	2722.671	147	18.522		
Total	8028.700	150			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dari tabel 4.4 dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,661, artinya data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan, harga dan lokasi secara bersama-sama mempunyai kontribusi atau pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan sebesar 66,1% dan selebihnya 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga sesuai dengan perumusan masalah, maka besarnya pengaruh kualitas pelayanan, harga dan lokasi secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan ialah 66,1% dan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Dan berdasarkan tabel 4.5 hasil Anova diatas dapat diperoleh Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan $df_1 = 1$ dan $df_2 = 151-1-1 = 149$ F_{tabel} , maka didapat F_{tabel} 2,666. Sehingga sebesar $95.493 > 2,666$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, harga dan lokasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa faktor kualitas pelayan menjadi faktor yang menentukan agar pelanggan bisa merasakan jasa yang ditawarkan. Sedangkan lokasi dan harga menjadi faktor utama agar pelanggan bisa menikmati jasa tersebut.

f. Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian pengaruh masing-masing antara variabel kualitas pelayanan (X_1), harga (X_2) dan lokasi (X_3) terhadap kepuasan pelanggan (Y), maka akan dilakukan dengan uji statistik (uji t) dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05) dan derajat kebebasan (dk) dengan rumus: $dk = n-k-1$, dimana n adalah jumlah responden, dan k adalah jumlah variabel yang diteliti.

Langkah-langkah pengujianya sebagai berikut Ghozali (2005: 84):

4.1.4. Menentukan Formula Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu kualitas pelayanan (X_1), harga (X_2) dan lokasi (X_3) terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen (Y). Adapun yang menjadi hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan

$H_{o1} : \beta_1 = 0$ "tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan"

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ "terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan"

Kriteria uji: terdapat pengaruh yang signifikan bila $t_{hitung} > t_{tabel}$

- b. Harga terhadap kepuasan pelanggan
 $H_{02} : \beta_2 = 0$ "tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari harga terhadap kepuasan pelanggan"
 $H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ "terdapat pengaruh yang signifikan dari harga terhadap kepuasan pelanggan"
 Kriteria uji : terdapat pengaruh yang signifikan bila $t_{hitung} > t_{tabel}$

c. Lokasi terhadap kepuasan pelanggan
4.1.5. Menentukan Derajat Kepercayaan Yaitu 95% ($\alpha = 0,05$)

4.1.6. Menentukan Signifikansi

- Nilai signifikansi ($p \text{ value}$) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Nilai signifikansi ($p \text{ value}$) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

5. MEMBUAT KESIMPULAN

Dasar pengambilan keputusan Ghozali (2005: 84) adalah dengan

$H_{03} : \beta_3 = 0$ "tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari lokasi terhadap kepuasan pelanggan"

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ "terdapat pengaruh yang signifikan dari lokasi terhadap kepuasan pelanggan"

Kriteria uji : terdapat pengaruh yang signifikan bila $t_{hitung} > t_{tabel}$

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

a. Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Dimana derajat kebebasan Statistik tabel :
 (dk) ialah: $dk = n - \alpha = 5\% (0,05)$
 $k - 1$ $t \alpha = t (\alpha ; dk)$

$$= 151 - 4 - 1 = 146 \quad = (0,05; 146) = 1,976 \text{ atau } 1,98$$

DAFTAR PUSTAKA

Ardhana, Oldy 2010 *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan studi pada Bengkel Caesar Semarang.*

Chaplin, J.P., 1999, *Kamus Lengkap Psikologi*, Alih Bahasa: Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Keempat*, Penerbit Universitas Diponegoro..

Kotler, Philip 2002, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.

Kotler, Philip & Kerin Lane Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

- Ningsih, Diyan, 2013, *Analisis Pengaruh Pelayanan, Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan serta Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan Convenience Store toko 7-Eleven UIN Ciputat.*
- Nurhandika Rahman, Diandaris 2013 *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Persepsi Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pemancingan Ngrembel Asri Gunungpati Semarang.*
- Parasuraman, A, Valerie A. Zethmani, Loenard, Berry. 1985 *A Conceptual Model Of Service Quality And Implications For Future Research Journal Of Marketing* 49, 41-50.
- Perdana, Yanuar (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Harga, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Bengkel Srijaya Mobil Jakarta”.
- Rangkuti, Freddy. 2004, *Riset Pemasaran*, P.T. GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- Riduwan, 2013, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, CV. Alfabeta Bandung
- Saladin Djaslim, 2003, *intisari Pemasaran & Unsur-Unsur Pemasaran*, Cetakan 3, Penerbit Linda Karya, Bandung.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Utami Dewi, Cindar, 2012 *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Freight forwarding PT. ACW Indonesia.*

PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN KOMPENSASI PERUSAHAAN TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA KOPERASI BMT WILAYAH CIPUTAT

Yeti Kusmawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email: kusmawati.yeti@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of individual morality and compensation Corporate Accounting Fraud Against the trend in BMT Regional Cooperative Ciputat. Samples are 139 respondents and methods of data collection was done by questionnaire. Of the 139 questionnaires distributed, the number of questionnaires returned 108 questionnaires can go back and fourth questionnaire is not perfect (not at full content) and 1 sheet questionnaire is not returned in full up to only 103 questionnaires that can be analyzed. Data analysis technique used is the test instrument data that consists of validity and reliability test, test the classical assumption of normality test, multicollinearity, and test heterosketastisitas, and hypothesis testing consisting of multiple regression test, the coefficient determination, t test and F test results showed that (1) the individual morality positive significant effect on the trend of fraud accounting (2) the company's compensation significant negative effect on the tendency of fraud accounting, (3) the compensation of individual morality and influential companies signifikan against the tendency of fraud accounting.

Key Words: Fraud Accounting, Individual Morality, Compensation Company

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Koperasi BMT Wilayah Ciputat. Sampel yang digunakan sebanyak 139 responden dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner. Dari 139 kuisisioner yang telah disebar, jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 108 kuisisioner yang dapat kembali dan 4 kuisisioner tidak sempurna (tidak diisi penuh) dan 1 kuisisioner lembarannya tidak kembali dengan lengkap hingga hanya 103 kuisisioner yang dapat dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrument data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterosketastisitas, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji regresi berganda, koefisien detriminasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) moralitas individu berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi (2) kompensasi perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi, (3) moralitas individu dan kompensasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kata Kunci: Kecurangan Akuntansi, Moralitas Individu, Kompensasi Perusahaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

1. PENDAHULUAN

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) atau *fraud* di Indonesia marak terjadi akhir-akhir ini, dimana hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di Indonesia maupun di dunia. Pada sektor publik Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk Kecenderungan Kecurangan Akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Siti Thoyibatun, 2009: 2). Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pun tak luput dari permasalahan praktik kecurangan akuntansi. Di Indonesia Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sudah menjadi hal yang biasa terjadi dari beberapa tahun silam. Banyak lembaga yang melakukan praktik kecurangan baik sektor publik maupun sektor swasta.

Laporan dari *Transparency International* (TI) yang di rilis baru-baru ini menyebutkan tahun 2014 Indonesia menduduki peringkat 107 negara terkorup tidak lebih baik dari posisi 183 di tahun 2011 (<http://transparency.org/research/cpi>). Banyaknya kasus korupsi di Indonesia terjadi bukan hanya dari moral seseorang namun banyak perusahaan yang memberikan kompensasi yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan karyawannya. Begitupun sebaliknya, ketika seorang karyawan menerima kompensasi yang sesuai bahkan lebih dari cukup dengan menerima berbagai bonus, tapi karyawan kadang merasa totalitasnya sudah cukup dan mengurangi totalitas yang semestinya di tingkatkan.

Koperasi Sembilan Sejati yang bertempat di Semarang, Juwana dan Solo yang dalam tiga tahun berdiri berhasil menghimpun dana sebesar Rp.200 Milyar merugi sebesar Rp.55 Milyar, menurut Indardi SH, dari Divisi investigasi *Semarang Corruption Watch* (SCW) menduga, laporan oleh sesama

pengurus itu sebagai upaya pelepasan tanggung jawab berkaitan dengan tuntutan masyarakat atas simpanan yang diselewengkan. Mengingat koperasi tersebut telah menerbitkan surat simpanan berjangka dengan total nilai hampir Rp.100 miliar, maka hal tersebut merupakan tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 jo 16 UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992. Hal itu terjadi karena segelintir pihak memiliki moral yang buruk yang diakibatkan dari buruknya pondasi keimanan yang dimiliki.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Wonogiri menyebutkan ada kemungkinan tindakan penyimpangan dilakukan oleh pengurus KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal WatTamwil*) Bina Sejahtera Mandiri (BSM) Wuryantoro. Setidaknya penyimpangan itu membuat jebolnya dana nasabah senilai Rp.3,6 miliar. Disperindagkop UMKM memperoleh *abstracts* yang ternyata ada selisih sebesar Rp.3,6 miliar antara laporan RAT ke dinas dengan pembukuan di kantor BMT.

Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Siti Thoyibatun dalam jurnal “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi" KKA dipengaruhi kejadiannya oleh faktor kesesuaian SPI, sistem kompensasi, ketaatan terhadap aturan, dan perilaku tidak etis. Dari keempat faktor tersebut ketaatan terhadap aturan dan perilaku tidak etis merupakan faktor yang berpengaruh positif.

Lalu menurut I Made Darma Prawira, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan dalam jurnal "Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" berpendapat bahwa secara parsial dapat diketahui bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dan menurut Rian Putra Zilmy dalam jurnal "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" berpendapat bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi, dan moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui moralitas individu dan kompensasi perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa umumnya sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu pengaruh moralitas individu dan kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Judul

2.1.1. Moralitas Individu

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Nurdin, 2006) moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Selanjutnya dikatakan bahwa kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas merupakan pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak.

Kohlberg (1969), dalam buku Etika Bisnis Dan Profesi (2009:43) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan pre konvensional, tahapan *conventional* dan tahapan *post conventional*.

Menurut Liyanarachchi (1994) dalam Wilopo menjelaskan semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar'. Dalam tahapan yang paling rendah (*pre-conventional*), individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/ peraturan yang ada. Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadi yang sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (*conventional*), individu akan mendasarkan tindakannya persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (*post-conventional*), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum universal.

2.1.2. Kompensasi Perusahaan

Hasibuan (2005:118), kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

diberikannya. Sedangkan menurut F.Sikula dalam Hasibuan (2005: 119), kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa.

Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, pengetahuan atas pekerjaan dan sebagainya. Berdasarkan pendapat di atas kesesuaian kompensasi dapat diketahui kesesuaian kompensasi adalah nilai/ *value* yang diterima oleh pegawai atau karyawan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya kepada organisasi dengan melihat hasil dari penghitungan kinerja pegawai atau karyawan tersebut. Bisa juga diartikan sebagai hak yang harus diterima oleh pegawai atau karyawan atas kewajiban yang telah dikerjakannya berdasarkan nilai standar yang telah ditetapkan.

Menurut Mathis dan Jackson (2006: 419) kompensasi terdiri dari kompensasi langsung (upah dan gaji), Kompensasi tidak langsung (asuransi kesehatan/ jiwa, cuti bayar, dana pensiun dan kompensasi pekerja) dan kompensasi yang terakhir, penghasilan tidak tentu yang meliputi bonus.

2.1.3. Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau penghilangan secara

sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan, salah satu yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU).

Segitiga *fraud* menurut Priantara (2013) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan perilaku/ rasionalisasi (*attitude/ razionalitation*).

2.2. Hubungan Antara Variabel Dengan Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2011: 64) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Dalam hal penelitian yang akan diteliti, penulis menyatakan hipotesis awal adalah dugaan sementara adanya pengaruh moralitas individu dan kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

2.2.1. Moralitas Individu dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Setiap manusia pasti melakukan tindakan, baik itu tindakan yang dilakukan sesuai dengan hati nurani maupun sesuai dengan emosional. Setiap tindakan didasari dengan moral individu,

apakah individu tersebut memiliki moral yang baik atau moral yang buruk. Secara sederhana moralitas merujuk pada benar dan salah, terlepas dari niatan individunya.

Benar dan salah akan selalu ada dalam diri manusia, dalam penelitian yang dilakukan Anastasia dan Sparta (2014), semakin tinggi tahapan moralitas seseorang individu maka semakin tinggi pula individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan pribadinya sendiri, begitupun sebaliknya jika seseorang memiliki moral yang rendah maka tidak menutup kemungkinan kecenderungan kecurangan akuntansi itu terjadi.

H1: Moralitas Individu Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akunansi

2.2.2. Kompensasi Perusahaan dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Setiap perusahaan akan memberikan imbalan dari apa yang di kerjakan oleh seorang karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kembali lagi kepada perusahaan dan karyawannya, ketika karyawan menerima kompensasi tersebut sesuai dengan apa yang di kerjakan bukan berarti karyawan merasa puas, begitupun pekerjaan yang di kerjakan oleh seorang karyawan telah sesuai dengan keharusannya belum tentu karyawan menerima kompensasi yang sesuai. Setiap perusahaan pasti berharap ketika kompensasi diberikan akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Amin (2009) dalam jurnal Rian Putra Zilmi salah satu faktor penyebab kecurangan akuntansi danya porsi yang tidak signifikan dari kompensasi.

H2: Kompensasi Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.2.3. Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Moralitas yang rendah dan kompensasi yang tidak seimbang tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun semuanya tidak akan terjadi ketika moralitas tinggi dan kompensasi yang seimbang.

Menurut Hasibuan (2005) dalam jurnal Rian Putra Zilmy kompensasi adalah semua pendapatan uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, sedangkan menurut Magnis (2005) dalam jurnal Rian Putra Zilmy mengatakan bahwa moralitas sebagai sikap hati yang teungkap dalam tindakan lahiriah. Kompensasi yang sesuai dan moralitas yang tinggi akan menghindarkan karyawan dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

H3: Moralitas Individu Dan Kompensasi Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

3. METODE PENELITIAN

Secara model, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2012: 3). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah jumlah responden yang menjawab kuisisioner.

Ruang lingkup penelitian ini adalah koperasi BMT di wilayah Ciputat yang meliputi BMT Al-Ittihad, BMT Al-Fath Ikmi dan BMT Ubasyada yang bergerak di bidang jasa simpan pinjam sebagai objek penelitian. Lebih spesifik penelitian dilakukan kepada seluruh karyawan sebagai objek baik karyawan tetap maupun yang tidak tetap dengan memberi kuisisioner.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah sluruh karyawan koperasi BMT Al-Ittihad sebanyak 34 orang, BMT Al-Fath Ikmi sebanyak 63 orang dan BMT Ubasyada sebanyak 42 orang, jadi sampel yang digunakan adalah sebanyak 139.

3.2. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili). Sampel dari penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* (dalam Riduwan, 2005: 65) dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Kuisioner

Skala Likert	Skor Jawaban
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (Ks)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber Sugiyono (2011: 93)

3.3.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2011: 147).

Kriteria jawaban deskriptif adalah sebagai berikut:

$$n = N/N(d)^2 + 1$$

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

$N = 139 / 139 (0,05)^2 + 1 = 103,154$, dibulatkan 103, jadi sampel yang digunakan adalah sebanyak 103.

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.1. Skala Kuisioner

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert dalam memberikan kuisioner dimana skala *likert* menurut Sugiyono (2011: 93) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.

Dengan skala *likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item intrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item *instrument* yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat *negative*, yang dapat berupa kata-kata yaitu:

- 76 – 100% kategori jawaban baik,
- 56 – 75% kategori jawaban cukup baik,
- < 56% kategori jawaban kurang baik

3.3.3. Uji Instrument

3.3.3.1. Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji *instrument* data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item

dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin di ungkap (Duwi Priyatno, 2014: 51).

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, digunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan ketentuan jika $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} maka item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

3.3.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau kontrak. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011: 47). Reliabel instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas.

Untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal peneliti menggunakan teknik *cronbach alpha*, dimana besarnya nilai alpha yang dihasilkan dibandingkan dengan indeks. Ukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Cronbach Alpha

Koefisien	Tingkat Hubungan
<0,600	Kurang Baik
0,601-0,690	Diterima
>0,700	Baik

Sumber: Duwi Priyanto (2010: 64)

3.3.4. Uji Asmsi Klasik

3.3.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data, peneliti menggunakan *Sample One Sample Kolmogrov-Smornov* (Jika nilai *Asymp. Sig 2-tailed*) > nilai taraf signifikansi (0,05), maka berdistribusi normal) dan dilengkapi dengan pengujian grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized*.

Dasar pengambilan keputusan antara lain:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diahonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.3.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas artinya antar variabel independen yang dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya (Dwi Priyatno, 2014: 99).

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance inflantion Factor* (VIF) dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel indeviden. Apabila *tolerance value* >0,10 dan VIF <10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3.3.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual atas suatu pengamat ke pengamatan lain. Jika varians dari residual sautau pengamatan ke

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *spearman's rho*. Pengujian ini mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya.

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi *problem* heteroskedastisitas.

3.3.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel independen terhadap variabel dependen (Dwi Priyatno, 2014: 142).

3.3.6. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen atau terikat. Dapat dihitung dengan rumus:

Pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu:

Kriteria Uji:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (berpengaruh).
- $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak berpengaruh).

Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

3.3.6. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari dua variabel bebas yaitu

Moralitas Individu (X_1) dan Kompensasi Perusahaan (X_2) dan satu variabel terikat yaitu Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan regresi berganda, dalam hal ini persamaanya sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Moralitas Individu

X_2 = Kompensasi Perusahaan

e = Epsilon (variabel-variabel independen lain tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

3.3.7. Uji t (t-test)

Menguji apakah secara terpisah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara baik. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi berganda pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Kriteria uji t:

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti H_0 diterima, H_a ditolak

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak, H_a diterima

Hipotesis yang akan dijawab dengan menggunakan uji signifikan adalah:

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H_{a1} : Terdapat pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{02} : Tidak terdapat pengaruh kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{a2} : Terdapat pengaruh kompensasi perusahaan terhadap

- kecenderungan kecurangan akuntansi
- H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh moralitas individu dan kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
- H_{a3} : Terdapat pengaruh moralitas individu dan kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3.4. Operasional Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2011, 38) mendefinisikan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa aja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.4.1. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah moralitas individu dan kompensasi perusahaan.

3.4.2. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tabel 3.3. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala ukur
Moralitas Individu	- Etika yang baik - Tanggung Jawab - Jujur	Skala likert
Kompensasi Perusahaan	- Gaji - Bonus - Insentif - Fasilitas	Skala likert
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	- Pernyataan yang salah - Pelanggaran peraturan - Penyalahgunaan wewenang - Peyembunyian fakta - Manipulasi - Suap - Gratifikasi	Skala likert

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan kuisisioner pada karyawan KSU BMT Ubayyada sebanyak 42, BMT Al-Fath 63 dan BMT Al-Ittihad sebanyak 34 sebagai responden. Peneliti memberikan 139 kuisisioner pada karyawan yang ada pada koperasi tersebut. Dari 139 kuisisioner yang diberikan hanya 108 yang kembali dan 4 tidak sempurna (tidak diisi penuh) dan 1

lembarannya tidak kembali lengkap. Jadi hanya 103 yang dapat diolah oleh peneliti dan cukup mewakili sampel yang telah ditentukan dengan rumus slovin.

4.1. Hasil Uji Instrumen

4.1.1. Uji Validitas

Syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana $r_{tabel} = 0,1937$ (dengan taraf kesalahan 5% dan $n=103$).

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.1. Uji Validitas

INTRUMEN VARIABEL	NILAI TERKECIL
Moralitas Individu (X1)	0,210
Kompensasi Perusahaan (X2)	0,269
KKA (Y)	0,200

4.1.2. Uji Reliabilitas

Semakin tinggi reliabilitas suatu pengukur, semakin stabil pula alat pengukuran tersebut.

Tabel 4.2. Uji Reliabilitas

INTRUMEN VARIABEL	Nilai Cronbach’s Alpha
Moralitas Individu (X1)	0,855
Kompensasi Perusahaan (X2)	0,843
KKA (Y)	0,610

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

sebaliknya jika data > dari 0.05 maka data berdistribusi normal.

4.1.3.1. Uji Normalitas

Jika signifikansi data < 0.05 maka data terdistribusi tidak normal dan

Tabel 4.3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,65325927
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,048
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Output diatas menjelaskan tentang hasil uji normalitas dengan metode *One Sample Klomogrov-Smirnov*.

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifasi Pengaruh Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebesar 0,200. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (nilai signifikansi lebih dari 0,05).

4.1.3.2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4. Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37,864	3,665		10,331	,000		
M_I	,296	,103	,275	2,865	,005	,976	1,025
K_P	-,140	,062	-,216	-2,255	,026	,976	1,025

a. Dependent Variable: KKA

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* kedua valiabel > 0,10 dan VIF kurang < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

4.1.3.3. Uji heteroskedastisitas

Tabel 4.5. Uji Validitas Correlations

			Unstandardized Residual	M_I	K_P
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000	-,024	,055
		Sig. (2-tailed)	.	,809	,584
		N	103	103	103
M_I	M_I	Correlation Coefficient	-,024	1,000	,143
		Sig. (2-tailed)	,809	.	,150
		N	103	103	103
K_P	K_P	Correlation Coefficient	,055	,143	1,000
		Sig. (2-tailed)	,584	,150	.
		N	103	103	103

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 22

Pengujian heteroskedastisitas degan menggunakan metode Korelasi *Spearman's rho* tersebut bahwa korelasi antara variabel moralitas individu dan kompensasi perusahaan dengan *Unstandardized Residual* memiliki nilai

signifikansi (*sig 2-tailed*) lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi maslah heteroskedastisitas.

4.1.4. Koefisien Determinasi

Tabel 4.6. Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,322 ^a	,104	,086	4,700

a. Predictors: (Constant), K_P, M_I

Besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,104. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebesar 10,4% sedangkan 89,6% ditentukan oleh faktor lain di luar

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. **4.1.5. Uji F**

Tabel 4.7. Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	255,237	2	127,619	5,778	,004 ^b
	Residual	2208,588	100	22,086		
	Total	2463,825	102			

Hasil pengolahan data uji f menunjukkan $F = 5,778$ dan signifikan pada level 0,004. Sedangkan nilai F_{tabel} adalah 3,09. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,778 > 3,09$ dan $sig. 0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau

model yang digunakan *fix*. Berarti model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4.1.6. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.8. Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37,864	3,665		10,331	,000		
M_I	,296	,103	,275	2,865	,005	,976	1,025
K_P	-,140	,062	-,216	-2,255	,026	,976	1,025

a. Dependent Variable: KKA

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:
 $Y = 37,864 + 0,296 X_1 - 0,140 X_2 + e$

Keterangan:

- Y = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
- X1 = Moralitas Individu
- X2 = Kompensasi Perusahaan
- E = Standar Error

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 37,864 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan adalah nol maka Kecenderungan Kecurangan Akuntansi adalah sebesar konstanta 37,864.
- b. Koefisien Moralitas Individu sebesar 0,296 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Moralitas Individu sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebesar 0,296 satuan dengan asumsi variabel konstan.

- c. Koefisien Kompensasi Perusahaan sebesar -0,140 mengindikasikan bahwa peningkatan kompensasi perusahaan satu satuan akan mengakibatkan penurunan kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar -0,140 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

4.1.7. Uji t

Patokan yang digunakan adalah membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan *alpha* 0.05 atau dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dimana kriteria uji adalah:

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti H_0 diterima, H_a ditolak

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak, H_a diterima

Tabel 4.9. Hipotesis (*t*-test)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37,864	3,665		10,331	,000
M_I	,296	,103	,275	2,865	,005
K_P	-,140	,062	-,216	-2,255	,026

a. Dependent Variable: KKA

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Moralitas Individu berpengaruh signifikan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Hasil analisis dari tabel diatas, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,66023. Untuk variabel Moralitas Individu (X_1) nilai t_{hitung} adalah 2,865 dan nilai sig adalah 0,005. Selanjutnya untuk melihat apakah arah positif atau *negative* dilihat dari koefisien β , pada tabel koefisien β sebesar 0,275. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,865 > 1,66023$ dan nilai signifikansi $0,005 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Moralitas Individu (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, sehingga hipotesis pertama diterima. Atau menerima H_{a1} dan menolak H_{01} .

b. Kompensasi Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil analisis dari tabel diatas, pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,66023.

Untuk variabel Kompensasi Perusahaan (X_2) nilai t_{hitung} adalah -2,255 dan nilai sig adalah 0,026. Selanjutnya untuk melihat apakah arah positif atau *negative* dilihat dari koefisien β , pada tabel koefisien β sebesar -0,216. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,255 > 1,66023$ dan nilai signifikansi $0,026 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompensasi Perusahaan (X_2) berpengaruh signifikan negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, sehingga hipotesis kedua diterima. Atau menerima H_{a2} dan menolak H_{02} .

c. Moralitas Individu dan kompensasi Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.24 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 5,778 lebih besar dari pada F_{tabel} sebesar 3,09 dengan angka signifikansi = $0,004 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara moralitas individu dan kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang dihasilkan pada Koperasi BMT wilayah ciputat, sehingga hipotesis ketiga diterima. Atau menerima H_{a3} dan menolak H_{03} .

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Hal ini berarti individu dengan level moral rendah kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi lebih tinggi dibandingkan individu yang memiliki level moral yang tinggi.

Hasil penelitian ini membuktikan apa yang ada dalam hirarki tahap perkembangan moral Kohlberg. Semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post*-konvensional), semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Semakin tinggi level moral individu, semakin ia berusaha untuk menghindari diri dari kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan banyak pihak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia dan Sparta (2014). Anastasia dan Sparta menyatakan bahwa variabel moralitas individu memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Moralitas dapat dilihat tingkat pencapaian yang cukup baik, moral karyawan BMT wilayah Ciputat dinilai baik dalam berperilaku atau moralnya masih kurang untuk berperilaku jujur dan mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan dalam BMT. Karyawan BMT lebih takut terhadap pimpinannya daripada patuh terhadap Peraturan Dinas Koperasi sekalipun pimpinannya berperilaku buruk.

Peranan moral yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat, sangat mendorong tegaknya suatu etika dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh karyawan.

Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Sementara itu manajemen organisasi harus memperlihatkan kepada karyawan tentang adanya kesesuaian antara kata dengan perbuatan dan tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah etika organisasi yaitu dengan diberikannya sanksi hukuman yang jelas, dan demikian pula sebaliknya terhadap pegawai yang berprestasi dan bermoral baik diberikan penghargaan yang profesional pula.

4.2.2. Pengaruh Kompensasi Perusahaan Terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi

Menurut teori yang dinyatakan oleh Amin (2008) dalam Rian Putra Zilmy (2013), pemberian kompensasi terhadap karyawan dapat mengarah kepada perilaku yang tidak semestinya terhadap kas. Seorang karyawan memiliki masalah keuangan bisa menyalahgunakan kas atau uang yang ada di tangannya. Kewajiban keuangan pribadi dapat menimbulkan tekanan bagi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian atau menyalahgunakan aktiva/kas. Amin juga mengatakan bahwa adanya promosi, kompensasi atau hadiah yang tidak sesuai dengan harapan akan memicu faktor terhadap terjadinya praktik kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Jensen and Mackling (1976) dalam Wilopo (2005) menjelaskan teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* (pemegang saham) dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rian Putra Zilmy “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri

informasi dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi diperoleh hasil bahwa Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan *negative* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan hasil perhitungan *statistic* deskriptif variabel kompensasi perusahaan menunjukkan bahwa umumnya pemberian kompensasi yang di berikan BMT Wilayah Ciputat kepada karyawannya sudah cukup baik, namun pada faktanya kompensasi yang diberikan terhadap belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan karyawannya dan juga masih kurangnya asuransi yang diberikan kepada anggota keluarga karyawan. Selain itu adanya sifat yang tidak pernah merasa puas pada diri manusia akan menyebabkan adanya pencurian/ penyalahgunaan uang milik BMT yang bertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

4.2.3. Pengaruh Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 5,778 lebih besar dari pada F_{tabel} sebesar 3,09 dengan angka signifikansi = $0,004 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara moralitas individu dan kompensasi perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang dihasilkan pada Koperasi BMT wilayah ciputat sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hasil ini serupa dengan pengujian hipotesis pertama dan kedua, hal ini membuktikan besar kecilnya kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di Koperasi BMT wilayah Ciputat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya moral individu dan kompensasi perusahaan.

Moralitas dari karyawan berpengaruh terhadap kecenderungan dalam laporan keuangan, dengan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya) dan keserakahan merupakan faktor pemicu kecurangan. Selain dari moralitas individu, adanya kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi terdesak ketika apa yang didapatkan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan pun memicu terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai "Pengaruh Moralitas Individu dan Kompensasi Perusahaan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" pada koperasi BMT di wilayah Ciputat adalah sebagai berikut:

- a. Moralitas individu berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan dari hasil statistik deskriptif moralitas individu pada koperasi BMT di wilayah Ciputat dinilai cukup baik dalam berperilaku atau moralnya masih kurang untuk berperilaku jujur dan mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan dalam BMT. Masih ada karyawan pada BMT lebih takut terhadap pimpinannya daripada patuh terhadap peraturan Dinas Koperasi sekalipun pimpinannya berperilaku buruk.
- b. Kompensasi perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan dari hasil statistik deskriptif kompensasi perusahaan dinilai baik, namun pada faktanya kompensasi yang diberikan terhadap karyawan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Selain itu adanya sifat

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

yang tidak pernah puas pada diri karyawan akan menyebabkan timbulnya benih-benih kecurangan.

- c. Moralitas individu dan kompensasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, secara bersama sama moralitas individu dan kompensasi perusahaan mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas merupakan hal mendasar dalam menentukan keputusan yang diambil, dan keserakahan merupakan faktor pemicu kecenderungan kecurangan akuntansi.

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya.

Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 10,4%, sedangkan 89,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini menggunakan metode *survey* menggunakan kuisioner tanpa dilengkapi wawancara. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan wawancara.

5.2. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti menyarankan bahwa:

- a. Saran bagi Akademis untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi dan pertimbangan untuk peneliti yang akan datang.
- b. Bagi BMT wilayah Ciputat disarankan untuk meningkatkan *control* dan disiplin para karyawan serta melakukan peningkatan moral

karyawan dan meninjau kembali kompensasi yang diberikan sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi seperti *control* atasan, pemerataan informasi, etika atasan, disiplin dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. Ardana, I Cenik. “*Etika Bisnis Dan Profesi*”. Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Ali, Zainuddin. 2008, “*Hukum Ekonomi Syariah*”. Sinar Grafika, Palu.

Anastasia, Sparta, “*Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*”. Universitas Multimedia Nusantara, 2014.

Aranta, Petra Zulia.”*Pengaruh Moralitas Individu dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*”, Universitas Negeri Padang, 2013.

Bertens, K. “*Etika*”, PT Gramedia usaka Utama, Jakarta, 2001.

Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. “*Lembaga Keuangan Islam*”. Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Kementrian Koperasi Dan UKM, “*Penyempurnaan Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/ UJKS Koperasi*”, Deputi Bidang Pembiayaan, 2015

- Prawira, I Made Darma, dkk. "*Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan (Fraud) Akuntansi*". Universitas Pendidikan Ganesha, 2014.
- Priyatno, Duwi. "*SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*". C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2014.
- Priantara, Diaz. "*Fraud Auditing dan Investigation*". Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Riduwan. "*Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*". Alfabeta, Bandung, 2005.
- Rivai, Veithzal. "*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*". PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sihotang, A. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- S.P Hasibuan, Malayau. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Sofyadi, Herman. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono dan Edilius. "*Koperasi Dalam Teori dan Praktik*". Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Shintadevi, Prekanida Farizqa. "*Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Prilaku Tidak Etis Sebagai Variaber Intervening*". Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Sumiyanto, Ahmad BMT Menuju Koperasi Modern, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Alfabeta, 2011.
- Thoyibatun, Siti. "*Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi*". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Universitas Negeri Malang, 2009.
- Wilopo. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesai*", Publikasi SNA IX, Padang, 2006.
- Yulyanti, Siti. "*Pengeruh Moral Siswa Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*", Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, 2003.
- Zilmy, Rian Putra, "*Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*". Universitas Negeri Panga, 2013.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**MOTIF TRANSFORMASI WIRAUSAHAWAN
MENJADI WIRAUSAHAWAN SOSIAL
(STUDI PILOT PADA WIRAUSAHAWAN MAHASISWA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

Yuli Yanti*), Ni Putu Febi Istiani, Kurnia Perdana

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, IBI Darmajaya, Bandar Lampung

*Email: yuli.yanti1303@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the university students' entrepreneurship motive transformation into social entrepreneurship by using the dimension of wealth creation, independence, risk level and work effort. The Maslow hierarchy of need will be employed comprehensively for analyze the entrepreneurship transformation motive. 30 samples will be deeply interviewed to gain the information to qualify the qualitative method. The findings are the self esteem and self actualization is the strongest dimension which support the entrepreneurship transformation motive and followed by risk sharing and togetherness dimension.

Key Words: Social Entrepreneurship, Entrepreneurship, Motive Transformation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif transformasi wirausahawan mahasiswa dengan mengedepankan dimensi penciptaan pendapatan, independensi, tingkat risiko dan tingkat usaha kerja. Teori hirarki kebutuhan Maslow akan digunakan secara komprehensif untuk membahas motif transformasional kewirausahaan. 30 orang sampel akan diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan informasi guna memenuhi kualitas penelitian kualitatif. Temuan pada penelitian ini adalah dimensi penghargaan dan aktualisasi diri dari teori hirarki kebutuhan Maslow adalah motif terkuat bertransformasinya motivasi wirausahawan menjadi wirausahawan sosial. Lalu disusul oleh motif berbagi risiko dan kebersamaan.

Kata Kunci: Kewirausahaan Sosial, Kewirausahaan, Motif Transformasi

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa diharapkan kelak dapat menjadi motor penggerak masa depan dengan berbekal ilmu dari perkuliahan dan idealisme yang terbentuk, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan diri menjadi seorang agen solusi seperti halnya menjadi wirausahawan (Alma, 2011). Peran mahasiswa sebagai agen perubahan di bidang wirausaha telah

menunjukkan hasil yang amat mengembirakan. Dukungan dari sektor swasta dan badan usaha milik pemerintah baik yang berkerjasama dengan institusi kampus maupun lembaga profesional telah nyata terlihat dengan pemberian penghargaan, ilmu pengetahuan, pengalaman kerja dan bantuan modal (Koran sindo, 2016).

Kewirausahaan (*entrepreneurhip*) merupakan persoalan penting di dalam

perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausahawan ini (Rachbini, 2002). Peter Drucker (1993) menyatakan bahwa seluruh proses perubahan ekonomi pada akhirnya tergantung dari orang yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut yakni sang "entrepreneur". Kebanyakan perusahaan yang sedang tumbuh dan yang bersifat inovatif menunjukkan suatu jiwa (*spirit*) *entrepreneur*. Korporasi-korporasi berupaya untuk mendorong para manajer mereka menjadi orang-orang yang berjiwa *entrepreneur*, universitas-universitas sedang mengembangkan program-program *entrepreneurship*, dan para *entrepreneur* individual menimbulkan perubahan-perubahan dramatik dalam masyarakat.

Menumbuh kembangkan atribut dan nilai kewirausahaan pada mahasiswa merupakan salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi (Yohnson, 2003). Keberhasilan sektor ini telah teruji pada tahun-tahun di awal era reformasi, saat Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi (Kompas, 1998). Mahasiswa mampu berkontribusi terhadap pergerakan sektor riil dan politik ekonomi (Indarti dan Rostiani, 2008). Sehingga dianggap penting bagi perguruan tinggi untuk memberikan prioritas bagi penerapan pola pembelajaran kewirausahaan yang berbasis empiris untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pengalaman agar dapat mendorong semangat berwirausaha (Yohnson 2003, Wu dan Wu, 2008).

Ketidakmampuan mahasiswa untuk masuk di pasar kerja juga merupakan permasalahan akut di Indonesia. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah ini telah memicu berbagai macam masalah sosial seperti kriminalitas, kemiskinan dan pengangguran. Bahkan laju pertumbuhan

angka pengangguran terdidik terus bertambah setiap tahunnya (Putri, 2015, Alghofari, 2010). Masalah sosial lain yang masif dihadapi adalah rendahnya kualitas pendidikan akibat rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan pola pencarian nafkah yang tidak terstruktur baik (Setiawan, 2010). Model kemiskinan simultan ini dikenal sebagai *the vicious circle of poverty* (Bouer, 1965).

Salah satu solusi untuk menyelesaikan *the vicious circle of poverty* adalah mencatat para wirausahawan (Nisa, 2016) yang berperan dari sisi ekonomi. Namun untuk dapat menumbuhkan dampak luas dibutuhkan penerahan potensi sosial yang masif dan viral. Masalah sosial penting untuk diperhatikan tidak hanya dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi (Kharisma, 2016) tetapi harus diimbangi pula dengan pemerataan ekonomi (Siboro, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif transformasi wirausahawan mahasiswa yang bersifat kapitalis dengan mengedepankan dimensi penciptaan pendapatan, kebebasan waktu, tingkat risiko dan tingkat usaha kerja (Douglas dan Sheppherd, 1999) menjadi wirausahawan yang bersifat sosial, nirlaba dan berdampak sosial dan positif yang luas (Dorado dan Vantrisca, 2012). Informasi akan didapat dengan menggunakan metode wawancara mendalam kepada 30 orang wirausahawan mahasiswa sebagai unit analisis yang berada di provinsi Lampung.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Motivasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan (Robbins dan Judge, 2015). Motivasi tidak dapat terlepas dari tiga dimensi yang melingkupinya. Dimensi tersebut adalah

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kekuatan (*intensity*), arahan (*direction*) dan ketekunan (*persistence*). Motivasi tidak akan berdiri dengan kokoh apabila tidak dilandasi oleh pemenuhan ketiga aspek dimensi tersebut (Wagner dan Harter, 2006).

Motivasi yang lemah hanya akan menimbulkan ketidakefisienan waktu dan biaya. Misalnya terbuangnya waktu bekerja secara percuma, karyawan tidak merasa terlibat dengan pekerjaannya dan ada pula yang memilih mundur dari posisinya sekarang (salary.com, 2013). Interaksi seseorang dengan organisasi pada koridor pekerjaan telah dijelaskan secara sangat komprehensif dengan teori hirarki kebutuhan (Kenrick, Griskevicius, Neuberg, 2010; Robbins dan Judge, 2015).

Bahwa kebutuhan yang sangat mendasar adalah kebutuhan fisiologis dimana seseorang akan terlebih dulu memenuhi kebutuhan akan rasa lapar dan haus, kebutuhan berpakaian, tempat tinggal serta kebutuhan fisik lainnya. Setelah seluruh kebutuhan fisiknya terpenuhi orang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Selanjutnya individu akan berusaha untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Lalu kebutuhan pengakuan atau penghargaan eksternal dan internal pun akan berusaha untuk dipenuhi. Lalu jika seluruh kebutuhan itu telah dapat tercukupi maka individu akan berupaya untuk bekerja secara total sesuai dengan dorongan tertinggi yaitu aktualisasi untuk mencapai potensi dan pemenuhan diri (Maslow, 1954).

2.2. Transformasi Motivasi

Ada perbedaan mendasar tentang sikap, perilaku dan motivasi individu menjadi wirausahawan dan wirausahawan sosial. Wirausahawan lebih didasari oleh motif profit dan *capital* (Kourlitzky dan Wastald, 1998) namun kewirausahaan sosial lebih banyak didasari oleh etika,

kewarganegaraan (*citizenship*) dan rasa kepedulian sosial yang tinggi.

Perubahan visi sebuah entitas bisnis untuk menjadi lebih memerhatikan aspek etika dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Perusahaan tidak lagi hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga fokus memerhatikan komunitas dan lingkungan sekitarnya. Sehingga perubahan visi inilah yang menjadi salah satu faktor penguat kinerja perusahaan (Looser, 2015).

2.3. Motivasi Berwirausaha dan Berwirausaha Sosial

Banyak penelitian sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi bahwa motivasi utama individu ingin menjadi wirausahawan adalah karena dipengaruhi oleh teori efikasi diri (Chen, Li dan Matlay, 2006). Semakin tinggi efikasi diri, semakin tinggi pula kepercayaan diri pada kemampuan untuk berhasil. Jika efikasi seseorang rendah maka secara bertahap orang akan mengurangi upayanya hingga menyerah, namun sebaliknya jika efikasi tinggi akan semakin kuat dan semakin tinggi upaya untuk berhasil, sehingga akan berdampak pada kinerja (Robbins dan Judge, 2015).

Lebih jauh secara empiris Chen, Li dan Matlay (2006) mengungkapkan *push factor* dan *pull factor* yang memengaruhi individu menjadi wirausahawan. *Push factor* adalah status pengangguran, ketidaksetujuan dengan manajemen sehingga mengundurkan diri dari perusahaan dan sedikitnya pilihan untuk bekerja. Sedangkan *pull factor* adalah kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan capaian diri dan penciptaan penghasilan.

Berbeda dengan wirausahawan pada umumnya, wirausaha sosial memiliki motivasi yang lebih kompleks. Para wirausahawan sosial memiliki ambisi untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan sosial yang disesuaikan dengan harapan untuk menciptakan keseimbangan baru dalam sistem sosial.

Wirausahawan sosial tidak hanya ingin anggotanya, namun lebih dari itu. Mereka terus berupaya untuk mempromosikan perubahan dan reformasi sosial, solusi terbaru dan (Davis, 2002; Zahra et al, 2009).

Peredo dan McLean (2006) mendefinisikan wirausahawan sosial adalah penciptaan nilai-nilai sosial yang menunjukkan kemampuan untuk mengenali dan mengambil peran, menggunakan inovasi, bersedia untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dan menggunakan sumberdaya yang tidak biasa untuk memastikan partisipasi sosial.

Keterkaitan kewirausahaan sosial dengan teori pembelajaran sosial adalah dari sisi proses retensi. Bahwa pada kondisi alamiahnya seberapa baiknya individu mengingat tindakan model setelah model tidak lagi tersedia (Robbins dan Judge, 2015). Komunitas akan berupaya beradaptasi dengan mencari kesetimbangan dan membentuk model baru serta memiliki kecenderungan untuk meninggalkan model lama. Hal ini menyisakan konsekuensi terhapusnya nilai sosial yang dianut dalam suatu komunitas. Wirausahawan sosial berusaha menggali dan mengembalikan nilai-nilai sosial yang ditinggalkan dan disajikan dalam bentuk kewirausahaan guna menyelesaikan masalah sosial yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji dengan subyek penelitian adalah wirausahaan mahasiswa di provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terpengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong 2007:10).

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Esterberg (dalam Sugiyono 2009:317) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya (Sugiyono, 2007).

Periode penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2016. Wawancara dilakukan dengan beberapa butir pertanyaan yang

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

diajukan pada wirausahawan mahasiswa se-Provinsi Lampung, dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam motivasi 30 informan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu melalui distribusi langsung kuesioner kepada responden yang ada. Wawancara direkam dengan menggunakan *recorder* sehingga dapat lebih fokus melakukan tanya jawab.

Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara langsung kepada responden. Responden yang diukur meliputi keadaan demografis yaitu berjenis jenis kelamin laki-laki terdapat 22 (dua puluh dua) orang dan jenis kelamin perempuan terdapat sebanyak 8 (delapan) orang. Usia kelompok 18-21 tahun berjumlah tujuh orang dan kelompok usia 22-25 tahun sejumlah dua puluh tiga orang. Wawancara dilakukan saat informan melaksanakan kegiatan wirausahanya. Wawancara dilaksanakan secara *on the spot* agar dapat diketahui pula secara langsung aktivitas usaha yang dilakukan oleh para responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penciptaan Pendapatan

Variabel pertama yang ditanyakan kepada informan adalah variabel penciptaan pendapatan. Pada sesi ini diajukan tiga pertanyaan seputar pendapatan usaha dan motif keinginan untuk bertransformasi menjadi wirausahawan sosial. Bygrave (2004) menyatakan bahwa wirausaha adalah penciptaan kekayaan melalui inovasi, pusat pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi dan pembagian kekayaan yang bergantung pada kerja keras dan pengambilan risiko. Dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah upaya individu untuk menghasilkan pendapatan dan kekayaan pribadi dan secara kolektif mampu menyebabkan peningkatan perekonomian karena adanya produktivitas.

Pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat terbuka dengan jenis ini maka dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi informan untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Pengukuran instrumen menggunakan skala ordinal yaitu mengurutkan seseorang atau objek sesuai dengan banyak atau kuantitas dari karakteristik yang dimilikinya. Pada skala ordinal, dimungkinkan untuk melakukan penghitungan (kuantifikasi) variabel-variabel yang diuji sehingga dapat memberikan informasi yang lebih substansial. Dari hasil angket yang diberikan kepada informan sampel terdapat 25 orang, setelah proses perhitungan yang dipersentasikan dari keseluruhan informan yang diteliti didapat angka sebesar 83% yang menyatakan cukup puas dengan pendapatan saat ini sebagai wirausahawan. Kepuasan ini adalah relatif sesuai dengan ukuran usaha yang dikelola. Selanjutnya ada 27 orang atau sebesar 90% yang menyatakan penghasilannya mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dimaksud adalah kebutuhan untuk umumnya mahasiswa lajang dan belum memiliki tanggungan keluarga. Sebanyak 28 orang atau sebesar 93% menyatakan berkeinginan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan melakukan diversifikasi produk. Keinginan ini lebih dikarenakan dengan kemampuan dan kesempatan informan merasa mampu untuk berkembang.

4.2. Independensi

Kebebasan bermakna bahwa seorang wirausahawan memiliki kebebasan untuk membuat putusan bisnisnya sendiri (Douglas dan Shepperd, 1999). Jika individu merasa enggan untuk independen maka dapat diduga individu tidak berkeinginan untuk menjadi wirausahawan. Sebaliknya jika

seseorang yang memiliki keinginan untuk independen, dapat diduga orang sangat ingin menjadi wirausahawan. Guna mendapatkan informasi yang reliabel dan valid diajukan tiga pertanyaan kepada informan. Pertanyaan ini seputar independensi dan motif keinginan untuk bertransformasi menjadi wirausahawan sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah 29 informan atau 97% yang menyatakan meyakini memiliki sikap untuk menjadi independen. Sebagian besar menyatakan bahwa kebebasan menjalankan bisnis dengan tidak diatur oleh aturan seperti halnya peraturan perusahaan lebih membuat nyaman dan mengasah kedewasaan dan terimplikasi pengambilan putusan hidup.

Sebanyak 27 informan atau 90% menyatakan independensi membuat mereka sangat mungkin untuk mengelola bisnis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadi. Dan 25 informan atau 83% menyatakan sikap independen memengaruhi karir kewirausahaan, sehingga semakin besar sikap independensi akan semakin besar minat untuk mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha termasuk untuk melakukan diversifikasi produk serta membuka peluang bisnis baru.

4.3. Upaya Kerja

Variabel ketiga adalah variabel upaya kerja. Diajukan empat pertanyaan tentang kegiatan operasi usaha dan motif keinginan untuk bertransformasi menjadi wirausahawan sosial. Upaya kerja dideskripsikan sebagai kerja mental dan fisik yang dikeluarkan oleh wirausahawan untuk menjalankan bisnisnya. Untuk memulai bisnisnya seorang wirausahawan membutuhkan kerja keras dan upaya tinggi. Terkadang membutuhkan jam kerja tambahan dengan mengorbankan waktu istirahat dan biaya lebih. Memerhatikan aspek tersebut dapat diduga bahwa individu yang memiliki sikap independensi dan

keinginan untuk bekerja lebih keras akan memiliki intensi menjadi wirausahawan.

Sebanyak 30 informan terdapat 29 atau 97% yang menikmati sebagai seorang wirausahawan. Menikmati pekerjaan sebagai wirausahawan secara psikologis akan mengurangi beratnya beban bekerja (Bygrave, 2004). Selain itu juga keinginan untuk mengembangkan usaha yang telah menjadi cita-cita akan mendorong wirausahawan bekerja lebih keras dan mengorbankan assetnya demi mencapai tujuan. Sejumlah 28 atau 93% merasa tidak terpaksa untuk menjadi seorang *entrepreneur*. Hal ini berkesinambungan dengan jawaban sebelumnya, sehingga beban kerja yang berat akan terasa menjadi tantangan dan seluruh informan merasa tertantang untuk mencapainya.

Sebanyak 22 orang atau 73% informan merasa termotivasi untuk mencapai target usaha karena ingin mengembangkan usaha dan mendapatkan laba yang diharapkan. Menurut sebagian besar informan, penetapan target telah dilakukan dengan akurat dan memertimbangkan kemampuan pribadi. Sehingga dengan target tersebut informan merasa telah proporsional mengatur waktu dan keuangan dengan fleksibel. Sejumlah 22 atau 73% informan tidak terbebani dengan tugas utama kuliah dengan berwirausaha. Karena mahasiswa wirausahawan dalam menjalankan usahanya didukung oleh afeksi diri yang kuat dan merasa mampu membagi waktu untuk menjalankan tugas utamanya.

4.4. Pengambilan Risiko

Seluruh informan menyatakan bahwa motif keuntungan dan kebutuhan berprestasi menjadi alasan utama untuk berwirausaha. Douglas and Shepperd (1999) mengemukakan bahwa semakin keras usaha kerja semakin besar pendapatan yang diperoleh. Keputusan untuk berwirausaha adalah keputusan strategis yang melibatkan keputusan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

pengambilan risiko (Indarti dan Rostiani, 2008). Wirausahawan merupakan sikap untuk berani mengambil risiko kegagalan atas modal dan waktu yang mereka kelola.

Seluruh informan menyadari bahwa sejatinya profesi wirausaha adalah profesi yang sangat berisiko. Namun informan menyadari sepenuhnya bahwa dengan mengambil risiko, dapat menjadi tempaan sehingga lebih dewasa dan lebih berani dalam proses pengambilan keputusan di semua lini. 28 orang atau 93,3% responden menyatakan sepenuhnya menyadari bahwa dengan modal yang disertakan untuk usaha diharapkan akan memiliki produktivitas sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian. Informan sepenuhnya mengakui bahwa memiliki toleransi terhadap ketidakpastian di masa depan. Sehingga mengambil risiko adalah sebuah konsekuensi yang harus dihadapi.

Sebanyak 25 orang (83,3%) informan menyatakan bahwa risiko dapat dikelola dan dengan keyakinan tinggi memiliki kompetensi untuk mengelola risiko. Pengelolaan risiko usaha mutlak dimiliki oleh wirausahawan, hasil wawancara juga didapat strategi wirausahawan mengelola risiko yaitu dengan melakukan riset secara terus menerus tentang bisnis, mengembangkan kreatifitas dan selalu tanggap serta sigap mengantisipasi perubahan.

4.5. Motif Transformasi Menjadi Kewirausahaan Sosial

Sebanyak 20 (dua puluh) orang informan atau sebesar 66% menyatakan ketertarikannya untuk menjadi wirausahawan sosial. Ketertarikan ini dikarenakan dengan bisnis yang telah dikelola saat ini telah dinilai stabil dan telah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga informan merasa membutuhkan tantangan lain selain pengembangan usaha intinya. Selain itu keinginan untuk berbagi atau *altruism*

yang dimiliki telah mendorong untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat.

Garriga dan Mele (2004) mengungkapkan tentang teori etika, bahwa sebuah entitas bisnis yang fokus terhadap persyaratan etis yang melekatkan hubungan antara bisnis dan masyarakat. Selain itu motif transformasi menjadi kewirausahaan juga didorong oleh rasa ingin berbagi dengan orang lain. Altruism adalah sifat mementingkan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan materi dari orang lain (Tan et al, 2005). Sejalan dengan penelitian Gunawan (2015) bahwa mahasiswa melakukan kegiatan sukarela karena keinginan untuk berinteraksi dengan masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan teori hirarki kebutuhan Maslow (Robbins dan Judge, 2015). Mayoritas informan menyatakan keinginannya untuk juga mengembangkan sifat altruistik kepada masyarakat melalui kewirausahaan sosial. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa informan yang berminat untuk mengembangkan bisnisnya dengan motif sosial adalah wirausahawan yang memiliki usaha yang relatif telah stabil dan hasilnya telah dapat memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa wirausahawan yang telah mapan secara finansial, merasa cukup aman dalam menjalankan usahanya dan statusnya telah diterima secara sosial yang berminat mengembangkan konsep kewirausahaan sosial. Menurut penelitian Gunawan (2015) interaksi mahasiswa dengan masyarakat adalah bukan mendapatkan keuntungan materi namun untuk berinteraksi yaitu mendapatkan pengakuan secara sosial dan aktualisasi diri.

Sementara ada 10 orang lainnya yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi wirausahawan sosial. Alasan

mayor yang berhasil dihimpun adalah lebih karena informan masih ingin fokus terhadap modal yang dikelola dan meningkatkan perhatian keberlanjutan usahanya. Namun sebenarnya ketidakinginan itu bukan karena tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah sosial, tetapi lebih didasarkan pada ketidaktahuan dengan konsep wirausaha sosial, merasa tidak sanggup untuk melakukannya jika sendirian, tidak memiliki pengetahuan untuk pengelolaan lebih lanjut serta merasa masih memerlukan asset usaha guna pengembangan usaha.

Temuan lapang tersebut masih selaras dengan teori hierarki kebutuhan Maslow (Robbins dan Judge, 2015). Wirausaha yang tidak berminat untuk mengembangkan usahanya mayoritas dilandasi oleh belum stabilnya usaha dan masih membutuhkan perhatian yang

lebih. Belum terpenuhinya kebutuhan finansial dari hasil usahanya dan masih dirasa usahanya belum aman adalah alasan utama sehingga menjadi pertimbangan wirausahawan untuk tidak memprioritaskan pengembangan bisnisnya dengan motif sosial.

Temuan lain adalah karena informan masih belum mengetahui konsep kewirausahaan sosial secara komprehensif. Alasan selanjutnya adalah karena ada ketidakyakinan informan untuk dapat menjalankannya sendirian. Namun bagi informan ada kemungkinan untuk menumbuhkan minat berwirausaha sosial apabila dapat dilakukan secara bergotong-royong secara finansial dan upaya kerja lalu dibentuk komunitas khusus. Komunitas dimaksud diharapkan dapat menyampaikan visi dan misi serta tujuan sosial yang akan diemban.

Tabel 4.1. Analisis Indeks Variabel

Variabel	Angka Indeks
Penciptaan Pendapatan	93 %
Independensi	97%
Upaya Kerja	97%
Pengambilan Resiko	83,3%
Motiv Transformasi	66%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

5. KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Sebagai studi pilot, limitasi dari penelitian ini adalah masih sedikitnya informan yang direkrut hanya tiga puluh orang dan dengan sampel sejumlah itu kontribusi yang dihasilkan pun tidak optimal, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Terlebih, masih ada walaupun minoritas wirausaha mahasiswa yang sama sekali belum mengetahui konsep kewirausahaan sosial. Ketidaktahuan ini mengakibatkan jawaban informan tidak tegas menggambarkan peminatan. Masih adanya jawaban yang tidak jelas dan tegas dengan menyatakan berminat jika

ditambahkan syarat tertentu, menggambarkan kegamangan informan.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dimensi penghargaan dan aktualisasi diri dari wirausahawan adalah motif terkuat bertransformasinya motivasi wirausahawan menjadi wirausahawan sosial. Selanjutnya bahwa motif berbagi risiko dan berkumpulnya wirausahawan dalam suatu komunitas yang mengedukasi tentang nilai-nilai sosial dapat mentransformasi nilai pfofit dan kapital menjadi bermotif sosial.

Kewirausahaan sosial dapat diandalkan untuk menjadi agen untuk penyelesaian masalah sosial. Sehingga edukasi bagi elemen masyarakat yang memiliki nilai etika dan altruisme tinggi seperti mahasiswa atau anggota lembaga-

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

lembaga relawan sosial dapat digencarkan. Selain itu juga dibutuhkan promosi dan publikasi tentang keberhasilan terselesaikannya masalah sosial dari proses kewirausahaan sosial, agar gerakan moral dapat menjadi viral.

DAFTAR PUSTAKA

- Algofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 1980-2007. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Alma, Buchari. 2009. *Kewirausahaan*. Alfa Beta. Bandung.
- Bauer, P.T. 1965. The Vicious Circle of Poverty. *Weltwirtschaftliches Archiv*. Bd.95 (1965), pp. 4-20
- Bygrave, W.D. 2004. *The Portable MBA in Entrepreneurship*. 3rd Edition. New Jersey. John Willey & Sons Inc.
- Chell,E., Spence, L.J., Perrini,F., Harris,J.D. 2016. Social Entrepreneurship and Business Ethics: Does Social Equal Ethical. *Journal of Business Ethics*. Volume 133. Issue 4, pp. 619-625.
- Chen,G., Li, J., Matlay, H. 2006. Who are the chinese private entrepreneurs. *Jurnal of small business and enterprise development*. Vol.13, pp.148-160.
- Davis, M.E. 2002. Ordered Porous Materials for Emerging Applications. *Nature* 417, 813-821
- Dorado, S., & Ventresca, M.J. 2013. Crescive entrepreneurship in Complex Socisl Problems: Institutional Conditions for Entrepreneurial Engagement. *Journal of Business venturing*. 28, 69-82.
- Douglas, E.J., Shepherd, D.A. 1999. Entrepreneurship As A Utility Maximing Response. *Journal of Business Venturing*. Vol. 15, pp.231-251.
- Douglas,E.J., Shepherd. D. 2002. Self-employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial and Utiilty Maximation. *Journal of Entrepreneurial Theory and Practice*. Vol. 26. No 3, pp. 81-90.
- Drucker, Peter. 1996. *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Erlangga. Jakarta.
- Garriga, E & Mele, D. 2004. Corporate Social Responsibility Theoris: Mapping Territory. *Journal of Business Ethics*. 53:51-71.
- Gunawan, H.M. 2015. Pengaruh Development and Learning, Altruism, Belonging and Protection, dan Career Recognition terhadap Volunteer Satisfaction-Studi Terhadap Mahasiswa Manajemen UPH Surabaya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol.4. No. 1.
- Indarti, N., Rostiani, R. 2008. Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan Antara Indonesia, Jepang dan Norwegia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15. No. 4, pp.01-27.
- Kenrick, D.T., Griskavicius, V., Neuberg, S.L., Schaller, M. 2010. Renovating the pyramid of Needs: Contemporary Extentions Built Upon Anction Foundations. *Perspect of psycicol sci*. 5(3): 292-314.

- Maslow, A.H. 1954. *Motivation and Personality*. New York: Harper.
- Putri, R.F. 2015. Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Economics Development Analysis Journal*.
- Robbins, Stephen, P., Judge, T.A. 2015. *Perilaku organisasi*. Penerbit Salemba Empat
- Siboro,E.N., Rusdi., I. 2012. Pola Komunikasi Keluarga dan Tingkat Depresi Lansia di Kelurahan Padang Bulan Medan.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*Bandung: Alfabeta.
- Tan, W.L., Willians, J., Tan, T.M. 2005. Defining the Social Entrepreneurship: Altruism & Entrepreneurship. *Intl Entrepreneurship & Management Journal*. Vol. 1, pp.1-18.
- Wu, S., & Wu, L. 2008. The Impact of Higher Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in China. *Journal of Small Bussiness and Enterprise Development*, 5(2): 97-111.
- Yohnson. 2003. Peranan Universitas dalam Memotivasi Sarjana Menjadi Young Entrepreneurs. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2, pp. 97-111

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN
DAN KARAKTERISTIK PERSONAL TERHADAP
PERTUMBUHAN UMKM YANG BERKELANJUTAN
(KASUS: WIRAUSAHA PENGOLAHAN KENTANG
DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI)**

Silvia Sari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: sari_silvia26@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesia needs to strengthen the national economy for economic development through the growth of entrepreneurial SMEs. This study is aimed to identify and to analyze some factors of entrepreneurial activities contribute in the growth of SMES. This study is held in Kerinci since its entrepreneurial activities increase. The primary data were collected through giving questionnaire to 111 women entrepreneurs. The technic used is census, then the data were analyzed by Equation Modeling (SEM). In this study, the exogenous latent variables are entrepreneurial and personal characteristics. Meanwhile, endogenous latent variable is entrepreneurial activities and the growth of new business. The result of this study shows that the built model has fulfilled the criteria of; goodness fit' and its reliability measurement variables is ($CR \geq 0.70$, $VE \geq 0.50$). Furthermore, the result of SEM analysis shows that the entrepreneurial women activities are most influenced by entrepreneurial characteristics ($\gamma = 0.81$). Entrepreneurial characteristics of women entrepreneur are formed by motivation ($\lambda = 0.46$), risk ($\lambda = 0.32$), and innovation ($\lambda = 0.99$). It implies that the higher motivation held by SMEs, the higher possibility held to growth the SMEs. Therefore, the most priority programs need to be done by the government and stakeholders for economic development are to facilitate a program in creating new and innovative efforts in entrepreneurial activities, to enrich the entrepreneur knowledge through some trainings, and to support their capital needs.

Key Words: Entrepreneurial Activity, Entrepreneurial Characteristics, Personal Characteristics, SMEs, Entrepreneur

ABSTRACT

Indonesia perlu memperkuat perekonomian nasional untuk menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menumbuhkan UMKM yang memiliki karakteristik kewirausahaan. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pembentuk dalam aktivitas wirausaha yang berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kerinci karena di sana terjadi peningkatan aktivitas wirausaha. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada pengusaha 111 wanita yang aktif berwirausaha dengan teknik sensus, dan data dianalisis dengan Structural Equation Modeling (SEM). Variabel laten eksogen adalah karakteristik kewirausahaan dan karakteristik personal. Sedangkan aktivitas wirausaha dan pertumbuhan usaha sebagai variabel laten endogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dibangun telah memenuhi kriteria goodness fit dan variabel pengukuran penelitian memiliki reliabilitas

($CR \geq 0.70$, $VE \geq 0.50$) yang baik. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa aktivitas usaha dari wanita wirausaha dipengaruhi paling besar oleh karakteristik kewirausahaan ($\gamma = 0.81$). Karakteristik kewirausahaan ‘wanita wirausaha’ secara baik dibentuk oleh motivasi ($\lambda = 0.46$), risiko ($\lambda = 0.32$), dan inovasi ($\lambda = 0.99$). Dengan demikian UMKM yang karakter inovasinya tinggi terbukti mampu menumbuhkan usaha baru yang berkelanjutan. Implikasinya program fasilitas penciptaan usaha-usaha baru yang inovatif, program penguatan modal dan pelatihan usaha kepada UMKM adalah program prioritas pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Aktivitas Wirausaha, Karakteristik Kewirausahaan, Karakteristik Personal, UMKM, Wirausaha*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia perlu memperkuat perekonomian nasional untuk menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu cara memperkuat perekonomian nasional Indonesia adalah penguatan peran dan dukungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM telah terbukti tangguh. Sektor UMKM mampu bertahan ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Para ahli ekonomi dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2015 mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena, tidak memiliki utang luar negeri, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*, menggunakan input lokal, dan berorientasi ekspor.

Peran dan eksistensi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional juga sudah tidak diragukan lagi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak yaitu mencapai 56 juta unit usaha di tahun 2012, dengan jumlah usaha mikro dan kecil yang mendominasi (Gambar 1). Jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 94,4 persen dan menyumbang 54,77 persen pada PDB Indonesia. Berikut data perkembangan jumlah UMKM di Indonesia tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan jumlah usaha UMKM dan Besar, PDB RI tahun 2010-2012

Indikator	2010		2011*		2012*	
	Jumlah unit	Jumlah unit	PDB (%)	Jumlah unit	PDB (%)	Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Unit Usaha	53.828.569	55.211.396		56.539. 560		
UMKM	53.823.732	55.206.444	50,04	56.534. 592	54,77	94,4
Usaha Besar	4.837	4.952	49,96	4.968	45,23	5,6

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2013 (diolah)
 (*) = Data sementara

Berdasarkan angka di atas, peranan UMKM sebagai bentuk kewirausahaan sangat membantu pemerintah sebagai penggerak perekonomian negara, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap PDB nasional. Peranan kewirausahaan UMKM tidak hanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat (makro), tetapi juga mikro.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi

masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.



Gambar 1.1. Persentase Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2012

Menumbuhkan UMKM yang memiliki karakteristik kewirausahaan menjadi penting dalam perekonomian yang berkelanjutan di Indonesia. Saragih (2015) juga mengatakan dalam era persaingan saat ini yang bersaing bukan komoditas tetapi SDM atau wirausahanya. Wirausaha itu lebih dari sekedar berusaha, wirausaha berusaha dengan cerdas, kreatif, penuh dengan inovasi dan keberanian mengambil risiko (Longenecker dan Justin G 2001 dalam Noersasongko 2005).

Para wirausaha (*entrepreneurs*) adalah manusia-manusia unggul yang selalu berorientasi untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru, melaksanakan proses yang lebih baik dan efisien untuk memenangkan persaingan (Daryanto 2010).

Aktivitas wirausaha UMKM terus bermunculan baik dari sektor pertanian maupun non pertanian. Perkembangan jumlah UMKM berdasarkan pada pengelompokan sembilan sektor ekonomi di Indonesia tahun 2011 didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (LPPI 2015). Penciptaan wirausaha baru khususnya di bidang pertanian menjadi sangat penting karena Indonesia mempunyai potensi besar di

sektor agribisnis pertanian. Pertanian berperan sebagai mata pencarian sebagian besar penduduk. Saragih (2010) mengatakan agribisnis pertanian akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (*a leading sector*) pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Indonesia juga sebagai negara pertanian terbesar di ASEAN.

Adanya aktivitas wirausaha baru ini terbentuk karena beberapa faktor, ada yang memang sudah secara lahiriah memiliki karakteristik kewirausahaan, namun tidak sedikit juga wirausaha baru muncul karena karakteristik personal dari tekanan ekonomi, kebosanan dalam bekerja, memasuki usia tua, serta faktor pendidikan dan perkawinan. Menurut penelitian Bosma (2011), *trend* munculnya wirausaha adalah karena tekanan ekonomi, sehingga seseorang terpaksa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dikarenakan latar belakang tersebut tidak heran banyak usaha-usaha mikro dan kecil yang bermunculan, namun tidak dapat berkembang menjadi usaha besar dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pembentuk dalam aktivitas wirausaha yang berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Jumlah wirausaha mengindikasikan kemajuan suatu negara. Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2013 ada 56 juta, namun pengusaha ini tidak dihitung sebagai wirausaha dengan penilaian Kemenkop. Jumlah wirausaha dari Kemenkop hanya 1.65 persen dari 250 juta penduduk (Sasongko 2015). Rasio ini masih lebih kecil dari syarat jumlah minimal wirausaha bagi suatu negara menuju negara maju. Menurut ilmuwan As David McClelland syarat minimal untuk menuju negara maju, jumlah wirausaha adalah 2% dari total penduduk suatu negara (Saptana 2013). Berdasarkan angka diatas Indonesia masih perlu mengembangkan jumlah UMKM yang berkarakter wirausaha.

Kriteria wirausaha oleh Kemenkop ini adalah pengusaha yang bisa *survive* selama 42 bulan. Casson *et al.* (2006) juga mengatakan perusahaan yang mampu bertahan 18 sampai 24 bulan akan tumbuh dan sisanya 80 persen akan keluar secara sukarela.

Pertumbuhan dan keberlangsungan usaha berdasarkan model Bosma *et al.* (2011) menyebutkan sebuah usaha akan mencapai tahap mapan (kematangan) pada saat umur bisnis lebih dari 3,5 tahun. Sehingga seorang wirausaha itu tidak hanya mampu mendirikan sebuah usaha-usaha baru (*start up enterprises*) tetapi juga dilihat dari sisi pertumbuhan usahanya mencapai tahap keberlanjutan atau tidak.

Jumlah wirausaha mengindikasikan kemampuan bersaing sebuah negara, berdasarkan data *Global Competitiveness Index* (CGI) oleh *World Economic Forum* 2013 dari 11 negara, posisi Indonesia dalam kawasan ASEAN berada di peringkat ke-5 atau 38 dari peringkat global dengan jumlah wirausaha 1.65%. Posisi ini menempatkan peringkat Indonesia di bawah Singapura (CGI peringkat global ke dua dengan jumlah wirausaha 7%), Malaysia (CGI peringkat global ke 24 dengan jumlah wirausaha 5%), dan Thailand (CGI peringkat global ke 27 dengan jumlah wirausaha 3%) dengan

jumlah penduduk ketiga negara tersebut juga lebih sedikit dari Indonesia (Kemenkop dan UKM RI 2015). Hal ini menunjukkan pengusaha yang memiliki karakteristik kewirausahaan dan personal yang baik yang akan mampu menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang berkelanjutan dan berdaya saing. Aktivitas dari wirausaha ini secara tidak langsung akan menumbuhkan usaha-usaha baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penciptaan wirausaha baru khususnya di bidang pertanian menjadi sangat penting karena Indonesia mempunyai potensi besar di sektor agribisnis pertanian. Kabupaten Kerinci kaya akan sumber daya pertanian, salah satunya kentang. Kabupaten Kerinci adalah provinsi penghasil kentang tertinggi kedua setelah Jawa Barat (BPS 2015). Potensi sumber daya ini juga diikuti dengan peran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan pelatihan dan sosialisasi teknologi sederhana pengolahan kentang kepada para wanita di beberapa desa di Kabupaten Kerinci. Kegiatan pelatihan ini telah menumbuhkan usaha baru pengolahan kentang menjadi dodol kentang, kripik dan kering kentang (serundeng). Produk ini dijadikan sebagai produk oleh-oleh khas daerah Kabupaten Kerinci.

Jumlah UMKM pengolahan kentang yang ada di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan, seperti usaha dodol kentang pada tahun 2006 ada sebanyak 26 unit usaha menjadi 60 unit usaha di tahun 2012 (Lampiran 1). Peningkatan jumlah usaha ini tidak menjadi faktor mutlak keberhasilan pertumbuhan ekonomi, jika tidak diikuti dengan keahlian dan kemampuan berwirausaha yang baik. Menurut Naude (2008) perlunya pengamatan aktivitas wirausaha karena masuknya pengusaha dengan kemampuan rendah, memungkinkan dia menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, kuantitas wirausaha yang banyak jika tidak diikuti dengan kualitas

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

wirausaha yang baik justru akan melemahkan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini di arahkan kepada aktivitas UMKM pengolahan kentang di Kabupaten Kerinci karena aktivitas UMKM ini muncul dari ide inovasi bagaimana mengolah hasil kentang yang produksinya berlebih ketika musim panen di Kabupaten Kerinci menjadi produk yang nilai tambahnya lebih tinggi. Usaha ini juga telah berdiri sejak tahun 2006, sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor pembentuk dalam aktivitas wirausaha yang berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Sejauh mana kemampuan personal dan karakteristik kewirausahaan yang dimiliki pelaku UMKM ini mempengaruhi aktivitas kewirausahaan? apakah UMKM yang mengolah kentang di Kabupaten Kerinci seorang wirausaha? dan apakah aktivitas yang mereka lakukan sekarang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kabupaten Kerinci menarik untuk dikaji.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Karakteristik Kewirausahaan

Karakteristik mengandung pengertian suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, reputasi seseorang dan kepribadian yang eksentrik sehingga membuatnya menarik dan atraktif (Sumantri 2013). Li (2009) membedakan karakteristik individu pengusahanya ke dalam tiga kategori dan menyebutnya dengan istilah *entrepreneurial characteristics*, yaitu: (1) karakteristik demografis, seperti jenis kelamin, umur, etnis, dan latar belakang orangtua yang umumnya dikaitkan dengan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan; (2) karakteristik psikologis dan perilaku wirausaha, seperti motivasi berprestasi, kontrol diri, keberanian menghadapi risiko, kreativitas, dan inovasi, yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memulai usaha (*start-up*), keberlanjutan dan keberhasilan usaha; (3) faktor *human capital*, seperti tingkat pendidikan,

pengalaman bekerja, pengalaman membuka usaha, pelatihan keterampilan dan teknis, serta jaringan wirausaha atau hubungan sosial, yang mempengaruhi kemampuan wirausaha dalam mengakses informasi dan modal usaha untuk keberhasilan usahanya.

Karakteristik kewirausahaan yang dipakai pada penelitian ini adalah karakteristik psikologi yaitu motivasi, risiko dan inovasi yang dimiliki pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, karena yang akan dilihat adalah karakter jiwa kewirausahaan yang dimiliki pelaku wirausaha yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memulai usaha dan menjadi seorang wirausaha.

Motivasi merupakan semangat dan akan membuat seseorang bekerja keras untuk melakukan pembentukan ide atau gagasan baru, yang kemudian akan diimplementasikan menjadi usaha baru dan produk baru melalui aktivitas sekelompok orang (Noersasongko 2005).

Karakteristik kewirausahaan yang kedua berkaitan dengan pengambilan resiko. Richard Kontillon, seorang ekonom Perancis mengkonsepkan kewirausahaan sebagai pengambilan risiko yang tidak tergaransi (Yaghoubi dan Ahmadi 2010).

Menurut Drucker (1985), wirausahawan sangat berkaitan dengan inovasi. Inovasi adalah kemampuan wirausaha untuk menghasilkan ide bisnis dan membuat produk atau jasa yang memiliki nilai pasar (Gries dan Naude 2008).

2.2. Karakteristik Personal

Pengamatan karakteristik personal adalah aspek yang penting untuk dilakukan karena karakteristik personal menyangkut tentang ciri-ciri pribadi seorang individu. Karakteristik personal yang dipakai pada penelitian terlebih dahulu adalah usia, pengalaman, pendidikan, pelatihan dan peran keluarga (Li 2009; Sumantri 2013; Puspitasari 2013; dan Brush *et al.* 2010).

Usia terkait dengan kematangan usia pelaku usaha dalam menjalankan usaha.

Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika dalam Alma (2010) yang mengatakan usia wanita yang memulai usaha di Amerika rata-rata 35-45 tahun sehingga wanita pada selang usia tersebut sudah memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak sebagai pelaku usaha.

Pengalaman merupakan lamanya menjalankan usaha sendiri (kemampuan menjadi pengusaha). Pengalaman berhubungan dengan daya tahan dalam menjalankan usaha, Casson *et al.* (2006) mengatakan perusahaan baru lebih sering mengalami kegagalan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih dahulu berdiri (lebih tua), karena para pemilik perusahaan yang baru cenderung memiliki sedikit pengalaman dibandingkan perusahaan yang telah lama berdiri dan untuk mendapatkan pengalaman melalui riset butuh biaya besar.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu karakteristik yang penting dalam aktivitas wirausaha. Hal ini karena wirausaha yang berpendidikan memiliki kemampuan mengimplementasikan ide-ide baru untuk menciptakan bisnis baru. Pelatihan juga salah satu cara yang dinilai efektif, baik untuk meningkatkan kinerja usaha dan pengetahuan wirausaha. Berdasarkan hasil penelitian Noersasongko (2005) menemukan pengusaha yang mengikuti banyak pelatihan lebih berhasil daripada pengusaha yang kurang atau tidak mendapat pelatihan.

Faktor dorongan dan hambatan dari anggota keluarga inti dan dorongan dari keluarga besar seperti asal etnis juga sangat menentukan keputusan seseorang untuk melakukan aktivitas wirausaha.

2.3. Aktivitas Wirausaha

Kuratko dan Hotgetts (2007) melihat aktivitas wirausaha dari pendirian bisnis baru yang layak, secara khusus dapat dilihat dari lima aktivitasnya yaitu: (1) *technical*, berkaitan dengan analisis kelayakan produk dan jasa; (2) *market*, berkaitan dengan penentuan peluang pasar dan risiko; (3) *financial*, berkaitan dengan kelayakan

finansial dan sumber daya; (4) *organizational*, berkaitan dengan kemampuan organisasi (pemilik dan karyawan); (5) *competitive*, berkaitan dengan daya saing. Oleh karena aktivitas wirausaha yang dilihat dari pengaruh internal maka aktivitas wirausaha hanya dilihat dari daya saing dan daya produksi.

2.4. Pertumbuhan Usaha

Tahap pertumbuhan dan perkembangan usaha dikaitkan Bygrave dan Zacharakis (2010) dengan skala usaha (*size*) dan tingkat pendapatan (profitabilitas) dari waktu ke waktu. Aktivitas wirausaha dengan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Hubungan juga dijelaskan dalam model penelitian *Global Entrepreneur Monitors* (GEM). Aktivitas ini selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan usaha yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi. Jumlah dan kualitas wirausaha juga akan berpengaruh terhadap tingkat dan kualitas pertumbuhan suatu negara. Makin banyak jumlah wirausaha yang berkualitas ada kemungkinan pertumbuhannya akan semakin tinggi Pambudy (2010).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner kepada 111 UMKM yang mengolah kentang di Kabupaten Kerinci. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2014 sampai Januari 2015. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Kerinci terjadi peningkatan aktivitas UMKM yang diduga karena faktor inovasi dan mampu bertahan sejak tahun 2006. Industri pengolahan kentang juga dipilih karena ada karakteristik yang unik pada usaha ini, yaitu merupakan produk oleh-oleh khas asli Kabupaten Kerinci yang banyak diminati masyarakat dari kalangan bawah hingga atas. Hal ini karena Kabupaten Kerinci adalah daerah penghasil

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

kentang dengan produktivitas terbesar di Sumatera dan produktivitasnya stabil yaitu rata-rata 17.3 ton/Ha dari tahun 2008-2012 (BPS Kabupaten Kerinci 2013).

Selain itu kentang merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan di Indonesia. Kentang adalah salah satu dari lima kelompok makanan pokok terbesar di dunia selain gandum, jagung, beras, dan terigu. Kentang juga merupakan salah satu produk ekspor non migas Indonesia.

Data-data yang telah terkumpul direkapitulasi terlebih dahulu dengan menggunakan program *MS Excel* 2013. Hasil olahan tersebut selanjutnya menjadi input dan dianalisis dengan metode SEM (*Structural Equation Modelling*) menggunakan bantuan program LISREL 8.3.

Model SEM dalam penelitian ini terdiri atas: dua variabel laten eksogen yaitu karakteristik kewirausahaan (X1) dan

karakteristik personal (X2); dua variabel laten endogen yaitu aktivitas (Y1) dan pertumbuhan usaha (Y2); dan 12 variabel *manifest*. Rincian variabel laten dan *manifest* dapat dilihat pada Tabel 3.1. Skala pengukuran menggunakan skala *likert* yang terbagi menjadi lima skala/ skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh, penilaian terhadap suatu objek semakin positif, demikian sebaliknya.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Karakteristik kewirausahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap aktivitas wirausaha.

H2: Karakteristik personal berpengaruh signifikan dan positif terhadap aktivitas wirausaha.

H3: Aktivitas wirausaha pengolahan kentang berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan usaha olahan kentang di Kabupaten Kerinci.

Tabel 3.1. Variabel laten dan manifes (indikator) model persamaan struktural

Variabel laten	Variabel Manifes (indikator)	Sumber
Eksogen	1. Motivasi berwirausaha (X _{1.1})	Noersasongko (2005),
• Karakteristik kewirausahaan (X ₁)	2. Keberanian mengambil risiko (X _{1.2})	Casson(2006), Sumantri (2013)
	3. Kemampuan inovasi (X _{1.3})	
• Karakteristik personal (X ₂)	4. Kematangan usia (X _{2.1})	Suandi dan Sativa (2001), Riyanti (2003),
	5. Pengalaman berusaha (X _{2.2})	Li (2009), Sumantri (2013), Puspitasari (2013), dan Brush <i>et al.</i> (2010)
	6. Pendidikan formal yang dimiliki (X _{2.3})	
	7. Pelatihan yang pernah diikuti (X _{2.4})	
	8. Dorongan dan dukungan keluarga (X _{2.5})	
Endogen	9. Daya saing (Y _{1.1})	Kuratko dan Hodgetts (2007)
• Aktivitas wirausaha (Y ₁)	10. Daya produksi (Y _{1.2})	
Endogen	11. Skala usaha (Y _{2.1})	Bygrave dan Zacharakis (2010), Burhanuddin (2014)
• Pertumbuhan usaha (Y ₂)	12. Tingkat pendapatan (Y _{2.2})	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Kewirausahaan UMKM Pengolah Kentang di Kabupaten Kerinci

Karakteristik kewirausahaan dilihat dari motivasi, risiko dan inovasi. Tingkat karakteristik kewirausahaan di bagi lima kelas (sangat rendah, rendah, sedang,

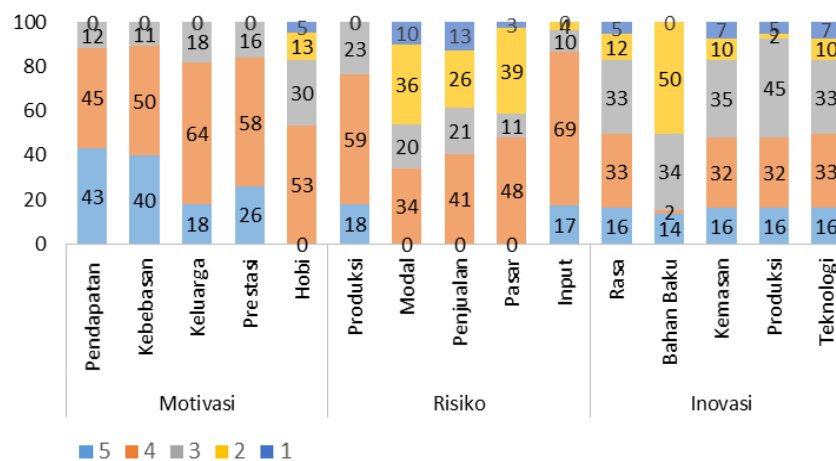
tinggi, sangat tinggi), nilai tertinggi skala *likert* 5 (responden sangat setuju dan sering melakukan aktivitas pada pernyataan kuisioner) dan terendah 1 (responden sangat tidak setuju dan tidak pernah melakukan aktivitas pada pernyataan kuisioner). Tingkat karakteristik kewirausahaan ini dapat dilihat pada Tabel

4.1. dan sebaran penilaian responden tentang karakteristik kewirausahaan dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Tingkat karakteristik kewirausahaan pengolahan kentang di Kabupaten Kerinci Jambi

Karakteristik Kewirausahaan	Persentase rata-rata penilaian (%)					Rata-rata skor	Kategori
	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Netral (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tidak setuju (1)		
Motivasi	25	54	17	3	1	4.00	Tinggi
Risiko	7	50	17	21	5	3.33	Sedang
Inovasi	16	26	36	17	5	3.31	Sedang

Keterangan: (1.0 ≤ sangat rendah ≤ 1.8), (1.8 < rendah ≤ 2.6), (2.6 < sedang ≤ 3.4), (3.4 < tinggi ≤ 4.2), (4.2 < sangat tinggi ≤ 5.0).



Gambar 4.1. Sebaran penilaian responden tentang karakteristik kewirausahaan

Rata-rata motivasi pelaku usaha UMKM berada pada kategori tinggi. Pada Gambar 4.1. terlihat sebaran jawaban respon yang setuju, persentasenya mendominasi artinya wirausaha di Kabupaten Kerinci memang termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha. Hal tersebut diindikasikan oleh rata-rata jawaban responden pada Tabel 4.1., yaitu 54% setuju dan 25% sangat setuju memiliki motivasi yang kuat untuk berwirausaha. Motivasi yang kuat menjadi potensi besar bagi pelaku UMKM untuk mampu meningkatkan usahanya karena menurut Noersasonko (2005) motivasi merupakan semangat dan akan membuat seseorang bekerja keras untuk melakukan pembentukan ide atau gagasan baru, kemudian diimplementasikan menjadi

usaha baru dan produk baru melalui aktifitas sekelompok orang.

Rata-rata keberanian pelaku UMKM dalam mengambil risiko berada pada kategori sedang. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden 50% berani mengambil risiko dan tidak berani 21% (Tabel 4.1.). Risiko diindikasikan oleh ketidakpastian penjualan, risiko modal, risiko produksi, risiko pasar dan input. Pada Gambar 3.1 terlihat hanya 41% pelaku UMKM yang berani menanggung risiko penjualan, 48% yang berani menanggung risiko pasar dan 36% yang berani menanggung risiko modal. berdasarkan sebaran jawaban responden ini terlihat pelaku UMKM paling rentan pada risiko modal. Hal ini juga ditemukan pada penelitian Mahbub (2000) yang mengidentifikasi peluang yang tidak

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

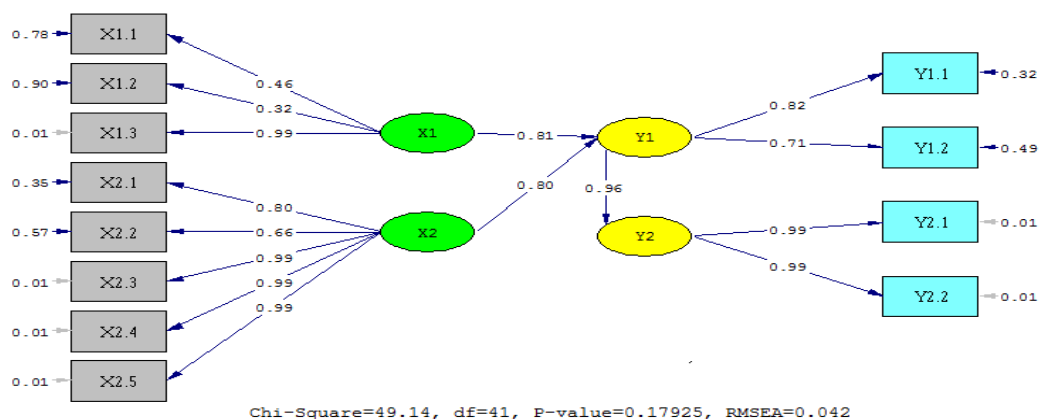
dimiliki pelaku UMKM sehingga memperlambat pertumbuhan usahanya adalah akses pada modal dan sumber keuangan. Peran lembaga keuangan dan perbankan sangat dibutuhkan pada aktivitas kewirausahaan terutama sebagai penyedia modal awal dan sumber keuangan bagi pelaku usaha UMKM yang akan mendirikan usaha baru.

Rata-rata inovasi yang dilakukan pelaku UMKM di Kabupaten Kerinci berada pada kategori sedang. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden yang setuju bahwa sering melakukan inovasi 26% sangat setuju 16% (Tabel 3). Inovasi diindikasikan oleh jawaban responden 33% sering melakukan inovasi rasa, 32% sering melakukan inovasi kemasan, 33% sering melakukan inovasi teknologi dan 32% sering melakukan inovasi dalam proses produksi, tetapi untuk inovasi bahan baku hanya 7% yang melakukan karena banyak responden yang mempertahankan bahan baku lama sebagai ciri khas produknya.

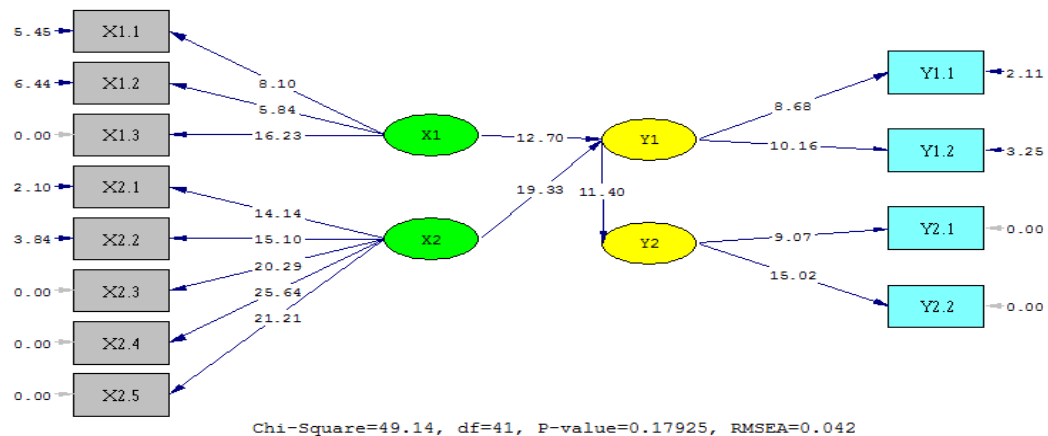
Dengan demikian, berdasarkan ketiga faktor karakteristik kewirausahaan diatas, pelaku UMKM pengolahan kentang di Kabupaten Kerinci relevan disebut sebagai seorang wirausaha (*entrepreneur*)

4.2. Analisis SEM

Analisis SEM dilakukan untuk melihat hubungan aktivitas wirausaha dan pertumbuhan usaha UMKM serta faktor dominan yang membentuknya. Analisis SEM dilakukan dengan pendekatan *one step approach* yaitu komponen model pengukuran dan struktural di estimasi secara simultan dalam sebuah analisis tunggal. Hasil analisis SEM estimasi model awal menunjukkan bahwa terjadi *offending estimates* yaitu memiliki nilai-nilai estimasi yang melebihi batas yang dapat diterima. Hal ini terlihat dari *error varian* yang negatif, *standardized coefficients* melebihi atau sangat dekat dengan 1 dan memiliki *t value* lebih kecil dari 1,96, sehingga dilakukan proses respesifikasi. Respesifikasi dilakukan dengan memanfaatkan saran yang ada pada *modification indeks* yaitu menambahkan *error covariances* diantara dua buah *error variances* (Wijanto 2008). Diagram *path* estimasi pada model setelah proses respesifikasi terlihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Diagram path model estimasi hasil respesifikasi



Gambar 4.3. Diagram path t-value model

Hasil estimasi pada model setelah proses respesifikasi menunjukkan bahwa kriteria uji kecocokan model berkategori baik (*good fit*) (Tabel 4.2.) artinya model telah baik dalam menggambarkan data dan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat disesuaikan dengan teori yang melandasinya. Hasil uji reliabilitas terhadap model menyimpulkan bahwa *construct reliability* (CR) dan *variance extracted* (VE) sebagian besar adalah baik (Tabel 4.3.). Hal ini menunjukkan variabel-variabel indikator mempunyai konsistensi

yang tinggi dalam mengukur konstruk latennya.

Validitas model setelah dilakukan respesifikasi juga baik. Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap variabel latennya jika nilai *t-value* ≥ 1.96 pada taraf nyata $\alpha = 0.05$ dan nilai *standardized loading* faktor ≥ 0.3 (Igbaria *et al.* 1997 dalam Wijanto 2008). Validitas nilai *t-value* pada Gambar 4.3. juga menunjukkan bahwa variabel pada model mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau model mampu menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel.

Tabel 4.2. Hasil uji kecocokan model

Goodness-of-Fit	Cutt-off-Value	Hasil	Keterangan
Significance Probability(P-value)	≥ 0.05	0.17	Memenuhi (Good Fit)
RMR(Root Mean Square Residual)	≤ 0.05 atau ≤ 0.1	0.08	Memenuhi (Good Fit)
RMSEA(Root Mean square Error of Approximation)	≤ 0.08	0.04	Memenuhi (Good Fit)
GFI(Goodness of Fit)	≥ 0.90	0.98	Memenuhi (Good Fit)
AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index)	≥ 0.90	0.97	Memenuhi (Good Fit)
CFI (Comparative Fit Index)	≥ 0.90	1.00	Memenuhi (Good Fit)
NFI (Normed Fit Index)	≥ 0.90	0.98	Memenuhi (Good Fit)

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Tabel 4.3. Hasil uji reliabilitas model pengukuran

	$(\sum \text{std Load})^2$	$\sum e_j$	CR	$\sum (\text{std Load})^2$	VE	Kesimpulan
Karakteristik kewirausahaan	3.13	1.71	$0.65 < 0.70$	1.29	$0.43 < 0.05$	Cukup Baik
Karakteristik personal	19.62	1.42	$0.93 \geq 0.70$	4.02	$0.74 \geq 0.05$	Baik
Aktivitas wirausaha	2.34	0.53	$0.82 \geq 0.70$	1.18	$0.69 \geq 0.05$	Baik
Pertumbuhan usaha	3.92	0.49	$0.89 \geq 0.70$	1.96	$0.80 \geq 0.05$	Baik

4.3. Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan dan Karakteristik Personal terhadap Aktivitas Wirausaha Pengolahan Kentang

Berdasarkan model Gambar 4.3. diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang adalah karakteristik kewirausahaan ($\gamma = 0,81$) dan karakteristik personal ($\gamma = 0,80$). Karakteristik kewirausahaan lebih kuat mempengaruhi aktivitas pertumbuhan usaha dari pada karakteristik personal. Hal ini menunjukkan untuk meningkatkan aktivitas wirausaha maka karakteristik kewirausahaan harus terus dibina, disalurkan dan dikembangkan. Analisis secara lebih detail terhadap masing-masing faktor ini adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Kewirausahaan

Aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang signifikan dipengaruhi oleh karakteristik kewirausahaan ($t\text{-value} = 12,70$). Semakin tinggi karakteristik kewirausahaan yang dimiliki wirausaha, cenderung aktivitas wirausahanya semakin meningkat. Karakteristik kewirausahaan yang mempengaruhi aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang dibentuk oleh motivasi (faktor *loading* = 0,46), risiko (faktor *loading* = 0,32) dan inovasi (faktor *loading* = 0,99).

Karakteristik kewirausahaan yang mempengaruhi aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang relatif lebih kuat dibentuk oleh kontribusi inovasi. Hal ini didukung oleh Drucker

(1985), yang mengatakan wirausahawan sangat berkaitan dengan inovasi. Semakin tinggi tingkat inovasi atau semakin banyak inovasi yang diterapkan oleh wirausaha cenderung aktivitas kewirausahaannya semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin inovatif pelaku usaha UMKM, semakin kuat pembentukan karakter wirausaha dalam dirinya, dan semakin tinggi aktivitas wirausahanya.

b. Karakteristik Personal

Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang adalah karakteristik personal ($t\text{-value} = 19,33$). Semakin tinggi karakteristik personal yang dimiliki wirausaha cenderung aktivitas wirausahanya semakin meningkat. Karakteristik personal yang mempengaruhi aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang dibentuk dan dijelaskan paling besar oleh pendidikan formal (faktor *loading* = 0,99), pelatihan (faktor *loading* = 0,99) dan peran keluarga (faktor *loading* = 0,99).

Pendidikan formal penting dalam menunjang pengetahuan berwirausaha, mengakses informasi dan modal usaha untuk keberhasilan usahanya. Hasil penelitian Puspitasari (2013) juga menemukan pentingnya pendidikan dalam aktivitas wirausaha.

Pelatihan juga menjadi variabel terbesar yang merefleksikan karakteristik personal. Hasil penelitian Sumantri (2013) juga menemukan pelatihan sebagai faktor yang dominan dalam

menentukan karakteristik personal. Penelitian Noersasongko (2005) juga menemukan pengusaha yang mengikuti banyak pelatihan lebih berhasil daripada pengusaha yang kurang atau tidak mendapat pelatihan. Ini menandakan bahwa pelatihan akan memberi dampak bagi karakter individu masing-masing orang untuk lebih maju. Peran atau dukungan keluarga juga menjadi variabel indikator yang terbesar merefleksikan karakteristik personal. Brush *et al.* (2010) juga menekankan elemen individu sebagai pengusaha bersumber dari keluarga. Aktivitas wirausaha dipengaruhi oleh dorongan keluarga seperti suami/ istri, anak dan orangtua. Oleh karena itu peningkatan peran anggota keluarga merupakan syarat penting untuk peningkatan aktivitas wirausaha.

4.4. Pengaruh Aktivitas Wirausaha Pengolahan Kentang terhadap Pertumbuhan Usaha Olahan Kentang

Hasil analisis SEM terhadap model menunjukkan bahwa variabel laten aktivitas kewirausahaan mempengaruhi variabel laten pertumbuhan bisnis (Gambar 4.3.). Koefisien korelasi antara aktivitas kewirausahaan dan pertumbuhan bisnis (β) adalah 0,96 (*t-value* = 11,40). Hal ini berarti bahwa aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang kuat mempengaruhi pertumbuhan usaha olahan kentang. Dengan demikian, jika semakin tinggi aktivitas kewirausahaan mengindikasikan pertumbuhan usaha semakin tinggi dan secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga cenderung semakin baik. Ringkasan keseluruhan hasil analisis SEM dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. menunjukkan aktivitas usaha pada wirausaha pengolahan kentang signifikan dipengaruhi oleh faktor karakteristik kewirausahaan dan personal. Aktivitas usaha paling tinggi dipengaruhi oleh faktor karakteristik kewirausahaan. Dengan kata lain, wirausaha pengolahan kentang di Kabupaten Kerinci memiliki jiwa wirausaha atau berkarakter wirausaha dan aktivitas usahanya telah dikelola dengan prinsip-prinsip kewirausahaan.

Tabel 4.4. Ringkasan keseluruhan hasil estimasi model

Path	Estimasi	t-value	Kesimpulan
Karakteristik Kewirausahaan → Aktivitas wirausaha	0.81	12.70	<i>significant</i>
Karakteristik personal → Aktivitas wirausaha	0.80	19.33	<i>significant</i>
Aktivitas wirausaha → Pertumbuhan Usaha	0.96	11.40	<i>significant</i>

Wirausaha pengolahan kentang secara signifikan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha olahan kentang yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, asumsi *ceteris paribus*. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan positif antara aktivitas wirausaha dan pertumbuhan usaha, artinya aktivitas wirausaha pengolahan kentang memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan usaha.

Sebagai seorang wirausaha (*entrepreneur*) yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengelola usahanya, wirausaha di Kabupaten Kerinci berpotensi mampu berperan dalam penciptaan UMKM yang berkarakter wirausaha guna menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa aktivitas wirausaha dipengaruhi paling besar oleh karakteristik kewirausahaan ($\gamma = 0,81$). Karakteristik kewirausahaan wirausaha secara baik dibentuk oleh motivasi ($\lambda = 0,46$), risiko ($\lambda = 0,32$), dan inovasi ($\lambda = 0,99$). Dengan demikian wanita yang mengolah kentang di Kabupaten Kerinci berkarakter wirausaha. Aktivitas usaha UMKM ini terbukti menumbuhkan usaha pengolahan kentang ($\beta=0,96$) yang berkelanjutan dari skala usaha dan tingkat pendapatan.

5.2. Saran

Implikasinya program fasilitas penciptaan usaha-usaha baru, program penguatan modal dan pelatihan usaha kepada wirausaha adalah program prioritas pemerintah dan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah UMKM yang berkarakter wirausaha yang mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alma B. 2010. *Kewirausahaan*. Bandung (ID): Alfabeta.

Amine L, Staub K. 2009. *Women Entrepreneurs in Sub-Saharan Africa: An Institutional*. Vol. 21, No. 2, March 2009, 183–211. Routledge Taylor and Francis Group.

Bosma N, Wennekers S, Amorós JE. 2011. *Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees Across the Globe*. London (GB): Global Entrepreneurship Research Association.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 2013. *Kabupaten Kerinci Dalam Angka*. Kerinci (ID): Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Brush CG, de Bruin A, Gatewood EJ, Henry C. 2010. *Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth*. Northampton (US): Edward Elgar Publishing Inc.

Bygrave WD, Zacharakis A. 2010. *The Portable MBA in Entrepreneurship: Fourth Edition*. New Jersey (US): John Willey & Sons Inc.

Carrington C. 2006. Sustaining the Momentum: Gender, Entrepreneurship and Public Policy. Volume 19, Issue 2, 2006. Routledge Taylor and Francis Group.

Casson M, Yeung B, Basu A, Wadeson N. 2006. *The Oxford Handbook of Entrepreneurship*. New York (US): Oxford University Press Inc.

Daryanto A. 2010. *Peran Kewirausahaan dan Modal Sosial dalam peningkatan Daya Saing Agro-Food Complex*. Di dalam: Baga L M, Fariyanti A, Jahroh S, editor. *Kewirausahaan dan Daya Saing Agribisnis*. Bogor (ID): IPB Press.

Drucker PF. 1985. *Inovasi dan Kewiraswataan Praktek dan Dasar-Dasar*. Rusjdi Naib, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *Innovation and Entrepreneurship*.

Fielden SL, Davidson MJ. 2005. *International Handbook of Women and Small Business*

- Entrepreneurship*. USA: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Gries T, Naude W. (2008). *Entrepreneurship and Structural Economic Transformation*. Research Paper No. 2008/62. Finland: World Institute for Development Economics Reserch (UNUWIDER).
- Hubeis M. 2005. *Manajemen Kreativitas dan Inovasi Dalam Bisnis*. Jakarta (ID): Hecca Publising.
- Kementrian Koperasi dan UKM .2012. Jumlah Unit Usaha UMKM. www.depkop.go.id [diunduh: 8 Agustus 2016]
- [Kemenkop dan UKM RI 2015] Kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia. 2015. Wirausaha Maju Negara Sejahtera [internet]. [diunduh 2015 Apr 21]. Tersedia pada: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1521:wirausaha-maju-negara-sejahtera&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=9
- Kementrian Luar Negri Republik Indonesia. 2010. Pengembangan Kewirausahaan Perempuan Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 [internet]. [diunduh 2015 Apr 21]. Tersedia pada: <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1054&l=id>
- Koran Sindo. 2013. 60% Pelaku UKM di Indonesia Wanita. [diunduh 2015 Mar 22]. Tersedia pada: <http://www.koperasiwanita/60%25PelakuUKMdiIndonesiaWanitaKoranSindo.htm>.
- Kuratko DF, Hodgetts RM. 2007. *Entrepreneurship: Theory, Proses, Practice*. Canada (US): Thomson South-Western.
- [LPPI] Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta (ID): Kerjasama LPPI dan BI
- Li X. 2009. Entrepreneurial Competencies as An Entrepreneurial Distinctive: An Examination of The Competency Approach in Defining Entrepreneurs. [Thesis]. Institutional Knowledge at Singapore Management University.
- Mahbub UH. 2000. *Human Development Centre, Human Development in South Asia: The Gender Question* (Oxford University Press).
- Naude W. 2008. Entrepreneurship in Economic Development. Research Paper 2008. UNU-WIDER. United Nation University.
- Noersasongko E. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Kewirausahaan, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Usaha serta Keberhasilan Usaha pada Usaha Kecil Batik di Jawa Tengah [disertasi]. Malang : Universitas Merdeka Malang.
- Pambudy R. 2010. *Membangun Entrepreneur Agribisnis yang Berdayasaing*. Di dalam: Baga L M, Fariyanti A, Jahroh S, editor. *Kewirausahaan dan Dayasaing Agribisnis*. Bogor (ID): IPB Press.
- [Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2014. *Buletin*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Konsumsi*. Volume ke-4. Jakarta (ID): Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Puspitasari. 2013. Pengaruh Perilaku Kewirausahaan Petani Anggrek terhadap Kinerja Usaha: Kasus di Kecamatan Gunung Sindur dan Parung, Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Saptana. 2013. Mikro Makro Daya Saing dan Strategi Kemitraan Usaha. Di dalam: Saptana, Daryanto A Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan Berkelanjutan.
- Saragih B. 2010. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad 21. Di dalam: Pambudy R, Dabukke F, editor. *Agribisnis Paradigma Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Bogor (ID): IPB Press.
- Saragih. 2015. *Suara Agribisnis 2*. Bogor (ID): Gaung Persada Press.
- Sasongko A. 2015. Jumlah pengusaha Indonesia hanya 1.65 persen. *Republika Online* [internet]. [diunduh 2015 Apr 13]. Tersedia pada: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/12/nl3i58-jumlah-pengusaha-indonesia-hanya-165-persen>
- Sumantri B. 2013. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Wanita Wirausaha Pada Industri Pangan Perumahan di Bogor [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Timmons JA, Spinelli S. 2007. *New Venture Creation: Entrepreneurship for The 21st Century*. Singapore (SG): McGraw Hill Companies Inc.
- Wijanto SH. 2008. *Structural Equation Modelling dengan LISREL 8.8*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.
- Yaghoubi NM, Ahmadi F. (2010). Factors Affecting the Women Entrepreneurship in Industrial Section. *European Journal of Social Sciences*. 17(1).

**ANALISIS EXPERIMENTAL MARKETING
TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
MELALUI KEPUASAN PELANGGAN DENGAN HARGA
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI KASUS PADA TEMPAT PIJAT BERSIH SEHAT
DI MENTENG, JAKARTA PUSAT)**

Teddy Mustaqim*), Tantri Yanuar Rahmat Syah

Universitas Esa Unggul, Jakarta

*Email: teddy.mustaqim@yahoo.com

ABSTRACT

The occurrence of value economy to experience economic makes traditional marketing concepts are not sufficiently able to meet the challenge, experience marketing at that point became a key concept in experience economic. Previous research has been proving effect experimental marketing to customer loyalty. There is an improvement from previous research, this study analyzes experimental marketing with fifth sub variables, they are: sense, feel, think, act and relate as the dependent variable that can affect toward customer loyalty mediating by customer satisfaction and moderating by price. Result in this study states experimental marketing can affect customer satisfaction on services industry. From the results obtained, this study expected will further enrich the study of experimental marketing, exclusively in services industry.

Key Words: Experimental marketing, Customer Satisfaction, Price, Customer Loyalty

ABSTRAK

Perkembangan nilai ekonomi menjadi experience economic membuat konsep pemasaran tradisional tidak cukup mampu memenuhi tantangan pada industry saat ini, experimental marketing menjadi strategi kunci dalam experience economic. Penelitian sebelumnya telah membuktikan efek experimental marketing terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengembangan dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menganalisis experimental marketing dengan kelima sub variabel: panca indera, perasaan, berpikir, bertindak dan pertalian, serta sebagai variabel dependen yang dapat mempengaruhi terhadap loyalitas pelanggan dimediasi oleh kepuasan pelanggan dan dimoderasi dengan harga. Hasil dalam penelitian ini menyatakan experimental marketing dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan pada industri jasa. Dari hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan akan lebih memperkaya studi pemasaran pengalaman, dan secara eksklusif khususnya pada strategi pemasaran di industri jasa.

Kata Kunci: Experimental marketing, Kepuasan Pelanggan, Harga, Loyalitas Pelanggan

1. PENDAHULUAN

Experimental marketing, sebagai bagian dari strategi pemasaran yang terintegrasi, dapat menjadi cara yang nyata untuk membangun dan

memperdalam hubungan dengan pelanggan. Sebagai pemasar, pertama kita perlu memahami perilaku manusia dan motivasinya, serta apa yang membentuk emosi dan perasaan

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

pelanggan. Merupakan bagian penting dari strategi *experimental marketing* adalah: (1) perasaan, apa yang akan mereka rasakan ketika menggunakan barang atau jasa; (2) penginderaan, bagaimana pelanggan secara fisik merasa produk dengan indera; (3) berpikir, bagaimana jelas kita dapat menunjukkan manfaat dari barang dan jasa melalui berbagai program pemasaran. Faktor berikutnya; (4) akting, perubahan perilaku pelanggan akan menentukan produk yang mereka akan membeli (5) pertalian, bagaimana barang dan jasa yang menghubungkan dengan pelanggan, atau dapat menjadi proyeksi kebutuhan masa depan mereka. (Griffin, 2005).

Setelah pelanggan merasakan dan terlibat dalam *experimental marketing*, maka pelanggan dapat menentukan tingkat kepuasan, di mana tingkat perasaan seseorang diperoleh setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan ekspektasi (Kotler dan Keller, 2006). Menurut Schmitt (1999), *experimental marketing* dapat digunakan dan memberikan keuntungan dalam berbagai situasi dan yang paling penting, membuat konsumen menjadi pelanggan setia.

Diharapkan marketer memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana *experimental marketing* dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, oleh karena itu diperlukan dengan adanya riset. Sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat, yaitu mencapai loyalitas dari pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan mengadopsi pada penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Rotti (2012). Dengan demikian, peneliti juga ingin memberikan kelebihan untuk penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan menjadikan faktor harga sebagai variabel moderator.

2. KERANGKA TEORI

2.1. *Experimental marketing*

Experimental marketing adalah strategi pemasaran yang berorientasi pada pengalaman pelanggan dalam upaya untuk menarik pelanggan untuk menggunakan produk dan layanan kami, dan bahkan pelanggan memotivasi untuk melakukan pembelian berulang (Schmitt, 1999). Memuaskan pengalaman pembelian adalah salah satu alasan untuk tetap tertarik pada produk, yang pada gilirannya menyebabkan untuk mengulang pembelian (Oliver, 1997).

Terdapat lima pendekatan (Schmitt, 1999) *experimental marketing* bertujuan untuk merasakan pengalaman sensor sentuh melalui panca indera, yaitu penglihatan, suara, sentuhan, rasa dan bau. Merasa *experimental marketing* adalah strategi untuk mempengaruhi pelanggan untuk merek melalui komunikasi (iklan), Termasuk kemasan produk dan isinya, co-branding, lingkungan, website, orang yang menawarkan produk. Mengalami pikiran (berpikir) yang bertujuan untuk mendorong pelanggan yang berpikir tertarik dan kreatif yang dapat menyebabkan evaluasi ulang dari perusahaan dan merek.

Pendekatan keempat adalah pengalaman tindakan pemasaran dalam pembentukan pengalaman gaya hidup yang dapat diterapkan dengan menggunakan tren yang sedang berlangsung mendorong terciptanya budaya baru. Setelah itu hubungan *experimental marketing* adalah kombinasi dari empat aspek dari *experimental marketing* yang terdiri dari panca indera, perasaan, berpikir, dan bertindak.

2.2. Kepuasan pelanggan

Kepuasan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan ekspektasi (Kotler dan Keller, 2006). Lovelock dan Wirtz

(2007) menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi disconfirmation dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual merasa setelah digunakan. Menurut Irawan (2009) kepuasan pelanggan merupakan hasil dari akumulasi pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan.

Menurut Kotler dan Keller (2006) ada empat metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu Feedback, Survei, Ghost Shopping, dan menggunakan lembaga eksternal. Menurut Anderson (2003), kepuasan pelanggan adalah membangun kumulatif dan ekspektasi pasar dipengaruhi oleh persepsi kinerja selama periode tersebut, dan juga dipengaruhi oleh kepuasan sebelumnya dari waktu ke waktu.

Fornell (1992) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai fungsi dari harapan pelanggan dan kinerja yang dirasakan. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap evaluasi atau diskonfirmasi dari ketidakcocokan yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah digunakan (Nasution, 2004).

Sementara Kotler & Armstrong (2013) menyatakan bahwa definisi negara-tingkat kepuasan pelanggan dirasakan oleh seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau hasil dari produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja dan harapan yang dirasakan. Ada tiga tingkat kepuasan yaitu: jika penampilan kurang dari harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja yang sebanding dengan harapan, maka pelanggan puas dan jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan sangat puas atau senang.

2.3. Harga

Menurut Tjiptono (2008) dalam harga jangka sederhana dapat didefinisikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan / atau aspek lain (non-moneter) yang mengandung utilitas / kegunaan yang diperlukan untuk mendapatkan layanan. Keputusan harga (Tjiptono, 2008) adalah pemilihan perusahaan untuk tingkat umum harga untuk layanan tertentu yang relatif terhadap tingkat harga pesaing, serta memiliki peran strategis penting dalam mendukung pelaksanaan strategi pemasaran.

Pelanggan selalu memeriksa harga dan merek informasi nama ketika mereka membuat penilaian tentang langkah-langkah kualitas: kemudahan penggunaan, kegunaan, kinerja, ketahanan, dan status (Zeithalm, Bitner, dan Gremler, 2013). Menurut Cheng, Chiu, Hu dan Chang (2010) harga memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas yang dirasakan oleh pelanggan.

2.4. Loyalitas Pelanggan

Menurut Oliver (1994), loyalitas pelanggan adalah yang terakhir komitmen pelanggan mendalam untuk berlangganan kembali atau re-pembelian produk atau layanan yang telah secara konsisten di masa depan, meskipun upaya situasi dan pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan mengubah perilaku. loyalitas pelanggan menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan merek tertentu dengan tingkat tinggi konsistensi (Kotler & Keller, 2006).

Pelanggan setia merupakan aset penting bagi perusahaan, hal itu dapat dilihat dari karakteristik pelanggan setia, seperti yang diungkapkan oleh Griffin (2003), pelanggan setia memiliki karakteristik sebagai berikut: re-pembelian secara teratur, membeli keluar garis atau layanan produk, merekomendasikan produk lainnya, menunjukkan daya tarik kekebalan dari

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

produk sejenis dari pesaing. Menurut Griffin (2003), ada empat loyalitas pelanggan: tidak ada loyalitas, loyalitas lemah, loyalitas tersembunyi, dan premium loyalitas.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

Lullulangi (2014) menyatakan bahwa *experimental marketing* mempengaruhi kepuasan pelanggan, dalam penelitian ini menyatakan bahwa produk yang lebih sering dibeli dan rasakan manfaatnya, pelanggan akan lebih puas. Pernyataan itu juga sejalan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya oleh Lee dan Hsiao (2012) yang terdiri dari pengertian pemasaran pengalaman, merasa, berpikir, bertindak dan berhubungan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:
H 1a = Rasa mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Menurut Schmitt (1999) *experimental marketing* merasakan kasih sayang dan pengalaman dari pelaksanaan penyedia, dengan tujuan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 1b = merasa mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Menurut Rotti (2012) *experimental marketing* berpikir berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 1c = berpikir mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Menurut Schmitt (1999) fungsi strategi pemasaran tindakan menciptakan pengalaman yang sangat berharga bagi pelanggannya, berkaitan dengan fisik, pola perilaku dan gaya hidup serta kepuasan jangka panjang dari pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 1d = bertindak mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Menurut Rotti (2012) *experiential* tindakan pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 1e = berhubungan mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dharmawangsyah (2013) menyatakan bahwa *experimental marketing* dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 2 = *Experimental marketing* mempengaruhi loyalitas pelanggan.

Dharmawangsyah (2013) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. HOQ dan Amin (2009) juga menyatakan bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 3 = kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan.

Nurhayati (2011) menyatakan bahwa harga mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jika harga suatu produk dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang diperoleh oleh pelanggan dari produk dan produk tersebut dianggap sebagai harga yang wajar, dalam banyak kasus, pelanggan akan tetap setia untuk kembali menggunakan produk atau jasa. Dari tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis:

H 4 = Harga yang mempengaruhi loyalitas pelanggan.

3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tinjauan literatur, itu akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *experimental marketing* terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dan harga sebagai variabel moderasi. Sebagai gambaran umum dari penelitian ini dibagi menjadi studi

pertama yang menganalisis hubungan antara pemasaran pengalaman parsial dan kepuasan pelanggan, dan mempelajari tujuan II adalah menganalisis hubungan antara pemasaran pengalaman secara bersamaan untuk loyalitas pelanggan dimediasi oleh kepuasan pelanggan dan dimoderatori oleh harga.

Metode ini menerapkan analisis regresi untuk stadium I dan metode SEM untuk tahap II. Sebagai pre-test, peneliti melakukan uji reliabilitas untuk melakukan penelitian pendahuluan dan menggunakan analisis kualitas data.menerapkan analisis faktor KMO untuk menguji validitas. Selanjutnya, penelitian ini melihat apakah ada

pengaruh antara kelompok demografis responden untuk menjawab untuk setiap variabel.Hal ini dilakukan dengan menguji analisis deskriptif homogenitas responden dengan One Way ANOVA.

3.1. Pengukuran

Penelitian ini merupakan kuantitatif dan data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner (Adler dan Clark, 2008).Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel X, Y, mediasi dan moderasi. Berikut adalah daftar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan setiap definisi menurut (Dharmawangsyah, 2013), yaitu:

Tabel 3.9. Operasional Variabel

Variable	Indicator	Operationalization
Sense	○ Interest building design	● physical sighting interesting in Bersih Sehat massage associated with interior design.
	○ Convenient room	● Coolness in massage room make me comfortable.
	○ Good aromatherapy	● The massage at Bersih Sehat quiet so as to provide comfort for me when using services
	○ Clean facilities	● Cleanliness in all amenities in Bersih Sehat properly maintained
	○ Strong aromatherapy	● The massage has a fragrant aroma so it make me comfort
Feel	○ hospitality of employees	● I feel comfortable in Bersih Sehat outlet.
	○ Good layout of goods.	● I feel the layout make me easier to find the products
	○ Fast responses	● I feel easy to get explanation of products
	○ Good service	● I feel satisfaction during services
	○ Good Entertainment	● I feel enjoyed in Bersih Sehat outlet
Think	○ Service guarantee	● Bersih Sehat have service guarantee
	○ Competitive price	● Bersih Sehat have Competitive price
	○ Have a standard quality	● Bersih Sehat give a good standard quality

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Variable	Indicator	Operationalization
	○ Promotion program	● Bersih Sehat give a best promotion
	○ Innovation of product	● Bersih Sehat is the leader of the massage services
Act	○ Customer want to try another services	● I want to try a various services offered in outlet Bersih Sehat
	○ Place to spend the time with partner	● Bersih Sehat represent my image of excellent services
	○ Place for gathering	● I usually came with my family
	○ Place for looking entertainment	● I want to try a various services offered in outlet Bersih Sehat
	○ Place for try a new <i>experience</i>	● Using Bersih Sehat’s services is a new lifestyle
Relate	○ Customer have enough instruction for solution	● Employee give solution for customer complaint
	○ Customer feel sophisticated	● Bersih Sehat have environment that make me sophisticated.
	○ Customer have relation with employee	● I feel comfortable communication with employee
	○ Have relation with customer	● Bersih Sehat have a friendly management
	Employee be a good customer service	● Bersih Sehat accept all complaint and suggestion
Customer Satisfaction	○ Satisfaction	● I feel satisfied using services of Bersih Sehat outlet.
	○ Re-purchase	● I always use Bersih Sehat for massage services
	○ Recommend to friend	● I feel satisfied using services of Bersih Sehat outlet.
	○ Expect the objective of product	● I always use Bersih Sehat for massage services
	○ Satisfaction	● Bersih Sehat offer a new services
Price	○ Affordable price	● Bersih Sehat outlet give affordable price
	○ Discount	● Bersih Sehat outlet give interesting discount
	○ Payment method	● Bersih Sehat outlet give simple and easy payment method
Customer Loyalty	○ Customer will come to outlet	● I intend to visit Bersih Sehat if need massage services.
	○ Customer make outlet as a first choice	● I always make Bersih Sehat as a top option when choosing massage services
	○ Customer doesn’t care about promotion from competitor	● I never accept promotion from other massage outlet
	○ Customer give recommendation to others	● I have given recommendations to my relations
	○ Customer give suggestion to management	I always give suggestion to Bersih Sehat management

Sumber: Dharmawangsyah (2013)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, tes pertama adalah analisis faktor dan uji reliabilitas serta untuk menguji validitas indikator penelitian kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kuesioner yang digunakan dapat diterima dan dapat diandalkan. Selanjutnya, penelitian ini melihat apakah ada pengaruh antara kelompok demografis responden untuk menjawab untuk setiap variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok responden perempuan cenderung lebih sensitif untuk pemasaran pengalaman menghubungkan hal dibandingkan dengan kelompok responden laki-laki.

Tahap I, niat melakukan tahap I adalah untuk menganalisis hubungan

antara *experimental marketing* sebagian dan kepuasan pelanggan. Pada tahap I, metode analisis menggunakan Regresi. Hasil Menunjukkan bahwa *experimental marketing* dengan variabel sub-nya; akal, berpikir, bertindak, dan berhubungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan nilai tertinggi dari *experimental marketing* adalah sub variabel pengertian terhadap kepuasan pelanggan (t 34.782;.. Sig 0,00). Artinya semakin tinggi *experimental marketing* panca indera, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah variabel perasaan *experimental marketing*.

Tabel 4.1 T Value

Model	t	Sig.
ExperientialMarketing_Sense	34,782	0,000
ExperientialMarketing_Feel	1,195	0,233
ExperientialMarketing_Think	4,297	0,000
ExperientialMarketing_Act	3,546	0,000
ExperientialMarketing_Relate	2,040	0,043

Sumber: hasil olah data

Tahap II, tujuan tahap II adalah untuk menganalisis hubungan *experimental marketing* secara bersamaan terhadap loyalitas pelanggan dan dimediasi oleh kepuasan pelanggan dan moderasi oleh harga. Pada tahap II

menggunakan metode SEM dimana data responden diolah dengan perangkat lunak analisis, Hasil analisis goodness of fit pada model penelitian ini menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Goodness of Fit

Group	Indicators	Value	Description
1	Degree of Freedom	280	Poor Fit
	Chi Square	2934.83	
	NCP	1621.66	
	Confidence Interval	1487.26; 763.50	
2	RMSEA	0.17	Poor Fit
	Confidence Interval	7.51 ; 8.91	
	P Value	0.00	
3	ECVI Model	10.32	Good Fit
	ECVI Saturated	9.64	

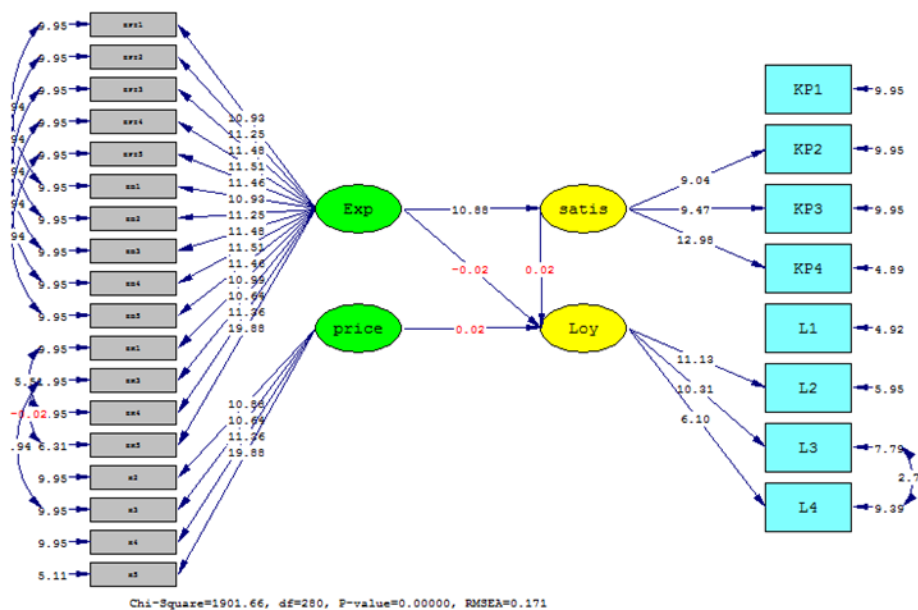
PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Group	Indicators	Value	Description
	ECVI Independence	123.66	
	Confidence Interval	9.64; 11.04	
4	AIC Model	2043.66	Good Fit
	AIC Saturated	702	
	AIC Independence	24596.35	
	CAIC Model	2348.49	
	CAIC Saturated	2208.95	
5	NFI	0.88	Marginal Fit
	CFI	0.89	
	NNFI	0.87	
	IFI	0.89	
	RFI	0.86	
	PNFI	0.76	
6	Critical N	23.80	Poor Fit
7	Standardized RMR	0.16	Poor Fit
	GFI	0.58	
	AGFI	0.47	
	PGFI	0.46	

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan dari model fit cocok memenuhi semua standar. Selanjutnya penelitian ini

menghasilkan diagram jalur seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. T Value

MANAGERIAL IMPLICATION

Dari penelitian ini didapat bahwa *experimental marketing* adalah faktor tertinggi dalam meningkatkan kepuasan

pelanggan di outlet Besih Sehat. Temuan kedua yang sangat penting adalah faktor pancaindra dalam *experimental marketing* adalah indikator utama yang

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya di outlet pijat Bersih Sehat. Berdasarkan beberapa point yang telah disebutkan diatas akan dijabarkan pula beberapa implikasi penting bagi manajemen yang bersifat manajerial dan sangat krusial untuk dibahas apa dan bagaimana bentuk strategi yang harus diterapkan.

Berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan dapat dibuat garis besar untuk beberapa implikasi manajerial, antara lain sebagaimana telah dibuktikan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh *experimental marketing* dan kepuasan pelanggan baik secara parsial maupun simultan. Implikasi pertama yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah tipe *experience* yang muncul untuk menciptakan pengalaman pancaindra melalui mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung.

Pada saat konsumen datang ke outlet Bersih Sehat, mata melihat desain layout yang menarik, hidung mencium aroma terapi, telinga mendengar alunan musik, dan kulit merasakan kesejukan AC. Pada dasarnya sense marketing yang diciptakan oleh pelaku usaha dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap loyalitas. Mungkin saja suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen tidak sesuai dengan selera konsumen atau mungkin juga konsumen menjadi sangat puas, dan akhirnya harga yang ditawarkan oleh produsen tidak menjadi masalah bagi konsumen.

Sense marketing merupakan salah satu cara untuk menyentuh emosi konsumen melalui pengalaman yang dapat diperoleh konsumen lewat pancaindra (mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung). Oleh karena itu pihak manajemen pijat Bersih Sehat hendaknya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sehingga dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan yaitu dalam keramahan dan kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu hendaknya berkomunikasi lebih sering kepada

pelanggan melalui obrolan ringan, cara ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh pelanggan dan begitupun sebaliknya, saling mengenal lebih jauh akan memupuk kepercayaan (trust) yang lebih tinggi dan membentuk emosi (feel) yang lebih terjalin kuat.

Implikasi manajerial kedua adalah fokus pada bagaimana mempengaruhi *experimental marketing* feel yang ditujukan terhadap perasaan dan emosi dengan tujuan mempengaruhi pengalaman yang dimulai dari suasana hati yang lembut sampai dengan emosi yang kuat terhadap kesenangan yang dirasakan oleh pelanggan Bersih Sehat. Fokus implikasi *experimental marketing* feel adalah suatu perhatian-perhatian kecil yang ditunjukkan kepada konsumen dengan tujuan untuk menyentuh emosi konsumen secara luar biasa.

Feel marketing merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi *experimental marketing*. Feel dapat dilakukan dengan pelayanan yang bagus, serta keramahan pelayan. Agar konsumen mendapat feel yang kuat dari suatu produk atau jasa, maka management Bersih Sehat harus mampu memperhitungkan kondisi konsumen dalam arti memperhitungkan mood yang dirasakan konsumen. Kebanyakan konsumen menjadi pelanggan apabila mereka merasa cocok terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, untuk itu diperlukan waktu yang tepat yaitu pada waktu konsumen dalam keadaan good mood sehingga produk dan jasa tersebut benar-benar mampu memberikan memorable *experience* sehingga berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan.

Pelayanan yang memuaskan sangat diperlukan termasuk didalamnya keramahan dan sopan santun karyawan, pelayanan yang tepat waktu, dan sikap simpatik yang membuat pelanggan merasakan kepuasan dan kembali datang pada kesempatan yang lainnya.

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers “Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”

Implikasi manajerial yang ketiga adalah fokus pada tipe *experience* yang bertujuan untuk menciptakan kognitif, pemecahan masalah yang mengajak konsumen untuk berfikir kreatif. Dimana tujuan dari implikasi think marketing adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa komoditi menjadi pengalaman (*experience*) dengan melakukan customization secara terus menerus.

Tujuan dari implikasi think marketing adalah untuk mempengaruhi pelanggan agar terlibat dalam pemikiran yang kreatif dan menciptakan kesadaran melalui proses berfikir yang berdampak pada evaluasi ulang terhadap perusahaan, produk dan jasanya. Management Bersih Sehat harus cepat tanggap terhadap kebutuhan keluhan konsumen. Perusahaan dituntut untuk dapat berfikir kreatif. Salah satunya dengan mengadakan program yang melibatkan pelanggan. Program yang melibatkan pelanggan bisa berupa mengajak pelanggan berpartisipasi memberikan testimoni halaman Facebook resmi milik Bersih Sehat. Testimoni ini nantinya akan membentuk pikiran serta persepsi konsumen terhadap Pijat Bersih Sehat.

Implikasi manajerial ketiga adalah berfokus pada tipe *experience* yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku, gaya hidup dan interaksi dengan konsumen dengan Bersih Sehat. *Act marketing* adalah suatu cara membentuk persepsi pelanggan terhadap produk dan jasa yang bersangkutan. *Act marketing* didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam hubungannya dengan physical body, lifestyle, dan interaksi dengan orang lain. *Act marketing* ini memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Ketika *act marketing* mampu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup maka akan berdampak positif terhadap loyalitas karena merasa produk atau jasa tersebut sesuai dengan gaya hidupnya. Sebaliknya ketika konsumen tidak merasa bahwa

produk atau jasa tersebut sesuai dengan gaya hidupnya maka akan berdampak negatif terhadap loyalitas pelanggan.

Implikasi manajerial ke lima adalah fokus pada tipe *experience* yang digunakan untuk mempengaruhi pelanggan dan menggabungkan seluruh aspek, *sense, feel, think*, dan *act* serta menitik beratkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan. *Relate marketing* adalah suatu cara membentuk atau menciptakan komunitas pelanggan dengan komunikasi. *Relate marketing* menggabungkan aspek *sense, feel, think*, dan *act* dengan maksud untuk mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar dirinya dan mengimplementasikan hubungan antara orang lain dan grup sosial lain sehingga mereka bisa merasa bangga dan diterima dikomunitasnya.

Relate marketing dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap loyalitas pelanggan tetapi ketika *relate marketing* tidak berhasil mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar dirinya maka konsumen tersebut tidak akan mungkin loyal dan memberikan dampak yang negatif. Salah satu cara memberikan *experimental marketing* relate adalah dengan cara membentuk komunitas di Facebook, Line group, Whatsapp group resmi dari Bersih Sehat. Dalam situs dan media jejaring sosial online inilah pihak management dapat menjalin komunikasi terintegrasi antara pihak Bersih Sehat dengan pelanggan serta calon konsumennya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *sense* (pancaindra), *feel* (perasaan), *think* (cara berpikir), *act* (kebiasaan), dan *relate* (pertalian) secara simultan terhadap kepuasan pelanggan di tempat pijat Bersih Sehat Menteng Jakarta Pusat. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis pengaruh *sense* (pancaindra), *feel* (perasaan), *think* (cara berpikir), *act*

(kebiasaan), dan *relate* (pertalian) secara parsial terhadap kepuasan pelanggan di tempat pijat Bersih Sehat Menteng Jakarta Pusat. Tujuan ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di tempat pijat Bersih Sehat Menteng Jakarta Pusat, dan tujuan penelitian yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh harga menjadi moderator hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan di tempat pijat Bersih Sehat Menteng Jakarta Pusat.

Mengadopsi penelitian terdahulu dan dari penelitian ini yang dipakai sebagai dasar penentuan hipotesis, dimana yang pertama adalah penelitian yang dibuat sebagai rujukan untuk membuat penelitian replikasi ini, yaitu penelitian milik Rotti (2012) yang berjudul Analisa Pengaruh *Experimental marketing* Terhadap *Customer Satisfaction* dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan. Studi Kasus: Blitz Megaplex Grand Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dampak *experimental marketing* terhadap kepuasan pelanggan dan juga dampaknya terhadap loyalitas pelanggan di Blitz Megaplex Grand Indonesia.

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa hipotesis diantaranya adalah: *sense* yang kuat akan meningkatkan kepuasan pelanggan, *feel* yang kuat akan meningkatkan kepuasan pelanggan, *think* yang kuat akan meningkatkan kepuasan pelanggan, *act* yang kuat akan meningkatkan kepuasan pelanggan, *relate* yang kuat akan meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian hipotesis selanjutnya adalah *experimental marketing* yang di uji secara serempak atau simultan terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis selanjutnya adalah kepuasan pelanggan mempengaruhi hubungan *experimental marketing* dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan sebagai moderasi, diajukan hipotesis harga menguatkan hubungan antara

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.

Berdasarkan evaluasi studi I ditemukan hubungan pengaruh yang positif ditunjukkan antara *experimental marketing* dan kepuasan pelanggan. Dalam temuan studi I ini, didapatkan bahwa variabel *experimental marketing sense* merupakan sub variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam studi I ini juga didapatkan temuan bahwa variabel *experimental marketing feel* tidak mendukung hipotesis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah *sense* (pancaindra), *think* (cara berpikir), *act* (kebiasaan), dan *relate* (pertalian) di tempat pijat Bersih Sehat Menteng Jakarta Pusat.

Hasil penelitian pertama ini menemukan bahwa *experimental marketing sense* merupakan faktor paling besar dalam membentuk kepuasan pelanggan, pada penelitian ini dikemukakan dalam hipotesis H1a yang menghasilkan data yang mendukung hipotesis, temuan senada juga ditemukan pada sub variabel *experimental marketing* kebiasaan, perilaku dan pertalian keseluruhan variabel. Namun dalam temuan ini juga didapatkan bahwa variabel *experimental marketing* berpikir tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Dalam studi II, dilakukan pengujian terhadap variabel *experimental marketing* secara serempak, kepuasan pelanggan sebagai mediator dan harga sebagai moderator terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa hanya terdapat hubungan pengaruh yang positif antara *experimental marketing* dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk membuat pelanggan merasakan kepuasan atas produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, pelaku usaha harus menjadikan *experimental marketing*

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

menjadi prioritas utama dalam strategi bisnisnya dan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan harus memperhatikan kelima aspek dalam strategic *experimental marketing*, diantaranya; pancaindra (*sense*), perasaan (*feel*), berfikir (*think*), kebiasaan (*act*), dan pertalian (*relate*).

Temuan studi kedua ini mendapatkan hasil bahwa kepuasan pelanggan tidak menentukan loyalitas pelanggan Bersih Sehat, berdasarkan temuan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelanggan Bersih Sehat yang masuk dalam kategori pelanggan yang puas belum tentu menjadi pelanggan loyal di outlet tersebut, ada alasan lain bahwa harga menjadi terlalu sensitif terhadap pelanggan pijat Bersih Sehat dan jika dihubungkan dengan analisis studi pertama alasan pelanggan tersebut tidak menjadi loyal adalah karena pelanggan tidak merasakan emosi yang mendukung pelanggan untuk kembali datang menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, satu diantaranya yang paling mendasar adalah pada tempat objek penelitian dimana peneliti hanya berfokus pada satu outlet sebagai satu tempat dalam pengambilan sampel dan populasi. Dimana outlet tempat pengumpulan data tidak dapat mewakili keseluruhan kinerja perusahaan baik dalam mengukur dan mengevaluasi seluruh outlet dalam kawasan regional Jakarta atau bahkan keseluruhan outlet di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aaker, D. A. (2009). 'Managing Brand Equity'. New York: John Willey & Sons, Inc.

Adler, E. S., & Clark, R. (2008). 'The Methodology of Sampling and

Purposive Sampling'. Arghya Ray.

Amin, M., & Hoq, M. Z. (2009). 'The Role of Customer Satisfaction to Enhance Customer Loyalty'. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 2(4), 112-121.

Azwar, S. (2004). 'Metodologi Penelitian'. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bougie, R. (2010). 'Research Methods for Business'. Carbondale: John Wiley and Sons, Inc.

Byrne, B. M. (2010). 'Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2nd ed.)'. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Cheng, C. C., Chiu, S. I., Hu, H. Y., & Chang, Y. Y. (2010, July 4). 'A Study on Exploring the Relationship Between Customer Satisfaction and Loyalty in The Fast Food Industry: with Relationship Inertia as a Mediator'. *African Journal of Management*, 15(13), 5118-5126. Retrieved 2011

Dharmawangsyah, I. (2013). 'Pengaruh *Experimental marketing* dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi kasus pada Rumah Makan Pring Asri Bumiayu)'. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Griffin, J. (2003). 'Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan'. Alih bahasa: Dr Dwi Kartini Yahya, Erlangga, Jakarta

- Hair, J. F., Black, W. C., & Babin, B. J. (2013). 'Multivariate Data Analysis' (7 ed.). New York: Pearson.
- Hsiu-Jung, C. (2009). 'The Effect of Experiential and Relationship Marketing on Customer Value: A Case Study of International American Casual Dining Chains in Taiwan'. *Social Behaviour and Personality*, 37(7), 993-1008.
- Irawan, H. (2009). '10 Prinsip Kepuasan Pelanggan'. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Januar, T. O., & Diah, D. (2014). 'Analisa Pengaruh *Experimental marketing* Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Sebagai Intervening Variabel di Tator Café Surabaya Town Square'. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Khaled, A., Kwek, C., Anas, Ahmad, & Abzakh. (2013). 'The Impact of *Experimental marketing* and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks'. *Asian Social Science*, 9(1).
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). 'Principles of Marketing' (13 ed.). London: Prentice Hall.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). 'Marketing Management' (12 ed.). New York: Pearson International.
- Lovelock, C. H., & Wirtz, J. (2007). 'Service Marketing' (6 ed.). New York: Prentice Hall.
- Lupiyoadi, R. (2006). 'Manajemen Pemasaran Jasa'. Jakarta: Salemba Empat.
- Malhotra, N. K., & Dash, S. (2011). 'Marketing Research An Applied Orientation' (11 ed.). England: Pearson.
- Mei, Y., & Li, T. H. (2014). 'Customer Satisfaction and Loyalty in an Online Shop : An *Experimental marketing* Perspective'. *International Journal of Business and Management*, 10(1).
- Ming, C.-Y. (2010). 'Study on the Impacts of *Experimental marketing* and Customers Satisfaction Based on Relationship Quality'. *The International Journal of Organizational Innovation*, 347-355.
- Ming-Shing, L., Huey, H., & Ming-Feng, Y. (2012). 'The Study of The Relationships Among *Experimental marketing*, Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty'. *International Journal of Organizational Innovation*, 11(4).
- Nasution, M. N. (2004). 'Manajemen Jasa Terpadu. Bogor': Ghalia Indonesia.
- Noegroho, A. S. (2013). 'Pengaruh *Experimental marketing* dan Brand Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan'. Malang: Universitas Brawijaya.
- Novy, U., & Harjanto, P. (2013). 'Pengaruh *Experimental marketing* dan Relationship

PROSIDING

Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"

- Marketing Terhadap Experiential Value dan Dampaknya Terhadap Customer Behavioral Intention (Studi Kasus: Nanny's Pavillon Terrace – Central Park Mall)'. Jakarta: Binus University.
- Oliver, R. L. (1997). 'Satisfaction: A Behavioural Persepctive on The Consumer'. New York: McGraw Hill.
- Osin, T., & Marhadi. (2012, Desember). 'Pengaruh Emotion Marketing dan *Experimental marketing* Terhadap Customer Loyalty Pondok Khas Melayu di Pekan Baru'. *Jurnal Ekonomi*, 20(4).
- Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). 'SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality'. *Journal of Marketing*, 12-40.
- Rotti, G. K. (2012). 'Analisa Pengaruh *Experimental marketing* terhadap Customer Satisfaction'. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Santoso, S. (2011). 'Statistik Non Parametrik Konsep dan Aplikasi'. Bandung: CV. Alfabeta.
- Schmitt, B. H. (1999). 'Experiential Marketing: How to get costumer to sense, feel, think, act, and relate to your company and Brand's. New York: Free Press.
- Tjiptono, F. (2008). 'Pemasaran Strategik'. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Uma, S. (2006). 'Metode Penelitian untuk Bisnis'. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, D. (2009). 'Riset Bisnis'. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto, S. H. (2008). 'Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8 Konsep dan Tutorial'. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiratmadja, R. (2011). 'Pengaruh *Experimental marketing* Terhadap Minat Beli Ulang Pelanggan Studi Kasus: Inul Vizta Ktv Pejaten Village'. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yamin, S. (2009). 'SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS'. Jakarta: Salemba Infotek.
- Yuan, Y., & Wu, C. (2008). 'Relationship Among *Experimental marketing*, Experiential Value and Customer Satisfaction'. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 32(3), 387-410.
- Zikmund, W. D. (2003). 'Exploring Marketing Research'. Ohio: South Western, A division of Thomson Learning.